Listrik untuk Membangun & Mensejahterakan

Electricity for Developing & Prospering

PT PLN (Persero)

Laporan Tahunan **2016** Annual Report

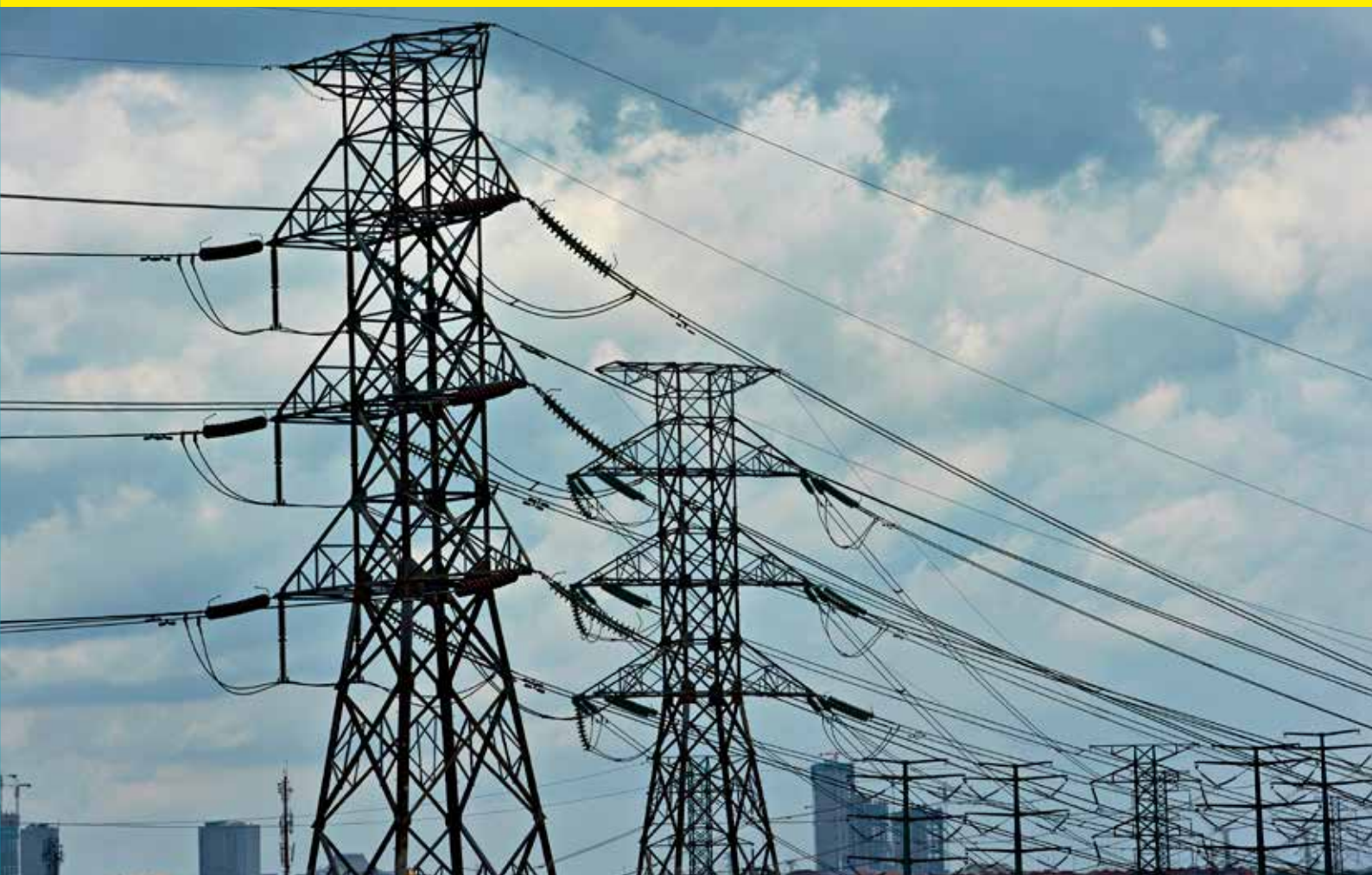

Listrik untuk Membangun & Mensejahterakan

Electricity for Developing
& Prospering

Kelistrikan merupakan infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung produktivitas, baik rumah tangga maupun industri. Karena itulah, pemerintah terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi, yang antara lain melalui Program Listrik 35.000 MW.

Bagi PT PLN (Persero), semangat mendorong ketersediaan listrik sebagai pendukung pembangunan dan sarana bagi terciptanya kesejahteraan sejalan dengan motto yang sudah ditetapkan: "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

Untuk mewujudkannya, sepanjang tahun 2016 Perseroan terus mengembangkan pembangkit dan meningkatkan layanan. Termasuk untuk daerah-daerah yang belum terjangkau kelistrikan, demi mendukung pembangunan dan ikut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Electricity infrastructure is fundamental in boosting productivity and prosperity, for industries and households respectively. Thus the government is very committed in augmenting electrification ratio, mainly through 35,000 MW Electricity Program.

PLN's motto: "Electricity For a Better Life" is a reflection of the Company's uncompromising ambition to provide electricity throughout the nation assisting government's pursue for national economic development and prosperity for all.

In order to accomplish this, throughout 2016 the Company has done its utmost to erect as many power plants as possible and improve quality of service. Foremost to provide electricity to areas that never had electricity, contributing to the betterment of prosperity for all.

Kesinambungan Tema Annual Report

Annual Report Theme of Continuity

Terang Lebih Baik
Bright is Better

2012

Dalam mewujudkan misi perusahaan tersebut, kami yakin bahwa hanya dengan menjalankan operasional perusahaan yang berdasarkan kaidah praktik terbaik tata kelola perusahaan dengan mengedepankan profesionalitas dan menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran, secara konsisten tekad kami untuk menerangi nusantara akan terwujud

In accomplishing the Company's mission, we believe that by simply running the Company's operations based good corporate governance best practice, by promoting professionalism and consistently applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, our determination to light up the archipelago will happen.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Inovasi Operasional
Improving the Quality of Governance and Operational Innovation

2013

Komitmen tinggi jajaran Manajemen untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersih, menjunjung tinggi etika bisnis, etika moral serta etika bekerja dengan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, membuahkan berbagai pengakuan dan peningkatan kepercayaan pihak eksternal serta menimbulkan keyakinan seluruh jajaran internal akan manfaat berbagai program perbaikan kualitas penerapan GCG bagi perkembangan perusahaan dalam jangka panjang.

A highly committed board of management is intent in running clean business operations and upholding business ethics, moral ethics and work ethics by implementing good corporate governance, al of this leading to a wide ranging recognition and trust building from external parties that benefit the Company into the long term.

Menuju Level Kinerja Baru
Towards a New Performance Level

2014

Dilandasi komitmen kuat dari jajaran manajemen puncak dan keyakinan akan kemampuan seluruh insan perusahaan dalam mewujudkan misi perusahaan, dalam beberapa tahun terakhir PLN berupaya memperbaiki kinerja dengan menerapkan beragam inovasi operasional di berbagai lini kegiatan.

Based on the top management's strong commitment and belief in the ability of all of its employees in pursuing the Company's mission, PLN is seeking to improve its performance by implementing operational innovations across a diverse range of activities.

35.000 MW untuk Indonesia
35,000 MW for Indonesia

2015

Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara, oleh karenanya, kini dan seterusnya PLN bertekad memastikan seluruh kawasan di tanah air mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

Adequate availability of electricity is one of the major fundamental needs with a significant role in the economic growth of a country. Hence, from now onwards, PLN is determined to supply ample electricity to every region of the country.

Listrik untuk Membangun dan Menyejahterakan
Electricity for Developing & Prospering

2016

Bagi PT PLN (Persero), semangat mendorong ketersediaan listrik sebagai pendukung pembangunan dan sarana bagi terciptanya kesejahteraan sejalan dengan motto yang sudah ditetapkan: "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

The driving spirit to strive for electricity availability, as a basic necessity for the development and prosperity creation, is in line with motto of PT PLN (Persero): "Electricity for a Better Life".

1.

Dalam mewujudkan cita-cita besar kelistrikan, PLN optimis untuk terus melangkah membangun Program 35.000 MW. Program ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari internal PLN, pihak swasta, dan pemerintah. Selain itu, Program 35.000 MW juga membutuhkan pengawalan dan pengamanan dari sisi hukum agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan lancar.

In pursuing the goal of this immense 35,000 MW project, PLN as a company exerts every possible effort in confidence. This program requires the involvement of many parties , such as internal PLN, private sector, and government. The 35,000 MW program calls for government safeguarding, guarantee and protection of law to be successfully accomplished.

Proyek Listrik 35.000 MW

Program Pembangkit 35.000 MW diyakini memiliki dampak penggandaan kegiatan ekonomi yang amat besar di seluruh Indonesia. Dengan sebaran lokasi pembangunan mencapai 210 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, sementara di Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi, maka selain berdampak positif terhadap bidang industri dan investasi, juga akan membuka lapangan kerja hingga meningkatkan serapan komponen dalam negeri.

35,000 MW Power generation project undeniably will bring about profound multiplication effect to the national economy. With the widespread construction to of over 210 locations across Indonesia, consisting 59 locations in Sumatra, 34 locations in Java, 49 locations in Sulawesi, 34 locations in Kalimantan, and 34 locations in the eastern part of Indonesia, greatly to contributing regional job creation and uptaking of local contents.

35,000 MW Power Plant Project

2.

Program Listrik Pedesaan yang dijalankan PLN diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap penduduk Indonesia di mana pun berada. Program ini sejalan dengan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional sebesar 97,4% di tahun 2019.

Rural Electrification Program undertaken by PLN is expected to provide equal opportunity for all Indonesian throughout the archipelago in the pursue of prosperity. The program is targeted to increase national electrification ratio from to 97.4% in 2019.

Program Listrik Pedesaan

Karena itulah, program listrik desa ini dilaksanakan dalam kerangka perencanaan sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Moreover, rural electrification program is carried out within the framework of overall electrical system planning.

Rural Electrification Program

3.

Sebagai bagian dari perencanaan ke depan, PLN telah menyusun strategi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan. Indonesia memiliki kelimpahan potensi energi terbarukan dan telah berkontribusi terhadap produksi energi sebesar 12,32% di tahun 2016. Oleh karenanya, PLN berencana meningkatkan bauran energi untuk Energi Baru dan Terbarukan sebesar 25 % di tahun 2025.

As part of planning ahead, PLN has formulated strategies develop New and Renewable Energy resources. Indonesia has an abundance of renewable energy and has contributed to energy production as 12.32% in 2016. Therefore, PLN has a planning to increase fuel mix from New and Renewable Energy to 25% in 2025.

Program Energi Baru dan Terbarukan

Perseroan merencanakan pengembangan EBT yang meliputi pengembangan panas bumi, pembangkit tenaga air pembangkit tenaga angin, serta Pembangkit EBT skala kecil tersebar berupa PLTS, biomassa, dan biogas. PLN juga mendorong penelitian dan pengembangan EBT lain seperti gasifikasi batubara. *solar thermal power,* arus laut, OTEC (*ocean thermal energy conversion*) dan *fuel cell*.

The Company plans to venture into the development of renewable energy power plants that include geothermal, hydro power plant, wind power plants, as well as new and renewable energy, such as solar power, biomass, bio-fuels, and biogas. PLN also encourages research and development of other renewable energy such as coal gasification, solar thermal power, ocean currents, OTEC (ocean thermal energy conversion) and fuel cells.

New and Renewable Energy Program

4.

PLN terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya bagi masyarakat. Salah satunya adalah program Layanan Satu Pintu Sambungan Listrik yang merupakan layanan terpadu yang meliputi layanan pembangunan instalasi listrik bangunan, Sertifikasi Laik Operasi, pembayaran biaya penyambungan dan penyambungan, dimana semua layanan tersebut dikelola oleh PLN. Upaya ini telah berhasil membantu peningkatan peringkat ease of doing business Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dari peringkat 120 di tahun 2015 menjadi peringkat 106 di tahun 2016, dimana indikator getting electricity sudah pada peringkat 49 dari 190 negara di tahun 2016. PLN menargetkan perbaikan peringkat getting electricity menjadi peringkat 25.

PLN strives constantly to improve its customer service: One of which is through One Stop Electrical Connection Service; it is an integrated service that includes building electrical installations services, Operation Worthiness Certification, connection fees and electrical installation costs payment, where all are managed by PLN. This effort is successfully help Indonesia's ease of doing business rank which is enacted by World Bank Group from rank 120th in 2015 to rank 106th in 2016, where getting electricity indicator achieved rank 49th from 190 countries in 2016. PLN targets getting electricity indicator rank to rank 25th.

Peningkatan Layanan Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, PLN telah melakukan perbaikan sistem transaksi keuangan dengan menerapkan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat (P2APST) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) sebagai bagian perbaikan sistem bisnis ini.

Hence, PLN has made improvements to the financial transactions by implementing Centralized Revenue Flow Supervisory Management (P2APST), and Centralized Customer Service Application (AP2T) as part of business system upgrading.

Service Improvement for the Community

5.

Sesuai prinsip keadilan, subsidi listrik ditata ulang agar penerima subsidi benar-benar keluarga yang membutuhkan. Selama ini, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp49,32 triliun (87%). Namun, Menurut Data Terpadu dari Kementerian Sosial, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak diberikan subsidi.

Based on the principles of justice and equality, electricity subsidy policies were readjusted to subsidize real under privileged recipients. In the recent past, significant amount of electricity subsidies were given to customers of 450 VA and 900 VA, reaching Rp49.32 trillion (87%). On the other hand, according to the Ministry of Social Affairs Integrated Data system, of a total of 23 million 900 VA power households enjoying subsidies, in actual fact only 4.1 million were eligible for electricity subsidies.

Subsidi Tepat Sasaran

Upaya penerapan subsidi tepat sasaran secara signifikan telah membantu pemerintah untuk dapat mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada sektor lain yang lebih bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Targeted subsidies significantly helps the government to allocate state budget funds to other sectors which is more beneficial to encourage economic growth.

Targeted Subsidies

6.

Secara konsisten, PLN menerapkan beragam inovasi di berbagai lini kegiatan untuk meningkatkan kinerja operasional. Dalam rangka mengintegrasikan seluruh inisiatif operasional, PLN menerapkan program strategis Enterprise Asset Management (EAM) dan Manajemen berbasis Teknologi Informasi lainnya dengan sasaran meningkatnya efisiensi operasional, revitalisasi kapasitas pembangkit, serta optimalisasi pemeliharaan pembangkit dan sarana ketenagalistrikan.

Consistently, PLN implements innovations in various activities to improve operational performance. In integrating all operational initiatives, PLN implements strategic program Enterprise Asset Management (EAM) and other Information Technology management with the improvement on operational efficiency target, revitalization of power plants, as well as optimization of power plants and electricity installations overhaul.

Peningkatan Efisiensi Operasional

Selain itu, PLN juga terus berupaya secara optimal untuk melakukan efisiensi operasi dan meningkatkan keandalan. PLN mengambil langkah strategis melalui penerapan program berkelanjutan Operational Performance Improvement (OPI), yang bertujuan untuk meningkatkan performa pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

Meanwhile, we strives optimally for improving operational efficiency and reliability. PLN has made strategic moves through an on-going Operational Performance Improvement (OPI) program, which aims to improve performance at the highest level in the field of power generation, transmission, distribution and human resources.

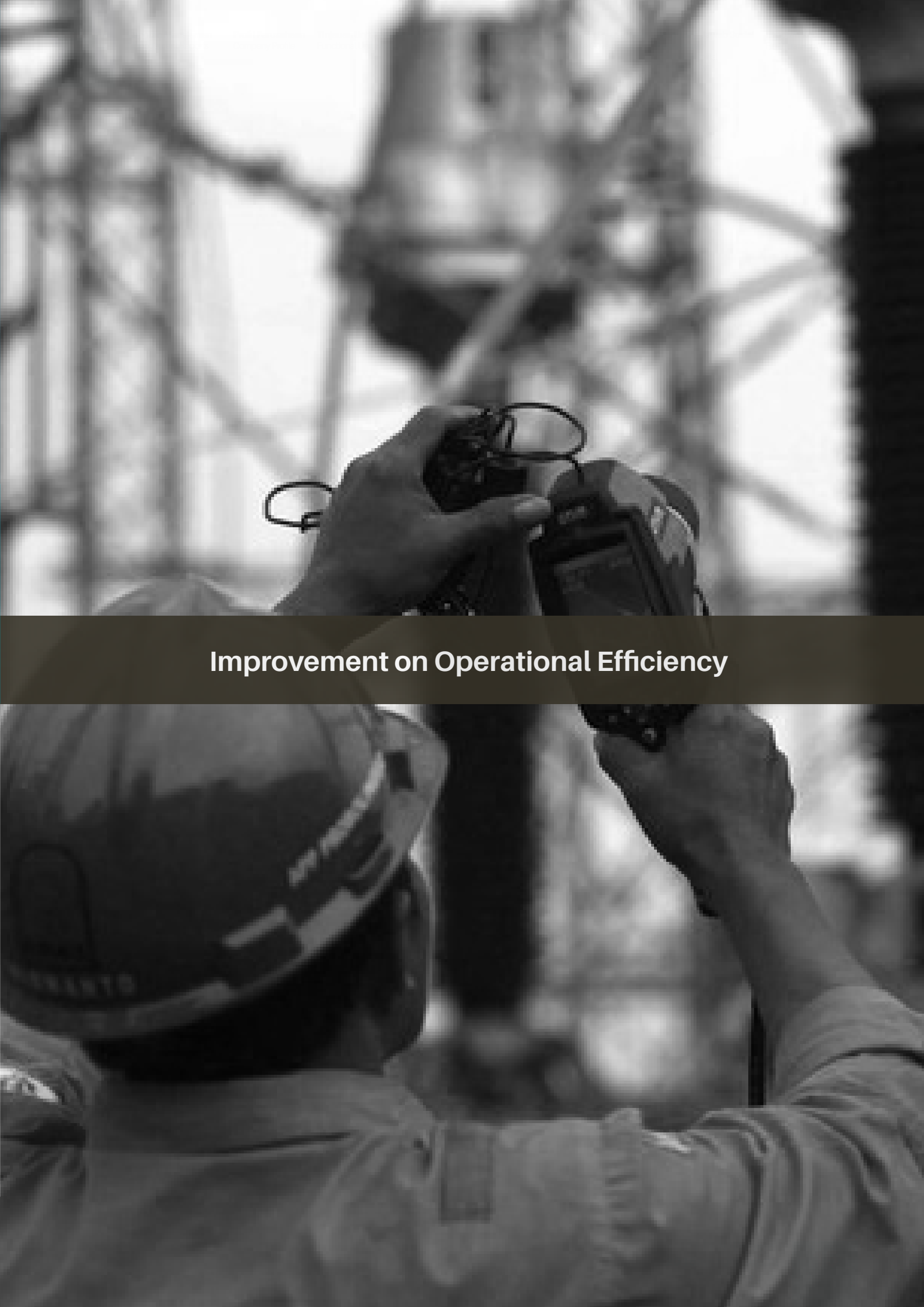

Improvement on Operational Efficiency

7.

Pelaksanaan pembangunan sarana ketenagalistrikan telah mampu mendorong kebangkitan industri manufaktur dalam negeri dengan semakin meningkatnya penggunaan komponen produk dalam negeri seiring dengan kebijakan penerapan komponen TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) minimal 40%. Hal ini memberi dampak terhadap pertumbuhan industri dari skala UMKM sampai skala menengah besar.

The implementation of electricity infrastructure development has encouraged manufacture industry resurrection nationally with more increasing usage of domestic component product (TKDN) as 40% minimal. This gives an impact to industrial growth from skala Small and Medium Enterprises until Medium-High Scale.

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Aktifitas operasi ketenagalistrikan baik dalam proses pembangunan sarana ketenagalistrikan maupun pengoperasiannya, telah mampu menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dalam jumlah yang signifikan. Tercatat ditahun 2016, PLN telah merekrut 5.245 orang.

Electricity operational activities both in the process of electricity construction and its operations, have been able to absorb direct and indirect labor significantly. Recorded in 2016, PLN recruited 5,245 people.

Supporting Economic Growth

Daftar Isi

Contents

Ikhtisar Utama
Main Highlights

1 Listrik untuk Membangun & Mensejahterakan
Listrik untuk Membangun & Mensejahterakan

2 Kesinambungan Tema Annual Report
Annual Report Theme of Continuity

24 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

26 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

28 Ikhtisar Obligasi
Bonds Highlights

30 Rangkaian Peristiwa Penting 2016
2016 Event Highlights

38 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

Laporan Manajemen
Management Report

42 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

52 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

56 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

72 Direksi
The Board of Directors

Profil Perusahaan
Company Profile

82 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

83 Riwayat Singkat Perusahaan
PLN in Brief

84 Jejak Langkah Perusahaan
Company Milestones

86 Makna Logo Perseroan
Company Logos

88 Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

90 Bidang Usaha
Line of Business

92 Struktur Organisasi
Organizational Structure

94 Kepemilikan Saham
Shareholders Ownership

98 Struktur Grup Perusahaan
Business Structure and Subsidiary

100 Entitas Anak Perusahaan
Subsidiaries

120 Entitas Asosiasi & Ventura Bersama
Associated Entities & Joint Ventures

126 Segmen Operasional Regional
Regional Operating Segments

128 Profil Sumber Daya Manusia
Human Resources Profile

130 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

134 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

140 Profil Komite-komite
Profile of Committees

144 Profil Pejabat Senior PLN
PLN Senior Official Profile

154 Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak & Entitas Asosiasi PLN
Addresses of PLN Branch Offices, Subsidiaries & Association

186 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Supporting Institutions and Professions in Capital Market

190 Akses Informasi
Access of Information

192 Situs Web PLN
PLN Website

Tinjauan Rencana, Kebijakan dan Strategi
Plan, Policy, and Strategy Review

196 Tinjauan Rencana, Kebijakan dan Strategi
Plan, Policy, and Strategy Review

197 Aspirasi Jangka Panjang
Long Term Ambition

198 Arah Strategis Jangka Panjang
Long Term Strategic Direction

201 Tujuan Strategis
Strategic Objectives

202 Strategi Utama Perusahaan
Primary Strategy Of The Company

203 Program Pengembangan Usaha
Business Development Program

203 Latar Belakang
Background

204 Strategi Pengembangan Usaha Tahun 2016
2016 Business Development Strategy

205 Tantangan Perusahaan
Challenges For The Company

207 Sasaran Strategis 2016
2016 Strategic Target

207 Program Prioritas
Priority Programs

210 Langkah-Langkah Strategis Yang Telah Dijalankan
Implemented Strategic Measures

211 Keselarasan Program Pembangunan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
Alignment Of Short-Term And Long-Term Development Programs

214 Pengembangan Anak Usaha
Development Of Subsidiaries

214 Pengembangan Organisasi
Organizational Development

215 Roadmap Organisasi Tahun 2015-2019
2015-2019 Organizational Roadmap

216 Pencapaian Program Organisasi
Achievement Of Organizational Program

218 Struktur Organisasi Baru Pln Menjamin Kesuksesan Konstruksi Pembangkit 35.000 MW
New Pln Organizational Structure Securing The Success Of The 35,000 MW Power Plant Constructions

221 Rencana Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Powerplant Infrastructure Facility Development Plan

221 Perencanaan Pembangunan Pembangkit
Powerplant Development Plan

226 Tantangan Program 35.000 MW
35,000 MW Program Challenges

227 Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
Development Of New Renewable Energy

230 Perencanaan Pengembangan Sistem Transmisi Dan Distribusi
Transmission System Development Planning And Distribution

233 Pengembangan Transmisi Dan Gardu Induk
Transmission And Substation Development

233 Program Pengembangan Sistem Transmisi
Transmission System Development Program

235 Program Pengembangan Sistem Distribusi
Distribution System Development Program

237 Terang dengan Pembangkit Terapung
Lighting with Floating Power Plants

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

240 Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

241 Tinjauan Umum
General Review

242 Tinjauan Industri
Industry Review

243 Tinjauan Proyek Strategis
Strategic Projects Review

243 Program Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Development Program

244 Progres Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Development Progress

251 Tinjauan Produksi Dan Operasional
Operating And Production Review

251 Indikator Operasional Strategis
Strategic Operating Indicators

252 Produksi Tenaga Listrik
Electricity Power Production

254 Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Cost Of Supply (BPP)

256 Bauran Energi
Fuel Mix

256 Konsumsi Dan Harga Energi Primer
Consumption And Primary Energy Price

257 Tarif Tenaga Listrik
Electricity Tariff

260 Subsidi Listrik
Electricity Subsidy

262 Susut Jaringan
Network Losses

263 Peningkatan Mutu Layanan Dan Keandalan
Increasing Service Quality And Reliability

264 Tinjauan Per Segmen Usaha
Review Per Business Segment

264 Segmentasi Usaha
Business Segmentation

264 Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

266 Jumlah Pelanggan
Number Of Customers

268 Daya Tersambung
Connected Power

269 Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Revenue

269 Tinjauan Pemasaran
Marketing Review

269 Pangsa Pasar
Target Market

269 Strategi Pemasaran
Marketing Strategy

272 Biaya Pemasaran
Marketing Cost

272 Tinjauan Pencapaian Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Achievement Review

275 Tinjauan Keuangan
Financial Review

277 Aset Tidak Lancar
Long Term Assets

279 Aset Lancar
Current Assets

283 Piutang Subsidi Listrik
Electricity Subsidy Receivables

285 Liabilitas
Liabilities

285 Liabilitas Jangka Panjang
Long Term Liabilities

287 Liabilitas Jangka Pendek
Short Term Liabilities

290 Ekuitas
Equity

291 Laba Rugi
Income Statement

291 Pendapatan Usaha
Operating Revenues

293 Beban Usaha
Operating Expenses

295 Subsidi
Subsidi

296 Rugi Usaha Sebelum Subsidi
Operating Loss Before Subsidy

296 Laba Usaha Setelah Subsidi
Operating Profit After Subsidy

296 Laba Sebelum Selisih Kurs Dan Pajak
Profit Before Foreign Exchange Discrepancies And Tax

296 Laba Selisih Kurs - Bersih
Foreign Exchange Profit – Net

296 Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax

297 Laba Tahun Berjalan
Current Year Profit

297 Laba Bersih Dan Laba Per Saham Tahun Berjalan
Net Profit And Earnings Per Share For The Current Year

297 Ebitda Dan Ebitda Margin
Ebitda Dan Ebitda Margin

297 Arus Kas
Cash Flow

298 Kemampuan Membayar Utang
Ability To Pay Debts

299 Rasio-Rasio Lain
Other Ratios

300 Struktur Modal Dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure And Capital Structure Policy

301 Modal Kerja Bersih
Net Working Capital
301 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment On Capital Goods
303 Transaksi Lindung Nilai
Hedging Transaction
303 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment
304 Pebandingan Realisasi Dan Target
Realization And Target
305 Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Akuntan
Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Akuntan
306 Prospek Usaha 2017
2017 Business Prospects
307 Dividen Dan Kebijakan Dividen
Dividend And Dividend Policy
309 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan / Manajemen
Employee / Manager Share Ownership Program
309 Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Dan Efek Lainnya
Use Of Funds Raised From Bonds And Other Shares
309 Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Material Transactions With Conflict Of Interest
309 Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi (Afiliasi)
Transactions With Related Parties (Affiliates)
315 Kerja Sama
Cooperation
318 Perubahan Peraturan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes In Regulations Which Significantly Affect The Company
319 Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada Tahun Buku Terakhir
Changes In Accounting Policy Implemented In Last Financial Year
323 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information
325 Kinerja Anak Perusahaan
Subsidiary Performance
326 PLN Terangi Desa
PLN Illuminating Villages

Tinjauan Unit Pendukung Bisnis
Businiess Review

330 Sumber Daya Manusia (SDM)
Human Resources (HR)
331 Rencana Strategis Pengelolaan SDM
HR Management Strategic Plan
332 Roadmap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Roadmap Of Human Resources Management
332 Knowledge Management
Knowledge Management
336 Peningkatan Budaya Unggul Dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Korporat
Culture Of Excellence Improvement And Corporate Culture Values Internalization
337 Human Capital Management System (HCMS)
Human Capital Management System (HCMS)
341 Program Rekrutmen
Recruitment Program
344 Sekilas Tentang Tes Adaptif Pln
Pln Adaptive Test In Brief
346 Program Pembelajaran
Learning Program
347 Optimalisasi Pegawai
Employee Optimization
348 Program Dana Pensiun
Pension Fund Program
348 Sistem Informasi SDM
HR Information System
349 Tingkat Turn-Over
Employee Turn Over Rate
349 Dampak Keuangan Pengelolaan Sdm
Financial Impact Of Hr Management
350 Survei SDM
HR Survey
351 Demografi Sumber Daya Manusia
Demography Of Human Resources
355 Menuju Nihil Kecelakaan Melalui HSSE Academy
Towards Zero Accidents through the HSSE Academy
356 Teknologi Informasi
Information Technology
357 Strategi Pengembangan Teknologi Informasi PLN
Information Technology Development Strategy Of PLN
359 Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi
Infrastructure Condition Of Information Technology
359 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance
361 Sumber Daya Manusia
Human Resources
362 Pengembangan Talenta Bidang Teknologi Informasi
Development Of Talents In Information Technology
363 Perkembangan Teknologi Informasi Tahun 2016
Information Technology Development In 2016
363 Program Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development Program

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

371 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

371 Tujuan Penerapan
Implementation Objectives

372 Komitmen Penerapan GCG
Commitment To The Implementation Of GCG

372 Pedoman, Struktur, Dan Mekanisme Tata Kelola
Guidelines, Structure And Mechanism For Governance

375 Kebijakan Pengelolaan Perusahaan
The Company's Management Policy

376 Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG Yang Baik
Basic Principles And GCG Best Practice Implementation

383 Penilaian Penerapan GCG
GCG Achievement Assessment

393 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting Of Shareholders (GMS)

397 Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

409 Direksi
Board Of Directors

424 Asesmen Terhadap Dewan Komisaris Dan Direksi
Assessment Of The Board Of Commissioners And Directors

432 Penetapan Remunerasi
Remuneration Determination

436 Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi
Working Relationship Management Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

437 Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi
Meeting Of The Board Of Commissioners And Directors

455 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

456 Komite Audit
Audit Committee

461 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

468 Komite Nominasi Dan Remunerasi
Nomination And Remuneration Committee

472 Komite-Komite Di Bawah Direksi
Board Of Directors' Committees

474 Sekretaris Dewan Komisaris
Board Of Commissioners' Secretary

476 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

490 Manajemen Risiko
Risk Management

496 Profil Risiko Yang Dihadapi Perusahaan Dan Upaya Pengelolaan Risiko 2016
2016 Corporate Risk Profile And Management

500 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Supervisory Unit (SPI)

504 Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawas Intern
Activities Of The Internal Supervisory Unit

506 Pemeriksaan Khusus Tahun 2016
Special Audit Of 2016

509 Penugasan Khusus 2016
Special Assignment 2016

509 Tindak Lanjut Rekomendasi Bpk RI
Follow-Up Of The Indonesian Supreme Audit Board's Audit Recommendations

510 Akuntan Perusahaan
Company's Accounting Firm

511 Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal
Internal Control And Audit System

512 Whistle Blowing System
Whistleblowing System

516 Perkara Hukum Yang Melibatkan Perseroan
Litigations Involving The Company

522 Kode Etik/Pedoman Perilaku
Code Of Conduct

526 Budaya Perusahaan
Company Culture

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

530 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

531 Visi Dan Misi
Vision And Mission

531 Maksud Dan Tujuan
Purpose And Objective

532 Ruang Lingkup Kegiatan Dan Sumber Dana Kegiatan TJSL
Scope Of Activities And Funding Of Csr Activities

534 Dasar Hukum Dan Kebijakan Pelaksanaan
Legal Basis And Policy Of Csr Implementation

536 Rumah Kreatif BUMN
Rumah Kreatif BUMN

540 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Dan Perubahan Iklim
Responsibility For The Environment, Electricity Safety (K2) And Climate Change

547 Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Occupational Health And Safety

547 Ketenagakerjaan
Workforce

548 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Occupational Health And Safety

554 Bekerja Tanpa Padam
Working Without Power Outage

558 Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Dan Program Csr Pln
Partnership And Community Development Program (PKBL) And Pln Csr Program

560 Langkah Kongkrit Plln Bangun Kompetensi Kelistrikan Siswa Smk Melalui Program CSR
Pln Concrete Measures In Upgrading The Skills Of Vocational High School Students Through CSR Program

562 Aksi Sosial Di Tengah Bencana Bima
Social Action Amidst The Bima Disaster

563 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/ Pelanggan
Responsibility To Customers

560 Upaya peningkatan kepuasan pelanggan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)
Efforts to improve customer satisfaction at PT PLN (Persero) Jakarta Raya Distribution (Disjaya)

573 **Laporan keuangan konsolidasian**
Consolidated Financial Statements

772 **Referensi Kriteria Annual Report Award**
Cross Reference of Annual Report Award

790 **Referensi SEOJK**
Reference of Financial Services

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Seluruh angka keuangan tahun 2016 tidak menerapkan ISAK 8 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017.

All Financial Numbers in the Year of 2016 are not applying IFSAS 8 Based on Financial Services Authority Decision No. 6/POJK.04/2017.

(Rp Miliar) | in billion Rp

IKHTISAR POSISI KEUANGAN	2016	2015*	2014*	SUMMARY OF FINANCIAL POSITION
Aset Tidak Lancar	1.173.609	1.235.026	522.025	Non-Current Assets
Aset Lancar	100.967	79.345	85.424	Current Assets
JUMLAH ASET	1.274.576	1.314.371	607.448	TOTAL ASSETS
Liabilitas Jangka Panjang	272.155	389.441	366.586	Long Term Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek	121.623	120.139	87.558	Short Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	393.779	509.580	454.144	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS	880.798	804.791	153.304	TOTAL EQUITY
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	3.830	3.174	2.572	Investment in Associates and Joint Ventures
IKHTISAR LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF				**OVERVIEW OF INCOME STATEMENT & COMPREHENSIVE INCOME**
PENDAPATAN USAHA	222.822	217.347	193.418	REVENUES
Penjualan Tenaga Listrik	214.140	209.845	186.634	Sales of Electricity
Biaya Penyambungan Pelanggan	7.052	6.141	5.624	Customer Connection Fees
Lain-lain	1.630	1.361	1.160	Others
BEBAN USAHA	254.450	225.574	247.806	OPERATING EXPENSES
Bahan Bakar dan Pelumas	109.492	138.408	170.488	Fuel and Lubricants
Pembelian Tenaga Listrik	59.729	4.421	3.493	Purchased Electricity
Sewa	6.545	8.066	7.866	Lease
Pemeliharaan	21.227	21.861	20.207	Maintenance
Kepegawaian	22.660	20.321	16.646	Personnel
Penyusutan	27.512	25.407	23.618	Depreciation
Lain-lain	7.284	7.090	5.489	Others
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	28.814	48.325	44.915	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	15.976	(15.913)	15.004	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak	(5.428)	21.940	(3.935)	Tax Benefit (Expenses)
LABA BERSIH	10.549	6.027	11.069	NET INCOME
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada:				Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	10.512	6.011	11.054	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	37	16	15	Non-Controlling Interest
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	8.467	648.759	7.415	Total Comprehensive Income for the Year
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	8.430	648.743	7.400	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	37	16	15	Non-Controlling Interest
Laba Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	194.349	130.106	253.833	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

* Penyajian kembali (restated) atas penerapan ISAK 8
* Restated Financial Statements for Applying IFSAS 8

Rasio-Rasio (%) | Ratios (%)

RASIO LIKUIDITAS	2016	2015	2014	CURRENT RATIO
Rasio Lancar	83.02	66.04	99.88	Rasio Lancar
Rasio Kas	34.77	19.74	31.82	Rasio Kas
RASIO SOLVABILITAS				**RASIO SOLVABILITAS**
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset	30.89	38.77	65.31	Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas	44.71	63.32	188.25	Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas
RASIO PROFITABILITAS				**RASIO PROFITABILITAS**
Margin Laba Kotor	13.46	23.03	14.69	Margin Laba Kotor
Margin Laba Bersih	4.93	2.87	7.50	Margin Laba Bersih
RASIO RENTABILITAS				**RASIO RENTABILITAS**
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	1.2	0.75	7.48	Rasio Laba Terhadap Ekuitas
Rasio Laba Terhadap Aset	0.83	0.46	2.60	Rasio Laba Terhadap Aset
RASIO OPERASIONAL				**RASIO OPERASIONAL**
Perputaran Piutang (Hari)	10.31	10.67	15.99	Perputaran Piutang (Hari)
Perputaran Utang Usaha (Hari)	9.70	9.37	22.83	Perputaran Utang Usaha (Hari)
Perputaran Aset Tetap	2.38	2.55	0.41	Perputaran Aset Tetap
Perputaran Persediaan	1.39	1.33	0.92	Perputaran Persediaan

Pertumbuhan Total Aset (Rp triliun)
The Growth of Total Assets (Rp trillion)

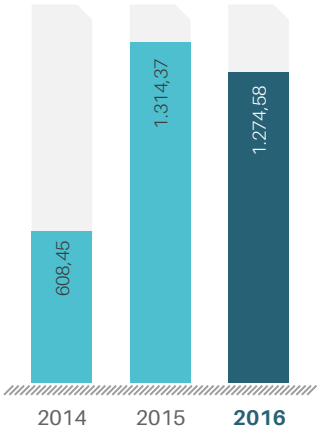

Pertumbuhan Aset Tetap (Rp triliun)
The Growth of Property, Plant, and Equipment (Rp trillion)

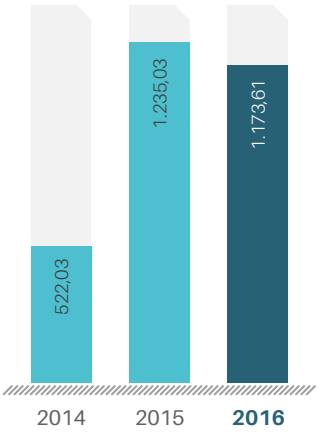

EBITDA (Rp triliun) & EBITDA Margin (%)
EBITDA (Rp trillion) & EBITDA Margin (%)

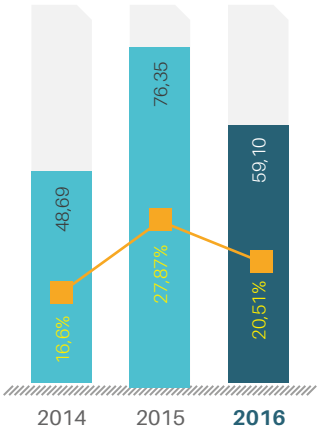

Pendapatan (Rp triliun)
Revenue (Rp trillion)

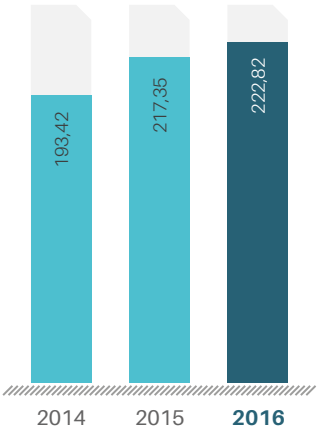

Penjualan Listrik (Rp triliun)
Sales of Electricity (Rp trillion)

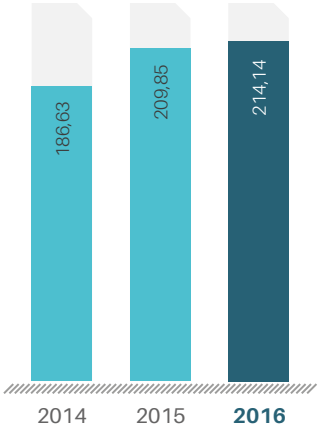

Laba Bersih (Rp triliun)
Net Profit (Rp trillion)

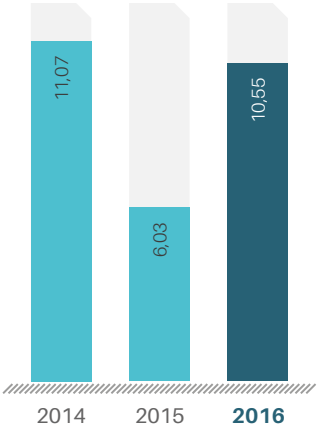

Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

Keterangan	Unit	2016	2015	2014	Description
Kapasitas Terpasang*	MW	54.665	50.859	49.591	**Installed Capacity**
Penjualan	GWh	216.004	202.846	198.602	Sales
Instalasi					**Installation**
Daya Tersambung	MVA	114.348	106.582	100.031	Installed Capacity
Panjang Transmisi	kms	46.266	41.683	39.91	Transmission Length
Kapasitas Gardu Induk	MVA	108.479	92.651	86.472	Substation Capacity
Produksi	GWh	248.611	233.982	228.553	**Production**
Produksi Sendiri	GWh	166.457	156.631	152.853	Own Production
Sewa Diesel	GWh	17.352	19.841	22.443	Diesel Rent
Pembelian	GWh	64.802	57.510	53.257	Purchase
Mutu					**Quality**
Susut Jaringan	Persen Percentage	9,48%	9,77%	9,71	Network Losses
Jumlah Pelanggan	Ribu pelanggan Thousand customers	64.282	61.167	57.493	**Number of Customers**
Jumlah Karyawan**	Orang	51.158	47.610	48.068	**Number of Employees**

* Termasuk IPP dan Sewa
Including IPP and Rent

** Termasuk jumlah karyawan anak Perusahaan
Including subsidiaries' employees

Kapasitas Terpasang (MW)
Installed Capacity (MW)

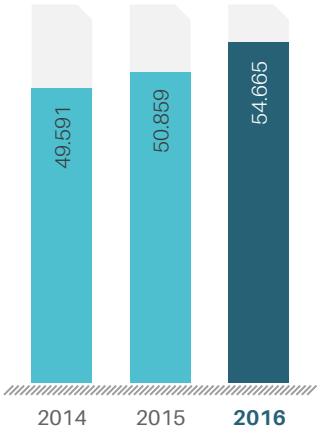

Penjualan (TWh)
Sales (TWh)

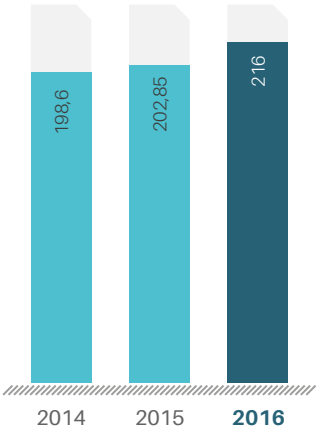

Total Produksi (TWh)
Total Production (TWh)

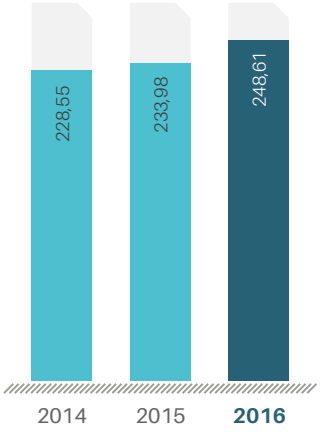

Susut Jaringan (%)
Network Losses (%)

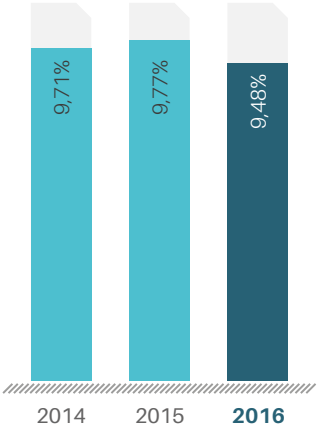

Jumlah Pelanggan (Ribu)
Number of Customers (Thousands)

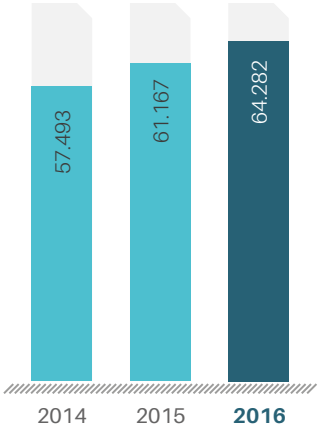

Jumlah Karyawan (Ribu)
Number of Employees (Thousands)

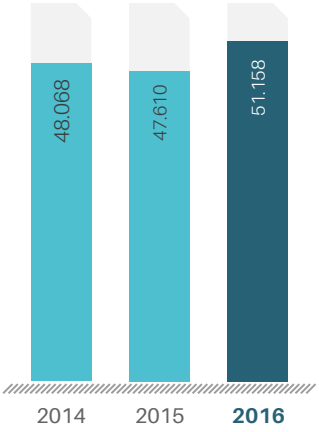

Ikhtisar Obligasi
Bonds Highlights

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Domestic Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

No.	Uraian Description		Jumlah Amount	Penerbitan Issued Loan Signing	Tenor (Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate (%)	Peringkat Rating		Tempat Listing Listing Location
								Pefindo		
								2015	2016	
1	PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21-Jun-06	15	21-Jun-21	13,75%	AAA	AAA	IDX
2	PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10-Jul-07	10	10-Jul-17	10,40%	AAA	AAA	IDX
3	PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10-Jul-07	15	10-Jul-22	10,90%	AAA	AAA	IDX
4	PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10-Jul-07	10	10-Jul-17	10,40%	AAA	AAA	IDX
5	PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12-Jan-10	7	12-Jan-17	11,95%	AAA	AAA	IDX
6	PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12-Jan-10	10	12-Jan-20	12,55%	AAA	AAA	IDX
7	PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12-Jan-10	7	12-Jan-17	11,95%	AAA	AAA	IDX
8	PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12-Jan-10	10	12-Jan-20	12,55%	AAA	AAA	IDX
9	PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8-Jul-10	12	8-Jul-22	10,40%	AAA	AAA	IDX
10	PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8-Jul-10	12	8-Jul-22	10,40%	AAA	AAA	IDX
11	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000,00	5-Jul-13	7	5-Jul-20	8,00%	AAA	AAA	IDX
12	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000,00	5-Jul-13	10	5-Jul-23	8,25%	AAA	AAA	IDX
13	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000,00	5-Jul-13	7	5-Jul-20	8,00%	AAA	AAA	IDX
14	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000,00	10-Dec-13	5	10-Dec-18	9,00%	AAA	AAA	IDX
15	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000,00	10-Dec-13	10	10-Dec-23	9,60%	AAA	AAA	IDX
16	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000,00	10-Dec-13	5	10-Dec-18	9,00%	AAA	AAA	IDX
17	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000,00	10-Dec-13	10	10-Dec-23	9,60%	AAA	AAA	IDX

Daftar Efek Internasional yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of International Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

No	Uraian Description	Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Penerbitan Issued	Tenor (Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate (%)	Peringkat Rating						Tempat Listing Listing Location
								S&P		Moody		Fitch		
								2015	2016	2015	2016	2015	2016	
1	GLOBAL BOND II Tr. A	USD	500.000.000	28-Jun-07	10	28-Jun-17	7,25%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
2	GLOBAL BOND II Tr. B	USD	500.000.000	28-Jun-07	30	29-Jun-37	7,88%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
3	GLOBAL BOND III	USD	750.000.000	7-Aug-09	10	7-Aug-19	8,00%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
4	GLOBAL BOND IV	USD	1.250.000.000	6-Nov-09	10	20-Jan-20	7,75%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
5	GMTN 1st DD 2011	USD	1.000.000.000,00	22-Nov-11	10	22-Nov-21	5,50%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
6	GMTN 2nd DD 2012	USD	1.000.000.000,00	24-Oct-12	30	24-Oct-42	5,25%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX

Rangkaian Peristiwa Penting 2016

2016 Event Highlights

10 Januari January

PT PLN (Persero) berhasil menyelesaikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Rawa Minyak 25MW

Dengan masuknya PLTMG 25 MW dalam sistem kelistrikan Riau, diharapkan menambah rasio elektrifikasi yang ada dan menambah kekuatan dalam sistem 20 kilo Volt (kV) Siak, Sei Apit, Dayun, Gasip, Pakning dan Mengkikip.

PT PLN (Persero) successfully completed the 25 MW Rawa Minyak Gas Engine Power Plant

With the presence of the 25 MW Gas Engine Power Plant in the Riau Electricity system, the current electrification ratio is expected to improve, strengthening the 20 kilo Volt (kV) system of Siak, Sei Apit, Dayun, Gasip, Pakning, and Mangkikip.

21 Januari January

Kerja Sama Pasokan Listrik dengan SESCO Malaysia

Pemerintah Indonesia melalui PT PLN (Persero) dan Malaysia melalui perusahaan listrik SESCO melakukan kerja sama untuk saling memasok kebutuhan listrik guna memperkuat kelistrikan di perbatasan kedua negara. Kerja sama ini diwujudkan dalam tersambungnya interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Barat, Indonesia – Serawak, Malaysia. Interkoneksi listrik dua negara ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2016, melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV sirkuit 1 antara Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Bengkayang dan GITET Mambong (SESCO Malaysia) setelah melalui beberapa rangkaian pengujian.

Power Supply Cooperation with SESCO Malaysia

The Indonesian government through PT PLN (Persero) and Malaysia through the electricity company SESCO conducted cooperation to mutually supply electricity to strengthen electrification in the border of both countries. This cooperation is realized with the interconnection connectivity of the West Kalimantan, Indonesia – Sarawak, Malaysia electricity network. The electricity interconnection was conducted on 20 January 2016, through the circuit 1 275 kV Extra High Voltage Electricity Network (SUTET) between the Bengkayang Extra High Voltage Substation (GITET) and Mambong GITET of SESCO Malaysia after a testing series.

27 Januari January

Kapal Pembangkit Listrik MVPP Zeynep Sultan resmi melakukan COD (*Commercial Operation Date*)

Penandatanganan COD dilakukan oleh General Manager PT PLN (Persero) Suluttenggo, dengan Mr. Noorchan dan Mr. Osman mewakili pihak Karpowership Indonesia. Hal ini sebagai tanda bahwa terhitung tanggal 28 Januari 2016, MVPP Zeynep Sultan secara komersial beroperasi dan menjual energi listrik ke PLN Wilayah Suluttenggo dan disuplai ke sistem interkoneksi 150 kV Sulawesi Utara & Gorontalo (Sulutgo) dengan minimum energi yang disuplai adalah 96 MW.

MVPP Zeynep Sultan officially conducted COD (Commercial Operation Date)

The COD signing was conducted by the Sulutengo General Manager of PT PLN (Persero) with Mr. Noorchan and Mr. Osman who are representing Karpowership Indonesia. This indicates that effective 28 January 2016, MVPP Zeynep Sultan is commercially in operations to sell electricity to the North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo (Sulutenggo) PLN Region to be supplied to the North Sulawesi & Gorontalo (Sulutgo) 150 kV interconnection system, with a minimum of 96 MW supplied energy.

26 Februari February

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pemerintah menugaskan PLN dengan memberikan dukungan berupa penjamin, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dalam keseluruhan Proyek 35.000 MW.

The Government issued the Presidential Regulation (Perpres) No. 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development

The government assigned PLN to provide support in the form of underwriting, licensing and non-licensing acceleration, supply of primary energy, spatial layout, provision of land, and settlement of issues and complications faced in the overall development of the 35,000 MW Project.

5 April April

Presiden resmikan PLTS Wawama

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Pembangunan PLTS Wawama Kecamatan Morotai Selatan, Maluku Utara. PLTS berkapasitas 350 kilo Watt peak (kWp) on Grid dengan pola operasi 12 jam ini, diharapkan mampu menghemat pemakaian BBM untuk PLTD sebanyak 28.930 liter per bulan.

The President launched the Wawama Solar Cell Power Plant

The President of the Republic of Indonesia inaugurated the Development of the Wawama Solar Cell Power Plant in the District of South Morotai, North Maluku. The power plant with the capacity of 350 kilo Watt peak (kWp) On Grid with a 12 hour operations pattern is expected to be able to save 28,930 liters of fuel consumption per month for the Diesel Power Plant.

7 April April

Kerja sama pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
Upaya pemanfaatan bayu sebagai tenaga pembangkit listrik di Indonesia, salah satunya diwujudkan PLN melalui penandatanganan financing agreement antara PT UPC Sidrap Bayu Energy sebagai perusahaan pembangunan pembangkit, dengan *The Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) yang merupakan lembaga keuangan pembangunan Pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan kerja sama pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini berlangsung di PLN Kantor Pusat.

Financing Cooperation for the Wind Power Plant (PLTB) Project
One of the efforts to utilize wind to generate power in Indonesia is realized by PLN through the signing of the financing agreement between PT UPC Sidrap Bayu Energy as the power plant constructing company with The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), which is a development financing institution of the Government of the United States. The financing cooperation agreement for the Wind Power Plant (PLTB) took place at PLN Head Office.

18 April April

Penandatanganan MoU dengan Siemens
PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Siemens terkait pengembangan pembangkit listrik *small mobile power plant* berkapasitas 500 Megawatt (MW). Pembangkit ini akan dibangun di berbagai kawasan Indonesia bagian timur. 75% komponen *small mobile power plant* akan diproduksi di dalam negeri melalui manufaktur-manufaktur lokal, dengan nilai minimal 45% dari total investasi. Sementara itu, untuk jasa O&M akan dilakukan oleh Pusat Pemeliharaan Listrik (Pusharlis) PLN.

MoU Signing with Siemens
PLN signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Siemens related to the development of small mobile power plants with a capacity of 500 Megawatt (MW). The power plants will be constructed in various locations in the Eastern part of Indonesia. 75% of the components for the small mobile power plants will be manufactured domestically, with a minimum value of 45% of the total investment. The O&M services will be performed by the Electricity Maintenance Center (Pusharlis) of PLN.

21 April April

Pencanangan Progran Indonesia Terang (PIT)
Pencanangan Program Indonesia Terang di Desa Temel, Distrik AyamaruJaya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat oleh Menteri ESDM Sudirman Said (21/4). PIT merupakan wujud upaya pemerintah dan PLN untuk bersatu dan fokus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah terpencil agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya di Indonesia Timur.

Launching of the Bright Indonesia Program (PIT)
The Bright Indonesia Program (PIT) is launched at Temel Village, Ayamaru Jaya District, Maybrat Regency, West Papua by the Minister of Energy and Mineral Resources, Mr. Sudirman Said (21/4). PIT is an embodiment of the government and PLN's efforts to unite and focus to meet electricity needs in remote areas in order to increase electrification ratio, particularly in Eastern Indonesia.

23 Mei May

Proyek transmisi PLN
Sistem kelistrikan di tanah Maluku kini semakin meningkat dengan adanya Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 70 kV. Transmisi yang melewati jalur Waai-Passo-Sirimau ini digunakan untuk mengevakuasi daya dari Kapal Pembangkit Listrik atau *Marine Vessel Power Plant* (MVPP) berkapasitas 60 MW yang didatangkan dari Turki.

PLN Transmission Project
The electrical system in Maluku is currently improving with the presence of the 70 kV High Voltage Transmission. The transmission which passes the Waai-Passo-Sirimau line will be utilized to evacuate power from the Marine Vessel Power Plant (MVPP) brought in from Turkey with a capacity of 60 MW.

30 Mei May

Kerja sama optimalkan EBT
PLN terus meningkatkan pemanfaatan EBT sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Guna mewujudkan upaya tersebut, PLN Regional Sumatera melakukan kesepakatan PPA dengan total kapasitas 115,6 MW, serta penandatanganan kesepahaman Pengembangan Pembangkit EBT sebesar 14,7 MW.

Cooperation to Optimize EBT
PLN continuously increases the utilization of renewable energy as a power source for power generation. To realize this effort, PLN Regional Sumatera conducted a PPA agreement with a total capacity of 115.6 MW as well as signing the MoU for the Development of Renewable Energy Power Plant of 14.7 MW.

31 Mei May

Fatwa mencuri listrik haram
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menyatakan pencurian listrik, baik melakukan pencurian secara langsung, membantu melakukan pencurian, serta membiarkan terjadinya pencurian, merupakan perbuatan yang diharamkan.

Haram fatwa for stealing electricity
The Ulema Council of Indonesia (MUI) officially declared that stealing electricity, in terms of directly assisting the theft and omitting to prevent the theft, is a forbidden conduct.

1 Juni June

Presiden Resmikan *Mobile Power Plant* di Bangka
PLN dukungan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dengan meluncurkan *Bali Eco Smart Grid* di Provinsi Bali sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih. *Smart Grid* adalah sistem jaringan listrik cerdas yang mengintegrasikan pengelolaan pembangkitan dan distribusi listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dua arah antara PLN sebagai produsen listrik dengan pelanggan sebagai konsumen.

President Launched Mobile Power Plant in Bangka
PLN supports the utilization of New and Renewable Energy by launching the Bali Eco Smart Grid in the Province of Bali as a National Clean Energy Region. Smart Grid is a smart electrical network system that integrates the management and distribution of electricity by utilizing information technology and two-way communications between PLN as the electricity provider and the customers.

2 Juni June

Presiden Resmikan Proyek Kelistrikan di Aceh dan Kalimantan Barat
Presiden meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 184 MW yang berlokasi di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Kemudian, di hari yang sama, Presiden Jokowi pun melakukan *groundbreaking* pembangkit *Mobile Power Plant* (MPP) berkapasitas total 100 MW di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang di Sukabangun berkapasitas total 20 MW.

President Inaugurated Electricity Projects in Aceh and West Kalimantan
The President inaugurated the 184 MW Arun Gas Engine Power Plant, located at the Meuria Paloh Village, Muara Satu District, Lhokseumawe City. Later, on the same day, Jokowi also conducted the groundbreaking for the 100 MW capacity Mobile Power Plant at the Jungkat Village, Mempawah District, Pontianak, West Kalimantan. The President also inaugurated the 20 MW Ketapang Steam Power Plant in Sukabangun.

3 Juni June

Pembangkit Pertama Program 35.000 MW Beroperasi
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) *Dual Fuel* Gorontalo kapasitas 100 MW. PLTG ini merupakan pembangkit pertama yang beroperasi dari Program 35.000 MW.

First Power Plant for the 35,000 MW Program in Operations
President Joko Widodo visited the Dual Fuel Gorontalo Gas Turbine Power Plant with a capacity of 100 MW. The power plant is the first power plant in operations for the 35,000 MW Program.

10 Juni June

***Ground Breaking* PLTU Lontar 1x315 MW**
Presiden Joko Widodo melakukan Ground Breaking proyek PLTU Lontar 1x315 MW di desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang-Banten. Kapasitas PLTU ini sebesar 1x315 MW dan memasok 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten yakni subsistem Balaraja, subsistem Kembangan serta subsistem Muara Karang-Gandul.

Ground Breaking of 1x315 MW Lontar Steam Power Plant
President Joko Widodo conducted the groundbreaking for the 1x315 MW Lontar Steam Power Plant project at Lontar Village, Kemiri District, Tangerang-Banten. The Steam Power Plant has a capacity of 1x315 MW and supplies 3 subsystems for the DKI Jakarta and Banten region, namely the Balaraja subsystem, Kembangan subsystem, and Muara Karang-Gandul subsystem.

11 Juni June

Mulai Gunakan Mini LNG ke PLTDG Pesanggaran, PLN Mampu Hemat Biaya Pemeliharaan Rp60 Miliar per Tahun
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran Bali. Penggunaan pembangkit berkapasitas 200 MW ini merupakan bentuk nyata dari komitmen PLN Group dalam meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Starting to Use Mini LNG to Pesanggaran Diesel and Gas Power Plant, PLN was Able to Save Maintenance Cost of Rp60 Billion Annually
The visit of President Joko Widodo to the Pesanggaran Bali Diesel and Gas Power Plant. The utilization of the 200 MW power plant is a realization of the PLN Group's commitment for a cleaner and environmentally friendly electricity infrastructure in Indonesia.

11 Juni June

Ground Breaking MPP Lombok
Presiden RI Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek *Mobile Power Plant* (MPP) berkapasitas total 50 MW di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat. MPP 50 MW ini merupakan salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam RUPTL 2015–2024.

Ground breaking of Lombok MPP
The President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo conducted a ground breaking for the Mobile Power Plant (MPP) project with a total capacity of 50 MW at the Taman Ayu Village, Regency of Lombok Barat. The 50 MW MPP is one of PLN's strategic programs contained in the 2015-2024 Electricity Power Supply Business Plan (RUPTL).

21 Juni June

Raih Penghargaan *The Best Indonesia Green Awards*
PLN berhasil meraih penghargaan *The Best Indonesia Green Awards* (IGA) 2016 atas upaya PLN dalam pelaksanaan program yang mendukung pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Penyerahan penghargaan diberikan oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didampingi *Chairman* La Tofi School of CSR, kepada Kepala Satuan Komunikasi Korporat I Made Suprateka di Jakarta.

Obtaining the Best Indonesia Green Award
LN was awarded The 2016 Best Indonesian Green Awards (IGA) for PLN's efforts in implementing programs that supports conservation and preservation of the environment. The award was handed by a representative from the Ministry of Environment and Forestry, accompanied by the Chairman of the La Tofi School of CSR, to the Head of Corporate Communication Unit, Mr. I Made Suprateka, in Jakarta.

29 Juni June

Kerja Sama Kredit Sindikasi
Tiga BUMN Perbankan yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri dan BNI menyalurkan pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) Talangan Subsidi sebesar Rp15 triliun kepada PLN guna mendukung Program Kelistrikan 35.000 MW. Sedangkan fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) sebesar Rp12 triliun digunakan untuk membantu proses pengadaan Perseroan dan grup usaha dan fasilitas *treasury line* sebesar US$950 juta digunakan untuk pembayaran kewajiban valuta asing dan kebutuhan *hedging* atas kewajiban valuta asing sesuai PBI No. 16/21/PBI/2014.

Syndicated Loans Cooperation
Three State Banks, consisting of BRI, Bank Mandiri, and BNI distributed Subsidy Bailout Working Capital Loan (KMK) financing in the amount of Rp 15 trillion to PLN to support the 35,000 MW Electricity Program, with a Non Cash Loan (NCL) facility in the amount of Rp12 trillion utilized to assist the procurement process of the Company and business group and a treasury line facility in the amount of US$950 million utilized for payment of foreign exchange payment obligations and hedging requirement on the foreign exchange obligations in accordance with the PBI No. 16/21/PBI/2014.

19 Agustus August

Presiden RI Joko Widodo Melakukan Peletakan Batu Pertama Pada Pembangunan SUTT 70 kV Nias-Teluk Dalam
Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan SUTT 70 kV Nias-Teluk Dalam sepanjang 110 km di Idanoi, Nias.

President of the Republic of Indonesia Conducted the Groundbreaking for the Construction of the 70 kV Nias-Teluk Dalam High Voltage Transmission
The President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, along with the Minister of SOE, Ms. Rini Soemarno, the Governor of North Sumatra, Mr. Teuku Erry, and the President Director of PLN, Mr. Sofyan Basir conducted the ground breaking for the development of the 700 kV Nias-Teluk Dalam High Voltage Transmission along 110 km in Idanoi, Nias.

19 Agustus August

Penandatanganan Perjanjian Pendanaan Pembangunan PLTGU Priok
PLN dan Japan Bank for International Cooperation menandatangani perjanjian pendanaan US$310 juta untuk pembangunan PLTGU Priok 1x800 MW. Proyek ini diharapkan rampung pada pertengahan 2019. PLTGU yang masuk dalam Program 35.000 MW ini merupakan pembangkit berbahan bakar gas alam dan berperan sebagai *load follower* yang akan memasok listrik dan menjaga kualitas tegangan di DKI Jakarta maupun sistem Jawa-Bali secara keseluruhan.

Signing of Financing Agreement for the Development of Priok Combined Cycle Power Plant
PLN and Japan Bank for International Cooperation signed a financing agreement of US$ 310 million for the development of the 1x800 MW Priok Combined Cycle Power Plant. This project is expected to be completed in mid 2019. The Combined Cycle Power Plant is a power plant using natural gas and has the role as the load follower, which will supply electricity and maintain voltage quality in DKI Jakarta as well as the Java – Bali system in general.

25 Agustus August

PLN Raih Social Business Innovation dan Green CEO Award 2016
PLN meraih Social Business Innovation Award 2016 untuk kategori pembangkit listrik dengan program penghematan energi. Selain itu, penghargaan untuk kategori Green CEO Award 2016 diraih oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Pada kesempatan yang sama, anak perusahaan PLN, seperti PT PJB dan PT IP mendapatkan penghargaan yang berkaitan dengan program efisiensi energi serta teknologi ramah lingkungan.

PLN obtained the 2016 Social Business Innovation and Green CEO Award
PLN obtained the 2016 Social Business Innovation Award in the power plant with energy saving program category. In addition, the President Director of PLN, Mr. Sofyan Basir, acquired the award for the 2016 GREEN CEO. On this occasion, subsidiaries of PLN, such as PT PJB and PT IP obtained awards relating to energy efficiency as well as environmentally friendly programs.

29 Agustus August

PLTU Maluku Utara Beroperasi
PLTU Maluku Utara telah berhasil beroperasi secara komersial untuk unit 2 berkapasitas 7 MW. Kehadiran PLTU Maluku Utara di Tidore ini merupakan PLTU pertama yang sukses beroperasi di wilayah Maluku dan Papua. PLTU ini akan menambah kapasitas daya pada sistem Ternate dan Tidore sebanyak 15 MW. Penggunaan PLTU ini juga mampu menghemat Rp10 miliar per bulan.

North Maluku Steam Power Plant in Operations
The North Maluku Steam Power Plant is successfully in operations commercially for unit 2 with a capacity of 7 MW. The presence of the Steam Power Plant in Tidore is the first Steam Power Plant successfully in operations in the Maluku and Papua area. The Steam Power Plant will increase the capacity in the Ternate and Tidore system by 15 MW. The utilization of the Steam Power Plant also saved Rp10 billion per month.

29 Agustus August

PLN Tandatangani Kontrak EPC untuk Pembangunan PLTGU Muara Karang
PLTGU Muara Karang 500 MW sebagai salah satu pembangkit dari Program 35.000 MW siap dibangun. Penandatanganan kontrak EPC ini dilakukan oleh PLN dan Konsorsium Mitsubishi-Wijaya Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp3,9 triliun.

PLN Signed EPC Contract for the Development of the Muara Karang Gas and Steam Power Plant
The 500 MW Gas and Steam Power Plant as one of the power plants in the 35,000 MW Program is ready to be developed. The signing of the EPC contract was executed by PLN and the Consortium of Mitsubishi – Wijaya Karya with a contract value of Rp 3.9 trillion.

7 September September

PLN Raih 17 PROPER Hijau
Sebanyak 17 unit pembangkit yang dikelola PLN bersama Anak Perusahaan, yakni PT IP dan PT PJB, berhasil meraih penghargaan Proper Hijau dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia tahun 2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

PLN Obtained 17 Green PROPER Awards
A total of 17 generating units managed by PLN and its subsidiaries, namely PT IP and PT PJB, acquired the Green Proper award in the Company Performance Rating Assessment (PROPER) from the Ministry of the Environment and Forestry of the Republic of Indonesia in 2016. The Minister of Environment and Forestry, Ms. Siti Nurbaya Bakar, personally handed the awards.

8 September September

PLN Raih Penghargaan Indonesia *Capital Human Study*
PLN meraih penghargaan dari Indonesia Capital Human Study (IHCS) 2016 untuk kategori *Best Reward Management Initiative* dan *Best Employee Engagement*.

PLN acquired the Human Capital Award
PLN acquired an award from the Indonesian Human Capital Study (IHCS) in the Best Reward Management and Best Employee Engagement categories.

9 September September

PLN Tandatangani Pembangunan PLT Biomassa Pertama di Kalimantan Barat
PLN berkomitmen membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBiomassa) berkapasitas 10 MW di Kalimantan Barat. Pembangkit yang berlokasi di Desa Wajok, Siantan, Kabupaten Mempawah ini merupakan pembangkit biomassa pertama yang dibangun di Kalimantan Barat dengan biaya investasi sebesar Rp250 miliar dan target pembangunan 14 bulan.

PLN Signed the Development of the First Biomass Power Plant in West Kalimantan
PLN is committed to develop a Biomass Power Plant with a capacity of 10 MW in West Kalimantan. The power plant that is located at the Wajok Village, Siantan, Regency of Mempawah is the first biomass power plant developed in West Kalimantan with an investment cost of Rp250 billion and a development target of 14 months.

9 September September

PLN Peroleh Kucuran Dana
PLN kembali mendapat dukungan dari sinergi Perbankan BUMN, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri untuk kredit investasi senilai maksimum Rp12 triliun dan kredit modal kerja tambahan tahun 2016 yang semula sebesar Rp15 triliun menjadi maksimum Rp20 triliun. Dukungan dana ini diberikan guna memenuhi kebutuhan investasi kelistrikan tanah air dan memperkuat arus kas PLN terkait pembayaran energi primer.

PLN Obtained Fund Disbursement
PLN has the support from the synergy of the State Banks, namely BNI, BRI, and Bank Mandiri for investment loan with a maximum value of Rp12 trillion and additional Working Capital Loan, initially between Rp15 trillion and Rp20 trillion. The funding support is to meet the need of the country's electricity investment and to strengthen the cash flow of PLN relating to the investment in primary energy.

19 September September

PLN Kerja Sama dengan Vestas-Equis untuk Membangun PLTBayu
Penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN, Vestas dan Equis untuk membangun PLTBayu berkapasitas 60 MW di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penandatanganan berlangsung di Copenhagen, Denmark. Nilai investasi pembangunan PLTBayu ini mencapai US$130 juta hingga US$140 juta dengan menggunakan sistem kerja sama *Build, Operate, and Transfer* (BOT) selama 30 tahun ke depan.

PLN in Cooperation with Vestas-Equis for the Development of Wind Power Plant
The signing of the power purchase agreement between PLN, Vestas, and Equis to develop a Wind Power Plant with a capacity of 60 MW in Janeponto, South Sulawesi. The signing took place in Copenhagen, Denmark. The investment value for the Wind Power Plant reached US$130-140 million, using the Build, Operate, and Transfer (BOT) system for the next 30 years.

23 September September

PLN Peroleh Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi dan BIN Kepulauan Riau

Penarikan jalur transmisi 150 kV Tanjung Uban-Sri Bintan 28 kmr, Sri Bintan-Air Raja 38 kmr dan Air Raja-Kijang 20 kmr berhasil dipercepat dari target dua tahun menjadi tiga bulan. Percepatan pembangunan transmisi tersebut merupakan hasil sinergi, koordinasi dan kerja sama yang sangat baik antara PLN dengan Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Intelijen Negeri Kepulauan Riau.

PLN Acquired Full Support from the Provincial Government, Chief Prosecutor's Office, and BIN of Riau Islands

The transmission line installation for the 150 kV Tanjung Uban-Sri Bintan 28 kmr, Sri Bintan-Air Raja 38 kmr, and Air Raja-Kijang 20 kmr was successfully accelerated from the two year target into three months. The accelerated development of the transmission is the result of the synergy, coordination, and cooperation between PLN with the Provincial Government, Chief Prosecutor's Office, and the State Intelligence Agency of Riau Islands.

28 September September

Pencanangan PLTU Nasional

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri BUMN, Dirjen Ketenagalistrikan dan Direksi PLN mencanangkan Program PLTU Nasional pada acara pembukaan Seminar & Pameran HLN ke-71. Program PLTU Nasional merupakan pembangunan PLTU skala kecil dan menengah di pelbagai pelosok negeri. Program PLTU Nasional meliputi 201 unit PLTU skala kecil dan menengah, yang terdiri dari 30 unit PLTU 100 MW, 37 unit PLTU 50 MW, 37 unit PLTU 25 MW, dan 72 unit PLTU dibawah 25 MW. Kapasitas total Program PLTU Nasional mencapai 6.550 MW. Realisasinya diperkirakan akan menyerap dana investasi lebih dari Rp150 triliun.

Initiation of National Steam Power Plant

Indonesia's Vice President, Mr. Jusuf Kalla, along with the Minister of SOE, Director General of Electricity, and the Board of Directors of PLN initiated the National Steam Power Plant Program at the opening ceremony of the 71st National Electricity Day Seminar & Expo. The National Steam Power Plant Program is the development of small and medium scale steam power plants in various corners of the country. The National Steam Power Plant Program consists of 201 small and medium scale steam power plants, consisting of 30 100MW steam power plants, 37 unit 50MW steam power plants, 37 unit 25MW steam power plants, and 72 unit under 25MW power plants. The total capacity of the National Steam Power Plant Program reached 6,550 MW. Its realization is expected to absorb an investment fund of more than Rp150 trillion

17 Oktober October

Peresmian 6 Infrastruktur Kelistrikan

Presiden Joko Widodo meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Keenam infrastruktur kelistrikan tersebut, yakni PLTA Orya Genyem 2 x 10 MW, PLTMH Prafi 2 x 1,25 MW, SUTT 70 kV Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kms, SUTT 70 kV Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kms, GI Waena-Sentani 20 MVA), dan GI Jayapura 20 MVA.

Inauguration of Six Electricity Facilities

The Indonesian President, Mr. Joko Widodo inaugurated six electricity facilities in the Province of Papua and the Province of West Papua. The six electricity facilities are, the 2 x 10 MW Orya Genyem Hydro Power Plant, 2 x 1.25 MW Prafi Micro Hydro Power Plant, the 174.6 km long 70 kV Genyem - Waena - Jayapura High Voltage Transmission, the 43.4 km long 70 kV Holtekamp - Jayapura High Voltage Transmission, 20 MVA Waena - Sentani GI, and 20 MVA Jayapura GI.

20 Oktober October

Pembangkit Kedua Program 35.000 MW Beroperasi

PLN berhasil mengoperasikan satu unit mesin MPP Jeranjang berkapasitas 2 x 25 MW yang terletak di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat. MPP Jeranjang ini merupakan pembangkit listrik kedua dari Program 35.000 MW yang telah berhasil beroperasi.

Second Power Generator 35,000 MW Program Operates

PLN has successfully start to operate one unit of MPP Jeranjang with 2 x 25 MW capacity located in Taman Ayu Village, West Lombok Regency. MPP Jeranjang is the second power plant of the 35,000 MW Program that is now in full operational.

16 November November

Kerja Sama Pekerjaan Studi Kelayakan Pola Penyediaan Pasokan Gas

Kepala Satuan Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN Chairani Rachmatullah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Regional Manager Kellog Brown and Root (KBR) Indonesia Keith Garry yang disaksikan oleh Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso dan Presiden KBR Asia Pasifik Greg Conlon di PLN Kantor Pusat. Kerja sama tersebut dilakukan untuk pekerjaan studi kelayakan pola penyediaan pasokan gas untuk Pembangkit Listrik di seluruh Indonesia dan desain engineering untuk infrastruktur penyediaan pasokan Gas ke PLTG di Wilayah Indonesia Timur.

Cooperation on Gas Supply Feasibility Study

Head of the Natural Gas and Fuel Unit of PLN, Chairani Rachmatullah signed a cooperation agreement with the Regional Manager of Kellog Brown and Root (KBR) Indonesia, Keith Garry, witnessed by the Director of Procurement of PLN, Supangkat Iwan Santoso and the President of KBR Asia Pacific, Greg Conlon at the Head Office of PLN. The cooperation is conducted for the feasibility study on gas supply patterns for Power Plants across Indonesia and the engineering design for the gas supply infrastructure to Gas Turbine Power Plants in the Eastern Parts of Indonesia.

22 **November** November

FGD Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Pemerintah pastikan penyesuaian tarif listrik bagi golongan 900 Volt VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) mulai 1 Januari 2017. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kepastian penyaluran subsidi yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan kurang mampu, serta terciptanya keadilan energi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. FGD dilakukan untuk mensosialisasikan kembali kepada para *opinion leader* mengenai mekanisme kebijakan subsidi listrik dilaksanakan oleh Pemerintah.

FGD on Accurate Electricity Subsidy Policy
The government confirms electricity bill adjustments for the 900 Volt VA categories that fall into the Able Household (RTM) effective January 1, 2017. This measure is expected to create certainty of subsidy distribution for the poor and underprivileged households, as well as the creation of energy equality for the people of Indonesia. The FGD is intended to re-socialize the opinion leaders on the electricity subsidy mechanism conducted by the government.

24 **November** November

PLN Terima Penghargaan *Government Contracting Agency* (GCA) 2016
PLN memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan karena telah berhasil menyukseskan Program Implementasi Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS)/*Private Project Partnership* (PPP) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2x1.000 MW.

PLN Received the 2016 Government Contracting Agency (GCA) Award
PLN obtained an award from the Ministry of Finance for successfully implementing the Private Project Partnership (PPP) Implementation Program in the 2x1,000 MW Batang Steam Power Plant.

19 **Desember** December

PLN Peroleh Dana investasi Rp12 Triliun
PLN memperoleh pinjaman dari sindikasi kreditur perbankan dalam negeri yang terdiri dari Bank Mandiri, BCA, BRI, Maybank, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Indonesia Eximbank, untuk membiayai kebutuhan pendanaan investasi tahun 2016 sebesar Rp12 triliun untuk jangka waktu 10 tahun.

PLN Acquired an Investment Fund of Rp12 Trillion
PLN acquired a loan from a syndication of domestic creditor banks, consisting of Bank Mandiri, BCA, BRI, Maybank, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and Indonesia Eximbank, to finance the investment funding in the amount of Rp12 trillion with a tenor of 10 years.

20 **Desember** December

PLN Raih Peringkat 2 (Dua) Keterbukaan Informasi Publik
Konsistensi dan komitmen PLN dalam pengelolaan perusahaan yang terbuka dan transparan melalui implementasi Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Dengan skor 82,35 dari total skor 100 dalam *assessment* KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, PLN menempati peringkat 2 (dua) untuk kategori badan publik BUMN. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Istana Wakil Presiden RI.

PLN Obtained Rank 2 (Two) for Public Disclosure of Information
The consistency and commitment of PLN in managing an open and transparent company through the implementation of the Law No. 14 of 2008 on KIP. With a score of 82.35 from the total score of 100 in the KIP assessment, which was organized by the Central Information Commission, PLN was ranked 2nd in the SOE category. The award was presented by the Vice President of the Republic of Indonesia, Mr. Jusuf Kalla, to the President Director of PLN, MR. Sofyan Basir, at the Residence of the Vice President of the Republic of Indonesia.

Desember December

PLN Berhasil Operasikan 8 (Delapan) Pembangkit Listrik Tenaga Gas/*Mobile Plant*
Delapan pembangkit yang sudah beroperasi adalah MPP Jeranjang – Lombok 2 x 25 MW, MPP Air Anyir – Bangka 2 x 25 MW, MPP Tarahan – Lampung 4 x 25 MW, MPP Nias 1 x 25 MW, MPP Pontianak 4 x 25 MW, MPP Balai Pungut – Riau 3 x 25 MW, MPP Suge – Belitung 1 x 25 MW dan terakhir Paya Pasir Medan 3 x 25 MW yang baru masuk ke sistem kelistrikan Medan unit #1 pada 9 Desember 2016, unit #2 pada 13 Desember 2016, dan terakhir unit #3 pada 16 Desember 2016.

PLN Successfully Operates 8 (Eight) Gas Power Plants/Mobile Power Plants (PLTG/MPP)
The 8 operational power plants are the 2x25 MW Jeranjang – Lombok MPP, 2x25 MW Air ANyir – Bangka MPP, 4x25 MW Tarahan – Lampung MPP, 1x25 MW Nias MPP, 4x25 MW Pontianak MPP, 3x25 MW Balai Pungut – Riau MPP, 1x25 MW Suge – Belitung MPP, and lastly the 3x25 MW Paya Pasir Medan that entered the Medan electricity system on 9 December 2016 for unit 1, 13 December 2016 for unit 2, and 16 December 2016 for unit 3.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

PENGHARGAAN

Pada tahun 2016, PLN menerima berbagai penghargaan baik secara langsung maupun melalui unit bisnis, anak usaha maupun pejabat strategis dari berbagai lembaga independen. Penghargaan yang diperoleh mencakup:

AWARDS & APPRECIATIONS

In 2016, PLN received numerous awards, directly and through business units, subsidiaries and strategic officials from various independent institutions. Awards obtained include:

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 (Aplikasi Info PLN)

Tanggal Date	31 Maret 2016 March 31, 2016
Penyelenggara Organization	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi RI
Kategori Category	Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 2016 Public Service Innovation System (SINOVIK) 2016

Markplus WOW Service Excellence Award 2016

Tanggal Date	13 Mei 2016 May 13, 2016
Penyelenggara Organization	Markplus, Inc
Kategori Category	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya meraih Gold Medal dalam kategori Public Service PT PLN (Persero) Jakarta Raya Power Distribution earned the Gold Medal in the category of Public Service

Indonesia Green Awards (IGA) 2016

Tanggal Date	21 Mei 2016 May 21, 2016
Penyelenggara Organization	The La Tofi School of CSR
Kategori Category	• Penyelamatan Sumber Daya Air • Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan • Mengembangkan Keanekaragaman Hayati • Mempelopori Pencegahan Polusi • Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu • Membangun Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan • Menjaga Kualitas Kesuburan Tanah dengan Pertanian Organik • Water Resources Conservation • Energy Conservation and Use of New and Renewable Energy • Biodiversity Research & Development • Pioneering of Pollution Prevention • Integrated Waste Management System Development • Forest Fire Prevention and Response Mechanism • Sustaining Soil Fertility Quality in Organic Farming

Social Business Inovation Award 2016

Tanggal Date	25 Agustus 2016 August 25, 2016
Penyelenggara Organization	Majalah Warta Ekonomi
Kategori Category	• Social Business Innovation Award kategori pembangkit listrik dengan program Penghematan Energi • Sofyan Basir sebagai Green CEO • Social Business Innovation Award in the category of Energy Saving Power Plant Program • Sofyan Basir as Green CEO

Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2016

Tanggal Date	8 September 2016 September 8, 2016
Penyelenggara Organization	Dunamis Human Capital
Kategori Category	• Kategori Best Reward Management Initiative • Best Employee Engagement. • Management Initiative Best Reward Category • Best Employee Engagement

Government Contracting Agency (GCA)/ Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/ PJPK tahun 2016

Tanggal Date	24 November 2016 November 24, 2016
Penyelenggara Organization	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kategori Category	• Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan mega proyek pembangkit listrik PLTU Batang 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah • Private Project Partnertship (PPP) in the construction of Steam Power Plant Batang 2 x 1,000 MW mega project in Central Java

Apresiasi CSR 2016

Tanggal Date	13 Desember 2016 December 13, 2016
Penyelenggara Organization	Sindo Media
Kategori Category	• Kategori Lingkungan • Kategori Budaya • Kategori Pendidikan • Kategori Sosial • Kategori Pemberdayaan Ekonomi • Kategori Inovasi Program CSR • Environment Category • Culture Category • Education Category • Social Category • Economic Empowerment Category • Innovation CSR Program Category

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2016

Tanggal Date	20 Desember 2016 December 20, 2016
Penyelenggara Organization	Komisi Informasi Pusat
Kategori Category	Peringkat 2 kategori BUMN dengan skor 82.35 dari total skor 100 Ranked 2nd Best State Owned Company category with a score of 82.35 out of 100

SERTIFIKASI

Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan dan Pelayanan Pelanggan meliputi:

1. ISO 14001:2004 & ISO 14001:2005 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
2. ISO 9001:2008 tentang Pelayanan Pelanggan
3. SMK3 & Zero Accident
4. Kelaikan Operasi,
5. OHSAS untuk Keselamatan dan Kesehatan pegawai dan
6. Sertifikasi dari Pihak Independen Lainnya.

Realisasi Kebijakan Sertifikasi tersebut membuat hamper seluruh Unit Bisnis dan Anak Usaha telah memiliki sertifikasi standar dimaksud, dengan rekapitulasi sertifikasi untuk tahun 2016 sebagai berikut:

CERTIFICATION

Since 2004, the intensive PLN implement the certification program and the Power Sector Customer Service include:

1. ISO 14001: 2004 & ISO 14001: 2005 on Environmental Management and Monitoring
2. ISO 9001: 2008 on Customer Service
3. SMK3 & Zero Accident
4. Operation Worthiness
5. OHSAS for occupational safety and health of employees and
6. Certification from Other Independent Parties.

Company's certification policies resulted that almost all Business Units and Subsidiaries are certified such standards, with a recapitulation of the certification for 2016 as follows:

Jenis Sertifikasi Certification	**Keterangan** Description	2015	2016
ISO 14001:2004 & ISO 14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	42	57
ISO 9001 : 2008	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	161	161
ISO 31000	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	1	1
SNI 19-14001:2005	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	2	1
OHSAS 16001 : 2007	Sertifikasi Manajemen Management Certificate	1	1
SMK3 & Zero Accident	Sertifikat Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Management Certificate	139	178
ISO 28000:2007 /SNI ISO 28000 : 2009	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok Supply Chain Security Management Certificate	2	2
OHSAS 18001 : 2007	Sertifikasi Keselamatan Kerja dan Keamanan Lingkungan Occupational Safety and Environment Management Certificate	2	2
ISO / IEC 17021 : 2006	Sertifikasi Sistem Mutu Quality System Certificate	0	2
BSN 401-2000	Sertifikasi Produk Product Certificate	0	7
SNI/ISO /IEC 17201 :2008	Sertifikasi Manajemen Lingkungan Environmental Management Certificate	0	6
	Total	**350**	**418**

1

Laporan Manajemen

Management Report

42 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

52 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

56 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

72 Direksi
The Board of Directors

Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Dalam pandangan Dewan Komisaris, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Perseroan, Direksi serta jajaran manajemen telah menerapkan sejumlah inisiatif yang sangat bagus, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja Perseroan.

In the opinion of the Board of Commissioners with all the limitations and challenges faced by the Company, the Board of Directors and management have put in place and executed various exceptional initiatives which brought about beneficial outcomes on the Company's performance.

Hasan Bisri
Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera untuk kita semua karena atas karuniaNya PT PLN (Persero) berhasil melalui tahun 2016 yang penuh tantangan. Manajemen berhasil mengembangkan kegiatan usaha, sehingga semakin memperkuat posisi PT PLN (Persero) sebagai bagian penting dari perjalanan pembangunan bangsa. Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada Dewan Komisaris, seperti tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Tujuan pelaksanaan tugas yang melekat pada Dewan Komisaris adalah untuk mendukung kinerja Perseroan, agar mampu memenuhi visi, misi dan target-target yang telah ditetapkan, dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik.

KONDISI USAHA

Dewan Komisaris menyadari bahwa tahun 2016 masih penuh dengan tantangan yang harus dihadapi Direksi dalam menjalankan usaha, baik yang berasal dari kondisi eksternal maupun internal. Kondisi eksternal Perseroan berupa pergerakan harga energi primer dan fluktuasi mata uang asing, sangat berpengaruh pada biaya operasi dan biaya investasi, karena sebagian besar biaya tersebut digunakan untuk pembelian energi primer, pembelian listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) dan pembayaran hutang luar negeri, yang sebagian besar dalam mata uang asing, terutama USD.

Dear Honorable Stakeholders,

On this occasion, please allow us to represent the Board of Commissioners and render our utmost gratitude to All Mighty God for all the blessings He bestowed upon us and all the best wishes to all of us. It is because of God's blessing that PT PLN (Persero) has managed through a very challenging and demanding 2016. The management has not only successfully developed its business operations, but also further strengthened its position as an important part of the nation-building journey. In line with the duties and responsibilities placed upon the Board of Commissioners, as stipulated in Law No. 40 of 2007 and Act No. 19 of 2003 on SOEs, the tasks of the Board of Commissioners are to supervise the actions and policies made by the management, to monitor the administration of the business in general, both in regards to the Company itself and the Company's business, and to provide advice or admonition to the Board of Directors.

The objectives of the tasks assigned upon the Board of Commissioners are to assist the Company in accomplishing targets as well as its vision and mission, all within the boundaries of good corporate governance.

BUSINESS CONDITIONS

The Board of Commissioners is completely and fully aware that 2016 was a year full of challenges faced by the Board of Directors in conducting business, originating either externally or internally. The Company faces external conditions in the form of primary energy price movements and foreign currency fluctuations, which have a major impact on operating costs and investment costs, as most of the costs are used for procurement of primary energy, private power purchase (IPP) and foreign debt repayments, which are mostly in foreign currency, especially USD.

Selain itu, kebijakan Pemerintah juga sangat mempengaruhi Perseroan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan tarif dasar listrik (TDL) dan kebijakan dalam energi primer. Sedangkan dari dalam internal Perseroan, tantangan yang dihadapi antara lain adalah program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35.000 MW termasuk proyek transmisi dan distribusinya. Program besar tersebut berpengaruh besar terhadap kebijakan PLN di bidang pendanaan untuk investasi, penyediaan energi primer, kesiapan SDM serta organisasi.

Salah satu resiko yang menghadang adalah penyelesaian pembangunan proyek yang tidak tepat waktu, sebagai akibat adanya kendala sinkronisasi penyelesaian proyek pembangkit, jaringan transmisi dan distribusinya. Resiko tersebut timbul akibat kelemahan perencanaan, pemilihan lokasi proyek, pemilihan kontraktor, klausul kontrak, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Selain itu, belum adanya strategi jangka panjang dalam penyediaan energi primer juga memberikan kontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh Perseroan. Berbagai tantangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana pengembangan sistem kelistrikan jangka panjang, dalam mewujudkan investasi dan operasi usaha kelistrikan yang efisien. Oleh karena itu, PLN membutuhkan bantuan dari pemerintah, serta partisipasi dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan seluruh program pengembangan 35.000 MW.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dasar penilaian kinerja Direksi tahun 2016, terutama terkait dengan target kinerja yang telah disepakati, yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang telah dilakukan oleh Direksi.

Penilaian kinerja Direksi tidak dapat dipisahkan dari rencana besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan strategis nasional yaitu "Pembangkit 35.000 MW untuk Indonesia". Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan teknis pelaksanaan, baik di tingkat Departemen Teknis maupun kebijakan strategis yang mendukung program tersebut.

PLN mendapat tugas untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, lengkap dengan infrastruktur transmisi dan distribusi, di luar tugas untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit yang tengah dalam masa konstruksi dengan kapasitas total 7.000 MW. Sebagai wujud pelaksanaan program 35.000 MW, maka pada tahun 2016 PLN telah menandatangani PPA dengan IPP sebesar 7.747 MW atau 41% dari target sebesar 19.000 MW. Jumlah PPA yang ditandatangani tahun 2016 tidak tercapai karena adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan yang harus diambil terkait dengan perubahan pada jumlah dan kapasitas IPP sesuai dengan RUPTL.

In addition, government policies also greatly affect the Company, especially those related to the basic electricity tariff policy (TDL) and the policy in primary energy. Internally, the challenges faced include the construction of a 35,000 MW electricity infrastructure including its transmission and distribution projects. This large program has a major impact on PLN's policy on funding for investment, primary energy supply, human resources, and organizational readiness.

One of the major risks faced is project completion delays, because of power plants project synchronization constraints, transmission network and its distribution. Moreover, the risks arise from planning weaknesses, selection of project sites, and selection of contractors, inappropriate contract clauses, implementation, and control. In addition, the absence of a long-term strategy in the provision of primary energy also contributes to the challenges faced by the Company. These challenges do affect the implementation of the long-term power system development plan, in realizing investment and efficient operation of electricity business. For that reason, PLN calls for assistance from the government, as well as the participation of businesses, communities and other stakeholders to accomplish the entire 35,000 MW development program.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The basis for the Board of Directors performance assessment in 2016 is mainly related to the agreed performance targets set forth in the Company's Work Plan and Budget Plan (RKAP) in 2016. In addition, the Board of Commissioners also takes into account the implementation of good corporate governance (GCG) by the Board of Directors.

The Board of Directors performance evaluation is inseparable from the overall plans that have been set by the government, one of which is to promote the development of electricity infrastructure. In that context, the government has established a national strategic development program called "Generating 35,000 MW Power for Indonesia". The government has also issued various regulations on its implementation, both at the Technical Department level as well as the strategic policies that support the program.

PLN is tasked with the responsibilities for completion of the development program, complete with transmission and distribution infrastructure, coupled with the task of completing the construction of a power plant under construction with a total capacity of 7,000 MW. As an effort to accomplish the 35,000 MW program, PLN has signed PPAs for 7,747 MW or 41% of the 19,000 MW target in 2016. The amount of PPAs signed in 2016 were not achieved due to policy adjustments that had to be taken in relation to changes in the amount and capacity of the IPP in accordance with the RUPTL.

Realisasi penambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2016 adalah 3.174 MW. Beberapa pembangkit yang belum bisa beroperasi pada tahun 2016 dikarenakan: i) keterlambatan pembangunan proyek transmisi untuk penyaluran beban dan dukungan untuk operasi awal pembangkit karena kendala pembebasan lahan; dan ii) keterlambatan didalam proses konstruksi terutama terjadinya gangguan di dalam pelaksanaan pengetesan pembangkit.

Rasio elektrifikasi merupakan indikator untuk mengukur apakah seluruh penduduk RI telah menikmati listrik yang disediakan oleh negara dalam hal ini adalah PLN. Indikator yang diukur adalah jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki, dibandingkan dengan total rumah tangga Indonesia. Dengan jumlah rumah tangga di Indonesia sebesar 66.489.408 dan jumlah pelanggan rumah tangga yang terlistriki oleh PLN sebesar 59.243.671. Sedangkan jumlah pelanggan rumah tangga non-PLN yang terlistriki sebesar 1.441.212, maka rasio elektrifikasi pada tahun 2016 mencapai 91,27% meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 88,30%.

Dari aspek produksi tenaga listrik, pada tahun 2016 Perseroan menghasilkan 248.611 GWh, lebih besar dari tahun 2015 sebesar 233.981 GWh. Produksi tenaga listrik tersebut sebagian besar yaitu 66,96 % berasal dari produksi sendiri PLN sebesar 166.457 GWh. Sedangkan penjualan tenaga listrik, pada tahun 2016 mencapai sebesar 216.004,29 GWh meningkat 6,49 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 202.846 GWh. Besarnya penjualan tenaga listrik terutama berasal dari penjualan kepada pelanggan industri yang mencapai 68.145 GWh meningkat 6,35 % dibanding tahun 2015 sebesar 64.079 GWh.

Dari sisi keuangan, Perseroan pada tahun 2016 berhasil membukukan laba sebesar Rp10,55 triliun. Laba ini ditopang oleh peningkatan pendapatan usaha pada tahun 2016 mencapai Rp222,821 triliun atau meningkat 2,52% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2015 sebesar Rp217,346 triliun .

Peningkatan pendapatan usaha tersebut, terutama ditopang oleh pendapatan dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp214,139 triliun yang meningkat 2,05 % dibanding tahun 2015 sebesar Rp 209,844 triliun. Berbagai pencapaian kinerja Direksi tersebut tercermin pada capaian KPI Direktorat yang rata-rata mencapai diatas 80 dari target 100.

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja tersebut, yang menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan upaya maksimal untuk menjadi bagian dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan kebijakan strategis yang telah diimplementasikan oleh Direksi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja usaha Perseroan. Misalnya terkait dengan efisiensi operasi dan keandalan, perusahaan mengambil langkah strategis melalui penerapan program berkelanjutan *Operasional Performance Improvement* (OPI), yang bertujuan untuk meningkatkan performa pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

The completion of additional generating capacity in 2016 is 3,174 MW. Some of the reasons that plants that have not been able to operate by 2016 are due to: i) delay in the construction of transmission projects for the disbursement of loads and support for initial plant operations due to land acquisition constraints; and ii) delays in the construction process, especially the occurrence of disturbance in the testing implementation of the plants.

Electrification ratio is an indicator to measure the level of Indonesians that enjoy the electricity provided by the state in this case PLN. The measured indicator is the number of households that are connected to the electricity grid, compared to the total number of households in Indonesia. With the number of households in Indonesia amounting to 66,489,408 and the number of households connected to the PLN electricity grid amounted to 59,243,671. Meanwhile the number of households for non-PLN amounted to 1,441,212, this means that the electrification ratio in 2016 reached 91.27%, an increase from 2015 of 88.30%.

In terms of electricity production, in 2016 the Company generated 248,611 GWh, greater than 2015 of 233,981 GWh. The electric power production largely i.e. 66.96% came from PLN's own production amounting to 166 457 GWh PLN. Electricity sales in 2016 reached 216,004.29 GWh, an increase of 6.49% compared to 2015 amounted to 202,846 GWh. The amount of electricity sales comes primarily from industrial customers sales and reached 68,145 GWh, an increase of 6.35% compared to 2015 of 64,079 GWh.

Financially, the Company in 2016 managed to book a profit of Rp10.55 trillion. This profit was sustained by an increase in operating revenues in 2016 reached Rp222, 821 trillion, an increase of 2.52% compared to revenues in 2015 amounting to Rp217, 346 trillion.

The increase in operating revenues was mainly due to electricity sales amounting to Rp214.139 trillion, increasing 2.05% compared to 2015 at Rp 209.844 trillion. These various achievements of the Board of Directors are reflected in the achievement of KPI Directorate index averaging over 80 out of 100.

The Board of Commissioners appreciates the achievements made by the Board of Directors; this demonstrates that the Board of Directors has made all possible efforts to realize the development program outlined by the government. The implemented strategic policies by the Board of Directors have had a positive impact on the Company's business performance. In relation to operating efficiency and reliability, the Company has taken strategic steps through the implementation of its on-going Operational Performance Improvement (OPI) program, which aims to improve performance at the highest level in power generation, transmission, distribution, and human resources.

TINGKAT KESEHATAN

Kinerja Direksi tersebut telah menghasilkan tercapainya KPI Manajemen PT PLN (Persero) tahun 2016 dengan Skor 95,52 (masuk pada golongan perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AAA. Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja manajemen tersebut sudah baik dan harus dipertahankan atau sedapat mungkin ditingkatkan. Atas pencapaian tersebut Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada manajemen.

COMPANY'S HEALTH LEVEL

In general, management performance is reflected on the Health Level / KPIs achievement with a score of 95.52 which placed the Company into the healthy State Owned Enterprise category with classification of "AAA".
The Board of Commissioners view that the achievement is admirable and that it must be continuously maintained or improved as much as possible. For this achievement, the Board of Commissioners expresses its appreciation to and congratulates the management.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa berupaya menjadi bagian dalam perjalanan usaha Perseroan bersama manajemen, sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang tentang BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi. Metode penyampaian saran antara lain dilakukan melalui rapat konsultasi dengan Direksi ataupun melalui surat.

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners strives to become part of the Company's business journey, corresponding with the inherent role and duties. In carrying out its duties in oversight and advice, the Board constantly communicates with the Board of Directors through coordination meetings and or by memo.

Masukan dan saran serta informasi hasil pengawasan yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain berasal dari masukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut melakukan analisis, kemudian hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya dikomunikasikan dengan Direksi.

Feedback and suggestions made by Board of Commissioners as well as oversight outcomes are submitted to the Board of Directors, some of which originated from committees responsible to the Board of Commissioners. These committees perform analysis, and the findings are submitted to the Board of Commissioners and subsequently to the Board of Directors. Throughout 2016, the Board of Commissioners convened meetings with the Board of Directors.

Sepanjang tahun 2016, dalam rapat konsultasi dengan Direksi, Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi, yang antara lain menekankan agar Direksi terus memperkuat landasan dan menggali potensi dari seluruh sumber daya PLN yang dimiliki, termasuk kompetensi SDM yang tersedia, agar dapat secara optimal mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perseroan.

On those occasions, oversight outcomes and advice were presented to management, including mandates, opinions, suggestions and advice on human resource competence and strategies to strengthen the Company's business foundation and explore other potentials.

Dewan Komisaris secara konsisten telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan berbagai tugas operasional yang dijalankan Direksi melalui pertemuan berkala, kunjungan langsung ke wilayah, anak perusahaan serta lokasi pembangunan proyek ketenagalistrikan.

The Board of Commissioners consistently supervises and provides advise on the progress of the Work Plan and Budget (RKAP) and on a variety of operational tasks undertaken by the Board of Directors through regular meetings and power plant site visits, and visits to subsidiaries and electricity project construction sites.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain berhasil mempersembahkan kinerja yang baik serta kondisi Perseroan yang tetap sehat, manajemen juga masih berpegang teguh pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Dewan Komisaris berpandangan seperti itu, di antaranya dengan memperhatikan komitmen manajemen menindaklajuti temuan auditor, baik internal maupun eksternal.

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT

In addition to have successfully presented a commendable performance for continuing good performance, the management also upheld good corporate governance (GCG). The Board of Commissioners has the opinion that management must remain committed in following up on finding of auditors, both internal and external.

Dari pemantauan kinerja, Dewan Komisaris berpendapat bahwa sepanjang tahun 2016, hampir seluruh temuan auditor internal dan auditor eksternal telah ditindaklanjuti sedangkan sisanya sedang dalam proses. Atas temuan-temuan tersebut, Dewan Komisaris beserta Komite Audit secara berkala melakukan pembahasan dengan Satuan Pengawasan Intern. Dewan Komisaris berpendapat bahwa manajemen telah menindaklanjuti seluruh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu membuktikan bahwa manajemen memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

From performance monitoring, the Board of Commissioners concluded that almost all of the findings of internal auditors and external auditors have been followed-up throughout 2016, while the rest are still in process. Based on the findings, the Board of Commissioners and the Audit Committee periodically discussed with the Internal Audit Unit.
The Board of Commissioners finds that management has followed up on all decisions made in the General Meeting of Shareholders (AGM), demonstrating that the management has a strong commitment for good corporate governance.

Selama tahun 2016, Direksi telah merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta melakukan sosialisasi kebijakan internal baru kepada seluruh jajaran perangkat Perseroan. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practises* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di perusahaan BUMN.

During 2016, the Board of Directors has successfully improved various governance program and dissemination of new internal policies. The entire program was implemented with best practices and to the latest GCG procedings for State-Owned Enterprises.

Kinerja penerapan GCG di PT PLN (Persero) ditunjukkan melalui skor GCG. Pelaksanaan penilaian implementasi GCG tahun 2016 di PT PLN (Persero) dilakukan oleh Assessor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Assessment dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

The performance of GCG implementation in PT PLN (Persero) is made known through a GCG score. The GCG implementation assessment in 2016 in PT PLN (Persero) was performed by an Independent Assessor: the Supervisory Board of Finance and Development (BPKP). The assessments based on the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decision No. 16 / S.MBU / 2012 on the Indicators / Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Secara keseluruhan, hasil assessment terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai total skor sebesar 87,14. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai kualifikasi Sangat Baik.

Results of the assessment for PT PLN's GCG for the period of 2016 reached a total score of 87.14. This indicates that the application of GCG in PT PLN (Persero) for the period 2016 falls under the excellent classification.

Sebagai bagian dari assessmen terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero), maka hasil assessmen atas penerapan GCG di Dewan Komisaris PT PLN (Persero) mencapai 92,41 dengan kualifikasi Sangat Baik.

As part of the assessment of GCG at PT PLN (Persero), the assessment result of GCG implementation in PT PLN (Persero) Board of Commissioners reached 92.41 with an excellent qualification.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dalam pengelolaan *whistle blowing system* (WBS), Dewan Komisaris berpandangan kebijakan manajemen harus menempatkan WBS sebagai bagian penting dalam manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan, sebab merupakan bagian dari upaya tindakan preventif dan proaktif manajemen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

VIEWS TO THE ADOPTION OF WHISTLE BLOWING SYSTEM

For the management of the whistle blowing system (WBS), the Board of Commissioners is of the opinion that management policies must position WBS as an important part of the Company's risk management and internal control system, as it is part of preventive and proactive management action in implementing good corporate governance.

Penerapan WBS terintegrasi dengan upaya menjaga kesinambungan usaha Perusahaan. Karena itulah, Dewan Komisaris mendukung dan ikut melakukan pengawasan terhadap implementasi WBS di Perseroan. Dewan Komisaris berharap komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya implementasi WBS terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

The WBS application must be integrated with efforts in maintaining Company's business continuity. Thus, the Board of Commissioners espouses and supervises the Company's implementation of WBS. The Board of Commissioners expects strong commitment to good corporate governance; in particular the implementation of WBS to be continuously enhanced and implemented on an on-going basis.

KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2016, ketiga komite ini telah menjalankan fungsinya dengan baik,efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berbobot kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi.

Komite Audit (KA)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit yang dibentuk bersifat independen, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2016 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen Perseroan, Satuan Audit Internal (SAI) dan Auditor Eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut dari Manajemen Perusahaan.

Pada tahun 2016, Komite Audit telah melakukan telaahan, pendapat dan saran atas laporan manajemen, hasil temuan SPI dan auditor eksternal, usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dekom terkait penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR) dan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB). Keseluruhan proses yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, secara ekonomis dan secara yuridis.

Komite Manajemen Risiko (KMR)

Dewan Komisaris juga telah memberikan pertimbangan dan saran atas berbagai keputusan strategis yang akan dilakukan oleh Direksi berdasarkan analisis Komite Manajemen Risiko. Masukan-masukan yang telah diterima dari Komite Manajemen Risiko sangat bermanfaat bagi Dewan Komisaris dalam merumuskan pertimbangan kepada Direksi dalam pengambilan keputusan strategis.

Komite ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam memberikan pertimbangan. Salah satu tugasnya adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis perusahaan, yang dimintakan pertimbangan dan/atau persetujuan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pada tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melakukan telaahan pendapat dan saran atas rencana Direksi terkait rencana jangka panjang, usulan Direksi yang memerlukan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris terkait pinjaman, dan transaksi lain guna memitigasi risiko baik secara teknis, finansial maupun legal.

PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Board of Commissioners has established support units, namely the Audit Committee, Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2016, all Committees have performed its functions well, efficiently and effectively so as to provide substantial recommendations to the Board of Commissioners which were subsequently forwarded to the Board of Directors.

Audit Committee (KI)

The Board of Commissioners ensured that the Audit Committee was formed independently, thus providing substantial benefits to the Board of Commissioners in carrying out its functions in oversight and advice to the Board of Directors. All findings, remarks, recommendations, reviews and analysis made by the Audit Committee during the year 2016 were communicated and discussed with the management, Internal Audit and the external auditor, and reported to the Board of Commissioners for improvement to be made and followed-up by management.

In 2016, the Audit Committee conducted investigations and provided advice on the management report, the findings of SPI and external auditors, recommendations Board of Directors that require the approval or recommendation from the Board of Commissioners regarding the removal Doubtful accounts receivable (PRR) and Non-Operating Fixed Assets (ATTB), so that the the findings in question can be justified technically, economically and legally.

Risk Management Committee

The Board of Commissioners has submitted advise and suggestions to the Board of Directors based on considerations and findings made by the Risk Management Committee. Recommendations and opinions presented by the Risk Management Committee were very beneficial to the Board of Commissioners in formulating advice to the Board of Directors in its strategic decision-making.

This Committee plays a strategic role, especially in delivering judgments. For one of its tasks as an independent appraiser is to conduct reviews on the strategic policies of the Company, to be delivered for consideration or approval by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and with assessment in managing risk of corporate activities that could contain potential risks harming the Company's performance.

In 2016, the Risk Management Committee conducted analysis, provided opinions and suggestions on the Board of Directors related to long-term plan, and on Board of Directors proposals and recommendations that require the approval from the Board of Commissioners on loan transactions to mitigate the possible onset of risks, whether technically, financially or legally.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

Berdasarkan ketentuan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sesuai surat Menteri BUMN Nomor: S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, maka dalam KNR terdapat anggota komite yang berasal dari pihak manajemen yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, sehingga segala rekomendasi yang disampaikan oleh Komite kepada Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hasil analisisnya telah dimanfaatkan dengan baik oleh Dewan Komisaris dalam memberikan pertimbangan kepada Direksi. Komite ini juga sangat penting dalam ikut menjaga kesinambungan organisasi Perseroan. Sebab salah satu tugasnya adalah menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) dengan baik.

Pada tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaahan pendapat dan saran atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris terkait pengisian personil Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan serta besaran remunerasi Direksi PT PLN (Persero).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Terhadap prospek usaha tahun 2017 yang telah disusun manajemen, Dewan Komisaris memandang bahwa pertimbangan yang dijadikan alasan dalam menyusun target tersebut sangat rasional. Pijakan terhadap proyeksi yang dibuat oleh pemerintah adalah keputusan yang sangat baik, mengingat kegiatan usaha Perseroan merupakan bagian penting dari rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2017, seperti ditargetkan oleh pemerintah cenderung bergerak positif. Kondisi itu akan berdampak positif terhadap kegiatan dunia usaha serta pendapatan masyarakat. Karena itulah, kinerja Perseroan berpotensi ikut bergerak secara positif seiring dengan perkembangan faktor eksternal yang membaik.

Selain itu, berbekal kinerja yang telah dicapai oleh Direksi dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sangat realistis. Apalagi ditunjang dengan kemampuan Direksi mengambil inisiatif strategis di tengah lingkungan usaha yang penuh dengan tantangan, tentu sejumlah target yang telah ditetapkan sangat memungkinkan untuk diraih.

Kendati demikian, Dewan Komisaris berpandangan adanya sejumlah hal spesifik yang perlu diperhatikan Direksi untuk tahun 2017, yaitu:

- Mencermati perkembangan makro ekonomi, antara lain pergerakan harga batu bara dan minyak bumi yang cenderung meningkat dan fluktuasi kurs valuta asing, serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi keuangan, operasi maupun investasi, pinjaman valuta asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

The Nomination and Remuneration Committee (KNR)

Under the provision of the Nomination and Remuneration Committee membership (KNR) in accordance with Minister of SOE Letter No. S-371 / MBU / 06/2015 dated June 26, 2015, KNR committee members must consist of members from the Company who hold a managerial position under the Board of Directors Human resource management, so that any recommendation submitted by the Committee to the Board of Commissioners can be properly accounted for. The results of analysis have been beneficial for the Board of Commissioners in providing recommendations and opinions to the Board of Directors. This Committee is also very important in helping to maintain the continuity of the Company's organization. For one of its tasks is to examine and monitor to ensure that the Board of Directors has established the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) appropriately and impartially.

In 2016, the Nomination and Remuneration Committee conducted analysis, provided opinions and suggestions following a proposal by Board of Directors that required the approval or recommendation of the Boards of Commissioners and Directors relating to boards of commissioners and directors of subsidiaries, and their remuneration.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS

Concerning the business prospects for 2017 compiled by the management, the Board of Commissioners has the point of view that the foundation of judgment in preparing the business target is viable and rational. The basis of the forecast prepared by the government is sound, considering the fact that the Company's business operation is an important part of the government's plan. Indonesia's economic trend for 2017, as forecasted by the government, tends to be on the positive side. Should it be true, it will definitely give a positive impact to the Company business. For this reason, the Company's performance may likely further accelerate along with the external economic improvement factors.

Moreover, armed with the admirable Company performance presented by the Board of Directors in the past few years, The Board of Commissioenrs has the opinion that the business forecast prepared by the Board of Directors is realistic. Furthermore, with the Board of Directors ability to take strategic initiatives in midst of business environment full of challenges, the Board of Commissioners has the confidence that the business targets are achievable.

Nevertheless, the Board of Commissioners deemed that a number of specific matters need to be considered the by the Board of Directors for 2017, namely:

- To observe the macroeconomic development, among others, the price of coal and oil are likely to increase and fluctuations in foreign exchange rates which will impact the Company's performance, financially, operationally and investments wise, due to short term and long term loans in foreign currency.

- Menjaga dan memastikan bahwa perusahaan memiliki *likuiditas* yang memadai untuk operasional perseroan dan pembiayaan proyek-proyek investasi.
- Berupaya secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dengan menyelesaikan proyek-proyek investasi secara tepat waktu, meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian material dengan tertib, mengendalikan bauran energi, serta menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
- Memastikan pembangunan pembangkit tenaga listrik, baik pembangkit milik PLN maupun milik swasta, harus disinkronkan dengan pembangunan transmisi dan gardu induk.
- Melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memperkecil angka *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) dan angka *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI).
- Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi, yang mampu menyediakan informasi yang akurat, handal dan tepat waktu .
- Memastikan SDM tersedia secara tepat waktu dan berkualitas.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi kaidah-kaidah Good Corporate Governance (GCG) serta berpegang pada prinsip kehati-hatian.

- The Board of Directors must maintain and ensure that the Company remain sufficiently liquid to back the Company's operational needs and project financing.
- The Board of Directors should take all necessary steps ensuring projects to be completed on schedule, improve maintenance, control material in an orderly manner, control energy mix, and lower electricity BPP.
- To assure the construction power plants both owned by PLN and IPPs to be synchronized with the construction of the transmission lines and substations.
- To make maximum effort to improve customer service by minimizing System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) and System Average Interruption Duration Index (SAIDI) numbers.
- To further develop Information Technology System to be capable of providing accurate, reliable and timely information.
- To ensure the availability of Human Resources in a timely and qualified manner.
- The Company's Work Plan and Budget Plan to be implemented adhering to the applicable laws and regulations, compliance with Good Corporate Governance (GCG) principles, and adherence to the principle of prudence.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

- Komposisi Dewan Komisaris PLN selama tahun 2016 mengalami 3 kali pergantian, sebagai berikut:
- Komisaris Utama Kuntoro Mangkusubroto mengajukan pengunduran diri dan telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) Nomor: SK-106/MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016.
- Atas jabatan Komisaris Utama yang lowong, maka Komisaris Hasan Bisri ditetapkan merangkap jabatan sebagai PLT Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) Nomor: SK-106/MBU/ 05/2016 tanggal 24 Mei 2016.
- Komisaris Andin Hadiyanto mengajukan pengunduran diri karena telah mendapat tugas dari Pemerintah sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk South East Asia Voting Group (SEAVG) yang berkedudukan di Washington DC dan telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) Nomor: SK-266/MBU/12/2016 tanggal 1 November 2016.

CHANGES TO BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

- The composition of the Board of Commissioners for 2016 PLN underwent three changes, as follows:
- President Commissioner Kuntoro Mangkusubroto submitted his resignation and was dismissed with honor by the Minister of State Enterprises as per the GMS of PT PLN (Persero) Number: SK-106 / MBU / 05/2016 dated May 24, 2016..
- Upon the vacancy of the President Commissioner position, Commissioner Hasan Bisri has been appointed concurrently as PLT President Commissioner based on Decision of Minister of SOE at the GMS of PT PLN (Persero) Number: SK-106 / MBU / 05/2016 dated May 24, 2016.
- Commissioner Andin Hadiyanto submitted his resignation as having been assigned by the government as the Executive Director of the World Bank for the Washington DC-based Southeast Asia Voting Group (SEAVG) and has been honorably dismissed under the Decision of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero) Number: SK-266 / MBU / 12/2016 dated November 1, 2016.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan tugasnya di PLN, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama bertugas. Sedangkan kepada jajaran anggota Dewan Komisaris yang baru, Dewan Komisaris menyampaikan selamat bergabung semoga mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara melalui PT PLN (Persero).

To the members of the Board who have served and contributed their time and effort in PLN, the Board of Commissioners conveys its highest gratitude. The Board of Commissioners also welcomes the new members of the Board of Commissioners, with the highest confidence to contribute the best for the country through PT PLN (Persero).

Komposisi Dewan Komisaris PT PLN (Persero) pada akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) at end of 2016 is as follows:

Jabatan	Nama Name	Position
Plt. Komisaris Utama dan Komisaris	Hasan Bisri	Acting President Commissioner and Commissioner
Komisaris Independen	Oegroseno	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Darmono	Independent Commissioner
Komisaris	Budiman	Commissioner
Komisaris	Harry Susetyo Nugroho	Commissioner
Komisaris	Jarman	Commissioner
Komisaris	Aloysius K. Ro	Commissioner

PENUTUP

Kepada Direksi dan jajaran di bawahnya, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja usaha tahun 2016 yang baik, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Dengan kinerja keuangan yang positif, kondisi perlambatan ekonomi serta sejumlah indikator makro yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap dunia usaha, telah dibuktikan oleh Direksi bahwa situasi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris berharap agar Direksi dan jajarannya tetap melakukan inovasi-inovasi dan inisiatif strategi yang baik serta relevan, sehingga kinerja Perusahaan tetap tumbuh. Bahkan lebih baik dari perolehan tahun 2016 seperti target yang telah disusun.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Perseroan. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Kepada para pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal Perseroan, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2016.

CLOSING STATEMENT

To the Board of Directors and management, the Board of Commissioners gives the highest appreciation for the achievements the Board of Directors made in 2016, despite the many challenges faced. With an encouraging financial performance in the face of the global economic slowdown as well as a number of negative economic indicators that presented negative impact to the business world, the Board of Directors has proven that the situation did not significantly hinder the Company's performance.

The Board of Commissioners trust that the Board of Directors and management will continue to innovate and formulate relevant strategic initiatives to further enhance the Company's performance, even better than that of 2016.

The Board of Commissioners also expressed gratitude for the trust given by the shareholders to be a part of the Company's business journey, even more so with the direction and guidance given by the shareholder.

To stakeholders both external and internal of the Company, the Board of Commissioners expresses its deepest appreciation for the cooperation already at hand. With the unrelenting support of the stakeholder, the management has able to present an admirable business performance for fiscal year 2016.

Hasan Bisri
Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners

Hasan Bisri
Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan Komisaris
Acting President Commissioner and Commissioner **1.**

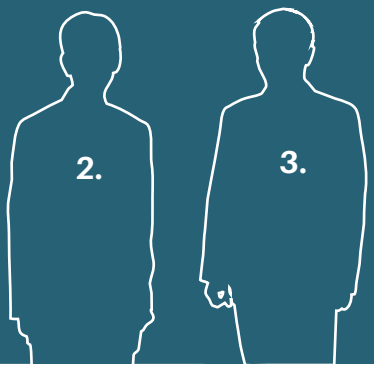

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner **2.**

Oegroseno
Komisaris Independen
Independent Commissioner **3.**

Harry Susetyo Nugroho
Komisaris
Commissioner
4.

Aloysius K. Ro
Komisaris
Commissioner
5.

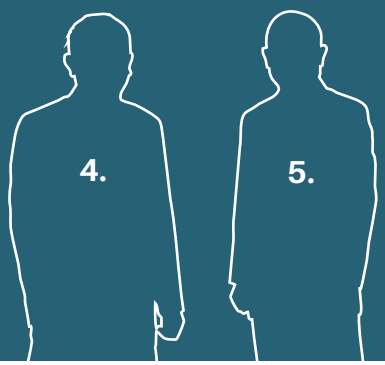

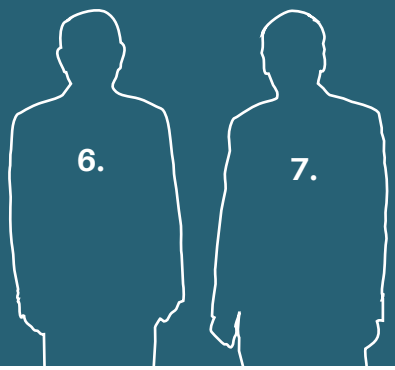

Budiman
Komisaris
Commissioner
6.

Jarman
Komisaris
Commissioner
7.

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

Sepanjang tahun 2016, manajemen telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja usaha yang positif serta menjadi bagian penting dalam program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah.

Throughout 2016, the management has spawned a number of strategic policies as a foundation for the achievement of business performance, as well as underpinning strategies to expedite infrastructure development initiated by the government.

Sofyan Basir
Direktur Utama
President Director

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama manajemen menyampaikan Laporan Tahunan PT PLN (Persero) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, sebagai wujud tanggung jawab kami dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Kami menyadari, tahun 2016 yang sudah kita lalui masih penuh dengan dinamika, walaupun tampak ada indikasi lebih baik. Namun dalam kondisi apa pun, manajemen harus melaluinya dengan serangkaian strategi usaha agar tidak hanya menghasilkan kinerja bisnis yang baik, tetapi juga mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Negara dalam kapasitas Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara.

KONDISI UMUM

Kinerja bisnis Perseroan tidak dapat dipisahkan dari kondisi makro yang sedang berlangsung. Ketika kondisi makro ekonomi tidak stabil, maka pasar keuangan akan terpengaruh. Ekspektasi pasar terhadap imbal hasil berpotensi meningkat, sehingga biaya mendapatkan dana bisa lebih mahal. Sementara Perseroan juga masih membutuhkan dana dari lembaga keuangan, pasar modal, serta lainnya untuk membiayai berbagai aktivitas proyek.

Pada tahun 2016, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat global tidak merata. Pertumbuhan di negara-negara maju berjalan lambat, kecuali ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terus membaik.

Perbaikan ekonomi AS seperti tercermin dari menguatnya sektor tenaga kerja dan peningkatan inflasi, telah mendorong kenaikan suku bunga acuannya, yaitu Fed Fund Rate (FFR) pada Desember 2016.

Dear Honorable Stakeholders,

On this occasion, please allow us, on behalf of the Board of Directors, to present our Annual Report PT PLN (Persero) for the Fiscal Year ended December 31, 2016, as a manifestation of our responsibility in running the Company's business.

We are fully aware that 2016 was a very dynamic, tough and challenging year, though there were some positive indicators. However in any condition, we must all undertake strategies not only for the sake of good financial performance, but also able to fulfill the social mission set forth by the government in our capacity as a State-Owned Enterprise.

CHALLENGES

The Company's business performance cannot be separated from the ongoing macro-economic conditions. During unstable macro-economic conditions, the financial markets will also be affected. Market expectations on returns could potentially rise, and the cost of obtaining funds could also be more expensive. While the Company is still in need of affordable funding from financial institutions, capital markets, and others to finance various projects, this uncertainty requires consideration.

In 2016, Bank Indonesia noted that global economic growth is still disproportionate. Economic growth in the developed countries is on the down side, except in the United States, which shows sign of improving.

The US economic recovery is reflected in the strengthening of the labor market and rising inflation, pushing up the benchmark Fed Fund Rate (FFR) in December 2016.

Kendati demikian, di tengah situasi perekonomian global yang masih dalam proses pemulihan, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Perekonomian domestik ditopang oleh permintaan di dalam negeri yang terjaga.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,02%, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,79%. Pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut didukung oleh konsumsi dan investasi, khususnya pembangunan infrastruktur.

Sedangkan kurs rupiah, seperti tercermin dari kurs tengah Bank Indonesia, relatif stabil. Bahkan rupiah sempat menguat tipis hingga Oktober, namun tertahan di bulan November pasca Pemilu AS. Penguatan Rupiah didukung oleh sentimen positif terhadap perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pada tahun 2016, Perseroan telah menjalankan sejumlah kebijakan strategis, selain untuk merespons kondisi eksternal, juga bertujuan demi pengembangan usaha Perseroan. Beberapa kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Pelaksanaan implementasi tarif yang diberlakukan oleh pemerintah secara proaktif dengan melakukan sosialisasi kepada pelanggan untuk menyukseskan tarif baru.
3. Perseroan melakukan kerja sama Forex Line dengan beberapa Bank BUMN untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar.

KENDALA DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Mengacu kepada pencapaian kinerja operasi Perseroan yang didominasi oleh keterbatasan infrastruktur ketenagalistrikan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi operasi, Perseroan telah mengambil langkah-langkah:

1. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal pembebasan lahan untuk proyek pembangkit maupun transmisi termasuk perintisan upaya untuk menerapkan Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Melakukan amandemen kontrak dalam hal deviasi kontrak.
3. Melakukan penyelesaian permasalahan untuk kontraktor yang tidak mampu melalui langkah pengambilalihan pekerjaan.
4. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk IPP (pihak swasta).
5. Selain hal-hal yang terkait dengan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan dari sisi efisiensi operasi dan keandalan, perusahaan mengambil langkah strategis melalui penerapan program berkelanjutan *Operational*

Nevertheless, amidst the global economic situation still in the process of recovery, the Indonesian economy however has showed sign of improvements, with the domestic economy sustained by domestic consumption.

The Central Statistics Bureau data, has noted that Indonesia's economic growth in 2016 reached 5.02%, better than that of 2015 at 4.79 %. Improved economic growth is supported by domestic consumption and investment, particularly in infrastructure development.

Meanwhile, the Rupiah exchange rate, as reflected in the exchange rate of Bank Indonesia, remains stable. Though the Rupiah rose slightly to October, it held back in November after the US election. The strengthening of the Rupiah is owed to positive sentiment towards the domestic economy, in line with relatively stable macroeconomic conditions and implementation of the well-received Tax Amnesty Law.

STRATEGIC POLICY

In 2016, the Company has formulated a number of strategic policies, as well as overcoming challenges posed by external conditions. Likewise, implementation of proper policies aspire further development of the Company's business. Some of these policies include:

1. Solving outstanding predicaments and the development of electricity infrastructure.
2. Proactive information dissemination to the public on the new tariffs scheme imposed by the government.
3. The Company collaborates Forex Line with several state-owned banks to anticipate fluctuation in foreign currencies.

KENDALA DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Referring to the Company's operating performance constraints as created by electricity infrastructure limitations and affecting the effectiveness and efficiency of operations, the Company has taken:

1. To coordinate with relevant agencies in terms of land acquisition for power generation and transmission projects, including pioneering efforts to implement Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development of Public Interest.
2. To amend contracts in the circumstances of contract deviation.
3. To take over projects that contractors cannot fulfill.
4. To encourage financial closing settlements for IPP (private parties).
5. In addition to operational efficiency and reliability of electricity infrastructure matters, to take strategic steps through the implementation of ongoing program Operational .Performance Improvement (OPI), which aims

Performance Improvement (OPI), yang bertujuan untuk meningkatkan performa pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

to improve performance the highest level in the areas of power generation, transmission, distribution and human resources.

PENGHARGAAN

Pada tahun 2016, Perseroan telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan dari lembaga yang kredibel. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pihak eksternal atas kinerja bisnis Perseroan yang terus membaik. Di antara penghargaan dimaksud adalah:

- Penghargaan Government Contracting Agency (GCA)/ Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/PJPK tahun 2016 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas keberhasilan PLN dalam implementasi Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS)/ Private Project Partnertship (PPP) pembangunan mega proyek pembangkit listrik PLTU Batang 2 x 1.000 MW di Jawa Tengah.
- Dua penghargaan dari Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2016, yaitu dalam kategori Best Reward Management Initiative dan Best Employee Engagement.
- Penghargaan Social Business Innovation Award untuk kategori pembangkit listrik dengan program penghematan energi dan Green CEO Award 2016. Penghargaan diberikan oleh Warta Ekonomi Intelligence Unit yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

AWARDS & APPRECIATIONS

In 2016, the Company secured a number of awards from several credible institutions. These awards are appreciations for the Company's business performance. Among the awards are:

- Government Contracting Agency (GCA)/Responsible for Project Cooperation/PJPK 2016 from Minister of Finance Sri Mulyani on the success of PLN in the implementation of cooperation Public Private Partnership (PPP)/Private Project partnership (PPP) development of mega power projects Power Plant Batang 2 x 1,000 MW in the Central Java.
- Two awards from the Indonesian Human Capital Study (IHCS) in 2016, in the category of Best Reward Management Initiative and Best Employee Engagement.
- Social Business Innovation Award for the category of power generation with energy saving programs and Green CEO Award 2016. The award was given by the Economic News Intelligence Unit in cooperation with the Ministry of Environment and Forestry.

KINERJA USAHA

Kinerja Program 35.000 MW untuk Indonesia

Pemadaman listrik yang dialami hampir setiap daerah saat ini disebabkan kekurangan pasokan listrik. Bila hal ini tidak mendapat perhatian khusus dan upaya terobosan luar biasa, maka krisis listrik bisa terjadi dalam 3-4 tahun ke depan. Kondisi ini bukan hanya kurang mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan daya saing industri dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek pembangkit listrik 35.000 MW merupakan solusi utama yang telah diambil oleh pemerintah. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Perseroan menjadi ujung tombak pelaksanaannya.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, dibutuhkan dana investasi yang sangat besar di atas Rp1.100 triliun. Untuk tetap menjaga kemampuan finansial, Perseroan disamping melakukan pembangunan sendiri pembangkitnya juga melibatkan pihak swasta atau *independent power producer* (IPP).

Hingga berakhirnya tahun buku 2016, sejumlah peristiwa penting yang mewarnai proses realisasi proyek listrik 35.000 MW telah terjadi. Di antaranya, pada 26 Februari 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur

BUSINESS PERFORMANCE

Program Performance 35,000 MW for Indonesia

The power outages experienced in almost every area are due to inadequate power supply. If this matter is not quickly resolved through major breakthroughs, then the power crisis would likely become worse within the next 3-4 years. This condition not only hinders popular activities, but definitely also diminishes industry competitiveness and hampers national economic growth.

The 35,000 MW power project is the foremost solution to resolve this national issue, which the government has aggressively taken on. To accomplish the mission, the Company is assigned to spearhead the project.

To accomplish this mega project, major funding is needed of more than Rp1,100 trillion. To maintain financial ability, in addition to construction its own electrical power plants, the Company also invited the private sector as independent power producers (IPP) to take part in the project.

By the end of fiscal year 2016, a number of significant events took place supporting the 35,000 MW project. Among other things, on February 26, 2016, the government issued Presidential Decision No. 4 Year 2016 on Electricity Infrastructure Development Acceleration. The regulation

Ketenagalistrikan. Dalam peraturan ditegaskan bahwa pemerintah Pusat menugaskan PLN dengan memberikan dukungan berupa penjamin, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dalam keseluruhan Proyek 35.000 MW.

affirmed that the government commissioned PLN for the project; moreover, the government acts as guarantor and assists in accelerating licensing and non-licensing procedures, supply of primary energy, land use planning, land acquisition, and overcoming obstacles and problems, as well as the settlement of legal issues in the overall 35,000 MW project.

Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah melakukan *ground breaking* enam pembangkit *Mobile Power Plant* yang menggunakan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 350 MW. Pembangkit ini akan memperkuat sistem kelistrikan regional Sumatera. Ini adalah kunjungan pertama Presiden dalam rangkaian peninjauan progress program 35.000 MW.

On June 1, 2016, President Joko Widodo initiated ground breaking for six Mobile Gas Engine Power Plants (PLTMG) with total capacity of 350 MW. These power generating plants will further reinforce regional electricity supply system for Sumatra. This is the first presidential visit in a series of progress reviews for the 35,000 MW program.

Komposisi realisasi program 35.000 MW terdiri atas proyek yang masih dalam proses perencanaan sebesar 5.824 MW atau 16,32%, dalam proses pengadaan 10.410 MW atau 29,16%, dalam proses persiapan konstruksi sebesar 8.664 MW atau 24,27%, dalam proses konstruksi sebesar 10.090 MW atau 28,27% dan yang telah beroperasi (COD/SLO) sebesar 706,5 MW atau 1,98%.

The completion progress of the 35,000 MW program consists of projects that are: under the planning process at 5,824 MW, or 16.32%; under procurement process at 10,410 MW, or 29.16%; under construction preparation at 8,664 MW, or 24.27%; under construction process at 10,090 MW, or 28.27%, and fully in operation (COD/SLO) amounting to 706.5 MW, or 1.98%.

Kinerja Keuangan

Pada tahun 2016, kami telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp10,55 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemillik Entitas Induk pada tahun 2016 sebesar Rp10,51 triliun dan diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali mencapai Rp36,73 miliar.

Financial Performance

In 2016, we booked a net profit of Rp10.55 trillion. Profit for the year attributed to the holding company in 2016 amounted to Rp10.51 trillion, and attributed to Non-Controlling Interests reached Rp36.73 billion.

Pendapatan dari penjualan tenaga listrik di tahun 2016 naik 2,05% menjadi Rp214,14 triliun, dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp209,84 triliun. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan energi listrik yang terjual yang masing-masing sebesar 5,09% dan 6,49% dibandingkan tahun lalu.

Revenue from electricity sales in 2016 rose by 2.05% to Rp214.14 trillion, compared to that of 2015 which amounted to Rp209.84 trillion. This increase occurred along with the rising numbers of customers and electricity sold, respectively by 5.09% and 6.49% compared to those of last year.

Sementara pendapatan biaya penyambungan pelanggan pada tahun 2016 naik 4,83%, menjadi Rp7,05 triliun dari Rp6,14 triliun di tahun 2015. Kenaikan ini terjadi karena bertambahnya jumlah pelanggan, dan meningkatnya daya listrik untuk pelanggan. Penambahan 3,1 juta pelanggan baru di tahun 2016 membuat total pelanggan PLN berkembang menjadi 64,28 juta pelanggan.

Meanwhile, revenues from customer connection fees in 2016 rose by 4.83%, to Rp7.05 trillion from Rp6.14 trillion in 2015. This increase was due to the growing numbers of new customers, and increase in the volume of electrical power distributed to customers. The addition of 3.1 million new subscribers in 2016 led total PLN customers of 64.28 million.

Pada akhirnya, Perseroan mencatatkan laba usaha setelah subsidi sebesar Rp28,81 triliun, lebih rendah 40,38%dibandingkan tahun tahun 2015 yang Rp48,33 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan tidak tercapainya target pendapatan pada pelanggan R1-450/ 900VA akibat belum diterapkannya tarif non subsidi untuk pelanggan R1-450/ 900VA yang tidak masuk dalam kategori pelanggan miskin dan rentan miskin.

Ultimately, the Company posted operating income after subsidies of Rp28.81 trillion, down 40.38% compared to that of 2015 amounting Rp48.33 trillion. This occurred due to the failure to achieve revenue targets on R1-450/900VA customers as a result of not applying the non-subsidized rates for R1-450/900VA customers, who are not supposed to be included in the category of underprivileged and poor customers.

Kinerja Keuangan	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Financial Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Pendapatan Usaha	(Rp billion/miliar)	235.306	217.347	222.822	92,24	102,52	Operating Revenue
Biaya Usaha	(Rp billion/miliar)	261.764	225.574	254.450	97,21	112,80	Operating Expense
Subsidi Pemerintah	(Rp billion/miliar)	66.713	56.552	60.441	90,60	106,88	Subsidy
Laba Usaha Setelah Subsidi	(Rp billion/miliar)	40.256	48.325	28.814	71,58	59,62	Operating Income After Subsidy
Laba Tahun Berjalan	(Rp billion/miliar)	15.624	6.027	10.549	67,52	175,04	Income for the Year
Biaya Pokok Penyediaan*	(Rp/kWh)	1.294	1.301	1.265	98	97	Cost of Supply

* Polaritas Negatif * Negative Polarity

KINERJA OPERASIONAL

Produksi

Pada tahun 2016 kondisi perekonomian sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ikut mendorong bergairahnya situasi perekonomian masyarakat yang akhirnya berdampak pada peningkatan permintaan tenaga listrik. Oleh karenanya, perusahaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dengan memproduksi tenaga listrik pada tahun 2016 yang mencapai 248.611 GWh, meningkat 6,25 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 233.982 GWh.

Adapun komposisi produksi tenaga listrik tahun 2016 yang berasal dari pembangkit sendiri sebesar 166,457 GWh atau memberikan kontribusi 66,96% dari total produksi. Sedangkan, produksi yang berasal dari pembangkit sewa sebesar 17.352 GWh atau 6,98% dari total produksi dan produksi yang berasal dari pembelian listrik swasta sebesar 64.802 GWh atau 26,06% dari total produksi.

Kami menerapkan strategi mengurangi penggunaan BBM, dan sebaliknya meningkatkan penggunaan sumber energi batubara, gas dan sumber energi terbarukan guna mendapatkan pola bauran energi yang memberi benefit optimal dalam rangka menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).

Produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM) mengalami penurunan sebesar 19,18% dari tahun 2015. Hal ini menunjukkan usaha yang dilakukan untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak, telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui optimalisasi produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM.

Produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit BBM telah berhasil kami turunkan dan dilain sisi kami telah berhasil meningkatkan produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM. Hal ini merupakan hasil kerja keras kami untuk menyelesaikan pembangkit berbahan bakar gas dan

OPERATIONAL PERFORMANCE

Production

In 2016, the economy showed signs of improvement compared to the previous year. This contributed to the stimulation of the economic situation in general which ultimately brought about rising demand for electricity. Consequently, the Company made every effort to meet the needs of electric power by producing 248.611 GWh of electricity in 2016, an increase of 6.25% compared to 2015 of 233.982 GWh.

The composition of electricity production in 2016 that PLN itself produced from its own power generating capacity was 166.457 GWh, or 66.96% of the total production, with production from leased plants at 17,352 GWh, or 6.98%, and from private electricity purchases at 64,802 GWh, or 26.06% of total domestic electricity production.

We formulated strategies to reduce usage of oil, and instead increased the use of coal, gas and renewable energy sources in order to obtain an optimum fuel mix, seeking to reduce the cost of supply.

Production of electricity derived from PLN's own power generating facilities that utilize oil (BBM) as primary energy source decreased by 19.18% from 2015. This demonstrates the Company's efforts to reduce use of oil-fired power plants, in line with the Company's work plan priority to reduce cost of supply and reduce production of electricity from oil-fired power plants.

Production of electricity derived from oil-fired power plants has been successfully reduced, and alternatively we have managed to increase production of electricity from non-oil-fired power plants. This is the result of our hard work to finalize gas-fueled and coal power plants. In addition, we also are

batubara. Selain itu, kami juga memanfaatkan penggunaan teknologi CNG, serta optimalisasi produksi PLTA seiring dengan curah hujan yang tinggi di tahun 2016.

taking advantage of the use of CNG, as well as increased electricity production derived from hydropower power plants due to high rainfall in 2016.

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Produksi Tenaga Listrik	(GWh)	251.496	233.982	248.611	98,85	106,25	Production of Electricity

Penjualan

Seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi secara nasional, penjualan tenaga listrik tahun 2016 mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,49%. Lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik pada tahun 2015 yang hanya sebesar 2,14%.

Selama tahun 2016, penjualan tenaga listrik di Jawa-Bali masih memberikan kontribusi terbesar, yaitu 74,2% dari penjualan tenaga listrik Perseroan, sedangkan dari Sumatera sebesar 15,4% dan Indonesia Timur 10,4%.

Hasil penjualan listrik memberikan kontribusi kepada pendapatan sebesar Rp214,14 triliun, naik 2,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp209,85 triliun, sebagai dampak dari meningkatnya penjualan tenaga listrik, penambahan jumlah pelanggan dan daya tersambung.

Sales

With the positive signs of domestic economic conditions, electricity sales in 2016 grew by 6.49% compared to the previous year. This is an uptrend in electric power sales from 2015 of 2.14%.

During 2016, sales of electric power in the Java-Bali grid still contributed the largest at 74.2% of the Company's total electricity sales, while that of Sumatra contributed 15.4% and the Eastern part of Indonesia 10.4%.

Proceeds from sales of electricity contributed Rp214.14 trillion to the Company, up 2.05% from the previous year of Rp209.85 trillion; this is the outcome from increased electricity sales, from new additional customers and power volume distributed

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Penjualan Tenaga Listrik	(GWh)	219.356	202.846	216.004	98,47	106,49	Electricity Sales

Penambahan Pelanggan

Pada tahun 2016, kami telah berhasil menambah jumlah pelanggan sebanyak 3.114.513 pelanggan. Penambahan jumlah pelanggan di tahun 2016 tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional menjadi sebesar 89,10% (tidak termasuk pelanggan non PLN) dari angka tahun sebelumnya sebesar 86,20%.

Sementara, jika ditambah angka pelanggan non-PLN maka rasio elektrifikasi menjadi 91,27% di tahun 2016 dari 88,30% di tahun sebelumnya.

Berdasarkan segmen wilayah, jumlah pelanggan di wilayah Jawa Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi sebesar 64,26%, diikuti wilayah Sumatera sebesar 19,94% dan Indonesia Timur sebesar 15,80%.

New Subscribers

In 2016, we managed to augment the number of new subscribers by 3,114,513 customers. The additionalsubscribers in the year 2016 raised the national electrification ratio to 89.10% (excluding non PLN customers) from the previous year of 86.20%.

Meanwhile, if the number of non-PLN subscribers added, the electrification ratio became 91.27% in 2016 from 88.30% in the previous year.

Based on regional segmentation, the number of customers in the Java-Bali region continues to dominate, with a contribution of 64.26%, followed by Sumatra at 19.94% and Eastern part Indonesia at 15.80%.

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Penambahan Pelanggan	(Plg)	3.808.279	3.674.746	3.114.513	81,78	84,75	New Subscribers

Daya Tersambung

Penambahan daya tersambung di tahun 2016 sebesar 7.764 MVA, mengalami peningkatan sebesar 18,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan daya tersambung terjadi pada semua kelompok pelanggan, khususnya pada kelompok pelanggan bisnis dan rumah tangga.

Peningkatan penambahan daya tersambung seiring dengan pulihnya perekonomian nasional yang berdampak pada bergairahnya situasi bisnis di Indonesia. Selain itu, karena dampak diberlakukannya syarat penyambungan baru untuk kelompok pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang hanya diperuntukkan untuk pelanggan miskin dan rentan miskin. Dengan demikian, beberapa calon pelanggan yang semula ingin menjadi pelanggan 450VA dan 900VA beralih ke 1.300VA.

Connected Power

The addition of connected power in the year 2016 amounted to 7,764 MVA, an increase of 18.50 over the previous year. The addition of connected power occurred in all categories of customers, especially in business/industry and households categories.

Augmented power connected along with the national economy recovery has brought about the growth of business and industry in Indonesia. Moreover, the enactment of the new regulation for household customers of 450 VA and 900 VA categories which is reserved for the underprivileged and unfortunate customers; thus, many customers who originally classified under 450VA and 900VA category have to migrate to 1,300VA category.

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Penambahan Daya Tersambung	(MVA)	7.108	6.552	7.764	109,22	118,50	Addition Power Connected

Susut Jaringan

Kami telah berhasil menekan susut jaringan pada tahun 2016 menjadi 9,48%, lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 9,77%. Beberapa upaya yang telah kami lakukan dalam menekan susut jaringan, antara lain dengan cara melakukan investasi dan perbaikan pada jaringan transmisi maupun distribusi, sehingga berhasil menekan kenaikan susut akibat pertumbuhan beban.

Kami juga melakukan penambahan penyulang/jurusan baik untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat. Selain itu, kami juga melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi dan mengganti konduktor/pemberatan jaringan serta penyeimbangan beban trafo.

Network Losses

We managed to suppress network losses in 2016 by 9.48%, comparing favorably with the decline of 2015 at 9.77%. Some of the efforts we have made in reducing network losses, among others, are by investing and upgrading both in transmission and distribution networks, so as to suppress the losses due to power load growth.

We also installed additional feeders/channeling both for medium voltage network and low voltage networks at several heavily burdened locations. In addition, we also installed additional substation inserts into the distribution network and replaced conductors/network weightings, and transformer load balancing.

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Susut Jaringan*	(%)	9,12	9,77	9,48	103,93	97,03	Network Losses*

* Polaritas Negatif
* Negative Polarity

Bauran Energi

Sepanjang tahun 2016, kami terus mengintensifkan upaya mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak secara bertahap. Hal ini terlihat dari pencapaian bauran energi, dimana produksi tenaga listrik dari pembangkitBBM hanya sebesar 6,46 % lebih baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,22%. Produksi dari pembangkit non BBM telah mencapai 93,54%, lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar 91,78%.

Fuel Mix

Throughout 2016, we continued to intensify our efforts to reduce dependency on fossil fuels. This is evident from the fuel mix indicators, in which the production of electricity from oil-fired power generators decreased to 6.46%, better than the previous year at 8.22%. Production of non-oil power plants reached 93.54%, higher than previous year at 91.78%.

Bauran energi dari pembangkit berbahan bakar gas meningkat tetapi bauran energi batubara menurun. Meskipun bauran energi batubara menurun, tetapi secara produksi total pembangkit (milik sendiri, sewa, dan beli) mengalami peningkatan yaitu dari semula 130,54 TWh pada tahun 2015 menjadi 135,36 TWh di tahun 2016.

The fuel mix of gas-fired power plants has increased and the fuel mix of coal decreased. Although the fuel mix of coal has decreased, in terms of the total production (PLN owned, leased, and purchased) has risen from 130.54 TWh in 2015 to 135.36 TWh in 2016.

Selain itu, terlihat pula bahwa bauran energi dari pembangkit berbahan bakar air meningkat dibanding tahun lalu, dari 5,87% menjadi 7,79%. Hal ini disebabkan oleh pola musim basah pada tahun 2016.

Moreover, the fuel mix of hydro power plants increased compared to last year from 5.87% to 7.79%. This is due to heavy rainfall in 2016.

Kinerja Operasional	Satuan Unit	Target (a)	Realisasi Actual		Capaian (%) Achievements (%)		Operational Performance
			2015 (b)	2016 (c)	c/a	c/b	
Bauran Energi*	(%)	6,03	8,22	6,46	107,06	121,45	Fuel Mix*

* Polaritas Negatif
* Negative Polarity

Kapasitas Terpasang

Sampai dengan akhir tahun 2016, kami telah meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit menjadi sebesar 54.664,50 MW, naik 7,48% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 50.859,28 MW. Peningkatan kapasitas terpasang ini seiring dengan berjalannya program Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 42.000 MW dari tahun 2016-2019.

Installed Capacity

As of end of 2016, we have enlarged the installed power generating capacity to 54,664.50 MW, an increase of 7.48% compared to that of 2015 at 50,859.28 MW. The growth in installed capacity is in line with the Company's program to boost power capacity by 42,000 MW in period of 2016 to 2019.

Subsidi Listrik

Besarnya subsidi listrik yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp60,44 triliun meningkat 6,88% dibanding tahun 2015 sebesar Rp56,55 triliun.

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih dari biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif dimana PLN telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 09/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014 tentang tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Electricity subsidy

The amount of electricity subsidies received by the Company in 2016 amounted to Rp60,44 trillion, increasing 6,88% compared to 2015 at Rp56.55 trillion. T

Subsidy income constitutes revenue from the Government of Indonesia, from the difference of costs allowed plus a margin of 7% on the actual sales price per each group except for group rates where PLN has secured automatic tariff adjustments according to Regulation No. Minister of Energy and Mineral Resources 09 Year 2015 concerning amendments to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 31 of 2014 on electricity provided by the Company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Kinerja Korporat

Key Performance Indicators (KPI) Manajemen PT PLN (Persero) sampai akhir tahun 2016 mendapatkan Skor 95,52 (masuk pada golongan perusahaan BUMN yang "Sehat", kategori "AAA") dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan 19,43, Efektivitas Produk dan Proses 21,07, Fokus Tenaga Kerja 7,0, Keuangan dan Pasar 23,09, dan Kepemimpinan dan Tata Kelola 24,93.

Corporate Performance

The Key Performance Indicator (KPI) outcome for overall management of PT PLN (Persero) as of the end of 2016 was a score of 95.52 classifying it in the "Healthy" SOE group, the category of "AAA"). The achievements of each indicator were 19.43 for Customer Focus, 21.07 for effectiveness of Product and process, Human Resource Focus 7.0, Financial and Market 23.09, and 24.93 for Leadership and Governance.

INOVASI

Kami terus berupaya merealisasikan program inovasi dengan membangun pembangkit listrik bersumberkan energi baru dan terbarukan, terutama untuk memasok listrik pada area terpencil menggunakan sumber energi yang bervariasi sesuai kondisi setempat, meliputi energi nabati, energi bayu, energi surya, dan energi mikro hidro. Kami juga terus berupaya mengintensifkan upaya pengembangan pusat pembangkit energi panas bumi di Indonesia dengan potensi terbesar di dunia. Dalam rangka menekan penggunaan BBM, kami juga semakin intens memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai sumber energi alternatif pembangkit *peaker*.

Pada daerah-daerah tertentu dengan dukungan infrastruktur kelistrikan masih terbatas, kami membangun *mobile power plant* untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dan menjaga keandalan pasokan listrik. Pada tahun 2016, kami telah mengeksekusi berjalannya *mobile power plant* yang pembangunannya dapat dilakukan selama 6 bulan di beberapa wilayah seperti di NTB, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Pekanbaru Riau serta Kalimantan Barat.

Kami juga semakin intensif menerapkan beberapa inovasi dengan dukungan teknologi informasi terkait manajemen mutu, layanan satu pintu, pencatatan keuangan, administrasi proyek, evaluasi kinerja pembangkit, manajemen energi primer, administrasi data pelanggan, pencatatan meter pelanggan, sistem kepegawaian, dan lainnya.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

PLN mewujudkan suatu *Knowledge Management System* yang terintegrasi secara korporat melalui penyatuan seluruh "3 Pilar Utama *Knowledge Management*", yaitu *People*, *Process* dan *Technology*.

- *People*: salah satu kriteria pengukuran kompetensi pegawai adalah melalui aktivitas *knowledge management* yang meliputi *knowledge sharing*, *knowledge capturing*, *community of practice*, dan inovasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan diri pegawai.
- *Process*: telah diterbitkan dan disempurnakan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas *knowledge* management termasuk pemberian penghargaannya.
- *Technology*: menerapkan teknologi kolaboratif yang diharapkan cukup adaptif mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Selain itu, Perseroan juga mendorong terciptanya peningkatan Budaya Unggul. Hal ini merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa memiliki kinerja yang maksimal dan mampu berkontribusi besar bagi Perseroan.

INNOVATION

We continue to drive innovation by building new and renewable energy sourced power plants, mainly to supply electricity in remote areas using energy sources that vary according to local conditions, including bio energy, wind energy, solar energy and micro hydro energy. We also keep on intensifying efforts to develop geothermal power plants in Indonesia, which has the greatest potential reserve in the world. In order to further reduce the use oil-fired power plants, we also are intensely looking into Compressed Natural Gas (CNG) technology as an alternative energy source for peaker power plants.

In certain areas where electricity supply is still inadequate, we commissioned mobile power plants to augment electrification ratio while maintaining reliability of electricity supply. In 2016, we have instructed the construction of mobile power plants which can be delivered in 6 months to some areas such as in the Nusa Tenggara Barat, North Sumatra, Lampung, Bangka Belitung, Pekanbaru in Riau, and West Kalimantan.

We also intensified several innovations with the support of information technology related to quality management, one-stop service, accounting, project management administration, power plants performance evaluation, primary energy management, administration of customer data, metering, human resource system, and more.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

PLN realizes an integrated Knowledge Management System corporately integrated through the unification of "3 Main Pillars of Knowledge Management", i.e. People, Process and Technology.

- People: one employee competence valuation criteria is through knowledge management activities that include knowledge sharing, knowledge capturing, community of practice, and innovation, all as integral parts of employees' self-development.
- Process: issued and refined policies as guidelines for the implementation of knowledge management activities including the provisions of rewards.
- Technology: applying collaborative and adaptive technologies.

In addition, the Company promotes the enhancement of a Superior Culture. This is part of the efforts to motivate employees to always pursue best performance and contribute significantly to the Company.

Dimensi Budaya Kinerja Tinggi/Unggul memiliki inisitiaf untuk menciptakan pegawai PLN yang kompeten, produktif, memiliki tata nilai & etika kerja tinggi, berjiwa entrepreneur dan *cost-benefit conscious*.

High Performing Culture and Performance Excellence are the foundations shaping employees to be more competent, productive, with values and strong work ethics, while being entrepreneurial and cost-benefit conscious.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Peran penting teknologi informasi di lingkungan PLN sesuai dengan Surat Keputusan No. 529.K/DIR-2010 Pasal 4, yaitu pendorong dalam meningkatkan kapabilitas proses bisnis Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah layanan dan sebagai penggerak penciptaan produk layanan baru dalam mencapai tujuan strategis Perseroan.

Dalam rangka merealisasikan proyek strategis tersebut, fokus utama tahun 2016 adalah penyesuaian aplikasi terpusat dengan organisasi baru, implementasi *Enterprise Aset Management* (EAM) pembangkit dan Implementasi aplikasi Saidi Saifi serta Implementasi Aplikasi Transaksi Tenaga Listrik Terpusat (AT2LT).

Implementasi EAM Pembangkit dilakukan untuk mendukung proses bisnis Pembangkitan di unit Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, implementasi tersebut menerapkan sebuah sistem informasi yang terpusat sehingga mendukung standardisasi proses bisnis.

Selain itu, untuk mendukung kebutuhan strategi bisnis PLN yang menuntut perubahan organisasi maka sistem teknologi informasi memberikan dukungan dengan melakukan penyesuaian perubahan tersebut pada aplikasi aplikasi korporat di unit organisasi baru.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Information technology's crucial role in PLN, in accordance with the Decision No. 529.K/DIR-2010 Article 4, is a basis in driving the Company's business capabilities, amplifying value-added services, and as an instrument for new product & services development in attaining the Company's strategic goals.

The main focus in 2016 was centralized application customization with the new organization, application of Enterprise Asset Management (EAM) of power plants, application of SAIFI SAIDI, and the Power Centralized Transaction Application (AT2LT).

Enterprise Asset Management (EAM) is to facilitate the business processes of Power Generation units in Southern Sumatra and North Sumatra; this application employs a standardized and centralized information system.

In addition, as PLN's business strategy requires organizational restructuring, information technology application systems must also adapt to the new organization.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Selain melaksanakan tugas dalam bentuk public services obligation, Perseroan juga memberikan kontribusi besar kepada negara dalam bentuk dividen dan pembayaran pajak. Untuk tahun 2016, total pajak yang dibayarkan mencapai Rp28,87 triliun, dengan komposisi Rp1,93 triliun dibayar secara kas, sementara sisanya dibayar secara non kas.

Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2015 dan 2014 masing-masing sejumlah Rp2,14 triliun Rp 38.400 (nilai penuh) per lembar saham dan Rp3,96 triliun atau Rp85.774 (nilai penuh) per lembar saham.

CONTRIBUTIONS TO THE STATE

In addition to carrying out duties as a public service obligation provider, the Company made a significant contribution to the government in the form of dividends and taxes. For 2016, the total tax paid reached Rp28.87 trillion, tax payment composition is paid as Rp1.93 trillion by cash and the rest is paid by non-cash.

In 2016 and 2015, the Company disbursed dividends in cash for the 2015 and 2014 fiscal years respectively at Rp2.14 trillion or Rp38.400 (full amount) per share and Rp3.96 trillion or Rp85.774 (full amount) per share.

PROSPEK USAHA 2017

Penyusunan prospek usaha Perseroan ini telah memperhatikan sejumlah variabel eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja usaha Perseroan pada tahun 2017. Baik indikator-indikator ekonomi maupun ekspektasi yang telah disusun oleh pemerintah sebagai sumber resmi. Apalagi, Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang memiliki fungsi sosial dan pada saat bersamaan, melakukan aktivitas usaha sebagai entitas bisnis.

BUSINESS PROSPECTS 2017

Formulation of the Company's business prospects has taken into account a number of external variables that could potentially affect the Company's business performance in 2017: economic indicators and expectations prepared by the government as an official source. Moreover, the Company is a state-owned enterprise that has a social obligation as public service provider and at the same time a business entity.

Perseroan telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2017. Beberapa di antaranya adalah:

The Company has compiled a series of quantitative targets as outlined in the Work and Budget Plan of the Company/ (RKAP) in 2017, such as:

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi 2016 Actual 2016	Target 2017 Target 2017	Description
Penjualan Tenaga Listrik	TWh	216	234	Electricity Sales
Penambahan Pelanggan	juta million	3,1	3,24	New Subscribers
Penambahan Daya Tersambung	MVA	7.764	9.474	Addition of Power Connected
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik	Rp trillion/ triliun	214,14	267	Electricity Revenues
Laba Usaha setelah Subsidi	Rp trillion/ triliun	28,81	38,20	Operating Profit after Subsidies
Laba Bersih	Rp trillion/ triliun	10,55	15,63	Net Profit

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah:

1. Menyelesaikan program 35.000 MW termasuk penyelesaian *Fast Track Program* (FTP) I dan FTP II.
2. Mengembangkan *partnership* yang me-*leverage* nama besar dan pengalaman PLN dalam membangun tambahan kapasitas.
3. Mengembangkan *Mobile Power Plant* untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
4. Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif (insentif-disinsentif).
5. Mengupayakan struktur tarif listrik yang dapat memenuhi *revenue requirement* untuk kegiatan operasi dan investasi.

To accomplish strategic objectives, the Company has a number of priority programs:

1. Completion of the 35,000 MW program including that of the Fast Track Program carry-over of FTP I and II.
2. Develop strategic partnerships to leverage large companies and PLN's experience in construction of additional capacity.
3. Develop Mobile Power Plants to address the short-term power supply shortage.
4. Implement Demand Side Management program integrated with the tariff structure (incentives-disincentives).
5. Promoting the electricity tariff structure to meet revenue requirements for operations and investment activities.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan berkomitmen untuk terus memastikan aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Untuk itu, Perseroan juga terus berupaya menyempurnakan praktik-praktik GCG yang selama ini telah diterapkan.

Untuk memperkuat implementasi GCG, Perseroan secara aktif terus melakukan sosialisasi penerapan *Whistle Blowing System*, Komitmen Pakta Integritas serta Program Pengendalian Gratifikasi.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas praktik-praktik GCG tercermin dalam kegiatan Perseroan Assessment penerapan GCG sesuai dengan Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada awal tahun 2016, PLN melakukan *self-assessment* GCG untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2015. Hasil *self-assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) periode tahun 2015 mencapai total skor sebesar 86,46.

THE APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to continuing and ensuring that business management activities are conducted prudently and based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). For that reason, the Company is persistently working to improve corporate governance practices.

To reinforce good corporate governance practices, the Company continues to disseminate information on Whistle Blowing System, Integrity Pact Commitment, and Gratuity Control measures.

The quality of corporate governance practices are reflected in the activities of the Company as it periodically performs GCG Assessments in accordance with the Secretary of the Ministry of SOE No.SK-16/S.MBU/2012 Indicator/Parameter Assessment and evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs).

In early 2016, PLN self-assessed its own GCG to for the period 2015. The results of self-assessment on the application of GCG of PT PLN (Persero) in the period 2015 reached a total score of 86.46.

Pelaksanaan *self-assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT PLN (Persero), sehingga hasil *self-assessment* juga merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG di PT PLN (Persero).

Pada awal tahun 2017, pelaksanaan penilaian implementasi GCG di PT PLN (Persero) masuk dalam periode *Assessment* yang dilakukan oleh *Assessor* Independen dan pelaksanaan ini untuk menilai implementasi penerapan GCG pada Periode tahun 2016. Pada Periode ini, PT PLN (Persero) kembali meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai *assessor* independen dalam melakukan penilaian implementasi GCG Periode Tahun 2016.

Hasil terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai total skor sebesar 87,14. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai kualifikasi Sangat Baik.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program-program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan diarahkan untuk menunjang keberlanjutan bisnis Perseroan. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PLN memfokuskan kegiatan CSR Perseroan pada kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2016, PT PLN (Persero) mengimplementasikan pencairan Program Bina Lingkungan senilai Rp64,80 miliar, Program CSR senilai Rp37,01 miliar, dan Program Kemitraan senilai Rp371,34 juta.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, Perseroan telah membentuk komite di bawah Direksi yang beranggotakan anggota direksi. Komite Direktur dibagi menjadi 8 Komite:

1. Komite IPP dan Kerja Sama Kemitraan
2. Komite Energi Primer
3. Komite Investasi dan Pendanaan
4. Komite Niaga
5. Komite SDM dan Organisasi
6. Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi
7. Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset
8 Komite Operasional

GCG self-assessment is part of the ongoing implementation of GCG at PT PLN (Persero), so that the results of the self-assessment are also an assessment of the progress of GCG at PT PLN (Persero).

In early 2017, the GCG assessment at PT PLN (Persero) was conducted by an independent assessor to assess for the period of 2016. PT PLN (Persero) requested the assistance of the Financial Supervisory Agency (BPKP) as an independent assessor to assess GCG for the period of 2016.

The results of the GCG assessment of PT PLN (Persero) for the period 2016 scored 87.14, indicating that the application of GCG in PT PLN (Persero) for the period 2016 is classified as Very Good.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company's Corporate Social Responsibility (CSR) programs are geared to support the sustainability of the Company's business. According to regulation of Minister of State PER-09/MBU/07/2015, dated July 3, 2015, regarding Partnership Program for State Owned Enterprises with the SME and Community Development Program, PLN focuses its CSR on the Partnership Program and Community Development Program.

In 2016, PT PLN (Persero) implemented disbursement of Community Development Program as Rp84.80 billion, Corporate Social Responsibility Program as Rp37.01 billion, and Patnership Program as Rp371.34 million.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has formed eight committees under the Board of Directors composed of members of the Board of Directors as follows:

1. IPP Cooperation and Partnership Committee
2. Primary Energy Committee
3. Investment and Financing Committee
4. Commerce Committee
5. Human Resources and Organization Committee
6. Subsidiaries and Affiliates Committee
7. Write-off and Discharge of Assets Committee
8. Operational Committee.

Komite Direksi merupakan Komite yang dibentuk dan beranggotakan Direksi. Komite Direksi sebagai sarana pengambilan Keputusan didasarkan atas batasan kewenangan pengambilan keputusan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 304.K/DIR/2009 dan perubahannya yang dalam pelaksanaanya seluruh Keputusan yang diambil dalam Komite Direksi diangkat kembali dalam Rapat Direksi dan menjadi keputusan Rapat Direksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa kinerja komite di bawah Direksi telah berjalan dengan efektif. Komite-Komite telah memberikan masukan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategi usaha.

A Director Committee is a committee formed and consisting of the Board of Directors. Committee of the Board of Directors is a mean for decision making based on the decision-making authority limitation stipulated in Directive No. 304.K / DIR / 2009 and amendments in which all Decisions made in the Committee of the Board of Directors to be reappointed during the Board of Directors Meeting and becomes a decision of the Board of Directors.

Based on these considerations, the Board of Directors deem that the committee under the Board of Directors has performed effectively. The Committees have provided valuable advice and recommendations to be considered by the Board of Directors in decisions making and business strategy policies formulation.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Hingga berakhirnya Tahun Buku 2016, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of end of Fiscal Year 2016, the composition of the Board of Directors of the Company was as follows:

Jabatan	**Nama** Name	Position
Direktur Utama	Sofyan Basir	President Director
Direktur Perencanaan Korporat	Nicke Widyawati	Director of Corporate Planning
Direktur Pengadaan	Supangkat Iwan Santoso	Director of Procurement
Direktur Keuangan	Sarwono Sudarto	Director of Finance
Direktur Human Capital Management	Muhamad Ali	Director of Human Capital Management
Direktur Bisnis Regional Sumatera	Amir Rosidin	Sumatra Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	Murtaqi Syamsuddin	Western Java Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	Nasri Sebayang	Central Java Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali	Amin Subekti	East Java & Bali Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Kalimantan	Djoko Rahardjo Abumanan	Kalimantan Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara	Machnizon	Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua	Haryanto W.S.	Maluku & Papua Regional Business Director

APRESIASI BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

Demikianlah laporan atas kinerja pengelolaan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham serta nasihat-nasihat dan arahan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris.

APPRECIATION FOR STAKEHOLDERS

Thus, this management report of the Company for the Financial Year 2016 we hereby submit. We thank you and extend our deepest appreciation for the trust given to us by the shareholder as well as the advice and directives that have been provided by the Board of Commissioners.

Kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan, kami mengucapkan selamat atas dedikasi serta kinerja yang cukup baik dalam melalui tahun yang penuh dengan tantangan. Mari terus berinovasi. Terima kasih atas kerja sama tim yang sangat baik selama ini.

To the employees, we congratulate for your outstanding performance for over a year filled with challenges. Let us continue to innovate, strive and do our utmost for the Company. We extend our deepest gratitude for your unrelenting dedication and for the fine team work over the years.

Tentu kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, pelanggan, maupun mitra kerja sama. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, terutama dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT PLN (Persero).

Last but not least, we also express deep appreciation to other stakeholders, regulators, customers, and partners alike. Thank you for the support that has been given, especially in the framework of good corporate governance at PT PLN (Persero).

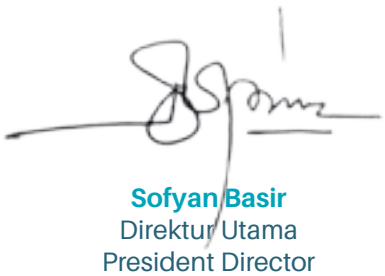

Sofyan Basir
Direktur Utama
President Director

Direksi

The Board of Directors

Sofyan Basir
Direktur Utama
President Director
1.

Nicke Widyawati
Direktur Perencanaan Korporat
Corporate Planning Director
2.

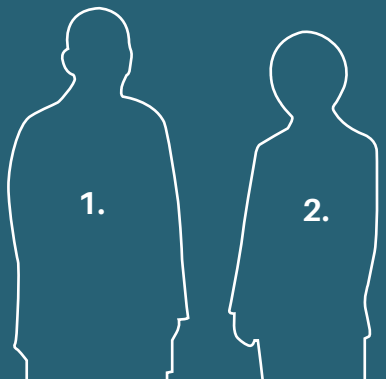

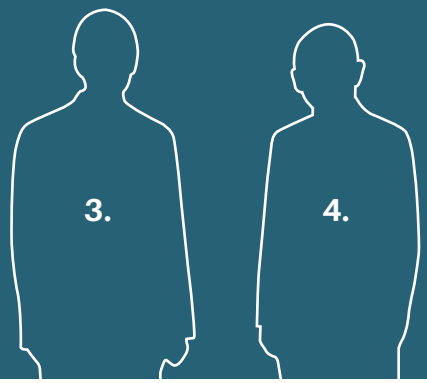

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Finance Director **3.**

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Human Capital Management Director **4.**

Djoko R. Abu Manan
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Business Director **5.**

Nasri Sebayang
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director **6.**

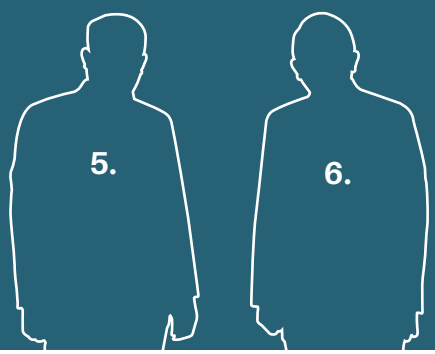

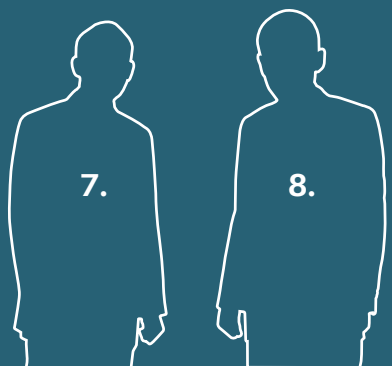

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan
Procurement Director **7.**

Murtaqi Syamsuddin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director **8.**

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara
Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director **9.**

Haryanto W.S.
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Maluku & Papua Regional Business Director **10.**

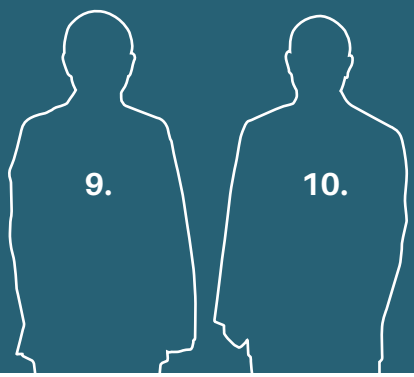

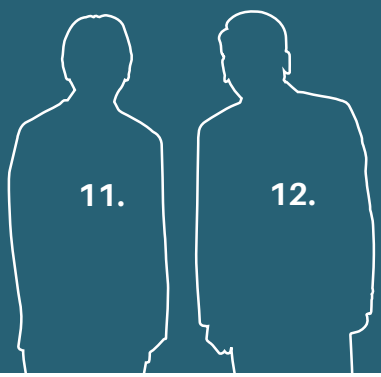

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Sumatra Regional Business Director **11.**

Amin Subekti
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali
East Java & Bali Regional Business Director **12.**

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 PT PLN (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2017

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Hasan Bisri
Plt. Komisaris Utama
Acting President Commissioner

Oegroseno
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Hasan Bisri
Komisaris
Commissioner

Jarman
Komisaris
Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Harry Susetyo Nugroho
Komisaris
Commissioner

Aloysius K. Ro
Komisaris
Commissioner

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding Annual Report for the Year 2016 PT PLN (Persero)

We, the undersigned, testify that all information contained in the 2016 Annual Report of PT PLN (Persero) has been presented in its entirety, and assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 2017

Direksi
Board of Directors

Sofyan Basir
Direktur Utama
President Director

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan
Director of Procurement

Nicke Widyawati
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Murtaqi Syamsuddin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director

Nasri Sebayang
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director

Amin Subekti
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali
East Java & Bali Regional Business Director

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Sumatra Regional Business Director

Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Business Director

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara
Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director

Haryanto W.S.
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Maluku & Papua Regional Business Director

2

Profil Perusahaan

Company Profile

82 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

83 Riwayat Singkat Perusahaan
PLN in Brief

84 Jejak Langkah Perusahaan
Company Milestones

86 Makna Logo Perseroan
Company Logos

88 Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

90 Bidang Usaha
Line of Business

92 Struktur Organisasi
Organizational Structure

94 Kepemilikan Saham
Shareholders Ownership

98 Struktur Grup Perusahaan
Business Structure and Subsidiary

100 Entitas Anak Perusahaan
Subsidiaries

120 Entitas Asosiasi & Ventura Bersama
Associated Entities & Joint Ventures

126 Segmen Operasional Regional
Regional Operating Segments

128 Profil Sumber Daya Manusia
Human Resources Profile

130 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

134 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

140 Profil Komite-komite
Profile of Committees

144 Profil Pejabat Senior PLN
PLN Senior Official Profile

154 Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak & Entitas Asosiasi PLN
Addresses of PLN Branch Offices, Subsidiaries & Association

186 Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Supporting Institutions and Professions in Capital Market

190 Akses Informasi
Access of Information

192 Situs Web PLN
PLN Website

Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Name	**PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
Bidang Usaha Line of Business	**Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan** Generation, Distribution, Transmission and Other Services Related To Electricity
Kepemilikan Ownership	**100% Pemerintah Indonesia** The Government of Indonesia 100%
Alamat Address	**Kantor Pusat** Head Office PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. : +62 21 725 1234, 725 0550, 726 1122 Fax. : +62 21 722 1330 Email : pln123@pln.co.id Website : www.pln.co.id.
Alamat Kontak Contact Center	**Sekretaris Perusahaan** Corporate Secretary Tel. : +62 21 725 1234 ext 4000 Fax. : +62 21 722 2328 Email : bambang.dwiyanto@pln.co.id Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	1 Januari 1961, dengan nama Jawatan Listrik dan Gas dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 1 January 1961, with the name of Jawatan Listrik dan Gas under the Ministry of Public Works and Energy.
Dasar Hukum Pendirian Establishment Legal Basis	1. Peraturan Pemerintah No. 1 s/d tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas. 2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. 4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero). 1. Government Regulation Num. 1 until dated 27 October 1945, established as Jawatan Listrik dan Gas. 2. Government Regulation Num. 67 of 1961, changed to State Company (Perusahaan Negara), and called Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Government Regulation Num. 19 of 1965, established as Perusahaan Listrik Negara. 4. Government Regulation Num. 18 of 1972, dated 3 June 1972, affirmed as Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Act Num. 169, 30 July 1994 from Sutjipto, Notary, Perum PLN was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).
Modal Dasar Authorized Capital	Rp204 triliun/trillion.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp55,67 triliun/trillion.

Riwayat Singkat Perusahaan

PLN in Brief

Perjalanan PT PLN (Persero) tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Bermula sejak akhir abad ke-19, beberapa perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan perkebunan teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Hingga kemudian antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk mengambil alih perusahaan listrik yang dikuasai Jepang. Delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti pembentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PLN kini telah berkembang sebagai salah satu dari kelompok korporasi dengan aset terbesar di seluruh dunia. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2016 telah semakin berkembang menjadi 39.785,06MW.

The journey of PT PLN (Persero) is inseparable from Indonesia's long history of electricity development. Beginning at the end of the 19th century, several Dutch companies owning sugar mills and tea plantations built power plants as self-necessity. Between the years 1942-1945 the management of these plantations with power plants was transferred to the Japanese.

With the fall of Japan into the hands of the Allies, and as Indonesia proclaimed independence in August 17, 1945, Indonesia took over the control of the electricity plants from the Japanese. The youth and electricity workingmen through the Delegation of Electricity and Gas Employees together with the leaders of the Central Indonesian National Committee (KNIP) took the initiative to meet President Sukarno to hand over these power plants to the Government of the Republic of Indonesia.

In October 27, 1945, President Sukarno established the Electricity and Gas Bureau, under the Public Works and Energy Department, which at that time oversaw a power generator capacity of 157.5 MW. OnJanuary 1, 1961, the Electricity and Gas Bureau was reconstituted and renamed BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company), with its main business as the supply of electricity, gas and coking coal. In January 1, 1965 BPU-PLN was dismissed and divided with State Electricity Company (PLN) managing electricity power and the National Gas Company (PGN) managing gas.

In 1972, based on the Government Regulation No. 17, the State Electricity Company (PLN) was renamed as the Public State-Owned Electricity Company, acting as the Authorized Agency for Electrical Power Business (PKUK) with the task to provide electricity to fulfill public needs. In 1994, the Government provided opportunities to the private sector to be involved in the business of electricity supply. PLN was then turned into a Limited Liability Company (PT) as state owned (Persero), continuing as PKUK in providing electricity for public use.

With the issuance of Law No. 30 of 2009, PLN no longer acted as an authorized agency in the electrical power business (PKUK), but as a State Owned Enterprise (SOE) where its main business is to supply electricity to meet public needs. PLN is burgeoning to be one of the highest asset companies in the world. Until the end of 2016, the total capacity of the power plants owned by PLN had grown to 39,785.06 MW.

Jejak Langkah Perusahaan

Company Milestones

Akhir Abad 19
Late 19th Century

Perusahaan-perusahaan Belanda di bidang Pabrik Gula dan Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own use.

1942-1945

Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil alih Jepang.

All of the electricity generating facilities under the Dutch rule were taken over by Japan.

27 Oktober 1945
27 October 1945

Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

President Sukarno established the Electricity and Gas Bureau under the command of the Department of Public Works and Energy.

1 Januari 1961
1 January 1961

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.

The Electricity and Gas Bureau reconstituted into BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company) with its line of business as provider of electricity, gas, and coking coal.

1 Januari 1965
1 January 1965

BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

BPU-PLN was dismissed, followed by the establishment of two state companies, namely the State Electricity Company (PLN) managing the electricity sector and the National Gas Company (PGN) managing the gas sector.

2006

Sesuai Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 MW tahap pertama (FTP I).

In accordance to the Presidential Regulation No. 71 of 2006, PLN was mandated to build coal-fired Steam Power Plant with a capacity of 10,000 MW for the first phase (FTP I).

2009

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

With the issuance of Law No. 30 of 2009, PLN was no longer designated as PKUK but operated as a State-Owned Entity (SOE) with the mandate to provide electricity to the public.

2010

Sesuai Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II).

In accordance to the Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal Power Plants as a second phase fast track program (FTP II).

2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).

The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) to PT PLN (Persero) in August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

2013

PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*).

PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as a fuel substituting oil to meet the demand of its peaker power plant.

1970

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1970.

The Company's status was changed to Public Company (Perum) in accordance with the Government Regulation No. 30 of 1970.

1972

Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

PLN's status was changed to Public State-Owned Electricity Company and acted as the Holder of the Authority to Conduct Electricity Business (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan—PKUK) with the mandate to provide electricity for public use.

1992

Tahun pertama mendapatkan dana investasi dari pasar modal domestik, melalui penerbitan Obligasi PLN I.

For the first time PLN obtained investment funds from the domestic capital market through the issuance of the PLN Bonds I.

1994

Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta.

PLN's legal status was changed into Limited Liability Company, in accordance with the Act No. 169 dated July 30, 1994 from Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

2005

PLN memulai program transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia.

PLN began its transformation program into a World-Class Electricity Supplier and Distributor.

2014

PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500.

PLN became one of the companies with the largest revenues in the world, according to Fortune 500.

2015

- PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan.
- PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*.

- PLN declared commencement of the construction of coal, gas, and geothermal steam power plants with a capacity of 35,000 MW with a target of completion within the next five years.
- PLN commenced the construction of steam power plant with the ultra super critical technology, with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through the Public Private Partnership scheme.

2016

PLN pertama kali mengoperasikan Marine Vessel Power Plant (MVPP) sebagai bagian dari diversifikasi tipe pembangkit *mobile*.

For the first time, PLN operated the Marine Vessel Power Plant (MVPP) as part of a diversified type of mobile power plants.

Makna Logo Perseroan

Company Logos

1976-2007

PT PLN (PERSERO)

2007-2016

PT PLN (Persero)

2016-sekarang

Penjelasan Makna Logo

- Perpaduan logo gram dan logotype dengan tampilan yang lebih dinamis dan modern.

Logo gram terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu terdiri dari bidang persegi, petir, dan tiga gelombang.

- Bidang Persegi sebagai dasar, berwarna kuning, dan tanpa garis pinggir. Warna kuning menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di PLN.
- Petir atau Kilat, berwarna merah, bentuk atas tebal, bentuk bawah runcing, dan memotong/menembus tiga gelombang. Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh PLN. Selain itu, Petir juga mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi pelanggannya. Warna merah memberikan representasi kedewasaan PLN selaku perusahaan listrik pertama di Indonesia dan dinamisme gerak laju PLN beserta insan perusahaan, serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.
- Tiga Gelombang, berwarna biru, berbentuk sinusodia (2,5 periode), ujung gelombang menghadap ke bawah, tersusun sejajar dalam arah mendatar, dan terletak di tengah-tengah pada dasar kuning. Tiga Gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti oleh PLN yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PLN guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Warna biru melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta keandalan yang dimiliki insan PLN dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Logotype terdiri dari akronim kalimat Perusahaan Listrik Negara yakni PLN yang disusun dari karakter huruf yang khas sehingga memiliki standar khusus dan hanya dimiliki oleh PLN.

Meaning of Logo

The combination of logo gram and logotype with a more dynamic and modern look.

Logo gram consists of three basic elements, consisting of a rectangular area, lightning, and three waves.

- The yellow square without borders is the base. Yellow color depicts enlightenment, as expected by PLN that electricity is able to en-lighten people's lives. Yellow also symbolizes the fiery spirit of PLN employees.
- A red, thick and tapered shaped lightning piercing three waves. The lightning symbolizes the electricity power contained therein as the main service product produced by PLN. In addition, the lightning also represents quick and accurate work performed by PLN employees in providing the best solutions for its customers. The red color represents PLN's maturity as the first electricity company in Indonesia and PLN's dynamic progress as well as its employees, and the Company's courage in facing challenges.
- Three blue waves shaped as a sinusodia (2.5 period), with the end of waves facing down, arranged parallel in horizontal direction and placed in the middle of the yellow base. The three waves represents the propagation of electrical energy delivered by the three main business areas cultivated by PLN namely generation, transmission, and distribution, progressing along with the hard work of PLN employees to provide the best services for its customers. The blue color symbolizes loyalty and devotion to duty in order to achieve prosperity and good welfare of the people of Indonesia, as well as the reliability PLN employees in providing the best services to its customers.

Logotype consists of the acronyms of the sentence the State Electricity Company (PLN) composed of unique characters with a specific standard and only owned by PLN.

Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Persetujuan Visi dan Misi

Pernyataan visi dan misi telah disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan telah dideklarasikan pada saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2002.

Vision

To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources.

Mission

1. Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction, company members and shareholders.
2. Making electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. Making every effort for electricity as an economic booster.
4. Operating an environmentally friendly business.

Vision and Mission Statements

The vision and mission statements were approved by the Boards of Directors and Commissioners in 2002 and declared on National Electricity Day on October 27, 2002.

Moto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Motto

Electricity for Better Life

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

SALING PERCAYA
Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

INTEGRITAS
Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

PEDULI
Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

PEMBELAJAR
Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

MUTUAL TRUST
An atmosphere of mutual trust and openness between fellow members of the company based on a belief in integrity, good faith and competence from parties connected in the implementation of clean and ethical business practices.

INTEGRITY
The manifestation of an attitude shown by members of the company in which they consistently show honesty, harmony between words and deeds, and a sense of responsibility towards company management and use of corporate property both for short and long-term benefit, as well as a sense of responsibilities toward all stakeholders.

CARE
A reflection of the intention to protect and care for the work-life quality felt by company members and stakeholders growing together as imbued with sensitivity toward problems faced by the company and the desire to find the right solution.

LEARNING
The attitude of company members who always have the courage to question the system and practices of development, management and operations, as well as mastering cutting-edge science and technology for the renewal and sustainability of the company.

Bidang Usaha

Line of Business

Kegiatan Usaha

Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN adalah: Menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha PLN, adalah:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
   - Pembangkitan tenaga listrik.
   - Penyaluran tenaga listrik.
   - Distribusi tenaga listrik.
   - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
   - Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
   - Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
   - Konsultansi ketenagalistrikan.
   - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
   - Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
   - Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
   - Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
   - Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
   - Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, ketenagalistrikan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:
   - Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
   - Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan *retail* tenaga listrik.
   - Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
   - Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
   - Usaha jasa ketenagalistrikan.

Lebih lanjut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.

Business Activities

In accordance with Law No. 30 of 2009 regarding Electricity and the Company's Articles of Association, the Company's primary line of business is: Providing electricity for the public interest.

Lines of Business

In accordance with Law No. 30 of 2009 regarding Electricity and in the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

1. Provision of electrical power, which includes:
   - Generation of electricity.
   - Transmission of electricity.
   - Distribution of electricity.
   - Planning and constructing facilities to supply electrical power.
   - Development of electricity supply.
   - Sales of electricity.
2. Provision of service business units to support electricity services, which include:
   - Electricity consultation.
   - Construction and installation of electrical power equipment.
   - Assessment and testing of electrical power equipment
   - Operation and maintenance of electrical power equipment.
   - Laboratory of electrical power equipment and consumer testing.
   - Certification of electrical power equipment and consumer.
   - Certification of competence for electricity technicians.
3. Other activities, which include:
   - Management and utilization of natural resources and other energy sources in the interests of electrical power.
   - Operating and dispatching services for generation, transmission, distribution and retail sales of electricity.
   - Building the industry of hardware, software and equipment related to industry of electricity power.
   - Cooperation with other parties and related industry institutions to electrical power in the fields of development, operations, telecommunications and other information related to electrical power.
   - Electricity services business.

Furthermore, PLN's business also focuses on other services related to electricity as follows:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.
2. Construction of electricity infrastructure, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformers, facility stations).

3. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-tenaga listrik swasta.
4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.

Produk dan jasa yang dihasilkan:
a. Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik.
b. Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan.
c. Jasa konsultasi ketenagalistrikan.
d. Jasa pembangunan. pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
e. Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang).
f. Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 2 Unit Pusat Penyaluran, 17 Unit Induk Pembangunan dan 6 Unit Pusat/Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Utilization and commercialization activities of power plants, which consist of steam power plants, hydro power plants, gas turbine power plants, geothermal power plants, diesel power plants, solar cell power plants and wind power plants. PLN also purchases electrical power produced by private power plants and rents other public power plants to be utilized.
4. Research and development, activities and other related to electricity.

The Products and Services resulted includes:
a. Provision of electricity.
b. Equipment certification and electrical power installation.
c. Electrical power consultation.
d. Building, maintaining and installing equipment to produce electrical power.
e. Electrical power development services (research and support).
f. Other services related to electrical power.

The services mentioned above are conducted by PLN through its 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 3 Generation Units, 3 Transmission Units, 2 Dispatcher Centre and 2 TransmissionUnits, 17 Core Development Units and 6 Central/ Service Units spread across the entire region of Indonesia.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Organisasi Berdasarkan Peraturan Direksi

Organization Based on Directors Regulation

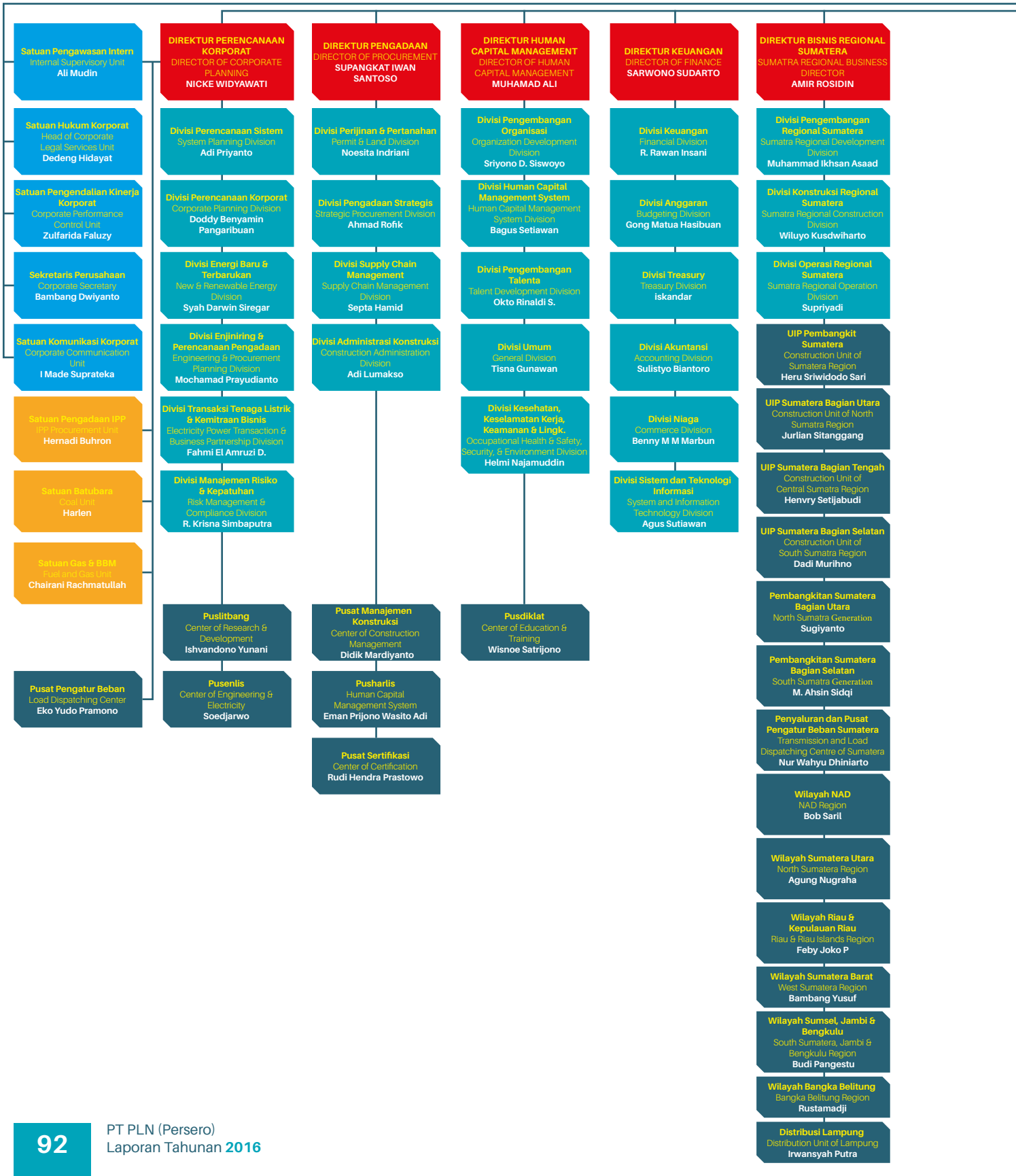

PT PLN (Persero) No. 0179.P/Dir/2016, Tgl. 03 Mei 2016

PT PLN (Persero) No. 0179.P/Dir/2016, Date. May 03, 2016

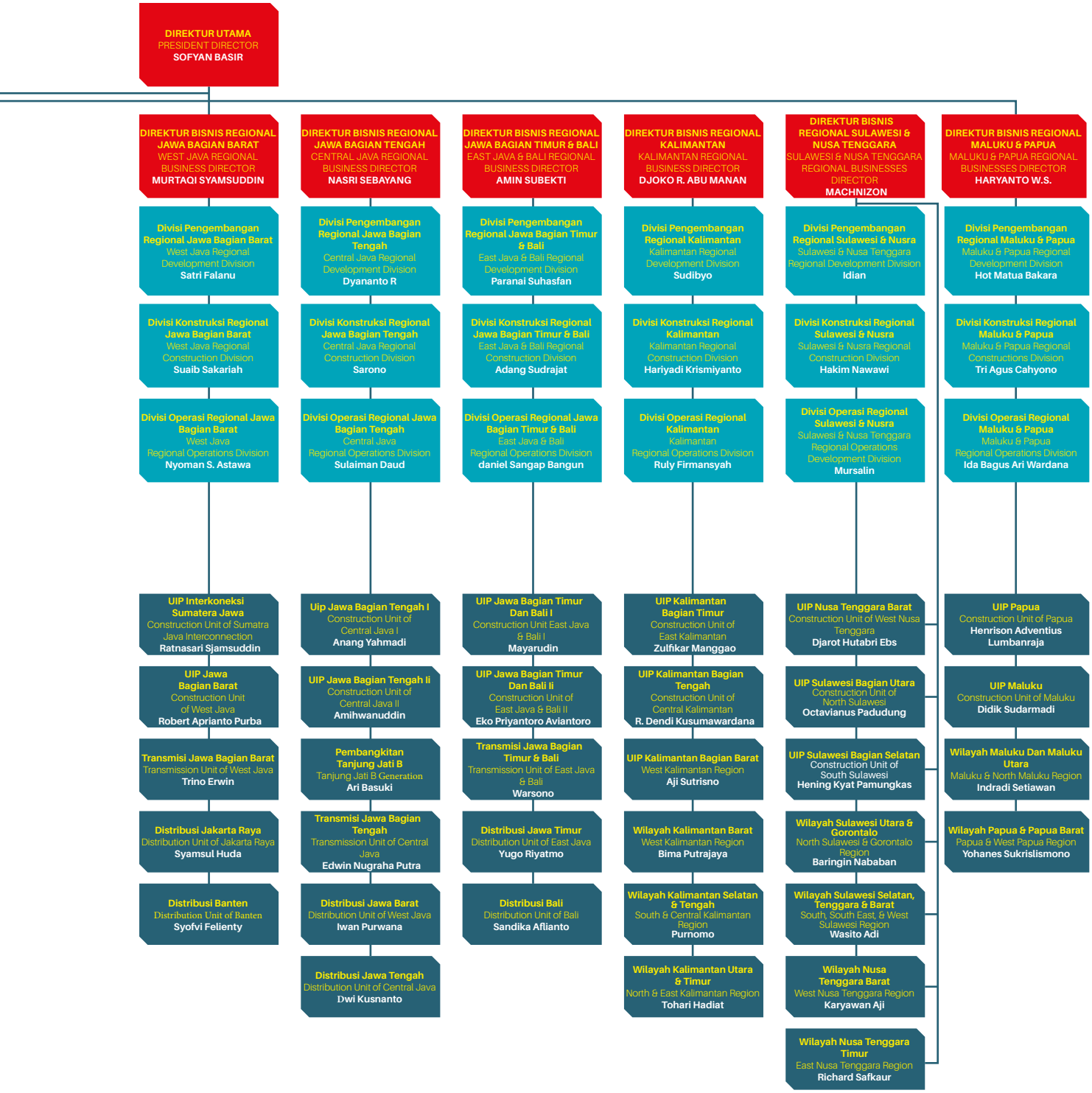

* Status Per 31 Desember 2016
* Status Per December,31 2016

Kepemilikan Saham

Shareholders Ownership

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Hingga berakhirnya tahun buku 2016, Perseroan belum mencatatkan sahamnya di bursa saham dan belum menawarkan saham perdana (*initial pubic offering*) ke publik.

LISTING OF SHARES

PT PLN (Persero) is a State-Owned Enterprises (SOEs) 100% owned by the Republic of Indonesia. By end of fiscal year 2016, the Company has not listed its shares on the stock market and has not offered IPO (initial public offering) to the public.

Daftar Efek Domestik yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of Domestic Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

No.	Uraian Description	Jumlah Amount		Penerbitan Issued Loan Signing	Tenor (Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate (%)	Peringkat Pefindo		Tempat Listing Listing Location
								Pefindo		
								2015	2016	
1	PLN VIII 2006 SERI B	IDR	865.000.000.000	21-Jun-06	15	21-Jun-21	13,75%	AAA	AAA	IDX
2	PLN IX 2007 SERI A	IDR	1.500.000.000.000	10-Jul-07	10	10-Jul-17	10,40%	AAA	AAA	IDX
3	PLN IX 2007 SERI B	IDR	1.200.000.000.000	10-Jul-07	15	10-Jul-22	10,90%	AAA	AAA	IDX
4	PLN SYARIAH IJARAH II	IDR	300.000.000.000	10-Jul-07	10	10-Jul-17	10,40%	AAA	AAA	IDX
5	PLN XI 2010 SERI A	IDR	920.000.000.000	12-Jan-10	7	12-Jan-17	11,95%	AAA	AAA	IDX
6	PLN XI 2010 SERI B	IDR	1.783.000.000.000	12-Jan-10	10	12-Jan-20	12,55%	AAA	AAA	IDX
7	PLN SUKUK IJARAH IV SERI A	IDR	130.000.000.000	12-Jan-10	7	12-Jan-17	11,95%	AAA	AAA	IDX
8	PLN SUKUK IJARAH IV SERI B	IDR	167.000.000.000	12-Jan-10	10	12-Jan-20	12,55%	AAA	AAA	IDX
9	PLN XII 2010 SERI B	IDR	1.855.000.000.000	8-Jul-10	12	8-Jul-22	10,40%	AAA	AAA	IDX
10	PLN SUKUK IJARAH V SERI B	IDR	340.000.000.000	8-Jul-10	12	8-Jul-22	10,40%	AAA	AAA	IDX
11	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A	IDR	182.000.000.000,00	5-Jul-13	7	5-Jul-20	8,00%	AAA	AAA	IDX
12	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B	IDR	697.000.000.000,00	5-Jul-13	10	5-Jul-23	8,25%	AAA	AAA	IDX
13	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap I	IDR	121.000.000.000,00	5-Jul-13	7	5-Jul-20	8,00%	AAA	AAA	IDX
14	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	593.000.000.000,00	10-Dec-13	5	10-Dec-18	9,00%	AAA	AAA	IDX
15	Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	651.000.000.000,00	10-Dec-13	10	10-Dec-23	9,60%	AAA	AAA	IDX
16	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap II Seri A	IDR	321.000.000.000,00	10-Dec-13	5	10-Dec-18	9,00%	AAA	AAA	IDX
17	Sukuk Ijarah Berkelan-jutan I PLN Tahap II Seri B	IDR	108.000.000.000,00	10-Dec-13	10	10-Dec-23	9,60%	AAA	AAA	IDX

Daftar Efek Internasional yang Diterbitkan PLN dan Belum Jatuh Tempo
List of International Bonds Issued by PLN and Not Yet Reaching Maturity

No	Uraian Description	Mata Uang Currency	Jumlah Amount	Penerbitan Issued	Tenor (Years)	Jatuh Tempo Maturity Date	Fixed Rate (%)	Peringkat Rating						Tempat Listing Listing Location
								S&P		Moody		Fitch		
								2015	2016	2015	2016	2015	2016	
1	GLOBAL BOND II Tr. A	USD	500.000.000	28-Jun-07	10	28-Jun-17	7,25%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
2	GLOBAL BOND II Tr. B	USD	500.000.000	28-Jun-07	30	29-Jun-37	7,88%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
3	GLOBAL BOND III	USD	750.000.000	7-Aug-09	10	7-Aug-19	8,00%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
4	GLOBAL BOND IV	USD	1.250.000.000	6-Nov-09	10	20-Jan-20	7,75%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
5	GMTN 1st DD 2011	USD	1.000.000.000,00	22-Nov-11	10	22-Nov-21	5,50%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX
6	GMTN 2nd DD 2012	USD	1.000.000.000,00	24-Oct-12	30	24-Oct-42	5,25%	BB	BB	Baa3	Baa3	BBB-	BBB-	SGX

Anak Perusahaan
Subsidiary

Nama Perusahaan Name of Company	**Bidang Usaha** Line of Business	**Kepemilikan** Ownership	**Status Operasional** Operational Status
PT Indonesia Power	Pembangkitan tenaga Listrik **Power Generation**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkitan Tenaga Listrik **Power Generation**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT Indonesia Comnets Plus	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi **Telecommunication Provider**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyedia Tenaga Listrik **Power Generation**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi **Engineering, Procurement and Construction**	99,90%	Beroperasi **In operations**
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Penyedia Jasa Tenaga Listrik **Power Generation**	99,97%	Beroperasi **In operations**
PT PLN Batubara	Perdagangan Batubara **Coal Trading**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT PLN Geothermal	Pembagkit Tenaga Listrik **Power Generation**	99,99%	Belum Beroperasi **Not operations**
Majapahit Holding BV	Lembaga Keuangan **Financial Institution**	100%	Beroperasi **In operations**
PT Pelayanan Bahtera Adiguna	Pelayaran **Shipping**	99,99%	Beroperasi **In operations**
PT Haleyora Power	Pembangkit Tenaga listrik **Power Generation**	99,99%	Beroperasi **In operations**

Entitas Asosiasi & Ventura Bersama
Associated Entity & Joint Venture

Nama Perusahaan Name of Company	Bidang Usaha Line of Business	Kepemilikan Ownership		Status Operasional Operational Status
		Langsung Direct	Tidak Langsung Indirect	
Perusahaan Asosiasi Entitas Asosiasi Associated Company				
PT Geo Dipa Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation	6,67%		Beroperasi In operations
PT Mitra Energi Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		30,00% / PT PLN Batam	Beroperasi In operations
PT Indo Pusaka Berau	Perdagangan Batubara Coal Trading		46,80% / PT IP	Beroperasi In operations
PT Sumber Segara Primadaya	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		49,00% / PT PJB	Beroperasi In operations
PT Dalle Energy Batam	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		20,00% / PTPLN Batam	Beroperasi In operations
PT Tanjung Kasam Power	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		10,00% / PT PLN Batam	Beroperasi In operations
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Generation		45,00% / PT Haleyora Power	Beroperasi In operations
Ventura Bersama Joint Venture				
PT Unelec Indonesia	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik Power Generation Support	32,25%		Beroperasi In operations
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		51,00% / PT IP	Beroperasi In operations
PT Bajradaya Sentranusa	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		36,61% / PT PJB	Beroperasi In operations
PT Bukit Pembangkit Inovatif	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		37,25% / PT PJB	Beroperasi In operations
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Operasi dan Pemeliharaan Operations & Maintenance		49,00% / PT PJB	Beroperasi In operations
PT Perta Daya Gas	Transportasi dan penyimpanan LNG LNG Transport and Storage		35,00% / PT IP	Beroperasi In operations
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik Control Equipment & Power Distribution		49,00% / PT PLNE	Beroperasi In operations
PT Rekind Daya Mamuju	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		10,00% / PT PJB	Beroperasi In operations
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		30,00%/ PT PJB	Beroperasi In operations
PT GCL Indo Tenaga	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		35,00%/ PT IP	Beroperasi In operations
PT Guohua Taidian – PJBI	Pembangkit Tenaga Listrik Power Generation		35,00%/ PT PJB	Beroperasi In operations

Struktur Grup Perusahaan

Business Structure and Subsidiary

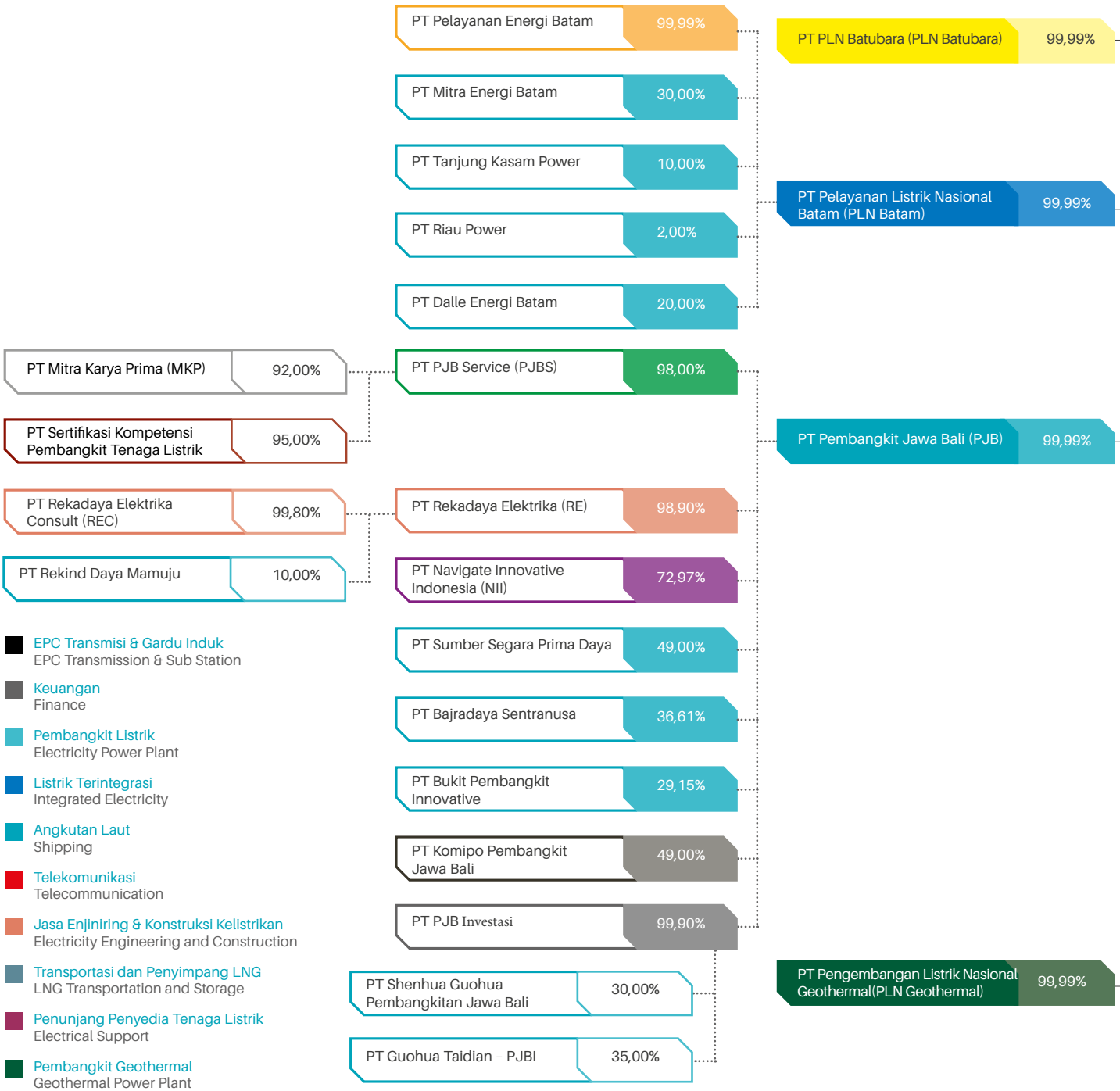

- EPC Transmisi & Gardu Induk
  EPC Transmission & Sub Station
- Keuangan
  Finance
- Pembangkit Listrik
  Electricity Power Plant
- Listrik Terintegrasi
  Integrated Electricity
- Angkutan Laut
  Shipping
- Telekomunikasi
  Telecommunication
- Jasa Enjiniring & Konstruksi Kelistrikan
  Electricity Engineering and Construction
- Transportasi dan Penyimpang LNG
  LNG Transportation and Storage
- Penunjang Penyedia Tenaga Listrik
  Electrical Support
- Pembangkit Geothermal
  Geothermal Power Plant
- Operasi dan Pemeliharaan
  Operational & Maintenance
- Pembangunan Pipa Gas dan Energi lainnya
  Construction of Gas Pipeline and Other Energy Services
- Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
  Electricity Controller and Distribution
- Pemeliharaan Pembangkit
  Power Plant Maintenance
- Perdagangan Batubara
  Coal Trading
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Listrik & Konsultasi Kelistrikan
  Electricity Competency Sertificaton & Electricity Consultation

Catatan:
(*) "Unit bisnis" adalah Unit Operasional dari PLN yang menjalankan fungsi usaha tertentu. Daftar unit bisnis ini beserta bidang kegiatannya dapat dilihat pada Lampiran "profil perusahaan" per 31 Desember 2016.

Note:
(*) "Business Unit" is defined as an Operational Unit of PLN that performs certain business functions. The list of business units and their lines of business are available on the Appendix titled "Company Profile" as at December 31, 2016.

——— Anak Perusahaan | Subsidiary
- - - - - - - - *Special Purpose Vehicle* (SPV)
. . . . . Perusahaan Asosiasi & Ventura Bersama | Associated & Joint Venture

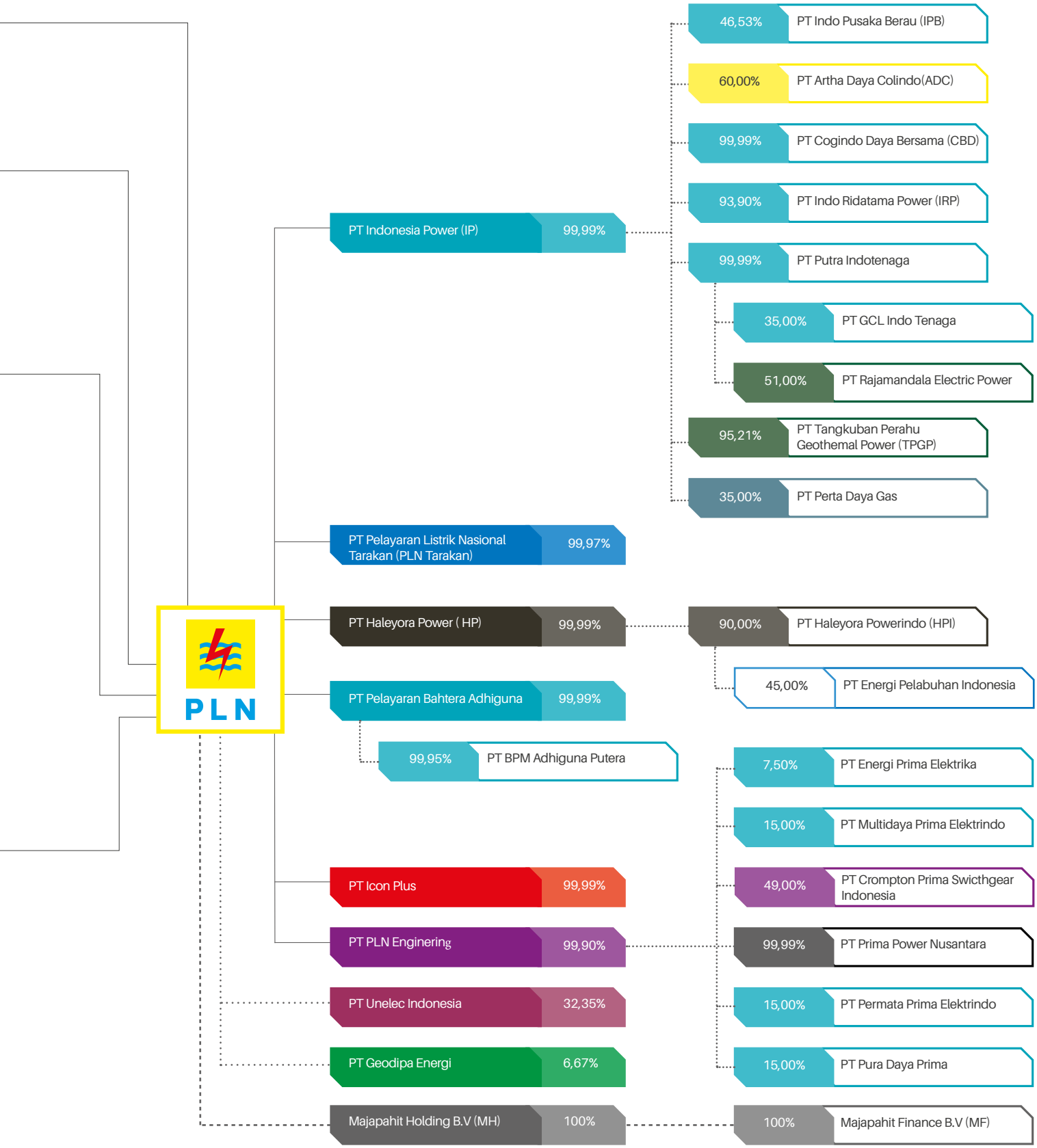
PLN
PT Indonesia Power (IP) 99,99%
46,53% PT Indo Pusaka Berau (IPB)
60,00% PT Artha Daya Colindo(ADC)
99,99% PT Cogindo Daya Bersama (CBD)
93,90% PT Indo Ridatama Power (IRP)
99,99% PT Putra Indotenaga
35,00% PT GCL Indo Tenaga
51,00% PT Rajamandala Electric Power
95,21% PT Tangkuban Perahu Geothemal Power (TPGP)
35,00% PT Perta Daya Gas
PT Pelayaran Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) 99,97%
PT Haleyora Power (HP) 99,99%
90,00% PT Haleyora Powerindo (HPI)
45,00% PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 99,99%
99,95% PT BPM Adhiguna Putera
PT Icon Plus 99,99%
PT PLN Enginering 99,90%
7,50% PT Energi Prima Elektrika
15,00% PT Multidaya Prima Elektrindo
49,00% PT Crompton Prima Swicthgear Indonesia
99,99% PT Prima Power Nusantara
15,00% PT Permata Prima Elektrindo
15,00% PT Pura Daya Prima
PT Unelec Indonesia 32,35%
PT Geodipa Energi 6,67%
Majapahit Holding B.V (MH) 100%
100% Majapahit Finance B.V (MF)

Entitas Anak Perusahaan

Subsidiaries

PT INDONESIA POWER

PT Indonesia Power (IP) berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PJB I dan kemudian berubah menjadi PT Indonesia Power pada tanggal 1 September 2000 bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha-usaha lain di antaranya pekerjan operasi dan maintenance pembangkit, pengembangan teknologi pembangkit, serta bidang terkait lainnya. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Indonesia Power adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Indonesia Power (IP) was established in October 3, 1995 under the name PJB I and was renamed to PT Indonesia Power in September 1, 2000. This company operates in the field of power generation as well as other businesses among others the operation and maintenance of generators, development of generator technology, as well as other related fields. The Company's shareholding in PT Indonesia Power is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan — Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	198.332	195.973	(1,19)	Non-current Assets
Aset Lancar	28.155	30.468	8,22	Current Assets
Total	**226.487**	**226.441**	**(0,02)**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	214.875	216.318	0,67	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	2.491	5.825	133,84	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	9.121	4.298	(52,88)	Long-term Liability
Total	**226.487**	**226.441**	**(0,02)**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	32.020	36.509	14,02	Operating Income
Biaya Usaha	29.929	32.700	9,26	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	2.091	3.809	82,16	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	8	27	237,50	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	**4.680**	**2.643**	**(43,53)**	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Bagus Setiawan	Komisaris Utama President Commissioner	25 Agustus 2016	25 Agustus 2020	Anggaran Dasar PT IP Masa Jabatan Direksi Selama 4 Tahun PT IP Articles of Association on The Work Tenure of The Board of Commissioners For 4 Years
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	25 Agustus 2016	25 Agustus 2020	
Tri Setyo Nugroho	Komisaris Commissioner	25 Agustus 2016	25 Agustus 2020	
Agus Hernawan	Komisaris Commissioner	25 Agustus 2016	25 Agustus 2020	
Abdi Mustakim	Komisaris Commissioner	10 November 2015	10 November 2019	
Ahmad Yani	Komisaris Commissioner	02 Mei 2016	02 Mei 2020	
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Utama Director Of Operations	14 Juli 2016	14 Juli 2020	Anggaran Dasar PT IP Masa Jabatan Direksi Selama 4 Tahun PT IP Articles 0f Association 0n The Work Tenure 0f The Board 0f Directors For 4 Years
Eri Prabowo	Direktur Operasi I Director Of Operations I	11 Desember 2013	11 Desember 2017	
Antonius Rt. Artono	Direktur Operasi Ii Director Of Operations Ii	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Adi Supriono	Direktur Pengembangan Dan Niaga Director Of Development And Commerce	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Hudiono	Direktur Keuangan Director Of Finance	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Roikhan	Direktur Sdm Dan Administrasi Director Of Human Resources And Administration	11 Desember 2013	11 Desember 2017	

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PJB II dan kemudian berubah menjadi PT PJB pada tanggal 1 September 2000 bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha-usaha lain di antaranya pekerjaan operasi dan *maintenance* pembangkit, pengembangan teknologi pembangkit, serta bidang terkait lainnya. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Pembangkitan Jawa Bali adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) was established on October 3 1995 by the name PJB II and was renamed to PT PJB on September 1, 2000. This company operates in the field of power generation as well as other businesses among others the operation and maintenance of generators, development of generator technology, as well as other related fields. The Company's shareholding in PT Pembangkitan Jawa Bali is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan — Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	172.972	169.992	(1,72)	Non-current Assets
Aset Lancar	22.574	24.277	7,54	Current Assets
Total	**195.546**	**194.269**	**(0,65)**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	186.242	187.543	0,70	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	1.820	3.019	65,92	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	7.485	3.707	(50,47)	Long-term Liability
Total	**195.546**	**194.269**	**(0,65)**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	27.862	35.260	26,55	Operating Income
Biaya Usaha	26.393	29.276	10,92	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	1.469	5.984	307,32	Profit/ Loss
Pendapatan/(Beban) di Luar Usaha	781	356	(54,37)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	3.228	4.731	46,56	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Sriyono D Siswoyo	Plt. Komisaris Utama President Commissioner	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Wiluyo Kusdwiharto	Plt. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Benny MM Marbun	Plt. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Iwan Agung Firstantara	Direktur Utama President Director	14 Juli 2016	14 Juli 2020	Anggaran Dasar PT PJB masa Jabatan Direksi selama 4 tahun PT PJB Articles of Association on the Work Tenure of the Board of Directors for 4 Years
R. Yuddy Setio Wicaksono	Direktur Operasi I Director of Operations I	11 Desember 2013	11 Desember 2017	
Miftahul Jannah	Direktur Operasi II Director of Operations II	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Henky Heru Basudewo	Direktur Pengembangan & Niaga Director of Development and Commerce	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Suharto	Direktur SDM & Administrasi Director of Finance	14 Juli 2016	14 Juli 2020	
Tjutju Kurnia Sutjiningsih	Direktur Keuangan Director of Human Resources and Administration	14 Juli 2016	14 Juli 2020	

PT INDONESIA COMNETS PLUS (PT ICON+)

PT Indonesia Comnets Plus berdiri pada tanggal 3 Oktober 2000 dan berperan sebagai penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi berbasis serat optik dalam upaya memenuhi kebutuhan sistem jaringan dan layanan telekomunikasi serta layanan teknologi informasi bagi sektor ketenagalistrikan dan publik. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Indoneisa Comnets Plus adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Indonesia Comnets Plus was established in October 3, 2000 and acts as a provider of fiber optic based telecommunications networks and services in an effort to meet the needs of telecommunications network and services system as well as information technology services for the electricity sector and the public. The Company's shareholding in PT Indonesia Comnets Plus is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	1.188	1.071	(9,78)	Non-current Assets
Aset Lancar	883	1.216	37,63	Current Assets
Total	**2.071**	**2.287**	**10,44**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	1.195	1.414	18,32	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	353	338	(4,34)	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	522	535	2,39	Long-term Liability
Total	**2.071**	**2.287**	**10,44**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	1.609	1.624	0,93	Operating Income
Biaya Usaha	1.272	1.273	0,07	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	337	351	4,18	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	(58)	(27)	(52,67)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	202	219	8,31	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Gong Matua Hasibuan	PLT. Komisaris Utama President Commissioner	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Agus Sutiawan	PLT. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Hikmat Dradjat	PLT. Direktur Utama President Director	09 Februari 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Rully Fasri	PLT. Direktur Perencanaan dan Operasi Director of Planning and Operations	09 Februari 2016	-	
Kuswowo	PLT. Direktur Keuangan & SDM Director of Finance and Human Resources	01 Oktober 2015	-	
Ardian Cholid	PLT. Direktur Niaga Director of Commerce	21 Maret 2016	-	

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) berdiri pada tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam bidang pembangkitan dan distribusi listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam. Kepemilikan saham Perseroan pada PT PLN Batam adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) was established in October 3, 2000 and operates in the field of power generation and distribution to meet the public needs within the area of Batam Island. The Company's shareholding in PT Pelayanan Listrik Nasional Batam is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	5.136	15.265	197,20	Non-current Assets
Aset Lancar	1.278	825	(35,40)	Current Assets
Total	**6.414**	**16.091**	**150,86**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	4.299	5.675	32,02	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	1.136	7.900	595,56	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	980	2.516	156,82	Long-term Liability
Total	**6.414**	**16.091**	**150,86**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	2.841	3.261	14,82	Operating Income
Biaya Usaha	2.677	3.061	14,36	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	164	200	22,35	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	62	53	(13,92)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	334	182	(45,48)	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Yahya Sacawiria	Komisaris Utama President Commissioner	02 Mei 2016	02 Mei 2020	Anggaran Dasar PT PLN Batam masa Jabatan Dekom selama 4 tahun PT PLN Batam Articles of Association on the Work Tenure of the Board of Commissioners for 4 Years
Fery Krisna	Komisaris Commissioner	04 Maret 2013	04 Maret 2017	
Junino Jahja	Komisaris Commissioner	04 Maret 2013	04 Maret 2017	
Dadan Koerniadipoera	Direktur Utama President Director	21 Maret 2016	21 Maret 2020	Masa Jabatan 4 tahun 4 Years Work Tenure
Ikram	Direktur Operasi Director of Operations	21 Maret 2016	21 Maret 2020	Masa Jabatan 4 tahun 4 Years Work Tenure
Khusnul Mubien	PLT. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha Director of Business and Business Development	30 Agustus 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Salusra Wijaya	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and Human Resources	21 Maret 2016	21 Maret 2020	Masa Jabatan 4 tahun 4 Years Work Tenure

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

PT Prima Layanan Nasional Enjinering (PT PLN Enjinering) berdiri padatanggal 3 Oktober 2002, bergerak dalam bidang rekayasa/konstruksi listrik. Kepemilikan saham Perseroan pada PT PLN Enjinering adalah sebesar 9,90% dimana sebesar 0,1% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Prima Layanan Nasional Enjinering (PT PLN Enjinering) was established in October 3, 2002 and operates in the field of electrical engineering/ construction. The Company's shareholding in PT Prima Layanan Nasional Enjiniring is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan — Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	280	306	9,26	Non-current Assets
Aset Lancar	236	572	142,14	Current Assets
Total	**516**	**878**	**70,11**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	382	404	5,65	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	53	190	256,99	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	81	284	252,60	Long-term Liability
Total	**516**	**878**	**70,11**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	295	485	64,28	Operating Income
Biaya Usaha	249	459	84,20	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	46	26	(43,84)	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	8	(3)	(131,78)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	53	22	(59,19)	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Tumpal Simarmata	Plt. Komisaris Utama President Commissioner	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Djoko Prasetyo	Plt. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Julius Bobo	Plt. Komisaris Commissioner	22 Juni 2016		
Hernadi Buhron	Plt. Direktur Utama President Director	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Alfi Zamzami	Plt. Direktur Keuangan & SDM Director of Finance and Human Resources	2 Desember 2016	-	
Yanuar Hakim	Plt. Direktur Enjiniring Director of Engineering	2 Desember 2016	-	
Ultrisza Mednawarman	Plt. Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development	2 Desember 2016	-	

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) berdiri pada tanggal 15 Desember 2003 dan bergerak dalam bidang pembangkitan dan distribusi listrik bagi kepentingan umum di wilayah pulau Tarakan. Kepemilikan saham Perseroan pada PT PLN Tarakan adalah sebesar 99,97% dimana sebesar 0,03% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 November 2016, ditetapkan bahwa terhitung 1 Januari 2017 bidang usaha PT PLN Tarakan tidak lagi sebagai pengelola pembangkitan dan distribusi listrik di Pulau Tarakan, tetapi sebagai perusahaan penyedia Operation & Maintenance (O&M) serta pelayanan teknik di kawasan Indonesia Timur dan kawasan industri. Pengelolaan pembangkitan dan distribusi di Pulau Tarakan yang sebelumnya dilakukan oleh PT PLN Tarakan selanjutnya dikelola oleh PT PLN (Persero).

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) was established on December 15, 2003 and operates in the field of power generation and distribution to meet the public needs in the Island Tarakan. The Company's shareholding in PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan is 99.97% with 0.03% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Based on the General Meeting of Shareholders held in November 30, 2016, it was determined that as of January 1, 2017 PT PLN Tarakan no longer manages the generation and distribution of electricity in Tarakan Island, but as a provider of Operation & Maintenance (O&M) as well as engineering services within the area of Eastern Indonesia and industrial areas. The power generation and distribution on the island of Tarakan which was previously conducted by PT PLN Tarakan will be managed by PT PLN (Persero).

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	194	214	110,13	Non-current Assets
Aset Lancar	115	139	120,45	Current Assets
Total	**309**	**352**	**113,98**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	19	42	220,86	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	33	26	77,52	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	257	285	110,79	Long-term Liability
Total	**309**	**352**	**113,98**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	361	384	106,31	Operating Income
Biaya Usaha	351	360	102,55	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	11	24	230,40	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	5	2	36,31	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	25	23	91,51	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Dewa Gede Ngurah Ambara	Plt. Komisaris Utama President Commissioner	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
R. Rawan Insani	Plt. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Rahimuddin	Plt. Direktur Utama President Director	10 Desember 2015	-	Sebagai Plt As Acting
Hendrizal	Plt. Direktur Keuangan & Administrasi Director of Finance and Administration	26 September 2015	-	

PT PLN BATUBARA

PT PLN Batubara didirikan pada tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tambang dan trading batubara serta berfungsi untuk menyediakan sebagian kebutuhan batubara untuk pembangkit PLN. Kepemilikan saham Perseroan pada PT PLN Batubara adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT PLN Batubara was established on September 3, 2008 and is a subsidiary that operates in the field of coal mining and trading and functions to provide supply of coal for PLN's power plants. The Company's shareholding in PT PLN Batubara is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	1.032	1.001	(2,99)	Non-current Assets
Aset Lancar	192	233	21,44	Current Assets
Total	**1.224**	**1.234**	**0,84**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	(69)	(12)	(82,28)	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	1	2	32,48	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	1.291	1.245	(3,60)	Long-term Liability
Total	**1.224**	**1.234**	**0,84**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	3.399	2.632	(22,57)	Operating Income
Biaya Usaha	3.470	2.555	(26,36)	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	(72)	76	(206,37)	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	(24)	0,46	(101,92)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	(95)	56	(159,22)	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Harlen	Plt. Komisaris Utama President Commissioner	26 Juni 2015	-	Sebagai Plt As Acting
Suwarno	Plt. Direktur Utama & PLT. Direktur Keuangan President Director and Finance Director	26 Juni 2015	-	Sebagai Plt As Acting
Djoko Martono	Plt. Direktur Operasi & PLT. Direktur SDM Director of Operations and Human Resources	26 Juni 2015	-	

PT PELAYANAN BAHTERA ADIGUNA

PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) merupakan anak perusahaan hasil dari penugasan Kementerian BUMN untuk mengakuisisi PT Pelayaran Bahtera Adiguna menjadi anak perusahaan PLN. PT BAG bergerak di bidang transportasi laut khususnya angkutan batubara. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Pelayaran Bahtera Adiguna adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) is a subsidiary established based on the mandate from the Ministry of SOEs to acquire PT Pelayaran Bahtera Adiguna to become a subsidiary of PLN. PT BAG engaged operates in the field of sea transport particularly coal transportation. The Company's shareholding in PT Pelayaran Bahtera Adiguna is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan — Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	926	859	(7,26)	Non-current Assets
Aset Lancar	349	398	14,25	Current Assets
Total	**1.275**	**1.257**	**(1,37)**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	110	248	125,04	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	860	634	(26,24)	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	304	374	23,08	Long-term Liability
Total	**1.275**	**1.257**	**(1,37)**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	1.088	1.148	5,55	Operating Income
Biaya Usaha	914	951	4,08	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	175	198	13,23	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	5	(0,3)	(106,41)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	72	97	35,11	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Subagio Utomo	Dewan Komisaris Board of Commissioners	24 Februari 2012	24 Februari 2017	Anggaran Dasar PT BAG masa Jabatan Direksi selama 5 tahun PT BAG Articles of Association on the Work Tenure of the Board of Directors for 5 Years
Surya Fitriadi	Plt. Direktur Utama President Director	07 April 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Acto Pambudi Rahardjo	Plt. Direktur Operasi Director of Operations	07 April 2016	-	
Surya Fitriadi	Direktur Keuangan Director of Finance	14 November 2011	14 November 2016	Masa Jabatan Direksi selama 5 tahun Work Tenure of the Board of Directors for 5 Years

PT HALEYORA POWER

Berdiri pada tahun 2011 dan bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan jasa layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Kepemilikan saham Perseroan pada PT Haleyora Power adalah sebesar 99,99% dimana sebesar 0,01% saham lainnya merupakan kepemilikan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Pegawai PLN (YPK PLN).

PT Haleyora Power was established in 2011 and operates in the field of power generations as well as the operation and maintenance power transmission and distribution. The Company's shareholding in PT Haleyora Power is 99.99% with 0.01% of the remaining shares held by Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (PLN YPK).

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights

Keterangan	2015	2016	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset (Rp Miliar)				**Assets (Rp Billion)**
Aset Tidak lancar	68	143	109,16	Non-current Assets
Aset Lancar	395	460	16,63	Current Assets
Total	**463**	**603**	**30,30**	Total
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Miliar)				**Equity and Liability (Rp Billion)**
Ekuitas	266	346	29,85	Equity
Liabilitas Jangka Pendek	136	165	21,37	Short-term Liability
Liabilitas Jangka Panjang	61	93	52,16	Long-term Liability
Total	**463**	**603**	**30,30**	Total
Laba Rugi (Rp Miliar)				**Profit and Loss (Rp Billion)**
Pendapatan Usaha	1.048	1.345	28,30	Operating Income
Biaya Usaha	956	1.210	26,63	Operating Expenses
Laba/Rugi Usaha	93	135	45,50	Profit/ Loss
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha	9	(5)	(151,69)	Other Operating Income/ Loss
Laba/Rugi Periode Berjalan	75	93	23,35	Current Period Profit/ Loss

Susunan Pengurus

Management

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date Of Appointment	Tanggal Berakhir Date Ended	Keterangan Notes
Fahmi El Amruzi D	Plt. Komisaris Utama	2 Desember 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Okto Rinaldi S	Plt. Komisaris Commissioner	2 Desember 2016	-	
Achmad Taufik Haji	Plt. Direktur Utama President Director	12 Januari 2016	-	Sebagai Plt As Acting
Sutrisno Samad	Plt. Direktur Keuangan & SDM Director of Finance and Human Resources	14 Juli 2016	-	

PT PLN GEOTHERMAL

PLN Geothermal (PLNG) didirikan pada tanggal 28 Januari 2009 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Kegiatan PT PLNG sementara tidak beroperasi sambil menunggu keputusan pemerintah tentang kebijakan Badan Usaha Pengelolaan Geothermal.

PT PLN GEOTHERMAL

PLN Geothermal (PLNG) was established in January 28, 2009 and is a subsidiary engaged in the operations and management of geothermal based power generation.

While awaiting for the Government's decision related to the policy on Geothermal Management Enterprises, PT PLNG is currently not operating.

MAJAPAHIT HOLDING B.V. (MH)

Majapahit Holding BV (MH) merupakan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak pada bidang keuangan berbentuk Special Purpose Vehicle. PT PLN (Persero) memiliki 100% saham atas Majapahit Holding BV (MH). Majapahit Holding BV (MH) didirikan pada tanggal 3 Oktober 2006 dan berdomisili di Amsterdam, Belanda.

MAJAPAHIT HOLDING B.V. (MH)

Majapahit Holding BV (MH) is a subsidiary of PT PLN (Persero) engaged in finance in the form of Special Purpose Vehicle. PT PLN (Persero) owns a 100% interest in Majapahit Holding BV (MH). Majapahit Holding BV (MH) was established on October 3, 2006 and is domiciled in Amsterdam, The Netherlands.

Entitas Asosiasi & Ventura Bersama

Associated Entities & Joint Ventures

PT GEO DIPA ENERGI

PT Geo Dipa Energi bergerak dalam bidang usaha pertambangan, perdagangan, dan jasa dalam bidang panas bumi dari hulu sampai dengan hilir, dan pembangkit listrik, didirikan berdasarkan Akta No 6 tanggal 5 Juli 2002 dari Notaris Haryanto, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C-16633 HT.01.01. TH 2002 tanggal 2 September 2002. PT Geo Dipa energy berdomisili di Jakarta. Perseroan memiliki 21.847.557 saham dengan nilai nominal Rp 10.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 218.475.570.000 yang merupakan 6,67% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT MITRA ENERGI BATAM

PT Mitra Energi Batam bergerak dalam bidang usaha Pembangkitan, Jasa Operasi & Pemeliharaan, Perdagangan alat listrik & peralatan teknis mekanikal termasuk suku cadang, didirikan berdasarkan Akta No 9 tanggal 17 November 2003 dari Notaris Yetty Taher, S.H. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-04167.AH.01.02 tanggal 30 Januari 2004.

PT Mitra Energi Batam berdomisili di Batam. Perseroan memiliki 72.930 saham melalui PT PLN Batam dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp72.930.000.000 yang merupakan 30% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA

PT Sumber Segara Primadaya bergerak dalam bidang usaha perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa, didirikan berdasarkan Akta No 65 tanggal 12 Mei 2003 dari Notaris Hilda Sari Gunawan, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C-12362HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Juni 2003.

PT Sumber Segara Primadaya berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 437.501 saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp437.501.000.000 yang merupakan 49% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT DALLE ENERGY BATAM

PT Dalle Energy Batam bergerak dalam bidang usaha Pembangkit tenaga, Penjualan energi listrik, Penyewaan pembangkit tenaga listrik, Perencanaan/rancang bangun pembangkit tenaga listrik dan Menyediakan Jasa Operasi dan Pemeliharaan, didirikan berdasarkan Akta No 5 tanggal 2 Maret 2005 dari Notaris Legalia Riama Uli Sirait, S.H M.M, M.H dan sudah mengalami perubahan melalui Akta No.20 tanggal 19 April 2012 oleh Notaris Yurisa Martanti, S.H, M.M. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

PT GEO DIPA ENERGI

PT Geo Dipa Energi is engaged in geothermal mining, trade and services, from upstream to the downstream, as well as power generation. This entity was established based on Deed Num. 6 dated July 5, 2002 by Notary Haryanto, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. C-16633 HT.01.01.TH 2002 dated September 2, 2002. PT Geo Dipa Energy is located in Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 21,847,557 shares with a nominal value of Rp 10,000 per share or equivalent to Rp 218,475,570,000 or representing 6.67% of ownership.

PT MITRA ENERGI BATAM

PT Mitra Energi Batam operates in the field of generation, operations & maintenance services, electrical & mechanical technical tools (including spare parts) trading. This entity was established based on Deed No. 9 dated November 17 2003 by Notary Yetty Taher, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decision No. AHU-04167. AH.01.02 dated January 30, 2004.

PT Mitra Energi Batam is located in Batam. As of December 31, 2016, the Company owns 72,930 shares through PT PLN Batam with a nominal value of Rp 1,000,000 per share or equivalent to Rp72,930,000,000, which represents 30% of ownership.

PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA

PT Sumber Segara Primadaya operates in the field of trade, industrial, mining and services, and was established based on Deed No. 65 dated May 12, 2003 by Notary Hilda Sari Gunawan, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. C-12362HT.01.01.TH.2003 dated June 3, 2003.

PT Sumber Segara Primadaya is located in South Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 437,501 shares through PT Pembangkitan Jawa Bali with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp437,501,000,000 or representing 49% of ownership.

PT DALLE ENERGY BATAM

PT Dalle Energy Batam operates in power generation, sales of electric energy, power plant rental, power plant planning/ design as well as provides operations and maintenance services. This entity is established based on Deed No. 5 dated March 2, 2005 by Notary Legalia Riama Uli Sirait, SH MM, MH and has experienced changes based Act No. 20 dated April 19, 2012 by Notary Yurisa Martanti, SH, MM The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-AH.01.10-20132 tanggal 5 Juni 2012.

PT Dalle Energy Batam berdomisili di Batam Perseroan memiliki 40.000 saham melalui PT PLN Batam dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp40.000.000.000 yang merupakan 20% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT TANJUNG KASAM POWER

PT Tanjung Kasam Power bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No 154 tanggal 12 April 2005 dari Notaris Yondri Darto, S.H . Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C-13005 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Mei 2006 Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No 8 tanggal 10 Mei 2010 dibuat dihadapan Nelson Edy Tampubolon, S.H, Notaris di Jakarta dan disahkan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH-01.10-16637 tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010.

PT Tanjung Kasam Power berdomisili di Batam. Perseroan memiliki 13.000.000 saham melalui PT PLN Batam dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp13.000.000.000 yang merupakan 10% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

PT Energi Pelabuhan Indonesia bergerak dalam bidang usaha penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya, didirikan berdasarkan Akta No 11 tanggal 05 November 2012 dari Notaris N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

PT Energi Pelabuhan Indonesia berdomisili di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perseroan memiliki 6.750.000 saham melalui PT Haleyora Power dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham atau setara dengan Rp67.500.000.000 yang merupakan 45% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT UNELEC INDONESIA

PT Unelec Indonesia bergerak dalam bidang usaha industri transformator dan peralatan listrik tegangan menengah dan tegangan tinggi serta jasa konstruksi di bidang ketenagalistrikan, didirikan berdasarkan Akta No 16 tanggal 21 Mei 1969 dari Notaris Eliza Pondaag Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No J.A.5/17/13 tanggal 07 Februari 1970.

Decision No. AHU-AH.01.10-20132 dated June 5, 2012.

PT Dalle Energy Batam is located in Batam. As of December 31, 2016, the Company owns 40,000 shares through PT PLN Batam with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp40,000,000,000 representing 20% of ownership.

PT TANJUNG KASAM POWER

PT Tanjung Kasam Power operates in the field of electricity supply. The entity was established based on Act No. 154 dated April 12, 2005 by Notary Yondri Darto, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decision No. C-13005 HT.01.01.TH.2006 dated May 5, 2006. The Articles of Association of this entity have been amended several times and the last amendments were made based on Deed No. 8 dated May 10, 2010 made before Notary Nelson Edy Tampubolon, SH, in Jakarta and was approved through Decision of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH-01.10-16637 of 2010 dated July 5, 2010.

PT Tanjung Kasam Power is located in Batam. As of December 31, 2016 the Company owns 13,000,000 shares through PT PLN Batam with a nominal value of Rp 1,000 per share or equivalent to Rp13,000,000,000, which represents 10% of ownership.

PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

PT Energi Pelabuhan Indonesia operates to supply electricity in the port area and its surroundings, This entity was established based on Deed No. 11 dated November 5, 2012 by Notary N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decision No. AHU-58019.AH.01.01 of 2012 dated November 14, 2012.

PT Energi Pelabuhan Indonesia is located in Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 6.75 million shares through PT Haleyora Power with a nominal value of Rp10,000 per share or equivalent to Rp67,500,000,000 representing 45% of ownership.

PT UNELEC INDONESIA

PT Unelec Indonesia operates in the field of industrial transformers and medium and high voltage electrical equipment as well as electricity construction services. This entity was established based on Deed No. 16 dated May 21, 1969 by Notary Eliza Pondaag. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. JA5/17/13 dated February 7, 1970.

PT Unelec Indonesia berdomisili di Jakarta Timur. Perseroan memiliki saham 22.384 saham terdiri dari Saham seri A sebanyak 18.340 dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.195.758.000 atau setara dengan US$3.668.000 dan Saham Seri C sebanyak 4.044 saham dengannilai nominal Rp7.440.960.000 atau setara dengan US$808.800 yang merupakan 32,35% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT RAJAMANDALA ELECTRIC POWER

PT Rajamandala Electric Power bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 14 Februari 2012 dari Notaris Lenny Janis Ishak, SH Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-08273.AH.01.01 tanggal 16 Februari 2012.

PT Rajamandala Electric Power berdomisili di Jakarta. Perseroan memiliki 10.200.000 saham melalui PT Putera Indo Tenaga dengan nilai nominal USD1 per lembar saham atau setara dengan USD10.200.000 yang merupakan 51% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT BAJRADAYA SENTRANUSA

PT Bajradaya Sentranusa bergerak dalam bidang usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk umum, didirikan berdasarkan Akta No 88 tanggal 30 oktober 1995 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-5.197.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

PT Bajradaya Sentranusa berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 388.516 saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp388.516.000.000 yang merupakan 36,61% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT BUKIT PEMBANGKIT INOVATIF

PT Bukit Pembangkit Inovatif bergerak dalam bidang usaha menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan guna kepentingan umum, didirikan berdasarkan Akta No 63 tanggal 28 Agustus 2006 dari Notaris Hasanal Yani Ali Amin, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No W7-01585HT.01.01.TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006.

PT Bukit Pembangkit Inovatif berdomisili di Palembang. Perseroan memiliki 332.127 saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp332.127.000.000 yang merupakan 29,15% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Unelec Indonesia is located in East Jakarta. As of December 31, 2016 the Company owns 22,384 shares, consisting of 18,340 series A shares with nominal value of Rp1,195,758,000 or equivalent to US$3,668,000 and 4,044 series C shares with nominal value of Rp7,440,960,000 or equivalent to US$ 808,800 representing 32.35% of ownership.

PT RAJAMANDALA ELECTRIC POWER

PT Rajamandala Electric Power operates in the field of power generation and was established based on Act No. 4 dated February 14, 2012 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-08273.AH.01.01 dated February 16, 2012.

PT Rajamandala Electric Power is located in Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 10.2 million shares through PT Putera Indo Tenaga with a nominal value of US$ 1 per share or equivalent to US$10,200,000 representing 51% of ownership.

PT BAJRADAYA SENTRANUSA

PT Bajradaya Sentranusa operates to supply electricity to the public, and was established based on Deed No. 88 dated October 30, 1995 by Notary Enimarya Agoes Suwarko, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decision No. C2-5.197.HT.01.01.TH.96 dated March 6, 1996.

PT Bajradaya Sentranusa is located in Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 388,516 shares through PT Pembangkitan Jawa Bali with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp388,516,000,000 representing 36.61% of ownership.

PT BUKIT PEMBANGKIT INOVATIF

PT Bukit Pembangkit Inovatif operates in the electricity business for public interest and was established based on Deed No. 63 dated August 28, 2006 by Notary Hasanal Yani Ali Amin, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. W7-01585HT.01.01.TH.2006 dated October 12, 2006.

PT Bukit Pembangkit Inovatif is located in Palembang. As of December 31, 2016, the Company owns 332,127 shares through PT Pembangkitan Jawa Bali with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp332,127,000,000 representing 29.15% of ownership.

PT KOMIPO PEMBANGKIT JAWA BALI

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali bergerak dalam bidang usaha jasa penunjang kelistrikan, didirikan berdasarkan Akta No 47 tanggal 30 September 2010 dari Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-46410.AH.01.01 tanggal 10 Oktober 2010.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 12.250 saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai nominal Rp 905.200 per lembar saham atau setara dengan Rp11.088.700.000 yang merupakan 49% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT PERTA DAYA GAS

PT Perta Daya Gas bergerak dalam bidang usaha pengangkutan, penyimpanan dan regasifikasi LNG, didirikan berdasarkan Akta No. 60 tanggal 26 April 2012 dari Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-29626.AH.01.01 tanggal 1 Juni 2012.

PT Perta Daya Gas berdomisili di Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 35.000 saham melalui PT Indonesia Power dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp35.000.000.000 yang merupakan 35% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT INDO PUSAKA BERAU

PT Indo Pusaka Berau bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 12 Januari 2005 dari Notaris Sukawati Sumadi, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-08559 HT.01.01 TH 2005 tanggal 31 Maret 2005.

PT Indo Pusaka Berau berdomisili di Berau, Kalimantan Timur. Perseroan memiliki 61.950 saham melalui PT Indonesia Power dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 61.950.000.000 yang merupakan 46,53% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT CROMPTON POWER SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Power Switchgear Indonesia bergerak dalam bidang usaha di bidang industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, didirikan berdasarkan Akta No 03 tanggal 7 Mei 2014 dari Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-08265.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014.

PT KOMIPO PEMBANGKIT JAWA BALI

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali operates in the field of electricity support services and was established based on Act No. 47 dated September 30, 2010 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-46410.AH.01.01 dated October 10, 2010.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali is located in Jakarta. As of December 31, 2016 the Company owns 12,250 shares through PT Pembangkitan Jawa Bali with a nominal value of Rp 905,200 per share or equivalent to Rp11,088,700,000 representing 49% of ownership.

PT PERTA DAYA GAS

PT Perta Daya Gas operates in the field of transportation, storage and regasification of LNG and was established based on Act No. 60 dated April 26, 2012 by Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-29626. AH.01.01 dated June 1, 2012.

PT Perta Daya Gas is located in Jakarta. As of December 31, 2016 the Company owns 35,000 shares through PT Indonesia Power with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp35,000,000,000 representing 35% of ownership.

PT INDO PUSAKA BERAU

PT Indo Pusaka Berau operates in the field of power generation and was established based on Act No. 8 dated January 12, 2005 by Notary Sukawati Sumadi, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decision No. C-08559 01.01 TH 2005 dated March 31, 2005.

PT Indo Pusaka Berau is located in East Kalimantan. As of December 31, 2016, the Company owns 61,950 shares through PT Indonesia Power with a nominal value of Rp1,000,000 per share or equivalent to Rp 61,950,000,000 representing 46.53% of ownership.

PT CROMPTON POWER SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Power Switchgear Indonesia operates in the field of industrial control equipment and electricity distribution, and was established based on Act No. 03 dated May 7, 2014 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-08265.40.10.2014 dated May 12, 2014.

PT Crompton Power Switchgear Indonesia berdomisili di Jakarta. Perseroan memiliki 147 saham melalui PT PLN Enjiniring dengan nilai nominal Rp11.6008.000 setara dengan USD1,000 per lembar saham atau setara dengan Rp1.706.376.000 yang merupakan 49% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Crompton Power Switchgear Indonesia is located in Jakarta. As of December 31, 2016, the Company owns 147 shares through PT PLN Enjiniring with a nominal value of Rp11,6008,000, or USD 1,000 per share or equivalent to Rp1,706,376,000 representing 49% of ownership.

PT REKIND DAYA MAMUJU

PT Rekind Daya Mamuju bergerak dalam bidang usaha pembangkitan tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No 6 tanggal 21 Februari 2003 dari Notaris Nurul Larasati, SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-56700.AH.01.01.Tahun 2013.

PT Rekind Daya Mamuju berdomisili di Jakarta. PT PJB memiliki 2.245.630 lembar saham yang merupakan 10% kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2016.

PT REKIND DAYA MAMUJU

PT Rekind Daya Mamuju engaged in the business of power generation, and was established based on Notarial Deed No. 6 dated February 21, 2003 of Public Notary Nurul Larasati, SH. The deed of incorporation was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-56700.AH.01.01. Year 2013.

PT Rekind Daya Mamuju resides in Jakarta. PT PJB and owns 2,245,630 shares of PT Rekind Daya Mamuju representing 10% of share ownership as of December 31, 2016.

PT SHENHUAN GUOHUA PEMBANGKITAN JAWA BALI

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No 5 tanggal 13 Januari 2016 dari Notaris Mina Ng SH. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-0001929.AH.01.01.Tahun 2016 Tanggal 13 Januari 2016.

PT Shenhuan Guohua Pembangkitan Jawa Bali berdomisili di Jakarta. PT PJB memiliki 24 lembar saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dengan nilai nominal US$1.000.000 per lembar saham atau setara dengan US$24.000.000, yang merupakan 30% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT SHENHUAN GUOHUA PEMBANGKITAN JAWA BALI

PT Shenhuan Guohua Pembangkitan Jawa Bali engaged in power generation business, and was established based on Notarial Deed No. 5 dated January 13, 2016 of Public Notary Mina Ng SH. The deed of incorporation was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0001929.AH.01.01. 2016 on January 13, 2016.

PT Jawa Bali Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali resides in Jakarta. PT PJB owns 24 shares of PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi with a nominal value of US$1,000,000 per share, equivalent to US$24 million, representing 30% ownership as of December 31, 2016.

PT GUOHUA TAIDIAN PEMBANGKITAN JAWA BALI

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GHPJB) bergerak dalam bidang usaha jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, didirikan berdasarkan Akta No 11 tanggal 23 September 2016 dari Notaris Lenny Janis Ishak SH Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU—00474777.AH.01.01.TAHUN 2016 Tanggal 26 Oktober 2016

PT GUOHUA TAIDIAN PEMBANGKITAN JAWA BALI

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GHPJB) is engaged in the operation and maintenance service of power plants business, and was established based on Notarial Deed No. 11 dated 23 September 2016 of Lenny Janis Ishak SH Public Notary. The deed of incorporation was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-00474777.AH.01.01. YEAR 2016 on October 26, 2016.

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali berdomisili di Jakarta. PT PJB memiliki 150.000 lembar saham melalui PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi setara dengan Rp1.951.500.000, yang merupakan 35% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2016.

PT GCL INDOTENAGA

PT GCL Indotenaga didirikan pada tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Akta No.11 oleh Notaris Mina Ng, SH. GCL Indotenaga bergerak dalam melaksanakan proyek untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara PLTU Batubara Kalbar-1 2x100 MW di Provinsi Kalimantan Barat dengan basis Bangun-Miliki-Operasi-Transfer (Build-Own-Operate-Transfer) dan memasok tenaga listrik kepada PLN sesuai dengan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik.

PT GCL Indotenaga berdomisili di Jakarta. PT. Indonesia Power melalui PT. Putra Indotenaga (PT. PIT) memiliki saham setara USD3.150.000 atau sebesar 35% kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2016.

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali resides in Jakarta. PT PJB owns 150,000 shares of PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi equivalent to Rp1,951,500,000, representing 35% ownership on December 31, 2016.

PT GCL INDOTENAGA

PT GCL Indotenaga was established on February 25, 2016 based on Notarial Deed no 11 by Public Notary Mina Ng, SH. PT GCL Indotenaga is engaged in the business of project development, operation, and maintaining a Steam Power PlantKalbar-1 2x100 MW in West Kalimantan Province under the scheme of Build-Own-Operate-Transfer and supplying electricity to PLN in accordance with Power Purchase Agreement.

PT GCL Indotenaga resides Jakarta. PT. Power Indonesia owns 35% of PT. Putra Indotenaga (PT. PIT) or equivalent to USD3,150,000 as of December 31, 2016.

Segmen Operasional Regional

Regional Operating Segments

Area Operasi PLN dan entitas anak terbagi dalam 7 segmen Operasi Regional menurut kondisi geografis, yakni: Operasi Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

The operational areas of PLN and its subsidiaries are divided into seven Regional Operating Segments according to geography: Sumatra, West Java, Central Java, East Java and Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, as well as Maluku and Papua

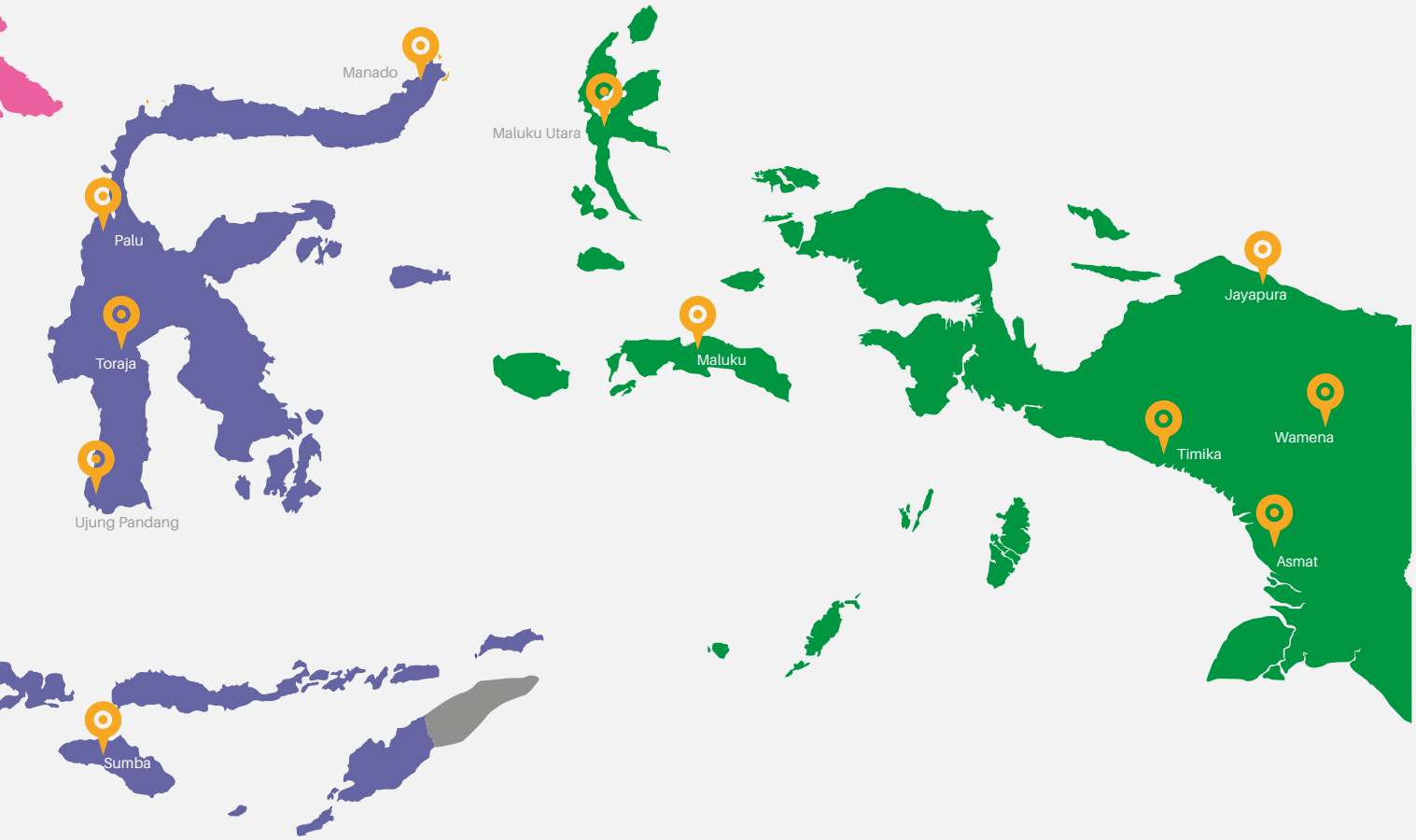
Manado
Maluku Utara
Palu
Toraja
Maluku
Jayapura
Timika
Wamena
Asmat
Ujung Pandang
Sumba

Profil Sumber Daya Manusia

Human Resources Profile

Sumber daya manusia PT PLN (Persero) dan anak perusahaan sampai akhir 2016 berjumlah 51.158 pegawai terdiri dari 43.956 pegawai dan 7.202 pegawai anak perusahaan.

As of the end of 2016, PT PLN (Persero) and its subsidiaries employed 51,158 employees consisting of 43,956 Company employees and 7,202 employees of the subsidiaries.

Jumlah Pegawai berdasarkan Level Manajemen
Number of Employees based on Management Level

Tingkat	2016	2015	2014	Level
Manajemen Atas	110	83	84	Top Management
Manajemen Menegah	425	362	358	Middle Management
Manajemen Dasar	1.373	1.154	1.110	Basic Management
Supervisor Atas	3.129	2.808	2.698	Top Supervisor
Supervisor Dasar	6.346	5.807	4.711	Basic Supervisor
Fungsional	32.573	30.236	32.039	Functional
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiaries
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai berdasarkan Level Organisasi
Number of Employees based on Organizational Level

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Kantor Pusat	2.126	1.365	1.356	Head Office
Unit Bisnis	41.830	39.085	39.644	Business Units
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiaries
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees based on Employment Status

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Pegawai Tetap	51.147	47.608	48.068	Permanent Employee
Pegawai Kontrak	11	2	0	Contract Employee
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees based on Educational Level

Tingkat	2016	2015	2014	Level
< D3	2.207	21.855	23.692	< D3
D3	8.683	7.359	6.875	D3
S1	12.159	10.185	9.459	S1
S2	1.030	1.045	969	S2
S3	6	6	5	S3
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiaries
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai berdasarkan Kelompok Usia
Number of Employees based on Age Group

Tingkat	2016	2015	2014	Level
< 25 Tahun	11.962	7.855	8.220	< 25 old
26-30 Tahun	8.870	8.234	7.354	26-30 old
31-35 Tahun	4.565	3.599	2.936	31-35 old
36-40 Tahun	1.323	1.158	1.199	36-40 old
41-45 Tahun	2.838	3.553	4.175	41-45 old
46-50 Tahun	4.680	5.064	5.934	46-50 old
> 50 Tahun	9.718	10.987	11.182	> 50 old
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiaries
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Hasan Bisri, 59 tahun/years
Pelaksana Tugas Komisaris Utama & Komisaris
Acting President Commissioner & Commissioner

Lahir di Tegal pada 8 Mei 1957. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris sejak 23 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-273/MBU/12/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Pelaksana Tugas Komisaris Utama sejak tanggal 24 Mei 2016 dengan dasar penunjukannya adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-106/MBU/05/2016 Tanggal 24 Mei 2016. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Bisnis dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Djakarta (UID) pada tahun 1985 dan Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Satyagama Jakarta pada tahun 2004.

Karirnya dimulai sebagai Administrasi Umum Sub Bagian Konsultasi Hukum I, badan Pemeriksa Keuangan (1977). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Unit Pemeriksa Sub Bagian Pemberhentian (1980), Verifikatur bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum (1981), Verifikatur Auditorat ODIT A di BPK RI Jakarta (1981), Verifikatur Auditorat ODIT A di BPK RI Jakarta (1981), Penilik Auditorat ODIT E (1986), Penilik Auditorat ODIT A (1986), Kasub Bidang Litbang Fiskal di BPK RI Jakarta (1994 – 1999), Pemeriksa Muda Auditorat ODIT E (1988), Kepala Sub Auditorat II.A.1 di BPK RI Jakarta (1999 – 2001), Kepala Sub Auditorat II.B.2 – BPPN di BPK RI Jakarta (2001 – 2004), Auditor Ahli Madya Sub Auditorat II.B.2 – BPPN (2003), Kepala Auditorat II.C (2004), dan anngota BPK RI (2004-2014).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Pengendali Teknis Senior (BPK)
- SPAMEN
- Investigative Auditing & Development (Australia)
- Analisis Dampak Lingkungan dan Audit Lingkungan (BPK)
- SPAMA
- SEPALA

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Tegal on 8 May 1957. Currently based in Jakarta. He served as Commissioner since December 23, 2014 by the Minister of State Enterprises as decide during on the AGM No. SK-273 / MBU / 12/2014 December 23, 2014 and Acting Commissioner since of May 24, 2016 based on the Decree of the Minister of SOEs as AGM No. SK-106 / MBU / 05/2016 May 24, 2016. The term of office as Commissioner of the Company is 5 years.

He holds a bachelor's degree in Business Economics from the School of Economics, University of Islam Djakarta (UID), Jakarta in 1985, and a Master's degree in Financial Management from University Satyagama, Jakarta in 2004

His career began as a General Administration Sub Section Legal Consultancy I, State Audit Audit (1977). In the course of his career, he held positions as Head of the Audit Unit Sub Section Termination (1980), Verificator in the Consultancy and Legal Aid Section (1981), Verificator of Auditorat ODIT A in BPK RI Jakarta (1981), Verificator of Auditorat ODIT A in BPK RI Jakarta (1981), Inspector of Auditorat ODIT E (1986), Inspector of Auditorat ODIT A (1986), Head of Fiscal Research and Development Sub-Division in BPK RI Jakarta (1994-1999), Young Investigator of Auditorat ODIT E (1988), Head of Sub Auditorat II.A.1 BPK RI in Jakarta (1999 - 2001), Head of Sub Auditorat II.B.2 - IBRA in BPK Jakarta (2001-2004), Associate Expert Auditor Sub Auditorat II.B.2 - IBRA (2003), Head of Auditorat II. C (2004), and a member of BPK RI (2004-2014)

Competence Training and Development
- Senior Technical Controller (BPK)
- Investigative Auditing & Development (Australia)
- Environmental Impact Analysis and Environmental Audit (BPK)
- SPAMA
- SEPALA

Affiliated Relation
No affiliated relations

Oegroseno, 60 tahun/year
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Lahir di Jakarta pada 17 Februari 1956. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris Independen perusahaan sejak tanggal 16 Oktober 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014.

Menempuh pendidikan di kademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1978), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986), selanjutnya SESPIMPOL (1996), SESPATI III (2002) dan terakhir di LEMHANAS (2007).

Sebelumnya beliau berkarir di bidang Kepolisian dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis, meliputi: Wakil Kepala POLRI (2013), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012), Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2010) dan Kadiv Propam POLRI (2009).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- SESPIMPOL
- SESPATI III
- LEMHANAS

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

He was born in Jakarta in February 17, 1956. He is currently domiciled in Jakarta. He has served as Independent Commissioner since October 16, 2014 and was appointed based on Minister of SOE,, as GMS, Decision No. SK-211/MBU/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014.

He graduated from the Armed Forces Police Academy of the Republic of Indonesia (AKABRI) in 1978, Police Institute in 1986, Police Staff and Leadership College (SESPIMPOL) in 1996, High-Ranking Officers College (SESPATI III) in 2002 and finally the National Resilience Institute (LEMHANAS) in 2007

He previously had a career in the police force, holding various strategic positions, including: Deputy Chief of Police (2013), Head of Security Maintenance at National Police Headquarters (2012), Head of the National Police Education Institute (2011), Head of North Sumatra Police (2010) and Head of the National Police Professions and Security Division (2009).

Training and Competence Development
- SESPIMPOL
- SESPATI III
- LEMHANAS

Affiliate Relations
No affiliated relations

Darmono, 63 tahun/year
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Lahir di Klaten pada 5 Juni 1953. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris Independen perusahaan sejak tanggal 16 Oktober 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Menempuh pendidikan di kademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1978), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986), selanjutnya SESPIMPOL (1996), SESPATI III (2002) dan terakhir di LEMHANAS (2007).

Sebelumnya beliau berkarir di bidang Kepolisian dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis, meliputi: Wakil Kepala POLRI (2013), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012), Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (2010) dan Kadiv Propam POLRI (2009).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Pendidikan Jaksa (1980)
- Pendidikan SEPADYA (1992)
- Pendidikan Aparatus Kepemimpinan (1994)
- Pendidikan SPAMEN (1996)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Klaten on June 5, 1953. Currently domiciled in Jakarta.
He serves as an Independent Commissioner of the Company since October 16, 2014, based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises as GMS No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014. Term of office as Commissioner of the Company is 5 years. He earn his education at The Armed Forces Academy of the Republic of Indonesia (AKABRI) (1978), Police Academy - University of Police Science (1986), SESPIMPOL (1996), SESPATI III (2002), and lastly in LEMHANAS (2007).

Previously he had a career in the Police field and occupied various strategic positions, including: Deputy Chief of The National Police (2013), Head of Security Maintenance at The National Police Headquarters (2012),

Head of Education Institute of The National Police (2011), Chief of Regional Police at North Sumatra (2010) and Head of Profession and security Division at The National Police (2009).

Training and Competence Development
- Prosecutors Education (1980)
- SEPADYA Education (1992)
- Leadership Apparatus Education (1994)
- SPAMEN Education (1996)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Jarman, 59 tahun/year
Komisaris
Commissioner

Lahir di Bondowoso pada 23 Maret 1957. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris perusahaan sejak tanggal 26 November 2012, dengan dasar penunjukannya adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-223/MBU/11/2015 Tanggal 10 November 2015. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Mendapat gelar Sarjana Listrik dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Master of Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute di Amerika Serikat pada tahun 1991.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Energi, Kementerian BUMN (2006-2010), Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2014) setelah sebelumnya menjabat Komisaris PT Indosat Tbk (2008-2011) dan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2003-2008) serta Asisten Deputi Bidang Industri Strategis, Kementerian BUMN (2002-2006).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2011 – sampai sekarang).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Building Pathways for High Efficiency Low Emissions Coal In Indonesia Workshop
- Seminar Ketenagalistrikan
- Power Wheeling Workshop (JICA)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Bondowoso n 23 March 1957. Currently residing in Jakarta. He serves as a Commissioner of the company since 26 November 2012, with the basisi of appointment the Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-223/MBU/11/2015 dated 10 November 2015. The term of office as Commissioner of the Company is 5 years.

He holds a Bachelor degree in Electricity from the University of Indonesia in 1981, and Master of Electrical Power Engineering at Rensselaer Polytechnic Institute, USA in 1991.

Previously, he served as the Deputy Assistant of Energy, Ministry of SOE (2006-2010), Commissioner of PT PLN (Persero) (2012-2014) after previously serving as a Commissioner of PT Indosat Tbk (2008-2011) and Commissioner of PT Bukit Asam Tbk (2003-2008) as well as Deputy Assistant of Strategic Industry, Ministry of SOE (202-2006).

Currently, he also serves as the Director General of Electricity, Ministry of Energy and Natural Resources (2011-present).

Competence Training and Development
- Building Pathways for High Efficiency Low Emissions Coal In Indonesia Workshop
- Electricity Seminar
- Power Wheeling Workshop (JICA)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Budiman, 60 tahun/year
Komisaris
Commissioner

Lahir di Jakarta pada 25 September 1956. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris perusahaan sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-273/MBU/12/2014 Tanggal 23 Desember 2014. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Menyelesaikan pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang Tahun 1978, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1994) dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI (2001).

Sebelumnya beliau berkarir di bidang kemiliteran dengan mengemban berbagai jabatan strategis, meliputi: Kepala Staff Angkatan Darat (2013), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (2013), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (2011), Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (2010) setelah sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IV/ Diponegoro (2009).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- LEMHANAS
- Lulusan Terbaik AKABRI - Adhi Makayasa & Tri Sakti Wiratama
- Lulusan Terbaik Sesko TNI - Wira Adi Nugraha

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Jakarta on 25 September 1956. Currently residing in Jakarta. He serves as a Commissioner of the company since 23 December 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-273/MBU/12/2014 dated 23 December 2014. The term of office as Commissioner of the Company is 5 years..

He graduated from the Armed Forces Academy, Magelang in 1978, Army Staff and Command College (1994) and Armed Forces Staff and Command College (2001).

He previously had a career in the military and held various strategic positions, including: Army Chief of Staff (2013), Secretary General of the Ministry of Defense (2013), Deputy Army Chief of Staff (2011), Army Commander of Education, Training and Doctrine Command (2010) and Military Commander IV / Diponegoro (2009).

Competence Training and Development
- LEMHANAS
- AKABRI Valedictorian – Adhi Makayasa & Tri Sakti Wiratama
- Sesko TNI Valedictorian – Wira Adi Nugraha (2001)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Harry Susetyo Nugroho,
61 tahun/year
Komisaris
Commissioner

Lahir di Jakarta pada 22 September 1955. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris perusahaan sejak tanggal 2 April 2013, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-199/MBU/2013 Tanggal 2 April 2013. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Mendapat gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980 dan Master Business Administration (Finance) dari University of Denver di Colorado Amerika Serikat pada tahun 1988.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris pada beberapa BUMN, seperti Komisaris PT Pertamina (Persero) (2012-2013), Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Dewan Pengawas Perum Peruri (2007-2012), Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012), serta bertugas di Kementerian BUMN dengan jabatan sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN (2013 - 2015), Staf Ahli Tata Kelola, Kementerian BUMN (2010 - 2013), Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2005-2010) dan Asisten Deputi Bidang Usaha Aneka Industri Lainnya, Kementerian BUMN (2003-2005).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Seminar Penerapan Monitoring GCG pada BUMN
- Seminar Meneguhkan Peran BUMN Sebagai Agen Perubahan
- Forum Human Capital Indonesia

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Jakarta on 22 September 1955. Currently residing in Jakarta. He serves as a Commissioner of the company since 2 April 2013, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-199/MBU/2013 dated 2 April 2013. The term of office as Commissioner of the Company is 5 years.

He holds a Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1980) and Master's degree in Business Administration (Finance) from the University of Denver, Colorado, USA (1988).

Previously, he has held roles as Commissioner in several State-Owned Enterprises, including Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2012-2013), President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Supervisory Board of Perum Peruri (2007-2012), Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2007-2012) and served in the Ministry of State-Owned Enterprises with roles such as Deputy of Business Infrastructure, SOE Ministry (2013-2015), Expert Governance Staff, SOE Ministry (2010-2013), Deputy of Logistics and Tourism, SOE Ministry (2005-2010) and Deputy Assistant of Other Miscellaneous Industries, SOE Ministry (2003-2005).

Competence Training and Development
- GCG Monitoring Implementation in SOE Seminar
- Affirming the Role of SOE as Agent of Change Seminar
- Human Capital Indonesia Forum

Affiliated Relations
No affiliated relations

Aloysius K. Ro
55 tahun/year
Komisaris
Commissioner

Lahir di Kupang pada 29 April 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat Komisaris perusahaan sejak tanggal 25 September 2015, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-183/MBU/09/2015 Tanggal 25 September 2015. Masa jabatan sebagai Komisaris Perseroan adalah 5 tahun

Mendapat gelar Master of Business Administration (Finance) dari University of Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1994 dan PhD-Finance dari University of Kentucky Lexington, Amerika Serikat pada tahun 1998.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kementerian BUMN (2002-2005), Tim Asistensi Menteri Keuangan (2006-2009), Direktur Eksekutif PT Danareksa (Juli 2005-Maret 2015), Direktur Keuangan PT Antam (31 Maret 2015 - 27 Juli 2015) dan Komisaris PT Pelindo III, Surabaya (2002 - 2005). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN (2015-sampai sekarang)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Seminar Reshaping, Sharpening, and BUMN Outlook 2016
- Seminar Sinergi BUMN

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Kupang on 29 April 1961. Currently residing in Jakarta. He serves as a Commissioner of the company since 25 September 2015, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE as the GMS No. SK-183/MBU/09/2015 dated 25 September 2015. The term of office as Commissioner of the Company is 5 years.

He holds a Masters of Business Administration-Finance, University of Illinois, USA (1994) and a PhD in Finance, University of Kentucky Lexington, USA (1998).

Previously, he served as Assistant Deputy for Restructuring and Privatization, SOE Ministry (2002-2005), Assistance Team to the Minister of Finance (2006-2009), Executive Director of PT Danareksa (July 2005-March 2015), Finance Director of PT Antam (31 March 2015 – 27 July 2015) and Commissioner of PT Pelindo III, Surabaya (2002-2005). Currently, he also serves as the Deputy of Business Restructuring and Development, Ministry of SOE (2015-present)

Competence Training and Development
- Reshaping, Sharpening, and SOE Outlook 2016 Seminar
- SOE Synergy Seminar

Affiliated Relations
No affiliated relations

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Sofyan Basir, 58 Tahun/Years
Direktur Utama
President Director

Lahir di Bogor pada 2 Mei 1958. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2014, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Mendapat gelar Diploma dari STAK Trisakti pada tahun 1980, Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha Jakarta pada tahun 2010, dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (2005-2014), Direktur Utama Bank Bukopin (2005) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan jabatan di tingkat manajemen lainnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Seminar Risk Management Certification Refreshment Program (Frankfurt)
- Eksekutif Manajemen Risiko, (ABN Amro)
- Islamic Finance Forum (Swiss)
- Seminar Business Continuity Planning, (Ernst & Young)
- SESPIBANK
- Strategy Development Session (IBM)
- Structuring Loans & Short Term (The Institute Banking & Finance)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Bogor on 2 May 1958. Currently residing in Jakarta. Appointed as the President Director since 23 December 2014, based on the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years

He obtained a Diploma from STAK Trisakti in 1980, a Bachelor of Economics from STIE Ganesha Jakarta in 2010, and an Honorary Doctorate from Trisakti University Jakarta in 2012.

He previously served as the President Director of Bank Rakyat Indonesia (2005-2014), President Director of Bank Bukopin (2005), having previously served as Commercial Director and held other management level positions.

Competence Training and Development
- Risk Managament Certification Refreshment Program Seminar (Frankfurt)
- Risk Management Executive (ABN Amro)
- Islamic Finance Forum (Switzerland)
- Business Continuity Planning Seminar (Ernst & Young)
- SESPIBANK
- Strategy Development Session (IBM)
- Structuring Loans & Short Term (The Institute Bankng & Finance)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Nicke Widyawati, 49 Tahun/Years
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Lahir di Tasikmalaya pada 25 Desember 1967. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014.Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana Tekik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991, dan Master di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mega Eltra (2014), Direktur Usaha PT Rekayasa Industri (2010-2014), Komisaris Utama PT Tracon Industri (2009-2013), dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) PT Rekayasa Industri (2007-2010).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Shared Services (Hongkong)
- Advance Management (IPMI)
- Leadership Development Program (CLDI)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Tasikmalaya on 25 December 1967. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Directors since 23 December 2014, based on the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years

Obtained a Bachelor's degree in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology (1991) and a Master's degree in Business Law from Padjadjaran University Bandung (2009).

Previously, she was the President Director of PT Mega Eltra (2014), Business Director of PT Rekayasa Industri (2010-2014), President Commissioner of PT Tracon Industry (2009-2013) and Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) of PT Rekayasa Industri (2007-2010).

Competence Training and Development
- Shared Services (Hongkong)
- Advance Management (IPMI)
- Leadership Development Program (CLDI)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Supangkat Iwan Santoso, 58 Tahun/ Years
Direktur Pengadaan
Director of Procurement

Lahir di Lampung pada 19 Desember 1958. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1987, dan Master Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

Sebelumnya beliau pernah menjabat Direktur Utama PT Indonesia Power (2013), Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali di Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera PLN, dan Direktur Pengembangan dan Niaga PT Indonesia Power. Memulai karir di PT PLN pada tahun 1987 sebagai Mechanical Engineer.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Program Pengembangan Direktur (IICD)
- Power Plant Management
- Asset Management Leadership Workshop
- Power Wheeling, Electric Market Organization & Operation
- IHT Tata Kelola Batu Bara

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Lampung on 19 December 1958. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director of the company since 23 December 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years

Obtained a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia (1987) and a Masters degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1997).

Previously, he served as President Director of PT Indonesia Power (2013) and Division Head of Java Bali Generation in PLN's Java Bali Sumatra Operations Directorate. He also served as Director of Development and Commerce in PT Indonesia Power. He started his career at PT PLN in 1987 as a Mechanical Engineer.

Competence Training and Development
- Director Development Program (IICD)
- Power Plant Management
- Asset Management Leadership Workshop
- Power Wheeling, Electric Market Organization & Operation
- IHT Coal Governance

Affiliated Relations
No affiliated relations

Sarwono Sudarto, 64 Tahun/Years
Direktur Keuangan
Director of Finance

Lahir di Sragen pada 21 Maret 1952. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponogoro pada tahun 1975, gelar MBA dari Tulane Univgersity Amerika Serikat pada 1987, dan Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2011.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Operasional BRI (2006-2014), setelah sebelumnya menduduki berbagai jabatan manajerial Bank Rakyat Indonesia diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa InternationalFinance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer Finance Ltd. Hongkong.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Pasar Modal (Tokyo)
- Sertifikasi Manajemen Risiko–BSMR (Singapura)
- Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness On Asean Community's Economy
- LEMHANAS RI
- SESPIBANK
- Credit Manager; Dan Organization Management

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Sragen on 21 March 1952. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director of since 23 December 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years

Obtained a Bachelor's degree in Business Administration from Diponegoro University in 1975, an MBA from Tulane University, USA in 1987, and a Doctorate from the Department of Educational Management, Universitas Negeri Jakarta in 2011.

He previously served as BRI Operations Director (2006-2014), having previously held various managerial positions at Bank Rakyat Indonesia, including Head of Treasury Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Internal Audit Division, Head of Retail Business Division, Vice Head of Management Accounting and Finance Division, Branch Manager of Palembang Sriwijaya, Guest Officer of Sanwa International Finance Ltd. Hong Kong, Treasury Manager and Chief Dealer of BRI Finance Ltd. Hong Kong.

Competence Training and Development
- Capital Market (Tokyo)
- Risk Management Certification – BSMR (Singapore)
- Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness On Asean Community's Economy
- LEMHANAS RI
- SESPIBANK
- Credit Manager; And Organizational Management

Affiliated Relations
No affiliated relations

Muhamad Ali,
55 Tahun/Years
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Lahir di Purworejo pada 24 Februari 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal Oktober 2015, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum Perdata dari Universitias Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Koordinator Bisnis Ritel BRI (2015), Pemimpin Wilayah Kantor BRI Yogyakarta (2014) dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial Bank Rakyat Indonesia diantaranya Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat, Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI, Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat BRI, Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Surakarta, Kepala Bagian Pemasaran Consumer Banking, Pemimpin Kantor Cabang BRI Selong Kantor Wilayah Denpasar, Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Kandangan Kantor Wilayah Banjarmasin, Manager Loan Officer.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Assistant Vice President Development Program (AVDP) Training
- Basic Risk Management Training BRI
- Risk Management Training Level II
- Corporate Secretary Training and Seminar (Australia)
- Corporate Secretary Training and Seminar (Jerman)
- Corporate Secretary Training and Seminar (Inggris)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Purworejo on 24 February 1961. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since October 2015, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015. The term of office as Director of the Company is 5 years.

Obtained a Bachelor's degree in Civil Law from Gadjah Mada University, Yogyakarta.

He previously served as Bank Rakyat Indonesia Retail Business Coordinator (2015), Branch Manager of BRI Yogyakarta (2014) and has held various managerial positions in Bank Rakyat Indonesia, including Head of Corporate Secretariat Division at BRI Head Office, Division Head of the Board of Directors Bureau, Corporate Secretariat Division BRI Head Office, Deputy Head of Corporate Secretariat Division BRI Head Office, Branch Manager BRI Surakarta, Head of Marketing Consumer Banking, Branch Manager BRI Selong, Denpasar Regional Office, Branch Manager BRI Kandangan, Banjarmasin Regional Office and Loan Officer Manager.

Competence Training and Development
- Assistant Vice President Development Program (AVDP) Training
- BRI Basic Risk Management Training
- Level II Risk Management Training
- Corporate Secretary Training and Seminar (Australia)
- Corporate Secretary Training and Seminar (Germany)
- Corporate Secretary Training and Seminar (UK)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Amir Rosidin,
57 Tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Sumatra Regional Business Director

Lahir di Malang pada 7 Juni 1959. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985, dan Master di bidang Manajemen dari Sekolah Manajemen PPM, Jakarta pada tahun 1998.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali(PJB). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Direktorat Bisnis & Manajemen Risiko PLN Kantor Pusat (2010-2013), General Manager PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (2010) dan General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (2008). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Corporate University Implementation Master-Plan Development
- Diklat Penjenjangan Advance To Integration / Executive Education I
- Penataran Pengawasan Melekat
- Microprocesseur 6809 (Prancis)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Malang on 7 June 1959. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 23 December 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years.

Obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in1985 and a Master's Degree in Management from PPM Management Institute, Jakarta in 1988.

Previously, he served as President Director of PT Java Bali Generation (PJB). In addition, he has served as Head of Risk Management Division in the Business & Risk Management Directorate at PLN Head Office (2010-2013), General Manager of PLN South Sumatra, Jambi, Bengkulu (2010) and General Manager of PLN East Nusa Tenggara (2008). He started his career with PLN in 1985.

Competence Training and Development
- Corporate University Implementation Master – Plan Development
- Advance to Integration Path Training/ Executive Education I
- Inherent Supervision Counselling
- Microprocesseur 6809 (France)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Murtaqi Syamsuddin,
60 Tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
West Java Regional Business Director

Lahir di Solo pada 24 Agustus 1956. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-179/ MBU/2013. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1981, dan gelar MBA bidang Keuangan Perusahaan dari Univeritas Oregon pada tahun 2003.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Dan Pembinaan Afiliasi (2013-2014) dan sebagai Direktur Perencanaan & Manajemen Risiko (2011-2013). Selain itu, beliau juga pernah menduduki posisi penting lainnya di perusahaan, diantaranya: Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko (2009-2011), Direktur Jawa Madura dan Bali (2008-2009), General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008), Ahli Pemasaran dan Pengembangan Unit Bisnis (2001-2003), Sekretaris Perusahaan (2000-2001), Kepala Dinas Kepegawaian (1998-2000) dan Deputi Manajer Perencanaan pada PLN Wilayah Sumatera Utara (1996-1998).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Pendidikan Intensif Corporate Secretary Angkatan IX
- Merger, Aquasisi & Starategic Partnership
- Strategic Planning
- Management Information System
- Human Resources Development
- Protection Signaling Equipment (Swiss)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Solo on 24 August 1956. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 23 December 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-179/MBU/2013. The term of office as Director of the Company is 5 years.

Obtained a degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia in 1981 and an MBA in Corporate Finance from the University of Oregon in 2003.

He previously served as Director of Planning and Affiliation Development in (2013-2014) and as Director of Planning & Risk Management (2011-2013). He has also served as Director of Business and Risk Management (2009-2011), Director of Java, Madura and Bali (2008-2009), General Manager of PLN Distribution West Java and Banten (2003-2008), Marketing Expert and Business Unit Development (2001-2003), Corporate Secretary (2000-2001), Head of Employment Division (1998-2000) and Deputy Manager for Planning at PLN North Sumatra region (1996-1998).

Competence Training and Development
- Corporate Secretary Intensive Education Batch IX
- Merger, Acquisition & Strategic Partnership
- Strategic Planning
- Management Information System
- Human Resources Development
- Protection Signaling Equipment (Switzerland)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Nasri Sebayang,
60 tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Central Java Regional Business Director

Lahir di Kaban Jahe pada 14 Februari 1656. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1979, dan gelar Master Bisnis Admnistrasi dari Erasmus University & Center for Global Leadership pada tahun 2007.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan mulai Maret 2013 setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Konstruksi PLN sejak Oktober 2011. Selain itu, beliau juga tercatat pernah menduduki posisi penting lainnya di perusahaan, antara lain: Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN periode Desember 2009 hingga Oktober 2011, Kepala Satuan Energi Primer sejak April 2008 hingga Desember 2009, Deputi Direktur Independent Power Producer (2006-2008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), General Manager PLN Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006), Manajer SDM PLN Pembangkitan Muara Tawar (2003-2005).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi
- Sistem Pengeloalaan Bendung Besar
- Sinotech Enginering Consultant Training (Taiwan)
- Pelayanan Unggul

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Kaban Jahe on 14 Februari 1956. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 23 September 2014, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years.

Obtained a Bachelor's Degree in Civil Engineering from the University of North Sumatra in 1979 and a Master's Degree in Business Administration from Erasmus University and the Center for Global Leadership (2007).

He previously served as Director of Construction and Renewable Energy from March 2013 and Director of Construction since October 2011. In addition, he served in various key positions in the company, among others: Director of Planning and Technology from December 2009 to October 2011, Head of Primary Energy from April 2008 to December 2009, Deputy Director of Independent Power Producers (2006-2008), Head of Risk Management (2006), General Manager of PLN Muara Tawar (2005-2006), HR Manager of PLN Muara Tawar (2003-2005).

Competence Training and Development
- Competence-based HR management
- Large Dam Management System
- Sinotech Engineering Consultant Training (Taiwan)
- Excellent Service

Affiliated Relations
No affiliated relations

Amin Subekti,
46 Tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali
East Java and Bali Regional Business Director

Lahir di Banyumas pada 22 September 1970. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 23 Desember 2014, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku RUPS PLN No. SK-272/ MBU/12/2014. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1992, dan gelar MBA Universitas Melbourne, Australia pada tahun 2001.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai ABAC Executive Director (APEC Business Advisory Council) (2013), Senior Vice President (SVP) di PT Indika Energy Tbk, Direktur PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi Internasional dan PT Indika Infrastruktur Investindo. Beliau juga pernah berkiprah di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) – Aceh & Nias (2006-2009) dan pernah bertugas sebagai Team Leader untuk Pengembangan Regional pada Kantor World Bank Jakarta pada tahun 2009-2011.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Fundamental of IPP (Hongkong)
- Integral Risk Management (Switzerland)
- Applied Problem – Driven Political Economy (Washington DC)
- Supplying Indonesia's Energy Needs
- Foundation of Leadership

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Banyumas on 22 September 1970. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 23 December 2014, with the basis of appointent the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) as the GMS of PLN No. SK-272/MBU/12/2014. The term of office as Director of the Company is 5 years.

He obtained an Accounting degree from the State Accounting College (STAN) and obtained a Master's degree in Business Administration from the University of Melbourne, Australia in 2001.

Previously, he served as Executive Director of ABAC (APEC Business Advisory Council) (2013), and Senior Vice President of PT Indika Energy Tbk, Director of PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Power Services, PT Indika Multi Energi International and PT Indika Infrastruktur Investindo. He has also been active in the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) - Aceh and Nias (2006-2009) and served as Team Leader for Regional Development at the World Bank Jakarta Office (2009-2011).

Competence Training and Development
- Fundamental of IPP (Hongkong)
- Internal Risk Management (Switzerland)
- Applied Problem – Driven Political Economy (Washington DC)
- Supplying Indonesia's Energy Needs
- Foundation of Leadership

Affiliated Relations
No affiliated relations

Djoko Rahardjo Abumanan,
56 Tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Kalimantan Regional Business Director

Lahir di Surabaya pada 10 September 1960. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 30 Oktober 2015, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/ MBU/10/2015. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager Distribusi Jawa Barat & Banten (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Energy Baru dan Terbarukan PLN Kantor Pusat (2014-2015), General Manager PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY (2013-2014) dan General Manager PLN Wilayah Riau & Kepri (2011-2012). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1985.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Workshop Persiapan PLN Menyongsong ASEAN Economic Community 2015
- Distance Learning – CBHRM
- Executive Education I Angkatan 1
- Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Unsur Pimpinan PT PLN (Persero)
- Entrepreneurship untuk Eksekutif
- Peranan Outsourching dalam Daya Saing

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Surabaya on 10 September 1960. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 30 October 2015, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015. The term of office as Director of the Company is 5 years.

Obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1985.

He previously served as the General Manager of Distribution West Java and Banten (2015). In addition, he served as Head of New and Renewable Energy Division at PLN Head Office (2014-2015), General Manager of PLN Distribution Central Java and Yogyakarta (2013-2014) and General Manager of PLN Riau and Riau Islands Region (2011-2012). He started his career with PLN in 1985.

Competence Training and Development
- PLN Preparation for the 2015 ASEAN Economic Community Workshop
- Distance Learning - CBHRM
- Executive Education I Batch I
- Strengthening of Nationality Values for Leadership Element of PT PLN (Persero)
- Entrepreneurship for Executives
- Role of Outsourcing in Competitiveness

Affiliated Relations
No affiliated relations

Machnizon, 48 tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara
Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business Director

Lahir di Batusangkar pada 2 Mei 1968. Saat ini berdomisili di Jakarta. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 30 Oktober 2015, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun.

Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993, dan gelar Master of Business Administration Dario Universiti Tenaga Nasional Malaysia pada tahun 2006.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi Regional Jawa 5Bagian Tengah pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai General Manager Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (2014-2015). Mulai berkarir di PLN pada tahun 1993.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Peranan Dunia Pendidikan dalam Menunjang Bisnis PLN
- Manajemen Kinerja untuk Manajemen Atas
- Strategic Finance for PLN Senior Executives
- Executive Education I (EEI)
- Manajemen Perubahan untuk Manajer Menengah dan Setara

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Batusangkar on 2 May 1968. Currently residing in Jakarta. Appointed as a Director since 30 October 2015, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015. The term of office as Director of the Company is 5 years

Obtained a degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1993 and a Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia in 2006.

He previously served as Operations Division Head of Central Java at the Directorate of Regional Business Central Java at PLN Head Office (2015). In addition, he served as General Manager of East Kalimantan and North Kalimantan (2014-2015). He started his career with PLN in 1993.

Competence Training and Development
- The Role of Education in Supporting the Business of PLN
- Performance Management for Senior Management
- Strategic Finance for PLN Senior Executives
- Executive Education I (EEI)
- Change Management for Middle Management and Equivalent

Affiliated Relations
No affiliated relations

Haryanto W.S, 57 Tahun/Years
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Maluku & Papua Regional Business Director

Lahir di Boyolali pada 6 April 1959. Saat ini berdomisili di Bogor. Ditetapkan sebagai Direktur sejak tanggal 30 Oktober 2015, dengan dasar penunjukannya adalah Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015. Masa jabatan sebagai Direksi Perseroan adalah 5 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983, dan menyelesaikan pendidikan S2 bidang Manajemen Lainnya di STIE IPWIJA pada tahun 2003.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015), General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2011-2014), Kepala Divisi Distribusi Jawa-Bali pada Direktorat Operasi Jawa Bali PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat (2010), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2008-2009), Manajer Bidang Perencanaan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2003-2008). Serta Jabatan Manajer di lingkup PT PLN (Persero) lainnya. Mulai Berkarir di PLN sejak Desember 1983.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
- Training Executive Talent Management
- Newst Development on Energi Sektor (Jerman)
- Managing Change Through Leadership Building
- PLN Customer Service & Info (Amerika Serikat)
- MR TAP Changing Equipment (Jerman)
- Tehnical Power Distribution (Jerman)

Hubungan Afiliasi
Tidak ada hubungan afiliasi

Born in Boyolali on 6 April 1959. Currently residing in Bogor. Appointed as a Director since 30 October 2015, with the basis of appointment the Decree of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015. The term of office as Director of the Company is 5 years.

He obtained a Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1983 and completed a Masters in Management at STIE IPWIJA in 2003.

He previously served as the General Manager of PLN Jakarta and Tangerang distribution (2014-2015), General Manager of PLN East Java distribution (2011-2014), Division Head of Java-Bali Distribution at the Java-Bali Operations Directorate at PLN Head Office (2010-2011), General Manager of PLN South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (2010), General Manager PLN West Kalimantan (2008-2009), Planning Manager at PLN Distribution Jakarta and Tangerang (2003-2008), as well as Manager of other PLN areas. His careers with PLN started in December 1983.

Competence Training and Development
- Executive Talent Management Training
- Newest Development on Energy Sector (Germany)
- Managing Change Through Leadership Building
- PLN Customer Service & Info (USA)
- MR TAP Changing Equipment (Germany)
- Technical Power Distribution (Germany)

Affiliated Relations
No affiliated relations

Profil Komite-komite

Profile of Committees

Djoko Hastowo
Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

- Menjadi Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2015.
- Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1979).
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Penyaluran PLN P3B (1996-2001), Manajer Bidang Teknik pada PLN P3B (2001-2004), Deputi DIrektur Pembinaan Transmisi pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2004-2008), General Manajer P:T PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008-2009), Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta pada PLN Kantor Pusat (2009), Direktur Utama PT Indonesia Power (2009-2014), Komisaris Utama PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013), dan Advisor PT Enviromate Technology Internasional (2014).
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 62 tahun.

- Serves as the Board of Commissioners' Secretary of PT PLN (Persero) since October 1, 2015..
- Obtained a Degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (1979).
- Previously served as Head of Operations and Maintenance at PLN P3BDistribution Division (1996-2001), Manager of Engineering at PLN P3B (2001-2004), Deputy Director of Transmission of PT PLN (Persero) Head Office (2004-2008), General Manager of PLN Construction Management Services (2008-2009), Deputy Director of HR and Talent Development at PLN Head Office (2009), Prsident Director of PT Indonesia Power (2009-2014), President Commissioner of PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013), and Advisor of PT Enviromate Technology Internasional (2014)
- As of 31 December 2016, he is 62 years old.

Sugeng Rochadi
Komite Audit
Audit Committee

- Menjadi Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2013.
- Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1973) dan S2 Manajemen Bisnis dan Administrasi dari Instritut Teknologi Bandung (1997)
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (1999-2001), Kepala Bidang Audit Operasional pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2006-2009), Anngota Komite Audit pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2010-2011), Staf Senior Bidang Teknik pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2013)
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 63 tahun.

- Serves as a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 1 August 2013
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1973) and Master's Degree in Business Management and Administration from Bandung Institute of Technology (1997)
- He previously served as the Head of Internal Audit of PT PLN (Persero) West Java Distribution (1999-2001), Head of Operational Audit of Internal Supervisory Unit of PT PLN (Persero) Head Office (2006-2009), Member of the Audit Committee (2010-2011), Senior Staff at the Engineering Division at the Board of Commissioners' Secretariate (2012-2013)
- As of 31 December 2016, he is 63 years old.

Achmad Wachyudi
Komite Audit
Audit Committee

- Menjadi anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2016.
- Beliau merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga (1986)
- Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Konsultan di Hadori & Co, Auditor internal di Mercedez Benz Grup, dan Staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope (1986-1992), Akuntan publik, sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan(1992-2010), dan Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013)
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 52 tahun.

- Serves as a member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 1 August 2016.
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a Degree in Accounting from Airlangga University (1986)
- Previously he served as Consultant at Hadori & Co, Internal aufitor at the Mercedes Benz Group, and Accounting and finance staff in an Australian mining company, New Hope (1986-1992), Public Accountant, at the same time management and taxation consultant (1992-2010), and Financial Director of Susi Air (2011-2013)
- As of 31 December 2016, he is 52 years old.

Marlius Alrobin
Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

- Menjadi Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) sejak 1 Juni 2015.
- Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1986) dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1999).
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat Senior Cresit Recovery Bank Mandiri (Assistant Vice President) (2002-2007), Regional Reovery Manager Bank Mandiri (Vice President) (2007-2008), Special Project Officer Credit Recovery Bank Mandiri (Vice President) (2008), dan Departemen Head Corporate Risk Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015)
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 57 tahun.

- Member of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since 1 June 2015
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a Bachelors Degree in Economic from Trisakti University (1986) and a Masters Degree in Management from North Sumatra University (1999).
- Previously, he served as a Senior Credit Recovery of Bank Mandiri (Assistant Vice President) (202-2007), Regional Recovery Manager of Bank Mandiri (Vice President) (207-2008), Special Project Officer Credit Recovery of Bank Mandiri (Vice President) (2008), and Department Head of Corporate Risk of Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015)
- As of 31 December 2016, he is 57 years old.

Bambang Purwo
Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

- Menjadi Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 31 Agutus 2015.
- Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Jember (1980), Notariat (Sp1) dari Universitas Negeri Diponogoro, Semarang (2000), dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2005).
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengurusan TanahPLN Proyek Induk Transtekstib Koreksi (1984-1988), Kepala bagian Sekretariat PT PLN Proyek Induk Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (1988-1992), Kepala Staf Adm&Keu PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan di Balikpapan (1992-1996), Kepala Staf Adm&Keu PT PLN (Persero) Pikitring Jateng di Semarang (1996-2000), Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), VP Hukum pada PT Indonesia Power (2002-2012), Konsultan pada PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015), dan Instruktur pada PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015).
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 60 tahun.

- Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since 31 August 2015.
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a bachelors Degree in Law from Universitas Negeri Jember (1980), Notariate (Sp1) from Universitas Negeri Diponogoro, Semarang (2000), and Masters in Law from the University of Indonesia (2005).
- He previously served as the Section Head for Land Management at Transketib Correction Project (1984-1988), Head of the Secretariate Division at PLN Extra High Voltage Network Parent Project (1988-1992), Head of Staff Administration and Finance at PLN Pikitring Kalimantan in Balikpapan (1992-1996), Head of Staff Administration and Finance at PLN Pikitring Central Java in Semarang (1996-2000),Performance Expert and concurrently DM of Personnel at PLN Disjaya and Tangerang, Legal VP at PT Indonesia Power (2002-2012), Construction Management Services Consultant of PT PLN (Persero) (2013-2015), Instructor at PT PLN (Persero) Cibogo Education and Training Center (2012-2015).
- As of 31 December 2016, he is 60 years old

Firman Dini
Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

- Menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2016.
- Beliau merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1983)
- Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur SDM PT Indonesia Power (2009-2013), Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013), Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014), Komisaris PT Rekadaya Elektrika (2012-2014), Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Project Avdisor pada PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014-sekarang), Aksesor Bldang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-sekarang).
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 59 tahun.

- Serves as a member of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since 1 October 2016.
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a Bachelors Degree in Electrical Engineering from Bandubng Institute of Technology (1983)
- He previously served as the HR Director of PT Indonesia Power (2009-2013), Member of the Supervisory Board of PLN's Pension Fund (2010-2013), Member of Supervisory Board of STT-PLN (2012-2014), Commissioner of PT Rekadaya Elektrika (2012-2014), President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Project Advisor at PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014-present), Assessor in the Power Plant Sector at PT ELESKA IATKI, Bandung (205-present).
- As of 31 December 2016, he is 59 years old.

Okto Rinaldi
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

- Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 24 Maret 2016.
- Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang merupakan juga pegawai PT PLN (Persero) sebagai Kepala Divisi Talenta PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIEI dan Magister Manajemen dari Universitas Syiah Kuala (2001)
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM pada Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan(Corporate University) (2014-2015), General Manajer Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (Corporate University) (2015-2016), dan Kepala Divisi Pengembangan Talenta pada Direktorat Human Capital Management (2016-sekarang)
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 53 tahun.

- Serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) since 24 March 2016.
- Member of Committee (non commissioner) who is also a PT PLN (Persero) employee
- Obtained a Bachelors Degree from STIEI and Masters Degree in Management from Syiah Kuala University (2001)
- Previously, he served as the Senior Manager of HR Performance Management of PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014), Head of PT PLN Education and Training Center (Corporate University) (2014-2015), General Manager of Corporate Secretariate of PT PLN Education and Training Center (Corporate University) (2015-2016), and Division Head of Talent Management at the Human Capital Management Directorate (2016-present)
- As of 31 December 2016, he is 53 years old

Murniati
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

- Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2015.
- Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).
- Meraih gelar Sarjana Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional (1993).
- Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Ahli Analisa Investasi pada Direktorat Perencanaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2000-2009), Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2011), dan Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2015),
- Usia per 31 Desember 2016 adalah 61 tahun.

- Serves as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (persero) since 1 October 2015.
- Independent (Non-Commissioner) member of the Committee because he is not an employee of PT PLN (Persero).
- Obtained a Bachelors Degree in Electrical Engineering from National Engineering College (1993)
- Previously, he served as the Investment Analysis Expert at the Directorate of Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2000-2009), Senior Manager of Investor Relations and Corporate Governance at the Coorporate Secretariate of PT PLN (Persero) Head Office (2009-2011), and Senior Staff of General Affairs at the Secretariate of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) (2012-2015),
- As of 31 December 2016, he is 61 years old.

Profil Pejabat Senior PLN

PLN Senior Official Profile

Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi | Officials One Level Below the Board of Directors

Dedeng Hidayat
Kepala Satuan Hukum Korporat
Head of Corporate Legal Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Hukum, Universitas Indonesia (1992)
- S2 Hukum, Universitas Indonesia (2002)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Pelayanan Hukum Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014)
- Kepala Bidang Regulasi Dan Kepatuhan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2013)
- Manajer Komunikasi Kelembagaan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2010)

Educational Background :
- Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1992)
- Master of Law, Universitas Indonesia (2002)

Employment History :
- Senior Specialist I, Corporate Law, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014)
- Head of Regulation and Compliance, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2013)
- Manager of Institutional Communication, PT PLN (Persero) Head Office (2009-2010)

Ali Mudin
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head Of Internal Supervisory Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Hukum, Universitas Padjadjaran (1981)
- S2 Hukum, Universitas Padjadjaran (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Audit Intern BRI Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2008-2015)
- Kepala Divisi Logistik Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2005-2008)
- Kepala Wilayah BRI Banda Aceh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Educational Background:
- Bachelor of Law, Universitas Padjadjaran (1981)
- Master of Law, Universitas Padjadjaran (2006)

Employment History :
- Head of Internal Audit of Bri Head Office, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2008-2015)
- Head of Logistics, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2005-2008)
- Head of Bri Banda Aceh, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2004-2005)

Zulfarida Faluzy
Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat
Head Of Corporate Performance Control Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung(1991)
- S2 Manajemen, Universitas Indonesia(2012)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2012-2013)
- Senior Specialist Ii Kinerja Perusahaan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2011-2012)
- Kepala Bidang Program Metamorfosa Pada Satuan Pengendalian Kinerja Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung(1991)
- Master of Business Law, Universitas Indonesia(2012)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for The Region of Bangka Belitung (2012-2013)
- Senior Performance Specialist Ii of PT PLN (Persero) for The Region of Bangka Belitung (2011-2012)
- Head of The Metamorphic Program In The Unit of Corporate Performance Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Bambang Dwiyanto
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Riwayat Pendidikan :
- S1 Komunikasi, Universitas Gadjah Mada (1990)

Riwayat Pekerjaan :
- Manajer Senior Stakeholder Management, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016)
- Manajer Senior Komunikasi Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2015)

Educational Background :
- Bachelor of Communication, Universitas Gadjah Mada (1990)

Employment History :
- Senior Manager of Stakeholder Management, PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016)
- Senior Manager of Corporate Communication, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2015)

I Made Suprateka Yadnya
Kepala Satuan Komunikasi Korporat
Head Of Corporate Communication Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Ekonomi Akuntansi, UPN Veteran Yogyakarta (1986)
- S2 Bidang Manajemen, IPWI Jakarta (1998)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Wilayah BRI Pekanbaru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2011-2015)
- Wakil Kepala Divisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)
- Kepala Bagian Hubungan Lembaga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Accounting, Upn Veteran (1986)
- Master of Management, Ipwi (1998)

Employment History :
- Regional Head of Pekanbaru Region, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2011-2015)
- Deputy Division Head, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)
- Head of Institutional Relations, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2007-2011)

Hernadi Buhron
Kepala Satuan Pengadaan IPP
Head of IPP Procurement Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1985)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Pengadaan IPP, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2015)
- Manajer Senior Pengadaan Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2012)
- Manajer Senior Pengadaan Gas Dan BBM PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten (2008-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1985)

Employment History :
- Head of IPP Procurement Division, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2015)
- Senior Manager of Gas and Oil Procurement of PT PLN (Persero) Head Office (2011-2012)
- Senior Manager Gas and Oil PT PLN (Persero), South Java and Banten Distribution (2008-2011)

Harlen
Kepala Satuan Batubara
Head of Coal Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Brawijaya (1993)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Batubara Pada Direktorat (Pengadaan Dan Energi Primer) PT PLN (Persero) Kantor Pusat(2015)
- Senior Specialist Ii Audit Teknik (Tk), PT Indonesia Power (2012-2015)
- Engineer Teknik Mesin Dan Listrik (Tk), PT Indonesia Power (2009-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Brawijaya (1993)

Employment History :
- Head of Coal In The Directorate of Procurement and Primary Energy, PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- Senior Specialist Ii In Technical Audit, PT Indonesia Power (2012-2015)
- Mechanical and Electrical Engineer of PT Indonesia Power (2009-2011)

Chairani Rachmatullah
Kepala Satuan Gas dan BBM
Head of Oil and Gas Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya (1992)
- S2 Program Studi Energi, The University of Melbourne (2005)
- S2 Teknik Sipil, Universitas Indonesia(2001)

Riwayat Pekerjaan :
- Manajer Senior Perencanaan dan Evaluasi Energi Primer, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- Manajer Senior Perencanaan Energi Primer, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)
- Asisten Kepala Bidang Pengendalian Energi Bbm, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2010)

Educational Background :
- Bachelor of Civil Engineering, Universitas Sriwijaya (1992)
- Master of Energy, The University of Melbourne (2005)
- Master of Civil Engineering, Universitas Indonesia(2001)

Employment History :
- Senior Manager of Primary Energy Planning and Evaluation, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- Senior Manager of Primary Energy Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)
- Deputy Head of Oil Control, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2010)

Direktorat Perencanaan Korporat | Directorate of Corporate Planning

Adi Priyanto
Kepala Divisi Perencanaan Sistem
Head of System Planning Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1998)
- S2 Manajemen, IPWI (1998)

Riwayat Pekerjaan :
- Manajer Senior Perencanaan Sistem Ii Pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2016)
- Manajer Perencanaan Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang (2014-2015)
- Senior Specialist Ii Manajemen Resiko (Plt Manajer Perencanaan) Pada PT PLN (Persero) Distribusi Bali (2014)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- Master of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1998)
- Master of Business Management, IPWI (1998)

Employment History :
- Senior Manager of System Planning Ii,PT PLN (Persero) Head Office (2016)
- Planning Manager In PT PLN (Persero), Jakarta Raya and Tangerang Distribution (2014-2015)
- Risk Management Senior Specialist Ii (Acting Planning Manager) In PT PLN (Persero), Bali Distribution (2014)

Doddy Benyamin Pangaribuan
Kepala Divisi Perencanaan Korporat
Head Of Corporate Planning Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1992)
- S2 Manajemen, HEC - Montreal Canada (2002)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali (2014-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau (2013-2014)
- Manajer Senior Perencanaan Strategis Korporat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1992)
- Master of Business Management, HEC - Montreal Canada (2002)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for Bali Distribution (2014-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) for Riau and Riau Islands (2013-2014)
- Senior Manager of Corporate Strategic Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)

Syah Darwin Siregar
Kepala Divisi Energi Baru & Terbarukan
Head Of New And Renewable Energy Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1984)

Riwayat Pekerjaan :
- Principal Engineer Konstruksi PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Ix (2013-2014)
- General Manager PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera Ii (2011-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (1984)

Employment History :
- Principal Construction Engineer, PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit of Ix (2013-2014)
- General Manager of PLN (Persero) Construction Unit of Ii (2011-2013)

Mochamad Prayudianto
Kepala Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan
Head of Engineering and Procurement Planning Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Univ Gadjah Mada (1985)
- S2 Teknik Elektro, Victoria University of Manchester (1992)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan Strategis, Enjiniring Dan Teknologi (2013-2015)
- Kepala PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan (2012-2013)
- Manajer Senior Enjiniring
- Pembangkitan (2010-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Univ Gadjah Mada (1985)
- Master of Electrical Engineering, Victoria University of Manchester (1992)

Employment History :
- Head of Strategic Engineering and Procurement Planning Division, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- Head of The Centre of Electrical Engineering PT PLN (Persero) (2012-2013)
- Senior Manager of Power Generation Engineering Division, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2012)

Fahmi El Amruzi D
Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik dan Kemitraan Bisnis
Head of Electricity Transaction and Business Partnership Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1993)
- S2 Bidang Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Strategi Bisnis, PT Unindo (2013-2015)
- Senior Specialist I Perencanaan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- Master of Business Management, University of Missouri (2006)

Employment History :
- Senior Specialist I for Business Strategy, PT Unindo (2013-2015)
- Senior Specialist I for Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)

R Krisna Simbaputra
Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan
Head Of Risk Management And Compliance Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1985)
- S2 Manajemen, Sheffield University (1995)

Riwayat Pekerjaan :
- Expert Kinerja Korporat (2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (2012-2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2010-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1985)
- Master of Business Management, Sheffield University (1995)

Employment History :
- Expert In Corporate Performance (2013)
- General Manager of PT PLN (Persero) for North Sumatera Region (2012-2013)
- General Manager of PT PLN (Persero) for West Sumatera Region (2010-2011)

Direktorat Pengadaan | Procurement Directorate

Noesita Indriani
Kepala Divisi Perijinan dan Pertanahan
Head Of Licensing And Land Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1991)
- S2 Bidang Ekonomi Lainnya, Universitas Gadjah Mada(2009)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Manajemen Risiko, PT Indonesia Power (2012-2014)- Sekretaris Perusahaan, PT Indonesia Power (2009-2012)
- Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran, PT Indonesia Power (2006-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1991)
- Master of Finance, Universitas Gadjah Mada(2009)

Employment History :
- Head of Risk Management Division, PT Indonesia Power (2012-2014)
- Corporate Secretary, PT Indonesia Power (2009-2012)
- Head of The Division of Planning and Budget, PT Indonesia Power (2006-2012)

Ahmad Rofik
Kepala Divisi Pengadaan Strategis
Head of Strategic Procurement Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Mesin, Universitas Indonesia (1992)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I (2014-2015)
- Manajer Senior Konstruksi Pembangkit, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014)
- Manajer Perencanaan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I (2012-2014)

Educational Background :
- Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Indonesia (1992)

Employment History :
- General Manager of Construction Unit I, PT PLN (Persero) (2014-2015)
- Senior Manager of Generator Construction, PT PLN (Persero) Head Office (2014)
- Manager of Planning, Construction Unit I, PT PLN (Persero) (2012-2014)

Septa Hamid
Kepala Divisi Supply Chain Management
Head Of Supply Chain Management Unit

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1993)
- S2 Manajemen, Universitas Indonesia (2004)

Riwayat Pekerjaan :
- Direktur Utama PT. Cogindo Bersama (2009-2013)
- Wakil Direktur Bidang Kelistrikan PT Indonesia Power (2009)
- Senior Expert pada Pengembangan Bisnis PT Indonesia Power (2009)

Educational Background :
- Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- Master of Management, Universitas Indonesia (2004)

Employment History :
- President Director of Pt.cogindo Daya Bersama (2009-2013)
- Vice President of Engineering, PT Indonesia Power (2009)
- Senior Expert On Business Development, PT Indonesia Power(2009)

Adi Lumakso
Kepala Divisi Administrasi Konstruksi
Head of Construction Administration Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1993)
- S2 Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional (2005)
- S2 Manajemen Bisnis, Universitas Sriwijaya (2001)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V (2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2014-2015)
- Senior Specialist Ii Kinerja (Plt General Manager Unit Induk Pembangunan X) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2014)

Educational Background :
- Bachelor of Civil Engineering, Universitas Diponegoro (1993)
- Master of Business Management, Universitas Tenaga Nasional (2005)
- Master of Business Management, Universitas Sriwijaya (2001)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit V (2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) Constructionunit X (2014-2015) Performance Senior Specialist Ii (Acting General Manager of Construction Unit X) PT PLN (Persero)

Direktorat Human Capital Management | Directorate of Human Capital Management

Sriyono D Siswoyo
Kepala Divisi Pengembangan Organisasi
Head of Organizational Development Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1984)
- S2 Bidang Manajemen (Univ of Melbourne), (1996)

Riwayat Pekerjaan :
- Expert Pengembangan Tarif Usaha (Tk), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (2010-2012)
- Senior Specialist I Pengembangan Tarif Usaha (Tk), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (2009-2010)
- Manajer Koordinasi Dan Administrasi (2003-2008)

Educational Background :
- Bachelor of Civil Engineering, Institut Teknologi Bandung (1984)
- Master of Business Management,University of Melbourne, (1996)

Employment History :
- Expert of Business Tariff Development, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (2010-2012)
- Senior Specialist I of Business Tariff Development, Pt Pelayanan Listrik Nasional Batam (2009-2010)
- Manager of Coordination and Administration, PT PLN (Persero) Head Office (2003-2008)

Bagus Setiawan
Kepala Divisi Human Capital Management System
Head of Human Capital Management System Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1993)
- S2 Bidang Manajemen Bisnis, University of Missouri (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- Senior Specialist I Manajemen Sdm, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
- Master of Business Management, University of Missouri/Missouri (2006)

Employment History :
- Head of Human Capital Management System Development, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- Senior Specialist I of Human Capital Management, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2013)
- General Manager of PT PLN (Persero) for Bangka Belitung Region (2010-2011)

Okto Rinaldi S
Kepala Divisi Pengembangan Talenta
Head Of Talents Development Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Ekonomi, STIEI (1990)
- S2 Manajemen, Universitas Syiah Kuala (2001)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Corporate University) (2015)
- Kepala Pusdiklat (Chief Learning Officer) Pada PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Corporate University) (2014-2015)
- Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM Pada Divisi Pengembangan Sistem SDM Direktorat (SDM Dan Umum) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014)

Educational Background :
Bachelor of Economics, STIEI (1990)
Master of Business Management, Universitas Syiah Kuala (2001)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero), Education and Training Centre (Corporate University) (2015)
- Chief Learning Officer In PT PLN (Persero), Centre for Education and Training Centre (Corporate University) (2014-2015)
- Senior Manager for HR Performance Management In The Division of HR System Development, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014)

Tisna Gunawan
Kepala Divisi Umum
Head Of General Affairs Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas (1991)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Perencana Pengadaan Kantor Pusat Dan Fasilitas Korporat (2016)
- Senior Specialist I Pengawasan Intern (2016)
- Kepala Bidang Audit Regional V PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)

Educational Background :
- S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas (1991)

Employment History :
- Senior Procurement Planning Specialist I, Head Office and Corporate Facilities, PT PLN (Persero) Head Office (2016)
- Senior Internal Audit Specialist I, PT PLN (Persero) Head Office (2016)
- Head of Regional Audit V, PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)

Helmi Najamuddin
Kepala Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Kemanan Dan Lingkungan
Head Of Occupational Health And Safety, Security, And Environment Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1987)
- S2 Teknik Elektro, University of Melbourne (1995)

Riwayat Pekerjaan :
- Principal Engineer Transmisi, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)
- Kepala Divisi Batubara, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2015)
- Manajer Senior Pendanaan Luar Negeri, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (1987)
- Master of Electrical Engineering, University of Melbourne (1995)

Employment History :
- Principal Transmission Engineer, PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- Head of Coal Division, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2015)
- Senior Manager for Overseas Funding, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2011)

Direktorat Keuangan | Directorate of Finance

Rawan Insani
Kepala Divisi Keuangan
Head Of Finance Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- S2 Manajemen Bisnis, University of Abertay Dundee (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist Ii Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014)
- Manajer Senior Pendanaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)
- Manajer Senior Pendanaan Luar Negeri PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
- Master of Business Management, University of Abertay Dundee (2006)

Employment History :
- Senior Financial Specialist Ii, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014)
- Senior Manager of Funding, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)
- Senior Manager of Overseas Funding, PT PLN (Persero) Head Office (2012)

Gong Matua Hasibuan
Kepala Divisi Anggaran
Head of Budgeting Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Ekonomi Akuntansi, STIE Nusa Bangsa (1994)
- S2 Bidang Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia(2008)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2015)
- Senior Specialist Ii Keuangan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012)
- Manajer Senior Perencanaan Keuangan, PT PLN

Educational Background :
- Bachelor of Accounting, STIE Nusa Bangsa (1994)
- Master of Finance, Universitas Indonesia(2008)

Employment History :
- Head of The Budget Planning and Control Division, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2015)
- Senior Specialist Ii for Finance, PT PLN (Persero) Head Office (2012)
- Senior Manager for Financial Planning, PT PLN (Persero) Head Office (2011)

Iskandar
Kepala Divisi Treasury
Head of Treasury Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Ekonomi Akuntansi, UII, (1994)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Manajemen Keuangan (Tk), PT Indonesia Comnets Plus (2012-2015)
- Manajer Senior Pengelolaan Pendapatan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2012)
- Manajer Bidang Keuangan, PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2008-2010)

Educational Background :
Bachelor of Accounting, UII(1994)

Employment History :
- Senior Specialist I for Financial Management (Tk), PT Indonesia Comnets Plus (2012-2015)
- Senior Manager for Revenue Management, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2012)
- Finance Manager, PT PLN (Persero) West Sumatera Region (2008-2010)

Sulistyo Biantoro
Kepala Divisi Akuntansi
Head Of Accounting Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)
- S2 Akuntansi, The University of Queensland (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Akuntansi Manajemen (Plt Kepala Divisi Akuntansi) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)
- Kepala Bidang Audit Regional V PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2014)

Educational Background :
- Bachelor of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)
- Master of Accounting, The University of Queensland (2006)

Employment History :
- Senior Accounting Management Specialist I (Acting Head of Accountingi) PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)
- Head of Audit Regional V, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2014)

Benny M Marbun
Kepala Divisi Niaga
Head Of Commerce Division

Riwayat Pekerjaan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Gajah Mada (1985)
- S2 Teknik Elektro, Universitas Indonesia(1994)

Riwayat Pendidikan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Papua (2008-2010)
- Ahli Tata Usaha Pelayanan Pelanggan (2003- 2008)
- Kepala Cabang Surabaya Selatan (2000-2002)

Educational Background :
- General Manager of PT PLN (Persero) for Papua Region (2008-2010)
- Customer Service Administration, PT PLN (Persero) Head Office (2003- 2008)
- Head of South Surabaya Branch Office (2000-2002)

Employment History :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Gajah Mada (1985)
- Master of Electrical Engineering, Universitas Indonesia(1994)

Agus Sutiawan
Kepala Divisi Sistem Dan Teknologi Informasi
Head Of System And Information Technology Division

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (1998)
- S2 Master of Information Technology, UNSW, Sydney-Australia (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi IT Bank Bukopin (2007 – 2014)

Educational Background :
- Bachelor of Information Technology, Institut Teknologi Bandung (1998)
- Master of Information Technology, UNSW, Sydney-Australia (2006)

Employment History :
- Head of IT, Bank Bukopin (2007 – 2014)

Direktorat Bisnis Regional Sumatera | Directorate of Sumatra Regional Business

Muhammad Ikhsan Asaad
Kepala Divisi Pengembangan Regional Sumatera
Head Of Regional Development Division for Sumatera Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin (1990)
- S2 Manajemen Bisnis, Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2002)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara (2014-2015)
- Senior Specialist I Kinerja PT PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara (2013-2014)
- Manajer Operasi Sistem Pada PT PLN (Persero) Penyaluran Dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (2010-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Hasanuddin (1990)
- Master of Business Management, Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2002)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for Maluku and North Maluku Region (2014-2015)
- Senior Performance Specialist I, PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku Region (2013-2014)
- System Operations Manager, PT PLN (Persero), Distribution and Control for Sumatera (2010-2013)

Wiluyo Kusdwiharto
Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera
Head Of Regional Construction Division for Sumatera Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Viii (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar (2012-2013)
- Manajer Bidang Enjiniring PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar (2011-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for The Construction Unit Viii (2013-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) for Generators In Lontar, PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar (2012-2013)
- Manager In Engineering, PT PLN (Persero) Pembangkitan Lontar (2011-2012)

Supriyadi
Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera
Head Of Regional Operation Division for Sumatera Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (1991)
- S2 Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2007)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat (2015-2016)
- Manajer Senior Risk Infrastructure Pada Divisi Manajemen Risiko Direktorat (Niaga, Manajemen Risiko, Dan Kepatuhan) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2015)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (1991)
- Master of Business Management, Institut Teknologi Bandung (2007)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for The Region of West Sumatera (2015-2016)
- Senior Manager for Risk Infrastructure In The Risk Management Division, The Directorate of Commerce, Risk Management and Compliance, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2015)

Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Barat | Directorate of West Java Regional Business

Satri Falanu
Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat
Head Of Regional Development Division for West Java Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1986)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala PT PLN (Persero) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Research Institute) (2013-2015)
- Kepala Bidang Program Strategis PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)
- Manajer Bidang Penelitian Sistem Transmisi Dan Distribusi PT PLN (Persero) Penelitian Dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2008-2010)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1986)

Employment History :
- Head of The Research and Development Centre, PT PLN (Persero) Ketenagalistrikan (Research Institute) (2013-2015)
- Head of Strategic Programs, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2011)
- Manager for Transmission and Distribution System Research, PT PLN (Persero) Penelitian Dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2008-2010)

Suaib Sakariah
Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat
Head of Regional Construction Division for West Jawa Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Universitas Hassanudin (1981)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Specialist I Kinerja (Plt General Manager) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Iii (2014-2015)
- Senior Engineer I Konstruksi Jaringan (2014)
- Senior Engineer I Konstruksi Pembangkit (2013)

Educational Background :
- Bachelor of Civil Engineering, Universitas Hassanudin (1981)

Employment History :
- Senior Specialist I Performance (Acting General Manager) PT PLN (Persero) Construction Unit Iii (2014-2015)
- Senior Engineer I Network Construction, PT PLN (Persero) Head Office (2014)
- Senior Engineer I Generator Construction, PT PLN (Persero) Head Office (2013)

Nyoman S. Astawa
Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Barat
Head Of Regional Operation Division for West Java Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1993)
- S2 Manajemen, University of Missouri (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Distribusi Dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur Pada Direktorat (Operasi Indonesia Timur) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara (2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur (2013

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1993)
- Master of Management, University of Missouri (2006)

Employment History :
- Head of The Division of Distribution and Customer Services for East Indonesia Region Within The Directorate of Operations In East Indonesia, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) for East Kalimantan and North Kalimantan Region (2013)
- General Manager of PT PLN (Persero) for East Kalimantan Region (2013)

Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah | Directorate of Central Java Regional Business

Dyananto R
Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah
Head of Regional Development Division for Central Java Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1988)
- S1 Hukum, Universitas Kartini Surabaya (2006)
- S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)
- S2 Hukum (Notariat), Universitas Putra Bangsa (2005)
- S2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah (1998)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung (2011-2013)
- Manajer Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara Dan Sulawesi Barat (2008-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1988)
- Bachelor of Law, Universitas Kartini Surabaya (2006)
- Master of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)
- Master of Law (Notary), Universitas Putra Bangsa (2005)
- Master of Business Management, Universitas Muhammadiyah (1998)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for North Sumatera Region (2013-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) for Lampung Distribution (2011-2013)
- Manager for The Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (2008-2011)

Sarono
Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah
Head Of Regional Construction Division For Central Java Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Universitas Wijayakusuma (1990)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Xiii (2015)
- Senior Engineer I Konstruksi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Xiii (2014-2015)
- Senior Engineer I Konstruksi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Xiii (2010-2013)

Educational Background :
- Bachelor Of Civil Engineering, Universitas Wijayakusuma (1990)

Employment History :
- General Manager Of PT PLN (Persero) Construction Unit Xiii (2015)
- Senior Construction Engineer I, PT PLN (Persero) Construction Unit Xiii (2014-2015)
- Senior Constructionengineer I, PT PLN (Persero) Construction Unit Xiii (2010-2013)

Sulaiman Daud
Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah
Head Of Regional Operation Division For Central Java Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil, Unsyiah Darussalam (1987)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh (2012- 2015)
- Manajer Bidang Perencanaan Kantor Wilayah PT PLN (Persero) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (2009-2010)

Educational Background :
- Bachelor Of Civil Engineering, Unsyiah Darussalam (1987)

Employment History :
- Head Of Regional Construction for Central Java, PT PLN (Persero) Head Office (2015)
- General Manager Of PT PLN (Persero) for the Region Of Aceh (2012- 2015)
- Manager Of Office Planning for The Region Of Nanggroe Aceh Darussalam (2009-2010)

Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali | Directorate of East Java & Bali Regional Business

Paranai Suhasfan
Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Timur dan Bali
Head Of Regional Development Division For East Java And Bali Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1992)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu (2014-2015)
- Senior Specialist I Kinerja (Plt General Manager) PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu (2013-2014)
- Manajer Bidang Distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang (2011-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1992)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for South Sumatera Selatan, Jambi and Bengkulu (2014-2015)
- Senior Performance Specialist I (Acting General Manager) of PT PLN (Persero) for The Regions of South Sumatera, Jambi and Bengkulu (2013-2014)
- Distribution Manager of PT PLN (Persero) Jakarta Raya and Tangerang Distribution (2011-2013)

Adang Sudrajat
Kepala Divisi Konstruksi Regional Jawa Bagian Timur dan Bali
Head of Regional Construction Division for East Java and Bali Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Sipil , Institut Teknologi Bandung (1986)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Konstruksi Pembangkit, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- Kepala Divisi Konstruksi Dan Ipp Indonesia Barat, PT PLN (Persero) Kantor Pusat(2013)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Thermal Jawa Bali (2011-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Civil Engineering , Institut Teknologi Bandung (1986)

Employment History :
- Head of Generator Construction Division, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- Head of Construction and Ipp Division for West Indonesia, PT PLN (Persero) Kantor Pusat(2013)
- General Manager of Thermal Power Plant Construction for Java-Bali Construction Unit, PT PLN (Persero) (2011-2013)

Daniel Sangap Bangun
Kepala Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur dan Bali
Head of Operational Division for East Java and Bali Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1990)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Distribusi & Pp Sumatera, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2011-2013)
- Manajer Senior Strategi Pemasaran, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1990)

Employment History :
- Head of Division for Sumatera Distrbution, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) for West Kalimantan Region (2011-2013)
- Strategic Marketing Senior Manager, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2011)

Direktorat Bisnis Regional Kalimantan | Directorate of Kalimantan Regional Business

Sudibyo
Kepala Divisi Pengembangan Regional Kalimantan
Head Regional Development Division for Kalimantan Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Sumatera Utara (1987)

Riwayat Pekerjaan :
- Senior Engineer I PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2015)
- Manajer Senior Operation Performance Improvement Transmisi PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)
- Manajer Senior Operasi Sistem PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sumatera Utara (1987)

Employment History :
- Senior Engineer I, PT PLN (Persero) Head Office (2013-2015)
- Senior Manager for Transmission Operation and Performance Improvement, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)
- Senior Manager for System Operation, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2012)

Hariyadi Krismiyanto
Kepala Divisi Konstruksi Regional Kalimantan
Head of Regional Construction Division for Kalimantan Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1993)
- S2 Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Bandung (2001)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Ix (2015)
- Senior Engineer I Konstruksi ApbnPT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (2013-2014)
- Manajer Bidang Perencanaan, PT PLN (Persero) Pembangkitan Kalimantan Dan Nusa Tenggara (2010-2013)

Educational Background :
- Bachelor In Nuclear Engineering, Universitas Gadjah Mada (1993)
- Master of Business Management, Institut Teknologi Bandung (2001)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit Ix (2015)
- Senior Engineer I of Apbnpt, PT PLN (Persero), Construction Unit X (2013-2014)
- Manager In The Field of Planning, PT PLN (Persero) for Generators In Kalimantan and Nusa Tenggara (2010-2013)

Ruly Firmansyah
Kepala Divisi Operasi Regional Kalimantan
Head of Regional Operation Division for Kalimantan Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1990)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012-2015)
- Senior Specialist I Kinerja Perusahaan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2011-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1990)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012-2015)
- Senior Performance Specialist I, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2011-2012)

Direktorat Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara | Directorate of Sulawesi & Nusa Tenggara Regional Business

Idian
Kepala Divisi Pengembangan Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara
Head Of Regional Development Division For Sulawesi And Nusa Tenggara Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya (1986)
- S2 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada (2006)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (2016)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Xiii (2015-2016)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Xi (2015)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sriwijaya (1986)
- Master of Electrical Engineering, Universitas Gadjah Mada (2006)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit of South Sulawesi Region (2016)
- General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit Xiii (2015-2016)
- General Manager of PT PLN (Persero) for the Construction Unit Xi (2015)

Hakim Nawawi
Kepala Divisi Konstruksi Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara
Head of Regional Construction Division for Sulawesi Dan Nusa Tenggara Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin (1990)
- S1 Manajemen Keuangan, Universitas Hasanuddin (2001)
- S2 Manajemen Keuangan, Universitas Hasanuddin (2004)

Riwayat Pekerjaan :
- Kepala Divisi Administrasi Konstruksi Pada Direktorat (Konstruksi Dan Energi Baru Terbarukan) PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2014-2015)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Iii (2014)
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera Ii (2012-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Hasanuddin (1990)
- Bachelor of Finance, Universitas Hasanuddin (2001)
- Master of Finance, Universitas Hasanuddin (2004)

Employment History :
- Head of The Construction Administration Division, the Directorate of Construction and New Renewable Energy, PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015)
- General Manager of PT PLN (Persero) Construction Unit Iii (2014)
- General Manager of PT PLN (Persero) Network Construction Unit for Sumatera Ii (2012-2013)

Mursalin
Kepala Divisi Operasi Regional Sulawesi Dan Nusa Tenggara
Head Of Regional Operation Division For Sulawesi And Nusa Tenggara Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Mesin, Universitas Syiah Kuala (1989)
- S2 Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Hasanuddin (2009)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2014-2015)
- Senior Specialist I Kinerja PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2011-2014)

Educational Background :
- Bachelor of Mechanical Engineering, Universitas Syiah Kuala (1989)
- Master of Human Resources Management, Universitas Hasanuddin (2009)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for South Kalimantan Selatan and Central Kalimantan (2014-2015)
- Senior Performance Specialist I of PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan (2011-2014)

Direktorat Bisnis Regional Maluku & Papua | Directorate Regional Business Maluku & Papua

Hot Martua Bakara
Kepala Divisi Pengembangan Regional Maluku dan Papua
Head Of Regional Development Division Of Maluku And Papua Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Tanjung Pura (1993)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2013-2015)
- Manajer Senior Hubungan Internasional PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2013)
- Senior Specialist Ii Proyeksi Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2008-2010)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Tanjung Pura (1993)

Employment History :
- General Manager of PT PLN (Persero) for West Kalimantan Region (2013-2015)
- Senior Manager of International Relations, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2013)
- Senior Specialist II for Financial Projections, PT PLN (Persero) Head Office (2008-2010)

Tri Agus Cahyono
Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua
Head of Regional Construction Division for Maluku and Papua Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Universitas Jayabaya (1994)
- S2 Manajemen, Institut Teknologi Surabaya (2004)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV (2013-2015)
- General Manager Kantor Induk PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera Jawa (2013)
- Manajer Senior Pengadaan Jaringan, PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Univ Jayabaya (1994)
- Master of Business Management, Institut Teknologi Surabaya (2004)

Employment History :
- General Manager PT PLN (Persero), Construction Unit Iv (2013-2015)
- General Manager of Main Office PT PLN (Persero), Construction Unit of Extra High Voltage Transmission Interconnecting Sumatra and Java (2013)
- Senior Manager of Network Procurement, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)

Ida Bagus Ari Wardana
Kepala Divisi Operasi Regional Maluku Dan Papua
Head Of Regional Operation Division For Maluku Dan Papua Region

Riwayat Pendidikan :
- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1992)
- S2 Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)

Riwayat Pekerjaan :
- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2014-2015)
- Kepala Bidang Program Metamorfosa PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2012-2013)
- Senior Specialist Ii Program Metamorfosa PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2011-2012)

Educational Background :
- Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1992)
- Master of Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2001)

Employment History :
- General Manager for Bangka Belitung Region, PT PLN (Persero) (2014-2015)
- Head of The Metamorphic Program, PT PLN (Persero) Head Office (2012-2013)
- Senior Specialist Ii for The Metamorphic Program, PT PLN (Persero) Head Office (2011-2012)

Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak & Entitas Asosiasi PLN

Addresses of PLN Branch Offices, Subsidiaries & Association

KANTOR CABANG — BRANCH OFFICES

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
I	**PT PLN (Persero) - KANTOR PUSAT |** BRANCH OFFICES	**Jl. Trunojoyo Blok M I - 135 JAKARTA 12160** Trunojoyo Street, Blok M I – 135 JAKARTA 12160 Tel. : (021) 7261 875, 726 1122, 726 2234, 725 1234, 725 0550 Fax. : (021) 722 1330, 739 7150 E-mail : webmaster@pln.co.id Home page : www.pln.co.id
II.	**PT PLN (Persero) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** PT PLN (Persero) RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER **ISO/IEC 17025 - 2005**	**Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta 12760** Duren Tiga Street No. 102, Jakarta 12760 Tel. : (021) 797 3774, 798 0190, 798 9982 (Hunting), 7991155 (GM) Fax. : (021) 7991762, 7975414 E-mail : customercare@pln-litbang.co.id Home Page : www.pln-litbang.co.id Jwots : 13107,13109,13110,13111,13115,13121
	Lab Hubung Singkat Duri Kosambi Electrical Short Lab Duri Kosambi	**Jl. Pondok Randu, RT 003/RW 02 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat** Pondok Randu Street, RT 003/RW 02 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat Tel. : (021) 703 33874
	Lab LTA Cipayung	**Gg. Habib Umar Alatas Ds. Cipayung RT 05/RW 01 Kec. Mega Mendung** Habib Umar Alatas Alley, Cipayung Village, RT 05/RW 01 Kec. Mega Mendung Tel. : (0251) 825 6450
III.	**PT PLN (Persero) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** PT PLN (Persero) EDUCATION AND TRAINING CENTER	**Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550** HR. Harsono RM. Street No. 59, Ragunan - Pasar Minggu South Jakarta 12550 Tel. : (021) 781 1292, 781 1293, 780 0832, 781 1368 (KPUSDIKLAT) Fax. : (021) 7811294, 781 1295 (Sekretaris KPUSDIKLAT), 7829263 (SDM) Website : http://pln-pusdiklat.co.id Vicon : 192.168.13.178
	Udiklat (Academy) Bogor ISO 9001 : 2008, SMK3	**Jl. Raya Puncak Km. 72, PO.Box 250, Bogor 16750** Raya Puncak Street Km. 72, PO.Box 250, Bogor 16750 Tel. : (0251) 825 4545, 825 4546, 825 4523 (Mnj) Fax. : (0251) 825 5821, 825 9875 E-mail : udiklatbgr@yahoo.com Vicon : 192.168.13.194
	Udiklat (Academy) Jakarta ISO 9001 : 2008	**Jl. Letjen S. Parman No. 27 Slipi, Jakarta 11480** Letjen S. Parman Street No. 27, Slipi, Jakarta 11480 Tel. : (021) 548 1141, 535 7007, 535 7657 Fax. : (021) 549 11538, 535 7661 E-mail : udiklat.jakarta@yahoo.co.id Vicon : 192.168.13.186
	Udiklat (Academy) Suralaya ISO 9001:2008	**Jl. Raya Kompl PLTU Suralaya No. 7 Merak 42439, Cilegon, Banten** Raya Kompl PLTU Suralaya Street No. 7, Merak 42439, Cilegon, Banten Tel. : (0254) 571 218, 572 118, 572 119 (Mnj) Fax. : (0254) 571 219 Email : udiklat.suralaya@pln.co.id Vicon : 192.168.13.202
	Udiklat (Academy) Semarang ISO 9001:2008	**Jl. Raya Kedung Mundu, Salak Utama, Semarang 50273** Raya Kedung Mundu Street, Salak Utama, Semarang 50273 Tel. : (024) 671 8318, 671 8317 Fax. : (024) 671 8316 Jwots : 51017 - 51022 E-mail : udiklatSMG.pgn@gmail.com Vicon : 192.168.13.210
	Udiklat (Academy) Pandaan ISO 9001 : 2010	**Jl. Raya Surabaya-Malang Km 50 Pandaan, Pasuruan 67156** Raya Surabaya-Malang Street Km 50, Pandaan, Pasuruan 67156 Tel. : (0343) 631 688, 632 651, 632 811 (Mnj) Fax. : (0343) 631 796 Jwots : 71063 - 71065 E-mail : udiklat.pandaan@pln.co.id Vicon : 192.168.13.98

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Udiklat (Learning Unit) Tuntungan	**Jl. Lapangan Golf Tuntungan No. 35, Pancurbatu 20353** Lapangan Golf Tuntungan Street No. 35, Pancurbatu 20353 Tel. : (061) 836 0355, 836 0511 Fax. : (061) 836 0613, 836 0615, 836 0616 E-mail : penganjaranU5@gmail.com Vicon : 10.254.111.18
	Udiklat (Learning Unit) Padang ISO 9001:2008	**Jl. Raya Padang Bukit Tinggi Km. 37 Padang, Lubuk Alung Sumatera Barat 25581** Raya Padang Bukit Tinggi Street Km. 37, Padang, Lubuk Alung Sumatera Barat 25581 Tel. : (0751) 968 31, 968 319, 698 329, 967 68, 963 66 Fax. : (0751) 963 90 E-mail : udiklat_padang@yahoo.com Vicon : 10.254.111.10
	Udiklat (Academy) Palembang ISO 9001:2008	**Jl. Bendungan No. 22, Sekip Palembang 30126** Bendungan Street No. 22, Sekip Palembang 30126 Tel. : (0711) 322 342, 365 829, 312 760, 361 644 (Mnj) Fax. : (0711) 312 740 Jwots : 15022 (fone) + 81731-32 E-mail : udiklat.plm@pln-pusdiklat.co.id Vicon : 10.254.111.2
	Udiklat (Academy) Makassar ISO 9001:2008	**Jl. Malino No. 377 Makassar 92171** Malino Street No. 377, Makassar 92171 Tel. : (0411) 865 390, 865 391 Fax. : (0411) 866 090 E-mail : udiklatmakassar@yahoo.co.id Vicon : 10.254.111.34
	Udiklat (Academy) Banjarbaru	**Jl. A. Yani Km 32,5 Loktabat - Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711** A. Yani Street Km 32,5 Loktabat - Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 Tel. : (0511) 477 7357, 477 7436 Fax. : (0511) 477 2590 Email : udiklat.banjarbaru@pln.co.id
	Unit Assessment Centre	**Jl. Harsono RM No. 59 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550** Jl. Harsono RM Street No. 59, Ragunan Pasar Minggu, South Jakarta 12550 Tel. : (021) 781 1390 Fax. : (021) 780 0832 E-mail : assessment.centre@yahoo.com
	Unit Sertifikasi	**Jl. Harsono RM No. 59 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550** Harsono RM Street No. 59, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Tel. : (021) 781 1292 Fax. : (021) 782 9287 E-mail : lsp_user_pln@yahoo.com
	Unit Museum Listrik dan Energi Baru	**Jl. Raya Taman Mini, Jakarta 13560** Tel. : (021) 841 3451, 841 3554 Fax. : (021) 841 3451 E-mail : museumlistrik.tmii@gmail.com
IV.	**PT PLN (Persero) PUSAT ENJINIRING KETENAGALISTRIKAN** PT PLN (Persero) ELECTRICAL ENGINEERING CENTER **ISO 9001 : 2008**	**Jl. Aipda K.S. Tubun I/2 Petamburan, Jakarta Barat 11420** Aipda K.S. Tubun Street I/2, Petamburan, Jakarta Barat 11420 Tel. : (021) 564 0141, 563 8642 , 563 8644 Fax. : (021) 563 8658, 563 8661 E-mail : pusenlis@pln.co.id
V.	**PT PLN (Persero) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN** PT PLN (Persero) ELECTRICAL MAINTENANCE CENTER	**Jl. Banten No. 10 Bandung 40272** Banten Street No. 10, Bandung 40272 Tel. : (022) 723 6791-3 Fax. : (022) 723 6794 Email : pusharlis@pln.co.id Homepage : www.pln.co.id/pusharlis
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) I Merak	**Jl. Plorida Kotak Pos 6, Merak 42456** Plorida Street, PO BOX 6, Merak 42456 Tel. : (0254) 571 265 Fax. : (0254) 571 273 E-mail : sekre.uwp1merak@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) II Klender	**Jl. Raya Bekasi Timur KM 17, Jakarta Timur 13930** Raya Bekasi Timur Street KM 17, East Jakarta 13930 Tel. : (021) 461 3230, 461 2848 Fax. : (021) 461 9066 E-mail : pusharlis_uwp2@pln.co.id
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) III Bandung	**Jl. Banten No. 8 Bandung 40272** Banten Street No. 8, Bandung 40272 Tel. : (022) 721 5344 Fax. : (022) 720 4809 E-mail : pusharlis_uwp3@pln.co.id
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) IV Citarum	**Jl. Raya Dayeuhkolot Km. 9 Bandung 40257** Raya Dayeuhkolot Street Km. 9, Bandung 40257 Tel. : (022) 523 0669, 520 2929 Fax. : (022) 523 0539 E-mail : pusharlis_uwp4@pln.co.id
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) V Semarang	**Jl. Siliwangi No. 379, Semarang 50146** Siliwangi Street No. 379, Semarang 50146 Tel. : (024) 726 0850 Fax. : (024) 760 8783 E-mail : pusharlis_uwp5@pln.co.id
	Unit Workshop Dan Pemeliharaan (UWP) VI Surabaya	**Jl. Ngagel Timur No. 16 Surabaya 60285** Ngagel Timur Street No. 16, Surabaya 60285 Tel. : (031) 502 3731, 502 3132 Fax. : (031) 504 2449 E-mail : pusharlis_uwp6@pln.co.id
VI.	**PT PLN (Persero) PUSAT MANAJEMEN** PT PLN (Persero) MANAGEMENT CENTER **KONSTRUKSI |** CONSTRUCTION **ISO 9001 : 2000 LMK - KAN**	**Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232** Slamet Street No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232 Tel. : (024) 831 0060 Fax. : (024) 831 7241 E-mail : plnjmk@pln.co.id
	Unit Manajemen Konstruksi I (UMK I) ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	**Jl. Letjen Sutoyo No. 1, Cililitan, Jakarta Timur 13640** Letjen Sutoyo Street No. 1, Cililitan, East Jakarta 13640 Tel. : (021) 8011575 Fax. : (021) 8011670 E-mail : plnjmk_umk1@pln.co.id
	Unit Manajemen Konstruski II (UMK II) ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	**Jl. Ketintang Baru No. 1 - 3, SURABAYA 60231** Ketintang Baru Street No. 1 – 3, SURABAYA 60231 Tel. : (031) 8273456 Fax. : (031) 8276337 E-mail : plnjmk_umk2@pln.co.id
	Unit Manajemen Konstruksi III (UMK III) ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	**Jl. Demang Lebar Daun No. 170 Kel. Demang Lebar Daun Palembang 30137** Demang Lebar Daun Street No. 170, Demang Lebar Daun District Tel. : (0711) 444951 Fax. : (0711) 444953 E-mail : plnjmk_umk3@pln.co.id
	Unit Manajemen Konstruksi IV (UMK IV) ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	**Jl. Kolonel Yos Sudarso Km. 8 Tanjung Mulia Medan 20241** Kolonel Yos Sudarso Street Km. 8, Tanjung Mulia Tel. : (061) 6645621, 6645619 Fax. : (061) 6645620 E-mail : plnjmk_umk4@pln.co.id
	Unit Manajemen Konstruksi V (UMK V) ISO 9001 : 2000 LMK - KAN	**Jl. Prof Abdurrahman Basamalah (Racing Centre) Komp. Perumahan PLN, Makassar 90231** Prof Abdurrahman Basamalah Street, (Racing Centre) Tel. : (0411) 441235 Fax. : (0411) 441214 E-mail : plnjmk_umk5@pln.co.id
VII.	**PT PLN (Persero) PUSAT SERTIFIKASI** PT PLN (Persero) CERTIFICATION CENTER **ISO 17021 : 2011**	**Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760** Laboratorium Street, Duren Tiga,South Jakarta 12760 Tel. : (021) 7900034 Fax. : (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots : 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail : niaga@pln-jaser.co.id, skt@pln-jaser.co.id, psm@pln-jaser.co.id Homepage : wwwpln.co.id/jaser Vicon : 192.168.1.154

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
VIII.	**PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN** DISTRIBUTION AND LOAD CONTROL CENTER	
1.	PT PLN (Persero) PUSAT PENGATUR BEBAN (P2B) ISO 9001 : 2000	**Cinere 16514, Jakarta Selatan** Tel. : (021) 7542646, 7543566 Fax. : (021) 7542516 E-mail : plnp3b@pln-jawa-bali.co.id
	Area Pengatur Beban Jakarta dan Banten ISO 9001 : 2000 UPT Cilegon, UPT Bogor, UPT Jakarta Utara, UPT Banten, UPT Jakarta Barat, UPT Jakarta Timur, UPT Jakarta Pusat, UPT Jakarta Selatan, UPT Tangerang.	**Jl. Mayjend Sutoyo No. 1 Cawang, Cililitan, Jakarta Timur 13640** Mayjend Sutoyo Street No. 1, Cawang, Cililitan, East Jakarta 13640 Tel. : (021) 8092596, 80878612, 80878613 Fax. : (021) 8093394, 80878611
	Area Pengatur Beban Jawa Barat	**Jl. Moh. Toha Km. 4 Komplek PLN GI Cigereleng, Bandung 50255** Moh. Toha Street Km. 4, Komplek PLN GI Cigereleng, Bandung 50255 Tel. : (022) 5201723 Fax. : (022) 5201742 E-mail : RJBR@pln-jawa-bali.co.id
	Area Pengatur Beban Jawa Tengah dan DIY ISO 9001 : 2000 UPT Semarang, UPT Kudus, UPT Purwokerto, UPT Yogyakarta, UPT Surakarta, UPT Salatiga, UPT Purwokerto, UPT Tegal.	**Jl. Jend Sudirman Km 23, Komplek GI Ungaran, Jawa Tengah 50501** Jend Sudirman Street Km 23, Komplek GI Ungaran, Jawa Tengah 50501 Tel. : (024) 6922402 Fax. : (024) 6921223, 6921209 E-mail : Region3@pln-jawa-bali.co.id
	Area Pengatur Beban Jawa Timur	**Jl. Suningrat No. 45, Taman Sidoarjo, Surabaya 61257** Suningrat Street No. 45, Taman Sidoarjo, Surabaya 61257 Tel. : (031) 7882113, 7882114 Fax. : (031) 7881024
2.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT	**Krukut-Limo, Cinere 16514, Jakarta Selatan** Tel. : (021) 7543566 Fax. : (021) 7542380
	Area Pelaksanaan Pemeliharaan (APP) Cawang	**Jl. Cililitan Besar No. 1 Jakarta Timur 13640** Cililitan Besar Street No. 1, East Jakarta 13640 Tel. : (021) 8092208 Fax. : (021) 8091264
	Area Pelaksanaan Pemeliharaan (APP) Pulogadung	**Jl. Raya Bekasi Km. 21, Kawasan Industri Pulogadung** Raya Bekasi Street Km. 21, Kawasan Industri Pulogadung East Jakarta 13920 Tel. : (021) 4609288 Fax. : (021) 4609284
	Area Pelaksanaan Pemeliharaan (APP) Duri Kosambi	**Jl. Raya Duri Kosambi No. 1, Cengkareng JAKARTA BARAT** Raya Duri Street Kosambi No. 1, Cengkareng West Jakarta Tel. : (021) 54398379 Fax. : (021) 5402957
	Area Pelaksanaan Pemeliharaan (APP) Cilegon	**Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5, Kotabumi, Cilegon BANTEN 42435** Jend. Sudirman Street Km. 4,5, Kotabumi, Cilegon Tel. : (0254) 398176, 399617 Fax. : (0254) 396932
3.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH	**Jl. Moh. Toha Km. 4 Komplek PLN GI Cigereleng** Moh. Toha Street Km. 4, Komplek PLN GI Cigereleng BANDUNG 40255 Tel. : (022) 5201725 Fax. : (022) 5220214 E-mail : RJBR@pln-jawa-bali.co.id
4.	PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI	**Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo SURABAYA 61257** Suningrat Street No. 45, Taman, Sidoarjo Tel. : (031) 7882113, 7882114 Fax. : (031) 7882578, 7883266 Email : tjbtb1@pln.co.id
	PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan Surabaya	**Jl. Ketintang Baru No. 9, SURABAYA 60231** Ketintang Baru Street No. 9, SURABAYA 60231 Tel. : (031) 8285505 Fax. : (031) 8284400
	PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan Malang	**Jl. Raya Karanglo No. 90, MALANG 65100** Raya Karanglo Street No. 90, MALANG 65100 Tel. : (0341) 478030, 471860 Fax. : (0341) 411800

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan Probolinggo	**Jl. Cokroaminoto No. 947, Kanigaran** Cokroaminoto Street No. 947, Kanigaran PROBOLINGGO 67213 Tel. : (0335) 424933 Fax. : (0335) 424933
	PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan Madiun	**Jl. M.H. Thamrin No. 2, MADIUN 63115** M.H. Thamrin Street No. 2, MADIUN 63115 Tel. : (0351) 454355 Fax. : (0351) 454469
	PT PLN (Persero) Area Pelaksana Pemeliharaan Bali	**Jl. Abian Base, Kapal, Mengwi, Badung BALI 80351** Abian Base Street, Kapal, Mengwi, Badung Tel. : (0361) 4410979 Fax. : (0361) 4419943
5.	PT PLN (Persero) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA	**Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat** Musyawarah Street, Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru RIAU 28233 Tel. : (0761) 6700011, 6700012 Fax (0761) 6700015 E-mail : p3bs@pln.co.id Website : www.pln.co.id/p3bs
	UNIT PELAYANAN TRANSMISI (UPT)	
	PT PLN (Persero) UPT Banda Aceh ISO 9001 : 2008	**Jl. Soekarno Hatta-Desa Lamreueng ACEH BESAR** Soekarno Hatta Street, Desa Lamreueng Tel. : (0651) 48961, 48962 Fax. : (0651) 48963 E-mail : upt_aceh@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Medan ISO 9001 : 2008	**Jl. Listrik No. 12 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah MEDAN 20112** Listrik Street No. 12, Petisah Tengah, Medan Petisah District Tel. : (061) 4579900 Fax. : (061) 4577700 E-mail : upt_medan@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Pematang Siantar ISO 9001 : 2008	**Jl. Sangnawaluh KM 4,5 PEMATANG SIANTAR 21151** Sangnawaluh Street KM 4,5, PEMATANG SIANTAR 21151 Tel. : (0622) 7550874, 7550883 Fax. : (0622) 7552223 E-mail : upt_siantar@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Pekanbaru ISO 9001 : 2008	**Jl. Siak II Air Hitam Km. 11 Garuda Sakti** Siak II Street Air Hitam Km. 11, Garuda Sakti PEKANBARU 28293 Tel. : (0761) 30388884 Fax. : (0761) 3041008 E-mail : upt_pekanbaru@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Padang ISO 9001 : 2008	**Jl. By Pass Km. 06 Lubuk Begalung, PADANG 25221** By Pass Street Km. 06, Lubuk Begalung, PADANG 25221 Tel. : (0751) 71650 Fax. : (0751) 71783 E-mail : upt_padang@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Bengkulu	**Jl. Basuki Rahmat No. 47, Sukamerindu BENGKULU 38119** Basuki Rahmat Street No. 47, Sukamerindu Tel. : (0736) 343878 Fax.: (0736) 21547 E-mail : upt_bengkulu@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Jambi	**Jl. H. Kamil No. 39 RT. 15, Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan JAMBI 36131** H. Kamil Street No. 39, RT. 15, Kel. Wijaya Pura Kec. South Jambi, JAMBI Tel. : (0741) 35733 Fax. : (0741) 3062045 E-mail : uptjambi17@gmail.com
	PT PLN (Persero) UPT Palembang ISO 9001 : 2008	**Jl. MP. Mangkunegara No. 1A, PALEMBANG 30127** MP. Mangkunegara Street No. 1A, PALEMBANG 30127 Tel. : (0711) 818221, 814516 Fax. : (0711) 812576, 819863 E-mail : sektr.upt.palembang@pln.co.id
	PT PLN (Persero) UPT Tanjung Karang ISO 9001 : 2008	**Jl. Basuki Rahmat No. 19 Teluk Betung BANDAR LAMPUNG 35116** Basuki Rahmat Street No. 19, Teluk Betung Tel. : (0721) 80586288, 80586299 Fax. : (0721) 472584 E- mail : upt.karang@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	UNIT PELAYANAN BEBAN (UPB) LOAD SERVICE UNIT (UPB)	
	PT PLN (Persero) UPB Sumatera Bagian Selatan ISO 9001 : 2008	**Jl. Abikusno Cokrosuyoso No. 24 Palembang, SUMATERA SELATAN 30259** Abikusno Cokrosuyoso Street No. 24 Palembang, SOUTH SUMATERA 30259 Tel. : (0711) 510349, 519152 Fax. : (0711) 510472 E-mail : upb-sumbagsel@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPB Sumatera Bagian Tengah ISO 9001 : 2008	**Jl. Ir. H Sutami Batang Tapakis, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab Padang Pariaman SUMATERA BARAT 25581** Ir. H Sutami Street, Batang Tapakis, Sintuk WEST SUMATERA 25581 Tel. : (0751) 96163, 96159 Fax. : (0751) 96368 E-mail : upb_sumbagteng@p3b-sumatera.co.id
	PT PLN (Persero) UPB Sumatera Bagian Utara ISO 9001 : 2008	**Jl. Komodor Laut Yos Sudarso Lorong XII No. 6 Medan, SUMATERA UTARA 20115** Komodor Laut Yos Sudarso Lorong XII Street No. 6 Medan, NORTH SUMATERA 20115 Tel. : (061) 6615125 Fax. : (061) 6615692 E-mail : upb_sumbagut@p3b-sumatera.co.id
IX.	**KANTOR WILAYAH |** REGIONAL OFFICES	
1.	PT PLN (Persero) WILAYAH ACEH	**JL. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 172 Lampriet Banda Aceh, ACEH 23243** Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh Street No. 172, Lampriet Tel. : (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. : (0651) 21516 E-mail : plnwilaceh@pln.co.id Website : www.plnaceh.co.id
	Area Banda Aceh ISO 9001; 14001 : PLTD Aneuk Laot Sabang	**Jl. Tentara Pelajar No. 11 Merduati, Banda Aceh ACEH 23247** Tentara Pelajar Street No. 11, Merduati, Banda Aceh Tel. : (0651) 23205, 22230, 23569 Fax. : (0651) 22226 E-mail : pln_bna@pln.co.id
	Area Sigli ISO 9001; 14001 : PLTD Pulo Pisang	**Jl. Tgk Chik Ditiro No. 14, SIGLI 24116** Tgk Chik Ditiro Street No. 14, SIGLI 24116 Tel. : (0653) 22232, 21582 Fax.. : (0653) 21014 E-mail. : pln_sgl@pln.co.id
	Area Lhokseumawe ISO 9001 ; 2000 ; Rayon Kota Lhokseumawe	**Jl. Merdeka Timur No. 2 Cunda** East Merdeka Street No. 2, Cunda LHOKSEUMAWE 24351 Tel. : (0645) 47862, 47863 Fax. : (0645) 42970 E-mail : pln_lsm@telkom.net
	Area Langsa	**Jl. Jend. A. Yani No. 6, LANGSA 24416** Jend. A. Yani Street No. 6, LANGSA 24416 Tel. : (0641) 21288, 21195 Fax. : (0641) 21721 E-mail : pln_lsa@pln.co.id
	Area Meulaboh	**Jl. Swadaya No. 30, MEULABOH 23617** Swadaya Street No. 30, MEULABOH 23617 Tel. : (0655) 7551008, 7551351 Fax. : (0655) 7551352 E-mail : pln_mbo@pln.co.id
	Area Subulussalam	**Jl. Teuku Umar No. MEULABOH** Teuku Umar Street No , MEULABOH Tel. : (0627) 31786, 31250 Fax : (0627) 31775, 31774 E-mail : pln_sbs@pln.co.id
	Area Pengatur Distribusi (APD) Aceh	**Jl. Tentara Pelajar No. 11 Merduati, Banda Aceh** Tentara Pelajar Street No. 11, Merduati, Banda Aceh ACEH 23247

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA	**Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284 MEDAN 20115 Kotak Pos 2000** K.L. Yos Sudarso Street No. 284 Tel. : (061) 6615155 Fax. : (061) 6613789 E-mail : plnsumut@plnwill.co.id
	Area Medan Rayon Medan Kota, Rayon Medan Timur, Rayon Medan Baru, Rayon Medan Selatan, Ranting Sunggal, Ranting Helvetia, Ranting Belawan, RantingLabuhan, Ranting Johor	**Jl. Listrik No. 8 MEDAN 20115** Listrik Street No. 8 MEDAN 20115 Tel. : (061) 4142888 Fax. : (061) 4152289 E-mail : plncabangmedan@yahoo.co.id
	Area Pematang Siantar Rayon Siantar Kota, Ranting Perdagangan, Ranting Tanah Jawa, Ranting Parapat, Ranting Kisaran, Ranting Sidamanik, Ranting Indra Pura, Ranting Tebing Tinggi, Ranting Pangururan, Ranting Tanjung Tiram, Ranting Dolok Masihul	**Jl. Kapten MH. Sitorus No. 1 PEMATANG SIANTAR** Kapten MH. Sitorus Street No. 1 Tel. : (0622) 23875, 23621, 26143 Fax. : (0622) 20217 E-mail : mcab-siantar@plnwil2.co.id
	Area Sibolga Rayon Sibolga Kota, Ranting Taruntung, Ranting Ranting Siborong borong, Ranting Dolok Sanggul, Balige, Porsea, Barus	**Jl. Ferdinand Lumban Tobing No. 30, SIBOLGA** Ferdinand Lumban Tobing Street No. 30, SIBOLGA Tel. : (0631) 23941, 23945 Fax. : (0631) 22889 E-mail : mcab-sibolga@plnwil2.co.id
	Area Binjai Rayon Binjai Kota, Rayon Binjai Timur, Rayon Binjai Barat, Ranting Kuala, Ranting Sabat, Ranting Tanjung Pura, Ranting Gebang, Ranting Pangkalan Bradan, Ranting Pangkalan Susu, Ranting Brastagi, Ranting Kaban Jahe, Ranting Tiga Binanga, Ranting Sidikkalang, Ranting Pakpak Barat	**Jl. Teuku Amir Hamzah No. 37, BINJAI 20743** Teuku Amir Hamzah Street No. 37, BINJAI 20743 Tel. : (061) 8824777, 8821778 Fax. : (061) 8821976, 8823740 E-mail : mcab-binjai@plnwil2.co.id
	Area Padang Sidempuan Rayon Sidimpuan Kota, Ranting Sipirok, Ranting Sibuhuan, Ranting Gunung Tua, Ranting Panyabungan, Ranting Natal, Ranting Kota Nopan	**Jl. Sisingamangaraja No.11 Km. 4, Batu Nadua PADANG SIDEMPUAN Kode Pos 22733** Sisingamangaraja Street No.11 Km. 4, Batu Nadua Tel. : (0634) 23104, 23105, 23106, 23032, 23107, 22599 Fax. : (0634) 23099 E-mail : mcab-sidempuan@plnwil2.co.id
	Area Rantau Prapat Rayon Rantau Kota, Ranting Labuhan Bilik, Ranting Aek Kanopan, Ranting Kota Batu. Ranting Aek Nabara, Ranting Kota Pinang, Ranting Tanjau Balai	**Jl. Listrik No. 1 Labuhan Batu RANTAU PRAPAT** Listrik Street No. 1, Labuhan Batu Tel. : (0624) 219522, 21953, 24440 Fax. : (0624) 24053 E-mail : mcab-prapat@plnwil2.co.id
	Area Lubuk Pakam Rayon Lubuk Pakam, Ranting Medan Denai, Ranting Delitua, Ranting Pancur Batu, Ranting Tanjung Morawa, Ranting Perbaungan, Ranting Sei Rampah, Ranting Galang	**Jl. Tanjung Garbus Dusun Jati Sari, LUBUK PAKAM 20514** Tanjung Garbus Street, Jati Sari Village, LUBUK PAKAM 20514 Tel. : (061) 7950141, 7955549 Fax. : (061) 7950123 E-mail : plncabpakam@gmail.com
	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT	**Jl. Dr. Wahidin No. 8, PADANG 25121** Dr. Wahidin Street No. 8, PADANG 25121 Tel. : (0751) 33446 Fax. : (0751) 29540, 31564 E-mail : PLN W3@indosat.net..id
	Area Pengatur Distribusi (APD)	**Jl. Khatib Sulaiman No. 44, PADANG 25135** Khatib Sulaiman Street No. 44, PADANG 25135 Tel. : (0751) 7053839, 7053848 Fax. : (0751) 7053840
	Area Padang ISO 9001 : 2000 Rayon Tabing, Rayon Belanti, Rayon Indarung, Ranting Sungai Penuh, Ranting Kersik Tuo, Ranting Balai Selasa, Ranting Painan, Ranting Pariaman, Ranting Sicincin, Ranting Lubuk Alung.	**Jl. S. Parman No. 221, PADANG** S. Parman Street No. 221, PADANG Tel. : (0751) 7535001 Fax. : (0751) 7535002 E-mail : pln.cpdg@plnsumbar.co.id
	Area Bukittinggi ISO 9001 : 2000 Rayon Bukittinggi, Ranting Padang Panjang, Ranting Lubuk Basung, Ranting Lubuk Sikaping, Ranting Simpang Empat, Ranting Baso.	**Jl. Jend Sudirman No.1, BUKITTINGGI 26111** Jend Sudirman Street No.1, BUKITTINGGI 26111 Tel. : (0752) 32217, 35148 Fax. : (0752) 34544 E-mail ß: pln.cbkt@plnsumbar.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Solok ISO 9001 : 2000 Rayon Solok, Ranting Silungkang, Ranting Sawah Lunto, Ranting Sijunjung, Ranting Singkarak, Ranting Kayu Aro, Ranting Sei Rumabi, Ranting Muara Labuh, Ranting Sitiung.	**Jl. Prof. Dr. Hamka No. 81, SOLOK 27314** Prof. Dr. Hamka Street No. 81, SOLOK 27314 Tel. : (0755) 20969, 20583, 420466 Fax. : (0755) 20383 E-mail : plnsolok@telkom.net
	Area Payakumbuh ISO 9001 : 2000 Ranting Payakumbuh. Ranting Lintau, Ranting Batusangkar, Ranting Lima Puluh Kota.	**Jl. M. Yamin, SH No. 52, Payakumbuh SUMATERA BARAT** Street M. Yamin, SH No. 52, Payakumbuh Tel. : (0752) 93575 Fax. : (0752) 95212
	PT PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPRI	**Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295** Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295 Musyawarah Street RT. 01 RW. 09 Tel. : (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. : (0761) 855310 E-mail : wrkr@pln.co.id
	Area Pekanbaru ISO 9001 : 2000 Rayon Kota Timur, Rayon Kota Barat, Rayon Simpang Tiga, Rayon Panam, Rayon Rumbai, Rayon Bangkinang, Rayon Pasir Pengaraian, Rayon Pangkal Kerinci, Rayon Siak Sri Indrapura, Rayon Perawang.	**Jl. Dr. Sutomo No.69, PEKANBARU 28142** Dr. Sutomo Street No.69, PEKANBARU 28142 Tel. : (0761) 33006, 33024 (Mnj) Fax. : (0761) 33052 E-mail : wrkr_pekanbaru@pln.co.id
	Area Tanjung Pinang ISO 9001: 2000 Rayon Tanjung Pinang Kota, Rayon Bintan Center, Rayon Kijang, Rayon Tanjung Uban, Rayon Belakang Padang, Rayon Tanjung Balai Karimun, PLTU Tanjung Batu, Rayon Tanjung Batu, Rayon Dabo Singkep, Rayon Ranai.	**Jl. Bakar Batu No. 55, TANJUNG PINANG 29112** Bakar Batu Street No. 55, TANJUNG PINANG 29112 Tel .: (0771) 23755, 24406 Fax. : (0771) 21148 E-mail : wrkr_cabangtanjung@pln.co.id
	Area Dumai ISO 9001 : 2000, Rayon Kota Dumai, Rayon Duri, Rayon Bagan Siapiapi, Rayon Bagan Batu, Rayon Bengkalis, Rayon Selat Panjang, Pusat Listrik Bagan Besar Dumai.	**Jl. Jend. Sudirman No. 173 DUMAI 28812** Jend. Sudirman Street No. 173, DUMAI 28812 Tel. : (0765) 31032, 36718, 36719, 36720 Fax. : (0765) 32416 E-mail : wrkr_dumai@pln.co.id
	Area Rengat Rayon Rengat Kota, Rayon Taluk Kuantan, Rayon Air Molek, Rayon Tembilahan, Rayon Kuala Enok, Pusat Listrik Rengat	**Jl. Lintas Timur, Pematang Reba, Kab. Indra Giri Hulu RENGAT** Lintas Timur Street, Pematang Reba, Kab. Indra Giri Hulu Tel. : (0769) 341656 Fax. : (0769) 341650 Email : wrkr_rengat@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU	**Jl. Kapten A. Rivai No. 37, PALEMBANG 30129** Kapten A. Rivai Street No. 37, PALEMBANG 30129 Tel.: (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax.: (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail: gmws2jb@plnpalembang.co.id Website: http/www.plnpalembang.co.id
	Area Palembang ISO 9001 : 2000, SNI 19-9001-2001 Rayon Rivai	**Jl. Kapten A Rivai No. 37, PALEMBANG 30129** Kapten A Rivai Street No. 37, PALEMBANG 30129 Tel. : (0711) 357560 Fax. : (0711) 357575 E-mail : manplg@plnpalembang.co.id
	Area Jambi ISO : 9001 : 2000, SNI 19-9001-2001 Rayon Telanai Pura, Rayon Kota Baru	**Jl. Urip Sumohardjo No. 2, JAMBI 36122** Urip Sumohardjo Street No. 2, JAMBI 36122 Tel. : (0741) 63100, 63895 Fax .: (0741) 60585, 667694 E-mail : manjmb@plnpalembang.co.id
	Area Bengkulu ISO 9001 : 2000, SNI 19-9001-2--1 Rayon Teluk Segara, Rayon Nusa Indah, PLTM Curup.	**Jl. Prof. DR.Hazairin No. 80, BENGKULU 38114** Prof. DR.Hazairin Street No. 80, BENGKULU 38114 Tel. : (0736) 20926 Fax. : (0736) 21540 E-mail : manbkl@plnpalembang.co.id
	Area Lahat ISO 9001 : 2000, SNI 19-9001-2001 Ranting Prabumulih, Ranting Lubuk Linggau	**Jl. Kol. M Nuh Lembayung No. 31, LAHAT 31414** Kol. M Nuh Lembayung Street No. 31, LAHAT 31414 Tel. : (0731) 3211753 Fax. : (0731) 321753 E-mail : manlht@plnpalembang.co.id

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Muara Bungo Audit SMK3	**Jl. RM.Mattaher No.8 Muara Bungo, JAMBI** RM.Mattaher Street No.8 Muara Bungo, JAMBI Tel. : (0747) 21567 Fax. : (0747) 22066 E-mai l: plnbungo@yahoo.co.id
	Area Pelayanan Distribusi S2JB	**Jl. H. Bastari Jakabaring, PALEMBANG** H. Bastari Jakabaring Street, PALEMBANG Tel. : (0711) 512965 Fax. : (0711) 511708
6.	PT PLN (Persero) WILAYAH BANGKA BELITUNG	**Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171 Kep. BANGKA BELITUNG** Soekarno Hatta Street KM 5, Pangkalpinang 33171 Tel. : (0717) 439300 (Hunting) Fax. : (0717) 439600 E-mail : wbabel@pln.co.id
	Area Bangka ISO 9001 ; 14001 (PLN Cab. Bangka) ISO 9001 : 14001, SMK 3 (PLTD Merawang) Rayon Sungailiat, Rayon Muntok, Ranting Toboali, Rayon Pangkalpinang, Rayon Koba	**Jl. Jend. Sudirman No. 180, Pangkal Pinang 33118 Kep. BANGKA BELITUNG** Jend. Sudirman Street No. 180, Pangkal Pinang 33118 Tel. : (0717) 422713, 42281, 437767 (Hunting) 433223 (Mnj) Fax. : (0717) 431661 E-mail : bangka@pln.co.id
	Unit Layanan Tanjung Pandan Ranting Manggar, Ranting Kelapa Kampit	**Jl. Ahmad Yani No. 111, Tanjung Pandan 33413 Kep. BANGKA BELITUNG** Ahmad Yani Street No. 111, Tanjung Pandan 33413 ≈Tel. : (0719) 22311, 22411 (Mnj) Fax. : (0719) 21750 E-mail : tjpandan@yahoo.co.id
	Sektor Pembangkitan Bangka Belitung PLTD Merawang, PLTD Mentok, PLTD Koba, PLTD Toboali, PLTD Pilang, PLTD Padang, Gardu Induk Pangkalpinang, Gardu Induk Air Anyir, Gardu Induk Bukit Semut	**Dusun Air Anyir Kec. Merawang, Pangkal Pinang Kab. Bangka Induk** Air Anyir Village, Merawang District, Pangkal Pinang
7.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN BARAT	**Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya** Adi Sucipto Street Km 7,3 Sei Raya Kubu Raya PONTIANAK 78391 Tel. : (0561) 722037 (Hunting), 721960 (GM) Fax. : (0561) 721395 E-mail : kalbar@pln.co.id Web : www.plnkalbar.co.id
	Area Pontianak ISO 2008 : 2011	**Jl. Jend. A. Yani No. 25, PONTIANAK - 78116** Jend. A. Yani Street No. 25, PONTIANAK - 78116 Tel. : (0561) 734420 (Hunting), 749041 (Mnj) Fax. : (0561) 730403 E-mail : cabptk@plnkalbar.co.id
	Area Singkawang ISO 2008 : 2011	**Jl. Alianyang No. 71, SINGKAWANG 79122** Alianyang Street No. 71, SINGKAWANG 79122 Tel. : (0562) 631725 (Hunting), 631934 (Mnj) Fax. : (0562) 632016 E-mail : cabskw@plnkalbar.co.id
	Area Sanggau ISO 2008 : 2011	**Jl. Dr. Setia Budi No. 1 Kab. SANGGAU 78512** Dr. Setia Budi Street No. 1, SANGGAU District 78512 Tel. : (0564) 23223 (Hunting), 23224 (Mnj) Fax. : (0564) 22016 E-mail : areasanggau@pln.co.id
	Area Ketapang	**Jl. M. Tohir No. 25, KETAPANG 78113** M. Tohir Street No. 25, KETAPANG 78113 Tel. : (0534) 31778, 34592 (Mnj) Fax. : (0534) 33277 E-mail : areaketapang@pln.co.id
	Area Pengatur Distribusi dan Penyaluran	**Jl. Ismail Marzuki No. 15, Pontianak KALIMANTAN BARAT** Ismail Marzuki Street No. 15, Pontianak WEST KALIMANTAN Tel. : (0561) 736896 E-mail : apdp.kalbar@pln.co.id
	Sektor Kapuas ISO 9000; ISO 14000; SMK 3 PLTD Siantan, PLTG Siantan, PLTD Sei Raya	**Jl. Adisucipto KM 7,3 Sei Raya PONTIANAK 78391** Adisucipto Street KM 7,3 Sei Raya PONTIANAK 78391 Tel. : (0561) 723449, (Hunting), 723472 (Mnj) Fax. : (0561) 723482 E-mail : sektor.kapuas@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
8.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	**Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70711** Panglima Batur Barat Street No. 1, Banjarbaru SOUTH KALIMANTAN 70711 Tel. : (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax. : (0511) 4772442 E-mail : humas.kalseteng@pln.co.id
	Area Banjarmasin ISO 9001 : 2000 Rayon Ahmad Yani, Rayon LambungMangkurat, Ranting Banjarbaru, Ranting Martapura.	**Jl. Lambung Mangkurat No. 12, Banjarmasin KALIMANTAN SELATAN 70111** Lambung Mangkurat Street No. 12, Banjarmasin SOUTH KALIMANTAN 70111 Tel. : (0511) 3354992, 3351158, 4368291 (Man Area) Fax. : (0511) 3353610 E-mail : banjarmasin@pln.co.id
	Area Barabai ISO 9001 : 2000	**Abdul Muis Redhani Street No. 62, Barabai 71213, KALIMANTAN SELATAN** Abdul Muis Redhani Street No. 62, Barabai 71213, SOUTH KALIMANTAN Tel. : (0511) 41320,42500, 42258 (Man Area) Fax. : (0511) 41503 E-mail : barabai@pln.co.id
	Area Kotabaru ISO 9001: 2000 PLTD Kotabaru. ISO 9001 : 2000	**Brigjend H. Hasan Basri Street No. 4, Kotabaru KALIMANTAN SELATAN 72117** Brigjend H. Hasan Basri Street No. 4, Kotabaru SOUTH KALIMANTAN 72117 Tel. : (0518) 21248, 21515, 21983 (Man Area) Fax. : (0518) 21229 E-mail : kotabaru@pln.co.id
	Area Kuala Kapuas ISO 9001 : 2000 Ranting Pulang Pisau	**Patih Rumbih Street No. 70, Kuala Kapuas 73514 KALIMANTAN TENGAH** Patih Rumbih Street No. 70, Kuala Kapuas 73514 CENTRAL KALIMANTAN Tel. : (0513) 21280, 21636, 21368 (Man Area) Fax : (0513) 21368 E-mail : kuala.kapuas@pln.co.id
	Area Palangkaraya ISO 9001 : 2000	**Jend. A. Yani Street No. 1, Palangkaraya 73111 KALIMANTAN TENGAH** Jend. A. Yani Street No. 1, Palangkaraya 73111 CENTRAL KALIMANTAN Tel. : (0536) 3221444, 3221062 (Mnj Area) Fax. : (0536) 3222444. E-mail : sekre.apry@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Barito ISO 9001 : 2000, ISO 14001: 2004, SMK 3	**Pangeran Moch. Noor Street No. 33, Banjarmasin 70111 KALIMANTAN SELATAN** Pangeran Moch. Noor Street No. 33, Banjarmasin 70111 SOUTH KALIMANTAN Tel. : (0511) 3354995, 4366683, 4366698(Man Area) Fax. : (0511) 4366684, 4366697 E-mail : barito@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Asam – Asam ISO 9001: 2000, ISO 14001 : 2004, SMK 3	**Jl. Raya Banjarmasin – Kota Baru Km 122 Desa Asam – Asam, Kec. Jorong , Kab. Tanah Laut KALIMANTAN SELATAN** Raya Banjarmasin– Kota Baru Street Km 122 Desa Asam – Asam, Kec. Jorong , Kab. Tanah Laut SOUTH KALIMANTAN Tel. : (0512) 63292, 63296 Fax. : (0512) 63293, 63292 E-mail : sektor.asamasam@pln.co.id
	Area Penyaluran dan Pengaturan Beban Sistem Kalselteng ISO 9001 : 2008 SNI ISO 9001 : 2008	**Mistar Cokrokusumo Street Km. 39, Komplek Gardu Induk Cempaka, Banjar Baru 70733, KALIMANTAN SELATAN** Mistar Cokrokusumo Street Km. 39, Komplek Gardu Induk Cempaka, Banjar Baru 70733, SOUTH KALIMANTAN Tel. : (0511) 4782594 Fax. : (0511) 4772011 E-mail : ap2b.kalselteng@pln.co.id
9.	PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	**Jl. M.T. Haryono No. 384, BALIKPAPAN 76114** M.T. Haryono Street No. 384, BALIKPAPAN 76114 Tel. : (0542) 871840 (Hunting) Fax. : (0542) 876130 E-mail : humas.kaltim@pln.co.id
	Area Balikpapan ISO 9001 : 2000	**Jl. Jend. Sudirman No. 117, BALIKPAPAN 76112** Jend. Sudirman Street No. 117, BALIKPAPAN 76112 Tel. : (0542) 732660, 733117 Fax. : (0542) 732524 E-mail : sekretariat@plnbalikpapan.com

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Samarinda ISO 9001 : 2000	**Jl. Gajah Mada No. 23, SAMARINDA 75122** Gajah Mada Street No. 23, SAMARINDA 75122 Telp : (0541) 741531, 734524, 732527, 732533 Fax. : (0541) 743432 E-mail : sekretariat.plnsmd@yahoo.co.id
	Area Bontang ISO 9001 : 2000	**Jl. M.T. Haryono No. 12, Kec. Bontang Utara BONTANG 75311** M.T. Haryono Street No. 12, Kec. Bontang Utara Tel. : (0548) 26123, 21014 Fax. : (0548) 21423 E-mail : plnbontang@yahoo.com
	Area Berau ISO 9001 : 2000	**Jl. SA. Maulana No.1, Tanjung Redep, BERAU 77311** SA. Maulana Street No.1, Tanjung Redep, BERAU 77311 Tel. : (0544) 21424, 21062 Fax. : (0544) 25681 E-mail : sekretariatplnareaberau@gmail.com
	Sektor Pembangkitan Mahakam ISO 9001; 2000, ISO 14001; 2004, SMK 3 PLTGU Tanjung Batu.	**Jl. Ulin No. 1 SAMARINDA 75127** Ulin Street No. 1, SAMARINDA 75127 Tel. : (0541) 273727, 274153 Fax. : (0541) 272714 E-mail : sek-mhk@pln.wilkaltim.co.id
	Sektor Pembangkitan Balikpapan	**Jl. PLTU No. 1 Kelurahan Teluk. Waru Kariangau BALIKPAPAN 76134** PLTU Street No. 1, Teluk. Waru Kariangau District Tel. : 081545399222 E-mail : sektorbalikpapan@pln.co.id
	Area Penyaluran dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Kalimantan Timur ISO 9001 : 2000	**Jl. Soekarno - Hatta, Km.15 Rt. 30 No. 1, BALIKPAPAN 76122** Soekarno – Hatta Street, Km.15 Rt. 30 No. 1, BALIKPAPAN 76122 Tel. : (0542) 745480 (hunting), 427856 (dispachter) Fax. : (0542) 7217025 E-mail : sek-ap2b@pln-wilkaltim.co.id
10.	PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO	**Jl. Bethesda No. 32, MANADO 95116** Bethesda Street No. 32, MANADO 95116 Telp : (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax : (0431) 863660, 862360 E-mail : gmsutg@pln.co.id
	Area Manado ISO 9001 : 2000, SNI 19-1901-2001 Rayon Manado Utara, Rayon Manado Selatan, Rayon Paniki, Rayon Airmadidi, Rayon Tondano, Rayon Bitung, Rayon Tomohon, Rayon Kawangkoan, Rayon Ratahan, Rayon Motoling, Rayon Amurang	**Jl. Achmad Yani No. 32, MANADO 95114** Achmad Yani Street No. 32, MANADO 95114 Tel. : (0431) 862144, 862344, 862544 (Mnj) Fax. : (0431) 864144 E-mail : paultje.mangundang@pln.co.id
	Area Gorontalo ISO 9001 : 2000, SNI 19-9001-2001 Rayon Limboto, Rayon Kwandang, Rayon Marisa, Rayon Telaga, PLTD Telaga	**Jl. Jend. Sudirman No. 63, GORONTALO 96115** Jend. Sudirman Street No. 63, GORONTALO 96115 Tel. : (0435) 821936, 822442, 826123 Fax. : (0435) 824474 E-mail : putueka.astawa@pln.co.id
	Area Palu ISO 9001 : 2000 Rayon Poso, Rayon Parigi, Rayon Tentena, Rayon Kolonedale, Rayon Donggala, Rayon Tambu, Rayon Bungku, Rayon Kamonji, Rayon Tawaeli, Rayon Kota PLTD Silae	**Jl. RA. Kartini No. 26, PALU 94112** RA. Kartini Street No. 26, PALU 94112 Tel. : (0451) 451088 Fax. : (0451) 421088
	Area Kotamobagu ISO 9001 : 2000 PLTD Kotamobagu, Rayon Bintauna, Rayon Inobonto, Rayon Modayang, Rayon Imandi, Rayon Molibagu.	**Jl. Paloko No. 2, KOTAMOBAGU 95712** Paloko Street No. 2, KOTAMOBAGU 95712 Tel. : (0434) 21244 Fax. : (0434) 21244 E-mail : mkotamobagu@pln.co.id
	Area Tahuna Rayon Tamako, Rayon Siau, Rayon Tagulandang Rayon Lirung, Rayon Beo, Rayon Melongguane Rayon Petta, PLTD Tahuna.	**Jl. Baru Tona 1 No. 28 TAHUNA 95815** Baru Tona Street 1, No. 28 TAHUNA 95815 Tel. : (0432) 21410, 21411 (Mnj) Fax. : (0432) 21762 E-mail : tahuna@pln.co.id
	Area Luwuk ISO 9001 : 2000 Rayon Ampana, Rayon Banggal, Rayon Toili, PLTD Luwuk.	**Jl. Urip Sumoharjo No. 1, LUWUK** Urip Sumoharjo Street No. 1, LUWUK Tel. : (0461) 21830, 325230, 324123 Fax. : (0461) 325185 E-mail : revanny@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Toli - Toli ISO 9001 : 2000 Rayon Bangkit, Rayon Moutong, Rayon Kotaraya, Rayon Leok, PLTD Toli – Toli	**Jl. Jend. Sudirman No. 66, Toli-Toli 94511** Jend. Sudirman Street No. 66, Toli-Toli 94511 Tel. : (0453) 23749, 23750, 23748 (Mnj) Fax. : (0453) 21668, 23748 E-mail : plntolitoli@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Minahasa PLTA Tanggari, PLTA Tonsealama, PLTP Lahendong, PLTD Bitung, PLTD Lopana, PLTD Amurang, PLTG Maleo	**Jl. B. W. Lapian Luaan, TONDANO** B. W. Lapian Luaan Street, TONDANO Tel. : (0431) 321686, 621684, 323603 Fax. : (0431) 321685 E-mail: sektor.minahasa@pln.co.id, sutg-sektor-minahasa@pln.co.id
	Area Penyaluran dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Minahasa ISO 9001 : 2000 Tragi Sawangan, Tragi Lopana, Tragi Gorontalo, Tragi Palu	**Jl. Raya Tomohon Kel. Matani 1 Tondano 95362** Raya Tomohon Street,. Matani 1 District, Tondano 95362 TOMOHON Tel. : (0431) 355004, 355918(Mnj) Fax. : (0431) 355914 E-mail : ap2b@pln.co.id
	Area Pengatur Distribusi Suluttenggo	**Jl. Bethesda No. 32 Sario Mando Gedung 6** Bethesda Street No. 32, Sario Mando Gedung 6 MANADO 95114 Tel. : (0431) 823082
11.	PT PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	**Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206** Let.Jend Hertasning Street, Blok B, Kotak Pos 1206 Panakukang, MAKASSAR 90222 Tel. : (0411) 457155, 457157 Fax. : (0411) 444800
	Area Makassar Selatan Rayon Makassar Utara, Rayon Makassar Selatan, Rayon Makassar Barat, Rayon Makassar Timur, Rayon Sungguminasa, Rayon Takalar, Rayon Malino Rayon Maros, Rayon Pangkep, Rayon Kalebajeng	**Jl. RW. Monginsidi No. 2, MAKASSAR 90174** RW. Monginsidi Street No. 2, MAKASSAR 90174 Tel. : (0411) 870088, 854283 Fax. : (0411) 876688 Email : plncup@indosat.net.id
	Area Makassar Utara Rayon Karebosi, Rayon Daya, Rayon Maros, Rayon Pangkep	**Jl. Jend. A. Yani No. 27** Jend. A. Yani Street No. 27 Tel ß: (0411) 3632626 Fax. : (0411) 3624607
	Area Pare-Pare Rayon Mattirotasi, Rayon Barru, Rayon Pangsid, Rayon Rappang, Rayon Tanrutedong, Rayon Soppeng, Rayon Rayon Pajalesang	**Jl. Veteran No. 32 PARE-PARE 91114** Veteran Street No. 32, PARE-PARE 91114 Tel. : (0421) 25444, 22932 Fax. : (0421) 21897 Email : plncpare@wasantara.net.id & plncpare@indosat.net.id
	Area Pinrang Rayon Kariango, Rayon Watang Sawitto, Rayon Pekkabata, Rayon Enrekang, Rayon Lakawan	**Jl. Jend Sukowati No. 24 PINRANG 91212** Jend Sukowati Street No. 24, PINRANG 91212 Tel. : (0421) 921220, 923333 Fax. : (0421) 921005 Email. : www.plnsulselra.co.id
	Area Watampone Rayon Hasanuddin, Rayon Sengkang, Rayon Paria, Rayon Patangkai, Rayon Uloe	**Jend Sudirman Street No 10, Desa Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone 1WATAMPONE** Jend Sudirman Street No 10, Desa Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone WATAMPONE Tel. : (0481) 21757, 22220 Fax. : (0481) 23094
	Area Palopo Rayon Palopo Kota, Rayon Belopa, Rayon Masamba Rayon Rantepao, Rayon Makale, Rayon Malili, Rayon Malili, Rayon Tomoni	**Jl. Andi Kambo No. 70, PALOPO 91921** Andi Kambo Street No. 70, PALOPO 91921 Tel. : (0471) 24001, 24008 Fax. : (0471) 24005 Email. : plnpalopo@plnsulselra.co.id
	Area Bulukumba Rayon Panrita Lopi, Rayon Sinjai, Rayon Jeneponto, Rayon Bantaeng, Rayon Selayar, Rayon Tanete, Rayon Kalumpang	**Lanto Dg Pasewang Street, Kel. Caile, Kec Ujung- Bulu BULUKUMBA 92512** Lanto Dg Pasewang Street, Kel. Caile, Kec Ujung- Bulu District BULUKUMBA 92512 Tel. : (0413) 82000, 83000 , 81490 Fax. : (0413) 81591 Email. : http://www.cbk.plnsulselra.co.id
	Area Kendari Rayon Wua-wua, Rayon Benua-benua, Rayon Kolaka Rayon Kolaka Utara, Rayon Bombana, Rayon Unaha Rayon Konawe Selatan	**Jl. Jend A. Yani No. 1, KENDARI 93117** Jend A. Yani Street No. 1, KENDARI 93117 Tel. : (0401) 390444, 390985 Fax. : (0401) 390084

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Bau-Bau Rayon Bau-Bau Kota, Rayon Raha, Rayon Wangi-Wangi, Rayon Pasar Wajo, Rayon Mawasangka	**Jl. Jend. Sudirman No. 62** Jend. Sudirman Street No. 62 Tel. : (0402) 2822200 Fax. : (0402) 2822100
	Area Mamuju Rayon Manakkara, Rayon Majene, Rayon Polewali, Rayon Mamasa, Rayon Pasangkayu	**Jl. Sultan Hasanuddin No. 43, MAMUJU 91511** Sultan Hasanuddin Street No. 43, MAMUJU 91511 Tel. : (0426) 22499 Fax. : (0426) 21067
	Sektor Tello Unit PLTD Selayar	**Jl. Urip Sumiharjo KM 7 Tello Baru, MAKASSAR 90233** Urip Sumiharjo Street KM 7, Tello Baru, Tel. : (0411) 444466, 444477, 454588 Fax. : (0411) 442243
	Sektor Bakaru Unit PLTA Bakaru, Unit PLTA Bili-Bili, Unit PLTD Mamuju, Unit PLTM Kalukku, Unit PLTM Balla, Unit PLTM Bonehau, Unit PLTM Budong-Budong, Unit PLTD Mamuju, Unit PLTD Palopo	**Jl. H. A. Muh. Arsyad No. 21, PARE - PARE** H. A. Muh. Arsyad Street No. 21, PARE – PARE Tel.: (0421) 25580, 25581 Fax.: (0421) 25582
	Sektor Kendari Unit PLTD Wua-Wua, Sentral PLTD Lambuya, Unit PLTD Kolaka, Sentral PLTMH Sabilambo, Unit PLTD Bau-Bau, Sentral PLTD Raha, Sentral PLTD Wangi-Wangi, Sentral PLTM Wining, Unit PLTD Poasia	**Jl. Pattimura No. 264 E** Pattimura Street No. 264 E Tel. : (0401) 3123034 Fax. : (0401) 3122827 E-mail : sector_kendari@yahoo.co.id
	Unit Pengatur Transmisi Unit Transmisi & Gardu Induk Panakkuang, Unit Transmisi & Gardu Induk Tello, Unit Transmisi & Gardu Induk Pare, Unit Transmisi & Gardu Induk Sidrap, Unit Transmisi & Gardu Induk Bulukumba, Unit Transmisi & Gardu Induk Mamuju, Unit Transmis & Gardu Induk Kendari	**Jl. Jend, Hertasning Blok B, MAKASSAR** Jend, Hertasning Street Blok B, MAKASSAR Tel. : (0411) 440055 Fax. : (0411) 444666
	Unit Pengatur Beban	**Jl. Jend. Hertasning Blok B, MAKASSAR** Jend. Hertasning Street Blok B, MAKASSAR Tel. : (0411) 440011, 440055, 440066 Fax. : (0411) 440022
	Unit Pengatur Distribusi	**Jl. Serui No. 5** Tel. : (0411) 319927, 334132 Fax. : (0411) 334130
12.	PT PLN (Persero) WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA	**Jl. Diponegoro No. 2, AMBON 97127** Diponegoro Street No. 2, AMBON 97127 Tel. : (0911) 311810, 347766, 354696 Fax : (0911) 310910 E-mail : plnwilmaluku@plnmmu.co.id
	Area Ambon ISO 9001 : 2000 PLTD Poka, PLTD Hative Kecil	**Jl. Kapt. Piere Tendean, Halong AMBON 97127** Kapt. Piere Tendean Street, Halong AMBON 97127 Tel. : (0911) 315017, 342478 (Mnj) Fax : (0911) 344179 E-mail : plncabamb@plnmmu.co.id
	Area Ternate ISO 9001 : 2000 ; PLTD Kayu Merah	**Jl. Jend. A. Yani No. 40 TERNATE 97714** Jend. A. Yani Street No. 40 TERNATE 97714 Tel. : (0921) 3121272, 22353 Fax. : (0912) 21872 E-mail : plncabtnt@plnmmu.co.id
	Area Tual	**Jl. Soekarno - Hatta, TUAL 97672** Soekarno – Hatta Street, TUAL 97672 Tel. : (0916) 21871, 21903 Fax. : (0916) 21872
	Area Masohi	**Jl. Abdullah solissa No. 1, MASOHI** Abdullah Solissa Street No. 1, MASOHI Tel. : (0914) 21046, 22246
	Area Sofifi	**Jl. Pemuda Kec. Oba Utara, SOFIFI** Pemuda Street, Oba Utara District, SOFIFI
	Sektor Pembangkitan Maluku	**Jln. Kapt. Piere Tendean-Halong-Ambon** Kapt. Piere Tendean Street, Halong, Ambon Tel. : (0911) 352119, 352109 Fax. : (0911) 341506

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
13.	PT PLN (Persero) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT	**Jl. Ahmad Yani No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045** Ahmad Yani Street No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Tel. : (0967) 533891, 533981, 536637 Fax. : (0967) 534694 E-mail : wilpapua@pln.co.id Http : // www.pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Jayapura Pusat Listrik Yarmpkh, Pusat Listrik Waena	**Jl. Ahmad Yani No. 18 JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045** Ahmad Yani Street No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Tel. : (0967) 533981, 533891, 533566 Fax. : (0967) 536391, 543694 Email : skit.jayapura@pln.co.id
	Area Jayapura Rayon Jayapura, Rayon Abepura, Rayon Sentani, Rayon Wamena, Rayon Timika, Rayon Arso, Rayon Sarmi, Rayon Genyem	**Jl. Baru Kotaraja No. 115, Abepura JAYAPURA 99225** Baru Kotaraja Street No. 115, Abepura JAYAPURA 99225 Tel. : (0967) 5180040, 5180041 Fax. : (0967) 5180049 E-mail : area.jayapura@pln.co.id
	Area Biak Rayon Serui, Rayon Yomdori, Pusat Listrik Biak	**Jl. Yos Sudarso No. 8, BIAK 98111** Yos Sudarso Street No. 8, BIAK 98111 Tel. : (0981) 21775, 25678, 21895 Fax. : (0981) 21705 E-mail : area.biak@pln.co.id
	Area Merauke Rayon Kuprik, Rayon Kurik, Rayon Tanah Merah, Pusat Listrik Merauke	**Jl. Trikora No. 1, MERAUKE 99613** Trikora Street No. 1, MERAUKE 99613 Tel. : (0971) 321570, 3215601 Fax. : (0971) 321770 E-mail : area.merauke@pln.co.id
	Area Manokwari Rayon Nabire, Rayon Prafi, Rayon Bintuni, Pusat Listrik Manokwari	**Jl. Bandung No. 2, MANOKWARI 98311** Bandung Street No. 2, MANOKWARI 98311 Tel. : (0986) 211180, 211179 Fax. : (0986) 211971 E-mail : area.manokwari@pln.co.id
	Area Sorong Rayon Aimas, Rayon Doom, Rayon Teminabuan, Rayon Fax-Fax, Rayon Kaimana, PLTD Kebun Kapas, PLTD Klasaman, PLTD Klademak	**Jl. Ahmad Yani No. 7 Klademak, SORONG 98414** Ahmad Yani Street No. 7, Klademak, SORONG 98414 Tel. : (0951) 321451, 327611 Fax. : (0951) 321950 E-mail : area.sorong@pln.co.id
	Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Papua (Gedung Wilayah Lt. II)	**Jl. Ahmad Yani No. 18, JAYAPURA 99111** Ahmad Yani Street No. 18, JAYAPURA 99111 Kotak Pos 1045 Tel. : (0967) 534579 Fax . : (0967) 534579 Email : upkk.papua@pln.co.id
	Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Papua Barat	**Jl. Jend. Soedirman No. 55, MANOKWARI 98311** Jend. Soedirman Street No. 55, MANOKWARI 98311 Tel. : (0986) 215274 Fax. : (0986) 215274 Email : upkk.pb@pln.co.id
14.	PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	**Jl. Langko No. 25-27 Ampenan MATARAM 83114** Langko Street No. 25-27, Ampenan, MATARAM 83114 642868 (GM) Tel. : (0370) 643123 Fax. : (0370) 634401 E-mail : sekretariat@plnntb.co.id Website : http://www.plnntb.co.id
	Area Mataram ISO 9001 : 2000	**Jl. Yos Sudarso No. 2, MATARAM 83114** Yos Sudarso Street No. 2, MATARAM 83114 Tel. : (0370) 636804, 622793 (Mnj) Fax. : (0370) 632029 E-mail : plnmtr@plnntb.co.id
	Area Sumbawa ISO 9001 : 2000; PLTD Labuhan	**Jl. Dr. Setiabudi No. 18, Sumbawa Besar SUMBAWA 84311** Dr. Setiabudi Street No. 18, Sumbawa Besar SUMBAWA 84311 Tel. : (0371) 21028 (Hunting) Fax. : (0371) 21427 E-mail : plnsbw@plnntb.co.id.

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Bima ISO 9001 : 2000, SMK 3 ; PLTD Niu	**Jl. Soekarno Hatta, BIMA 84113** Soekarno Hatta Street, BIMA 84113 Tel. : (0374) 43686, 43585, 43011 Fax. : (0374) 43265 E-mail : plnbima@plnntb.co.id
	Sektor Lombok ISO 9001: 2000, SMK 3; PLTD Ampenen	**Jl. Arya Banjar Getas No. 1, Ampenan, NUSA TENGGARA BARAT 83115** Arya Banjar Getas Street No. 1, Ampenan, WEST NUSA TENGGARA 83115 Tel. : (0370) 634844, 641127 (Mnj) Fax. : (0370) 641126 E-mail : sektorlombok@plnntb.co.id
	Area Pengatur Distribusi dan Penyaluran Mataram	**Jl. Kesra Raya-Perumnas TANJUNG KARANG** Kesra Raya Street, Perumnas TANJUNG KARANG Tel. : (0370) 636976, 645028 Fax. : (0370) 646163
15.	PT PLN (Persero) WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	**Jl. Piet A. Tallo No. 101, KUPANG 85228** Piet A. Tallo Street No. 101, KUPANG 85228 Tel. : (0380) 8554005 (Hunting) Fax. : (0380) 8554010 E-mail : ntt@pln.co.id Website : htpp//www.pln.co.id/ntt
	Area Kupang ISO 9001 : 2000; PLTD Tenau	**Jl. Palapa No. 27, KUPANG 85111** Palapa Street No. 27, KUPANG 85111 Tel. : (0380) 821217 Fax. : (0380) 832198 E-mail : plnkup@kupang.wasantara.net.id
	Area Flores Bagian Barat	**Jl. El Tari, ENDE** El Tari Street, ENDE Tel. : (0381) 22079 Fax. : (0381) 21644 E-mail : plnend@kupang.wasantara.net.id
	Area Sumba	**Jl. Ahmad Yani No. 16, WAINGAPU 87111** Ahmad Yani Street No. 16, WAINGAPU 87111 Tel. : (0387) 61666 Fax. : (0387) 61341 E-mail : cabsum@plnntt.co.id
	Area Flores Bagian Timur	**Jl. El Tari, ENDE** El Tari Street, ENDE Tel. : (0382) 21040 Fax. : (0382) 21675 Email : cabfbt@plntt.co.id
	Sektor NTT	**Jl. Diponegoro, Kuanino - KUPANG** Diponegoro Street, Kuanino - KUPANG Telp : (0380) 826198 Fax : (0380) 826101
	Unit Pelaksana Kelistrikan NTT	**Jl. Diponegoro, Kuanino - KUPANG** Diponegoro Street, Kuanino - KUPANG Tel. : (0380) 826198 Fax. : (0380) 826101
X.	**KANTOR DISTRIBUSI**	
1.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR	**Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21** Embong Trengguli Street No. 19 - 21 SURABAYA 60271 Tel. : (031) 5340651 - 5340655 Fax. : (031) 5310057 Jwots : 71016 – 18 Hunting E-mail : moch.sulatyo@pln.co.id Website : www.pln-jatim.co.id
	AREA	
	Area Surabaya Selatan ISO 9001 : 2000	**Jl. Ngagel Timur No. 14 – 16, SURABAYA 60283** Ngagel Timur Street No. 14 – 16, SURABAYA 60283 Tel. : (031) 5042572 - 5042574 Fax. : (031) 5042405 Jwots : 71014 E-mail : apjsurabayaselatan@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Surabaya Utara ISO 9001 : 2000 UP Embong Wungu	**Jl. Gemblongan No. 64, SURABAYA 60174** Gemblongan Street No. 64, SURABAYA 60174 Tel. : (031) 5340151 - 54 Fax. : (031) 5353957 Jwots : 71015 E-mail : pln.sbu@pln.co.id
	Area Mojokerto ISO 9001 : 2008	**Jl. RA Basuni No.67 Sooko, MOJOKERTO 61361** RA Basuni Street No.67, Sooko, MOJOKERTO 61361 Tel. : (0321) 322705 Fax : (0321) 322704 E-mail : apjmojokerto@pln.co.id
	Area Gresik ISO 9001 : 2008	**Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 134, GRESIK 61114** Dr. Wahidin Sudirohusodo Street No. 134, GRESIK 61114 Tel .: (031) 3974291-93 Fax. : (031) 3974294 E-mail : apjgresik@pln.co.id
	Area Jember ISO 9001 : 2008 SAI GLOBAL	**Jl. Gajah Mada No. 198, JEMBER 68133** Gajah Mada Street No.198, JEMBER 68133 Tel. : (0331) 484641, 484642 Fax. : (0331) 485766 E-mail : apjjember@pln.co.id
	Area Kediri ISO 9001 : 2008	**Jl. Basuki Rahmad No. 3-7, KEDIRI 64123** Basuki Rahmad Street No. 3-7, KEDIRI 64123 Tel. : (0354) 682960 Fax .: (0354) 682431 E-mail : plnkdr@pln.co.id
	Area Pasuruan	**Jl. Panglima Sudirman No.69, PASURUAN 68113** Panglima Sudirman Street No.69, PASURUAN 68113 Tel. : (0343) 426516 - 426517 Fax. : (0343) 426518 E-mail : plnpsr@pln.co.id
	Area Madiun ISO 9001 : 2008	**Jl. MT Haryono No. 30, MADIUN 63139** MT Haryono Street No. 30, MADIUN 63139 Tel. : (0351) 452267 s.d 452269, 462624 Fax. : (0351) 464366 E-mail : plnmdn@pln.co.id
	Area Malang ISO 9001 : 2008	**Jl. Basuki Rachmad No.100, MALANG 65111** Basuki Rachmad Street No.100, MALANG 65111 Tel. : (0341) 326034 Fax. : (0341) 362046 Jwot : 71041-44 E-mail : plnmlg@pln.co.id
	Area Sidoarjo	**Jl. A. Yani No. 47 - 49, SIDOARJO 61216** A. Yani Street No. 47 – 49, SIDOARJO 61216 Tel. : (031) 8955411 - 44 Fax. : (031) 8955414 E-mail : plnsda@pln.co.id
	Area Bojonegoro	**Jl. Teuku Umar No. 03, BOJONEGORO 62111** Teuku Umar Street No. 03, BOJONEGORO 62111 Tel. : (0353) 881271 (Hunting) Fax. : (0353) 881532 E-mail : apjbojonegoro@pln.co.id
	APJ Banyuwangi ISO 9001 : 2008	**Jl. Nusantara No. 1, BANYUWANGI 68412** Nusantara Street No. 1, BANYUWANGI 68412 Tel. : (0333) 421441/421442 Fax. : (0333) 421446 E-mail : apjbanyuwangi@pln.co.id
	Area Situbondo	**Jl. Cempaka No. 35, SITUBONDO 68301** Cempaka Street No. 35, SITUBONDO 68301 Tel. : (0338) 672905 - 672907 Fax. : (0338) 672908 E-mail : apj_situbondo@pln.co.id
	Area Pamekasan ISO 9001 : 2008	**Jl. Jokotole No. 127 A, PAMEKASAN 69321** Jokotole Street No. 127 A, PAMEKASAN 69321 Tel. : (0324) 322994 - 322115 Fax. : (0324) 322117 E-mail : apjpamekasan@pln.co.id

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Ponorogo ISO 9001 : 2000	**Jl. Arif Rahman Hakim KM 1, PONOROGO** Arif Rahman Hakim Street KM 1, PONOROGO Tel. : (0352) 489973, 489974 Fax. : (0352) 489977 E-mail: apjponorogo@pln.co.id
	AREA PENGATUR DISTRIBUSI (APD) DISTRIBUTION MANAGEMENT AREA (APD)	
	Area Pengatur Distribusi Surabaya	**Jl. Embong Wungu No. 4, SURABAYA 60271** Embong Wungu Street No. 4, SURABAYA 60271 Tel. : (031) 5313606 - 5315609 Fax. : (031) 5458833 Jwots : 71013 E-mail : sek.apd@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA	**Jl. Teuku Umar No. 47, SEMARANG** Teuku Umar Street No. 47, SEMARANG Tel. : (024) 8411991 (hunting) Fax. : (024) 8412268 E-mail : plnjatengdiy@pln.co.id Website : www.plnjateng.co.id E-mail : plnubd@plnjateng.co.id
	AREA	
	Area Semarang ISO 9001 : 2000 Rayon Semarang, Rayon Semarang Timur, Rayon Semarang Barat, Rayon Semarang Selatan, Rayon Kendal Rayon Waleri, Rayon Demak, Rayon Purwodadi, Rayon Tegowanu, Rayon Boja	**Jl. Pemuda No.93, SEMARANG** Pemuda Street No.93, SEMARANG Tel. : (024) 3547651, 3547655 Fax. : (024) 3513708 E-mail : plnsemarang@pln.co.id
	Area Surakarta ISO 9001 : 2000 Rayon Surakarta Kota, Rayon Manahan, Rayon Palur, Rayon Sragen, Rayon Grogol, Rayon Kartosuro, Rayon Sukoharjo, Rayon Jatisrono, Rayon Wonogiri, Rayon Sumberlawang, Rayon Karanganyar	**Jl. Slamet Riyadi No. 468, SURAKARTA** Slamet Riyadi Street No. 468, SURAKARTA Tel. : (0271) 722091, 722095 Fax. : (024) 722095 E-mail : plnsolo@pln.co.id
	Area Yogyakarta ISO 9001 : 2000 Rayon Bantul, Rayon Sedayu, Rayon Wates, Rayon Sleman, Rayon Kalasan, Rayon Wonosari, Rayon Kota	**Jl. Gedong Kuning No. 3 Banguntapan, YOGYAKARTAJl. Gedong Kuning No. 3 Banguntapan, YOGYAKARTA** Gedong Kuning Street No. 3 Banguntapan, YOGYAKARTA Tel. : (0274) 452200 (Hunting) Fax . : (0274) 452452 Email: plnjogja@pln.co.id
	Area Magelang ISO 9001 : 2000 Rayon Magelang Kota, Rayon Purworejo, Rayon Kutoarjo Rayon Tegalrejo, Rayon Borobudur, Rayon Temanggung, Rayon Parakan	**Jl. Jend. A. Yani No. 14, MAGELANG** Jend. A. Yani Street No. 14, MAGELANG Tel. : (0293) 363355 Fax. : (0293) 362144 E-mail : plnmagelang@pln.co.id
	Area Tegal ISO 9001 : 2000 Rayon Tegal Kota, Rayon Tegal Timur, Rayon Slawi, Rayon Balapulang, Rayon Bumiayu, Rayon Brebes, Rayon Jatibarang, Rayon Pemalang, Rayon Comal, Rayon Randudongkal	**Jl. Pemuda No. 9, TEGAL** Pemuda Street No. 9, TEGAL Tel. : (0283) 358633 Fax. : (0283) 351608 E-mail : plntegal@pln.co.id
	Area Purwokerto ISO 9001 : 2000 Rayon Purwokerto Kota, Rayon Wonosobo, Rayon Purbalingga, Rayon Banjarnegara, Rayon Wangon, Rayon Ajibarang, Rayon Banyumas	**Jl. Jend. Sudirman No. 141, PURWOKERTO** Jend. Sudirman Street No. 141, PURWOKERTO Tel. : (0281) 634220 Fax. : (0281) 636456 E-mail : plnpurwokerto@pln.co.id
	Area Kudus ISO 9001 : 2000 Rayon Kudus Kota, Rayon Pati, Rayon Juwana, Rayon Bangsri, Rayon Jepara, Rayon Blora, Rayon Cepu, Rayon Rayon Rembang	**Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 102, KUDUS** AKBP Agil Kusumadya Street No. 102, KUDUS Tel. : (0291) 431982, 435123, 433792 Fax. : (0291) 438435 E-mail : plnkudus@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Pekalongan ISO 9001 : 2000 Rayon Pekalongan Kota, Rayon Keduwuni, Rayon Batang Rayon Wiradesa	**Jl. Manggis No. 2, PEKALONGAN** Manggis Street No. 2, PEKALONGAN Tel. :(0285) 434784, 434785 Fax. : (0285) 421011 E-mail : plnpekalongan@pln.co.id
	Area Klaten ISO 9001 : 2000 Rayon Klaten Kota, Rayon Tulung, Rayon Boyolali, Rayon Pedan, Rayon Delanggu	**Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3A KLATEN** Perintis Kemerdekaan Street No. 3A KLATEN Tel. : (0272) 320912 Fax. : (0272) 326073 E-mail : plnklaten@pln.co.id
	Area Cilacap ISO 9001 : 2000 Rayon Cilacap Kota, Rayon Kebumen, Rayon Gombong, Rayon Kroya, Rayon Majenang, Rayon Sidareja	**Jl. Brigjen Katamso No. 52 CILACAP** Brigjen Katamso Street No. 52, CILACAP Tel. : (0282) 521041, 532912 Fax. : (0282) 533075 E-mail : plncilacap@pln.co.id
	Unit Layanan Salatiga ISO 9001 : 2000 Service Point Ambarawa, Service Point Ungaran	**Jl. P. Diponegoro No. 19, SALATIGA** P. Diponegoro Street No. 19, SALATIGA Tel. : (0298) 313883 Fax. : (0298) 324671, 315882 Email : plnsalatiga@pln.co.id
	APD Jateng & D.I.Y	**Jl. Gatot Subroto No. 5 SEMARANG** Gatot Subroto Street No. 5, SEMARANG Tel. : (024) 7602195 Fax. : (024) 7604116 E-mail : APDJTY@pln.co.id
3.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT ß	**Jl. Asia Afrika No. 63, BANDUNG 40111** Asia Afrika Street No. 63, BANDUNG 40111 Tel. : (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. : (022) 4230822, 4207114 Jwots : 30995 E-mail : info.djbb@pln.co.id
	AREA	
	Area Bandung ISO 9001 : 2000 Rayon Bandung Utara, Rayon Bandung Selatan, Rayon Bandung Timur, Rayon Bandung Barat, Rayon Ujung Berung, Rayon Kopo, Rayon Cijawura, Rayon Prima Priangan.	**Jl. Soekarno Hatta No. 436, BANDUNG 40255** Soekarno Hatta Street No. 436, BANDUNG 40255 Tel. :(022) 5222043 (Hunting) Fax. : (022) 5221446 Jwots : 30996, 30167
	Area Cimahi ISO 9001:2008 Rayon Cimahi Kota, Rayon Prima Cibabat, Rayon Cimahi Selatan, Rayon Padalarang, Rayon Lembang, Rayon Rajamandala, Rayon Cililin.	**Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 675, CIMAHI** Jend. H. Amir Machmud Street No. 675, CIMAHI Tel. : (022) 6654727 Fax. : (022) 6652221 Jwots : 31028
	Area Majalaya ISO 9001 : 2008 Rayon Soreang, Rayon Banjaran, Rayon Rancaekek, Rayon Majalaya, Rayon Baleendah	**Jl. Jaksa Naranata No. 1 Bale Endah** Jaksa Naranata Street No. 1, Bale Endah MAJALAYA 40258 Tel. : (022) 5940281, 5940282, 5949401, 5949752 Fax. : (022) 5940772 Jwots : 38091
	Area Tasikmalaya ISO 9001:2008 Rayon Banjar, Rayon Ciamis, Rayon Karangnunggal, Rayon Kota Tasikmalaya, Rayon Pangandaran, Rayon Rajapolah, Rayon Singaparna.	**Jl. Mayor Utarya No. 28, TASIKMALAYA 46113** Mayor Utarya Street No. 28, TASIKMALAYA 46113 Tel. : (0265) 327176, 334848, 333871, 331686 (Hunting) Fax. : (0265) 331997 E-mail : plntasikmalaya@pln.co.id
	Area Garut ISO 9001: 2008 Rayon Garut Kota, Rayon Leles, Rayon Cibatu, Rayon Cikajang, Rayon Pamengpeuk	**Jl. Oto Iskandardinata 140 Tarogong, GARUT 44151** Oto Iskandardinata Street 140, Tarogong, GARUT 44151 Tel. : (0262) 241147, 241148, 242144 Fax. : (0262) 231302 E-mail : area.garut@pln.co.id

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Sumedang ISO 9001 : 2008 Rayon Sumedang Kota, Rayon Tanjungsari, Rayon Majalengka, Rayon Jatiwangi.	Jl. **Prabu Gajah Agung, SUMEDANG** Prabu Gajah Agung Street, SUMEDANG Tel. : (0261) 210846, 210847 Fax. : (0261) 210840
	Area Cirebon ISO 9001 : 2008 Rayon Sumber, Rayon Cirebon Kota, Rayon Cileduk, Rayon Kuningan, Rayon Cilimus, Rayon Jatibarang, Rayon Indramayu, Rayon Haurgeulis.	**Jl. Tuparev No. 100, CIREBON 45153** Tuparev Street No. 100, CIREBON 45153 Tel. : (0231) 236560-62, 236568, 236549 Fax. : (0231) 236546 Jwots : 37057
	Area Cianjur ISO 9001 : 2008 Rayon Cianjur Kota, Rayon Cipanas, Rayon Mande, Rayon Tanggeung, Rayon Sukanegara.	**Jl. Dr. Muwardi No. 165 CIANJUR 43216** Dr. Muwardi Street No. 165, CIANJUR 43216 Tel. : (0263) 266222 Fax. : (0263) 261823 Jwots : 30099
	Area Sukabumi ISO 9001 : 2008 Rayon Sukabumi Kota, Rayon Sukaraja, Rayon Pelabuhan Ratu, Rayon Cikembar, Rayon Cibadak, Rayon Cicurug	**Jl. Bhayangkara No. 220, SUKABUMI 43113** Bhayangkara Street No. 220, SUKABUMI 43113 Tel. : (0266) 224224 Fax. : (0266) 224937
	Area Bogor ISO 9001 : 2008 Rayon Bogor Timur, Rayon Prima Pakuan, Rayon Bogor Kota, Rayon Bogor Barat, Rayon Cipayung, Rayon Leuwiliang, Rayon Jasinga.	**Jl. Raya Pajajaran No. 233, BOGOR 16153** Raya Pajajaran Street No. 233, BOGOR 16153 Tel. : (0251) 8314200 Fax. : (0251) 8345700
	Area Depok ISO 9001 : 2008 Rayon Depok Kota, Rayon Cimanggis, Rayon Cibinong, Rayon Bojonggede, Rayon Sawangan.	**Jl. Boulevard Raya No. 1 Grand Depok City - DEPOK 16412** Boulevard Raya Street No. 1 Grand Depok City - DEPOK 16412 Tel. : (021) 77820960, 7700001 Fax. : (021) 77824058
	Area Bekasi ISO 9001 : 2008 Rayon Prima Bekasi, Rayon Bekasi Kota, Rayon Medan Satria, Rayon Bantar Gebang, Rayon Cikarang, Rayon Lemah-Abang, Rayon Tambun, Rayon Mustika Jaya, Rayon Cibitung, Rayon Babelan.	Jl. Cut Meutia No. 44, BEKASI 17113 Cut Meutia Street No. 44, BEKASI 17113 Tel. : (021) 8812222 Fax. : (021) 8816130
	Area Purwakarta ISO 9001 : 2008 Purwakarta Kota, Rayon Plered, Rayon Subang, Rayon Pagaden, Rayon Pamanukan	**Jl. K.K Singawinata No. 50, PURWAKARTA 41114** K.K Singawinata Street No. 50, PURWAKARTA 41114 Tel. : (0264) 200033, 2000075, 202872 (Manajer) Fax. : (0264) 201012
	Area Karawang ISO 9001 : 2008 Rayon Prima karawang, Rayon Karawang Kota, Rayon Rengasdengklok, Rayon Cikampek, Rayon Kosambi.	**Jl. Kertabumi No. 36 KARAWANG 41311** Kertabumi Street No. 36, KARAWANG 41311 Tel. : (0267) 411132, 402122 Fax. : (0267) 408260
	Area Gunung Putri ISO 9001:2008 Rayon Cileungsi, Rayon Citeureup, Rayon Jonggol	**Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Km. 1 Cileungsi Kabupaten BOGOR 16820** Raya Cileungsi Street Km. 1, Jonggol Cileungsi Kabupaten BOGOR 16820 Tel. : (021) 82495080 Fax. : (021) 8236514
	AREA PENGATUR DISTRIBUSI (APD)	
	Area Pengatur Distribusi Jawa Barat dan Bandung ISO 9001:2008	Jl. **Cikapundung Timur No. 3, BANDUNG 40111** Cikapundung Timur Street No. 3, BANDUNG 40111 Tel. : (022) 4236034, 4232035 Fax. : (022) 4204055 Jwots : 30052, 30053
4.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BANTEN	**Jl. Jendral Sudirman (Akses By Pass) No. 1 TANGERANG 15118** Jendral Sudirman Street (Akses By Pass) No. 1 TANGERANG 15118 Tel.: (021) 5526716, 5526717 Fax.: (021) 5526721 Email: disbanten@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA ISO 9001 : 2008	**Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110** M. I. Ridwan Rais Street No. 1, JAKARTA 10110 Tel. : (021) 3454000, 3455000 Fax. : (021) 3456694 Email : humasjaya@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Pengatur Distribusi	**Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110** M. I. Ridwan Rais Street No. 1, JAKARTA 10110 Tel. : (021) 3454000, 3455000 Fax. : (021) 3846536
	Area Menteng ISO 9001 : 2008	**Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110** M. I. Ridwan Rais Street No. 1, JAKARTA 10110 Tel. : (021) 3454000, 3455000 Fax. : (021) 3846508 E-mail : menteng@pln.co.id
	Area Bandengan ISO 9001 : 2008	**Jl. Bandengan Utara No. 79, JAKARTA 14440** Bandengan Utara Street No. 79, JAKARTA 14440 Tel. : (021) 6604082, 6600149 Fax. : (021) 6693500 E-mail : bandengan@pln.co.id
	Area Cempaka Putih ISO 9001 : 2008	**Jl. A.Yani Street No. 60, JAKARTA PUSAT 10510** A.Yani Street No. 60, CENTRAL JAKARTA PUSAT 10510 Tel. : (021) 4255050 Fax. : (021) 4258152 E-mail : cempakaputih@pln.co.id
	Area Jatinegara ISO 9001 : 2008	**Jl. Jatinegara Timur No. 75, JAKARTA TIMUR 13310** Jatinegara Timur Street No. 75,EAST JAKARTA 13310 Tel. : (021) 85908324, 8504426 Fax. : (021) 8192192
	Area Pondok Kopi ISO 9001 : 2008	**Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, JAKARTA TIMUR** Sentra Primer Baru Timur Street, Pulogebang, JAKARTA TIMUR Tel. : (021) 4806506, 4806504 Fax. : (021) 4807160 E-mail : pondokkopi@pln.co.id
	Area Tanjung Priok ISO 9001 : 2008	**Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter JAKARTA UTARA 14350** Yos Sudarso Street Kav. 85, Sunter JAKARTA UTARA 14350 Tel. : (021) 6510113, 6510078 Fax. : (021) 6510077
	Area Marunda ISO 9001 : 2008	**Jl. Sungai Berantas 1, Semper Barat JAKARTA UTARA 14120** Sungai Berantas 1 Street, West Semper JAKARTA UTARA 14120 Tel. : (021) 4410627, 4410628 Fax. : (021) 4410622 E-mail : marunda@pln.co.id
	Area Bulungan ISO 9001 : 2008	**Jl. Sisingamangaraja No.1, Kebayoran Baru** Sisingamangaraja Street No.1, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN 12120 Tel. : (021) 7208333, 7220411 Fax. : (021) 7233283 E-mail : bulungan@plnjaya.co.id
	Area Bintaro ISO 9001 : 2008	**Jl. MH. Thamrin Blok B7 Kav. A2 No. 7** MH. Thamrin Street Blok B7 Kav. A2 No. 7 Sentra Bisnis Distrik /Sektor VII Bintaro Jaya, TANGERANG 15524 Tel. : (021) 74861708, 74861755 Fax. :(021) 7375843 E-mail : bintaro@pln.co.id
	Area Kebon Jeruk ISO 9001 : 2008	**Pertokoan Intercon Blok A IX No. 7 - 8** Meruya Ilir Raya Street, JAKARTA 11520 Jl. Meruya Ilir Raya, JAKARTA 11520 Tel. : (021) 5852534, 5852562 Fax. : (021) 5871458 E-mail : kebonjeruk@pln.co.id
	Area Ciputat ISO 9001 : 2008	**Jl. RE. Martadinata Km. 27, Ciputat TANGERANG 15411** RE. Martadinata Street Km. 27, Ciputat TANGERANG 15411 Tel. :(021) 7443805, 7440802 Fax. : (021) 7443804 E-mail : ciputat@plnjaya.co.id
	Area Kramat Jati ISO 9001 : 2008	**Jl. Raya Bogor Km. 20, JAKARTA TIMUR 13520** Raya Bogor Street Km. 20, EAST JAKARTA 13520 Tel. : (021) 8009534, 8009537 Fax. ß: (021) 8006084

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Area Lenteng Agung ISO 9001 : 2000	**Jl. Raya Duren Tiga No. 100, JAKARTA SELATAN** Raya Duren Tiga Street No. 100, SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 79184937, 79184936 Fax. : (021) 79184935 E-mail : pasarminggu@pln.co.id
	Area Pondok Gede ISO 9001 : 2000	**Jl. Raya Jatimakmur No. 150 Pondok Gede BEKASI** Raya Jatimakmur Street No. 150, Pondok Gede BEKASI Tel. : (021) 8488385, 8488386 Fax. : (021) 8488387 E-mail : pondokgede@pln.co.id
	Area Ciracas ISO 9001 : 2000	**Jl. Raya Centex No. 1 Ciracas, JAKARTA TIMUR 13740** Raya Centex Street No.1, Ciracas, EAST JAKARTA 13740 Tel. : (021) 8720990, 8726605 Fax. : (021) 8726604 E-mail ciracas@pln.co.id
	Area Cengkareng	**Jl. Lingkar Luar Duri Kosambi Cengkareng** Lingkar Luar Street, Duri Kosambi Cengkareng JAKARTA 11750 Tel. : (021) 5440329, 5440330 Fax. : (021) 5440340 E-mail : cengkareng@plnjaya.co.id
6.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI BALI ISO 9001 : 2000	**Jl. Letda Tantular No. 1 Renon DENPASAR 80234** Letda Tantular Street No. 1 Renon DENPASAR 80234 Tel. : (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. : (0361) 227101
	Area Pengatur Distribusi (APD Bali)	**Jl. Diponegoro No. 17 DENPASAR 80112** Diponegoro Street No. 17 DENPASAR 80112 Tel. : (0361) 222270, 224286, 223027 Fax. : (0361) 223035, 235241
	Area Pelayanan Prima Bali	**Jl. PB. Sudirman No. 2 DENPASAR 80113** PB. Sudirman Street No. 2, DENPASAR 80113 Tel. : (0361) 251127 Fax. : (0361) 251128
	Area Bali Timur ISO 9001 : 2000 Rayon Gianyar, Rayon Bangli, Rayon Klungkung, Rayon Nusa Penida, Rayon Karang Asem	**Jl. Raya Batutabih No. 53 KLUNGKUNG 80752** Raya Batutabih Street No. 53, KLUNGKUNG 80752 Tel. : (0366) 21982, 21200 Fax. : (0366) 21049
	Area Bali Selatan ISO 9001 : 2000 Rayon Denpasar, Rayon Kuta, Rayon Mengwi, Rayon Tabanan	**Jl. Sudirman No. 2, DENPASAR 80113** Sudirman Street No. 2, DENPASAR 80113 Tel. : (0361) 264210, 228121 Fax. : (0361) 234920
	Area Bali Utara ISO 9001: 2000 Rayon Singaraja, Rayon Tejakula, Rayon Seririt, Rayon Negara, Rayon Gilimanuk	**Jl. Udayana No. 27, SINGARAJA 81116** Udayana Street No. 27, SINGARAJA 81116 Tel. : (0362) 21071, 22584 Fax. : (0362) 23129
7.	PT PLN (Persero) DISTRIBUSI LAMPUNG ISO 9001 : 2008	**Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144** Z.A. Pagar Alam Street No.05, Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144 Tel. : (0721) 774868 Fax. : (0721) 780247 Email : kanwil.lampung@pln.co.id
	Area Tanjung Karang ISO 9001 : 2000 Rayon Karang, Rayon Sutami, Rayon Way Halim, Rayon Teluk Betung, Rayon Natar, Rayon Sidomulyo, Rayon Kalianda.	**Jl. Pangeran Diponegoro No. 14, BANDAR LAMPUNG 35119** Pangeran Diponegoro Street No. 14, BANDAR LAMPUNG 35119 Tel. : (0721) 267065 Fax. : (0721) 264200 E-mail : sek_tkarang_lampung@pln.co.id
	Area Metro ISO 9001 : 2008 ayon Kota Metro, Rayon Kota Sribawono, Rayon Bandarjay , Rayon Pringsewu, Rayon Talang Padang, Rayon Kota Agung, Rayon Kalirejo, Rayon Rumbia, Rayon Sukadana.	**Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara No. 9915A, Kauman METRO** Alamsyah Ratu Prawiranegara Street No. 9915A, Kauman METRO Tel. : (0725) 45699 Fax : (0725) 7850929 E-mail : sek_metro_lampung@pln.co.id
	Area Kota Bumi ISO 9001 : 2008 Rayon Bumi Abung, Rayon Bukit Kemuning, Ryon Menggala, Rayon Blambangan Umpu, Rayon Liwa.	**Jl. Soekarno Hatta No. 149 Kota Bumi** Soekarno Hatta Street No. 149, Kota Bumi LAMPUNG UTARA 34511 Tel.: (0724) 21166 Fax.: (0724) 22555 Email: sek_kotabumi_lampung@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Area Pengatur Distribusi	**Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG** Z.A. Pagar Alam Street No. 05, Rajabasa BANDAR LAMPUNG Tel. : (0721) 773295 Fax. : (0721) 789012 Email : apd.lampung@pln.co.id
	Satuan Kerja Listrik Pedesaan Lampung	**Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG** Z.A. Pagar Alam Street No. 05, Rajabasa BANDAR LAMPUNG Tel. : (0721) 774868, 774867 Fax. : (0721) 780247 Email : kontakkami_lampung@pln.co.id
XI.	**PEMBANGKITAN**	
1.	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA	**Jl. Brigjend Katamso, KM. 5,5 No. 30 Titikuning** Brigjend Katamso Street, KM. 5,5 No. 30, Titikuning Telp : (061) 7869025 Fax : (061) 7867967 Website : http://www.pln.co.id/Kitsbu Email : plnksu@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Belawan	**Jl. Pulau Sicanang No. 1, Belawan, MEDAN 20416 MEDAN 20146** Pulau Sicanang Street No.1, Belawan, MEDAN 20416 Telp : (061) 6941192, 6940559 Fax : (061) 6941143 Email : plnksu.sblw@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Medan	**Jl. Pembangkitan Listrik No. 1, Paya Pasir Medan** Pembangkitan Listrik Street No. 1, Paya Pasir Medan Marelan, MEDAN 20255 Telp : (061) 6850064, 6851958, 6841096 Fax : (061) 6853842 Email plnksu.smdn@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Pekan Baru	**Jl. Tanjung Datuk No. 74, PEKAN BARU 28141** Tanjung Datuk Street No. 74, PEKAN BARU 28141 Telp : (0761) 41855 Fax : (0761) 40336 Email : plnksu.spkb@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Pandan	**Jl. R. Suprapto Tukka Sibuluan I Ds. Pandan, Sibolga TAPANULI TENGAH 22611** R. Suprapto Tukka Sibuluan I Street, Pandan Village, Sibolga TAPANULI TENGAH 22611 Telp : (0631) 371818, 371733 Fax : (0631) 371571 Email : plnksu.spdn@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Labuhan Angin	**Desa Labuhan Angin, Kec. Tapian Nauli II, Kec. Tapian** Labuhan Angin Village, Tapian Nauli II District, Tapian Nauli Tapanuli Tengah PO BOX 003, SIBOLGA 22500 Telp : (0631) 7398002 Fax : (0631) 7398004 Email : plnksu.sbla@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Nagan Raya	**Jl. Meulaboh, Tapak Tuan, KM. 8,5 Nagan Raya, NANGGROE ACEH DARUSSALAM** Meulaboh Street, Tapak Tuan, KM. 8,5 Nagan Raya, NANGGROE ACEH DARUSSALAM Telp : (0655) 7552320, 7552321 Fax : (0655) 7552904 Email : plnksu.sngr@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	**Jl. Demang Lebar Daun No. 375 PALEMBANG 30128** Demang Lebar Daun Street No. 375, PALEMBANG 30128 Tel. : (0711) 374955 (Hunting) Fax. : (0711) 374958, 374959 E-mail : info.kitsbs@pln.co.id Website : http://www.pln.co.id/kitsbs/
	ektor Pengendalian Pembangkitan Keramasan SO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK 3 PLTD/G Sungai Juaro	**Jl. Abikusno Cokrosuyoso No.24 Kertapati** Abikusno Cokrosuyoso Street No.24, Kertapati PALEMBANG 30259 Tel. : (0711) 510955, 512066 Fax. : (0711) 510952 E-mail : skrm.kitsbs@pln.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Sektor Pembangkitan Bukit Asam ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK 3	**Jl. Lingga Raya PO BOX 117 Tanjung Enim SUMATERA SELATAN 31701** Lingga Raya Street, PO BOX 117, Tanjung Enim SUMATERA SELATAN 31701 Tel. : (0734) 451052, 451053 Fax. : (0734) 451051 E-mail : sbam.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK 3, Zero Accident PLTA Batang Agam, PLTA Maninjau, PLTA Singkarak	**Jl. Simpang Tiga Padang Luar KM. 1 BUKIT TINGGI 26181** Simpang Tiga Padang Luar Street KM. 1 BUKIT TINGGI 26181 Tel. (0752) 33153, 33663 Fax. : (0752) 33103, 35043 E-mail : sbkt.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung ISO 9001 : 2000; ISO 14001: 2004, SMK 3, Zero Accident, PLTD Teluk Betung, PLTD Tegineneng PLTD/G Tarahan, PLTD Batu, PLTA Besai	**Jl. Raden Gunawan II No. 4 Raja Basa BANDAR LAMPUNG 35144** Raden Gunawan II Street No. 4, Raja Basa BANDAR LAMPUNG 35144 Tel. : (0721) 704385, 781156 Fax. : (0721) 708436 E-mail : sbdl.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pengendalian Pembangkitan Ombilin ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK3, Zero Accident PLTG Pauh Limo	**Jl. Prof . DR.M.Yamin SH, Talawi, Kota Sawah Lunto SUMATERA BARAT 27446** Prof . DR.M.Yamin SH Street, Talawi, Kota Sawah Lunto SUMATERA BARAT 27446 Tel. : (0754) 410351, 410352 Fax. : (0754) 410354 E- mail : somb.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pengendalian Pembangkitan Bengkulu ISO 9001 : 2000, ISO 14001: 2004, SMK 3 PLTD Sukamerindu, PLTD Pulau Baai, PLTA Tes, PLTA Musi	**Jl. Raya Bengkulu - Curup KM 72, Desa Ujan Mas Atas** Raya Bengkulu – Curup Street KM 72, Desa Ujan Mas Atas Kab Kepahyang, BENGKULU 39171 Tel. : (0732) 23715, 325437 Fax. : (0732) 23711 E-mail : sbkl.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Tarahan ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK3	**Jl. Lintas Sumatera KM. 15 Tarahan Kec. Katibung LAMPUNG SELATAN 35551** Lintas Sumatera Street KM. 15, Tarahan Kec. Katibung LAMPUNG SELATAN 35551 Tel. : (0721) 341815, 341816 Fax. : (0721) 341819 E-mail : star.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pengendalian Pembangkitan Jambi ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, SMK 3 PLTD Kasang	**Jl. Dr. Setia Budhi RT 09 Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur JAMBI 36134** Dr. Setia Budhi Street, RT 09 Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur JAMBI 36134 Tel. : (0741) 31649, 31233 Fax . : (0741) 22672 E-mail : sjmb.kitsbs@pln.co.id
	Sektor Pembangkitan Teluk Sirih	**Jl. Lintas Sumatera Padang-Painan Km. 25 Teluk Kabung Tengah - Bungus Teluk Kabung PADANG 25241** Lintas Sumatera Padang-Painan Street Km. 25 Teluk Kabung Tengah – Bungus Teluk Kabung PADANG 25241 Tel. : (0751 4650089 Fax. : (0751) 4650092 Email : stir.kitsbs@pln.co.id
	PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	**Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara JAWA TENGAH 59453** Tubanan Village, Kembang District. Jepara JAWA TENGAH 59453 Tel. : (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. : (0291) 772125 E-mail : tanjungjatib@pln.co.id
XII	**UNIT INDUK PEMBANGUNAN**	
1.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA	**Jl. Kartini No. 23 MEDAN 20152** Kartini Street No. 23 MEDAN 20152 Tel. : (061) 4568532, 4568539, 4568504 Fax. : (061) 4568532 Email : www.plnsumatera-1.co.id
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 1	**Jl. Medan-Banda Aceh Gate 53 PT Arun NGL Desa Meuria Paloh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe-ACEH** Medan-Banda Aceh Street Gate 53, PT Arun NGL Desa Meuria Paloh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe-ACEH

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 2	**Jl. Desa Tanjung Pasir, Kec Pangkalan Susu, Kab. Langkat, SUMATERA UTARA** Tanjung Pasir Village Street, Pangkalan Susu Distric, Langkat, SUMATERA UTARA
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 3	**Jl. Pemuda No. 18 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, PEKAN BARU** Pemuda Street No. 18, Rejosari Tenayan Raya, PEKAN BARU
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 4	**Jl. Pertambangan No. 30 RT 1/RW1 Ranggam, Kel. Tebing** Pertambangan Street No. 30, RT 1/RW1 Ranggam,. Tebing Kec. Tanjung Balai Karimun, RIAU
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 5	**Jl. Takengon, Angkup Km 15 Takengon Silih Nara ACEH TENGAH** Takengon Street, Angkup Km 15 Takengon Silih Nara ACEH TENGAH
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 6	**Jl. Raya Porsea-Pulo Raja Km 50 Desa Meranti Utara Village Kec. Pintu Pohan, TOBASA** Raya Porsea-Pulo Raja Street Km 50, Meranti Utara Village Kec. Pintu Pohan, TOBASA
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 7	**Jl. Timtim Blok X No. 08 Wisma Ulak Karang PADANG** Timtim Street Blok X No. 08, Wisma Ulak Karang PADANG
	Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 8	**Jl. Perum Graha Loka Blok A3 No. 9 Kel. Selindung Kec. Pangkat Balam, PANGKAL PINANG** Perum Graha Loka Street Blok A3 No. 9, Kel. Selindung Kec. Pangkat Balam, PANGKAL PINANG Tel. : (0717) 7030789
2.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA	**Jl. Dr. Cipto No. 12, MEDAN 20152** Dr. Cipto Street No. 12, MEDAN 20152 Tel. : (061) 4144151, 4144152, 4518580 (GM) Fax. : (061) 4144153 E-mail :sekrt.gm@pikitringsuar.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh	-
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Sumatera 1	-
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Sumatera 2	-
3.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH	**Komplek Citragarden Square Blok R1 No. 7 - 11** **Jl. Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, RIAU 28294** Citragarden Square Complex, Blok R1 No. 7 – 11 Purwodadi Panam Street, Kelurahan Sidomulyo Barat , Tampan District, Pekanbaru City, RIAU 28294 Tel. : (0761) 6704881 Fax. : (0761) 6704882 Email : uipsumbagteng@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Pekanbaru	**Jl. Setia Budhi No. 57, PEKANBARU 28291** Setia Budhi Street No. 57, PEKANBARU 28291 Tel. : (0761) 40877 Fax. : (0761) 28081 Email : prov.kitringriau@pikitringsuar.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Bukit Tinggi	**Jl. Batang Agam No. 5 Belakang Balok Bukittinggi, Padang SUMATERA BARAT 26136** Batang Agam Street No. 5, Belakang Balok Bukittinggi, Padang SUMATERA BARAT 26136 Tel. : (0752) 627545, 627546, 625555 Fax.: : (0752) 627544 Email : upkjs.3@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jambi	**Jl. DR. Setia Budhi RT 09 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur JAMBI 36143** DR. Setia Budhi Street, RT 09 Rajawali,. Jambi Timur District JAMBI 36143 Tel. : (0741) 34452, 34453 Fax. : (0741) 22672
	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	**Jl. Residen Abdul Rozak No. 2180 Sekojo, PALEMBANG 30118** Residen Abdul Rozak Street No. 2180, Sekojo, PALEMBANG 30118 Tel. : (0711) 719103 s.d 719109 Fax. : (0711) 719102 Email : info@uipring-sumatera2.co.id

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Sumatera Selatan	-
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Bangka Belitung	-
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Lampung dan Bengkulu	-
5.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA JAWA	**Jl. Aipda K. S. Tubun I/2 Lantai 3 Petamburan, JAKARTA BARAT 11420** Aipda K. S. Tubun I/2 Street, 3rd Floor Petamburan, WEST JAKARTA 11420 Tel. : (021) 56950412, 56950413 Fax. : (021) 56950409 Email : sekr.uipiv@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Interkoneksi Sumatera Jawa 1	**Komplek Gardu Induk Serang** Jl. Raya Warung Jaud, Kali Gandu Kasemen, Serang, BANTEN 42191 Gardu Induk Serang Complex Raya Warung Jaud Street, Kali Gandu Kasemen, Serang, BANTEN 42191 Tel. : (0254) 8242071 Fax. : (0254) 8242990 Email : sekr.upkjisj1@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Interkoneksi Sumatera Jawa 2	**Jl. Perintis Kemerdekaan No. 05 Bandar Lampung, LAMPUNG 35128** Perintis Kemerdekaan Street No. 05 Bandar Lampung, LAMPUNG 35128 Tel. : (0721) 5600014 Fax. : (0721) 5600014 Email : sekr.upkjisj2@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Interkoneksi Sumatera Jawa 3	**Jl. Demang Lebar Daun No. 170 Lantai 2 Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang SUMATERA SELATAN 30137** Demang Lebar Daun Street No. 170 2nd Floor, Demang Lebar Daun District, Palembang SOUTH SUMATERA 30137 Tel. : (0711) 444950 Fax. : (0711) 5640566 Email : sekr.upkjisj3@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT	**Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere DEPOK 16514** Ehave-Gandul Street, Gandul Cinere District Tel. : (021) 7535500, 7548461, 7548467 Fax. : (021) 7535599
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat 1	**Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere** Ehave-Gandul Street,. Gandul Cinere District DEPOK 16514 Tel. : (021) 7545837, 7543321, 7543375 Fax. : (021) 7535596
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat 2	**Jl. Mayjen Sutoyo No. 1 Cililitan Kec. Kramat Jati JAKARTA TIMUR 13640** Mayjen Sutoyo Street No. 1, Cililitan, Kramat Jati District EAST JAKARTA 13640 Tel. : (021) 80872087, 80872526, 80872524 Fax. : (021) 80872529
	Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Barat 3	**Komp. PLN GI Petukangan RT. 005 RW. 001 Pondok Karya – Pondok Aren TANGERANG SELATAN 15225** PLN GI Petukangan Complex, RT. 005 RW. 001 Pondok Karya – Pondok Aren SOUTH TANGERANG 15225 Tel. : (021) 73889320 Fax. : (021) 73889325
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Barat 1	**Jl. Raya Mauk Desa Lontar Kec. Kemiri Kab. Tangerang** Raya Mauk Street, Lontar Village, Kemiri, Tangerang District PROVINSI BANTEN Tel. : (021) 29665516 Fax. : (021) 29665516
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Barat 2	**Jl. Raya Pluit Utara No. 2A Muara Karang Pluit JAKARTA UTARA** Raya Pluit Utara Street No. 2A, Muara Karang Pluit NORTH JAKARTA Tel. : (021) 6600054 Fax. : (021) 6692806

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
7.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH 1	**Jl. Karawitan No. 32, BANDUNG 40264** Karawitan Street No. 32, BANDUNG 40264 Tel. : (022) 7320595 Fax. : (022) 7320596 Website : www.pln.co.id/hidrojb Email : hydro_jawa@yahoo.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Tengah 1 (UPP KIT JBT 1)	**Komplek Kantor PLN Proyek PLTA Upper Cisokan Desa Sarinangen, Kec. Cipongkor Kab. BANDUNG BARAT** Office Complex PLN Proyek PLTA Upper Cisokan Sarinangen Village, Cipongkor District Kab. WEST BANDUNG District Tel. : (022) 70889974 Fax . : (022) 70889974 Email : upkpltacisokan@yahoo.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Tengah 2 (UPP KIT JBT 2)	**Jl. Raya Timur Kadipaten No. 9 Sawala Kec. Kadipaten, Kab. MAJALENGKA 45452** Raya Timur Kadipaten Street No. 9, Sawala Kadipaten, MAJALENGKA District 45452 Tel. : (0233) 662433 Fax. : (0233) 662433 Email : upkph2@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Tengah 3 (UPP KIT JBT 3)	**Jl. Mayjend Soetoyo No. 1 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramajati, JAKARTA TIMUR 13640** Mayjend Soetoyo Street No. 1, Cililitan, Kramajati District, EAST JAKARTA 13640
8.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II	**Jl. P. Mangkubumi No. 16, YOGYAKARTA 55232** P. Mangkubumi Street No. 16, YOGYAKARTA 55232 Tel. : (0274) 582912, 582922 Fax. : (0274) 582971
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 1	**Jl. Meyjen Sutoyo No. 1, Cililitan, Kec. Kramat Jati JAKARTA TIMUR 13640** Meyjen Sutoyo Street No. 1, Cililitan, Kramat Jati District JAKARTA TIMUR 13640 Tel. : (021) 80872526, 80872524, 80872529 Fax. : (021) 80872529
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 5	**Jl. Ciliwung No. 5, BANDUNG 40114** Ciliwung Street No. 5, BANDUNG 40114 Tel. : (022) 7107194, 7107196 Fax. : (022) 7272928
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 6	**Jl. Brigjen Darsono By Pass Sunyaragi (Komplek PLTG)** Brigjen Darsono Street, By Pass Sunyaragi (Komplek PLTG) CIREBON 45132 Tel. : (0231) 4800081, 482500 Fax. : (0231) 486789
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7	**Jl. Slamet No. 1, Candi Baru** Slamet Street No. 1, Candi Baru SEMARANG 60231 Tel. : (024) 8412701 Fax. : (024) 8312738
9.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI 1	**Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 SURABAYA 60231** Ketintang Baru I Street No. 1-3 SURABAYA 60231 Tel. : (031) 8281200 Fax. : (031) 8280214 Email : sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 7	**Jl. Slamet No. 1 Candi baru, SEMARANG 50232** Slamet Street No. 1 Candi baru, SEMARANG 50232 Tel. : (024) 8412701 Fax. : (024) 8312738 E-mail : sekreupk7@pln.co.id
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 8	**Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, SURABAYA 60231** Ketintang Baru I Street No. 1-3, SURABAYA 60231 Tel. : (031) 8285800 Fax. : (031) 8280380 Email : sekreupk8@pln.co.id

No.	**Kantor Cabang** | Branch Offices	**Alamat** | Address
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 9	**Jl. Raya Karanglo No. 90, MALANG 65111** Raya Karanglo Street No. 90, MALANG 65111 Tel. : (0341) 400084, 400094 Fax. : (0341) 419681 Email : sekreupk9@pln.co.id
	Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali 10	**Jl. Raya Abianbase No. 0, Kapal, Mengwi, Badung** Raya Abianbase Street No. 10, Kapal, Mengwi, Badung BALI 80351 Tel. : (0361) 4427824 Fax. : (0361) 9006918 Email : sekreupk10@pln.co.id
10.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI II	**Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya** Ketintang Baru I Street No. 1-3, Surabaya JAKARTA TIMUR 60231 Tel. : (031) 8291377, 8291538 Fax. : (031) 8288959 Email : komunikasijbtb2@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Timur Dan Bali 1	**Jl. Tanjung Awar-Awar, Desa Wadung, Kec. Jenu, Kab. Tuban** Tanjung Awar-Awar Street, Wadung Village, Jenu, Tuban District JAWA TIMUR 62352 Tel. : (0356) 331931 Fax. : (0356) 325550
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Timur Dan Bali 2	**Jl. Raya Surabaya-Probolinggo KM 73, Desa Wates, Kec. Lekok Kab. Pasuruan, JAWA TIMUR 67184** Raya Surabaya-Probolinggo Street KM 73, Wates Village, Lekok Pasuruan District,EAST JAVA 67184 Tel. : (0343) 4506336)
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Timur Dan Bali 3	-
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Jawa Bagian Timur Dan Bali 4	**Ds. Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap JAWA TENGAH** Bunton Village, Adipala, Cilacap District CENTRAL JAVA Tel. : (0282) 5259903 Fax. : (0282) 5259903 Email : upkpltuadipala@gmail.com
11.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	**Jl. MT. Haryono Street No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, Balikpapan 76114, KALIMANTAN TIMUR** MT. Haryono Street No. 384, Kotak Pos 210 Ring Road, Balikpapan 76114, EAST KALIMANTAN Tel. : (0542) 871559 (Hunting), 872192 (GM) Fax. : (0542) 871558, 871565 (Sek GM) E-mail : pikitringkal@pln-pikal.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Timur 1	-
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Timur 2	-
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Timur 3	-
	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH	**Jl. Mistar Cokrokusumo Street KM. 39, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70733** Mistar Cokrokusumo Street KM. 39, Banjarbaru SOUTH KALIMANTAN 70733 Tel. : (0511) 4777571, 6749571 Fax. : (0511) 6749900
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 1	**Jl. Pemuda Street No. 17, Selat Dalam, Kapuas District KALIMANTAN TENGAH** Pemuda Street No. 17, Selat Dalam, Kapuas District CENTRAL KALIMANTAN
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 2	**Jl. Imam Bonjol Street No. 14 RT 26, Melayu, Teweh Tengah, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara KALIMANTAN TENGAH** Imam Bonjol Street No. 14 RT 26, Melayu, Teweh Tengah, Muara Teweh, Kabupaten North Barito CENTRAL KALIMANTAN
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 3	**Jl. Pelita Timur Street No. 19A, Sampit KALIMANTAN TENGAH** Pelita Timur Street No. 19A, Sampit CENTRAL KALIMANTAN
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Tengah 4	**Jl. Panglima Batur No. 1, Banjarbaru** KALIMANTAN SELATAN 70711 Panglima Batur Street No. 1, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70711 Tel. : (0511) 4773268 Fax. : (0511) 4773269

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT	**Jl. Letjen Suprapto Street No. 50 G, Pontianak KALIMANTAN BARAT 78121** Letjen Suprapto Street No. 50 G, Pontianak WEST KALIMANTAN 78121 Tel. : (0561) 762580 Fax : (0561) 762579 Email : uip.kalimantan.barat@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimatan Bagian Barat 1	**Jl. Abdurrahman Saleh No. Street 88 A, Pontianak KALIMANTAN BARAT 78124** Abdurrahman Saleh No. Street 88 A, Pontianak WEST KALIMANTAN 78124 Tel. : (0561) 8171321 Fax. : (0561) 8171198 Email : uppkbbl.pontianak@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Barat 2	**Komp. Ruko Jl. Komp. Ruko Oevang Oeray Street, Next to Nanas Alley, Baning, RT/RW 29/02 Sintang, KALIMANTAN BARAT 78600** Komp. Ruko Oevang Oeray Street, Next to Nanas Alley, Baning, RT/RW 29/02 Sintang, WEST KALIMANTAN 78600 Sintang, KALIMANTAN BARAT 78600 Email : uppkbb2.sintang@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Barat 3	**Jl. Pangeran Antasari Street No. 61, Singkawang Barat, Singkawang KALIMANTAN BARAT** Pangeran Antasari Street No. 61, Singkawang Barat, Singkawang WEST KALIMANTAN Tel. : 0811571709 Email : uppkbb3.singkawang@gmail.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Barat 4	**Jl. Kolonel Sugiono Street No. 21, Ketapang KALIMANTAN BARAT** Kolonel Sugiono Street No. 21, Ketapang WEST KALIMANTAN Email : uppkbb4.ketapang@gmail.com
14.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA	**Jl. Pendidikan No. 56, MATARAM 83125** Pendidikan Street No. 56, MATARAM 83125 Tel. : (0370) 621732, 621733 Fax. : (0370) 621734 Email : pln@uip-nusra.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Lombok	**Jl. Majapahit No. 12B, MATARAM 83125** Majapahit Street No. 12B, MATARAM 83125 Tel. : (0370) 638884 Fax. : (0370) 627631
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sumbawa	**Jl. Gajah Mada No. 22 Penato'I Mpunda, BIMA 84115** Gajah Mada Street No. 22, Penato'I Mpunda, BIMA 84115 Tel. : (0374) 43225 Fax. : (0374) 647100
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Flores	**Jl. Pahlawan No. 20, ENDE 86311** Pahlawan Street No. 20, ENDE 86311 Tel. : (0381) 24148 Fax : (0381) 24481
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Timor	**Jl. Timor Raya No. 138 Oesapa, KUPANG 85228** Timor Raya Street No. 138, Oesapa, KUPANG 85228 Tel. : (0380) 832319 Fax. : (0380) 832319
	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA	**Jl. Bethesda No. 32, Kota Manado SULAWESI UTARA 95116** Bethesda Street No. 32, Kota Manado SULAWESI UTARA 95116 Tel. : (0431) 855620 Fax. : (0431) 855630 Email : uipsulbagut@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Utara	**Jl. Pakowa Street No. 1 Lingkungan V, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado SULAWESI UTARA** Pakowa Street No. 1 Lingkungan V, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Manado City NORTH SULAWESI Tel : (0431) 857467
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Gorontalo	**Jl. Mohammad Yamin No. 19, Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, GORONTALO** Mohammad Yamin Street No. 19, Limba B Kota Selatan District, Gorontalo City, GORONTALO Tel. : Fax. : Email : uppgorontalo@gmail.com

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan ulawesi Tengah	**Jl. MH. Thamrin Atas Street No. 73, Besusu Timur, Palu Timur District, Palu City, SULAWESI TENGAH** MH. Thamrin Atas Street No. 73, Besusu Timur, Palu Timur District, Palu City, CENTRAL SULAWESI Tel. : (0451) 453357 Fax. : (0451) 456006 Email : upk.kitsul2@yahoo.co.id
	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN	**Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang** Letjend. Hertasning Street, Panakkukang MAKASSAR 90222 Tel. : (0411) 852519 Fax. : (0411) 444339 E-mail : pln.uipsulbagsel@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Selatan	**Jl. Letjend Hertasning, Panakkukang** Letjend Hertasning Street, Panakkukang MAKASSAR 90222 Tel. : (0411) 852519 Fax. : (0411) 444339 Email : pln.uppkitringsulsel@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Barat	**Jl. Dr. Sam Ratulangi Street, Mamuju SULAWESI BARAT** Dr. Sam Ratulangi Street, Mamuju WEST SULAWESI Tel. : (0426) 2324458 Fax. : (0426) 2324458 Email : pln.uppkitringsulbar@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Tenggara	**Jl. D. I. Panjaitan Street 24, Lepo-lepo, Kendari SULAWESI TENGGARA** D. I. Panjaitan Street 24, Lepo-lepo, Kendari SOUTH EAST SULAWESI Tel. : (0401) 3194964 Fax. : (0401) 3194964 Email : pln.uppkitringsultra@pln.co.id
17.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PAPUA	**Jl. Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN** Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru SOUTH JAKARTA Tel. : (0967) 581740 Fax. : (0967) 582323 Email : uipxiv@gmail
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Papua	**Jl. Poros Abepura (Kompleks Perumahan PLN) Entrop** Poros Abepura Street (PLN Housing Complex) Entrop JAYAPURA
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Papua Barat	**Jl. Kavling Transmigran Klasaman, KOTA SORONG** Kavling Transmigran Klasaman Street, SORONG City
18.	PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN MALUKU	**Jl. Kapt. Piere Tendean, Halong, AMBON 97127** Kapt. Piere Tendean Street, Halong, AMBON 97127 Tel. : (0911) 341089 Fax : (0911) 341089 Email : uip.maluku@pln.co.id
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Maluku	**Jl. Wolter Monginsidi No. 170 Gudang PLN Area Ambon, Kel Lateri, Kec Teluk Ambon Baguala, AMBON 97231** Wolter Monginsidi Street No. 170 Gudang PLN Area Ambon, Lateri, Teluk Ambon Baguala District , AMBON 97231 Tel. : (0911) 3826179 Fax. : (0911) 3826179 Email : bartho.saly@yahoo.com
	Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Maluku Utara	

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
XII.	IKATAN KELUARGA PENSIUNAN LISTRIK NEGARA (IKPLN) PUSAT	**Gedung I Lt. 4 PT PLN (Persero) Kantor Pusat** **Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN** Building I. 4th Floor, PT PLN (Persero) Head Office Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Tel. : (021) 7261122, 7251234, Pest: 1919, 1691 Fax. : (021) 7227073
XIII.	DANA PENSIUN PLN	**Jl. Wolter Monginsidi Street No. 5 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN** Wolter Monginsidi Street No. 5 Kebayoran Baru SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7222867 (Hunting 4 nomor) Fax. : (021) 7255358, 7206019, 7231390 E-Mail: webmaster@dppln.co.id, Pelayanan@dppln.co.id
XIV	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO)	**Jl. Trunojoyo Street Blok M I/135, Building I 4th Floor, Kebayoran Baru-JAKARTA SELATAN** Trunojoyo Street Blok M I/135, Building I 4th Floor, Kebayoran Baru-SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7261875, 7261122, 7262234, Pest: 5563 Fax. : (021) 7221330
XV	SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN (STT - PLN)	**Kampus Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi Kotak Pos 6569/ JKBCK, CENGKARENG BARAT JAKARTA 11750** Campus Lingkar Luar Barat Street, Duri Kosambi Kotak Pos 6569/ JKBCK, CENGKARENG BARAT JAKARTA 11750 Tel. : (021) 5440342, 5440344 Fax. : (021) 5440343
XVI	DPP SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO	**Jl. Trunojoyo Street Blok M I/135 Building 1 3rd Floor Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN** Trunojoyo Street Blok M I/135 Building 1 3rd Floor Kebayoran Baru, SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7251846 Ext. 1700 Fax. : (021) 7251650 E-mail : dppsp@pln.co.id **JL. Trunojoyo Blok M I/135 Gedung 1 Lantai 9** Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN Trunojoyo Street Blok M I/135, Building 1, 9th Floor Kebayoran Baru, SOUTH JAKARTA Tel. : (021) 7250550 Ext. 1699

ENTITAS ANAK | SUBSIDIARIES

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
1	PT Indonesia Power	**Jl. Gatot Subroto Street Kav. 18, Jakarta 12950** Gatot Subroto Street Kav. 18, South Jakarta 12950 Telp. (021) 5267666 (Hunting), Fax. (021) 5252623 Jwot s : 161400, 161300 E-Mail : www.indonesiapower.co.id
2	PT Pembangkit Jawa Bali	**Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231** Ketintang Baru Street No. 11, Surabaya 60231 Telp (031) 8283180 (Hunting) Fax. (031) 8283183 Website : www.ptpjb.com
3	PT Indonesia Commets Plus	**Gedung Wisma Mulia Lt. 50-51 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta** Wisma Mulia Building. 50-51st Floor, Jend. Gatot Subroto Street No. 42 12710 Telp. (021) 5253019 (Hunting) Jwots : 12900 Fax. (021) 5253659 Jwots : 12264 E-mail : humas@iconpln.co.id Website : www.iconpln.co.id
4	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	**Jl. Engku Putri No. 3, Batam Centre Batam 29432** Engku Putri Street No. 3, Batam Centre, Batam 29432 Telp. (0778) 463150 s.d 463153 Fax. (0778) 463143 Website : http://www.plnbatam.com
5	PT Prima Layanan Nasional Enjinering	**Jl. K.S. Tubun I No. 2 Lt.2 Jakarta 11420** K.S. Tubun Street I No. 2, 2nd Floor, Jakarta 11420 Telp. (021) 5608918, 5608432, 5609044 Fax. (021) 5640132 E-mail : contact@pln-enjiniring.com Website : http://www.pln-enjiniring.com
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	**Jl. Pangeran Diponegoro Street No. 1, Tarakan , Kalimantan Utara 77114** Pangeran Diponegoro Street No. 1, Tarakan , North Kalimantan 77114 Telp. (0551) 35192, 21828, 22017 Fax. (0551) 34158, 21928 Email : spdtrk@telkom.net
7	PT PLN Batubara	**PT PLN (Persero) Kantor Pusat Gedung I Lantai 8** **Jl. Head Office Building I 8th Floor Trunojoyo Street Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan** Head Office Building I 8th Floor Trunojoyo Street Blok M I/135 Kebayoran Baru South Jakarta Telp . (021) 7206813, 7206814, 7206837 Fax : (021) 7206838 Website : kontak@plnbatubara.co.id
8	PT PLN Geothermal	**PT PLN (Persero) Kantor Pusat Gedung 1 Lantai 7** **Head Office, Building 1, 7th Floor Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160** Head Office, Building 1, 7th Floor Trunojoyo Street Blok M I/135, Kebayoran Baru South Jakarta 12160 Telp. (021) 7251234, 7261122 ext. 4171 Fax : (021) 7227063
10	PT Pelayanan Bahtera Adiguna	**Jl. Kalibesar Timur Street No. 10 – 12, Jakarta Barat 11110** Kalibesar Timur Street No. 10 – 12, West Jakarta 11110 Telp. (021) 6912547, 6912548, 6912549 Fax : (021) 6901450, 6902726 Email : pelba@bahteradhiguna.co.id Website : http://www.bahteradhiguna.co.id
11	PT Haleyora Power	**Pejaten Office Park Blok B** **Jl. Pejaten Office Park Block B Warung Buncit Raya Street No. 79, Pejaten Barat Jakarta Selatan** Pejaten Office Park Block B Warung Buncit Raya Street No. 79, West Pejaten South Jakarta Telp. (021) 79192517 Fax : (021) 79192516 Email : sekper@haleyora.co.id

ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA
ASSOCIATED ENTITIES AND JOINT VENTURE

No.	Kantor Cabang | Branch Offices	Alamat | Address
PERUSAHAAN ASOSIASI | AFFILIATED COMPANY		
1	PT Geo Dipa Energi	**Recapital Building 8th Floor** **Jl. Adityawarman Street Kav. 55, Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN** Recapital Building 8th Floor Adityawarman Street Kav. 55, Kebayoran Baru SOUTH JAKARTA Telp. (021) 7245673 (hunting) Fax. (021) 7247539 E-mail : pusat@geodipa.co.id
2	PT Mitra Energi Batam	**Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang KM3.5** **Panaran- Kepulauan Riau 29438, Indonesia** Lintas Gas Negara Street, Trans Barelang KM3.5 Panaran- Kepulauan Riau 29438, Indonesia Telp. +6278 3583331/32 Fax. +6278 3583333
3	PT Sumber Segara Primadaya	Office 8 Lantai 9 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B) Jakarta 12190
4	PT Dalle Energy Batam	**Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang KM3.5** **Panaran- Kepulauan Riau 29438, Indonesia** Office 8 9th Floor SCBD Lot 28 Jend. Sudirman Street Kav.52-53 (Senopati Raya Street No.8B) Jakarta 12190 Lintas Gas Negara Street, Trans Barelang KM3.5 Panaran- Kepulauan Riau 29438, ndonesia Telp. +6278 3583331/32 Fax. +6278 3583333
5	PT Tanjung Kasam Power	**Jl. Patimura, Sei Kasam Telaga Punggur, Batam- Kepulauan Riau 29467** Patimura Street, Sei Kasam Telaga Punggur, Batam- Kepulauan Riau 29467 Telp. +6278 8070196 Fax. +6278 8070 198
6	PT Energi Pelabuhan Indonesia	**Jl. Yos Sudarso No. 30 Jakarta Utara, cs@ecopowerport.co.id** Yos Sudarso Street No. 30, North Jakarta, cs@ecopowerport.co.id Pelayanan Administrasi: 021-4305052 Pelayanan Teknik: 021-4370510
PERUSAHAAN VENTURA | JOINT VENTURE COMPANY		
1	PT Unelec Indonesia	**Jl. Swadaya PLN, Klender Jakarta Timur13930** Swadaya PLN Street, Klender East Jakarta 13930
2	PT Rajamandala Electric Power	**Jl. PMI Building 2nd Floor, Wijaya I Street No.63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Jakarta 12170** PMI Building 2nd Floor, Wijaya I Street No.63 Kebayoran Baru – South Jakarta Jakarta 12170
3	PT Bajradaya Sentranusa	**Jl. Wijaya III Street No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170** Wijaya III Street No.5, Kebayoran Baru, South Jakarta 12170
4	PT Bukit Pembangkit Inovatif	**Gedung Graha Surveyor Indonesia, Lantai 17, Suite 1703** **Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta** Graha Surveyor Indonesia Building, 17th Floor, Suite 1703 Jend. Gatot Subroto Street Kav.56, Jakarta
5	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	**PLTU Tabjung Jati B Unit 3 dan 4, Tubana Village, Rembang, Jepara District, Jawa Tengah 59453** PLTU Tabjung Jati B Unit 3 dan 4, Tubana Village, Rembang, Jepara District, Central Jawa 59453 Telp (0291) 4270493, Fax (0291) 427060
6	PT Perta Daya Gas	**Patra Office Tower Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta Selatan 12950** Patra Office Tower. 2nd Floor, Jend. Gatot Subroto Street Kav.32-34, South Jakarta 12950
7	PT Indo Pusaka Berau	Jl. Pemuda No 356 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau - Kalimantan Timur Pemuda Street No 356, Tanjung Redeb, Berau District – East Kalimantan
8	PT Crompton Power Switchgear Indonesia	**Jl. Wijaya I No. 61, Kebayoran Bar, Jakarta Selatan 12170** Wijaya I Street No. 61, Kebayoran Baru, South Jakarta 12170 **Factory Office: (Correspondence)** **Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern Industri VI Blok A No.4** **Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten 42185** Factory Office: (Correspondence) Modern Industrial Complex, Cikande Modern Industri Street VI Blok A No.4 Nambo Ilir Village, Kibin Kabupaten District, Serang Banten 42185 Telp +62254 8408448 Fax +62254 8408848

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

Supporting Institutions and Professions in Capital Market

LEMBAGA PEMERINGKAT OBLIGASI

Perusahaan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk melakukan pemeringkatan terhadap obligasi dalam negeri PLN dan Moody's Investors Service, Fitch Rating dan Standar and Poor's Rating untuk pemeringkatan obligasi internasional PLN, dengan masing-masing alamat sebagai berikut:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp : (62-21) 7278 2380
Faks : (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel : +852 3758 1300
Fax : +852 3758 1644

Fitch Ratings Ltd
30 North Colonnade
London E14 5GN
Tel : +44 20 3530 1000
Fak : +44 20 3530 1500

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

BURSA EFEK

Obligasi dalam negeri PLN tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan obligasi luar negeri tercatat di The Singapore Exchange Limited, Singapura. Masing-masing perusahaan pencatat efek tersebut beralamat di:

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp : (65) 6236 8888
Faks : (65) 6535 6994

BOND RATING AGENCIES

The Company has commissioned PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) to conduct assessments on PLN's domestic bond. For PLN's international bond rating, the Company has commissioned Moody's Investors Service, Fitch Ratings, and Standard and Poor's Rating, with the addresses as follows:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City 17th floor
Asia Afrika Street Lot. 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telephone : (62-21) 7278 2380
Fax : (62-21) 7278 2370

Moody's Investor Service Hongkong Limited
24/F, One Pacifik Place, 88 Queesway
Hongkong
Tel : +852 3758 1300
Fax : +852 3758 1644

Fitch Ratings Ltd
30 North Colonnade
London E14 5GN
Tel : +44 20 3530 1000
Fak : +44 20 3530 1500

Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
12 Marina Boulevard
#23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3
Singapore 018982

STOCK EXCHANGE

PLN domestic bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, whereas its foreign bonds are listed in the Singapore Exchange Limited, Singapore. These securities registrar companies addresses are as follows:

Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building
Jend. Sudirman Street Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

The Singapore Exchange Limited
2 Shenton Way
#19-00 SGX Centre 1
Singapore 068804, Singapore
Telp : (65) 6236 8888
Faks : (65) 6535 6994

WALI AMANAT

PT CIMB Niaga Tbk
Gedung Graha Niaga Lt 20
Jln Jend. Sudirman Kav. 58Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro Lantai 14
Jln M.H Thamrin Blok B 1 No. 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15224

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN Lt. 18
Jl. Gajah Mada No. 1Jakarta – 10130

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

AKUNTAN PERUSAHAAN

KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Plaza Asia, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman No.59, Senayan
Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Jakarta 12190

NOTARIS

Lenny Janis, S.H.
Jalan Hang Lekir 9 Nomor 1 Jakarta 12120

Aryanti Artisari, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Kav 60 Jakarta Selatan 12190

Ati Mulyati, S.H., M.Kn
Cyber 2 Tower Lantai 22 E
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta selatan 12950

Yualita Widyadhari, S.H.,M.Kn
TCC Batavia Tower One Lantai 9 Suite 9
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat 10220

Imas Fatimah, S.H.
Graha MIK Lantai 5 Taman Perkantoran Kuningan
Jalan Setiabudi Selatan Kav 16-17

TRUSTEES

PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Building Floor 20
Jend. Sudirman Street Kav. 58Jakarta 12190

PT Bank Permata Tbk
Securities & Agency Operations
Permata Bank Tower 3 Bintaro 14th Floor
M.H Thamrin Blok Boulevard, B 1 No. 1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7
Tangerang 15224

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN Lt. 18
Jl. Gajah Mada No. 1Jakarta – 10130

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia Tower 1 Building, 5th Floor
Jend. Sudirman Boulevard , Kav. 52-53 Jakarta 12190

COMPANY ACCOUNTANT

KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Plaza Asia, 10th Floor
Jend. Sudirman Boulevard No.59, Senayan,
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12190
Kebayoran Baru, Kota South Jakarta, Jakarta 12190

PUBLIC NOTARY

Lenny Janis, S.H.
Hang Lekir 9 Street No 1, Jakarta 12120

Aryanti Artisari, S.H., M.Kn
Sudirman Tower18th Floor, Jenderal Sudirman Boulevard, Kav 60 South Jakarta 12190

Ati Mulyati, S.H., M.Kn
Cyber 2 Tower 22nd Floor E, H.R. Rasuna Said Boulevard, Blok X-5 No 13, Jakarta selatan 12950

Yualita Widyadhari, S.H.,M.Kn
TCC Batavia Tower One 9th Floor Suite 9,
K.H. Mas Mansyur Street, Kav 126, Jakarta Pusat 10220

Imas Fatimah, S.H.
Graha MIK 5th Floor Taman Perkantoran Kuningan,
Setiabudi Selatan Street, Kav 16-17

M. Nova Faisal, S.H., M.Kn
Cyber 2 Tower Lantai 22 E Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta selatan 12950

Zulkifli Harahap, S.H
Jalan R.S Fatmawati Nomor 15L Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Muhammad Hanafi, S.H
Komplek Rukan Tendean Square Nomor 26
Jl. Wolter Monginsidi Nomor 122-124 Kebayoran Baru, Jaksel 12170

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II Lantai 21 Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Feri Samad Law Firm
The Royal Palace Blok C#10,
Jalan Prof. Soepomo No. 178 A, Tebet Jakarta Selatan

Anullah & Partners
Sampoerna Strategic Square Tower B 19th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930

Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building 9th Floor,
Jalan Jend Gatot Subroto Kav 21 Jakarta 12930

Lubis Santosa dan Maramis
Equity Tower 12th Floor Sudirman
Central Business District (SCBD) Lot 9
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Lubis Ganie Surowidjojo
Menara imperium 30th Floor,
Jalan H.R Rasuna Said Kav 1 Kuningan Jakarta 12980

Ginting & Reksodiputro
The Energy Building, 15th Floor SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Hogan Lovells Lee & Lee
50 Collyer Quay #10-01 Oue Bayfront Singapore 049321

M. Nova Faisal, S.H., M.Kn
Cyber 2 Tower 22nd Floor E, H.R. Rasuna Said Boulevard, Blok X-5 No 13, South Jakarta 12950

Zulkifli Harahap, S.H
R.S Fatmawati Street No. 15L, Kebayoran Baru South Jakarta

Muhammad Hanafi, S.H
Tendean Square Office Complex, No 26
Wolter Monginsidi Street No 122-124, Kebayoran Baru, Jaksel 12170

LEGAL CONSULTANT

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II 21st Floor Sudirman Central Business District, Jendral Sudirman Boulevard Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Feri Samad Law Firm
The Royal Palace Blok C#10,
Prof. Soepomo Street No. 178 A, Tebet Jakarta Selatan

Anullah & Partners
Sampoerna Strategic Square Tower B 19th Floor
Jenderal Sudirman Boulevard, Kav 45-46, Jakarta 12930

Nah'r Murdono Law Office
Mitra Building 9th Floor,
Jend Gatot Subroto Boulevard, Kav 21, Jakarta 12930

Lubis Santosa dan Maramis
Equity Tower 12th Floor Sudirman
Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jend. Sudirman Boulevard, Kav 52-53, Jakarta 12190

Lubis Ganie Surowidjojo
Menara imperium 30th Floor,
H.R Rasuna Said Boulevard, Kav 1 Kuningan Jakarta 12980

Ginting & Reksodiputro
The Energy Building, 15th Floor SCBD Lot 11A
Jend. Sudirman Boulevard, Kav. 52-53 Jakarta 12190

Hogan Lovells Lee & Lee
50 Collyer Quay #10-01 Oue Bayfront Singapore 049321

Norton Rose Fullbright LLP
Equity Tower Level 33
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
Jalan Tulodong Bawah Blok D Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta selatan 12190

Rahmad Irwan & Partners
Gandaria 8 Office 15th Floor E
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Kantor Hukum Citra Lentera Hukum
Gedung Timah, Jalan Iskandarsyah I Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Kantor Hukum Karsa Mandiri
Gedung Kindo Lantai Dasar Suite 107
Jalan Duren Tiga Raya Nomor 101 Jakarta Selatan 12760

Janis & Associates
Menara Bidakara Lt 6 Suite 03-04,
Jalan Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Menteng Dalam,
Tebet Jakarta Selatan 12870

M. Sidik Latuconsina & Partners
Ruko Golden Boulevard Blok Q Nomor 8
Jl. pahlawan Seribu, BSD City Serpong Jakarta Selatan

Utomo Karim & Partners
Hanurata Graha 2th Floor,
jalan Kebon Sirih 67-69 Jakarta Pusat 10430

Rahayu & Rekan
Jl. l Gusti Ngurah Rai Blok B3 Nomor 09 Duren Sawit Jakarta Timur

Genta Darwin & Partners
Komp Ruko Mutiara Faza Blok RA-9, J
Jalan Comdet Raya Nomor 27 Jakarta Timur

Norton Rose Fullbright LLP
Equity Tower 33rd Floor
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jend. Sudirman Boulevard, Kav 52-53, Jakarta 12190

Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
Tulodong Bawah Street Blok D No 3, Kebayoran Baru
Jakarta selatan 12190

Rahmad Irwan & Partners
Gandaria 8 Office 15th Floor E
Sultan Iskandar Muda Street, Kebayoran Lama South Jakarta

Citra Lentera Hukum Law Office
Timah Building, Iskandarsyah I Street No 4, Kebayoran Baru, South Jakarta 12160

Karsa Mandiri Law Office
Kindo Building Ground Floor Suite 107,
Duren Tiga Raya Street No. 101, South Jakarta 12760

Janis & Associates
Bidakara Tower 6th Floor Suite 03-04,
Jend Gatot Subroto Boulevard, Kav 71-73, Menteng Dalam,
Tebet South Jakarta 12870

M. Sidik Latuconsina & Partners
Ruko Golden Boulevard Blok Q No 8,
Pahlawan Seribu Street, BSD City Serpong, South Jakarta

Utomo Karim & Partners
Hanurata Graha 2nd Floor,
Kebon Sirih Street No. 67-69, Central Jakarta 10430

Rahayu & Partners
l Gusti Ngurah Rai Street, Blok B3 No 09, Duren Sawit, East Jakarta

Genta Darwin & Partners
Mutiara Faza Office Complex Blok RA-9, Condet Raya Street No 27, East Jakarta

Akses Informasi

Access of Information

Seluruh informasi berkaitan dengan PT PLN (Persero) dapat diperoleh di:

Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero)
Jl. Trunojoyo Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax.+62 21 7221330
www.pln.co.id

Pada situs ini, PLN memberikan informasi yang mencakup aspek pelayanan pelanggan, info umum, info korporat dan hubungan investor.

MEDIA PUBLIKASI

1. Untuk Level Korporasi mencakup: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Company Profile, CSR, PLN Kita, majalah internal Fokus.
2. Untuk level Unit Bisnis mencakup: Yes,Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3BSumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA dan CAHAYA.
3. Untuk menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, Perseroan menyediakan fasilitas *website* mengenai upaya pemberantasan korupsi bekerja sama dengan TII (Transparansi Internasional Indonesia) yaitu: www.plnbersih.com.
4. Media Sosial, berupa twitter @pln_123, dan facebook: PLN123.

All information related to PT PLN (Persero) can be obtained at:

Corporate Secretary of PT PLN (Persero)
Trunojoyo Street Blok M I No.135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122
Fax.+62 21 7221330
www.pln.co.id

PLN provides information on the Company's website that includes aspects of customer service, general information, corporate information, and investor relations.

MEDIA PUBLICATIONS

1. For Corporation Level include: Annual Reports, Sustainability Reports, Company Profile, CSR, PLN Kita, internal magazine Focus.
2. For Business Unit level include: Yes, Saburai, Pelita Bertuah, INFO PJB, SULUHETAM, DAYA, Warta PLN 8, LMK, ICONEWS, Fokus, Tabaos, WARTA Serumpun Sebalai, P3B Sumatera, LISTRIK KITA, Floeksi, SULUH DEWATA and CAHAYA.
3. To demonstrate Company's commitment in improving the quality of corporate governance practices, the Company provide information on the website pertaining to the anti-corruption efforts in cooperation with TII (Transparency International Indonesia), namely: www.plnbersih.com.
4. Social Media: twitter @pln_123, and facebook: PLN123.

Situs Web PLN

PLN Website

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengadopsi peraturan-peraturan terkait yang ada. Salah satu peraturan yang diadopsi terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi perusahaan adalah Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

PT PLN (Persero) memiliki *corporate website* dengan alamat http://www.pln.co.id. PLN selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* PLN secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

Website ini menggunakan bahasa Indonesia. Website PLN secara garis besar dibagi menjadi 6 bagian besar yang terdiri dari:

1. Informasi terkait Pelanggan:
   Layanan Online, Listrik Pintar, Tarif Tenaga Listrik, Tanya Jawab Seputar Tarif Listrik, Uang Jaminan Langganan, dan Informasi P2TL.
2. Informasi terkait Hubungan Investor (Hubungan Investor):
   Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Statistik, RUPTL, 35.000 MW, IPP, ESSA, PLTU Batang, PLTU Indramayu, Proyek Jawa-Bali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), Sutet 500 KV Kendal, LARP Jawa-Bali 500 KV Crossing, IPTD II Loan IBRD, Investor Presentation, dan Request for Meeting.
3. Informasi tentang Media:
   Siaran Pers, Warta PLN, 35.000 MW, Profil Perusahaan, Video Berita, dan Istilah Kelistrikan.
4. Informasi tentang Supplier:
   Syarat Menjadi Vendor, Pengumuman, Portal E-Proc, Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa, Local Product Announcement, Pengadaan Batubara, Model PJBL PLTM, dan Pedoman penyambungan
5 Informasi terkait Profil Perusahaan (Tentang Kami):
   Profil Perusahaan, Good Corporate Governance, Struktur Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, Bisnis PLN, Unit PLN, Inovasi dan Penghargaan, Unit Note, Anak Perusahaan, PLN Peduli, Pedoman Perilaku, dan Whistleblowers System.
6. Informasi tentang keterbukaan informasi (KIP)
   Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik.

To comply with transparency principle in the management of the Company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adopted several pertaining regulations. One of the regulations adopted is the transparency on information delivery is FSA Regulation No. 8 / POJK.04 / 2015 concerning Website of Issuers or Public Listed Companies.

PT PLN (Persero) has a corporate website http://www.pln.co.id. PLN continually updates its corporate website to be more informative and convenient to access.

Website PLN is Indonesian and is categorized into six major sections consisting of:

1. Customer Related Information:
   Online Services, Listrik Pintar, Electrical Power Pricing, Questions & Answers Regarding Electricity Rates, Deposit Subscriptions and P2TL Information.
2. Investor Relations Related Information:
   Financial Statements, Annual Report, Statistics Report, RUPTL, 35,000 MW, IPPs, ESSA, Batang Steam Power Plant, Indramayu Steam Power Plant, Project Java-Bali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), SUTET 500 KV Kendal, LARP Java-Bali 500 KV Crossing , IPTD II IBRD Loan, Investor Presentation, and Request for Meeting
3. Information on Media:
   Press Releases, PLN News, 35,000 MW, Company Profile, Video News, and Electricity Terminology
4. Information on Suppliers:
   Vendor Prerequisites, Announcements, Portal E-Proc, Registration Suppliers of Goods / Services, Local Product Announcement, Coal Supply, Model PJBL micro hydro power plants, and Connection Guidelines
5 Company Profile Related Information (About Us):
   Company Profile, Good Corporate Governance, Corporate Structure, Board of Commissioners, the Board of Directors, PLN Business, PLN Unit, Innovation and Awards, Unit Note, Subsidiaries, PLN Peduli, Code of Conduct and Whistle blowers System.
6. Disclosure of Information (KIP)
   Public Information Services and List of Public Information.

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015, *website* korporat PLN telah mencakup 4 (empat) bagian utama informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, yaitu:

a. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
b. Informasi bagi pemodal atau investor
c. Informasi tata kelola perusahaan, dan
d. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, website PLN juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam kelistrikan dan lain-lain yang terkait dalam bisnis PLN.

In accordance with POJK 8 / POJK.04 / 2015, PLN's corporate website comprises four (4) primary category of information that must be published on the Company's website, namely:

a. General information regarding Issuer or Public Listed Company;
b. Information for financiers or investors
c. Corporate governance information, and
d. Information on corporate social responsibility

Moreover, PLN website also contains other information that could serve as additional knowledge on the subject of electricity terminology and other information on PLN business.

03

TINJAUAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Plan, Policy, and Strategy Review

196 Tinjauan Rencana, Kebijakan dan Strategi
Plan, Policy, and Strategy Review

197 Aspirasi Jangka Panjang
Long Term Ambition

198 Arah Strategis Jangka Panjang
Long Term Strategic Direction

201 Tujuan Strategis
Strategic Objectives

202 Strategi Utama Perusahaan
Primary Strategy Of The Company

203 Program Pengembangan Usaha
Business Development Program

203 Latar Belakang
Background

204 Strategi Pengembangan Usaha Tahun 2016
2016 Business Development Strategy

205 Tantangan Perusahaan
Challenges For The Company

207 Sasaran Strategis 2016
2016 Strategic Target

207 Program Prioritas
Priority Programs

210 Langkah-Langkah Strategis Yang Telah Dijalankan
Implemented Strategic Measures

211 Keselarasan Program Pembangunan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang
Alignment Of Short-Term And Long-Term Development Programs

214 Pengembangan Anak Usaha
Development Of Subsidiaries

214 Pengembangan Organisasi
Organizational Development

215 Roadmap Organisasi Tahun 2015-2019
2015-2019 Organizational Roadmap

216 Pencapaian Program Organisasi
Achievement Of Organizational Program

218 Struktur Organisasi Baru PLN Menjamin Kesuksesan Konstruksi Pembangkit 35.000 MW
New Pln Organizational Structure Securing The Success Of The 35,000 MW Power Plant Constructions

221 Rencana Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Powerplant Infrastructure Facility Development Plan

221 Perencanaan Pembangunan Pembangkit
Powerplant Development Plan

226 Tantangan Program 35.000 MW
35,000 MW Program Challenges

227 Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
Development Of New Renewable Energy

230 Perencanaan Pengembangan Sistem Transmisi Dan Distribusi
Transmission System Development Planning And Distribution

233 Pengembangan Transmisi Dan Gardu Induk
Transmission And Substation Development

233 Program Pengembangan Sistem Transmisi
Transmission System Development Program

235 Program Pengembangan Sistem Distribusi
Distribution System Development Program

237 Terang dengan Pembangkit Terapung
Lighting with Floating Power Plants

Tinjauan Rencana, Kebijakan dan Strategi

Plan, Policy, and Strategy Review

Rencana strategis jangka panjang yang dikembangkan oleh PLN merupakan upaya untuk menjadikan Perseroan sebagai entitas korporasi yang sehat secara finansial dan berkembang sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan.

The Long-term strategic plan formulated by PLN is an effort to construct a financially healthy and expanding corporation in line with the vision and mission of the Company.

ASPIRASI JANGKA PANJANG

Aspirasi jangka panjang PT PLN (Persero) adalah menuju "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

1. Kelas Dunia

Pada fungsi-fungsi utamanya untuk menjadi perusahaan kelas dunia, PLN harus berada pada kelompok 35% *best performance* dunia dalam hal kinerja operasi pembangkitan, transmisi dan distribusi pada akhir tahun 2022. Peningkatan kinerja operasi ditargetkan mencapai 25% terbaik Dunia pada tahun 2025 berdasarkan Global Competitiveness Index dari World Economic Forum.

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memperbaiki keandalan, efisiensi, dan produktivitas pegawai. Sedangkan pada fungsi pendukung seperti proses bisnis, PLN sebagai perusahaan kelas dunia harus menerapkan proses bisnis kelas dunia, antara lain dalam hal pengadaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan manajemen aset.

Salah satu strategi untuk mencapai kelas dunia, PLN harus mampu mengambil manfaat dari besarnya skala ekonomi pengadaan dan penggunaan prinsip T*otal Cost of Ownership* (TCO) untuk mendapatkan harga dan kualitas yang lebih baik. Begitu juga dalam hal manajemen aset, optimalisasi investasi, dan kemampuan mengeksekusi proyek-proyek skala besar.

2. Menguntungkan

Selain menjadi perusahaan kelas dunia, PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu diperlukan margin keuntungan (*Return On Asset*) yang dapat memastikan PLN untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan *stakeholders*.

3. Ramah Lingkungan

PLN harus ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang sehat, memanfaatkan energi tebarukan yang fokus pada pengembangan *geothermal* dan pemanfaatan energi air. Energi batu bara tetap menjadi andalan utama PLN, namun ke depan diupayakan menggunakan teknologi pemanfaatan batu bara yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan.

Program *clean coal* yang akan dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi *coal upgrading* untuk mendapatkan batu bara dengan kualitas yang lebih baik. Di samping itu, PLN akan memulai inisiatif implementasi *smart grid* dan akan memperluas penerapannya apabila diperlukan.

LONG TERM ASPIRATION

The long term ambition of PT PLN (Persero) is to become "A World Class Company, both Profitable and Trusted by its Customers, in an Environmentally Friendly and Safe Manner".

1. World Class

In order to become a world class company, PLN must stand among the top 35% of the world's best performing companies in terms of electricity generation, transmission and distribution by the end of 2022. With the improvement of operational performance, the target is to be among the top 25% of the world's best performing companies by 2025, based on the World Economic Forum's Global Competitiveness Index.

This can be achieved by improving staff capability, efficiency and productivity. Meanwhile, in relation to supporting functions such as business processes, as a world class company PLN must implement world class business processes, such as in procurement, optimization of information technology and asset management.

As one of the strategies to achieve world class status, PLN must take advantage from economies of scale and the TCO (Total Cost Ownership) principle to deliver a better price and better quality, in addition to global best asset management, investment optimization, and capability to implement large-scale projects.

2. Profitable

In addition to becoming a world class company, PLN needs to have financial capability and independence. Therefore, it is required to have margins (such as Return on Assets) that will ensure the Company's growth and sustainability in line with stakeholder demands.3. Environmentally Friendly

3. Enviroment Freindly

PLN must also take responsibility to preserve environment, utilize renewable energy, and focus on the development of geothermal and hydropower energy. Coal energy remains as PLN's mainstay, but future efforts will concentrate on more environmentally friendly and cleaner coal technology.

The clean coal program will be developed by utilizing upgraded coal technology to obtain coal with better quality. In addition, PLN will commence the implementation of its smart grid initiative, and will expand its application if necessary.

4. Aman

Pada akhirnya yang paling penting adalah faktor keamanan (*safety*). PLN memiliki jumlah pegawai lebih dari 40.000 pegawai sehingga perusahaan harus memperhatikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dengan tidak terjadi kecelakaan kerja (*Zero accident*), termasuk keamanan terhadap masyarakat sekitar aset operasional (lingkungan).

Dalam rangka mewujudkan aspirasi jangka panjang perusahaan perlu ditetapkan prioritas-prioritas kegiatan yang mampu mendukung pencapaian *roadmap* Visi perusahaan tahun 2025. Sesuai dengan pentahapan pencapaian Visi perusahaan, untuk tahap 2015-2019 ditetapkanlah prioritas jangka panjang sebagai berikut:

a. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009 dan PP No.14 Tahun 2012 (telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2014) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
b. Mempertahankan kecukupan pasokan daya dan menciptakan sistem ketenagalistrikan yang efisien termasuk melibatkan partisipasi konsumen melalui Demand Side Management.
c. Meningkatkan kesehatan keuangan PLN.
d. Mempersiapkan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan termasuk organisasi, budaya, manajemen kinerja serta ketersediaan tenaga kerja.
e. Meningkatkan efisiensi internal perusahaan dalam rangka optimalisasi BPP dan antisipasi penerapan PBR.
f. Memastikan ketersediaan pasokan energi primer dalam rangka optimalisasi bauran energi.

4. Safety

Finally, safety is the most important factor. PLN has more than 40,000 employees; hence the Company must pay attention to the health and safety (K3) of its employees to achieve Zero Accidents, as well as safety for the public who are in the vicinity of operational assets.

In order to achieve long-term objectives, the Company has set priorities for action that will support the achievement of the Company's 2025 Vision Roadmap. In accordance with the Company's phased vision achievements, the long-term priorities for 2015-2019 include:

a. Following through on the enactment of Law No. 30 of 2009 and Government Regulation No. 14 of 2012 (as amended to Government Regulation No. 23 of 2014) on Electricity Supply Business Activities.
b. Maintaining adequate power supplies and creating an efficient electricity system, including inviting customers to participate in efficiency programs through Demand Side Management.
c. Improving financial soundness.
d. Preparing Company readiness to address challenges relating to organization, culture, performance management, and labor availability.
e. Improving internal efficiency in order to optimize the cost of supply.
f. Ensuring the availability of primary energy in order to optimize the fuel mix.

ARAH STRATEGIS JANGKA PANJANG

"Memastikan pencapaian aspirasi jangka panjang Perseroan menjadi salah satu perusahaan kelistrikan berkelas dunia dan dicintai pelanggan dengan mengenali kendala-kendala yang dihadapi, menetapkan serangkaian inisiatif strategis serta menjalankan program prioritas sesuai kondisi yang dihadapi dengan mengedapankan pengelolaan yang berkualitas."

PLN telah menyiapkan rencana strategis pengembangan usaha dalam jangka panjang, yaitu menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial agar berinvestasi untuk mempertahankan market share dan berkembang sesuai kaidah-kaidah korporasi.

Selain kondisi keuangan yang sehat, PLN juga harus efisien dan dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan serta didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai Good *Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC) dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian,

LONG TERM STRATEGIC DIRECTION

"Ensuring the achievement of the Company's Long-Term Development Roadmap to be one of the world class electricity companies and loved by customers, by recognizing obstacles, implementing a series of strategic steps, and implementing priority programs based on the current business situation with a priority on quality management."

PLN has prepared a long-term strategic development business plan to establish a financially sound corporate entity and then invest in order to maintain and develop market share based on corporate principles.

In addition to having a sound financial condition, PLN should operate efficiently and be able to achieve reliable standards based on consumer expectations. These services should be supported by highly competent HR who have high competencies and attitudes based on Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct (CoC) in all

perusahaan dapat menjalankan misinya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah strategis perusahaan untuk 10 tahun mendatang dibagi menjadi dua bagian: masa tumbuh (*growth*) pada periode 2015-2019, dan masa ekselen (*excellence*) pada periode 2020-2025.

Penjelasan ringkas *Roadmap milestone*, rincian arah strategis dan Visi Perusahaan untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

Masa Tumbuh (Growth) 2015-2019

Masa tumbuh ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 50% perusahaan listrik terbaik di dunia. Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani".

Perspektif capaian mencakup:

a. Keuangan dan Pasar

- Keuangan sehat
- Dipercaya investor dan lembaga keuangan
- Subsidi plus marjin wajar, pada kelompok pelanggan tertentu
- Automatic *tariff adjustment* dan sistem tarif baru diterapkan
- Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik makin optimal.

b. Produk dan layanan

Keandalan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) pada level baik.

c. Pelanggan

- Kepuasan pelanggan pada level baik
- Komposisi pelanggan semakin baik

d. SDM

- Jumlah SDM mencukupi dan komposisi SDM baik
- Kompetensi SDM meningkat melalui *Talent Management*
- Knowledge Management berjalan baik

e. Proses bisnis internal:

- Defisit pasokan listrik terselesaikan (kapasitas bertambah signifikan, mengimbangi permintaan)
- Pasokan energi primer terjamin
- EAF pada level baik
- Persentase produksi oleh BBM menurun
- Susut jaringan pada level baik
- Teknologi informasi yang terintegrasi
- *Zero accident*
- Baku mutu lingkungan hidup sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup

business operations. Hence, the Company can deliver its mission as a contributor to the economic growth.

The Company's ten-year strategic roadmap is divided into two phases: the growth phase for the period of 2015-2019, and the excellence phase for the period of 2020-2025.

A brief summary on Roadmap Milestone, details on the Company's plans and vision for each period is as follows:

Growth Phase 2015-2019

The growth phase of PLN is marked by the effort to be one of the top 50% of electricity companies in the world. The vision enlargement to achieve that objective is "To be acknowledged as a Growing, Superior, and Trusted World-Class Company, Supported by its Competent Human Resources".

This objective includes:

a. Financial and Market Share

- Financial health
- Trusted by investors and financial institutions
- Fair subsidies and margins for specific groups of customers
- Implementation of automatic tariff adjustment and new tariff system
- Optimize cost of electricity supply.

b. Products and Services

The reliability of the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) is at a good level.

c. Customers

- Customer satisfaction at a good level
- Better customer composition.

d. Human Resources

- Workforce total and composition at the proper level
- Improved HR competency through Talent Management
- Well implemented Knowledge Management.

e. Internal business processes:

- Deficit of electricity supply has been resolved (significant increase in capacity, meeting the demand)
- Assured supply of primary energy
- EAF at a good level
- Diminishing percentage of fuel for electricity production
- Network losses at a good level
- Integrated information technology
- Zero accidents
- Environmental quality in accordance with the standards of the Ministry of the Environment.

f. *Leadership*
- *Good Corporate Governance* berjalan baik
- Menjadi *Emerging Industry Leader* dengan *score* Malcom Baldrige minimal 576 (tahun 2015) dan Industry Leader (tahun 2017)

Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:
- *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU: Tahap awal 82% kemudian menjadi 79%
- Susut Jaringan: Tahap awal 9,77% kemudian menjadi 8,72%
- SAIDI: Tahap awal 1.539 menit/pelanggan/tahun kemudian, menjadi 850 menit/pelanggan/tahun
- SAIFI: Tahap awal 15,5 kali/pelanggan/tahun kemudian, menjadi 8,7 kali/pelanggan/tahun

Masa Ekselen (*Excellence*) 2020-2025

Masa Ekselen ditandai dengan upaya pencapaian posisi PLN sebagai salah satu dari 35% perusahaan listrik terbaik di dunia pada tahun 2022, untuk kemudian menjadi 25% perusahaan listrik terbaik dunia di akhir periode (2025). Pengembangan visi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah "Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani" untuk tahap pertama. Selanjutnya pada tahap selanjutnya, visi berubah menjadi "Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman".

Perspektif capaian mencakup:

a. Keuangan dan Pasar
- Keuangan sangat sehat
- Kemandirian bisnis dan finansial
- Subsidi sangat terbatas dan langsung kepada pelanggan
- Tarif memenuhi *revenue requirement* untuk investasi dan operasi
- Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang optimal karena proses efisiensi

b. Produk dan layanan
- Keandalan (SAIDI dan SAIFI) pada level sangat baik

c. Pelanggan
- Kepuasan pelanggan pada level sangat baik
- Komposisi pelanggan menguntungkan

d. SDM
- Struktur organisasi efektif (*lean, clean, vertical* and h*orizontal alignment, adaptive, responsive*)
- Kompetensi SDM dapat memenuhi kebutuhan perusahaan melalui *Talent Management* yang baik
- Inovasi berjalan baik

f. Leadership
- Well implemented Good Corporate Governance
- Becoming an Emerging Industry Leader with a minimum of 576 Malcolm Baldrige score (in 2015) and Industry Leader (in 2017).

The KPIs used as criteria for becoming a "World Class" vision are:
- Equivalent Availability Factor (EAF) of Steam Power Plant: 82% for the early stage, change to 79%
- Network Losses: 9.77% in the early stage, decreased to 8.72%
- SAIDI: 1,539 minutes/customer/year in the early stage, to 850 minutes/customer/year
- SAIFI: 15.5 times/customer/year, to 8.7 times/customer/year.

Excellence Phase 2020-2025

The excellence phase is marked with PLN's attempt to be one of the top 35% of the best electricity companies in the world in 2022, and then become one of the top 25% of the best electricity companies in the world at the end of this period (2025). The goal during the first period of this phase is "To be Acknowledged as a Growing, Superior and Trusted World-class Company, Supported by its Competent Human Resources". The second goal is to become a "A World Class Company, which is Profitable and Loved by the Customers, in an Environmentally Friendly and Safe Manner."

The achievement perspectives include:

a. Financial and Market Share
- Very healthy financial conditions
- Business and financial independence
- Very limited and direct subsidies to the customers
- Tariff meeting the revenue requirement for investment and operations
- Optimize cost of electricity supply due to efficiency processes

b. Products and Services
- Reliability (SAIDI and SAIFI) at a very good level

c. Customers
- Customer satisfaction at a very good level
- Profitable customer composition

d. Human Resources
- Effective organizational structure (lean, clean, vertical and horizontal alignment, adaptive, and responsive)
- HR competence is able to meet the needs of the Company through proper talent management
- Well implemented innovations

e. Proses Bisnis Internal

- The biggest player, mengontrol 90% kapasitas pembangkitan nasional
- Pasokan energi primer terjamin
- EAF pada level sangat baik di Asia dan dunia
- Susut jaringan pada level sangat baik
- *IT – Based Organization*
- Teknologi ramah lingkungan dan penggunaan *renewable energy*
- Implementasi *smart grid* semakin efektif

f. Leadership

- GCG berjalan sangat baik
- Menjadi Benchmark Leader (tahun 2022) berdasarkan kriteria Malcolm Baldridge/KPKU

Ukuran KPI Visi "Kelas Dunia" yang dijadikan rujukan adalah:

1. EAF PLTU: Lebih besar dari 79%
2. Susut Jaringan: Lebih kecil dari 8,45%
3. SAIDI: Lebih kecil dari 488 menit/pelanggan/tahun
4. SAIFI : Lebih kecil dari 5 kali/pelanggan/tahun

TUJUAN STRATEGIS

Arah strategis perusahaan 10 tahun mendatang untuk masa tumbuh (*growth*) dan masa ekselen (*excellence*) tersebut di atas dijabarkan ke dalam Tujuan Strategis Perusahaan dengan menggunakan pendekatan 6 perspektif *results* Malcolm Baldrige, yang terdiri dari: Perspektif Produk dan Layanan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Keuangan dan Pasar, Perspektif Sumber Daya Manusia, Perspektif Proses Bisnis Internal dan Perspektif Kepemimpinan, dengan rincian tujuan sebagai berikut:

1. Perspektif Produk dan Layanan (P)
   P1. Tenaga Listrik yang Andal dan Berkualitas
2. Perspektif Pelanggan (C)
   C1. Kepuasan Pelanggan
   C2. Penambahan Pelanggan Baru
   C3. Citra
3. Perspektif Keuangan dan Pasar (F)
   F1. Kesehatan Keuangan
   F2. BPP dan Tarif yang Optimal
   F3. Efisiensi Operasi dan Investasi
   F4. Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik
4. Perspektif Sumber Daya Manusia (S)
   S1. Kualitas dan Kuantitas SDM
   S2. Efektivitas Organisasi dan Sistem SDM
5. Perspektif Proses Bisnis Internal (B)
   a. B1. Bidang Energi Primer:
      B1.1. Ketersediaan Bahan Bakar
      B1.2. *Fuel Mix*
   b. B2. Bidang Pembangkitan
      B2.1. Penambahan Kapasitas
      B2.2. Kesiapan Pembangkit
   c. B3. Bidang Transmisi dan Distribusi
      B3.1. Efisiensi Operasi
      B3.2. Penambahan Transmisi dan Distribusi yang Optimal dan Berbiaya Rendah

e. Internal Business Process

- The biggest player, controlling 90% of the national power generation capacity
- Assured supply of primary energy
- EAF at a very good level in Asia and the world
- Network losses at a very good level
- IT – Based Organization
- Environmentally friendly technology and the utilization of renewable energy
- More effective implementation of smart grid

f. Leadership

- Very good implementation of GCG
- To become the Benchmark Leader (2020) based on the Malcolm Baldrige/ KPKU criteria.

The KPIs used as criteria for the "World Class" Vision are:

- EAF of Steam Power Plant: Greater than 79%
- Network Losses: Less than 8.45%
- SAIDI: Less than 488 minutes/customer/year
- SAIFI : Less than 5 times/customer/year

STRATEGIC OBJECTIVES

The strategic direction of the Company in the next 10 years for the growth phase and excellence phase is elaborated in the Strategic Objectives of the Company that utilizes the 6 perspective approaches of Malcolm Baldrige results, consisting of: Products and Services Perspective, Customer Perspective, Financial and Market Perspective, Human Resources Perspective, Internal Business Process Perspective, and Leadership Perspective, with the following objective details:

1. Products and Services Perspective (P)
   P1. Reliable and Quality Electricity
2. Customers Perspective (C)
   C1. Customer Satisfaction
   C2. Addition of New Customers
   C3. Image
3. Financial and Market Perspective (F)
   F1. Financial Soundness
   F2. Optimal Cost of Supply and Tariff
   F3. Efficiency of Operations and Investment
   F4. Growth in Electricity Sales
4. Human Resources Perspective (S)
   S1. HR Quality and Quantity
   S2. HR Organization and System Effectiveness
5. Internal Business Process Perspective (B)
   a. B1. Primary Energy Sector:
      B1.1. Fuel Availability
      B1.2. Fuel Mix
   b. B2. Power Plant Sector
      B2.1. Addition of Capacity
      B2.2. Power Plant Readiness
   c. B3. Transmission and Distribution Sector
      B3.1. Operational Efficiency
      B3.2. Optimized and Low Cost Additional Transmission and Distribution

d. B4. Sistem Pendukung:
   B4.1. Efisiensi Pengadaan dan Konstruksi
   B4.2. Manajemen *Stakeholder* dan Regulasi
   B4.3.Peningkatan Pemanfaatan IT dan Teknologi Ketenagalistrikan
   B4.4. Lingkungan dan Keselamatan Ketenagalistrikan
e. Perspektif Kepemimpinan (L)
   L1. Implementasi GCG dan Hukum
   L2. Implementasi ERM
   L3. Perbaikan Kinerja Proses dan Hasil

STRATEGI UTAMA PERUSAHAAN

Dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan, PLN telah menetapkan delapan strategi utama perusahaan; lima strategi berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua strategi sebagai *enabler*, dan satu strategi sebagai *ultimate result* dari strategi lainnya. Delapan strategi utama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Mengoptimalkan Ekspansi Kapasitas dan Pembiayaan**
   Tujuan strategis dimensi kapasitas dan pembiayaan adalah untuk optimalisasi ekspansi kapasitas berikut bauran bahan bakarnya dengan biaya terendah dan meningkatkan peluang untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan.

2. **Mengoptimalkan Biaya Energi Primer**
   Strategi utama ini bertujuan untuk: (i) memastikan memperoleh harga energi primer terendah atau sesuai keekonomiannya tanpa mengabaikan kualitasnya, dan (ii) mengamankan kecukupan pasokan energi primer.

3. **Melanjutkan *Operational Excellence***
   Tujuan strategis pada *operational excellence* adalah mendorong pelaksanaan operasional menuju pada tingkat layanan kelas dunia dengan memaksimalkan nilai tambah aset baik dari aspek efektivitas biaya, operasi & pemeliharaan, tingkat layanan dan ketersediaan kapasitas. Berdasarkan evaluasi kondisi saat ini, potensi nilai yang signifikan telah diidentifikasi dan diimplementasikan untuk masing-masing area dalam proses *Value Chain* - pembangkitan, transmisi dan distribusi.

4. **Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence***
   Tujuan dari *Procurement and Construction Excellence* adalah meminimalkan *Total Cost of Ownership* (TCO), menurunkan dan mengoptimalkan biaya barang dan jasa serta memastikan pelaksanaan konstruksi yang tepat waktu dan memenuhi kualitas. Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan pendekatan pengadaan dalam skala besar (*joint inventory and joint Procurement*) dan mengadopsi pendekatan TCO. Pelaksanaan konstruksi dilakukan melalui pengendalian dan supervisi yang didukung oleh SDM yang memadai dan kompeten serta berbasis teknologi informasi.

d. B4. Supporting System
   B4.1. Procurement and Construction Efficiency
   B4.2. Stakeholder and Regulation Management
   B4.3. Increasing Utilization of Information Technology and Electricity Technology
   B4.4. Environmental and Electrical Safety
e. leadership Perspective (L)
   L1. GCG and Legal Implementation
   L2. ERM Implementation
   L3. Improvement of Performance Process and Results.

PRIMARY STRATEGY OF THE COMPANY

In order to achieve the Company's strategic objectives, PLN has established eight main strategies; five strategies related to the core business function two strategies as enabler, and one strategy as an ultimate result of other strategies. The eight primary strategies are as follows:

1. **Optimizing the Capacity and Funding Expansion**
   The strategic goal of capacity and funding dimension is to optimize capacity expansion as well as fuel mix at the lowest cost and to increase opportunities in order to obtain the needed funding sources.

2. **Optimizing the Cost of Primary Energy**
   This primary strategy aims to: (i) ensure and obtain the lowest cost for primary energy or based on the economical price without neglecting quality, and (ii) secure a sufficient supply of primary energy.

3. **Maintaining Operational Excellence**
   The strategic objective of operational excellence is to encourage operational implementation towards a world class service level by maximizing the value of added assets in terms of cost effectiveness, operation & maintenance, level of service, and available capacity. Based on the evaluation of the current conditions, the potential of significant value has been identified and implemented in each area of the Value-Chain process, in power plant, transmission and distribution.

4. **Maintaining Procurement and Construction Excellence**
   The objectives of Procurement and Construction Excellence are to minimize the total cost of ownership (TCO), to reduce and optimize the cost of goods and service and as well as to assure punctual and good quality of construction implementation. The procurement of goods and services will be implemented through a large scale procurement approach (joint inventory and joint Procurement) and adopting the TCO approach. Construction execution is conducted through control and supervision by adequate and competent Human Resources as well as information that is technology-based.

5. **Melanjutkan *Commercial Excellence***
   Tujuan strategis dari *Commercial Excellence* adalah mengembangkan pilihan-pilihan tingkat pelayanan untuk meningkatkan pendapatan.

6. **Meningkatkan Manajemen *Stakeholders* dan *Regulatory***
   Tujuan strategis dari manajemen *stakeholders* dan *regulatory* ini adalah untuk bersama-sama membentuk industri kelistrikan nasional dengan fokus kepada pembentukan fungsi regulasi dan pengimplementasian undang-undang ketenagalistrikan.

7. **Melanjutkan Budaya Kinerja Tinggi dan Kepemimpinan**
   yang Kuat Tujuan dari strategi utama ini adalah: i) menjalankan visi korporat, ii) membangun budaya Kinerja Unggul, iii) mengembangkan generasi untuk masa depan, iv) mengimplementasikan Enterprise Risk Management (ERM), v) kepemimpinan yang kuat dalam eksekusi.

8. **Meningkatkan Pembentukan Citra yang Positif**
   Inti pembentukan citra positif perusahaan dan mendapatkan kepercayaan pelanggan adalah terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan stakeholders.

Lima strategi utama pertama diharapkan akan memberikan hasil yang terukur dan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan keberhasilan strategi enabler dan infrastruktur pendukung lainnya meskipun tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan PLN namun kesuksesannya akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan lima strategi utama.

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

Merealisasikan Program 35.000 MW beserta sarana pendukungnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagai salah satu jalan memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik, tercapainya keandalan dan kualitas listrik yang semakin baik serta mewujudkan arah strategis perusahaan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial.

LATAR BELAKANG

Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah membuka peluang bagi BUMN di luar PLN, swasta, koperasi, bahkan LSM untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Menurut undang-undang tersebut, PLN tidak lagi sebagai perusahaan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum.

5. **Maintaining Commercial Excellence**
   The objective of Commercial Excellence is to develop service levels to increase income.

6. **Improving Stakeholders and Regulatory Management**
   The objective of Stakeholder and Regulatory Management is to make a national electricity industry together by focusing on the establishment of regulatory functions and the implementation of new electricity laws.

7. **Maintaining Strong Working Culture and Leadership**
   The objectives of this main strategy are: i) implementing the corporate vision, ii) developing a Superior Performance culture, iii) developing the future generation, iv) implementing Enterprise Risk Management (ERM), v) strong leadership in execution.

8. **Improving Positive Corporate Image**
   The core of creating positive corporate image and obtaining customer trust is building good relationships and communication between the Company and its stakeholders.

The first five strategies are expected to give measurable results and directly affect the Company's financial performance, while the success of the enabler strategic initiatives and other supporting infrastructures although not directly affecting PLN's financial performance, they will be important to assure the success of the five main strategic initiatives.

BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM

Realizing the 35,000 MW Program as well as its supporting infrastructure as stated in the Presidential Regulation No. 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development as a means to fulfill the needs for electricity capacity, the accomplishment of a better electricity reliability and quality, as well as realizing the Company's strategic directions to become a financially sound corporate entity.

BACKGROUND

Through the Law No. 30 of 2009 on Electricity, the government provided the opportunities for SOEs other than PLN, private enterprises, cooperatives, even NGOs to provide electricity for the public interest. Based on that law, PLN is no longer the only authorized company in electricity provision (PKUK), but as a permit holder of providing electricity (IUPTL) for the public interest.

Gambaran mengenai usaha kelistrikan sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, sebagai berikut:

An overview of the electricity business prior and after the enactment of Law No. 30 of 2009 is as follows:

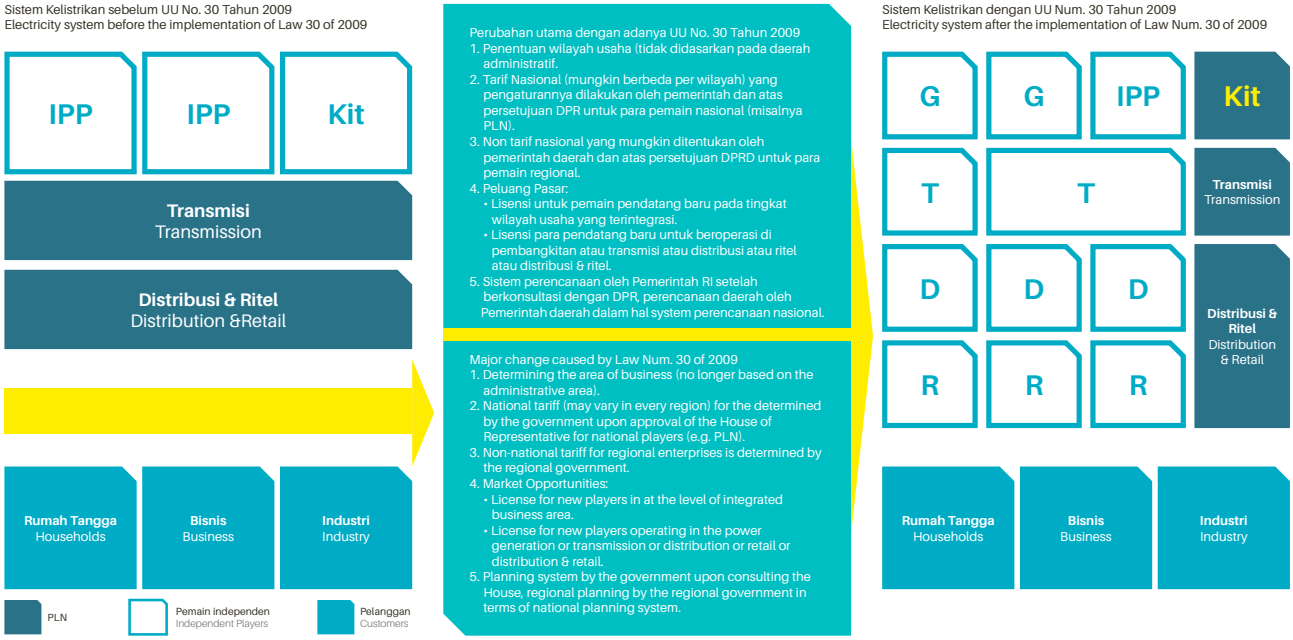

Sebagai tindak lanjut dan pedoman pelaksanaan undang-undnag tersebut, maka pada 24 Januari 2012 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 (telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2014) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui kebijakan tersebut, harga sewa serta perjanjian kerja sama bisnis usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tergantung pada cakupan wilayah usaha.

As a follow up and guideline to the implementation of Law No. 30 of 2009, on 24 January 2012 the Government Regulation No. 14 of 2012 was issued (now revised as Government Regulation No. 23 of 2014) on Electrical Power Provision Business Activities. Through this policy, the rent price and business agreement on the provision of electricity to the public will be regulated under the permission of the National Government or the Regional Government, depending on the coverage area of the business.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TAHUN 2016

"Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan menyusun prioritas kegiatan sesuai rencana strategis jangka pendek untuk memastikan tercapainya tujuan pengembangan usaha dan terlaksananya amanat Program 35.000 MW."

2016 BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

"Identifying the obstacles and prioritizing activities according to the short-term strategic plan, to ensure the achievement of business development goals and the implementation of the 35,000 MW program mandate."

Strategi usaha yang dijalankan di tahun pelaporan 2016 pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan strategi pengembangan usaha jangka menengah dan jangka panjang. Tahun 2016 masih merupakan Periode Pertumbuhan, dimana pada masa tersebut masih banyak program-program investasi yang harus direalisasikan. Selain realisasi investasi, Perseroan masih menjalankan berbagai perbaikan internal, meliputi: perbaikan kondisi keuangan, pemenuhan SDM, perbaikan pengelolaan organisasi, penerapan program berkelanjutan *Operasional Performance*

The business strategy undertaken in the 2016 reporting year was part of the implementation of the medium-term and long-term business development strategy. 2016 was a growth period, during which many investment programs had to be realized. In addition to the realization of these programs, the Company conducted various internal improvements, including: improvement of the financial situation, fulfillment of workforce requirements, improvement of organizational management, implementation of a sustainable Operational Performance Improvement (OPI) program in the fields of

Improvement (OPI) di bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan sebagainya. Selain perbaikan kondisi internal, Perseroan juga harus memperhatikan dengan seksama kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi hasil-hasil operasional yang telah dijalankan.

power plants, transmission, distribution, and others. In addition to improving internal conditions, the Company also considered those external factors that may have affected the results of implemented programs.

Perseroan sebetulnya telah memperhitungkan dengan seksama perkembangan eksternal maupun internal dalam menyusun asumsi-asumsi yang kemudian dijadikan landasan penyusunan target capaian, kerangka strategi dan program kerja yang akan dijalankan. Namun demikian, adakalanya kondisi-kondisi tersebut mengalami perubahan sehingga implementasi strategi dalam jangka pendek akan selalu ditinjau sesuai kondisi yang dihadapi.

The Company carefully considered the external and internal developments in formulating assumptions used as the basis for formulating achievements, the strategic framework, and work programs that will be implemented. Nevertheless, it was imperative to closely monitor conditions and adjust the implementation of the short-term strategy.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan tenaga listrik serta meningkatkan kualitas dan jangkauan distribusi tenaga listrik. Sejak tahun 2015 PT PLN (Persero) telah berkomitmen untuk merealisasikan tambahan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebesar 35.000 Megawatt (MW) plus 7.000 MW pembangkit yang sudah dalam pipe line Perusahaan. Selain pembangunan pembangkit, dalam 5 tahun ke depan (2015-2019) juga akan dibangun saluran transmisi sepanjang 46.000 kms dan gardu induk sebesar 108 GVA. Dengan peningkatan kapasitas infrastruktur kelistrikan dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi sehingga menjadi daya dorong peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat, yang pada akhirnya mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan GDP per kapita.

The development of the electricity infrastructure is needed to improve the availability of electricity supply and improve the quality and range of electricity distribution. Since 2015, PT PLN (Persero) has committed itself to realize the development of the electricity infrastructure to realize additional 35,000 Megawatts (MW), plus the 7,000 MW already in the Company's pipeline. In addition to plant construction, in the next 5 years (2015-2019), 46,000 kmc of transmission lines and a 108 GVA substation will also be developed. With the increase in electricity infrastructure capacity, an increase in the electrification ratio is expected to increase production, trade, and community activities, subsequently becoming a driver for sustainable economic growth and increasing GDP per capita.

Tahun 2016 diawali dengan angin segar yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia berupa diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini tentu saja akan memberikan jaminan yang lebih pasti bagi PLN untuk melaksanakan amanat pembangunan pembangkit 35.000 MW beserta sarana pendukungnya.

2016 commenced with a breath of fresh air by the government for the electricity development in Indonesia with the issuance of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 4 of 2016 on the Acceleration of Electricity Infrastructure Development. The regulation clearly reconfirms the guarantee for PLN to implement the mandate to execute the 35,000 MW power plants development as well as the supporting facilities.

Untuk merealisasikan target pengembangan usaha dalam Masa Pertumbuhan dan menjalankan amanat Program 35.000 MW, Perseroan telah menetapkan kendala strategis yang harus diatasi dan menetapkan program-program prioritas untuk direalisasikan. Perseroan juga telah menetapkan Rencana Strategis yang diterapkan pada tahun pelaporan.

To realize the business development target in the Growth Period and implement the mandate of the 35,000 MW program, the Company has established the strategic challenges that must be addressed and determined priority programs to be realized. The Company has also determined the Strategic Plan that will be implemented in the reporting year.

TANTANGAN PERUSAHAAN

Dalam rangka merealisasikan program tahun 2016, Perseroan masih akan menghadapi tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. **Kemampuan Keuangan**
   Model bisnis cost plus margin dalam penentuan tarif tenaga listrik dan kebijakan subsidi listrik mengakibatkan keterbatasan sumber pendanaan internal. Pada saat

CHALLENGES FOR THE COMPANY

In order to realize the 2016 program, the Company will still face the following challenges:

1. **Financial Ability**
   The cost-plus margin business model for the determination of electricity tariff and subsidies lead to limitations with internal funding sources. At the same time,

yang sama, Pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam membantu pendanaan investasi ketenagalistrikan melalui Penambahan Modal Disetor (PMN).

2. Pembangunan Kapasitas Sarana Ketenagalistrikan
Ketersediaan kapasitas sarana ketenagalistrikan masih belum mampu memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik, terutama sistem (sub sistem) di luar Jawa Bali. Di beberapa wilayah Indonesia pertumbuhan permintaan pelanggan seringkali tidak dapat dilayani, bahkan untuk beberapa daerah tertentu masih sering mengalami pemadaman.

3. Energi Primer
Perusahaan menghadapi ketidakpastian ketersediaan pasokan bahan bakar terutama kontuniuitas pasokan gas alam maupun fluktuasi harganya, karena sebagian besar kontrak pembelian gas alam masih menggunakan denominasi US Dollar.

4. Efisiensi Operasi
Untuk dapat memberikan harga yang efisien bagi pelanggan, maka upaya menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Perusahaan akan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasi maupun investasi secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan program.

5. Regulasi
Beberapa regulasi yang terkait dengan kegiatan Perusahaan memerlukan sinkronisasi dengan kebutuhan pembangunan sektor ketenagalistrikan, seperti (1) kompetisi industri dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, (2) kebijakan Feed in Tariff energi baru dan terbarukan mendorong kenaikan BPP penyediaan tenaga listrik, (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum belum efektif dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan (4) regulasi tentang perizinan belum dapat mempercepat proses pembangunan sarana ketenagalistrikan.

6. Kepercayaan pelanggan
Tuntutan kualitas maupun harga dari pelanggan semakin tinggi atas pelayanan penyediaan listrik oleh Perusahaan.

7. Kesiapan SDM dengan Struktur Organisasi Baru PLN
Restrukturisasi organisasi memerlukan kesiapan SDM menghadapi perubahan lingkungan bisnis, perubahan kebijakan manajemen, perubahan budaya, dan kesiapan SDM itu sendiri untuk berubah.

the Government also has limitations in assisting electricity investment through Additional Paid-up Capital (PNM).

2. Construction of electricity infrastructure
The availability of electricity infrastructure has yet to be able to meet the electricity demand growth, particularly for systems (sub systems) outside of Java-Bali. In several parts of Indonesia, the increase in customer demand often cannot be fulfilled, with certain areas still experiencing blackouts.

3. Primary Energy
The Company faces uncertainties in regards to the availability of fuel, mainly the continuity of a natural gas supply as well as its price fluctuations due to the use of US Dollar denominated natural gas purchase contracts.

4. Operational Efficiency
To obtain an efficient price for customers, the effort to reduce the electricity Cost of Supply (BPP) becomes key. On that account, the Company will increase efficiency in operations as well as broad spectrum investments, starting from the planning stage, up to program implementation.

5. Regulation
A number of regulations related to the Company's activities need to be synchronized with electricity development activity requirements, such as (1) industrial competition, with the implementation of Law No. 30 of 2009 on Electricity, (2) the Feed in Tariff policy for new and renewable energy that increases the cost of supply, (3) Law no. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest has yet to be effective in terms of electricity infrastructure development, and (4) the regulation on licensing has not accelerated the process of electricity facility development.

6. Customer confidence
The demand for quality and well-priced provision of electricity from customers is increasingly high on the Company.

7. Readiness of Human Resources towards the New Pln Organizational Structure
Organizational restructuring requires the readiness of HR to address the changes in the business environment, management policy, culture, and the readiness of HR itself to change.

SASARAN STRATEGIS 2016

Sasaran strategis tahun 2016 meliputi:
1. Peningkatan kesehatan keuangan Perusahaan.
2. Peningkatan kapasitas dan sustainabilitas pasokan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik.
3. Peningkatan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik.
4. Perbaikan produktivitas asset dan kinerja operasional.
5. Peningkatan reputasi Perusahaan.

PROGRAM PRIORITAS

Untuk dapat menghadapi tantangan dan merealasikan sasaran strategis Perusahaan, maka sepanjang tahun 2016 Perusahaan mengembangkan beberapa program prioritas, agar mampu mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dalam melayani pertumbuhan dan ekspektasi pelanggan dengan sumber daya Perusahaan:
1. Meningkatkan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan:
   a. Mempertahankan tersedianya margin usaha minimal sebesar 7% dalam perhitungan tarif tenaga listrik dan penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO).
   b. Menerapkan pola perhitungan subsidi berdasarkan kebijakan *Performance based Regulatory* (PBR) dalam penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO).
   c. Meningkatkan pendapatan perusahaan dengan melanjutkan implementasi *tariff adjustment*, mengupayakan restrukturisasi Tarif Tenaga Listrik (TTL), memulai inisiasi penyesuaian pelanggan R1 450 VA dan R1 900 VA dengan mekanisme pemberian subsidi tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai data Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), meningkatkan penjualan kwh pada pelanggan golongan tarif Industri I3 dan I4 melalui mekanisme "Promo LWBP" serta Program "Penundaan Pembayaran Listrik"
   d. Mendiversifikasi model pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam skema *direct lending* dengan dan tanpa jaminan Pemerintah termasuk kredit ekspor yang dijamin oleh *Export Credit Agency* (ECA).
   e. Memperbaiki struktur permodalan melalui tambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) baik setoran tunai maupun konversi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) ,memperbaiki *capital structure* Perusahaan dengan melaksanakan revaluasi aktiva tetap, menurunkan rasio pinjaman dalam mata uang asing, dan mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   f. Menjaga *compliance* terhadap *debt covenant*.
   g. Melakukan program hedging untuk memitigasi risiko fluktuasi valas.
2. Memulai proses konstruksi pembangunan pembangkit 35.000 MW termasuk transmisi dan gardu induk terkait.

2016 STRATEGIC TARGET

The 2016 strategic targets included:
1. Improvement in the Company's financial health.
2. Increase in the capacity and sustainability of electricity supply to fulfill the growth in electricity demand.
3. Improved efficiency in electricity supply.
4. Improvement in asset productivity and operational performance.
5. Improvement of the Company's reputation.

PRIORITY PROGRAMS

To be able to address the challenges and realize the Company's strategic targets, the Company developed a number of priority programs throughout 2016 in order to realize excellence in operational performance, subsequently able to correspond to customer growth for and expectations about the Company:
1. Improvement in the Company's financial health:
   a. Maintaining the availability of 7% operating margin in the calculation of electricity tariff and the implementation of Public Service Obligation (PSO).
   b. Implementing a subsidy formulation that is based on the Performance based Regulatory (PBR) policy in the implementation of Public Service Obligation (PSO).
   c. Increasing the revenues of the Company by maintaining the implementation of tariff adjustment, pursue Electricity Tariff Rates (TTL) restructuring, starting the initiation of the R1 450 VA and R1 900 VA customer adjustments by granting subsidies accurately to poor and volatile households based on the data from the National Poverty Acceleration and Reduction Team (TNP2K), increasing kwh sales for the I3 and I4 Industry customer groups through the "Promo LWBP" mechanism as well as the "Electricity Payment Delay" Program.
   d. Diversification of the funding through a bank loans model, with the direct lending scheme, with and without Government guarantees, including export credit guaranteed by the Export Credit Agency (ECA).
   e. Improving the capital structure through the Government Investment Scheme (PMP), both by cash and Unspecified Status of Government Assistance (BPYBDS), improving the Company's capital structure by revaluating fixed assets, lowering the ratio of loans in foreign currencies, and implementing Bank Indonesia Regulation No. 17/3/2015 on the Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Republic of Indonesia.
   f. Maintaining compliance to debt covenants.
   g. Implement hedging to mitigate foreign exchange fluctuation risks.
2. Commencing the construction process of the 35,000 MW power plants, including the related transmission lines and substations.

3. Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan dengan mengupayakan terbitnya regulasi Pemerintah yang mempermudah eksekusi di lapangan.
4. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
5. Menjaga kecukupan pasokan listrik:
   a. Meningkatkan *availability factor* pembangkit non bahan bakar minyak.
   b. Meningkatkan produktivitas aset melalui revitalisasi pembangkit, mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi listrik lokal seperti pembelian *excess power* dan pembangkit milik swasta yang idle, mengoptimalisasi sewa genset dan penggunaan *Marine Vessel Power Plant* (MVPP) untuk beberapa daerah tertentu.
   c. Mengembangkan pembangkit *peaker* dengan memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG), PLTGB dan *biofuel* (nabati) sebagai pengganti BBM.
   d. Mengembangkan PLTMG *Mobile Power Plant* untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
   e. Mengembangkan pembangkit *dual fired* dan pengadaan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang masih *isolated*.
   f. Mengembangkan energi baru dan terbarukan termasuk pemanfaatan *biofuel* (nabati), biomassa (sampah), *solar cell*,dan Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) serta konservasi energi melalui partisipasi pelanggan.
7. Menjamin ketersediaan energi primer:
   a. Memastikan ketersediaan pasokan gas termasuk kesiapan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU).
   b. Melakukan pencarian sumber gas baru berupa LNG, CNG dan CBM.
   c. Memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) pada level yang efisien dan optimal serta mengendalikan konsumsi BBM.
   d. Mengendalikan harga beli BBM dengan optimalisasi hasil lelang.
   e. Memastikan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dengan pemasok dan tersedianya persediaan rata-rata batubara yang efisien dan optimal.
   f. Memastikan penyediaan batubara sesuai dengan kualitas pembangkit dengan teknologi *blending* dan *coal upgrading*.
8. Mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut, dan mengoperasikan pembangkit *renewable energy* termasuk *biofuel* dan *solar cell*.
9. Meningkatkan efisiensi operasi:
   a. Melakukan efisiensi biaya energi primer dengan cara meningkatkan kinerja *availability* dan *capacity* factor

3. Accelerating the licensing and land acquisition processes for electricity development projects by pursuing the issuance of Government regulations that facilitates execution in the field.
4. Encouraging the completion of financial closing for Independent Power Producer (IPP) and completion of construction in a timely manner.
5. Maintaining sufficient electricity supply:
   a. Increasing the availability factor for non-fuel power plants.
   b. Increasing asset productivity through plant revitalization, optimizing the utilization of local electricity resources, such as the purchase of excess power and idle private power plants, optimizing generator rentals, and the utilization of Marine Vessel Power Plant (MVPP) for certain areas.
   c. Developing peaker power plants by utilizing Compressed Natural Gas (GNC), Coal Slurry Power Plant, and biofuel to replace fuel technologies.
   d. Developing Mobile Gas Engine Power Plants to address short-term electricity supply shortages.
   e. Developing dual fired power plants and the procurement of generators to meet the electricity needs in isolated areas.
   f. Developing new and renewable energy, including the utilization of biofuel (vegetable), biomass (waste), solar cell, and Micro Hydro Power Plants, as well as energy conservation through customer participation.
7. Ensuring the availability of primary energy:
   a. Ensuring the availability of natural gas supply, including the readiness of the Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
   b. Search for new natural gas sources in the form of LNG, CNG, and CBM.
   c. Ensuring an efficient and optimal supply of fuel as well as controlling fuel consumption.
   d. Controlling the fuel purchase price by optimizing the bidding results.
   e. Ensuring the compliance of coal purchase agreements with the supplier and the availability of an efficient and optimal coal supply.
   f. Ensuring that the supply of coal is in accordance with quality of the power plant with blending and coal upgrading technologies.
8. Optimizing fuel mix by generating electricity from non-fuel power plants, increasing the capacity of electricity transferred through submarine cables, and operating renewable energy power plants, including biofuel and solar cell.
9. Increasing operational efficiency:
   a. Conducting efficiency methods for primary energy costs through increased plant availability and

pembangkit, memperbaiki *heat rate* dan *specific fuel consumption* (SFC), serta memperbaiki manajemen energi primer.
b. Menurunkan biaya *non-fuel* per kWh jual.
c. Melanjutkan program penurunan susut jaringan sesuai *roadmap* susut.
d. Mengembalikan kondisi bebas pemadaman bergilir dan menurunkan angka SAIDI dan SAIFI.
e. Melakukan perbaikan kinerja operasi secara berkelanjutan.

10. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi:
    a. Melanjutkan program Listrik Prabayar/Listrik Pintar.
    b. Menyempurnakan proses bisnis dan mengimplementasikan regulasi pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi pengelolaan *supply chain*.
    c. Implementasi aplikasi *Project Management Office* (PMO) untuk pengendalian proyek, Aplikasi *Dashboard* Korporat, Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (SIP2A), *Enterprise Asset Management* (EAM) Pembangkitan, dan fungsi pendukung.
11. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM:
    a. Mengimplementasikan pengembangan organisasi sesuai desain organisasi fungsi korporat dan fungsi bisnis regional.
    b. Melanjutkan program *Corporate University*.
    c. Meningkatkan implementasi budaya Perusahaan.
12. Memperkuat bisnis dan sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis Perusahaan.
13. Mendorong kemitraan dalam rangka peningkatan efisiensi proses bisnis:
    a. Memberdayakan *local resources*.
    b. Menjajaki pola kerja sama pembentukan joint venture untuk pembangunan jaringan transmisi *Extra High Voltage*
14. Meningkatkan citra Perusahaan diantaranya melalui peningkatan GCG berupa perbaikan aspek *risk management* maupun *compliance* Perusahaan, serta meningkatkan fungsi *public relations* agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan *stakeholders*.

capacity, improving heat rate and specific fuel consumption (SFC), and improving primary energy management.
b. Reducing non-fuel cost per kWh sold.
c. Continuing the network losses reduction program in accordance with the losses roadmap.
d. Restoring the rolling blackout free conditions and reducing the number of SAIDI and SAIFI.
e. Improving operational performance on an ongoing basis.

10. Improving the consolidation of business processes to maintain efficiency and service integrity:
    a. Continuing the Prepaid/ Smart Electricity program.
    b. Enhancing the business process and implementing the goods and services procurement regulation and improving the efficiency of supply chain management.
    c. Implementing the Project Management Office (PMO) application for project control, Corporate Dashboard Application, Budget Planning & Control Information System (SIP2A), Power Plant Enterprise Asset Management (EAM), and supporting functions.
11. Organization optimization and HR quality improvement:
    a. Implementing organizational development in accordance with the organizational design for corporate and regional business functions.
    b. Continuing the Corporate University program.
    c. Improving the implementation of the Corporate Culture.
12. Strengthening the business and synergy of Subsidiaries for the accomplishment of the corporate strategic direction and business processes.
13. Encourage partnerships in order to improve the efficiency of business processes:
    a. Empowering local resources.
    b. Developing cooperation schemes for the establishment of joint ventures for the development of the Extra High Voltage transmission network.
14. Improving the Company's image, among others through GCG improvement in the form of the Company's risk management and compliance improvement, as well as improving the functions of public relations to develop good relations and communication with the stakeholders.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG TELAH DIJALANKAN

Mempertimbangkan dengan seksama kondisi-kondisi eksternal dan internal yang dihadapi selama tahun 2016, Perseroan telah menjalankan berbagai langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Mengingat berbagai kendala yang dihadapi bermuara pada keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja operasional maupun keuangan perusahaan, Perseroan memfokuskan upaya penyelesaian permasalahan terkait, meliputi:

i. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal pembebasan lahan untuk proyek pembangkit maupun transmisi termasuk perintisan upaya untuk menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
ii Melakukan amandemen kontrak dalam hal deviasi kontrak.
iii. Melakukan penyelesaian permasalahan untuk kontraktor yang tidak mampu melalui langkah pengambilalihan pekerjaan.
iv. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk IPP.

Selain hal-hal yang terkait dengan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan dari sisi efisiensi operasi dan keandalan, perusahaan mengambil langkah strategis melalui penerapan program berkelanjutan *Operational Performance Improvement* (OPI), yang bertujuan untuk meningkatkan *performance* pada level terbaik pada bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan sumber daya manusia.

IMPLEMENTED STRATEGIC MEASURES

With due regards to the internal and external factors arising in 2016, the Company conducted various strategic measures to overcome these challenges. Various constraints caused the delayed completion of certain electricity facilities, which in turn affected the Company's operational and financial performance. The Company focused to resolve the related problems through measures including to:

i Coordinate with relevant land acquisition-related institutions for generation and transmission projects, including attempting to implement Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest.

ii. Amend contracts in terms of contract deviation.

iii. Resolve issues of non-performing contractors by taking over the work.
iv. Encourage the completion of financial closing for IPPs.

In addition to issues related to the addition of electricity infrastructure in terms of operating efficiency and reliability, the Company took a strategic measure through the implementation of the ongoing Operational Performance Improvement (OPI) program, which aims to optimize performance in the fields of generation, transmission, distribution and human resources.

Perseroan juga menjalankan langkah strategis lain berupa pelaksanaan implementasi tarif yang diberlakukan oleh pemerintah secara proaktif dengan melakukan sosialisasi kepada pelanggan untuk mensukseskan tarif baru, serta di sisi lain meningkatkan efisiensi operasional untuk mengendalikan biaya. Selain itu, merintis kerja sama Forex Line dengan beberapa Bank BUMN untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar.

The Company also conducted other strategic measures, such as implementing proactive Government tariffs, disseminating of information to customers to ensure their success, also increasing operational efficiency to keep costs under control. In addition, the Company initiated a Forex Line cooperation with several state-owned banks to anticipate changes in the exchange rate.

Terkait dengan pelaksanaan Program 35.000 MW, Perseroan juga telah menjalankan berbagai langkah strategis, meliputi:

1. Pembenahan Struktur Organisasi di tingkat Direktorat.
2. Inventarisasi Peraturan Perundangan di bidang kelistrikan, perijinan dan pembebasan lahan.
3. Menggalang kerja sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, seperti BIN, Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk mencari solusi dengan mengedepankan kepatuhan terhadap koridor hukum.
4. Mengantisipasi kebutuhan SDM.
5. Menciptakan prosedur pemantauan kemajuan proyek berbasiskan inovasi teknologi informasi.
6. Menggalang kerja sama dengan lembaga keuangan luar dan dalam negeri (perbankan, lembaga pembiayaan).
7. Mencari alternatif pembiayaan proyek.

In relation to the implementation of the 35,000 MW program, the Company also conducted a variety of strategic measures, including:

1. Improving the Organizational Structure at the Directorate level.
2. Inventorying legislation in the field of electricity, licenses, and land acquisition.
3. Sustaining cooperation with government institutions, such as BIN, police, state attorney, and KPK to seek solutions by promoting compliance with the law.
4. Anticipating the needs for human resources.
5. Establishing IT-based procedures as a means to monitor the progress of projects.
6. Promoting cooperation with national and international financial institutions (banking and financial institutions).
7. Seeking alternative financing for projects.

KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Seluruh program jangka pendek tersebut merupakan bagian dari realisasi program jangka panjang perusahaan sehingga terdapat keselarasan dan kesinambungan pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan tujuan perusahaan dan pencapaian misi perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam diagram berikut:

ALIGNMENT OF SHORT-TERM AND LONG-TERM DEVELOPMENT PROGRAMS

All short-term programs are part of the realization of the Company's long-term programs; thus, there is harmony and continuity of electricity development and accomplishment of the Company's missions, as stated in the Company's purpose statement. This is reflected in the following diagram:

KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
ALIGNMENT OF SHORT-TERM AND LONG-TERM DEVELOPMENT PROGRAMS

Tujuan Perusahaan
- Menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Misi Perusahaan RJP
- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- Menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Strategis RJP
- Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
- Meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan pasokan tenaga listrik dengan memastikan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi, meningkatkan keandalan pembangkit dan jaringan, serta memastikan kecukupan pasokan energi primer.
- Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui pencapaian bauran energi, pola operasi sistem dan proses operasi lainnya.
- Memperbaiki kinerja operasional.
- Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Inisiatif Strategis
- Mengoptimalkan ekspansi kapasitas dan pembiayaan.
- Mengamankan kebutuhan energi primer dengan biaya rendah.
- Melanjutkan *Operational Performance Improvement* (OPI).
- Melanjutkan *Procurement and Construction Excellence*.
- Melanjutkan *Commercial Excellence*.
- Meningkatkan Manajemen *Stakeholders* dan *regulatory*.
- Melanjutkan budaya kinerja tinggi dan kepemimpinan yang kuat.
- Meningkatkan pembentukan citra yang positif.

Prioritas Program Kerja RKAP 2015
- Mempertahankan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
- Menerapkan pola perhitungan subsidi berdasarkan kebijakan *Performance Base Regulatory* (PBR).
- Meningkatkan harga jual rata-rata melalui kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), implementasi *automatic tariff adjustment*, pemberian subsidi langsung kepada pelanggan yang layak disubsidi, dan mendorong perubahan (penambahan) daya pelanggan.
- Mendiversifikasi model pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam skema kredit ekspor yang dijamin oleh *Export Credit Agency* (ECA) dan *direct lending* tanpa jaminan Pemerintah.
- Memperbaiki struktur permodalan melalui tambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
- Menjaga *compliance* terhadap *debt covenant*.
- Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
- Menjaga kecukupan pasokan listrik.
- Meningkatkan *availability factor* pembangkit yang telah beroperasi.
- Menyelesaikan pembangkit FTP-1, melanjutkan perencanaan dan konstruksi FTP-2, serta pembangkit reguler lainnya, termasuk transmisi dan gardu induk terkait.
- Optimalisasi aset dan sumber-sumber energi listrik lokal, pembelian *excess power*, dan sewa pembangkit non BBM.
- Mengembangkan pembangkit *peaker* dengan memanfaatkan teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai pengganti BBM.
- Mengembangkan energi baru dan terbarukan.
- Menjamin ketersediaan energi primer.
- Memanfaatkan ketersediaan pasokan gas termasuk kesiapan *Floating Storage Regasification* Unit (FSRU).
- Melakukan pencarian sumber gas baru berupa LNG, CNG, dan CBM.
- Memastikan stok BBM pada level yang efisien dan optimal, serta mengendalikan konsumsi BBM.
- Mengendalikan harga beli BBM.
- Memastikan pemenuhan perjanjian jual beli batubara dan tersedianya persediaan rata-rata batubara yang efisien dan optimal.
- Memastikan penyediaan batubara sesuai dengan kualitas pembangkit.
- Optimalisasi bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dikirimkan melalui kabel laut, dan mengoperasikan pembangkit rendah energi termasuk *biofuel dan solar cell*.
- Meningkatkan efisiensi operasi.
- Melakukan efisiensi biaya energi primer melalui peningkatan *availability* dan *capacity factor* pembangkit, memperbaiki *heat rate* dan *specific fuel consumption* (SFC). serta memperbaiki manajemen energi primer.
- Menurunkan biaya *nonfuel* per kWh jual.
- Melanjutkan program penurunan susut jaringan.
- Menurunkan angka SAIDI – SAIFI.
- Mengimplementasikan *Operational Performance Improvement* (OPI).
- Meningkatkan efisiensi *working capital*.
- Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
- Melanjutkan program Listrik Prabayar.
- Menyempurnakan proses bisnis dan mengimplementasikan regulasi pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan efisiensi pengelelolaan *supply chain*.
- Implementasi aplikasi dan fungsi pendukung, seperti EAM Pembangkit/Transmisi/Distribusi.
- Melakukan percepatan proses perijinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan SLA secara intensif.
- Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
- Mengimplementasikan pengembangan organisasi.
- Melanjutkan program *Corporate University*.
- Meningkatkan implementasi budaya perusahaan.
- Sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis PLN serta meningkatkan kinerja dan ketahanan Anak Perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis.

Company Goals

Running a profitable electricity business for public use, which is sufficient both in quantity and quality, and to perform the Government's mandate relating to the electricity industry in order to support the development of the application of Limited Liability Companies principles.

Long-Term Company Mission

- Running an electricity business and other related sectors revolving around customer, employee, and shareholder satisfaction.
- Providing electricity as medium which improves quality of life.
- Striving to make electricity an economic booster.
- Operating an environmentally friendly business.

Strategic Goals

- Maintaining the financial soundness of the Company.
- Increasing the capacity and sustainability of electricity supply by ensuring the completion of generation and transmission projects, by improving the reliability of power plants and networks, as well as by ensuring a sufficient supply of primary energy.
- Increasing the efficiency of electricity supply through optimization of fuel mix, operating system patterns and other operating processes.
- Improving operational efficiency.
- Improving GCG practices.

Strate gic Initiatives

- Optimizing capacity expansion and financing.
- Securing primary energy demand at a low cost.
- Continuing Operational Performance Improvement (OPI).
- Continuing Procurement and Construction Excellence.
- Continuing Commercial Excellence.
- Improving stakeholders and regulatory management.
- Continuing high performance culture and strong leadership.
- Improving positive corporate image.

2015 Work Program Priorities

- Maintaining the Company's financial soundness.
- Implementing a subsidy calculation scheme based on PBR policy.
- Increasing the average selling price by increasing Electricity Rates (TTL), implement automatic tariff adjustment, provide direct subsidies to subsidyeligible customers and encourage changes or addition to customers' electricity capacity.
- Diversifying the funding model through bank loans in the form of an export credit scheme, guaranteed by Export Credit Agency (ECA) and direct lending without government guarantees.
- Improving capital structure through Government Investment Scheme (PMP).
- Ensuring compliance with debt covenants.
- Encouraging the completion of financial closing for Independent Power Producer (IPP) and completion of construction as scheduled.
- Maintaining sufficient electricity supply.
- Increasing plant availability factor for operating plants.
- Completing the construction of FTP-1 power plant, continue the planning and construction of FTP-2, as well as other regular plants, including related transmission and substations.
- Optimizing assets and locally-sourced electricity, purchase excess power, and non-fuel plant leases.
- Developing peaker plants by utilizing Compressed Natural Gas (CNG) as a substitute to oil.
- Developing new and renewable energy.
- Ensuring the availability of primary energy.
- Harnessing the availability of gas supply including the readiness of Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
- Searching for new gas sources in the form of LNG, CNG and CBM.
- Ensuring fuel stocks are at an efficient and optimal level, as well as controlling fuel consumption.
- Controlling the fuel purchase price.
- Ensuring the fulfillment of coal purchase agreements and the availability of coal, efficiently and optimally.
- Ensuring coal supply is in accordance with plant quality.
- Optimizing energy mix by generating electricity from nonfuel plants, increase the capacity of the electricity transferred through submarine cables, and operate a low-energy power plant with biofuel and solar cells.
- Increasing operational efficiency.
- Performing efficiency methods for primary energy costs through increased plant availability and capacity, improve heat rate and specific fuel consumption (SFC) and improve primary energy management.
- Lowering non-fuel cost per kWh sold
- Continuing network losses reduction program.
- Reducing the number of SAIDI-SAIFI.
- Implementing Operational Performance Improvement (OPI).
- Improving working capital efficiency.
- Improving consolidation of business processes to maintain efficiency and service integrity.
- Continuing Prepaid Electricity program.
- Improving business processes, implement goods and services procurement regulations and improve supply chain efficiency management.
- Implementing applications and support functions, such as EAM Generation/ Transmission/ Distribution.
- Speeding up construction permit approvals and land acquisition process through intensive SLA management.
- Optimizing organization and improvement of workforce quality.
- Implementing organizational development.
- Continuing Corporate University program.
- Expanding corporate culture implementation.
- Synergizing subsidiaries to achieve corporate strategic direction and to support PLN's business processes, as well as to improve the subsidiaries' performance and resilience in the face of business demands.

PENGEMBANGAN ANAK USAHA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis korporat tersebut, seluruh bisnis Anak Perusahaan diarahkan untuk mendukung proses bisnis PLN. Arah pengembangan bisnis Anak Perusahaan adalah spesifik untuk setiap Anak Perusahaan, namun tetap sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) korporat untuk menjamin sinergi antar Anak Perusahaan.

Sinergi diantara Anak-Anak Perusahaan dapat dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh Anak Perusahaan tersebut, serta melakukan alih keahlian dan kapabilitas diantara Anak Perusahaan.

Secara umum, arah pengembangan bisnis Anak Perusahaan/ Cucu Perusahaan/Afiliasi ke depan adalah:
1. Memperkuat *core business* perusahaan dengan cara meningkatkan sinergi di sepanjang rantai nilai (*value chain*) di antaranya energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi dan pelayanan pelanggan, mengingat besarnya penambahan kapasitas yang akan masuk pada tahun mendatang terkait Program 35.000 MW.
2. Mengembangkan (diversifikasi) bisnis perusahaan dengan strategi *concentric diversification*, di mana produk yang dihasilkan anak perusahaan/cucu perusahaan/ afiliasi harus menunjang produk utama PLN yaitu tenaga listrik.
3. Meningkatkan keunggulan operasional antara lain dengan penerapan teknologi baru serta otomasi proses bisnis di lingkungan PLN Group.

Strategi likuidasi, merger, dan pendirian Anak Perusahaan/ Cucu Perusahaan/Afiliasi yang baru, dapat dilaksanakan setelah dilakukan Kajian Kelayakan yang komprehensif, yaitu Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Finansial, Kajian Kelayakan SDM, dan kajian Manajemen Risiko.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Sejalan dengan tantangan bisnis yang semakin kompleks seperti penyelesaian proyek 35.000 MW, pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 97,4% pada tahun 2019, peningkatan pelayanan serta menyikapi implementasi regulasi Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, maka PLN telah menyusun *roadmap* organisasi yang bersifat efektif, akuntabel dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi PLN pada saat ini maupun di masa depan.

Dalam pengembangan organisasi PLN memperhatikan pembagian peran antara (i) fungsi strategis perusahaan yaitu fungsi yang dilakukan secara terpusat, dimodernisasi dan memberikan dampak efisiensi, serta (ii) fungsi bisnis yang bersifat operasional yang dapat dikelola terintegrasi regional untuk memberikan perbaikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

DEVELOPMENT OF SUBSIDIARIES

In order to support the achievement of corporate strategic goals, all of the subsidiary companies are directed to support PLN's development business process. The business development of each subsidiary/affiliated company's business development is specific, but it must still be aligned and integrated with PLN's Long Term Plan (RJP) to assure synergy among the subsidiaries.

The business development direction of each subsidiary can be implemented by providing resources required to subsidiaries, and by transferring skills and capabilities between subsidiaries.

In general, the direction of business development of subsidiaries/sub-subsidiaries/affiliates in the future are:
1. Strengthening the core business of the company by increasing synergies throughout the value chain, among others primary energy, power generation, transmission, distribution, and customer services, given the magnitude of additional capacity that will enter in the coming years related to the 35,000 MW Program.
2. Diversifying the corporate business through concentric diversification strategy, in which products generated by the subsidiaries/sub-subsidiaries/affiliates must support the main products of PLN, namely electricity.
3. Improve operational excellence, among others through the implementation of new technologies as well as business process automation in the PLN Group environment.

Liquidation, merger, and establishment of new subsidiaries/ sub-subsidiaries/affiliates strategies can only be conducted after comprehensive Feasibility Studies, namely Operational Feasibility Study, Financial Feasibility Study, HR Feasibility Study, and Risk Management Study.

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

With the increasingly complex business challenges, such as the completion of the 35,000 MW project, 97.4% Indonesia electrification ratio by 2019, service improvement and implementation of the Electricity Law No. 30 of 2009, PLN has prepared an effective and accountable organization roadmap which is capable of addressing the current and future issues and problems.

In its organizational development, PLN pays close attention to division of roles between (i) a modernized corporate strategy function which is centrally performed and efficiently impactful, and (ii) an operational business function which is managed regionally and integrally to deliver improved effectiveness and organizational management accountability.

Pada tanggal 3 Mei 2016 telah ditetapkan perubahan Struktur Organisasi PT PLN (Persero) sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tujuan penataan organisasi adalah untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, selaras dan sinergi antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat end to end, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

ROADMAP ORGANISASI TAHUN 2015-2019

Roadmap organisasi PLN ke depan harus selaras (*aligned*) dan saling mendukung (*synergy*) antara fungsi korporat strategis dan fungsi bisnis regional, sebagai berikut:

1. Fungsi korporat strategis, mengelola fungsi korporasi secara terpusat dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, standaridsasi, investasi dan kendali korporasi menuju perusahaan yang sehat. Fungsi ini kedepan akan dilakukan secara terstandar dan terpusat (sentralisasi), dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta proses kerja yang standar, *best practices*, dan efektif dan efisien.

   Adapun fungsi korporat strategis meliputi fungsi:
   - Perencanaan korporat: mengelola perencanaan dan pengembangan korporasi keseluruhan.
   - Pengadaan korporat: mengelola investasi kapital korporat strategis (*capex*), *trading* energi korporat (*opex*), dan IPP.
   - Sumber Daya Manusia: mengelola pengembangan organisasi dan SDM korporat.
   - Keuangan: mengelola keuangan korporat dan niaga.
   - Fungsi pendukung korporat meliputi: pengawasan internal, hukum, manajemen risiko dan kepatuhan, teknologi informasi, dan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE).

2. Fungsi bisnis regional, mengelola perencanaan dan pengendalian konstruksi, operasi, pelayanan pelanggan dan keuangan regional mulai dari hulu sampai hilir dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek 35.000 MW, meningkatkan kualitas operasi dan pelayanan pelanggan, meratakan beban organisasi, meningkatkan akuntabilitas konstruksi, operasi dan keuangan. Fungsi bisnis regional melakukan transaksi bisnis serta mengukur keberhasilan bisnis (konstruksi, operasi dan keuangan) di regionalnya, yang meliputi karakteristik:
   - Melaksanakan proses bisnis secara end to end, mulai dari fungsi perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasi dan pelayanan pelanggan di regionalnya.
   - Mengelola Unit PLN langsung di bawah komando bisnis regional yang dapat meningkatkan tanggung jawab operasi unit serta mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.

On 3 May 2016, the amendment to the Organizational Structure of PT PLN (Persero) has been set, in accordance with the Regulation of the Board of Directors No. 0179.P/DIR/2016 on the Organization and Procedures of PT PLN (Persero). The restructuring objective is to strengthen organizational performance and support future business needs, end-to-end harmony and synergy between the strategic corporate functions and regional business functions, quick decision-making, and more accountability from upstream to downstream.

2015-2019 ORGANIZATIONAL ROADMAP

The future PLN organizational roadmap must align with and mutually support the strategic corporate and regional business functions, as follows:

1. Corporate strategy functions: managing centralized corporate functions and aiming to improve their effectiveness, efficiency, standardization, investment and corporate control to enable a healthier company. In the future, this function will be standardized, centralized and modernized with the use of information technology in order to create effective, efficient and practical standard work processes.

   Corporate strategy functions include:
   - Corporate planning: managing plan and developing corporate as a whole.
   - Corporate procurement: managing strategic corporate venture capital (capex), corporate energy trading (OPEX), and IPP.
   - Human Resources: managing corporate organizational development and human resources.
   - Finance: managing corporate finance and commerce.
   - Corporate support functions, including: internal audit, legal, risk management and compliance, information technology, occupational health, safety, security, and environment.

2. Regional business functions: managing planning and controlling construction, operation, customer service and regional upstream-to-downstream finance, as well as aiming to accelerate 35,000 MW project development, improve operational quality and customer service, arrange organizational load, improve construction, and operational and financial accountability. Regional business functions perform business transactions, as well as measure the success of a business (construction, operation and finance) regionally, including the following characteristics:
   - Implementing end-to-end business processes, from regional planning, control, development, operation and customer service.
   - Managing PLN units directly under the regional business command to enhance the responsibility of operating units, as well as support decision-making in a more quick and accurate manner.

- Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan regional, serta mendorong terciptanya internal *benchmarking* dalam keberhasilan kinerja di antara bisnis regional.

Untuk mendukung keberhasilan proyek 35.000 MW, operasi dan pelayanan pelanggan, maka fungsi bisnis regional dibentuk dalam jumlah yang memadai dengan memperhatikan proses bisnis *end to end* dengan keluasan dan karakteristik wilayah, sehingga beban dapat terbagi merata dan dapat dikelola dengan baik.

PENCAPAIAN PROGRAM ORGANISASI

Adapun pencapaian perusahaan dalam menata organisasi PLN selama tahun 2016 adalah :

1. Penataan Organisasi PT PLN (Persero) secara Korporat dalam mengelola bisnis ketenagalistrikan , antara lain :
   - Kep.Dir.No. 0001.K/DIR/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Penetapan Tingkat Organisasi Unit Induk di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Kep.Dir. No. 0078.K/DIR/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Tingkat Organisasi Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana di Lingkungan PT PLN (Persero) & Perubahannya.
   - Telah diterbitkan Per.Dir. No 0093.P/DIR/2016 tanggal 4 Maret tentang Perubahan 018.P/DIR/2015 Organisasi Unit Transmisi Jawa Bagian Barat terkait penguatan MB Konstruksi.
   - Telah ditetapkan Per.Dir. No.0155 s.d. 0176.P/DIR/2016 tanggal 1 April 2016 ttg FJ Unit Induk seluruh Wilayah dan Distribusi.
   - Telah ditetapkan PerDir.No. 0179.P/DIR/2016 ttg Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) tanggal 3 Mei 2016 sebagai pengganti Per.Dir.No. 0015.P/DIR/2015 terdiri dari 1 Direktur Utama, 11 Direktorat, 42 Divisi, 7 Satuan, 1 Setper dan 54 Unit Induk.
   - Telah ditetapkan Per.Dir.Susunan Organisasi dan FJ Direktorat pada Mei 2016 terkait ditetapkannya Per. Dir.No. 0179.P./DIR/2016.
   - Telah diterbitkan Per.Dir.No.0312.P/DIR/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Organisasi Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera terkait penambahan Bidang Sistem Transmisi I dan Bidang Sistem Transmisi II.
   - Telah ditetapkan Per.Dir. No. 0336.P/DIR/2016 tanggal 7 Des 2016 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B terkait reposisi peran 2 Bidang Operasi I & II menjadi Bidang Operasi dan Bidang Energi Primer, K3 & Lingkungan.

- Improving regional finance performance and accountability, as well as encouraging internal benchmarking for creating successful performance among regional businesses.

In order to support the 35,000 MW project, as well as operational and customer service success, regional business functions are sufficiently well-established to look after end-to-end processes in regional areas and their specific characteristics. Therefore, the load can be distributed evenly and managed properly.

ACHIEVEMENT OF ORGANIZATIONAL PROGRAM

During 2016, PLN achieved the following matters related to organizational structure:

1. Corporate Organizational Restructuring of PT PLN (Persero) in the electricity business management, among others :
   - Board of Directors Decision No. 0001.K/DIR/2016 dated 1 January 2016 on the Establishment of Parent Unit Organizational Level in PT PLN (Persero) and Board of Directors Decision No. 0078.K/DIR/2016 dated 24 May 2016 on Establishment of Executing Unit and Sub Unit Organizational Level in PT PLN (Persero) & its Amendments.
   - Issuance of the Board of Directors Regulation No. 0093.P/DIR/2016 dated 4 March 2016 on the Amendment to 018.P/DIR/2015 on West Java Transmission Unit Organization related to the strengthening of MB Construction.
   - The stipulation of the Board of Directors Regulation No. 0155-0176.P/DIR/2016 dated 1 April 2016 on Parent Unit FJ for all Areas and Distributions.
   - The stipulation of the Board of Directors Regulation No. 0179.P/DIR/2016 dated 3 May 2016 as a substitute for the Board of Directors Regulation No. 0015.P/DIR/2015 consisting of 1 President Director, 11 Directorates, 42 Divisions, 7 Units, 1 Corporate Secretary, and 54 Parent Units.
   - The stipulation of the Board of Directors Regulations on Organizational Composition and Directorate FJ relating to the stipulation of the Board of Directors Regulation No. 0179.P/DIR/2016.
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0312.P/DIR/2016 dated 20 October 2016 on Sumatra Distribution and Load Control Center (P3B) Organization related to the addition of the Transmission I System Sector and Transmission II System Sector.
   - The stipulation of the Board of Directors Regulation No. 0336.P/DIR/2016 dated 7 December 2016 on Tanjung Jati B Power Plant Organization of PT PLN (Persero) related to the role reposition of 2 Operation Sectors I & II to become the Operations Sector and Primary Energy, K3, & Environment Sector.

Manfaat: Memperkuat organisasi Unit sehingga tercipat sinergi antara fungsi korporat dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, peningkatan kinerja, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel.

Benefits: Strengthening the Units to create end-to-end synergies between the corporate functions and the regional business functions, performance improvement, ability to manage electricity growth, speed in making accountable decisions.

2. Penguatan organisasi proyek dalam mendukung pembangunan kelistrikan sesuai dengan :
   - Telah diterbitkan Per.Dir. No. 0011 sd 0021.P/DIR/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Per.Dir. No. 0043 sd 0049.P/DIR/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Organisasi PLN Unit Induk Pembangunan (UIP). Termasuk tambahan 1 UIP di Sumatera dan 1 UIP di Kalimantan dan penamaan berdasar wilayah Regionalnya.
   - Telah diterbitkan Per.Dir. No. 0025 sd 0035.P/DIR/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Per.Dir. No. 0094 sd 0100.P/DIR/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Formasi Jabatan (FJ) Unit Induk Pembangunan (UIP), serta perubahan FJ UIP pada 24 Mei 2016.
   - Telah diterbitkan Per. Dir No. 0050 sd 0067.P/DIR/2016 tanggal 22 Februari 2016 ttg Organisasi PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) pada PLN Unit Induk Pembangunan (UIP)
   - Telah diterbitkan Per.Dir. No. 0120 sd 0137.P/DIR/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Formasi Jabatan (FJ) Unit Pelaksanan Proyek (UPP) pada Unit Induk Pembangunan (UIP).
   - Telah diterbitkan Per.Dir. 0262.P/DIR/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Organisasi PLN Pusat Sertifikasi terkait penguatan peran a.l. QA, standaridsasi, pengujian, komisioning, TPG, NDC Test pada Pembangkit PLN & IPP dan FJ nya No. 0275.P/DIR/2016 tanggal 18 Juli 2016.
   - Telah diterbitkan Per.Dir. 0292.P/DIR/2016 tanggal 25 Agst 2016 tentang Pembentukan 32 Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan untuk mengelola listrik pedesaan di setiap propinsi dan FJ nya No. 0294.P/DIR/2016 tanggal 29 Agst 2016.

2. Strengthening of project organization to support electricity development in accordance with :
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0011-0021.P/DIR/2016 dated 21 January 2016 and Board of Directors Regulation No. 0043-0049.P/DIR/2016 dated 19 February 2016 on Development Parent Unit (UIP) of PLN. Including the addition of 1 UIP in Sumatra and 1 UIP in Kalimantan and the naming based on the Region.
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0025-0035.P/DIR/2016 dated 27 January 2016 and Board of Directors Regulation No. 0094-0100.P/DIR/2016 dated 7 March 2016 on the Position Formation (FJ) of Development Parent Unit (UIP), as well as the amendment to the FJ UIP on 24 May 2016.
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0050-0067.P/DIR/2016 dated 22 February 2016 on PLN Project Executing Unit (UPP) at the PLN Development Parent Unit (UIP)
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0120-0137.P/DIR/2016 dated 15 March 2016 on the Position Formation (FJ) of Project Executing Unit (UPP) at the Development Parent Unit (UIP).
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0262.P/DIR/2016 dated 22 June 2016 on Certification Center of PLN related to the role strengthening, among others QA, standardization, assessment, commissioning, TPG, NDC Test on PLN & IPP Power Plants and their FJ No. 0275.P/DIR/2016 dated 18 July 2016.
   - The issuance of the Board of Directors Regulation No. 0292.P/DIR/2016 dated 25 August 2016 on the Establishment of 32 Executing Unit for Electricity Project to manage rural electricity in each province and its FJ No. 0294.P/DIR/2016 dated 29 August 2016.

Manfaat: Memperkuat organisasi UIP untuk mendukung sinergi pembangunan kelistrikan 35.000 MW supaya tepat waktu, biaya dan mutu.

Benefits: Strengthening the UIP to support the synergy for the 35,000 MW electricity development ensuring accuracy in terms of time, cost, and quality.

3. Pengembangan dan penyempurnaan Direktori Kompetensi (Dirkom), Uraian Jabatan (Urjab) dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ).
   Manfaat: Tersedianya Dirkom, Urjab dan KKJ sebagai dasar pengembangan kompetensi SDM, kesesuaian antara jabatan dengan pemangku jabatan.

3. Development and improvement of the Competence Directory (Dirkom), Position Description (Urjab), and Position Competency Requirement (KKJ).
   Benefits: The availability of Dirkom, Urjab, and KKJ as the basis for HR competence development, conformity between the position and the person holding the position.

4. Pengembangan standar Proses Bisnis sesuai PLN BisProF meliputi:
   - Pemetaan proses bisnis Unit-Unit sesuai standar PLN BisProF.

4. Development of Business Process standards in accordance with PLN BisProF, including :
   - Business process mapping of units in accordance with PLN BisProF standards.

- Telah diterbitkan Nota Dinas No. 00127/SDM.01.01/DIVORG/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Proses Bisnis Manajemen IPP yang telah disepakati Stakeholder terkait.
- Telah dikembangkan Dekomposisi Proses Bisnis untuk seluruh Unit PLN.
- Telah dikembangkan Sistem Tata Kerja (STK) yang selaras dengan PLN BisProF Unit.

Manfaat: Tersedianya *framework* proses bisnis PT PLN (Persero) sebagai acuan dasar pengelolaan kegiatan, dasar penyusunan sistem korporasi & organisasi untuk menjalankan proses bisnis PLN yang efektif dan berkelanjutan.

5 Penetapan Perencanaan Tenaga Kerja dan Pagu Rekrutmen Tahun 2016 secara Korporat dan untuk masing-masing Unit PLN.
Manfaat: Diperoleh perencanaan untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia (kapasitas dan kapabilitas) sesuai strategi, kebijakan dan program kerja Perusahaan.

6. Penetapan Perencanaan Tenaga Kerja dan Pagu Rekrutmen Tahun 2016 secara Korporat dan untuk masing-masing Unit PLN.

7. Implementasi ketentuan tentang alih daya, koordinasi dan pembinaan Unit-Unit terkait cara-cara peningkatan kualitas implementasi penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
Manfaat: Memastikan kebijakan alih daya yang dibuat PLN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh Unit mengimplementasikan kebijakan alih daya tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI BARU PLN MENJAMIN KESUKSESAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT 35.000 MW

Dalam rangka menjalankan penugasan Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan listrik, dan yang utama adalah menjamin kesuksesan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW & jaringan tegangan tinggi 46 ribu kms, Gardu Induk sebesar 109 ribu MVA memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp1.200 triliun, pemenuhan pertumbuhan *demand* berupa penjualan yang naik 16.200 GWh/tahun, pelanggan baru tumbuh 3 juta/tahun serta penambahan rasio elektrifikasi dari 88,3% menjadi di atas 97,4% pada 2019, PLN melakukan perubahan struktur organisasi PLN sebagai salah satu strategi korporat yang mendasar. Tujuannya adalah memastikan terjaminnya kecukupan dan keandalan sistem serta kecepatan pelayanan serta pemenuhan tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan dalam tataran operasional.

- The issuance of the Official Note No. 00127/SDM.01.01/DIVORG/2016 dated 23 May 2016 on the IPP Management Business Process which has been agreed upon by the related stakeholders.
- The Business Process Decompositionhas been developed for all PLN Units.
- The Work Procedure System (STK) that is in conformity with the PLN BisProF Unit has been developed.

Benefits: The availability of PT PLN (Persero) business process framework as the basis for the management of activities, basis for the corporate & organization system formulation to implement effective and sustainable business processes at PLN.

5. Determination of the 2016 Corporate Workforce Planning and Recruitment Capping for each PLN Unit.
Benefits: Obtaining the plan to support the human resources requirement (capacity and capability) that is in accordance with the strategy, policy, and work program of the Company.

6. Determination of the 2016 Corporate Workforce Planning and Recruitment Capping for each PLN Unit.

7. Implementation of the provisions on outsourcing, coordination, and counseling of Units related to the methods of improving implementation quality of partial work transfer to other companies.
Benefits: Ensuring PLN outsourcing policies are in accordance with the applicable legislation and all units are implementing the outsourcing policies.

NEW PLN ORGANIZATIONAL STRUCTURE SECURING THE SUCCESS OF THE 35,000 MW POWER PLANT CONSTRUCTIONS

In order to implement the government's mandate to meet electricity needs and to ensure the successful completion of the 35,000 MW power plant project, 46,000-kilometer circuit, and 109 thousand MVA Substation requires substantial funding of approximately Rp1,200 trillion, along with the fulfillment of increasing demand (namely sales growth of 16,200 GWh annually), 3 million new customers annually and the electrification ratio rising from 88.3% to over 97.4% by 2019, PLN has changed its organizational structure as a fundamental corporate strategy. The end result aims to ensure an adequate and reliable system, fast service and accountability in the corporate financial management at the operational level.

Mulai September 2015, PLN melakukan perombakan struktur di tingkat Direktorat dengan membagi manajemen operasional PLN per daerah, sesuai pembagian Wilayah Regional. Masing-masing Wilayah Regional di Indonesia dipimpin oleh satu Direktur yang akan mengatur seluruh bisnis Perseroan dari hulu ke hilir, dari proses Perencanaan, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan sampai dengan Pelayanan Konsumen/retail. Direktur dari Direktorat dengan fungsi bisnis regional tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan dalam suatu wilayah (*end to end*), sedangkan Direktur dari Direktorat penunjang, seperti: Direktur SDM, Direktur Keuangan, bertindak sebagai pendukung (*support*).

Commencing in September 2015, PLN revamped its structure at the Directorate level by dividing operational management according to Regional Area divisions in Indonesia. Each division is led by a Director, who will manage the entire upstream-to-downstream business, from Planning, Construction, Operation and Maintenance Services to End User/ Retail Consumer. The Director of regional business functions will be responsible for the overall region (end-to-end), while the Director of supporting directorates (i.e. Director of Human Resources, Director of Finance) will act as support.

Pada Mei 2016 dilakukan pengembangan organisasi dengan menambah 2 Unit Induk Pembangunan (UIP) menjadi 18 UIP dan 66 UPP (Unit Pelaksana Proyek) untuk memperkuat pembangunan ketenagalistrikan. Telah diterbitkan Per. Dir. 0292.P/DIR/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pembentukan 32 Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) untuk mengelola listrik pedesaan di setiap propinsi

Organizational development was conducted in May 2016 by adding 2 Development Parent Units, becoming 18 UIP, and 66 UPP (Project Executing Unit) to strengthen electricity development. The Board of Directors Regulation No. 0292.P/DIR/2016 dated 25 August 2016 on the Establishment of 32 Electricity Project Executing Units (UPPK) was issued to manage rural electricity in every province.

Perubahan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan kekurangan dari pengelolaan Program FTP yang tidak selesai pada waktunya. Berbagai kelemahan struktur organisasi lama dalam pengelolaan FTP, perbaikan dan perubahan di tatanan operasional dari struktur baru serta kelebihannya dalam mengelola penyelesaian program dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut.

The change to the organizational structure was implemented while considering any shortcomings of incomplete FTP program management at the due time. Weaknesses in the old FTP management structure, newly-made improvements and changes in the operational structure, as well as the advantages of program completion management, are described briefly as follows.

- Pelajaran dari pengelolaan FTP sebelumnya (2006- 2009).
  - Tim koordinasi proyek tidak ditetapkan sejak perencanaan.
  - Tim melapor langsung ke Direksi, tidak ada kepemilikan secara khusus oleh salah satu Direktur
  - Tidak ada Organisasi yang mengelola tingkat Program.

- Lessons learned from previous FTP management (2006–2009).
  - Project coordination team was not established from the planning stage.
  - The team reports directly to the Board of Directors, each Director had no particular ownership.
  - There was no organization managing on the Program level.

- Direktorat Konstruksi Strategis tahun 2008 baru dibentuk tahun 2008.
  - Pengelolaan dan Organisasi PMO serta Fungsi SPKK pasca reorganisasi.
  - PMO di bawah Div AKO.
  - PMO mengelola *database*, administrasi pelaporan dan laporan kemajuan, termasuk me-*review* dan mengevaluasi kemajuan unit konstruksi.
  - Mengolah data sejak Tahap Inisiasi, Implementasi s/d Pasca Proyek berbasis TI (PMO Tools).
  - SPKK (Manajer Senior Program Strategis) menjalankan fungsi *tracking, monitoring*, evaluasi, dan *early warning system* atas program strategis kelistrikan.

- Strategic Construction Directorate was newly established in the same year.
  - PMO Management & Organization as well as SPKK Post Reorganization Functions.
  - PMO is under the AKO Division.
  - PMO manages database, as well as administering reports and progress reports, including reviewing and evaluating progress in each construction unit.
  - Processing data from the Initiation Stage, Implementation up to Post Project with IT-based (PMO Tools).
  - SPKK (Manager Senior Program Strategy) runs the functions of tracking, monitoring, evaluation, and providing early warning system to strategic electricity programs.

- Keunggulan Pola Organisasi Pengelolaan Program 35.000 MW:
  - Memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan berkualitas.

- Advantages of the 35,000 Program Organizational Management Scheme:
  - Enabling quick and quality data-based decision-making.

- Integrasi dan koordinasi proses dan jadwal secara *end-to-end*.
- Ada shared KPI yang fokus pada pencapaian tujuan utama Program 35.000 MW (listrik siap digunakan oleh pelanggan).
- Kejelasan komando dan *dedicated champion* didukung ketetapan formal
- Mengikuti skema pengelolaan proyek dengan mempertimbangkan beban kerja dan wilayah kerja pada periode program dan pasca program.
- Mempertimbangkan penyebaran wewenang, beban kerja dan wilayah kerja.

Perubahan struktur organisasi tersebut menunjukkan kesiapan internal PLN untuk memastikan Proyek 35.000 MW berhasil diselesaikan tepat waktu, efisien dan berkualitas.

- Integration and coordination process and end-to-end scheduling.
- Shared KPIs are focused on the achievement of the 35,000 MW Program's main objectives (ready-to-use electricity).
- Clarity in command and dedicated champion supported by formal provisions.
- Following project management schemes by considering work load and work area during the program and post-program phases.
- Consideration of authority and workload deployment.

Changes made to the PLN organizational structure demonstrate PLN's own internal readiness to ensure that the 35,000 MW project will be successfully completed in a timely and efficient manner, and to a very high standard.

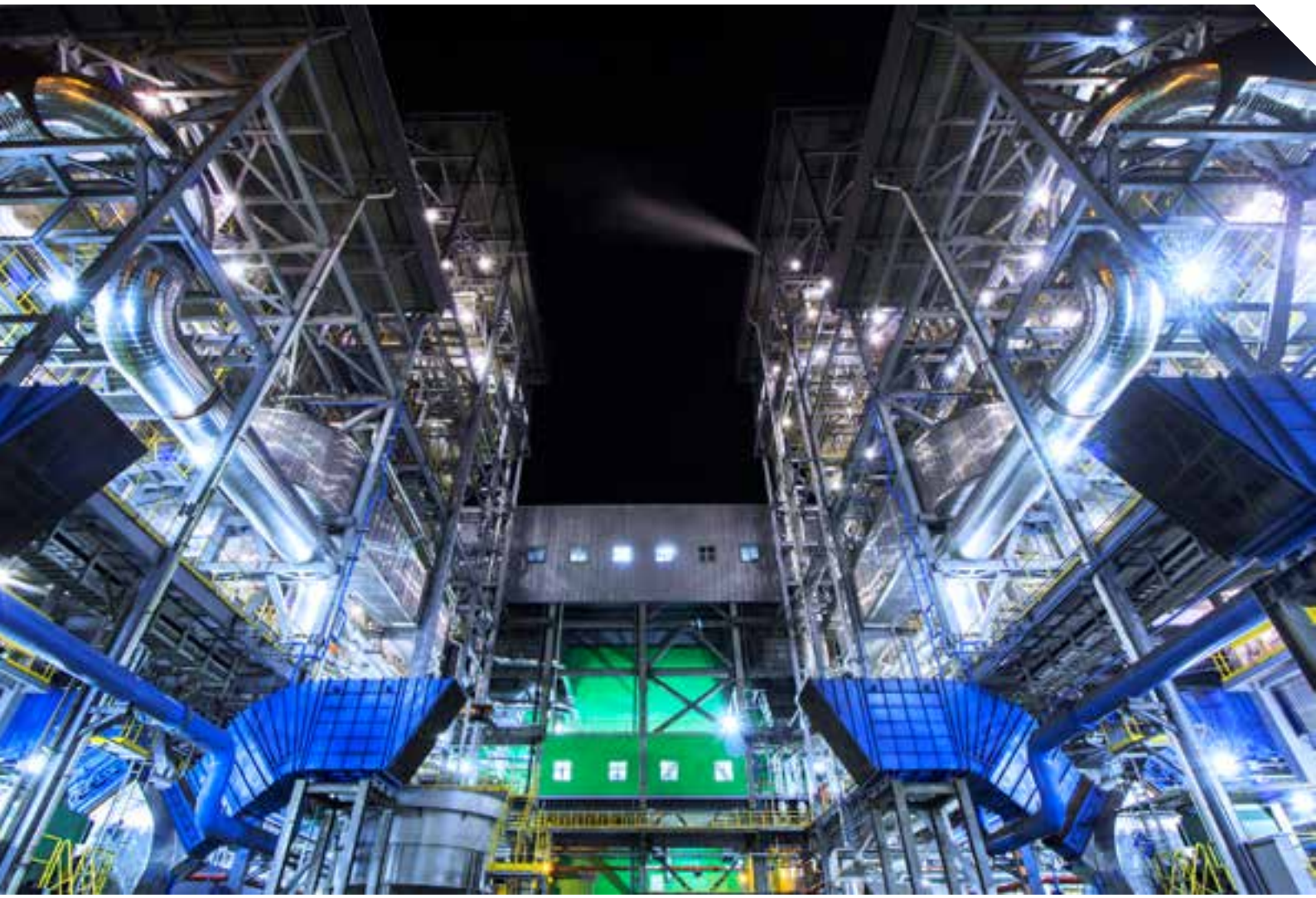

Rencana Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan

Powerplant Infrastructure Facility Development Plan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki dampak *multiplier* besar dalam mendukung pembangunan perekonomian suatu negara. Kekurangan tambahan daya akan berakibat pada terjadinya pemadaman bergilir, seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu, yang laju pertambahan pasokan daya listriknya, sama atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.

Persoalan yang cukup mendasar dalam memenuhi kebutuhan listrik adalah besarnya biaya investasi dan lamanya masa pengembalian modal. Sementara risiko sosialnya cukup tinggi, mengingat penyediaan tenaga listrik tidak hanya melibatkan pembangunan pembangkit, namun pembangunan saluran distribusi yang berada di wilayah publik.

Oleh karena itu, dalam membangun dan mengembangkan kapasitas pembangkit, PLN senantiasa memperhitungkan beberapa kriteria, seperti keandalan pembangkit bersangkutan, biaya yang rendah, tingkat keandalan/kinerja pembangkitan yang optimum serta lokasi pembangkit yang harus sedekat mungkin dengan konsumen.

Mengingat pembangunan pembangkit akan terus berlangsung selaras dengan pembangunan ekonomi, PLN menyusun rencana pengembangan kapasitas pembangkit dengan menetapkan kebijakan pengembangan pembangkit dan merealisasikan rencana pembangunan dalam beberapa program pembangunan pembangkit untuk mengefisienkan biaya pembangunan pada tahap selanjutnya.

Kebijakan Pengembangan Kapasitas Pembangkit

1. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan: (i) untuk memenuhi pertumbuhan beban yang direncanakan; (ii) pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik, (iii) meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan.
2. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan tenaga listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik, yang diukur dengan kriteria *Loss of Load Probability* (LOLP) dan cadangan daya (*reserved margin*). Pembangkit sewa dan excess power tidak diperhitungkan dalam membuat rencana pengembangan jangka panjang, namun diperhitungkan dalam perencanaan jangka pendek untuk menggambarkan upaya PLN dalam mengatasi kondisi krisis kelistrikan.
3. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk lebih banyak mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan *supply-demand* dan status kesiapan pengembangan pembangkit EBT tersebut, serta kebijakan Pemerintah dalam program 35.000 MW.

POWERPLANT DEVELOPMENT PLAN

Electrical power is one of the most basic of needs and has a huge multiplier effect in the economic development of a country. Frequent power shortages lead to more rolling blackouts, as often occurs in certain areas where the rate of supply increase in electric power is just equal with, or lower than, those regions' economic growth.

The most fundamental issue in fulfilling electricity demand is the high cost of investment and length of capital return. Meanwhile the social risks are relatively high. It is a fact that increasing electric power supply does not involve only the construction of a power plant itself, but also the construcion of distribution system spanning across the public domain.

Therefore, in constructing and developing power plants, PLN takes into account several criteria, such as: the reliability of the respective power plants, low cost, and performance. Furthermore, powerplant location should be as close as possible to the consumers.

Given the fact that power demand will continue to escalate in line with economic growth, PLN has prepared a development plan to boost national power supply capacitiy, with a power plants development policy, realization plan of development, and streamlining the development costs at later stages.

Powerplant Development Policy

1. The development of power generation capacity is aimed:(i) to meet the growing demand for electricity; (ii) to fulfill the demand for electricity for certain prioritized regions currenly in shortage, (iii) to improve reliability of electricity supply by emphasizing the use of local energy sources, in particular renewable energy.
2. The development of power generation capacity is based on the principle of low cost, whilst fulfilling a reasonable reliability standard in the electric power industry, measured by the Loss of Load Probability (LOLP) and backup power (reserved margin) criteria. Generator rental and excess power is not taken into account in making long-term development plan, but is taken into account only in short-term planning in order to overcome the electricity demand crisis.
3. One of Government's policies is to push more for the development and utilization of renewable energy as a power source while maintaining supply-demand balance, as well as for the 35,000 MW national power plant program.

4. Kebijakan dalam besarnya cadangan daya mengacu kepada kecukupan pemenuhan tenaga listrik sesuai kriteria perencanaan. Dengan nilai cadangan daya tertentu, pembangkit-pembangkit di suatu sistem mampu memasok tenaga listrik secara terus menerus.
5. Pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, *topologi* jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, serta kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial.
6. Pemenuhan kebutuhan beban puncak sistem besar diupayakan tidak menggunakan pembangkit berbahan bakar BBM, prioritas perusahaan adalah dengan menggunakan gas (LNG, mini LNG, CNG), apabila ada potensi hidro lebih diutamakan pembangkit hidro seperti *pumped storage* atau PLTA *Peaking* dengan *reservoir*.
7. Pembangkit pemikul beban menengah pada umumnya menggunakan PLTGU berbahan bakar gas lapangan (gas pipa), namun hanya direncanakan apabila terdapat kepastian pasokan gas. Jika pembangunan PLTGU tidak dimungkinkan, sebagian pembangkit beban dasar yaitu PLTU Batubara dapat dioperasikan sebagai pemikul beban menengah dengan *capacity factor* yang relatif rendah, dan perlu dibantu dengan pembangkit jenis lain yang mempunyai *ramping rate* tinggi seperti PLTG dan PLTA Bendungan.
8. Penyelesaian kekurangan pasokan listrik jangka pendek dilakukan melalui pengembangan *mobile power plant* (MPP), yang menggunakan bahan bakar gas dengan teknologi pembangkit *dual fuel*.
9. Pengembangan sistem kelistrikan yang *isolated* dan di pulau-pulau kecil masih memerlukan pembangkit berbahan bakar minyak.
10. Kepemilikan proyek-proyek pembangkitan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan perusahaan. Oleh sebab itu, pembangunan sebagian proyek pembangkitan akan dilakukan oleh pihak swasta dalam skema *independent power producer* (IPP).

4. Policy on the size of power reserve depends on electric power adequacy according to planning criteria. With a certain predetermined value of power reserve, power plants within the system must be able to supply continuous power.
5. The choice of plant location is determined by local primary energy feedstock availability or primary energy supply ease, proximity to load centers, the principle of regional balance, desired transmission network topology, constraints on transmission system, and technical constraints, as well as environmental as well as social considerations.
6. Preferably, fulfilling a large system peak load is sought by not using fossil fuel fired power plants. The priority is to use gas (LNG, mini LNG, CNG), and should there be hydro potential, hydro power plants are of a higher preference such as pumped storage hydro power plants or hydropower peaking with reservoirs.
7. In general, medium loadbearing power generators utilize field gas-fired power plant (gas pipeline), but only if a realible gas supply is available. Should a gas power plant not be feasible, a coal power plant can be considered as a medium loadbearing with relatively low capacity factor, to be backed up with other types of plants that have a slender high rate like gas power plant and hydropower plant.
8. Overcoming short-term power shortages is done through the provision of mobile power plants (MPP), which utilize gas fuel with dual fuel power plant technology.
9. Electrical power generators for small isolated islands can still be based on fossil fuel as the primary energy source (feedstock).
10. Power generator project ownership depends much on the Company's funding capability. Therefore in several cases, the construction of some power generator projects will be executed by the private sector under the scheme of independent power producers (IPP).

Pengembangan Pembangkit

Berdasarkan RUPTL 2016-2025 dan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7,1% per tahun, maka pada kurun waktu 2016-2025 diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebanyak 80,5 GW untuk seluruh Indonesia, atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 8,1 GW per tahun. Dari kapasitas tersebut PLN dan IPP akan membangun masing-masing 18,2 GW dan 45,7 GW, sedangkan 16,6 GW lainnya merupakan proyek yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya.

PLTU batu bara mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 34,8 GW atau 43,2% sementara PLTGU gas dengan kapasitas 18,9 GW atau 23,5% dan PLTG/MG sebesar 4,3 GW atau 5,3%. Untuk energi terbarukan, yang terbesar adalah PLTA sebesar 14,5 GW atau 18% dari

Power Plant Development

Based on RUPTL 2016-2025, and assuming average economic growth of over 7.1% per year, it is estimated that for the period 2016-2025 a much needed additional 80.5 GW of power generation is required for the whole of Indonesia. This equates to 8.1 GW of additional power increase per year. Between PLN and IPPs, they will build a total of 18.2 GW and 45.7 GW respectively, while the rest of the 16.6 GW power plants project developments are still unassigned, as well as their funding sources.

Coal based power plants dominate the category that will be built at 34.8 GW, or 43.2% of the total, while gas power plants will be around 18.9 GW or 23.5% of total, and gas power plant/MG at 4.3 GW, or 5.3%. For renewable energy, the largest is hydropower plant at 14.5 GW, or 18% of total capacity,

kapasitas total, disusul oleh panas bumi sebesar 6,2 GW atau 7,6%. Sedangkan pembangkit lain sebesar 1,9 GW atau 2,4% berupa pembangkit termal modular, PLTS, PLTB, PLTD, PLT sampah dan biomass.

followed by geothermal at 6.2 GW, or 7.6%. Other types of power plants at 1.9 GW, or 2.4%, are in the form of modular thermal power, solar power, thermal power station, diesel, and waste/biomass power plants.

Rencana Pembangunan Pembangkit PLN
PLN Power Development Plan

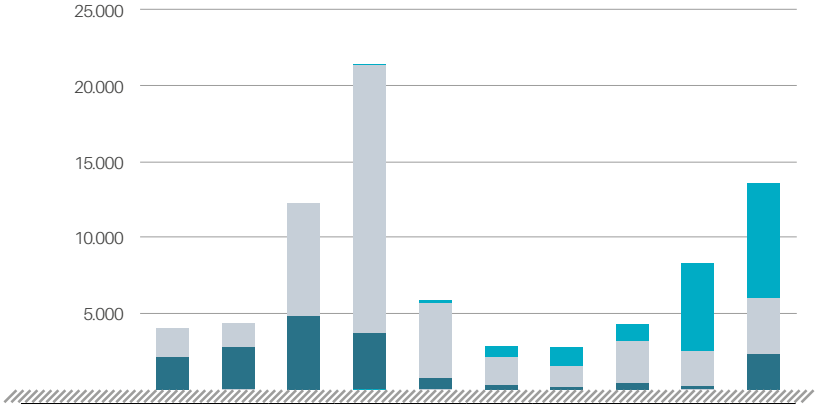

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
unallocated	-	-	-	15	76	798	1.247	1.201	5.810	7.498
IPP	1.896	1.649	7.579	17.646	5.038	1.779	1.307	2.741	2.317	3.722
PLN	2.244	2.838	4.858	3.737	760	388	262	456	291	2.387

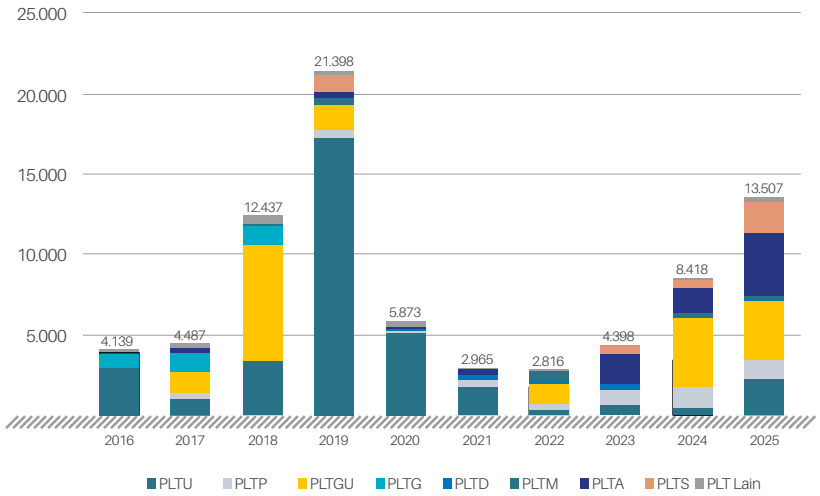

PLTU
Steam Power Plant
PLTD
Diesel Power Plant
PLT Lain
Other Power Plants

PLTP
Geothermal Power Plant
PLTM
Micro Hydro Power Plant

PLTGU
Combined Cycle Power Plant
PLTA
Hydro Power Plant

PLTG
Gas Turbine Power Plant
PLTS
Solar Cell Power Plant

Dari perencanaan pembangkit yang telah tersebut, maka akan terlihat komposisi produksi energi listrik per jenis energi primer Indonesia diproyeksikan pada tahun 2025 akan menjadi 50,3% batu bara, 29,4% gas alam (termasuk LNG), 8% panas bumi, 10,4% tenaga air, 0,6% BBM, dan 1,1% bahan bakar lainnya (dengan total porsi Energi Baru Terbarukan sebesar 19,6%). Untuk mencapai target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25% pada tahun 2025, maka diperlukan tambahan energi sebesar 27 TWh yang dapat dihasilkan dari PLTN 3,6 GW atau pembangkit EBT lain sebesar 14,4 GW. Tingginya porsi bauran energi dari gas sebesar 29% merupakan kontingensi apabila target bauran energi dari EBT sebesar 25% pada tahun 2025 tidak terpenuhi.

From aforementioned planning, one can observe that the composition of the electrical energy production per primary energy by type in 2025 Indonesia is projected to be 50.3% coal, 29.4% natural gas (including LNG), 8% geothermal, 10.4% hydro, 0.6% other fossil fuel, and 1.1% of other fuel types (with total portion of Renewable Energy of 19.6%). To achieve the target of fuel mix of New and Renewable Energy (EBT) by 25% by 2025, it will require an additional 27 TWh of energy that can be generated from 3.6 GW nuclear power plants (PLTN) or other Renewable Energy (EBT) generating of 14.4 GW. The high proportion of the 29% gas fuel mix is a contingency if the 25% target of the fuel mix from renewable energy by 2025 cannot be met.

Bauran Energi (PLN + IPP)

Fuel Mix (PLN + IPP)

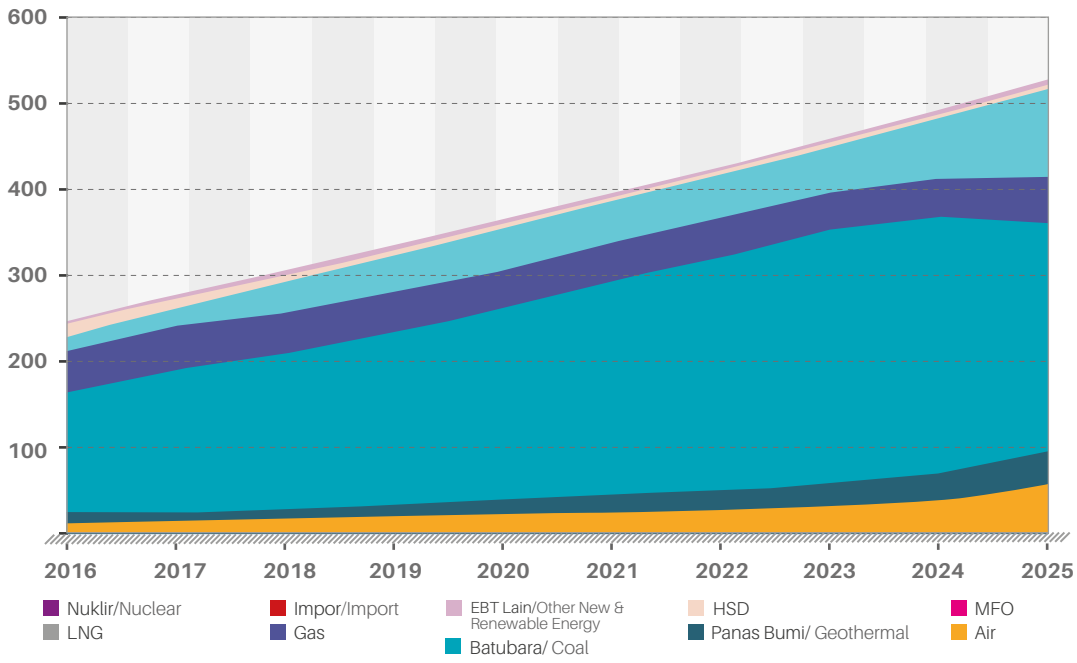

Program 35.000 MW untuk Indonesia

Semangat baru pembangunan pembangkit sebesar 35.923 MW untuk 5 tahun ke depan, dilandasi pula oleh kenyataan bahwa rasio elektrifikasi akhir tahun 2014 sebesar 84% yang menunjukkan Indonesia masih tertinggal di bidang ketenagalistrikan dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (100%) Brunei (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99%), dan Vietnam (98%) [Global Status Report 2014, GIZ, data 2013].

Mempertimbangkan urgensinya pemenuhan listrik dan belajar dari pengalaman program pembangunan pembangkit FTP-1, Pemerintah dengan PLN sebagai pelaksana, menjadikan Program Pembangunan Pembangkit 35.923 MW yang selanjutnya disebut sebagai program

35,000 MW Program for Indonesia

PLN's new-found strong determination in the construction of 35,923 MW for the next 5 years is due to the fact that Indonesia's 2014 electrification ratio only amounted to 84%, lagging behind in comparison with other Southeast Asian countries, such as: Singapore (100%), Brunei (99.7%), Thailand, (99.3%), Malaysia (99%), and Vietnam (98%) [Global Status Report 2014, GIZ, the data in 2013].

Considering the urgency, the electrification program and the lessons learned from the FTP-1 power plant program and past experience, the government and PLN, as executor, are trying hard to realize 35,923 MW Power Development Program as a success. Hereinafter, the national electrification program

35.000 MW sebagai program utama pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional pada kurun waktu 2015-2019.

Saat ini total kapasitas terpasang nasional sebesar 54.664,50 MW yang dibangun PLN beserta swasta sejak PLN berdiri. Dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, dalam lima tahun ke depan dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW per tahun. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Program kelistrikan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Program 35.000 MW membutuhkan dana investasi yang sangat besar di atas Rp1.100 triliun, sehingga untuk tetap menjaga kemampuan finansial maka PLN akan membangun pembangkit sebesar 10.000 MW. Adapun sisanya sebesar 25.000 MW akan ditawarkan kepada pihak swasta atau independent power producer/IPP.

Untuk merealisasikan program itu, sejumlah peraturan telah diterbitkan dan diberlakukan. Peraturan termaksud antara lain UU 2/2012 (tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum), Perpres 30/2015 (tentang Perubahan atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum), Permen ESDM 3/2015 (tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik), serta Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015 (tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024). Mengingat sedemikian strategisnya program 35.000 MW, dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Program Pembangkit 35.000 MW diyakini memiliki dampak penggandaan kegiatan ekonomi yang amat besar di seluruh Indonesia. Dengan sebaran lokasi pembangunan mencapai 210 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, sementara di Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi, maka selain berdampak positif terhadap bidang industri dan investasi, juga akan membuka lapangan kerja hingga meningkatkan serapan komponen dalam negeri.

Perhitungan awal yang dilakukan Kementerian ESDM mengindikasikan megaproyek ini akan membuka peluang pembangunan 75.000 set tower, pemanfaatan 300.000-an km konduktor aluminium, pembangunan 1.382 unit gardu induk, penggunaan 2.600 set trafo, serta kebutuhan akan 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.

Pemenuhan seluruh produk tersebut, diprakirakan akan menyerap sekurang-kurangnya 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung. Jika 1 tenaga kerja membawa manfaat bagi paling-tidak 4 orang

is referred to as the 35,000 MW program, the government's major program to spur national economic growth in the period 2015-2019.

Currently the national total installed capacity is 54,664.50 MW built since the beginning of PLN's establisment. Taking into account the projected economic growth of 6-7% a year for the next five years, 35,000 MW or 7,000 MW additional electricity capacity per year is needed. Therefore, the government has no other choice but to increase electricity capacity by 35,000 MW. This program has become a national strategic program that was declared in the document of the National Medium Term Development Plan 2015-2019.

The 35,000 MW program is in need of very large investment funding of over Rp1,100 trillion. PLN itself has only the financial capacity to build 10,000 MW. As for the other 25,000 MW, this is being offered to private parties or independent power producers/IPP.

To realize the program, a number of regulations have been issued and enacted. The said regulations include: Law 2/2012 (on Land Acquisition for Public Interest), Presidential Decision 30/2015 (on the Amendment of Presidential Decision 71/2012 on the Implementation of Land Acquisition for Public Interest), ESDM 3/2015 (on Power Purchase Procedures), as well as the Decision EMR 74K / 21 / MEM / 2015 (on the Ratification of Electricity Supply Business Plan 2015-2024). Given such a strategic program of the 35,000 MW, the full support of all stakeholders is necessary.

Spurring Economic Growth

The 35,000 MW program will no doubt have tremendous multiplier effects for the economy throughout Indonesia. With the distribution of the construction sites to reach 210 locations across Indonesia consisting of 59 locations in Sumatera, 34 locations in Java, 49 locations in Sulawesi, while in Kalimantan 34 locations, and in 34 locations in the eastern region of Indonesia, in addition to positive impact on industry and investment, it will create jobs and boost the uptake of local content.

Preliminary calculations conducted by the Ministry of Energy indicates that this mega project will require the construction of 75,000 towers, utilization of 300,000 km aluminum conductors, construction of 1,382 substation units, the use of 2,600 transformers, as well as the need for 3.5 million tons of steel profiles and pipes.

The upshot is that all of these products and equipment are expected to absorb at least 650,000 direct workers and 3 million indirect workers. If one worker can bring benefit to the least 4 others, then about 20 million people will gain

lainnya, maka sekitar 20 juta orang akan mendapat manfaat ekonomi dari program ini. Adapun nilai investasi total yang diperlukan jika minimal 40% saja kebutuhan komponen dipenuhi oleh produk dalam negeri bisa mencapai lebih dari Rp1.100 triliun. Suatu angka yang cukup besar untuk menggerakan ekonomi nasional secara langsung.

Di luar itu, energi listrik yang dihasilkan akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan yang akan terus berlangsung, yang pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian nasional.

TANTANGAN PROGRAM 35.000 MW

1. Perseroan perlu segera memperkuat struktur permodalan untuk menjaga rasio keuangan yang sehat.
2. Perseroan memerlukan percepatan dan kejelasan skema penjaminan Pemerintah untuk pendanaan.
3. Interdependensi antar aktivitas pada Program 35.000 MW sangat tinggi, sehingga memerlukan integrasi antar fungsi dan proses yang kuat.
4. Pengadaan tanah membutuhkan waktu 488-742 hari (sesuai dengan UU 2 tahun 2012) dan harus selesai sebelum penunjukan pengembang.
5. Perizinan membutuhkan akselerasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta perlu waktu yang lama (rencana PTSP masih membutuhkan 240 hari sampai dengan siap konstruksi).
6. Untuk memberikan waktu konstruksi yang cukup dan mencapai target COD tahun 2019, maka penunjukan pengembang harus selesai pada kuartal IV tahun 2016 untuk pembangkit PLN dan kuartal IV tahun 2015 untuk pembangkit IPP.
7. Perseroan memerlukan langkah khusus pengamanan pasokan energi primer, terutama gas.

Dukungan Pemerintah untuk Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW

Keberhasilan program 35.000 MW untuk 5 (lima) tahun ke depan membutuhkan dukungan Pemerintah dalam hal:

1. Mempermudah dan mempercepat persetujuan SLA dan PKLN.
2. Menyetujui *direct loan* dari bank pembangunan internasional ke PLN dengan jaminan pemerintah.
3. Melanjutkan proyek kelistrikan tahun jamak (*multi years*) melalui APBN.
4. Merencanakan tambahan modal ke PLN untuk menambah kapasitas investasi.
5. Menyetujui tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
6. Memberikan dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
7. Menetapkan Perhutani sebagai penerima kuasa dan pengguna hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.

economic benefits from this program. If at least 40% of the total investment is met from locally sourced domestic products, or around Rp1,100 trillion, it is a large enough number to drive the national economy.

In addition, electrical energy is very fundamental as a driving force in accelerating national economic growth.

35,000 MW PROGRAM CHALLENGES

1. The Company must immediately strengthen its capital structure to maintain sound financial ratios.
2. Immediate decisions and clarification from the government in regard to funding guarantee scheme.
3. Interdependency of 35,000 MW program is very high; robust integration of all functions and processes is of outmost importance.
4. Land Acquisition can take up to any where from 488 to 742 days (in accordance with Law Act 2 of year 2012) and the process must be completed prior to appointment of any developer.
5. Permit processess need to be urgently expedited by the central and regional governments; currently still consumes considerable time (PTSP plan still takes 240 days before any construction can commence).
6. To allow sufficient construction time and to achieve the COD target in 2019, the contract awards to developers should have be been completed during the fourth quarter of 2016 to PLN's and fourth quarter of 2015 for IPP plants.
7. PLN requires extraordinary measures to secure primary energy supply (feedstock) in particular for gas.

Government Support for the Acceleration of 35,000 MW Development Program

The success of the 35,000 MW program for the next five years much depends on government support to:

1. Facilitate and accelerate the approval of SLA and PKLN
2. Approve direct loans from international development banks to PLN with government guarantee
3. Resume the multi-year electricity projects through the state budget
4. Secure additional capital investment to PLN in order to increase investment capacity
5. Approve additional allocation for gas and LNG to PLN
6. Secure forestry permits (giving permission to construct on protected forest while completing Borrow and Use of Forest Area Permit)
7. Assign Perhutani as endorsee and forest custodian to procure forests land and re- forestationIssue automatic jetty permits once the local government has issued location permits

8. Menerbitkan izin *jetty* secara otomatis apabila Pemda telah menerbitkan izin penetapan lokasi.
9. Menyederhanakan perizinan terkait dengan kelistrikan.
10. Membentuk Tim Pengadaan Tanah khusus program 35.000 MW.

Program Antisipatif oleh PLN

PLN telah melakukan berbagai persiapan untuk mengawal keberhasilan implementasi Program 35.000 MW meliputi:

1. Melakukan perubahan struktur organisasi dengan membentuk organisasi berbasis regional dimana Direktorat Regional bertanggung jawab secara end to end termasuk di dalamnya pembangunan proyek PLTU dari Program 35.000 MW di regionalnya.
2. Melakukan program perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan dan perkembangan Program 35.000 MW.
3. Mengembangkan teknologi informasi berupa aplikasi *Project Management Office* (PMO) untuk memantau perkembangan realisasi pembangunan masing-masing proyek.
4. Menetapkan keberhasilan realisasi proyek program 35.000 MW sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang menjadi dasar penilaian kinerja organisasi dan individu.
   Implementasi Peraturan & Perundangan, dengan tetap menjalin konsultasi dengan penegak hukum, PLN menerapkan aturan-aturan baru yang berlaku dalam pemilihan dan penunjukan kontraktor pembangunan proyek pembangkit, termasuk memutuskan penunjukan langsung pada proyek-proyek tertentu yang memenuhi syarat.

Program Pembangkit 7.000 MW

Program Pembangunan Pembangkit 7000 MW adalah pembangunan pembangkit yang merupakan kelanjutan (*carry over*) dari pembangunan proyek *Fast Track Program* (FTP) – I; FTP – II maupun program regular yang telah dikonsolidasikan dalam RUPTL tahun 2016 – 2025.

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT ENERGI BARU TERBARUKAN

Kebijakan Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Seiring dengan misi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM No. 2/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah, maka Perseroan merencanakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang meliputi pengembangan panas bumi yang sangat besar, pembangkit tenaga air skala besar, menengah dan kecil, pembangkit tenaga angin skala besar dan kecil, serta EBT skala kecil tersebar berupa PLTS, biomassa, biofuel, biogas dan gasifikasi batubara (energi baru). PLN juga mendorong penelitian dan Pengembangan EBT lain seperti *thermal solar power*, arus laut, OTEC (*ocean thermal energy conversion*) dan fuel cell.

8. Simplify licensing procedure related to electricity and power plant
9. Establish a special Land Acquisition Team for the 35,000 MW program.

Anticipatory Measures by PLN

PLN has made various preparations and measures to oversee the implementation of 35,000 MW program, which include:

1. Organizational structure change by establishing region-based organizations where by the Regional Directorate is responsible end to end, including portion of the 35,000 MW program construction in each region.
2. Human Resources Recruitment (HR) according to the needs of 35,000 MW program.
3. Application of information technology for Project Management Office (PMO) to monitor the development progress of each project.
4. Implement Key Performance Indicators (KPI) as the basis for performance assessment of organizations and individuals for the successful accomplishment of the 35,000 MW program.
   Abide by Rules & Regulations, in close consultation with law enforcement, and put into effect new rules that apply in the selection and appointment of contractors, including direct appointment of eligible contractors on specific projects.

7,000 MW Power Plant Program

The 7,000 MW Development Program of is a continuation (carry over) from the Fast Track development Program (FTP) - I; FTP – II, as well as the regular program that has been consolidated in RUPTL 2016-2025.

DEVELOPMENT OF NEW RENEWABLE ENERGY

New and Renewable Energy Power Plant Policy (EBT)

In line with the PLN mission to conduct an eco friendly business, Government Regulation No. 79 Year 2014 on National Energy Policy and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Exploitation 2 of 2006 on Medium Sized Renewable Energy Power Generation, the Company plans to develop new and renewable energy (EBT), which includes the development of a very large geothermal, large hydropower plants, medium and small, large-scale wind power plants and small, distributed and small-scale renewable energy such as solar power, biomass, biofuels, biogas and coal gasification (new energy). PLN also encourages research and development of other types of renewable energy such as thermal solar power, ocean currents, OTEC (ocean thermal energy conversion) and fuel cells.

Kebijakan Perseroan dalam pengembangan EBT didukung oleh Kebijakan Pemerintah yang tercermin dalam Perpres No. 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Perpres No. 194 Tahun 2014. Peraturan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2010 yang selanjutnya telah dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2012, Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2014.

Pemerintah juga mendukung pengembangan EBT dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Untuk tenaga air, kebijakan ini tidak membatasi PLN untuk merencanakan sebuah proyek PLTA tanpa menganut prinsip *demand driven* demi mencapai suatu tujuan khusus tertentu, walaupun hal ini hanya dilakukan secara sangat terbatas dan selektif. Dalam konteks ini PLN merencanakan pembangunan PLTA Baliem berkapasitas 50 MW untuk melistriki 7 kabupaten baru di dataran tinggi Pegunungan Tengah yang sama sekali belum memiliki listrik. Proyek ini diharapkan akan mendorong kegiatan ekonomi di daerah tersebut untuk pengolahan sumber daya alam di Papua.

Khusus mengenai PLTS, PLN mempunyai kebijakan untuk mengembangkan *centralized Photo Voltaic* (PV) untuk melistriki banyak komunitas terpencil yang jauh dari *grid* pada daerah tertinggal, pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar lainnya. Hal ini didorong oleh semangat PLN untuk memberi akses ke tenaga listrik yang lebih cepat kepada masyarakat di daerah terpencil. Lokasi *centralized* PV/PLTS komunal dipilih setelah mempertimbangkan faktor tekno-ekonomi seperti biaya transportasi BBM ke lokasi dan mengoperasikan PV secara *hybrid* dengan PLTD yang telah ada sehinggga mengurangi pemakaian BBM. Selain itu PLN juga memperhatikan, alternatif sumber energi primer/EBT yang tersedia setempat dan tingkat pelayanan yang akan disediakan pada lokasi tersebut.

Company policy for the development of renewable energy is supported by government policies reflected in Presidential Decision No. 4 of 2010 as amended twice under Presidential Decision No. 194 Year 2014. The regulation was elaborated in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 02 of 2010 which subsequently has been revoked under Minister Regulation No. 15 of 2010 as amended by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 In 2012, Ministry of Energy and Mineral Resources No. 21 of 2013 and Regulation of the Minister No. 32 of 2014.

The government moreover supports the development of renewable energy with the imposition of Energy and Mineral Resources Regulation No. 17 Year 2013 on the Purchase of Electricity by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on Photovoltaic Solar Power, Energy and Mineral Resources Ministerial Decision No. 22 of 2014 as amended by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 19 Year 2015 on the Purchase of Electricity of Hydro Power Plant by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2014 on the Purchase of Electricity from Biomass Power Plant and Power Plant Biogas by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Without being constrained only on demand driven policy, PLN is planning to construct hydro power plants selectively for specific goals. In this context PLN plans to build the Baliem Hydropower Plant with a capacity of 50 MW to electrify seven districts in the highlands of Papuan Central Mountains that have not had electricity. This project is expected to stimulate economic growth through providing electrical power for the processing of natural resources in Papua.

On the subject of solar energy power plants, PLN has a policy to support the development of centralized photo voltaic plants (PV) to electrify many remote communities far off grid in underdeveloped regions, the outer islands bordering neighboring countries and outer islands. This is PLN's determination to provide quick access to electricity for communities in remote areas. The location of centralized PV/ communal solar power generators are to be selected after techno-economic considerations such as fuel transport cost to site and hybrid operation of PV and existing diesel power plants so as to reduce the use of fossil fuels. Other than that, PLN also focuses on other locally available alternative sources of primary energy / EBT and the level of service that will be provided at these locations.

Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan

PLN telah menyusun rencana pengembangan EBT sebagai berikut:

1. PLTA: PLN akan mengembangkan sebagian besar dari potensi tenaga air yang ada di Indonesia sebagai proyek PLN.
2. PLTP: PLN akan mengembangkan proyek PLTP, terutama di Sumatera, Jawa dan beberapa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.
3. PLTMH: PLN mendorong pengembangan PLTMH terutama oleh swasta atau masyarakat untuk melistriki kebutuhan setempat dan juga untuk disalurkan ke *grid* atau sistem kelistrikan PLN.
4. PLTB: karena potensi energi angin di Indonesia sangat terbatas, maka pengembangannya akan terbatas di daerah yang memiliki potensi.
5. Biomassa: PLN bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa dengan menjalin kerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten untuk merintis industri biomassa.
6. Energi kelautan: teknologi dan keekonomiannya masih belum diketahui, PLN akan melakukan uji coba skala kecil sebagai proyek penelitian dan pengembangan.
7. *Biofuel*: tergantung kepada kesiapan pasar *biofuel*, PLN siap untuk memanfaatkan *biofuel* apabila tersedia.
8. PLTS: PLN akan mengembangkan program PLTS di 1.000 lokasi/pulau terutama di wilayah yang terluar maupun yang terisolasi untuk mempercepat rasio elektrifikasi.
9. CBM (*Coal Bed Methane*): *Reserve gas* CBM diperkirakan lebih besar daripada *reserve* gas konvensional, terutama di South Sumatera Basin (183 TCF) dan Kutai Basin. PLN berkeinginan untuk memanfaatkan gas non-konvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup.
10. *Coal slurry*: merupakan batubara yang dicairkan melalui proses *upgrading* sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. *Coal slurry* digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar. PLN sudah membangun pembangkit *pilot project* dengan kapasitas 500 kW di Karawang, Jawa Barat.
11. Nuklir: Program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan Pemerintah, karena pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan *profitability*, namun juga aspek politik, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Development of Renewable Energy Power Plant

PLN has prepared renewable energy development plan as follows:

1. Hydropower: PLN will develop most of the hydropower potential in Indonesia as PLN projects.
2. Geothermal: PLN will develop geothermal power plant projects, particularly in Sumatra, Java and Sulawesi, Nusa Tenggara and Maluku.
3. Micro hydro power plant: PLN encourages development of MHP by the private sector or the public to provide electricity for local needs and/or to be distributed to the PLN's grid.
4. Wind Power: because wind energy in Indonesia is very limited, the development will be restricted to areas that have the potential.
5. Biomass: PLN intends to build biomass power plants in cooperation with several Regencies to pioneer the biomass industries.
6. Marine energy: technology and economics are still unknown; PLN will pilot a small scale research and development project.
7. Biofuel: depending on biofuels market readiness, PLN is ready to exploit biofuels wherever applicable.
8. Solar Energy: PLN will develop solar power plants in more than 1,000 locations / islands, especially the outermost and isolated regions.
9. CBM (Coal Bed Methane): CBM gas reserves are estimated to be greater than conventional gas reserves, mainly in the South Sumatra Basin (183 TCF) and Kutai Basin. PLN is eager to take advantage of this non-conventional gas when it becomes available and in sufficient quantities.
10. Coal slurry: a liquefied coal through the process of upgrading to a more environmentally friendly, more transportable, and storeable form. Coal slurry is used as a replacement for diesel in power plants for a small-scale base load. PLN has built a 500 kW pilot project plant in Karawang, West Java.
11. Nuclear: nuclear power development can only be decided upon by the government, because the decision to build nuclear power plants are not solely based on economics and profitability considerations, but also political, social acceptance, culture, climate change and environmental protection.

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

"Membangun sistim transmisi dan distribusi dengan tingkat keandalan optimal untuk mendukung penyaluran daya listrik dari program 35.000 MW maupun daya listrik eksisting dan yang akan datang untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Nusantara."

Kebijakan Pengembangan Transmisi dan Gardu Induk

Dalam mengembangkan sistem transmisi dan gardu induk, Perseroan menerapkan berbagai kebijakan pokok, meliputi:

1. Pengembangan saluran transmisi dan GI secara umum diarahkan kepada tercapainya keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien dengan memenuhi kriteria keandalan tertentu, untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan dan fleksibilitas operasi.
2. Proyek transmisi pada dasarnya dilakukan oleh PLN, kecuali beberapa transmisi terkait dengan pembangkit IPP yang sesuai kontrak PPA dilaksanakan oleh pengembang IPP dan proyek transmisi yang terkait dengan wilayah usaha lain. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya build lease transfer (BLT) dan *power wheeling*.
3. Perencanaan kapasitas transmisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan pertumbuhan beban hingga 30 tahun ke depan.
4. Untuk jaringan yang memasok listrik ke kota besar direncanakan *looping* antar sub-sistem dengan pola operasi terpisah untuk meningkatkan keandalan pasokan.
5. Pada saluran transmisi yang tidak memenuhi kriteria keandalan N–1 akan dilaksanakan *reconductoring* dan *uprating*.
6. Perluasan jaringan transmisi dari *grid* yang telah ada untuk menjangkau sistem *isolated* yang masih dilayani PLTD BBM (*grid extension*) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis
7. Penentuan lokasi GI dilakukan dengan mempertimbangkan keekonomian biaya pembangunan fasilitas sistem transmisi tegangan tinggi, biaya pembebasan tanah, biaya pembangunan fasilitas sistem distribusi tegangan menengah dan harus disepakati bersama oleh unit pengelola sistem distribusi dan unit pengelola sistem transmisi.
8. Pemilihan teknologi seperti jenis menara transmisi, penggunaan tiang, jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah, kabel laut) dan perlengkapannya (pemutus, pengukuran dan proteksi) mempertimbangkan aspek keekonomian jangka panjang, dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik, dengan memenuhi standar nasional (SNI, SPLN) atau standar internasional yang berlaku.

TRANSMISSION SYSTEM DEVELOPMENT PLANNING AND DISTRIBUTION

"Transmission and distribution systems development with a high level of reliability for the electrical power distributions of the 35,000 MW Program as well as the existing and forthcoming power provides for more equitable national development throughout the archipelago."

Transmission and Substation Development Policy

In developing the transmission system and substations, the Company is putting into effect several major key policies include:

1. Development of the transmission line and substations is generally directed towards striking a balance between generating capacity in the upstream and power demand downstream in an efficient manner under certain reliability criterion to overcome distribution bottlenecks, improvement in voltage stability, and operational flexibility.
2. Transmission projects are basically done by PLN, except for several transmissions related to IPP power plants according to appropriate PPA contracts executed by IPP developers and transmission projects related to other business areas. Nevertheless, the options are open for the private sector to take part in power transmission business under a special scheme, for example build lease transfer (BLT) and power wheeling.
3. Transmission capacity planning considering power loading growth for 30 years to come.
4. For tranmission networks that supply power to large cities, it is prefeable using looping between sub-systems with separate operating patterns to improve the reliability of supply.
5. For transmission lines that do not meet the N-1 reliability criteria, they will be going through the process of reconductoring and uprating.
6. To reach isolated systems, expansions of the existing transmission network that are still served by diesel power plants are only considered after economic and technical aspect evaluation.
7. Determining substation locations is done by considering the economic costs of building high-voltage transmission system facilities, the cost of land acquisitions, the construction cost of medium-voltage distribution system facilities; furthermore, it should be mutually agreed upon by the distribution system management and the transmission system management unit.
8. Selection of technologies such as the type of transmission towers, use of poles, channel type (air ducts, underground cables, and submarine cables) and equipment (breakers, measurement and protection) are based on economic considerations, longevity, and quality aspects that comply with national standards (SNI, SPLN) or applicable international standards.

Kebijakan lebih rinci mengenai pengembangan transmisi dan GI adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi kabel 500 kV di ibu kota provinsi di Jawa-Bali. Untuk penyaluran tenaga listrik di luar Jawa-Bali, PLN merencanakan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dibangun minimal 1 (satu) gardu induk, untuk yang terkendala menggunakan jaringan 20 kV.
2. Trafo daya (TT/TM) pada dasarnya direncanakan mempunyai kapasitas sampai dengan 60 MVA. Di wilayah yang padat dan sulit mendapatkan lokasi GI, unit size trafo daya (150/120 kV) ditingkatkan menjadi maksimum 100 MVA untuk GI Baru.
3. Dengan perubahan harga EPC GIS tahun 2015 yang makin mendekati harga EPC gardu induk konvensional, maka kota-kota besar di Jawa dan ibukota provinsi di luar Jawa yang sudah padat penduduknya diutamakan menggunakan GIS karena kebutuhan lahan yang lebih kecil.
4. Jumlah unit trafo yang dapat dipasang pada suatu GI dibatasi oleh ketersediaan lahan, kapasitas transmisi dan jumlah penyulang (feeder) keluar yang dapat ditampung oleh GI tersebut. Dengan kriteria tersebut suatu GI dapat mempunyai 3 atau lebih unit trafo. Sebuah GI baru diperlukan jika GI-GI terdekat yang ada tidak dapat menampung pertumbuhan beban lagi karena keterbatasan tersebut.
5. Pengembangan GI baru juga dimaksudkan untuk mendapatkan tegangan yang baik di ujung jaringan tegangan menengah.
6. Trafo Inter Bus GITET (500/150 kV dan 275/150 kV) dapat dipasang hingga 4 unit per GITET.
7. Spare trafo Inter Bus 1 fasa disediakan per lokasi untuk GITET jenis GIS, dan 1 fasa per tipe per provinsi untuk GITET jenis konvensional.
8. Pembangunan gardu induk dengan desain minimalis dapat dilaksanakan untuk melistriki komunitas dengan kebutuhan listrik yang dalam jangka panjang diperkirakan akan tumbuh lambat.

Rencana Pengembangan Transmisi dan Gardu Induk

Pada periode tahun 2016-2025 pengembangan sistem penyaluran berupa pengembangan sistem transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera. Pembangunan sistem transmisi secara umum diarahkan kepada tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien. Disamping itu juga sebagai usaha untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan.

Rencana pengembangan sistem penyaluran di Indonesia hingga tahun 2025 diproyeksikan sebesar 67.901 kms pengembangan jaringan transmisi serta 172.136 MVA untuk pengembangan gardu induk.

More detailed policies concerning the development of transmission and substations are as follows:

1. The use of 500 kV for cable transmission system is reserved for the provincial capitals in Java - Bali. For electricity distribution of outside Java-Bali, for 1 (one) district / city PLN plan to build at least 1 (one) substations, and 20 kV system for constrained areas.
2. Power transformers (TT / TM) are basically designed to have a capacity of up to 60 MVA. However, in a region of densely populated area and difficult to obtain land for a substation, power transformers unit size (150/120 kV) are increased to a maximum of 100 MVA for new substations.
3. With the price of GIS EPC in 2015 converging towards the price of EPC conventional substations, and that major cities in Java and outside Java provincial capitals are already densely populated, it is more preferable to use GIS due to the fact that it requires smaller plots of land.
4. The number of transformer units that can be installed on a substation is limited by the availability of land size, transmission capacity and the number of feeders that can be accommodated by the substation. With these criteria, a substation can have 3 or more transformer units. A new substation is required should the nearest available substation-to-substation not accommodate the load increase.
5. A new substation is intended also to obtain a good voltage reading at end of a medium voltage network.
6. Up to 4 Interbus GITET transformers (500/150 kV and 275/150 kV) can be mounted per GITET.
7. Interbus one phase transformer spare is provided per location for GITET type GIS, and one phase per type per province for GITET of conventional type.
8. Areas forecasted with slow electrical growth demand can make the most of minimalist designed substations.

Transmission and Substation Development Plan

For the period of 2016-2025, the distribution system will be in the form of of 500 kV and 150 kV transmission systems for the Java-Bali system and a 500 kV, 275 kV, 150 kV and 70 kV transmission systems for the eastern part of Indonesia and Sumatra. Construction of the transmission system is directed to achieve compatibility between generation capacity in the upstream and downstream side of the power demand in an efficient manner. Besides, it is also an attempt to overcome distribution bottlenecks and improvement in voltage stability.

The distribution system plan in Indonesia until 2025 is projected at 67,901 kmc in the transmission network and 172,136 MVA of substations.

Rencana Pengembangan Sistem Transmisi Program 35.000 MW
Development Plan of Transmission Lines on 35,000 MW Program

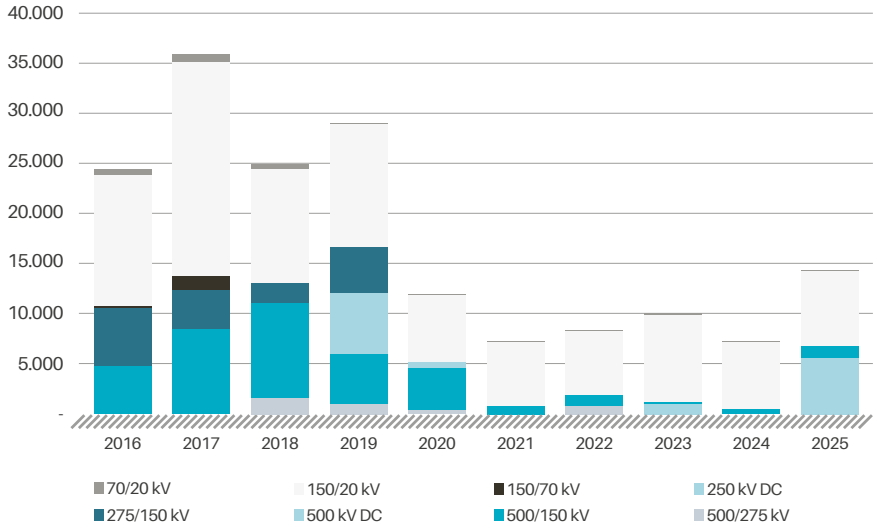

Rencana Pengembangan Sistem Distribusi Program 35.000 MW
Development Plan of Distribution Lines on 35,000 MW Program

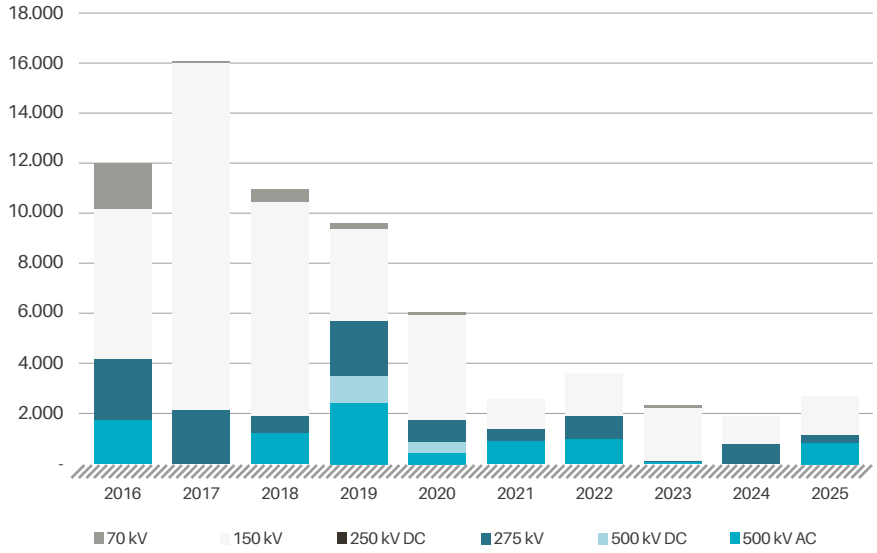

Program pembangunan Pembangkit selain terdiri atas pembangunan 402 proyek pembangkit, juga melibatkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, dengan area tersebar sesuai sebaran pembangunan pembangkit. Jumlah proyek untuk transmisi adalah 732 proyek dengan panjang transmisi adalah 46.597 kms dan Gardu Induk dengan kapasitas mencapai 108.789 MVA.

Other than 402 power plants construction, the program consists of transmission and distribution network constructions spreading across area corresponding distribution capacity of the plants. There are 732 transmission projects with transmission length of 46,597 kmc and substations with capacity reaching 108,789 MVA.

Sebagaimana halnya dengan pembangunan pembangkit, sebaran proyek pembangunan transmisi dan gardu induk untuk tahun 2015-2019 juga telah disesuaikan dengan pembagian Wilayah Regional, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

PENGEMBANGAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK

Tabel Rencana Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk Sesuai RUPTL 2016-2025

As in the case with the construction of power plants, the distribution of transmission and substation development projects year 2015-2019 has also been adjusted according to the division of regional territory, with the breakdown per region as follows:

TRANSMISSION AND SUBSTATION DEVELOPMENT

Development Plan Transmission and Substation Table In accordance with RUPTL 2016-2025

Wilayah	Transmisi (kms) Transmission (kms)	Gardu Induk (MVA) Substation (MVA)	Region
Sumatera	25.435	45.060	Sumatra
Jawa- Bali	18.471	106.096	Java- Bali
Indonesia Timur	23.995	20.980	East Indonesian

Berbeda dengan pembangunan unit pembangkit yang lebih banyak melibatkan peran swasta, pada pembangunan sistem transmisi dan gardu induk mayoritas dilakukan oleh PLN. Seluruh proyek pembangunan sistim transmisi dan distribusi tersebut telah tercakup dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019 yang tengah dijalankan oleh PLN. Skema pembangunan dan aspek teknis lainnya juga telah dituangkan dalam RUPTL tersebut. Penjelasan umum mengenai program pembangunan sistem transmisi dan distribusi adalah sebagaimana uraian berikut.

Unlike power plants that involve the role of the private sector, the development and construction of the transmission system and substation is done by PLN. The entire construction of transmission and distribution system has been included in the Long Term Plan (RJP) 2015-2019. Development schemes and other technical aspects have also been outlined in the RUPTL. A general description of the development program transmission and distribution systems are as described below.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSMISI

Pengembangan saluran transmisi dan gardu induk dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efiisien dengan memenuhi kriteria keandalan tertentu. Disamping itu pengembangan saluran transmisi merupakan suatu usaha untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan dan flleksibilitas operasi.

Pengembangan sistem transmisi dilaksanakan oleh (i) PLN, (ii) pengembang IPP (terkait pembangkit milik IPP yang sesuai dengan kontrak PPA) dan (iii) pihak swasta dengan skema bisnis tertentu.

Adapun program pengembangan sistem transmisi pada masing-masing region dapat disampaikan sebagai berikut:

TRANSMISSION SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM

Development of transmission lines and substations is intended to achieve a balance between generating capacity upstream and power demand downstream in an efficient manner while meeting certain reliability criterion. Moreover, the development of the transmission lines is an attempt to overcome distribution bottlenecks, voltage stability improvement, and operational flexibility.

Development of the transmission system carried out by (i) PLN, (ii) a developer IPP (related plants owned by IPP in accordance with the PPA contract) and (iii) the private sector under specific business schemes.

The transmission system development programs in each region are elaborated as follows:

Region Sumatera

Pengembangan transmisi di Sumatera akan membentuk transmisi backbone 500 kV yang menyatukan sistem interkoneksi Sumatera pada koridor timur, dimana pusat-pusat pembangkit skala besar dan pusat-pusat beban yang besar di Sumatera akan tersambung ke sistem transmisi 500 kV. Transmisi ini juga akan mentransfer tenaga listrik dari pembangkit listrik di daerah yang kaya sumber energi primer murah (Sumatera bagian selatan dan Riau) ke daerah yang kurang memiliki sumber energi primer murah (Sumatera bagian utara).

Selain itu, transmisi 500 kV juga akan bertindak sebagai *feeder* pemasok listrik dari PLTU mulut tambang ke stasiun konverter transmisi HVDC yang akan menghubungkan pulau Sumatera dan pulau Jawa. Di samping interkoneksi Sistem Sumatera dengan Sistem Jawa-Bali, direncanakan juga akan di Interkoneksikan Sistem Sumatera ke Sistem Peninsular (Malaysia), melalui stasiun konverter transmisi HVDC di Riau.

Rencana pengembangan sistem transmisi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 - 2025 akan banyak mengubah topologi jaringan dengan terwujudnya sistem interkoneksi 275 kV dan 500 kV di Sumatera. Pengembangan juga banyak dilakukan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan listrik dalam bentuk penambahan kapasitas trafo. Pengembangan untuk meningkatkan keandalan dan *debottlenecking* yang juga terdapat di beberapa sistem, antara lain rencana pembangunan *ring* 275 kV Medan, dan *rekonductoring* beberapa ruas transmisi di Sistem Sumbagut dan Sumbagsel.

Rencana interkoneksi *backbone* 275 kV di Sumatera diprogramkan untuk terlaksana seluruhnya pada tahun 2018. Selain itu terdapat pembangunan beberapa gardu induk dan transmisi 150 kV untuk mengambil alih beban dari pembangkit diesel ke sistem interkoneksi (dedieselisasi).

Region Jawa Bali

Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa dimaksudkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit-pembangkit baru maupun ekspansi skala besar serta untuk menjaga kriteria sekuriti N-1, baik statik maupun dinamik. Pengembangan transmisi 150 kV dimaksudkan untuk menjaga kriteria sekuriti N-1 dan sebagai transmisi yang terkait dengan gardu induk 150 kV baru.

Sumatra Region

Sumatra transmission system will form the 500 kV transmission backbone that combines Sumatra interconnection systems in the east corridor, where large-scale power plants and load centers are located in Sumatra, to the 500 kV transmission systems. This transmission system will also transfer electricity from power plants in areas that possess plentiful inexpensive primary energy sources (southern Sumatra and Riau) to areas lacking inexpensive primary energy source (northern Sumatra).

In addition, the 500 kV transmissions will also act as electricity feeders from the power plant source to the HVDC transmission converter station that will connect Sumatra and Java. In addition to the interconnection of Sumatra system with the Java-Bali system, it is also planned that the Sumatra system to be interconnected with Peninsular Systems (Malaysia), through a HVDC transmission converter station in Riau.

The transmission system development plan as stated in the General Plan of Power Supply (RUPTL) 2016-2025 will change the network topology a great deal with the realization of 275 kV and 500 kV interconnected systems in Sumatra. The development has also much to do in fullfiling the growing electricity demand in the form of additional transformer capacity. This upgrading plan is to improve the reliability and debottlenecking found in several systems, including a plan to build 275 kV Medan ring, and reconductoring several sections of transmission in northern Sumatra System and southern Sumatra.

The 275 kV Backbone Interconnection plan in Sumatra is planned to be fully completed by 2018. In addition, there will be several substations and 150 kV transmission to take over the diesel generator load (de-dieselization) to the interconnection system.

Java Bali Region

Development of the 500 kV transmissions in Java is intended to channel power from new power plants as well as large-scale expansion and to maintain the N-1 security criterion, both static and dynamic. Development of 150 kV transmission intended to safeguard the N-1 security criterion and transmission system associated with new 150kV substations.

Memperhatikan pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sering terlambat karena masalah perizinan, rate of way dan sosial, serta kebutuhan tambahan daya yang mendesak, maka PLN perlu melakukan usaha meningkatkan kapasitas transmisi dalam waktu dekat. Pembangunan SUTET dengan menggunakan rute baru akan memerlukan waktu yang lama sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah rekonduktoring beberapa ruas transmisi 500 kV dan 150 kV dan mulai memanfaatkan ruas transmisi 150 kV eksisting untuk dibangun menjadi transmisi 500 kV di sekitar Jakarta.

Region Indonesia Timur

Pengembangan transmisi dan gardu induk di wilayah Indonesia Timur dibangun untuk menghubungkan sistem-sistem yang selama ini masih isolated yang selama ini dipasok dari PLTD (dedieselisasi) membentuk *backbone* transmisi untuk menyalurkan energi dalam jumlah besar ke pusat beban yang lokasinya sangat berjauhan, mengatasi bottleneck penyaluran serta untuk menghubungkan antar sistem menjadi sistem yang lebih besar.

Perencanaan Sistem Transmisi dan Gardu Induk

Pada rencana jangka panjang perusahaan, pengembangan sistem penyaluran dibagi kedalam beberapa kategori, berupa pengembangan sistem transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV di sistem Jawa Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur dan Sumatera.

Adapun arah pembangunan sistem transmisi:

a. tercapainya kesesuaian antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien;
b. untuk mengatasi *bottleneck* penyaluran dan perbaikan tegangan pelayanan.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI

Pengembangan sistem distribusi diperlukan untuk mempertahankan keandalan serta menampung penambahan pelanggan yang diprakirakan terus meningkat signifikan, selain itu juga diselaraskan dengan perkembangan perekonomian suatu daerah.

Kebijakan Pengembangan Distribusi

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi diarahkan pada: (i) perbaikan tegangan pelayanan, (ii) perbaikan SAIDI dan SAIFI, (iii) penurunan susut teknis jaringan dan (iv) rehabilitasi jaringan yang tua, dilanjutkan dengan perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

The construction Extra High Voltage Overhead Power Line transmission (SUTET) and High Voltage Overhead Power Line transmission (SUTT) is often delayed due to licensing issues, right-of-way, and social issues. To compound the challenge, the need for additional power is quite urgent. Consequently, PLN needs to make an extraordinary effort to increase the transmission capacity in the near future. Since the constrution of new SUTET utilizing new routes requires prolonged time; the present effort that PLN can do is reconductoring several sections of 500 kV and 150 kV transmission system and begin to upgrade the existing 150 kV transmission segment into 500 kV transmission surrounding Jakarta.

East Indonesia Region

The development of transmission systems and substations in the eastern part of Indonesia is intended to connect isolated systems that are still being supplied from diesel generators to form a backbone transmission to channel of large amount of electrical power to load centers, which are located far apart, overcoming the distribution bottleneck as well as to interconnect systems into a larger system.

Transmission Systems and Substation Planning

According to the company's long term plan, the distribution system development plan is divided into several categories: 500 kV and 150 kV voltage transmission systems in the Java-Bali system and 500 kV, 275 kV, 150 kV and 70 kV voltage transmission systems in eastern Indonesia and Sumatra system.

As for the transmission system development direction:

a. Striking a balance between power generating capacity in the upstream and power demand downstream side of the in an efficient manner;
b. To overcome distribution bottlenecks and voltage stability improvements.

DISTRIBUTION SYSTEM DEVELOPMENT PROGRAM

A distribution system is required to maintain reliability and to accommodate new customers predicted to increase significantly; but this must be orchestrated with the economic development of that region.

Distribution Development Policy

The focus of the distribution system development and investment is aimed at: (i) improving voltage stability, (ii) SAIDI and SAIFI improvement, (iii) reduction in network's technical shrinkage, and (iv) refurbishment of aging networks, followed by network expansion to accommodate demand growth, and improvement in service facilities.

Faktor lain yang juga memerlukan analisis dan pertimbangan keekonomian jangka panjang, namun tetap memenuhi standar SNI atau SPLN yang berlaku adalah:

1. Pemilihan teknologi seperti jenis tiang (beton, besi atau kayu).
2. Jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah).
3. Sistem jaringan (*radial, loop atau spindle*).
4. Perlengkapan (menggunakan *recloser* atau tidak), termasuk penggunaan tegangan 66 kV sebagai saluran distribusi ke pelanggan besar.

Perencanaan Sistem Distribusi

Perencanaan Sistem Distribusi dibuat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Membatasi panjang maksimum saluran distribusi (JTM dan JTR) untuk menjaga agar tegangan pelayanan sesuai standar SPLN.
2. Konfiigurasi JTM untuk kota-kota besar dapat berupa topologi jaringan yang lebih andal seperti *spindle*, sementara konfiigurasi untuk kawasan luar kota minimal berupa saluran radial yang dapat dipasok dari 2 sumber.
3. Mengendalikan susut teknis jaringan distribusi pada tingkat yang optimal.
4. Program listrik desa dilaksanakan dalam kerangka perencanaan sistem kelistrikan secara menyeluruh dan tidak memperburuk kinerja jaringan dan biaya pokok penyediaan.

Sasaran sistem distribusi adalah menyediakan sarana pendistribusian tenaga listrik yang cukup, andal, berkualitas, efiisien, dan susut teknis wajar. Oleh sebab itu, perencanaan sistem distribusi diarahkan untuk meningkatkan kontinuitas pasokan kepada pelanggan (menekan SAIDI dan SAIFI) melalui upaya:

1. Membangun SCADA Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 *feeder*.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan *recloser* atau AVS yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing* relay penyulang di GI.
3. Memonitor pengoperasian *recloser* atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan periodiknya.
4. Dimungkinkan menggunakan DAS (*Distribution Automation System*) pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Other factors which also require analysis and long-term economic considerations, and at the same time complying with applicable ISO standards or SPLN are:

1. Materials selection such as pole type (concrete, steel or wood).
2. Type of distribution (overhead, underground cable).
3. Network system (radial, loop or spindle).
4. Equipment (using Recloser or not), including the use of 66 kV voltage line as distribution means to large customers.

Distribution System Planning

Distribution system planning made with regard to the following criteria:

1. Limit the maximum length of distribution channels (JTM and JTR) to maintain appropriate voltage standard according to SPLN standards of service.
2. JTM configuration for large cities can be in the form of a more reliable topology network such as spindles, while the configuration for areas outside of cities can be in the form of radial distribution channels that can be supplied from two sources.
3. Controlling distribution network technical losses at an optimal level.
4. Rural electricity program implemented within the electrical system planning framework thoroughly that do not degenerate the network performance and the provision of basic costs.

The target of the distribution system is to provide means of sufficient electrical power supply, reliably, high quality, efficiency, and at reasonable technical losses. For that reason, distribution system planning is geared to improve the continuity of supply to customers (reduce SAIDI and SAIFI) through the efforts to:

Build SCADA distribution for provincial capital cities and other cities at minimum served by 2 substations and 15 feeders.

2. Optimize the use recloser or AVS installed in SUTM, harmonized with reclosing relay feeders in substations.
3. Monitor the operation of recloser or AVS, and improve periodic maintenance procedure.
4. If possible, to use DAS (Distribution Automation System) on very heavily loaded areas and of high revenue potential areas.

Terang dengan Pembangkit Terapung
Lighting with Floating Power Plants

Beragam upaya dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk menerangi Indonesia, termasuk memanfaatkan kapal pembangkit listrik (*Marine Vessel Power plant*/ MVPP). Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan berdirinya Perseroan, yang terutama untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai.

Pembangkit listrik terapung ini diharapkan ikut memberikan solusi bagi masalah kelistrikan di Indonesia. Sebab kondisi Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau, belum seluruhnya terjangkau sistem kelistrikan. Karena itulah, kehadiran MVPP pertama, yaitu pada 23 Desember 2015, menjadi sangat penting.

PLN menggunakan pembangkit terapung untuk sejumlah lokasi yang merupakan solusi interim sampai dengan pembangkit permanen selesai dibangun, di antaranya adalah untuk Sumatera Bagian Utara (240 MW), Kupang (60 MW), Ambon (60 MW) dan Lombok (60 MW).

Lighting with Floating Power Plants

PT PLN (Persero) has made numerous efforts to light up Indonesia, including the use of Marine Vessel Power Plants (MVPP). This is consistent with the aim and purpose of the establishing a Company which primarily seeks to provide electric power for the people in adequate amounts and of good quality.

This floating power plant is expected to provide a solution to Indonesia's power shortages. Given the fact that Indonesia stretches across over 17 thousand islands, not all have access to electricity. In response to this, the launching of the first ever MVPP in 23 December 2015 became of utmost importance.

PLN relies on floating power generators for a number of locations as an interim solution until construction of permanent power plants can be completed, among others in North Sumatera (240 MW), Kupang (60 MW), Ambon (60 MW) and Lombok (60 MW).

04

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

240 **Analisa dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis

241 Tinjauan Umum
General Review

242 Tinjauan Industri
Industry Review

243 Tinjauan Proyek Strategis
Strategic Projects Review

243 Program Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Development Program

244 Progres Pembangunan Sarana Infrastruktur Ketenagalistrikan
Electricity Infrastructure Development Progress

251 Tinjauan Produksi Dan Operasional
Operating And Production Review

251 Indikator Operasional Strategis
Strategic Operating Indicators

252 Produksi Tenaga Listrik
Electricity Power Production

254 Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Cost Of Supply (BPP)

256 Bauran Energi
Fuel Mix

256 Konsumsi Dan Harga Energi Primer
Consumption And Primary Energy Price

257 Tarif Tenaga Listrik
Electricity Tariff

260 Subsidi Listrik
Electricity Subsidy

262 Susut Jaringan
Network Losses

263 Peningkatan Mutu Layanan Dan Keandalan
Increasing Service Quality And Reliability

264 Tinjauan Per Segmen Usaha
Review Per Business Segment

264 Segmentasi Usaha
Business Segmentation

264 Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

266 Jumlah Pelanggan
Number Of Customers

268 Daya Tersambung
Connected Power

269 Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Revenue

269 Tinjauan Pemasaran
Marketing Review

269 Pangsa Pasar
Target Market

269 Strategi Pemasaran
Marketing Strategy

272 Biaya Pemasaran
Marketing Cost

272 Tinjauan Pencapaian Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Achievement Review

275 Tinjauan Keuangan
Financial Review

277 Aset Tidak Lancar
Long Term Assets

279 Aset Lancar
Current Assets

283 Piutang Subsidi Listrik
Electricity Subsidy Receivables

285 Liabilitas
Liabilities

285 Liabilitas Jangka Panjang
Long Term Liabilities

287 Liabilitas Jangka Pendek
Short Term Liabilities

290 Ekuitas
Equity

291 Laba Rugi
Income Statement

291 Pendapatan Usaha
Operating Revenues

293 Beban Usaha
Operating Expenses

295 Subsidi
Subsidi

296 Rugi Usaha Sebelum Subsidi
Operating Loss Before Subsidy

296 Laba Usaha Setelah Subsidi
Operating Profit After Subsidy

296 Laba Sebelum Selisih Kurs Dan Pajak
Profit Before Foreign Exchange Discrepancies And Tax

296 Laba Selisih Kurs - Bersih
Foreign Exchange Profit – Net

296 Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax

297 Laba Tahun Berjalan
Current Year Profit

297 Laba Bersih Dan Laba Per Saham Tahun Berjalan
Net Profit And Earnings Per Share For The Current Year

297 Ebitda Dan Ebitda Margin
Ebitda Dan Ebitda Margin

297 Arus Kas
Cash Flow

298 Kemampuan Membayar Utang
Ability To Pay Debts

299 Rasio-Rasio Lain
Other Ratios

300 Struktur Modal Dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure And Capital Structure Policy

301 Modal Kerja Bersih
Net Working Capital

301 Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment On Capital Goods

303 Transaksi Lindung Nilai
Hedging Transaction

303 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

304 Pebandingan Realisasi Dan Target
Realization And Target

305 Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Akuntan
Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Akuntan

306 Prospek Usaha 2017
2017 Business Prospects

307 Dividen Dan Kebijakan Dividen
Dividend And Dividend Policy

309 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan / Manajemen
Employee / Manager Share Ownership Program

309 Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Dan Efek Lainnya
Use Of Funds Raised From Bonds And Other Shares

309 Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Material Transactions With Conflict Of Interest

309 Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi (Afiliasi)
Transactions With Related Parties (Affiliates)

315 Kerja Sama
Cooperation

318 Perubahan Peraturan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes In Regulations Which Significantly Affect The Company

319 Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Pada Tahun Buku Terakhir
Changes In Accounting Policy Implemented In Last Financial Year

323 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

325 Kinerja Anak Perusahaan
Subsidiary Performance

326 PLN Terangi Desa
PLN Illuminating Villages

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

PLN berhasil menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik dengan menurunkan pemanfaatan minyak bumi sebagai energi primer pembangkit. Oleh karenanya, Perseroan memaksimalkan penggunaan energi primer batu bara dan gas.

PLN has successfully suppressed power generation cost of supply by lowering the use of petroleum as primary energy. Hence, the company has increased the use of coal and gas as primary energy.

TINJAUAN UMUM

Kondisi perekonomian di tingkat global pada tahun 2016 relatif belum stabil. Pertumbuhan ekonomi tidak merata. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berjalan lambat, kecuali ekonomi Amerika Serikat (AS) yang terus membaik.

Perbaikan ekonomi AS yang tercermin dari menguatnya sektor tenaga kerja dan peningkatan inflasi, telah mendorong kenaikan suku bunga acuannya, yaitu *Fed Fund Rate* (FFR) pada Desember 2016.

Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi negara berkembang, terutama India dan Tiongkok, diperkirakan dapat menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan sejumlah harga komoditas. Meskipun masih pada level yang rendah, kenaikan harga minyak dunia mulai terjadi dan berpotensi meningkat seiring kesepakatan OPEC untuk menurunkan produksinya.

Di tengah situasi perekonomian global yang masih dalam proses pemulihan, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Perekonomian domestik ditopang oleh permintaan di dalam negeri yang terjaga.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,02%, lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,79%. Pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut didukung oleh konsumsi dan investasi, khususnya pembangunan infrastruktur.

Kurs rupiah, seperti tercermin dari kurs tengah Bank Indonesia, relatif stabil. Bahkan rupiah sempat menguat tipis hingga Oktober, namun tertahan di bulan November pasca Pemilu AS. Penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif terhadap perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik.

Dalam laporan Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa kinerja pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) menguat di sepanjang 2016. Penguatan tersebut didorong oleh sentimen positif yang bersumber dari global maupun domestik. Investor nonresiden tercatat melakukan net beli di pasar saham maupun SBN meski sempat terjadi outflow khususnya pada akhir triwulan III 2016.

PT PLN (Persero) berkepentingan dengan kondisi global, mengingat harga energi primer yang digunakan untuk pembangkit tidak terlepas dari sentimen global. Begitu juga dengan suku bunga, karena Perseroan membutuhkan pendanaan, yang antara lain ditempuh melalui penerbitan surat berharga dan pinjaman. Jika perekonomian tidak stabil atau terdapat risiko yang meningkat, maka biaya memperoleh dana (cost of fund) berpotensi naik seiring dengan ekspektasi di pasar keuangan.

GENERAL REVIEW

Global economic conditions in 2016 were relatively unstable with economic growth uneven. Bank Indonesia recorded that growth in developed countries was slow, except the United States (US) economy which continued improving.

US economic improvement, as reflected in a strengthening labor sector and increasing inflation, triggered an interest rate increase with the Fed Fund Rate (FFR) increasing in December 2016.

On the other hand, there was slow economic growth of developing countries, especially India and China, which had previously been predicted to be the source of global economic growth. There was an increase in several commodity prices, and despite being at a low level, global oil prices began to increase and surged after an OPEC agreement to cut production.

Amid the recovery of global economic conditions, Indonesia's economy showed improving performance. The domestic economy was supported by stable domestic demand.

Indonesian Statistics Bureau Data recorded Indonesian economic growth in 2016 as 5.02%, better than in 2015 at 4.79% GDP growth. The improvement in economic growth was supported by consumption and investment, especially for infrastructure development.

The Rupiah, as reflected in Bank Indonesia's middle exchange rate, was relatively stable in 2016. The Rupiah strengthened slightly up until October, but was halted in November post-US election. Rupiah strengthening was supported by positive sentiment in the domestic economy, in line with resilient macro-economic stability and a well-implemented Tax Amnesty Law.

In a Monetary Policy Report, Bank Indonesia also reiterated that the performance of the stock market and Government Bonds (SBN) strengthened in 2016, supported by positive sentiment both globally and domestically. Non-resident investors were recorded as making a net buy in the stock market and SBNs, despite some outflows especially at the end of Q3 2016.

PT PLN (Persero) is monitoring global conditions, considering that the price of primary energy used for power plants is related to global sentiment. This concern is also for interest rates as the Company needs funding, from among other sources, obtained from bond issuance or borrowing. If the economy is unstable, then the cost of funds could potentially increase in line with financial market expectations.

TINJAUAN INDUSTRI

Situasi Industri sepanjang tahun 2016 ialah pola konsumsi listrik Industri di Jawa Bali sama dengan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, kecuali Golongan tarif I3 dan I4 sedikit lebih tinggi dibanding Tahun 2015, namun jauh lebih rendah dibanding Tahun 2013 dan 2014.

INDUSTRY REVIEW

The energy industry situation in 2016 shows that the industrial electricity consumption pattern in Java-Bali was lower compared to that of the previous year, while category tariffs I3 and I4 were slightly higher than in 2015, but far lower than in either 2013 or 2014.

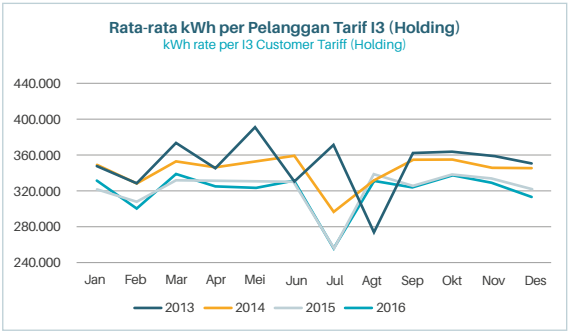

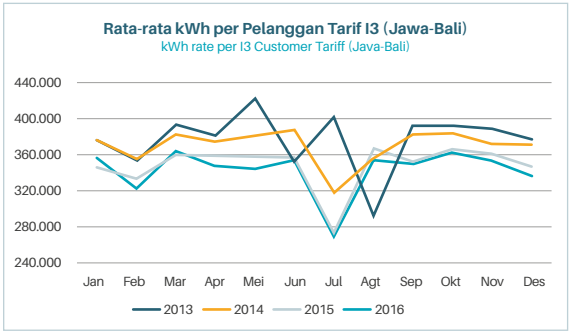

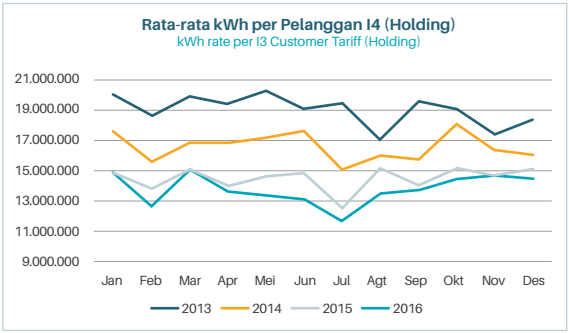

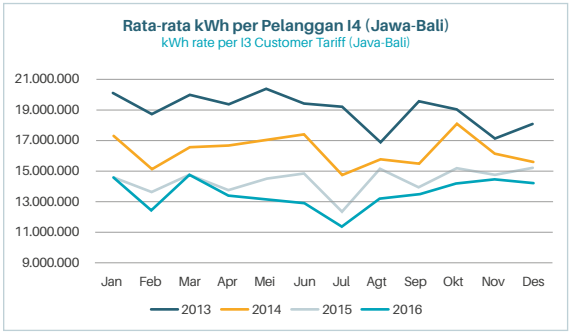

Sementara untuk konsumsi rata-rata energi listrik per pelanggan per bulan untuk pelanggan industri sepanjang tahun 2016 mengalami tren kenaikan dibandingkan tahun 2015, walaupun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Tren positif ini menunjukkan konsumsi energi oleh pelanggan industri telah mengalami kenaikan dari tahun 2015 dan diharapkan tahun 2017 tren positif ini akan terus berlanjut.

Meanwhile average electricity consumption per customer for overall industrial clients in 2016 had an increasing trend compared to that of 2015; though still lower than for 2013 and 2014. This positive trend shows that energy consumption of industrial clients rose from 2015 and is expected to continue in 2017.

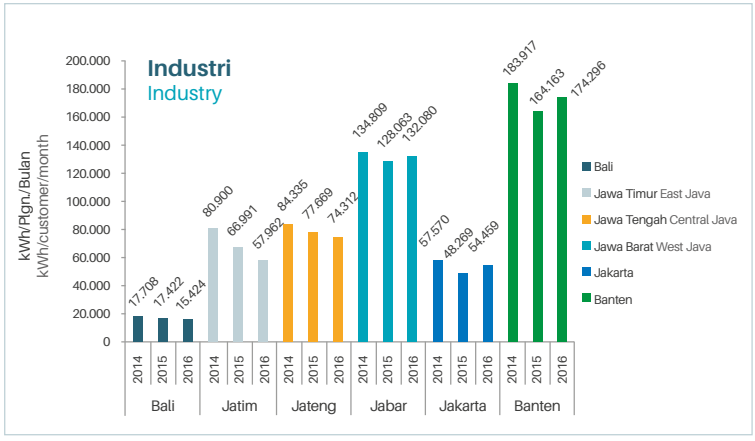

Situasi tren pemakaian pada sektor industri sangat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Hingga saat ini, kontribusi pendapatan dari Kelompok Tarif Industri mencapai lebih dari 30% terhadap total pendapatan, terutama industri skala menengah (> 200 kVA) dan skala besar (>30.000 kVA), walaupun jumlah pelanggan pada kelompok Tarif Industri kurang dari 1% dari total pelanggan.

The usage trend in the industrial sector massively affected Company financial conditions. As of now, revenue contributions from the Industry Tariff Category reached more than 30% of total revenue, especially medium scale industry (> 200 kVA) and large scale (>30,000 kVA), although the number of clients in the Industry Tariff category was less than 1% of total customers.

TINJAUAN PROYEK STRATEGIS

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pemadaman listrik yang dialami beberapa lokasi saat ini disebabkan oleh kekurangan pasokan listrik. Bila hal ini tidak mendapat perhatian khusus dan upaya terobosan luar biasa, maka krisis listrik dapat terjadi dalam 3-4 tahun ke depan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Cadangan listrik yang terbatas adalah cermin dari ketidakmampuan pasokan dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan yang disebabkan oleh tertinggalnya pembangunan pembangkit dibanding pertumbuhan permintaan listrik dalam lima tahun terakhir. Ketertinggalan itu akibat terkendala berbagai permasalahan, seperti pembebasan lahan, regulasi dan perizinan, pendanaan, hingga negosiasi harga jual listrik antara pihak swasta dengan PLN.

Pada tahun 2016, total kapasitas terpasang nasional sebesar 54.664,50 MW yang dibangun PLN beserta swasta. Dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, maka dari tahun 2016-2019 dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 42.000 MW. Penambahan kapasitas pembangkit sebesar 42.000 MW ini terbagi atas 2 program, yaitu program pembangunan pembangkit 7.000 MW yang statusnya telah berjalan dan beberapa pembangkit telah berhasil diselesaikan pembangunannya dan beroperasi serta program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang merupakan program pembangkit baru.

Selain pembangunan pembangkit, juga dalam pembangunan sarana infrastruktur ketenagalistrikan ini akan dibangun jaringan transmisi sepanjang 48.665 kms dan gardu induk sebesar 113.666 MVA. Program kelistrikan ini juga telah tercantum dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2016-2025.

Untuk merealisasikan program sarana infrastruktur ketenagalistrikan, telah diterbitkan dan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang 2/2012 (tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum);
2. Perpres 30/2015 (tentang Perubahan atas Perpres

STRATEGIC PROJECTS REVIEW

ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM

Power outages experienced in several locations currently happen due to low electricity supply. Without extra attention and a remarkable supply breakthrough, an electricity crisis could happen in the next 3-4 years. This condition not only hampers the people's economic activities, but can reduce industry competitiveness and national economic growth.

Such a limited electricity reserve reflects an inability in matching supply with demand growth, as caused by power plant construction lagging behind electricity demand growth over the past five years. This lag was due to obstacles in many areas, such as land clearance, regulation and licensing, and funding, as well as negotiations on electricity tariffs between private producers and PLN.

In 2016, total national installed capacity was 54,664.50 MW of both PLN and private companies. Calculating projected economic growth of 6-7% annually, then between 2016-2019 there needs to be additional electricity capacity of 42,000 MW. This additional power plant capacity of 42,000 MW is divided into 2 programs: 1) the 7,000 MW plant construction program with on-going status in which several plants have finished construction and are operating, and 2) the 35,000 MW plant construction program, which is a new plant construction program.

Besides plant construction, in the electricity infrastructure development there will be transmission line erection of 48,665 kmc and substation capacity construction of 113,666 MVA. This electricity program is also stated in the Electricity Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) 2016-2025.

To realize the electricity infrastructure program, several regulations have been issued and/or implemented, including:

1. Law No. 2/2012 on Land Procurement for Public Needs;
2. Presidential Decision No. 30/2015 amendment of

71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum);
3. Perpres 4/2016 (tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);
4. Perpres 14/2017 (tentang Perubahan Perpres No.4 tahun 2016 mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);
5. Permen ESDM 3/2015 (tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik)
6. Permen ESDM 10/2017 (tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik);
7. Permen ESDM 11/2017 (tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik);
8. Permen ESDM 12/2017 (tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik);
9. Kepmen ESDM 5899 K/20/MEM/2016 (tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025).

Mengingat sedemikian strategisnya program pembangunan sarana infrastruktur ketenagalistrikan, maka dibutuhkan dukungan dari segenap pemangku kepentingan.

PROGRES PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Progres Pembangunan Pembangkit

Hingga berakhirnya tahun buku 2016, Perseroan masih terus mengembangkan proyek strategis pembangunan pembangkit. Perkembangan proyek strategis tersebut tidak seluruhnya dibangun oleh Perseroan, tetapi juga mengikutsertakan pihak swasta (*Independent Power Producer*/IPP).

Program pembangunan ketenagalistrikan untuk tahun 2015 – 2019 meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi. Pengembangan tersebut untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi 6,7%, pertumbuhan kebutuhan listrik 8,8% dan rasio elektrifikasi 97,4% pada tahun 2019.

Pembangunan pembangkit secara *massive* telah dimulai sejak tahun 2006 melalui program FTP-1, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2011 dimana pemerintah menugaskan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 37 lokasi di Indonesia yang meliputi 10 lokasi dengan kapasitas 7.490 MW di Jawa Bali, 12 lokasi dengan kapasitas 1.600 MW di Indonesia Barat dan 15 lokasi dengan kapasitas 885 MW di Indonesia Timur.

Presidential Decision No. 71/2012 on Execution of Land Procurement for Public Needs;
3. Presidential Decision No. 4/2016 on Electricity Infrastructure Development Acceleration;
4. Presidential Decision No. 14/2017 amendment of Presidential Decision No. 4/ 2016 on Electricity Infrastructure Development Acceleration;
5. ESDM Ministerial Regulation No. 3/2015 on Electricity Power Purchase Procedure;
6. ESDM Ministerial Regulation No. 10/2017 on Principles in Electricity Power Buy Sell Agreement;
7. ESDM Ministerial Regulation No. 11/2017 on Geothermal Usage for Power Plants;
8. ESDM Ministerial Regulation No. 12/2017 on Renewable Energy Usage for Electricity Power Provision;
9. ESDM Ministerial Decision 5899 K/20/MEM/2016 on Electricity Power Provision Business Plan 2016-2025.

Considering how strategic the electricity infrastructure development program is, it needs support from all stakeholders.

ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRESS

Plant Development Progress

Up to the close of the 2016 financial year, the Company had still been developing construction plans for strategic projects. Strategic project developments are not entirely being built by the Company, but also involve private parties, Independent Power Producers/IPP.

The electricity development program for 2015–2019 covers plant development, transmission network and substations, as well as distribution network. The developments are aimed to fulfill GDP growth of 6-7%, electricity needs growth of 8.8%, and target electrification ratio of 97.4% by 2019.

Massive plant development began in 2006 with FTP-1 program (Fast Track Program), signified with the issuance of President of the Republic of Indonesia Regulation No. 71/2006 on 5 July 2006 amended by Presidential Regulation No. 59/2009 on 23 December 2009 renewed with Presidential Regulation No. 47/2011, where the government instructed PLN to build coal-fired power plants (PLTU) in 37 locations in Indonesia covering 10 locations with capacity of 7,490 MW in Java-Bali, 12 locations with capacity of 1,600 MW in West Indonesia and 15 locations with capacity of 885 MW in East Indonesia.

Selanjutnya di tahun 2010 diluncurkan program FTP-2, melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 dan diamandemen melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2013, No. 32 Tahun 2014, dan No. 40 Tahun 2014 yang menugaskan PLN untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk didalamnya pengadaan IPP dengan total kapasitas 17.563 MW.

In 2010 FTP-2 was launched, through Presidential Regulation No. 4/2010 and amended through Presidential Regulation No. 48/2011 as well as ESDM Ministerial Regulations No. 21/2013, No. 32/2014, and No. 40/2014 which tasked PLN to conduct power plant development including IPP procurement with total capacity of 17,563 MW.

Keseluruhan program pembangunan pembangkit baik FTP-1 maupun FTP-2 selanjutnya dikonsolidasikan dalam RJP tahun 2015-2019 dan tambahan pembangkit baru yang diperlukan untuk kurun waktu 2015-2019 adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 35.694,5 MW yang sedang dalam proses perencanaan dan pengadaan. Selanjutnya progam ini disebut dengan program 35.000 MW.
b. Sebesar 7.462 MW yang sedang dalam tahap konstruksi dan merupakan kelanjutan (carry over). Selanjutnya program ini disebut sebagai program 7.000 MW

Overall plant development programs FTP-1 and FTP-2 were then consolidated in the 2015-2019 RJP with additional new plants needed for 2015-2019 as detailed:

a. Capacity of 35,694.5 MW is in the planning and procurement phases, and called the 35,000 MW program.
b. Capacity of 7,462 MW is in construction and carry-over phases, and called the 7,000 MW program.

Status kemajuan sampai dengan akhir tahun 2016 sebagai berikut:

Progress status until the end of 2016 is as follows:

Program 35.000 MW status kumulatif hingga Desember 2016
Cumulative status of 35,000 MW program as at December 2016

Fase Phase		Regional Sumatera Sumatra Region	Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah, Regional Jawa Bagian Timur dan Bali West Java Region, Central Java Region, East Java and Bali Region	Regional Kalimantan Kalimantan Region	Regional Sulawesi & Nusa Tenggara Sulawesi & Nusa Tenggara Region	Regional Maluku & Papua Maluku & Papua Region	Total	Pencapaian terhadap Total Achievement to Total
		(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	
PPA/ Kontrak	Beroperasi Operation	392,6	22,5	112,4	163,4	15,6	706,5	1,98%
	Konstruksi Construction	722,0	8.278,0	400,0	640,0	50,0	10.090,0	28,27%
	Pra Konstruksi Pre-Construction	3.030,0	4.595,0	835,0	190,0	14,0	8.664,0	24,27%
Pengadaan Procurement		2.154,0	6.400,0	511,0	1.045,0	300,0	10.410,0	29,16%
Perencanaan Planning		2.094,0	1.800,0	300,0	1.600,0	30,0	5.824,0	16,32%
Total		**8.392,6**	**21.095,5**	**2.158,4**	**3.638,4**	**409,6**	**35.694,5**	**100,00%**

Komposisi realisasi program 35.000 MW terdiri atas proyek yang masih dalam proses perencanaan sebesar 5.824,0 MW atau 16,32%, dalam proses pengadaan 10.410,0 MW atau 29,16%, dalam proses persiapan konstruksi sebesar 8.664,0 MW atau 24,27%, dalam proses konstruksi sebesar 10.090,0 MW atau 28,27% dan yang telah beroperasi sebesar 706,5 MW atau 1,98%.

Composition of realized 35,000 MW program consists of projects in planning process of 5,824.0 MW, or 16.32%; in procurement process of 10,410.0 MW, or 29.16%; in construction preparation process of 8,664.0 MW, or 24.27%; in construction process of 10,090.0 MW, or 28.27%; and already operating at 706.5 MW or 1.98%.

Program 7.000 MW
7,000 MW Program

Fase Phase	Regional Sumatera Sumatra Region	Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah, Regional Jawa Bagian Timur dan Bali West Java Region, Central Java Regional, East Java Region and Bali	Regional Kalimantan Kalimantan Region	Regional Sulawesi & Nusa Tenggara Sulawesi & Nusa Tenggara Region	Regional Maluku & Papua Maluku & Papua Region	Total	Pencapaian Terhadap Total Achievement to Total
	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	
Beroperasi Operation	1.776,0	2.885,0	527,0	279,0	54,0	5.521,0	73,99%
Konstruksi Construction	915,0	93,0	448,0	421,0	64,0	1.941,0	26,01%
Total	**2.691,0**	**2.978,0**	**975,0**	**700,0**	**118,0**	**7.462,0**	**100,00%**

Komposisi realisasi program 7.000 MW terdiri atas proyek yang masih dalam proses konstruksi 1.941,0 MW atau 26,01% dan yang telah beroperasi sebesar 5.521,0 MW atau 73,99%.

Composition of realized 7,000 MW program consists of projects in construction of 1,941.0 MW, or 26.01%; and already operating of 5,521.0 MW, or 73.99%.

Selama tahun 2016, sejumlah pembangkit telah berhasil beroperasi komersial yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat layak operasi (SLO).

In 2016, several plants managed to operate commercially as signified by the Commissioning Certificates (SLO) received.

Berikut beberapa pembangkit yang berhasil mendapatkan SLO.

These are the several plants which received an SLO.

Realisasi Pembangunan Pembangkit 2016
2016 Realization of Power Plants Development

No.	Regional/ Proyek Pembangkit Regional/ Plant Development		Milik Owner	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Power (MW)	Propinsi Province
SUMATERA 1125,8 MW					
1	PLTU Steam Power Plant	Belitung Baru (FTP1) unit 2	PLN	16,5	Babel
2	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Bangka	PLN-Batam	25	Babel
3	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Bangka	PLN-Batam	25	Babel
4	PLTU Steam Power Plant	Tarahan Baru unit 2	PLN	100	Lampung
5	PLTP Geothermal Power Plant Geothermal Power	Ulubelu #3(FTP2)	IPP	55	Lampung
6	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Lampung Tarahan	PLN-Batam	100	Lampung
7	PLTU Steam Power Plant	Riau (Amandemen FTP1) #1	PLN	110	Riau
8	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Balai Pungut	PLN-Batam	75	Riau
9	PLTU Steam Power Plant	Riau (Amandemen FTP1) #2	PLN	110	Riau

No.	Regional/ Proyek Pembangkit Regional/ Plant Development		Milik Owner	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Power (MW)	Propinsi Province
SUMATERA 1125,8 MW					
10	PLTM Micro Hydro Power Plant	Lubuk Sao II	IPP	2,6	Sumatera Barat West Sumatra
11	PLTM Micro Hydro Power Plant	Pakkat	IPP	10	Sumatera Utara West Sumatra
12	PLTU Steam Power Plant	Sumsel - 5	IPP	150	Sumatera Selatan South Sumatra
13	PLTU Steam Power Plant	Sumsel - 5	IPP	150	Sumatera Selatan South Sumatra
14	PLTU Steam Power Plant	Keban Agung	IPP	120	Sumatrea Selatan South Sumatra
15	PLTA Hydro Power Plant	Wampu (FTP2)	IPP	45	Sumatera Utara North Sumatra
16	PLTM Micro Hydro Power Plant	Karai 7	IPP	6,7	Sumatra Utara North Sumatra
17	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Nias	PLN-Batam	25	Sumatra Utara North Sumatra
JAWA BAGIAN BARAT 19 MW					
18	PLTM Micro Hydro Power Plant	Situmulya	IPP	3	Banten
19	PLTM Micro Hydro Power Plant	Cirompang	IPP	8	Banten
20	PLTM Micro Hydro Power Plant	Lebak Tundun	IPP	8	Banten
JAWA BAGIAN TENGAH 1302,46 MW					
21	PLTM Micro Hydro Power Plant	Cianten 2	IPP	5	Jawa Barat West Java
22	PLTM Micro Hydro Power Plant	Cianten 1B	IPP	6,2	Jawa Barat West Java
23	PLTM Micro Hydro Power Plant	Cianten 3	IPP	5,8	Jawa Barat West Java
24	PLTM Micro Hydro Power Plant	Lebak Barang	IPP	7	Jawa Tengah Central Java
25	PLTD Diesel Power Plant	Karimunjawa	PLN-Batam	4	Jawa Tengah Central Java
26	PLTU Steam Power Plant	Cilacap exp	IPP	614	Jawa Tengah Central Java
27	PLTM Micro Hydro Power Plant	Banyumlayu	IPP	0,46	Jawa Tengah Central Java
28	PLTU Steam Power Plant	Adipala	PLN	660	Jawa Tengah Central Java
JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI 350 MW					
29	PLTU Steam Power Plant	Tanjung Awar-awar	PLN	350	Jawa Timur East Java
KALIMANTAN 461,22 MW					
30	PLTU Steam Power Plant	Ketapang	PLN	10	Kalimantan Barat West Kalimantan

No.	Regional/ Proyek Pembangkit Regional/ Plant Development		Milik Owner	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Power (MW)	Propinsi Province
SUMATERA 1125,8 MW					
31	PLTU Steam Power Plant	Ketapang	PLN	10	Kalimantan Barat West Kalimantan
32	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Pontianak #4	PLN-Batam	25	Kalimantan Barat West Kalimantan
33	PLTU Steam Power Plant	Pulang Pisau (FTP1)	PLN	60	Kalimanta Tengah Central Kalimantan
34	PLTM Micro Hydro Power PlantG	Bangkanai (FTP2) (14 unit)	PLN	136,22	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
35	PLTU Steam Power Plant	Teluk Balikpapan	PLN	110	Kalimantan Timur East Kalimantan
36	PLTU Steam Power Plant	Teluk Balikpapan	PLN	110	Kalimantan Timur East Kalimantan
SULAWESI & NUSA TENGGARA 431,2 MW					
37	PLTS	Gorontalo	IPP	2	Gorontalo
38	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Gorontalo Peaker	PLN	100	Gorontalo
39	PLTM Micro Hydro Power Plant	Bantaeng 1	IPP	4,2	Sulawesi Selatan South Sulawesi
40	PLTU Steam Power Plant	Tawaeli (Ekspansi)	IPP	30	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
41	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Marine Vessel Sulut Amurang	Sewa	120	Sulawesi Utara North Sulawesi
42	PLTP Geothermal Power Plant	Lahendong V (FTP 2)	IPP	20	Sulawesi Utara North Sulawesi
43	PLTP Geothermal Power Plant	Lahendong VI (FTP 2)	IPP	20	Sulawesi Utara North Sulawesi
44	PLTU Steam Power Plant	Lombok (FTP1)	PLN	25	NTB West Nusa Tenggara
45	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Lombok unit 1	PLN-Batam	25	NTB West Nusa Tenggara
46	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Mobile PP Lombok unit 2	PLN-Batam	25	NTB West Nusa Tenggara
47	PLTG/MG Gas Turbine Power Plant	Marine Vessel Kupang	Sewa	60	NTT East Nusa Tenggara
MALUKU & PAPUA 24 MW					
48	PLTU Steam Power Plant	Tidore (FTP1)	PLN	7	Maluku Utara North Maluku
49	PLTU Steam Power Plant	Tidore (FTP1)	PLN	7	Maluku Utara North Maluku
50	PLTU Steam Power Plant	Jayapura - Holtekamp #2	PLN	10	Papua
		TOTAL		**3.714**	

Progres Pembangunan Transmisi & Gardu Induk

Selain pembangunan proyek pembangkit, juga melibatkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, dengan area tersebar sesuai sebaran pembangunan pembangkit. Jumlah proyek untuk transmisi dengan panjang transmisi adalah 46.266 kms dan Gardu Induk dengan kapasitas mencapai 108.479 MVA.

Transmission & Substation Development Progress

In addition to transmission project development, the abovementioned programs also involve transmission and distribution network development, with areas spread out according to plant development distributions. Transmission projects span a length of 46,266 kmc with substation capacity reaching 108,479 MVA.

Progres Pembangunan Transmisi

Adapun program pengembangan sistem transmisi kumulatif sampai dengan 31 Desember adalah sebagai berikut:

Transmission Development Progress

Cumulative transmission system development program up to 31 December is as follows:

Fase Phase	**Regional Sumatera** Sumatra Region	**Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah, Regional Jawa Bagian Timur dan Bali** West Java Region, Central Java Region, East Java Region and Bali	**Regional Kalimantan** Kalimantan Region	**Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** Sulawesi & Nusa Tenggara Region	**Regional Maluku & Papua** Maluku & Papua Region	**Total**	**Pencapaian terhadap Total** Achievement to Total
	(MW)	**(MW)**	**(MW)**	**(MW)**	**(MW)**	**(MW)**	
Energize, RLB, Komisioning Energize, Proper Voltage Recommendation, Commissioning	1.522,0	944,0	1.221,0	972,0	330,0	4.989,0	10,78%
Konstruksi Construction	8.242,0	3.403,0	2.575,0	2.923,0	27,0	17.170,0	37,11%
Pra Konstruksi Pre Construction	9.401,0	6.648,0	4.087,0	3.312,0	659,0	24.107,0	52,11%
Total	**19.165,0**	**10.995,0**	**7.883,0**	**7.207,0**	**1.016,0**	**46.266,0**	**100,00%**

Selama tahun 2016, sejumlah proyek gardu induki telah energize, Rekomendasi Layak Bertegangan (RLB), dan komisioning, dengan rincian sebagai berikut:

In 2016, several transmission projects were energized, gained Proper Voltage Recommendation (RLB), and were commissioned, with details as follows:

Fase Phase	**Regional Sumatera** Sumatra Region	**Regional Jawa Bagian Barat** West Java Region	**Regional Jawa Bagian Tengah** Central Java Region	**Regional Jawa Bagian Timur & Bali** East Java & Bali Region	**Regional Kalimantan** Kalimantan Region	**Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** Sulawesi & Nusa Tenggara Region	**Regional Maluku & Papua** Maluku & Papua Region	**Total**
	(kms)	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**
Energize	–	0,50	4,00	–	4,00	–	–	8,50
Rekomendasi Layak Bertegangan Proper Voltage Recommendation	1.274,75	218,90	180,52	32,95	316,50	536,35	182,20	2.742,17
Komisioning Commissioning	–	24,00	–	–	40,00	–	–	64,00
Jumlah	**1.274,75**	**243,40**	**184,52**	**32,95**	**360,50**	**536,35**	**182,20**	**2.814,67**

Progres Pembangunan Gardu Induk

Adapun program pengembangan Gardu Induk kumulatif sampai dengan 31 Desember adalah sebagai berikut:

Substation Development Progress

The cumulative substation development program as at 31 December was as follows:

Fase Phase	**Regional Sumatera** Sumatra Region	**Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Tengah, Regional Jawa Bagian Timur dan Bali** West Java Regio, Central Java Region, East Java Region and Bali	**Regional Kalimantan** Kalimantan Region	**Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** Sulawesi & Nusa Tenggara Region	**Regional Maluku & Papua** Maluku & Papua Region	**Total**	**Pencapaian Terhadap Total** Achievement to Total
	(MVA)	**(MVA)**	**(MVA)**	**(MVA)**	**(MVA)**	**(MVA)**	
Energize, RLB, Komisioning Recommendation, Commissioning	5.510,0	12.438,0	1.160,0	790,0	80,0	19.978,0	18,42%
Kontruksi Construction	8.340,0	13.061,0	540,0	1.010,0	40,0	22.991,0	21,19%
Pra Konstruksi Pre Construction	18.326,0	40.524,0	2.210,0	3.800,0	650,0	65.510,0	60,39%
Total	**32.176,0**	**66.023,0**	**3.910,0**	**5.600,0**	**770,0**	**108.479,0**	**100,00%**

Selama tahun 2016, sejumlah proyek gardu induki telah energize, Rekomendasi Layak Bertegangan (RLB), dan komisioning, dengan rincian sebagai berikut:

In 2016, several substation projects were energized, gained Proper Voltage Recommendation (RLB), and were commissioned, with details as follows:

Fase Phase	**Regional Sumatera** Sumatra Region	**Regional Jawa Bagian Barat** West Java Region	**Regional Jawa Bagian Tengah** Central Java Region	**Regional Jawa Bagian Timur & Bali** East Java & Bali Region	**Regional Kalimantan** Kalimantan Region	**Regional Sulawesi & Nusa Tenggara** Sulawesi & Nusa Tenggara Region	**Regional Maluku & Papua** Maluku & Papua Region	**Total**
	(kms)	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**	**(kms)**
Energize	–	–	–	–	–	–	–	–
Rekomendasi Layak Bertegangan Proper Voltage Recommendation	4.270,0	3.360,0	3.443,0	2.050,0	480,0	420,0	40,0	14.063,0
Komisioning Commissioning	60,0	–	–	–	30,0	130,0	–	220,0
Jumlah	**4.330,0**	**3.360,0**	**3.443,0**	**2.050,0**	**510,0**	**550,0**	**40,0**	**14.283,0**

TINJAUAN PRODUKSI DAN OPERASIONAL

INDIKATOR OPERASIONAL STRATEGIS

Sebagai perusahaan kelistrikan yang menjalankan tugas pemenuhan tenaga listrik kepada seluruh lapisan masyarakat, PT PLN (Persero) dituntut untuk menjalankan Perusahaan dengan kinerja yang baik. Untuk itu, diperlukan penyusunan beberapa target utama dan asumsi kunci, berupa target capaian di bidang operasional, sebagai dasar bagi diperolehnya gambaran kinerja yang dapat dicapai di masa mendatang termasuk perhitungan kebutuhan dana bagi pengembangan ketenagalistrikan sesuai target yang ditetapkan tersebut.

Mengingat pentingnya pemenuhan target dan asumsi kunci tersebut terhadap kinerja keuangan PLN, beberapa diantaranya kemudian dimasukan sebagai komponen *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi yang ditetapkan dan dievaluasi setiap periode, sebagai wujud akuntabilitas Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan aset Perusahaan.

Beberapa asumsi kunci/target operasional utama yang memberi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan PLN, meliputi:

1. Kenaikan jumlah pelanggan: Penambahan jumlah pelanggan merupakan salah satu sasaran yang ditetapkan untuk PLN, tujuannya adalah meningkatkan rasio elektrifikasi. Penambahan jumlah pelanggan secara umum didominasi oleh pelanggan rumah tangga yang tarifnya masih di bawah tarif keekonomian, sehingga pendapatan PLN dari segmen tersebut masih membutuhkan subsidi dari pemerintah.
2. *Commercial Operation Date* (COD)/Penambahan Kapasitas Pembangkit: Pertambahan kapasitas pembangkit tepat pada waktunya membuat berbagai proyeksi perhitungan biaya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, pembelian daya dari pembangkit IPP maupun sewa dan subsidi lebih dapat dialokasikan dengan tepat. Sebaliknya kekurang akuratan COD membuat perhitungan tersebut kurang tepat dan berdampak pada meningkatnya biaya operasional yang berujung pada naiknya biaya pokok pengadaan.
3. Fuel Mix BBM (Bauran Energi): Kurang berhasilnya capaian bauran energi membuat biaya operasional cenderung meningkat, mengingat biaya produksi BBM secara umum masih lebih mahal dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.
4. Kapasitas Pembangkit Sewa: Sewa pembangkit dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit energi pada suatu area serta juga untuk mempertahankan tingkat mutu pelayanan. Namun, penggunaan pembangkit sewa akan berdampak pada naiknya biaya operasional.

OPERATING AND PRODUCTION REVIEW

STRATEGIC OPERATING INDICATORS

As an electricity company which is tasked to fulfill electricity needs to all levels of society, PT PLN (Persero) is obliged to meet good performance standards. Therefore, there are main targets and key assumptions translated as operational achievement targets, serving as the basis for future achievable performance, including determining funding calculations for meeting electricity development targets.

Considering the importance of target achievement and key assumptions for PLN's financial performance, several are included as Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors, set and evaluated every period, functioning as part of the accountability of the Board of Directors in executing Company asset management.

Several key assumptions and main operating targets with significant impact to PLN's financial performance include:

1. Increasing the number of clients: A rising number of clients is a target set by PLN aimed at increasing the electrification ratio. The increase in the number of clients will generally be dominated by household customers whose tariff is under market price, thus PLN revenue from this segment still needs government subsidy.
2. Commercial Operation Date (COD)/Additional Plant Capacity: Commissioning plants on time allows effective cost projection to cover fuel demand, power purchases from IPPs or leased, and accurate subsidy allocation. On the contrary, COD inaccuracy invites less accurate calculations and increased operational costs, leading to a rise in key procurement costs.
3. Fuel Mix: Less successful achievement of fuel mix causes operating costs to rise, considering the BBM production cost is generally more expensive than for other fuel types.
4. Leased Plant Capacity: Leasing of plants is done to resolve energy deficits in certain areas as well as to maintain service quality. However, leased plants increase operating costs.

5. Faktor Ketersediaan Pembangkit/Equivalent Availability Factor (EAF) PLTU: Menunjukkan prosentase kesiapan unit pembangkit untuk dapat dioperasikan pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi EAF berarti kesiapan pembangkit untuk memproduksi tenaga listrik semakin besar.
6. Susut Jaringan: menunjukan besarnya tingkat kehilangan daya listrik dalam proses transmisi dan distribusi dari pembangkit ke pelanggan. Semakin besar susut jaringan, maka semakin besar kehilangan kWh yang pada akhirnya meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

5. Equivalent Availability Factor (EAF) of PLTU: Shows plant readiness percentage to be operable in certain periods. The higher EAF means greater plant readiness to produce electricity.
6. Network Losses: Show the extent of electricity loss in transmission and distribution processes from plants to customers. The higher network losses, the higher kWh loss, eventually increasing key cost of electricity procurement.

PRODUKSI TENAGA LISTRIK

Pada tahun 2016, produksi tenaga listrik mencapai 248.611 GWh, meningkat 6,25 % dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 233.982 GWh. Adapun komposisi produksi tenaga listrik tahun 2016 yang berasal dari pembangkit sendiri sebesar 166.457 GWh atau memberikan kontribusi 66,96% dari total produksi. Sedangkan, produksi yang berasal dari pembangkit sewa sebesar 17.352 GWh atau 6,98% dari total produksi dan produksi yang berasal dari pembelian listrik swasta sebesar 64.802 GWh atau 26,06% dari total produksi.

ELECTRICITY POWER PRODUCTION

In 2016, electricity production reached 248,611 GWh, rising 6.25 % compared to 2015 of 233,982 GWh. Electricity power production in 2016 coming from owned-plants was 166,457 GWh, or contributing 66.96% to total production. Meanwhile, production from leased plants was 17,352 GWh, or 6.98% of total production; and production coming from private electricity producers was 64,802 GWh, or 26.06% of total production.

Tabel Produksi Tenaga Listrik
Electricity Power Production Table

Produksi Listrik (GWh)	2016	2015	2014	Electricity Power Production (GWh)
Produksi Sendiri				**Own Production**
BBM	4.673	5.783	9.491	Fossil Fuel/Petroleum
Non BBM	161.784	150.848	143.362	Non Fossil Fuel/Petroleum
Batubara	91.701	90.275	83.373	Coal
Gas Alam	51.890	46.039	44.398	Natural Gas
Panas Bumi	3.958	4.392	4.285	Geothermal
Air	13.886	10.004	11.164	Hydro
Surya dan Bayu	6	5	7	Solar and Wind
Biodiesel dan Olein	344	133	135	Biodiesel and Olein
Sewa	17.352	19.841	22.444	Lease
Pembelian	64.802	57.510	53.258	Purchase
Total Produksi Listrik	**248.611**	**233.982**	**228.555**	**Total Power Production**

Dari tabel di atas tampak bahwa produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit sendiri berbahan bakar minyak (BBM), mengalami penurunan sebesar 19,19% dari tahun 2015.

From the table, it can be seen that electricity power production from owned and fossil-fuel based plants (BBM), experienced a decrease of 19.19% from 2015.

Usaha yang dilakukan untuk menekan produksi tenaga listrik dari pembangkit berbahan bakar minyak, telah sejalan dengan prioritas program kerja Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik melalui optimalisasi produksi tenaga listrik dari pembangkit non BBM.

The effort made to decrease electricity power production sourced from fossil-fuel powered plants is in line with the Company's work plan priority to reduce Electricity Power Provision Key Costs through optimizing electricity power production from non-BBM plants.

Produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM (batu bara, gas alam, tenaga air, panas bumi, surya dan angin) mengalami peningkatan sebesar 161.784 GWh atau 7,25% dari tahun sebelumnya 150.848 GWh. Produksi tenaga listrik dari pembangkit sewa sebesar 17.352 GWh, mengalami penurunan sebesar 12,55% dibanding tahun 2015 sebesar 19.841GWh.

Electricity production from non-BBM plants (coal, natural has, geothermal, wind and solar) increased by 161,784 GWh, or 7.25%, from the previous year of 150,848 GWh. Electricity power production from leased plants of 17,352 GWh had a decrease of 12.55% compared to that of 2015 at 19,841 GWh.

Menurunnya produksi tenaga listrik yang berasal dari pembangkit BBM dan meningkatnya produksi tenaga listrik dari pembangkit non-BBM dapat tercapai karena sejumlah hal berikut ini:

1. Telah beroperasinya beberapa proyek pembangkit yang berbahan bakar batu bara.
2. Selesainya proses pemeliharaan pembangkit eksisting non-bbm.
3. Adanya pasokan gas alam, sehingga pembangkit berbahan bakar gas alam dapat menghasilkan produksi tenaga listrik yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
4. Meningkatnya penggunaan teknologi CNG sebagai pembangkit *peaker*.
5. Meningkatnya produksi PLTA karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2016.

The declining electricity production from BBM plants and increasing electricity production from non-BBM plants was achieved due to these factors:

1. Several coal-fired power plants have started operations.
2. Maintenance of existing non-BBM plants has finished.
3. There is a greater natural gas supply, leading to natural gas-fired plants producing more electricity than that of the previous year.
4. Increasing CNG technology usage at peaker plants.
5. Increasing PLTA production due to high rainfall rate in 2016.

Produksi Tenaga Listrik Menurut Segmen Geografis (GWh)
Electricity Production Based on Geographical Segment (GWh)

Wilayah	2016	2015	2014	Region
Sumatera	37.665	35.309	33.272	Sumatra
Jawa Bagian Barat	25.514	105.675	99.675	West Java Region
Jawa Bagian Tengah	53.987			Central Java Region
Jawa Bagian Timur dan Bali	32.702			East Java and Bali Region
Kalimantan	10.175	24.010	22.723	Kalimantan
Sulawesi & Nusa Tenggara	13.293			Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua	2.550			Maluku & Papua
Anak Perusahaan	72.724	68.988	72.885	Subsidiary
Total	**248.611**	**233.982**	**228.555**	**Total**

Kapasitas Terpasang

Kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar 54.664,50 MW, naik 7,48% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 50.859,28 MW. Komposisi kapasitas terpasang adalah milik sendiri 72,78%, %, swasta (IPP) 20,80 %, dan sewa 6.42%.

Installed Capacity

Installed plant capacity as at the end of 2016 was 54,664.50MW, up 7.48% from 2015 at 50,859.28 MW. Composition of installed capacity is owned plants 72.78 %, privates (IPP) 20.80 %, and leased plants 6.42%.

Kapasitas Terpasang (MW)
Installed Capacity (MW)

Kapasitas Terpasang	2016	2015	2014	Installed Capacity
Status Kepemilikan				**Ownership Status**
Milik PLN	39.785,06	38.265,25	37.227,55	PLN
Swasta (IPP)	11.370,87	8.964,54	7.950,68	Independent Power Producer
Sewa Pembangkit	3.508,56	3.629,48	4.412,37	Lease
Jumlah	**54.664,49**	**50.859,28**	**49.590,60**	**Total**

BIAYA POKOK PENYEDIAAN (BPP)

Perseroan berupaya menurunkan BPP melalui penerapan berbagai program dengan tujuan menurunkan komponen biaya yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap BPP. Salah satu komponen utama dari BPP adalah biaya pembangkitan yang sangat dipengaruhi oleh jenis energi primer yang digunakan unit pembangkit.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) adalah:

1. Mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang relatif lebih mahal dan menggantikannya dengan sumber energi primer lain seperti batubara dan gas.
2. Meningkatkan efisiensi distribusi dan transmisi serta menjaga adanya kasus-kasus pencurian listrik dengan tujuan mengurangi susut jaringan.
3. Meningkatkan keandalan pengelolaan sistem distribusi, transmisi dan pembangkitan melalui pemeliharaan secara berkala atas fasilitas tersebut dengan tetap memperhatikan pengaturan penyaluran tenaga listrik dan beban listrik.

Berbagai program yang dijalankan dengan konsisten tersebut telah memberikan hasil nyata berupa relatif terjaganya besaran BPP dalam tiga tahun terakhir, seperti ditunjukan pada grafik berikut.

COST OF SUPPLY (BPP)

PLN strives to reduce the cost of supply by implementing various program aiming to lower the most significant component to the cost of supply. One of the core components of the cost of supply is the cost of power generating which heavily influenced by the type of energy used.

Efforts done by PLN to lower the cost of supply are:

1. Reducing the use of relatively expensive fuels and replacing them with other primary energy sources, such as coal and gas.
2. Increasing the efficiency of distribution and transmission as well as preventing the electricity theft cases to reduce network losses.
3. Improving the reliability of the management system of distribution, transmission and power plant through regular maintenance of the facility by taking into account the arrangement of power distribution and electrical loads.

Programs implemented consistently yielded an actual result which depicted from a stable cost of supply in the past three years – shown in the graph below:

Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (Rp/KWh)
Electricity Cost of Supply (Rp/KWh)

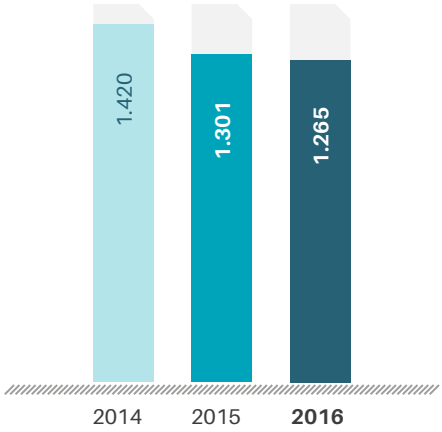

Perseroan berupaya meningkatkan penggunaan energi primer batubara dan gas sebagai sumber bahan bakar utama pengganti minyak bumi. Perseroan juga mengembangkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, bayu, surya, dan bio fuel (CPO) dengan tujuan menurunkan BPP.

PLN strives to increase the use of primary energy sources of coal and natural gas as the primary fuel to replace oil-based fuels. PLN also develops the use of new and renewable energy such as geothermal, wind, solar, and bio fuel (CPO) to recude the cost of supply.

Namun demikian, Perseroan menghadapi kendala dalam meningkatkan secara substansial penggunaan energi primer, terutama gas dan panas bumi dalam mengembangkan pembangkit yang dengan biaya per kWh yang lebih murah. Kendala yang dihadapi meliputi:

1. Ketiadaan jaminan pasokan gas yang cukup dan konsisten. Perseroan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan dan menjamin pemenuhan gas untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit dari pasar bebas. PLN berupaya mengatasi kendala pasokan gas ini dengan menjalin kerja sama dengan BUMN di bidang gas, yakni Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
2. Program-Program Gasifikasi untuk menggantikan energi BBM saat ini masih dalam proses lelang dan pembuatan kajian.
3. Belum adanya aturan yang jelas mengenai perijinan pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang sumbernya banyak berada di areal hutan lindung. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang memungkinkan pembangunan pusat PLTP di kawasan hutan lindung. Namun demikian peraturan lanjutan (PP dan turunan aturan lainnya) belum ada, sehingga potensi pembangkitan dari area prospek belum dapat dioptimalkan dalam waktu dekat.
4. Keterbatasan kapasitas dari unit pembangkit bertenaga bayu dan surya, sehingga lebih cocok untuk digunakan pada sistem kecil.

Mengingat pentingnya perhitungan biaya pokok pengadaan ini terhadap keseluruhan operasional Perseroan, PLN berupaya meningkatkan akuntabilitas dan akurasi pencatatan transaksi keuangan (termasuk penerimaan pembayaran dari pelanggan) dengan menerapkan berbagai program, meliputi:

1. Perbaikan sistim akuntansi pencatatan keuangan dengan menerapkan PSAK terbaru seusai ketentuan.
2. Perbaikan sistem transaksi keuangan dengan menerapkan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan secara Terpusat (P2APST) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) sebagai bagian perbaikan sistem bisnis ini.
3. Pengelolaan seluruh transaksi keuangan secara terpusat.
4. Bekerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan dan pengelolaan keuangan.
5. Bekerjasama dengan KPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

Nonetheless, PLN is still facing barriers to increase the use of primary energy significantly particularly natural gas and geothermal in developing power plants with lower costs per kWh. These barriers are:

1. Lack of adequate and consistent guarantees of gas supply. PLN does not have the full authority to establish and ensure the fulfillment of gas needs for its plants from the free market. PLN tries to overcome gas supply obstacle in building cooperation with SOE's in gas sector, which are Pertagas & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
2. Gasification program to replace fossil fuels which currently in the producrement process and feasibility study.
3. Lack of clear regulations on geothermal power plants development which most of them within the protected forestry area. The government issued the Forestry Minister Regulation No P.18/Menhut-II/2011 on guidelines for borrow-to use permits for forest areas which allows the construction of geothermal power plant station in protected forest area. However, there are no derivative regulations yet hence the potentials for power plants in the prospective area is not yet optimized in the near future.
4. Limited capacity from solar and wind power plants, making them more suitable for use on small systems.

Considering the calculation of basic cost this procurement on entire PLN's operational cost, PLN strives to increase the accountability and accuracy of the financial transaction recording (including the receipt of payments from customers) by implementing these programs:

1. Improvement in financial records accountancy system by implementing the latest IFAS in accordance with the prevailing regulations.
2. Improvement in financial transaction system by implementing Integrated Income Cashflow Management and Monitoring (P2APST) and Integrated Customer Service Application (AP2T) as part of business system improvement.
3. Centralized financial transaction management.
4. Cooperation with the State Audit Agency to enchance accountability and transparency of financial records and management.
5. Cooperation with the Commission of Corruption Eradication to enhance accountability and prevent actions that may harm the Company and/or the country.

BAURAN ENERGI

Sepanjang tahun 2016, Perseroan terus mengintensifkan upaya mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak secara bertahap. Hal ini terlihat dari pencapaian bauran energi, dimana produksi tenaga listrik dari pembangkit BBM hanya sebesar 6,46% lebih baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,22%. Produksi dari pembangkit non BBM telah mencapai 93,54%, lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar 91,78%.

FUEL MIX

In 2016, the Company intensified its staged effort to reduce dependency on oil-based fuel. As seen from the fuel mix achievement, electricity production from oil source plants was only 6.46%, improving from the previous year at 8.22%. Production from non-fossil fuel plants reached 93.54%, higher than previously at 91.78%.

Bauran Energi (%)
Fuel Mix (%)

Jenis Pembangkit	2016	2015	2014	Type of Power Plant
BBM	6,46	8,22	11,37	Fossil Fuel
Non-BBM	93,54	91,78	88,63	Non Fossil Fuel
Gas Alam	26,28	25,34	24,58	Gas
Batubara	54,45	55,79	52,59	Coal
Panas Bumi	4,29	4,29	4,39	Geothermal
Air	7,79	5,87	6,63	Hydro
Lainnya (EBT, Biodiesel dan Olein)	0,73	0,49	0,02	Others (New and Renewable Energy, Biodiesel, and Olein)

Pada tabel di atas terlihat bahwa bauran energi dari pembangkit berbahan bakar gas meningkat tetapi bauran energi batubara menurun. Meskipun bauran energi batubara menurun, tetapi secara produksi total pembangkit (milik sendiri, sewa, dan beli) mengalami peningkatan yaitu dari semula 130,54 TWh pada tahun 2015 menjadi 135,36 TWh di tahun 2016.

In the table above, the fuel mix from gas-fired plants rose but the coal energy mix dropped. Although the coal fuel mix dropped as a percentage, coal plants total production (self-owned, leased, and purchased) rose from 130.54 TWh in 2015 to 135.36 TWh in 2016.

Peningkatan bauran energi gas dan tambahan produksi pembangkit berbahan bakar batubara disebabkan oleh:

a. Peningkatan produksi gas di Sumatera dimana pada tahun 2016 pusat listrik Belawan dan Arun sudah beroperasi penuh dengan bahan bakar gas.
b. Pengoperasian Pembangkit gas baru di Bali dan Kalimantan yaitu PLTDG Pesanggaran dan PLTMG Bangkanai.
c. Semakin intensifnya penggunaan CNG untuk pembangkit peaker.
d. Beroperasinya PLTU baru baik milik PLN maupun IPP.

The increase in the gas energy mix and additional production of coal-fired plants was caused by:

a. Increasing gas production in Sumatra, where in 2016, Belawan and Arun electricity centers were fully operated with gas fuel.
b. Operation of new gas Plant in Bali and Kalimantan: Diesel and Gas Power Plant Pesanggaran and Combined Cycle Power Plant Bangkanai.
c. Intensified use of CNG for peaker plants.
d. Operation of new Steam Power Plant, either owned by PLN or IPP.

Selain itu, terlihat pula bahwa bauran energi dari pembangkit berbahan bakar air meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh pola musim basah pada tahun 2016 dimana curah hujan cukup tinggi pada periode Januari sampai dengan bulan Mei.

Moreover, the fuel mix from hydro-plants rose compared to the previous year due to a considerably higher rainfull pattern in the January to May 2016 period.

KONSUMSI DAN HARGA ENERGI PRIMER

Penambahan kapasitas pembangkit (MW) dan peningkatan produksi tenaga listrik secara langsung menyebabkan meningkatnya pemakaian energi primer, yakni batu bara dan gas. Peningkatan volume pemakaian batubara dan gas alam ini merupakan realisasi dari upaya yang dilakukan Perseroan untuk menekan pemakaian bahan bakar minyak.

CONSUMPTION AND PRIMARY ENERGY PRICE

Additional plant capacity and increasing electricity production directly caused the increased usage of primary energy, of coal and gas. The increasing usage volume of coal and natural gas is the realization of efforts made by the Company to diminish oil-based fuel.

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa pemakaian bahan bakar minyak mengalami penurunan dan sebaliknya pemakaian batu bara dan gas alam meningkat. Hal ini disebabkan (i) telah beroperasinya sebagian pembangkit FTP I yang berbahan bakar batubara dan peningkatan produksi PLTU eksisting untuk mendukung penjualan energy listrik, serta (ii) adanya tambahan pasokan gas alam untuk Pusat listrik Belawan (beroperasi penuh menggunakan bahan bakar gas pada tahun 2016) serta pengoperasian pembangkit baru PLTDG Pesanggaran di Bali dan PLTMG Bangkanai di Kalimantan.

As seen in the below table, oil-based fuel use saw a decrease and contrarily coal and natural gas usage rose. This was caused by (i) operations of some FTP I Steam Power Plantand increase in existing Steam Power Plant production to support electricity energy sales, as well as (ii) additional natural gas supply to Belawan power Center (fully operated using gas fuel in 2016) as well as operations of new Diesel and Gas Power Plant Pesanggaran plant in Bali and Combined Cycle Power Plant Bangkanai in Kalimantan.

Pemakaian Energi Primer
Primary Energy Usage

Jenis Bahan Bakar	2016	2015	2014	Fuel Type
BBM (Kilo liter)	4.279.067	5.478.863	7.431.004	Fossil Fuel(Kilo liter)
Batubara (ton)	50.556.446	48.995.169	44.604.981	Coal (ton)
Gas Alam (MMSCF)	505.125	456.494	450.190	Natural Gas (MMSCF)

TARIF TENAGA LISTRIK

Komponen utama pendapatan PLN adalah penjualan tenaga listrik dengan dasar perhitungan Tarif Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian digunakan sebagai dasar menghitung jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan. Besaran Tarif Tenaga Listrik ditinjau dan ditetapkan secara berkala dan terdiri dari berbagai kelompok tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.

Tarif Tenaga Listrik ditetapkan dengan memperhitungkan kemampuan pelanggan dan mempertimbangkan daya terpasang dari masing-masing kelompok pelanggan. Semakin tinggi daya terpasang pada suatu tegangan, maka akan semakin besar pula besaran Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan pada tegangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, terdapat 12 (dua belas) golongan tarif yang diberlakukan mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif adjustment), yaitu:

1. R-1/TR, 1300 VA (rumah tangga kecil).
2. R-1/TR, 2200 VA (rumah tangga kecil).
3. R-2/TR, 3500 VA – 5500 VA (rumah tangga menengah).
4. R-3/TR, 6600 VA ke atas (rumah tangga besar).
5. B-2/TR, 6600 VA – 200 kVA (bisnis menengah),
6. B-3/TM, di atas 200 kVA (bisnis besar),
7. P-1/TR, 6600 VA – 200 kVA (kantor pemerintah sedang),
8. I-3/TM, di atas 200 kVA (industri menengah),
9. I-4/TT, 30000 kVA ke atas (industri besar),
10. P-2/TM, di atas 200 kVA (kantor pemerintah besar),
11. P-3/TR (penerangan jalan umum),
12. Layanan Khusus (L/TR, TM, TT).

ELECTRICITY TARIFF

The main component of PLN's revenue is the electricity sales with the base calculation of the electricity tariff determined by the Government and the House of Representative (DPR) to be used as the basis for calculating the utility bill. Electricity Tariff is reviewed and adjusted periodically and consist of a number of tariff groups for different customer groups.

The electricity tariffs are set by taking into account the customer's ability and the installed power of each customer group. The higher the installed power, the greater tariff imposed. The greater the volume of electricity consumption, the greater the multiplier in setting the tariff.

In line with the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No 09/2015 on the Amendment of the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No 31/2014 on Electricity Tariff Provided by Liability Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, there are 12 (twelve) tariff groups stipulated by the tariff adjustment mechanism which consist of:

1. R-1/TR, 1300 VA (small households).
2. R-1/TR, 2200 VA (small households).
3. R-2/TR, 3500 VA – 5500 VA (medium households).
4. R-3/TR, 6600 VA above (medium households).
5. B-2/TR, 6600 VA – 200 kVA (medium enterprises),
6. B-3/TM, above 200 kVA (big enterprises),
7. P-1/TR, 6600 VA – 200 kVA (medium government offices),
8. I-3/TM, above 200 kVA (medium industries),
9. I-4/TT, 30000 kVA above (big industries),
10. P-2/TM, above200 kVA (big government offices),
11. P-3/TR (public street lighting),
12. Special Services (L/TR, TM, TT).

Penyesuaian atas 12 golongan tarif tersebut dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan :
a. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah (kurs)
b. Indonesia Crude Price (ICP) dan
c. Inflasi.

The adjustment of the 12 tariff groups is conducted every month should there is a necessary change of:
a. Curenccy exchange of the US Dollar against Rupiah
b. Indonesia Crude Price (ICP), and
c. Inflation.

Adapun gambaran mutasi Tarif Tenaga Listrik yang dikenakan oleh PLN untuk tahun 2016 sebagai realisasi penerapan perhitungan Tariff Adjustment sebagai berikut:

The description of the Electriity Tariff adjustment imposed by PLN for the year 2016 as a realization of the application of the Tariff Adjustment calculation is as follow:

Realisasi Tarif Tenaga Listrik pada Segmen Pelanggan yang Diberlakukan Automatic Tariff Adjustment 2016

Realization on Electricity Tariff for Customer Segment that was Applied of Atomatic Tariff Adjustment 2016

Realisasi Tarif Tenaga Listrik pada Segmen Pelanggan yang Diberlakukan Automatic Tariff Adjustment 2016
Realization of Electricity Tariff for Customer Segment that was Applied Automatic Tariff Adjustment in 2016

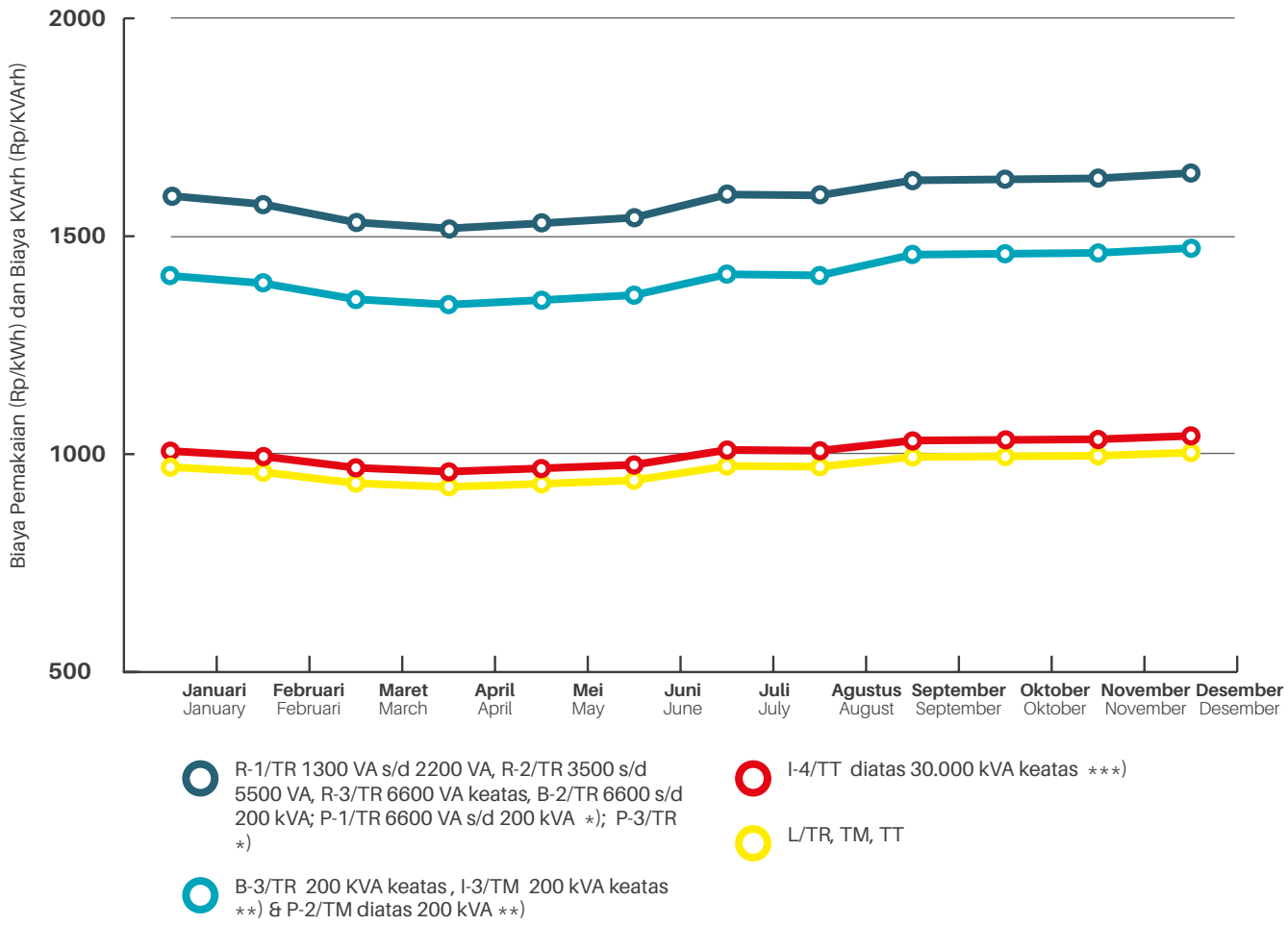

Periode Period	Tegangan Rendah Low Voltage	Tegangan Menegah Medium Voltage			Tegangan Tinggi High Voltage		Layanan Khusus Special Services
	(Rp/kWh)	LWBP (Rp/kWh)	WBP (Rp/kWh)	kVARh (Rp/kVArh)	LWBP & WBP (Rp/kWh)	kVARh (Rp/kVArh)	(Rp/kWh)
Januari January	1.409,16	1.007,15	K x LWBP	1.083,92	970,35	970,35	1.592,70
Februari February	1.392,12	994,97	K x LWBP	1.070,82	958,62	958,62	1.573,44
Maret March	1.355,29	968,65	K x LWBP	1.042,49	933,26	933,26	1.531,81
April	1.342,98	959,84	K x LWBP	1.033,02	924,78	924,78	1.517,90
Mei May	1.353,45	967,33	K x LWBP	1.041,07	931,99	931,99	1.529,73
Juni June	1.364,88	975,50	K x LWBP	1.049,86	939,86	939,86	1.542,65
Juli July	1.412,66	1.009,65	K x LWBP	1.086,62	972,76	972,76	1.596,66
Agustus August	1.410,12	1.007,83	K x LWBP	1.084,66	971,01	971,01	1.593,78
September	1.457,72	1.031,20	K x LWBP	1.109,81	993,42	993,42	1.628,24
Oktober October	1.459,74	1.032,63	K x LWBP	1.111,34	994,80	994,80	1.630,49
November	1.461,80	1.034,09	K x LWBP	1.112,92	996,21	996,21	1.632,80
Desember December	1.472,72	1.041,81	K x LWBP	1.121,23	1.003,65	1.003,65	1.644,99

Catatan:
a. Untuk pelanggan reguler (non prabayar) akan dikenakan rekening minimum jika pemakaian kWh dibawah 40 jam nyala dikali daya tersambung.
b. Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
c. Untuk WBP, Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Notes:
a. For regular customers (non prepaid electricity) will charge a minimum fee whould the usage of electricity below 40 hours activation multiplies by installed power.
b. The excess fee on the usage of reactive power (kVArh) is charged within the average power of each month below 0.85 (eighty five percent).
c. For WBP, the comparative factor between WBP and LWBP is in line withthe characteristic of the local power system (1.4 ≤ K ≤ 2), determined by the Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara.

Tarif Listrik Rata-rata Menurut Golongan Tahun 2016 (Rp/kWh)
Average Electricity Tariff Based on Groups 2016 (Rp/kWh)

Golongan Tarif Tariff Class	Harga Jual Rata-rata Average of Selling Price	BPP Rata-rata Average Cost of Supply	Subsidi Subsidy
S.1 / 220 VA	3.217,44	1.425,02	-
S.2 / 450 VA	319,88	1.425,02	(1.105,13)
S.2 / 900 VA	436,47	1.425,02	(988,54)
S.2 / 1.300 VA	720,43	1.425,02	(704,59)
S.2 / 2.200 VA	771,11	1.425,02	(653,90)
S.2 / > 3.500 s/d 200 kVA	921,26	1.425,02	(503,76)
S.3 > 200 kVA	920,35	1.211,13	(290,78)
S			
R.1 / s/d 450 VA	416,98	1.425,02	(1.008,03)
R.1 / 900 VA	585,41	1.425,02	(839,60)
R			
B.1 / s/d 450 VA	503,30	1.425,02	(921,72)
B.1 / 900 VA	603,81	1.425,02	(821,20)
B.1 / 1.300 VA	985,61	1.425,02	(439,41)
B.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	1.129,21	1.425,02	(295,81)

Golongan Tarif Tariff Class	**Harga Jual Rata-rata** Average of Selling Price	**BPP Rata-rata** Average Cost of Supply	**Subsidi** Subsidy
B			
I.1 / 450 VA	465,62	1.425,02	(959,40)
I.1 / 900 VA	438,28	1.425,02	(986,73)
I.1 / 1.300 VA	946,48	1.425,02	(478,54)
I.1 / 2.200 VA	984,11	1.425,02	(440,90)
I.1 / 3.500 s/d 14 kVA	1.183,84	1.425,02	(241,17)
I.2 / > 14 kVA s/d 200 kVA	1.117,33	1.425,02	(307,68)
I			
P.1 / s/d 450 VA	638,68	1.425,02	(786,34)
P.1 / 900 VA	759,88	1.425,02	(665,13)
P.1 / 1.300 VA	1.082,45	1.425,02	(342,57)
P.1 / 2.200 s/d 5.500 VA	1.108,97	1.425,02	(316,05)
P			
T / > 200 kVA	739,09	1.211,13	(472,05)
C / > 200 kVA	919,86	1.211,13	(291,27)

SUBSIDI LISTRIK

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

PLN memerlukan subsidi, mengingat hingga akhir tahun 2016 harga penjualan tenaga listrik masih berada di bawah rata-rata biaya pokok penyediaan listrik (sudah termasuk margin).

Akumulasi besaran subsidi yang diperlukan oleh Perseroan tersebut ditentukan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, diputuskan untuk masing-masing tahun operasional dan dibayarkan oleh Pemerintah sesuai jadwal realisasi APBN tahun berjalan.

BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula tertentu dengan telah memasukkan perhitungan tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan.

Subsidi listrik yang dianggarkan dalam APBNP Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp50,67 triliun yang terdiri dari Rp38,39 triliun untuk tahun berjalan serta Rp12,28 triliun untuk piutang 2014 yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

ELECTRICITY SUBSIDY

The magnitude of electricity subsidies is calculated by the difference between average selling prices of electricity (Rp/kWh) of each tariff group and the electricity Cost of Supply (BPP) in (Rp/kWh) based on each voltage rating tariff group multiplied by the volume of sales (kWh) for each group of tariff.

Up to date PLN still seeks subsidies. This is due to the fact that until the end of 2016 the selling prices of electricity are still below the average cost of supply (including margin).

With the approval of the House of Representatives, the accumulated amount of subsidies required by the Company is determined by the Government decided for each year of operation and paid by the Government according to state budget schedule for the current year.

The cost of supply of electric power is calculated based on specific formulas which include the calculation of transmission and distribution network losses, defined by the Minister of Energy and Mineral Resources e.g. Directorate General of Electricity.

The electricity subsidies budgeted in the revised state budget of the fiscal year 2016 amounted to Rp50.67 trillion consisting of Rp38.39 trillion for the current year as well as receivables Rp12.28 trillion for 2014. The amount of subsidies has been agreed and passed by the House of Representatives (DPR) RI and of which has issued a Law of the Republic of Indonesia No 12 Year 2016 on the Amendment of Act No. 14 of 2015 On the State Budget for Fiscal Year 2016.

Alokasi subsidi listrik pada APBNP TA 2016 telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan dan disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-999.07.1.979321/2016 tanggal 31 Desember 2015, yang mencantumkan pagu subsidi listrik sebesar Rp38,39 triliun Rp50,67 triliun yang terdiri dari Rp38,39 triliun untuk tahun berjalan serta Rp12,28 triliun untuk piutang 2014. DIPA tersebut telah mengalami perubahan, perubahan terakhir mencantumkan nilai subsidi sebesar Rp63,1 triliun yang terdiri dari Rp50,82 triliun untuk tahun berjalan serta Rp12,28 triliun untuk piutang 2014.

Jumlah alokasi subsidi tersebut termasuk di dalamnya pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp12,28 triliun. Pencairan subsidi listrik oleh Pemerintah cq. Kementerian Keuangan Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 November 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik serta Surat Menteri Keuangan No S-25/MK.2/ 2014 tanggal 5 Maret 2016 tentang Penjelasan Tambahan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 170/PMK.02/2013 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-22/MK.2/2016 tanggal 12 Februari 2016 hal Tanggapan Atas Usulan Revisi PMK 170/PMK.02/2013.

Pencairan subsidi listrik Tahun 2016 adalah sebesar Rp 63,10 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Allocation of electricity subsidies has been followed up in the 2016 state budget (APBN PTA) by the issuance and endorsement stated in the Budget Implementation List (DIPA) No. SP DIPA-999.07.1.979321/2016 dated December 31, 2015, which included electricity subsidies maximum amount of Rp 50.67 trillion consisting of Rp38.39 trillion for the current year as well subsidy receivable of Rp12.28 trillion for 2014. The DIPA has been amended to include subsidy of Rp63.1 trillion consisting of Rp50.82 trillion for the current year as well as Rp12.28 trillion in subsidies receivable for 2014.

The aforementioned total includes payment of Rp12.28 trillion for electricity subsidies deficit from 2014. Disbursement of subsidy by the government e.g. the Ministry of Finance carried out by the issuance of Finance Minister Regulation (PMK) No. 170/PMK.02/2013 dated 28 November 2016 on Procedures for the Provision of Budget, Calculation, payment and accountability of Electricity Subsidy and the Letter of the Minister of Finance No. S-25/Mk.2/2014 dated March 5, 2016 on Supplementary Explanation on Article 9 of Regulation Finance (PMK) No. 170/PMK.02/2013 and letter of the Director General of Budget No. S-22/Mk.2/2016 dated February 12, 2016 Response to Proposed Revised terms PMK 170/PMK.02/2013.

The disbursement of the electricity subsidy payment in 2016 was as much as Rp 63.10 trillion, with the detail below:

NO	Penjelasan	Nilai (Rp Triliun) Amount in Rp Trillion	Description
1	Tagihan Audit 2014	12,28	Audited invoice 2014
2	Tagihan subsidi listrik Januari 2016	5,05	Electricity subsidy invoice in January 2016
3	Tagihan subsidi listrik Februari 2016	4,71	Electricity subsidy invoice in February 2016
4	Tagihan subsidi listrik Maret 2016	5,08	Electricity subsidy invoice in March 2016
5	Koreksi Triwulan I 2016	(3,10)	Correction First Quarter 2016
6	Tagihan subsidi listrik April 2016	4,99	Electricity subsidy invoice in April 2016
7	Tagihan subsidi listrik Mei 2016	5,18	Electricity subsidy invoice in May 2016
8	Tagihan subsidi listrik Juni 2016	5,13	Electricity subsidy invoice in June 2016
9	Koreksi Triwulan II 2016	(0,57)	Correction second Quarter 2016
10	Tagihan subsidi listrik Juli 2016	5,23	Electricity subsidy invoice in July 2016
11	Tagihan subsidi listrik Agustus 2016	5,22	Electricity subsidy invoice in August 2016
12	Tagihan subsidi listrik September 2016	5,15	Electricity subsidy invoice in September 2016
13	Koreksi Triwulan III 2016	(2,18)	Correction Third Quarter 2016
14	Tagihan subsidi listrik Oktober 2016	5,24	Electricity subsidy invoice in October 2016
15	Tagihan subsidi listrik November 2016	5,10	Electricity subsidy invoice in November 2016
16	Sebagian Tagihan subsidi listrik Desember 2016	0,58	Partial electricity subsidy invoice in December 2016

Dengan demikian pelaksanaan pembayaran subsidi listrik Tahun 2016 dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Pagu subsidi listrik tahun 2016 termasuk kekurangan subsidi listrik tahun 2014 =Rp 63.098.156.837.000,00
- Realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2016: Rp 63.098.156.836.654,00
- Sisa pagu subsidi listrik tahun 2016: Rp 346,00

Sisa pagu subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp346,00 merupakan selisih pembulatan angka dikarenakan APBN-P Tahun 2016 menggunakan pembulatan angka dalam ribu rupiah. Berdasarkan hasil audit BPK RI yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Thus the 2016 electricity subsidy payout can be informed as follows:

- Capping electricity subsidy in 2016, including shortage electricity subsidy in 2014 = Rp63,098,156,837,000.00
- Realization of electricity subsidy payout in 2016: Rp63,098,156,836,654.00
- The rest of the electricity subsidy ceiling in 2016: Rp346.00

The remainder of Rp346.00 electricity subsidy ceiling in 2016 represents the difference due to Revised State Budget 2016 using rounding off in thousand rupiah. Based on the audit results performed by BPK the following are obtained:

Besaran Subsidi Listrik Pemerintah (Rp Juta)
Government's Electricity Subsidies (Rp Million)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Subsidi Pemerintah	60.441.520	56.552.531	99.303.250	Government Subsidy

SUSUT JARINGAN

Susut jaringan merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya beban pada jaringan tenaga listrik baik pada jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Pertumbuhan beban memberikan kontribusi terhadap meningkatnya susut, namun demikian beberapa upaya yang dilakukan antara lain: investasi dan perbaikan pada jaringan, baik pada jaringan transmisi maupun distribusi, berhasil menekan kenaikan susut akibat pertumbuhan beban.

Realisasi pencapaian susut jaringan pada tahun 2016 adalah 9,48%, lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 9,77%. Pencapaian susut jaringan yang lebih baik dibanding tahun lalu karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan antara lain: melakukan investasi dan perbaikan pada jaringan transmisi maupun distribusi, sehingga berhasil menekan kenaikan susut akibat pertumbuhan beban.

NETWORK LOSSES

Network losses are a consequence of an increasing load in the electricity network both of transmission or distribution. This load growth contributed to an increase in losses; however, both investments in and improvements to transmission and distribution networks resulted in reducing losses due to load growth.

The outcome of network losses achievement in 2016 was 9.48%, better than 2015 which amounted to 9.77%. Achievement of losses is better than last year because of it efforts made by the Company include: Making investments and improvements on transmission lines As well as distribution, thus successfully suppressing the increase losses due to load growth.

Tabel Susut Jaringan
Network Losses Table

Jenis Susut Jaringan	2016	2015	2014	Description
Susut Distribusi	7,37%	7,64%	7,52%	Distribution Losses
Susut Transmisi	2,29%	2,33%	2,37%	Transmission Losses
Susut Jaringan	9,48%	9,77%	9,71%	Network Losses

Tabel Susut Jaringan per Regional
Network Losses Table per Region

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Susut Transmisi	2,29%	2,33%	2,37%	Transmission Losses
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur& Bali	2,36%	2,44%	2,49%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Sumatera	2,72%	2,46%	2,44%	Sumatera
Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua	1,13%	1,30%	1,36%	Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua
Susut Distribusi	7,37%	7,64%	7,52%	Distribution Losses
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali	6,02%	6,28%	6,24%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Sumatera	11,11%	11,88%	11,84%	Sumatera
Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua	10,91%	10,61%	10,24%	Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua
Susut Jaringan	9,48%	9,77%	9,71%	Network Losses
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali	8,23%	8,55%	8,57%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Sumatera	13,52%	14,04%	13,99%	Sumatera
Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua	12,31%	11,76%	11,45%	Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, Maluku & Papua

Adapun upaya berkesinambungan yang telah dilakukan oleh PLN untuk menurunkan susut jaringan yaitu:

1. Melakukan penambahan penyulang/jurusan baik untuk jaringan tegangan menengah maupun jaringan tegangan rendah pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat.
2. Melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi.
3. Melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan.
4. Penyeimbangan beban trafo.
5. Penggantian kWh meter macet.
6. Melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance*.
7. Melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban PJU liar dan P2TL.
8. Melakukan perbaikan proses pengadaan Material Distribusi Utama (MDU).
9. Melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management*.
10. Penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

Continuous efforts have been made by PLN to reduce network losses including:

1. Adding feeder/tracks for medium voltage and low voltage networks in several locations with heavy loads.
2. Installing substation inserts in the distribution network.
3. Replacing network conductor/up rating.
4. Transformer load balancing.
5. Jammed kWh meter replacement.
6. Conducting and intensifying Revenue Assurance program.
7. Consistently and continuously performing policing program on illegal PJU and P2TL.
8. Improving procurement process of Main Distribution Material (MDU).
9. Improving Billing Management system.
10. Completing development of plants and related transmission infrastructure.

PENINGKATAN MUTU LAYANAN DAN KEANDALAN

Upaya berkesinambungan yang dilakukan PLN agar terus dapat meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan adalah:

1. Melengkapi manajemen dengan tools pemantauan gangguan penyulang guna mendorong kinerja penyulang yang lebih baik.
2. Meningkatkan peralatan proteksi, melakukan pembenahan pemeliharaan dan pengaturan alat proteksi agar di masa depan tidak terjadi lagi malfungsi.
3. Melakukan pembersihan *Right of Way* (ROW) secara efektif dengan memanfaatkan informasi peta pohon.

INCREASING SERVICE QUALITY AND RELIABILITY

The continuing efforts made by PLN to be able to increase service quality to customers are:

1. Providing management with feeder disruption monitoring tools to support better feeder performance.
2. Increasing protection tools and revamping maintenance and protection tools to avoid malfunctions in the future.
3. Making more effective Right of Way (ROW) cleaning using tree map information.

4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja trafo distribusi yang meliputi: pemeliharaan, penyeimbangan beban, pengurangan jumlah trafo yang berbeban lebih (*overblast*), trafo sisipan maupun relokasi, sekaligus mengurangi risiko kerusakan trafo.

4. Tightly monitoring distribution transformer performance which covers: maintenance, load balancing, reducing numbers of overblast transformers, inserting or relocating transformers, and reducing transformer breakage risk.

TINJAUAN PER SEGMEN USAHA

Segmen usaha PLN hingga 75% berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai transmisi dan distribusi ke pengguna akhir. Sebagian segmen usaha lain baik berkaitan langsung dengan ketenagalistrikan maupun segmen pendukung usaha yang relevan, pada umumnya dilaksanakan oleh entitas Anak Usaha, meliputi: pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, rancang bangun ketenagalistrikan, teknologi informasi, angkutan laut khusus, tambang dan perdagangan batubara, keuangan dan sebagainya.

SEGMENTASI USAHA

Untuk kepentingan perencanaan strategis, sejak September 2015 PT PLN (Persero) telah membagi segmen usaha menjadi 7 area bisnis regional, yakni: Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur dan Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, serta Maluku & Papua.

Dalam melayani konsumen ketenegalistrikan, Perseroan memenuhinya melalui: pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit milik swasta.

Untuk mendapatkan efisiensi operasional dari proses produksi listrik, prioritas program kerja yang dilaksanakan bertujuan antara lain: menjaga kecukupan pasokan listrik, optimalisasi bauran energi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP), serta meningkatkan efisiensi operasi proses/kinerja pembangkit.

Selain itu, strategi yang dijalankan pada tahun 2016 adalah memperkuat organisasi untuk mendukung kebutuhan bisnis, selaras & sinergi antara fungsi korporat strategis (*strategic corporate function*) dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mengimplementasikan kriteria kinerja ekselen, menjalankan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif, melakukan penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja yang selaras dengan strategi bisnis, serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

PENJUALAN TENAGA LISTRIK

PLN menargetkan penjualan tenaga listrik di tahun 2016 dengan berpatokan bahwa volume bahan bakar minyak yang digunakan untuk produksi tenaga listrik tidak melampaui target konsumsi sebagai bagian dari implementasi program efisiensi. Pengendalian kenaikan penjualan listrik dilakukan

REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PLN business is 75% directly related to the electricity business, from electricity plants to transmission and distribution to end users. Other business segments include either directly-related to electricity or other relevant supporting business segments and, generally, are conducted by Subsidiaries, covering: electricity power plants, electricity distribution, electricity design, information technology, special sea transport, mining and coal trading, finance and others.

BUSINESS SEGMENTATION

For strategic planning, since September 2015 PT PLN (Persero) has divided business segments into 7 regional business areas: Sumatra, Western Part of Java, Central Part of Java, Eastern Part of Java and Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, and Maluku & Papua.

The Company fulfills serving electricity customers through: its own plants, leased plants and electricity purchases from privately owned plants.

To get operating efficiency from electricity production processes, the work program priority is aimed at: maintaining sufficient electricity supply, optimizing fuel mix to reduce Electricity cost of supply (BPP), and increasing efficiency of operating processes/plant performance.

Moreover, strategy conducted in 2016 was set strengthen the organization to support business needs, in accordance and synergy between strategic corporate functions and end-to-end regional business functions by implementing performance excellence criteria, running a comprehensive HR Management System, improving Performance Management Systems in line with business strategy, and increasing employee involvement in achievement of the Company's vision and mission.

ELECTRICITY SALES

PLN targeted electricity sales in 2016 based on assumptions that fossil-based fuel volumes used for electricity production will not surpass consumption targets as part of efficiency program implementation. Electricity sales increases were conducted in areas in which the electricity supply is still

pada daerah-daerah yang pasokan listriknya masih didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak, yaitu: Sumatera Utara dan sekitarnya, Kalimantan Barat dan sekitarnya, Kalimantan Timur, Bali, dan sebagian besar di daerah Indonesia Timur.

dominated by fossil-based fuel power plants: North Sumatra and surroundings, West Kalimantan and surroundings, East Kalimantan, Bali, and most areas in Eastern Indonesia.

Sementara pada daerah-daerah yang pasokan listriknya disuplai pembangkit listrik berbahan bakar non-minyak didorong untuk meningkatkan penjualan dengan tetap memperhatikan kendala operasional lainnya, seperti: Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu; Kalimantan Selatan & Tengah; Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo; Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Jawa.

Meanwhile in areas where electricity supply comes from non-fossil fuel power plants, increased sales were supported by monitoring other operating issues, such as in South Sumatra, Jambi and Bengkulu; South & Central Kalimantan; North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo; South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi and Java.

Pengendalian pertumbuhan penjualan listrik ini pada dasarnya tidak mengurangi target peningkatan rasio elektrifikasi karena pelayanan penyambungan baru bagi pelanggan rumah tangga tidak dibatasi.

Management of electricity sales growth in essence does not reduce the electrification ratio growth target as new connection service for household customers is not limited.

Dilihat dari pertumbuhannya, maka penjualan tenaga listrik tahun 2016 mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,49%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik yang hanya sebesar 2,14%, maka terlihat bahwa di tahun 2016 telah terjadi pemulihan ekonomi secara nasional.

As seen in the table below, electricity sales in 2016 experienced growth of 6.49% as compared to the previous year at 2.14%. This growth in 2016 partially corresponds to the nationwide economic expansion.

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik, Menurut Kelompok Pelanggan
Electricity Sales (GWh) per Customer Category

Kelompok Pelanggan	2016	2015	2014	Customer Category
Rumah Tangga	5,58%	5,47%	8,90%	Households
Bisnis	8,37%	1,92%	5,17%	Business
Industri	6,35%	(2,78%)	2,37%	Industry
Lainnya	7,96%	6,34%	7,63%	Others
Jumlah	**6,49%**	**2,14%**	**5,90%**	**Total**

Penjualan Tenaga Listrik, Menurut Kelompok Pelanggan
Electricity Sales (GWh) per Customer Category

Kelompok Pelanggan	2016	2015	2014	Customer Category
Rumah Tangga	93.635	88.682	84.086	Households
Bisnis	40.074	35.978	36.282	Business
Industri	68.145	64.079	65.909	Industry
Lainnya	14.150	13.106	12.324	Others
Jumlah	**216.004**	**202.845**	**198.602**	**Total**

Berdasarkan segmen wilayah regional, kontribusi penjualan terbesar terjadi pada wilayah regional Jawa Bali yakni sebesar 74,2% dari penjualan tenaga listrik Perseroan tahun 2016, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Based on regional area segments, the biggest sales contribution happened in the Java-Bali region at 74.2% of the Company's total electricity sales in 2016, as shown in the following table.

Sejalan dengan jumlah pelanggan dan jumlah penjualan daya listrik, maka nilai penjualan listrik terbesar terdapat pada segmen geografis Jawa Bali, diikuti Sumatera dan Indonesia Timur.

In line with the number of customers and electricity sales, the biggest electricity sales value was in the Java-Bali geographical segment, followed by Sumatra and Eastern Indonesia.

Penjualan Menurut Segmen Geografis (GWh)
Sales Based on Geographical Segment (GWh)

Area Geografis Geographical Area	2016	2015	Kontribusi 2016 2016 Contribution	Perubahan 2015-2016 2015-2016 Change
Sumatera Sumatra	33.306	31.206	15,4%	6,73%
Kalimantan	9.000	20.742	10,4%	8,44%
Sulawesi & Nusa Tenggara	11.336			
Maluku & Papua	2.157			
Jawa Bagian Barat West Java	51.662	150.898	74,2%	6,17%
Jawa Bagian Tengah Central Java	70.516			
Jawa Bagian Timur& Bali East Java & Bali	38.026			
Total	**216.004**	**202.845**	**100%**	**6,49%**

JUMLAH PELANGGAN

Penambahan pelanggan sampai akhir tahun 2016 mencapai 3.114.513 pelanggan. Penambahan pelanggan ini masih lebih kecil dari tahun 2015 sebesar 3.674.746 pelanggan. Adapun komposisi penambahan pelanggan per kelompok tarif dapat dilihat pada tabel berikut.

NUMBER OF CUSTOMERS

The increase in customers as at the end of 2016 reached 3,114,513 customers. The increase in customers is smaller than that of 2015 with 3,674,746 customers. The composition of the customer increase per tariff group can be seen in the following table.

Penambahan Pelanggan
Increase in Customers

Kelompok Pelanggan	2016	2015	2014	Customer Category
Rumah Tangga	2.638.412	3.295.935	3.193.198	Households
Bisnis	344.774	268.830	207.729	Business
Industri	6.315	4.964	2.804	Industry
Lainnya	125.012	105.017	93.295	Others
Jumlah	**3.114.513**	**3.674.746**	**3.497.026**	**Total**

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penambahan pelanggan terjadi pada semua kelompok pelanggan, kecuali kelompok pelanggan rumah tangga, khususnya kelompok pelanggan rumah tangga R1-450VA/900VA. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kepastian regulasi terkait dengan penerapan tarif subsidi dan non-subsidi pada kelompok pelanggan tersebut, di mana saat ini tarif R1-450VA/900VA merupakan tarif yang mendapatkan subsidi dengan tidak melihat apakah pelanggan pada kategori ini masuk kategori miskin dan rentan miskin, sedangkan tarif subsidi hanya diberikan kepada pelanggan dengan kategori miskin dan rentan miskin.

The table above shows that there was increase in customers in all categories, except household customer category, especially the household customer category R1-450VA/900VA. This was due to uncertainty in regulations related to the implementation of subsidy and non-subsidy tariffs in this customer category; in which tariff R1-450VA/900VA is a subsidized tariff, and is not checked to see if the customers are in the poor or vulnerably poor categories, while the subsidized tariffs is only given to customers in the poor or vulnerably poor categories.

Hal itu menyebabkan PLN menerapkan kebijakan bahwa calon pelanggan yang dapat disambung pada kelompok pelanggan ini adalah pelanggan kategori miskin dan rentan miskin, sehingga beberapa calon pelanggan yang tidak masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin tetapi menghendaki penyambungan pada tarif R1-450VA/900VAmemilih untuk melakukan penundaan penyambungan baru hingga ada kepastian regulasi terkait penerapan tarif subsidi dan non subsidi untuk kelompok pelanggan tersebut. Selain hal tersebut, masih adanya imbas kondisi defisit pada triwulan sebelumnya di beberapa regional seperti Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua yang mengakibatkan dilakukannya pengendalian penyambungan baru.

This caused PLN to implement a policy that prospective customers who can be connected in this customer category are customers in the poor and vulnerably poor categories, so that several prospective customers who were not included in the poor and vulnerably poor categories but wanted to be connected to tariff R1-450VA/900VA preferred to delay new connection until there is regulatory certainty related to subsidized and non-subsidized tariff implementation for the customer category. In addition, there was still a deficit in the previous quarter in several regions such as Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara as well as Maluku and Papua in management of new connections.

Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan)
Total Number of Customers (Thousands of Customers)

Kelompok Pelanggan	2016	2015	2014	Customer Category
Rumah Tangga	59.244	56.605	53.309	Households
Bisnis	3.240	2.895	2.626	Business
Industri	70	63	58	Industry
Lainnya	1.729	1.604	1.500	Others
Total	**64.282**	**61.167**	**57.493**	**Total**

Pertumbuhan jumlah pelanggan di tahun 2016 tersebut membuat rasio elektrifikasi secara nasional (tidak termasuk pelanggan non PLN) menjadi sebesar 89,10% dari angka tahun sebelumnya sebesar 86,20%.

Total customer growth in 2016 caused the electrification ratio nationwide (excluding non-PLN customers) to reach 89.10% from the previous year of 86.20%.

Berdasarkan segmen wilayah regional, jumlah pelanggan di wilayah regional Jawa Bali tetap mendominasi, dengan kontribusi sebesar 64,26% diikuti wilayah regional Sumatera sebesar 19,94%dan regional Indonesia Timur sebesar 15,80%, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Based on regional area segments, the number of customers in the Java-Bali region still dominated with contribution of 64.26% followed by Sumatra of 19.94% and Eastern Indonesia of 15.80%, as shown in the following table.

Jumlah Pelanggan menurut Segmen Geografis
Number of Customers based on Geographical Segments

Wilayah Religion	2016	2015	2014	Kontribusi 2016 2016 Contribution	Perubahan 2015-2016 2015-2016 Change
Sumatera Sumatra	12.816.806	12.129.363	11.448.744	19,94%	5,67%
Kalimantan	3.493.498	9.568.669	8.999.845	15,80%	6,14%
Sulawesi & Nusa Tenggara	5.623.061				
Maluku & Papua	1.039.886				
Jawa Bagian Barat West Java	6.746.995	39.469.948	37.044.645	64,26%	4,66%
Jawa Bagian Tengah Central Java	22.782.047				
Jawa Bagian Timur& Bali East Java & Bali	11.780.200				
Total	**64.282.493**	**61.167.980**	**57.493.234**	**100%**	**5,09%**

DAYA TERSAMBUNG

Penambahan daya tersambung di tahun 2016 sebesar 7.764 MVA, mengalami peningkatan sebesar 18,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan daya tersambung terjadi pada semua kelompok pelanggan, khususnya pada kelompok pelanggan bisnis dan rumah tangga.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Pulihnya perekonomian nasional yang berdampak pada bergairahnya situasi bisnis di Indonesia.
2. Adanya peningkatan penambahan daya tersambung pada kelompok pelanggan R1-1300VA sebagai dampak diberlakukannya syarat penyambungan baru untuk kelompok pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang hanya diperuntukkan untuk pelanggan miskin dan rentan miskin, sehingga beberapa calon pelanggan memilih yang semula ingin menjadi pelanggan 450 VA dan 900 VA beralih ke 1.300 VA.

CONNECTED POWER

Additional connected power in 2016 reached 7,764 MVA, an increase of 18.50% from the previous year. Additional connected power happened in all customer categories, especially in business and household customer categories.

This was caused by:

1. National economic expansion which impacted as the spark of business in Indonesia.
2. Increase in connected power to customer category R1-1300VA as the impact of new connection requirements for household customer category 450 VA and 900 VA as only designated to poor and vulnerably poor customers, so that several prospective customers who wanted to subscribe to 450VA and 900VA turned to 1,300VA.

Penambahan Daya Tersambung (MVA)
Additional Connected Power (MVA)

Penambahan Daya Tersambung	2016	2015	2014	Additional Connected Power
Rumah Tangga	3.629	3.280	3.160	Households
Bisnis	1.885	1.254	1.292	Business
Industri	1.546	1.482	1.998	Industry
Lainnya	705	536	486	Others
Jumlah	**7.764**	**6.552**	**6.936**	**Total**

Jumlah daya tersambung hingga akhir 2016 mencapai 114.348 MVA atau naik 7,29 % dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

The amount of connected power as at the end of 2016 reached 114,348 MVA, or up 7.29% from the previous year, as seen from the following table.

Daya Tersambung (MVA)
Connected Power (MVA)

Kelompok Pelanggan	Daya tersambung			Kelompok Pelanggan
	2016	2015	2014	
Rumah Tangga	55.285	51.655	48.374	Households
Bisnis	24.362	22.477	21.224	Business
Industri	26.570	25.024	23.542	Industry
Lainnya	8.131	7.426	6.890	Others
Jumlah	**114.348**	**106.582**	**100.031**	**Total**

Secara geografis, daya tersambung untuk region Jawa Bali mendominasi hingga sekitar 71,69 % dari total daya tersambung nasional, disusul oleh daya tersambung di wilayah Sumatera sebesar 16,42% dan Indonesia Timur sebesar 11,89% seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Geographically, connected power for the Java-Bali region dominated at 71.69% from the total national connected power, followed by connected power in Sumatra at 16.42% and Eastern Indonesia at 11.89% as in the following table:

Daya Tersambung per Regional (MVA)
Connected Power per Region (MVA)

Wilayah Region	2016	2015	2014	Kontribusi 2016 Contribution 2016	Perubahan 2015-2016 Changers 2015-2016
Sumatera Sumatra	18.775	17.240	16.113	16,42%	8,90%
Kalimantan	4.901	12.384	11.442	11,89%	9,78%
Sulawesi & Nusa Tenggara	7.235				
Maluku & Papua	1.459				
Jawa Bagian Barat West Java	26.344	76.958	72.475	71,69%	6,52%
Jawa Bagian Tengah Central Java	35.094				
Jawa Bagian Timur& Bali East Java & Bali	20.541				
Jumlah Total	**114.348**	**106.582**	**100.031**	**100%**	**7,29%**

PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Nilai pendapatan penjualan tenaga listrik pada tahun 2016 mencapai Rp 214.139,83 miliar, naik 2,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp209.844,54 miliar, sebagai dampak dari meningkatnya penjualan tenaga listrik (GWh), penambahan jumlah pelanggan dan daya tersambung.

Penerapan automatic tariff adjustment membuat harga jual rata-rata penjualan tenaga listrik pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp994/kWh atau 4,17% di bawah harga rata-rata tahun 2015 sebesar Rp1.035/kWh.

ELECTRICITY SALES REVENUE

The value of electricity sales revenue in 2016 reached Rp 214,139.83 billion, up 2.05% from the previous year at Rp209,844.54 billion, as a result of increasing electricity sales (GWh), additional numbers of customers, and amount of connected power.

Implementation of automatic tariff adjustment caused average selling price of electricity sales in 2016 to Rp994/kWh, or 4.17% below the average 2015 price of Rp1,035/kWh.

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Revenue

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Pendapatan Penjualan Listrik (Rp miliar)	214.140	209.845	186.634	Electricity Sales Revenue
Harga Jual Rata-rata (Rp/kWh)	994	1.035	939,00	Average Selling Price (Rp / kWh)

TINJAUAN PEMASARAN

Pemasaran merupakan kegiatan pendukung bisnis yang sangat penting di lingkungan Perseroan dalam upaya pencapaian bisnis yang telah ditargetkan. Selain itu, kegiatan pemasaran merupakan upaya untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik terkait dengan penjualan produk usaha Perseroan maupun lainnya, seperti pembelian produk kelistrikan.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar penjualan tenaga listrik PLN di seluruh Indonesia pada tahun 2016 sekitar 95%.

STRATEGI PEMASARAN

Dalam menghadapi situasi industri yang lesu sepanjang tahun 2015, maka di tahun 2016 manajemen memiliki strategi untuk meningkatkan kegiatan sektor industri dengan membuat Program Promo Diskon Luar Waktu Beban Puncak

MARKETING REVIEW

Marketing is a highly important business support activity to achieve business targets. Moreover, marketing activities are efforts to build relationships with stakeholders, both related to the Company's product sales and others, such as electricity product purchasers.

TARGET MARKET

The target market of PLN electricity sales across Indonesia in 2016 was around 95%.

MARKETING STRATEGY

Afer facing sluggish industry conditions in 2015, in 2016 management had a strategy to increase industrial sector activity by making Outside Peak Hours (LWBP) Discount Promo Programs for medium- and large-scale industrial

LWBP bagi pelanggan industri skala menengah dan besar. Program ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap kemajuan industri dan merupakan dukungan perusahaan terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid – III pada bulan Oktober 2016.

customers. This program is part of PLN's support for industrial development and the Company's support of the government's Economic Policy Package Series – III in October 2016.

Paket program promo diskon LWBP ini memberikan diskon tarif sebesar 30% terhadap tambahan (*increment*) pemakaian di atas rata-rata normal selama 3 bulan terakhir, dari pemakaian jam 23.00 s/d 08.00.

This LWBP discount promo program package provides tariff discounts of 30% of usage increases above normal average for the past 3 months, from 11 pm to 8 am.

Pada tahun 2016, total pelanggan yang memanfaatkan energi promo mencapai 1.306 pelanggan dengan total konsumsi mencapai 653 GWh.

In 2016, total customers who utilize promo energy reached 1,306 customers with total consumption of 653 GWh.

Adapun strategi pemasaran lainnya yang dilakukan oleh PLN adalah:

1. Pembangunan infrastruktur dalam rangka penyambungan baru antara lain penarikan jaringan, pembangunan gardu, ketersediaan *cubicle* 20 kV, kendala beban GI 100 kV dan 150 kV.
2. Menerapkan program GOS (*Generation of Sales*) atau program membangkitkan upaya penjualan yang terdiri dari:
   a. Melakukan peningkatan penjualan di Jawa Bali.
   b. Mengevaluasi daftar tunggu permintaan sambungan baru /penambahan daya, terutama di daerah yang didorong untuk meningkatkan penjualan (Jawa, Sumbar, S2JB, Sulsel).
   c. Mengkaji penjualan pada ceruk-ceruk yang menguntungkan seperti pada saat Luar Waktu Beban Puncak.

Other marketing strategies conducted by PLN were:

1. Infrastructure development for new connections including network withdrawal, substation development, availability of cubicle 20 kV, load constraints GI 100 kV and 150 kV.
2. Implementing GOS (Generation of Sales) program to increase sales consisting:
   a. Increasing sales in Java-Bali.
   b. Evaluating waiting lists for new connection/additional power, especially in areas supported to increase sales (Java, West Sumatra, S2JB, South Sulawesi).
   c. Reviewing sales in profitable slots such as Outside Peak Hours.

Selain menerapkan strategi pemasaran berupa pembangunan infrastruktur dan program Generation of Sales, beberapa program pendukung dalam bentuk media komunikasi dan publikasi yang telah dilakukan antara lain:

Besides implementing a marketing strategy in the form of infrastructure development and Generation of Sales programs, several supporting programs in communication and publication media were:

A. Program Komunikasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah kebijakan yang diterapkan Pemerintah dalam rangka memberikan subsidi listrik kepada rumah tangga yang memang berhak, yaitu mereka yang termasuk golongan masyarakat tidak mampu (miskin dan tidak mampu). Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan tidak mampu.

A. Targeted Electricity Subsidy Communication Program

Targeted Electricity Subsidy Policy was implemented by the government in providing electricity subsidy for deserving households, who are categorized as low-income, poor and low income. This is in line with Law No. 30/2007 on Energy and Law No. 30/2009 on Electricity. Therefore, the government provides an electricity subsidy to customers with 450 VA and 900 VA voltages for poor and low income households.

Tujuan dari program ini:
- Memberikan pemahaman yang sama tentang kebijakan subsidi listrik tepat sasaran kepada para stakeholder ketenagalistrikan (masyarakat, pelanggan, opinion leader, pemerintah, petugas pelaksana di lapangan, dan sebagainya).
- Memperoleh dukungan terhadap upaya strategis dan upaya teknis (lapangan) kepada PLN dalam menertibkan distribusi subsidi listrik yang tepat sasaran kepada pelanggan yang tidak berhak.
- Meredam gejolak dan resistensi dari *opinion leader*, sehingga latar belakang kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui *oponion leader*.
- Mendukung kesuksesan penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

B. Utilisasi Fasilitas *Contact Center* PLN 123

PLN terus berupaya dan berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses layanan tanpa batas kepada pelanggan. Komitmen PLN tersebut diwujudkan dengan menghadirkan layanan CC PLN 123. Masyarakat dan pelanggan semakin dipermudah untuk melakukan proses penyambungan baru (PB), perubahan daya (PD), penyambungan sementara (PS), informasi dan keluhan, serta pemulihan gangguan penyaluran tenaga listrik dengan cukup mengakses CC PLN 123. CC PLN 123 ini juga untuk menghilangkan potensi korupsi berupa gratifikasi atau pungutan tambahan biaya oleh petugas dan praktik-praktik percaloan, sehingga dapat meningkatkan integritas layanan PLN kepada publik.

Tujuan dari program ini:
- Memberikan informasi ke masyarakat adanya layanan CC PLN 123.
- Memberikan pemahaman tentang proses bisnis CC PLN 123.
- Meningkatkan brand awareness CC PLN 123.

C. Program Komunikasi Manfaat 1 kWh

Selama ini masyarakat menganggap tarif listrik itu mahal. Setiap ada kebijakan Pemerintah tentang penyesuaian tarif listrik selalu rentan dengan resistensi dari masyarakat. Untuk mendukung kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah, PLN ingin memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tarif listrik selama ini tidaklah mahal asal digunakan dengan bijak.

Tujuan dari program ini:
- Memberikan informasi dan pemahaman ke masyarakat tentang manfaat 1 kWh.

The aim of this program:
- Giving the same understanding on targeted electricity subsidy to electricity stakeholders (society, customers, opinion leader, government, executing officers in the field, others).
- Obtaining support to strategic efforts and technical efforts (field) to PLN in curbing targeted electricity subsidy distribution to customers who are not entitled to so receive.
- Absorbing resistance from opinion leaders, so that the background of targeted electricity subsidy policy can be well communicated to the society through opinion leaders.
- Supporting the success of targeted electricity subsidy policy implementation.

B. Utilization of PLN 123 Contact Center Facilities

PLN is committed to provide easy and unlimited services access to customers. PLN's commitment is shown by presenting CC PLN 123 service. The public and customers find it easy to make a new connection (PB), change voltage (PD), create a temporary connection (PS), gain information and make a complaint, and recover electricity distribution after a disruption by accessing CC PLN 123. CC PLN 123 is also aimed to eliminate potential of dishonest practice in form of seeking gratuities or additional charges by officers and touting practices, to increase PLN service integrity to the public.

The aims of advertising this program are to:
- Giving information to the public on CC PLN 123.
- Giving understanding on the business process of CC PLN 123.
- Increasing brand awareness of CC PLN 123.

C. 1 kWh Benefit Communication Program

The public always thinks electricity tariffs are expensive. The government's policy on electricity tariff adjustment is always prone to resistance from the public. To support the Targeted Electricity Subsidy policy set by the Government, PLN wants to give understanding to the public that the electricity tariff is not expensive as long as electricity is used wisely.

The aim of this program is to:
- Giving information and understanding to the public on the benefit of 1 kWh.

D. Program Komunikasi Gratis Biaya Tambah Daya

Berdasarkan data PLN, ada 46 juta rumah tangga menerima subsidi listrik, yaitu 23 juta rumah tangga daya 450 VA dan 23 juta rumah tangga daya 900 VA. Sedangkan data TNP2K untuk rumah tangga dengan kesehjahteraan 40% terendah (atau miskin) hanya 25,7 juta. Berarti ada rumah tangga yang tak berhak namun membayar listrik dengan tarif bersubsidi.

Dari 23 juta konsumen rumah tangga 900 VA, sesuai data TNP2K, hanya 4,05 juta yang berhak, yaitu yang miskin. Artinya ada sekitar 19 juta rumah tangga 900 VA yang sebenarnya tidak berhak membayar listrik secara bersubsidi.

Tujuan dari program ini:

- Memberikan kesempatan bagi pelanggan daya rumah tangga 900 VA yang tidak disubsidi untuk dapat menikmati listrik dengan daya lebih besar dan harga sama.

D. Free Additional Connection Fee of Communication Program

Based on PLN data, there are 46 million households receiving an electricity subsidy: 23 million households get 450 VA voltage and 23 million households get 900 VA voltage. Meanwhile TNP2K data shows households with welfare at the lowest 40% (or poor) are 25.7 million. This means there are households which do not deserve the subsidized tariff.

Of 23 million household customers of 900 VA, according to TNP2K data, only 4.05 million have the right, as considered poor. This means there are around 19 million households of 900 VA which do not have the right to gain subsidized electricity.

The aim of this program is to:

- Providing chance for unsubsidized 900 VA household customers to receive electricity with bigger voltage at the same price.

BIAYA PEMASARAN

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh PLN adalah melalui publikasi media massa. Kegiatan ini juga termasuk bagian dari keterbukaan informasi, yang sepanjang tahun 2016 disosialisasikan melalui media. Berikut ini rinciannya:

MARKETING COST

One of the marketing strategies conducted by PLN is through the mass media, which in 2016 spread information with the following details:

Media	**Nilai Kontrak** Contract Value (Rp)	Media
Media Cetak	811.037.200	Printed Media
Radio	170.987.500	Radio
Televisi	2.541.541.842	Television
Total	**3.523.566.542**	**Total**

TINJAUAN PENCAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATORS*

Pengukuran kinerja perusahaan mencakup 5 perspektif Key Performance Indicator (KPI) berbasis "Kriteria Penilaian Kinerja Unggul" sesuai Kontrak Manajemen yaitu Fokus Pelanggan, Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tata Kelola.

Pencapaian score Key Performance Indicators PT PLN (Persero) tahun 2016 adalah 95,52 (masuk pada golongan perusahaan BUMN yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan 19,43, Efektivitas Produk dan Proses 21,07, Fokus Tenaga Kerja 7,0, Keuangan dan Pasar 23,09, dan Kepemimpinan dan Tata Kelola 24,93.

KEY PERFORMANCE INDICATORS ACHIEVEMENT REVIEW

The Company's performance evaluation covers 5 Key Performance Indicators (KPI) based on "Excellent Performance Evaluation Criteria" according to the Management Contract: Customer Focus, Product and Process, Labor Focus, Finances and Market, Leadership and Governance.

The achievement score of PT PLN (Persero) Key Performance Indicators in 2016 was 95.52 (included in the HEALTHY State-Owned Enterprise (SOE) company category, with AAA category) with achievement in each indicator as follows: Customer Focus 19.43, Product Effectiveness and Process 21.07, Labor Focus 7.0, Financial and Market 23.09, and Leadership and Governance 24.93.

Pencapaian Key Performance Indicator
Key Performance Indicator Achievement

Perspektif Perspektif	Nilai Value	Perspektif Perspectives
Fokus Pelanggan	19,43	Customer Focus
Efektivitas Produk dan Proses	21,07	Effectiveness of Products and Processes
Fokus Tenaga Kerja	7,0	Labor Focus
Keuangan dan Pasar	23,09	Finance and Markets
Kepemimpinan dan Tata Kelola	24,93	Leadership and Governance
Jumlah	**95,52**	**Total**

Adapun gambaran *Key Performance Indicators* Direksi/Korporat untuk tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Descriptions of Key Performance Indicators of the Board of Directors/Corporate for 2016 overall are as follows:

NO.	PERSPEKTIF PERSPECTIVE	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI
1	Fokus Pelanggan | Customer Focus						
	1.1 Rasio Elektrifikasi PLN PLN Electrification Ratio	%	5	88,00	89,10	101,25%	5,00
	1.2 Gangguan Penyulang per 100 kms Disturbance of Feeder per 100 kms	Kali/100 kms	5	22,00	24,20	89,98%	4,50
	1.3 Implementasi Aplikasi SAIDI/SAIFI Implementation of SAIDI/SAIFI applications	Unit	5	10,00	24,00	240,00%	5,00
	1.4 Penjualan Tenaga Listrik Pelanggan Industri Sales of Electricity to the Industrial Segment	TWh	5	69,13	68,15	98,58%	4,93
2	Efektivitas Produk dan Proses | The Effectiveness of Products and Processes						
	2.1 Penambahan Kapasitas Pembangkit Addition of Power Plant Capacity	GW	6	4,90	4,14	84,47%	5,07
	2.2 *Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU Equivalent Availability Factor (EAF) PLTU	%	4	83,50	81,32	97,39%	3,90
	2.3 *Capacity Factor* (CF) Pembangkit PLN Addition of Power Plant Capacity	%	4	47,71	48,01	100,63%	4,00
	2.4 *Fuel Mix* BBM Termasuk IPP Fuel Mix BBM Includes IPP	%	4	7,20	6,95	103,53%	4,00
	2.5 Susut Jaringan Network Loss	%	3	9,12	9,48	96,01%	2,88
	2.6 Jumlah PPA IPP yang Ditandatangani Number of PPA IPP Signed	MW	3	19.000	7.747	40,77%	1,22

NO.	PERSPEKTIF PERSPECTIVE	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI
3	Fokus Tenaga Kerja | Manpower Focus						
	3.1 *Human Capital Readiness* Human Capital Readiness	Level	2	3,90	4,06	104,15%	2,00
	3.2 *Organization Capital Readiness* Organization Capital Readiness	Level	3	3,90	4,05	103,85%	3,00
	3.3 Produktifitas Pegawai Employee Productivity	MWh/ Pegawai	2	4.907	4.914	100,14%	2,00
4	Keuangan dan Pasar | Finance And Market						
	4.1 Pengendalian Biaya Pokok Penyediaan Control of Supply Main Cost	Rp/kWh	5	1.261	1.265	99,71%	4,99
	4.2 EBITDA Margin EBITDA Margin	%	5	29,20	26,03	89,14%	4,46
	4.3 *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR) Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)	kali	5	2,00	3,11	155,50%	5,00
	4.4 Pencapaian Investasi Investment Achievement						
	a. Program (Realisasi Program Terkontrak UIP) Tanpa Luncuran Program (UIP contracted program realization) without launching	%	3	100,00	89,09	89,09%	2,67
	b. Fisik (Realisasi Bayar / Pagu Disburse) Physical (actual payment/cap ceiling disbursement)	%	3	75,00	74,25	99,00%	2,97
	4.5 Realisasi Penyerapan Tambahan Dana PMN Actual Absorption of additional PMN funds	%	3	80,00	86,86	108,58%	3,00
5	Kepemimpinan dan Tata Kelola | Leadership and Governance						
	5.1 Pencapaian Skor KPKU Achievement of KPKU Score	Skor	3	600,00	615,75	102,63%	3,00
	5.2 Peningkatan Tingkat Proper Improvement of Proper Level	Unit	3	6	20	333,33%	3,00
	5.3 Pencapaian GCG GCG Achievement	Skor	3	85,00	87,14	102,52%	3,00
	5.4 Pemenuhan Portal BUMN Fulfillment of SOE Portal	%	3	100,00	100,00	100,00%	3,00

NO.	PERSPEKTIF PERSPECTIVE	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI
5.5	Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI dan Auditor Lainnya) Completion of audit findings (CPC, KAP, SPI and Other Auditors)	%	3	100,00	100,00	100,00%	3,00
5.6	a. Pelaksanaan Program Pendanaan PMN PMN Funding Program Implementation	%	5	100,00	98,65	98,65%	4,93
	b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Program Penggunaan dana PMN Report Punctuality of PMN Funds Realization Program Utilization	%	5	100,00	106,67	106,67%	5,00
Jumlah | Total			**100**				**95,52**

A. SEHAT, YANG TERDIRI DARI :
HEALTHY, COMPRISED OF :
AAA APABILA TOTAL SKOR (TS) > 95
IF TOTAL SCORE (TS) > 95
AA APABILA 80 < TS < 95
IF 80 < TS < 95
A APABILA 65 < TS < 80
IF 65 < TS < 80

C. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
NOT HEALTHY, COMPRISED OF:
CCC Apabila 20 < TS < 30
IF 20 < TS < 30
CC Apabila 10 < TS < 20
IF 10 < TS < 20
C Apabila TS < 10
IF TS < 10

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016. Laporan Keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Semua informasi dalam laporan keuangan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016 yang menjadi dasar pembahasan, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (Member of RSM International)**.

Laporan Keuangan tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dimana laporan keuangan konsolidasian telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Posisi keuangan berdasarkan mata uang asing telah disajikan dalam jumlah yang setara Rupiah dengan kurs yaitu Rp13.795/USD dan Rp13.436/USD pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

FINANCIAL REVIEW

The Management Discussion and Analysis on financial performance is made based on financial data from PT PLN (Persero) Consolidated Financial Statements for years ending 31 December 2015 and 2016. The Financial Statements are presented in accordance with rules stated in the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). All information in these Financial Statements is published in complete and accurate manner and does not contain inaccurate material information or facts, and does not omit material information or facts.

The Consolidated Financial Statements for years ending 31 December 2015 and 2016 are the basis for discussion, have been audited by Public Accountant Office **Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner (Member of RSM International)**.

The Financial Statements received unqualified opinion in which the Consolidated Financial Statements are fairly presented in all material respects in accordance with generally applied accounting principles in Indonesia.

The financial position based on foreign currencies has been presented in equal value in Rupiah with exchange rate of Rp13,795/USD and Rp13,436/USD per 31 December 2015 and 2016, respectively.

ASET

ASET

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Aset tidak lancar	1.173.609	1.235.026	522.025	Long term assets
Aset lancar	100.967	79.345	85.424	Current assets
TOTAL ASET	1.274.576	1.314.371	607.448	TOTAL ASSETS
Liabilitas jangka panjang	272.155	389.441	366.586	Long term liabilities
Liabilitas jangka pendek	121.623	120.139	87.558	Short term liabilities
TOTAL LIABILITAS	393.778	509.580	454.144	TOTAL LIALIBILITIES
EKUITAS	880.798	804.791	153.304	EQUITY

Total aset Perseroan hingga berakhirnya tahun buku 2016 mencapai Rp1.274,58 triliun, turun 3,03% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp1.314,37 triliun. Perubahan tersebut terutama dikontribusikan oleh menurunnya aset pajak tangguhan karena penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp19,2 triliun dari semula sebesar Rp29,1 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp9,8 triliun di tahun 2016 terutama disebabkan sejumlah hal, yakni:

- Penurunan aset pajak tangguhan yang bersumber dari utang sewa pembiayaan ISAK 8 sebesar Rp14,8 triliun, dimana pada tahun 2016 sehubungan dengan telah terbitnya POJK 6/2017 maka LK PLN tidak lagi menerapkan ISAK 8
- Penurunan aset pajak tangguhan yang bersumber dari Aset Tetap sebesar Rp21,1 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan dilakukannya proses revaluasi Aset Tetap di tahun 2015.
- Kenaikan aset pajak tangguhan yang bersumber dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp16,0 triliun.
- Kenaikan aset pajak tangguhan yang bersumber dari liabilitas imbalan kerja dan lainnya sebesar Rp700 miliar.

Bidang usaha PLN yang padat modal membuat komponen aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan yang termasuk dalam kelompok akun aset tidak lancar terus mendominasi nilai posisi keuangan. Nilai Aset tersebut akan terus bertambah, mengingat PLN tengah dan akan terus membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Baik dalam rangka pertimbangan bisnis maupun karena penugasan pemerintah, seperti pembangunan pembangkit maupun infrastruktur transmisi dalam Program 35.000 MW.

Total Company assets until the end of 2016 financial year reached Rp1,274.58 trillion, down 3.03% compared to 2015 of Rp1,314.37 trillion. The increase was mainly contributed by decreasing deffered tax assets of Rp19.2 trillion from Rp29.1 trillion in 2015 to Rp9.8 trillion in 2016 mostly due to several things, including:

- Decreasing deferred tax assets from finance lease debt ISAK 8 of Rp14.8 trillion, which in 2016 was in line with the issuance of POJK 6/2017 then PLN Financial Report no longer implemented ISAK 8
- Decreasing deferred tax assets from Fixed Assets of Rp2.1 trillion. The decrease was mainly due to the revaluation of Fixed Assets in 2015.
- Increasing deferred tax assets from tax loss carry forward of Rp16.0 trillion.
- Increasing deferred tax assets from other and employee benefit liabilities of Rp700 billion.

The capital-intensive PLN business caused the fixed assets and work inprogress components included in long term asset account category to dominate financial position value. Asset Value will continue rising, considering that PLN is building and will continue to build electricity infrastructure, due both to business reasoning and government task, such as plant development or transmission infrastructure in the 35,000 MW Program.

ASET TIDAK LANCAR

LONG TERM ASSETS

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Aset tetap	1.145.529	1.187.880	501.706	Fixed Assets
Properti Investasi	1.325	1.001	233	Investments in Property
Investasi pada entitas asosiasi	1.980	1.645	1.305	Investment in associates
Investasi pada ventura bersama	1.850	1.529	1.268	Investment in joint ventures
Aset pajak tangguhan	9.882	29.088	6.689	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	263	269	99	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7.464	8.797	5.994	Restricted cash in bank accounts and time deposits
Piutang lain-lain	350	312	321	Other receivables
Aset tidak lancar lain	4.964	4.505	4.409	Other long term assets
Total	1.173.609	1.235.026	522.025	Total

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada akhir tahun 2016 mencapai Rp1.173,61 triliun, turun 4,97% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp1.235,03 triliun. Kontribusi terbesar aset tidak lancar, terutama berasal dari aset tetap bersih yang mencapai 97,61% dari total aset tidak lancar.

The amount of Company's long-term assets at the end of 2016 reached Rp1,173.61 trillion, down 4.97% compared to 2015 of Rp1,235.03 trillion. The largest contribution of long-term assets, especially came from net fixed assets amounting to 97.61% of total long-term assets.

Aset Tetap

Aset tetap bersih pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.145,53 triliun, turun 3,57% dibandingkan realisasi tahun 2015 yang Rp1.187,88 triliun. Penurunan ini, terutama dikontribusikan oleh penerapan POJK No. 6 Tahun 2017 yang menerapkan transaksi dengan IPP adalah merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik dan bukan perjanjian sewa atau mengandung sewa, namun demikian selama kurun waktu tahun 2016 Perusahaan merealisasikan beberapa pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi di tahun 2016 dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan keandalan jaringan. Beberapa proyek dimaksud, antara lain:

Fixed Assets

Net fixed assets at the end of 2016 were recorded at Rp1,145.53 trillion, down 3.57% compared to the realized 2015 of Rp1,187.88 trillion. This decrease was contributed mainly by the implementation of POJK No. 6/2017, which states that transactions with IPP are electricity buy and sell agreements and not lease or lease-containing agreements; however, in 2016 the Company realized several power plant constructions, transmission and distribution networks in 2016 in an attempt to increase the electrification ratio and network reliability. Several of the projects were:

(i) Program Percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dapat dikapitalisasi.

(i) Fast track Program

Fast track program is a project tasked by the Government to the Company. Work in progress of fast track program included down payment to contractors, borrowing cost and other revenues which could be capitalized.

Pembangkitan

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU Kalimantan TimurTeluk Balikpapan 2x100 MW, PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW, dan PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW.

Plants

Work in progress of plants in fast track program were: PLTU East Kalimantan Teluk Balikpapan 2x100 MW, PLTU 1 West Kalimantan - Parit Baru 2x50 MW, and PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW.

Transmisi
Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1 dan Gardu Induk 150 kV Bekasi Utara.

(ii) Konstruksi Rutin

Pembangkitan
Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTA Peusangan 2x88 MW, PLTU 3 Kalimantan Barat – Site Bengkayang 2x50 MW dan PLTGU Grati Peaker 1x450 MW.

Transmisi
Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa - Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi
Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan
Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Hingga saat ini, kekurangan daya listrik masih cukup besar. Setidaknya diperlukan penambahan daya 7 GW per tahun. Dengan demikian, peningkatan jumlah aset tetap PLN akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Kenaikan tersebut menunjukkan progres pembangunan berbagai proyek transmisi dan distribusi yang tiada henti. Sebab peningkatan terjadi sejalan dengan kebijakan PLN untuk memastikan kemajuan pembangunan proyek-proyek tersebut sebelum melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi sesuai kemajuan proyek.

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan akun yang mencatat nilai jaminan dana yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa uang muka pembelian barang modal maupun uang muka kontrak pembangunan proyek ketenagalistrikan.

Investasi pada Entitas Asosiasi
Pada tahun 2016, investasi pada entitas asosiasi mengalami kenaikan sebesar 20,36% dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp1,65 triliun menjadi Rp1,98 triliun. Investasi tersebut merupakan realisasi pembangunan berbagai proyek pembangkit yang dilakukan bersama mitra strategis, yaitu PT Geo Dipa Energi,

Transmission
Work in progress of transmission in fast track program were mainly Extra High Voltage Substation 500 kV New Rawalo (Kesugihan) projects, Underground Cable (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Package 1 and 150 kV Substation North Bekasi.

(ii) Routine Construction

Plants
Work in progress of plants were mainly PLTA Peusangan 2x88 MW, PLTU 3 West Kalimantan – Site Bengkayang 2x50 MW and PLTGU Grati Peaker 1x450 MW.

Transmission
Work in progress of transmission were mainly transmission network projects T/L 500 kV Java - Bali, T/L 150 kV for outside Java - Bali, 150 kV substation projects as well as network interconnection projects.

Distribution
Work in progress of distribution were mainly medium-voltage and low 20 kV voltage distribution network projects as well as distribution substation projects.

Equipment
Work in progress equipment included special equiments and material used to support plant function and electricity distribution.

To date, electricity shortage is quite large. At least an additional 7 GW voltage per year is needed. Therefore, the increase of PLN fixed assets will continue in the coming years.

The increase shows relentless developmental progress of various distribution and transmission projects. This increase is happening in line with PLN policy to ensure the development of those projects before paying for installments of financing rent and operation collateral according to each project development.

Restricted deposits are accounts which record fund collateral allocated to settle certain projects. The collateral can be in form of down payment for capital goods purchase or down payment for electricity project contracts.

Investment in Associates
In 2016, investment in associates rose 20.36% compared to 2015, from Rp1.65 trillion to Rp1.98 trillion. The investment was realized in development of various plant projects conducted with strategic partners: PT Geo Dipa Energi, PT Mitra Energi Batam, PT Sumber Segara Primadaya, PT Dalle Energy Batam,

PT Mitra Energi Batam, PT Sumber Segara Primadaya, PT Dalle Energy Batam, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Tanjung Kasam Power, serta perdagangan batubara yang dilakukan bersama dengan PT Indo Pusaka Berau.

PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Tanjung Kasam Power, as well as coal trading conducted with PT Indo Pusaka Berau.

Investasi pada Ventura Bersama

Sepanjang tahun 2016, jumlah investasi Perseroan pada ventura bersama mencapai Rp1,85 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp1,53 triliun, telah mengalami kenaikan 20,93%.

Kenaikan investasi pada ventura bersama terjadi sebagai akibat adanya penambahan investasi pada perusahaan eksisting dan investasi baru pada perusahaan penyedia peralatan listrik. Termasuk kedalam akun ini adalah kerjasama pada PT Unelec Indonesia, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Perta Daya Gas, PT Rajamandala Electric Power, PT Rekind Daya Mamuju, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indo Tenaga, PT Guohua Taidian – PJBI, dan PT Crompton Power Switchgear Indonesia.

Investasi pada PT Crompton Power Switchgear Indonesia sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap upaya meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam industri terkait ketenagalistrikan, khususnya komponen-komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen PLN dan mitranya di PT Crompton Prima dalam mendukung suksesnya pembangunan program Pembangkit 35.000 MW.

Aset Pajak Tangguhan

Nilai aset tangguhan pada tahun 2016 mencapai Rp9,88 triliun, turun sebesar 66,03% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp29,09 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penerapan POJK 6/2017 yang menerapkan transaksi dengan IPP adalah merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik dan bukan perjanjian sewa atau mengandung sewa, serta akibat revaluasi Aset Tetap di tahun 2015.

Aset Tidak Lancar Lain

Terutama terdiri dari pengeluaran uang muka pengembangan proyek, uang muka pembelian batu bara dan biaya dibayar di muka untuk pembelian gas. Nilai aset tidak lancar naik 10,19% dari Rp4,50 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4,96 triliun pada tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan uang muka pengembangan proyek 32,10%.

ASET LANCAR

Jumlah aset lancar Perseroan pada akhir tahun 2016 naik 27,25% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp79,34 triliun, sehingga menjadi Rp100,97 triliun.

Komposisi terbesar aset lancar di tahun 2016 adalah kas dan setara kas 41,51%, diikuti piutang usaha pihak ketiga 20,94%, piutang subsidi listrik 14,70%, persediaan sebesar 11,46%,

Investment in Joint Ventures

In 2016, the amount of the Company's investment in joint ventures reached Rp1.85 trillion. Compared to 2015 of Rp1.53 trillion, there was an increase of 20.93%.

The increasing investment in joint ventures occured due to additional investments in existing firms and new investments in electrical equipment suppliers. Included in this account were PT Unelec Indonesia, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bajradaya Sentranusa, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Perta Daya Gas, PT Rajamandala Electric Power, PT Rekind Daya Mamuju, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indo Tenaga, PT Guohua Taidian – PJBI, and PT Crompton Power Switchgear Indonesia.

The investment in PT Crompton Power Switchgear Indonesia is a form of the Company's commitment in increasing Domestic Component Level (TKDN) in the electricity-related industry, especially components which can be produced domestically. These steps were made as part of PLN commitment and its partner PT Crompton Prima in supporting the success of 35,000 MW Plant development program.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets in 2016 reached Rp 9.88 trillion, down 66.03% compared to 2015 of Rp 29.09 trillion. The decline was caused by the implementation of POJK 6/2017 which states that transactions with IPPs are electricity buy and sell agreements and not lease or lease-containing agreements, as well as due to Fixed Assets revaluation in 2015.

Other Long Term Assets

These are mainly in form of down payments for project developments, down payments for coal purchase and down payments for gas purchase. Other long term assets rose 10.19% from Rp4.50 trillion in 2015 to Rp4.96 trillion in 2016. The increase was due to rising down payment for project development of 32.10%.

CURRENT ASSETS

The Company's current assets at the end of 2016 rose 27.25% from Rp79.34 trillion in 2015, to Rp100.97 trillion.

The largest composition of current assets in 2016 was cash and cash equivalent of 41.51%, followed by third-party account receivables of 20.94%, electricity subsidy receivables

dan pajak dibayar di muka 7,14% serta beberapa akun yang jumlahnya kurang dari 5% terhadap total aset lancar. Komposisi aset lancar tercantum pada tabel berikut:

of 14.70%, inventory of 11.46%, and prepaid taxes of 7.14% as well as several accounts which amount to less than 5% of total current assets. Composition of current assets is stated in the following table:

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Kas dan setara kas	41.909	23.596	27.111	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	375	120	101	Short term investments
Piutang usaha Pihak berelasi	565	569	582	Account receivables of related parties
Piutang usaha Pihak ketiga	21.146	19.265	18.913	Account receivables of third parties
Piutang subsidi listrik	14.844	17.501	19.281	Electricity subsidy receivables
Piutang lain-lain	2.411	482	867	Other receivables
Persediaan - bersih	11.570	11.416	11.608	Net – inventory
Pajak dibayar dimuka	7.207	5.265	4.889	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	898	1.059	1.789	Prepaid expenses and down payments
Piutang pihak berelasi	37	72	283	Receivables of related parties
Aset keuangan lancar lainnya	6	-	-	Other current financial assets
Total Aset Lancar	100.967	79.345	85.424	Total Current Assets

Kas dan setara kas

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2016 sebesar Rp41,91 triliun, naik 77,61% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp23,60 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai penempatan dana perseroan di bank-bank nasional.

Kas dan setara kas pada tahun 2015 terdiri dari kas di tangan sebesar Rp16,53 miliar, ditempatkan di rekening giro dalam mata uang asing maupun rupiah sebesar Rp39,22 triliun yang merupakan 93,58% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas, serta deposito berjangka sebesar Rp2,69 triliun atau sebesar 6,41% dari jumlah keseluruhan kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perusahaan dalam bentuk deposito, ditempatkan di antaranya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin, dan lain-lain.

Dari penempatan dana tersebut Perseroan mendapatkan bunga antara 7,16%-7,81% per tahun untuk penempatan dana dalam rupiah. Sedangkan dana dalam mata uang asing kisaran bunganya adalah 0,5%-1,49% per tahun

Melalui pola penempatan dana seperti itu, Perseroan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp578,51 miliar. Apabila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp627,41 miliar, maka telah terjadi penurunan sebesar 8,45%.

Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalent in 2016 was Rp41.91 trillion, up 77.61% compared to 2015 of Rp23.60 trillion. This was caused by increasing the Company's funds placements in national banks.

Cash and cash equivalent in 2015 was in the form of cash in hand of Rp16.53 billion placed in current account in foreign currency and Rupiah of Rp39.22 trillion or 93.58% of overall cash and cash equivalent, as well as time deposits of Rp2.69 trillion or 6.41% of overall cash and cash equivalent. The Company's cash and cash equivalent in deposits were placed in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin, and others.

From those funds placements, the Company received interest of between 7.16%-7.81% per year for fund placement in Rupiah. While funds in foreign currencies received interest rates between 0.5%-1.49% per year.

Through the funds placement pattern, the Company received interest income of Rp578.51 billion. Compared to 2015 of Rp627.41 billion, there was a decline of 8.4

Posisi dan Penempatan dana Kas dan Setara Kas
Position and Placement of Cash and Cash Equivalent

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
KAS	17	13	10	CASH
REKENING BANK	39.220	21.637	23.304	BANK ACCOUNT
Bank - Pihak berelasi	35.563	17.896	18.017	Bank – Related parties
Bank Rakyat Indonesia	13.344	8.981	8.256	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	10.440	4.194	3.864	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	10.016	3.749	4.928	Bank Negara Indonesia
Bank Tabungan Negara	1.003	2.9	29	Bank Tabungan Negara
Bank DKI	761	969	940	Bank DKI
Bank - Pihak ketiga	3.640	3.729	5.277	Bank – Third parties
Bank Bukopin	2.667	2.241	3.703	Bank Bukopin
Bank Maybank	2	2	72	Bank Maybank
Bank Danamon	122	78	80	Bank Danamon
Bank Central Asia	415	456	629	Bank Central Asia
Deutsche Bank	0	858	0	Deutsche Bank
Lain-lain	433	93	792	Others
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA	2.690	1.959	3.808	CASH EQUIVALENT – TIME DEPOSITS
Bank - Pihak berelasi	1.628	1.250	2.236	Bank – Related parties
Bank Rakyat Indonesia	520	652	1.093	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	453	238	512	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	654	360	632	Bank Negara Indonesia
Bank - Pihak ketiga	1.062	709	1.572	Bank - Pihak ketiga
Bank Bukopin	972	558	1.453	Bank Bukopin
Lain-lain	90	152	119	Others
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	41.909	23.596	27.111	TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENT

Piutang Usaha

Perseroan mencatat Piutang Usaha dengan membagi pelanggan ke dalam dua kelompok besar, yakni piutang berdasarkan langganan dan piutang berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya.

Account Receivables

The Company categorizes Account Receivables by dividing customers into two main categories: receivables based on customer type, and receivables based on periods of impairment.

A. Piutang usaha berdasarkan Langganan

A. Account Receivables based on Customer Type

Piutang Usaha
Account Receivables

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Pihak berelasi				Related parties
Badan Usaha Milik Negara	565	569	582	State Owned Enterprises
Pihak ketiga				Third parties
Umum	20.445	18.564	17.977	Public
TNI dan Polri	603	431	456	Military & Police
Institusi lainnya	1.120	1.130	1.074	Other institutions
Sub jumlah	22.169	20.125	19.508	Sub total
Pihak ketiga bersih	21.146	19.265	18.913	Net – third parties
Total piutang Usaha - Bersih	21.711	19.834	19.495	Net - receivables

Piutang berdasarkan langganan terdiri atas piutang pihak berelasi yang merupakan pelanggan dari lingkungan BUMN, dan piutang pihak ketiga yang terdiri dari kelompok pelanggan umum, TNI dan Polri serta institusi lainnya.

Pada tahun 2016, saldo piutang pihak berelasi mencapai Rp565 miliar, turun 0,70% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp569,08 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi penghematan oleh BUMN dan pengaruh penyelesaian Tarif Tenaga Listrik.

Piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp21,15 triliun, naik 9,76% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp19,27 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya piutang usaha pihak ketiga- untuk pelanggan umum, TNI & Polri masing-masing sebesar 10,10% dan 40,10% terutama dikontribusikan oleh naiknya jumlah pelanggan dan adanya penyesuaian Tarif Tenaga Listrik. Sedangkan piutang usaha institusi lainnya mengalami penurunan 0,84% dibandingkan tahun lalu.

Adapun kontribusi terbesar piutang usaha pihak ketiga berasal dari pelanggan umum yang mencapai Rp20,44 triliun atau 96,69% dari total piutang pihak ketiga.

Receivables based on customers include receivables from related parties which are customers from SOEs, and receivables from third parties consisting of general customers, the military & police as well as other institutions.

In 2016, the balance of receivables from related parties reached Rp565 billion, down 0.70% from 2015 of Rp569.08 billion. The decline is caused by realized savings from SOEs and the impact of Electricity Tariff settlement.

Receivables from third parties reached Rp21.51 trillion, up 9.76% from 2015 which reached Rp19.27 trillion. The increase is caused by increasing receivables from third parties for general customers, and military & police respectively by 10.10% and 40.10%, especially contributed by increasing numbers of customers and adjustment of Electricity Tariff. Meanwhile receivables from other institutions dropped 0.84% from the previous year.

The largest contribution of account receivables from third parties came from general customers which reached Rp20.44 trillion or 96.69% of total receivables of third parties.

B. Piutang usaha berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya.

B. Account receivables based on account receivables period of impairment.

Piutang Usaha (Miliar)
Account Receivables (Billion)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Belum jatuh tempo	19.806	17.462	16.786	Not yet due
Lewat Jatuh Tempo				Overdue
1 s/d 90 hari	1.121	1.554	2.291	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	735	740	473	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	1.074	941	542	More than 360 days
Jumlah	22.737	20.697	20.092	Total
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai				Mutation on impairment
Saldo awal tahun	(863)	(598)	(465)	Beginning-year balance
Penambahan	(243)	(273)	(224)	Increase
Penghapusan	80	7	92	Write-off
Saldo akhir tahun	(1.026)	(863)	(598)	Year-end balance

Pada tahun 2016, piutang usaha yang belum jatuh tempo mengalami kenaikan sebesar 13,42% menjadi Rp19,81 triliun dari Rp17,46 triliun di tahun 2015. Sedangkan piutang yang lewat jatuh tempo mengalami penurunan 9,40% menjadi sebesar Rp2,93 triliun dari Rp3,23 triliun di tahun 2015.

In 2016, account receivables which were not yet due increased 13.42% to Rp19.81 trillion from Rp17.46 trillion in 2015. While receivables which were overdue dropped 9.40% to Rp2.93 trillion from Rp3.23 trillion in 2015.

Perseroan menerapkan kebijakan untuk melakukan pemutusan aliran listrik jika ada keterlambatan pembayaran pada periode tertentu. Penerapan sistem Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) maupun sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APT). Kebijakan ini membuat PLN lebih cepat mendeteksi adanya keterlambatan pembayaran dan mempercepat tindakan penyelesaian.

The Company implemented policy to cut electricity if there is delay in payment in certain period. The implementation of Centralized Customer Service Application (AP2T) system or Centralized Revenue Stream Monitoring (P2APT) system. This policy caused PLN to be faster in detecting payment delay and accelerating settlement actions.

Namun jika piutang tersebut menyangkut kepentingan umum yang lebih besar, PLN menunda penyelesaian. Karena itulah, piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 360 hari mencapai Rp1,07 triliun, naik 14,20% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp940,55 miliar.

However if the receivables concern bigger public interests, PLN delays the settlement. Therefore, receivables with overdue period of more than 360 days reached Rp1.07 trillion, up 14.20% compared to 2015 of Rp940.55 billion.

PIUTANG SUBSIDI LISTRIK

Pada tahun 2016, total piutang subsidi listrik mencapai Rp14,84 triliun, menurun sebesar 15,18% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp17,50 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2016 dan 2015, Perseroan telah menerima piutang subsidi listrik Tahun Anggaran 2014 masing-masing sebesar Rp12,28 triliun dan Rp7 triliun.

ELECTRICITY SUBSIDY RECEIVABLES

In 2016, total electricity subsidy receivables reached Rp14.84 trillion, down 15.18% from 2015 of Rp17.50 trillion. The decline was mainly because in 2016 and 2015 the Company received electricity subsidy receivables of the 2014 Budget respectively by Rp12.28 trillion and Rp7 trillion.

Persediaan

Nilai saldo persediaan pada tahun 2016 sebesar Rp11,57 triliun, meningkat 1,35% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp11,42 triliun. Nilai persediaan terbesar adalah

Inventories

The inventory balance in 2016 was Rp 11.57 trillion, up 1.35% from 2015 of Rp 11.42 trillion. The largest inventory value was fuel and lubricants, followed by general

persediaan bahan bakar dan pelumas, diikuti persediaan umum, persediaan *switchgear* & jaringan serta alat ukur, pembatas dan kontrol diikuti dengan transformator dan kabel. Nilai persediaan untuk komponen bahan bakar dan pelumas pada tahun 2016 sebesar Rp6,07 triliun, menurun sebesar 15,33% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp7,17 triliun. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan perusahaan untuk menekan penggunaan BBM, khususnya pada Pembangkit yang ada pada sistem Jawa-Bali.

inventories, switchgear and network as well as gauges, limiters and controls, followed by transformers and cables. The inventory value of fuel and lubricant components in 2016 was Rp 6.07 trillion, down 15.33% compared to 2015 which reached Rp7.17 trillion. This was caused by the Company's success to reduce fuel usage, especially on existing Plants in Java-Bali system.

Sementara komponen nilai persediaan umum, switchgear, alat pengukur dan pengendali naik. Hal tersebut terjadi akibat realisasi pemeliharaan pembangkit serta adanya kebutuhan peningkatan kualitas operasionall yang mensyaratkan penggantian maupun penambahan alat pengukur dan pengendali.

Meanwhile, components of general inventory which increased in value include switchgear, gauges and controllers. This was due to plant maintenance and the need to improve operations quality which required the replacement or addition of gauges and controllers.

Sekalipun aplikasi pengelolaan operasional berbasis teknologi informasi, seperti ERP yang telah *roll-out* di seluruh unit bisnis, aplikasi EAM dan aplikasi GOLS di beberapa unit bisnis tetap dioperasikan, operasional beberapa pembangkit baru dan kebutuhan pemeliharaan beberapa pembangkit berikut jaringan transmisi-distribusi dan gardu induk maupun gardu distribusi membuat nilai persediaan meningkat. Beberapa komponen persediaan yang harus di impor pada saat nilai rupiah melemah juga berpengaruh terhadap nilai persediaan yang dicatat dalam mata uang rupiah.

In spite of the information technology-based operational management applications, such as ERP which has been rolled out to all business units, EAM application and GOLS application in several business units remain operational, the operation of several new power plants and maintenance requirements of several power plants and transmission-distribution networks and substations or distribution station caused inventories value to rise. Some inventory components which had to be imported at a time when the Rupiah was weak also affected the inventory value recorded in Rupiah.

Jumlah persediaan tersebut, sebenarnya sudah mencerminkan nilai minimal sebagai hasil aplikasi pengelolaan berbasis teknologi informasi, dengan tetap mengacu pada level yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional yang berkualitas.

The amount of inventories reflects a minimum value as part of information technology-based management application results, while continuing to maintain adequate levels to support effective operational activities.

LIABILITAS

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2016 mencapai Rp393,78 triliun, turun 22,72% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp509,580 triliun. Liabilitas di tahun 2016 terdiri dari 69,11% liabilitas jangka panjang dan 30,89% liabilitas jangka pendek.

Komposisi liabilitas Perseroan mayoritas adalah liabilitas jangka panjang. Hal ini sesuai sifat usaha yang padat modal dan periode pengembalian investasi yang berjangka waktu lama. Karena itulah, kontribusi liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas senantiasa merupakan yang terbesar.

Penurunan total liabilitas terjadi pada liabilitas jangka panjang yang pada tahun 2016 lebih rendah 30,12% menjadi sebesar Rp272,15 triliun dibandingkan dengan tahun 2015, sedangkan liabilitas jangka pendek meningkat 1,24% menjadi sebesar Rp121,62 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2015.

LIABILITIES

Total Company liabilities in 2016 reached Rp393.78 trillion, down 22.72% compared to 2015 of Rp509.580 trillion. Liabilities in 2016 consisted of 69.11% long-term liabilities and 30.89% short-term liabilities.

The majority of Company liabilities are long term. This is in line with the nature of the business which is capital intensive and with long-term investment return period. Therefore, the contribution of long-term liabilities to total liabilities is always the largest.

The decrease in total liabilities occured in long-term liabilities which in 2016 were 30.12% lower to Rp272.15 trillion compared to 2015, while short-term liabilities rose 1.24% to Rp121.62 trillion if compared to 2015.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2016 mencapai Rp272,16 triliun, turun 30,12% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp389,44 triliun.

Komposisi liabilitas jangka panjang adalah utang bank sebesar 36,88%, hutang obligasi dan sukuk ijarah sebesar 25,29%, liabilitas imbalan kerja sebesar 15,11%, penerusan pinjaman sebesar 10,70%, utang sewa pembiayaan sebesar 6,59%, serta beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing kurang dari 6,0%.

LONG TERM LIABILITIES

Total long term liabilities in 2016 reached Rp272.16 trillion, down 30.12% compared to 2015 of Rp389.44 trillion.

The composition of long-term liabilities is bank debts of 36.88%, bonds and ijarah sukuk of 25.29%, employee benefit liabilities of 15.11%, two-step loans of 10.70%, finance lease debt of 6.59%, as well as other accounts with total amounts of less than 6.0%.

Liabilitas jangka panjang
Long term liabilities

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Lialibilitas pajak tangguhan -bersih	60	5	3.753	Net – deferred tax liabilities
Penerusan pinjaman	29.134	29.205	26.453	Two-Step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank	7.258	8.195	8.372	Debt to Government and non-bank government financial institutions
Utang sewa pembiayaan	17.933	149.622	128.097	Finance lease debt
Utang bank (Bagian Jangka Panjang)	100.362	77.829	70.400	Bank debt (Long Term)
Utang obligasi dan sukuk ijarah	68.825	80.043	81.673	Bond and ijarah sukuk debt
Utang listrik swasta	7.315	7.093	6.654	Private electricity debt
Utang pihak berelasi	2	3	7	Related parties debt
Lialibilitas imbalan kerja	41.110	37.378	41.079	Employee benefit liabilities
Utang lain-lain	156	68	99	Other debts
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	272.155	389.441	366.586	Total Long Term Liabilities

Penerusan Pinjaman

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek PLN. Pada tahun 2016, jumlahnya mencapai Rp29,13 triliun, lebih rendah dari posisi tahun sebelumnya yang Rp29,21triliun.

Perseroan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

Utang kepada Pemerintah

Pada 20 Juni 2001, Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5,29 triliun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146,90 miliar hingga 30 Juli 2021.

Hingga akhir tahun 2016, total utang kepada pemerintah Rp7,26 triliun. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang Rp8,19 triliun.

Utang Sewa Pembiayaan

Akun ini merupakan utang kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4 x 660 MW Tanjung Jati B Unit A, B, C dan D. Akun utang sewa pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp17,93 triliun, menurun 88,81% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp149,62 triliun, dikarenakan adanya pembayaran saldo utang yang jatuh tempo.

Utang Bank

Pada tahun 2016, posisi utang bank Perseroan mencapai Rp100,36 triliun, naik 28,95% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp77,83 triliun. Peningkatan utang bank terutama berasal dari pinjaman tidak terkait program percepatan.

Peningkatan akun ini lebih banyak berasal dari pencairan pinjaman bank dalam negeri yakni Mandiri, BRI, dan BNI, selain dari bank luar negeri seperti Standard Chartered, ADB, dan EDC.

Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Penerbitan obligasi oleh Perseroan adalah untuk kepentingan pembiayaan berbagai proyek pembangunan instalasi pembangkitan, transmisi maupun distribusi. Pada tahun 2016, posisi utang obligasi mengalami penurunan sebesar 14,01%, dari Rp80,04 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp68,82 triliun.

Two-Step Loans

This account is Indonesian Government foreign debt which is not tied by collateral and extended to the Company to fund PLN projects. In 2016, the amount reached Rp29.13 trillion, lower than the previous year at Rp29.21 trillion.

The Company paid principal debt and interest loans according to payment schedule and fulfilled requirements as stated in the two-step loan agreement.

Government Debt

On 20 June 2001, the Company and Indonesian government approved restructuring of arrears of two-step loan principal repayments of Rp5.29 trillion according to the Finance Minister Letter of Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001 to 20-year period loans. The loans have an annual interest of 4% and are without collateral. The loans are paid in installments every semester amounting to Rp146.90 billion until 30 July 2021.

Until the end of 2016, total debt to the government was Rp7.26 trillion. The position was lower than the Rp8.19 trillion in 2015.

Finance Lease Debt

This account is debt to PT Central Java Power ("CJP") in a Finance Lease Agreement on electricity plant procurement of the 4 x 660 MW Tanjung Jati B Units A, B, C and D. Finance lease debt in 2016 was Rp17.93 trillion, down 88.81% from 2015 at Rp149.62 trillion, due to repayment of the maturing debt balance.

Bank Loan

In 2016, the Company's bank debt position reached Rp100.36 trillion, up 28.95% from 2015 of Rp77.83 trillion. The bank debt increase was mainly due to loans unrelated to the fast track program.

The account increase was mostly due to loan disbursements from local banks: Mandiri, BRI, and BNI, and foreign banks such as Standard Chartered, ADB, and EDC.

Bond and Ijarah Sukuk Debt

Bond issuance by the Company is for financing needs of various plant installation development projects, and both transmission or distribution. In 2016, the bond debt position decreased 14.01%, from Rp80.04 trillion in 2015 to Rp68.82 trillion.

Hal ini karena pada tahun 2016 PLN tidak menerbitkan obligasi baru. Lebih lanjut, penguatan nilai rupiah yang menyebabkan saldo obligasi berdenominasi mata uang asing berkurang nilainya ketika dicatat dalam mata uang rupiah.

This happened because in 2016 PLN did not issue new bonds. Moreover, the Rupiah strengthening caused the balance of foreign currency-denominated bonds to decrease when recorded in Rupiah.

Utang Listrik Swasta

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta. Hingga berakhirnya tahun 2016, posisinya sebesar Rp7,32 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,09 triliun.

Electricity Purchase Payable

This account is electricity purchase payable restructured through renegotiation with private electricity developers and suppliers. Until the end of 2016, the position was Rp7.32 trillion or lower than the previous year of Rp7.09 trillion.

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45%. Kewajiban tersebut dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2013.

Debt to PT Paiton Energy and PT Jawa Power was charged with annual interest rates of respectively 4.81% and 18.45%. The obligation is paid in 360 monthly installments from 1 January 2002 to 1 December 2013.

Utang Pihak Berelasi

Utang kepada pihak berelasi merupakan transaksi dengan PT Mitra Energi Batam, PT Dale Energy Batam dan PT Riau Power. Pada tahun 2016, posisinya masih Rp2,30 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan posisi tahun 2015 yang sebesar Rp2,57 triliun.

Related Parties Debt

Debt to related parties were transactions with PT Mitra Energi Batam, PT Dale Energy Batam and PT Riau Power. In 2016, the position was Rp2.30 trillion, lower than the 2015 position of Rp2.57 trillion.

Utang kepada Mitra Energi Batam dan Dale Energy Batam merupakan utang oleh PT PLN Batam masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan utang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

Debt to Mitra Energi Batam and Dale Energy Batam was the debt of PT PLN Batam respectively for switchyard purchases and debt on deposit shares which have not been fully paid by PLN Batam.

Penyisihan Imbalan Kerja

Jumlah penyisihan untuk manfaat pensiun dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2016 mencapai Rp41,11 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp37,38 triliun, mengalami peningkatan 7,04%. Kenaikan penyisihan imbalan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya imbalan pemeliharaan kesehatan dikarenakan perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Employee Benefit Provision

Total provision for pension and employee benefits in 2016 reached Rp41.11 trillion. Compared to 2015 of Rp37.38 trillion, there was an increase of 7.04%. The increase in employee benefit provision was due to increasing healthcare benefit because the Company and subsidiaries provided health program benefits without funding for pensioners and dependents who fulfill requirements.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek pada akhir tahun 2016 mencapai Rp121,62 triliun, meningkat 1,24% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp120,14 triliun.

SHORT TERM LIABILITIES

Short Term Liabilities at the end of 2016 reached Rp121.62 trillion, rising 1.24% from 2015 at Rp120.14 trillion.

Komposisi liabilitas jangka pendek di antaranya meliputi utang usaha kepada ketiga sebesar 18,43%, utang bank sebesar 21,70%, utang lain-lain sebesar 14,86%, utang jaminan langganan sebesar 9,91%, biaya masih harus dibayar sebesar 8,75%, utang obligasi dan sukuk ijarah 7,87%, dan utang sewa pembiayaan sebesar 3,12%. Selain itu adalah beberapa akun lain dengan jumlah masing-masing di bawah 3%.

The composition of short term liabilities covers trade accounts payable to third parties of 18.43%, bank loans of 21.70%, other loans of 14.86%, customer security deposits of 9.91%, accrued expenses of 8.75%, bond and ijarah sukuk loans of 7.87%, and finance lease loans of 3.12%. There are also other accounts with respective totals below 3%.

Liabilitas Jangka Pendek
Short Term Liabilities

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Utang usaha	30.192	26.626	26.284	Trade accounts payable
Utang Pajak	1.951	15.132	1.151	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	10.645	10.627	9.403	Accrued expenses
Uang jaminan langganan	12.050	11.325	10.829	Customer security deposits
Utang biaya proyek	385	1.114	858	Project cost payable
Pendapatan ditangguhkan	1.147	1.534	1.307	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				Long term loans maturing in one year
Penerusan pinjaman	2.562	2.505	2.645	Two step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.044	294	294	Loans to Government and non-bank Government financial institutions
Utang sewa pembiayaan	3.789	6.759	5.116	Lease liabilities
Utang bank	26.395	11.752	9.528	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.568	9.122	805	Bond and ijarah sukuk loans
Utang listrik swasta	329	311	292	Electricity purchase payable
Lialibiltas imbalan kerja	3.494	2.849	2.700	Employee benefit liabilities
Utang lain-lain	18.073	20.189	16.347	Other lialibilities
Jumlah Lialibilitas Jangka Pendek	121.623	120.139	87.558	Total Short Term Lialibilities

Utang Usaha

PLN melakukan pembelian beberapa jasa dan barang tertentu dari para pemasok utama untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, dengan term pembayaran sesuai kesepakatan dan dicatat pada akun utang usaha. Beberapa jasa dan bahan pokok yang dipasok tersebut meliputi: bahan bakar (BBM, Batubara dan Gas), tenaga listrik, pelumas dan jasa konsultasi dengan pemasok utama adalah perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower dan sebagainya.

Mengingat kesamaan pada struktur kepemilikan perusahaan pemasok, maka utang usaha Perseroan dicatat pada dua sub-akun, yakni utang usaha dengan pihak berelasi dan utang usaha pada pihak ketiga lainnya.

Utang usaha pihak berelasi turun 12,77% menjadi Rp7,77 triliun pada tahun 2016, dari Rp8,91 triliun pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena menurunnya pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebesar 11,13% dibanding tahun lalu.

Sementara utang kepada pihak ketiga mencapai Rp22,42 triliun, naik 26,55% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp17,71 triliun yang disebabkan oleh kenaikan pembelian tenaga listrik dibanding tahun lalu.

Accounts Payable

PLN purchased certain goods and services from key suppliers to meet its operational needs, with agreed terms of payment that are recorded in accounts payable. Some of the staple services and goods supplied include: fuel (oil fuel, coal, and gas), electricity, lubricants and consultation services with key suppliers that are large companies, such as PT Pertamina, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Sumber Segara Primadaya, PT Bajradaya Sentranusa, PT Paiton Energy, PT Jawa Tower and others.

Given the similarities in ownership structure with the supplier companies, PLN's accounts payable is recorded in two sub-accounts: accounts payable to related parties and accounts payable to third parties.

Accounts payable to related parties was down 12.77% to Rp7.77 trillion in 2016, from Rp8.91 trillion in 2015. This is due to declining purchase of fuel, goods and services by 11.13% compared to last year.

Meanwhile accounts payable to third parties reached Rp 22.42 trillion, up 26.55% compared to 2015 of Rp 17.71 trillion caused by increased electricity purchases compared to last year.

Biaya Masih Harus Dibayar

Pada tahun 2016, total biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp10,64 triliun. Dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp10,63 triliun, telah terjadi kenaikan sebesar 0,16%. Kenaikan ini disebabkan oleh kewajiban pembayaran pihak berelasi yang akan jatuh tempo, meliputi utang usaha atas pembelian BBM, utang bank, utang penerusan pinjaman, dan utang kepada pemeritah dan lembaga keuangan pemerintah non bank, serta bonus dan insentif prestasi kerja.

Accrued Expenses

In 2016, total costs that must be paid were Rp10.64 trillion; as compared to 2015 at Rp10.63 trillion, there was an increase of 0.16%.The increase was caused by maturing payment obligations to related parties, covering accounts payable on BBM purchase, bank loans, two-step loans, and debt to government and non-bank government financial institutions, as well as bonus and incentives for work performance.

Uang Jaminan Langganan

Akun ini mencatat uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besaran daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar. Pada tahun 2016, total uang jaminan pelanggan mencapai Rp12,05 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp11,32 triliun, terjadi kenaikan sebesar 6,39%.

Customer Security Deposits

This account records customer security deposits based on voltage and tariff categories. Customer security deposits will be returned if the customers stop subscribing, after calculating unpaid electricity bills. In 2016, total customer security deposits reached Rp12.05 trillion. Compared to 2015 at Rp11.32 trillion, there was an increase of 6.39%.

Utang Bank

Pada tahun 2016, utang bank meningkat 124,59%, dari Rp11,75 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp26,39 triliun di tahun 2016 terutama disebabkan oleh telah jatuh temponya beberapa fasilitas pinjaman bank, baik dari bank BUMN/BUMD maupun swasta dalam dan luar negeri.

Bank Loans

In 2016, bank loans rose 124.59%, from Rp11.75 trillion in 2015 to Rp26.39 trillion in 2016, especially due to maturing loan facilities from several banks, both from SOE and local government banks and local and foreign private banks.

EKUITAS

EQUITY

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the Company
Modal saham-nilai nominal Rp 1 juta per saham				Capital stock - par value of Rp 1 million per share
Modal dasar 63.000.000 saham				63,000,000 basic equity shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh	55.666	46.197	46.197	Subscribed and paid up shares
Tambahan modal disetor	21.797	49.707	52.497	Additional paid - in capital
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	54.161	9.469	-	State capital injection in share issuance process
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	40.304	26.872	19.108	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	79.593	41.222	46.938	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	629.160	631.242	(11.491)	Other comprehensive income
Total Ekuitas yang dapat distribusikan kepada:				Total Equity attributable to:
Pemilik Entitas Induk	880.681	804.709	153.250	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali	117	81	54	Non - controlling interests
Jumlah Ekuitas	880.798	804.791	153.304	Total Equity

Ekuitas (Modal) Perseroan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 9,44% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp808,79 triliun, sehingga menjadi Rp880,80 triliun. Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan komposisi 6,32%, tambahan modal disetor 2,47% penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham 6,15%, serta saldo laba 13,61%.

Peningkatan signifikan ekuitas terjadi karena penambahan modal saham (penyertaan modal pemerintah) sebesar Rp54,16 triliun.

Selain itu, peningkatan dikontribusikan oleh adanya tambahan laba bersih tahun buku serta keberhasilan PLN dalam menerapkan strategi efisiensi operasional.

The Company's equity (capital) in 2016 increased 9.44% compared to 2015 at Rp808.79 trillion, to Rp 880.80 trillion. The Company's Equity consists of issued and fully paid in capital with composition of 6.32%, additional paid in capital 2.47%, state capital injection in share issuance process 6.15%, and retained earnings 13.61%.

The significant increase in equity occurred due to increased capital stock (government capital injection) of Rp 54.16 trillion.

Moreover, the increase was contributed by additional net profit for the fiscal year as well as PLN's success in implementing operational efficiency strategies.

LABA RUGI

INCOME STATEMENT

Ikhtisar Laba Rugi (Rp Miliar)
Income Statement Analysis (Rp Billion)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penjualan tenaga listrik	214.140	209.845	186.634	Electricity sales
Penyambungan pelanggan	7.052	6.141	5.624	Customer connections
Lain-lain	1.630	1.361	1.160	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	222.822	217.347	193.418	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	109.492	138.408	170.488	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	59.729	4.421	3.493	Electricity Purchase
Sewa	6.545	8.066	7.866	Lease
Pemeliharaan	21.227	21.861	20.207	Maintenance
Kepegawaian	22.660	20.321	16.646	Personnel
Penyusutan	27.512	25.407	23.618	Depreciation
Lain-lain	7.284	7.090	5.489	Others
Jumlah Beban Usaha	254.450	225.574	247.806	Total Operating Expense
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(31.628)	(8.227)	(54.388)	LOSS BEFORE SUBSIDY
Subsidi listrik pemerintah	60.442	56.553	99.303	Government Electricity Subsidy
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	28.814	48.325	44.915	PROFIT AFTER SUBSIDY
Penghasilan lain-lain bersih	1.092	2.437	4.157	Other income - net
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing -bersih	4.195	(27.326)	1.319.211	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan keuangan	578	627	584	Financial income
Beban keuangan	(18.703)	(39.977)	(35.971)	Financial cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	15.976	(15.913)	15.004	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(5.428)	21.940	(3.935)	TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10.549	6.026	11.069	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
Laba (rugi) periode berjalan diatribusikan kepada :				Profit (loss) for the year attributable to:
Pemilik entitas Induk	10.512	6.011	11.054	Owners of the Company
Kepentingan Non Pengendali	37	16	15	Non-controlling Interest
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	194.349	130.106	253.833	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)

PENDAPATAN USAHA

Perseroan mereklasifikasi penyajian subsidi listrik yang tidak lagi dalam kelompok pendapatan usaha tetapi disajikan sebagai line item tersendiri setelah laba (rugi) usaha sebelum subsidi.

Dengan demikian, pendapatan usaha PLN di tahun 2016 terutama berasal dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, jasa penyambungan pelanggan dan lain-

OPERATING REVENUES

The Company reclassified the electricity subsidy presentation which is no longer part of revenue but is now presented as a separate line item after profit (loss) before subsidy.

As such, PLN's revenue in 2016 was primarily derived from electricity sales to customers, customer connection services and others. In 2016, total revenue reached Rp222.82 trillion,

lain. Pada tahun 2016, total pendapatan usaha mencapai Rp222,82 triliun, naik 2,52% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp217,35 triliun

up 2.52% compared to 2015 at Rp217.35 trillion.

Pendapatan Penjualan Listrik
Electricity Sales Revenue

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (Rp miliar)	214.140	209.845	186.634	Electricity Sales Revenue (Rp Billion)
Energi Listrik Terjual GWh	216.004	202.846	198.602	Electricity Energy Sold GWh
Rata-rata Tarif Tenaga Listrik (Rp/kWh)	994	1.035	939.74	Average Electricity Tariff (Rp/kWh)

Pendapatan dari penjualan tenaga listrik di tahun 2016 naik 2,05% menjadi Rp214,14 triliun, dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp209,84 triliun. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan energi listrik yang terjual yang masing-masing sebesar 5,09% dan 6,49% dibandingkan tahun lalu.

Revenue from electricity sales in 2016 rose 2.05% to Rp214.14 trillion, compared to 2015 of Rp209.84 trillion. This increase is in line with the growing number of customers and electricity energy sold respectively by 5.09% and 6.49% from last year.

Tabel berikut menunjukkan, berdasarkan kelompok pelanggan, maka kontribusi kenaikan pendapatan penjualan listrik terutama berasal dari kelompok umum dan TNI & POLRI yang masing-masing naik sebesar 2,36% dan 1,72% dibandingkan tahun lalu.

The following table shows, based on customer categories, the contribution of electricity sales revenue increase mainly came from public and military & police, which respectively rose 2.36% and 1.72% from last year.

Pendapatan Penjualan Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan
Electricity Sales Revenue Based on Customer Category

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Pihak berelasi (BUMN)	5.126	5.428	5.084	Related parties (SOE)
Pihak ketiga	210.250	205.641	181.550	Third parties
Umum	199.054	194.460	172.517	Public
Lembaga dan kementrian	10.077	10.080	8.017	Agencies and ministries
TNI dan Polri	1.119	1.100	1.016	Military & Police
Total Penjualan Tenaga Listrik	214.140	209.845	186.634	Total Electricity Sales

Pendapatan Biaya Penyambungan

Pendapatan biaya penyambungan pelanggan pada tahun 2016 naik 14,83%, menjadi Rp7,05 triliun dari Rp6,14 triliun di tahun 2015. Kenaikan ini terjadi karena bertambahnya jumlah pelanggan, dan meningkatnya daya listrik untuk pelanggan. Penambahan 3,1 juta pelanggan baru di tahun 2016 membuat total pelanggan PLN berkembang menjadi 64,28 juta pelanggan.

Penambahan daya tersambung adalah 16,72% atau 7.764 MVA dari tahun 2015, sehingga total daya tersambung menjadi 114.348 MVA. Perseroan mengenakan biaya penyambungan dengan besaran yang berbeda sesuai golongan tarif. Kebijakan umumnya adalah biaya semakin meningkat sejalan dengan naiknya golongan tarif pelanggan.

Revenue from Customer Connections

Revenue from customer connections in 2016 rose 14.83% to Rp7.05 trillion from Rp6.14 trillion in 2015. The increase was due to growing number of customers, and the increase in electrical power for customers. The addition of 3.1 million new customers in 2016 saw PLN's total customers rise to 64.28 million customers.

Additional connected power was 16.72%, or 7,764 MVA, from 2015, so total connected voltage was 114,348 MVA. The Company charges connection fees in different rate based on tariff category. The general policy is that the cost increases with higher tariff categories.

Pendapatan lain-lain

Pada tahun 2016, pendapatan lain-lain meningkat 19,75% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp1,36 triliun, sehingga menjadi Rp1,63 triliun.

Pendapatan lain-lain ini berasal dari penjualan jasa yang dilakukan oleh unit bisnis PLN yang maupun anak usaha dikonsolidasi yang bergerak di berbagai bidang yang berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jaringan telekomunikasi, perbaikan mesin pembangkit, sewa transformator dan jasa lain-lain.

Konsistensi pemerintah dalam membangun ketenagalistrikan membuat permintaan jasa-jasa tersebut naik, dan mempengaruhi pendapatan anak usaha. Rincian pendapatan lain-lain yang berasal dari unit bisnis, anak usaha maupun kegiatan PLN lainnya adalah sebagai berikut.

Other Revenues

In 2016, other revenues rose 19.75% to Rp1.63 trillion compared to 2015 at Rp1.36 trillion.

Other revenues came from service sales conducted by PLN business units or consolidated subsidiaries which operate in various sectors related to electricity, such as telecommunication network, plant machinery repair, transformer leasing and other services.

The government's consistency in developing electricity has seen demand for services rise, thus impacting the revenue of PLN's subsidiaries. Details of other revenues coming from business units, subsidiaries and PLN's other activities are as follows.

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Jaringan dan jasa telekomunikasi	816	798	718	Telecommunication network and service
Sewa transformator	313	270	198	Transformer rental
Perubahan daya tersambung dan administrasi	25	1	46	Upgrade of electricity power and administration fees
Jasa-jasa dan lainnya	476	291	197	Services and others
Total Pendapatan Usaha Lain	1.630	1.361	1.160	Total Other Income

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2016, penghasilan komprehensif tahun berjalan mencapai Rp8,47 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp648,76 triliun. Sebagai catatan, pada tahun 2015 sesuai dengan anjuran dan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah, PLN melakukan program revaluasi aset properti yang dimilikinya. Revaluasi aset dilakukan dengan melibatkan pihak penilai independen seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Current Year Comprehensive Revenue

In 2016, current year comprehensive revenue reached Rp8.47 trillion. It is lower than 2015 which reached Rp648.76 trillion. For the record, in 2015 according to recommendation and opportunity given by the government, PLN conducted an asset revaluation program of its owned properties involving independent appraisals as elaborated previously.

BEBAN USAHA

OPERATING EXPENSES

Keterangan	2016	2015	Perubahan Changers	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Bahan bakar dan pelumas	109.492	138.408	170.488	Fuel and lubricant
Pembelian tenaga listrik	59.729	4.421	3.493	Electricity Power Purchase
Sewa	6.545	8.066	7.866	Lease
Pemeliharaan	21.227	21.861	20.207	Maintenance
Kepegawaian	22.660	20.321	16.646	Personnel
Penyusutan	27.512	25.407	23.618	Depreciation
Lain-lain	7.284	7.090	5.489	Others
Jumlah Beban Usaha	254.450	225.574	247.806	Total Operating Expense

Total beban usaha tahun 2016 mencapai Rp254,45 triliun, naik 12,80% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp225,57 triliun. Perubahan ini, antara lain didorong oleh peningkatan pembelian tenaga listrik yang tumbuh signifikan, dari Rp4,42 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp59,73 triliun di tahun 2016. Beban penyusutan juga mengalami peningkatan cukup besar, yaitu 8,29% pada tahun 2016. Jika pada tahun 2015 bebannya Rp25,41 triliun, pada 2016 naik menjadi Rp27,51 triliun.

Total operating expenses in 2016 reached Rp254.45 trillion, up 12.80% compared to 2015 at Rp225.57 trillion. This change, among others was pushed by increasing electricity purchases from privates which grew significantly from Rp4.42 trillion in 2015 to Rp59.73 trillion in 2016.
Depreciation cost also experienced a large increase, by 8.29% in 2016, from a 2015 cost of Rp25.41 trillion to a 2016 cost of Rp27.51 trillion.

Beban Bahan Bakar dan Pelumas

Realiasi pembelian BBM dan pelumas di tahun 2016 turun sebesar 20,89% dari Rp138,41 triliun di tahun 2015 menjadi Rp109,49 triliun. Komponen beban usaha yang berkontribusi sebesar 43,03% dari total beban usaha ini, terdiri dari pembelian BBM dan non BBM (batu bara, gas alam dan panas bumi).

Penurunan penggunaan BBM dan pelumas ini karena penurunan volume penggunaan BBM dan Pelumas dikarenakan telah beroperasinya beberapa pembangkit berbahan bakar batubara dan gas.

Fuel and Lubricant Expenses

Realized purchases of oil-based fuel and lubricant in 2016 dropped 20.89% from Rp138.41 trillion in 2015 to Rp109.49 trillion. This operating expense component contributed 43.03% from total operating expenses, comprising purchases of oil-based fuel and non-oil-based fuel (coal, natural gas and geothermal).

The declining use of oil-based fuel and lubricant is due to the decline in use of oil-based fuel and lubricant due to operations of several coal-fired and gas-fired power plants.

Beban Pembelian Tenaga Listrik dan Sewa

Beban pembelian tenaga listrik dan sewa pada tahun 2016 naik cukup signifikan, dari Rp12,48 triliun menjadi Rp66,27 triliun. Beban pembelian tenaga listrik dan sewa ini berkontribusi 26,05% terhadap total beban usaha PLN.

Kenaikan terutama disebabkan bertambahnya daya listrik yang dibeli dari Pembangkit Listrik Swasta, yakni dari 57.506 GWh di tahun 2015 menjadi 64.802 GWh di tahun 2016 atau naik 12,68%. Penambahan pembelian listrik swasta dan pihak berelasi dilakukan di antaranya karena kebutuhan pasokan tenaga listrik untuk mengatasi defisit. Selain itu juga karena jumlah pelanggan terus naik, sehingga suplai listrik harus bertambah.

Beban pembelian tenaga listrik di masa mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi pembangkit listrik swasta untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

Beban Sewa juga menurun sebesar 18,85%. Hal ini disebabkan telah beroperasi beberapa proyek pembangkit baik milik PLN maupun IPP. Namun beban sewa berkontribusi sangat kecil, yaitu 2,57% terhadap total beban usaha PLN.

Electricity Power Purchase and Lease

Electricity power purchase and lease expenses in 2016 rose significantly, from Rp12.48 trillion to Rp66.27 trillion. Electricity power purchase and lease expenses contributed 26.05% to PLN total operating expenses.

This increase was mainly due to increase in electrical power purchased from Independent Power Producers, up from 57,506 GWh in 2015 to 64,802 GWh in 2016 or up 12.68%. The increase in power purchases from private and related parties was made due to the need for electricity supply to cover the deficit. Moreover, the increasing number of customers means more electricity has to be supplied.

In future, purchases of electricity will increase, in line with increasing participation of independent power producers to fulfill national electricity demand.

Lease expenses dropped 18.85%. This was due to the operations of several power plants both owned by PLN or IPPs. But lease expenses were very small, amounting to 2.57% of PLN's total operating expenses.

Beban Pemeliharaan

Pada tahun 2016, total beban pemeliharaan mencapai Rp21,23 triliun, turun 2,90% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp21,86 triliun. Kontribusi beban pemeliharaan sebesar 8,34% terhadap total beban usaha Perseroan.

Maintenance Cost

In 2016, total maintenance cost reached Rp21.23 trillion, down 2.90% compared to 2015 at Rp21.86 trillion. The contribution of maintenance cost was 8.34% of total Company's operating expenses.

Beban Kepegawaian

Pada tahun 2016, total beban kepegawaian mencapai Rp22,66 triliun, naik 11,51% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp20,32 triliun. Kontribusi beban kepegawaian sebesar 8,91% terhadap total beban usaha Perseroan. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah pegawai, serta adanya penyesuaian inflasi dalam remunerasi.

Beban penyusutan

Pada tahun 2016, total beban penyusutan mencapai Rp27,51 triliun, naik 8,29 % dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp25,41 triliun. Kontribusi beban pemeliharaan sebesar 10,81% terhadap total beban usaha Perseroan. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset tetap, seiring dengan telah selesainya beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan

Beban Lain-lain

PLN mencatat beban lain-lain (di luar beban translasi) pada tahun 2016 sebesar Rp7,28 triliun, naik 2,74% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp7,09 triliun. Penyebab utama kenaikan beban lain-lain adalah kenaikan biaya baca meter.

SUBSIDI

Sesuai dengan tugas awalnya sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) di bidang penyediaan tenaga listrik, PLN mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hal ini karena PLN wajib menyediakan tenaga listrik dengan harga jual yang terjangkau oleh seluruh pelanggannya, walaupun harga jual tersebut berada di bawah rata-rata biaya penyediaan tenaga listrik (BPP).

Subsidi ini diperhitungkan berdasarkan pada selisih negative antara harga jual rata-rata dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari masing-masing golongan tarif. (Lihat penjelasan "Subsidi Listrik"; Biaya Pokok Pengadaan" dan "Tarif Tenaga Listrik").

Sampai akhir tahun 2016, sebagian pelanggan PLN masih membayar penggunaan tenaga listrik dengan tarif subsidi (kecuali pelanggan anak perusahaan PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan yang menerapkan tarif regional). Tahun 2016 nilai rata-rata Biaya Pokok Penyediaan konsolidasi termasuk anak perusahaan PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan adalah sebesar Rp1.265/kWh sedangkan Biaya Pokok Penyediaan tanpa PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan adalah sebesar 1247,5/kWh. Harga jual rata-rata relatif tarif tenaga listrik konsolidasi (termasuk anak perusahaan PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan) adalah sebesar Rp994/kWh, turun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp1.035/kWh. Sedangkan harga jual rata-rata relatif tenaga listrik tanpa anak perusahaan PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan pada tahun 2016 adalah sebesar 1.003,6/kWh.

Employment Expenses

In 2016, total employment expenses reached Rp22.66 trillion, up 11.51% compared to 2015 at Rp20.32 trillion. The contribution of employment expenses was 8.91% of total Company's operating expenses. The increase was mainly due to increasing number of employees, as well as inflation adjustment in remuneration.

Depreciation Expenses

In 2016, total depreciation expenses reached Rp27.51 trillion, up 8.29% from 2015 at Rp25.41 trillion. Contribution of maintenance cost was 10.81% of total Company's operating expenses. The increase was mainly due to increasing fixed assets, along with the completion of several electricity infrastructure projects.

Other Expenses

PLN recorded other expenses (excluding translational costs) in 2016 at Rp7.28 trillion, up 2.74% compared to 2015 at Rp7.09 trillion. The main factor of other expenses increasing was the meter reading cost increase.

SUBSIDY

In accordance with the tasks originally as the executor of Public Service Obligation (PSO) in the field of electricity supply, PLN get subsidies from the government. This is because PLN is required to provide power to the selling price affordable by all customers, even if the sale price is below the average cost of electricity supply (BPP).

This subsidy will be calculated based on a negative difference between the average selling price of each class of reduced rates of electricity supply basic cost of each class fare. (See explanation "Electricity Subsidies"; Cost of Supply "and" Electric Power Rates ").

Until the end of 2016, most customers still pay PLN power consumption with the subsidy rates (unless the subsidiary customers of PT PLN Batam and PT PLN Tarakan which are rated regionally). In 2016, the average value of the consolidated cost of supply including subsidiaries such as PT PLN Batam and PT PLN Tarakan amounted to Rp1,265 / kWh, while the cost of supply without PT PLN Batam and PT PLN Tarakan amounted to 1247.5 / kWh. The average selling price consolidation tariff (including a subsidiary of PT PLN Batam and PT PLN Tarakan) amounted to Rp994 / kWh, down compared to 2015 which amounted to Rp1.035 / kWh. While the average selling price relative electricity without subsidiary of PT PLN Batam and PT PLN Tarakan in 2016 amounted to 1,003.6 / kWh.

Realisasi subsidi di tahun 2016 adalah sebesar Rp60,44 triliun atau lebih tinggi 6,88% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp56,55 triliun. Penurunan nilai subsidi tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pencabutan subsidi energi yang diterapkan Pemerintah melalui penyesuaian TTL secara berkala tersebut.

Penentuan besaran subsidi listrik tetap dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI), yang telah mendapatkan akses terhadap pencatatan pembukuan keuangan PLN sesuai kerja sama antara BPK dan PLN dan pembahasan intensif antara PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Keuangan dan DPR (lihat kembali uraian "Subsidi Listrik").

RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI

Pada tahun 2016, total rugi usaha sebelum subsidi yang dibukukan Perseroan mencapai Rp31,63 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 8,23 triliun, berarti kerugian meningkat 284,44%. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan pada pelanggan R1-450/ 900VA akibat belum diterapkannya tarif non subsidi untuk pelanggan R1-450/ 900VA yang tidak masuk dalam kategori pelanggan miskin dan rentan miskin.

LABA USAHA SETELAH SUBSIDI

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan laba usaha setelah subsidi sebesar Rp28,81 triliun, turun 40,37% dibandingkan tahun tahun 2015 yang Rp48,32 triliun. Hal ini terjadi seiring dengan tidak tercapainya target pendapatan pada pelanggan R1-450/ 900VA akibat belum diterapkannya tarif non subsidi untuk pelanggan R1-450/ 900VA yang tidak masuk dalam kategori pelanggan miskin dan rentan miskin.

LABA SEBELUM SELISIH KURS DAN PAJAK

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan laba sebelum selisih kurs pajak sebesar Rp11,78 triliun, lebih tinggi 3,23% dibandingkan tahun 2015 yang Rp11,41 triliun.

LABA SELISIH KURS - BERSIH

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan laba selisih kurs sebesar Rp4,19 triliun. Pada tahun 2015, rugi kurs bersih Perseroan mencapai Rp27,32 triliun. Perubahan ini disebabkan oleh penguatan kurs rupiah pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.

LABA SEBELUM PAJAK

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp15,98 triliun. Sementara pada tahun 2015, rugi sebelum pajak mencapai Rp15,91 triliun. Perubahan ini seiring dengan penguatan kurs rupiah pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.

Realization of subsidies in 2016 was Rp60.44 trillion or 6.88% higher compared to 2015 which amounted Rp56.55 trillion. The decline in value of the subsidy is a direct result of the removal of subsidies on energy policy implemented by the government through periodic adjustments to the TTL.

Determining the amount of electricity subsidies are done through a series of processes involving input from the Supreme Audit Agency (BPK - RI), who have gained access to the recording of financial accounting PLN based cooperation between the CPC and the PLN and intensive discussions between the PLN, the Director General of Electricity, Ministry of Finance and Parliament (see the description of "Electricity subsidies").

OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY

In 2016, total operating loss before subsidy booked by the Company reached Rp31.63 trillion. If compared to 2015 of Rp 8.23 trillion, then the loss rose 284.44%. This was caused by unachieved revenue target on R1-450/ 900VA customers as non-subsidized tariff was not yet implemented for those R1-450/ 900VA customers who are not included as poor and vulnerably poor customers.

OPERATING PROFIT AFTER SUBSIDY

In 2016, the Company booked operating profit after subsidy of Rp28.81 trillion, down 40.37% compared to 2015 of Rp48.32 trillion. This occurred due to an unachieved revenue target for R1-450/ 900VA customers as non-subsidized tariff was not yet implemented for those R1-450/ 900VA customers who are not included as the poor and vulnerably poor customers.

PROFIT BEFORE FOREIGN EXCHANGE DISCREPANCIES AND TAX

In 2016, the Company booked profit before foreign exchange discrepancies and tax of Rp11.78 trillion, 3.23% higher than in 2015 of Rp11.41 trillion.

FOREIGN EXCHANGE PROFIT – NET

In 2016, the Company recorded foreign exchange profit of Rp4.19 trillion. In 2015, net foreign exchange loss of the Company reached Rp27.32 trillion. The change was caused by Rupiah strengthening in 2016 compared to 2015.

PROFIT BEFORE TAX

In 2016, the Company recorded profit before tax of Rp15.98 trillion. Meanwhile in 2015, loss before tax reached Rp15.91 trillion. The change was in line with Rupiah strengthening in 2016 compared to 2015.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan yang berhasil dicatatkan oleh Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp10,55 triliun. Dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp6,03 triliun, telah mengalami kenaikan sebesar 75,04%.

CURRENT YEAR PROFIT

Current year profit recorded by the Company in 2016 was Rp10.55 trillion. Compared to 2015 of Rp6.03 trillion, there was an increase of 75.04%.

LABA BERSIH DAN LABA PER SAHAM TAHUN BERJALAN

Total laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemillik Entitas Induk pada tahun 2016 sebesar Rp10,51 triliun dan diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali mencapai Rp36,73 miliar. Dengan demikian total laba bersih tahun berjalan adalah Rp10,55 miliar triliun.

Dengan laba bersih tersebut, maka laba per saham Perseroan di tahun 2016 mencapai Rp194.349 per saham. Dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp130.106 juta per saham, mengalami kenaikan 49,38%.

NET PROFIT AND EARNINGS PER SHARE FOR THE CURRENT YEAR

Total current year profit attributed to the Owners of the Company in 2016 was Rp10.51 trillion and attributed to Non-Controlling Interest reaching Rp36.73 billion. Therefore total current year net profit was Rp10.55 trillion.

With the net profit, then earnings per share of the Company in 2016 reached Rp194,349 per share. Compared to 2015 of Rp130,106 million per share, it increased 49.38%.

EBITDA DAN EBITDA MARGIN

EBITDA Perseroan di tahun 2016 mencatatkan nilai sebesar Rp58,10 triliun, turun 23,91 % dibandingkan tahun 2015 yang Rp76,35 triliun. Hal ini terjadi karena Perseroan menerapkan POJK 6/2017 yang menerapkan transaksi dengan IPP adalah merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik dan bukan perjanjian sewa atau mengandung sewa, sedangkan jika EBITDA pada tahun 2015, jika tanpa menerapkan POJK 6 adalah sebesar Rp51,49 triliun yang berarti EBITDA di tahun 2016 meningkat sebesar 12,84%

EBITDA Margin pada tahun 2016 mencapai 20,51%, lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sebesar 27,87%. Hal ini seiring dengan diterapkannya POJK 6/2017, sedangkan EBITDA Margin tanpa menerapkan POJK 6/2017 adalah sebesar 13,17% yang berarti EBITDA Margin meningkat dari tahun sebelumnya.

EBITDA AND MARGIN EBITDA

EBITDA of the Company in 2016 recorded a value of Rp58,10 trillion, down 23.91% compared to 2015 which was Rp76,35 trillion. This happens because the Company implemented POJK 6/2017 applying transactions with IPP is a power purchase agreement and not a rental agreement or contains a lease, whereas the EBITDA in 2015, if without applying POJK 6 amounted Rp51,49 trillion, which means EBITDA in 2016 increased by 12.84%

EBITDA margin in 2016 reached 20.51%, lower than in 2015 which amounted to 27.87%. This is in line with the implementation of POJK 6/2017, while the EBITDA margin without applying POJK 6/2017 amounted to 13.17%, which means the EBITDA margin increased from the previous year.

ARUS KAS

CASH FLOW

Rincian Arus Kas
Cash Flow Details

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	29.588	37.289	39.252	Net Cash Provided by Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(54.800)	(38.297)	(30.399)	Net Cash Used in Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	43.595	(2.870)	(7.254)	Net Cash Provided by Financing Activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	18.383	(3.878)	1.599	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	23.596	27.112	25.530	Cash and cash equivalents at beginning of year
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(70)	363	(18)	Foreign exchange change
Kas dan setara kas akhir tahun	41.909	23.596	27.111	Cash and cash equivalents at end of year

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan kenaikan Arus Kas mencapai Rp18,38 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 474,06% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar Rp3,88 triliun. Perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan dari arus kas pendanaan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah dan perolehan hutang, sehingga Perseroan mencatatkan kenaikan kas dan setara kas pada akhir tahun 2016 menjadi Rp41,91 triliun atau mengalami kenaikan 77,61% dibandingkan kas dan setara kas awal tahun yang sebesar Rp23,60 triliun.

In 2016, the Company booked an increase in Cash Flow of Rp18.38 trillion or up 474.06% compared to 2015 which dropped Rp3.88 trillion. This change occurred due to an increase in funding cash flow coming from the government's capital injection and debt proceeds, so that the Company recorded an increase in cash and cash equivalent at the end of 2016 of Rp41.91 trillion, or an increase of 77.61% compared to cash and cash equivalent at the beginning of the year at Rp 23.60 trillion.

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2016 mencapai Rp29,59 triliun, menurun 20,65% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp37,29 triliun. Hal ini tersebut terjadi karena penurunan penerimaan subsidi Pemerintah.

Net cash from operating activities in 2016 reached Rp29.59 trillion, down 20.65% compared to 2015 of Rp37.29 trillion. This occurred due to declining government subsidy revenue.

Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi naik 43,09%, dari Rp38,30 triliun menjadi Rp54,80 triliun. Kas tersebut, antara lain digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan. Dalam kegiatan investasi ini Perseroan memberi pinjaman kepada pihak berelasi, menempatkan dana yang dibatasi penggunaannya di rekening bank berelasi, serta menempatkan dana investasi jangka pendek sebesar Rp254,71 miliar. Dari kegiatan investasi ini Perseroan menerima dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp207,88 miliar.

Cash used for investment activities rose 43.09%, from Rp38.30 trillion to Rp54.80 trillion. The cash was used to finance acquisition of fixed assets and work in progress. In the investment activities the Company gave loans to related parties, placed funds under restricted use in related bank accounts, as well as placed short-term investment funds of Rp254.71 billion. Of the investment the Company received dividends from associates of Rp207.88.

Dari sisi pendanaan, kas bersih Perseroan pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp43,60 triliun, dibandingkan tahun 2015 yang mencapai negatif Rp2,87 triliun, telah mengalami kenaikan sebesar 1.519,22%. Kenaikan berasal dari penyertaan modal Pemerintah dan perolehan hutang.

In funding, the Company's net cash in 2016 was Rp43.60 trillion, which is compared to 2015 which reached a negative Rp2.87 trillion which mean increased 1,519.22%. The increase came from the government capital injection and debt proceeds.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan PLN dalam membayar hutang, dapat dilihat dari tiga rasio keuangan yang relevan, yakni rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan. Secara umum, kondisinya bisa dikatakan sangat baik. Berikut ini rincian penjelasannya.

ABILITY TO PAY DEBTS

PLN's ability in paying its debts can be seen in three relevant financial ratios: solvency ratio, liquidity ratio and account receivable collectability ratio. In general, the conditions are very healthy as elaborated below.

Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo. Rasio ini juga terpengaruh oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan PLN yang membuat total aset dan modal Perseroan naik substansial. Pada tahun 2016, rasio solvabilitas Perusahaan terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) menurun menjadi 30,89% dari 38,77% di tahun 2015 dikarenakan oleh turunnya kewajiban perusahaan, sedangkan solvabilitas terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) adalah 44,71%, menurun dari posisi 63,32% di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh selain turunnya kewajiban perusahaan juga dikontribusikan oleh peningkatan ekuitas perusahaan akibat penyertaan modal negara.

Solvency Ratio

These ratios show the Company's ability in fulfilling maturing short- and long-term obligations. This ratio is also affected by asset revaluation results conducted by PLN which caused the Company's total assets and capital to both rise substantially. Increasing obligations in 2016 caused the Company's solvency to asset (Debt to Asset Ratio) to rise to 31.15% from 30.89% in 2015, while solvency to equity (Debt to Equity Ratio) was 45.20%, rising from 44.70% in 2015.

Rasio Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Pada tahun 2016, rasio likuiditas Perseroan (*Current Ratio*) mencapai 83,02%, naik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 66,04%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Liquidity Ratio

This ratio demonstrates PLN's ability to meet its maturing short-term liabilities, calculated by dividing current assets and current liabilities. In 2016, PLN's Current Ratio reached 82.30%, up from 67.81% in 2015. The increase shows the Company has better liquidity than in the previous year.

Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas piutang dihitung dengan membandingkan total piutang terhadap total hasil penjualan. Dengan perhitungan tersebut, tingkat perputaran piutang Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar 9,70 hari, sementara pada tahun sebelumnya 9,37 hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan piutang Perusahaan hingga menjadi kas semakin lama daripada tahun 2015.

Accounts Receivable Collectability

The collectability of accounts receivable is calculated by comparing total debts to total sales. With this calculation, PLN's accounts receivable turnover per 2016 amounted to 35.85 days, while in the previous year it was 34.20 days. The condition shows that the Company's account receivables to cash has become longer than 2015.

Posisi Piutang PLN

PLN Account Receivables Position

Piutang Usaha (Rp Miliar)
Account Receivables (Rp Miliar)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Belum jatuh tempo	19.806	17.462	16.786	Not due
Lewat Jatuh Tempo				Overdue
1 s/d 90 hari	1.121	1.554	2.291	1 to 90 days
91 s/d 360 hari	735	740	473	91 to 360 days
Lebih dari 360 hari	1.074	941	542	More than 360 days
Jumlah	23.737	20.697	20.092	Total

RASIO-RASIO LAIN

OTHER RATIOS

RASIO-RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIOS

Keterangan	2016	2015	2014	Description
RASIO LIKUIDITAS				LIQUIDITY RATIO
Rasio Lancar	83,02%	66,04%	99,88%	Current Ratio
Rasio Kas	34,77%	19,74%	31,82%	Cash Ratio
RASIO SOLVABILITAS				SOLVENCY RATIO
Jumlah liabilitas terhadap jumlah asset	30,89%	38,77%	65,31%	Total liabilities to total assets
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	44,71%	63,32%	188,25%	Total Liabilities to total equity
RASIO PROFITABILITAS				PROFITABILITY RATIO
Margin laba-kotor	13,46%	23,03%	14,69%	Gross profit margin
Margin laba-bersih	4,93%	2,87%	7,50%	Net profit margin
RASIO RENTABILITAS				PROFITABILITY RATIO
Rasio laba terhadap ekuitas	1,20%	0,75%	7,48%	The ratio of earnings to equity
Rasio laba terhadap aset	0,83%	0,46%	2,60%	The ratio of earnings to assets

RASIO OPERASIONAL				OPERATIONAL RATIO
Perputaran Utang Usaha (hari)	9,70	9,37	22,83	Collection Period (days)
Perputaran Piutang Usaha (hari)	10,31	10,67	15,99	Receivable Turn Over (days)
Perputaran Aset Tetap (kali)	2,38	2,55	0,41	Fixed Asset Turn Over (times)

Rentabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Rentabilitas terhadap ekuitas (*Return On Equity*) di tahun 2016 adalah 1,20%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang 0,75%. Sementara rentabilitas terhadap aset (Return on Asset) mengalami peningkatan menjadi 0,83% dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,46%.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas laba bersih di tahun 2016 mengalami penurunan gross profit margin dari 23,03% di tahun 2015 menjadi 13,46% di tahun 2016, serta peningkatan net profit margin dari 2,87% di tahun 2015 menjadi 4,93% di tahun 2016. Kondisi ini sebagai akibat belum diterapkannya tarif non subsidi pada pelanggan R1/450-900 VA yang tidak termasuk dalam pelanggan miskin dan rentan miskin, sehingga menyebabkan pendapatan penjualan tenaga listrik tidak mencapai sasaran.

Consolidated Interest Coverage Rasio (CICR)

CICR merupakan rasio antara Consolidated Cash Flow dengan Consolidated Interest Expense, yang merupakan persyaratan pemegang obligasi dari pendanaan global bond. Ketentuan CICR sesuai covenant pemegang obligasi adalah sebesar 2 kali. Sementara posisi CICR per akhir tahun 2016 adalah sebesar 3,11 kali.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perseroan pada tahun 2016 terdiri atas 30,89% berupa liabilitas dan 69,11% berupa ekuitas. Liabilitas Perseroan sebagian besar digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sebagian digunakan untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan ekuitas seluruhnya digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan risiko usaha.

Rentabilitas

RentabilityThis ratio shows the Company's ability to generate net profit using available resources. Rentability on equity (Return on Equity) in 2016 was 1.22%, lower than 1.84% in 2015, Meanwhile rentability on assets (Return on Assets) experienced a decline to 0.84% compared to 2015 of 1.27% from. This was due to the impact of several plant projects in construction which have not yet generated revenue.

Profitability

The net profit profitability ratio in 2016 experienced a declinedue to the gross profit margin declining from 13.17% in 2015 to 11.83 % in 2016, with a proportionate decline in net profit margin from 7.43% in 2015 to 5.03% in 2016. This condition resulted from the non-subsidized tariff not being implemented for customers R1/450-900 VA who are not categorized as poor and vulnerably poor, causing electricity sales revenue to not reach target.

Consolidated Interest Coverage Rasio (CICR)

CICR is the ratio between Consolidated Cash Flow and Consolidated Interest Expense, which is the bondholders' requirement of global bond funding. The provisions of CICR according to the covenant of bondholders are 2 times. While the position of CICR by the end of 2016 is equal to 3.11 times.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Company's capital structure in 2016 comprised 30.89% in the form of liabilities and 69.11% in equity. The Company's liabilities were mostly used for investment in electricity infrastructure development such as for plant installations, transmission and distribution network, and partly for working capital. Meanwhile overall equity was used to finance investment capital of electricity infrastructure development and business risks.

Struktur Modal (Rp Miliar)
Capital Structure (Rp Billion)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
	(Rp Miliar) (Rp Billion)			
Liabilitas	393.778	509.580	454.145	Liabilities
Ekuitas	880.798	804.791	153.304	Equity
Jumlah Lialibilitas dan Ekuitas	1.274.576	1.314.371	607.449	Total Liabilities and Equity

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan menetapkan kebijakan terkait struktur modal yang meliputi:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai perusahaan.
   - Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan penggunaan hutang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas perusahaan.
   - Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.
2. Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai perusahaan dan biaya modal.
3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisa sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh PLN.
5. Perseroan telah memilih kebijakan struktur modal dengan menetapkan batas pemenuhan *covenant* dari para kreditur yang direpresentasikan dalam nilai-nilai rasio DSCR dan CICR.

Capital Structure Policy

The Company set a capital structure related policy covering:

1. The capital structure reflects a balance between financial risk and return to increase Company's value.
   i. This is done by considering proportional debt use to maintain ability in liability payments for interest and principal debt in line with the Company's liquidity management.
   ii. Optimizing economic rentability and owned capital rentability.
2. Capital structure is reviewed by making relationship evaluations between financial leverage, corporate value and capital cost.
3. Capital structure consists of an optimal combination between debt and equity capital which can maximize the Company's value and ensure business development program implementation.
4. The capital structure combination covering the equity to liquidity ratio is set through sensitivity analysis implementation with various core assumptions that could be faced by PLN.
5. The Company has selected a capital structure policy by setting covenant fulfillment limits from creditors represented in DSCR and CICR ratio values.

MODAL KERJA BERSIH

Tahun 2016 modal kerja Perseroan adalah sebesar negatif Rp 20,66 triliun lebih baik dari modal kerja di tahun 2015 yang sebesar negatif Rp40,79 miliar. Peningkatan modal kerja bersih terjadi karena adanya peningkatan aktivitas Perseroan, seperti peningkatan daya listrik dari realisasi pembangunan pembangkit, penambahan pelanggan dan jumlah daya listrik terjual. Selain itu, peningkatan modal kerja bersih ini juga disebabkan oleh penyertaan modal pemerintah.

Naiknya TTL, membuat nilai penjualan PLN meningkat secara substansial berkontribusi terhadap kenaikan piutang usaha *(account receivable)*, sehingga membuat PLN mampu memenuhi kebutuhan modal kerja dari kegiatan operasional.

NET WORKING CAPITAL

In 2016 the Company's working capital was a negative Rp 20.66 trillion, or better than the working capital in 2015 of a negative Rp40.79 billion. The improvement in net working capital was due to increasing Company's activities, such as electricity voltage increasing from realized plant development, additional customers and electricity sold. Moreover, the net working capital increase was also caused by the government's capital injection.

Increasing electricity tariffs (TTL) caused PLN sales value to rise substantially, contributing to increased accounts receivable, which caused PLN to meet its working capital needs from operating activities.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan barang modal dalam proses pembangunan instalasi ketenagalistrikan, Perseroan mengadakan ikatan pengadaan peralatan utama dengan para pemasok utama, umumnya melibatkan kreditor penyandang dana. Ikatan tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya pembangunan instalasi terkait, umumnya pada tahap *engineering, procurement, and construction* (EPC).

MATERIAL COMMITMENT ON CAPITAL GOODS

To fulfill capital goods needs in the electricity installation development process, the Company has main equipment procurement commitments with key suppliers, generally involving financier creditors. The commitments were made during related installation developments, generally in the engineering, procurement, and construction (EPC) phases.

Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, Ikatan dan Kontinjensi dan Perolehan Barang Modal. Beberapa penjelasan menyangkut ikatan tersebut, meliputi:

Material commitments made were recorded and presented in the Consolidated Audited Financial Statements and notes, Commitments and Contigencies, and Capital Goods Acquisition. Several explanations related to the commitments are:

Ikatan material yang dilakukan dimaksud dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian, Ikatan dan Kontinjensi dan Perolehan Barang Modal.

Material commitments made are recorded and presented in the Consolidated Audited Financial Statement and notes, Commitments and Contigencies and Capital Goods Acquisition.

Tujuan ikatan barang modal adalah terkait dengan ikatan proses pembangunan dan pengadaan Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

The aim of the capital goods commitments is related to the development process commitment and procurement of Plants, Transmission and Distribution in fulfilling electricity demand.

Per tanggal 31 Desember 2016, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi adalah sebagai berikut:

Per 31 December 2016, total capital goods acquisition commitments based on contract as related to procurement of plants, transmission and distribution networks are as follows:

Tujuan Transaksi	**Mata Uang** Currency	**Jumlah dalam mata uang asing** Amount in foreign currency	**Setara Rupiah** Rupiah Equivalent	Intereset Transaction
Program Percepatan				Acceleration Program
Kontrak Pembangkitan	US$	126.202.000	1.695.650	Power Plant Contracts
	EUR	8.405.725	119.056	
	JPY		0	
	NZD	542.100	5.074	
	Rupiah	-	2.958.881	
			4.778.661	
Kontrak Transmisi	US$	35.876.613	482.038	Transmission Contracts
	Rupiah		546.944	
	Lain-lain**)EUR		0	
			1.028.983	
Kontrak Konstruksi Rutin	US$	219.567.472	2.950.109	Routine Construction Contracts
	EUR	23.935.370	338.973	
	JPY	4.997.811.234	574.748	
	Rupiah		22.830.191	
	Lain-lain**)			
	Lain-lain**) NZD			
			26.694.020	

*) Dalam nilai penuh | in full amount

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa-Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.486 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Per 31 December 2016, the Company has signed 37 EPC contracts covering 10 power plants with capacity of 7,490 MW in Java – Bali and 27 power plants with capacity of 2,486 MW outside Java - Bali. Based on the EPC contracts, the Company must pay down payments of 15% of contract value and 85% will be funded through bank credit facilities.

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

A transmission contract is a contract to increase and develop new transmission lines and substations in Java and outside Java. The projects are self-funded and bank credit facilities withdrawal.

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

A capital goods procurement commitment for routine construction is a contract which has been signed for additional power plants and development of the transmission and distribution network. These projects are self funded as well as through external parties, through overseas loans, and investment projct aid as part of the state budget.

TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Sejak tahun 2015, Perseroan telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya. Transaksi lindung nilai tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

Hingga berakhirnya tahun buku 2016, total kewajiban Perseroan dalam mata uang asing yang telah dilindungi dengan fasilitas lindung nilai mencapai USD825 juta.

HEDGING TRANSACTION

Since 2015, the Company has made hedging transactions on several commitment and contingency exposures in foreign currencies. Hedging transactions were made according to BUMN Ministerial Regulation No. 09/MBU/2013 on Hedging Transaction General Policy for State-Owned Enterprises, as well as related implementing technical rules.

As at end of 2016 financial year, total Company liabilities in foreign currencies covered by hedging facilities reached USD825 million.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas daya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh. Selain berasal dari penambahan daya masyarakat golongan mampu, pertambahan kebutuhan daya listrik adalah sejalan dengan program peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional, yang ditargetkan mencapai angka 97,4% di akhir tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai sasaran elektrifikasi rasio tersebut, Perseroan menargetkan penambahan daya listrik sebesar 7 GW per tahun.

CAPITAL GOODS INVESTMENT

This type of investment is made to increase voltage capacity to fulfill growing electricity needs. Besides providing for just well-off customers, the electricity needs increase is in line with the national electrification ratio increase program and is targeted to achieve 97.4% at the end of 2019. To achieve the electrification ratio, the Company is adding electricity voltage of 7 GW per year.

Karena itulah, Perseroan terus merealisasikan pembangunan berbagai proyek pembangkit maupun sistem transmisi dan distribusi. Berbagai proyek yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2016 mencakup:

- Pembangunan beberapa instalasi pembangkit listrik baru.
- Pembangunan proyek jaringan transmisi.
- Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi.
- Peningkatan sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan sistem penunjang.

Therefore, the Company continued realizing the development of several plant projects as well as transmission and distribution system expansion. Several projects that were realized in 2016 were:

- Development of several new electricity plant installations.
- Development of transmission network projects.
- Distribution network development implementation.
- Increase of Corporate Information Technology system and supporting system.

Adapun nilai investasi selama kurun waktu 2016 adalah sebagai berikut:

Investment value during 2016 was as follows:

Per Fungsi	Rp Juta Rp Million	Per Function
Pembangkitan PLTA	2.102.414	Hydro Power Plant
Pembangkitan PLTU	870.044	Steam Power Plant
Pembangkitan PLTD	716.355	Diesel Power Plant
Pembangkitan PLTG	12.569.079	Gas Turbine Power Plant
Pembangkitan PLTP	225.025	Geothermal Power Plant
Pembangkitan PLTGU	3.279.922	Combined Cycle Power Plant
Pembangkitan PLTS	3.237	Solar Cell Power Plant
Sistem Transmisi	19.083.083	Transmission System
Sistem Teleinformasi Data	1.282.456	Data Teleinformation System
Sistem Distribusi	17.393.398	Distribution System
Sistem Penunjang	824.250	Supporting System
Jumlah	58.349.262	Total

PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET

Perseroan telah menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2016 sebagai acuan kegiatan usaha pada tahun buku tersebut. Perencanaan tersebut disahkan melalui rapat umum pemegang saham.

Dalam pelaksanaannya, RKAP 2016 telah mengalami perubahan dan mendapat persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui surat Nomor: S-610/MBU/10/2016. Perubahan ini, antara lain mempertimbangkan perkembangan kondisi eksternal dan internal Perseroan.

Berikut ini rincian perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2016.

COMPARISON BETWEEN REALIZATION AND TARGET

The Company designed the 2016 budget and work plan (RKAP) as a business reference for the financial year. The plan was approved in the General Meeting of Shareholders.

In the implementation, the 2016 RKAP experienced changes and was approved by the State-Owned Enterprises Minister through Letter No: S-610/MBU/10/2016. This change considers the development of the Company's external and internal conditions.

The following are the details of comparison between target and realization in 2016.

Ringkasan Capaian Beberapa Target Utama di Keuangan
Achievement Summary of Several Key Financial targets

Keterangan	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Description
			2016	
Pendapatan Usaha	Rp Triliun | trillion	235	223	Revenue
Beban Usaha	Rp Triliun | trillion	262	254	Operating Income
Rugi Usaha	Rp Triliun | trillion	26	32	Operating Loss
Subsidi	Rp Triliun | trillion	67	60	Subsidy
Laba Bersih	Rp Triliun | trillion	16	11	Net Profit

- Pendapatan Penjualan tenaga listrik tidak mencapai target dikarenakan tidak diterapkannya tarif non subsidi untuk pelanggan R1/450-900 VA yang tidak termasuk dalam kategori pelanggan miskin dan rentan miskin, dimana dalam target sudah harus diterapkan sepanjang tahun 2016.

- Electricity Sales revenue did not reach target because non-subsidized tariff was not implemented for those R1/450-900 VA customers who were not categorized as poor and near poor, where in the target it should have been implemented in 2016.

- Beban Usaha berhasil ditekan, sebagai akibat upaya Perusahaan dalam menekan penggunaan bahan bakar minyak.
- Rugi Usaha tidak mencapai target sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya penjualan tenaga listrik akibat tertundanya penerapan tarif non subsidi untuk pelanggan R1/450-900 VA yang tidak termasuk dalam kategori pelanggan miskin dan rentan miskin
- Subsidi Listrik berhasil ditekan dibawah target sebagai hasil upaya Perusahaan menekan biaya bahan bakar minyak.

Laba bersih tidak mencapai target seiring dengan tidak tercapainya target pendapatan dan subsidi.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN AKUNTAN

(i) Pada bulan Januari 2017, Perusahaan telah melakukan penarikan pinjaman senilai Rp5.601.926 untuk fasilitas Pinjaman Perusahaan 2016 dari Bank Mandiri.

(ii) Pada tanggal 9 Januari 2017, Perusahaan telah melakukan penarikan pertama pinjaman IBRD 86100ID. Jumlah penarikan adalah sebesar US$107.650.000. Pinjaman ini sebelumnya telah dinyatakan efektif sejak tanggal 18 November 2016 berdasarkan surat dari World Bank no.CD-254/WB/XI/2016.

(iii) Pada tanggal 10 Januari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjualan bertahap dengan Islamic Development Bank ("IDB") dimana IDB berpartisipasi dalam pendanaan Proyek Peningkatan Jaringan Listrik ("Proyek") dengan cara mendanai pembelian atas peralatan tertentu ("Aset"). Berdasarkan perjanjian ini, IDB menyediakan pendanaan melalui penjualan bertahap yang jumlahnya tidak melebihi US$330.000.000 dan penjualan Aset kepada Perusahaan dimana IDB menunjuk Perusahaan sebagai agen untuk melaksanakan Proyek dan pembelian Aset. Pencairan dana dapat dilakukan dalam tiga tahun sejak pencairan pertama ("Periode Pembangunan"). Biaya modal akan ditentukan oleh IDB berdasarkan jumlah pencairan sampai dengan akhir masa pelaksanaan proyek atau pada saat penjualan terjadi ditambah suku bunga mengambang dari US$ LIBOR enam bulanan +1,3%.

(iv) Pada bulan Januari 2017, Perusahaan telah melunasi obligasi PLN XI tahun 2010 seri A sebesar Rp920.000 dan sukuk ijarah PLN IV tahun 2010 seri A sebesar Rp130.000 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2017.

(v) Pada tanggal 22 Februari 2017 Perusahaan telah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Pajak atas permohonan banding Perusahaan terhadap SKPKB PPh Badan tahun 2012. Hasil putusan tersebut mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan sehingga nilai kurang bayar dalam SKPKB Perusahaan yang semula sebesar Rp1.330.243 ditetapkan menjadi sebesar Rp100.510.

- Operating Expenses were lowered, as part of the Company's efforts in lowering fossil fuel use.
- Operating Loss did not reach target as a consequence of unachieved electricity sales due to the delay in implementation of non-subsidized tariffs for those R1/450-900 customers who were not categorized as poor and near poor.
- Electricity Subsidy was lowered below target ss part of the Company's efforts to reduce fossil fuel use.

Net profit did not achieve target along with the unachieved revenue and subsidy targets.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN AKUNTAN

(i) In January 2017, the Company made withdrawals in the amount of Rp5,601,926 under Corporate Loan 2016 facility from Bank Mandiri.

(ii) On January 9, 2017, the Company has performed its first withdrawal of loan IBRD 86100ID. The withdrawal amounted to US$107,650,000. This loan has previously been declared effective since November 18, 2016 based on the letter from World Bank no.CD- 254/WB/XI/2016.

(iii) On January 10, 2017 the Company entered into an installment sale agreement with Islamic Development Bank ("IDB") in which IDB participate in the financing of the Power Grid Enhancement Project (the "Project") by financing the purchase of certain equipments (the "Asset"). Under this agreement, IDB provide the financing of the Asset through installment sale for an amount not exceeding US$330,000,000 and the sale of the Asset to the Company in which IDB appointed the Company as its agent for implementing the Project and purchasing the Asset. The disbursements are made available until three years since the first disbursement (the "gestation period"). The capital cost will be determined by IDB based on the total disbursements at the end of the gestation period or the time of sale plus a floating mark up rate of US$ LIBOR six months +1.3%.

(iv) In January 2017, the Company has fully settled the PLN XI Bonds 2010 series A amounting to Rp920,000 and sukuk ijara PLN IV 2010 series A amounting to Rp130,000 which were due on January 12, 2017.

(v) On February 22, 2017 the Company received a copy of the Tax Court's verdict regarding the Company's appeal over the SKPKB of 2012 fiscal year Corporate Income Tax. The verdict has partly granted the Company's appeal on that the underpayment in the Company's SKPKB which was previously stated as Rp1,330,243 was stipulated to become Rp100,510.

(vi) Pada tanggal 27 Februari 2017, berdasarkan rapat pemegang saham PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB") dan PT Indonesia Power ("IP"), pihak berelasi, sepakat untuk membentuk entitas anak yang ruang lingkup kegiatan utamanya bergerak dibidang penyediaan suku cadang pembangkitan tenaga listrik. Dengan modal dasar sebesar Rp600.000, PJB akan menempatkan modal sebesar Rp76.500 dan IP Sebesar Rp73.500 sehingga porsi kepemilikan Perusahaan atas entitas anak adalah sebesar 51%.

(vii) Pada bulan November 2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas berbagai Pajak Penghasilan ("PPh") tahun 2013 sebesar Rp3.319.660. Atas SKPKB tersebut, Perusahaan telah melakukan pemindahbukuan dari pajak dibayar dimuka atas PPh 25/29 sebesar Rp690.012. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada bulan Pebruari 2017.

(viii) Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK menerbitkan POJK No.6 Tahun 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016.

(ix) Perusahaan telah melakukan pembayaran utang pajak dan uang tebusan kepada Kas Negara sebesar Rp3.644.981 dalam rangka keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sehubungan keikutsertaan Perusahaan dalam Pengampunan Pajak tersebut belum diterbitkan.

(vi) Based on shareholder circular dated February 27, 2017, PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB") and PT Indonesia Power ("IP"), related party, agreed to establish a subsidiary with scope of its activities to provide spare parts for power plant. With share capital amounted to Rp600,000 PJB will subscribed paid - in capital amounting to Rp76,500 and IP amounting to Rp73,500 which giving the Company 51% share of ownership in newly subsidiary.

(vii) In November 2016, the Company received several tax assessment letters for underpayment ("SKPKB") for various income tax ("PPh") for fiscal year 2013 amounting to Rp3,319,660. For those SKPKB, the Company has partly overbooking from income tax art 25/29 amounted to Rp690,012. The Company has submitted objection letter for those SKPKB on February 2017. (viii) Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK menerbitkan POJK

(viii) On March 1, 2017, the FSA issued POJK No.6 Year 2017 regarding Accounting Treatment on Transactions under the Power Purchase Agreement. The Company decided to implement POJK No.6 prospectively since January 1, 2016.

(ix) The Company has made payments for tax payables and compensation to State Treasury amounting to Rp3,644,981 with respect to the Company's participation in Tax Amnesty. Until March 30, 2017, the Tax Amnesty Approval Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia regarding the Company's participation in Tax Amnesty has not been issued.

PROSPEK USAHA 2017

Penyusunan prospek usaha Perseroan ini telah memperhatikan sejumlah variabel eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja usaha Perseroan pada tahun 2017. Baik indikator-indikator ekonomi maupun ekspektasi yang telah disusun oleh pemerintah sebagai sumber resmi. Apalagi, Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang memiliki fungsi sosial dan pada saat bersamaan, melakukan aktivitas usaha sebagai entitas bisnis.

Untuk tahun 2017, pemerintah menyusun ekspektasi yang cenderung konservatif dibandingkan proyeksi tahun 2016. Seperti tampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2017, target pertumbuhan adalah 5,1%. Sementara pada APBN 2016 ditargetkan 5,3%.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, patokannya sebesar Rp13.300 per dolar. Patokan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun APBN 2016 yang Rp13.900 per dolar.

Sedangkan harga minyak mentah dipatok US$45 per barel. Acuan tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2016 yang US$50 per barel.

2017 BUSINESS PROSPECTS

The Company's business prospect plan has taken into account several external variables which potentially can affect the Company's business performance in 2017. Both the economic indicators and expectations have been made by the government as an official source. Moreover, the Company is a state-owned company with a social function and at the same time, conducts business activities as a business entity.

For 2017, the government set more conservative expectations compared to 2016 projections. As seen in the 2017 State Budget (APBN), the growth target is 5.1%. Meanwhile in the 2016 APBN it was 5.3%.

The Rupiah exchange rate against the US dollar was made at Rp13,300 per dollar. The rate was lower than the 2016 APBN of Rp13,900 per dollar.

Meanwhile the crude oil price was set at US$45 per barrel. The reference was lower than the 2016 APBN of US$50 per barrel.

Memperhatikan kondisi di atas, Perseroan pada tahun 2017 tampaknya masih akan menghadapi kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Kendati demikian, Perseroan tetap optimistis dalam menghadapi tahun 2017.

Considering the conditions above, the Company in 2017 will still face economic conditions that are not fully conducive. Nevertheless, the Company remains optimistic in facing 2017.

Perseroan telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2017. Beberapa di antaranya adalah:

The Company has designed several quantitative targets stated in the 2017 Work and Budget Plan (RKAP). Several of these are:

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi 2016 Realization 2016	Target 2017 Target 2017	Description
Penjualan Tenaga Listrik	TWh	216	234	Electricity Sales
Penambahan Pelanggan	Juta Pelanggan	3.1	3.4	Additional Customers
Penambahan Daya Tersambung	MVA	7.764	9.474	Additional Connected Power
Pendapatan Penjualan tenaga Listrik	Rp Triliun	214	277	Electricity Sales Revenue
Laba Usaha setelah subsidi	Rp Triliun	29	38	Business Profit after subsidy
Laba Bersih	Rp Triliun	11	16	Net Profit

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah:

1. Menyelesaikan program 35.000 MW termasuk penyelesaian *Fast Track Program* (FTP) I dan FTP II.
2. Mengembangkan *Strategic partnership* yang me-*leverage* nama besar dan pengalaman PLN dalam membangun tambahan kapasitas.
3. Mengembangkan Mobile Power Plant untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik jangka pendek.
4. Melaksanakan program *Demand Side Management* yang terintegrasi dengan struktur tarif (insentif-disinsentif).
5. Mengupayakan struktur tarif listrik yang dapat memenuhi *revenue requirement* untuk kegiatan operasi dan investasi.
6. Melanjutkan perbaikan kemampuan meminjam (*Debt Capacity*) dan mendapatkan pinjaman dengan biaya yang paling efisien bagi PLN.
7. Menurunkan non *fuel cost*.
8. Menurunkan susut jaringan.
9. Menciptakan sistem *Supply Chain Management* yang terintegrasi.
10. Melayani dan mencukupi kebutuhan permintaan listrik yang tinggi termasuk melayani daftar tunggu, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di propinsi tertinggal sesuai dengan pertumbuhan permintaan (*demand*), ketersediaan pembangkit, dan kemampuan pendanaan.

To achieve the strategic targets, the Company has several priority programs. Among these are:

1. Completing the 35,000 MW program including Fast Track Program (FTP) I and FTP II.
2. Developing Strategic partnerships which leverage PLN's experience and brand in building additional capacity.
3. Developing Mobile Power Plants to solve lack of electricity supply in the short term.
4. Implementing Demand Side Management programs which are integrated with the tariff structure (incentive-disincentive).
5. Managing an electricity tariff structure which can meet revenue requirements for operating and investment activities.
6. Continuing improving Debt Capacity and getting loans with the most efficient cost for PLN.
7. Reducing non-fuel cost.
8. Reducing network losses.
9. Creating integrated Supply Chain Management system.
10. Serving and meeting high electricity demand including serving waiting list, and increasing electrification ratio in disadvantaged provinces in line with demand growth, plant availability, and funding capacity.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Perseroan memiliki kebijakan pembagian dividen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, realisasi pembagian dividen setiap tahun operasional ditetapkan dalam RUPS untuk tahun buku bersangkutan. Adapun kebijakan umum mengenai pembagian dividen laba usaha mencakup:

DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

Dividend Policy

The Company has a dividend policy set out in the Company's Articles of Association. However, the actual distribution of dividends each operating year is set at the GMS for the financial year concerned. The general policy regarding dividend distribution of business profit includes:

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Laba bersih tersebut akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
3. Dividen harus sudah diambil dalam waktu maksimal lima tahun, atau jika tidak diambil akan dimasukkan ke dalam dana cadangan, kecuali dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya dapat memberikan tantiem kepada Komisaris dan Direksi jika seluruh akumulasi kerugian telah terkompensasikan oleh akumulasi laba tahun-tahun selanjutnya.

1. The Company's net profit for one financial year as stated in the balance sheet and income statement approved by the General Meeting of Shareholders is divided accordingly as determined by the meeting.
2. The net profit will be distributed for reserves, dividends and others with respective percentages determined each year by the GMS.
3. Dividends must be taken within a maximum of five years, otherwise will be put into a reserve fund, except for dividends to the Government of the Republic of Indonesia.
4. The Company can only give a bonus to the Board of Commissioners and the Board of Directors if all accumulated losses have been compensated by the cumulative gains in the following year.

Total Dividen Dibagikan

Pada tahun 2016, Perseroan membagikan dividen kepada pemerintah sebesar Rp2.137,75 miliar yang disisihkan dari laba bersih tahun 2015. Kebijakan ini merupakan keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016.

Total Dividends Paid

In 2016, the Company shared dividends to the government of Rp2,137.75 billion set aside from 2015 net profit. The policy was decided in the Annual Report Approval GMS and 2015 Financial Report Approval which took place on 30 June 2016.

Tahun Year	**Jumlah Dividen (Rp miliar)** Number of Divident (Rp billion)	**Dividen Per Lembar Saham** (Rp) Dividend Per Share (Rp)	**Payout Ratio** Payout Ratio	**Tanggal Pengumuman Pembayaran** Payment Announcement Date	**Realisasi Pembayaran (Rp triliun)** Payment Realization (Rp billion)
2016	2.137,75	38.400	29,51%	29 Juli 2016 29 July 2016	Pembayaran dilakukan tiga tahap: 1. 29 Juli 2016 Rp712,58 2. 26 Agustus 2016 Rp712,58 3. 28 September 2016 Rp712,58 Payments are made in three stages: 1. July 29, 2016 Rp712.58 2. August 26, 2016 Rp712.58 3. September 28, 2016 Rp712.58
2015	3.962,4 miliar	85.774	44,13%	26 Juni 2015 26 June 2015	Pembayaran dilakukan dalam 4 tahap: 1. 26 Juni sebesar Rp990,60 miliar. 2. 22 Juli 2015 sebesar Rp600,00 miliar. 3. 21 Agustus 2015 sebesar Rp990,60 miliar. 4. 22 September 2015 sebesar Rp1.381,20 miliar. Payments are made in four stages: 1. June 26, 2015 Rp990.60 2. July 22, 2015 Rp600.00. 3. August 21, 2015 Rp990.60 4. September 22, 2015 Rp1.381.20

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN / MANAJEMEN

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Negara RI, sehingga tidak ada program penawaran saham untuk karyawan maupun untuk manajemen.

EMPLOYEE / MANAGER SHARE OWNERSHIP PROGRAM

PT PLN (Persero) is a 100% SOE whose shares are owned by the RI Government, so there is no share ownership program offered to employees or management.

REALISASI PENGGUNAAN DANA OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Pada Tahun 2015 dan 2016, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi maupun efek lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Penerbitan obligasi dan efek lainnya (Sukuk Ijarah) terakhir dilakukan pada tahun 2013. Seluruh dana penerbitan obligasi/Sukuk Ijarah telah digunakan sebagaimana dijelaskan pada Prospektus penerbitannya.

USE OF FUNDS RAISED FROM BONDS AND OTHER SHARES

In 2015 and 2016, the Company did not issue any bonds or other shares to finance electricity infrastructure construction. The most recent issuance of bonds or other shares (Ijarah Sukuk) was in 2013. All bonds/Ijarah Sukuk proceeds have been used as elaborated in the issuing Prospectus.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak ada transaksi benturan kepentingan selama periode pelaporan.

MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST

There were no transactions with conflict of interest reported during the reporting period.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (AFILIASI)

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan anak usaha melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi (hubungan afiliasi). Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (AFFILIATES)

In business, the Company and its subsidiaries implement certain transactions with related parties (affiliates). All significant transactions with parties with special relations to the Company, either under the same or different terms and conditions with transactions with third parties, have been disclosed in the notes to consolidated financial statements.

Sifat Hubungan Berelasi

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan.
3. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
4. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Nature of Related Party Transactions

1. The Government represented by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is the Shareholder of the Company and State-Owned Enterprises (SOE).
2. The Company is related with other SOEs owned by the Ministry of Finance.
3. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).
4. Membership of the Boards of Commissioners and Directors are members of the key management of the Company and its subsidiaries.

Ketentuan Transaksi Berelasi

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan, meliputi:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.

Provisions of Transactions with Related Parties

PLN adopted the following policies in conducting transactions with related parties, including:

1. Product and service sales with affiliates are assigned based on sales contracts, which commonly use the prevailing market price plus a previously agreed specific margin.
2. The shipment of fuel and spare parts conducted by affiliates is assigned based on the shipping contract signed and negotiated together in consideration of the costs which may arise, plus a specific margin.

3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi term dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

3. Funds are allocated in consideration of requirements, mutual agreement, and the Company's optimal benefit.
4. Loans are acquired through a negotiation of terms and conditions which will provide optimal benefit to the Company's operational interest.

Hingga akhir tahun buku 2016, transaksi dengan pihak berelasi yang masih berjalan adalah:

Hingga akhir tahun buku 2016, transaksi dengan pihak berelasi yang masih berjalan adalah:

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Saldo / Balance	
		Nature of Relationship	Nature of Transaction	Kas/Cash	Hutang/Debt
1	Pemerintah Republik Indonesia Governance of the Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir Ultimate Shareholder	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan	Rp98.001.768,00	-
2	Badan Usaha Milik Negara Stated owned enterprises	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	-	Rp5.659.324,00	-
3	PT SMI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank Receipt of non-bank government financial institution	-	Rp8.421.243,00
4	Bank Rakyat Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	-	Rp23.143.505,00
5	Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	-	Rp1.438.805,00
6	Bank Negara Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans	-	Rp12.097.832,00

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Saldo / Balance	
		Nature of Relationship	Nature of Transaction	Kas/Cash	Hutang/Debt
7	Bank Tabungan Negara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents	Rp1.003.076,00	-
8	Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	-	Rp2.249.085,00
9	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants	-	Rp26.691.758,00
10	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	-	Rp5.024.859,00
11	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	-	Rp7.798.710,00
12	PT Wijaya Karya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services transaction	-	Rp11.393,00
13	Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp202.558,00
14	PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Engineering services, survey and coal measurement	-	Rp43.419,00
15	PT Jakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara Fuels and coals transportation services transaction	-	Rp3.646,00

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction	Saldo / Balance Kas/Cash	 Hutang/Debt
16	PT Surveyor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Engineering services, survey and coal measurement	-	Rp8.325,00
17	PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels	-	Rp270.828,00
18	PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	-	Rp8.978.148,00
19	PT Geo Dipa Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp648.151,00
20	PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp347.739,00
21	PT Perta Daya Gas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loan	Rp260.085.00	-
22	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang Purchase of electricity and issuance of long-term loan	-	Rp(219.525,00)
23	PT Tanjung Kasam Power	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp(60.019,00)
24	PT Dalle Energy Batam	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp(588.346,00)

No.	Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi	Saldo / Balance	
		Nature of Relationship	Nature of Transaction	Kas/Cash	Hutang/Debt
25	PT Mitra Energi Batam	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp(15.958,00)
26	PT Sumber Segara Primadaya	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp3.906.455,00
27	PT Bajradaya Sentranusa	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp837.456,00
28	PT Bukit Pembangkit Innovative	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	-	Rp444.259,00

Penanganan Benturan Kepentingan

Perseroan telah memiliki prinsip dasar sebagai upaya pencegahan benturan kepentingan, yaitu:

1. Apabila pegawai berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal pegawai berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung dan/atau Auditor memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/atau Auditor.
3. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:
   a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana pegawai memiliki kepentingan;
   b. Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan;
   c. Membatasi akses pegawai atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
   d. Mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
   e. Mengintensifkan pengawasan terhadap pegawai tersebut;

Tata Cara Penanganan Terjadinya Situasi/Kondisi Benturan Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, sebagai berikut:

Conflict of Interest Handling

The Company has basic principles to prevent conflict of interest:

1. If employees are in situations that potentially could create Conflict of Interest, then based on their own evaluation they sign the Declaration Letter on Potential Conflict of Interest.
2. If employees on their own evaluation do not feel there is potential Conflict of Interest, but based on the view of the Direct Superior and/or Auditor there is potential Conflict of Interest, then the judgement of Superior or Auditor will be used.
3. A series of actions that should be made as further steps in handling potential Conflict of Interest which can be used as guidance are:
   a. Self withdrawal from decision making process in which employees have interest;
   b. Transferring the task and responsibility of related employees;
   c. Limiting employee access on certain information if they have interest;
   d. Employee mutation to other positions without conflict of interest;
   e. Intensifying supervision of the employees.

Procedures for Handling Conflict of Interest Situation/ Condition in Decision and/or Action Making, as follows:

1. Apabila pegawai berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal pegawai berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung dan/atau Auditor memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/atau Auditor.
3. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:
   a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana pegawai memiliki kepentingan.
   b. Mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.
   c. Membatasi akses pegawai atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
   d. Mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
   e. Mengintensifkan pengawasan terhadap pegawai tersebut.
4. Keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas selain diberikan kepada pelapor juga disampaikan kepada Auditor untuk dilakukan pengawasan.

1. If employees are in situations that potentially could create Conflict of Interest, then based on their own evaluation they sign the Declaration Letter on Potential Conflict of Interest.
2. If employees on their own evaluation do not feel there is potential Conflict of Interest, but based on the view of the Direct Superior and/or Auditor there is potential Conflict of Interest, then the judgement of Superior or Auditor will be used.
3. A series of actions that should be made as further steps in handling potential Conflict of Interest which can be used as guidance are:
   a. Self withdrawal from decision making process in which employees have interest;
   b. Transferring the task and responsibility of related employees;
   c. Limiting employee access on certain information if they have interest;
   a. Employee mutation to other positions without conflict of interest;
   e. Intensifying supervision to the employees.
4. Decision from assessment review of conflict of interest as stated in item 3 is given to the informant as Auditor to conduct supervision.

Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengawasan:

Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan *responsibel* dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:

1. Menugasi auditor yang memiliki hubungan afiliasi dengan auditi/mitra kerja;
2. Menugasi auditor yang diduga/patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap calon auditi/mitra kerja.
3. Menugasi auditor dalam satu tim penugasan yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak.
4. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memanfaatkan, menyebarkan, dan memberikan akses informasi dan data yang diperoleh.
5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta dan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material.
6. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan sebelum penyampaian resmi kepada auditi/mitra kerja.
7. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam penentuan status tindak lanjut temuan pengawasan.

Conflict of Interest in Supervision Follow-Up and Implementation

Supervision implementation must be made in professional, with-integrity, customer oriented, conscience-based and common sense, independent and responsible manner by avoiding conflict of interest, without (being):

1. Assigning auditors who are affiliated with auditee or business partners;
2. Assigning auditors who allegedly/are suspected to have personal interest with potential auditee/business partner.
3. Assigning auditors in one assignment team who have marital relations, siblings, as well as parents and children.
4. Affected by personal interest in supervision implementation by taking benefit, spreading, and giving information access and data obtained.
5. Affected by personal interest in supervision implementation by changing/replacing/hiding relevant, competent, sufficient, and material facts and evidence.
6. Affected by personal interest in presenting supervision result reporst before official report to auditee/business partners.
7. Affected by personal interest in giving privilege in determining follow-up status of supervision findings.

8. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk mengurangi temuan tanpa didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
9. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menentukan auditi/mitra kerja yang akan dipantau.
10. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar,dan prosedur yang ditetapkan.

8. Affected by personal interest in relaying findings without support from relevant, competent and sufficient evidence.
9. Affected by personal interest in determining auditee/ business partners who will be monitored.
10. Affected by personal interest in making supervision which does not suit the set norms, standards, and procedures.

KERJA SAMA

Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendukung pencapaian kegiatan usaha. Kerja sama ini tidak terbatas pada pihak berelasi, namun juga terhadap pihak lain. Berikut ini rincian kerja sama yang telah direalisasikan:

Kerja Sama dengan BUMN

Kerja sama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Adapun kerja sama tersebut adalah:
1. Bidang pelayanan melalui *call center* 123 dengan PT Telkom. Sedang dikembangkan kerja sama dalam bidang telekomunikasi baik dengan PT Telkom maupun PT INDOSAT melalui jaringan listrik dan fiber optik PLN.
2. Pembelian tenaga listrik dengan Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) dan PT Pusri.

COOPERATION

In 2016, the Company cooperated with several parties to support business target achievements. The cooperation was not limited to related parties, but also to other parties. Following are the realized cooperations:

Cooperation with SOEs

Cooperation with SOEs was both conducted by PT PLN (Persero), PLN Units and Subsidiaries and were continued and upgraded.

The cooperation included:
1. Service through call center 123 with PT Telkom. A cooperation in telecommunication with PT Telkom and PT INDOSAT through PLN electricity and fiber optic network is being developed.
2. Electricity purchase with Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) and PT Pusri.

3. Pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dengan PERTAMINA dan pemenuhan sebagian kebutuhan gas dengan PT PGN.
4. Pemenuhan kebutuhan batu bara dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam.
5. Pemanfaatan dan pengusahaan aset PLN seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati) right of way di PLN Wilayah Sulselra, PLN Distribusi Jatim dengan PT TELKOM dan Indovision.
6. Pelayanan pasokan listrik ke kawasan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II.
7. PLN dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW.
8. Penandatanganan MoU dan Perjanjian Induk: Sinergi BUMN Integrasi Logistik - Maritim untuk Akselerasi Konektivitas Nasional.

Kerja sama dengan Mitra Usaha lain

Kerja sama dengan mitra usaha non BUMN baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Adapun kerja sama tersebut adalah:

1. Pelatihan, pengembangan SDM dan rekrutmen pegawai dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti ITB, ITS, UI, UGM.
2. Kerja sama proyek konversi BBM menjadi BBN antara PT PLN dengan PT Wilmar nabati sebagai pemasok BBN.
3. Pembayaran rekening listrik di payment point untuk meningkatkan pelayanan dengan Bank Swasta, Bank Pemerintah dan KUD.
4. Pelaksanaan operation maintenance dengan PT Siemens Indonesia di PLTG Muara Tawar.
5. Penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain : Biro Pusat Statistik, Balitbang Depkes, BATAN, BPPT, LIPI, Puslitbang Geologi dan LAPAN.
6. PLN menjalin kerja sama dengan Tranparency International Indonesia (TII) yaitu jaringan organisasi global anti korupsi. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya sungguh-sungguh menerapkan praktik GCG dan anti korupsi.
7. PLN menjalin kerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak tentang pengoptimalan penerimaan pajak disisi konsumen listrik.
8. PLN dan Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
9. PLN menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dalam hal menjaga pasokan batu bara.
10. Penandatanganan MoU Kerja sama PLN dengan Universitas Cendrawasih, Politeknik Jayapura, Politeknik Manado, Politeknik Maluku, Politeknik NTT.

3. Fulfillment of all fuel needs with PERTAMINA and fulfillment of part gas needs with PT PGN.
4. Fulfillment of coal needs with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam.
5. Utilization and cultivation of PLN assets such as dock (PLTU Gresik and PLTU Grati) right of ways in PLN Sulselra Region, PLN East Java distribution with PT TELKOM and Indovision.
6. Electricity supply service to ports managed by Pelindo II.
7. PLN and PT LEN Industri (Persero) signed sale and purchase agreement of PLTS Kupang with 5 MW capacity.
8. Signing MoU and Master Agreement: SOE Synergy on Logistic – Maritime Integration for National Connectivity Acceleration.

Cooperation with Other Business Partners

Cooperation with non-SOE business partners conducted by PT PLN (Persero), PLN Units and Subsidiaries was continued and improved. The cooperation included:

1. Training, HR development and employees recruitment with educational institutions such as ITB, ITS, UI, UGM.
2. Cooperation on BBM to BBN conversion between PT PLN and PT Wilmar Nabati as BBN supplier.
3. Electricity bills payment in payment point to increase service with Private Banks, State Banks and KUD.
4. Maintenance operation implementation with PT Siemens Indonesia in PLTG Muara Tawar.
5. Research with government or private institutions, such as Statistics Bureau, Balitbang Depkes, BATAN, BPPT, LIPI, Puslitbang Geologi and LAPAN.
6. PLN cooperated with Transparency International Indonesia (TII), an anti-corruption global organization network. This cooperation aims to ensure PLN fully implements GCG and anti-corruption practices.
7. PLN cooperated with Tax Directorate General on optimizing tax revenue from electricity customers.
8. PLN and Attorney General's Office signed joint agreements on legal issues handling on civil cases and state administration.
9. PLN signed memorandum of understanding with TNI in maintaining coal supply.
10. MoU signing of Cooperation between PLN and Universitas Cendrawasih, Politeknik Jayapura, Politeknik Manado, Politeknik Maluku, Politeknik NTT.

Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Unit PLN dan Anak Perusahaan adalah:

1. HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*), pertemuan dilakukan setiap tahun diantara negara anggota ASEAN secara *alphabetis*.
2. Kerja sama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu : *Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality* dan *Human Resource.*
3. Kegiatan tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (*Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting*) yang diadakan setiap tahun.
4. PLN dipercaya sebagai sebagai ketua ASEAN *Power Grid Consultative Committee* dan tergabung dalam IERE (*International Electric Research Exchange*)
5. Kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Sumatera–Peninsular (Malaysia);
6. Kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan Serawak *Electricity Suply Company* (SESCO) dalam rangka interkoneksi Kalimantan-Serawak
7. Perusahaan multinasional secara *job order* yang bersifat tidak mengikat, antara lain: *Sulzer Hydro* untuk perbaikan PLTA, Yokogawa untuk perbaikan sistem control industri, *Sulzer Pump* untuk perbaikan pompa, Vatech-Elin untuk pembuatan sistem kontrol PLTA, Entec/GTZ untuk pembuatan PLTMH, Hickam Industries untuk perbaikan PLTG, Thomassen untuk perbaikan PLTG, *Quality Assurance Services* untuk sertifikasi ISO, *Cast Iron Welding* Ltd. untuk pengelasan *cast iron*, *Global Crankshaft Services* Ltd. untuk *regrindingcrankshaft* dan *Suzler Metco* untuk *metal coating*;
8. Indramayu *Coal Fired Power Plant Project* antara JICA dengan PT PLN (Persero), BAPPENAS, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi.
9. PLN menjalin kerja sama di bidang kelistrikan dengan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Penandatanganan MoU ini membuka kemungkinan kerja sama segala bidang untuk keuntungan kedua belah fihak, termasuk kemungkinan interkoneksi Kalimantan Utara dengan Sabah.
10. PLN menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis *Electricité de France (EDF)* dan *Agence Française de Développement (AFD).* Kemitraan antara PLN dan EDF bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia.
11. PLN menandatangani perjanjian kerja sama dengan *State Grid Corporation of China* tentang pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Indonesia.

Foreign Cooperation

Cooperation with foreign parties conducted by PT PLN (Persero), PLN Units and Subsidiaries were:

1. HAPUA, (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities), meeting is conducted annually among ASEAN countries.
2. The cooperation covers 8 projects: Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality and Human Resources.
3. The activity is reported to SOME/AMEM (Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting) held annually.
4. PLN is trusted as chairman of ASEAN Power Grid Consultative Committee and joined in IERE (International Electric Research Exchange).
5. Cooperation between PT PLN (Persero) and Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia in the interconnection of Sumatra–Peninsular (Malaysia).
6. Cooperation between PT PLN (Persero) and Serawak Electricity Supply Company (SESCO) in Kalimantan-Serawak interconnection.
7. Multinational companies in not-binding job order, among others are: Sulzer Hydro for PLTA improvement, Yokogawa for industry control system improvement, Sulzer Pump for pump improvement, Vatech-Elin for PLTA control system creation, Entec/GTZ for PLTMH creation, Hickam Industries for PLTG improvement, Thomassen for PLTG improvement, Quality Assurance Services for ISO certificate, Cast Iron Welding Ltd. for cast iron welding, Global Crankshaft Services Ltd. for crankshaft regrinding and Suzler Metco for metal coating.
8. Indramayu Coal Fired Power Plant Project between JICA and PT PLN (Persero), BAPPENAS, and Energy and Mineral Resources Ministry.
9. PLN made cooperation in electricity with Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). The MoU signing opens cooperation in all sectors for both parties' benefits, including potential interconnection of North Kalimantan and Sabah.
10. PLN signed partnership program agreement with French electrical company Electricité de France (EDF) and Agence Française de Développement (AFD). The partnership between PLN and EDF is aimed at developing electricity sector development and producing low carbon emissions in Indonesia.
11. PLN signed cooperation with State Grid Corporation of China on electricity transmission network development in Indonesia.

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

1. Perpres 4/2016 (tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan)
   Perpres ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan tenaga listrik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) adalah memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Perpres ini juga menyebutkan cara meningkatkan kemampuan pendanaan PLN melalui restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi aset finansial PLN, lindung nilai (*hedging*), *refinancing*, pemanfaatan laba usaha dengan menekan *dividend payout ratio* seminimal mungkin.

   Peraturan ini berdampak pada kemampuan PLN dalam melakukan akselerasi implementasi pembangunan program 35.000 MW terutama dalam akuisisi lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan memperkuat posisi keuangan Perusahaan.

2. Permen ESDM 3/2015 (tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik)
   Permen ini mengatur prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan tenaga listrik dari PLTU, PLTG, PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN (Persero) melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Peraturan ini berdampak pada kemampuan PLN dalam membeli dan menentukan harga patokan pembelian tenaga listrik dari IPP tanpa persetujuan Menteri ESDM, sehingga dapat mempercepat berjalannya program 35.000 MW. Dalam Permen tersebut, harga pembelian listrik telah ditetapkan pada harga patokan tertinggi untuk tiap jenis pembangkitnya.

3. Permen ESDM 10/2017 (tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)
   Permen ini membatasi jangka waktu Power Purchase Agreement maksimal 30 tahun, sehingga setelah waktu tersebut pembangkit listrik milik swasta harus diserahkan kepada negara. Peraturan ini berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan karena dalam Permen ini, mengatur pembelian tenaga listrik di atas harga yang telah ditetapkan dalam PPA apabila dapat mempercepat jadwal operasi secara Commercial Operation Date (COD).

CHANGES IN REGULATIONS WHICH SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

1. Presidential Regulation 4/2016 (on Electricity Infrastructure Development Acceleration)
   This regulation aims to accelerate electricity supply to support economic growth. The government's support provided to PT PLN (Persero) is in form of collateral, permit and non-permit acceleration, primary energy provision, spatial, land procurement, and obstacles and issues handling, as well as handling of issues faced. The Regulation also states the way to increase PLN's funding ability through funding restructuring by optimizing PLN financial assets, hedging, refinancing, business profit utilization by reducing dividend payout ratio as little as possible.

   This regulation has an impact on the acceleration of the infrastructure development of gas power plant realization at the mouth of the well.

2. ESDM Ministerial Regulation 3/2015 (on Electricity Purchase Procedure)
   The regulation manages electricity purchase procedure and electricity benchmark price from PLTU, PLTG, PLTMG, and PLTA by PT PLN (Persero) through direct selection and designation. In this regulation, PLN can buy electricity from IPP and can decide benchmark price without approval from Energy Ministry, thus accelerating the 35,000 MW program. In the regulation, electricity purchase price has been set in the highest benchmark price for every plant.

3. ESDM Ministerial Regulation 10/2017 (on Principles in Electricity Buy Sell Agreement)
   This regulation limits time period of Power Purchase Agreement to maximum 30 years, after which the private-owned power plant must be handed over to the government. In addition, the Regulation also manages incentives to purchase electricity above the set price in PPA if it can accelerate operating schedule according to Commercial Operation Date (COD).

4. Permen ESDM 11/2017 (tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik)
   Permen ini mendorong pemanfaatan gas bumi di mulut sumur (*wellhead*) untuk pembangkit tenaga listrik. Pengadaan pembangkit listrik di mulut sumur gas bumi dapat dilakukan dengan skema penunjukan langsung dan pelelangan umum. Penunjukan langsung dapat dilakukan pada harga gas bumi paling tinggi 8% *Indonesian Crude Price* (ICP)/MMBTU dan *Spesific Fuel Consumption* (SFC) setara minyak solar 0,25 liter/kWh. Sementara itu, pelelangan dapat dilakukan pada harga gas bumi lebih tinggi dari 8% dari ICP/MMBTU.

   Peraturan ini berdampak pada percepatan realisasi pembangunan infrastruktur pembangkit berbahan bakar gas bumi di mulut sumur.

4. ESDM Ministerial Regulation 11/2017 (on Natural Gas Use for Power Plants) This regulation encourages natural gas use in wellhead for power plants. Power plant procurement in natural gas wellhead can be made in direct appointment scheme and general auction. Direct appointment can be made in the highest natural gas price 8% Indonesian Crude Price (ICP)/ MMBTU and Specific Fuel Consumption (SFC) equal to diesel fuel 0.25 liter/ kWh. Meanwhile, auction can be made in natural gas price higher than 8% of ICP/MMBTU.

   This regulation has an impact on the acceleration of the infrastructure development of gas power plant realization at the mouth of the well.

5. Permen ESDM 12/2017 (tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik)
   Permen ini mengatur kewajiban PLN dalam pembelian tenaga listrik pada pembangkit sumber energi baru terbarukan yang efisien, seperti PLTS, PLTB, PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, dan PLTP. Peraturan ini berdampak pada kemampuan PLN untuk membeli tenaga listrik bersumber energi baru terbarukan paling tinggi 85% dari Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

5. ESDM Ministerial Regulation 12/2017 (on Renewable Energy Source Use for Electricity Procurement) This regulation aims to manage PLN duty in electricity purchase in efficient renewable energy source plants, such as PLTS, PLTB, PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, and PLTP. This regulation manages the purchase of renewable energy-sourced electricity the highest 85% of Plant Production Cost in local electricity system.

6. Kepmen ESDM 5899 K/20/MEM/2016 (tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025)
   Kepmen ESDM ini mengatur Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2016-2025. Pada Kepmen ini, bauran energi dari energi baru terbarukan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 25%. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka bauran energi gas akan ditingkatkan menjadi 29,4% dari rencana awal 24,3%.

   Peraturan ini memberikan panduan kepada PLN dalam menyusun strategi pembangunan usaha hingga tahun 2025.

6. ESDM Ministerial Regulation 5899 K/20/MEM/2016 (on Approval of Electricity Procurement Business Plan 2016-2025)
   This ESDM ministerial regulation manages Approval of Electricity Procurement Business Plan of PT PLN (Persero) 2016-2025. In the Ministerial Regulation, the fuel mix from renewable energy in 2025 is targeted at 25%. If it is not achieved, then gas fuel mix will be increased to 29.4% from initial plan of 24.3%.

   This regulation gives PLN a guide in arranging business development strategy until 2025.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Dalam periode berjalan, Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru dan revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY IMPLEMENTED IN LAST FINANCIAL YEAR

In the current period, the Company and subsidiaries have implemented the new and revised Indonesian Financial Accounting Standard ("PSAK") as well as Indonesian Financial Accounting Interpretation ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Accountant Association ("DSAK- IAI") which are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on 1 January 2016.

Standar baru dan revisi atas standar yang berlaku berikut telah diterbitkan dan bersifat wajib bagi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak:

A. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/ POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa.

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengijinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (catatan 3.l), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayaran Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut.

New standards and revisions to these existing standards have been published and are mandatory for the Company's consolidated financial statements for period beginning on or after January 1, 2016, but do not have material impact to the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries:

A. Implementation on Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.04/2017 on Treatment for Accounting or Transaction Based on Electricity Power Buy and Sell Agreement ("POJK No.6")

The Company and subsidiaries hold electricity power buy and sell agreement: the Electricity Power Buy and Sell Agreement ("PPA") and Energy Sales Contract ("ESC"), with suppliers and Independent Power Producer ("IPP"). IPP is the holder of Electricity Business License for public interest, which can be handed to other entities with responsibility to produce electricity for public interest.

Before 1 January 2016, the Company and subsidiaries implemented ISAK 8: Determining if an Agreement Consists Lease ("ISAK 8") in evaluating if PPA and ESC with IPP consist lease elements.

On 1 March 2017, the Financial Services Authority ("OJK") issued POJK No.6 which applies to Listed and Public Companies. Based on POJK No.6, transactions based on electricity buy and sell agreement are treated as buy and sell transactions, despite the electricity buy and sell agreements contain other substances besides buy and sell. POJK No.6 is effective prospectively since 1 January 2017 and allows earlier treatment since 1 January 2016. POJK No.6 is effective until the end of financial year period with the end of electricity infrastructure development acceleration task based on Presidential Regulation.

The Company decided to implement POJK No.6 earlier in prospective manner since 1 January 2016. Therefore transactions based on electricity buy and sell containing lease (note 3.l), starting 1 January 2016 is presented as electricity purchase in income statement and other comprehensive revenue in the occurring period. On 1 January 2016 the Company and subsidiaries conducted adjustment on related assets and liabilities.

Subsidiaries which have transactions based on electricity buy and sell agreements: PT Pelayaran Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), are not listed or public companies therefore they do not implement POJK No.6.

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Net adjustment on related assets and liabilities of Rp43,428,454 has been recorded as profit adjustment on 1 January 2016, with details as follows:

Uraian	1 Januari sebelum penyesuaian January 1, Before adjusment 2016 Rp	Penyesuaian saldo awal Beginning balance adjusment Rp	1 Januari setelah penyesuaian January 1, After adjusment 2016 Rp	Description
Aset Tetap	1.187.879.590	(72.227.600)	1.115.651.990	Property, plant and equipment
Aset Pajak Tangguhan	29.088.271	(14.787.769)	14.300.502	Deferred tax assets
	1.216.967.861	(87.015.369)	1.129.952.492	
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current liabilties
Utang Listrik Swasta	7.093.280	755.783	7.849.063	Electricity purchase payble
Utang Sewa Pembiayaan	149.621.763	(128.065.144)	21.556.619	Lease Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek				Current liabilties
Utang Sewa Pembiayaan	6.759.138	(3.313.534)	3.445.604	Lease Liabilities
Biaya Masih Harus Dibayar	10.627.055	(2.216.084)	8.410.971	Accured expenses
Utang Listrik Swasta	311.196	9.968	321.164	Electricity purchase payble
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Berelasi	8.910.438	380.409	9.290.847	Related parties
Pihak Ketiga	17.715.563	1.998.142	19.713.705	Third parties
Utang Lain-lain	20.188.608	6.637	20.195.245	Others payables
	221.227.041	(130.443.823)	90.783.218	
Dampak Penerapan POJK No.6 Terhadap Saldo Laba Awal		43.428.454		The effect of POJK No. 6 application on beginning retained eamings

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

For consolidation purpose, financial reports of PLN Batam and IP are adjusted so that accounting policy for transactions based on electricity buy and sell agreement are in line with POJK No.6.

B. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016

Standar dan implementasi standar baru:

- PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
- ISAK 30: Pungutan

Penyesuaian 2015

- PSAK 5: Segmen Operasi
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis

B. Implementation of New and Revised Financial Accounting Standard (PSAK), as well as Financial Accounting Standard Interpretation effective for financial year beginning on or after 1 January 2016

Standard and implementation of new standard:

- SFAS 70: Tax Amnesty Assets and Liabilities Accounting
- ISFAS 30: Fee

2015 Adjustment

- SFAS 5: Operating Segment
- SFAS 7: Disclosure of Related Parties
- SFAS 13: Investment Property
- SFAS 16: Fixed Assets
- SFAS 19: Intangible Assets
- SFAS 22: Business Combination

- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 110: Akuntansi Sukuk

Amandemen
- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja
- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

- SFAS 25: Accounting Policy, Accounting Estimates Change and Error
- SFAS 53: Share-Based Payment
- SFAS 68: Fair Value Measurement
- SFAS 110: Sukuk Accounting

Amendment
- SFAS 4: Separate Financial Statement on Equity Method in Separate Financial Statement
- SFAS 15: Investment in Associate Entity and Joint Venture on Investment Entity: Consolidation Exception Implementation
- SFAS 16: Fixed Assets on Accepted Method Clarification for Depreciation and Amortisation
- SFAS 19: Intangible Assets on Accepted Method Clarification for Depreciation and Amortisation
- SFAS 24: Employee Benefits on Fized Benefits Program: Employee Contributions
- SFAS 65: Consolidated Financial Report on Investment Entity: Consolidation Exception Implementation
- SFAS 66: Joint Regulation on Interest Acquisition Accounting in Joint Operations
- SFAS 67: Interest Disclosure in Other Entities on Investment Entity: Consolidation Exception Implementation

C. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan 2018

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
- PSAK 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31 (2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32 (2017): Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
- PSAK 69 (2015): Agrikultur
- PSAK 16 (Amandemen 2015): Aset Tetap
- PSAK 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas

C. Implementation of New and Revised Financial Accounting Standard (PSAK), as well as Financial Accounting Standard Interpretation effective for financial year beginning on or after 1 January 2017 and 2018

The following standard amendment and interpretation are effective for the period beginning on or after 1 January 2017, with earlier implementation allowed:
- SFAS 1 (Amendment 2015): Financial Report Presentation
- SFAS 3 (Adjustment 2016): Interim Financial Report
- SFAS 24 (Adjustment 2016): Employee Benefits
- SFAS 58 (Adjustment 2016): Non-current assets Owned to be Sold and Discontinued Operations
- SFAS 60 (Adjustment 2016): Financial Instrument: Disclosure
- ISFAS 31 (2015): Interpretation on Scope of PSAK 13: Investment Property
- ISFAS 32 (2017): Definition and Hierarchy or Financial Accounting Standard

The following standard amendment and interpretation are effective for the period beginning on or after 1 January 2018, with earlier implementation allowed:
- SFAS 69 (2015): Agriculture
- SFAS 16 (Amendment 2015): Fixed Assets
- SFAS 2 (Amendment 2016): Cash Flow Report

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Beberapa aspek penting yang mempengaruhi bisnis PLN secara signifikan adalah:

- **Kemampuan Keuangan**
  Berkurangnya kemampuan keuangan akan membuat membawa dampak melemahnya kemampuan pendanaan Perusahaan dan tertundanya program investasi strategis yang mendukung pertumbuhan, efisiensi (*fuelmix*) dan penguatan reserve margin yang pada akhirnya dapat berakibat pada pemadaman listrik. Pemadaman yang berulang dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan pelanggan, terutama pelanggan indsutri yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan.

- **Pembangunan Kapasitas Pembangkit**
  Dampak utama dari kurangnya pembangunan pembangkit adalah bertambahnya jumlah penambahan sewa pembangkit dan meningkatnya pemakaian BBM; target *fuelmix* tidak tercapai; peningkatan BPP dan *overrun* subsidi; defisit sistem (pemadaman); serta penurunan citra PLN.

- **Ketersediaan Energi Primer**
  Kekurangan pasokan energi primer, terutama batu bara adalah tidak optimalnya produksi pembangkit PLTU, yang akan berakibat pada kenaikan pemakaian BBM; Target *fuelmix* yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai; Peningkatan BPP dan *Overrun* subsidi; Terjadi pemadaman.

  Sedangkan untuk pasokan gas, dampaknya adalah Konsumsi BBM untuk pembangkit akan meningkat, hal ini berhubungan langsung dengan meningkatnya biaya operasional pembangkit; Target fuelmix yang sudah ditetapkan tidak dapat tercapai; Overrun subsidi.

Pada tahun 2016, masalah yang menjadi fokus Perseroan adalah:

1. Kemampuan keuangan, yaitu keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perusahaan untuk melakukan investasi sarana ketenagalistrikan.
2. Pembangunan kapasitas sarana ketenagalistrikan.
3. Energi primer, yaitu ketidakpastian kontinuitas ketersediaan pasokan serta fluktuasi harga energi primer.
4. Efisiensi Operasi, dilakukan untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP).
5. Regulasi, meliputi (i) kompetisi industri dengan diimplementasikannya Undang-Undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, (ii) kebijakan *Feed in Tariff* energi baru dan terbarukan mendorong kenaikan BPP penyediaan tenaga listrik, (iii) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum belum efektif dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan (iv) regulasi tentang perizinan belum dapat mempercepat

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Important matters that significantly affect PLN's business are:

- **Financial Ability**
  A reduced financial capability will cause the Company to have a weakened funding ability and delay strategic investment programs that support growth, efficiency (fuel mix) and the strengthening of reserve margins, and could finally result in power outages. Repeated blackouts may result in reduced customer confidence, especially in industrial customers who contribute greatly to the Company's income.

- **Construction of Plant Capacity**
  The main impact of a lack of construction is an increase in the number of additional leased power plants and rising fuel oil consumption; fuel mix targets not being achieved; cost of supply increasing and the subsidy overrunning; system deficits (blackouts); and a worsening of PLN's image.

- **Primary Energy Availability**
  An insufficient supply of primary energy, specifically coal, is not optimal for power plant generation. This would result in an increase in fuel consumption; the fuel mix target not being met; rising cost of supply and subsidy overrun; outages.

  Meanwhile, for gas supply, the impact would be rising consumption of oil for power generation, which is directly related to rising operational costs for power generation; the fuel mix target not being met; subsidy overrun.

In 2016, problems which became the Company's focus were:

1. Financial ability, as the limited funding by the Company to make electricity investments.
2. Electricity capacity development.
3. Primary energy, due to uncertain supply availability continuity as well as primary energy price fluctuation.
4. Operating Efficiency, made to reduce cost of supply (BPP).
5. Regulation, covering (i) industry competition with the implementation of Law No.30/ 2009 on electricity, (ii) new and renewable energy Feed in Tariff policy leading to the increase of electricity cost of supply (BPP), (iii) Law No 2/ 2012 on land procurement for Development for Public Interest was not yet effective in electricity infrastructure development and (iv) regulation on permits could not yet accelerate electricity development process.

proses pembangunan sarana ketenagalistrikan.
6. Kepercayaan Pelanggan.
7. Kesiapan Organisasi Perusahaan dengan struktur organisasi baru.

Perusahaan melakukan prioritas program kerja sepanjang tahun 2016, yaitu mensinergikan tuntutan mewujudkan kinerja operasi yang ekselen dan melayani pertumbuhan pelanggan, dengan sumber daya Perusahaan yang terbatas, meliputi:

1. Meningkatkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
2. Menyelesaikan pembangunan pembangkit program 10.000 MW tahap I dan Tahap II termasuk jaringan transmisi dan gardu induknya.
3. Memulai proses konstruksi pembangunan pembangkit 35.000 MW termasuk transmisi dan gardu induk terkait.
4. Melakukan percepatan proses perizinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan dengan mengupayakan terbitnya regulasi Pemerintah yang mempermudah eksekusi di lapangan.
5. Mendorong penyelesaian *financial closing* untuk *Independent Power Producer* (IPP) dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal.
6. Menjaga kecukupan pasokan listrik.
7. Menjamin ketersediaan energi primer.
8. Mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut dan mengoperasikan pembangkit *renewable energy* termasuk *biofuel* dan *solar cell*.
9. Meningkatkan efisiensi operasi.
10. Meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi.
11. Melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
12. Memperkuat bisnis dan sinergi Anak Perusahaan untuk mendukung pencapaian arah strategis korporat dan proses bisnis perusahaan. Meningkatkan kinerja dan kemampuan Anak Perusahaan dalam menghadapi tuntunan bisnis, antara lain mendorong pembentukan cucu perusahaan unrestricted (agar didalam melakukan aksi korporasi baik itu berupa investasi, divestasi maupun pendanaan serta hal lainnya tidak terikat dengan *covenant* korporasi dan lebih fleksibel), pengalihan aset PLN Holding kepada anak Perusahaan, kerjasama afiliasi dengan perusahaan lain seperti *joint venture*, kerja sama antar Anak Perusahaan dalam penyediaan dan transportasi batubara dan kerja sama antar Anak Perusahaan dalam penyedaiaan dan trasnportasi batubara dana kerja sama antar Anak Perusahaan dalam penyediaan transportasi batubara dana kerja sama antar Anak Perusahaan di bidang teknologi informasi.

6. Customer Trust.
7. Company's Organizational Readiness with new organizational structure.

The Company conducted work program priorities in 2016, synergizing demand to create excellent operating performance and serving customer growth, with limited Company resources, covering:

1. Improving corporate financial health level.
2. Completing plant development of 10,000 MW phase I and phase II programs including transmission network and substations.
3. Starting construction process of 35,000 MW plants including transmission and related substations.
4. Accelerating permit process and land clearance process for electricity project development by encouraging the issuance of government regulation which eased execution in the field.
5. Pushing for financial closing completion for Independent Power Producers (IPP) and construction completion as scheduled.
6. Maintaining sufficient electricity supply.
7. Guaranteeing primary energy availability.
8. Optimizing fuel mix through electricity production from non-oil based fuel plants, increasing electricity energy capacity which can be transferred through submarine cables and operating renewable energy plants including biofuel and solar cell.
9. Increasing operating efficiency.
10. Increasing business process consolidation for service integrity and efficiency.
11. Optimizing organization and increasing HR quality.
12. Strengthening business and synergy of Subsidiaries to support achievement of corporate strategic objective and business process. Increasing performance and ability of Subsidiaries in facing business demand, such as pushing for the development of unrestricted sub-subsidiaries (so in making corporate actions either in investment, divestment, or funding as well as others not bound to corporate covenant and more flexible), transferring PLN Holding assets to Subsidiaries, affiliate cooperation with other companies such as joint ventures, cooperation among Subsidiaries in procurement and transportation of coal and cooperation among Subsidiaries in information technology.

13. Mendorong kemitraan dalam rangka peningkatan efisiensi proses bisnis.
14. Meningkatkan citra Perusahaan diantaranya melalui peningkatan GCG berupa perbaikan aspek *risk management* maupun *compliance* Perusahaan. Serta Meningkatkan fungsi *public relations* agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan *stakeholders*.

13. Pushing for partnership in increasing efficient business process.
14. Increasing corporate image through GCG strengthening in form of risk management and compliance improvement. Increasing public relations functions to maintain good relations and communications with stakeholders.

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

Kinerja anak usaha mencerminkan kinerja sesuai segmen usaha sebagaimana tergambar pada struktur usaha. Adapun ringkasan kinerja keuangan Anak Perusahaan pada tahun 2016, sesuai bidang usahanya adalah sebagai berikut.

SUBSIDIARY PERFORMANCE

Subsidiary performance is evaluated per business segment as illustrated in the business structure. The summary of financial performance of Subsidiaries in 2016, according to business sector is as follows.

Kinerja Anak Perusahaan 2016
Subsidiary Performance 2016

(Rp Miliar) (Rp Million)

Uraian Description	PT IP	PT PJB	PT ICON +	PLN Batam	PLN Tarakan	PLN Enjiniring	PLN Batubara	PT BAG	PT Haleyora Power
Aktiva Assets									
Total Aktiva Total Assets	226.441	194.269	2.287	16.091	352	878	1.234	1.257	603
Aktiva Lancar Current Assets	30.468	24.277	1.216	825	139	572	233	366	460
Aktiva tidak Lancar Non-Current Assets	195.973	169.992	1.071	15.265	214	306	1.001	891	143
Total Ekuitas Total Equity	226.441	194.269	2.287	16.091	352	878	1.234	1.257	603
Ekuitas Equity	216.318	187.543	1.414	5.675	42	404	(12)	215	346
Kewajiban Lancar Current Liabilities	4.298	3.707	535	2.516	286	284	1.245	250	93
Kewajiban tidak Lancar Non-Current Liabilities	5.825	3.019	338	7.900	24	190	2	792	165
LABA (RUGI) PROFIT (LOSS)									
Pendapatan Usaha Revenue	36.509	35.260	1.624	3.261	384	485	2.632	1.148	1.345
(Beban) Usaha (Operating (Expenses)	32.700	29.276	1.273	3.061	360	459	2.555	835	1.170
Pendapatan/ (Beban) di Luar Usaha Others Income/ (Expenses)	27.292	356	(27)	53	2	(3)	0	(87)	(5)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	2.643	4.731	219	182	23	22	56	97	93

PLN Terangi Desa
PLN Illuminating Villages

Menjelang tutup tahun 2016, PT PLN (Persero) memberikan kado istimewa bagi lebih dari 250 kepala keluarga di 9 desa di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Setelah lebih dari 25 tahun tak teraliri listrik, akhirnya desa-desa tersebut terang-benderang, karena PLN telah mengaliri setrum ke wilayah tersebut.

Desa-desa tersebut adalah Desa Anjir Handil Manting, Kecamatan Anjir Muara, Desa Handil Aji, Desa Tinggiran Baru 1 dan Desa Tinggiran Baru 2 di Kecamatan Mekarsari, Desa Bahandang, Desa Karang Bunga, Desa Semangat Dalam, Desa Tebing Rimbah Raya di Kecamatan Mandastana dan Desa Pantang Raya, Kecamatan Tabukan.

Tak hanya masyarakat yang menyambut hadirnya listrik, Bupati Barito Kuala, H. Hasanuddin Murad mengungkapkan perasaan bahagia yang luar biasa saat meresmikan penyalaan listrik pertama kali di Desa Anjir Handil Manting, Kecamatan Anjir Muara, Jumat (30/12). Ia bersyukur dengan hadirnya listrik pastinya akan memberikan dampak peningkatan perekonomian masyarakat.

"Luar biasa komitmen dan kerja nyata yang ditunjukkan PLN," papar Bupati Barito Kuala, H. Hasanuddin Murad saat meresmikan penyalaan listrik pertama pada 30 Desember 2016. "Upaya dari PLN ini sangat berarti bagi masyarakat, karena listrik adalah kebutuhan dasar bagi mereka semua. Terima kasih PLN."

General Manager PLN Kalselteng, Purnomo menjelaskan bahwa untuk melistriki 9 desa ini, PLN telah menggelontorkan investasi lebih dari Rp4,4 miliar. Dana tersebut untuk membangun Jaringan Tengangan Menengah (JTM) sepanjang 7,25 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 10,24 kms, 3 buah Trafo dengan kapasitas 100 kilo Volt Ampere (kVA) dan 7 Trafo berkapasitas 50 kVA.

Listrik di 9 desa tersebut merupakan bagian dari total 61 desa di Kalimantan Tengah yang diterangi PLN selama tahun 2016. Plus, 51 desa di Kalimantan Tengah, sebagai wujud dari komitmen "Kerja Nyata Terangi Negeri".

Near to the end of 2016, PT PLN (Persero) gave a special gift to 250 heads of families from 9 villages in Barito Kuala Regency, South Kalimantan. After more than 25 years without electricity, finally the villages are illuminated, as PLN delivered electricity to the area.

The villages are Anjir Handil Manting Village in Anjir Muara District, Tinggiran Baru 1 and 2 Village in Mekarsari District, Bahandang, Karang Bunga, Semangat Dalam, Tebing Rimbah Raya Villages in Mandastana District, and Pantang Raya Village in Tabukan District.

It was not only the communities that welcomed electricity, Barito Kuala Regent, H. Hasanuddin Murad, also expressed very happy feelingings when the electricity was officially turned on in Anjir Handil Manting Village, Anjir Muara, Friday (30/12). He is thankful as the presence of electricity will improve the community's economy.

"PLN showed incredible commitment and work" said Barito Kuala Regent, H. Hasanuddin Murad when officially turning on the electricity on 30 December 2016. "PLN's effort means a lot to the community, because electricity is a basic need for them. Thank you PLN."

PLN Kalselteng General Manager, Purnomo explained that to deliver electricity to these 9 villages, PLN invested more than Rp4.4 billion. This amount was to build a medium voltage network along a 7.25 kilometer circuit (kmc), a low voltage network of 10.24 kmc, 3 transformers with 100 kilo Volt Ampere (kVA) capacity and 7 transformers with 50 kVA capacity.

Electricity in the 9 villages was a part of 61 village illumination objective by PLN in Central Kalimantan during 2016 and with another 51 villages in Central Kalimantan, a manifestation of "Real Work Illuminating the Nation".

Gerakan ini sejalan dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meluncurkan "Program Indonesia Terang" dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85% pada tahun 2015 menjadi 97% di tahun 2019. Hingga 2016, masih ada 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan PLN.

Karena itulah, selain sejumlah desa di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ikut teraliri listrik. Di Kaltim dan Kaltara, PLN telah meresmikan pengoperasioan LLTD Long Iram dan PLTD Muara Pahu di Kutai Barat serta PLTD Atap, PLTD Tulin Onsoi dan PLTD Sebuku di Kabupaten Berau, kemudian PLTD Sangkurilang di Kutai Timur yang semula hanya beroperasi 12 jam, menjadi 24 jam penuh.

Di Bali, kerja nyata mengaliri listrik direalisaskan di Desa Pengotan, Bangli, dengan investasi Rp646 juta, dari total .

Dengan masuknya listrik ke desa tersebut, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat yang kegiatan ekonomi utamanya adalah perkebunan dan peternakan. Sejumlah objek wisata alam yang mulai tumbuh di wilayah ini menjadi indikasi potensi ekonomi yang baik bagi masyarakat.

PLN Wilayah Papua dan Papua Barat juga memberikan hadiah istimewa kepada dua kabupaten di dua provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo. Presiden Joko Widodo telah meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat, yang dua di antaranya berbasis energi baru dan terbarukan.

Wilayah Jawa Tengah juga mendapat perhatian dari PLN. Tiga desa di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, yaitu Desa Hargo Tirto, Hargo Wilis dan Kalirejo, sudah teraliri listrik PLN, dalam rangkaian program listrik desa. Melalui program ini, diharapkan 25 desa di empat kabupaten akan teraliri listrik.

This action is in line with the Energy and Mineral Sources Ministry "Bright Indonesia Program" to fulfill the increase the national electrification ratio from 85% in 2015 to 97% in 2019. As of 2016, there are 12,659 underdeveloped villages that have not received access to electricity from PLN.

Besides the villages in South and Central Kalimantan, some in East and North Kalimantan are also electrified. In East and North Kalimantan, PLN has officially operated Long Iram and Muara Pahu PLTD (diesel power plants) in Kutai Barat (West Kutai), also Atap, Tulin Onsoi and Sebuku PLTD in Berau Regency, then Sangkurilang in Kutai Timur (West Kutai) originally operating 12 hours, now at 24 hours.

In Bali, real work to provide electricity is being done in Pengotan Village, Bangli with an investment of Rp. 646 million.

With the villages now having electricity, it is expected to drive the local economy which is mainly plantation and farm based. A number of natural attractions have also begun to grow in the region, a good indication of the economic potential for the community.

PLN Papua and West Papua Area also received special gifts in two regencies in those two provinces, namely Deiyai and Yahukimo Regency. President Joko Widodo inaugurated six electricity infrastructure facilities in Papua and West Papua, two of them based on new and renewable energy.

Central Java area also received attention from PLN. Three villages in Kulonprogo Regency, Yogyakarta, namely Hargo Tirto, Hargo Wilis, and Kalirejo Village have received electricity from PLN through the village electrification program series. Through this program, it is aimed that 25 villages in four regencies will be electrified.

05

Tinjauan Unit Pendukung Bisnis

Business Review

330 Sumber Daya Manusia (SDM)
Human Resources (HR)

331 Rencana Strategis Pengelolaan SDM
HR Management Strategic Plan

332 Roadmap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Roadmap Of Human Resources Management

332 Knowledge Management
Knowledge Management

336 Peningkatan Budaya Unggul Dan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Korporat
Culture Of Excellence Improvement And Corporate Culture Values Internalization

337 Human Capital Management System (HCMS)
Human Capital Management System (HCMS)

341 Program Rekrutmen
Recruitment Program

344 Sekilas Tentang Tes Adaptif Pln
Pln Adaptive Test In Brief

346 Program Pembelajaran
Learning Program

347 Optimalisasi Pegawai
Employee Optimization

348 Program Dana Pensiun
Pension Fund Program

348 Sistem Informasi SDM
HR Information System

349 Tingkat Turn-Over
Employee Turn Over Rate

349 Dampak Keuangan Pengelolaan Sdm
Financial Impact Of Hr Management

350 Survei SDM
HR Survey

351 Demografi Sumber Daya Manusia
Demography Of Human Resources

355 Menuju Nihil Kecelakaan Melalui HSSE Academy
Towards Zero Accidents through the HSSE Academy

356 Teknologi Informasi
Information Technology

357 Strategi Pengembangan Teknologi Informasi PLN
Information Technology Development Strategy Of PLN

359 Kondisi Infrastruktur Teknologi Informasi
Infrastructure Condition Of Information Technology

359 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

361 Sumber Daya Manusia
Human Resources

362 Pengembangan Talenta Bidang Teknologi Informasi
Development Of Talents In Information Technology

363 Perkembangan Teknologi Informasi Tahun 2016
Information Technology Development In 2016

363 Program Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development Program

Sumber Daya Manusia (SDM)

Human Resources (HR)

Sehubungan dengan program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang ditugaskan oleh pemerintah maupun program sendiri serta fasilitas pendukungnya, PLN terpacu untuk mengoptimalkan kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini.

With respect to the 35,000 MW power plant program commissioned by the government as well as its supporting facilities, PLN is very motivated to further improve employee competence above its current level.

PT PLN (Persero) memandang sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penting untuk mendukung kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dari rekrutmen hingga peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan.

PT PLN (Persero) considers human resources as a key factor to support thze performance of the Company in a sustainable manner. Therefore, the Company gives great attention, starting from the recruitment up to employee capacity and capability.

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN SDM

PLN mengembangkan rencana dan menjalankan pengelolaan serta pemenuhan SDM berdasarkan posisi dan kualifikasi sesuai pengembangan strategis Perseroan dengan fokus kepada:

1. Memenuhi kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi.
2. Mengelola pegawai yang berkinerja rendah.
3. Outsourcing/kebijakan kemitraan bisnis dan metodologinya.
4. Menciptakan kemitraan dengan institusi pendidikan.
5. Membangun system perekrutan pegawai yang kompetitif bagi *fresh graduate*.

Sebagai organisasi yang terus berkembang, PLN membutuhkan tambahan pegawai yang signifikan, sehubungan dengan bertambahnya pembangkit baru, jaringan yang lebih luas, dan jumlah pelanggan yang lebih banyak. Penambahan pegawai ini akan meningkat semakin pesat seiring dengan mulai direalisasikannya secara resmi Program 35.000 MW di tahun 2015 yang terus akan berlanjut hingga tahun 2019 mendatang.

PLN berupaya mengatasi tantangan ini melalui:

1. Memastikan bahwa tenaga kerja yang ada telah dioptimalkan atau memastikan bahwa setiap orang bekerja secara efektif dan efisien dengan produktivitas yang setara dengan perusahaan yang mempraktikkan standar terbaik di dunia
2. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Dari proses review atas kondisi SDM saat ini, khususnya pada fungsi-fungsi operasional, PLN telah mengidentifikasi adanya kelebihan pekerja yang cukup moderat di beberapa fungsi jika dibandingkan dengan standar global. PLN telah menetapkan kelebihan tenaga tersebut sebagai *buffer*, mengingat operasional Perseroan yang akan terus meningkat. PLN juga telah mengidentifikasi kecukupan SDM untuk fungsi-fungsi lain dan mempersiapkan skenario peningkatan kompetensi maupun penambahan tenaga kerja.

Selain dari sisi alokasi SDM dikaitkan dengan kebutuhan fungsi operasional, PLN telah menyiapkan program untuk menjamin lahirnya generasi pemimpin perusahaan masa depan melalui berbagai program pengelolaan SDM dengan tujuan meningkatkan kompetensi pekerja, memberi

HR MANAGEMENT STRATEGIC PLAN

PLN develops plans as well as implements the management and fulfillment of HR based on the position and qualification in accordance with the strategic development of the Company by focusing on:

1. Meeting HR quality in accordance with organizational needs.
2. Managing employees with low performance.
3. Outsourcing/ partnership policy and its methodologies.
4. Creating partnership with educational institutions.
5. Creating a competitive recruitment system for fresh graduates.

As an organization that continues to grow,PLN requires significant employee additions, in connection with the increase in new plants, a wider network, and an increase in the number of customers. The addition of these employees will rapidly increase, in line with the realization of the 35,000 MW Program, which commenced in 2015, and will continue to 2019.

PLN seeks to address this challenge by:

1. Ensuring that the existing workforce has been optimized or ensuring that everyone is working effectively and efficiently with a productivity that is equivalent to companies practicing the best standards in the world
2. Improving the quality and quantity of employees in accordance with organizational needs.

From the review process on the current HR conditions, particularly in the operational functions, PLN has identified a fairly moderate excess of workers at a number of functions compared to the global standards. PLN has determined the excess as a buffer, given the Company's operations will continue to increase. PLN has also identified the adequacy of HR for other functions and prepared increased competence and additional manpower scenarios.

Apart from allocation,HR is also associated with operational needs, PLN has prepared a program to ensure the birth of generation of corporate leaders the future through various programs of human resource management in order to increase the competence of workers, compensate according

kompensasi sesuai kompetensi, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjamin kesejahteraan pekerja pada masa bakti maupun purna bakti.

ROADMAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai acuan dalam melakukan *review* dan pembaruan rencana pengelolaan yang dilakukan secara berkala, Perseroan menyusun *Roadmap* SDM.Penyusunan *Roadmap* PLN ini memperhatikan kondisi perusahaan terkini dan rencana strategis perusahaan dalam beberapa tahun kedepan.

Dalam implementasinya, setiap pelaksanaan *item* program selalu mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan umum pengelolaan SDM, yang menyatakan bahwa pengembangan SDM PLN sesuai *roadmap* dan telah berada pada tahap:

1. Meningkatkan Pemanfaatan *Knowledge Management* (KM) dalam proses bisnis, antara lain melalui:
   - Implementasi KM ke dalam program *Human Capital Readiness* dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) *Teamwork* dengan menyelaraskan kepada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN,
   - Penyelenggaran Program *PLN Outlook* untuk mendukung pemenuhan pengetahuan strategis perusahaan,
   - Pembuatan konten video media channeling untuk meningkatkan strategi sosialisasi program KM,
   - KM sebagai indikator penilaian kinerja pegawai,
   - Perancangan desain *Knowledge Center*,
   - Evaluasi program KM dan Penyusunan inisiatif strategi dan roadmap KM tahun 2017 - 2021.
2. Program *Strengthening Alignment Framework* pada Sistem Manajemen Kinerja Pegawai melalui program :
   - Penyelarasan sasaran kinerja Pegawai dengan kinerja organisasi
   - Perumusan sasaran kinerja yang berbasiskan *outcome*
   - Standarisasi KPI sesuai portofolio unit
   - Integrasi system manajemen kinerja dengan sistem manajemen kepegawaian dengan *single input* dan sentralisasi data
   - Validasi kinerja Pegawai dengan kinerja organisasi
   - Integrasi dengan OCR Aligment
3. Implementasi Model Produktivitas Pegawai yang memasukkan unsur lingkungan geografis, demografi dan input internal PLN yang telah disusun di tahun sebelumnya kepada Unit Pilot (13 Unit PLN) dan penelitian untuk pembuatan formula Unit Jasa, serta aplikasi pendukungnya.
4. Implementasi *Third Party Administration* (TPA) untuk pengendalian fasilitas kesehatan dan pengobatan.
5. Pengelolaan *payroll* secara terpusat.

to competence, create a favorable working atmosphere and ensure the welfare of workers in future service and after-service.

ROADMAP OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

As a guideline to conduct periodic reviews and updates of the management plan, The Company has drafted the HR Roadmap. The formulation of the Roadmap observes the latest conditions of the Company as well as its strategic plans in the next few years.

In its implementation, each implementation of the program item always considers and pays attention to the general HR management policy, which states that human resource development remain in accordance with the PLN roadmap and has reached givenstages:

1. Improving Utilization of Knowledge Management (KM) in business processes, including through:
   - mplementation of KM into the Human Capital Readiness program and Organizational Capital Readiness (OCR) Teamwork by aligning to the SOE Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU),
   - Implementation of the PLN Outlook program to support the fulfillment of the Company's strategic knowledge,
   - Media channeling video content creation to improve the socialization of the KM Program,
   - KM as employee performance assessment indicator,
   - Designing the Knowledge Center,
   - KM program evaluation and preparation of the 2017-2021 strategy initiatives and KM roadmap KM.
2. Strengthening Alignment Framework Program on the Employee Performance Management System through the program:
   - Alignment between Employee performance and organizational performance target
   - Formulation of outcome-based performance target
   - KPI standardization according to unit portfolioIntegration of performance management system and employee management system with single input and data centralization
   - Validation of employee performance with organizational performance
   - Integration with OCR alignment.
3. Implementation of Employee Productivity Model by incorporating elements of geography, demography, and PLN internal input, which have been formulated in the previous year to the Pilot Units (13 PLN Units) and research for Service Unit formulation, as well as the supporting applications.
4. Implementation of Third Party Administration (TPA) to control healthcare and treatment facilities.
5. Centralized payroll management.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai tahapan sesuai roadmap, diantaranya:

1. Memperkuat kinerja organisasi saat ini dan di masa mendatang.
2. Mempersiapkan organisasi yang ramping, efektif dan adaptif untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan.
3. Desentralisasi kewenangan operasional dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis.
4. Implementasi kriteria kinerja ekselen.
5. Menjalankan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif.
6. Melakukan penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja yang selaras dengan strategi bisnis.
7. Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.

Strategies implemented to achieve the phases in accordance with the roadmap are, among others:

1. Strengthening the current and future organizational performance.
2. Preparing a streamlined, effective, and adaptive organization, to support Company business needs.
3. Decentralization of operational authorities and strategic policy centralization.
4. Implementation of excellent performance criteria.
5. Implementing a comprehensive HR Management System.
6. Conducting improvement to the Performance Management System as in line with business strategy.
7. Increasing employee engagement in the achievement of the corporate vision and mission.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah pendapatan terbesar, PLN menyadari keberhasilan suatu korporasi untuk menjadi perusahaan yang unggul dan berkualitas kelas dunia pada dasarnya bukan disebabkan oleh banyaknya *tangible asset* yang dimiliki perusahaan tersebut, namun lebih dikarenakan oleh tingkat pengetahuan *(intangible asset)* yang dimiliki oleh organisasi tersebut. *Intangible asset* adalah aset yang bertumpu pada potensi insani atau karyawan-karyawan perusahaan. Semakin maju kualitas dan tingkat pengetahuan karyawan yang dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi, maka akan semakin mudah pula bagi perusahaan itu untuk menghasilkan inovasi dan nilai tambah bisnis, dan pada akhirnya memenangkan kompetisi bisnisnya.

Oleh karena pentingnya pengelolaan pengetahuan tersebut, PLN sejak beberapa tahun terakhir mulai membangun suatu *Knowledge Management* sebagai basis dari OrganisasiPembelajar *(Learning Organization)* yang merupakan prasyarat untuk dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang. Dengan adanya budaya pembelajar, maka aliran pengetahuan akan makin lancar dan terbarukan, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya bibit-bibit inovatif diantara insan-insan pekerja PLN.

Sejak tahun 2007, Manajemen memutuskan untuk membentuk Tim *Knowledge Management* (KM) untuk menyusun rencana dan strategi penerapan KM.

Visi dan Misi *Knowledge Management*

Knowledge Management PLN mempunyai visi yaitu"Terbangunnya PLN sebagai suatu organisasi pembelajar dengan melancarkan aliran aset pengetahuan dan mendorong tumbuhnya inovasi yang relevan dengan strategi perusahaan".

KNOWLEDGE MANAGEMENT

As one of the Companies with the largest revenue, PLN is aware that the success of a corporation to become superior with world class quality is not solely influenced by the amount of its tangible assets, but also by its level of knowledge (intangible assets). Intangible assets are assets that rely on the potential of Company personnel. The more advanced the quality and level of knowledge of employees that can be transformed into organizational knowledge, the easier for the company to obtain innovation and value added businesses, and ultimately, winning the business competition.

Due to the importance of knowledge management, PLN has started to develop Knowledge Management in the last few years as a basis of a Learning Organization, which is a prerequisite for being acknowledged as a developing world-class company. With the existence of a learning culture, the flow of knowledge will be smoother and become enhanced, allowing the creation of an innovative generation of PLN employees.

Since 2007, management has decided to establish the Knowledge Management (KM) Team, responsible for developing plans and strategies of KM implementation.

Vision and Mission of Knowledge Management

Knowledge Management of PLN has a vision, namely "Developing PLN as a learning organization to expedite the flow of knowledge assets and foster innovation aligned with the Company's strategies".

Adapun Misi dari *Knowledge Management* adalah:

1. Memfasilitasi semua karyawan perusahaan untuk menjadi *"knowledge worker"*, yang memiliki semangat dan kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan kemudian melakukan modifikasi dan implementasi pengetahuan eksplisit untuk meningkatkan kinerja;
2. Melakukan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Mempertahankan dan memelihara aset pengetahuan dari kehilangan atau ketinggalan jaman, dan kemudian menumbuhkembangkan lebih cepat dan lebih efektif;
4. Mengintegrasikan seluruh aset pengetahuan dari setiap unit bisnis, menjadi aset perusahaan;
5. Mensinkronisasi strategi bisnis PLN dengan operasional;
6. Mengintegrasikan *knowledge management,* Organisasi Pembelajar dan proses inovasi di PLN.

Roadmap Knowledge Management sampai dengan tahun 2021 berisikan 3 sasaran utama, yaitu:

1. Penguatan *Enabler* KM,
2. Penguatan Proses KM,
3. Penguatan *Strategic Business Goal*.

Pencapaian sasaran tersebut didukung melalui *initiative action plan* yang dilaksanakan setiap tahunnya yang digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

The Mission of Knowledge Management are:

1. Facilitating all employees to become a "knowledge worker", with the spirit and capability to share knowledge, aimed at executing the modification and implementing the knowledge explicitly for the sake of performance improvement;
2. Performing continuous innovation to enhance the Company's competitiveness;
3. Preserving and maintaining knowledge assets from loss or becoming outdated, and developing them more rapidly and effectively;
4. Integrating all knowledge assets for each business unit into the Company's assets;
5. Synchronizing business strategies with business operations;
6. Integrating the KM, Learning Organization, and innovation processes within PLN.

Knowledge Management Roadmap to 2021 contains 3 main targets, namely:

1. Strengthening of KM Enabler,
2. Strengthening of KM Process,
3. Strengthening of Strategic Business Goals.

The achievement of these targets requires an initiative action plan which must be implemented annually, illustrated in the following diagram:

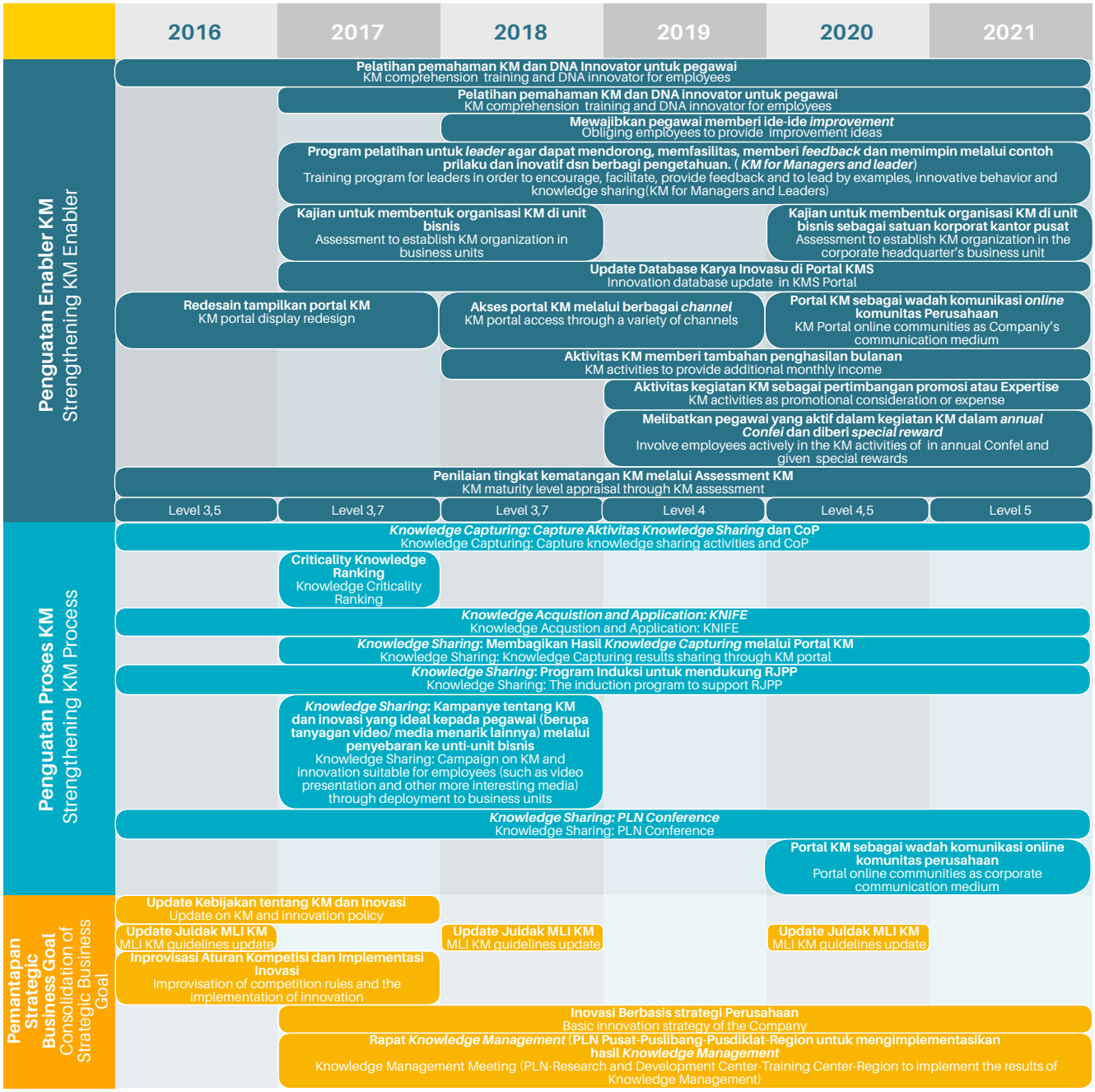

Strategi Implementasi KM PLN

PLN berupaya mewujudkan suatu *Knowledge Management System* yang terintegrasi secara korporat melaluipenyatuan seluruh 3 pilar utama KM, yaitu *People, Process* dan *Technology*.

People: salah satu kriteria pengukuran kompetensi pegawai adalah melalui aktifitas *knowledge management* yang meliputi *knowledge sharing, knowledge capturing, community of practice,* dan inovasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan diri pegawai.

PLN KM Implementation Strategy

PLN strives to form an integrated KM System by combining 3 main aspects, namely People, Process, and Technology.

People: One of the criteria in the measurement of employee's competence is through knowledge management including knowledge sharing, knowledge capturing, community of practice, and innovation, which are integral part of employee self-development efforts.

Process: telah diterbitkan dan disempurnakan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas *knowledge management* termasuk pemberian penghargaannya.

Technology: menerapkan teknologi kolaboratif yang diharapkan cukup adaptif mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI BUDAYA KORPORAT

Pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan. Dimensi Budaya Kinerja Tinggi/Unggul memiliki inisitiaf untuk menciptakan pegawai PLN yang kompeten, produktif, memiliki tata nilai & etika kerja tinggi, berjiwa intrapreneur, dan *cost-benefit conscious*.

Pembentukan budaya organisasi unggul dicapai melalui 3 (tiga) pilar utama sebagai berikut:

1. *High Performance Culture* (HPC)
   Business Concern: PLN menjadi *Emerging Industry Leader* pada tahun 2017 dengan nilai sebagai berikut:
   - *Customer Focus;*
   - *Performance Minded;*
   - *Managing Quality.*

2. *Synergizing in Business and Values* (SBV)
   Business Concern: Membangun PLN menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2017 dengan nilaisebagai berikut:
   - *Integrity and Business Ethic;*
   - *Human Capital Management;*
   - *Knowledge Capturing;*
   - *Change Management, Strategy Alignment.*

3. *Business Acumen* (BAC)
   Business Concern: Membangunkan jiwa intrapreneurship dan *business survival* pada tiap insan PLN dengan nilai sebagai berikut:
   - *Cost and Benefit Minded;*
   - *Intrapreneurship & Entrepreneurship*.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan adalah dengan Implementasi PLN Bersih tahun 2013-2014 dan dilanjutkan melalui tahun 2016 dengan program PLN Berintegritas, dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penetapan Kep.Dir. No. 060.K/DIR/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pedoman PLN Bersih.
2. Penetapan Kep.Dir. No. 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan antara PLN dengan Mitra Kerja Guna mendukung PLN Bersih.

Process: Various policies have been issued and perfected as operational guidelines for the management of knowledge accrual activities including its reward compensation.

Technology: Administering collaborative technologies with the expectation to be adaptive enough to keep up with the latest technological development.

CULTURE OF EXCELLENCE IMPROVEMENT AND CORPORATE CULTURE VALUES INTERNALIZATION

Culture of excellence formation and enhancement is part of the efforts to motivate employees to persistently improve performance and provide the best of ability to the Company. The element of culture excellence performance has the initiative to shape competent, productive, ethical, highly intraprenual spirited, and cost benefit conscious employees.

The establishment of the excellent organization culture is achieved through the following 3 (three) main pillars:

1. High Performance Culture (HPC)
   Business Concern: PLN becoming the Emerging Industry Leader in 2017 with the following values:
   - Customer Focus;
   - Performance Minded;
   - Managing Quality.

2. Synergizing in Business and Values (SBV)
   Business Concern: Creating PLN as a Corruption Free Zone (WBK) in 2017 with the following values:
   - Integrity and Business Ethics;
   - Human Capital Management;
   - Knowledge Capturing;
   - Change Management, Strategy Alignment.

3. Business Acumen (BAC)
   Business Concern: Enhancing intrapreneurship and business survival spirit in all PLN personnel with the following values:
   - Cost and Benefit Minded;
   - Intrapreneurship & Entrepreneurship

The culture of excellence formation and enhancement program is brought about through the 2013-2014 Clean PLN (PLN Bersih) program implementation and followed by the 2016 PLN with Integrity (PLN Berintegritas) program, and among others:

1. Issuance of the Decision of the Board of Directors No. 060.K/DIR/2014 dated 12 February 2014 on PLN Bersih Guidelines.
2. Issuance of the Decision of the Board of Directors No. 0054.K/DIR/2014 on Financial Transaction Guidelines between PLN and Business Partners to support PLN Bersih.

3. Penyusunan Juklak Kinerja *Organizational Readiness* terkait kultur sebagai Panduan Unit dalam menyelaraskan *Culture* dengan Program PLN Berintegritas.
4. Melakukan Revisi dan *Updating* materi pembelajaran terkait Pelopor PLN Berintegritas.
5. Memfasilitasi *Mentoring* terkait KPI DIR SDM Kesiapan Budaya Kerja.
6. Memfasilitasi *mentoring cascading* KPI terkait PLN Berintegritas terhadap 54 Unit Bisnis dan Anak Perusahaan.
7. Menetapkan kriteria dan peserta pelopor PLN Berintegritas.
8. Melakukan pelatihan pelopor (*change agent*) PLN Berintegritas terhadap 54 Unit Bisnis dan Anak Perusahaan.
9. Penyusunan program budaya unggul unit untuk mendorong implementasi program PLN Berintegritas agar *embedded* kedalam seluruh proses bisnisdandiinisiasiolehpelopor PLN Berintegritas
10. Mengadakan kegiatan Festival Budaya di mana masing-masing unit dapat studi banding mengenai program budaya unggul unit lainnya

3. Formulation of Organizational Readiness Performance Guidelines in relation to Culture as Unit Guidelines while aligning Culture with the PLN with Integrity Program.
4. Revising and updating the learning materials associated with Pioneer of PLN with Integrity.
5. Facilitating mentoring activities relating to KPI DIR HR Work Culture Readiness.
6. Facilitating KPI cascading mentoring relating to PLN with Integrity for 54 Business Units and Subsidiaries.
7. Determining PLN with Integrity criteria and pioneer (change agent) participants.
8. Training PLN with Integrity change agents for 54 Business Units and Subsidiaries.
9. Formulation of excellent culture program for units to encourage the implementation of the PLN with Integrity program to be embedded in all business processes and initiated by the change agents.
10. Organizing Culture Festival activities, where each unit obtains comparative studies on the excellence culture of other units.

PLN meyakini bahwa SDM merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh operasional bisnis yang dilaksanakan dan oleh karenanya menempatkan SDM sebagai kunci sukses pengembangan usaha di masa mendatang.Untuk memastikan seluruh SDM memberikan seluruh kompetensi terbaiknya, PLN berupaya memenuhi seluruh kebutuhan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

PLN strongly believes that human resource is the most essential driving force for the advancement of all of its business operations. Unquestionably, having excellent HR is the key for PLN' success. To ensure that all employees contribute their best, PLN strives to fulfill all employees' needs to the best ability of the Company's financial ability.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

Dalam menghadapi tantangan bisnis ketenagalistrikan, Perseroan telah mempersiapkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga menjadi insan-insan berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perseroan dengan internalisasi tata nilai dan budaya perusahaan melalui implementasi *Human Capital Management System* (HCMS) yang bercirikan kompetitif, adil dan transparan serta menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai Asset Perusahaan.

Penyusunan dan implementasi HCMS sangat menjunjung tinggi kesetaraan kesempatan pada seluruh pegawai untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya.Kesetaraan ini tidak mengenal gender, namun berdasarkan pada kemampuan individual pegawai. Setiap tahun Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi pegawai.

Ruang Lingkup HCMS adalah :
a. Sistem Pengambangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja;
b. Sistem Rekrutmen;

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM (HCMS)

In addressing the industry challenge, the Company prepares all of its employees to become more professional, competent and of high integrity as a prerequisite to accomplish Company's short term, medium term and long term goal. This is done by advocating, promoting and incorporating company's value and culture to all employees through the implementation of Human Capital Management System (HCMS) characterized by competitive, fair and transparent principles, and positioning Human Resources as one the most valuable asset of the Company.

The formulation and implementation of HCMS strongly uphold equality and opportunity for all employees to develop according to their competence. It does not discriminate against genders, and focuses purely on the ability of the individual worker. The Company annually conducts special training for promotions to fill certain positions, which is also a part of employee regeneration process.

The Scope of the HCMS are:
a. Organization Development System and Employment Planning;
b. Recruitment System;

c. Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir;
d. Sistem Pembelajaran;
e. Sistem Manajemen Kinerja;
f. Sistem Penghargaan;
g. Sistem Hubungan Industrial.

Di dalam Divisi HCMS melakukan fungsi 4 pilar utama, yakni: Sistem Manajemen Kinerja, Sistem Penghargaan/Remunerasi, Sistem Hubungan Industrial, Sistem Pengembangan Kompetensi dan Karir.

HCMS memiliki tujuan utama sebagai pola pengelolaan SDM untuk mendukung strategi dan pencapaian korporat yang selaras dengan optimasi sumber daya terutama biaya-biaya jangka panjang Perseroan, yang diberlakukan kepada pegawai yang diangkat sejak tahun 2011 (kualifikasi SMA/SMK) dan tahun 2012 (kualifikasi D3, S1/D4, S2 dan Profesional) untuk kemudian secara jangka panjang akan diselaraskan dengan keseluruhan entitas pegawai yang ada.

Adapun uraian pelaksanaan berbagai kegiatan pengelolaan SDM PLN berdasarkan implementasi HCMS tersebut adalah:

1. Manajemen Kinerja

PLN kini telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dengan tujuan: i) terwujudnya penilaian kinerja yang dapat membangun dan membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi bagi Perseroan, ii) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih transparan, terukur, dan obyektif sehingga Perseroan dapat memberikan kompensasi dan atau penghargaan yang berkeadilan dan sepadan dengan Kinerja Pegawai selama bekerja dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

PLN menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai indikator keberhasilan dari sebuah organisasi/ unit kerja/pejabat pimpinan Unit dan individu yang ada dalam Perusahaan.KPI adalah ukuran kinerja itu sendiri, sedangkan target KPI adalah target kinerja yang menyatakan kesepakatan hasil yang diharapkan dan keselarasannya dengan *job description* jabatan adalah yang utama untuk memastikan setiap pegawai memiliki pekerjaan yang berkesesuaian dan selaras dengan tujuan utama dibentuknya jabatan tersebut. PLN mengembangkan KPI melalui *value drivers* yang terkait dengan sasaran-sasaran strategis.

2. Sistem Remunerasi

PLN menetapkan besaran remunerasi Pegawai mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 043.P/ DIR/2015 tentang Sistem Remunerasi, beserta dengan Peraturan turunannya.yakni setiap pegawai berhak atas kompensasi berdasarkan:

c. Competency & Career Development System;
d. Learning System;
e. Performance Management System;
f. Reward System;
g. Industrial Relation System.

The HCMS Division administers the function of 4 main pillar, namely: Performance Management System, Reward/ Remuneration System, Industrial Relation System, Competency and Career Development System.

HCMS's main objective as part of HR management system is to support corporate strategy and the accomplishment of Company's objectives, specifically through optimization of human resource and Company's long term cost and expenses. This has been applied to employees that have been recruited since 2011 (for employees holding high school and Vocational high school degree) and in 2012 (for employees holding Associate Degree, Bachelors, Master and Professional degree) and of which in the long term will be standardized.

The details of PLN HR activities based on the HCMS implementation include:

1. Performance Management

Currently, PLN applies the Employee Performance Management System with the following objectives: i) the creation of performance assessment that builds and cultivates a culture of learning and accomplishment, as well as motivating employees to improve their competence and contribution to the Company, ii) as a guideline to evaluate employee performance in a more transparent, quantifiable, and objective manner, allowing the Company to provide fair and equal compensation and/ or reward based on employee performance in 1 (one) semester.

PLN established the Key Performance Indicators (KPI) as a success indicator of an organization/ work unit/Unit Leader and individuals within the Company. KPI are the measures of performance itself, while the KPI target is a performance target which states that the standard and agreed upon expected results and its compliance with the job description are the most important aspects for ensuring every employee has a proper position in accordance with the main objective of the job. PLN developed the KPIs through value drivers related to the strategic targets.

2. Remuneration System

PLN determines Employee remuneration by referring to the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 043.P/DIR/2015 on Remuneration System, as well as its derivative Regulation, namely that every employee is entitled to compensation based on:

a. *Pay for person* (P1), merupakan kompensasi atas kompetensi individu berdasarkan Level Kompetensi dan Grade.
b. *Pay for position* (P2), diberikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk uang yang bersifat tidak tetap dan melekat pada jabatan, yang besarannya ditentukan berdasarkan Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Khusus serta dipengaruhi oleh kehadiran untuk menyelesaikan pekerjaan dan/atau penugasan.
c. *Pay for performance* (P3), diberikan sebagai kompensasi atas prestasi kerja Pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

Selain Sistem Remunerasi di atas, PLN memberikan Benefit berupa Jaminan Sosial pegawai, meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan Bantuan Ganti Rugi.

Untuk jaminan Pensiun, maka bentuk pengelolaannya melalui dua skema, yakni Dana Pensiun Iuran Pasti dan Dana Pensiun Manfaat Pasti. PLN sudah mengikuti juga Program BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015 dan Program BPJS Kesehatan sejak tahun 2016.

3. Hubungan Industrial

PLN berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan melalui sarana-sarana hubungan industrial.

3.1. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

LKS Bipartit telah dilaksanakan di tingkat Unit Induk, Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana sebagai salah satu upaya untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan Manajemen, mencari alternative solusi kendala-kendala yang mungkin dan/atau telah terjadi serta mendapatkan masukan untuk perbaikan.

3.2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PLN telah memulai tahapan awal rangkaian perundingan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk maksud tersebut Perseroan telah menyusun materi perundingan PKB dan melakukan pembekalan kepada Tim Perunding PKB, baik dari unsur manajemen maupun unsur serikat pekerja.

Tim Perunding PKB dari Perseroan tersebut dibentuk dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 tanggal 15 April 2015 kemudian diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 tanggal 24 Juni 2015.

a. Pay for person (P1), which is individual compensation for individual competence based on Competency or Grade Level.
b. Pay for position (P2) variable compensation provided to Employee in monetary form that is inherent to the position, the amount is based on Position Allowance, Living Allowance, and Special Allowance, that are influenced by the attendance factor in completing work and/or assignment.
c. Pay for performance (P3), which is provided as a compensation for Employee work achievement, which is a real and measurable contribution, either individually or collectively.

In addition to the above Remuneration System, PLN also provides Benefits, including Employee Social Security, Work Accident Insurance, Life Insurance, Old Age Insurance, Retirement Insurance, Health Care Insurance, and Compensation Assistance.

The pension insurance is managed in two schemes, namely the Fixed Contribution Pension Fund and Defined Benefit Pension Fund. PLN has also participated in the BPJS Employment Program since 2015 and BPJS Health Program since 2016.

3. Industrial Relations

PLN strives to develop a harmonious, dynamic, and fair industrial relations through the facilities of industrial relations.

3.1. Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit)

LKS Bipartit has been implemented in the Parent Unit, Implementing Units, and Implementing Sub-Units as an effort to communicate management policies, resolving alternative solutions for issues, which may occur and/or have occurred, as well as obtaining input for improvement.

3.2. Cooperation Agreement (PKB)

PLN has commenced the initial stage of a series of discussions in order to formulate the Cooperation Agreement (PKB). The Company has drafted PKB discussion materials and provided briefings to the PKB Negotiation Team, both from the management and the labor union.

The PKB Negotiation Team was established through the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0088.K/DIR/2015 dated 15 April 2015, which was revised by the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0139.K/DIR/2015 dated 24 June 2015.

Sementara PKB yang baru masih dalam tahap perundingan, maka yang saat ini berlaku adalah PKB 2010-2012 beserta *Addendumnya* yang ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2013. Perundingan PKB beberapa kali terhenti dikarenakan adanya dinamika organisasi serikat pekerja di PT PLN (Persero).

While the new PKB is still in the discussion phase, the 2010-2012 PKB as well as its Addendum, which was signed on 11 October 2013 is currently still applicable. The PKB discussion was halted several times due to the dynamics of the labor union organization at PT PLN (Persero).

3.3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT PLN (Persero), supervisi dilakukan kepada Unit-Unit PLN terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada tahun 2016, antara lain :

a. Perkawinan Antar Pegawai;
b. Keberatan atas surat keputusan yang telah diterbitkan;
c. Pelanggaran Disiplin Pegawai; dan sebagainya.

3.4. Serikat Pekerja

Saat ini terdapat 4 (empat) serikat pekerja di PT. PLN (Persero). Perseroan mendorong keempat serikat pekerja untuk bersatu guna memudahkan mekanisme hubungan industrial antara manajemen perseroan dengan serikat pekerja.

3.5. Pembinaan Hubungan Industrial

Pembinaan hubungan industrial kepada pegawai dilakukan salah satunya melalui cara pendidikan dan pelatihan hubungan industrial di lingkungan PT PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh PLN Pusdiklat. Pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi Diklat Hubungan Industrial Dasar, Diklat Hubungan Industrial Terapan dan Diklat Investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai.

Selain itu untuk mempercepat penyamaan pengetahuan tentang hubungan industrial, pembinaan hubungan industrial dilakukan di Unit - Unit dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan praktisi ketenagakerjaan untuk mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja.

3.3. Industrial Relations Disputes Settlement

To realize Good Corporate Governance within PT PLN (Persero), supervision is conducted on PLN Units that are related to industrial relations disputes settlement.

Industrial relations disputes matters that occurred in 2016 are, among others:

a. Marriage Between Employees;
b. Appeal on issued decision letter;
c. Employee Disciplinary Violation; and others

3.4 Labor Union

There are currently 4 (four) Labor Unions at PT PLN (Persero). The Company encourages the four labor unions to unite in order to facilitate the industrial relations mechanisms easier between the management of the Company and the labor union.

3.5. Industrial Relations Development

The industrial relations development to employees is conducted through industrial relations education and training in PT PLN (Persero) which is conducted by PLN Corporate University. The education and training include Basic Industrial Relations Training, Applied Industrial Relations Training, and Employee Disciplinary Violation Investigation Training.

In addition to accelerate the alignment of knowledge on industrial relations, industrial relations development is conducted in the Units by inviting keynote speakers from the Ministry of Manpower and employment practitioners to realize a harmonious, dynamic, and fair Industrial Relations to ensure work and business sustainability.

4. Kesetaraan Kesempatan dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir

PLN melaksanakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dengan menerapkan ketentuan bahwa pengembangan eksekutif dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap level, dan pengelolaan calon pemimpin masa depan dilakukan melalui penyempurnaan sistem *talent management*.

4. Equal Opportunity for Career Competency Development

PLN consistently applies competency-based HR management system by enforcing policies on which executive career development must go through HR competence development procedures in accordance to the rules and regulations imposed at each career level, and the administration of executive candidates is executed through improved Talent Management System.

Jabatan Manager Menurut Jenis Kelamin
Manager Position According to Gender

Uraian	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	Description
Manajemen Atas	5	105	110	Top Management
Manajemen Menengah	37	388	425	Middle Management
Manajemen Dasar	160	1.213	1.373	Basic Management
Jumlah	202	1.706	1.908	Total

Sesuai dengan tabel tersebut tampak bahwa pada setiap jenjang manajer terdapat sebagian pejabat berjenis kelamin wanita. Mayoritas pejabat berjenis kelamin pria semata-mata karena sifat usaha yang lebih banyak berlangsung di lapangan yang membuat kebutuhan pegawai laki-laki lebih dominan.

As illustrated in the table, each level of management comprises both genders. The majority of the officers are male due to the nature of PLN's business, which made the male more dominant.

PROGRAM REKRUTMEN

Pelaksanaan rekrutmen berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, tes akademik, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program orientasi. Kebijakan umum yang diterapkan adalah bahwa proses penerimaan pegawai berawal dari kebutuhan unit bisnis (*user*) dan dalam bagian akhir (wawancara) juga melibatkan *user*.

PLN merealisasikan proses rekrutmen untuk jenjang jabatan tertentu secara terbuka untuk menjaring calon SDM yang kompeten dan bertalenta tinggi. Sementara untuk rekrutmen rutin bagi calon pegawai dari jenjang pendidikan S2, S1/D-IV, D-III, dan SMA/SMK dilakukan dengan metode rekrutmen umum maupun rekrutmen khusus. Rekrutmen *fresh graduate* untuk jenjang pendidikan S2, S1/D-IV dan D-III dilaksanakan secara terpusat dan dikoordinir oleh Kantor Pusat, sedangkan untuk rekrutmen untuk jenjang pendidikan SMA/SMK pelaksanaannya dilakukan terbuka dan dapat dilakukan oleh masing-masing Unit Induk dengan supervisi dari bidang rekrutmen dan seleksi kantor pusat.

Hasil proses rekrutmen dievaluasi tiap tahun, dan dilakukan *mapping* dengan kebutuhan pegawai dari masing-masing unit pada tiap periode operasional. Proses rekrutmen dari masing-masing unit akan terus dibuka hingga memenuhi jumlah Formasi Tenaga Kerja yang ditetapkan.

RECRUITMENT PROGRAM

Employee recruitment is based on short term and long term workforce requirement planning. The selection process involves an independent third party with candidates to initially fulfill administration aspect, undergoing aptitude test, psychological test, medical test and interview involving end users. Prior to assignment as permanent employee, candidates have to undergo an orientation program. Other employee recruitment general policies are that the requirement for new employees must be initiated by end users and end users must be involved during interviews as the last phase of recruitment process.

To obtain highly competent and talented candidates, PLN recruitment policy for a certain employment position levels is done openly. In the meanwhile, for routine recruitment of candidates holding master degree, undergraduate degree, diploma, and high schoo/vocational graduates can be done through regular or special recruitment procedure. Recruitment of fresh graduates with master, bachelor, and associate degrees is done centrally at Company's head office. Whereas, employee recruitment for candidates holding High School/ Vocational School qualifications is performed openly and can be done by Company's main units under the supervision of head office Recruitment and Selection Department.

The recruitment outcomes are evaluated annually and mapped out according to workforce requirement of each working unit at every stage of operation. Recruitment of employees at every unit to remain open until the amount of workforce is fulfilled.

Pada tahun 2016, PLN telah mengangkat pegawai baru sebanyak 5.245 pegawai dari target yang sama (5.245 pegawai).

In 2016, PLN recruited 5,245 new employees of the same target (5,245 employees).

Tingkat Pendidikan Academic Background	**Total S2** Masters Degree	**Total S1** Bachelors Degree	**Total D3** College Degree	**SMA** High School or Equivalent	**Pegawai Kontrak** Under Contract	**Jumlah** Total
Total	7	2.189	1.682	1.356	11	5.245

Keseluruhan realisasi pengangkatan tersebut adalah untuk mendukung program 35.000 MW dengan 3 strategi utama yaitu:

1. Meningkatkan kecepatan, akurasi dan efisiensi sistem rekrutmen calon pegawai baru dengan cara :

The total recruitment realization is to support the 35,000 MW program with 3 main strategies, namely:

1. Improving the speed, accuracy, and efficiency of new employee recruitment, with the following methods:

Cepat
Fast

- Pengguna Seleksi IT Based
  The use of IT-Based Selection
- Social Media
  Social Media

Akurat
Accurate

- Tools seleksi up to date
  Up to Date Selection Tools (TAP/CAT)
- Kompetensi tester
  Competency Test

Efisien
Efficient

- Waktu seleksi
  Selection Time
- Biaya seleksi
  Selection Cost

Pada tahun 2016 biaya seleksi dapat ditekan menjadi Rp 6.656.470,22 per orang dari rencana anggaran tahun 2016 Rp 11.000.000,- per orang. Adapun jumlah pegawai baru yang dididik dan diangkat mencapai delapan angkatan atau meningkat dari sebelumnya yang hanya lima angkatan dengan tetap memperhatikan kualitas pegawai baru.

Peningkatan jumlah angkatan pegawai baru yang dididik dan diangkat dipengaruhi oleh kecepatan proses seleksi yang dapat ditingkatkan dari rata-rata 94 hari kerja menjadi hanya maksimal 62 hari kerja. Peningkatan ini adalah akibat dari dilaksanakannya seleksi administrasi dan seleksi psikotest aspek inteligensi berbasis IT yang didukung oleh PLN *Corporate University* dan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Sinergi antar unit dan anak perusahaan diharapkan meningkat pada tahun 2017 demi tercapainya rekrutmen yang profesional, berkeadilan, efektif dan efisien.

In 2016, the recruitment cost was successfully reduced to Rp 6,656,470 from Rp 11,000,000 per person as per 2016 budget. Total new employeees trained and recruited reached eight batches, an increase from the previous period of only five batches, whilst maintaining the quality of new employees.

The increase in the number of new employees trained and recruited is owed to the speed of selection process from an average of 94 working days to 62 working days. The increase is due to the application of an IT-based administration selection process and intelligent psychotest, which has been supported and developed by PLN Corporate University and PT Pembangkitan Jawa-Bali. The mutual cooperation between HR units and subsidiaries is expected to improve in 2017 to accomplish a professional, fair, effective, and efficient recruitment.

2. Meningkatkan kompetensi pegawai baru dengan penajaman pada sisi pembidangan pegawai baru agar sesuai dengan penempatan dan kebutuhan user. Selain penajaman pada sisi pembidangan pegawai baru, sistem *On the Job Training* (OJT) juga dipertajam dari berbasis *project* menjadi lebih pada pelaksanaan tugas sesuai proyeksi jabatan siswa diklat prajabatan ketika nantinya akan diangkat sebagai pegawai baru. Penempatan OJT tahun 2016 menjadi lebih akurat karena penempatan siswa OJT adalah pada unit pengangkatannya, sehingga kompetensi yang didapat saat OJT sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh user.

3. Pengisian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari target 1000 orang dalam 2 tahun dimana tahun 2016 direncanakan akan diisi 500 orang sedangkan sisanya pada tahun berikutnya. Strategi ini adalah strategi pengawasan dalam pelaksanaan program 35.000 MW agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pada tahun 2016 jumlah pegawai yang direkrut dan atau diangkat untuk satuan SPI adalah 772 orang.

2. One way of raising new employees' competencies is through job description refinement to correspond to the assignment and needs of users. In addition to job description refinement, the On The Job (OTJ) system has also been perfected, from project-based to task-based assignment according to the intended position of the trainee when he/she is recruited as a new employee. OJT placement has became more precise in 2016 since OJT trainees are assigned on the Unit of his/her appropriate career path, consequently the working experience obtained during the OJT are in accordance with the abilities required by users.

3. In regard to the recruitment target of 1,000 employees within two years for Internal Audit Unit (IAU), 500 employees were recruited during 2016 while the rest will be filled in the following year. This scheme is to fulfill the supervisory needs to monitor the 35,000 MW program advocating GCG principles. In 2016, 772 employees were recruited for various positions within the Internal Audit Unit.

SEKILAS TENTANG TES ADAPTIF PLN
PLN ADAPTIVE TEST IN BRIEF

Seiring dengan kebutuhan peningkatan jumlah pegawai karena pengimplementasian Program 35.000 MW, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendapatkan standar rekrutmen yang baik untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Oleh karenanya, PT PLN (Persero) melalui Unit Assessment Centre Pusdiklat menerapkan inovasi asesmen berupa Tes Adaptif PLN (TAP). Tes ini mengukur tes kemampuan kognitif dengan pendekatan *Computerized Adaptive Testing* (CAT) yaitu suatu metode tes untuk mengukur kemampuan (*ability)* peserta tes. Tujuan dari penerapan test adaptif ini adalah mendapatkan keakuratan rekrutmen pada calon pegawai langsung pada *job description* yang ada di PT PLN (Persero).

In conjunction with the additional employee requirement for the 35,000 MW program, PLN is steadfastly trying to acquire superior recruitment standards in order to recruit highly talented personnel. PLN , through its Assessment Unit at its Training Center introduced an innovation called The Adaptive Test (TAP). This test measures the cognitive ability of candidates utilizing Computerized Adaptive Testing (CAT). The purpose of this adaptive test is to obtain and hire the right personnel in line with the right job description.

Soal-soal tes yang disajikan disesuaikan dengan kemampuan peserta tes. Pengaturan penampilan soal-soal tes dilakukan oleh komputer. Kelebihan metode CAT adalah hasil pengukuran lebih cepat dan akurat dibandingkan tes tradisional (*paper and pencil test*). Bagi peserta, mengerjakan CAT akan terasa lebih nyaman dibandingkan metode tradisional. Hal ini dikarenakan soal yang disajikan akan disesuaikan dengan kemampuan peserta. Jumlah soal yang disajikan akan lebih sedikit karena peserta tidak perlu mengerjakan soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah.

Test Questions are tailored to the ability of candidates. Test materials are arranged and automatically displayed on screen. The advantage of the CAT method is that the assessment can be completed more quickly and accurately compared to the traditional paper and pencil test. The CAT is more convenient compared to traditional testing methods, because the test is tailored to the participants' different abilities, the numbers of questions presented is more flexible, and participants do not need to answer questions that are too difficult or too easy.

Sistem penilaian pada CAT berdasarkan pada Teori Respons Modern atau lebih dikenal dengan IRT (*Item Respon Theory*). Dalam IRT, setiap soal tes akan dianalisis dan menghasilkan sejumlah informasi diantaranya: tingkat kesulitan soal (*difficulty*), daya pembeda (*discrimination*), peluang tebakan (*guessing*), dan ketidaktelitian (*inattention*). Informasi yang didapat dari setiap analisis soal tersebut digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta pada tes yang dikerjakan.

The CAT scoring system is based on the Theory of Modern Response or better known as the IRT (Item Response Theory). In IRT, each answer to a question is analyzed revealing information that includes : test question difficulty level, distinguishing features (discrimination) , guessing probability, and inaccuracy (inattention). From Information obtained from the analysis of test answers, the ability of the participants can be assessed.

TAHAPAN PENGEMBANGAN TES ADAPTIF PLN

PT PLN (Persero) Unit Assessment Centre (PLN Aster) memulai pengembangan Tes Adaptif PLN dengan tahapan sebagai berikut:

1. Benchmark metode CAT ke The Psychometric Centre, University of Cambridge pada tanggal 26 Agustus 2014.
2. Pengembangan PLN Business Reasoning (PBR) sebagai konten alat ukur untuk Tes Adaptif PLN. PBR terdiri dari tiga aspek ukur yaitu penalaran Abstrak, penalaran Verbal, dan penalaran Numerik.
3. Workshop CAT (Jakarta, 20 November-4 Desember 2015). Dipandu langsung (*hands on*) oleh Dr. David Stillwell (Deputy Director) dan Vaishali Mahalingam (Psychometricians) dari The Psychometric Centre, University of Cambridge.
4. Implementasi CAT (16 Februari 2016) pada pelaksanaan Assessment Centre peserta Executive Education II di 5 lokasi Udiklat (Jakarta, Suralaya, Semarang, Padang, dan Tuntungan) dan diikuti oleh 105 orang peserta. PT PLN (Persero) menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerapkan CAT pada fungsi *Human Resources*. Karena,CAT di PLN menggunakan sistem *Adaptive Test*, bukan sistem *Assissted Test* (memindahkan soal tes pada buku ke dalam komputer) seperti halnya pada metode *computer based test* lainnya. Berdasarkan testimoni dari University of Cambridge, PLN juga termasuk *leading* dalam penerapan CAT untuk asesmen di perusahaan.

PLN ADAPTIVE TESTS DEVELOPMENT STAGES

PLN Assessment Center Unit (PLN Aster) began development of the Adaptive Test in the following stages:

1. Benchmarked the CAT method to The Psychometric Center, University of Cambridge on August 26, 2014.
2. PLN Business Reasoning (PBR) as a measurement tool for PLN's Adaptive Test . PBR consists of three aspects, namely, abstract reasoning, verbal reasoning and numerical reasoning.
3. CAT Workshop (Jakarta, 20 November-4 December 2015). Guided directly (hands on) by Dr. David Stillwell (Deputy Director) and Vaishali Mahalingam (psychometricians) from The Psychometric Center, University of Cambridge.
4. The CAT system was put to use on February 16th 2016 at the Assessment Center for Executive Education Training II in 5 locations (Jakarta, Suralaya, Semarang, Padang, and Tuntungan) attended by 105 participants. PLN) became the first company in Indonesia to implement the CAT system in human resource management. PLN's CAT utilizes the Adaptive Test system to good effect, not merely assisted by a test system (transferring test materials on paper into computer) unlike other computer-based test systems. Based on the testimony of the University of Cambridge, PLN is a world leader in the application of CAT assessment in the Company.

5. Launching Tes Adaptif PLN (TAP). Metode *Computerized Adaptive Testing* di PLN di-branding dengan nama/merk Tes Adaptif PLN (TAP). TAP sendiri berarti "ketuk", sebagai padanan kata dari "klik" pada mouse komputer, untuk melakukan pilihan pada *smart devices* berbasis layar sentuh. Hal ini menggambarkan bahwa tes ini adalah tes yang modern sudah mengakomodasi penggunaan pada media *smart devices*. *Tagline* yang digunakan adalah: "Assessment? Just TAP!". Yang memiliki dua pengertian yaitu:
   * Tes Adaptif PLN (TAP) adalah jawaban jika ingin melakukan asesmen.
   * Sebagai tes modern, untuk melakukan asesmen hanya perlu mengetuk (*tap*) pada layar *smart devices*.

   Peluncuran perdana Tes Adaptif PLN dilakukan pada tahapan rekrutmen pegawai tingkat S1/D.III/D.IV melalui titian karier ITB yang dilakukan di Bandung pada tanggal 27-29 April 2016. *launching* TAP ini sekaligus juga menegaskan bahwa PLN sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan dan menerapkan metode CAT untuk keperluan rekrutmen calon pegawai.

5) In launching the PLN Adaptive Test (TAP). PLN branded this Computerized Adaptive Testing method "The PLN Adaptive Test (TAP)". TAP itself means "tap", a synonym of "click" on a computer mouse, to make a selection on the screen of smart devices . This illustrates that it is a modern test method using smart media devices. The tagline is: "Assessment? Just TAP!" Which has two meanings, namely:
   - Adaptive Test PLN (TAP) is the answer if you wish to make am assessment.
   - As a modern testing method, to make an assessment just tap on the screen of smart devices.

   The grand launching of PLN's Adaptive Tests was at the personnel recruitment level S1 / D.III / D. IV through the ITB career bridge in Bandung on April 27-29, 2016. This TAP launching moreover confirmed that PLN as the first company in Indonesia to develop and implement CAT for employee recruitment purposes.

Pengembangan TAP tahun 2017

TAP Development Year 2017

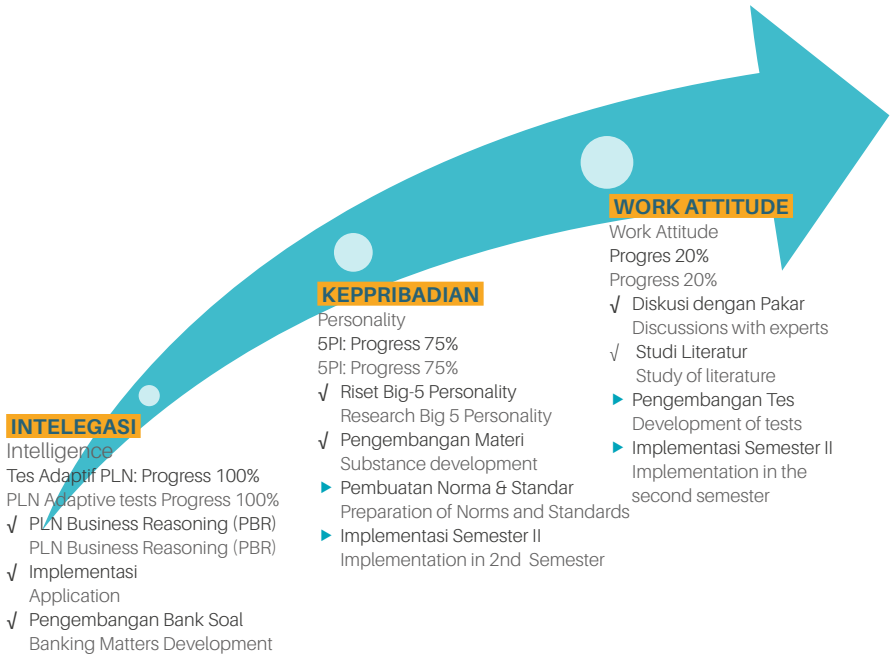

Kebutuhan rekrutmen di tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai salah satu tools rekrutmen, TAP perlu dikembangkan dan diperluas penggunaannya. Materi tes TAP tahun 2017 tidak hanya mengukur aspek intelegensi saja, tetapi juga dikembangkan sehingga dapat mengukur aspek kepribadian dan sikap kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan perusahaan (Kepdir No. 379.K/DIR/2010 tentang HCMS) bahwa tahapan tes psikologi dalam rekrutmen harus mengukur aspek kecerdasan, kepribadian dan sikap kerja.

Personnel recruitment in 2017 increased compared to the previous year. As one of the methods of recruitment, TAP should be further perfected and expanded. TAP test subject matter in 2017 should not only measure intelligence , but must also be able to assess personality traits and work ethic. This is in accordance with the provisions of the Company (Kepdir No. 379.K / DIR / 2010 on the HCMS) that the psychology tests phase during personnel recruitment must also be able to assess levels of intelligence, personality and work ethic.

PROGRAM PEMBELAJARAN

Maksud Program Pembelajaran di PLN adalah program untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kualitas insan PLN melalui penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen untuk mewujudkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan *(stakeholder)*, serta bertujuan untuk menyiapkan insan PLN yang profesional, bersemangat, dan berintegritas guna mendukung penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan.

Adapun jenis Program Pembelajaran meliputi :

1. **Program Pembelajaran Calon Pegawai Baru**
   Program Pembelajaran yang dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada seorang calon pegawai baru, yang terdiri dari :
   a. Program Pembelajaran Prajabatan
   b. Program Kerjasama Pendidikan *(co-operative education)*
   c. Program Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi

2. **Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi**
   Merupakan program pembelajaran untuk memenuhi kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jabatan dan profesi di Perseroan. Dimana program pembelajaran ini terdiri dari :
   a. Program pembelajaran profesi wajib *(mandatory)*
   b. Program pembelajaran profesi pengayaan *(enhancement)*

   Program pembelajaran profesi dirancang untuk selaras dengan program sertifikasi personel/kompetensi yang diakui secara nasional/internasional.

3. **Program Pembelajaran Kepemimpinan**
   Merupakan program pembelajaran untuk memenuhi kompetensi peran, termasuk juga kompetensi utama dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan struktural dan fungsional di Perseroan.

   Program pembelajaran ini meliputi :
   a. Executive Education
   b. Strategic Specialist Education
   c. Leadership Web Based Training
   d. Leadership Capability Development Program

4. **Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat**
   Merupakan program pembelajaran untuk meningkatkan kinerja unit/korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program ini hanya ditujukan untuk unit/ pegawai tertentu.

5. **Program Pembelajaran Penunjang**
   Merupakan program pembelajaran yang dibutuhkan oleh Perseroan, namun belum menjadi program pembelajaran profesi dan sertifikasi maupun program pembelajaran kepemimpinan.

LEARNING PROGRAM

The Learning Program in PLN is the program to develop, maintain, and improve the quality of PLN personnel through learning and assessment to generate added value for the stakeholders, as well as to prepare PLN personnel to be professional, high spirited, and with integrity to support the creation of a sustainable corporate values.

The Learning Program includes:

1. **Prospective Employee Learning Program**
   The Learning Program that is conducted to prepare the prospective employees, consists of:
   a. Pre-recruitment Learning Program
   b. Cooperative Education Program
   c. Cooperation Program with Higher Education Institutions

2. **Profession and Certification Learning Program**
   The learning program to fulfill the competencies required in each position and profession in the Company. The learning program consists of:
   a. Mandatory professional learning program
   b. Professional enhancement learning program

   The professional learning program is designed to be in line with the personnel/competence certification program that is recognized nationally/internationally.

3. **Leadership Learning Program**
   The learning program fulfills the role of competency, including the main competence and field competence, which is required in each structural and functional position in the Company.

   The learning program consists of:
   a. Executive Education
   b. Strategic Specialist Education
   c. Leadership Web Based Training
   d. Leadership Capability Development Program

4. **Corporate Strategic Initiative Learning Program**
   The learning program to improve the unit/corporate performance in the short term and in the long term. This program is only intended for certain units/ employees.

5. **Supporting Learning Program**
   The learning program needed by the Company, but yet to become a professional and certification learning program, as well as leadership learning program.

Jenis program ini antara lain :
a. Pendidikan formal
b. *Workshop*/lokakarya/seminar
c. Pengelolaan pengetahuan

6. **Program Pembelajaran Masa Purna Bakti**
Merupakan program pembelajaran untuk membangun kompetensi pegawai yang terkait dengan sikap, mental, dan perilaku untuk meniti karir selanjutnya setelah pensiun sebagai pegawai.

Realisasi 2016

Sepanjang tahun 2016, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk SDM adalah sebagai berikut:

The programs are, among others:
a. Formal Education
b. Workshop/ seminar
c. Knowledge management

6. **Post Employment Period Learning Program**
The learning program to develop employee competence related to the attitudes, mentality, and behaviour to pursue the next career after retiring as an employee.

2016 Accomplishment

Throughout 2016, training and education programs provided to employees were as follows:

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Hari/ Orang Number of Days/ Person	Jumlah Peserta Total Participants	Jumlah Program Number of Programs	Type of Training
1	Diklat Prajabatan	25,89	15.612	279	Pre Assignment Training
2	Diklat Profesi	5,19	41.063	2.916	Profession Training
3	Diklat Penjenjangan	2,59	19.803	1.059	Career Development Training
4	Diklat Penunjang	2,43	10.789	552	Support Training
5	Diklat Purnabakti	8,42	2.183	254	Post Retirement Training
6	Strategik	1,66	8.229	405	Strategic

OPTIMALISASI PEGAWAI

Sehubungan dengan Program Pembangunan 35.000 MW Pembangkit baru maupun rencana pembangkit eksiting beserta fasilitas pendukungnya, membuat PLN terpacu untuk mengoptimalkan kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini, selain mulai melakukan proses rekrutmen berjenjang sesuai kebutuhan.

Menyusul perubahan struktur organisasi yang mendasar, dengan adanya 7 regional sebagai Direktrorat yang menangani proses bisnis end-to-end, program-program yang tercakup dalam HCMS dipercepat implementasinya. Penjenjangan, pelatihan, penilaian kinerja serta proses mutasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pegawai dijalankan bersamaan, dengan ringkasan program sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan karir dan kompetensi Pegawai sebagai tindak lanjut dari kelulusan Diklat Penjenjangan, Uji Portofolio Kompetensi, hasil fit and proper test.
2. Pelaksanaan mutasi Pegawai antar unit PLN dan program rotasi OJT angkatan 39 dan 40 dengan Pegawai pengangkatan Pusat sejak tahun 2000 di luar Pulau Jawa untuk mutasi ke Unit-unit yang ada di Pulau Jawa.
3. Pengusulan Diklat Penjenjangan bagi Pegawai yang sudah memenuhi syarat dan menjadi prioritas untuk mengikuti diklat penjenjangan.
4. Pengisian Formasi Jabatan yang menjadi kewenangan PLN Pusat untuk jabatan yang kosong akibat pegawai

EMPLOYEE OPTIMIZATION

In association with the development of the 35,000 MW new and existing Power Plants as well as the supporting facilities, PLN strives to optimize the competencies of its existing employees, as well as conducting tiered recruitment based on organizational needs.

Following the basic changes to the organizational structure, 7 regionals as Directorates which manage end-to-end business processes, speeding up the implementation of HCMS programs. Tiered training, performance review, as well as transfer processes according to the competency and need of the employee are implemented simultaneously through the following program summary:

1. Implementation of Employee Career and Competence Training as a follow-up to the completion of Tiered Training and Competence Portfolio Testing, incorporating the result for the fit and proper test.
2. Implementation of employee transfer between PLN units and OJT transfer program for batches 39 and 40 with Head Office employees who have been working outside Java to be transferred to units in Java.
3. Nomination of Tiered Training for Employees who have fulfilled the requirements and become prioritized for the tiered training.
4. Filling Position Formation, which is the authority of PLN Head Office for vacant positions due to retirement

yang pensiun atau rotasi mutasi mulai dari Level Manajemen Dasar Unit Pelaksana hingga Level Manajemen Atas termasuk di Anak Perusahaan
5. Evaluasi pemberhentian Pegawai akibat Pensiun Normal, pengajuan Pensiun Dini, dan Masa Persiapan Pensiun.
6. Penjaringan, penilaian dan evaluasi kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan serta pengurus Dana Pensiun.
7. Bersama Bagian Hubungan Industrial melakukan evaluasi dan penindakan pelanggaran disiplin Pegawai serta tindak lanjut kasus –kasus Hubungan Industrial.
8. Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pegawai Tugas Karya sebagai bentuk pelaksanaan addendum PKB 2010-2012 Pasal 70 tentang Perkawinan Antar Pegawai.

or transfer from the level of Basic Management up to Top Management including in Subsidiaries.
5. Evaluation on Employee resignation due to Normal Retirement, Early Pension, and Pension Preparation Period.
6. Recruitment, assessment, and evaluation on candidates of the Boards of Commissioners and Directors of Subsidiaries as well as Pension Fund Administrators.
7. In collaboration with the Industrial Relation Division, evaluate and determine sanctions for Employee violations, as well as following-up Industrial Relations cases.
8. Evaluation on the implementation of Employee Training for Duty as an implementation of the Addendum of the 2010-2012 PKB, Article 70, on Marriage Between Employees.

PROGRAM DANA PENSIUN

Dana Pensiun PLN merupakan Badan Hukum yang terpisah dari Pendirinya (PLN) dan bertugas mengelola dana yang dihimpun dari iuran pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berhenti bekerja bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak).

Tujuan pendirian Dana Pensiun PLN adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai PT PLN (Persero) beserta anak perusahaannya yang menjadi Mitra Pendiri, yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam dan PT Indonesia Comnets Plus.

Penyelenggaraan program pensiun ini khusus bagi pegawai pendiri dan mitra pendiri yang diangkat menjadi pegawai sebelum Januari 2012. Seiring dengan peralihan bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi Dana Pensiun PT PLN (Persero), atau disebut juga Dana Pensiun PLN (DP-PLN).

Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2013 sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-481/NB.1/2013 tanggal 11 September 2013.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang program pensiun, maka disusun Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero). Saat ini yang berlaku adalah sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 008.E/DIR/2013 tanggal 18 November 2013.

SISTEM INFORMASI SDM

PLN juga terus mengembangkan Sistem Informasi SDM dengan mengoptimalkan kemampuan anak usaha di

PENSION FUND PROGRAM

The PLN Pension Fund is a separate entity from its founder (PLN) and has the responsibility to manage the funds collected from pension contributions to ensure and maintain sustainable of income after retirement for the Participant or the Beneficiaries (Widow/ Widower/Child).

The PLN Pension Fund was established to implement the Defined Benefit Penson Program (PPMP) for PT PLN (Persero) employees as well as its co-fouding subsidiaries, namely PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN Batam, and PT Indonesia Comnets Plus.

The pension program is specifically applied for founders and co founders who were employed prior to January 2012. Along with the legal transition of General State-Owned Electricity Company into PLN (Persero), the name of the Pension Fund was then changed into the Pension Fund of PT PLN (Persero), also known as Pension Fund of PLN (DP-PLN).

Currently, the prevailing regulation regarding the Pension Fund is PT PLN (Persero) Pension Fund Regulation in accordance with the Decision of OJK Commissioners No. KEP-481/NB.1/2013 dated 11 September 2013.

To implement the pension fund regulation, the Procedures and Guidelines for the Enforcement of the Pension Program based on the Pension Fund Regulation of PT PLN (Persero) of PT PLN (Persero) Pension Fund has been drafted. The Circular of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 008.E/DIR/2013 dated 18 November 2013 currently prevails.

HR INFORMATION SYSTEM

PLN also continues to develop its HR Information System by optimizing the Information Technology of its subsidiaries. In

bidang Teknologi Informasi. Untuk tahun 2016 PLN telah menyelesaikan Perancangan dan Implementasi *software talent pool,* dimana untuk aplikasi sudah siap 100%, sedangkan kebijakan yang mendukung program ini masih belum selesai seluruhnya.

TINGKAT *TURN-OVER*

Dengan berbagai upaya pengelolaan SDM yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, PLN berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya tingkat turn-over pegawai.

Pada Tahun 2016 tercatat ada 2.891 pegawai PLN yang berhenti, atau berarti mencapai 5,65% dari total pegawai PLN per-akhir tahun yang mencapai 51.158 pegawai. Rincian pegawai yang berhenti adalah 2.558 karena faktor alami (pensiun), 135 karena meninggal dunia, 91 karena mengundurkan diri, 47 karena pensiun dini, 31 karena pemutusan hubungan kerja, 22 karena pensiun uzur, dan 7 karena tewas. Di sisi lain pada tahun 2016, PLN merekrut 5.245 untuk berbagai posisi tertentu.

DAMPAK KEUANGAN PENGELOLAAN SDM

Setiap tahun PLN menganggarkan sejumlah dana yang memadai untuk memastikan dipenuhinya kesejahteraan pegawai. Selain dimaksudkan sebagai imbalan atas jasa pegawai, dana belanja pegawai dimaksudkan sebagai insentif agar setiap pegawai tergerak untuk memberikan kompetensi terbaiknya dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

Oleh karena itu, pada umumnya dana belanja pegawai PLN setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut bukan semata pengaruh penambahan pegawai, namun selaras dengan kenaikan skala usaha. Agar ada kesesuaian antara jumlah SDM dengan skala usaha, PLN merealisasikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Dengan demikian, maka dampak keuangan pengelolaan SDM terdiri dari dua bagian besar, yakni menyangkut pemberian imbal jasa (beban pegawai) serta penyediaan anggaran pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Beban Pegawai

Beban pegawai PLN tahun 2016 sebesar Rp21,23 triliun. Beban kepegawaian tersebut terdiri dari: imbalan kerja, gaji, jasa produksi dan insentif prestasi kerja, tunjangan dan lain-lain.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai

Secara total, pada tahun 2016, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan baik yang berasal dari PLN, anak Perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp741 Miliar.

2016, completed the talent pool Design and Implementation software, with the application being 100% ready, while the policies to support the program have not been fully completed.

EMPLOYEE TURN OVER RATE

With various HR managing efforts conducted in a fair, transparent, and impartial manner, PLN has succeeded in creating a favorable work environment for all employees. This is illustrated by the relatively low employee turnover rate.

In 2016, 2,891 PLN employees no longer worked in the Company, or 5.65% of the total of PLN's 51,158 employees. The breakdown is as follows: 2,558 employees retired, 135 employees passed away, 91 resigned, 47 took early retirement, 31 employees were terminated, 22 retired due to old age, and 7 employees died due to accidents. Conversely, PLN recruited 5,245 new employees in 2016, to be assigned to various positions.

FINANCIAL IMPACT OF HR MANAGEMENT

Every year, PLN allocates a sufficient amount of funds to ensure the fulfillment of employee welfare. Apart from compensating the employees' services, the funds serve as an incentive to encourage every employee to give their utmost best while performing their daily tasks.

On that account, employee expenditures generally increase every year. The increase is not only due to the increase in employee number, but also due the expansion on the scale of business. To align the number of HR with the scale of business, PLN implements competency training and development programs.

The financial impact of HR management comprises of two main components, namely for services compensation (employee expenses) and competency training and development.

Employee Expense

PLN personnel expenses in 2016 amounted to Rp 21.23 trillion. This expenditure comprised: employee compensation, salaries, production incentives and work performance bonus, fringe benefits and others.

Employee Competency Development Expense

In 2016, the PLN Training Center conducted training programs for PLN employees, subsidiaries, and external parties, with a total budget for education and training of Rp741 billion.

Mengingat besarnya biaya pegawai dan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung program peningkatan kompetensi, dalam melakukan penambahan pegawai maupun melaksanakan program menyangkut kepegawaian, PLN mempertimbangkan ukuran produktivitas pegawai sebagai salah satu butir yang diperhatikan. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program pelatihan, menunjukan memiliki korelasi positif dengan produktivitas pegawai yang diukur melalui satuan energi terjual per pegawai, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Given the magnitude of employee costs and other expenses incurred to support the competency enhancing program, PLN considers employee productivity when recruiting new employees and executing personnel-related programs. In relations to this, the execution of training programs shows a positive correlation with employee productivity. Employee productivity is measured by the unit of energy sold per employee, illustrated in the following table.

Produktivitas Pegawai (Energi Terjual MWh/Jumlah Pegawai)

Employee Productivity (Unit of Energy sold MWh of sales/ Number of Employees)

Tahun/Year	**Produktivitas Pegawai**/Employee Productivity
2012	4.019,7 MWh/pegawai/Employees
2013	3.836,0 MWh/pegawai/Employees
2014	4.131,7 MWh/pegawai/Employees
2015	4.915 MWh/pegawai/Employees
2016	4.914 MWh/pegawai/Employees

SURVEI SDM

Pada setiap periode tertentu PLN menyelenggarakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan *engagement* pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan berkarya di lingkup perusahaan. Visi dan misi mengisyaratkan bahwa sumber daya manusia yang ada di PT PLN (Persero) diperlukan tidak hanya kompeten, namun juga memiliki komitmen terhadap organisasi, *engaged*, berkinerja tinggi, sebagai perwujudan dari individu karyawan yang puas, bahagia dan sejahtera.

Untuk itulah, Perseroan merealisasikan program *Employee Engagement Survey* (EES)/Survey Kepuasan dan Engagement Pegawai bekerja sama dengan pihak Independen. Adapun tujuan survei ini adalah:

- Memperoleh gambaran data kepegawaian PT. PLN (Persero) sebagai *baseline* dari ke-12 variabel yang diukur.
- Mendapatkan kuesioner versi singkat yang lebih efisien dan efektif.
- Mendapatkan hasil analisis dari 12 variabel baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk tahun 2016.
- Mendapatkan rekomendasi mengenai kegiatan intervensi pengembangan sumber daya manusia.

Dari hasil survei antara lain tampak bahwa tingkat kepuasan karyawan PLN mengalami peningkatan. Dari skor 72 pada tahun 2015 menjadi 75 pada tahun 2016. Berikut ini rinciannya.

HR SURVEY

PLN periodically conducts surveys to measure the satisfaction and engagement level of employees in performing their tasks, fulfilling duties and contributing labor to the Company. The Company's vision and mission compel that all employees in PT PLN (Persero) are only not to be competent, but must as well be committed to the organization, engaged, and high performing, quintessence of satisfied, content, and successful employees.

On that account, the Company established Employee Engagement Survey (EES) program in collaboration with independent parties. The objectives of the surveys are as follows:

- To obtain wide-ranging picture of PT PLN (Persero) employment data as the baseline for the 12 assessed variables.
- To obtain more efficient effective and concise questionnaires.
- To obtain results from the analysis of the 12 assessed variables, both quantitatively and qualitatively for 2016.
- To obtain recommendations on human resources development intervention activities.

The result of the survey indicated that the satisfaction level of PLN employees has improved. From score level of 72 in 2015, to 75 in 2016. The details are as follows:

INDIKATOR	**SKOR** SCORE			**INDICATOR**
	2016	**2015**	**2014**	
Work Egagement	80	78	77	Work Egagement
Leadership Quality	73	71	70	Leadership Quality
Job Demands	43	42	46	Job Demands
Social Support	78	77	76	Social Support

Burnout	27	29	30	Burnout
Job Satisfaction	75	72	72	Job Satisfaction
Organizational Commitment	79	77	75	Organizational Commitment
Extra-role Performance	80	80	79	Extra-role Performance
In-role Performance	80	79	78	In-role Performance
Innovative Work Beheviour	77	62	61	Innovative Work Beheviour
Organizaional Memory	74	68	67	Organizaional Memory
Organizational Identity	67	52	52	Organizational Identity

Interpretasi Skor
Score Interpretation

Skor Dimensi Negatif Negative Dimension Score	Interpreasi Interpretation	Skor Dimensi Positif Positive Dimension Score
86-100	Sangat Buruk | Very Bad	0-19
70-85	Buruk | Poor	20-39
60-69	Kurang Baik | Less Than Satisfactory	40-59
40-59	Cukup Baik | Satisfactory	60-69
20-39	Baik | Good	70-85
0-19	Sangat Baik | Very Good	86-100

DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia PLN dan anak perusahaan sampai akhir 2016 berjumlah 51.158 pegawai terdiri dari 43.956 pegawai dan 7.202 pegawai anak perusahaan.

DEMOGRAPHY OF HUMAN RESOURCES

PLN' employees and its subsidiaries up to the end of 2016 totaled to 51,158 employees, consisting of 43,956 employees in the holding company and 7,202 in the subsidiaries.

Jumlah Pegawai Aktif Holding
Number of Active Employees in the

No.	Unit Bisnis Business Unit	Jumlah Pegawai Total Number of Employees
1	Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang	1.770
2	Distribusi Bali	861
3	Distribusi Banten	774
4	Distribusi Jabar	2.625
5	Distribusi Jateng & DIY	2.031
6	Distribusi Jawa Timur	2.634
7	Distribusi Lampung	680
8	Jasa Manajemen Konstruksi	408
9	Jasa Sertifikasi	157
10	Kantor Pusat	2.126
11	Kit Sumatera Bag Selatan	1.376
12	Kit Sumatera Bag Utara	1.143
13	Kit Tanjung Jati B	77
14	P3B Sumatera	1.639
15	Pusat Pengatur Beban	463
16	PUSDIKLAT	440
17	PUSENLIS	205
18	PUSHARLIS	288

19	PUSLITBANG	215
20	Transmisi JBB	918
21	Transmisi JBT	1.516
22	Transmisi JBTB	1.019
23	UIP Interkoneksi SJ	116
24	UIP JBB	195
25	UIP JBT I	134
26	UIP JBT II	171
27	UIP JBTB I	178
28	UIP JBTB II	104
29	UIP Kalimantan Bag Barat	136
30	UIP Kalimantan Bag Tengah	119
31	UIP Kalimantan Bag Timur	148
32	UIP Maluku	73
33	UIP Nusa Tenggara	152
34	UIP Papua	102
35	UIP Pembangkit Sumatera	209
36	UIP Sulawesi Bag Selatan	187
37	UIP Sulawesi Bag Utara	117
38	UIP Sumatera Bag Selatan	225
39	UIP Sumatera Bag Tengah	63
40	UIP Sumatera Bag Utara	239
41	Wilayah Aceh	1.132
42	Wilayah Bangka Belitung	426
43	Wilayah Kalimantan Barat	1.180
44	Wilayah Kalselteng	1.575
45	Wilayah Kaltim & Utara	1.147
46	Wilayah Maluku&Malut	991
47	Wilayah NusaTenggaraBarat	960
48	Wilayah NusaTenggaraTimur	897
49	Wilayah Papua&Papua Barat	1.143
50	Wilayah Riau dan Kep.Riau	1.071
51	Wilayah S2JB	1.133
52	Wilayah Sulselrabar	2.151
53	Wilayah Suluttenggo	1.543
54	Wilayah Sumatera Barat	1.036
55	Wilayah Sumatera Utara	1.538
	Grand Total	43.956

Jumlah Pegawai Aktif Anak Perusahaan
Number of Active Employees in Subsidiaries

No.	Unit Bisnis	Jumlah Pegawai
1	PT Indonesian Power	3.332
2	PT Pembangkitan Jawa Bali	2.695
3	PT Indonesian Comnet Plus	473
4	PLN Batu Bara	28
5	Geodipa Energy	152
6	PLN Enjiniring	125
7	PLN Tarakan	54
8	PLN Batam	294
9	PT Bag	25
10	PT Haleyora Power	24
	Jumlah	**7.202**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

Jenis Kelamin	2016	2015	2014	Gender
Laki-Laki	36.369	36.369	34.554	Male
Perempuan	7.587	6.609	6.446	Female
Total	**43.956**	**40.450**	**41.000**	**Total**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Manajemen
Number of Employees by Management Level

Tingkat	2016	2015	2014	Level
Manajemen Atas	110	83	84	Senior Management
Manajemen Menegah	425	362	358	Middle Management
Manajemen Dasar	1.373	1.154	1.110	Base Level Management
Supervisor Atas	3.129	2.808	2.698	Senior Supervisor
Supervisor Dasar	6.346	5.807	4.711	Base Level Supervisor
Fungsional	32.573	30.236	32.039	Functional
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiary
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai Berdasrkan Level Organisasi
Number of Employees by Organization Level

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Kantor Pusat	1.731	1.365	1.356	Head Office
Unit Bisnis	41.830	39.085	39.644	Business Units
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiary
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status kepegawaian
Number of Employees by Employment Status

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Pegawai Tetap	51.147	47.608	48.068	Permanent Employee
Pegawai Kontrak	11	2	0	Contract Employee
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees by Education Background

Keterangan	2016	2015	2014	Description
< D3	22.082	21.855	23.692	< Associate degree
D3	8.683	7.359	6.875	Associate degree
S1	12.160	10.185	9.459	Bachelors
S2	1.025	1.045	969	Masters
S3	6	6	5	PhD
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiary
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia
Number of Employees by Age

Keterangan	2016	2015	2014	Description
< 25	11.962	7.855	8.220	< 25
26-30	8.870	8.234	7.354	26-30
31-35	4.565	3.599	2.936	31-35
36-40	1.323	1.158	1.199	36-40
41-45	2.838	3.553	4.175	41-45
46-50	4.680	5.064	5.934	46-50
> 50	9.718	10.987	11.182	> 50
Anak Perusahaan	7.202	7.160	7.068	Subsidiary
Total	**51.158**	**47.610**	**48.068**	**Total**

Menuju Nihil Kecelakaan Melalui HSSE Academy
Towards Zero Accidents through the HSSE Academy

PT PLN (Persero) senantiasa berupaya mewujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh pegawai dan tenaga kerja kelistrikan. Penetapan Udiklat Semarang sebagai Health Safety Security and Environment Academy (HSSE Academy) merupakan wujud dari komitmen tersebut.

HSSE Academy adalah lembaga pendidikan internal yang akan mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan serta pelatihan tentang kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan bagi pegawai PLN dari seluruh Indonesia. Lembaga ini diluncurkan pada 30 Mei 2016.

Kehadiran HSSE Academy ini bertujuan untuk mewujudkan kecelakaan nihil (*zero accident*) di lingkungan PLN serta mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perseroan berusaha membangun budaya keselamatan dan Kesehatan kerja kepada seluruh pegawai dan tenaga kerja. Karena itulah, pembinaan melalui akademi yang baru dikukuhkan tersebut menjadi sangat penting untuk mempertahankan kecelakaan nihil.

Pada akademi tersebut, peserta didik akan dikenalkan dengan sejumlah modul. Misalnya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (3), Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) instalasi Tegangan Ekstra Tinggi (TET), penyelamatan personel pada ketinggian, audit internal sistem manajemen terpadu, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3, Sistem Manajemen Pengamanan Lingkungan dan modul-modul pembelajaran yang masih dalam pengembangan untuk unit operasional pembangkitan, transmisi, distribusi dan proyek.

Kehadiran HSSE Academy ini merupakan tuntutan terciptanya sumber daya manusia ketenagalistrikan yang berkualitas dan berkompeten. Selama melakukan pekerjaan, petugas kelistrikan diharapkan tidak mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, terciptanya mutu dan kegiatan ramah lingkungan baik di unit pembangkitan, penyaluran (transmisi), distribusi maupun proyek yang ada di PLN.

PT PLN (Persero) consistently works toward cultivating a culture of occupational health and safety among its employees and electrical workers. establishing the semarang pln's education unit as the health safety security and environment academy (hsse academy) is a manifestation of this commitment.

HSSE Academy is an internal educational facility that will develop and implement education and training programs on health, safety, security and the environment for pln employees all across indonesia. this educational facility was launched on 30 may 2016.

HSSE Academy is established to ensure zero accidents within pln, in compliance with law no. 1/1970 on occupational safety and law no. 30/2009 on electrical power. the company seeks to foster an occupational health and safety culture for all employees. education and training on this issue through the newly established academy is therefore critical to achieve and maintain zero accidents.

At the academy, participants are introduced to learning modules, such as on occupational health and safety management system (ohsms), electrical safety, occupational health and safety for extra high voltage installations, procedures for the rescue of personnel working at heights, integrated internal management audit system, occupational health and safety advisory board, and environmental safeguard management system, with others still in development for operational units related to power generation, transmission, distribution and project oversight.

The HSSE Academy is a timely response to the need for qualified and competent electrical personnel, demonstrating that efforts are being made to prevent work-related accidents among electrical workers. going forward, quality will be better assured and activities will be environmental friendly for units involved in power generation, transmission, distribution and projects within pln.

Teknologi Informasi

Information Technology

Pengembangan teknologi informasi di lingkungan PLN telah menjadi Perseroan memiliki jaringan komunikasi data untuk seluruh Sumatera dan Jawa yang menggunakan jaringan fiber optic.

Through the Information Technology development program, the Company now has a fiber optic data communication network across all Sumatra and Java.

Kondisi operasional yang semakin penuh tantangan dan pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW membuat PLN semakin memantapkan peran TI sebagai "enabler", yaitu sistem yang mampu mendukung dan menjawab seluruh tantangan, baik dalam proses pemantauan kemajuan proyek maupun mendukung kegiatan operasional dengan cepat dan akurat. Oleh karenanya pengembangan sistem Teknologi dan Informasi PLN semakin cepat bergerak, berubah dari *model distributed* menuju sistem yang terpusat dan standar melalui penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas dan keandalan *data center*.

Hal tersebut membuat Teknologi Informasi harus selalu memandang ke depan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi, mengevaluasi teknologi proses bisnis sekarang dan melakukan upaya peningkatan kinerja untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pengembangan TI saat ini diarahkan menuju sistem yang terpusat, standar dan terintegrasi melalui penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas dan keandalan *data center*.

STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PLN

Sesuai dengan konteks bisnis Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019, arahan strategis perusahaan adalah menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Selain itu, rencana strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2016-2025 untuk memenuhi amanat PP No. 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta menjadi pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usaha PLN secara efisien dan terencana guna menghindari ketidakefisienan perusahaan sejak tahap perencanaan.

Strategi utama perusahaan dalam RJPP serta dorongan dari perkembangan TI terkini berimplikasi pada TI PLN yang harus selalu selaras dalam usahanya untuk mendukung bisnis dan strategi utama perusahaan tersebut. Implikasi terhadap TI PLN dapat disarikan menjadi 5 kelompok strategi utama pengembangan TI, yaitu:

1. Prioritas Bisnis
   Dukungan IT yang berfokus kepada kegiatan bisnis *Capital Projects*, Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan, serta *Corporate Services*.

2. Optimalisasi Aplikasi Bisnis
   Rasionalisasi, standardisasi, konsolidasi, dan integrasi aplikasi-aplikasi bisnis

The operating conditions that are increasingly challenging and the execution of the 35,000 MW Program have compelled PLN to further strengthen the role of IT as an 'enabler', both in the process of monitoring project progress as well as supporting operations in a quick and accurate manner. Therefore, the development of PLN's Information Technology Systems is moving ever faster, transforming from the distributed model to the centralized and standardized system by strengthening the network infrastructure, data center capacity and reliability.

This has compelled IT to always look forward to obtain the latest information on technological developments, to evaluate the current business process technologies, and to strive to enhance its performance to increase the Company's value.

IT development is currently directed towards a centralized, standardized, and integrated system through the strengthening of the network infrastructure, capacity increase, and data center reliability.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT STRATEGY OF PLN

In accordance with the 2015-2019 Long Term Plan business context, the strategic direction of the Company is to become a financially sound corporate entity, allowing the Company to invest to maintain its market share, and develop in accordance with the corporate rules. In addition, the strategic plan of PLN sets out the 2016-2025 PT PLN (Persero) Electricity Provision Business Plan in relation to compliance with the mandate of Government Regulation No. 14 of 2012 on Electricity Provision Business Activity and in relation to meet the electricity facilities development guidelines in fulfilling electricity needs in the business regions of PLN for the 2016-2025 period in an efficient and planned manner to avoid corporate inefficiencies from the planning stage.

The main strategy of the Company in the Long Term Company Plan (RJPP) as well as the incentives of the latest IT development have implications to the IT of PLN to always be aligned in its efforts to support the main business and strategy of the Company. The implication to the IT of PLN can be summarized into 5 main groups of strategic IT development, namely:

1. Business Priority
   IT support that focuses on the business activities of Capital Projects, Power Generation, Transmission, Distribution, and Sales, as well as Corporate Services.

2. Business Application Optimization
   Rationalization, Standardization, Consolidation, and Integration of business applications

3. Integrasi Informasi
   Arsitektur informasi dengan model tata kelola yang sesuai

4. Infras truktur & Teknologi
   Agility, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan serta sistem IT

5. Model Operasi TI (*IT Operating Model*)
   IT operating model yang mampu mengelola lanskap TI yang semakin kompleks dan luas cakupannya.

3. Information Integration
   Information architecture with a proper governance model

4. Infrastructure & Technology
   Agility, reliability, availability, and security of IT services and system

5. IT Operating Model
   IT operating model capable of maintaining an increasingly complex and wide ranging IT landscape.

Selain itu dinamika kondisi eksternal juga berimplikasi pada kegiatan pengembangan dan operasional TI dalam memberikan dukungan terhadap bisnis. Dinamika kondisi eksternal tersebut antara lain adalah teknologi yang berkembang begitu pesat setiap tahunnya seperti *mobility, analytics, cloud, asset management, operation technology*, dan lainnya.

In addition, the dynamics of external conditions also have implications to IT development and operational activities in providing support to the business. The dynamics of external conditions include the rapid development of technology every year, such as mobility, analytics, cloud asset management, operation technology, and others. IT development refers to the 9 IT Guiding Principles, namely:

Pengembangan TI mengacu kepada 9 prinsip (*IT Guiding Principles)*, yaitu:

No.	**Prinsip** Principle	**Uraian** Description
1	IT & Business Alignment	Penyelenggara IT PLN memberikan prioritas dan mengelola seluruh investasi/inisiatif IT berdasarkan strategi dan arahan bisnis serta dievaluasi berdasarkan *business value*. Administrator of IT PLN prioritizes and manages all IT investment/initiatives based on the business strategy and direction as well as evaluation based on business value.
2	IT Financial Management	Penyelenggara IT PLN mengelola seluruh biaya IT untuk memastikan kesesuaian investasi terhadap strategi/arahan bisnis, kebijakan, standar dan arsitektur. Administrator of IT PLN manages all IT costs to ensure the suitability of investment to business strategy/ direction, policy, standard, and architecture.
3	IT Service Continuity	Penyelenggara IT PLN tetap mampu mendukung kegiatan strategis PLN dalam kondisi dan keadaan apapun. Administrator of IT PLN is still able to support PLN's strategic activities under any conditions or circumstances.
4	Information Management	Data adalah *business asset* milik PLN, sehingga data harus dapat dikelola dan digunakan secara konsisten oleh seluruh fungsi PLN sepenuhnya untuk kepentingan bisnis PLN. Data is PLN's business asset, to that effect, data shall be consistently managed and utilized by all functions of PLN for the business interest of PLN.
5	Application Management	Penyelenggara IT PLN mengembangkan, mengelola dan mengawasi penggunaan aplikasi yang terstandardisasi di PLN. Administrator of IT PLN develops, manages, and monitors the utilization of standardized applications in PLN.
6	Technology Management	Penyelenggara IT PLN mengembangkan, mengelola dan mengawasi penggunaan teknologi yang terstandardisasi di PLN. Administrator of IT PLN develops, manages, and monitors the utilization of standardized technology in PLN.
7	IT Policies & Standard	Penyelenggara IT PLN mengelola IT berdasarkan pada acuan yang berupa kebijakan, standar maupun arsitektur untuk menjamin keselarasan dengan bisnis dan kesesuaian dengan *standard framework*. Administrator of IT PLN manages IT based on references in the form of policies, standards, as well as architectures to ensure alignment with the business and conformity with the standard network.

No.	Prinsip Principle	Uraian Description
8	IT Responsibilities	Penyelenggara IT PLN sebagai sebuah organisasi bertanggung jawab dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengoperasikan seluruh proses-proses IT sehingga memenuhi seluruh kebutuhan bisnis terkait dengan spesifikasi layanan IT. Administrator of IT PLN as an organization is accountable in the planning, implementation, and operations of all IT processes, meeting all the business needs related to IT services specifications.
9	IT Talent Management	Penyelenggara IT PLN sebagai sebuah organisasi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memelihara kualitas serta kapabilitas sumber daya manusia khususnya di bidang IT di PLN. Administrator of IT PLN as an organization is accountable in developing and maintaining the quality and capability of human resources, particularly in the field of IT in PLN.

KONDISI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Pada saat ini PLN memiliki jaringan komunikasi data, untuk seluruh Sumatera dan Jawa sudah menggunakan jaringan *fiber optic*, Kalimantan dan Sulawesi baru beberapa lokasi saja yang sudah menggunakan jaringan *fiber optic,* sedangkan untuk Maluku dan Papua menggunakan teknologi VSAT.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai dengan Permen BUMN 01/2011 Pasal 30 Ayat (1) dan Permen BUMN 02/2013 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5), maka disusunlah prinsip praktis Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai berikut:

Prinsip Praktis:

Perseroan Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan.

A. Tata Kelola Teknologi Informasi

1. Tata Kelola Teknologi Informasi, adalah suatu struktur dari hubungan dan proses untuk mengerahkan dan mengendalikan Perseroan untuk mencapai tujuannya, dengan memberi nilai tambah dan menyeimbangkan risiko dengan hasil yang diperoleh dari teknologi informasi dan prosesnya.
2. Tata Kelola Teknologi Informasi memberikan suatu struktur yang mampu menghubungkan proses-proses teknologi informasi, sumber daya teknologi informasi, dan serta informasi itu sendiri dengan strategi dan tujuan Perseroan, sehingga akan tercipta suatu sistem yang terintegrasi antara tujuan implementasi teknologi informasi serta tujuan usaha Perseroan.

B. Rencana Strategis Teknologi Informasi

Dalam upaya membantu pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi maka Perseroan menetapkan 3 (tiga) mekanisme tata kelola:

1. Struktur Organisasi Tata Kelola
   Perseroan menetapkan struktur organisasi tata kelola berkaitan dengan pengelolaan kebijakan Teknologi

INFRASTRUCTURE CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGY

Currently PLN has a data communication network, with Sumatra and Java already using a fiber optic network, parts of Kalimantan and Sulawesi partially on the fiber optic network, while Maluku and Papua use the VSAT technology.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

In accordance with the Decision of the Minister of SOE No. 01/2011 Article 30 Paragraph (1) and the Decision of the Minister of SOE No. 02/2013 Article 3 Paragraph (1) and Paragraph (5), the following Information Technology Governance Principles of Practice were formulated:

Principle of Practice:

An effective Information Technology Governance that serves as the Company's Information Technology utilization and development guidelines in order to achieve the objectives of the Company.

A. Information Technology Governance

1. Information Technology Governance is a relationships and process structure to mobilize and control the Company to achieve its objectives, to provide added value, and balance risks with the results obtained from information technology processes.
2. Information Technology Governance provides a structure capable of connecting processes of information technology, information technology resources, as well as the information itself with the strategy and objectives of the Company, to create an integrated system between the implementation objectives of information technology and business objectives of the Company.

B. Information Technology Strategic Plan

In the effort to assist the implementation of Information Technology Governance, the Company established 3 (three) governance mechanisms:

1. Governance Organizational Structure
   The Company established the governance organizational structure related to Information

Informasi yang dapat memastikan berjalannya *IT Governance* sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku universal.

2. Proses Kebijakan Teknologi Informasi
   Proses kebijakan Teknologi Informasi yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama Tata Kelola Teknologi Informasi dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya dan Manajemen Risiko.
3. Komunikasi Kebijakan Teknologi Informasi
   Agar Tata Kelola Teknologi Informasi berjalan efektif, maka harus dikomunikasikan ke seluruh bagian dari Perseroan. Perseroan harus mengedukasi seluruh insan Perseroan mengenai pemahaman Tata Kelola Teknologi Informasi. Komunikasi dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan Tata Kelola yang efektif.

C. Kerangka Kerja Kontrol Proses dan Organisasi Teknologi Informasi

Berdasarkan *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), terdapat 4 domain proses untuk memastikan Tata Kelola dari kebijakan teknologi informasi dapat dijalankan dengan baik, yakni:

1. Perencanaan dan Pengorganisasian (*Plan and Organize*/PO)
   Mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana Tata Kelola Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis Perseroan sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula.
2. Identifikasi dan Implementasi (*Acquire and Implement*/AI)
   Identifikasi solusi Tata Kelola Teknologi Informasi dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis bisnis Perseroan untuk mewujudkan strategi Tata Kelola Teknologi Informasi.
3. Pelayanan dan Dukungan Layanan (*Deliver and Support*/DS)
   Perseroan menetapkan tingkat penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri atas operasi pada sistem keamanan dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Perseroan juga menetapkan standar sistem penanganan darurat (*disaster recovery planning* atau *contingency planing*).
4. Pengawasan dan Evaluasi (*Monitor and Evaluate*/ME)
   Semua proses Tata Kelola Teknologi Informasi perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Perseroan harus mempunyai prosedur dan indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi.

Technology policy management to ensure that IT Governance is carried out in accordance with the universally applicable rules.

2. Information Technology Policy Process
   Information Technology Policy Process is the process that aims to ensure the main objectives of Information Technology can be achieved related to the accomplishment of an organization's objectives, management of resources, and Risk Management.
3. Information Technology Policy Communication
   To ensure the effectiveness of Information Technology Governance, it has to be communicated to all parts of the Company. The Company must educate all personnel regarding the understanding of Information Technology Governance. The communication is conducted continuously with the objective to ensure effective Governance.

C. Control Framework of Information Technology Process and Organization

Based on the Control Objectives for Information Technology and Related Technology (COBIT), there are four process domains to ensure a proper implementation of Governance for information technology policy, namely:

1. Plan and Organize (PO)
   Containing the strategy and tactics related to the identification of how Information Technology Governance can provide the best contribution in the achievement of the Company's business objectives, creating a proper organization and also a proper technology infrastructure.
2. Acquire and Implement (AI)
   Identifying Information Technology Governance solutions to be implemented and integrated in the business processes of the Company to realize the Information Technology Governance strategy.
3. Deliver and Support (DS)
   The Company determines the desired level of services delivery, consisting of operating system security and business sustainability, up to the provision of training and development of human resources. The Company also determines the system standard for disaster recovery planning or contingency planning.
4. Monitor and Evaluate (ME)
   All Information Technology Governance processes need to be assessed regularly and periodically on the quality and compliance with control requirements. The Company must have accurate procedures and indicators to assess the management effectiveness of Information Technology.

D. Tata Kelola Investasi Teknologi Informasi

1. Kinerja Teknologi Informasi dinilai dari optimasi investasi serta penggunaan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan Perseroan.
2. Pengelolaan investasi Teknologi Informasi Perseroan merupakan bagian dari proses pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem informasi yang harus dilaksanakan dalam kerangka Master Plan Teknologi Informasi.
3. Perseroan harus menjamin bahwa investasi Teknologi Informasi yang dilakukan Perseroan dapat:
   a. Diukur manfaatnya dan tepat guna;
   b. Berkesinambungan;
   c. Sesuai dengan yang perencanaan yang dilakukan oleh Perseroan;
   d. Memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan dijanjikan.

D. Information Technology Investment Governance

1. The performance of Information Technology is assessed by the optimization of investment as well as the accuracy of Information Technology utilization and allocation in meeting the needs of the Company.
2. The management of Information Technology investment is part of the process of development, operations, and maintenance of information systems, which must be conducted in the Information Technology Master Plan framework.
3. The Company must ensure that the investment in Information Technology conducted by the Company shall be:
   a. Beneficial and appropriate;
   b. Sustainable;
   c. In accordance with the plan of the Company;
   d. Providing results as planned and expected.

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagan di bawah ini adalah struktur organisasi Divisi Sistem dan Teknologi Informasi PT PLN (Persero).

HUMAN RESOURCES

The following chart is the organizational structure of the Information System and Technology Division of PT PLN (Persero).

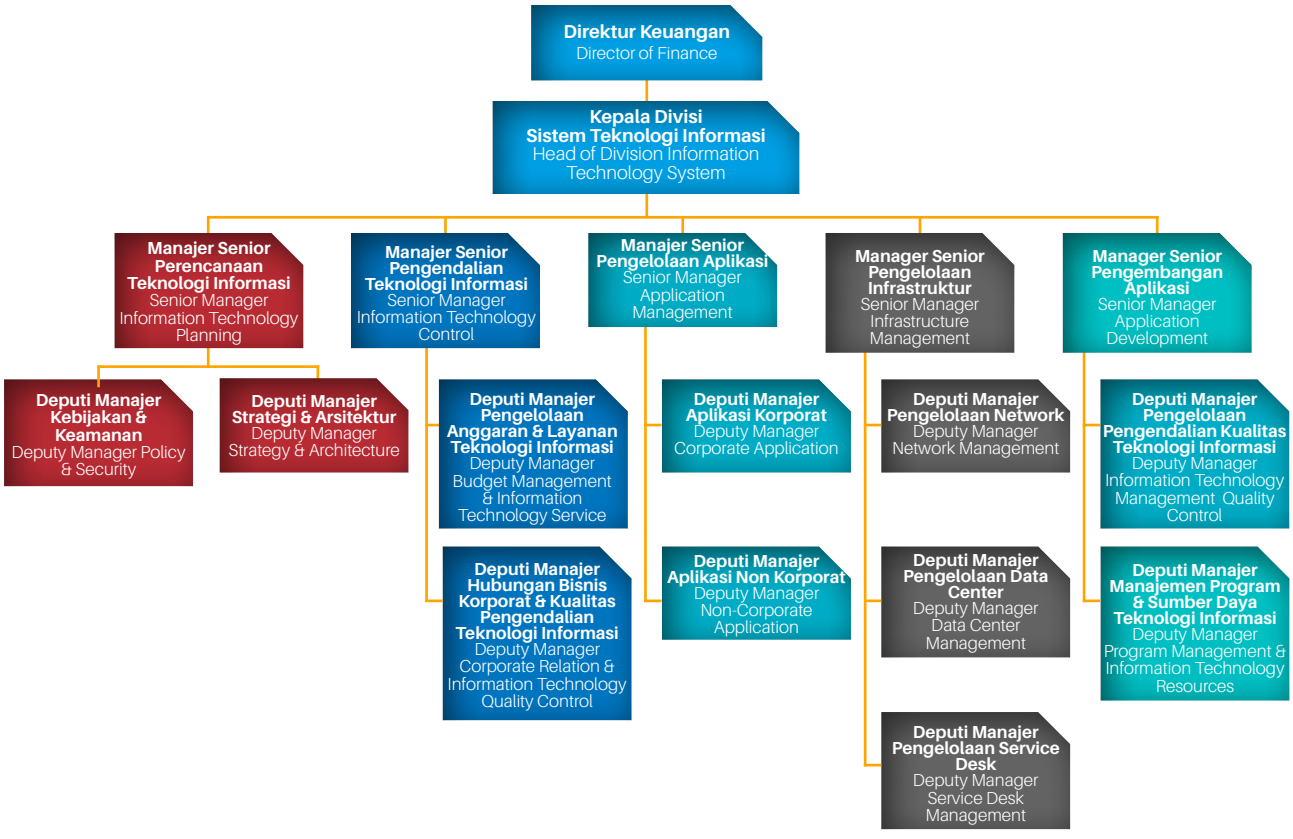

Adapun jumlah SDM yang terdapat pada Divisi Sistem dan Teknologi Informasi sebesar 97 orang dengan komposisi, sebagai berikut:

Total HR in the Information System and Technology Division amounted to 97 people, with the following composition:

No	Jabatan	Jumlah SDM Number of Positions	Position
1	KDIV STI	1	HEAD OF DIVISION INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM
2	Senior Specialist I TI	1	Information Technology Senior Specialist I
3	Senior Specialist II TI	1	Information Technology Senior Specialist II
4	Bidang Perencanaan dan Kebijakan Ti	6	Planning and Information Technology Policy
5	Bidang Pengendalian Layanan Ti	10	Information Technology Service Management
6	Bidang Pengembangan Aplikasi Ti	25	Information Technology Application Development
7	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Ti	22	Information Technology Infrastructure Management
8	Bidang Pengelolaan Aplikasi Ti	31	Information Technology Application Management
JUMLAH		97	TOTAL

PENGEMBANGAN TALENTA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Metode pengembangan talenta di bidang Teknologi Informasi mengacu kepada kebutuhan keahlian tenaga teknologi informasi yang dibutuhkan oleh organisasi yang meliputi *programming, web service, general application/ management/ development, data base, networking, wireless communication*. Sedangkan metode yang digunakan untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan dilakukan melalui:

1. Meningkatkan keahlian yang ada melalui pelatihan
2. Merekrut tenaga ahli berpengalaman dengan keahlian yang telah dimiliki dari organisasi lain.
3. Merekrut dan melatih *fresh graduate*.

DEVELOPMENT OF TALENTS IN INFORMATION TECHNOLOGY

The talent development method in Information Technology refers to the needs of information technology expertise needed by the organization, including programming, web service, general application/management/development, data base, networking, and wireless communication. The method implemented to obtain the required skills is conducted through:

1. Improving the existing expertise through training.
2. Recruiting experienced experts with skills obtained from other organizations.
3. Recruiting and training fresh graduates.

Tabel di bawah ini adalah pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2016 untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Teknologi Informasi.

The following table is the training conducted throughout 2016 to increase the competency of human resources in Information Technology.

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Hari/ Orang (HoP) Number of Days/ Person (HoP)	Jumlah Peserta Participant	Name of Training
1	Data Base Administration (DBA) Software Database Oracle	68	22	Data Base Administration (DBA) Software Database Oracle
2	Program Management Office (PMO) - Project Management Methodology (Pmm)	160	92	Program Management Office (PMO) - Project Management Methodology (PMM)
3	Programmable Logic Controller - Dasar (PLC 1)	170	65	Programmable Logic Controller – Basic (PLC 1)
4	Training of Trainer Upskilling AP2T dan APKT	70	70	Training Of Trainer Upskilling AP2T and APKT
5	Workshop Oracle Primavera (Project Approval, Controller, Reporting)	81	33	Workshop Oracle Primavera (Project Approval, Controller, Reporting)

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2016

Proyek strategis yang menjadi fokus utama pada tahun ini adalah Penyesuaian aplikasi terpusat dengan organisasi baru, implementasi EAM pembangkit dan Implementasi aplikasi Saidi Saifi serta Implementasi Aplikasi Transaksi Tenaga Listrik Terpusat (AT2LT).

Implementasi EAM Pembangkit dilakukan untuk mendukung proses bisnis pembangkitan di unit Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, implementasi tersebut menerapkan sebuah sistem informasi yang terpusat sehingga mendukung standardisasi proses bisnis.

Adanya tuntutan peningkatan kinerja operasi untuk mencapai *Operation Excellent* dalam proses bisnis penyaluran dan distribusi tenaga listrik sehingga dibutuhkan dukungan teknologi informasi yang baik, untuk kebutuhan tersebut maka direncanakan untuk melakukan Implementasi Saidi Saifi.

Dalam memberikan layanan kelistrikan kepada pelanggan secara real time, energi disalurkan dari pembangkit-pembangkit melalui saluran transmisi dan saluran distribusi ke persil-persil pelanggan. Dalam penyaluran energi tersebut terdapat energi yang hilang baik secara teknis maupun non teknis. Untuk dapat mengendalikan kehilangan energi tersebut dibutuhkan dukungan teknologi informasi berupa Aplikasi Transaksi Tenaga Listrik Terpusat (AT2LT).

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Rencana Pengembangan TI dikelompokkan ke dalam 6 proses bisnis PLN, yaitu pembangunan, pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan *corporate services*. Progres Pengembangan TI hingga akhir tahun 2016 adalah :

1. **Pembangunan:**
   - *Project Management Office (PMO)* bertujuan untuk memonitor progress pembangunan proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk.
   - Pengembangan PMO dilakukan dengan menambah fitur untuk pengendalian Jadwal dan Biaya Proyek.

2. **Pembangkitan:**
   - *Asset Management* Pembangkit
     Pengembangan aplikasi *Asset Management* Pembangkit sudah sampai tahap standardisasi proses bisnis dan integrasi dengan sistem ERP. Dijadwalkan pada triwulan I 2017 sudah diimplementasikan pada 3 Unit Pembangkit di Sumatera yaitu Belawan, Labuan Angin dan Bukit Asam. Implementasi di seluruh Unit Pembangkit PLN akan dilaksanakan pada tahun 2017-2018.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN 2016

Revision and modification of centralized applications to accommodate Company's new organization structure, EAM power plant and SAIDI/SIFI application implementations, and Centralized Transaction Application (AT2LT) were strategic projects and the main focus in 2016

The application of EAM is to support power generation business process for Southern Sumatra Power Plant unit and Northern Sumatra Power Plant unit. The software application is a centralized information system aim to standardize Company's business process.

First class operational performance in the supply and distribution of electricity require the backing of good information system. For that reason SAIDI SAIFI system is planned for development.

In providing of electrical power services to customers in real time, electrical energy is supplied from power plants and distributed through transmission lines and distribution channels. In the distribution of power inevitably there will always be losses on technical and non-technical grounds. In order to control and minimize losses, Centralized Transaction Application information system (AT2LT) is essential.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM

IT Development program is classified into 6 PLN business processes, namely construction, power generation, transmission, distribution, sales, and corporate services. The progress of IT development up to the end of 2016 was:

1. **Construction:**
   - Project Management Office (PMO) has the objective to monitor the development progress of power plant, transmission, and substation projects.
   - PMO development is conducted by adding features for Project Schedule and Cost.

2. **Power Generation:**
   - Asset Management of Power Plants
     Development of Power Plant Asset management application applies to business process standardization and integration with the ERP system. Scheduled to be implemented in the first quarter of 2017 in 3 Power Plant Units in Sumatra, namely Belawan, Labuan Angin, and Bukit Asam. The implementation for all PLN Power Plants will be conducted in 2017-2018.

- Manajemen Energi Primer
  Aplikasi Manajemen Energi Primer meliputi aplikasi Pengelolaan Batu Bara dan aplikasi Pengelolaan Bahan Bakar Gas dan Minyak.

  Aplikasi Pengelolaan Batu Bara melingkupi fungsi *controlling & invoicing* yaitu mulai dari penjadwalan pengiriman batu bara sampai dengan proses pembayaran. Sampai saat ini sudah diterapkan di seluruh wilayah Sumatera dan Jawa.

  Implementasi aplikasi Pengelolaan Bahan Bakar Gas dan Minyak (fungsi *monitoring)* telah selesai dikembangkan pada Oktober 2016 dan diimplementasi pada tahun 2017-2018.

3. Transmisi :

- *Asset Management* Transmisi
  Aplikasi *Asset Management Transmisi* sudah diimplementasikan di seluruh Unit Pengatur Beban dan Transmisi Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Sulselrabar. Tahun 2017 akan diimplementasi di Wilayah Sulutenggo dan Wilayah NTB.
- Penguatan *link* komunikasi SCADA
  Dalam rangka meningkatkan kehandalan, *link* komunikasi SCADA akan dikembangkan menjadi redundansi. Dalam periode tahun 2016-2018 akan diimplementasikan pada 1.840 lokasi di Sumatera dan di Jawa-Bali.

4. Distribusi :

- *Asset Management* Distribusi
  Aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan desain aplikasi dan direncanakan akan terimplementasi secara nasional pada akhir 2018.

  Salah satu aplikasi yang mendukung proses bisnis *asset management* distribusi adalah Aplikasi Gudang Online. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu pengelolaan material di Unit Organisasi level 3. Di tahun 2016 ini sudah terimplementasi di 55 Rayon di Wilayah Kalimantan Barat dan di Wilayah Sumatera Barat. Implementasi secara nasional ditargetkan selesai pada tahun 2018.

- *Monitoring* gangguan terkait *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI).

  Aplikasi *Monitoring* Gangguan (SAIDI-SAIFI) adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitor gangguan secara nasional. Tahun 2016 ini sudah diimplementasikan di 22 Unit PLN dan 2 Anak perusahaan (PLN Batam dan PLN Tarakan).

- Primary Energy Management
  Primary Energy Management Application includes Coal Management application and Oil and Gas Management applications.

  The Coal Management application includes the functions of controlling & invoicing, which starts from the scheduling of coal shipments up to the payment process, currently implemented in Sumatra and Java.

  The Oil & Gas Management application (monitoring function) was completed in 2016 and will be implemented in 2017-2018.

3. Transmission:

- Asset Management of Transmission
  The Transmission Asset Management application has been implemented at all Load and Transmission Control Units in Sumatra, Java-Bali, and the Sulselrabar Region. It will be implemented in the Sulutenggo Region and NTB Region in 2017.
- Strengthening of SCADA Communication Link
  In order to improve reliability, the SCADA communication link will be developed with redundancy. It will be implemented in 1,840 locations in Sumatra and Java-Bali in 2016-2018.

4. Distribution:

- Distribution Asset Management
  This application is still in the design phase and planned to be implemented nationally at the end of 2018.

  One of the applications that support the distribution asset management business process is the Gudang Online Application. The application is utilized to assist in the management of materials at the level 3 Organization Units. It has been implemented in 55 Rayons stations in the West Kalimantan Region and West Sumatra Region in 2016. The national implementation is targeted to be completed in 2018.

- Monitoring of disruptions related to the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI).

  The Interruption Monitoring application (SAIDI-SAIFI) are the applications used to monitor interruptions at the national level. It was implemented in 22 PLN Units and 2 Subsidiaries (PLN Batam and PLN Tarakan) in 2016.

5. Penjualan:

- Pengukuran energi terpusat
  Kegiatan pengukuran energi terpusat menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Neraca Energi, Aplikasi Pencatatan Meter Terpusat dan Aplikasi *Automatic Meter Reading (AMR).* Aplikasi Pencatatan Meter Terpusat sudah terimplementasi sebanyak 22 unit. Aplikasi AMR sudah diimplementasikan di Sumatera Barat dan akan diimplementasikan pada 22 unit Distribusi dan Wilayah sampai dengan tahun 2017. Aplikasi Neraca Energi sudah diimplementasikan pada November 2016. Di tahun 2017 dijadwalkan akan dilaksanakan implementasi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

- Pelayanan pelanggan
  Aplikasi Pelayanan Pelanggan merupakan aplikasi untuk memberikan layanan berbagai kebutuhan pelanggan yang dapat diakses oleh pelanggan melalui berbagai cara seperti *mobile application*, internet, *online payment*, pengaduan teknis, dan sebagainya, di samping juga disediakan di berbagai lokasi seperti gerai di Mal, Loket Layanan di kantor unit PLN dan layanan komuter (mobil).

- Pengelolaan pendapatan
  Aplikasi pengelolaan pendapatan merupakan aplikasi untuk mengelola pendapatan perusahaan baik yang diterima secara langsung di loket pembayaran PLN maupun melalui transaksi perbankan.

6. Corporate Services:

- **Pengukuran *Dashboard* KPI**
  Pembangunan Sistem Aplikasi Pengukuran KPI dimulai terdiri atas 2 kegiatan utama yaitu pembangunan *dashboard* dan pembangunan *Data Warehouse* sebagai pusat data. Direncanakan pembangunan kedua aplikasi ini akan selesai pada pertengahan tahun 2017.

- **Laporan Keuangan**
  Laporan Keuangan PT PLN (Persero) saat ini menggunakan aplikasi ERP sementara untuk pembuatan Laporan Keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan masih dilakukan secara manual

- **Sumber Daya Manusia (SDM)**
  Sebagian besar fungsi-fungsi pengelolaan SDM menggunakan aplikasi ERP dan fungsi-fungsi lain yang menggunakan aplikasi diluar ERP sudah terintegrasi dengan aplikasi ERP.

5. Sales:

- Measurement of centralized energy
  The centralized energy measurement activity uses 3 applications, namely the Energy Scales application, the Centralized Meter Registration application, and the Automatic Meter Reading (AMR) application. The Centralized Meter Registration application has been implemented in 22 units. The AMR application has been implemented in West Sumatra and will be implemented on 22 Distribution and Regional units in 2017. The Energy Scales application is scheduled to be implemented in Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi.

- Customer Service
  The Customer Service application is the application that provides various customer services, which can be accessed by the customers through various means, such as mobile application, internet, online payment, technical complaint, and others, also provided in various locations, such as outlets in shopping centers, Service Counter at PLN unit offices, and commuter service (car).

- Revenue management
  The revenue management application is the application to manage the revenues of the Company, both directly from PLN payment counters as well as from banking transactions.

6. Corporate Services:

- **KPI Dashboard Assessment**
  The development of the KPI Assessment Application System consists of 2 main activities, namely the dashboard development and data warehouse development as the data center. The development of both applications is planned to be completed in mid 2017.

- **Financial Statements**
  The Financial Statements of PT PLN (Persero) currently use the ERP application, while the consolidated Financial Statements with subsidiaries are still conducted manually.

- **Human Resources (HR)**
  Most of the HR management functions utilize the ERP application, while other functions utilize other applications that have been integrated with the ERP application.

- ***Helpdesk* TI terpusat**
  Untuk meningkatkan kualitas layanan TI, maka dibangun *HelpDesk* TI secara terpusat yang di dalamnya terdapat 2 komponen utama yaitu *Service Desk* dan *Command Center*. Pengembangan *HelpDesk* TI Terpusat dilakukan dengan menambah layanan *Operational Technology* (*OT*).

- **Audit & *Risk Management***
  Di dalam mendukung kegiatan Audit dan Manajemen Risiko terdapat aplikasi yang Audit berbasis Risiko (*Risk Base Audit*) yang meliputi 5 komponen yaitu Penilaian Risiko, *Electronic Working Paper, Schedule Staff & Audit, Reporting Time & Expense* serta *Audit Repository*.

- **Centralized IT HelpDesk**
  To improve the quality of IT services, a centralized IT HelpDesk is being developed, consisting of 2 main components, namely the Service Desk and the Command Center. The development of the Centralized IT HelpDesk is carried out by adding the Operational Technology (OT) services.

- **Audit & Risk Management**
  In supporting the Audit and Risk Management activities, there is a Risk Based Audit application, which consists of 5 components, namely Risk Assessment, Electronic Working Paper, Schedule Staff & Audit, Reporting Time & Expense, as well as Audit Repository.

- ***Smart Grid***
  Smart Grid merupakan konsep jaringan tenaga listrik cerdas untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dua arah antara produsen listrik dan konsumen. *Workshop* dan pembahasan inisiasi mengenai *Smart Grid* sudah dilaksanakan beberapa kali.

- **Smart Grid**
  The Smart Grid is a smart electricity networking concept to fulfill electricity needs by utilizing information technology and two-way communication technology between the electricity provider and the consumers. Workshop and initiation discussion on Smart Grid has been carried out several times.

06

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

371 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

371 Tujuan Penerapan
Implementation Objectives

372 Komitmen Penerapan GCG
Commitment To The Implementation Of GCG

372 Pedoman, Struktur, Dan Mekanisme Tata Kelola
Guidelines, Structure And Mechanism For Governance

375 Kebijakan Pengelolaan Perusahaan
The Company's Management Policy

376 Implementasi Prinsip Dasar Dan Praktek GCG Yang Baik
Basic Principles And GCG Best Practice Implementation

383 Penilaian Penerapan GCG
GCG Achievement Assessment

393 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting Of Shareholders (GMS)

397 Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

409 Direksi
Board Of Directors

424 Asesmen Terhadap Dewan Komisaris Dan Direksi
Assessment Of The Board Of Commissioners And Directors

432 Penetapan Remunerasi
Remuneration Determination

436 Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi
Working Relationship Management Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

437 Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi
Meeting Of The Board Of Commissioners And Directors

455 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

456 Komite Audit
Audit Committee

461 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

468 Komite Nominasi Dan Remunerasi
Nomination And Remuneration Committee

472 Komite-Komite Di Bawah Direksi
Board Of Directors' Committees

474 Sekretaris Dewan Komisaris
Board Of Commissioners' Secretary

476 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

490 Manajemen Risiko
Risk Management

496 Profil Risiko Yang Dihadapi Perusahaan Dan Upaya Pengelolaan Risiko 2016
2016 Corporate Risk Profile And Management

500 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Supervisory Unit (SPI)

504 Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawas Intern
Activities Of The Internal Supervisory Unit

506 Pemeriksaan Khusus Tahun 2016
Special Audit Of 2016

509 Penugasan Khusus 2016
Special Assignment 2016

509 Tindak Lanjut Rekomendasi Bpk RI
Follow-Up Of The Indonesian Supreme Audit Board's Audit Recommendations

510 Akuntan Perusahaan
Company's Accounting Firm

511 Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal
Internal Control And Audit System

512 Whistle Blowing System
Whistleblowing System

516 Perkara Hukum Yang Melibatkan Perseroan
Litigations Involving The Company

522 Kode Etik/Pedoman Perilaku
Code Of Conduct

526 Budaya Perusahaan
Company Culture

PLN
PEDOMAN
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
& BOARD MANUAL
2016

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Hasil penilaian penerapan GCG di lingkungan PLN menunjukkan kategori "Sangat Baik", sebagai indikasi terlaksanakan tata kelola yang baik dalam proses bisnis Perseroan

Assessment results in the PLN's application of GCG indicate the Company falls into the category of "Very Good". This indicates that the Company has successfully applied good corporate governance in its business processes.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) bertekad terus menerapkan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi benefit optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajamen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

TUJUAN PENERAPAN

Penerapan lima prinsip dasar GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi PLN, yakni:

1. Memaksimalkan nilai PT PLN (Persero) dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan PT PLN (Persero) secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT PLN (Persero) terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT PLN (Persero).
4. Meningkatkan kontribusi PT PLN (Persero) dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

PLN berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras GCG (yakni penguatan kelembagaan pelaksana dan unit kerja).

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG, PLN secara konsisten melakukan penilaian kualitas penerapan praktik GCG yang baik.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism that organizes and supervises the management of the company to meet the expectations of stakeholders. Consequently, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) is committed to continue implementation of Good Corporate Governance best practices to support the realization of corporate objectives, namely sustainable growth, and provision of optimum benefit to all stakeholders. This is based on the confidence of the entire top management and executive ranks that implementation of GCG best practices will continuously increase the trust in and value of the Company.

IMPLEMENTATION OBJECTIVES

The implementation of the five basic principles of GCG, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness is consistently believed to be able to improve the quality of GCG application while meeting the following targets for PLN :

1. Maximizing the value of PLN by enhancing the principles of openness, accountability, trustworthiness, responsibility and fairness in order to help the company to be competitive, both nationally and internationally
2. Encouraging professional, transparent, and efficient management of PLN and empower all functions, as well as increase the independence of all organs.
3. Encouraging organs to make decisions and act on them based on high moral values and in compliance with existing legislation, as well as show awareness of the social responsibility of PLN to the stakeholders and to preservation of the surrounding environment.
4. Raising PLN contribution to the national economy.
5. Augmenting the national investment climate

PLN seeks to ensure the achievement of these goals by enhancing and sustainably improving measures, both in terms of GCG software i.e. guidelines, rules and work systems, and hardware i.e. strengthening executive institutions and work units.

To obtain feedback for the improvement of corporate governance practices, PLN consistently assesses the quality of GCG best practices.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Seluruh jajaran PLN, mulai dari jajaran Direksi, Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar hingga pelaksana, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada Keputusan dan penetapan kebijakan operasional yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan terbaik.

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga mempelopori pelaksanaan penandatanganan pakta integritas untuk tunduk, taat dan konsisten melaksanakan seluruh pokok-pokok aturan dan kebijakan yang digariskan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman Perilaku Perusahaan.

Sejak deklarasi "PLN Bersih, No Suap" di tahun 2012, seluruh jajaran perseroan termotivasi untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, baik dalam Bidang Operasional, Keuangan dan terutama pada pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit.

Deklarasi "PLN Bersih, No Suap" merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perseroan untuk menunjukkan komitmen penerapan praktik tata-kelola perusahaan yang baik, yang telah dikampanyekan dan dilaksanakan secara konsisten.

Pernyataan deklarasi "PLN Bersih, No Suap" adalah:
1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan PLN. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan, dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi dan transparansi.

PEDOMAN, STRUKTUR, DAN MEKANISME TATA KELOLA

Pedoman GCG telah menjadi pegangan bagi pelaksanaan tata kelola maupun landasan setiap kebijakan pengelolaan operasional perusahaan, serta merupakan penjabaran dari 12 Prinsip Praktis implementasi GCG di lingkungan PLN, yaitu:

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GCG

The entire Company, starting from top management and middle management, basic management up to staff level has committed to follow all rules and policies as part of the effort to implement Good Corporate Governance. Commitment to the implementation of Good Corporate Governance is demonstrated based on the decision and establishment of operational policies in accordance with applicable laws and regulations, as well as with the guidelines of sound corporate management.

In addition, the Board of Directors and the Board of Commissioners pioneered the signing of integrity pact to submit, obey and consistently adhere to all major regulations and policies outlined in the Corporate Governance and Code of Conduct Guidelines.

Since the declaration of "PLN Bersih, No Suap"(Clean PLN, No Bribery) in 2012, the entire Company are motivated to implement good governance best practices in conducting daily tasks, both operationally and financially and especially in the implementation of power plant development projects.

The "PLN Bersih, No Suap" (Clean PLN, No Bribery) declaration is an effort by the Company to demonstrate its commitment to implement Good Corporate Governance through consistent campaign.

"PLN Bersih, No Suap" declarations are:
1. Not to undertake any form of action that can be categorized as corruption according to Law No. 20 of 2001 on Corruption, in all procurement processes of public services. Such actions include corruption, nepotism, graft, mark ups, gifts, conflicts of interest, and extortion.
2. Conduct the process of procurement of goods and services by holding on to the principles of transparency and efficiency in the use of state assets.
3. Conduct the process of procurement of goods and services by following the formal legal process while emphasizing the principles of efficiency and transparency.

GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM FOR GOVERNANCE

The GCG handbook has become the guidelines for the implementation of good corporate governance and the policy cornerstone of any Company's operational management, as well as an elaboration of the 12 Principles of practical GCG Implementation in PLN, namely:

1. Menghormati hak-hak Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris adalah bersifat kolegial.
3. Direksi pada dasarnya bersifat kolegial.
4. Menyusun perencanaan strategis yang efisien, efektif dan tepat sasaran.
5. Mengembangkan sistem dan prosedur Manajemen Risiko yang selaras dengan tujuan Perseroan.
6. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan Perseroan.
7. Menetapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif.
8. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang selaras dengan strategi Perseroan.
9. Menetapkan standar etika dalam berusaha dan tata perilaku di lingkungan Perseroan dan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
10. Menghormati hak pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).
11. Pengungkapan informasi (*disclosure*) secara tepat waktu dan berimbang.
12. Mengembangkan pengelolaan Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang berbasis *Good Corporate Governance*.

Implementasi GCG di PLN didukung oleh perangkat yang lengkap yaitu dengan memiliki dan memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berisi panduan, batasan dan nilai-nilai yang mengatur segala kebiasaan dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN.

PLN telah memiliki *Board Manual,* yakni Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Juga dilengkapi dengan *Charter* masing-masing Organ utama dan Organ pendukung perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan peran wewenang dan tanggung jawabnya.

Tujuan dari penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah:
1. Memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta memperjelas hubungan kerja di dalam maupun di antara kedua organ perusahaan tersebut; dan
2. Mempermudah organ-organ di bawah Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, maupun hubungan tugas keduanya.

1. Respecting the rights of Shareholders.
2. The Board of Commissioners is collegial.
3. The Board of Directors is essentially collegial.
4. Developing a strategic plan that is efficient, effective and targeted.
5. Developing systems and procedures in line with the risk management objectives of the Company.
6. Developing an Internal Control System to guarantee the achievement of Company objectives.
7. Establishing effective Information Technology Governance.
8. Developing Human Resources in harmony with the Company's strategy.
9. Establishing ethical standards in business and a code of conduct within the Company, as well as recognize the community's concerns through the implementation of Corporate Social Responsibility.
10. Respecting the rights of the Stakeholders.
11. Disclosing information in a timely and impartial manner.
12. Developing the management of the Business Unit and Subsidiaries based on Good Corporate Governance.

GCG implementation in PLN is supported by the Code of Conduct, which contains guidelines, limits and values that govern all practices and procedures in interaction among professionals associated with PLN.

PLN has a Board Manual, Work Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners that describes activities in a structured, systematic, and easily understood way and can be implemented consistently so that it becomes a reference for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of the Company. There is also a Charter for each of the Company's main and supporting organs that serves as a guideline when fulfilling its authority and responsibilities.

The purpose of the preparation and application of the Working Guidelines, is as follows:
1. Clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the working relationships within and between them;
2. Assist the organs under the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the relationship of both parties' duties.

Untuk melengkapi aturan tata laksana keorganisasian, sejak akhir tahun 2012 PLN telah memiliki buku Panduan Hubungan antara Kantor Pusat dengan Anak Perusahaan, serta hubungan antara Kantor Pusat dengan Unit Bisnis.

Further improve the completeness of organizational corporate governance regulations. At the end of 2012, PLN published a Guideline for Relationships between Head Office and Subsidiaries, as well as a Guideline for Relationships between Head Office and Business Units.

Struktur

Struktur mekanisme GCG di lingkungan PT PLN (Persero) adalah:

Structure

The structure of the corporate governance mechanisms in PLN can be seen in the following chart:

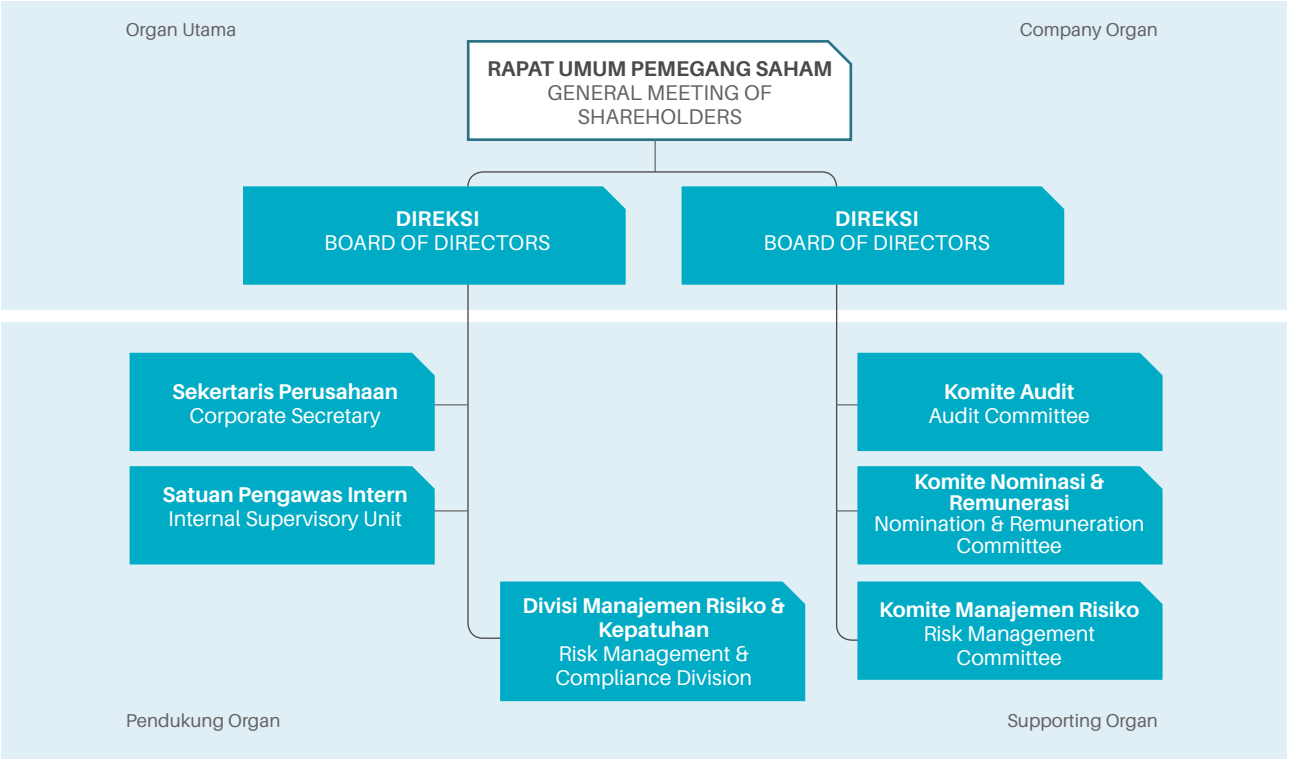

Mekanisme

Pada struktur tersebut tampak bahwa lembaga tertinggi di perusahaan adalah forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam forum ini, Pemegang Saham dapat mengusulkan suatu keputusan penting dengan kedudukan yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, dimana RUPS dapat menyerahkan segala kewenangan pengawasan kepada Dewan Komisaris dan pelaksanaan keputusan kepada Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan setiap keputusan RUPS dilakukan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris wajib

Mechanism

As demonstrated in the chart above, the highest corporate organ is the General Meeting of Shareholders (GMS).

Shareholders have equal voting rights and can make important decisions. For example, in making an investment decision, the GMS hands over all authority and supervision of the implementation of the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the applicable regulations.

The management of the Company and the implementation of any decision made in the GMS is conducted by the Board

mengawasi dan memberikan nasihat guna memastikan tujuan Perusahaan serta Keputusan RUPS terlaksana dan tercapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Untuk menunjang peningkatan penerapan tatakelola perusahaan yang baik PLN terus berupaya melengkapi aturan kebijakan operasional sebagai bagian dari panduan GCG. Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (*softstructure*) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan.

A. Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan

PLN menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi.

PLN telah memiliki Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, sebagai ujung tombak dalam meningkatkan pengelolaan risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif. Pengelolaan risiko disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang mungkin timbul dalam mencapai tujuannya.

B. Transaksi Benturan Kepentingan

PLN memiliki peraturan "Transaksi Benturan Kepentingan", yang menegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang keuntungan dari terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi, dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris setiap tahun menandatangani Pakta Integritas Benturan Kepentingan sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk integritas Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan.

C. Kebijakan Manajemen Kinerja

Dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN membuat Kontrak Manajemen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang mencakup lima perspektif *Key Performance Indicators* yang berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diterbitkan oleh Kementerian

of Directors and the Board of Commissioners, who shall supervise and provide advice to ensure Company objectives are met and decisions of Shareholders are activated. To ensure a successful and smooth execution of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, while the relevant work units assist the Board of Directors.

THE COMPANY'S MANAGEMENT POLICY

To support improvements to Good Corporate Governance implementation, PLN continues to complement the operational policy rules as part of GCG guidelines. The following are several of the rules of the policy (soft structure) that have been implemented.

A. Risk Management Policy of the Company

PLN has established the Risk Management Policy as part of the internal control system to minimize potential losses.

PLN has a Risk Management and Compliance Division, as a spearhead for improving risk management continuously, accurately and comprehensively. Risk management, and risk mitigation, will ensure that negative impact is avoided in achieving the Company's objectives.

B. Conflict of Interest Transactions

PLN has guidelines on "Conflict of Interest Transactions", confirming that internal or external parties have the opportunity to profit from conflicts of interest in a transaction. These parties are prohibited from engaging in the decision-making process regarding the transaction.

Every year, the Board of Directors and the Board of Commissioners sign a Pact of Conflict of Interests, and is one of the forms of compliance with the applicable laws and regulations and a sign of the Boards' integrity in performing all Company activities.

C. Performance Management Policy

In order to optimize the performance of the Company, PLN has created the Management Contract, which is agreed upon and signed by the Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners. It includes five perspectives of Key Performance Indicators of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU)

BUMN, yaitu perspektif pelanggan; efektivitas produk dan proses; fokus tenaga kerja; keuangan dan pasar; kepemimpinan dan tata kelola.

Kontrak Manajemen ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016, yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN / RUPS.

D. Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan.

E. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing dengan adil serta tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kebijakan *Whistleblowing System*

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas terhadap seluruh proses bisnis yang dilakukan, serta untuk mencegah tindakan korupsi, *fraud* dan tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya, PLN telah menerapkan Kebijakan *whistleblowing system* sejak akhir tahun 2012.

IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR DAN PRAKTEK GCG YANG BAIK

PLN senantiasa memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip dasar GCG, yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, kesetaraan diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua tingkat/struktur operasional perusahaan. Implementasi kelima prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional perusahaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Transparansi

Yakni keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

issued by the Ministry of State-Owned Enterprises. These are: customers' perspective, product and process effectiveness, human resources focus; finance and the market, and leadership and governance.

The Management Contract is mentioned in the 2016 Work and Budget Plan, signed by the Board of Directors, the Board of Commissioners and approved by the Minister of State-Owned Enterprises and the General Meeting of Shareholders (GMS).

D. Prohibition of Giving and Receiving Gifts and Donations

PLN prohibits giving or receiving gifts and donations both internally and externally. This prohibition is enforced to uphold the independency of decision-making, as well as to avoid potential conflicts of interest and or the decline in public trust towards the Company's integrity.

E. Procurement of Goods and Services

PLN procurement policies are based on the principles of transparency and accountability, effectiveness, efficiency, openness, fair competition, and non-discrimination. The procurement of goods and services processes must uphold and abide to the principle of healthy competition in accordance with applicable rules and regulations.

F. Whistleblowing System Policy

To improve accountability, transparency and responsibility of all business processes, as well as to prevent corruption, fraud and abuse of authority, PLN has implemented the Reporting Violations Policy (KPP), also known as the Whistleblowing System, since the end of 2012.

BASIC PRINCIPLES AND GCG BEST PRACTICE IMPLEMENTATION

PLN consistently makes certain that all basic principles of Good Corporate Governance, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness and Equality are implemented in every aspect of business and at every level of the Company's operational structure. Implementation of the five basic principles of GCG in Company operations is described as follows :

Transparency

Transparency is the disclosure of information, both in the decision-making process and in disclosing material information and its relevance to the company.

Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditor, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

Implementation of the principle of Transparency is reflected in professional and intensive management of communication media, so that investors, creditors, communities and all stakeholders can be uniformly informed of the performance and activities of the management of the Company.

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU PT serta UU KIP, PLN berkewajiban mengungkapkan informasi perusahaan. Oleh karenanya PLN menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja, termasuk kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Perseroan juga menyediakan beragam informasi dasar berkaitan dengan status perusahaan, maupun informasi lain yang wajib disampaikan dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

As a company that has issued bonds, in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (FSA), Company Law and Freedom of Information Law, PLN has the obligation to disclose company information. Consequently, PLN must provide information to the general public on any corporate action that has been carried out, no later than two business days of the event. This also includes informing the Shareholders and the Board of Commissioners. The Company also provides a variety of basic information pertaining to the status of the Company, as well as other information that must be submitted to and is required by Stakeholders.

Informasi diberikan melalui beragam saluran, berupa media cetak, tatap muka melalui acara *press release*, presentasi dan press gathering, maupun media elektronik sebagaimana disediakan pada *website* Perseroan. Adapun informasi yang disajikan oleh PLN meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
2. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca dan laporan laba-rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. Hasil penilaian oleh Auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau Direktur dan Komisaris perusahaan;
8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
9. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
10. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
11. Produk atau penemuan baru yang berarti;
12. Perubahan dalam pengendalian;
13. Perubahan penting dalam manajamen;
14. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;

Information is provided through a variety of channels, such as print media, face-to-face at press release events, presentations and press gatherings, and electronic media, as provided on the Company website. Information disseminated by PLN includes:

1. Official name and address of the Company, aim and purpose, type of business activity, the date and period of establishment, and capital, as stated in the Articles of Association;
2. Full names of all Shareholders, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
3. Audited annual reports, financial statements, balance sheet and income statements, and the audited statement of Corporate Social Responsibility;
4. Results of the assessment by External Auditors, credit rating agencies and other agencies;
5. The system and allocation of remuneration funds for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
6. Mechanism for the determination of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
7. Legal cases that, under law, are open to public scrutiny and lawsuits against the Company and / or the Directors and Commissioners;
8. Guidelines for the implementation of good corporate governance based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness;
9. Mergers, stock purchases, consolidation and/or formation of joint ventures;
10. Gain or loss of significant contracts;
11. New Products or other significant advancements;
12. Changes in control;
13. Important changes in management;
14. Relatively important labor disputes;

15. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
16. Penggantian akuntan yang mengaudit;
17. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
18. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi; dan
19. Transparansi mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Akuntabilitas

Yakni kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas operasional, PLN menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator di pasar modal, sebagai berikut:

1. Memiliki Komisaris Independen

PLN memiliki Dewan Komisaris yang berjumlah 7 orang termasuk Komisaris Utama, 2 anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham perseroan. Dengan status dan sikapnya yang independen, Komisaris Independen mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan stakeholders dan memberikan pendapat yang independen dan mewakili kepentingan seluruh pihak.

2. Membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten

Sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit, dengan anggota-anggota yang berkompeten di bidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen. Agar hasil rekomendasi di bidang pengawasan dan kerjasama dengan internal audit (Satuan Pengawasan Intern/SPI) berjalan bebas dari pengaruh pihak yang tidak berkepentingan, Komite Audit PLN diketuai oleh Komisaris Independen yang memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi dan/atau manajemen keuangan.

3. Membentuk Komite Manajemen Risiko

Dewan Komisaris PLN juga membentuk Komite Manajemen Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan memiliki anggota-anggota yang berkompeten dalam bidang Manajemen

15. Announcement of the issuance of debt securities;
16. Replacement of Auditing accountants;
17. Changes in the company's fiscal year;
18. Activities of government assignments and / or public services or subsidies;
19. Transparency in goods and services procurement.

Accountability

Accountability is clarity of function, structure, systems and responsibility so that the governance of corporate organs is implemented effectively.

The principles of accountability are implemented with a focus on improving the function and role of each organ of the Company, so that management of the business runs well. In order to enhance the accountability of conducting operational tasks, PLN implements various rules and regulations and various basic policies of corporate management in accordance with the regulator in the capital market, as follows:

1. Having Independent Commissioners

PLN has a Board of Commissioners totaling 9 people, including the President Commissioner and two Independent Commissioners who are unaffiliated with the Company's shareholders. With their independent status and stance, the Independent Commissioners are able to protect and promote the interests of the stakeholders and provide independent advice that represents the interests of all parties.

2. Establishing an Independent and Competent Audit Committee

As part of the enforcement of internal rules and the functioning of operational activities in accordance with the principles of good corporate governance, the PLN Board of Commissioners has established an Audit Committee, whose members are competent in their respective fields, that have independent status and are able to act independently. To ensure that supervision of and cooperation with the Internal Audit (Internal Supervisory Unit) operates free from the influence of unauthorized parties, the PLN Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner who has a background of expertise in accounting and / or financial management.

3. Establishing a Risk Management Committee

The PLN Board of Commissioners has also established a Risk Management Committee to assist in the implementation of supervisory duties. The Risk Management Committee is chaired by an independent commissioner and has members who are competent

Risiko. Komite Manajemen Risiko bertugas melakukan evaluasi terhadap model, kebijakan, pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

4. Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi

Selain membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, Dewan Komisaris PLN juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh seorang Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk melakukan evaluasi atas sistem nominasi dan remunerasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

5. Pengawasan dan Pengendalian Internal

PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. PLN menerapkan sistem pengendalian internal yang sebagian tugasnya adalah melakukan pengawasan atas akuntabilitas Direksi dan jajaran operasionalnya. Melalui unit Satuan Pengawasan Intern, manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundangundangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan transaksi dan pengelolaan keuangan perusahaan, PLN merintis dan meningkatkan kerja sama dengan BPK dan KPK, badan negara yang aktif terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. PLN juga menjalin kerja sama dengan Tranparansi Internasional Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan usaha.

6. Kebijakan *Whistleblowing* System

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabiltas, PLN telah menerapkan Kebijakan *whistleblowing system* sejak akhir tahun 2012.

7. Pengembangan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi

Pengembangan modul sistem transaksi berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk dua tujuan, yakni akuntabilitas pencatatan dan pembukuan transaksi, sekaligus efisiensi operasional. PLN telah menerapkan beragam modul transaksi berbasis teknologi informasi, meliputi: AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat) dan P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat), yang

in the field of Risk Management. The Risk Management Committee is in charge of evaluating the models and policies of risk measurements used by the Company and provides recommendations for further action.

4. Establishing a Nomination and Remuneration Committee.

Apart from the Audit Committee and Risk Management Committee, the PLN Board of Commissioners has formed a Nomination and Remuneration Committee, which is chaired by a Commissioner. The Nomination and Remuneration Committee is tasked with evaluating the nomination and remuneration system and providing recommendations for further action.

5. Internal Supervision and Control.

PLN conducts supervision and internal control as part of the implementation of accountability and transparency in line with the basic principles of good corporate governance. PLN implements an internal control system, which is part of its duty to supervise the Board of Directors' accountability and its operational team. Through the Internal Supervisory unit, PLN's management has guaranteed the effectiveness and efficiency of its operations, in compliance with the rules and regulations, as well as the accuracy and reliability of financial reporting.

As part of efforts to improve the accountability of transactional activities and the financial management of the company, PLN has pioneered and increased its cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), state agencies that are actively involved in efforts to combat corruption. PLN has also formed a partnership with Transparency International Indonesia in order to improve the accountability of its business activities.

6. Whistleblowing System Policy

As part of efforts to improve accountability, PLN has implemented the Whistleblowing System since the end of 2012.

7. Development of the Transactions based on Information Technology-

This has two purposes, the accountability of records and bookkeeping of transactions, and operational efficiency. PLN has implemented a variety of transaction modules based on information technology, including: AP2T (Central Application of Management and the Customer) and P2APST (Centralized Management and Supervision of Revenue Flows), which minimizes contact between the

meminimalisir kontak antara petugas dengan pelanggan sehingga meminimalisir peluang terjadinya tindakan penyimpangan.

8. Pedoman Perilaku

Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* PLN telah diterbitkan pada Oktober 2005 dan telah dimutakhirkan pada tahun 2010 sebagai implementasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, khususnya dalam hal akuntabiltas. *Code of Conduct* berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal. Secara berkala, Buku Pedoman Perilaku PLN disempurnakan mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perusahaan.

9. Budaya Perusahaan

Gerakan "PLN Bersih, No Suap", merupakan upaya menciptakan budaya perusahaan, budaya seluruh jajaran PLN untuk meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Seluruh "warga PLN" yakin untuk mewujudkan falsafah, visi dan misi perusahaan harus dilakukan secara bersama-sama dilandasi oleh Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar (SIPP).

Budaya Perusahaan PLN diresmikan pada 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-57, menjadi alat agar tercipta integritas di seluruh "warga PLN" sekaligus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Implementasi Budaya Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh jajaran perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga dilakukan kepada pegawai baru dalam masa orientasi.

Responsibilitas

Yakni kesesuaian/kepatuhan Perseroan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah pengelolaan sesuai standar-standar

officer and customers in order to lessen the chances of violations.

8. Code of Conduct

The PLN Code of Conduct was published in October 2005 and was updated in 2010 as a means of improving the quality of Good Corporate Governance, particularly in terms of accountability. The Code of Conduct emphasizes good habits and behavior, and exemplary social and professional conduct in PLN. These guidelines pertain to leadership, responsible membership, professional relationships between members, and relationships with external parties. Periodically, the PLN Code of Conduct is revised in line with developments to and changes in the business environment of the Company.

9. Corporate Culture

"PLN Bersih, No Suap" (Clean PLN, No Bribery) campaign is an attempt to create an exceptional corporate culture, a culture that encompasses all PLN employees to improve accountability in performing daily managerial tasks. All PLN employees believe that the formation of corporate philosophy, achievement of Company's vision and mission must be carried out jointly, based on Corporate Culture upholding the values of Mutual Trust, Integrity, Caring, and Keenness to learn.

PLN's Corporate Culture was inaugurated on October 27, 2002 coinciding with the 57th National Electrical Day. It has become a tool to instill integrity in all PLN employees, while enhancing the quality of Good Corporate Governance.

The implementation of Corporate Culture is implemented through socialization to the entire Company. Socialization is achieved through presentations, discussions, Q&A sessions, and group discussions. Planting Corporate Culture values in new employees is also an important feature during orientation.

Responsibility

Responsibility is the Company's compliance with and adherence to management of the Company in accordance with strong corporate principles, as well as with the laws and regulations.

Responsibility is applied through strict adherence to the precautionary principles and ensures compliance with company guidelines, and the statutes and regulations in force. Responsibility is also applied to management principles in accordance with universal corporate standards. Several

korporasi yang berlaku universal serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Beberapa kebijakan dan praktik operasional PLN yang menunjukan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini meliputi:

1. **Sistem Manajemen Mutu (ISO)**

   Sejak 2004, secara intensif PLN melaksanakan program sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3, Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. Penerapan sertifikasi ini untuk menunjukkan bahwa PLN dikelola dengan memperhatikan standar-standar pengelolaan korporasi yang berlaku universal.

   Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

   PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan. Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) dengan mewajibkan setiap unit memperoleh sertifikat ISO 27000.

   Penerapan sistem manajemen mutu melalui program sertifikasi diyakini akan membuat akuntabilitas kegiatan operasional meningkat, sehingga tingkat kepercayaan para kreditor dan para Pemangku kepentingan lain terhadap PLN membaik.

2. **Penerapan Manajemen Risiko**

   PLN berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko secara berkesinambungan di seluruh proses bisnis dan pengelolaan perusahaan guna mendukung tercapainya tujuan dan terhindarnya perusahaan dari dampak negatif atas risiko yang tidak tertangani dengan baik. Komitmen ini tercermin dari penetapan Kebijakan Manajemen Risiko, pembentukan Divisi Manajemen Risiko dan kepatuhan, dan pelaksanaan penilaian risiko secara berjenjang hingga ke level korporasi.

3. **Manajemen Kinerja**

   Untuk meningkatkan tanggung jawab setiap jajaran terhadap kualitas pelaksanaan tugasnya, PLN menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja. Melalui kebijakan tersebut, setiap insan PLN dituntut menunjukkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk

PLN policies and operational practices, which reveal efforts to improve the quality of the application of this principle include:

1. **Quality Management System (ISO)**

   Since 2004, PLN has intensively implemented a certification program in the power plant sector that includes ISO 9001 on Services, ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, SMK3, on Operational Feasibility, and Operation and Maintenance Competency Certification. Implementation of these certifications shows that PLN is managed with a substantial understanding of universal corporate management standards.

   The target is for every power plant to be managed according to international standards as shown by the evidence of obtaining certification in the Power Plant Sector.

   PLN has also intensified the implementation of the certification program in the consumer service sector such as ISO 9001 in the distribution business units in the regions, as an effort to improve the quality of service to customers. The Company prioritizes the health and safety of employees, and encourages the achievement of a zero accident record by requiring each unit to obtain ISO 27000.

   Implementation of a quality management system through this certification program is believed to improve the accountability of operating activities, which in turn, will improve the creditors' and other stakeholders' levels of trust towards PLN.

2. **Implementation of Risk Management**

   PLN is committed to implementing sustainable Risk Management in all business processes and management of the company in order to support the achievement of company objectives and avoid a negative impact from risks that are not handled properly. This commitment is reflected in the establishment of the Risk Management Policy, the establishment of the Division of Risk Management and Compliance, and the implementation of risk assessment in stages up to the corporate level.

3. **Performance Management**

   To improve the responsibility of each member of staff for the quality of his/her performance, PLN has implemented a Performance Management Policy. Through this policy, each PLN member of staff is required to show responsibility in performing their duties. The performance will be assessed to provide the basis for a career path and

kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima. Remunerasi berbasis kinerja ini sejalan dengan ketentuan peraturan terbaru dari kementerian BUMN.

Kebijakan Manajemen Kinerja juga diterapkan dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi. Dalam kaitan ini, seluruh jajaran insan PLN, mulai dari karyawan pelaksana, manajemen hingga Direksi, diberikan target kinerja yang harus dicapai sesuai lingkup dan tanggung jawabnya. Untuk level pelaksana, pertanggungjawaban kinerja dilakukan dalam bentuk asesmen kinerja atas *Key Performance Indicators* yang dilakukan secara berkala pada setiap periode operasional. Sementara untuk tingkatan Direksi dan Komisaris, target kinerja dituangkan dalam bentuk *Key Performance Indicators* Direksi dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris yang dipertanggungjawabkan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham.

the amount of remuneration to be received. Performance-based remuneration is in line with the latest rules and regulations of the Ministry of State-owned Enterprises.

Performance Management Policy is also applied in order to optimize corporate performance. In this regard, all PLN personnel, ranging from executive employees and management, to the Board of Directors, are given performance targets that must be achieved within the scope of work and responsibility. At the executive level, responsibility is indicated by assessment of Key Performance Indicators (KPI), which is conducted in each operational period. The performance targets of the Directors and Commissioners are stated in the KPI for the Board of Directors and the Board of Commissioners, which is checked and tallied before the General Meeting of Shareholders.

Kemandirian

Kondisi dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Selain itu, PLN menerapkan kebijakan larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para Direktur dengan anggota Dewan Komisaris ataupun antara masing-masing anggota Direktur dan Dewan Komisaris.

Untuk memastikan Independensi/Kemandirian dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, PLN juga menerapkan dengan ketat kebijakan-kebijakan sebagaimana tercantum dalam Pedoman GCG, Board Manual maupun Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang sudah diberlakukan.

Kesetaraan dan Kewajaran

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Independence

Independence refers to a professionally managed company with no conflict of interest and no influence or pressure from any party that does not comply with the law and the principles of a healthy corporation.

The principle of independence is applied through the development and implementation of the Code of Conduct including complete categorization of transactions and investment plans that contain or potentially contain conflicts of interest.

In addition, PLN implements a policy of banning family relationships, of any degree, between Directors and members of the Board of Commissioners or between each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.

To ensure independence in decision-making and execution of tasks, PLN strictly implements policies as contained in the Good Corporate Governance Guidelines, the Board Manual and the Code of Conduct.

Equality and Fairness

Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders, outlined in the agreement and the applicable laws and regulations.

Asas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh stakeholder secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh PLN. PLN juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan.

Kesetaraan juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Pada keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia tersebut, PLN hanya mendasarkan pada kompetensi, kemauan dan kinerja setiap karyawan, seperti dijelaskan dalam uraian Manajemen Kinerja.

Selain dalam pengelolaan sumber daya manusia, PLN juga menerapkan asas kewajaran/kesetaraan dalam pemilihan vendor barang maupun jasa. PLN menerapkan program *e-proc* dalam proses tender pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan penilaian dan pengumuman secara terbuka atas setiap kesempatan pengadaan barang dan jasa. Proses kualifikasi jenis barang dan jasa yang ditenderkan juga diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh calon peserta tender sesuai kualifikasi masing-masing.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, PLN melakukan asesmen kualitas penerapan GCG secara berkala sejak tahun 2002. Melalui asesmen berkala tersebut, PLN mempertimbangkan dengan seksama rekomendasi yang dikemukakan asesor, untuk memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik GCG pada periode selanjutnya.

Pada setiap periode penilaian, PLN berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi hasil *assessment* GCG pada periode sebelumnya.

Pada awal tahun 2016, PLN melakukan *self assessment* GCG untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2015. Hasil *self assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) periode tahun 2015 mencapai total skor sebesar 86,46.

Self Assessment penerapan GCG di PT PLN (Persero) dilaksanakan sesuai kriteria yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

The principle of equality is applied through balanced treatment of all stakeholders between the rights and obligations granted to them and PLN. PLN allows access of information to all stakeholders to elicit suggestions for progress, and improvements to the Company's quality of service.

Equality is also applied in the process of recruitment, training, assessment and arrangement of career paths for employees. In the complete process of managing human resources, PLN makes decisions based solely on competence, willingness and performance of each employee, as described in the Performance Management guidelines.

Apart from the management of human resources, PLN also applies the principle of fairness and equality in the selection of vendors for goods or services. PLN implements its e-process program in the procurement of goods and services, and implements assessment and conducts an open public announcement for all procurements of goods and services. Process and qualification details of goods and services are stated in an open bid, which is publicly announced and is open to prospective bidders.

GCG ACHIEVEMENT ASSESSMENT

In order to obtain feedback for improvement in the quality of corporate governance best practices, PLN has conducted GCG quality assessment regularly since 2002. Through this periodic assessment, PLN carefully considers the recommendations put forward by assessors to improve the quality of GCG best practices in the upcoming period.

In each assessment period, PLN attempts to correct certain policies, work mechanisms, and new governance infrastructure establishment in accordance with recommendations stemming from the GCG assessment results of the previous period.

In early 2016, PLN conducted GCG self-assessment to evaluate its implementation in 2015. The results for 2015 reached a total score of 86.46.

The self-assessment of GCG in PLN was conducted according to criteria developed by the Ministry of SOEs, based on:

1. SOE Minister Regulation No. Per-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprise (SOE).

2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Adapun tujuan pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG adalah untuk:

1. Menilai kecukupan infrastruktur dan praktik tata kelola perusahaan dalam memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk periode tahun 2015;
2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2014
3. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan (*area of improvement*);
4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT PLN (Persero) dan merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan yang masih diperlukan.

Pelaksanaan *self assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT PLN (Persero), sehingga hasil *self assessment* juga merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG di PT PLN (Persero).

Pada awal tahun 2017, pelaksanaan penilaian implementasi GCG di PT PLN (Persero) masuk dalam Periode *assessment* yang dilakukan oleh *Assessor* Independen dan pelaksanaan *assessment* ini untuk menilai implementasi penerapan GCG untuk Periode tahun 2016. Pada Periode ini, PT PLN (Persero) kembali meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai *assessor* independen dalam melakukan penilaian implementasi GCG Periode Tahun 2016.

Hasil *assessment* terhadap penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai total skor sebesar 87,14. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT PLN (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai kualifikasi Sangat Baik.

2. SOE Minister Secretary Decision No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicators/Evaluation Parameters and Evaluation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprises.

The objectives of self- assessment of GCG are to:

1. Evaluate infrastructure adequacy and governance practices in fulfilling Good Corporate Governance criteria, established by the SOE Ministry in 2015;
2. Follow up the 2014 assessment recommendations
3. Identify areas of improvement;
4. Monitor GCG implementation consistency in PLN and formulate improvement and refinement steps, if required.

The execution of GCG self-assessment is a part of sustainable GCG implementation in PLN ; consequently, the results of self-assessment can be considered to be an evaluation of GCG advancement.

In early 2017, a GCG assessment at PLN was conducted by an independent assessor, in order to evaluate GCG implementation in 2016. In connection with this, PLN once again requested the assistance of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to act as an independent assessor of GCG.

Results of the GCG assessment in 2016 reached a total score of 87.14. This indicated that the application of GCG in PLN in 2016 achieved a "Very Good" qualification.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT PLN (Persero) tahun 2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The results of the assessment of GCG in PLN in 2016 can be summarized as follows:

Aspek Penilaian Rating Aspects	**Bobot** Weight	**Capaian Perusahaan** Achievements of the Company	**Persentase** Percentage	**Penjelasan** Explanation
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementation of Good Corporate Governance Sustainably	7	5,94	84,86	Baik Good
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and the GMS	9	7,80	86,67	Sangat Baik Very Good
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	32,34	92,40	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35	31,09	88,83	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure and Transparency	9	8,09	89,89	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5	1,88	-	-
Total	100	87,14	-	Sangat Baik Very Good

Berdasarkan hasil *Assessment*, capaian skor tertinggi terdapat pada aspek Dewan Komisaris yaitu 32,34 dari nilai maksimum 35 atau 92,40% dan nilai capaian terendah terdapat pada aspek Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan yaitu 5,94 dari nilai maksimum 7 atau 84,86%.

Based on the assessment results, the highest performance score was 32.34 in relation to the aspects of the Board of Commissioners. This was equivalent to 92.40%, out of a maximum score of 35.The lowest performance was related to aspects of the commitment to implement Sustainable Good Corporate Governance recorded at 5.94 out of a maximum value 7 or 84.86%.

Parameter pada masing-masing aspek pengujian (indikator) yang masih memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan
    1. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala
    2. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku
    3. Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara
    4. Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.
    5. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.
    6. Perusahaan mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

The parameters of each aspect of the indicator test that still require improvement are as follows:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
    1. The Company has a Code of Conduct that is reviewed and updated periodically
    2. The Company has created a conducive situation to implement the guidelines for good corporate governance (GCG Code) and the Code of Conduct
    3. State official/ mandatory understands the standard operating procedures and policies on compliance with reporting state administrators wealth
    4. The company carries out the standard operating procedures and policy on compliance with reporting of the State administrators wealth
    5. The Company has a provision / policy on Gratuity Control.
    6. The Company implements Gratuity Control.

7. Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*).

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   1. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
   2. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.
   3. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/ Pemilik Modal.
   4. RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
   5. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
   6. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.
   7. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
   8. Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
   9. Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.
3. Dewan Komisaris
   1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.
   2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.
   3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
   4. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
   5. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur,

7. The Company carries out the reporting policy on alleged irregularities in the company (whistle blowing system).

2. Shareholders and the GMS/Capital Owners
   1. Shareholders/GMS/Capital Owners perform assessment of candidates for members of the Board of Commissioners/Board of Trustees.
   2. Shareholders/GMS/Capital Owners suggest ratification of the Company's Long Term Plan and/or its Revision.
   3. Shareholders/GMS/Capital Owners grant approval/ decision on the proposed corporate action, which requires the approval of GMS/Capital Owners.
   4. GMS/Capital Owners provide an assessment of the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners / Board of Trustees.
   5. Shareholders/GMS/Capital Owners approve the annual report including financial statements and the ratification of supervisory duties of the Board of Commissioners / Board of Trustees
   6. Shareholders/GMS/Capital Owners specify the use of net profit.
   7. GMS shall make decisions through a transparent and fair process.
   8. Shareholders/Capital Owners provide direction and guidance for the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and to the Board of Commissioners/Board of Trustees.
   9. Shareholders/Capital Owners respond to information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Board of Trustees on the indication of decline in performance and significant company losses.
3. The Board of Commissioners
   1. The Board of Commissioners conducted training programs in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners on an as –needed basis.
   2. The Board of Commissioners approved the Long-term Company Plan draft submitted by the Board of Directors.
   3. The Board of Commissioners approved the Work and Budget Plan draft submitted by the Board of Directors.
   4. The Board of Commissioners provided direction on important matters concerning changes in the business environment, that were expected to have a major impact on the operations and performance of the company, in a timely and relevant manner.
   5. Within the limits of its authority, The Board of Commissioners responded to suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders (customers,

dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

6. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.
7. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
8. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.
9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
10. Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
11. Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4. Direksi
   1. Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
   2. Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
   3. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.
   4. Direksi memiliki RJPP yang disahkan oleh RUPS
   5. Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.
   6. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.
   7. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan
   8. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
   9. Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.

suppliers, creditors, and employees) that were delivered directly to the Board of Commissioners or were submitted by the Board of Directors.

6. The Board of Commissioners provided direction on strengthening the company's internal control system.
7. The Board of Commissioners provided direction on the quality of policy and services, as well as their implementation.
8. The Board of Commissioners/Board of Trustees assessed the Board of Directors, and reported the results of the assessment to the Shareholders/Capital Owners.
9. The Board of Commissioners/Board of Trustees measured and evaluated the performance of the Board of Commissioners/Board of Trustees.
10. Meetings of the Board of Commissioners /Board of Trustees were held regularly according to applicable regulations and / or statutes.
11. The Board of Commissioners/Board of Trustees worked in accordance with the legislation in force and the needs of the Board of Commissioners/Board of Trustees.

4. Board of Directors
   1. The new Board of Directors was appointed following the introduction of the program organized by the Company.
   2. The Board of Directors conducted a training program in order to improve members' competence on an as-needed basis.
   3. The Board of Directors established operational policies and standard operational procedures (SOP) for the core business processes of the company.
   4. The Board of Directors has Long-term Company Plan passed by the GMS
   5. The Board of Directors has the Company's Work and Budget Plan passed by the GMS/Minister/Capital Owners.
   6. The Board of Directors placed employees at appropriate office levels in accordance with job specifications and drew up a succession plan for all positions in the Company.
   7. The Board of Directors implemented a system to improve the quality of products and services
   8. The Board of Directors carry out the procurement of goods and services that benefited the company, in both price and quality of goods and services.
   9. The Board of Directors developed human resources, assessed performance and provided adequate remuneration, and established an effective human resources environment to support the achievements of the company.

10. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.
11. Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
12. Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
13. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.
14. Pelaksanaan kewajiban kepada Negara
15. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.
16. Upaya untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten dan berkelanjutan
17. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.
18. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
19. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
20. SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
21. SPI melaksanakan fungsi pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.
22. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.

Rekomendasi

Terhadap Parameter pada masing-masing aspek pengujian yang masih memerlukan perbaikan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen/Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
    1. Direksi dan Dewan Komisaris agar mengesahkan pemutakhiran (*draft*) pedoman perilaku dan draft kode etik sebagai pendukung pedoman perilaku dan *Draft* Pedoman Perilaku agar memuat materi mengenai komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
    2. Direktur yang menangani SDM PT PLN agar menyusun petunjuk teknis pedoman perilaku sebagai panduan pelaksanaan pedoman perilaku dan menginstruksikan seluruh karyawan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku.
    3. Direksi dan Dewan Komisaris agar menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku.
    4. Pernyataan kepatuhan agar diperbarui dan ditandatangani setiap tahun,

10. The Board of Directors established and implemented a system of internal control to safeguard investments and protect company assets.
11. The Board of Directors followed up on the results of the Internal Supervisory Audit and the external auditor (Public Accountant Firms and Audit Board of the Republic of Indonesia).
12. The company complied with the legislation in force in agreements with third parties.
13. The relationship with creditors.
14. The obligation to the State
15. The relationship with employees.
16. Efforts to increase shareholder value in a consistent and sustainable manner.
17. The company carried out corporate social responsibility to support the sustainability of the company's operations.
18. The Board of Directors reported relevant information to the Shareholders and the Board of Commissioners/ Board of Trustees.
19. The Board of Directors evaluated the implementation of the decisions of the previous meeting.
20. Internal Supervisory Audit was equipped with the supporting factors for successful execution of their duties.
21. Internal Supervisory Audit implemented internal oversight to provide added value and improve the operations of the Company.
22. The Corporate Secretary performed its function.

Recommendations

For the parameters of each evaluation aspect still requiring improvement, the following points are recommended:

1. Commitment to Corporate Governance Policy
    1. The Board of Directors and the Board of Commissioners are to ratify updates to the Code of Conduct and Code of Ethics draft and show their support for them in order to render the material a commitment to health and safety.
    2. The HR Director of PLN is to develop a Code of Conduct manual as a guide and instruct all employees to sign a statement of compliance.
    3. The Board of Directors and the Board of Commissioners are to sign a statement of compliance with the Code of Conduct.
    4. A statement of compliance must be renewed and signed every year,

5. Direksi PT PLN agar meningkatkan pemantauan terkait ketepatan waktu penyampaian LHKPN oleh pejabat yang ditetapkan Direksi/wajib lapor LHKPN.

6. Direksi PT PLN agar mendorong kepatuhan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dalam penyampaian LHKPN ke KPK.
7. Direksi PT PLN agar mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap pejabat yang ditetapkan Direksi/wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK.

8. Unit pada PT PLN agar melakukan *update* informasi kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Divisi Manajemen Risiko/Manager Senior Kepatuhan sebagai bahan penyusunan laporan berkala penyampaian LHKPN ke KPK.
9. Direksi dan dewan komisaris agar mengesahkan penyempurnaan kebijakan pengendalian gratifikasi dan menambahkan materi:
   a. komitmen dewan komisaris.
   b. kewajiban peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.
10. Perlu disusun mekanisme *cross check* antara jumlah pengaduan yang diterima dengan tindak lanjutnya

11. Menyusun mekanisme pengaturan tindak lanjut pengaduan berdasarkan kategori organ perusahaan
12. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan WBS.

2. Pemegang Saham
   1. Pemegang saham agar meminta masukan secara formal kepada Kementerian Teknis dalam penjaringan calon Dewan Komisaris dan
   2. Pemegang Saham agar menuangkan proses dan hasil penilaian calon anggota dekom dalam berita acara.

   3. Pemegang saham agar melakukan pembahasan/ pengkajian terhadap rancangan RJPP atau revisi RJPP sebelum melakukan Pengesahan RJPP yang diajukan Direksi.
   4. Pemegang saham agar memperhatikan batasan waktu dalam memberikan persetujuan/keputusan RUPS atas usulan aksi korporasi.
   5. Pemegang saham agar:
      a) Menetapkan target kinerja direksi secara individu dan target kinerja dewan komisaris
      b) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan kinerja dewan komisaris.

5. The Board of Directors of PLN is to increase the monitoring of punctuality for the delivery of LHKPN by officials who are assigned by the Board of Directors and compulsory reporting of LHKPN.
6. The Board of Directors is to encourage compliance to officers who shall submit the LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK).
7. The Board of Directors is to impose sanctions under the applicable laws to officials assigned by the Directors and/or the compulsory reporting of LHKPN, that have not submitted LHKPN to the Corruption Eradication Commission.
8. Establish a unit at PLN to issue updates on compliance information on LHKPN submission to the Division of Risk Management/Compliance Senior Manager as material for periodic reports for LHKPN submission to the Corruption Eradication Commission.
9. The Board of Directors and the Board of Commissioners are to ratify improvements to the policy on gratification control and added material:
   a. Commitment of the board of commissioners.
   b. Obligation for periodic review and refinement of the supporting devices.
10. Mechanism of cross checking should be structured between the number of complaints received with follow-up action
11. Develop a mechanism for the follow-up of complaints based on the category of the Company organ
12. Conduct periodic evaluations for the implementation of WBS.

2. Shareholders
   1. Shareholders are to request formal input to the Ministry of Technical for the prospective members of the Board of Commissioners;
   2. Shareholders are to transfer the process and outcome of assessment for the prospective Board of Commissioner members in the Minutes of the Meeting.
   3. Shareholders are to discuss and assess the Long-term Company Plan draft or Long-term Company Plan revision before conducting Long-term Company Plan ratification as proposed by the Board of Directors.
   4. Shareholders are to pay attention to the time constraints when approving GMS decisions on proposed corporate action
   5. Shareholders are to:
      a) Set performance targets of individual Directors and The Board of Commissioners.
      b) Assess the individual performance of Directors and the performance of the Board of Commissioners.

6. Pemegang saham agar :
   a) Mengevaluasi pedoman penyusunan laporan manajemen,
   b) Menetapkan pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan dewan komisaris
7. Pemegang saham agar menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam penentuan deviden
8. Arahan pemegang saham agar menambahkan penekanan pada aspek lingkungan sebagai akibat dari operasi Perusahaan (contoh: indikator PROPER pembangkit).
9. Pemegang saham agar menindaklanjuti AOI hasil *assessment* GCG untuk aspek pemegang saham.
10. Pemegang saham agar melengkapi sistem pengumpulan informasi yang ada (Permen 18/2014) dengan sistem pelaporan gejala penurunan kinerja dari direksi dan/atau dewan komisaris.

3. Dewan Komisaris
   1. Dewan komisaris agar membuat laporan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti.
   2. Dewan komisaris agar memperhatikan batas waktu dalam memberikan tanggapan/persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh direksi.
   3. Dewan komisaris dalam memberikan persetujuan rancangan RKAP agar menyampaikan simpulan atas keselarasan RKAP dengan RJPP yang berlaku.
   4. Dewan komisaris agar melakukan pembahasan/ telaahan/kajian dan mendokumentasikan mengenai kesesuaian perubahan lingkungan bisnis dengan visi dan misi perusahaan.
   5. Dewan komisaris agar melakukan pembahasan secara intensif dan mendokumentasikan atas permasalahan dan keluhan dari *stakeholders*.
   6. Penelaahan/arahan oleh Dewan Komisaris terhadap sistem pengendalian internal agar mencakup 5 komponen pengendalian internal secara terintegrasi.
   7. Dewan komisaris agar merencanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan.
   8. Dewan komisaris agar melakukan penilaian secara khusus atas kinerja direksi secara individu dan melaporkannya kepada pemegang saham.
   9. Dewan Komisaris agar melakukan dan mendokumentasikan penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan komite dewan komisaris.
   10. Anggota dewan komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat komisaris agar menyampaikan surat kuasa dan penjelasan atas ketidakhadiran dalam rapat agar dicantumkan dalam risalah rapat.

6. Shareholders are to:
   a) Evaluate the guidelines for the preparation of management reports,
   b) Establish guidelines for the preparation of monitoring reports for the Board of Commissioners
7. Shareholders are to establish a policy as the basis for determining dividends
8. Prepare a tutorial for shareholders to add emphasis to the environmental aspects as a result of the Company's operations (eg.PROPER indicator power plant).
9. Shareholders are to follow up on the AOI results of GCG assessments on the aspects of shareholders.
10. Shareholders are to complement existing information collection systems (Ministerial Regulation 18/2014) with the reporting system of indications of decline in the performance of the Directors and/or Commissioners.

3. The Board of Commissioners
   1. The Board of Commissioners is to report the results of training activities conducted.
   2. The Board of Commissioners is to pay attention to the time limit for response and approval of the Long-term Company Plan draft submitted by the Directors.
   3. The Board of Commissioners is to approve the Work and Budget Plan draft in order to express a conclusion on the alignment of Work and Budget Plan with the applicable Long-term Company Plan.
   4. The Board of Commissioners is to conduct discussions, research and reviews, and document the suitability of the changing business environment with the vision and mission of the company.
   5. The Board of Commissioners is to conduct intensive discussion and documentation of problems and complaints from stakeholders.
   6. Review by the Board of Commissioners of the internal control system that includes the five components of integrated internal control.
   7. The Board of Commissioners is to plan monitoring activities and provide advice for upgrading quality and service.
   8. The Board of Commissioners is to conduct a special assessment on the performance of individual Directors and report to shareholders.
   9. The Board of Commissioners is to perform and document the performance assessment of each member of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners.
   10. Members of the Board of Commissioners who are unable to attend the Commissioners' meetings, are to convey a power of attorney and an explanation for the absence, to be recorded in the Minutes of the Meeting.

11. Dewan komisaris agar melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota komite kepada pemegang saham.

4. Direksi
   1. Untuk mempercepat pemahaman terkait proses bisnis dan tata kelola perusahaan, Sekretaris Perusahaan perlu menyelenggarakan program pengenalan secara sistematis kepada Direksi yang baru diangkat.
   2. Perencanaan program pelatihan kompetensi anggota direksi agar lebih detil dan Direksi agar membuat laporan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti.
   3. Direksi agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan proses bisnis inti perusahaan sesuai dengan SOP.
   4. Direksi agar:
      a) Memperhatikan batas waktu penyampaian dalam mengajukan Rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
      b) Menyosialisasikan RJPP yang telah disahkan kepada seluruh karyawan perusahaan.
   5. Dalam penyusunan RKAP, Direksi agar merujuk pada RJPP yang telah disahkan.
   6. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan organisasi, Direksi agar mengisi seluruh jabatan dalam oraganisasi dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada karyawan terkait kebijakan penempatan karyawan dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan.
   7. Dalam memenuhi hak pelanggan, perusahaan agar memperhatikan tingkat mutu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilakukan evaluasi secara berkala.
   8. Direksi agar menginstruksikan unit kerja untuk mematuhi pedoman pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan.
   9. Direksi agar memastikan prosedur dalam program K3 berjalan efektif sehingga hasilnya diharapkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja.
   10. Direksi agar melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas.
   11. Direksi agar meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut temuan audit SPI dan auditor eksternal.
   12. Perusahaan mengupayakan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, dan kasus-kasus dengan pihak ketiga yang menjadi sorotan publik.
   13. Direksi agar menyusun kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk perjanjian kredit, kebijakan pengelolaan pinjaman jangka panjang, dan kebijakan perusahaan sebagai penjamin (*avalist*).

11. The Board of Commissioners is to report the appointment and dismissal of members of the Committees to shareholders.

4. Board of Directors
   1. In order to accelerate the understanding related to business processes and corporate governance, the Corporate Secretary needs to conduct a systematic introduction program to new members of the Board of Directors
   2. Planning of competency training programs for members of the Board of Directors needs to be more detailed, and the Board of Directors needs to report the results of the training activities conducted.
   3. The Board of Directors is to increase oversight of the implementation of the company's core business processes in accordance with the SOP.
   4. Board of Directors is to:
      a) Take into account the deadline for submission of the Long-term Company Plan draft submitted to the Board of Commissioners and/or the GMS.
      b) Socialize Long-term Company Plan that has been ratified to all employees of the Company.
   5. In the preparation of the Work and Budget Plan, the Board of Directors is to refer to the Long-term Company Plan that has been ratified.
   6. To improve the effectiveness of the organization, the Board of Directors is to fill all positions in the organization and further improve socialization to employees related to policy on employee recruitment and required job specifications.
   7. In fulfilling the rights of its customers, the Company needs to consider the level of quality of services in accordance with applicable regulations, and evaluate periodically.
   8. The Board of Directors is to instruct the appropriate work units to comply with the guidelines for procurement of goods and services that have been set.
   9. The Board of Directors is to ensure that procedures in the K3 program are being performed effectively, resulting in a lower accident rate.
   10. The Board of Directors is to conduct an evaluation of the effectiveness of internal control at the entity level.
   11. The Board of Directors is to improve the follow-up efforts to resolve the audit findings of Internal Supervisory Audit and external auditors.
   12. The Company strives to increase compliance with laws and regulations relating to government policy, the environment, and cases with third parties in the public spotlight.
   13. The Board of Directors is to develop policies that can be used as a reference to the credit agreement, the policy management of long-term loans, and the company's policy as guarantor (avalist).

14. Pemenuhan kewajiban penyampaian dokumen dan pembayaran pajak agar memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan.
15. Direksi agar mempercepat proses penandatanganan PKB dan menetapkan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.
16. Direksi agar secara konsisten meningkatkan nilai pemegang saham melalui peningkatan EPS.
17. Perusahaan agar melaksanakan PKBL sesuai dengan yang direncanakan dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, agar program CSR dilengkapi dengan indikator kinerja.
18. Direksi agar memperhatikan batas waktu penyampaian informasi yang relevan dan laporan manajemen kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham.
19. Dalam rapat direksi, agar diagendakan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya
20. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran SPI, perlu didukung dengan jumlah dan kualitas SDM SPI yang memadai. Pada tahun 2017, perusahaan sedang dalam proses rekrutmen dan sertifikasi personil SPI. Perlu dilakukan percepatan atas proses sertifikasi bagi personil SPI yang belum memiliki sertifikat profesi.
21. SPI agar melakukan evaluasi dan memberikan masukan terkait konsistensi kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran organisasi.
22. Risalah rapat agar disusun sebagaimana diatur dalam *Board Manual*.

14. The fulfillment of the obligation to submit documents and payment of taxes in order to pay attention to established time limits.
15. The Board of Directors is to speed up the process of PKB signing and establish policies that involve employees in its formulation.
16. The Board of Directors is to consistently increase shareholder value through increasing EPS.
17. The Company is to implement the Partnership and Community Development Program in accordance with the plan and to assess the success of the program, so that the CSR programs are equipped with performance indicators.
18. The Board of Directors is to pay attention to the deadline for submission of relevant information and management reports to the Board of Commissioners and Shareholders.
19. The Board of Directors is to evaluate what was discussed and implemented in the previous BoD meeting
20. To improve the effectiveness of the Internal Supervisory Audit role, it needs to be supported by the number and quality of adequate Internal Supervisory Audit Human Resources. In 2017, The company is in the process of recruitment and Internal Supervisory Audit personnel certification. Acceleration of Internal Supervisory Audit personnel certification needs to be conducted for those who do not have professional certificates.
21. Internal Supervisory Audit is to evaluate and provide feedback regarding the consistency of activities and programs of the goals and objectives of the organization.
22. Minutes of the Meeting need to be prepared as stipulated in the Board Manual.

Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG

Selama tahun 2016, PLN merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru maupun restrukturisasi perangkat Dewan Komisaris. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practises* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di perusahaan BUMN.

Program yang dilakukan di tahun 2016, mencakup:

1. Perseroan telah memutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual* yang telah disesuaikan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini Perusahaan.

   Saat ini *Board Manual* PLN terdiri dari 3 Buku yang merupakan 1 kesatuan, yaitu :

Quality Improvement of GCG Best Practices

During 2016, PLN conducted various governance improvement programs and socialized new internal policies, and restructured the Board of Commissioners composition. All of these programs were conducted based on current GCG best practices and on the latest rules regarding GCG implementation in SOE companies.

Programs conducted in 2016, included :

1. The Company updated the revised GCG Code and Board Manual that was adjusted based on the applicable legislation and the current condition of the Company.

   Currently the PLN Board Manual consists of three books that constitute one unit, as follows:

a. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi
Mengatur Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi).

b. *Board Manual* Direksi
Mengatur Tata Laksana Kerja Direksi dan Unit Kerja Direksi.

c. *Board Manual* Dewan Komisaris
Mengatur Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Unit Kerja Dewan Komisaris (Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris).

2. Perseroan telah memutakhirkan Pedoman *Whistleblowing System*.
3. Perseroan saat ini sedang memutakhirkan Pedoman Gratifikasi dan saat ini *draft* sedang diajukan kepada Direksi untuk mendapat Pengesahan.
4. Perseroan saat ini sedang merancang Aplikasi Deklarasi Komitmen terhadap Pedoman Perilaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

a. The Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Setting the work procedures of the Board of Commissioners and Directors.

b. Board Manual of the Board of Directors
Setting the work procedures of the Board of Directors and Work Units of the Board of Directors.

c. Board Manual of the Board of Commissioners
Setting the work procedures of the Board of Commissioners and Work Units of the Board of Commissioners (the Board of Commissioners Secretariat and the Board of Commissioners Committees).

2. The Company has updated the Code of the Whistleblowing System.
3. The Company is currently updating guidelines on gratuities and currently the draft is being submitted to the Board of Directors for confirmation.
4. The Company is currently designing applications for Declaration of Commitment to The Code of Conduct for the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sebagai instansi tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Direktur dan lain-lain.

RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memberikan suara dan menetapkan sikap dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan rencana strategis Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Perseroan RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, RUPS Tahunan bersifat rutin, RUPS Tahunan terdiri dari:
   - RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan.
   - RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

As the highest level of authority in the Company, the General Meeting of Shareholders (GMS) has authority that is not given to either the Board of Commissioners or the Board of Directors, with its limitation set in the Articles of Association and applicable laws and regulations. This authority includes requesting the Board of Commissioners' and the Board of Directors' accountability related to the management of the Company ; making changes to the Articles of Association; appointing and dismissing members of the Board of Directors and Commissioners; deciding allocation of tasks and management authority between the Directors and other parties.

The GMS is a forum for Shareholders to vote and maintain a stance in important decision-making processes associated with the Company's strategic plan.

According to provisions in the Company's Articles of Association, the GMS involves the following :

1. The Annual GMS (AGM) is a routine meeting. The Annual GMS comprises :
   - The Annual GMS approves the Annual Report and the Financial Statements.
   - The Annual GMS approves the Work and Budget Plan.

2. RUPS Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

RUPS diselenggarakan dengan wewenang utama dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, di antaranya:
1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Meningkatkan permodalan Perseroan, memecah maupun mengurangi jumlah saham dan membeli kembali saham.
3. Menggabungkan, melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain.
4. Menjaminkan sebagian besar aktiva perusahaan.
5. Mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan.

PLN merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada keputusan Kementerian BUMN sebagai Pembina seluruh BUMN di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan RUPS dapat berlangsung dengan hadirnya kuasa pemegang saham Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri BUMN beserta staf yang ditugaskan serta dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi PLN.

Pemberitahuan rencana RUPS disampaikan oleh Direksi secara resmi kepada Kementerian BUMN beberapa waktu sebelum pelaksanaan, lengkap dengan agenda RUPS.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 4 kali yaitu:
1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016
2. RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017, dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016
3. RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian Komisaris Utama yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2016
4. RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2016

2. The Extraordinary GMS is the General Meeting of Shareholders that is held whenever necessary.

The GMS's main authority and responsibility is to make decisions, such as:
1. Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Increasing the Company's capital, breaking down or reducing the amount of shares, as well as repurchasing of shares.
3. Acquiring, merging, taking over, and spining off the Company's business units. This can relate to other companies and/or other units of the Company.
4. Using a large part of the Company's assets as collateral
5. Ratifying material transactions or changes in the Company's main business activity, and resolving conflicts of interest.

100% of PLN's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, ordinances and procedures for the implementation of the GMS refer to the decision of the Ministry of State- Owned Enterprises as supervisor of all state -owned enterprises in Indonesia and to the Articles of Association of the Company.

The GMS can be held with the presence of shareholders authorized by the Government of the Republic of Indonesia, in this case the Minister of State Enterprises and assigned staff and attended by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of PLN.

Notification of the GMS's plans is formally submitted by the Board of Directors to the Ministry of State- Owned Enterprises some time before its implementation, complete with the GMS agenda.

In 2016, the General Meeting of Shareholders was held 4 (four) times, as follows :
1. GMS Approval of the Annual Report and Approval of Financial Statements for Fiscal Year 2015, which was held on June 30, 2016
2. GMS Approval of the 2017 Work and Budget Plan, held on December 23, 2016
3. The Extraordinary General Meeting on the dismissal of the Commissioner, conducted on May 24, 2016
4. The Extraordinary General Meeting on Termination of the Board of Commissioners, conducted on December 14, 2016

Keputusan dan Realisasi RUPS 2016

Penyelenggaraan RUPS di tahun 2016 tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang telah ditindaklanjuti, dengan Rekapitulasi sebagai berikut.

Decisions and Realization of GMS 2016

The General Meeting of Shareholders in 2016 resulted in several decisions that have been acted upon, with the following recapitulation.

No.	Keputusan Decision	Realisasi Realization
1.	RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016 GMS GMS Approval of the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2014, which was held on June 30, 2016	
	1. RUPS menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2015 1. The General Meeting of Shareholders approved the Company's Annual Report on the condition and the course of the Company during the financial year 2015 and the Report of the Supervisory Board of Commissioners for Fiscal Year 2015, as well as the Annual Report on the Implementation of the Partnership Program and Community Development (CSR) in Fiscal Year 2015	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
	2. RUPS menyetujui dan mengesahkan penyajian kembali (restatement) atas Laporan Keuangan tahun buku 2014, sehubungan dengan PSAK Nomor 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja, ISAK 8 dan PSAK 30. 2. The General Meeting of Shareholders approved the restatement to the Financial Statements for Fiscal year 2014, in connection with SFAS No. 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits, IFAS 8 and SFAS 30.	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
	3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan tahun buku 2015 serta pemberian pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 3. The GMS approved the Annual Financial Statements for the Fiscal Year 2015, including Partnership and Community Development Program Financial Statements for Fiscal Year 2015, as well as the provision of release and discharge of full responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision for the financial year 2015, as well as the provision of settlement and release from responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for all acts of management and supervision of the Partnership Program and Community Development	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies

	4. RUPS menyetujui penetapan pembagian laba tahun berjalan yang diatribusikan entitas induk tahun buku 2015 sebesar Rp15.569.299 juta sebagai berikut: a. Dividen tunai sebesar Rp 2.137.752 juta atau 13,73% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 b. Sisa laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 sebesar Rp13.431.547 juta ditetapkan sebagai Cadangan Umum 4. The GMS approved the establishment of the distribution of profit for the year, attributable to the parent entity for financial year 2015, which amounted to Rp15,569,299 million as follows: a. Cash dividend of Rp2,137,752 million or 13.73% of the profits for the year, attributable to the owners of the parent entity for fiscal year 2015 b. The remainder of the profit for the year, attributable to the owners of the parent entity for fiscal year 2015 amounted to Rp13,431,547 million designated as General Reserves	Dividen tunai sebesar Rp 2.137.752 telah dibayarkan kepada Pemilik Entitas Induk dan sisa laba sebesar Rp13.431.547 juta telah ditetapkan sebagai Cadangan Umum A cash dividend amounting to Rp2,137,752 million was paid to the Owners of the Company and the remainder of the profit of Rp 13,431,547 million has been set as General Reserves
	5. RUPS menetapkan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2016 5. The GMS set Tantiem to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2015 and the salary/honorarium, allowances and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2016	Tantiem beserta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tantiem along with salary/honorarium, allowances and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners has been paid to the Board of Directors and Board of Commissioners
	6. RUPS meminta kepada Dewan Komisaris untuk segera menyelesaikan proses pengadaan Kantor Akuntan Publik/"KAP" sesuai ketentuan serta mengusulkannya secara terfulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan penetapan definitif KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 6. The GMS requested the Board of Commissioners to immediately complete the procurement process of the Public Accountant / "KAP" according to the provisions, as well as propose in writing to the Shareholders to obtain a definitive decision of the firm appointed to audit the Company's Financial Statements and the Annual Report for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the year ending December 31, 2016.	Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-594/MBU/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016, telah ditetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP AAJ) dalam rangka melaksanakan general audit atas laporan keuangan perseroan tahun 2016, laporan evaluasi kinerja tahun buku 2016, laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern tahun buku 2016, laporan PKBL, dan Key Performance Indicators Perseroan tahun buku 2016. Based on Letter of Minister of State-Owned Enterprises, No. S-594/MBU/10/2016 dated October 10, 2016, accounting firm, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (KAP AAJ) has been appointed to audit the financial statements of the company's 2016 performance, to evaluate reports for fiscal year 2016, to report compliance with laws and regulations and internal control for financial year 2016, Partnership and Community Development Program reports, and key performance indicators for financial year 2016.
	7. RUPS menetapkan Besaran dana PKBL untuk tahun 2016 berasal dari sisa/saldo dana PKBL yang tersedia di awal tahun dan dana bergulir/ revolving 7. The GMS established the amount of Partnership and Community Development Program funds for 2016, which came from the remaining fund balance of Partnership and Community Development Program at the beginning of the year, and from revolving funds	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
2.	RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017, dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 The GMS on the Ratification of the Work and Budget Plan for Year 2017, held on December 23, 2016	

	1. RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2015 1. The AGM approved the Work and Budget Plan for Fiscal Year 2015	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
	2. RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-07/MBU/05/20l5 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan mempertimbangkan hasil telaahan RKA PKBL PT PLN (Persero) sesuai Nota Dinas Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Nomor : RIS-14/D7.MBU.3/12/2016, dengan pendanaan yang bersumber dari penyisihan laba setelah pajak perusahaan 2. The GMS approved the Work and Budget Plan of the SOE Partnership Program With Small Business and Community Development Program for fiscal year 2017 in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-07/MBU/05/20l5 dated May 22, 2015, and considered the results of research paper of Partnership and Community Development Program Work and Budget Plan of PT PLN (Persero) in accordance with Memorandum of the Deputy Department of Business Infrastructure No. RIS-14/D7.MBU.3/12/2016, with funding sourced from the company's profit after tax allowances	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
	3. RUPS Menyetujui dan menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) dengan Pemegang Saham PT PLN (Persero), termasuk di dalamnya KPI Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2017 3. The GMS approved and established a Management Contract (Key Performance Indicators) that was included in the Management Contract,Year 2017 between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders of PLN, including the IKPI Board of Commissioners of PLN in 2017	Keputusan Langsung Berlaku The Decision Immediately Applies
3.	RUPS Luar Biasa tentang pemberhentian Komisaris Utama yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2016 Extraordinary General Meeting on the dismissal of President Commissioner that was established on May 24, 2016	Pemberhentian dengan Hormat "Sdr. Kuntoro Mangkusubroto" sebagai Komisaris Utama Perseroan Dismissed with Honor "Mr. Kuntoro Mangkusubroto " as President Commissioner of the Company
4.	RUPS Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2016 GMS Extraordinary General Meeting on Termination of the Board of Commissioners, which was established on December 14, 2016	Pemberhentian dengan Hormat "Sdr. Andin Hadiyanto" sebagai Komisaris Perseroan Dismissed with Honor "Mr. Andin Hadiyanto " as Commissioner of the Company

DEWAN KOMISARIS

Sebagai salah satu BUMN, PLN tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia wajib mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi.

Sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, masa tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan,

BOARD OF COMMISSIONERS

As one of the state- owned enterprises, PLN is subject to the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), which states that all companies incorporated under the laws of Indonesia shall have a Board of Commissioners to supervise management policy and the course of management, either of the Company itself or the Company's business, conducted by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors.

In accordance with Article 28, Paragraph 3 of Law Number 19 of 2003 concerning State -Owned Enterprises, the work period of the members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and may be extended for 1 (one) term, with

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, demi kebaikan perusahaan yang bersangkutan.

Agar tidak terjadi benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris PLN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pedoman *Board Manual* Dewan Komisaris (Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris)

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). Selain itu, Dewan Komisaris memiliki Pedoman *Board Manual* Dewan Komisaris (Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan dengan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini mengatur mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Unit Kerja Dewan Komisaris (Sekretariat Dewan Komisari dan Komite Dewan Komisaris),

Pedoman *Board Manual* Dewan Komisaris (Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris), mencakup:

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris
2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris
4. Prosedur Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasional Perseroan
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Rencana Kerja Tahunan dan *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris
7. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku, tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan

no prejudice to the right of the GMS to make a replacement at any time, if deemed necessary, in the best interests of the company.

To avoid a conflict of interest, each member of the Board of Commissioners of PLN is forbidden to hold a position as a member of the Board of Directors in other state owned enterprises, region- owned enterprises, private enterprises, and/or other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations.

Guidelines and Code of Conduct (Board Manual/ Charter) of the Board of Commissioners

In order to carry out supervision and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual). In addition, the Board refers to the Board Manual Guidelines of the Commissioners (BOC Work Procedures), which is a joint effort with the Board of Commissioners and the Board of Directors Manual. These guidelines set the mechanism of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Work Unit (Secretariat of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners)

Board Manual Guidelines of the Board of Commissioners (BOC Work Procedure), include:

1. General provisions on positions of members of the Board of Commissioners
2. Duties and authority of the Board of Commissioners
3. Rights and responsibilities of the Board of Commissioners
4. Supervision and providing advice for the Company's operations.
5. Meetings of the Board of Commissioners
6. Annual Work Plan and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners
7. Supporting Organs of the Board of Commissioners

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to supervise management policies, manage the company and its interests, and advise the Board of Directors. The duties are conducted in the interests of the Company and are based on its purposes and objectives, not on the interests of particular parties or groups.

According to the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners' duties and authority are:

1. Supervising the Company's management policies carried out by the Directors as well as advise the Directors on the Company's development plan, work plan, annual

Perseroan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Meneliti dan menalaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional selayaknya Direksi pada kondisi dimana Perseroan tidak memiliki satu pun Direktur;
6. Mewakili Perseroan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan;
7. Melakukan proses penunjukan Auditor Eksternal Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:
   - Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; dan
   - Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Meminta Direksi dan/atau Pejabat Perseroan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
5. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan

budget, and implementation of provisions of the Articles of Association, and decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as on prevailing laws and regulations;
2. Performing duties, and show authority and responsibility based on the provisions of the Articles of Association and decisions made in the General Meeting of Shareholders, as well as comply with prevailing laws and regulations;
3. Fulfilling the Company's interests by taking into consideration the interests of Shareholders, and be accountable to the General Meeting of Shareholders;
4. Assessing and reviewing the Annual Reports, including Financial Statements prepared by the Board of Directors and sign the reports;
5. Taking over the operational duties and responsibilities of the Board of Directors in the event of the Company not having a single Director;
6. Representing the Company in the event the Board of Directors has a conflict of interest;
7. Organizing the appointment of the External Auditor of the Company to be determined by the GMS.

Authority of the Board of Commissioners

In its supervisory capacity, the Board of Commissioners has the authority to:

1. Collectively or individually, at all times :
   - Entering buildings, yards, and locations used by or owned by the Company :
   - Examining books, evidence papers, inventory, examining and matching cash positions for verification or other purposes, examine securities, and know about actions, taken by the Board of Director;
2. Forming committees to support the supervisory duties of the Board of Commissioners or appoint experts;
3. Inquiring about answers to questions posed to the Board of Directors, to which the Board of Directors must provide answers;
4. Requesting the Board of Directors and/or Officers of the Company, with the knowledge of the Board of Directors, attendance at the meeting of the Board of Commissioners;
5. Attending meetings of the Board of Directors and provide opinions on the matters discussed;
6. Appointing the Secretary of the Board of Commissioners;
7. Dismissing temporarily one or more Members of the Board of Directors.

In performing its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and three committees, namely the Audit Committee, the

Komite Nominasi dan Remunerasi serta membagi tugas dan wewenang diantara Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai Ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut.

Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. In addition, allocate the tasks and responsibilities among the Board of Commissioners with the establishment of the Commissioner as Chairman and members of the Committees.

Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal ini Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris;
7. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
8. Memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Komisaris juga mengawasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners, according to the Articles of Association of the Company, are obliged to:

1. Offer opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on the Company's development plan, work plan, and annual budget, including its amendments and supplements, issue regular reports and other reports from the Board of Directors;
2. Supervise the execution of the Company's Work and Budget Plan, inform of the evaluation results, and offer its opinion in the General Meeting of Shareholders;
3. Follow developments of the Company's activities. If the Company is showing signs of recession, the Board of Commissioners must report about it in the General Meeting of Shareholders with recommendations for remedy;
4. Offer opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on all other issues deemed necessary to the management of the Company;
5. Perform other supervisory duties as required by the General Meeting of Shareholders;
6. Take the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners;
7. Report to the Company on any share ownership and/or kinship ties in the Company or in other companies;
8. Provide a report of duties and supervision conducted in the last financial year in the General Meeting of Shareholders.

In addition to the above, the Board of Commissioners supervises compliance with all applicable laws and regulations.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Setiap tahun Dewan Komisaris melakukan review atas kinerja komite yang berada di bawah organisasi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi kinerja. Dasar penilaian yang dijadikan pertimbangan oleh Dewan Komisaris adalah kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh komite serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan di awal tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa kinerja komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan sesuai yang diharapkan. Komite-komite telah memberikan masukan yang dijadikan bahan

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Once a year the Board of Commissioner conducts evaluation on the performance of its committees. One of the basis for evaluation taken into account is meeting activities accomplished by the committees under the Board of Commissioners and the completion of programs which have been agreed upon at the beginning of the year.

Based on these evaluations, the Board of Commissioners concluded that the performance of the committee under the Board of Commissioners is as expected. The Committees have provided valuable recommendations to the Board

pertimbangan oleh kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya, yaitu pemberian nasihat dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat atas pengendalian internal Perseroan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi:
   a. Pengawasan atas efektitivitas pengelolaan organisasi dan SDM.

      Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektifitas organisasi dan tata kerja, antara lain struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis dan manajemen SDM. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pembahasan dan pemberian pendapat/persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi.

   b. Pengawasan atas usulan RKAP Tahun 2016 yang diajukan oleh Direksi dilakukan dengan cara :
      - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta penugasan dari Pemerintah;
      - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

   c. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP dan KPI PT PLN (Persero) tahun 2016.
      Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2016 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP, hambatan dalam pelaksanan RKAP serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut.

of Commissioners in carrying out its functions, specifically in providing advice and suggestions for supervising the company's operation.

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners supervisory task is to perform evaluations, hold discussions and advisory provisions for the internal control of the Company, i.e. the entire system and processes contained within the Company designed to provide reasonable assurance on the achievement of corporate objectives, particularly in improving the effectiveness and efficiency of operations, financial reporting reliability, and compliance with laws and regulations.

1. Supervision of the Effectiveness and Efficiency of Operations and Investment:
   a. Effective supervision of the management of the organization and human resources.

      Supervision is conducted to assess the effectiveness of the 68 organizations and work procedures, including organizational structure and strategic position management and human resource management. Supervision is conducted by discussion and giving opinions and approved by the Board of Commissioners as proposed by the Board of Directors.

   b. Supervision of the proposed Work and Budget Plan of 2016, suggested by the Board of Directors, is done by:
      - Ensuring that the work plan in the Work and Budget Plan has been prepared in accordance with the vision, mission and objectives of the Company as well as with the assignment of the Government;
      - Setting forth goals in the proposed Work and Budget Plan that can be achieved more effectively and efficiently.

   c. Oversight of the Implementation of Work and Budget Plan and KPI PT PLN (Persero) 2016.
      Oversight of the implementation of the Work and Budget Plan and KPI 2016 is done through review and discussion of reports on the implementation of Work and Budget Plan, obstacles in implementation of Work and Budget Plan, as well as measures undertaken by the Board of Directors to overcome these obstacles.

Penelahaan dan pembahasan atas dasar Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), juga dilakukan pembahasan tersendiri untuk permasalahan tertentu.

Periodic review and discussion on the basis of the Quarterly Management Report, the Annual Management Report, and the Report on the Achievement of Key Performance Indicators (KPI), and of specific issues, discussed separately.

d. Pengawasan atas Pengelolaan Risiko.
Pengawasan atas pengelolaan risiko dilakukan dengan:
   - Melakukan telaah atas analisa risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi (tertentu), dengan mengkaji apakah analisa risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan perusahaan;
   - Melakukan telaahan atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan atas *monitoring* terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-asaran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

d. Oversight of Risk Management.
Oversight of risk management is conducted by:
   - Conducting a review of the risk assessment organized by the Board of Directors, particularly related to the request of recommendation or approval of the Board of Commissioners for the action plan of the Directors by examining whether the risk analysis was conducted in accordance with adequate risk management in relation to the Company's environment.
   - Conducting research for risks with high and extreme levels, as well as being alert to mitigation circumstances, and providing advice on possible risks that have not been identified.

2. Pengawasan atas keandalan informasi/pelaporan keuangan
Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasehat atas :
   a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa Program Pengembangan Teknologi Informasi berjalan sesuai rencana;

   b. Temuan audit oleh KAP mengenai kelemahan sistem informasi perseroan, untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan tersebut.

2. Controlling the reliability of information and financial reporting
Supervising the reliability of information systems, done by examining, discussing and advising on:

   a. Procedure of preparation of the consolidated financial statements and the information systems that have been running, as well as ensuring that the Information Technology Development Program goes according to plan;
   b. The findings of the audit by the accounting firm regarding the company's information system vulnerabilities, to ensure that the Directors follow up the findings.

3. Pengawasan atas Laporan Pelaksanaan RKAP berupa Laporan Manajemen dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) Korporat PT PLN (Persero).

   Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI Triwulanan dan Laporan Manajemen serta Realisasi KPI Tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut.

   Pengawasan atas Pelaksanaan Audit PT PLN (Persero) Tahun 2016 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), meliputi Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan PKBL Perseroan, Kinerja dan Kepatuhan Perseroan.

3. Supervision of the Implementation Report of Work and Budget Plan in the form of a Management Report and Realization of Key Performance Indicators (KPI).

   Reviewing the Management Report and the quarterly KPI Realization and Management Report, as well as the Annual KPI to ensure the accuracy and reliability of data presented in the Management Report.

   Oversight of the 2016 Audit by the Public Accountant Firm, including the Company's Financial Statements, the Company's Financial Statements of Partnership and Community Development Program, the performance and compliance of the Company.

4. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   a. Pengawasan atas Efektifitas Pemeriksanaan Internal
      Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawas Intern (SPI)

   b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal
      Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.

   c. Pengawasan atas Penerapan Unsur GCG
      Pengawasan atas penerapan unsur GCG dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi yang meminta persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengawasan atas Pengelolaan PKBL
   Pembahasan dan penelahaan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan perseroan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PKBL.

6. Nasehat dan Teguran
   Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa nasehat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dan fakta/kenyataan yang diterima dari sumber yang layak dipercaya, dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, antara lain berkaitan dengan penghapusan Piutang Ragu-Ragu (PRR), ATTB dan lainnya.

4. Monitoring of compliance with applicable legislation and regulations.
   a. A review on the effectiveness of Internal Oversight
      Supervision conducted through regular meetings with the Internal Supervisory Audit

   b. Oversight of the follow-up of external audit findings
      Supervision conducted through review, discussion and advisory means to ensure that the Board of Directors has followed up the recommendations of the audit findings by Public Accountant Firms and the Audit Board of the Republic of Indonesia.

   c. Supervision of the Implementation of GCG Elements
      Oversight of the implementation of GCG elements, done by ensuring that all the proposals from the Board of Directors for approval and recommendation to the Board of Commissioners, is in accordance with applicable regulations.

5. The supervision of the Partnership and Community Development Program Management
   Discussion and review is conducted on the steps that have been made by the Company in order to increase transparency and accountability in the management of Partnership and Community Development Program..
6. Advice and Reprimand
   In controlling the course of the management of the Company, the Board of Commissioners has provided advice and reprimand to the Board of Directors based on the information obtained and the facts from a credible source, from the evaluation results of a work visit, as well as from letters that were addressed to the Board of Commissioners from both inside and outside of the Company, relating to the elimination of Doubtful Accounts (PRR), ATTB, and others..

Kriterian dan Prosedur Penetapan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: (a) dinyatakan pailit, (b) menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan

Criteria and Procedures For Determination of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but has to abide by a consensus. Formal requirements of the members of the Board of Commissioners are individuals who have Indonesian nationality, are legally competent, and have never been declared bankrupt, have never been a member of a Board of Directors, Board of Commissioners, or a member of a supervisory board which was responsible for causing a company or state- owned enterprise to be declared bankrupt,

bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, dan (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

and have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's financial and/or to state owned enterprises and/or related to the financial sector.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners members are appointed and dismissed by the GMS. The structure, requirements, nomination, and appointment of the Board of Commissioners are determined by the GMS in accordance with the provision of the Articles of Association and applicable legislation.

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan RUPS mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Dewan Komisaris tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

Members of the Board of Commissioners are entitled to resign from their position by notifying the Company in writing of their intention,with a copy to the Authority of the Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia, to other members of the Board of Commissioners, and to the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the resignation does not specify an effective date and no decision is made in the GMS, then the resigning member of the Board of Commissioners is deemed to have resigned 30 (thirty) days from the date of receipt of the letter of resignation.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Mengingat bidang usaha PLN merupakan salah satu bidang usaha strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dengan posisi kegiatan operasional berada di seluruh wilayah Indonesia serta fasilitas distribusi meliputi area publik, komposisi personalia Dewan Komisaris PLN dibentuk dengan memperhitungkan latar belakang kompetensi yang beragam, namun dapat saling melengkapi, sehingga membentuk satu lembaga dengan kompetensi menyatu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, disesuaikan dangan Anggaran Dasar dan dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis pengembangan PLN agar dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen.

PLN meyakini bahwa keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang dibentuk melalui RUPS, telah memenuhi kebutuhan Perusahaan akan keberagaman latar belakang akademis, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan, yang saat ini diisi oleh personalia dengan latar belakang keahlian di bidang: pemerintahan, makro ekonomi, keuangan, hukum, keamanan, restrukturisasi/pengembangan usaha, maupun pengelolaan sumber daya manusia.

Diversity in Composition of The Board of Commissioners

Given that the field of PLN's business is one of the strategic business areas in supporting the growth of the economy by locating operational activities in all regions of Indonesia, the personnel composition of the Board of Commissioners of PLN was established by taking into account the diversity in competence background. Despite this, the members complement each other, and are able to form a single body with united competencies to perform supervisory duties.

The number and composition of the Board of Commissioners has been set by the GMS, in accordance with the Articles of Association and in consideration of the vision, mission and strategic development plan of PLN to make monitoring effective as well as fast, and precise, with independent decision making.

PLN believes that the diversity of the composition of the Board of Commissioners, has met the needs of the Company in the diversity of academic backgrounds, and in the required skills, knowledge and experience, that is currently filled by personnel with background expertise in the areas of: governance, macro-economics, financial, legal, security, restructuring and business development, as well as human resource management.

Sesuai dengan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Mei 2016 dan 14 Desember 2016, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan yaitu adanya Pemberhentian dengan Hormat Bapak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama dan Bapak Andin Hadiyanto sebagai Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris saat ini berjumlah 7 Orang.

Sesuai Keputusan RUPS, anggota Dewan Komisaris terdiri dari 7 Komisaris dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman kerja yang berbeda yaitu dari Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan, ABRI, Kepolisian, BUMN, Keuangan, ESDM.

Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah 2 orang, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER — 01 /MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara bahwa komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya oleh RUPS.

Kriteria Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN di atas, bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain hal tersebut, anggota Dewan Komisaris telah membuat pernyataan terkait dengan tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

In accordance with the Decision of the Extraordinary General Meeting dated May 24, 2016 and December 14, 2016, the composition of the Board of Commissioners experienced changes, namely the dismissal, with honor, of Mr. Kuntoro Mangkusubroto as President Commissioner and Mr. Andin Hadiyanto as Commissioner. Accordingly, the composition of the Board of Commissioners currently consists of seven people.

Corresponding to the GMS decisions, the Board of Commissioners consists of seven Commissioners with differing competence and work experience backgrounds, namely prosecutor, the Financial Supervisory Agency, the Armed Forces, the Police, SOE, finance, and energy and mineral resources ministeries..

Independence of The Board of Commissioners

There are 2 (two) Independent Commissioners in the Board of Independent Commissioners, which complies with Regulation of the State Minister of the State Owned Enterprises No. PER — 01 /MBU/2011 concerning the implementation of corporate governance practices in State Owned Enterprises. It states that at least 20% of the composition of Commissioners must be Independent Commissioners whose appointment was set out in the decision of the GMS.

Board of Independent Commissioners Criteria

Members of the Board of Independent Commissioners have met the criteria as set out in the above mentioned Decision of the Minister of State- Owned Enterprises. They do not have financial, management, share ownership and/or familial relationships with the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the controlling shareholders or have a relationship with the State Owned Enterprises concerned, which may affect their ability to act independently.

In addition, members of the Board of Commissioners have made a statement related to no conflict of interest and will not take personal advantage nor seek personal gain from decision-making and/or the implementation of the activities of the SOE in question, over and above their legitimate income.

Pernyataan Mengenai Komisaris Independen

Adapun independensi anggota Komisaris Independen yang menjabat sejak tahun 2014 tercermin dalam tabel dengan aspek-aspek utama sebagai berikut:

Independent Commissioners Statement

The independency of the Independent Commissioners who have served since 2014 is reflected in the following table emphasizing several key aspects as follows:

Aspek Independensi Independency Aspects	Oegroseno	Darmono
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya Has no financial, management, share ownership and/or relations with the Board of Commissioners members	√	√
Tidak memiliki hubungan dengan Direksi Has no relationship with the Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan dengan BUMN lain yang bersangkutan dengan PLN Has no relationship with any SOEs that are related to PLN	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintahan Does not serve on the boards of political parties and/or government offices.	√	√
Tidak menjabat kepengurusan di anak usaha PLN Doe not hold any managerial position in any of PLN's subsidiaries	√	√

Susunan Personalia dan Masa Tugas Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PLN selama tahun 2016 mengalami 2 kali pergantian, sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan hingga 24 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

Personnel Composition and Board of Commissioners Tenure

In 2016, the Board of Commissioners composition has undergone two changes, as follows:

- In accordance with SOE Ministerial Decision on GMS No. SK-223/MBU/11/2015 dated November 10, 2015 the personnel composition of the Board of Commissioners until May 24, 2016 was as follows:

No.	**Jabatan** Position	**Nama** Name
	Komisaris Utama President Commissioner	Kuntoro Mangkusubroto
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
	Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
	Komisaris Commissioner	Jarman
	Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
	Komisaris Commissioner	Budiman
	Komisaris Commissioner	Hasan Bisri
	Komisaris Commissioner	Aloysius K. Ro

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-106/MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- In accordance with SOE Ministerial Decision on GMS No. SK-106/MBU/05/2016 dated May 24, 2016, the personnel composition of the Board of Commissioners is as follows:

No.	Jabatan Position	Nama Name
	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris Acting President Commissioner and Commissioner	Hasan Bisri
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
	Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
	Komisaris Commissioner	Jarman
	Komisaris Commissioner	Andin Hadiyanto
	Komisaris Commissioner	Budiman
	Komisaris Commissioner	Aloysius K. Ro

- Sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-266/MBU/12/2016 tanggal 14 Desember 2016, susunan personalia Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- In accordance with SOE Ministerial Decision on GMS No. SK-266/MBU/12/2016 dated December 14, 2016 the personnel composition of the Board of Commissioners is as follows:

No.	Jabatan Position	Nama Name
	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris Acting President Commissioner and Commissioner	Hasan Bisri
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oegroseno
	Komisaris Independen Independent Commissioner	Darmono
	Komisaris Commissioner	Harry Susetyo Nugroho
	Komisaris Commissioner	Jarman
	Komisaris Commissioner	Budiman
	Komisaris Commissioner	Aloysius K. Ro

- Sehingga ringkasan perubahan komposisi personalia Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan dan masa jabatan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Thus, the summary of changes in the composition of the Board of Commissioners, the date of appointment and tenure during 2016 is as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan

Composition and Term of Office for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Akhir Masa Jabatan End of Term
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama Acting President Commissioner	24 Mei 2016 May 24, 2016	-
	Komisaris Commissioner	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019
Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 Oktober 2014 October 16, 2014	**16 Oktober 2019** October 16, 2019
Darmono	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 Oktober 2014 October 16, 2014	**16 Oktober 2019** October 16, 2019
Jarman	Komisaris Commissioner	10 November 2015 November 10, 2015	**10 November 2020** November 10, 2020
Budiman	Komisaris Commissioner	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	2 April 2013 April 2, 2013	**2 April 2018** April 2, 2018
Aloysius K. Ro	Komisaris Commissioner	25 September 2015 September 25, 2015	**25 September 2020** September 25, 2020

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Beberapa anggota Dewan Komisaris PLN memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun demikian perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rapat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Dewan Komisaris PLN. Adapun rincian Rangkap Jabatan dari anggota Dewan Komisaris PLN adalah sebagai berikut:

Concurent Position BOC

Several members of the Board of Commissioners of PLN have positions. At some other institutions. Nevertheless the catch the position does not conflict with the provisions prohibition of official meetings as set out in the criteria Board of Commissioners of PLN. As for the Duplicate Position details of Members of the Board of Commissioners of PLN are as follows:

Nama	Jabatan di PLN Position in PLN	Jabatan di Instansi/ Perusahaan Lain Positions in Institutions / Other Companies	Nama Instansi/Perusahaan Lain Name of Institutions / Other Companies
Hasan Bisri	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris Acting President Commissioner & Commissioner	-	-
Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Darmono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Jarman	Komisaris Commissioner	Dirjen Ketenagalistrikan Director General of Electricity	**Kementerian ESDM** Ministry of Energy and Mineral Resources
Budiman	Komisaris Commissioner	-	-
Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	-	-
Aloysius K. Ro	Komisaris Commissioner	Deputi Bidang Restrukturisasi Dan Pengembangan Usaha Deputy for Restructuring and Enterprise Development	**Kementerian BUMN** Ministry of SOEs

Program Pelatihan dan Program Pengenalan Dewan Komisaris

Program Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Program Pengenalan ditujukan bagi Komisaris yang baru pertama kali diangkat di Perseroan agar Komisaris tersebut segera mengenal proses bisnis Perseroan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan.

Program pengenalan yang diberikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit.

Training and Recognition Program of the BOC

Introduction Program for New Commissioners

The introduction program is intended for new Commissioners appointed for the first time in the Company. The new Commissioner has to immediately recognize the business processes of the Company, including all previous problems, and potential problems in the future, in order to work optimally for the benefit of the Company.

The recognition program offered to new Commissioners consists of the following:

a. Implementation of the principles of Good Corporate Governance by the Company.
b. Description of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, the composition and position of personnel, risk and other strategic issues.
c. Remarks relating to the authority that is delegated to the internal and external Audit, internal control systems and policies, as well as the Audit Committee.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Description of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Program Pengenalan Bagi Komisaris Baru tidak dilakukan, karena tidak ada pengangkatan Komisaris Baru selama tahun 2016.

The Introduction Program For New Commissioners was not conducted in 2016, as there were no new appointments.

Program Pengembangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti seminar, *workshop, benchmarking, training*/diklat. Jumlah kegiatan yang diikuti selama tahun 2016 yang diadakan di Jakarta maupun di luar negeri adalah 4 kali. Berikut ini rinciannya:

The Board of Commissioners Development Program

The Board of Commissioners increased its competence with seminars, workshops, benchmarking, training and education and coaching. 4 (four) training sessions, held in Jakarta and abroad, were conducted during 2016, as follows :

No.	Tanggal Date	Uraian Description
1.	30 Maret 2016 March 30, 2016	**Expand Leadership Program for BOD/BOC yang diadakan oleh CLDI di Bali** Expand Leadership Program for BOD/BOC held by CLDI in Bali
2.	5 April 2016 April 5, 2016	**ASEAN Global Leadership Program yang diadakan oleh SRW & Co di Amerika** ASEAN Global Leadership Program organized by SRW & Co in America
3.	12 September 2016 September 12, 2016	**Market Sounding dan Fact Finding Pabrikan Diesel Engine Set di Chicago, Amerika Serikat** Market Sounding and Diesel Engine Manufacturing Fact Finding Set in Chicago, United States of America
4.	3 Oktober 2016 October 3, 2016	***Benchmarking* mengenai pengelolaan bisnis kelistrikan serta organisasi dan pengelolaan SDM di Jepang** Benchmarking on the electricity business management, as well as organizational and human resource management in Japan
5.	8 Desember 2016 December 8, 2016	**International Conference Bali ERM yang diadakan oleh CRMS Indonesia di Bali** Bali ERM International Conference hosted by CRMS Indonesia in Bali

Kepemilikan Saham Anggota Komisaris

Mengingat saham PLN seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah, maka seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PLN maupun anak-anak usaha PLN lainnya.

Share Ownership of The Member of The Board of Commissioners

Since the Indonesian Government wholly owns PLN shares, the members of the Board of Commissioners do not own any PLN shares nor shares in its subsidiaries.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan perusahaan, Direksi wajib berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*).

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a constituent of the Company responsible for the daily management of on behalf of the Company interest to accomplish its objectives. The Board of Directors has the right to represent the company in and out of court in accordance with the Articles of Association of the Company. In conducting managerial duties of the Company, the Board of Directors is required to act in accordance with the Articles of Association of the Company, with decisions of the GMS, and the Board Manual.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara, sedangkan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Dalam pengelolaan perusahaan, masing-masing anggota Direksi dapat bertindak dan memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan pada masing-masing anggota Direksi, namun demikian tetap bertanggung jawab secara kolegial dalam pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan tugas sesuai kewenangan tersebut harus semata-mata dijalankan sesuai maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Pedoman *Board Manual* Direksi (Tata Laksana Kerja Direksi)

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Saat ini, Direksi juga telah memiliki Pedoman *Board Manual* Direksi (Tata Laksana Kerja Direksi) yang merupakan satu kesatuan dengan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini secara khusus mengatur tata laksana kerja Direksi dan Unit Kerja Direksi.

Pedoman *Board Manual* Direksi (Tata Laksana Kerja Direksi) mencakup :

1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi
2. Tugas dan Wewenang Direksi
3. Hak dan Kewajiban Direksi
4. Rapat Direksi
5. Komite Direktur
6. Sekretaris Perusahaan
7. Satuan Pengawasan Intern
8. Hubungan dengan Anak Perusahaan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan; dan

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

While the President Director coordinates the duties of the Directors, both are structurally equal.

In managing the Company, each Director may act and pursue policies in accordance with the duties and authorities delegated to him/her. Nevertheless, each is collegially accountable in the management of the company. The duties must be conducted in the interests and objectives of the company.

Board of Directors Guidelines and Code of Conduct (Board Manual/Charter)

In managing the Company, and relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors refers to the Board of Commissioners and the Board of Directors Work Guidelines (Board Manual) which contain work procedures as well as explanation on phases of activities in a structured, systematic, understandable, and consistent manner. Thus, it can be considered to be guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors in performing each task to achieve the Vision and Mission of the Company.

Moreover, the Board of Directors possesses Board Manual Guidelines (BOD Working Procedure) working in unity with the Board of Commissioners and Board of Directors Manual. These guidelines specifically regulate the governance of the Board of Directors and Board of Directors Work Unit.

Guidelines of the Manual of the Board of Directors (BOD Working Procedures) include:

1. Main Provisions of the Board of Directors
2. Board of Directors' Duties and Authority
3. Board of Directors' Rights and Obligations
4. Board of Directors Meetings
5. Board of Directors Committee
6. Corporate Secretary
7. Internal Supervisory Unit
8. Relationship with Subsidiaries

Board of Directors' Duties, Responsibilities, and Authority

The Board of Directors' main duties are:

1. Leading and managing the Company based on the Company's purposes and objectives as well as putting in continuous efforts to increase Company efficiency and effectiveness.
2. Controlling, maintaining, and managing Company wealth.

Dalam melaksanakan tugas itu, wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang berlaku diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah:
   a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
   b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
   c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
   d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
   e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
   f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
   g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
   h. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern;
   i. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
2. Pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, adalah:
   a. Mengalihkan kekayaan perusahaan; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan, yang nilainya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku.
3. Pelaksanaan wewenang Direksi yang dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS, yakni:
   a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
   b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
   c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

In performing these duties, according to the Company Articles of Association, the Board of Directors has the following authorities.

1. Implementation of the Board of Directors' authorities which requires written approval from the Board of Commissioners comprises:
   a. Mortgaging property, plant and equipment to obtain short-term credit;
   b. Cooperation with other businesses or entities in the form of licensing, management contract, asset leasing, Cooperative operations (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate, and other cooperation with fixed value or time frame as ratified by the GMS;
   c. Receiving or providing medium/long-term loans, except for loans (debt or receivables) which occur due to business transactions and loans given to PLN subsidiaries and reported to the Board of Commissioners;
   d. Writing off dormant accounts payable and provisions of goods from the books.
   e. Writing down movable property, plant and equipment with a reasonably fair economic life of up to five years, applicable to the particular industry.
   f. Defining organizational structure which is one level under the Board of Directors;
   g. Appointing and dismissing the Head of Internal Audit;
   h. Establishing the Internal Audit Charter;
   i. Appointing and dismissing the Corporate Secretary.
2. Implementation of the Board of Directors' authorities which requires approval from the GMS consists of:
   a. Transferring company assets
   b. Pledging company assets with a value exceeding 50% of the total net value of the Company in one or more transactions, whether the transactions are related or not. Such transactions transfer the net value of the Company during one financial year.
3. Implementation of the Board of Directors' authorities which requires written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS, consists of:
   a. Using Property, plant and equipment to generate medium to long-term credit;
   b. Undertaking equity investments in other companies;
   c. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak usaha
f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah, Bangun Milik Serah,Bangun Serah Guna dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham;
h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perusahaan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industry pada umumnya sampai dengan 5 tahun;
j. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
k. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
n. Membebankan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan
o. Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak dan Kewajiban Direksi

Hak dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berhak untuk:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keputusan rapat umum pemegang saham;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Redeeming equity investments to subsidiaries and/ or joint ventures;
e. Conducting mergers, consolidation, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries
f. Warranting the Company in surety (borg or avalist)
g. Cooperation with other businesses or entities which include contract management license, assets leasing, Operations Cooperation (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer, Build Transfer Operate, and other cooperation with a value or time frame exceeding that ratified by the General Meeting of Shareholders;
h. Re-billing dormant accounts payable which have been written off;
i. Redeeming and writing off company property, plant and equipment, except for movable property, plant and equipment with a fair economic life as applicable to the industry in general of up to five years;
j. Setting the blue print of the Company's organization;
k. Setting and changing the Company logo;
l. Conducting other actions and those which have not been ratified in the GMS;
m. Establishing foundations, organizations, and/or associations whether they are directly or indirectly related to the Company or can affect the Company;
n. Charging fixed and routine company costs for foundation, organization, and/or association activities, whether they are related directly or indirectly to the Company; and
o. Proposing a company representative to become a candidate of the Board of Directors and the Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries which make a significant contribution to the Company and/or has strategic value as defined in the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors' Rights and Obligations

The Board of Directors' rights and obligations are stated in the Company's Articles of Association. In performing their main duties, the Board of Directors has rights to:

1. Establish policies in leading and managing the Company;
2. Organize provisions regarding company employees including setting the value of salaries, pensions, and other income for Company employees based on laws and regulations and the General Meeting of Shareholders decision;
3. Appoint and dismiss company employees based on company employee regulations and applicable laws and regulations;

4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan
5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat umum pemegang saham guna mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada rapat umum pemegang saham;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta pemegang saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Manage the transfer of Directors' power to one or several members of the Board of Directors who are specially appointed, or to one or several company employees, either individually or together or to other persons or bodies to represent company in and out of court.
5. Perform other actions, related to either management or ownership based on provisions stated in the Articles of Association and ratified by the General Meeting of Shareholders according to applicable laws and regulations.

In performing its main duties, the Board of Directors is obliged to:

1. Make every effort and guarantee business operation and company activities based on company purposes and objectives as well as business activities;
2. Prepare the company development plan, annual Work and Budget Plan, as well as other plans that are related to business operations and company activities at the scheduled time, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be communicated further in the General Meeting of Shareholders to obtain ratification;
3. Establish and maintain Company records and administration based on applicable norms in the company;
4. Organize the accounting system based on financial accounting standards and internal control principles, especially administration, records, storage, and monitoring;
5. Report accountability and all information regarding the condition and operation of the Company in the form of an annual report which includes annual accounts, to the General Meeting of Shareholders;
6. Submit routine reports based on method and time in applicable provisions as well as other reports as requested by Shareholders;
7. Prepare a complete company organization structure and its job description details.
8. Prepare balance sheets and income statement for the Minister of Law and Human Rights of Indonesia which have been ratified in the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations;
9. Perform other obligations based on provisions stated in the Articles of Association and ratified in the General Meeting of Shareholders according to laws and regulations.

Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Aturan pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagai berikut:

1. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Perusahaan lainnya yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

Delegation of Duties and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors delegates duties and authorities among its members to ensure optimum execution of both. According to the provisions of the BOD Charter, delegation of duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

1. The duties and responsibilities delegated to each member of the Board of Directors are determined by the Decisions of the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders does not do so, delegation is determined following a meeting of the Board of Directors.

2. The description of duties, authorities, and responsibilities of the members of the Board of Directors is stipulated in Company Regulations on Organizational Structure and other Company Regulations stipulating the authority of each member.

Kriteria, Ketentuan dan Pemilihan Anggota Direksi

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Calon Direktur dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus menjalani tahap fit and proper test terlebih dahulu. Setiap Direktur PLN memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Namun demikian, pemegang saham melalui RUPS tahunan atau RUPS luar biasa berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Kriteria Anggota Direksi Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, maka yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Criteria, Requirements, and Appointment of Directors

The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS. A prospective candidate may be from both inside and outside of the Company. To be eligible for appointment, the candidate must first undergo a fit and proper test. Every PLN Director is tenured for up to 5 (five) years since his/her date of appointment. However, shareholders may, in annual or extraordinary GMS, dismiss a member of the Board of Directors before his/her tenure ends.

The criteria for Directors are in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of State-owned Enterprises state that a Director can face legal action, unless in the period of 5 (five) years prior to appointment:

1. Declared bankrupt;
2. Being a Member of a Board of Directors or Board of Commissioners/Board of Trustees declared guilty of bankrupting a State-owned Enterprise and/or Company;

3. Sentenced for crimes which caused losses to the state, a state-owned company, the Company, and/or other entities in the financial sector.

Pemilihan anggota Direksi PLN dilakukan melalui tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK/ *fit and proper test*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/ MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Independensi Direksi

Kriteria Independensi Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan antara lain diatur mengenai larangan jabatan rangkap yaitu Direksi dilarang memangku jabatan sebagai berikut:

1. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah;
8. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan;
2. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.

Selection of a member of the Board of Directors of PLN is conducted using a fit and proper test, in accordance with the Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-03/ MBU/02/2015 on Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the Board of Directors of State-owned Enterprises.

Board of Directors Independency

Board of Directors independency criteria is based on the Company's Articles of Association and include prohibition of dual positions in which Directors are prohibited to hold positions as follows:

1. Director of SOE, Regional Owned Enterprise, Private-owned Enterprise
2. Member of the Board of Commissioners / Board of Supervisors in SOE
3. Other structural and functional titles in central and/or regional government institutions/bodies.
4. Other titles based on provisions in laws and regulations
5. Leader of a political party and/or prospective member of the legislature and/or candidate of regional head/ deputy head and/or regional head/deputy head.
6. Other titles that can lead to conflict of interest.
7. Being a legislative candidate or regional head/deputy head candidate.
8. Dismissed by virtue of decisions of the GMS in writing, Ministerial decision as GMS, or unanimous circular decision of Shareholders.

A member of the Board of Directors is prohibited to hold dual positions as a member of a Board of Commissioners at other companies, except if he/she is:

1. A member of the Board of Commissioners of a subsidiary/ joint venture of the given SOE, providing that he/she, as a member of the Board of Commissioners at one or more subsidiaries/joint ventures, is only entitled to a maximum accumulated income of 30% of the salary of a member of the Board of Directors of the given SOE. The remainder of the salary is absorbed as the income of the given SOE.
2. A member of the Board of Commissioners at another company to represent/speak in the interest of the SOE, providing he/she obtains Ministerial permission.

Kebijakan Suksesi Direksi

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan, PLN menyelenggarakan program *Talent Management*. Kader-kader potensial yang masuk kedalam *Talent Pool* akan menjalani serangkaian program pelatihan dengan muatan utama adalah peningkatan kapabilitas di bidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya. Pada saat tibanya pergantian kepemimpinan, PLN akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh Panitia *Adhoc* dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Adapun ketentuan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Calon Direktur diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan dari Internal BUMN;
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon Direktur;
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat;
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/ Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik Negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Keberagaman, Komposisi dan Masa Tugas Direksi

Keberagaman Direksi

Keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan dari segi organ Direksi secara keseluruhan maupun secara individu masing-masing calon anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Kombinasi tersebut ditetapkan melalui pertimbangan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Dengan cara tersebut Perseroan memastikan kombinasi karakteristik maupun keahlian dari masing-masing anggota Direksi membentuk suatu kesatuan yang akan berdampak pada ketetapan dan kecepatan pengambilan keputusan pengelolaan oleh Direksi yang selalu bertanggung jawab secara kolegial.

Board of Directors Succession Policy

In an attempt to prepare future executives cadres, PLN organizes Talent Management program. Potential cadres who join the Talent Pool will participate in several training programs with management capability improvement as the main substance, business development strategy, strategic plan evaluation, and other similar subject matter. When the time comes for leadership succession, PLN will propose individuals from within the company as candidates through selections conducted by an adhoc committee and facilitated by the Board of Commissioners. The selected candidates will then be proposed to the SOE Ministry to undergo fit and proper testing.

The provisions of the succession of Directors is as follows:

1. Prospective Directors shall be appointed by the GMS from the candidates proposed by the shareholders and the Internal SOE;
2. Appointment of Directors conducted through a fit and proper test of the prospective Director;
3. Composition of the Board of Directors must always be tailored to the needs and development of the Company, thus enabling effective, appropriate and prompt decision making;
4. Candidates for Director are forbidden to hold another position as Director or Commissioner in the state/ enterprises/other private company or other positions in other companies, both private and state-owned, which can prompt a conflict of interest, unless approved by the GMS.

Diversity, Composition, and Tenure of The Board of Directors

Diversity of the Board of Directors

Diversity in the Board of Directors is a desired combination of the directorial organ. Collectively or individually, each member of the Board of Directors contributes to the growth of the Company. The combination is a considered mixture of expertise, knowledge, and experience in line with the delegation of duties and functions of the Director to fulfill the objectives of the Company. By using such methods, the Company has ensured a characteristic combination of expertise of each Director to form a cohesive unit capable of taking swift, accurate and collegially responsible business decisions.

Dalam menentukan komposisi Direksi, Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek keahlian tertentu untuk jabatan dan tugas strategis, secara garis besar Perseroan telah membagi tugas direksi ke dalam dua bagian besar, yaitu tugas-tugas korporasi yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi keuangan, perencanaan, pengadaan, dan sumber daya manusia. Sedangkan, tugas-tugas operasional dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional yang terbagi dalam 7 regional, yaitu Bisnis Regional Sumatera, Bisnis Regional Jawa Bagian Barat, Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Bisnis Regional Kalimantan, Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara, dan Bisnis Regional Maluku & Papua.

In arranging the composition of the Board of Directors, the Company always considers certain expertise for strategic offices and duties. In general, directorship in the Company falls into two major areas, namely corporate duties conducted by the Directors of Finance, Planning, Procurement, and Human Resources. Meanwhile, operational duties conducted by the Directors of Regional Businesses cover 7 regions: Sumatera, West Java, Central Java, East Java and Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara, and Maluku and Papua.

Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, telah memenuhi komposisi dan keberagaman keahlian kolegial maupun individu yang dipersyaratkan agar kepengurusan Perusahaan berlangsung profesional, efektif, dan akuntabel agar dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan optimal dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

The current members of the Board of Directors have satisfied the composition and regional expertise on both collegial and individual levels. Thus, this ensures that the Company's management is professional, effective, and accountable so as to ensure optimum execution of duties and satisfy shareholder demands.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan mengenai Kriteria Direksi, masa jabatan Direksi PLN adalah 5 tahun. Adapun komposisi Direksi PLN selama tahun 2016 adalah:

Composition and Tenure of the Board of Directors

As mentioned earlier, the tenure of the Board of Directors of PLN is 5 years. During 2016, the composition of the Board of Directors of PLN was as follows :

Komposisi dan Masa Jabatan Anggota Direksi

Composition and Term of Office of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Akhir Masa Jabatan End of Term	Keterangan Description
Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/ MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/ MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Nicke Widyawati	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/ MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015

Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Director of Procurement	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	30 Oktober 2015 October 30, 2015	**30 Oktober 2020** October 30, 2020	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 - Decision of the Minister of State SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015
Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Sumatera Sumatra Regional Business Director	23 Desember 2014 December 23, 2019	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Murtaqi Syamsuddin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat West Java Regional Business Director	8 Maret 2013 March 8, 2013	**8 Maret 2018** March 8, 2018	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/ MBU/2013 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-179/MBU/2013 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Nasri Sebayang	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Central Java Regional Business Director	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2014	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Amin Subekti	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali Eastern Java and Bali Regional Business Director,	23 Desember 2014 December 23, 2014	**23 Desember 2019** December 23, 2019	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/ MBU/12/2014 - Keputusan Menteri BUMN No. S-548/MBU/09/2015 - Decision of the Minister of State SK-272/MBU/12/2014 - Decision of the Minister of State S-548/MBU/09/2015
Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Kalimantan Regional Business Director	30 Oktober 2015 October 30, 2015	**30 Oktober 2020** October 30, 2020	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 - Decision of the Minister of State SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015

Machnizon	Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Sulawesi and Nusa Tenggara Regional Business Director	30 Oktober 2015 October 30, 2015	**30 Oktober 2020** October 30, 2020	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 - Decision of the Minister of State SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015
Haryanto W.S.	Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Maluku and Papua Regional Business Director	30 Oktober 2015 October 30, 2015	**30 Oktober 2020** October 30, 2020	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 - Decision of the Minister of State SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi

Deskripsi ringkas tugas pokok masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut.

Direktur Utama:

1. Memastikan bahwa arah pengelolaan Perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan;
2. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*);
3. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *Stakeholder*;
4. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan melangkah mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

Direktur Perencanaan Korporat (DIRREN):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai Visi melalui perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang pendanaannya;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, standarisasi enjiniring dan tersedianya perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis

Scope of Work and Responsibility of Each Member of the Board of Directors

A brief description of each member of the Board of Directors of the Company is as follows:

President Director:

1. Ensuring that the managerial direction of the Company is based on its Vision, Mission, and Objectives
2. Ensuring that the Company is managed in accordance with Good Corporate Governance principles.
3. Ensuring that the Company maintains growth and offers added value for Stakeholders.
4. Carrying out corporate leader functions to ensure full engagement of every member of the Company. The President Director also inspires and motivates Company resources to meet the Company's Vision, Mission, and Objectives.

Corporate Planning Director (DIRREN):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies to meet the Company's Vision by planning and developing power systems and business development plans as outlined in the Electricity Power Supply Business Plan, Long-term Company Plan, and Work and Budget Plan. These include planning the Company's financial projections and funding.
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in planning, developing, and utilizing new and renewable energy.
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in developing electricity generation technologies, research and development, engineering standardizations, and availability of supply and services procurement, including results of feasibility

termasuk di dalamnya hasil *feasibility study, engineering design*, Rencana Kerja dan Spesifikasi untuk proses pengadaan;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis IPP, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, serta pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat serta pembinaan Regional dan Unit Pusat Pengatur Beban.

studies, engineering designs, and Business Plan and Specification for procurement.

4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in the management of power transactions, business partnerships, IPP business model development, power transmission and distribution, and development of Subsidiaries and Joint Ventures;
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in Risk and Compliance Management.
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Corporate Planning, development and growth of Subsidiaries and Joint Ventures, development and growth of Regional businesses and Units under the Director of Corporate Planning, and development and growth of Regional and Transmission and Load Dispatching Units.

Direktur Pengadaan (DIRDAN):
1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perijinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perusahaan;
2. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan *supply chain management* dan pengelolaan logistik korporat;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara *online* serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan *Project Management Information System* (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Pengadaan.

Procurement Director (DIRDAN):
1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in the management of licenses, land procurement, and land allocation for those affected by Company business;
2. Adopting and ensuring the availability of regulations on, policies for, and strategies in corporate goods and services procurement, execution of strategic goods and services procurement, execution of Regional and Unit goods and services procurement development and administration of goods and services procurement and corporate contracts;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate procurement policies and strategies in procuring operational materials via management of supply chain and corporate logistics;
4. Adopting and ensuring the availability of policies and strategies on online procurement applications for goods and services as well as corporate procurement integration and centralization;
5. Adopting and ensuring the execution of project database and administration management, Project Management Information System (PMIS), project budgets management, and construction integration and development;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Procurement, development and growth of Regions and Units under the Director of Procurement.

Direktur Human Capital Management (DIRHCM):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem *Human Capital Management*, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, budaya Perusahaan dan manajemen perubahan;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan kebijakan pengelolaan tenaga kerja alih daya;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di kantor pusat dan pengelolaan properti korporat secara terintegrasi;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan sistem *knowledge management*, pengembangan sistem informasi SDM;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Human Capital Management, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Human Capital Management.

Direktur Keuangan (DIRKEU):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta *covenant* Perusahaan;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perbendaharaan (*treasury*), kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan aset *liability management*, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pegelolaan pajak dan asuransi;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan niaga tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus, pengelolaan dan pelaksanaan *Public Services Obligation* (PSO) dan *Performance Base Regulation* (PBR);

Human Capital Management Director (DIRHCM):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in organizational and human resources development. The duties consist of planning the workforce, recruitment systems, education and training systems, developing the Human Capital Management system, remuneration and recognition systems, HR administration systems, corporate culture, and change management;
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in industrial relations and outsourcing policies;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in general services at the head office and integrated management of corporate properties;
4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in health management, work safety, and environmental management and safety;
5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in knowledge management systems and HR information systems development;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and Risk management at the Directorate of Human Capital Management and development and growth of Regions and Units under the Director of Human Capital Management.

Finance Director (DIRKEU):

1. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in funding and financial management, funding allocation, loan management, and settlement of the Company's obligations and covenant.
2. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in managing funds to support the Work and Budget Plan;
3. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in treasury management, share ownership, cash and liquidity management, income and asset liability management, debt servicing, accounting practices, and tax and insurance management;
4. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in commercial power management, corporate and industrial accounts management of special services customers, Public Services Obligation (PSO) management and execution, and Performance Base Regulation (PBR);

5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi system dan aplikasi teknologi informasi korporat;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Keuangan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Keuangan.

Direktur Bisnis Regional Sumatera, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur & Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, dan Maluku & Papua (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JBTB, DIRREG-KAL, DIRREG-SNT, DIRREG-MP):

1. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (*capital expenditure* dan *operation expenditure*) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional;
2. Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya;
3. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
4. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate & industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya;
5. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
6. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Direksi

Komite Direksi merupakan Komite yang dibentuk dan beranggotakan Direksi. Komite Direksi sebagai sarana pengambilan Keputusan didasarkan atas batasan

5. Adopting and ensuring the execution of corporate policies and strategies in information systems and technology as well as centralization and integration of corporate IT systems and applications;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Finance, development and growth of Regions and Units under the Director of Finance.

Sumatra, West Java, Central Java, East Java & Bali, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara, dan Maluku & Papua Business Regional Directors (DIRREG-SUM, DIRREG-JBB, DIRREG-JBT, DIRREG-JBTB, DIRREG-KAL, DIRREG-SNT, DIRREG-MP):

1. Adopting and ensuring the execution of planning, development, and control of regional businesses, including procurement plans as well as capital and operation expenditures in accordance with their respective authorities. In addition, the Directors evaluate and manage regional performance.
2. Adopting and ensuring the construction of generators, transmissions, substations, and regional distributions, execution of IPP to COD developments, and management of contracts and construction administrations in their respective regions.
3. Adopting and ensuring the operation and maintenance of generators, transmissions, substations, and regional distributions, and management and planning of their spare parts in their respective regions;
4. Adopting and ensuring the execution of power procurement from IPPs, electricity marketing, corporate and industrial accounts management of special services customers in their respective regions, commercial and business power management, and electricity sales in their respective regions.
5. Adopting and ensuring the execution of customer service management and income and operational costs of their respective regions;
6. Adopting and ensuring the execution of business process development and risk management at the Directorate of Regional Businesses, development and growth of Regions and Units under the Directors of Regional Businesses.

Committee under the Board of Directors Performance Assessment

A Director Committee is a committee formed and consisting of the Board of Directors. Committee of the Board of Directors is a mean for decision making based on the decision-making

kewenangan pengambilan keputusan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 304.K/DIR/2009 dan perubahannya yang dalam pelaksanaanya seluruh Keputusan yang diambil dalam Komite Direksi diangkat kembali dalam Rapat Direksi dan menjadi keputusan Rapat Direksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa kinerja komite di bawah Direksi telah berjalan dengan efektif. Komite-Komite telah memberikan masukan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategi usaha.

Program Pelatihan dan Program Pengenalan Direksi

Program Pengenalan Direksi Baru

Program Pengenalan ditujukan bagi Direktur yang baru pertama kali diangkat di Perseroan agar Direktur tersebut segera mengenal proses bisnis Perseroan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Direktur antara lain:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan;
b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi komposisi, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. Audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta Komite Audit;
d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang dianggap sesuai dengan Perseroan.

Pada Tahun 2016 Program Pengenalan Bagi Direksi Baru tidak dilakukan, karena tidak ada pengangkatan Direksi Baru selama tahun 2016

authority limitation stipulated in Directive No. 304.K / DIR / 2009 and amendments in which all Decisions made in the Committee of the Board of Directors to be reappointed during the Board of Directors Meeting and becomes a decision of the Board of Directors.

Based on these considerations, the Board of Directors deem that the committee under the Board of Directors has performed effectively. The Committees have provided valuable advice and recommendations to be considered by the Board of Directors in decisions making and business strategy policies formulation.

Training and Introduction Program for the Board of Directors

Introduction Program for the New Board of Directors

The introduction program is intended for the first-time Director appointed by the Company for him/her to immediately recognize the Company's business processes, including all previous problems and potential problems in the future, in order to work optimally for the benefit of the Company. The responsibility for the Introduction Program lies with the Corporate Secretary or whoever is conducting the function of Corporate Secretary.

The Introduction Program for the new Director covers :

a. Implementation of the principles of Good Corporate Governance by the Company;
b. Description of the Company in relation to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, the position and composition of personnel, risk and other strategic issues;
c. Description related to authorities that are delegated to internal and external audit, internal control systems and policies, as well as the Audit Committee;
d. Description of the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their supporting organs, as well as matters that are prohibited.

The Company can implement the Introduction Program in any form that is considered appropriate.

In 2016, the Introduction Program for the New Board of Directors was not conducted, as there were no appointments during 2016.

Program Peningkatan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, PLN memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, mencakup:

Competence Enhancement Program

In order to improve knowledge and competence, PLN encourages the Board of Directors members to attend various trainings, seminars and workshops to improve their knowledge, skills, and understanding. Programs that were attended by members of the Board of Directors, include:

No.	**Tanggal** Date	**Uraian** Description
1.	20 – 24 Maret 2016 (Beijing, China) 20 – 24 March 2016 (Beijing, China)	**The 9th Meeting of the Asia Solar Energy Forum** The 9th Meeting of the Asia Solar Energy Forum
2.	01 – 08 April 2016 (Jerman) 1 – 8 April 2016 (Germany)	**Studi banding ketenagalistrikan di Jerman** The comparative study of electricity in Germany
3.	21-29 Mei 2016 (Jerman & Paris) 21-29 May 2016 (Germany & Paris)	**Pertemuan & Penandatanganan Loan Agreement 500 KV Jawa Bali Crossing dengan KFW, kemudian Direksi mengadakan Pertemuan dengan Bank AFD** Meeting & Signing of Loan Agreement 500 KV Java Bali Crossing with KFW, the Board of Directors then held a meeting with the AFD Bank
4.	01 – 04 Juni 2016 (Bangkok, Thailand) 1 – 4 June 2016 (Bangkok, Thailand)	**Workshop on the 35th GW Power Expansion Program** Workshop on the 35th GW Power Expansion Program
5.	18 – 22 Agustus 2016 (Shanghai, Tiongkok)	**Kunjungan ke Zhengjiang Ninghai Power Plant** A visit to Zhengjiang Ninghai Power Plant
6.	12 – 16 September 2016 (Skandinavia country (Norwegia-Swedia-Finlandia-Denmark) 12 – 16 September 2016 (Scandinavian country (Norway-Sweden-Finland-Denmark))	**Studi banding ketenagalistrikan di negara Skandinavia** The comparative studies to Scandinavian countries
7.	13 – 14 Oktober 2016 (Singapore) 13 – 14 October 2016 (Singapore)	**Principal meeting proses akuisisi Chevron Geothermal Power** Principle meeting for the acquisition of Chevron Geothermal Power
8.	12 – 16 Desember 2016 (Tehran, Iran) 12 – 16 December 2016 (Tehran, Iran)	**Studi banding ketenagalistrikan di Iran** The comparative study of electricity in Iran

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Mengingat saham PLN seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah, maka seluruh Direksi tidak memiliki saham di PLN maupun anak-anak usaha PLN lainnya.

Share Ownership of the Member of the Board of Directors

Given that PLN shares are entirely owned by the Government of Indonesia, the Board of Directors do not own shares in PLN nor in any of PLN's subsidiaries.

ASESMEN TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris. *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Board of Commissioners

The Shareholders conduct the Board of Commissioners performance assessment. The performance assessment of the Board of Commissioners refers to the Key Performance Indicators related to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is established by considering the duties and responsibilities of the Board of Commissioners by the statutes and regulations of the Ministry of SOE.

NO.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	URAIAN DESCRIPTION	KPI 2016			
			SASARAN TARGET	BOBOT PORTION	REALISASI REALIZATION	BOBOT PORTION
Dewan Komisaris Dengan Direksi				54		53
1.	*Review* dan tanggapan Rencana Perusahaan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP, KPI dan RJP	2 kali setahun	7	**3 kali, yaitu :** - **Revisi RKAP 2016** - **RKAP dan KPI Korporat 2017** - **RJP 2017-2025**	7
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah diperoleh dari Direksi dengan data akurat	14 hari kerja	3	**Rata-rata 3 hari kerja**	3
	Review and feedback of Company's Plan	Discussion, suggestions and or approval of Work and Budget Plan, KPI and Company Long-term Plan.	2 times a year		3 times, namely: - Revision of 2016 Work and Budget Plan - 2017 Work and Budget Plan and KPI Corporate - 2017-2025 Company Long-term Plan	
		Timeliness of response after accurate data obtained from the Board of Directors	14 working days		An average of 3 working days	
2.	*Review* dan tanggapan kinerja perusahaan	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas : - LM dan KPI PLN Triwulanan - LM dan KPI PLN Tahunan - KPI Direksi Tahunan	5 kali setahun	9	**5 kali , yaitu :** - **LM dan KPI Korporat 2015** - **KPI Direktorat 2015**	9
	Review and feedback of company's performance	Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat	14 hari kerja	3	- **LM dan KPI Korporat Triwulanan 2016 (3 x)** **Rata-rata 7 hari kerja**	3
		Discussion, feedback and approval of: - Management Report and KPI PLN Quarterly - Management Report and KPI PLN Annually - KPI BOD Annually	5 times a year		5 times, namely: - 2015 Management Report and KPI Corporate - 2015 KPI Directorate - Management Report and KPI Corporate Quarterly 2016 (3x)	
		Timeliness of response after accurate data obtained from the Board of Directors	14 working days		An average of 7 working days	
3.	*Review* tindak lanjut hasil /temuan audit internal /eksternal	Pembahasan dan tanggapan/saran atas Efektivitas pemeriksaan internal dan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor	6 kali setahun	10	**10 kali** 10 times	10
	Follow-up review results/findings of the internal/external audit	Discussion and feedback / advice on the effectiveness of internal inspections and follow-up monitoring of the auditor's findings	6 times a year			

NO.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	URAIAN DESCRIPTION	KPI 2016			
			SASARAN TARGET	BOBOT PORTION	REALISASI REALIZATION	BOBOT PORTION
4.	Memberi tanggapan tertulis/persetujuan/ nasehat/saran/teguran kepada Direksi Provide a written response/approval / counsel/advice/ warning to the Board of Directors	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap	Usulan Direksi ditanggapi	15	**96 %**	15
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap	14 hari kerja	3	**Rata-rata 15 hari kerja**	2
		Pemberian nasehat/saran/teguran	4 kali	4	**23 kali**	4
		Discussion and provision of written response / approval at the request of the Board of Directors after complete data has been obtained	Proposal of the Board of Directors addressed		96%	
		Timeliness of response following a proposal from the data obtained from the Board of Directors with the complete supporting data and documents	14 working days		On average of 15 working days	
		Advisory / recommendation / warning	4 times		23 times	
Dewan Komisaris Dengan RUPS BOC with GMS				20		18
5.	Menyampaikan program kerja dan KPI Dekom tahunan Delivering the work program and annual KPI of BOC	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan	1 paper	3	**1 Paper, yaitu : RKA dan KPI 2017**	3
		Ketepatan waktu penyampaian	sebelum RUPS	2	**21 hari kerja sebelum RUPS**	2
		Work Plan and Annual KPI BOC	1 paper		1 Paper, namely: RKA and KPI 2017	
		Timely Submission	Before the GMS		21 working days prior to the GMS	

NO.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	URAIAN DESCRIPTION	KPI 2016			
			SASARAN TARGET	BOBOT PORTION	REALISASI REALIZATION	BOBOT PORTION
6.	Menyampaikan pendapat/usul Dekom kepada Pemegang Saham/RUPS Delivering opinion / proposal BOC to the Shareholders / GMS	Pendapat atas : - RJP - RKAP - LM & KPI PLN Tahunan Menyampaikan : - Usulan penetapan kantor akuntan publik (KAP) - Usulan Remunerasi	4 pendapat atau usul setahun	4	**4 pendapat/usul , yaitu :** **- RKAP 2017** **- LM dan KPI Korporat 2015** **- KAP 2016** **- Remunerasi 2016**	4
		Ketepatan waktu penyampaian	sebelum RUPS	2	**Rata-rata 8 hari kerja sebelum RUPS**	1
		Opinion on: - Company Long-term Plan - Work and Budget Plan - Management Report & KPI PLN Annually Delivery: - Proposed establishment of the public accounting firm (KAP) - Proposed Remuneration	4 opinions or ideas in a year Before the GMS		4 opinion / proposal, namely: - 2017 Work and Budget Plan - 2015 Management Report and KPI Corporate - 2016 KAP - 2016 Remuneration An average of 8 working days prior to the GMS	
7.	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dekom Delivery of a report on supervisory duties of BOC	Laporan terdiri atas : - Laporan Progres KPI Semesteran - Laporan Pengawasan dan KPI Tahunan Ketepatan waktu penyampaian : - Laporan KPI Semesteran - Laporan Pengawasan Tahunan	2 laporan setahun 30 hari kerja sejak berakhirnya periode	4	**2 laporan, yaitu :** **- Laporan Pengawasan dan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2015** **- Laporan Progres KPI Dewan Komisaris Semester I Tahun 2016** **16 hari kerja sejak berakhirnya periode**	4
		The report consists of: - KPI Progress Report per Semester - Annual Monitoring Report and KPI	Sebelum RUPS	1		1
		Timeliness: - KPI Reports Semester - Annual Monitoring Reports	2 reports a year 30 working days after the end of the period Before to the GMS	2	**2 hari kerja sebelum RUPS** Two reports, namely: - Monitoring Report and the realization of the KPI Board of Commissioners in 2015 - Progress Reports of KPI BOC First Semester of 2016 16 working days after the end of the period 2 business days prior to the GMS	1

NO.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	URAIAN DESCRIPTION	KPI 2016			
			SASARAN TARGET	BOBOT PORTION	REALISASI REALIZATION	BOBOT PORTION
8.	RUPS GMS	Kehadiran Komisaris korum : - RUPS RKAP - RUPS Tahunan/LPT The presence of a quorum of BOC: - GMS of Work and Budget Plan - Annual General Meeting / Annual Calculation Report.	2 kali setahun 2 times a year	2	**Korum pada RUPS :** **- RKAP 2017** **- LPT 2015** The quorum at the GMS: - 2017 Work and Budget Plan - 2015 Annual Calculation Report.	2
Internal Dewan Komisaris BOC Internal				26		26
9.	Rapat Dewan Komisaris BOC Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat internal dan rapat konsultasi Meetings of the Board of Commissioners consist of internal meetings and consultation meetings	24 kali setahun 24 times a year	20	**41 kali** 41 times	20
10.	Pengenalan/ Induksi / peningkatan kompetensi Introduction / induction / enhancement of competence	- Mengikuti seminar/workshop di luar negeri maupun dalam negeri - Induksi jika Komisaris baru - Following the seminar / workshop abroad and domestic - Induction for new Commissioner	3 kali setahun 3 times a year	2	**3 kali** 3 times	2
11.	Pengelolaan GCG GCG Management	Penunjukan assessor GCG Pencapaian skor assesmen GCG Dewan Komisaris Appointment of GCG assessor Achievement score of GCG assessment for BOC	1 kali setahun Capaian Skor minimum 75% 1 time a year Achievement Score minimum 75%	1 3	**Assesor GCG 2016 : BPKP** **90 % untuk Tahun 2015** Assessor GCG 2016: Financial and Development Supervisory Agency 90% for 2015	1 3
Total				**100**		**97**

Direksi

Prosedur, Kriteria dan Pelaksana Asesmen

Pihak yang melakukan asesmen terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Dewan KomisarisAudit. Hasil asesmen kemudian menjadi catatan untuk dibahas dalam RUPS dan menjadi dasar bagi perpanjangan maupun perubahan posisi tugas Direktur di jajaran Direksi.

Dasar penilaian dalam pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicators* Direksi/Key Performance Indicators Korporat yang ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. *Key Performance Indicators* tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pada akhirnya, pihak yang menjadi penilai dari capaian *Key Performance Indicators* Direksi adalah RUPS. Melalui RUPS, Direksi bersama Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja *Key Performance Indicators* korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggung jawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan *Key Performance Indicators* dengan kondisi lapangan dan respon operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan penasehatan yang telah dilaksanakan selama tahun operasional.

Key Performance Indicators Direksi

Mengacu pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) No. RIS-31/D2.MBU/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015, maka penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) terhitung tahun 2012, mencakup 5 perspektif Key Performance Indicators berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Kontrak Manajemen yang meliputi perspektif Fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar, Kepemimpinan dan Tatakelola.

Evaluasi atas pencapaian kinerja perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat.

Board of Directors

Procedure, Criteria and Assessment

The entity that assesses the Board of Directors' performance is the Board of Commissioners, supported by the Audit Committee. The result of the assessment will then be discussed in the GMS and become the bases of extensions to or changes in the Board of Directors' duties.

The basis of the Board of Directors' performance assessment is the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) or Corporate KPI which is determined together with the Board of Commissioners at the beginning of tenure. Basically, KPI is a qualitative and quantitative scale of the Work and Budget Plan, which is indicative of the objectives of budget planning and execution.

Eventually, the GMS is the evaluator of the Board of Directors' KPI achievement. In the GMS, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, report their accountability in achieving Corporate KPI performance in 1 (one) operational year. They have to be able to explain the relationship between KPI achievement and conditions in the field as well as operational response taken by the Board of Directors. Moreover, the Board of Commissioners gives explanations and is accountable for supervisory and advisory aspects that have been conducted during the operational year.

Board of Directors' KPI

In accordance with the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) Minutes No. RIS-31/D2.MBU/2015 dated January 23, 2015 regarding Work and Budget Plan, the evaluation of Health Level of PT PLN (Persero) starting from 2012, referring to the assessment criteria, which covers the 5 (five) perspectives of Customer Focus, Product and Process, Effectiveness, Human Resources Focus, Financial and Marketplace, Leadership and Governance, in line with the management contract.

Evaluation of company performance is implemented by the Corporate Performance Control Unit.

Adapun pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Company performance achievements in 2016 were:

Perspektif Perspective	**Nilai** Score
Fokus Pelanggan Customer Focus	19,43
Efektivitas Produk dan Proses Product and Process Effectiveness	21,07
Fokus Tenaga Kerja Human Resources Focus	7,0
Keuangan dan Pasar Financial and Marketplace	23,09
Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance	24,93
Jumlah Total	**95,52**

Adapun gambaran Key Performance Indicators Direksi/ Korporat untuk tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut:

The following table shows the 2016 Board of Directors'/ Corporate KPI.

NO.	PERSPEKTIF PERSPECTIVE	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI
1	Fokus Pelanggan | Customer Focus						
1.1	Rasio Elektrifikasi PLN PLN Electrification Ratio	%	5	88,00	89,10	101,25%	5,00
1.2	Gangguan Penyulang per 100 kms Disturbance of Feeder per 100 kms	Kali/100 kms	5	22,00	24,20	89,98%	4,50
1.3	Implementasi Aplikasi SAIDI/SAIFI Implementation of SAIDI/SAIFI applications	Unit	5	10,00	24,00	240,00%	5,00
1.4	Penjualan Tenaga Listrik Pelanggan Industri Sales of Electricity to the Industrial Segment	TWh	5	69,13	68,15	98,58%	4,93
2	Efektivitas Produk dan Proses | The Effectiveness of Products and Processes						
2.1	Penambahan Kapasitas Pembangkit Addition of Power Plant Capacity	GW	6	4,90	4,14	84,47%	5,07
2.2	*Equivalent Availability Factor* (EAF) PLTU Equivalent Availability Factor (EAF) PLTU	%	4	83,50	81,32	97,39%	3,90
2.3	*Capacity Factor* (CF) Pembangkit PLN Addition of Power Plant Capacity	%	4	47,71	48,01	100,63%	4,00
2.4	*Fuel Mix* BBM Termasuk IPP Fuel Mix BBM Includes IPP	%	4	7,20	6,95	103,53%	4,00
2.5	Susut Jaringan Network Loss	%	3	9,12	9,48	96,01%	2,88
2.6	Jumlah PPA IPP yang Ditandatangani Number of PPA IPP Signed	MW	3	19.000	7.747	40,77%	1,22

NO.	PERSPEKTIF PERSPECTIVE	SATUAN UNIT	BOBOT WEIGHT	TARGET TARGET	REALISASI REALIZATION	PENCAPAIAN ACHIEVEMENT	NILAI
3	Fokus Tenaga Kerja | Manpower Focus						
	3.1 *Human Capital Readiness* Human Capital Readiness	Level	2	3,90	4,06	104,15%	2,00
	3.2 *Organization Capital Readiness* Organization Capital Readiness	Level	3	3,90	4,05	103,85%	3,00
	3.3 Produktifitas Pegawai Employee Productivity	MWh/ Pegawai	2	4.907	4.914	100,14%	2,00
4	Keuangan dan Pasar | Finance And Market						
	4.1 Pengendalian Biaya Pokok Penyediaan Control of Supply Main Cost	Rp/kWh	5	1.261	1.265	99,71%	4,99
	4.2 EBITDA Margin EBITDA Margin	%	5	29,20	26,03	89,14%	4,46
	4.3 *Consolidated Interest Coverage Ratio* (CICR) Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)	kali	5	2,00	3,11	155,50%	5,00
	4.4 Pencapaian Investasi Investment Achievement						
	a. Program (Realisasi Program Terkontrak UIP) Tanpa Luncuran Program (UIP contracted program realization) without launching	%	3	100,00	89,09	89,09%	2,67
	b. Fisik (Realisasi Bayar / Pagu Disburse) Physical (actual payment/cap ceiling disbursement)	%	3	75,00	74,25	99,00%	2,97
	4.5 Realisasi Penyerapan Tambahan Dana PMN Actual Absorption of additional PMN funds	%	3	80,00	86,86	108,58%	3,00
5	Kepemimpinan dan Tata Kelola | Leadership and Governance						
	5.1 Pencapaian Skor KPKU Achievement of KPKU Score	Skor	3	600,00	615,75	102,63%	3,00
	5.2 Peningkatan Tingkat Proper Improvement of Proper Level	Unit	3	6	20	333,33%	3,00
	5.3 Pencapaian GCG GCG Achievement	Skor	3	85,00	87,14	102,52%	3,00
	5.4 Pemenuhan Portal BUMN Fulfillment of SOE Portal	%	3	100,00	100,00	100,00%	3,00
	5.5 Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI dan Auditor Lainnya) Completion of audit findings (CPC, KAP, SPI and Other Auditors)	%	3	100,00	100,00	100,00%	3,00
	5.6 a. Pelaksanaan Program Pendanaan PMN PMN Funding Program Implementation	%	5	100,00	98,65	98,65%	4,93
	b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Program Penggunaan dana PMN Report Punctuality of PMN Funds Realization Program Utilization	%	5	100,00	106,67	106,67%	5,00
Jumlah | Total			**100**				**95,52**

A. HEALTHY, COMPRISED OF :
AAA IF TOTAL SCORE (TS) > 95
AA IF 80 < TS < 95
A IF 65 < TS < 80

C. NOT HEALTHY, COMPRISED OF:
CCC IF 20 < TS < 30
CC IF 10 < TS < 20
C IF TS < 10

PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur Penetapan dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan dan besaran nilai remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa RUPS menetapkan penghasilan anggota Dewan Komisaris berupa honorarium; tunjangan; fasilitas; dan tantiem.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran honorarium Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menetapkan besaran honorarium tersebut diterapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia.

Besaran remunerasi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER - 04/MBU/2014 adalah Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, sedangkan besaran remunerasi anggota Komisaris lainnya adalah 90% dari Komisaris Utama.

Adapun rincian Honorarium, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris sesuai keputusan RUPS 2016 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION DETERMINATION

Board of Commissioners Remuneration Determination Procedure

Remuneration of the Board of Directors is determined in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines on Determining the Incomes of Boards of Directors, Commissioners, and Trustees of State-Owned Enterprises.

The regulation states the GMS sets the honorarium, allowances, facilities, and bonus (tantiem) as the Board of Commissioners' income.

Board of Commissioners Remuneration

The amount of the Board of Commissioners honorarium is calculated in line with the Company's financial condition and capability and must not contradict laws and regulations. In deciding the amount of honorarium, the Industry Adjustment Factor is applied to take into account measurable similar industries (benchmark), business competitiveness or business complexity, as well as human resource shortage.

The remuneration amount of the Board of Commissioners is in accordance with SOE Minister Regulation Number PER-04/ MBU/2014 stating that the President Commissioners remuneration is 45% of that of the President Director while remuneration of other Board of Commissioners' members is 90% of President Commissioner's.

Details of honorarium, allowances, and facilities of the Board of Commissioners in accordance with the 2016 GMS are as follows:

No	Jenis Penghasilan Income Source	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS/Ministerial Decision (in Rupiah)		Keterangan Description
		Komisaris Utama President Commissioner	**Komisaris** Commissioner	
1	Honorarium Honorarium	112.500.000.00	**101.250.000.00**	**a. Komisaris Utama: 45 % gaji Direktur Utama** **b. Komisaris: 90 % Honorarium Komisaris Utama** a. President Commissioner: 45% of President Director's salary b. Commissioner: 90% of President Commissioner's Honorarium

No	Jenis Penghasilan Income Source	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS/Ministerial Decision (in Rupiah)	Keterangan Description
2	Tunjangan Allowances		
	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Religious Holidays	1 (satu) bulan Honorarium 1 (one) month's Honorarium	
	• Tunjangan Transportasi • Transport	sebesar 20% dari Honorarium 20% of Honorarium	
	• Asuransi Purna Jabatan • Pension Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun Premium covers 25% of annual honorarium	
3	Fasilitas Facilities		
	• Fasilitas Kesehatan • Health Coverage	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 th One wife and three children with maximum age of 25 years	
	• Fasilitas Bantuan Hukum • Legal Assistance	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Provided in accordance with prevailing laws and regulations	
	• Fasilitas Club Membership • Club Membership	dapat dikutsertakan Business Club Membership in Business Clubs	
	• Pakaian Seragam • Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year	

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016

2016 Board of Commissioners Remuneration

No.	Nama Name	Jabatan Position	Honorarium (Rp) Honorarium (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp) Transportation Allowance	Thr (Rp) Holiday Allowance (Rp)	Tantiem Dipotong Pajak (Rp) Tantiem After Tax (Rp)	Tanggungan Pph Ps 21 Income Tax Allowance Pph 21	Total Total
Dewan Komisaris Board Of Commissioners								
1	Kuntoro Mangkusubroto	Komisaris Utama (Jan S/D Mei) Chief Commissioner (Jan To May)	496.022.727	99.435.484	-	448.308.000	339.877.848	1.383.644.059
2	Hasan Basri	Plt. Komisaris Utama Chief Commissioner	1.316.250.000	258.750.000	90.000.000	2.420.873.000	1.462.667.002	5.548.540.002
3	Harry Susetyo Nugroho	Komisaris Commissioner	1.235.250.000	243.000.000	81.000.000	2.420.873.000	1.430.154.502	5.410.277.502
4	Andin Hadiyanto	Komisaris Commissioner	1.134.000.000	222.750.000	81.000.000	2.420.873.000	1.398.100.336	5.256.723.336
5	Darmono	Komisaris Commissioner	1.235.250.000	243.000.000	81.000.000	2.420.873.000	1.429.254.502	5.409.377.502
6	Oegroseno	Komisaris Commissioner	1.235.250.000	243.000.000	81.000.000	2.420.873.000	1.430.942.002	5.411.065.002
7	Budiman	Komisaris Commissioner	1.235.250.000	243.000.000	81.000.000	2.420.873.000	1.429.592.002	5.409.715.002
8	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commissioner	1.215.000.000	243.000.000	101.250.000	605.220.000	651.455.003	2.815.925.003
9	Jarman	Komisaris Commissioner	1.235.250.000	243.000.000	81.000.000	403.480.000	564.995.002	2.527.725.002
	Jumlah (A)= Total (A)=		10.337.522.727	2.038.935.484	677.250.000	15.982.246.000	10.137.038.199	39.172.992.410

Prosedur dan Penetapan Besaran Remunerasi Direksi

Remunerasi Komisaris dan Direksi dikaji oleh Dewan Komisaris. Hasil kajian melibatkan konsultan independen yang kompeten di bidangnya. Kajian tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, antara lain Kinerja Perusahaan, pencapaian target sesuai key performance Indicators yang ditetapkan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, serta imbal jasa yang terkait dengan tanggung jawab atas tindakan masing-masing yang mengandung risiko bagi pribadi masing-masing.

Pemberian remunerasi bagi anggota Direksi dihitung dengan mengacu pada persentase gaji Direktur Utama yang telah disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014.

Board of Directors' Remuneration Procedures and Determination

The Board of Commissioners assesses the remuneration of the Commissioners and the Board of Directors. The assessment involves an independent consultant competent in his or her field. Some main factors taken into account in the assessment are time commitment, target achievement in line with the key performance indicators (KPI) set by the Board of Commissioners and Board of Directors, and initiatives related to responsibility for individual actions that involve personal risk.

Remuneration for the Board of Directors members, including salary, is calculated based on the formula the Nomination and Remuneration Committee set. Determination of the remuneration amount of Board of Directors members refers to the President Director's salary percentage that has been approved by the General Shareholders' Meeting, taking into account SOE Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014.

Bagan Ringkas Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Determination

• Mendapatkan masukan dari Konsultan Independen dalam menetapkan dasar penentuan remunerasi
• Konsultan Independen memberi masukan berdasarkan:
  • BUMN No. PER-04/MBU/ 2014 tgl 10 Maret 2014 Pasal 5
  • Survey Remunerasi dan Faktor Penyesuian Industri
  • Keberhasilan memitigasi risiko
  • Kemampuan Perseroan, Kompetensi dan Pengalaman
	KNR	• Receiving input from Independent Consultant in setting the remuneration bases
		• Independent Consultant provides input in accordance with:
		  • Article 5 of the Minister of State-owned Enterprises Regulation Num. PER-04/MBU/ 2014 dated 10 March 2014
		  • Remuneration Survey and Industry Adjustment Factor
		  • Success in risk mitigation
		  • Company Capability, Competency and Experience

Mengusulkan dasar dan besaran Remunerasi kepada Dewan Komisaris (DK)	KNR	Proposing Remuneration bases and amounts to BOC
Membahas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan besaran remunerasi kepada RUPS	DK	Discussing Nomination and Remuneration Committee proposal and propose remuneration amounts to GMS.
Memutuskan Honor dan Tantiem Dewan Komisaris	RUPS	Determining honorarium and bonus amounts of the BoC
Honor dan Tantiem Dewan Komisaris		Honorarium and Incentives of performance for Board of Commissioners

KNR : Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
DK : Dewan Komisaris Board of Commissioners
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Remunerasi Direksi

Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Direksi juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PLN yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Adapun rincian gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai keputusan RUPS 2016 adalah sebagai berikut:

Remuneration of Directors

The Directors' remuneration, comprising salary, allowance and tantiem are established pursuant to SOE Minister Regulation Num. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.

The Directors also receive allowances and other facilities established in the PLN Board of Directors Meeting Decision No. 0309.K/DIR/2014 dated June 20, 2014 which refers to SOE Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.

The salary, allowances, and facilities in accordance with the General Shareholders' Meeting 2016 decisions are detailed below:

No.	Jenis Penghasilan Income Source	Putusan RUPS/ Menteri (dalam Rupiah) GMS/SOE Minister's Decision (in Rupiah)		
		Direktur Utama President Director	Direksi Director	Keterangan Description
1	Gaji Salary	250.000.000,00	225.000.000,00	a. Direktur Utama : 100 % b. Direktur : 90 % dari Direktur Utama a. President Director: 100% b. Board of Directors: 90% of President Director's
2	Tunjangan Allowance			
	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan • Religious Holiday Allowance	1 (satu) bulan gaji 1 (one) month salary		
	• Tunjangan Perumahan • Housing Allowance	27.500.000,00	27.500.000,00	
	• Asuransi Purna Jabatan • Life Insurance	Premi yang ditanggung 25% dari Gaji dalam satu tahun Premium that covered 25% of salary in one year		
3	Fasilitas Facilities			
	• Fasilitas Kendaraan Dinas • Vehicle facility	1 (satu) unit 1 (one) unit		
	• Fasilitas Kesehatan • Health facility	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 th 1 wife and 3 children aged up to 25		
	• Fasilitas Bantuan Hukum • Legal aid facility	diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Given in accordance with the provisions of the legislation		
	• Fasilitas Club Membership • Cub membership facility	dapat diikutsertakan 2 (dua) keanggotaan Club Membership yaitu Business Club atau Sport Club Can sign up to 2 Club Memberships, i.e. Business Club or Sports Club		
	• Fasilitas Komunikasi • Communication Device	biaya komunikasi ditanggung sepenuhnya oleh perseroan Costs covered entirely by the Company		
	• Corporate Credit Card • Corporate Credit Card	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu dinas perseroan atau biaya representasi kedinasan lainnya 1 (one) credit card for entertaining guests of the Company or other official representation expenses		Pemakaian untuk keperluan pribadi tidak ditanggung oleh perseroan
	• Pakaian Seragam • Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year		

Remunerasi Direksi Tahun 2016
Remuneration of Directors 2016

No	Nama Name	Jabatan Position	Honorarium Honorarium	Tunjangan Perumahan Housing Allownce
	DIREKSI			
1	Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	Rp.3.050.000.000	Rp330.000.000
2	Nasri Sebayang	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
3	Murtaqi Syamsuddin	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
4	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
5	Amir Rosidin	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	-
6	R. Nicke Widyawati	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
7	Amin Subekti	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	-
8	Ey Sarwono Sudarto	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
9	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	-
10	Machnizon Masri	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
11	Haryanto WS	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	-
12	Muhammad Ali	Direktur Director	Rp.2.745.000.000	Rp330.000.000
	Jumlah Total		**Rp.33.345.000.000**	**Rp.2.640.000.000**

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perangkat aturan yang menjadi dasar tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi PLN adalah Board Manual PLN. Board Manual merupakan tata laksana hubungan antar Organ Perusahaan yang mengacu kepada Peraturan Menteri dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian Wewenang dan Pengaturan Persetujuan Dewan Komisaris

Isi dari Board Manual di atas diantaranya adalah pendelegasian wewenang kepada Direksi pada batas-batas tertentu sesuai Anggaran Dasar dan sesuai butir-butir ketentuan Board Manual, untuk merealisasikan aksi korporasi tertentu sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagai pengelola Perusahaan.

Namun, jika nilai maupun dampak dari aksi korporasi yang akan dilaksanakan Direksi ternyata melebihi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual tersebut, maka Direksi harus terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

WORKING RELATIONSHIP MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The set of rules that has become the basis of the working relationship management between the Board of Commissioners and the Board of Directors of PLN is the Board Manual of PLN. The Board Manual is the relationship management between the organs of the Company, which refers to applicable ministerial regulations and legislation.

Authority Delegation and Management Approval of The Board of Commissioners

The contents of the Board Manual include the delegation of authority to the Board of Directors within certain limits according to the Articles of Association and to the Board Manual provisions, to realize certain corporate actions in accordance with the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors as the Manager of the Company.

However, if the value and impact of corporate actions implemented by the Board of Directors exceed the provisions as stipulated in the Board Manual , the Board of Directors must first submit a proposal to the Board of Commissioners and obtain their written approval.

Tunjangan Transportasi Transport Allowance	Thr Holiday Allowance	Tantiem Dipotong Pajak Tantiem After Tax	Tanggungan Pph Ps 21 Income Tax Allowance Pph Ps 21	Total Total
Rp.34.897.500	Rp.200.000.000	Rp.5977.468.000	Rp.3.570.541.252	Rp.13.162.752
-	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.207.746.002	Rp.11.842.470.002
-	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.207.746.002	Rp.11.842.470.002
-	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.203.696.002	Rp.11.838.420.002
-	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.104.696.002	Rp.11.409.420.002
Rp.34.897.500	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp3.219.565.252	Rp.11.889.186.752
-	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.106.046.002	Rp.11.410.770.002
Rp.34.897.500	Rp.180.000.000	Rp.5.379.724.000	Rp.3.218.215.252	Rp.11.887.836.752
-	Rp.180.000.000	Rp.896.691.500	Rp.1.186.065.502	Rp.5.007.685.002
-	Rp.180.000.000	Rp.896.691.500	Rp.1.282.365.502	Rp.5.433.985.002
-	Rp.180.000.000	Rp.896.691.500	Rp.1.186.065.502	Rp.5.007.685.002
-	Rp.180.000.000	Rp.896.691.500	Rp1.285.065.502	Rp.5.436.685.002
Rp.104.692.500	**Rp.2.180.000.000**	**Rp.47.222.014.000**	**Rp.30.777.813.778**	**Rp.116.163.520.278**

Apabila untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan penjelasan lebih detail dari Direksi, maka Dewan Komisaris dapat mengundang dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan anggaran dasar, rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika rapat yang bersifat segera / strategis dan dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; dan
2. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil selain dalam rapat tersebut juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan catatan keputusan tersebut telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

If such approval is required, in order to obtain a more detailed explanation from the Board of Directors, the Board of Commissioners may call a joint meeting, inviting the Board of Directors.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Based on the Articles of Association, the Board meetings are held at least once a month and the Board of Directors may be invited to attend the meeting of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners meeting may be held outside the regular schedule, if the meeting is urgent, strategic and deemed necessary by:

1. One or more members of the Board of Commissioners; and
2. Written request from one or more Members of the Board of Commissioners;

Decisions of the Board of Commissioners can be accepted while absent from the meeting or decided without the Board of Commissioners meeting, with a record of the decision to be approved in writing and signed by all the Members of the Board of Commissioners.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan 2 (dua) kali yaitu persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan dan pengesahan Laporan Perhitungan Tahunan (LPT).

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 25 kali, rincian pelaksanaan rapat sebagai berikut:

Meetings of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is always present at the General Meeting of Shareholders that are held 2 (two) times per year, for the approval of the Work and Budget Plan and Revenue approval of the Annual Calculation Report (LPT).

Throughout 2016, the Board of Commissioners held 25 (twenty five) meetings, the details of which are as follows:

No	**Tanggal Rapat** Date of Meeting	**Kehadiran Direksi** Attendance of the Board of Directors			**Agenda Rapat** Meeting Agenda
		Kehadiran Dekom Attendance of The Board of Commisisoners		**Uraian** Description	
1	6 Januari 2016 January 6, 2016	Kuorum Quorum	100%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Presentasi Project Management Office (PMO)** 1. Presentation of the Project Management Office (PMO)
					2. Pembahasan Potensi Kerugian PLN. 2. Discussion of Potential Losses for PLN.
					3. Pembahasan penjelasan Direksi atas beberapa catatan yang diminta Dewan Komisaris. 3. Discussion with the Board of Directors on some records requested by the Board of Commissioners.
					4. Pembahasan UU ITE; 4. Discussion on the ITE Law;
					5. Rencana Tatap Muka dengan Kontraktor PLN. 5. Face- to- Face Planning with PLN Contractors
					6. Konsep Laporan Tahunan. 6. The concept of the Annual Report.
					7. Usulan Komisaris Anak Perusahaan. 7. Proposals of the Commissioners of Subsidiaries
2	20 Januari 2016 January 20, 2016	Kuorum Quorum	100%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision of the Board of Commissioners Meeting.
					2. Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2015. 2. The Annual Report of the Board of Commissioners in 2015.
					3. Rencana Kerja dan KPI Komite Tahun 2016. 3. Work Plan and KPI Committee 2016.
					4. Usulan Penambahan Organisasi UIP. 4. Proposal for Additional of Construction Unit Organization.
					5. Lain-lain. 5. Others.

3	10 Februari 2016 February 10, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Pembelian Tenaga Listrik IPP.** 2. Discussion on Responsibilities of the Board of Commissioners in the IPP Power Purchase. **3. Penyertaan Modal kepada PT PLN Batam.** 3. Capital Investments for PT PLN Batam. **4. Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.** 4. Working Visit Plan for the Board of Commissioners **5. Lain-lain.** 5. Others.
4	24 Februari 2016 February 24, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Pinjaman Luar Negeri PKLN PLN.** 2. Discussion on Foreign Loans PKLN PLN. **3. Laporan hasil rapat dengan KAP.** 3. Report of the meeting with Public Accountant Firm. **4. Pendapat hukum terhadap PerPres No.4/2016.** 4. The legal opinion on Perpres No.4 / 2016. **5. Kunjungan Kerja ke PLN Riau dan Batam.** 5. Working Visit to PLN Riau and Batam.
5	08 Maret 2016 March 8, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB).** 2. Discussion of Proposed Elimination of Non-Operating Assets (ATTB). **3. Pembahasan Usulan Penghapusan Piutang Ragu-ragu.** 3. Discussion of Proposed Elimination of Doubtful Accounts. **4. Laporan Manajemen PT PLN (Persero) 2016 Unaudited.** 4. Management Report of PT PLN (Persero) Unaudited 2016. **5. Rencana Kunjungan Kerja bulan Maret 2016.** 5. Working Visit Plan in March 2016.
6	8 April 2016 April 8, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.** 2. Working Report of the Board of Commissioners. **3. Lain-lain.** 3. Others.

7	20 April 2016 April 20, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Kelistrikan P. Nias dan kontrak Diesel;** 2. Discussion on Electricity in Nias and Diesel contracts; **3. Laporan hasil pertemuan dengan SPI;** 3. Report on the results of the meeting with Internal Supervisory Unit; **4. Laporan hasil pertemuan dengan DIVMRK;** 4. Report on the results of the meeting with DIVMRK; **Lain-lain.** 5. Others.
8	11 Mei 2016 May 11, 2016	Kuorum Quorum	78%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro	**1. Monitoring Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Laporan kunjungan kerja ke PLTA Mrica dan PLTU Adipala, PLTU Cilacap.** 2. Report on the working visit to the Mrica Hydro Power Plant Hydroelectric and Adipala Steam Power Plant, Cilacap Steam Power Plant. **3. Laporan kunjungan kerja ke PLTU Paiton dan PLTU Grati;** 3. Report on the working visit to the Paiton Power Plant and Grati Power Plant; **4. Pembahasan Laporan Manajemen TW I Tahun 2016.** 4. Discussion on Quarter I Management Report 2016. **5. Lain-lain.** 5. Others.
9	25 Mei 2016 may 25, 2016	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Monitoring Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Pinjaman Langsung IDB;** 2. Discussion on the Direct Loan of IDB; **3. Pembahasan Rencana Pinjaman Pendanaan Investasi Transmission Lines 500 kV Sumatera.** 3. Discussion on Loan Plan Investment Funding 500 kV Transmission Lines Sumatra. **4. Pembahasan LMVPP Sumatera Utara.** 4. Discussion on LMVPP North Sumatra. **5. Laporan Revisi Pedoman GCG.** 5. The Revised GCG Code Report. **6. Lain-lain.** 6. Others
10	8 Juni 2016 June 8, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro	**1. Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Follow-up to the Board of Commissioners meeting decision **2. Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Riau;** 2. Working Report of the Board of Commissioners to Riau; **3. Pembahasan Pengadaan Batubara.** 3. Discussion on Coal Procurement. **4. Lain-lain.** 4. Others.

11	22 Juni 2016 June 22, 2016	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman	**1. Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Follow-Up Resolutions of the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Laporan Manajemen Tahun 2015 Audited.** 2. Discussion of Management Report 2015 Audited. **3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015.** 3. BOC Monitoring Report 2015 **4. Pembahasan Pendanaan Pinjaman Langsung ECA.** 4. Discussion of ECA Direct Loan Funding. **5. Lain-lain.** 5. Others.
12	29 Juni 2016 June 29, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. Persiapan RUPS LPT PT PLN (Persero) Tahun Buku 2015.** 1. Preparation of AGM of PT PLN (Persero) Annual Calculation Report.for Fiscal Year 2015. **2. Lain-lain** 2. Others
13	13 Juli 2016 July 13, 2016	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	**1. Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris.** 1. Follow-up of Resolution of the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Persetujuan Penghapusan ATTB.** 2. Discussion on ATTB Abolition Agreement. **3. Pembahasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tanjung Jati B 5&6 (Jawa-4) 2x1.000 MW** 3. Discussion on Power Purchase IPP Tanjung Jati B 5 & 6 (Java-4) 2x1.000 MW Steam Power Plant **4. Lain-lain.** 4. Others.
14	27 Juli 2016 July 27, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2016.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision of the Board of Commissioners Meeting dated July 13, 2016. **2. Laporan Pertemuan dengan KSPI.** 2. Meeting Report with Head of Internal Supervisory Unit. **3. Realisasi KPI Dewan Komisaris Triwulan II/2016.** 3. The realization of KPI BOC Quarter II / 2016. **4. Pembahasan Transaksi pembelian tenaga tenaga listrik IPP program 35.000 MW.** 4. Discussion on IPP electricity power purchase transactions of 35,000 MW program. **5. Inventarisasi masalah .** 5. Inventory issues. **6. Lain-lain** 6. Others

15	12 Agustus 2016 August 12, 2016	Kuorum 75% Quorum	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	**1. *Monitoring* Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juli 2016.** 1. Monitoring the Follow-up on the Board of Commissioners Meeting Decision dated July 27, 2016. **2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan II/2016.** 2. Discussion on Management Report Quarter II / 2016. **3. Laporan Kunjungan Kerja ke Aceh dan Pontianak.** 3. Report of Working Visit to Aceh and Pontianak. **4. Lain-lain** 4. Others
16	24 Agustus 2016 August 24, 2016	Kuorum 88% Quorum	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Andin Hadiyanto	**1. *Monitoring* Tindaklanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Pinjaman Bank BUMN Dalam Negeri untuk Investasi Tahun 2016-2017:** 2. Discussion on the Interior SOE Bank Loans for Investment Year 2016-2017: **3. Pembahasan Penerbitan Obligasi dan atau Sukuk Ijarah PLN melalui PUB Tahun 2016-2018.** 3. Discussion on Bonds or Sukuk Ijarah PLN through PUB Year 2016-2018. **4. Pembahasan Penghapusan ATTB dan PRR.** 4. Discussion of Elimination of ATTB and PRR. **5. Lain-lain** 5. Others
17	7 September 2016 September 7, 2016	Kuorum 63% Quorum	Hasan Bisri, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	**1. Monitoring Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Penghapusan ATTB dan PRR.** 2. Discussion on Elimination of ATTB and PRR. **3. Laporan Peninjauan Fhisik Penghapusan ATTB.** 3. Elimination of ATTB Physical Review Reports. **4. Rencana Kunjungan Kerja.** 4. Working Visit Plan **5. Lain-lain** 5. Others
18	20 September 2016 September 20, 2016	Kuorum 63% Quorum	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Penghapusan ATTB.** 2. Discussion on Elimination of ATTB. **3. Pembahasan *Global Medium Term Note* (GMTN) Programme 2016-2018.** 3. Discussion on the Global Medium Term Note (GMTN) Program 2016-2018. **4. Laporan Penghapusan ATTB-ACSR.** 4. Removal Report on ATTB-ACSR. **5. Konsep perubahan Board Manual dan Pedoman GCG.** 5. The concept of change in Board Manual and the revised GCG Code.

19	4 Oktober 2016 October 4, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Penghapusan ATTB dan PRR.** 2. Discussion on the Elimination of ATTB and PRR. **3. Konsep Final Perubahan Board Manual dan Pedoman GCG.** 3. The concept of Final Changes to the Board Manual and the revised GCG Code. **4. Lain - Lain.** 4. Others
20	19 Oktober 2016 October 19, 2016	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan RJP 2017-20121.** 2. Discussion on 2017-2021Company Long-term Plan. **3. Pembahasan RKAP Tahun 2017.** 3. Discussion on Work and Budget Plan Year 2017. **4. Laporan Peninjauan Phisik ATTB.** 4. Physical Review Reports of ATTB. **5. Lain - Lain.** 5. Others
21	25 Oktober 2016 October 25, 2016	Kuorum Quorum	71%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	**Rencana Akuisisi Chevron Geothermal Power Operation** Acquisition Plan of Chevron Geothermal Power Operation
22	8 November 2016 November 8, 2016	Kuorum Quorum	71%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Laporan Manajemen TW III/2016.** 2. Discussion on Management Report Quarter III / 2016. **3. Pembahasan KPI Tahun 2017.** 3. Discussion on KPI Year 2017. **4. Lain - Lain.** 4. Others
23	22 November 2016 November 22, 2016	Kuorum Quorum	71%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan KPI Tahun 2017.** 2. Discussion on KPI Year 2017. **3. Tanggapan Dekom terhadap RKAP Tahun 2017.** 3. Responses of the BOC towards Work and Budget Plan Year 2017. **4. Penjelasan Perubahan *Board Manual*.** 4. Explanation on Changes in Board Manual. **5. Rencana *Assessment* GCG oleh BPKP.** 5. Assessment Plan of GCG by Financial and Development Supervisory Agency. **6. Lain - Lain.** 6. Others

24	2 Desember 2016 December 2, 2016	Kuorum 71%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Pembahasan Penghapusan ATTB dan Piutang Ragu-ragu.** 2. Discussion on Elimination of ATTB and Doubtful Receivables. **3. Pembahasan Pinjaman Kredit Sindikasi Bank.** 3. Discussion on Syndicated Bank Loans. **4. Pembahasan Dana PMN Tahun 2016.** 4. Discussion on State Capital Injection.in 2016. **5. Pembahasan RJP 2017-2021.** 5. Discussion on 2017-2021 Company Long-term Plan.
25	20 Desember 2016 December 20, 2016	Kuorum 86% Quorum	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	**1. *Monitoring* Tindak lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Terdahulu.** 1. Monitoring the Follow-Up Decision on the Board of Commissioners Meeting. **2. Persiapan RUPS RKAP 2017.** 2. Preparation of AGM 2017 of Work and Budget Plan **3. Pembahasan SHL PLN Batam.** 3. Discussion on SHL PLN Batam. **4. Pembahasan Penghapusan PRR dan ATTB** 4. Discussion on the Elimination of PRR and ATTB **5. Lain-lain:** 5. Others: **• Rencana Kunjungan Kerja ke AP-PLN.** • Working Visit Plan to PLN Subsidiary. **• Rencana rapat tahun 2017.** • Meeting Plan 2017

*) Sejak 24 Mei 2016, Bpk. Kuntoro Mangkusubroto sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama
*) As of May 24, 2016, Mr. Kuntoro Mangkusubroto no longer serves as Chief Commissioner
**) Sejak 14 Desember 2016, Bpk. Andin Hadiyanto sudah tidak menjabat sebagai Komisaris
**) As of December 14, 2016, Mr. Andin Hadiyanto no longer serves as Commissioner

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi.

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:

   a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Komisaris; dan
   c. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.

Board of Directors Meeting

Decisions that bind are normally made in the Board of Directors' meeting. However, decisions can be made without holding a Board of Directors meeting; in such cases, decisions in writing must be approved and signed by all members of the Board of Directors.

The Board of Directors determines several issues which require decision making through the Directors Meeting, as follows :

1. Actions related to implementation of authority in accordance with provisions in the Articles of Association, namely:
   a. Authorities that require the Directors' approval;
   b. Authorities that require the Commissioners' approval; and
   c. Authorities that require the GMS approval.

2. Tindakan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; dan
3. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:
   a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan;
   b. Di luar rencana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
   c. Bersifat mendesak; dan
   d. Atau, menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan Board Manual, Rapat Direksi harus dilaksanakan secara berkala dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Direksi PT PLN (Persero) memutuskan untuk mengadakan rapat direksi secara rutin setiap hari Kamis.

Selain rapat rutin tersebut, dapat dilaksanakan juga rapat tambahan sesuai kebutuhan yang mendesak dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi berikut seluruh jajaran pejabat yang terkait, dan kehadiran Direksi dalam rapat tersebut harus bersifat kuorum.

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat yang dilakukan melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2016 sebanyak 21 kali dengan ringkasan tingkat kehadiran masing-masing Direktur sebagai berikut:

2. Actions associated with Goods and Service Procurement in accordance with applicable Company regulations ; and
3. Other Strategic Actions, with limitations as follows:
   a. Tendency to influence Company operations, strategically and significantly.
   b. Outside the Work and Budget Plan as set in the GMS;
   c. Urgent items and issues;
   d. Involvement of employees in strategic positions.

In accordance with SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011, the Directors Meeting should be held routinely at least once a month. The Board of Directors of PT PLN (Persero) decided to hold a Directors' meeting every Thursday.

Apart from routine meetings, additional meetings can be held based on urgent needs that require an immediate decision. A Directors' Meeting is participated in by the Board of Directors and all related officials. The attendance of the Directors in the meeting must be a quorum.

The Board of Directors meeting can be conducted via teleconference, videoconference or other electronic media that enables all participants to see and listen to each other directly and participate in the meeting. Meetings conducted via electronic media should always be recorded and compiled in the Minutes of Meeting as an administrative obligation and legal documentation.

There were 21 (twenty one) Board of Directors' Meetings in 2016, with the attendance rate of each member as follows:

No	Tanggal Rapat Date of Meeting	Kehadiran Direksi Attendance of BOD		Agenda Rapat Meeting Agenda
		Kehadiran Direksi Attendance of BOC	Uraian Description	
1	11 Januari 2016 January 11, 2016	Kuorum 92% Quorum	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Laporan Pengadaan IPP** **2. Laporan Prakiraan Realisasi KPI 2015** **3. Laporan Terkait Persiapan Pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan** **4. Laporan Amandemen PJBG Simenggaris untuk Tj Selor Kaltim** **5. Penyusunan Rencana Logistik Gas 4 kluster** 1. Procurement Reports of IPP 2. Realization of IBC 2015 Forecast Reports 3. Preparation of Implementation Related to AGM Reports of Subsidiary 4. Report of Amendment PJBG Simenggaris for Tj Selor Kaltim 5. Planning Preparation of Logistics Gas 4 cluster

2	21 Januari 2016 January 21, 2016	Kuorum Quorum	75%	Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Evaluasi FTP-1 dan White Paper 35.000 MW (Ernst & Young)** **2. Lain-lain** 1. Evaluation of FTP-1 dan White Paper 35,000 MW (Ernst & Young) 2. Others
3	18 Februari 2016 February 18, 2016	Kuorum Quorum	75%	Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Persetujuan Dokumen Lelang Pembangunan Pipa Gas PLTGU Tanjung Batu** **2. Laporan Progress Lelang LNG untuk Indonesia Bagian Tengah** **3. Kontrak-kontrak gas dengan PGN** **4. Solusi Temporary Suplai Gas PLTG Gorontalo** **5. Evaluasi Usulan Harga Beli Excess Power PT Arar Asia Power Sorong (PT AAPS) dan PT Waymon Daya Powergen (PT WDP)** 1. Approval of the Tender Documents for Construction of Gas Pipeline Tanjung Batu Combined Cycle Power Plant 2. Auction Progress Report of LNG to Indonesia Midsection 3. Gas Contracts to PGN 4. Temporary Solution of Gas Supply to Gorontalo Gas Turbine Power Plant 5. Evaluation of Proposed Price Buy Excess Power PT Arar Asia Power Sorong (PT AAPS) and PT Waymon Daya Powergen (PT WDP)
4	24 Maret 2016 March 24, 2016	Kuorum Quorum	100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Alternatif Penanganan PLTG Belawan GT 1.1 dan GT 1.2** **2. Lain-lain :** 1. Alternative Handling of Belawan Gas Turbine Power Plant GT 1.1 and GT 1.2 2. Others:
5	07 April 2016 April 7, 2016	Kuorum Quorum	83%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Laporan Progress 35.000 MW** **2. Kinerja Organisasi Tahun 2015** **3. Kondisi Pulau Nias** **4. Barge Power Plant untuk reserve margin di daerah-daerah Luar Jawa Bali** 1. Progress report of 35,000 MW 2. Organizational Performance in 2015 3. Conditions in Nias Island 4. Barge Power Plant for the reserve margin in the regions outside Java, Bali
6	14 April 2016 April 14, 2016	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Tindak Lanjut Pengadaan Spare Part PLTGU Belawan 1.1 dan 1.2** **2. Laporan Pengadaan Tower dan Konduktor** **3. Kelanjutan PLTU Way (Ambon)** **4. Perubahan Water Intake PLTU Holtekam** **5. Revitalisasi Mesin Relokasi Ex Bali** **6. Progress PLTU Jawa 5** **7. Progress PLTU Meulaboh** 1. Follow-Up the Supply of Spare Parts 1.1 and 1.2 at Belawan Combined Cycle Power Plant 2. Procurement Reports Tower and Conductor 3. Continuation of the Way Steam Power Plantpower plant (Ambon) 4. Changes in Holtekam Steam Power Plant Water Intake 5. Revitalization of Machine Relocation Ex Bali 6. Progress of Java 5 Power Plant 7. Progress of Meulaboh Power Plant

7	19 Mei 2016 May 19, 2016	Kuorum Quorum	75%	Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Laporan Progress 35.000 MW** **2. Penyesuaian Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero)** **3. Lanjutan Pengadaan Spare part PLTGU Belawan 1.1 dan 1,2** 1. Progress report of 35,000 MW 2. Adjustment on Limitation Authority of Environmental Decision Making in PT PLN (Persero) 3. Advanced Procurement of Spare parts 1.1 and 1.2 at Belawan Combined Cycle Power Plant
8	17 Juni 2016 June 17, 2016	Kuorum Quorum	58%	Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon,	**1. Laporan Kondisi PT PLN Tarakan** **2. Penetapan Basis Harga PJBTL IP dan PJB Tahun 2016 Terkait Revaluasi Aset** **3. Pembangunan Transmisi Dengan Skema Divert Payment** **4. Perbandingan Opsi Pekerjaan GT 11 dan GT 12 PLTG Belawan** **5. Akuisisi Chevron PLTP Gunung Salak dan Darajat** 1. Report of Condition of PT PLN Tarakan 2. Determination of Base Price PJBTL IP and PJB 2016 Related to Revaluation of Assets 3. Development of Transmission With Divert Payment Scheme 4. Comparison of Job Options GT 11 and GT 12 at Belawan Combined Cycle Power Plant 5. Acquisition of Chevron Geothermal Power Plant Mount Salak and Darajat
9	23 Juni 2016 June 23, 2016	Kuorum Quorum	92%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**HVDC Sumatera**
10	14 Juli 2016 July 14, 2016	Kuorum Quorum	100%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Realisasi PMN dikaitkan dengan Kebutuhan Dana Investasi** **2. Pembelian PLTP Chevron** 1. Realization of State Capital Injection. is associated with the Investment Fund Needs 2. The acquisition of Chevron Geothermal Power Plant
11	21 Juli 2016 July 21, 2016	Kuorum Quorum	92%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Pembahasan Remunerasi 2016 dan Tantiem Direksi/ Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan Anak Perusahaan Tahun 2015** **2. Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Penyelesaian PLTU Gorontalo 2 x 25 MW** **3. Usulan Harga Gas dari PGN untuk Muara Tawar, IPP Jawa Bali 3, dan IPP Jawa Bali 4** **4. Persetujuan Revisi Dokumen RFP Lelang LNG Indonesia Tengah** **5. Gasifikasi MPP Babel, Pontianak dan natuna** **6. Gasifikasi PLTG Gorontalo 4 x 25 MW** 1. Discussion of 2016 Bonus Remuneration of Directors / Board of Commissioners and its Subsidiaries, as well as Employee Bonus 2015 2. Evaluation of the Implementation and Settlement Plan of Gorontalo Steam Power Plant 2 x 25 MW 3. Proposed Gas price of PGN to Muara Tawar, IPP Java-Bali 3, and IPP Java-Bali 4 4. Approval of RFP Document Revision for Central Indonesian LNG Auction 5. Gasification MPP Babel, Pontianak and Natuna 6. Gasification Gorontalo 4 x 25 MW Gas Turbine Power Plant

12	28 Juli 2015 July 28, 2015	Kuorum Quorum	92%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Amandemen VI atas Perjanjian Tentang Jual Beli Gas di Blok KPS ONWJ untuk Penyerahan ke Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Muara Karang dan Priok** **2. Persetujuan Jual Beli LNG dari Lapangan WASAMBO** 1. Amendment VI on Gas Sale and Purchase Agreement On The Block KPS ONWJ for submission to the Center Muara Karang Power Plant and Priok 2. Approval of the Sale and Purchase of LNG from the Field WASAMBO
13	04 Agustus 2016 August 04, 2016	Kuorum Quorum	83%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon,	**1. Persetujuan Harga Gas (ex. LNG) Tambahan untuk Pasokan Muara Karang dan Tanjung Priok** **2. Persetujuan Harga Toll fee Perjanjian Pengangkutan Gas untuk Ruas Pipa Muara Karang – Muara Tawar** **3. Persetujuan Harga LNG Bontang untuk Benoa** 1. Approval of Gas Prices (ex. LNG) Supplement for Supply to Muara Karang andTanjung Priok 2. Approval of Price Toll fee for the Gas Transportation Agreement Pipe Segment Muara Karang - Muara Tawar 3. Approval of the Bontang LNG prices for Benoa
14	11 Agustus 2016 August 11, 2016	Kuorum Quorum	58%	Sarwono Sudarto, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Amandemen PPA untuk PLTA Poso** **2. Organisasi Listrik Pedesaan** **3. Program Listrik Gratis melalui CSR BUMN** **4. Program Listrik Gratis melalui PMN** **5. Usulan Amandeman PJBG CNOOC untuk PLTGU Cilegon** **6. Pemanfaatan excess produksi hidrat pada pelaksanaan uji realibity run CNG Gresik** 1. Amendments to the PPA for Poso Hydro Power Plant 2. Organization of Rural Electrification 3. Free Electrical Program Guide through SOE CSR 4. Free Electrical Program via State Capital Injection. 5. The proposed amendment to the PJBG CNOOC for Cilegon Combined Cycle Power Plant 6. Utilization of excess production realibity hydrate on the implementation of test run CNG Gresik
15	26 September 2016 September 26, 2016	Kuorum Quorum	92%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Persetujuan Pasokan Gas pengganti ke PLTMG Rawa Minyak** **2. RKAP 2017** **3. Laporan Pengadaan PLTGU Jawa 1** 1. Approval of Gas Supply replacement to Rawa Minyak Gas Engine Power Plant 2. 2017 Work and Budget Plan 3. Procurement Reports of Java 1 Combined Cycle Power Plant
16	27 September 2016 September 27, 2016	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Machnizon,	**1. Review RJP 2015 – 2019 (2017 – 2021 Company Long-term Plan draft)** **2. Penyampaian Hasil Review Proposal Penyesuaian Tarif PLTP Rantau Dedap** **3. PLTP Jailolo (4x10 MW)** **4. Persetujuan Amandemen PJBG antara PLN – CNOOC untuk optimasi penyerapan Gas Make Up** **5. Usulan Pembangunan Tambahan CNG Plant di Pusat Listrik Balai Pungut** 1. Review of RJP 2015-2019 (2017-2021 Long-term Plan draft) 2. Submission Review Results on Tariff Adjustment Proposal Rantau Dedap Geothermal Power Plant 3. Jailolo geothermal power plant (4x10 MW) 4. Approval of Amendments to the PJBG between PLN - CNOOC for absorption optimization Gas Make Up 5. Proposed Supplementary Development CNG Plant in Power Center Balai Pungut

17	29 September 2016 September 29, 2016	Kuorum Quorum	58%	Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon,	**1. Solusi Proyek Terkendala Regional Kalimantan** **2. *Mobile Power Plant*** 1. Kalimantan Regional Constrained Project Solutions 2. Mobile Power Plant
18	06 Oktober 2016 October 6, 2016	Kuorum Quorum	67%	Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso,Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Akuisisi Chevron** **2. Persetujuan Amended and Restated PJBG antara PLN dan PT Nusantara Regas** **3. Usulan Pengadaan BBM Tahun 2016** 1. Acquisition of Chevron 2. Approval of Amended and Restated PJBG between PLN and PT Nusantara Regas 3. Proposed Procurement BBM 2016
19	10 November 2016 November 10, 2016	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Muhamad Ali, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Haryanto W.S	**1. Kredit Investasi dengan Kreditur Dalam Negeri Tahun 2016 Tahap 2 dengan Nilai Maksimum Rp. 12 Triliun.** **2. Lain-lain** 1. Investment Credit with domestic creditors 2016 Phase 2 with a maximum value of Rp. 12 Trillion. 2. Others
20	24 November 2016 November 24, 2016	Kuorum Quorum	75%	Sofyan Basir, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang, Djoko R. Abumanan, Machnizon, Haryanto W.S	**1. Konsep Pra-Kualifikasi Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk 500 kV Sumatera Skema Build Maintain Transfer (BMT)** **2. Status Proyek PLTA Upper Cisokan** 1. Concept Development Prequalification Transmission and Substation 500 kV Sumatra Build Maintain Transfer Scheme (BMT) 2. Project Status Upper Cisokan Hydropower
21	22 Desember 2015 December 22, 2016	Kuorum Quorum	67%	Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nasri Sebayang, Amin Subekti, Djoko R. Abumanan, Haryanto W.S	**1. Solusi penyelesaian PLTU terkendala Tanjung Selor dan Malinau** **2. Penyelesaian PPA Jawa 1 Hydro Power Plant** **3. Update Rencana RUPS RKAP 2017** **4. Persetujuan Dokumen Lelang BBM 2017** **5. Persetujuan Kontrak AMC Asset CNG Marine dan CNG Gresik – Lombok** **6. Persetujuan Perjanjian MEDCO - Lematang** **7. Persetujuan KB CNOOC terkait Gas Make Up (GMU)** **8. Persetujuan Harga Gas Mubadala untuk MPP Kanaan Kaltim** **9. Presentasi Hasil Lelang Pipa Gas Tanjung Batu** **10. Presentasi Kesepakatan Tarif Toll Fee dengan Gemilang Jabung Energi** 1. The completion of the power plant solutions at Tanjung Selor dan Malinau Steam Power Plant 2. Completion of PPA Java Power Plant 1 3. Update on GMS of 2017 Work and Budget Plan 4. Approval of Tender Documents BBM 2017 5. Approval of Contracts AMC Asset CNG Marine and CNG Gresik - Lombok 6. Approval of Agreement MEDCO - Lematang 7. Approval of KB CNOOC related to Gas Make Up (GMU) 8. Approval of Gas Prices Mubadala for MPP Kanaan Kaltim 9. Presentation of Gas Pipeline Auction Results Tanjung Batu 10. Presentation on Toll Fee Tariff Agreement with Gemilang Jabung Energi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Konsultasi adalah Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Rapat dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris maupun Direksi. Rapat tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional.

Melalui Rapat tersebut diharapkan dihasilkan keputusan-keputusan strategis mengenai suatu rencana aksi korporasi, jika rencana dimaksud berada di luar batas kewenangan Direksi. Rapat tersebut juga dapat menjadi tempat bagi Dewan Komisaris memberikan pandangan dan arahan strategis pengembangan perusahaan.

Selama tahun 2016, PLN menyelenggarakan 16 kali Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dan Direksi. Rincian rapat gabungan adalah sebagai berikut:

Joint Meetings of The Board of Commissionersand The Board of Directors

Consultation Meetings are attended by both the Board of Commissioners and by the Board of Directors. Meetings can take place on the initiative of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The meetings are held to promote unity and harmony on points of view.The Board of Commissioners acts as superv isor, with the Board of Directors as the operational executor.

The meetings are expected to produce strategic decisions concerning corporate action plans, if the plan is beyond the authority of the Board of Directors. The meetings can also serve as an opportunity for the Board of Commissioners to provide insight and strategic direction to the Company's development.

In 2016, PLN held 16 (sixteen) Consultation Meetings with the Board of Commissioners and Board of Directors with attendance rates as follows:

No	**Tanggal Rapat** Date of Meeting	**Kehadiran Dekom** Attendance of Board of Commissioners		**Kehadiran Direksi** Attendance of Board of Directors	**Agenda Rapat** Meeting Agenda
		Kehadiran Attendance	**Uraian** Description		
1	20 Januari 2016 January 20, 2016	Kuorum 89% Quorum	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Laporan Progres 35.000 MW, IPP dan EPC;** **2. Penjelasan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan;** **3. Pembahasan Organisasi, cara kerja dan pemanfaatan PMO;** **4. Lain-lain** 1. 35,000 MW, IPP and EPC Progress Report; 2. Explanation of government implementation policy in the new and renewable energy development; 3. Organizational discussions, ways of working and utilization of PMO; 4. Others
2	22 Februari 2016 February 22, 2016	Kuorum 78% Quorum	Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi – Direktur Perencanaan Korporat Attended by Directors - Director of Corporate Planning	**Pembahasan Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.** Discussion on New and Renewable Energy Development Program.

3	24 Februari 2016 February 24, 2016	Kuorum Quorum	89%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi terkini** **2. Tindak lanjut PERPRES 4/2016** **3. Penjelasan progres PPA;** **4. Kesiapan pendanaan untuk Transmisi, GI dan Distribusi terkait program 35.000 MW;** 1. Latest information 2. Follow up of PERPRES 4/2016 3. Explanation of PPA progress; 4. Readiness of funding for Transmission, GI and Distribution related to the 35,000 MW program;
4	23 Maret 2016 March 23, 2016	Kuorum Quorum	100%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Penjelasan Direksi atas beberapa catatan yang diminta Dewan Komisaris;** **2. Progres penggantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan laporan Penggantian Pejabat 1 level di bawah Direksi.** 1. Explanation of the Board of Directors on several records requested by the Board of Commissioners; 2. Progress of replacement of the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries, and report on Substitution of Official 1 level below the Board of Directors.
5	20 April 2016 April 20, 2016	Kuorum Quorum	78%	Kuntoro Mangkusubroto, Darmono, Oegroseno, Budiman, Hasan Bisri, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Pembahasan kejadian kelistrikan Pulau Nias dan antisipasi terhadap kasus yang sama;** **2. Progres Program 35.000 MW sd TW I/2016;** **3. Progres PPA;** **4. Tangapan atas Arahan Menteri ESDM;** **5. Lainnya.** 1. Discussion on Nias Island Electricity occurrences and anticipation on the same case; 2. 35,000 MW Program Progress up to Quarter I/2016; 3. PPA Progress; 4. Emphasis on the direction of the Minister of Energy and Mineral Resources; 5. Others.
6	24 Juni 2016 June 24, 2016	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen PT PLN (Persero) Tahun 2015 Audited;** **2. Progres Penyelesaian PLTU Mangkrak;** **3. Lain-lain.** 1. Financial Reports and Management Reports of PT PLN (Persero) Year 2015 Audited; 2. Progress of Completion of Abandoned Steam Power Plant; 3. Others.
7	15 Juli 2016 July 15, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	Dihadiri Direksi-Direktur Pengadaan Attended by Directors - Director of Procurement	**Pembahasan Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tanjung Jati B 5&6 (Jawa 4) 2x1.000 MW;** Discussion on Power Plant Purchasing of IPP PLTU Tanjung Jati B 5 & 6 (Java 4) 2x1,000 MW;
8	27 Juli 2016 July 27, 2016	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Pembahasan Kewenangan Dewan Komisaris dalam proses Pembelian Tenaga Listrik IPP;** **2. Pembahasan Wilayah Usaha;** **3. Progres Program 35.000 MW sd TW II/2016;** **4. Lain-lain.** 1. Discussion on the Authority of the Board of Commissioners in the IPP Power Plant Purchase process; 2. Business Area Discussion; 3. 35.000 MW Program Progress up to Quarter II/2016; 4. Others.

9	24 Agustus 2016 August 24, 2016	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi terkini PLN;** **2. Pembahasan Wilayah Usaha;** **3. Penjelasan PLTU Jawa-5;** **4. Pembahasan Rencana Akuisisi Aset Chevron Geothermal Power Operation (GPO);** **5. Lain-lain.** 1. Current information of PLN; 2. Business Area Discussion; 3. Explanation of PLTU Java-5; 4. Discussion on Chevron Asset Acquisition Plan of Geothermal Power Operation (GPO); 5. Others.
10	23 September 2016 September 23, 2016	Kuorum Quorum	63%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi-Direktur Keuangan Attended by Directors - Director of Finance	**Rencana Penerbitan Global Medium Term Note (GMTN) Programme PLN Tahun 2016-2018** PLN's Global Medium Term Note (GMTN) Program Plan Year 2016-2018
11	30 September 2016 September 30 , 2016	Kuorum Quorum	88%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi terkini PLN;** **2. Upaya mengatasi derating (penurunan kapasitas) daya pembangkit di Luar Jawa;** **3. Tindak lanjut rekomendasi saran terkait hasil kunjungan kerja Dewan Komisaris;** **4. Lain-lain.** 1. Current information on PLN; 2. Efforts to overcome de-rating (decrease Capacity) of power plant outside Java; 3. Follow-up recommendations on results-related to working visit of the Board of Commissioners; 4. Others.
12	19 Oktober 2016 October 19, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Andin Hadiyanto	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi terkini;** **2. Pembahasan RKAP PT PLN (Persero) Tahun 2017;** **3. Strategi Pendanaan Operasi dan Investasi;** **4. Lain-lain.** 1. Current information; 2. Discussion on RKAP of PT PLN (Persero) Year 2017; 3. Operating and Investment Financing Strategy; 4. Others.
13	26 Oktober 2016 October 26, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	Dihadiri Direksi-Direktur Perencanaan Korporat Attended by Directors - Director of Corporate Planning	**Pembahasan Rencana Akuisisi Aset Chevron Geothermal Power Operation (GPO)** Discussion on Chevron Geothermal Power Operation (GPO) Asset Acquisition Plan

14	26 Oktober 2016 October 26, 2016	Kuorum Quorum	75%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Jarman	Dihadiri Direksi-Direktur Human Capital Management - Direktur Bisnis Regional Sumatera Attended by Directors – Director of Human Capital Management - Sumatra Business Regional Director	**Pembahasan Key Permormance Indicator (KPI) tahun 2017.** Discussion of Key Performance Indicator (KPI) in 2017.
15	23 November 2016 November 23, 2016	Kuorum Quorum	100%	Hasan Bisri, Darmono, Oegroseno, Budiman, Harry Susetyo Nugroho, Aloysius K. Ro, Jarman	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi terkini PLN;** **2. Progres pelaksanaan program 35.000 MW;** **3. Lain-lain.** 1. Current information on PLN; 2. Progress of the implementation of the 35,000 MW program; 3. Others.
16	21 Desember 2016 December 21, 2016	Kuorum Quorum	57%	Hasan Bisri, Darmono, Budiman, Harry Susetyo Nugroho	Dihadiri Direksi Attended by Directors	**1. Informasi Terkini;** **2. Persiapan RUPS RKAP 2017;** **3. Penjelasan RJP PT PLN (Persero) 2017-2021;** **4. Lain-Lain.** 1. Latest Information; 2. Preparation of GSM RKAP 2017; 3. Explanation of CPR PT PLN (Persero) 2017-2021; 4. Others.

*) Sejak 24 Mei 2016, Bpk. Kuntoro Mangkusubroto sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama
**) Sejak 14 Desember 2016, Bpk. Andin Hadiyanto sudah tidak menjabat sebagai Komisaris
*) As of May 24, 2016, Mr. Kuntoro Mangkusubroto no longer serves as Chief Commissioner
**) As of December 14, 2016, Mr. Andin Hadiyanto no longer serves as Commissioner

Hubungan Keluarga, Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Dalam rangka menjaga independensi, menghindarkan adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, PLN memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Aturan tersebut dipegang teguh, sehingga tidak terdapat hubungan keluarga di antara sesama anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Demikian juga tidak ada hubungan bisnis di antara sesama anggota Dewan

Family Relationships, Affliation Relationships Between Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

In order to maintain independency, to avoid conflict of interest and ensure accountability in decision-making and in the implementation of operational activities, PLN has a regulation that prohibits an affiliation or family relationship directly or indirectly between the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and key and/or controlling shareholders.

The rules have been, and are, adhered to, so that there are no family relationships between members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Likewise, there is no business relationship

Komisaris, sesama anggota Direksi, di antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi dengan PLN.

between members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners/Board of Directors and PLN.

Keterangan Description	**Hubungan Keluarga Dengan** Familial Relationship with						**Hubungan Afiliasi Dengan** Affiliation Relationship with					
	Dewan Komisaris BOC		**Direksi** BOD		**Pemegang Saham Pengendali** Controlling Shareholder		**Dewan Komisaris** BOC		**Direksi** BOD		**Pemegang saham Pengendali** Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris												
Hasan Bisri		√		√		√		√		√		√
Oegroseno		√		√		√		√		√		√
Darmono		√		√		√		√		√		√
Jarman		√		√		√		√		√		√
Andin Hadiyanto		√		√		√		√		√		√
Budiman		√		√		√		√		√		√
Harry Susetyo Nugroho		√		√		√		√		√		√
Aloysius K. Ro		√		√		√		√		√		√
Direksi												
Sofyan Basir		√		√		√		√		√		√
Nicke Widyawati		√		√		√		√		√		√
Supangkat Iwan Santoso		√		√		√		√		√		√
Sarwono Sudarto		√		√		√		√		√		√
Muhammad Ali		√		√		√		√		√		√
Amir Rosidin		√		√		√		√		√		√
Murtaqi Syamsuddin		√		√		√		√		√		√
Nasri Sebayang		√		√		√		√		√		√
Amin Subekti		√		√		√		√		√		√
Djoko Rahardjo Abuman		√		√		√		√		√		√
Machnizon		√		√		√		√		√		√
Haryanto WS		√		√		√		√		√		√

Informasi Pemegang Saham Utama

Seluruh saham PT PLN (Persero) atau sebesar 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Major Shareholder Information

All shares of PT PLN (Persero) or as much as 100% owned by the Indonesian government.

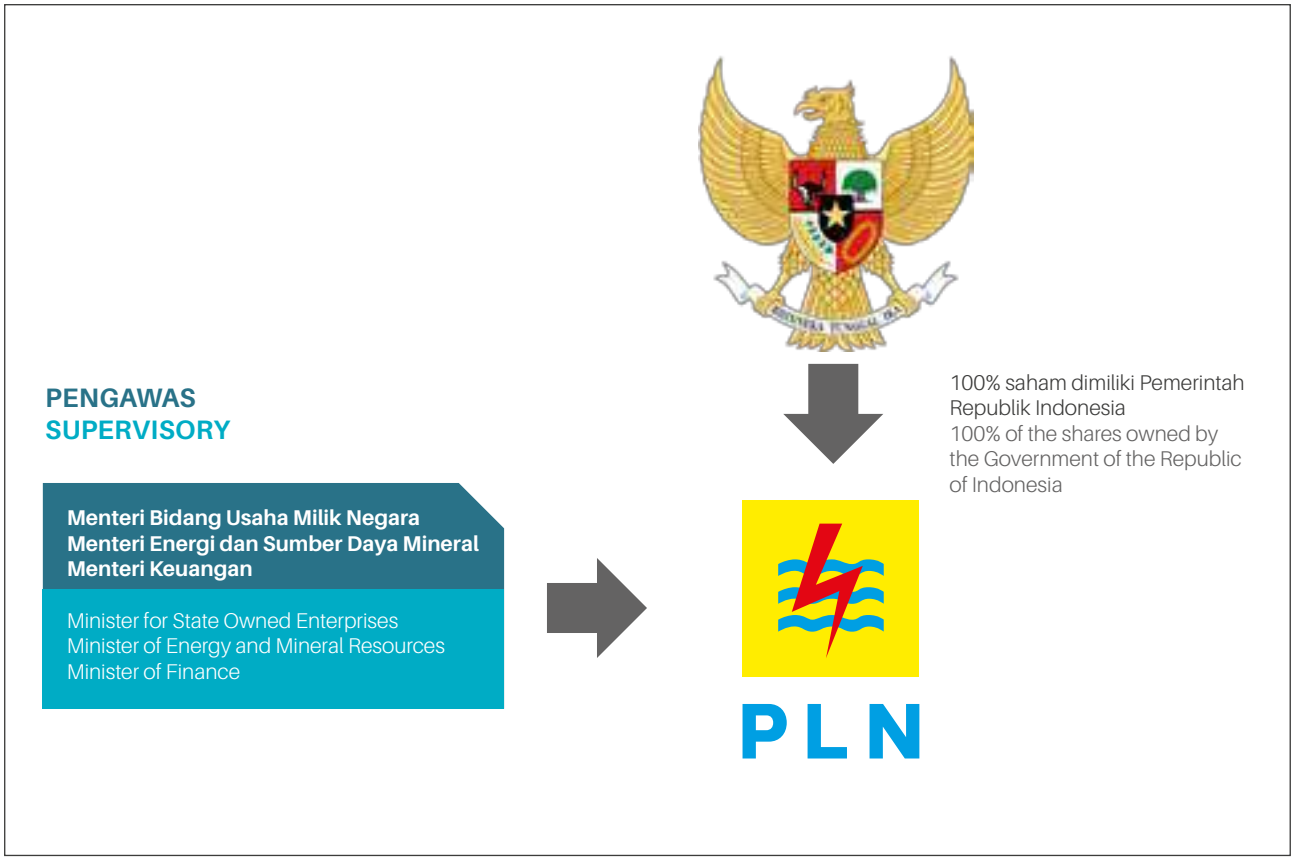

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Dewan Komisaris PLN membentuk Komite Audit (KA), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Nominasi & Remunerasi (KNR).

BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is obliged to form committees, especially the Audit Committee as a supporting function in performing supervisory tasks.

The committee consists of one or more members of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners' Committees are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

In accordance with SOE State Minister Decree No. KEP- 12/MBU/2012 dated 24 August 2012 regarding SOE Board of Commissioners'/Board of Supervisors' Supporting Organ and the SOE State Minister Decree Num. S-371/MBU/06/2015 dated June 26, 2015, PLN's Board of Commissioners PLN established the Audit Committee (AC), Risk Management Committee (RMC) and Nomination and Remuneration Committee (NRC).

KOMITE AUDIT

PLN membentuk Komite Audit guna memenuhi prinsip akuntabilitas pada perusahaan BUMN sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Piagam Komite Audit

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan termasuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap independensi dari auditor independen, di luar tanggung jawab atas isi Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

1. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN dan melakukan telaah untuk memastikan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik;
3. Melakukan telaah untuk menilai keandalan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN;
4. Melakukan telaah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) PLN;
5. Melakukan telaah atas ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan;
6. Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PLN;
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:
   - Memastikan bahwa penghapusan piutang, penghapusan persediaan dan penghapusan aktiva tidak beroperasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
   - Tugas-tugas khusus lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
9. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus;

AUDIT COMMITTEE

PLN established the Audit Committee in order to meet the principle of accountability in state-owned enterprises in accordance with the laws and regulations in Indonesia.

Audit Committee Charter

The Audit Committee's duties, responsibilities and obligations are explained in detail in the Audit Committee Charter, which is put into effect in accordance with the Board of Commissioners decision. One of the Audit Committee's main duties is to carry out oversight of the financial reporting process, including monitoring and evaluating the auditor's independence. However, this excludes the responsibility for the Financial Statement, which is the responsibility of the management.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Duties and Responsibilities of the Audit Committee are:

1. Conduct an assessment of financial information that PLN publishes, such as the Financial Statement, the Work and Budget Plan, Management Report, and other financial information;
2. Select a Public Accounting Firm to perform the audit of PLN's Financial Statement and conduct an assessment of the results to ensure the effectiveness of the audit conducted by the Public Accounting Firm;
3. Conduct an assessment of the reliability and effectiveness of PLN's Internal Control System;
4. Review the effectiveness of the internal audit and the results, held by PLN Internal Supervisory Unit;
5. Review the Company's' compliance with laws and regulations especially related to reporting to stakeholders;
6. Review complaints related to PLN;
7. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners, such as:
   - Ensure that proposals for accounts receivable removal, inventory removal, non operational Property, plant and equipment removal, and other assets removal arein accordance with the prevailing laws and regulations;
   - Other particular duties in accordance with applicable laws and regulations;
8. The Audit Committee is independent, both in its performance of duties and in reporting, and reports directly to the Board of Commissioners;
9. The Audit Committee's reporting to Board of Commissioners is conveyed in the form of theAnnual Report and reports on each particular duty assignment;

10. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai PLN, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

11. Melaksanakan *self assessment* atas efektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan melakukan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara periodik.

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen atau yang dapat bersifat independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) terdiri dari akademisi dan professional (akutansi, keuangan, teknik) yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan danaktivitasnya.

Komite Audit bersifat independen dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN;
3. Bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN;
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan PLN dan atau perusahaan afiliasi PLN;
5. Tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non audit atau jasa konsultasi pada PLN dalam sekurangnya satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN.

10. The Audit Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information on PLN,from both internal and external parties, and must ensure that their usage is only for input of performance of duties;
11. Conduct self-assessment of the effectiveness of the Audit Committee in performing its duties and periodically refine the Audit Committee's Charter.

Independency of Audit Committee Members

In accordance with the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) regulation and SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011, one of the criteria to become an Audit Committee member is being independent and free from conflict of interest in order to behave objectively in giving an opinion when facing problems.

Another matter that is emphasized to all committee members is to act professionally in performing duties and giving opinions to the Board of Commissioners.

The Audit Committee is led by an Independent Commissioner or one who is able to be independent. Meanwhile, members of the Committee (non-Commissioners) consist of academics (accounting, finance, engineering) that possess competencies and experience based on their areas of expertise or former company employees/officials who have experience and a broad knowledge associated with companies in general and their activities.

The Audit Committee acts independently based on the following criteria:

1. Does not have any family relationship due to marriage and off spring to the second degree with members of Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. Does not have any business relationship both directly and indirectly which is related to PLN's business operations;
3. Has not been a Director of PLN and/or of aPLN subsidiary of no less than one year before being appointed as a member of PLN's Audit Committee;
4. Does not hold any share in PLN's subsidiaries and/or affiliated companies both directly and indirectly;
5. Does not work for a Public Accounting Firm, Legal Consultancy or other entities that provide audit and/or non-audit services or consultation services to PLN in no less than one year prior to being appointed as a member of PLN's Audit Committee.

Susunan Anggota Komite Audit

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, komposisi Komite Audit PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

Composition of the Audit Committee

In line with the changes in the composition of the Board of Commissioners' members, the composition of the Audit Committee has also changed as follows :

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Darmono	**Ketua merangkap anggota** Chairman concurrently member
2.	Hasan Bisri	**Anggota** Member
3.	Sugeng Rochadi	**Anggota non Komisaris** Non -Commissioner Member
4.	Achmad Wahyudi	**Anggota non Komisaris** Non -Commissioner Member

Kualifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1) Memiliki integritas yang baik.
2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
3) Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/ bisnis Perseroan;
6) Bagi anggota Komite Audit, maka salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan/ keahlian bidang akuntansi
7) Berasal dari luar Perseroan

Qualifications of Audit Committee Members

Non-Commissioner Committee members selected and specified in the meeting of the Board of Commissioners, both for candidates who apply to the Board of Commissioners, as well as candidates proposed by the members of the Board of Commissioners.

Non-Commissioner Committee members should have the following qualifications:

1) Show good integrity.
2) Must not have the benefit of private relationships that may cause a negative impact and conflict of interest;
3) Have sufficient time to perform his or her duties.
4) Have the ability to communicate and coordinate effectively.
5) Have an adequate knowledge of the industry and the business of the Company;
6) Must have an educational background and expertise in accounting
7) Sourced from outside the Company

Profil Anggota Komite Audit Non Komisaris

Sugeng Rochadi, 63 tahun

Menjadi Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agutus 2013. Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun. Sugeng Rochadi diperpanjang 1 Tahun dari 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017.

Non Commissioner Audit Committee Profile

Sugeng Rochadi, 63 years old

Become a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since August 1, 2013. He is a member of the Independent Committee (Non Commissioner) because he is not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year. Sugeng Rochadi extended to 1 year from August 1, 2016 until August 1, 2017.

Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1973) dan S2 Manajemen Bisnis dan Administrasi dari Institut Teknologi Bandung (1997).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (1999-2001), Kepala Bidang Audit Operasional pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2006-2009), Anngota Komite Audit pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2010-2011), Staf Senior Bidang Teknik pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2013).

He holds a Bachelor's degree in electrical engineering from the Bandung Institute of Technology (1973) and Master's in Business Management and Administration from the Bandung Institute of Technology (1997).

In the course of his career, he served as the Head of Internal Audit of PT PLN (Persero) Distribution West Java (1999-2001), Head of the Operational Audit of Internal Control Unit of PT PLN (Persero) Head Office (2006-2009), Members of the Audit Committee of the Board Commissioner of PT PLN (Persero) (2010-2011), Senior staff in Engineering on the Secretariat of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) (2012-2013).

Achmad Wachyudi, 52 tahun

Menjadi anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2016. Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga (1986).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Konsultan di Hadori & Co, Auditor internal di Mercedez Benz Grup, dan Staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope (1986-1992), Akuntan publik, sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan(1992-2010), dan Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013).

Achmad Wachyudi, 52 years old

Become a member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since August 1, 2016. He is a member of the Independent Committee (Non Commissioner) because he is not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year. He holds a Bachelor's degree in Accounting from Airlangga University (1986).

In the course of his career, he served as Consultant in Hadori & Co, an Internal Auditor at Mercedes Benz Group, and Staff of finance and accounting at Australian mining company, New Hope (1986-1992), Public Accountant, as well as management and tax consultant (1992-2010) and Finance Director of Susi Air (2011-2013).

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2016 Komite Audit melaksanakan rapat 101 kali rapat melampaui rencana 68 kali rapat yang terdiri dari rapat yang dihadiri anggota komite unsur Komisaris sebanyak 69 kali dan rapat yang hanya dihadiri anggota komite unsur non komisaris 22 kali. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengawasan Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan.

Tabel berikut memperlihatkan kehadiran Anggota Komite Dewan Komisaris selain Komisaris dalam Rapat.

Audit Committee Meetings

In 2016, the Audit Committee conducted 101 (one hundred one] meetings, which exceeded the scheduled 68 (sixty eight) meetings. The meetings were attended 69 (sixty nine) times by Board of Commissioners members , and by non-commissioner committee members, 22 (twenty two) times. Also invited to the meeting were related parties in line with the duties and responsibilities of the Audit Committee, i.e. Internal Supervisory Unit, External Audit and Company Management.

This table shows attendances of members of Committee to the Board of Commissioners in meetings.

Anggota Members	**Jumlah Rapat** Number of Meeting	**Kehadiran** Attendance
Sugeng Rochadi	101/100	100%
Achmad Wachyudi *	42/100	41,58%

* Achmad Wachyudi Menjadi anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 1 Agustus 2016. Sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Juli 2016, rapat dihadiri oleh Aidil Yuzar.
* Achmad Wachyudi Became a member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since August 1, 2016. Since January 1, 2016 until July 31, 2016, meetings are attended by Aidil Yuzar.

Agenda/Pokok Bahasan Rapat Komite Audit Tahun 2016
Agenda/Audit Committee Meeting Highlights 2016

No	Uraian Description	Tahun 2016	
		Rencana Plan	Realisasi Realization
1.	Rapat internal Komite Audit & Staf Dewan Komisaris Internal meetings of the Audit Committee and Staff of the Board of Commissioners	12	12
2.	Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners	12	25
3.	Rapat pembahasan dengan Direktorat terkait (pembahasan RKAP, Laporan Manajemen dan permasalahan dengan masing-masing Direktorat Discussion meeting with Related Directorates (Work and Budget Plan discussion, Management Report and problems with each Directorate)	15	22
4.	Rapat dengan SPI PT PLN (Persero) Meeting with PT PLN (Persero) Internal Supervisory Unit	6	10
5.	Rapat dengan Kantor Akuntan Publik Meeting with Public Accounting Firm	8	7
6.	Mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat Following a working visit of BOC and meetings with leaders of local PLN unit	8	15
7.	Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan penghapusan atas ATTB, PRR, Aktiva Lainnya, Piutang macet lainnya yang diajukan Direksi Discussion with management to review the removal request on ATTB, PRR, Other Assets, Receivables Other bad debts filed by Directors	7	10
	Jumlah Rapat Number of Meetings	**68**	**101**

Rekapitulasi Kunjungan Kerja Komite Audit Tahun 2016

Komite Audit melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya sebanyak 11 (sebelas) kali kunjungan kerja sebagai berikut :

1. Kunjungan kerja ke PLN UIP IX (Proyek PLTMG Bangkanai), PLN UIP X (Proyek Transmisi 150 kV dan Gardu Induk) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 2016;
2. Kunjungan kerja ke kantor Area Tanjung Pinang Wilayah Riau dan ke PT PLN Batam pada tanggal 17-19 Februari 2016;
3. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah & Gorontalo di Menado dan PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), meninjau Proyek PLTU Bolok & PLTU Rote pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2016;
4. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan meninjau proyek PLTD Ni'u, PLTU Bima, PLTU Lombok/Jeranjang pada tanggal 14 sampai 17 Maret 2016;
5. Kunjungan kerja ke kantor PLN Distribusi Bali dan PT IP Unit Pembangkitan dan Jasa Pemeliharaan Bali pada tanggal 30 Maret 2016;
6. unjungan kerja ke PLTU Paiton dan PLTGU Grati pada tanggal 21-22 April 2016;
7. Kunjungan kerja ke PLTMG Rawa Minyak/Sektor Pekanbaru dan PLN Wilayah Pekanbaru pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2016;

Summary of Audit Committee Working Visits, 2016

The Audit Committee conducted working visits together with the BOC and the BOC Committees 11 (eleven) times :

1. Working visit to PLN Construction Unit IX (Bangkanai Gas Engine Power Plant Project), PLN Construction Unit X (150 kV Transmission Project and Substation) South Kalimantan and East Kalimantan on January 11, 2016;
2. Working visit to the offices of Tanjung Pinang Area at Riau region and to PT PLN Batam from 17 to19 February 2016;
3. Working visit to PLN North Sulawesi Region, Central & Gorontalo in Manado and PLN East Nusa Tenggara (NTT) Region, to review Bolok & Rote Steam Power Plant Project from14 to 18 March, 2016;
4. Working visit to PLN West Nusa Tenggara (NTB) Region and reviewed Ni'u diesel power project, Bima Steam Power Plant, Lombok/Jeranjang Steam Power Plant 14 to 17 March, 2016;
5. Working visit to the offices of PLN Bali Distribution and PT IP Unit Generation and Bali Maintenance Services on March 30, 2016;
6. Working visit to Paiton and Grati Combined Cycle Power Plant from 21 to 22 April 2016;
7. Working visit to Gas Engine Power Plant at Rawa Minyak/ Pekanbaru Sector and PLN Pekanbaru Region from May 31 to June 1, 2016;

8. Kunjungan kerja ke PLN (Persero) Wilayah Aceh dan PLTU Nagan Raya pada tanggal 2-4 Agustus 2016;
9. Kunjungan kerja ke PLN PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dan PT PLN (Persero) UIP Kalimantan pada tanggal 3-5 Agustus 2015;
10. Kunjungan kerja Proyek IPP Cirebon pada tanggal 27 September 2016;
11. Kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) Wilayah Ambon pada tanggal 20-21 Oktober 2016.

Kegiatan-Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

1. Menelaah dan memberikan tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan/rekomendasi penghapusan ATTB & PRR Komite Audit selama tahun 2016;
2. Telahaan atas Laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2015 unaudited;
3. Melakukan telaahan terhadap Laporan Manajemen 2015 audited;
4. Melakukan telaahan atas hasil rapat koordinasi antara Komite Audit dengan SPI;
5. Melakukan telaahan Laporan Manajemen triwulanan tahun 2016;
6. Melakukan telaahan atas Revisi RKAP tahun 2016;
7. Melakukan telaahan atas usulan Penunjukan KAP untuk mengaudit LK PT PLN (Persero) dan LK PKBL Tahun buku 2016;
8. Pembahasan rencana pengembangan TI PT PLN (Persero) termasuk kebijakan Teknologi Informasi Perusahaan;
9. Melakukan telaahan atas RKAP PT PLN (Persero) tahun 2017;
10. Melakukan telaahan atas rencana pengambilalihan saham (akuisisi) PLTP milik Chevron;
11 *Review* beberapa kontrak IPP;
12. Melakukan telaahan atas KPI tahun tahun 2017.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Piagam Komite Manajemen Risiko

Detail tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Manajemen Risiko dijabarkan dalam Piagam (Charter) Komite Manajemen Risiko yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Manajemen Risiko adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis Perusahaan, yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan

8. Working visit to PLN (Persero) in Aceh Region and Nagan Raya Steam Power Plant from 2 to 4 August 2016;
9. Working visit to PLN (Persero) West Kalimantan Region and PT PLN (Persero) Kalimantan Construction Unit from 3 to 5 August 2016;
10. Working visit to Cirebon IPP Project on September 27, 2016;
11. Working visit to PT PLN (Persero) Ambon Region from 20 to 21 October 2016.

Activities of The Audit Committee in 2016

1. Reviewed and provided feedback to the Board of Directors regarding the approval of request letter/ recommendations of ATTB & PRR closure of the Audit Committee during the year 2016;
2. Reviewed the Management Reports for theFourth Quarter 2015,(unaudited);
3. Conducted a review of the Management Report 2015, (audited);
4. Conducted a review of the results of a coordination meeting between the Audit Committee and Internal Supervisory Unit;
5. Conducted a review of the Quarterly Management Report, 2016;
6. Conducted a review of the Revised of 2016 Work and Budget Plan;
7. Conducted a review of the proposed appointment of the Public Accountant Firm to audit the Financial Report of PT PLN (Persero) and the CSR Financial Report for fiscal year 2016;
8. Discussed the IT development plan of PT PLN (Persero) including the Information Technology policy of the Company;
9. Conducted a review of the Work and Budget Plan of PT PLN (Persero) in 2017;
10. Conducted a review of the proposed acquisition of shares of Chevron Geothermal Power Plant;
11. Reviewed several IPP contracts;
12. Conducted a review of KPI, 2017.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee Charter

The Risk Management Committee's duties, responsibilities and obligations are explained in detail in the Risk Management Committee Charter, which is put into effect in accordance with the Board of Commissioners decision. One of the main duties of the Risk Management Committee is to serve as an independent assessor in reviewing the Company's strategic policy that the Board of Directors presents to the Board of Commissioners, which contains the results of risk

hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan; serta kegiatan lain yang masuk ke dalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* dalam Perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perusahaan;
8. Mengkaji hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional Perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Realisasi Triwulanan Komite.

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan

management analysis into the Company's activities that carry risks; and other activities under the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee are:

1. Develop the Work and Budget Plan;
2. Understand Company risk management including various risks faced by the Company;
   Company risk management strategies, system, and policies; Company internal control which covers policies, methodology, and infrastructure;
3. Conduct an evaluation of risk measurement models used by the Company and provide further recommendations for improvement;
4. Monitor various risk potencies faced by the Company;
5. Evaluate various Company risk management policies;
6. Coordinate implementation, supervision, and effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) component in the Company;
7. Measure the effectiveness of each Enterprise Risk Management (ERM) set by the Company;
8. Review the risk assessment result and other documents submitted by the Directors as a complement to the proposal of investment/funding/transaction plans and other operational activities which have a major impact on the Company as well as give a response to the Board of Commissioners regarding the Board of Directors' proposal;
9. Supervise and monitor the consistent implementation of risk mitigation in investment activities and Company operations which have a major impact;
10. Identify matters that require the Board of Commissioners' attention;
11. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the Risk Management Charter and applicable laws
12. Coordinate with the Board of Commissioners Secretary to facilitate the Committees' duties;
13. Convey the Committee's Quarter and Annual Duties Realization Report.

Independence of Risk Management Committee Members

One of the criteria to be selected as a member of the Risk Management Committee is independence and freedom from conflict of interest in order to behave objectively in

pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite adalah Komisaris Independen, sedangkan anggota Komite (non Komisaris) berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan karena anggota Komite merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya atau mantan pegawai/pejabat perusahaan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas berkaitan dengan perusahaan dan aktivitasnya.

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, komposisi Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

giving opinions in handling problems. Other criteria required by members of the committee are professional conduct in performing duties and giving opinions to the Board of Commissioners.

The Head of the Committee is the Independent Commissioner. Committee members (non-commissioners) are from outside the Company and do not have any relationship with management, ownership, as well as with Company business activities, since members of the Committee are academics who possess competency and experience based on their areas of expertiseof work or are former company employees/ officials who possess experience and a broad knowledge associated with companies in general and their activities.

Composition of Risk Management Committee

Until this Annual Report is published, the composition of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) is as follows:

No	**Nama** Name	**Jabatan** Position
1.	Oegroseno	**Ketua merangkap anggota** Chairman concurrently member
2.	Aloysius Kiik Ro	**Anggota** Member
3.	Jarman	**Anggota** Member
3.	Marlius Alrobin	**Anggota non Komisaris** Non-Commissioner Member
4.	Firman Dini	**Anggota non Komisaris** Non-Commissioner Member
5.	Bambang Purwo	**Anggota non Komisaris** Non-Commissioner Member

Kualifikasi Anggota Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1) Memiliki integritas yang baik.
2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
3) Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/ bisnis Perseroan;
6) Berasal dari luar Perseroan

Qualifications of Risk Management Committee Members

Non-Commissioner Committee Members are selected and appointed in the Board of Commissioners meeting, both from candidates who apply to the Board of Commissioners and from candidates proposed by members of the Board of Commissioners. Non Commissioner Committee members should have the following qualifications:

1) Show good integrity.
2) Must not have the benefit of a private relationship that may cause a negative impact or a conflict of interest;
3) Have sufficient time to carry out his/her duties.
4) Have the ability to communicate and coordinate well.
5) Have an adequate knowledge of the industry/business of the Company;
6) Sourced from outside the Company

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris

Marlius Alrobin, 57 tahun

Menjadi Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) sejak 1 Juni 2015. Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1986) dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1999).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat Senior Credit Recovery Bank Mandiri (Assistant Vice President) (2002-2007), Regional Recovery Manager Bank Mandiri (Vice President) (2007-2008), Special Project Officer Credit Recovery Bank Mandiri (Vice President) (2008), dan Departemen Head Corporate Risk Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015)

Bambang Purwo, 60 tahun

Menjadi Anggota Komite Audit PT PLN (Persero) sejak 31 Agutus 2015. Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Jember (1980), Notariat dari Universitas Negeri Diponegoro, Semarang (2000), dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2005).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengurusan Tanah PLN Proyek Induk Transtekstib Koreksi (1984-1988), Kepala bagian Sekretariat PT PLN Proyek Induk Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (1988-1992), Kepala Staf Adm&Keu PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan di Balikpapan (1992-1996), Kepala Staf Adm&Keu PT PLN (Persero) Pikitring Jateng di Semarang (1996-2000), Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), VP Hukum pada PT Indonesia Power (2002-2012), Konsultan pada PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015), dan Instruktur pada PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015).

Non Commissioner Risk Management Committee Profile

Marlius Alrobin, 57 years old

Become a Member of Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since June 1, 2015. He is a member of the Independent Committee (Non Commissioner) because he is not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year.

He holds a Bachelor's degree in Economics from Trisakti University (1986) and Master of Management from the University of North Sumatra (1999).

In the course of his career, he has served as the Senior Credit Recovery Bank Mandiri (Assistant Vice President) (2002-2007), Regional Recovery Manager Bank Mandiri (Vice President) (2007-2008), Special Project Officer Credit Recovery Bank Mandiri (Vice President) (2008), and Department Head of Corporate Risk Bank Mandiri (Vice President) (2008-2015)

Bambang Purwo, 60 years old

Become a Member of the Audit Committee of PT PLN (Persero) since August 31, 2015. He is a member of the Independent Committee (Non Commissioner) because he is not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year.

He holds a Law Degree from the State University of Jember (1980), Notary of the State University of Diponegoro, Semarang (2000), and a Master of Law from the University of Indonesia (2005).

In the course of his career, he served as Head of Land Management of PLN Parent Project of Transtekstib Koreksi (1984-1988), Head of the Secretariat of PT PLN Parent Project for Extra High Voltage Network (1988-1992), Chief of Staff for Administration & Finance of PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan in Balikpapan (1992-1996), Chief of Staff for Administration & Finance of PT PLN (Persero) Pikitring Central Java in Semarang (1996-2000), Performance Expert concurrently DM Officer of PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), VP Legal at PT Indonesia Power (2002-2012), Consultant at PT PLN (Persero) Construction Management Services (2013-2015), and Instructor at PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015).

Firman Dini, 59 tahun

Menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2016. Beliau merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1983).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur SDM PT Indonesia Power (2009-2013), Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013), Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014), Komisaris PT Rekadaya Elektrika (2012-2014), Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Project Avdisor pada PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014-sekarang), Aksesor BIdang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-sekarang).

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2016 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 34 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko.

Kehadiran Anggota Komite Dekom selain Komisaris 100% hadir dalam Rapat.

Firman Dini, 59 years old

Become a member of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since October 1, 2016. He is a member of the Independent Committee (non Commissioner) because he is not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year.

Holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1983).

In the course of his career, he served as Director of Human Resources of PT Indonesia Power (2009-2013), Member of the Daily Supervisory Board of the Pension Fund of PLN (2010-2013), Member of the Daily Supervisory Board STT-PLN (2012-2014), Commissioner of PT Rekadaya Elektrika (2012 -2014), President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Project Advisor in PT Multi Daya Lestari, Jakarta (2014 - present), Accessor in the field of Power Generation at PT ELESKA IATKI, Bandung (2015 - present).

Risk Management Committee Meetings

Throughout 2016 ,the Risk Management Committee held 34 (thirty four) meetings , which consisted of meetings with invited stakeholders in line with the duties and responsibilities of the Risk Management Committee.

Highlights of the Risk Management Committee Meeting, 2016

Anggota Members	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance
Marlius Alrobin	34	100%
Bambang Purwo	34	100%
Firman Dini *	10	29,41%

* Firman Dini menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero)sejak 1 Oktober 2016. Sejak 1 Januari 2016 hingga 30 September 2016, rapat dihadiri oleh Djoko Hastowo.
* Firman DIni became a member of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) since October 1, 2016. Since January 1, 2016 until September 30, 2016, meetings are attended by Djoko Hastowo.

Pokok Bahasan Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

No	Pokok Bahasan Subject
1.	Pembahasan Usulan Organisasi Discussion on Organization's Proposal
2.	Penambahan Modal Disetor dan Modal dasar Anak Perusahaan Additions to Capital, Paid-in Capital and Authorized Capital of Subsidiary
3.	Pinjaman komersial luar negeri Foreign commercial loans
4.	Skenario Pendanaan Funding scenarios

No	Pokok Bahasan Subject
5.	Kemitraan kerja sama antara KMR Dekom dengan Unit kerja Korporat yang membidangi Manajemen risiko Cooperative partnership between KMR Board of Commissioners and Corporate Work Unit in charge of Corporate Risk Management
6.	Pinjaman Langsung dengan maupun tanpa jaminan Pemerintah Direct loans with or without government guarantees
7.	Pengadaan Batubara PLTU PLN PLN Steam Power Plant procurement
8.	Tanggapan Komisaris Laporan Keuangan & Laporan Manajemen Thn 2015 Response of the Commissioners to Financial Statements and Management Report , 2015
9.	Pembelian Tenaga Listrik IPP IPP Power Purchase
10.	Pembahasan Pendanaan ECA ECA Funding Discussion
11.	Laporan Manajemen Triwulanan Tahun 2016 Quarterly Management Report, 2016
12.	Revisi RKAP Tahun 2016 Work and Budget Plan,Revised 2016
13.	Usulan RKAP 2017 Proposed 2017 Work and Budget Plan
14.	Rencana Penerbitan Global Medium Term Note Programme (GMTN) PT PLN (Persero) Issuance Plan of Global Medium Term Note Program (GMTN) PT PLN (Persero)
15.	Usulan RJP 2016-2019 Proposed 2016 – 2019 Long-term Company Plan
16.	Usulan RKAP 2017 Proposed 2017 Work and Budget Plan
17.	Rencana PLN mengakuisisi Chevron Geothermal PLNs plans to acquire Chevron Geothermal
18.	PMN State Capital Injection.
19.	Pembelian LNG LNG purchase

Kunjungan Kerja Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan kunjungan kerja ke Unit/Anak Perusahaan, sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja ke kantor Area Tanjung Pinang Wilayah Riau dan ke PT PLN Batam pada tanggal 17-19 Februari 2016;
2. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah & Gorontalo di Menado dan PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Proyek PLTU Bolok & PLTU Rote pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2016;
3. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan ke Bima meninjau proyek PLTD Ni'u, PLTU Bima, PLTU Lombok/Jeranjang pada tanggal 14 sampai 17 Maret 2016;
4. Kunjungan kerja ke kantor PLN Distribusi Bali dan PT IP Unit Pembangkitan dan Jasa Pemeliharaan Bali pada tanggal 30 Maret 2016;

Working Visits of the Risk Management Committee, 2016

Throughout 2016, the Risk Management Committee carried out working visits to Units and Subsidiaries, as follows:

1. Working visit to PLN offices in Tanjung Pinang , Riau and PT PLN Batam from17to19 February 2016;
2. Working visit to PLN North Sulawesi, Central & Manado and Gorontalo, and to PLN , East Nusa Tenggara (NTT) at Rote & Bolok Steam Power Plant from April 14 to March 18, 2016;
3. Working visit to PLN, West Nusa Tenggara (NTB) and to Bima to review Ni'u diesel power project, Bima power plant, Lombok/ Jeranjang Steam Power Plant from April 14 to March 17, 2016;
4. Working visit to the PLN Bali Distribution office and PT IP Unit Generation and Maintenance Services Bali on March 30, 2016;

5. Kunjungan kerja ke PLTU Cilacap dan PLTA Mrica pada tanggal 21-22 April 2016;
6. Kunjungan kerja ke PLTU Paiton dan PLTGU Grati pada tanggal 21-22 April 2016;
7. Kunjungan kerja ke PLTMG Rawa Minyak /Sektor Pekanbaru dan PLN Wilayah Pekanbaru pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2016;
8. Kunjungan kerja ke PLN (Persero) Wilayah Aceh dan PLTU Nagan Raya pada tanggal 2-4 Agustus 2016;
9. Kunjungan kerja ke PT PLN PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dan PT PLN (Persero) UIP Kalimantan pada tanggal 3-5 Agustus 2015;
10. Kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) Wilayah Ambon pada tanggal 20-21 Oktober 2016.

5. Working visit to Cilacap Power Plant and Mrica Hydro Power Plant from 21to 22 April 2016;
6. Working visit to Paiton Steam Power Plant and Grati Combined Cycle Power Plant from 21to-22 April 2016;
7. Working visit to Rawa Minyak/Pekanbaru Sector Gas Engine Power Plant and PLN Pekanbaru from May 31 to June 1, 2016;
8. Working visit to PLN Aceh and Nagan Raya Power Plant from 2 to 4 August 2016;
9. Working visit to PT PLN West Kalimantan and PT PLN Kalimantan Construction Unit from 3 to 5 August 2015;
10. Working visit to PT PLN Ambon from 20 to 21 October 2016.

Kegiatan Komite Manajemen Risiko Tahun 2016

Komite Manajemen Risiko telah melakukan telaahan atas permintaan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan nasehat ataupun teguran Dewan Komisaris.

Pada tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/ rekomendasi dari Direksi, yaitu:

Activities of Risk Management Committee, 2016

The Risk Management Committee conducted a review at the request of the Board of Directors to obtain the approval of the Board of Commissioners, and conducted a study on the Board of Directors that need advice from, or need to be reprimanded by, the Board of Commissioners.

In 2016, the Risk Management Committee delivered opinions on the request for approval/recommendations of the Board of Directors, as follows:

No.	Perihal Subject
1.	Usulan Penambahan Organisasi UIP Proposal of Additional Construction Unit Organization
2.	Penambahan Modal Disetor dan Modal Dasar Anak Perusahaan Addition of Authorized Capital and Paid-in Capital of Subsidiaries
4.	Rencana Pinjaman Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank (IDB) Loan Plan
7.	Pengadaan Batubara jangka panjang Untuk PLTU PT PLN (Persero) Procurement of long term for Steam Power Plant of PT PLN (Persero)
8.	Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tanjung Jati B 5&6 (Jawa-4) 2x1000MW Acquired IPP Tanjung Jati B 5 & 6 (Java-4) 2x1000MW Steam Power Plant
9.	Rencana Pinjaman Langsung Tanpa Jaminan Pemerintah Direct Unsecured Government Loans Plan
10.	Rencana Penerbitan Emisi Obligasi PLN dan/atau Sukuk Ijarah PLN Issuance Plan of PLN Bonds /or Sukuk Ijarah PLN
11.	Rencana Pinjaman dengan Bank BUMN Dalam Negeri The loan plan with the SOE Bank
12.	Penetapan Penggunaan Dana Penambahan PMN Tahun 2016 Determination for Use of Additional Funds for State Capital Injection. in 2016
13.	Rencana Penerbitan Global Medium Term Note (GMTN) Programme PLN Tahun 2016-2018 Issuance Plan of Global Medium Term Note (GMTN) PLN Program Year 2016 - 2018
14.	Rencana Akuisisi Chevron Geothermal Power Operation (GPO) dan Pendanaannya Acquisition Plan for Chevron Geothermal Power Operation (GPO) and Funding

No.	Perihal Subject
15.	Penetapan Penggunaan Dana Penambahan PMN Tahun 2016 Determination for Use of Additional Funds of State Capital Injection. in 2016
16.	Perjanjian Kredit dengan Kreditur Dalam Negeri Credit Agreement with Domestic Creditors

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap proses penetapan nominasi dan remunerasi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) secara benar;
2. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
7. Membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The criteria to become a member of the Nomination and Remuneration Committee are independency and being free from conflicts of interest, allowing members to act objectively when providing opinions on determining nominations and remuneration. All committee members are also encouraged to act professionally in carrying out their duties and in providing advice to the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are:

1. Review and monitor to ensure that the Board of Directors has set the Nomination and Remuneration variables of PLN correctly;
2. Review and monitor to ensure the Board of Directors has performed recruitment, career development, nomination and remuneration in accordance with the ratified provisions;
3. Assist in formulating the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors' salary and honorarium, allowances, and facilities that are fixed as well as incentives and tantiem (bonus), which are variable;
4. Identify matters that need the Board of Commissioners' attention and other duties of other Boards of Commissioners;
5. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners;
6. Coordinate with the Board of Commissioners Secretary to facilitate the Committees' duties;
7. Make reports in accordance with their sectors according to applicable regulations.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of Nomination and Remuneration Committee

No	Nama Name	Jabatan Position
1.	Budiman	**Ketua merangkap anggota** Chairman concurrently member
2.	Harry Susetyo Nugroho	**Anggota** Member
3.	Okto Rinaldi	**Anggota** Member
4.	Murniati	**Anggota** Member

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
3. Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
4. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/ bisnis Perseroan;
6. Salah seorang anggota Komite berasal dari manajemen PLN yang menagani SDM.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Non Komisaris

Okto Rinaldi, 53 tahun

Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 24 Maret 2016. Merupakan anggota Komite (non Komisaris) yang merupakan juga pegawai PT PLN (Persero) sebagai Kepala Divisi Talenta PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIEI dan Magister Manajemen dari Universitas Syiah Kuala (2001)

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM pada Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2013-2014), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan(Corporate University) (2014-2015), General Manajer Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University) pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (Corporate University) (2015-2016), dan Kepala Divisi Pengembangan Talenta pada Direktorat Human Capital Management (2016-sekarang)

Qualifications of Nomination and Remuneration Committee

Non-Commissioner Committee members are selected and appointed in the Board of Commissioners meeting, both from candidates who apply to the Board of Commissioners and from candidates proposed by members of the Board of Commissioners.

Non Commissioner Committee members should have the following qualifications:

1. Show good integrity;
2. Must not have the benefit of private relationships that may cause a negative impact or a conflict of interest;
3. Have sufficient time to carry out his/her duties;
4. Have the ability to communicate and coordinate well;
5 Have an adequate knowledge of the industry and the business of the Company;
6. Sourced from outside the Company.

Non Commissioner Risk Management Committee Profile

Okto Rinaldi, 53 years old

Become a Member of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) since March 24, 2016. He is a member of the Committee (non Commissioner) who is also an employee of PT PLN (Persero) as Head of Talent Division of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year.

He holds a Bachelor's in Economics from STIEI and a Master's in Management from the University of Syiah Kuala (2001)

In the course of his career, he served as Senior Manager of HR Performance Management in Human Resource System Development Division of PT PLN (Persero) Head Office (2013-2014), Head of Education and Training (Corporate University) of PT PLN (Persero) Education and Training Center (Corporate University) (2014-2015), General Manager of the Center for Education and Training (Corporate University) on the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) Head Office (Corporate University) (2015-2016), and Head of Talent Development Division in the Directorate of Human Capital Management (2016 - present)

Murniati, 61 tahun
Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober 2015. Beliau merupakan anggota Komite (Non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai PT PLN (Persero).

Masa jabatan Seluruh anggota Komite adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali 1 tahun.

Meraih gelar Sarjana Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional (1993).

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Ahli Analisa Investasi pada Direktorat Perencanaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2000-2009), Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2009-2011), dan Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) (2012-2015),

Murniati, 61 years old
Become a Member of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) since October 1, 2015. She is a member of the Independent Committee (Non Commissioner) because she not an employee of PT PLN (Persero).

The term of office for All members of the Committee is three years and can be extended up to 2 times for 1 year.

He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the National Technical High School (1993).

Previously, he served as Investment Analysis Expert at the Directorate of Planning of PT PLN (Persero) Head Office (2000-2009), Senior Manager of Investor Relations and Corporate Governance on Corporate Secretary of PT PLN (Persero) Head Office (2009-2011), and Senior staff of Public Affairs at the Secretariat of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) (2012-2015).

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran

Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali dengan agenda membahas mengenai usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN, Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan, usulan calon anggota Komite Non Komisaris, calon Sekretaris Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Throughout 2016 the Nomination and Remuneration Committee held 13 (thirteen), with an agenda to discuss the proposed remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN, the Directors and Commissioners of the subsidiaries, the proposed candidates for members of the Non Commissioner Committee and candidates for the Secretary to the Board of Commissioners.

Komite Audit

Tabel berikut memperlihatkan kehadiran Anggota Komite Dewan Komisaris selain Komisaris dalam Rapat.

Audit Committee

This table shows attendances of members of Committee to the Board of Commissioners in meetings.

Anggota Members	**Jumlah Rapat** Nimber of Meeting	**Kehadiran** Attendance
Okto Rinaldi *	8	61,54%
Murniati	13	100%

*Okto Rinaldi menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) sejak 24 Maret 2016. Sejak 1 Januari 2016 hingga 23 Maret 2016, rapat dihadiri oleh Suharto.
*Okto Rinaldi became a Member of Nomination and Remuneration Committee of PT PLN (Persero) since March 24, 2016. Since January 1, 2016 until March 23, 2016, meetings are attended by Suharto.

Pokok Bahasan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016

1. Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
2. Calon Direksi Anak Perusahaan;
3. Calon Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero);
4. Usulan tantiem dan gaji Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Pergantian anggota KNR yang berasal dari manajerial PLN.

Topics of the Nomination and Remuneration Committee Meeting, 2016

1. Candidates for the Board of Commissioners of Subsidiaries;
2. Candidates for the Board of Directors of Subsidiaries;
3. Candidate for Corporate Secretary of PT PLN (Persero);
4. Proposed bonuses and salaries of the Directors and Board of Commissioners;
5. Substitution of KNR members who are sourced from PLN management.

Kunjungan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite telah melaksanakan kunjungan kerja ke Unit bersama Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sejumlah 8 kali kunjungan kerja.

Daftar Kunjungan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Kunjungan kerja ke kantor Area Tanjung Pinang Wilayah Riau dan ke PT PLN Batam pada tanggal 17-19 Februari 2016;
2. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah & Gorontalo di Menado dan PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), meninjau Proyek PLTU Bolok & PLTU Rote pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2016;
3. Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), meninjau proyek PLTD Ni'u, PLTU Bima, PLTU Lombok/Jeranjang pada tanggal 14 sampai 17 Maret 2016;
4. Kunjungan kerja ke kantor PLN Distribusi Bali dan PT IP Unit Pembangkitan dan Jasa Pemeliharaan Bali pada tanggal 30 Maret 2016 bersamaan menghadiri *Expand Leadership Progam for BoD/BoC* oleh CLDI di Denpasar Bali;
5. Kunjungan kerja ke PLTU Merica, PLTU Adipala, IPP PLTU S2P pada tanggal 21 sd 22 April 2016;
6. Kunjungan kerja ke PLTU Paiton dan PLTGU Grati pada tanggal 21-22 April 2016;
7. Kunjungan kerja ke PLTMG Rawa Minyak/Sektor Pekanbaru dan PLN Wilayah Pekanbaru pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2016;
8. Kunjungan kerja ke PLN PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat dan PT PLN (Persero) UIP Kalimantan pada tanggal 3-5 Agustus 2015.

Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2016

Komite telah menerbitkan telaahan persetujuan anak perusahaan PLN, anggota Komite Dewan Komisaris, laporan kunjungan kerja dan kesekretariatan, sebagai berikut :

1. Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
2. Calon Direksi Anak Perusahaan;
3. Calon Anggota KMR;
4. Kenaikan Honorarium/Tunjangan Harian/ Staf Sekretariat/ Bantuan Transport Pengemudi Komisaris;
5. Laporan Kunjungan Kerja;
6. Laporan Kegiatan KNR 2015 dan Rencana Kerja serta KPI KNR Tahun 2016;

Working Visit of the Nomination and Remuneration Committee

The Committee carried out 8 (eight) working visit to Units together with the Audit Committee and Risk Management Committee.

NRC Working Visits , 2016, are as follows:

1. Working visit to Tanjung Pinang , Riau office and PT PLN Batam from 17to19 February 2016;
2. Working visit to PLN ,North Sulawesi, Central & Manado and Gorontalo, to PLN , East Nusa Tenggara (NTT) at Rote & Bolok Steam Power Plant from April 14 to March 18, 2016;
3. Working visit to PLN West Nusa Tenggara (NTB) and to Bima to review Ni'u diesel power project, Bima power plant, Lombok/Jeranjang power plant from April 14 to March 17, 2016;
4. Working visit to the PLN Bali Distribution office and PT IP Unit Generation and Maintenance Services Bali on March 30, 2016 and simultaneously attended Expand Leadership Program for BOD/BOC by CLDI in Denpasar, Bali;
5. Working visit to Mrica Steam Power Plant, Adipala Steam Power Plant, IPP Steam Power Plant S2P from 21to22 April 2016;
6. Working visit to Paiton Power Plan and Grati Combined Cycle Power Plant from 21 to 22 April 2016;
7. Working visit to Rawa Minyak/Pekanbaru Sector Gas Engine Power Plant and PLN Pekanbaru from May 31 to June 1, 2016;
8. Working visit to PT PLN , West Kalimantan and PT PLN Kalimantan Construction Unit from 3 to 5 August 2015.

Nomination and Remuneration Committee's activities, 2016

The Committee published a review of the PLN subsidiary agreement, of members of the Committees of the Board of Commissioners, on visit reports and secretarial work, as follows:

1. Candidates for the Board of Commissioners of Subsidiaries;
2. Candidates for the Board of Directors of Subsidiaries;
3. Candidate for Nomination and Remuneration Committee Membership;
4. Increased Honorarium/Daily Benefits/Secretariat Staff/ Transport Driver Assistance for Commissioners ;
5. Working Visit Report;
6. Activity Report of Nomination and Remuneration Committee 2015 and Work Plan, as well as KPI Nomination and Remuneration Committee 2016;

7. Calon Anggota KNR Non Komisaris;
8. Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI KNR Triwulan II tahun 2016;
9. Rencana Kerja dan KPI KNR 2017;
10. Calon anggota KMR Non Komisaris Bidang Teknik;
11. Calon Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).

Pernyataan Adanya Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 menyebutkan bahwa perusahaan publik wajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dan berdasarkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) dengan surat Nomor: S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 24/SK/DK-PLN/2015 tanggal 28 Juli 2015.

Salah satu tugas utama Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan, serta memberi nasihat kepada Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Rincian tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan dalam Piagam (Charter) Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Adapun isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

Kebijakan Suksesi Direksi

Penjelasan lengkap tentang kebijakan kebijakan suksesi Direksi ada di Bab Direksi pada laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, PLN telah membentuk komite di bawah Direksi yang beranggotakan Direktur-Direktur. Komite Direktur dibagi menjadi 8 Komite, dengan ruang lingkup Komite dan keanggotaan Direktur sebagai berikut:

7. Candidates for Nomination and Remuneration Committee Non Commissioner;
8. Activity Reports and Nomination and Remuneration Committee KPI Realization for Second Quarter 2016;
9. Work Plan and 2017 Nomination and Remuneration Committee KPI;
10. Candidates for Non- Nomination and Remuneration Committee Commissioner for Engineering;
11. Candidate for Corporate Secretary of PT PLN (Persero).

Statement regarding the Charter for Nomination and Remuneration Committee

In accordance with Financial Services Authority Regulation number 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, a public company shall have a nomination and remuneration function performed by the Board of Commissioners. In compliance with the regulation, and based on the approval of the Minister of SOE as the GMS of PT PLN (Persero) in its Letter number : S-371/MBU/06/2015 dated June 26, 2015, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) established a Nomination and Remuneration Committee by virtue of Decree of the Board of Commissioners number: 24/SK/DK-PLN/2015 dated July 28, 2015.

One of the primary duties of the Nomination and Remuneration Committee is to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties and advicing the Board of Directors, in particular to ensure that the nomination and remuneration system/policies have been implemented in accordance with prevailing laws and regulations, in conformity with good corporate governance principles, and in adherence with the prudent pronciple.

Details of the duties, responsibilities and obligations of the Nomination and Remuneration Committee are outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter enacted by decision of the Board of Commissioners. The contents of the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT PLN (Persero) are as follow:

Succession Policy of Directors

A full description of the succession policies of Directors is in the Chapter of Board of Directors on Good Corporate Governance Implementation Report.

BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

In order to support effectiveness in performing operational duties and responsibilities, PLN has formed committees under the Board of Directors comprising Directors as members. The Board of Directors Committees comprise 8 Committees, with the scope of each Committee and Director's membership as follows:

Komite Direktur Committee Director	Ruang Lingkup Pembahasan Scope of Discussion	Keanggotaan Direktur Membership of Director
Komite IPP dan Kerja sama Kemitraan IPP Committee and Partnership Cooperation	Pembelian Tenaga Listrik dari IPP, *Excess Power,* Kemitraan dan Kerja sama Komersial lainnya Purchasing Power Plant from IPP, Excess Power, Partnership and other Commercial Cooperation	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Perencanaan Korporat** **3. Direktur Pengadaan** **4. Direktur Keuangan** **5. Direktur Regional terkait** 1. President Director 2. The Director of Corporate Planning 3. The Director of Procurement 4. The Director of Finance 5. The Director of Related Regions
Komite energi Primer Primary energy committee	Pengadaan Gas, Batubara, BBM, Uap Panas Bumi dan Air Procurement of Gas, Coal, Fuel, Geothermal and Hydro	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Perencanaan Korporat** **3. Direktur Pengadaan** **4. Direktur Keuangan** **5. Direktur Regional terkait** 1. President Director 2. The Director of Corporate Planning 3. The Director of Procurement 4. The Director of Finance 5. The Director of Related Regions
Komite Investasi dan Pendanaan Investment and Financing Committee	Proyek Pembangkit Baru, Pembangkit *Existing, Repowering, Refurbishment* dan Konversi New Generation Project, Existing Power Plant, Repowering, Refurbishment and Conversion	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Perencanaan Korporat** **3. Direktur Pengadaan** **4. Direktur Keuangan** **5. Direktur Regional terkait** 1. President Director 2. The Director of Corporate Planning 3. The Director of Procurement 4. The Director of Finance 5. The Director of Related Region
Komite Niaga Commerce Committee	Mekanisme dan Aspek Komersial Transaksi Tenaga Listrik Khusus, Tarif Tenaga Listrik, Subsidi serta Aspek Komersial Lainnya Mechanisms and Commercial Aspects Electric Power Special Transactions, Electric Power Rates, Subsidies and Other Commercial Aspects	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Perencanaan Korporat** **3. Direktur Keuangan** **4. Direktur Regional terkait** 1. President Director 2. The Director of Corporate Planning 3. The Director of Finance 4. The Director of Related Region
Komite SDM dan Organisasi Human Resources and Organization Committee	Sistem SDM, Remunerasi, Suksesi Manajerial Unit Bisnis dan AP/Afiliasi, Perubahan Organisasi, Pengembangan/ Penyederhanaan Organisasi HR System, Remuneration and Succession Managerial Business Unit of Subsidiary/ Affiliates, Organizational Changes, Development / Organizational Simplification	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Human Capital Management** **3. Direktur Keuangan** **4. Direktur Regional terkait Direktur** 1. President Director 2. Director of Human Capital Management 3. The Director of Finance 4. The Director of Related Region

Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi	Pembentukan AP, Akuisisi Perusahaan menjadi AP, Penyertaan atau Pelepasan Modal pada AP/ Afiliasi, Penggabungan, Pemisahan, Peleburan dan Pembubaran AP/Afiliasi, Pembentukan Yayasan, Pembebanan Biaya Perseroan yang bersifat tetap untuk Yayasan/Organisasi Perkumpulan.	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Perencanaan Korporat** **3. Direktur Human Capital Management** **4. Direktur Keuangan** **5. Direktur Regional terkait**
Subsidiaries and Affiliates Committee	Subsidiaries formation, Company Acquisitions into Subsidiaries, Subscription or Waiver Capital of Subsidiaries / Affiliates, Merger, Separation, Dissolution and Liquidation of Subsidiaries / Affiliates, Formation of Foundation, Charging the Company that are fixed to the Foundation / Organization Society.	1. President Director 2. The Director of Corporate Planning 3. Director of Human Capital Management 4. The Director of Finance 5. The Director of Related Region
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset	Penghapusan ATTB, PRR, Piutang Macet, Persediaan atau Material, Pelepasan dan Penghapusan Aktiva Tetap (kecuali Aktiva Beroperasi) dengan Umur Ekonomis s/d 5 tahun.	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Keuangan** **3. Direktur Human Capital Management** **4. Direktur Regional terkait**
Committee on the Elimination and Disposal of Assets	Elimination of ATTB, PRR, Loss Accounts Receivable, Inventory or Materials, Discharge and Elimination of Fixed Assets (except Operating Assets) with Economical Age up to 5 years.	1. President Director 2. The Director of Finance 3. Director of Human Capital Management 4. The Director of Related Region
Komite Operasional	Sewa Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Sistem Grid Code dan Sistem Operasional Tenaga Listrik Lainnya.	**1. Direktur Utama** **2. Direktur Keuangan** **3. Direktur Perencanaan Korporat** **4. Direktur Regional terkait**
Operating Committee	Lease Power Plant, Transmission, Distribution, System Grid Code and Other Electricity Operating Systems.	1. President Director 2. The Director of Finance 3. The Director of Human Capital Management 4. The Director of Related Region

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Djoko Hastowo sejak 1 Oktober 2015. Sebelum menjadi Sekretaris Dewan Komisaris, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Power (2009 –2014), Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta pada PLN kantor Pusat (2009), General Manager PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008 - 2009), Deputi Direktur Pembinaan Transmisi pada PT PLN (Persero) kantor Pusat (2004 - 2008), Manajer Bidang Teknik pada PLN P3B (2001-2004) dan Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Penyaluran PLN P3B (1996-2001).

BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

In order to ensure that the Board of Commissioners performs its duties smoothly, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary appointed by the Board of Commissioners and paid by the Company.

TheBoard of Commissioners' Secretary provides administrative and secretarial support for the Board of Commissioners in order to facilitate them in performing duties.

Profile of the Board of Commissioners' Secretary

Djoko Hastowo has served as Secretary to the Board of Commissioners since 1 October 2015. He is also currently listed as a member of the Risk Management Committee. Before becoming Secretary to the Board of Commissioners, he served as President Director of PT Indonesia Power (2009 - 2014), Deputy Director of Human Resources and Talent Development at PLN Head Office (2009), General Manager of PLN Construction Management Services (2008-2009), Deputy Director of Transmission at PLN Head Office (2004-2008), Manager of Engineering at PLN P3B (2001-2004) and Head of Operations and Maintenance at PLN P3B Distribution Division (1996-2001).

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB Bandung (1979)

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/ informasi lainnya mengenai Perusahaan.
3. Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Memfasilitasi kegiatan Dewan Komisaris.
6. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya
   d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
   e. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris
   f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris
2. Melaksanakan tugas, yaitu:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG
   b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris
   c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris
   d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

He holds a Bachelor Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1979).

Duties of the Board of Commissioners' Secretary

TheBoard of Commissioners' Secretary performs the following duties:

1. Conducts secretarial activities within the Board of Commissioners' scope.
2. Coordinates information required by the Board of Commissioners, such as routine reports from the Board of Directors (Monthly Report, Quarterly Report, Annual Report, Internal Supervisory Unit Reports) as well as other reports or information about the Company;
3. Finalizes reports which are the obligations of theBoard of Commissioners, such as the Board of Commissioner Supervision Report;
4. Conducts Board of Commissioners meetings, prepares and sends invitations, submits meeting materials, draws up theMinutes of the Meeting, as well as other related tasks;
5. Facilitates the Board of Commissioners' activities;
6. Administers the Minutes of the Meeting and other Board of Commissioners' documents as well as delivering meeting decisions to related parties.

Activities of the Board of Commissioners' Secretary

The duties of the Board of Commissioners' Secretary is to assist the Board of Commissioners as follows:

1. Conducting activities to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties, namely:
   a. Prepare for the BOC meeting, including materials such as brief sheets
   b. Keep a record of the minutes of board meetings in accordance with the Company's Articles of Association
   c. Administer BOC documents, such as incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings and other documents
   d. Draft the Work and Budget Plan of the BOC
   e. Draft the BOC reports
   f. Carry out other duties of the Board of Commissioners
2. Perform tasks, as follows:
   a. Ensure that the BOC complies with legislation and implements the principles of good corporate governance
   b. Provide all information required by the Board of Commissioners
   c. Coordinate committee members, if necessary, in order to facilitate the tasks of the Board of Commissioners
   d. Act as a liaison officer between the BOC and other parties.

3. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Penyelenggaraan Tugas

Sesuai dengan tugasnya, maka kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris tahun 2016, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat lainnya sejumlah 64 kali rapat.
2. Membuat dan mengelola risalah rapat Dewan Komisaris sejumlah 55 risalah.
3. Membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 2014.
4. Membuat Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris 2016.
5. Mengadministrasikan surat-surat yang masuk atau ditujukan kepada Dewan Komisaris sejumlah 855 surat, dan surat-surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris baik sebagai jawaban dari surat masuk, mau pun dalam jenis surat lainnya sejumlah 269 surat.
6. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dengan jumlah yang dikunjungi sebanyak 27 Unit/Proyek PLN/ Anak Perusahaan.
7. Menyelenggarakan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke luarnegeri sebanyak 2 kali.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bambang Dwiyanto sejak November 2016.

Karir sebelumnya, yaitu menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan Sejak Februari 2016-November 2016. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau pernah menjabat sebagai Manajer Senior Stakeholder Management pada Juni 2015 – November 2016, sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Senior Komunikasi Korporat pada Maret 2010 – Juni 2015 serta berbagai jabatan Manajerial lain di Bidang Komunikasi dan SDM di Kantor Pusat, PLN Wilayah Lampung dan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1990.

Dasar Penunjukan

Kebijakan Regulator yang dijadikan sebagai acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan oleh PLN antara lain:

1. Keputusan Ketua Bapepam IX.I.4 No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

3. Ensure the BOC activities documents are filed and stored properly in the Company.

Duty Implementation

In accordance with designated duties, the activities of the Board of Commissioners' Secretary in 2016, were as follows:

1. Held 64 (sixty four) BOC and other meetings.
2. Drew up and managed 55 (fifty five) Minutes of Meetings for the Board of Commissioners.
3. Compiled the 2014 Board of Commissioners Supervisory Report.
4. Compiled the 2016 Work Plan and Board of Commissioners KPI
5. Administered incoming mail addressed to the Board of Commissioners, totaling about 855 (eight hundred fifty five)items, and issued outgoing response mail totaling 269 (two hundred sixty nine) letters.
6. Organized 12 (twelve) Board of Commissioners and Board of Commissioners' Committee work visit to 27 (twenty seven) locations of PLN Units/Projects/Subsidiaries.
7. Organized 2 (two)Board of Commissioners work visit abroad

CORPORATE SECRETARY

Profile of Corporate Secretary

Bambang Dwiyanto has held the position as the Corporate Secretary since November 2016.

In his previous position, he was the Acting Corporate Secretary from February 2016 to November 2016. Prior to serving as Corporate Secretary, he served as Senior Manager of Stakeholder Management from June 2015 to November 2016, and previously served as the Senior Manager of Corporate Communications from March 2010 - June 2015, as well as holding various other managerial positions in the field of Communications and HR at the Head Office, PLN Lampung and Jakarta and Tangerang Distribution.

He holds a Bachelor Degree in Communication Studies from the University of Gajah Mada, 1990.

Bases of Selection

Regulations that are in place and used by PLN as guidelines in establishing the Corporate Secretary are:

1. Chairman of Capital Market Supervisory Agency Decree No. Kep-63/PM/1996 on Corporate Secretary Establishment.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35./POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprises, which was amended with PER- 09/MBU/2012.
3. Regulation of theFinancial Services Authority (FSA) No. 35. /POJK.04 / 2014 on Corporate Secretary for Public Listed Companies.

Tugas Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi hubungan dengan investor, menyediakan informasi pasar modal, dan memastikan perusahaan memenuhi ketentuan regulasi pasar modal;
2. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), memastikan perusahaan memiliki perangkat dan pedoman GCG, dan melakukan pemantauan dan implementasi GCG;

Corporate Secretary's Duties

TheBoard of Directors appoint 1 (one) Corporate Secretary with following duties:

1. Ensure planning, implementation and evaluation of policies and investor relations strategy, provide stock market information, and ensure that the Company complies with capital market regulations;
2. Ensure the planning, implementation and evaluation of policies and strategies for the management of good corporate governance (GCG), ensure the Company has the tools and guidelines for good corporate governance, and monitor and implement GCG;

3. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesekretariatan perusahaan, termasuk didalamnya protokoler dan integrasi kegiatan Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan stakeholder lainnya;
4. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kebilakan dan strategi pengelolaan hubungan kelembagaan, termasuk didalamnya hubungan dengan lembaga-lembaga Negara, dan hubungan dengan pembuat kebijakan ketenagalistrikan;
5. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, melalui tetapi tidak terbatas pada media elektronik, media cetak dan media audio visual;
6. Memastikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi dan Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, Statistik Perusahaan, dan Laporan Perusahaan lainnya.

3. Ensure the planning, implementation and evaluation of policies and strategies for Company secretarial management, including protocol and integration activities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders (AGM) and other stakeholders;
4. Ensure the planning, implementation and evaluation of policy and management strategies on institutional relationships, including relationships with state institutions, and the relationship with electricity policy makers;
5. Ensure the planning, implementation and evaluation of the availability of corporate information that can be accessed by stakeholders, through ,but not limited to ,electronic media, print media and audio-visual media;
6. Ensure the planning, implementation and evaluation of the availability of information and the Management Report, Annual Reports, Company Statistics, and other Company reports.

Sekretaris Perusahaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

The Corporate Secretary is held accountable for the execution of his or her duties to the Board of Directors.

Uraian Pelaksanaan Tugas

Resume Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Company Secretary Administered Tasks Description

Company Secretary Activities Resume

KEGIATAN ACTIVITY	**JUMLAH** NUMBER
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	**2 kali** 2 times
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) General Meeting of Bondholders (RUPO)	**- kali** - times
Analyst Gathering Analysts Gathering	**1 kali** 1 times
Academic Visit Academic Visit	**1 kali** 1 times
Analyst Update & Analyst Meeting Analyst Update & Analyst Meeting	**5 kali** 5 times
Road show Road show	**- kali** - times
Press Release Press Release	**222 kali** 222 times
Press Briefing Press Briefing	**2 kali** 2 times
Site Visit/Press Tour/Media Gathering/Safari Jurnalistik Site Visit / Press Tour / Media Gathering / Safari Journalism	**16 kali** 16 times
Press Conference Press conference	**3 kali** 3 times
Forum Redaktur Editor Forum	**4 kali** 4 times

Dalam rangka keterbukaan informasi, PT PLN (Persero) juga menyampaikan berbagai informasi terkait operasional perusahaan kepada Bapepam-LK maupun melalui Siaran Pers, diantaranya mencakup:

In the framework of information disclosure, PT PLN (Persero) also deliver s a variety of information related to the Company's operations to Financial Services Authority and through Press Releases, among others, these include:

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
Januari January		
1	07 Januari 2016 January 7, 2016	**Harga Uap PLTP Kamojang 1, 2, 3 Mahal, PLN Dukung Penggunaan EBT** Geothermal Power Plant Steam Price at Kamojang 1, 2, 3 Expensive, PLN Supported the Use of EBT
2	10 Januari 2016 January 10, 2016	**PLN Berhasil Selesaikan PLTMG Rawa Minyak (25 MW)** PLN Successfully Completed Rawa Minyak Gas Engine Power Plant (25 MW)
3	10 Januari 2016 January 10, 2016	**PLN Berhasil Dirikan Tower Emergency** PLN Successfully Established Tower Emergency
4	11 Januari 2016 January 11, 2016	**PLN Bekerja Cepat Pulihkan Pasokan listrik** PLN Works Fast to Restore Power Supplies
5	12 Januari 2016 January 12, 2016	**Tower Emergency Padang Berhasil Beroperasi** Tower Emergency Padang Successfully in Operation
6	15 Januari 2016 January 15, 2016	**PLTG Gorontalo Siap Beroperasi** Gorontalo Gas Turbine Power Plant is Ready to Operate
7	16 Januari 2016 January 16, 2016	**Pembangkit Pertama 35.000 MW Perkuat Sistem Kelistrikan Sulutgo** The first power plant of 35,000 MW Strengthens Sulutgo Electrical System
8	16 Januari 2016 January 16, 2016	**PLTG Gorontalo Beroperasi. 2 Mesin Turbim TM 2500+ Tambah Pasokan Listrik** Gorontalo Gas Turbine Power Plant operates. 2 Turbim TM 2500+ Machines Added Electricity Supply
9	17 Januari 2016 January 17, 2016	**Kapal Listrik Terapung, Solusi Defisit Listrik** Floating Electric Boat, Electricity Deficit Solution
10	17 Januari 2016 January 17, 2016	**Kebakaran Pabrik Kayu Sebabkan Putusnya Kabel SUTT Belawan - Binjai** Wood Factory Fire Caused Loss of SUTT Cable at Belawan - Binjai
11	18 Januari 2016 January 18, 2016	**PLN Cocokkan Data 4 Juta Rumah Tangga Daya 900 VA** PLN Matched 4 Million Households Data of 900 VA Power
12	19 Januari 2016 January 19, 2016	**Kapal Pembangkit Berhasil Masuk Sistem Sulutgo** Generator Boats Successfully Entered Sulutgo Systems
13	22 Januari 2016 January 22, 2016	**PLN Operasikan GI Trafo Mobile untuk Lhokseumawe** PLN Operated GI Trafo Mobile to Lhokseumawe
14	24 Januari 2016 January 24, 2016	**SUTET Adipala Tambah 2.400 MW Sistem Kelistrikan Jawa Bali** SUTET Adipala Added 2.400 MW Electrical System in Java Bali
15	27 Januari 2016 January 27, 2016	**Kapal Pembangkit Listrik MVPP Zeynep Sultan Resmi COD (Commercial Operation Date)** MVPP Zeynep Sultan was Officially COD (Commercial Operation Date)
Februari February		
1	01 Februari 2016 February 1, 2016	**Tarif Tenaga Listrik Turun Lagi** Electricity Rates Down Again
2	08 Februari 2016 February 8, 2016	**PLN Amankan Kelistrikan Saat Banjir di Bangka** PLN Secured Electricity During Flooding in Bangka
3	08 Februari 2016 February 8, 2016	**PLTMG Bangkanai Dongkrak Pembangunan Ekonomi Kalselteng** Bangkanai Gas Engine Power Plant Boosts Economic Development of South and Central Kalimantan
4	10 Februari 2016 February 10, 2016	**PLN Pulihkan Pasokan Listrik Daerah Banjir serta Dirikan Posko Banjir** PLN Restores Electricity Supply At Flooded Areas and Establishes Flood Command Post
5	10 Februari 2016 February 10, 2016	**GI 150 KV Pagar Alam Siap Layani Permintaan Pelanggan Baru** GI 150 KV Pagar Alam Ready to Serve New Customers Demand
6	10 Februari 2016 February 10, 2016	**Pemanfaatan Mikro Hidro Untuk Sistem Ruteng** Utilization of Micro Hydro for System for Ruteng System

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
7	11 Februari 2016 February 11, 2016	**PLTP Ulumbu Tambah Pasokan Ruteng PLN Dukung Energi Baru Terbarukan** Ulumbu Geothermal Power Plant Added Supply to PLN Ruteng Supports Renewable Energy
8	14 Februari 2016 February 14, 2016	**Dorong Pertumbuhan Industri Dan Bisnis, PLN Perkuat Pasokan Listrik Jawa Bali** To Encourage Growth of Industry and Business, PLN Strengthens Power Supply in Jawa Bali
9	15 Februari 2016 February 15, 2016	**PLN Dorong Percepatan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei** PLN Pushed to Accelerate Economy in Special Economic Region Sei Mangkei
10	16 Februari 2016 February 16, 2016	**Sukses Jalankan Program 3 Days Energize, Pln Perkuat Sistem Jawa Bali** Successful In Running The 3 Days Energize Program, Pln Strengthens Java Bali System
11	16 Februari 2016 February 16, 2016	**Pentingnya Kabel Sutt 150Kv Celukan Bawang Bagi Keandalan & Kontinuitas Penyaluran Listrik Di Provinsi Bali** The Importance Of Cable Sutt 150Kvat Celukan Bawang For Reliability & Continuity Of Electricity Distribution In The Province Of Bali
12	17 Februari 2016 February 17, 2016	**Konsumsi Listrik yang Meningkat, Gambaran Membaiknya Perekonomian Indonesia** Increased Electricity Consumption, Improvement in the Indonesian Economy Overview
13	22 Februari 2016 February 22, 2016	**Menuju Indonesia Bersih, PLN Ajak Masyarakat Peduli Sampah dan Lingkungan** Towards A Clean Indonesia, PLN Invited the Waste and Environment Care Community
14	23 Februari 2016 February 23, 2016	**Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan** Safety and Security of Government in Electricity Infrastructure Development
15	24 Februari 2016 February 24, 2016	**Pengembangan PLTP Mataloko Akan Digegas** Geothermal Power Plant Development at Mataloko Will be accelerated
16	25 Februari 2016 February 25, 2016	**PLN Buka Rekrutmen Umum di Career Days UGM** PLN Opened Public Recruitment on UGM Career Day
17	26 Februari 2016 February 26, 2016	**Langkah Pasti Proyek 35.000 MW Didukung oleh Perpres No. 4 Tahun 2016** Definite Step of the 35,000 MW Project Supported by Presidential Decision No. 4 Year 2016
18	27 Februari 2016 February 27, 2016	**1.368 Joobsekeers Kunjungi Stand PLN di Hari Pertama Career Days UGM** 1.368 Joobsekeers Visited PLN Stand in First Day of UGM Career Day
Maret March		
1	01 Maret 2016 March 1, 2016	**Nilai Tukar Rupiah Relatif Stabil, Tarif Listrik Turun Lagi** IDR Exchange Rate Relatively Stable, Electricity Rated Down Again
2	02 Maret 2016 March 2, 2016	**Masyarakat Pulau Ngenang Nikmati Nyala Listrik 24 Jam** Ngenang Island Communities Enjoy Electricity 24 Hours
3	03 Maret 2016 March 3, 2016	**Bersama Sukseskan Program 35.000 MW** Together we will Succeed in the 35,000 MW Program
4	04 Maret 2016 March 4, 2016	**Pembangunan Tower Transmisi Sumsel-Lampung Terhambat karena Pembebasan Lahan** Construction of Transmission Tower South Sumatra - Lampung Hampered due to Land Acquisition
5	05 Maret 2016 March 5, 2016	**PLN Ajak Masyarakat Ikuti Lomba Foto Gerhana Matahari** PLN Asked the Community to participate in the Photo Contest of Solar Eclipse
6	08 Maret 2016 March 8, 2016	**Menjaga Pengamanan Aset dan Pengelolaan Lingkungan, PLN Gandeng POLRI dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan** Maintain the Security of Assets and Environmental Management, PLN Cooperated with the National Police and the Ministry of Environment and Forestry
7	11 Maret 2016 March 11, 2016	**Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Manfaatkan Lebak Arang** Increase the Electrification Ratio, PLN Utilized Lebak Arang
8	13 Maret 2016 March 13, 2016	**Percepatan Operasi GI Kambang, PLN Lakukan Penghematan hingga 94,2 Miliar Rupiah** Acceleration of the Operation of GI Kambang, PLN Conducted Savings of up to 94.2 Billion Rupiah
9	14 Maret 2016 March 14, 2016	**Diskon Tarif Listrik Dorong Pertumbuhan Industri** Discount Electricity Rates Drive Industrial Growth

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
10	15 Maret 2016 March 15, 2016	**Tingkatkan Infrastruktur Kelistrikan Jakarta, PLN Tandatangani Kesepakatan dengan Pemprov DKI** Electricity Infrastructure Improvement in Jakarta, PLN Signed Agreement With the City Government
April April		
1	01 April 2016 April 01, 2016	**Penguatan Nilai Tukar Rupiah Membawa Berkah Berlanjutnya Penurunan Tarif Listrik** Strengthening of Rupiah Exchange Brings Blessings on the continued decline in electricity tariffs
2	01 April 2016 April 01, 2016	**Bersama Perguruan Tinggi, PLN Optimalkan Putra Putri Terbaik Bangsa** Together with Universities, PLN Optimizes The Best Students in the Nation
3	03 April 2016 April 03, 2016	**17 Genset Siap Dikirim ke Nias** 17 Genset is Ready to be Sent to Nias
4	03 April 2016 April 03, 2016	**Regasifikasi Bali, Mini LNG Pertama di Indonesia** Bali Regasification, Indonesia First Mini LNG plant
5	03 April 2016 April 03, 2016	**17 Genset Siap Dikirim ke Nias** 17 Generator Set Ready to be Sent to Nias
6	03 April 2016 April 03, 2016	**PLN Jaga Stabilitas Listrik Selama Ujian Berlangsung** PLN Maintains Stability of Electricity During Exams
7	03 April 2016 April 03, 2016	**Aplikasi "INFO PLN" Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016** Applications "INFO PLN" Entered Top 99 National Public Service Innovation 2016
8	04 April 2016 April 04, 2016	**Penyedia Sewa PLTD Nias Lakukan Pemutusan Sepihak** Rental Providers PLTD Nias Conducted Unilateral Termination
9	04 April 2016 April 04, 2016	**Penyedia Sewa PLTD Nias Lakukan Pemutusan Sepihak** Diesel Power Plant Lease Providers Nias Conducted Unilateral Termination
10	04 April 2016 April 04, 2016	**Subsidi Listrik Hanya untuk yang Berhak** Electricity subsidies only to the Eligible
11	05 April 2016 April 05, 2016	**PLN Kebut Penyelesaian Pemadaman Nias Dengan Datangkan Genset Tambahan** PLN Accelerated Completion of PLN Nias Outages With Genset Additional Generators
12	05 April 2016 April 05, 2016	**PLN Siaga Dukung UNBK** PLN is Standby to Support UNBK
13	07 April 2016 April 07, 2016	**Pembangkit Listrik Tenaga Angin 70 MW Segera Dibangun Di Sidrap Sulawesi Selatan** 70 MW Wind Power Plant is Immediately Built In Sidrap South Sulawesi
14	07 April 2016 April 07, 2016	**Peran Aktif Swasta dalam Pengembangan Energi Baru & Terbarukan Bantu PLN Listriki Daerah-Daerah Pelosok** Active Role of Private Company in the Development of Renewable Energy & Assist PLN to Provide Electricity in Rural Areas
15	07 April 2016 April 07, 2016	**PLN Bergerak Cepat Demi Nias Benderang** PLN Accelerates to Brighten Nias
16	07 April 2016 April 07, 2016	**PLN dan 9 Anak Perusahaan Hadir di Titian Karir Terpadu ITB 2016** PLN and 9 Subsidiaries Attended At ITB Integrated Career Titian 2016
17	08 April 2016 April 08, 2016	**PLN Siapkan Lahan untuk 12 MW Genset** PLN Prepared Land for 12 MW Genset
18	08 April 2016 April 08, 2016	**Jaring Tenaga Muda Berkualitas, PLN Jalin Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi** Trawling Young Qualified Personnel, PLN Collaborated With Universities
19	09 April 2016 April 09, 2016	**Tambah 10 Genset Lagi, Daya Mampu Nias Menjadi 8, 65 MW** Added 10 Generators, The Electric Power Of Nias Becomes 8,65 MW
20	10 April 2016 April 10, 2016	**GIS Pantai Indah Kapuk Beroperasi, Jakarta Semakin Andal** Pantai Indah Kapuk Gas Insulation Switchgear Operates, Jakarta Is More Reliable
21	10 April 2016 April 10, 2016	**PLN Perbanyak Tangki Air Bersih untuk Masyarakat Nias** PLN Added Clean Water Tank for the people of Nias
22	10 April 2016 April 10, 2016	**95 Orang Sukarelawan PLN dari Luar Nias demi Pulihkan Kelistrikan Nias** 95 PLN Volunteers from Outside of Nias for the sake of Restoring Electricity in Nias

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
23	13 April 2016 April 13, 2016	**Operasikan PLTD Moawo dan Idanoi, Nias Benderang Kembali** Operated Moawo and Idanoi Diesel Power Plant, Nias is bright once again
24	14 April 2016 April 14, 2016	**Kunjungan Menteri ESDM ke Nias di PLTD Nias** Energy and Mineral Resource Minister's visit to Nias Diesel Power
25	15 April 2016 April 15, 2016	**Tingkatkan Performa Kelistrikan, PLN Tambah Trafo di Gardu Induk Sukarame** To Improve Performance of Electricity, PLN Added Transformers in Sukarame Substation
26	15 April 2016 April 15, 2016	**Tandatangani Amandemen LNG SPA, Pasokan Gas PLN Aman** Signed an Amendment of LNG SPA, PLN Gas Supply is Safe
27	15 April 2016 April 15, 2016	**Kunjungi Nias, Menteri ESDM Bicarakan Penguatan Kelistrikan Nias** Visiting Nias, the Minister Energy and Mineral Resorce Discussed Reinforcement of Nias Electrical
28	15 April 2016 April 15, 2016	**PLTD Moawo dan Idanoi Beroperasi, Nias Benderang Kembali** Idanoi and Moawo Diesel Power is Operating, Nias is Bright Once Again
29	18 April 2016 April 18, 2016	**Maksimalkan EBT di Sumba PLN Lakukan Penghematan Hingga Rp 10 M** Maximizing EBT in Sumba, PLN Saved up to Rp10 Billion
30	18 April 2016 April 18, 2016	**Lazis PLN Salurkan Beasiswa 'Cahaya Pintar' Senilai Rp 35 Miliar** PLN LAZIS Distributed Scholarships "Cahaya Pintar" Worth Rp35 Billion
31	20 April 2016 April 20, 2016	**Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia Timur, PLN Gandeng Siemens** Increasing Electrification Ratio in Eastern Indonesia, PLN Cooperated with Siemens
32	21 April 2016 April 21, 2016	**PLN Kembangkan PLTS 150 MWp Di Indonesia Timur** PLN Developed 150 MWp Solar Cell Power Plant in East Indonesia
33	21 April 2016 April 21, 2016	**Sripeni Inten Cahyani, Plt, Direktur Utama PT Indonesia Power** Sripeni Inten Cahyani, Acting President Director of PT Indonesia Power
34	21 April 2016 April 21, 2016	**Melalui Program Indonesia Terang, ESDM dan PLN Pasok Listrik Indonesia Timur** Through Indonesia Terang Program, ESDM and PLN Supplied Electricity to Eastern Indonesia
35	26 April 2016 April 26, 2016	**PLN Menerima 5.558 Pegawai Baru** PLN Received 5.558 New Employees
36	27 April 2016 April 27, 2016	**PLN, Perusahaan Pertama Kembangkan Sistem Tes Rekruitmen dengan CAT** PLN, The First Company that Develops Test Recruitment Systems by CAT
37	28 April 2016 April 28, 2016	**PLN Siap Dorong Industri Pariwisata di NTB** PLN is Ready to Push Tourism Industry in NTB
38	29 April 2016 April 29, 2016	**Pembangunan Transmisi Bangko - Sungai Penuh Terhambat 8 Tahun** Bangko Transmission Development – Sungai Penuh was Hampered for 8 Years
39	30 April 2016 April 30, 2016	**PLN Percepat Pembersihan Mesin Pendingin Pasca Serangan Ubur-Ubur** PLN Accelerated Cleaning of Engine Cooling After Jellyfish Attacks
Mei May		
1	01 Mei 2016 May 01, 2016	**PLTA Peusangan 88 MW Terkendala Pembebasan Lahan** Peusangan 88 MW Hydro Power Plant was Constrained by Land Acquisition
2	01 Mei 2016 May 01, 2016	**PLN Jabar Melistriki dan Mengedukasi hingga Ke Pelosok Jawa Barat** PLN West Java Electrify and Educate up To the Remote Areas of West Java
3	02 Mei 2016 May 02, 2016	**PLTU Ketapang 20 MW Segera Beroperasi, Efisiensi Hingga Rp 92 Miliar** Ketapang 20 MW Steam Power Plant Operating, Efficiency Up to Rp 92 Billion
4	03 Mei 2016 May 03, 2016	**Masalah Lahan Hambat Proyek PLTA Peusangan** Land issues hindering Peusangan Hydro Power Plant Project
5	04 Mei 2016 May 04, 2016	**Perkuat Keandalan di Provinsi Jambi, PLN Selesaikan GI Muara Bungo** Strengthening Reliability in Jambi, PLN Completes GI Muara Bungo
6	06 Mei 2016 May 06, 2016	**Asyik, Listrik Pulau Ende Nyala 24 Jam** Electricity in Ende Island On for 24 Hours
7	06 Mei 2016 May 06, 2016	**Tingkatkan Kehandalan Listrik, PLN Tambah Trafo 60 MVA di Cianjur dan Garut** Improve Reliability of Power, PLN Added 60 MVA Transformer in Cianjur and Garut

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
8	10 Mei 2016 May 10, 2016	**PLN Siap Bangun PLTU Lontar Unit 4** PLN Ready to Build Lontar Steam Power Plant Unit 4
9	11 Mei 2016 May 11, 2016	**Program 35.000 MW: PLN Telah Bangun 2.368 kms Transmisi dan 7.295 MVA Gardu Induk** 35,000 MW Program: PLN Has Build 2,368 kms Transmission and and 7.295 MVA of Substation
10	11 Mei 2016 May 11, 2016	**Proyek Transmisi PLN dan Waskita Karya Peroleh Kucuran 4,4 Triliun dari BRI dan BCA** PLN Transmission Project and Waskita Karya Obtained 4,4 trillion outpouring from BRI and BCA
11	11 Mei 2016 May 11, 2016	**Kejaksaaan Dukung Pembangunan Listrik Hingga Maluku dan Papua** Attorney Supports the Power Development up to Maluku and Papua
12	12 Mei 2016 May 12, 2016	**PLN Buka Rekrutmen Program D3 Kerjasama dengan 18 PT** PLN Opens Recruitment on D3 Cooperation Program with 18 PT
13	14 Mei 2016 May 14, 2016	**PLN Terus Siapkan Pasokan Listrik untuk PON Jawa Barat** PLN Continues to Supply Electricity for PON West Java
14	15 Mei 2016 May 15, 2016	**Beban Puncak Jawa Bali Capai 24.461 MW** Peak Load Java-Bali Reached 24,461 MW
15	16 Mei 2016 May 16, 2016	**Tekuk Pertamina Energi, Tim Putri Jakarta Elektrik PLN kembali Juarai Proliga 2016** Beating Pertamina Energy, Women's Team of PLN Jakarta Elektrik Once Again Won Proliga 2016
16	16 Mei 2016 May 16, 2016	**PLN Distribusi Jakarta Raya Raih Gold Medal pada WOW Service Excellence Award 2016** PLN Jakarta Raya Won Gold Medal at WOW Service Excellence Award 2016
17	18 Mei 2016 May 18, 2016	**Industri Skala Menengah dan Skala Besar Semakin Menggeliat** Medium Scale and Large Scale Industry Increasingly Stretched
18	19 Mei 2016 May 19, 2016	**Dukung Program 35.000 MW, PLN Cetak Pegawai Baru yang Handal** Support the Program for 35,000 MW, PLN Generate Reliable New Employees
19	21 Mei 2016 May 21, 2016	**Komitmen Pada Lingkungan, PLN Raih The Best Indonesia Green Awards 2016** Commitment to the Environment, PLN Achieved The Best Indonesia Green Awards 2016
20	24 Mei 2016 May 24, 2016	**PLN Tandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan Tujuh Pengembang PLTM** PLN Signed Power Purchase Agreement with Seven Micro Power Plant Developers
21	25 Mei 2016 May 25, 2016	**GI dan SUTT 70 kV Nonohanis Beroperasi, PLN NTT Hemat hingga Rp 345,3 Juta per Bulan** GI and SUTT 70 kV Nonohanis Operating, PLN NTT Saves Up To Rp 345.3 Million per Month
22	30 Mei 2016 May 30, 2016	**Tambah Infrastruktur Kelistrikan, PLN Dorong Pariwisata Karimunjawa** Added Electrical Infrastructure, PLN Pushes Tourism in Karimunjawa
23	31 Mei 2016 May 31, 2016	**PLN Tandatangani PPA EBT sebesar 73,6 MW dan Excess Power 42 MW di Sumatera** PLN Signed PPA EBT amounting to 73,6 MV and Excess Power of 42 MW in Sumatra
Juni June		
1	01 Juni 2016 June 01, 2016	**Lakukan *Ground Breaking* MPP Total Kapasitas 350 MW, Jokowi Minta Warga Sabar** Performed Ground Breaking MPP with total capacity of 350 MW, Jokowi Asked the Residents to Have Patience
2	01 Juni 2016 June 01, 2016	**Dukung Bali Clean and Green PLN Luncurkan Smart Grid** Support Bali Clean and Green PLN Launches Smart Grid
3	01 Juni 2016 June 01, 2016	**Penyesuaian 12 Golongan Tarif Tenaga Listrik pada Juni 2016** Adjustment of 12 Group Rates Power in June 2016
4	02 Juni 2016 June 02, 2016	**PLTMG Arun 184 MW Perkuat Kelistrikan Aceh** 184 MW Arun Gas Engine Power Plant Strengthening Electricity in Aceh
5	02 Juni 2016 June 02, 2016	**120 MW Tambahan Pasokan Listrik untuk Kalimantan Barat** Additional 120 MW Power Supply for West Kalimantan
6	03 Juni 2016 June 03, 2016	**Jokowi Resmikan PLTG Pertama dan Tercepat Dalam Program 35.000 MW** Jokowi inaugurated The First and Fastest Gas Turbine Power Plant in the 35,000 MW Program
7	09 Juni 2016 June 09, 2016	**Financial Close Date Tercapai, Konstruksi PLTU Jateng Dimulai** Financial Close Date Achieved, Central Java Steam Power Plant Construction Starts
8	10 Juni 2016 June 10, 2016	**Joko Widodo Lakukan *Ground Breaking* PLTU Lontar** Joko Widodo Performs Ground Breaking of Lontar Steam Power Plant

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
9	11 Juni 2016 June 11, 2016	**Mulai Gunakan Mini LNG ke PLTDG Pesanggaran, PLN Mampu Hemat Biaya Pemeliharaan Rp 60 M per Tahun** Start Using Mini LNG to Pesanggaran Diesel and Gas Engine Power Plant, PLN Saves Maintenance Cost of Rp 60 Billion per year
10	14 Juni 2016 June 14, 2016	**Kejaksaan Dukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Jawa dan Bali** The Court Supports Electricity Infrastructure Development in Java and Bali
11	16 Juni 2016 June 16, 2016	**PLTU Cilacap Ekspansi Siap Melayani 350.000 Pelanggan Baru** Cilacap Steam Power Plant Expansion is Ready to Serve 350,000 New Customers
12	16 Juni 2016 June 16, 2016	**PLN Sukses Gelar Buka Puasa Bersama 10.000 Anak Yatim dan Dhuafa Se-Nusantara** PLN Successfully Held Iftar with 10,000 Orphans and Dhuafa
13	20 Juni 2016 June 20, 2016	**Lazis PLN Salurkan Beasiswa 'Cahaya Pintar' Senilai Rp 40 Miliar** PLN Lazis Distributed Scholarships 'Cahaya Pintar' Worth Rp 40 Billion
14	23 Juni 2016 June 23, 2016	**Terowongan Akses Pekerjaan Waterway PLTA Jatigede Mulai Dikerjakan** Tunnel to Access Waterway Jatigede Hydro Power Plant Starts to be Constructed
15	23 Juni 2016 June 23, 2016	**PLN akan Tambah 5.000 Change Agent PLN Berintegritas** PLN Added 5.000 PLN Change Agent with Integrity
16	24 Juni 2016 June 24, 2016	**PLN Gelar Pasar Murah Siapkan 12.000 Paket Sembako untuk Masyarakat** PLN Held 'Gelar Pasar Murah' Prepares 12,000 Grocery Packages to Community
17	24 Juni 2016 June 24, 2016	**PLN Berangkatkan Tim AMV UI ke 9th International Roboboat Competition 2016, Virginia, Amerika Serikat** PLN Sent AMV UI Team to 9th International Roboboat Competition 2016, Virginia, United States
18	27 Juni 2016 June 27, 2016	**Perkuat Kelistrikan Jawa Timur & Madura, PLN Operasikan Trafo dan Bangun Transmisi** Strengthening of Electricity in East Java and Madura, PLN Operated Transformer and Build Transmission
19	27 Juni 2016 June 27, 2016	**PLN Buka Rekrutmen Umum Serentak di 7 Kota** PLN Opens Public Recruitment Simultaneously in 7 Cities
20	28 Juni 2016 June 28, 2016	**PLN Berbagi 35.000 Sembako untuk Dhuafa** PLN Shares 35,000 Sembako to Dhuafa
21	29 Juni 2016 June 29, 2016	**PLN Optimis Capai Target Pembangunan Transmisi 500 kV di Sumatera** PLN is Optimistic to Reach Development Target of 500 kV Transmision in Sumatra
22	29 Juni 2016 June 29, 2016	**Tiga BUMN Perbankan Dukung PLN Wujudkan Program 35.000 MW** Three SOE Banks Support PLN to Realize 35,000 MW Program
Juli July		
1	01 Juli 2016 July 01, 2016	**Mudik Gratis Bareng PLN 2016** Free Homecoming Together with PLN in 2016
2	21 Juli 2016 July 21, 2016	**Paket Diskon Listrik Ramai Peminat** Electrical Discount packages Brings Excitement
3	22 Juli 2016 July 22, 2016	**PLN Tandatangani Kerjasama Pemanfaatan Sampah Kota Surabaya Menjadi Energi Listrik** PLN Signed Cooperation for Waste Utilization in Surabaya Into Electrical Energy
4	26 Juli 2016 July 26, 2016	**Tingkatkan Elektrifikasi Bintan, 3 Gardu Induk Siap Beroperasi** Increase Electrification in Bintan, 3 Substations Ready to Operate
5	27 Juli 2016 July 27, 2016	**Sektor Industri Pacu Pertumbuhan Listrik** Industry Sector Spurs Electrical Growth
6	30 Juli 2016 July 30, 2016	**Dongkrak Pariwisata Wonosobo, PLN Beri Bantuan Penerangan Kawasan Wisata** Boost Tourism in Wonosobo, PLN Assists the Tourism Area with Lighting
7	31 Juli 2016 July 31, 2016	**Pembangkit ke-2 Program 35.000 MW Berhasil Operasi di Sistem Kelistrikan Lombok** 2nd Generator of 35,000 MW Program Successfully Operating in Lombok Electrical System
Agustus August		

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
1	01 Agustus 2016 August 01, 2016	**Rupiah Menguat, Tarif Listrik Agustus Turun** Stronger Rupiah, Electricity Rates Down in August
2	09 Agustus 2016 August 09, 2016	**Kunjungan Kerja Pertama Menteri ESDM ke PLN** First Working Visit of Energy and Mineral Resources Minister to PLN
3	09 Agustus 2016 August 09, 2016	**PLN Ajak Siswa Kenal Nusantara** PLN Invited Students to Learn about the Archipelago
4	10 Agustus 2016 August 10, 2016	**PLN Genjot Pengembangan Energi Panas Bumi** PLN Boosts Geothermal Energy Development
5	12 Agustus 2016 August 12, 2016	**PLN Buka Tender Empat Proyek Program 35.000 MW** PLN Opened Tender for Four Projects for 35,000 MW Program
6	12 Agustus 2016 August 12, 2016	**PLN Ajak Peserta Siswa Mengenal Nusantara Bertemu Menteri BUMN dan Ahok** PLN Invited Students to Learn about the Archipelago and Meet SOE Minister and Ahok
7	14 Agustus 2016 August 14, 2016	**Sambut Kemerdekaan RI, PLN ajak Masyarakat Jalan Sehat** Welcoming Indonesia Independence Day, PLN invited the Community to Walk Healthy
8	15 Agustus 2016 August 15, 2016	**PLN Listriki 14 Kabupaten di Papua dan Papua Barat** PLN Provides Electricity to 14 districts in Papua and West Papua When officials PLN So Teacher Day
9	15 Agustus 2016 August 15, 2016	**Antisipasi Pertumbuhan Beban, PLN Bangun Gardu Induk Baru** Anticipating Growth in Loans, PLN to Build New Substation
10	16 Agustus 2016 August 16, 2016	**Kado Kemerdekaan, PLN Hidupkan Jaringan Listrik di 15 Desa Pelosok Jawa Tengah** Contribution for Independence Day, PLN Turned on Electric Networks in 15 Remote Villages in Central Java
11	17 Agustus 2016 August 17, 2016	**Peringati HUT RI, PLN Berbagi Keceriaan dengan Rakyat** Commemorating Independence Day, PLN Shared Fun with Communities
12	17 Agustus 2016 August 17, 2016	**PLN Tuan Rumah BUMN Hadir untuk Negeri di Jakarta** PLN Hosts Present SOE for Home Affairs in Jakarta
13	19 Agustus 2016 August 19, 2016	**Jokowi Lakukan Peletakan Batu Pertama SUTT 70 kV** Jokowi Conducted the Groundbreaking of SUTT 70 kV Construction Foundation
14	22 Agustus 2016 August 22, 2016	**PLN Peduli Pariwisata Danau Toba** PLN Cares About Tourism in Lake Toba
15	23 Agustus 2016 August 23, 2016	**PLN Distribusi Jawa Barat Resmi Luncurkan Tim Sentuh Langsung Jaringan - PDKB 20 kV** PLN Distribution West Java Officially Launches Direct Touch Team Network - PDKB 20 kV
16	23 Agustus 2016 August 23, 2016	**PLN Kembali Buka Rekrutmen di Career Days UGM ke-20** PLN Held Open Recruitment in 20th Career Days UGM
17	25 Agustus 2016 August 25, 2016	**PLN Bangun Infrastuktur Kelistrikan di Pulau Natuna** PLN to Build Electricity Infrastructure on Natuna Island
18	25 Agustus 2016 August 25, 2016	**PLN Raih Penghargaan Green CEO Award 2016** PLN Awarded Green CEO Award 2016
19	26 Agustus 2016 August 26, 2016	**PLN Terangi Enggano** PLN Lightens Enggano
20	26 Agustus 2016 August 26, 2016	**PLN Raih Penghargaan Green CEO Award 2016** PLN Awarded Green CEO Award 2016
21	27 Agustus 2016 August 27, 2016	**PLN Berburu Tenaga Kerja Handal di Career Days UGM ke-20** PLN Hunting for Reliable Labor in 20th Career Days UGM
22	29 Agustus 2016 August 29, 2016	**PLN Buka Tender Dua Proyek Pembangkit 35.000 MW Non-BBM** PLN Opened Tender for Two Non-Fuel 35,000 MW Power Plant Project
23	30 Agustus 2016 August 30, 2016	**PLN Tandatangani Kontrak EPC PLTGU Muara Karang** PLN Signs EPC Combined Cycle Power Plant Contract Muara Karang
24	30 Agustus 2016 August 30, 2016	**Ketika Pejabat PLN Jadi Guru Sehari** When PLN Officials Become Teachers for A Day

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
September September		
1	01 September 2016 September 01, 2016	**PLN Beri Bantuan Transportasi Mahasiswa UTS** PLN Gave Assistance for UTS Student Transportation
2	07 September 2016 September 07, 2016	**Perkuat Kelistrikan Jawa Timur, PLN Tambah Kapasitas 4 Unit Trafo di New Wlingi, New Pacitan, New Lamongan dan Kebon Agung** Strengthening Electricity in East Java, PLN Added Capacity 4 Transformer Unit in New Wlingi, New Pacitan, New Lamongan and Kebon Agung
3	09 September 2016 September 09, 2016	**PLN Peroleh Kucuran Dana Investasi Rp 12 Triliun dan Upsize KMK menjadi Rp 20 Triliun dari BUMN Perbankan** PLN Obtained Disbursement of Funds Investment Rp 12 Trillion and Upsize KMK to Rp 20 Trillion from SOE banks
4	10 September 2016 September 10, 2016	**PLN Raih Dua Penghargaan IHCS 2016** PLN Won Two IHCS 2016 Awards
5	15 September 2016 September 15, 2016	**PLN Tandatangani Jual Beli Energi Listrik Berbasis Surya** PLN Signed Electricity Power Purchase Based on Solar Energy
6	15 September 2016 September 15, 2016	**Gelar Pasukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, PLN Siap Menyukseskan PON XIX Jawa Barat** Prepare Troops in Bandung Lautan Api Stadium, PLN ready to succeed in PON XIX PLN West Java
7	16 September 2016 September 16, 2016	**PLN Dongkrak Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Aceh** PLN Boosts Industrial Growth and Economy in Aceh
8	22 September 2016 September 22, 2016	**PLN Percepat Pemulihan Listrik Pasca Bencana Garut dan Sumedang** PLN Accelerates Electricity Post Disaster Recovery in Garut and Sumedang
9	23 September 2016 September 23, 2016	**Kerjasama dengan Pemda, Kejati dan BIN, PLN Mampu Percepat Pembangunan Jalur Transmisi dan Gardu Induk di Bintan** Cooperation with Local Government, Attorney and State Intelligence Agencies, PLN is Able to Accelerate Development of Transmission Line and Substation in Bintan
10	24 September 2016 September 24, 2016	**BUMN Hadir untuk Negeri: PLN Tetap Berupaya Menjaga Stabilitas Pasokan Listrik Pasca Bencana Banjir Garut & Sumedang** SOE Present to The Nation: PLN Strives to Maintain Stability Keep Electricity Supply Post-Flood Garut and Sumedang
Oktober October		
1	04 Oktober 2016 October 04, 2016	**Tarif Listrik PLN Oktober 2016 di Tengah Stabilnya Harga ICP dan Nilai Tukar Rupiah** PLN Electricity Rates in October 2016 in the Midst of Stabilized ICP Prices and Exchange Rate
2	11 Oktober 2016 October 11, 2016	**Perkuat Kelistrikan Jawa Timur, PLN Operasikan 7 Trafo Gardu Induk dan 2 Kapasitor** Strengthening Electricity in East Java, PLN Operates 7 Transformer Substation and Two Capacitors
3	11 Oktober 2016 October 11, 2016	**BUMN Hadir untuk Negeri: Pelatihan Wirausaha bagi Mantan Atlet Berprestasi dan Mantan Narapidana** SOE Present for the Nation: Entrepreneurial Training For Ex-Athlete Achievement and Former Prisoners
4	12 Oktober 2016 October 12, 2016	**Transmisi Selesai, Suplai Listrik PLTMG Bangkanai Menjangkau Muara Teweh dan Buntok** Transmission Finished, Power Supply Bangkanai Gas Engine Power Plant Reached Muara Teweh and Buntok
5	12 Oktober 2016 October 12, 2016	**Proyek 35.000 MW: *Groundbreaking* PLTU Cilacap 1.000 MW** 35,000 MW Projects: Groundbreaking 1,000 MW Cilacap Steam Power Plant
6	12 Oktober 2016 October 12, 2016	**Program Lisdes: 3 Desa di Yogyakarta Resmi Terlistriki** Village Electricity Program: 3 Villages in Yogyakarta Officially have Electricity
7	12 Oktober 2016 October 12, 2016	**Listrik Pulau Moa Menyala 24 Jam** Moa Island Electricity on 24 Hours
8	12 Oktober 2016 October 12, 2016	**PLN Bangka Belitung Siap Layani Listrik untuk Bisnis dan Industri** PLN Bangka Belitung is Ready to Serve Electricity for Business and Industry

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
9	14 Oktober 2016 October 14, 2016	**24 GI Diresmikan Perkuat Sistem Kelistrikan Jakarta** 24 Substations is Inaugurated Strengthens Electrical System in Jakarta
10	16 Oktober 2016 October 16, 2016	**PLTU Jawa-7 2 x 1.000 MW Sudah Mulai Dibangun** Java-7 Steam Power Plant 2 x 1,000 MW Starts Construction
11	16 Oktober 2016 October 16, 2016	**PLN Kembali Terangi Dua Kabupaten di Papua dan Papua Barat Oktober Ini** PLN Provides Lighting to Two Regencies in Papua and West Papua This October
12	17 Oktober 2016 October 17, 2016	**Presiden Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan Papua dan Papua Barat** The President Opens 6 Electrical Infrastructure in Papua and West Papua
13	17 Oktober 2016 October 17, 2016	**PLN Pacu Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah** PLN Spurs Economic Growth in Central Java
14	18 Oktober 2016 October 18, 2016	**Tingkatkan Elektrifikasi Cilacap, 250 Calon Pelanggan Tersambung Listrik Gratis** Increasing Electrification of Cilacap, 250 Prospective Customers Receive Free Electricity
15	19 Oktober 2016 October 19, 2016	**PLN Hadirkan 314 Karya Inovasi di *Event* LIKE 2016** PLN Presented 314 Innovation Works in LIKE Event 2016
16	20 Oktober 2016 October 20, 2016	**GI Raja Paksi Diresmikan, PLN Dongkrak Pertumbuhan Industri Bekasi** Raja Paksi Substations is Inaugurated, PLN Boosts Industrial Growth in Bekasi
17	20 Oktober 2016 October 20, 2016	**PLN Dan JBIC Tandatangani Perjanjian Pendanaan USD 310 Juta untuk Pembangunan PLTGU Priok 1 x 800 MW** PLN and JBIC Signed Rp310 Million Financing Agreement for Development of Priok Combined Cycle Power Plant 1 x 800 MW Combined Cycle Power Plant
18	22 Oktober 2016 October 22, 2016	**Lazis PLN Kucurkan Bantuan Program Pendidikan dan Dakwah di Pesantren Gontor** PLN Lazis Disbursed Education and Dakwah Program Assistance in Gontor
19	25 Oktober 2016 October 25, 2016	**Program Lisdes : 3 Desa di Kotawaringin Timur Resmi Terlistriki** Village Electricity Program: 3 Villages in East Kotawaringin Officially have Electricity
20	25 Oktober 2016 October 25, 2016	**PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Benderang 24 Jam** PT PLN (Persero) ,North and East Kalimantan Brighten for 24 Hours
21	27 Oktober 2016 October 27, 2016	**Dua Kabupaten Di Papua Nikmati Listrik Di Hari Listrik Nasional Ke-71** Two districts in Papua Enjoy Electricity During the 71st National Electricity Power Day
22	31 Oktober 2016 October 31, 2016	**Permudah Jangkauan Layanan Dengan PLN MOBILE** Simplifying Service Coverage With PLN MOBILE
November November		
1	03 November 2016 November 03, 2016	**PLN Dorong Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Proyek 35.000 MW** PLN Pushes Improvement of Domestic Component for 35,000 MW Project
2	07 November 2016 November 07, 2016	**Penguatan Rupiah Jaga Stabilitas Tarif Listrik November 2016** Strengthening Rupiah Keep Stability of Electricity Tariff in November 2016
3	10 November 2016 November 10, 2016	**Tambahan Dua Sirkit SUTET 500 kV Suralaya - Balaraja Memperkuat Struktur Tulang Punggung Sistem Jawa-Bali** Two Additional Circuits SUTET 500 kV Suralaya - Balaraja Strengthen the Backbone Structure of Java-Bali system
4	10 November 2016 November 10, 2016	**1.099 Pasukan Khusus PLN Siap Bertaruh Nyawa Amankan Listrik Nusantara** 1,099 PLN Special Forces is Ready to Bet Lives to Secure Power Plant in the Nation
5	15 November 2016 November 15, 2016	**Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah, PLN Siapkan Pasokan Listrik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu** Supporting Economic Growth in Central Sulawesi, PLN Prepares Power Supply in Palu Special Economic Zone (SEZ)
6	16 November 2016 November 16, 2016	**PLN Rancang Pola Khusus untuk Efektifkan Penggunaan LNG di Maluku dan Papua** PLN Designed Special Pattern for Efective use of LNG in Maluku and Papua
7	16 November 2016 November 16, 2016	**PLN Operasikan Gardu Induk 30 MVA Untuk Tambah Pasokan Listrik Bangka Barat** PLN Operated 30 MVA Substation to Add Bangka Barat Electricity Supply
8	17 November 2016 November 17, 2016	**Lahirkan SDM Unggulan, PLN - STT PLN Wisuda 385 Sarjana** Generating Excelence HR, PLN - STT PLN Graduated 385 Bachelor

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
9	24 November 2016 November 24, 2016	**Sukses Terapkan Kerja Sama Pemerintah Swasta untuk PLTU Batang, PLN Raih Penghargaan dari Menteri Keuangan** Successfully Applying Partnership of Public-Private for Batang Steam Power Plant, PLN Awarded From the Ministry of Finance
10	30 November 2016 November 30, 2016	**PLN Siap Dukung Pasokan Listrik Asian Games 2018 dan Proyek LRT Palembang** PLN is Ready to Support Electric Supply for Asian Games 2018 and LRT Palembang Project
Desember December		
1	02 Desember 2016 December 02, 2016	**Percepat Pembangunan 35.000 MW, PLN Tandatangani Pendanaan USD 435 Juta untuk Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) 500 MW** Accelerating the 35,000 MW Development, PLN Signed USD 435 Million Funding for the Development of Mobile Power Plant (MPP) 500 MW
2	05 Desember 2016 December 05, 2016	**Penguatan Rupiah Jaga Stabilitas Tarif Listrik Desember 2016** Strengthening Rupiah Maintain the Stability of Electricity Tariffs in December 2016
3	05 Desember 2016 December 05, 2016	**PLN Beli Listrik dari Sampah 100 MW** PLN Buy Electricity from Waste 100MW
4	06 Desember 2016 December 06, 2016	**Amankan Pasokan Listrik SulutGo, PLN Kebut Pembangunan Tower Emergency** Securing Electricity Supply of SulutGo, PLN Accelerates Tower Emergency Development
5	06 Desember 2016 December 06, 2016	**Tingkatkan Keandalan Listrik Dobo, PLN Datangkan Tiga Mesin Baru** Increasing Reliability of Electricity in Dobo, PLN Brings Three New Machines
6	07 Desember 2016 December 07, 2016	**Gempa 6,5 SR Guncang Pidie Jaya, Sejumlah Infrastruktur Kelistrikan Perlu Pemulihan** 6.5 Magnitude Earthquake Rattled Pidie Jaya, A Number of Electrical Infrastructure Need Recovery
7	07 Desember 2016 December 07, 2016	**17 Unit Pembangkit PLN Raih PROPER Hijau** 17 Generator Unit Achieved Green PROPER
8	12 Desember 2016 December 12, 2016	**PLN Operasikan 8 Pembangkit Listrik Total Kapasitas 500 MW** PLN Operated 8 Electricity Power Plant with Total Capacity of 500 MW
9	13 Desember 2016 December 13, 2016	**Apresiasi CSR 2016 oleh Sindo Media** CSR Appreciation 2016 by Sindo Media
10	14 Desember 2016 December 14, 2016	**100% Listrik Kembali Normal: Menteri BUMN Apresiasi Kinerja Petugas PLN Aceh** 100% Power Return to Normal: SOE Minister Appreciated the Performance of PLN Officer in Aceh
11	18 Desember 2016 December 18, 2016	**Kapal Vessel Datang, PLN Siap Terangi Daratan Timor NTT** Vessel Arrives, PLN is Ready to Lighten NTT East Mainland
12	18 Desember 2016 December 18, 2016	**PLN Tandatangani 3 Kerjasama EBT untuk Regional Kalimantan** PLN Signed 3 EBT Partnership for Regional Kalimantan
13	18 Desember 2016 December 18, 2016	**Menteri ESDM Kunjungi PLTU Tenayan** Minister of Energy and Mineral Resources Visited Tenayan Steam Power Plant
14	19 Desember 2016 December 19, 2016	**PLN Peroleh Dana Investasi Rp 12 Triliun** PLN Earned Rp 12 Trillion Investment Fund
15	20 Desember 2016 December 20, 2016	**Konsisten Jalankan Keterbukaan Informasi Publik, Skor PLN Naik** Consistently Performed Transparency of Public Information, PLN Scores Up
16	21 Desember 2016 December 21, 2016	**PLN Tambah Pasokan Listrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah** PLN Added Power Supply to South Kalimantan and Central Kalimantan
17	27 Desember 2016 December 27, 2016	**PLN Tingkatkan Rasio Elektrifikasi dari Panas Bumi** PLN Increased Electrification Ratio of Geothermal
18	28 Desember 2016 December 28, 2016	**Jokowi Kunjungi Kapal listrik Apung di Kupang** Jokowi Visited Floating Electric Boat in Kupang
19	28 Desember 2016 December 28, 2016	**Pastikan Listrik Bali Aman, Menteri ESDM Kunjungi PLTDG Pesanggaran dan GI Kapal** To Ensure Electricity in Bali, The Minister of Energy Mineral ResourcesVisit Pesanggaran Diesel and Gas Turbine Power Plant and Ships Substations

No.	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
20	29 Desember 2016 December 29, 2016	**PLN Lanjutkan Pelayanan Listrik Pulau Terluar: Pulau Selaru Menyala 24 Jam** PLN Continues Electricity Services for Outer Islands: Selaru Island Lighten for 24 Hours
21	30 Desember 2016 December 30, 2016	**Menanti Seperempat Abad, 9 Desa Akhirnya Nikmati Listrik dari PLN** Waiting for a Quarter Century, 9 Villages Finally Enjoy More Power from PLN
22	30 Desember 2016 December 30, 2016	**PLBN Terpadu Diresmikan Presiden Jokowi, PLN 100% Siap Pasok Listrik** Integrated Biomass Energy Power Plant was Inaugurated by President Jokowi, PLN is 100% Ready to Supply Electricity

Investor Relation

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan investor relation sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. *Analyst Meeting*

Kegiatan ini berupaka pemaparan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan progress pembangunan pembangkit 35.000 MW terhadap para *analyst* di pasar keuangan yang terkait dengan penjualan obligasi PLN. Aktivitas tersebut dilaksanakan bersama sejumlah perusahaan investasi berikut:

1. *Analyst Meeting* dengan Merrill Lynch: 31 Maret 2016
2. *Analyst Meeting* dengan Maybank Kim Eng: 10 Mei 2016
3. *Analyst Meeting* dengan Credit-Suisse: 13 Juni 2016
4. *Analyst Meeting* dengan HSBC Bank dan Cathay Life: 30 Agustus 2016
5. *Analyst Meeting* dengan RGA Reinsurance Company: 17 Oktober 2016

2. *Analyst Gathering*

Analyst Gathering ini dilakukan bersamaan dengan rilis Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015 dengan menggelar sesi interaktif antara seluruh Direksi dengan para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan para analis keuangan dari *sell side analyst* dan *buys side analyst* yang memiliki hubungan langsung dengan para *bond holder*. Tanggal *Meeting* 18 Juli 2016.

Kegiatan *analyst gathering* ini dihadiri oleh sejumlah institusi, diantaranya BNP Paribas, CEIC Data, Credit Suisse, Danareksa, DBS Vickers, Deutche Bank, Frost And Sullivan, ICBC, Maybank Kim Eng, Merill Lynch, Morgan Stanley, Panin Asset Management, Shroder, Stellar Investment, Trimegah Asset Management, UBS, BNI Securities, Yuanta Securities, Sunlife Financial, Indonesian Residence Mission, Sarana Multi Infrastruktur, Pefindo, dan AFD - Indonesia Resident Mission.

3. *Academic Visit*

Pada tahun 2016, kegiatan yang dilakukankan berupa pemaparan Update *Financial and Operational Performance* Tahun 2016 dengan pengajar Australian National University pada 29 Juli 2016.

Investor Relations

Activities carried out in connection with investor relations throughout 2016 are as follows:

1. Analysts Meeting

The Analysts Meeting covers the exposure of financial and operational performance, and the progress of construction of 35,000 MW for the analysts in financial markets that are associated with the sale of PLN bonds. Activities undertaken with a number of investment companies are as follows :

1. Merrill Lynch Analyst Meeting: March 31, 2016
2. Analysts Meeting with Maybank Kim Eng: May 10, 2016
3. Analysts Meeting with Credit-Suisse: June 13, 2016
4. Analysts Meeting with HSBC Bank and Cathay Life: August 30, 2016
5. Analysts Meeting with RGA Reinsurance Company: October 17, 2016

2. Analysts Gathering

The Analysts Gathering was conducted in conjunction with the release of the 2015 Financial Statements of PLN, by holding an interactive session between the Board of Directors and the stakeholders in the financial sector and financial analysts from sell side analyst and buy side analyst that have a direct relationship with the bond holders. The meeting date was July 18, 2016.

This event was attended by many institutions, such as BNP Paribas, CEIC Data, Credit Suisse, Danareksa, DBS Vickers, Deutche Bank, Frost And Sullivan, ICBC, Maybank Kim Eng, Merill Lynch, Morgan Stanley, Panin Asset Management, Shroder, Stellar Investment, Trimegah Asset Management, UBS, BNI Securities, Yuanta Securities, Sunlife Financial, Indonesian Residence Mission, Sarana Multi Infrastruktur, Pefindo, and AFD - Indonesia Resident Mission.

3. Academic Visit

On July 29, 2016, financial updates and operational performance exposure were conducted with a lecturer from the Australian National University.

Penerbitan Alat Komunikasi

Perusahaan juga membuat penerbitan buletin secara regular untuk para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Untuk penerbitan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Publishing The Communication Tools

The Company also published a regular newsletter for internal and external stakeholders. Publishing dates for 2016 were:

No	Waktu Terbit/Edisi Time of Publication	Tema Utama Main Theme
1	Januari 2016 January 2016	**Mengawal Megaproyek 35.000 MW** Guarding 35,000 MW Mega Project
2	Februari 2016 February 2016	**Sambung Baru Cukup Satu Pintu** New Connection just in Ones Stop Service
3	Maret 2016 March2016	**Proyek Listrik Melangkah Pasti** Electricity Project Steps Decisive
4	April 2016 April 2016	**Memacu Semangat Berkompetisi** Accelerating the Competition Spirit
5	Mei 2016 May 2016	**Bangkit untuk Indonesia** Rise Up for Indonesia
6	Juni 2016 June 2016	**Berlari untuk Terangi Negeri** Running for Enlightening the Nation
7	Juli 2016 July 2016	**Efisiensi Berbuah Manis** Efficiency Bears Snazzy
8	Agustus 2016 August 2016	**Kado Manis PLN Untuk Indonesia** PLN's Sweet Present for Indonesia
9	September 2016 September 2016	**Perlu Terobosan Luar Biasa** In a need of Extraordinary Breaktrough
10	Oktober 2016 October 2016	**Kerja Nyata Terangi Negeri** Real Work of Enlightening the Nation
11	November 2016 November 2016	**Menerangi Hingga Pelosok Negeri** Enlightening until the Nation Rimland
12	Desember 2016 December 2016	**Subsidi Listrik yang Berkeadilan** Equitable Electricity Subsidy

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop antara lain:

- *Executive Education* I PT PLN (Persero), Jakarta
- *Good Coorporate Governance Workshop* BPKP, Semarang

Corporate Secretary Training Programs

During 2016, the Corporate Secretary attended a number of training programs and workshops, as follows:

- Executive Education I, PT PLN (Persero), Jakarta
- Good Corporate Governance Workshop from Financial and Development Supervisory Agency, Semarang

MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, maka PLN menjalankan manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan profil risiko yang akan dihadapi dan berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut.

Dalam rangka mengelola risiko-risiko tersebut, Perseroan telah meletakan dasar-dasar untuk menerapkan implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan kaidah *best practice*. Sejak

RISK MANAGEMENT

In accordance with the Decision of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs, PLN implements risk management by constantly paying attention to the risk profile it faces, and strives to mitigate such risks.

In order to mitigate these risks, the Company has established the fundementals of risk management based on best practices. Since 2011, PLN has defined its Risk Management

tahun 2011, PT PLN (Persero) telah menggambarkan Profil Risiko Perusahaan untuk mencapai sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang didasarkan pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko sesuai KEPDIR No. 537.K/DIR/2010 yang saat ini telah diperbaharui menjadi PERDIR No. 0355.K/DIR/2014.

Dengan semakin membaiknya pengelolaan risiko PT PLN (Persero), maka diharapkan perkembangan tersebut dapat mendukung perubahan paradigma pengelolaan Perusahaan dari *crisis management*, yang bersifat reaktif korektif terhadap suatu permasalahan yang timbul, menjadi *risk management* yang berupa pengelolaan preventif sebelum suatu risiko benar-benar terjadi dan menjelma menjadi masalah bagi Perusahaan.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dijabat oleh R. Krisna Simbaputra sejak Januari 2014.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, pernah menjabat sebagai Expert Kinerja Korporat pada Juni 2013 - Desember 2013, sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai General Manajer Wilayah Sumatera Utara pada Januari 2012 – Mei 2013 dan General Manajer Wilayah Sumatera Barat pada tahun Juli 2010 - Desember 2011 serta berbagai jabatan Manajerial lain di PLN Distribusi Jawa Timur, PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P3B JB), PLN Wilayah Kaltim, Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981 dan melanjutkan jenjang pendidikan S-2 Ilmu Manajemen pada tahun 1993 dari Sheffield University.

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesiapan (*preparedness*) Perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) yang semakin tinggi di lingkungan global, regional maupun lokal yang berpotensi mengancam sumber daya dan bahkan kelangsungan Perusahaan.
2. Menjaga agar Perusahaan tetap dalam koridor pengelolaan usaha yang berkehati-hatian (*prudent operation*) dalam setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai bentuk tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan.

Profile to achieve its Work and Budget Plan (RKAP) targets, based on the Risk Management Implementation Policy in accordance with Decision of the Board of Directors No. 537.K/DIR/2010, and amended by Regulation of the Board of Directors No. 0355.K/DIR/2014.

Improvements to PLN's implementation of risk management is expected to support the change in the Company's previous paradigm from one of crisis management to being reactive and corrective to all problems that arise, to one that is more preventive, before a risk becomes a problem for the Company.

Profile of Head of Risk Management and Compliance

The Risk Management and Compliance Division has been chaired by R. Krishna Simbaputra since January 2014.

Prior to serving as Head of the Risk Management and Compliance Division, he served as Corporate Performance Expert from June 2013 to December 2013. Previously, he served as General Manager of North Sumatra Region from January 2012 to May 2013 and as General Manager of West Sumatra from July 2010 to December 2011. He also held other managerial positions such as PLN Distribution East Java, PLN Distribution and Load Control Central Java & Bali (P3B JB), PLN Kaltim Region, and Distribution, West Java and Banten.

He completed his Bachelor Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in 1981 and continued his Masters Degree in Management Science in 1993 from Sheffield University,United Kingdom

Risk Management Implementation Goals

The implementation of Risk Management by the Company is intended to:

1. Increase the Company's preparedness in facing increasing uncertainties in the global, regional and local environment, which has the potential to threaten the Company's resources and sustainability.
2. Maintain the Company's business management to remain within the corridors of prudent operations in each of its activities, as a part of Good Corporate Governance in order to increase added value for the Company.

Lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Pada prinsipnya setiap pemilik risiko di Perusahaan berkewajiban mengelola risikonya, dan setiap proses bisnis wajib dikelola risikonya sesuai ketentuan Perusahaan.
2. Manajemen Risiko Perusahaan diterapkan pada
   a. Proses pengambilan keputusan;
   b. Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional Perusahaan;
   c. Segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah proses pelaporan, dalam rangka continuous improvement;
   d. Aspek Kepatuhan (*Compliance*).
3. Pada prinsipnya Manajemen Risiko diterapkan pada segenap unsur organisasi dalam Perusahaan, namun demikian baik pemantauan secara korporat dilakukan hanya sampai dengan Unit Induk dan Anak Perusahaan maupun risiko tertentu yang secara spesifik akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan
4. Dalam pelaksanaannya, Manajemen Risiko yang spesiflk pada bidang, fungsi, proses bisnis maupun kebutuhan tertentu dapat ditetapkan dalam ketentuan tersendiri, namun tetap mengacu pada Peraturan ini, diantaranya seperti namun tidak terbatas pada Manajemen Risiko Keuangan, Manajemen Risiko Proyek; Manajemen Risiko Teknologi lnformasi; Manajemen Risiko Kecurangan (*Fraud*), Manajemen Risiko Kelangsungan Usaha (*Business Continuity*), dan lmplementasi Pengendalian lnternal (termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam pelaporan keuangan /lCoFR).

Sistim Pengelolaan Risiko

Dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan maupun pelaksanaan pengelolaan kegiatan lainnya, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *risk management* melalui implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM).

Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PLN disusun dengan menggunakan acuan utama ISO 31000: 2009 (*International Standard of Risk Management*). Namun demikian beberapa hal seperti aspek *compliance*, lingkup penerapan, beberapa peristilahan, mengacu pada standar COSO – ERM, AS/NZS dan lain-lain.

The scope of risk management implementation is as follows:

1. In principle, it is compulsory for every risk owner in the Company to manage risks, and for every business risk to be managed in accordance with the Company's regulations.
2. Risk Management is applied to:
   a. The decision-making process;
   b. The planning process and achievement of the Company's strategic and operational goals.
   c. The Company's entire business process, including reporting, in order to achieve continuous improvement.
   d. Compliance.
3. In principle, risk management is implemented in all of the Company's organizational elements, however, corporate monitoring is applied only at the level of the holding company and its subsidiaries, and on particular risks that will specifically affect the Company's business continuity.
4. In practice, risk management is specific to each field, function, and business process. Requirements can be stipulated separately, although they must still refer to the following regulations: Financial Risk Management, Project Risk Management; Information Technology Risk Management; Fraud Risk Management, Business Continuity Risk Management, and implementation of internal control (including Internal Control Over Financial Reporting/ICoFR).

Risk Management System

In order to achieve the Company's goals and manage its activities, the Company is committed to applying risk management by implementing Enterprise Risk Management (ERM).

The guidelines for Risk Management Implementation in PLN is based on ISO 31000:2009 (International Standard of Risk Management). However there are several aspects such as compliance, scope of application, and terminologies that are based on COSO – ERM, AS/NZS, and other standards.

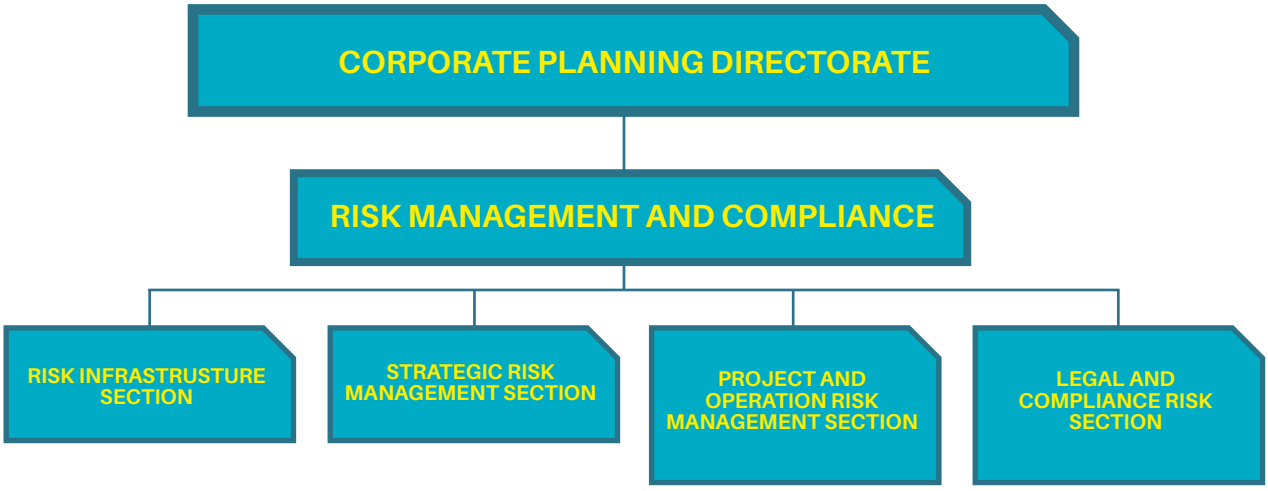

Struktur Manajemen Risiko dan Standar Proses Manajemen Risiko

Untuk mengelola risiko, Perseroan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Divisi MRK) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko tersebut dilingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk menyusun risk profile yang bersifat strategis sebagai *early warning* kepada manajemen Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko dalam suatu siklus pengelolaan risiko (atau penyusunan Kajian Risiko) yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Risk Management Structure And Risk Management Standard Process

In order to manage risks, the Company has formed the Risk Management and Compliance Division (RMC Division), which is responsible for managing policy, framework, guidance of risk management implementation, risk management infrastructure, and socializing and implementing risk management in the Company's environs. This division is also responsible for reporting strategic risk profiles as an early warning to the Company's management. The Risk Management Division reports to the Director of Corporate Planning.

The Company manages risks in the Risk Management Cycle (or Risk Assessment Preparation) described in the following diagram:

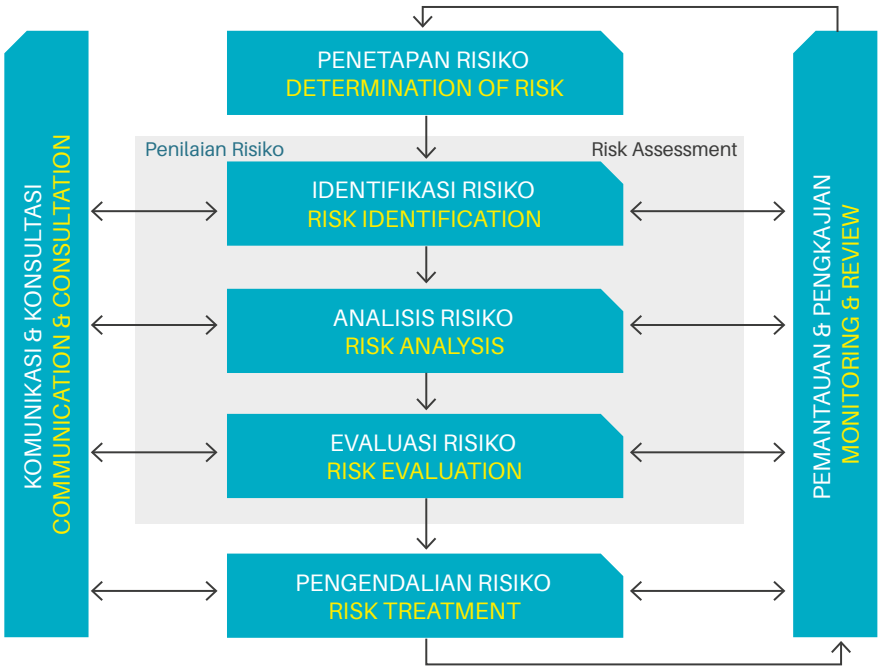

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam *Key Performance Indicators* Korporat, unit maupun Anak Perusahaan, audit manajamen risiko oleh auditor internal, *review* implementasi dan asesmen *risk maturity* oleh Pihak Independen, *risk management award* (RMA), maupun pemantauan dan pelaporan kepada *stakeholders*.

Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat, dengan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko dimaksud meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional, proyek dan kepatuhan serta penilaian atas perbaikan kontrol dan penanganan risiko.

Unit kerja operasional selaku *risk owner* bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas yang dilakukan. Pemimpin unit kerja operasional bertanggung jawab mengidentifikasi risiko, menilai risiko yang ada di unit kerjanya dan memantau risiko termasuk memitigasi risiko dengan level ekstrem dan tinggi, kemudian melaporkan profil risiko serta tindak lanjut mitigasi yang dilakukan.

Evaluation Of Risk Management System Effectiveness

Monitoring and evaluating risk management implementation is conducted through several mechanisms, such as incorporating aspects of risk management into the Company's and its subsidiaries' KPIs, conducting the risk management audit by the Internal Supervisory Unit, reviewing implementation and risk maturity assessment by an independent party, the Risk Management Award (RMA), and monitoring and reporting to stakeholders.

In its implementation, the Compliance and Risk Management Division conducts periodic evaluation of the effectiveness of the Company's risk management system, and reports the Risk Profile to the Board of Directors. The Risk Profile includes strategic risk management, financial, operational, project, and compliance reports, as well as an assessment of the control and risk management improvements.

Operational working units as risk owners are responsible for managing risks in all activities. The Head of an Operational Working Unit is responsible for identifying, rating, monitoring and mitigating high and extreme levels of risk, reporting risk profiles, and conducting mitigation.

Pelaksanaan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Dalam rangka mengembangkan agar dapat mencapai tingkat *maturity* yang lebih tinggi, PLN memperbaiki penerapan manajemen risiko yang telah ada. Untuk tahap awal, PLN membuat sistem pelaporan manajemen risiko berbasis aplikasi sehingga akan mempermudah proses pemantauan dari profil risiko. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu PLN dalam implementasi dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan

Enterprise Risk Management (ERM) yang lebih efektif dilaksanakan dengan mengunakan software/aplikasi untuk *data entry, cataloging* dan juga *database* untuk membantu menganalisa daftar risiko dan *tracking* implementasi program mitigasi risiko.

PLN juga melaksanakan program *Project Risk Analysis* untuk melakukan *review* dan analisis risiko-risiko yang terkait dengan proyek di PLN, dengan *pilot project* pada Proyek Pangkalan Susu 3 dan 4 (2 x 200 MW) dan Proyek Jawa Bali *Crossing*. Yang tidak kalah penting, PLN juga sedang mengembangkan dan mengimplementasikan Business Continuity Management System (BCMS) untuk membantu PLN dalam membangun dan mengimplementasikan sebuah *business continuity plan* yang ringkas dan teratur.

Business Continuity plan ini akan digunakan oleh PLN untuk secara efektif mengurangi dampak dari sebuah krisis dan untuk memulai kembali kegiatan usaha setelah mengalami gangguan.

Program-program tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan PLN untuk mencapai target Maturity Level ERM 3,5 di tahun 2016. Untuk mencapai target tersebut, PLN telah memetakan *maturity level* ERM di awal tahun, kemudian melakukan *Gap Analysis* untuk menentukan program kerja yang perlu dilaksanakan oleh PLN secara korporat untuk mencapai *maturity level* ERM 3,5 dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya tersebut melibatkan Asesor independen yang melakukan pengukuran *maturity level*.
Metode Pengukuran *maturity level* menggunakan metode *Six Element of Infrastructure* yang dikombinasikan dengan *Capability Maturity Model* yang dikembangkan oleh Carnegie Melon University. *Six Element of Infrastructure* adalah 6 elemen atau aspek yang dilihat untuk mengukur tingkat kematangan implementasi dan pengelolaan risiko.

Berdasarkan penilaian dengan metode tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen

Implementation Of Enterprise Risk Management (ERM)

In order to achieve a higher level of maturity, PLN has improved its risk management implementation. In the initial phase, PLN created a risk management reporting application to improve the risk profile monitoring process. The main goal of this application is to support PLN in implementing risk management in the company.

More Effectively Enterprise Risk Management (ERM), by using data entry, cataloguing and data base software to analyze a list of risks, and to track the implementation of the risk mitigation program.

PLN also conducts a project risk analysis, with pilot projects being the Pangkalan Susu Project 3 and 4 (2x200MW), and the Java–Bali Crossing Project. More importantly, PLN is also developing and implementing the Business Continuity Management System (BCMS) to support the formulation and implementation of a concise and well-organized business continuity plan.

The Business Continuity plan will be used by PLN to effectively reduce the adverse effects of a crisis and to restart business activities after an interruption.

Such programs are a continuation of the efforts made to achieve the target of ERM Maturity Level 3.5 in 2016. To achieve this target, PLN mapped the maturity level ERM at the beginning of the year and conducted a gap analysis to determine the work program to be implemented by PLN company-wide to achieve a ERM maturity level of 3.5 with the criteria established in advance. The effort also involved an independent assessment of the risk management maturity level.

Maturity level measurement methods were conducted by utilizing the Six Elements of the Infrastructure method combined with the Capability and Maturity Model, which was developed by Carnegie Mellon University. The Six Elements of Infrastructure are six elements or aspects used to measure the risk management maturity level.

Based on a review of the methods described above, it can be concluded that the maturity level of PLN's risk management

risiko di PT PLN (Persero) telah melampaui tingkat Defined. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian rata-rata seluruh Unit dan Anak Perusahaan.

system has exceeded the defined level. This review is based on the average score of all units and subsidiaries

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan pembangkit dan gardu induk, PLN bekerja sama dengan pihak asuransi, telah melakukan kegiatan *risk market survey* yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadi risiko di pembangkit dan gardu induk.

In order to improve the quality of risk management, in particular the risks associated with power plants and substations, PLN cooperates with the insurer in conducting risk market surveys that aim to identify aspects that can be a risk in the power plant and substation.

Pembangkit yang di survei adalah pembangkit dengan kapasitas di atas 25 MW yang termasuk di dalam polis asuransi PLN, sedangkan untuk gardu induk yang di survei adalah Gardu Induk Ekstra Tegangan Tinggi (GITET) 500kV. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh PLN untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi pada pembangkit dan gardu induk. Kegiatan telah dimulai pada akhir bulan April 2015 dan sudah selesai pada akhir bulan Juli 2016.

Generators that were surveyed, are generators with a capacity above 25 MW,and are included in PLN's insurance policy. Meanwhile, substations that were surveyed are Extra High Voltage Substation (GITET) 500kV. The results of these activities are in the form of recommendations for improvements that need to be done by PLN to minimize the risks that may occur in power plants and substations. The activities were initiated at the end of April 2015 and were completed by the end of July 2016.

Dari hasil rekomendasi tersebut PLN telah menyusun program pengelolaan dan mitigasi risiko-risiko potensial dari Pembangkit dan Gardu Induk.

From the results of these recommendations,PLN has developed management programs and the mitigation of risks from the power plant and substation.

PROFIL RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN UPAYA PENGELOLAAN RISIKO 2016

2016 CORPORATE RISK PROFILE AND MANAGEMENT

Penyusunan Profil Risiko Tahun 2016 dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan fokus perusahaan tahun 2016, yang telah diselaraskan dengan sasaran jangka panjang perusahaan. Risiko-risiko yang diidentifikasi dalam Profil Risiko Korporat Tahun 2016 terdiri dari risiko-risiko dengan level Ekstrem, Tinggi, Moderat dan Rendah. Perseroan kemudian fokus melakukan proses mitigasi terhadap risiko dengan profil ekstrem dan tinggi.

The 2016 Risk Profile of PLN was compiled based on the Company's goals and focus in 2016, aligned with the Company's long-term goals. Risks identified in the 2016 Corporate Risk Profile include risks with extreme, high, moderate and low levels. Company focus is on the risk mitigation process of extreme and high level risks.

Profil Risiko Perusahaan tahun 2016 yang diuraikan berikut adalah *key risks*, yaitu risiko-risiko yang secara dominan berpotensi mempengaruhi sasaran perusahaan diantaranya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

The 2016 Corporate Risk Profile described below are key risks, namely risks that predominantly have the potential to affect Company targets:

1. **Risiko tidak diperolehnya pendanaan yang memadai untuk Investasi**

   Guna mendukung antisipasi pertumbuhan konsumsi tenaga listrik pelanggan, peningkatan kontribusi pembangkit non-BBM, maupun menjaga keandalan penyediaan listrik, Perusahaan membutuhkan pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut dengan nilai yang sangat signifikan.

   Atas hal ini pada tahun 2016 perusahaan menghadapi risiko tidak tersedianya pendanaan yang memadai

1. **Risk of Insufficient Investment Funding**

   To support the anticipated growth in the consumption of electric power by customers, increasing contribution of non-oil powert plants, and maintenance of reliabile electricity supply, the Company requires adequate funding to meet the needs of investments of significant value.

   Regarding this issue, in 2016, the Company faced the risk of unavailability of adequate funding which was caused

sesuai rencana yang di antaranya diakibatkan oleh terjadinya pelampauan *debt covenant*, biaya pendanaan eksternal yang ditawarkan tinggi, prasyarat pendanaan eksternal kompleks dan sulit dipenuhi, pembatasan jaminan Pemerintah dalam skema SLA (*Subsidiary Loan Agreement*), belum disetujuinya PMN 2016, kebutuhan anggaran kas investasi RKAP 2016 yang tinggi, dan Net Cash flow operasi di bawah target.

Risiko ini akan membawa dampak tertundanya program investasi strategis yang mendukung pertumbuhan, efisiensi (*fuelmix*) dan penguatan *reserve margin*, tidak dapat melakukan ekspansi instalasi ketenagalistrikan, sustainabilitas pasokan tenaga listrik terancam, dan tertundanya penyelesaian program pembangkit 35 GW dan jaringan evakuasinya.

Setiap tahun *rating* selalu di-*update* oleh lembaga *rating* yakni Moody's, S&P, dan Fitch untuk internasional dan Pefindo untuk dalam negeri. Penyerahan data-data keuangan tepat waktu dan koordinasi lebih dini jika ada data keuangan maupun operasi yang akan menjadi pertanyaan dari lembaga rating diharapkan akan ikut menjaga penilaian lembaga rating [Sumber: DIVKEU/ eRMAP]. Rating PLN 2016: i) Pefindo: AAA; ii) Fitch: BBB-; iii) Moodys: Baa3 (2015; untuk 2016 belum dirilis); dan iv) S&P: BB.

PKLN yang telah disetujui akan dilaksanakan oleh PLN dengan aturan-aturan seperti sebelumnya seperti: i) Proses pinjaman oleh PT PLN (Persero) agar dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku-Pelaksanaan, penggunaan dan risiko pinjaman dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; ii) Persetujuan PKLN ini bukan merupakan bentuk penjaminan pemerintah dan pengelolaan risiko *default* menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero) secara korporasi; serta iii) Pelaksanaan dan penggunaan pinjaman dimaksud dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia secara periodik.

2. Risiko kebutuhan arus kas operasi tidak terpenuhi

Alokasi subsidi listrik dalam APBN/APBN-P tidak mencukupi kebutuhan Perusahaan, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan likuiditas untuk membiayai kebutuhan operasi dan investasi. Potensi kesulitan arus kas operasi Perusahaan dapat disebabkan oleh keterbatasan alokasi subsidi pada APBN 2016, kekurangan subsidi akibat penundaan kebijakan

by overshooting debt covenants, the high cost of available external financing, the complex and mostly unattainable requirements for external financing, restrictions on government guarantees in the SLA (Subsidiary Loan Agreement) scheme, the pending approval of PMN 2016, the high cash investment budget needs of Work and Budget Plan of 2016, and Net Cash flow operating below target.

This risk will see a delay in strategic investment programs that support the growth, efficiency (fuelmix) and strengthening of the reserve margin, the inability to expand electricity installations, the sustainability of electricity supply would be threatened, and the delayed completion of the 35 GW generator program and evacuation network.

Every year the rating is constantly updated by the rating agencies, namely Moody's, S&P, and Fitch for international ratings and Pefindo for domestic ratings. Submission of financial data in a timely manner and prompt coordination of financial data and operations will be the key questions posed by the rating agencies, and is expected to contribute to maintaining the assessments of rating agencies.

Overseas Commercial Loan that has been approved will be implemented by PLN along with the previous policies, such as: i) The process of lending by PLN to be carried out according to the rules and regulations. Implementation, usage and risk of the loan in question is the sole responsibility of PLN and must be in accordance with the applicable rules and regulations; ii) The Overseas Commercial Loan agreement will not constitute a government guarantee, and default risk management is the responsibility of PLN as a corporation; and iii) Implementation and the use of loans is reported periodically to the Coordinating Ministry for Economic Affairs and Bank Indonesia .

2. The risk of operating cash flow needs that are not met

Electricity subsidy allocation in APBN/APBN-P is inadequate for PLN, and may potentially cause difficulties of fund liquidity for operations and investment needs. The potential difficulty of operating cash flow can be attributed to the limited allocation of subsidies in the state budget, 2016, the lack of subsidies was due to the delay of the government policy on migration of 450 VA and 900 VA

pemerintah tentang migrasi pelanggan bersubsidi 450 VA dan 900 VA, migrasi pelanggan 450 VA dan 900 VA terlambat, pertumbuhan konsumsi listrik di luar Jawa-Bali melampaui asumsi dan pertumbuhan konsumsi listrik di Jawa Bali di bawah asumsi, penerimaan pendapatan di bawah target, tunggakan meningkat, kenaikan biaya operasi melebihi target, terjadi keterlambatan pencairan subsidi, kegagalan implementasi *automatic tariff adjustment*, perubahan kebijakan/regulasi Pemerintah terkait tarif, dan kenaikan BPP akibat beroperasinya IPP Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

subsidized customers, the migration of 450 VA and 900 VA customers was behind schedule, electricity consumption growth outside Java-Bali exceeded the assumptions and growth of electricity consumption in Java-Bali, arrears increased, operating costs were over the target, a delay in disbursement of subsidies, the failure of the implementation of automatic tariff adjustment, changes in tariff policies related to government regulations, and the increase in cost of supply due to the operation of IPP New and Renewable Energy (EBT).

Risiko ini akan membawa dampak terancam *default* karena terlampauinya *Debt Covenant* terutama DSCR, kegiatan operasional yang direncanakan dalam RKAP tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, biaya dan prasyarat pendanaan eksternal meningkat, terganggunya pelayanan penyediaan tenaga listrik, dan reputasi perusahaan menurun.

These risks will impact the exposed default for exceeding Debt Covenant mainly DSCR, operational activities that planned in Work and Budget Plan were not fully implemented, costs and rising external financing requirements, disruption of electricity supply, and the decline in the Company's reputation.

Penanganan risiko yang sudah ada berupa *demand side management* pada subsistem dengan BPP lebih besar dari harga jual dan melaksanakan *Generator of Sales* (GOS) di daerah dengan harga jual lebih besar dari BPP, meningkatkan Rupiah Jual per kWh dan pendapatan lain-lain, menurunkan COP (*collection of period*), optimalisasi SIPPA (Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran) mengoptimalkan skema KMK (Kredit Modal Kerja), menjaga performa operasi pembangkitan, penyaluran dan distribusi sesuai target RKAP, dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Sedangkan mitigasi yang dipersiapkan adalah berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk pemenuhan minimum *cash flow*, koordinasi dengan instansi terkait mengenai kemungkinan terlampauinya *Debt Covenant*, mempersiapkan strategi efektivitas proses migrasi dan pemberlakuan tarif nonsubsidi, membuat simulasi perhitungan kebutuhan tambahan subsidi untuk usulan pada APBN-P 2016, dan menjalankan Pro-IDI2 (Program Intensifikasi Dana Internal untuk Investasi) yang efektif.

Existing risk handling in the form of demand management in the subsystem with cost of supply is greater than the selling price and the Generator of Sales (GOS) in the region with a sales price greater than the cost of supply, increasing the IDR Sell per kWh and other income, lower COP (collection of period), optimization of SIPPA (Information Systems Planning and Budgetary Control) to optimize Working Capital scheme, maintain the performance of the generator operation, transmission and distribution according to CBP target, and completing projects on time. Meanwhile, mitigation that is prepared is coordinating with relevant stakeholders to meet the minimum cash flow, coordination with relevant agencies regarding the possibility of exceeding the Debt Covenant, effectiveness of strategies of the migration process and the implementation of non-subsidized tariffs, create a simulation of the need for additional subsidies for the proposal on the APBN-P 2016, and performing Pro-IDI2 Intensification Program Internal Fund for Investment that are effective.

3. Risiko Kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap IDR

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah sangat mempengaruhi kemampuan PLN dalam memenuhi kewajiban utangnya. Pengaruh mata uang USD sangat besar. Meskipun asumsi yang digunakan cukup pesimis namun risiko ini masih dapat terjadi dengan dampak yang signifikan. Kondisi ini disebabkan perlambatan ekonomi China, belum ada kepastian kenaikan suku bunga The Fed, pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, volume pinjaman porsi mata uang

3. The risk of increasing foreign currency exchange rates against the Indonesian Rupiah.

The risk of increasing foreign currency exchange rates against the Indonesian Rupiah influenced PLN's ability to meet its debt obligations. The influence of the USD is very strong . Although the assumptions are quite pessimistic, this risk can still occur with a significant impact. This condition was caused by a slowdown in China's economy,uncertainty in the increase of the federal funds rate, and Indonesia's low economic growth, the significant volume of the loan portion of foreign currency, the

asing cukup signifikan, sebagian besar *spare part* pembangkit dan penyaluran merupakan produk impor, kontrak dalam valas cukup signifikan (IPP, gas), dan pelaksanaan *hedging* tidak efektif, belum didukung SDM yang kompeten dan belum terbentuk sistem yang baik.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing ini akan membawa dampak peningkatan beban operasi dan BPP, peningkatan beban pengembalian pinjaman (pokok dan bunga) berdenominasi valas, subsidi bertambah besar, dan berkurangnya kemampuan pendanaan internal.

Penanganan yang sudah ada berupa pelaksanaan *hedging* untuk kewajiban yang jatuh tempo pada tahun berjalan, pemantauan kebutuhan valas secara ketat agar pembelian valas dapat dilakukan pada harga yang optimal, optimalisasi pendanaan dalam negeri, memastikan kontrak-kontrak ke depan dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai PBI No.17/2015, dan meningkatkan TKDN dalam kegiatan operasi dan investasi serta melakukan penyiapan material suku cadang melalui *reverse engineering*. Sedangkan mitigasi yang ditetapkan berupa meningkatkan kemampuan SDM dan kompetensi serta meningkatkan sistem yang lebih baik dalam penentuan keputusan *hedging*.

4. Risiko Kenaikan harga energi primer

Risiko kenaikan biaya energi primer disebabkan oleh tren harga komoditas (energi primer) masih tidak stabil, kondisi politik dan ekonomi dunia tidak stabil, pola operasi pembangkit tidak sesuai dengan rencana, dan *growth* yang tinggi di daerah yang masih disuplai pembangkit BBM.

Risiko ini akan membawa dampak berupa peningkatan beban operasi dan BPP, kebutuhan subsidi meningkat, dan hambatan suplai bahan bakar ke PLN untuk kontrak jangka panjang.

Penanganan risiko yang sudah ada berupa melaksanakan PerDir No.017/2015 tentang Peningkatan dan Pengendalian Penjualan Tenaga Listrik, meningkatkan performa pembangkit non-BBM, khususnya pada aspek *heat rate* dan EAF, optimalisasi pola operasi sistem dengan *merit order*, dan koordinasi keselarasan jadwal pemeliharaan pembangkit, khususnya pembangkit non-BBM. Sedangkan mitigasi yang disiapkan di antaranya adalah mendorong Pemerintah agar harga gas untuk industri berlaku juga untuk PLN, pembelian langsung gas dengan skema G2G, re"Zona"lisasi pengadaan Batubara, mengusulkan memperbesar porsi alokasi DMO, dan sejalan dengan rencana PLN masuk ke bisnis gas, perlu

majority of spare parts for power plants and distribution in imported products, the significance of which currency the contract is in (IPP, gas), and the implementation of ineffective hedging, not supported by competent human resources, which has not drawn up a viable system.

The risk of increasing foreign currency exchange rates will see an increase in operating expenses and cost of supply, an increase in loan repayments (principal and interest) denominated in foreign currency, growth in subsidies, and reduced internal financing capability.

Existing handling is in the form of hedging for liabilities maturing in the current year, strict monitoring of the demand for foreign currency so that foreign exchange purchases can be done at an optimal price, optimization of domestic funding, ensuring contracts are drawn up in Indonesian Rupiah in accordance with PBI No. 17/2015, and increase local content in operations and investment activities, as well as prepare the material parts through reverse engineering. Meanwhile, the mitigation set forth in the form of Human Resources and competencies improvement, as well as improve the system for hedging decision-making.

4. Risk of increasing primary energy prices

The risk of increasing primary energy prices caused by unstable commodity price trends (primary energy), the instability of global political and economic conditions, the pattern of plant operations are not in accordance with the original plan, and high growth in areas that are still supplied with oil based generators.

This risk would have an impact on increased operating expenses and cost of supply, the need for an increase in subsidies,and barriers to fuel supplies to PLN for long-term contracts.

The handling existing risks in implementing President's Decision No.017/2015 on Improvement and Control of Electricity, improve the performance of non-fuel plants, especially in the aspect of heat rate and EAF, optimization of system operation pattern in order of merit, and coordination of alignment for generator maintenance schedules, particularly non-fuel plants. Meanwhile, mitigation that is prepared among others is to encourage the Government to set the price of gas for industry so that it also applies to PLN, the direct purchase of gas with a scheme G2G, procurement rezonalization of coal, proposes to increase the share allocation of DMO, and in line with the plan of PLN to enter the gas business, the

pengembangan organisasi dan kompetensi untuk menggunakan opsi *hedging* baik *futures*, swap dalam pengadaan gas.

5. Risiko Pertumbuhan Konsumsi Tenaga Listrik di Bawah Target

Terjadinya penurunan pertumbuhan konsumsi tenaga listrik dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi nasional sehingga pasar konsumtif di dalam negeri, dan produksi industri relatif menurun, kenaikan nilai tukar valas terhadap rupiah, PerMen ESDM No.28 tahun 2012 tentang penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang berpotensi kehilangan pangsa pasar, pelanggan bisnis dan industri membangun pembangkit sendiri untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan listriknya, dan dampak kenaikan tarif listrik yang relatif tinggi mengakibatkan pelanggan rumah tangga dan industri melakukan penghematan konsumsi listriknya

Hal tersebut dapat berdampak pada pendapatan dari penjualan listrik lebih rendah dari rencana, tingkat *return on investment aset* PLN di bawah target, dan PLN terkena penalti TOP (*Take or Pay*) IPP dan *supplier* energi primer.

Namun demikian, penanganan yang sudah ada untuk risiko ini berupa meningkatkan pemasaran secara agresif dan proaktif dengan tetap memperhatikan prinsip keekonomian, mempercepat elektrifikasi daerah yang belum terjangkau listrik, dan secara periodik, me-review perhitungan perkiraan kebutuhan listrik dengan data terbaru dan lebih akurat. Sedangkan mitigasi yang sudah dipersiapkan adalah mendorong Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mempercepat arus masuk investasi agar industri dan perdagangan tumbuh lebih cepat sehingga dapat menyerap listrik lebih banyak, memastikan program 35GW tepat waktu dalam rangka mencukupi kebutuhan listrik, dan sejalan dengan program 35GW, PLN mendorong Pemerintah agar mempertimbangkan optimalisasi peran PLN sebelum memberikan izin wilayah usaha kelistrikan kepada pihak lain.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) PLN bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi Satuan Pengawasan Intern yang tidak terbatas pada fungsi audit internal dan audit khusus dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan berbasis risiko.

organizational development and competence necessary to use either hedging options on futures or swaps in gas procurement.

5. Risk of Growing Electricity Consumption below Target

The decrease in the growth of electrical power consumption can be caused by a slowdown in the national economy so that the domestic consumer market, and industrial production is in relative decline,the foreign exchange rate against the Rupiah is increasing,the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 year 2012 on the designation of electricity supply business that are potentially losing market share, business and industrial customers must build their own plants to meet partial or entire electricity needs, and the impact of rising electricity rates causing households and industrial customers to reduce electricity consumption

This aspect can have an impact on revenues from electricity sales that are lower than planned, the rate of return on investment assets of PLN is below the target, with PLN receiving TOP (Take or Pay) IPP penalty as the primary energy supplier.

However, the existing handling of this risk is an aggressive and pro-active increase in marketing with due regard to the principles of economics, acceleration of the electrification of areas not reached by electricity, and periodic review of an approximate calculation of electricity needs with up-to-date and more accurate data. Meanwhile, mitigation that has been prepared is to encourage the Central and Regional Governments to accelerate investment so that industry and trade can grow faster, thus absorbing more electricity, ensuring that the 35GW program is on track in order to meet the electricity needs, and in line with the 35GW program, PLN encourages the Government to consider optimizing the role of PLN prior to authorizing the electricity supply business to other operating parties.

INTERNAL SUPERVISORY UNIT (SPI)

The Internal Supervisory Unit of PLN has the responsibility to lead, plan, implement, evaluate, and conduct training on the Internal Audit, although this is not restricted to internal and specific audit functions in order to implement good corporate governance (risk-based internal audit).

Profil Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern dijabat oleh Ali Mudin sejak September tahun 2015.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Asuransi Jiwa – Beringin Jiwa Sejahtera (2011-sekarang), setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris (2006-2011). Sebelumnya menjalani karir di PT Bank BRI (Persero) Tbk dengan berbagai jabatan dan tugas, meliputi: Kepala Audit Intern BRI, Kantor Pusat (2008-2015), Kepala Divisi Logistik, Kantor Pusat BRI (2005-2008), Pemimpin Wilayah–Kantor Wilayah Banda Aceh (2014- 2015), Kepala Divisi Hukum, Kantor Pusat BRI (2003), Kepala Desk Hukum, Kantor Pusat BRI (2001-2003), Pemimpin Cabang Kebayoran BRI - Kantor Wilayah Jakarta (1998-2001) dan berbagai jabatan managerial lain di lingkup PT BRI (Persero) Tbk. Menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1981 dan melanjutkan jenjang pendidikan S-2 Manajemen Ekonomi/ Manajemen Pemasaran pada tahun 2006 dari Universitas Padjadjaran, Bandung

IInternal Supervisory Unit Profile

The Head of the Internal Supervisory Unit has been Ali Mudin since September 2015.

He currently serves as President Commissioner of PT Asuransi Jiwa – Beringin Jiwa Sejahtera (2011 -present), after previously serving as Commissioner (2006 - 2011). Prior to that, he pursued a career at PT Bank BRI (Persero) Tbk with a variety of positions and duties, including: Head of Internal Audit BRI, the Central Office (2008 - 2015), Head of Logistics Division, Central Office BRI (2005-2008), Regional Leader - Regional Office Banda Aceh (2004- 2005), Head of the Legal Division, Central Office BRI (2003), Head of the Legal Desk, BRI Central Office (2001-2003), Branch Manager Kebayoran BRI - Jakarta Regional Office (1998-2001) and various other managerial positions. He obtained a Bachelors Degree in Legal Studies from the University of Padjadjaran Bandung in 1981 and continued his Masters education in Economic Management and Marketing Management in 2006 from the University of Padjadjaran, Bandung

Tugas Pokok Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern, bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dengan tugas pokok:

1. Kebijakan dan strategi pengelolaan audit intern, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk didalamnya meningkatkan kwalitas audit.
2. Program Audit Berbasis Risiko diseluruh lingkungan PLN yang meliputi Kantor Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan Anak Perusahaan, termasuk didalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit intern dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.
3. Program audit khusus (investigasi/*fraud*) di seluruh lingkungan PLN yang meliputi Kantor Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan Anak Perusahaan termasuk didalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.
4. Hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk dan tidak terbatas pada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kantor Akuntan Publik.

Pada Tahun 2016 ini, PLN telah melakukan pembaruan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) seiring dinamika global, regional maupun lokal sebagai wujud pelaksanaan GCG. Piagam ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.

Piagam Pengawasan Intern juga dibuat untuk menjelaskan mandat dan kewenangan yang diberikan kepada SPI sebagai landasan tanggung jawab, kewenangan, independensi dan pelaporan kegiatan SPI. Piagam ini tidak membatasi Auditor Internal membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern telah berubah dengan keluarnya Peraturan Direksi No. 0064.P/ DIR/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Susunan Organisasi, tanggung jawab dan tugas pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) yang telah diubah dengan Peraturan Direksi No. 0213.P/ DIR/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Susunan Organisasi, tanggung jawab dan tugas pokok pada

Main Tasks of The Head of Internal Supervisory Unit

The Head of the Internal Supervisory Unit is responsible for ensuring the implementation of the internal audit according to good corporate governance (GCG). Its main tasks are as follows:

1. Policies and strategies for the management of the internal audit, audit standards, methodology, systems and information technology, which includes improvement of the Company's overall audit quality;
2. Risk-Based Audit Program throughout PLN, that includes the Central Office, Parent Unit, Executive Unit and its Subsidiaries, including evaluating, making recommendations on the results from the internal audit and monitoring the follow-up completion
3. The special audit program (investigation and fraud) in all PLN environs, which covers the Central Office, Parent Unit, Executive Unit and Subsidiaries, including evaluation, giving special audit recommendations and monitoring follow-up resolutions.
4. The working relationship with the external auditor, including, but not limited to, the Audit Board and the Public Accounting Firm

In 2016, PLN updated its Internal Audit Charter in line with global, regional and local dynamics, as a form of GCG implementation. The Charter is designed to provide added value and improve the Company's operations, while also aiming to achieve its objectives through a systematic and orderly approach to evaluation,improvement in professionalism and operational effectiveness, risk management, risk control and governance processes, according to the principles of good corporate governance.

The Internal Audit Charter also explains the mandate and authority given to Internal Supervisory Unit as a basis of responsibility, authority, independence and reporting activities of the Internal Supervisory Unit. This Charter does not limit the Internal Auditor to make professional judgment and conduct an innovative audit.

Organizational Structure Of Internal Supervisory Unit

The organizational structure of the Internal Supervisory Unit was amended with the issuance of Board of Directors Regulation No. 0064.P/DIR/2015 dated 14 September 2015 on Organization Structure, responsibilities and basic duties of the PT PLN (Persero) Internal Supervisory Unit, as amended by Board of Directors Regulation No. 0213.P/DIR/2016 dated May 20, 2016 on Organizational Structure, responsibilities

Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) , yang terdiri dari 1 Kepala Satuan Pengawasan Intern, 8 Inspektur, 22 Group Head Auditor Regional, 1 Group Head Audit TI, 1 Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit (KSPKA), 1 Group Head PSKA, dan 193 tenaga auditor.

and basic duties of PT PLN (Persero) Internal Supervisory Unit, which comprises 1 (one) Internal Supervisory Unit Head, 8 (eight) Inspectors, 22 (twenty two) Regional Auditor Group Heads, 1 (one) IT Audit Group Head, 1(one) Audit Quality System Development Head (KSPKA), 1(one) PSKA Group Head and 193 (one hundred ninety three) auditors.

Struktur organisasi Satuan Pengawas Intern sesuai SK DIR No. 0213.P/DIR/2016 tanggal 20 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Internal Supervisory Unit according to SK DIR No. 0213.P/DIR/2016 dated May 20, 2016 is as follows:

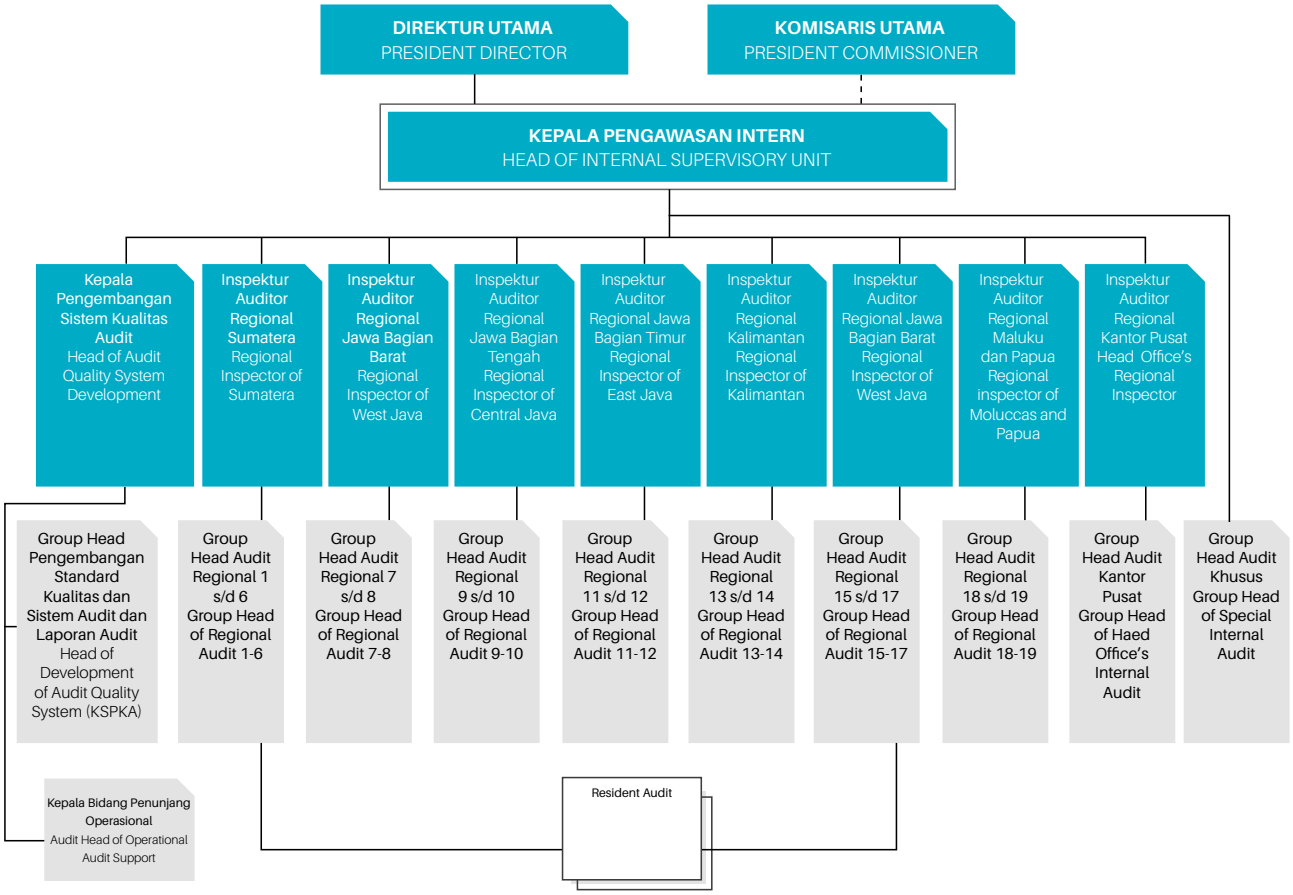

Proses Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal

Sesuai formasi tersebut, organisasi SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang berada langsung di bawah Direktur Utama dan bertangggung jawab kepada Direktur Utama. Pemilihan Kepala SPI dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

The Election and Appointment Process for the Head of the Internal Supervisory Unit

In accordance with this structure, the Internal Supervisory Unit is led by the Internal Supervisory Unit Head and falls directly under the President Director and is directly responsible to the President Director. The selection of the Internal Supervisory Unit Head is conducted by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

Sertifikasi Auditor Internal

Untuk memastikan *assurance* hasil pemeriksaan audit terhadap kepatuhan dan proses bisnis yang berlangsung, PLN menerapkan kebijakan perolehan sertifikasi di bidang audit oleh setiap auditor. Oleh karenanya PLN menyediakan anggaran pelatihan sertifikasi bagi setiap pegawai yang bertugasi di Satuan Pengawasan Internal. Dari proses pelatihan tersebut, saat ini sebagian besar tenaga auditor di PT PLN (Persero) sudah bersertifikat *Qualified Internal Audit* (QIA).

Internal Audit Certification

To ensure the audit results comply with sustainable business processes, PLN introduced a policy of obtaining audit certification for all auditors, and has provided a certification-training budget for all employees assigned to ISU. As a result of the training,at present most of the auditors at PLN have been certified as Qualified Internal Auditors (QIA).

Jumlah SDM SPI - PLN

Total Human Resources of PLN's ISU

Uraian	Jumlah Total	Description
KSPI	1	KSPI
Inspektur Auditor Regional	7	Inspector Auditor Regional
Group Head Auditor Regional	18	Group Head Auditor Regional
Group Head/Kabid Pusat	7	Group Head
Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit (KPSKA)	1	Head of Audit Quality System Development
Deputy Group Head	58	Deputy Group Head
Auditor Eksis	79	Eksisting Auditor
Auditor hasil rekrut *fresh graduate* 2015/2016	456	Auditor proceeds from the fresh graduate program 2015/2016
Jumlah	**627**	**Total**

PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN PENGAWAS INTERN

Pemeriksaan Operasional Tahun 2016 dan Tindak Lanjut

Berdasarkan Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2016, telah dilaksanakan Pemeriksaan Operasional terhadap 55 unit induk, 323 unit pelaksana, 14 kantor pusat dan 9 anak perusahaan. Total Obyek (*auditee*) yang diperiksa adalah sebanyak 232 dengan jumlah temuan sebanyak 2.036 temuan.

1. Berdasarkan 2.036 temuan, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh auditee (unit PLN). Tindak lanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 1.730 temuan dengan rincian temuan sebagai berikut:

ACTIVITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT

Operational Audit and Follow-up Action, 2016

Based on the Annual Audit Work Plan (AAWP) in 2016, PLN conducted operational audits of 55 main units, 323 implementation units, 14 head offices and 9 subsidiaries. Total units audited amounted to 232 (two hundred thirty two) units with total findings amounting to 2.036 (two thousand thirty six) findings.

1. All of the 2.036 findings have been fully followed up by the PLN units involved. The completed and declared follow-ups amounted to 1,730 (one thousand seven hundred thirty) findings, as follows:

Regional Wilayah Regional Areas	Objek Audit Object of Audit					Objek Audit Object of Audit					Temuan Audit Audit Findings		
	KI	UP	KP	AP	Jumlah	KI	UP	KP	AP	Jumlah	Jumlah	Selesai	Monitor
Inspektur Sumatera	14	85	1	0	100	24	39	1	0	64	345	300	45
Regional 1-Medan	2	16	1	0	19	2	5	0	0	8	55	45	10
Regional 2-Pekanbaru	3	22	0	0	25	5	9	0	0	14	63	49	14
Regional 3-Palembang	3	13	0	0	16	7	9	0	0	16	100	86	14
Regional 4-Medan	1	6	0	0	7	2	4	0	0	6	32	31	1
Regional 5-Palembang	1	10	0	0	11	2	9	0	0	11	72	68	4
Regional 6-Medan	4	18	0	0	22	6	3	0	0	9	23	21	2
Inspektur Jawa Bagian Barat	5	36	1	0	42	7	15	1	0	23	141	112	29
Regional 7-Jakarta	2	24	1	0	27	4	7	1	0	12	76	63	13
Regional 8-Jakarta	3	12	0	0	15	3	8	0	0	11	65	49	16
Inspektur Jawa Bagian Tengah	6	43	1	0	50	7	16	1	0	24	196	172	24
Regional 9-Bandung	2	29	1	0	32	2	9	1	0	12	104	96	8
Regional 10-Semarang	4	14	0	0	18	5	7	0	0	12	92	76	16
Inspektur Jawa Bagian Timur	5	34	1	0	40	9	11	1	0	21	402	351	51
Regional 11-Surabaya	2	22	1	0	25	3	11	1	0	15	320	287	33
Regional 12-Surabaya	3	12	0	0	15	6	0	0	0	6	82	64	18
Inspektur Kalimantan	6	32	1	0	39	11	6	1	0	18	104	83	21
Regional 13-Banjarbaru	3	21	1	0	25	5	6	1	0	12	83	67	16
Regional 14-Nalikpapan	3	11	0	0	14	6	0	0	0	6	21	16	5
Inspektur Sulawesi dan Nusa Tenggara	7	47	1	0	55	16	26	1	0	43	407	381	26
Regional 15-Manado	2	27	0	0	29	5	12	0	0	17	165	162	3
Regional 16-Makassar	3	10	1	0	14	5	5	1	0	11	82	79	3
Regional 17-Mataram	2	10	0	0	12	6	9	0	0	15	160	140	29
Inspektur Maluku dan Papua	4	17	1	0	22	8	3	1	0	12	88	67	21
Regional 18-Jayapura	2	4	0	0	6	6	0	0	0	6	50	38	12
Regional 19-Ambon	2	13	1	0	16	2	3	1	0	6	38	29	9
Inspektur Kantor Pusat	8	29	7	9	53	12	1	5	9	27	353	264	89
Regional 20-Jakarta	0	0	3	4	7	0	0	2	5	7	66	39	27
Regional 21-Jakarta	0	0	3	5	8	0	0	3	4	7	117	73	44
Regional 22-Jakarta	7	29	1	0	37	7	1	0	0	8	158	145	13
Group Head TI	1	0	0	0	1	5	0	0	0	5	12	7	5
JUMLAH	55	323	14	9	401	94	117	12	9	232	2.036	1.730	306

Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Operasional Tahun 2015 Berdasarkan Kode Temuan

Findings and Follow-up Action of 2015 Operational Year Based on the Findings Code SPECIAL AUDIT OF 2016

Kode / Klasifikasi Temuan Code / Finding Classification		**Area Improvement (AOI)**		
		Jumlah Total	**Selesai** Completed	**Di monitor** Under Monitoring
01.1	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Compliance with Laws and Regulations in Force	102	73	29
01.2	Kepatuhan terhadap Prosedur dan Tata Kerja yang Telah Ditetapkan Compliance with the Working Procedures that have been Established	977	846	131
01.3	Kepatuhan terhadap Ketentuan Pelaksanaan Anggaran Compliance with the Provisions of Budget Implementation	27	26	1
01.4	Temuan Berulang Repeated Findings	9	9	0
02.1	Keandalan & Keakuratan Informasi/Laporan Keuangan & Non Keuangan The Reliability and Accuracy of the Information/Financial & Non Financial Statements	209	183	26
02.2	Keandalan & Keakuratan Informasi/Laporan TUL The Reliability and Accuracy of the Information/reports TUL	56	49	7
03	Pengamanan Aset Assets Safeguarding	81	65	16
04.1	Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Utilization of Human Resources	31	25	6
04.2	Pemanfaatan Sumber Daya Material dan Peralatan Utilization of Material Resources and Equipments	66	55	11
04.3	Pemanfaatan Sumber Daya Uang Utilization of Monetary Resources	28	23	5
05	Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program atau Operasi Program or Operation Objectives and Targets Achievements	382	327	55
06.1	Kasus yang Merugikan Perusahaan Detrimental Cases to the Company	22	9	13
06.2	Kewajiban Penyetoran kepada Negara/Perusahaan Obligation to Make Deposit to the State/Enterprise	46	40	6
	Jumlah Total	**2.036**	**1.730**	**306**

PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2016

Pemeriksaan Khusus dilaksanakan atas permintaan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan informasi dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah dan dilaporkan kepada Direktur Utama.

SPECIAL AUDIT OF 2016

A Special Audit may be conducted at the request of the Board of Directors and the Board of Commissioners, based on the information provided by a Public or Non-Governmental Organization (NGO). Special audits are intended to gather facts regarding certain issues reported to the President Directors.

Realisasi pemeriksaan khusus telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebanyak 25 (dua puluh lima) laporan, yaitu:

Realization of the Special Audit has been reported to the President Director through a total of 25 (twenty five) reports, as detailed below:

Uraian Description	**Unit/ Anak Perusahaan** Unit/Subsidiaries	**Progres** Progress
Pengadaan Renovasi Gedung Kantor Office Building Renovation Procurement	Area Semarang Semarang Area	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
	Kantor Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta Distribution Office of Central Java & Yogyakarta	
	Area Tegal Tegal Area	
	Area Pekalongan Pekalongan Area	
	Area Magelang Magelang Area	
	Area Cilacap Cilacap Area	
	Area Purwokerto Purwokerto Area	
Penyalahgunaan wewenang Abuse of authority	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands Region	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pembayaran dua kali PLTU Waai Payment of two times the Waai steam power plant	UIP XII - Makassar UIP XII - Makassar	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pengadaan CCTV & Alat Ukur Vibrasi PLTG Procurement of CCTV & Vibration Measuring Instrument for Gas Power Plant	Wilayah Sumatera Selatan Jambi & Bengkulu South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pengadaan Material Pemeliharaan MO Plus Procurement of MO Plus Maintenance Materials	Wilayah Sulutenggo & Maluku Sulutenggo & Maluku Region	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Penyalahgunaan wewenang Abuse of authority	UIP II UIP II	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Proses Pembangunan PLTU Pulang Pisau The Development Process of PLTU Pulang Pisau	UIP IX UIP IX	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Penyalahgunaan wewenang Abuse of authority	Wilayah Sulutenggo-Area Luwuk Sulutenggo Region – Luwuk Area	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pengadaan Batubara pola Kerja Sama Operasi Procurement of Coal Operating Schemes	PLN Batubara PLN Coal	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Proses Pengadaan Sewa BOOT PLTG 100 MW Payoselincah Procurement Process for Renting BOOT PLTG 100 MW Payoselincah	Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Jambi Power Plant of South Sumatra, Jambi Sector	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Proses Pembayaran Sewa BOOT PLTG 100 MW Payoselincah Payment Process for Renting BOOT PLTG 100 MW Payoselincah	Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Jambi Power Plant of South Sumatra, Jambi Sector	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Emergency PLTU Bukit Asam Procurement Process of Emergency Maintenance of PLTU Bukit Asam	Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Bukit Asam Power Plant of South Sumatra, Bukit Asam Sector	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports

Uraian Description	**Unit/ Anak Perusahaan** Unit/Subsidiaries	**Progres** Progress
Proses Pengadaan CNG Plant Gresik-CNG Marine Vessel – CNG Plant Lombok – Kontrak Operation & Maintenance Procurement Process for CNG Plant Gresik - CNG Marine Vessel - CNG Plant Lombok - Contract Operation & Maintenance	Kantor Pusat Headquarters	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Desain dan Pemasangan Pemutus Tegangan (PMT) Gardu Induk PLTU Sebalang – PLTU Pulang Pisau dan PLTMB Bangkanai Design and Installation of Voltage Breaker (PMT) PLTU Sebalang - PLTU Pulang Pisau and PLTMB Bangkanai	UIP IX - Kalimantan UIP IX - Kalimantan	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan over haul Mesin Hitachi 16 ZAV 40S Unit 9 PLTD Bitung – Sektor Minahasa Implementation of Maintenance work over haul Hitachi Machine 16 ZAV 40S Unit 9 PLTD Bitung - Minahasa Sector	Wilayah Sulutengga – Sektor Minahasa Sulutengga Region - Minahasa Sector	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pengadaan Sewa Mesin PLTD HSD Tersebar (7 Lokasi PLTD) Procurement of PLTD HSD Rental Spread (7 PLTD Locations)	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau – Area Rengat Riau and Riau Islands - Rengat Area	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Laporan Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja (DPD-SP) Report of the Regional Council of Trade Unions (DPD-SP)	Wilayah Sulutenggo Sulutenggo Region	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Laporan Ex-Auditor Regional 17 Mataram Ex-Auditor Report of 17 Mataram Regional	Wilayah NTT – Area Flores Bagian Timur NTT Region - East Flores Area	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Proses Pengadaan Modem AMR dan alat kerja Ultrasonic Procurement Process of AMR Modem and Ultrasonic Working Equipment	Wilayah Maluku dan Maluku Utara Maluku and North Maluku Area	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports
Pelaksanaan Audit Pendalaman LHA No.038/PO REG 5/SPI.02.01/2016 di Sektor Bengkulu Implementation of In-depth Auditing of LHA No.038/PO REG 5/SPI.02.01/2016 in Bengkulu Sector	Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Power Plant of SouthSumatra	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014, 2015 dan 2016 Procurement Process of Goods and Services Year 2014, 2015 and 2016	Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Power Plant of South Sumatra	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Pelaksanaan Audit Pendalaman atas LHA 042.LHA/PO REG 6/SPI.01.01/2016 Implementation of In-depth Auditing of LHA 042.LHA/PO REG 6/SPI.01.01/2016	UIP Sumatera Bagian Selatan UIP of South Sumatra	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Pelaksanaan Audit Pendalaman atas LHA 040.LHA/PO REG 15/SPI.01.01/2016 Implementation of In-depth Auditing of LHA 040.LHA/PO REG 15/SPI.01.01/2016	Wilayah Sulselrabar – Sektor Kendari Sulselrabar Region - Kendari Sector	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Pelaksanaan Audit Pendalaman atas LHA 039.LHA/PO REG 15/SPI.01.01/2016 Implementation of In-depth Auditing of LHA 039.LHA/PO REG 15/SPI.01.01/2016	Wilayah Sulselrabar – Sektor Kendari Sulselrabar Region - Kendari Sector	Pemeriksaan Sedang Berlangsung Ongoing Audit
Tindakan penyelewengan oleh oknum Outsourcing di UDIKLAT Bogor The act of misappropriation by unscrupulous Outsourcing in UDIKLAT Bogor	UDIKLAT Bogor UDIKLAT Bogor	Laporan Hasil Pemeriksaan Sudah Selesai Completed Audit Reports

PENUGASAN KHUSUS 2016

1. **Audit pengembangan Distribusi Sumatera Pinjaman World Bank**
   Merupakan penugasan khusus dari Direktur Bisnis Regional Sumatera untuk melakukan audit 15% *contracts awarded by each procuring distribution unit* untuk mendapat persetujuan pinjaman dari World Bank. Kegiatan ini menugaskan sebagian auditor internal untuk terlibat dalam pelaksanaan audit pengadaan Tahun 2015 dan 2016 di PLN Sumatera.
2. **Audit Sewa Pembangkit**
   Merupakan penugasan khusus dari Direktur Utama untuk memeriksa pekerjaan operasi sewa mesin pembangkit di PLN Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, dan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dimana Laporan Pemeriksaan Sudah Selesai

SPECIAL ASSIGNMENT 2016

1. **Audit of Sumatra Distribution Development, World Bank Loan**
   This was a special assignment from Sumatra Regional Business Director to conduct an audit of 15% of contracts awarded by each procuring distribution unit for approval of loans from the World Bank. Most of the internal auditors were assigned to the audit of procurement in 2015 and 2016 at PLN Sumatra.
2. **Audit of Generator Rental**
   A special assignment from the President Director to inspect the operational work of generator rental at PLN, Aceh and North Sumatra, PLN North Sumatra, and PLN, Riau and Riau Islands where inspection reports were completed

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK RI, terdapat 637 rekomendasi dan sampai dengan Desember 2016 status rekomendasi adalah sudah sesuai 420 rekomendasi, belum sesuai 199 rekomendasi, belum ditindaklanjuti 0 rekomendasi, dan tidak dapat ditindaklanjuti 18 rekomendasi.

FOLLOW-UP OF THE INDONESIAN SUPREME AUDIT BOARD'S AUDIT RECOMMENDATIONS

According to the audit results conducted by the Supreme Audit Board, 637 (six hundred thirty seven) recommendations were received, and until December 2016 their recommendation status was: appropriate 420 (four hundred twenty), not relevant 199 (one hundred ninety nine), not followed up 0 (zero), and non-actionable18 (eighteen) .

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Report on BPK Audit Results	**Jumlah Rekomendasi** Number of Recommendations	**Status Rekomendasi** Recommendation Status			
		Sudah Sesuai Already Appropriate	**Belum Sesuai** Not Appropriate	**Belum Ditindaklanjuti** Has Not Been Followed Up	**Tidak Dapat Ditindaklanjuti** Not Actionable
Laporan Keuangan PLN TB 2003 dan 2004 Financial Statements of PLN TB 2003 and 2004	46	41	2	0	3
Subsidi Listrik PLN TA 2004 Electricity Subsidy PLN FY 2004	1	1	0	0	0
Laporan keuangan PLN TB 2004 dan 2005 Financial Statements of PLN TB 2004 and 2005	53	37	14	0	2
Subsidi Listrik Tahun 2005 Electricity Subsidy 2005	1	1			
BPP TL dan Pembangkitan Tahun Cost of Supply and Power Plant Year	13	12	1	0	0
Subsidi Listrik Tahun 2006 Electricity Subsidy 2006	1	1			
Subsidi Listrik Tahun 2007 Electricity Subsidy 2007	15	13	2	0	0
Subsidi Listrik Tahun 2008 Electricity Subsidy 2008	20	18	0	0	2
Subsidi Listrik Tahun 2009	26	21	4	0	1
Electricity Subsidy 2009	4	3	1	0	0

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Report on BPK Audit Results	**Jumlah Rekomendasi** Number of Recommendations	**Status Rekomendasi** Recommendation Status			
		Sudah Sesuai Already Appropriate	**Belum Sesuai** Not Appropriate	**Belum Ditindaklanjuti** Has Not Been Followed Up	**Tidak Dapat Ditindaklanjuti** Not Actionable
Sistem Pengendalian Intern PT PLN (Persero) Tahun 2010 Internal Control System of PT PLN (Persero) Year 2010	7	7	0	0	0
Sektor Hulu Listrik Upstream Electricity Sector	86	56	23	0	7
Kinerja Distribusi Jawa tengah dan DIY Tahun 2011 Performance Distribution of Central Java and Yogyakarta Year 2011	26	23	1	0	2
Kinerja Distribusi Jawa barat dan Banten Tahun 2009 dan Semester I 2010 Performance Distribution of West Java and Banten Year 2009 and Semester I 2010	23	23	0	0	0
Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2011 Electricity Subsidy for Budget Year 2011	9	3	5	0	1
Uang Jaminan Langganan PLN PLN Subscription Warranty	7	5	2	0	0
Subsidi Listrik TA 2012 Electricity Subsidy FY 2012	64	60	4	0	0
Batubara dan BBM TA 2013 Coal and Fuel FY 2013	12	4	8	0	0
Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik th 2013 Purchase and Lease of Electricity in 2013	12	4	8	0	0
Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya th 2010 – 2013 Unspecified Government Assistance Status in 2010 - 2013	6	5	1	0	0

AKUNTAN PERUSAHAAN

Biaya dan Jasa

Pada periode 2016, KAP yang melaksanakan audit perseroan adalah KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ) Auditor dengan biaya jasa audit sebesar Rp18,07 miliar (delapan belas koma nol tujuh miliar rupiah). Ruang lingkup jasa audit meliputi:

1. Jasa audit umum laporan keuangan;
2. Jasa Audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
3. Audit Atas Laporan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan;
4. Audit Atas Laporan Proyek Percepatan 10.000 MW;
5. Audit Atas Laporan Penerusan Pinjaman;
6. *Review* Atas Laporan Evaluasi Kinerja;
7. Audit Atas Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

COMPANY'S ACCOUNTING FIRM

Fees and Services

In 2016, the Public Accounting Firm, RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (KAP RSM AAJ) conducted the Company's audit. The Auditor conducted a full-scope general audit, the cost of which amounted to Rp18.07 billion (eighteen point zero seven billion Rupiah). The audit services included:

1. General financial statement;
2. Adherence to the Established Legislation and Internal Control;
3. Audit of Ongoing Work Statement;
4. Audit of 10.000 MW Acceleration Project Report;
5. Audit of Subsidiary Loan Agreement Statements;
6. Review of Performance Evaluation Report;
7. Audit of Partnership and Community Development Program (CSR),

Nama Akuntan Publik Pelaksana Audit

KAP yang melaksanakan audit sebelum tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia), untuk Laporan Keuangan tahun 2015, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA.
2. Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia), untuk Laporan Keuangan tahun 2014, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA.
3. Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013, auditor Drs. Osman Sitorus.
4. Osman Bing Satrio dan Eny (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012, auditor Drs Osman Sitorus.
5. Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011, auditor Rusli.
6. Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte), untuk Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2010, auditor Ali Hery.

SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/ MBU/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, ditegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistim pengendalian internal. Pembentukan sistim pengendalian internal ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi ada mekanisme internal yang telah dilalui untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka COSO

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, PLN mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*). Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

Names of the Public Accountant Responsible for the Audit

Public Accounting Firms that have performed a general internal audit prior to 2016 are as follows:

1. Tanudiredja, Wibisana & Patners (Price Waterhouse Coopers Indonesia), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2015, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA
2. Tanudiredja, Wibisana & Patners (Price Waterhouse Coopers Indonesia), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2014, auditor Drs. Haryanto Sahari, CPA
3. Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2013, auditor Drs. Osman Sitorus
4. Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2012, auditor Drs Osman Sitorus.
5. Osman Bing Satrio & Patners (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2011, auditor Rusli
6. Osman Bing Satrio & Patners (Deloitte), for the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2010, auditor Ali Hery

INTERNAL CONTROL AND AUDIT SYSTEM

In accordance with Article 26 of Regulation of the Minister of State -Owned Enterprises (SOE) No. PAER-01/ MBU/2011 as a replacement for the Decision of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 on Promoting Good Corporate Governance of SOE, it was affirmed that each SOE should establish an internal control system. The internal control system performs as an internal mechanism of each organizational unit. Thus, an internal mechanism benefits each transaction as a decision-maker in ensuring proper, correct, fair and accountable decisions.

Adjustments to the Internal Audit System for compliance with the COSO Framework

In order to implement these regulations and increase the accountability of each decision, and the transparency and accuracy of business transaction records, PLN has developed an internal control system using COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) approach. The Internal Control System includes:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. *Monitoring*, yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PLN membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Satuan Pengawasan Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle blowing system atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, ataupun praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG. Hal ini adalah kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) terhadap berbagai cara yang paling mungkin diterapkan oleh suatu organisasi, baik di kalangan pemerintahan maupun korporasi, untuk menekan dan mencegah secara dini terjadinya tindak korupsi dan penyimpangan lain yang sejenis.

Meyakini efektivitas sistem tersebut dalam mendeteksi, mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan korupsi, fraud dan sejenisnya sebelum merebak lebih jauh, PLN bekerja sama dengan lembaga yang kompeten dalam bidang tersebut, merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perseroan, baik di Unit Bisnis maupun di anak usaha. Sejak pertengahan tahun 2012, Perseroan melakukan kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya perusahaan.

Setelah mengalami pembahasan intensif dan tahap uji coba secara terbatas, pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.21.E/Dir/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perseroan secara resmi memberlakukan "Sistem

1. A disciplined and structured internal control of the environs ;
2. Risk assessment and business management;
3. Control activities;
4. Information and communication systems;
5. Monitoring, covering the external oversight of internal controls and policies i.e. Manuals, Operational Guidelines and Work Instructions.

Assessment of Internal Audit System Effectiveness

To evaluate the implementation of its internal control system, PLN has established the Internal Supervisory Unit. The results of the evaluation of the internal control system is used as one of the factors considered by the management as it evaluates the effectiveness of the internal control system in order to determine the improvements to the system or policies that allow the management to conduct operational activities in a more effective way.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System or violation reporting system is considered to be the most effective method to prevent and deal with corruption, bribery and other fraudulent practices, which are contrary to the implementation of good corporate governance. The whistleblowing system is a result of a study conducted by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) and the Global Economic Crime Survey (GECS) on various methods most applicable to organizations (both the governing body and the company). It is aimed to suppress and prevent early occurrences of corruption and other similar irregularities.

PLN ensures the effectiveness its system for detecting, preventing and overcoming the occurrence of corruption, fraud and other similar problems. It cooperates with competent institutions, designing systems to report violations at all levels (Business Units and subsidiaries). Since mid-2012, the Company has conducted studies and designed a violation reporting system according to its culture and conditions.

After conducting intensive discussions and a limited test phase, the Company formally implemented the Whistleblowing System, throughout the Company under Decision of the Board of Directors No. 21.E/Dir/2012 dated 20 December 2012. It consists of definitions, purposes, reporting

Pelaporan Pelanggaran" (*Whistle Blowing System*) diseluruh jajaran bisnis PLN. Dalam ketetapan tertulis yang mengiringi pemberlakuan tersebut, dijelaskan secara ringkas dan jelas seluruh definisi, maksud dan tujuan serta mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut.

mechanisms, whistleblower's protection and follow-ups, which were described succinctly and clearly under a written provision.

Agar kebijakan *Whistle Blowing System* dapat dilaksanakan secara konsisten perlu adanya penanggung jawab laporan pelaksanaan *whistle blowing system* yang disampaikan pada Direksi dan Dewan Komisaris sehingga perlu dilakukan perbaruan mekanisme, pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati dengan penetapan Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 Tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan penanggung jawab adalah Satuan Pengawasan Intern.

In order for the Whistleblowing System policy to be enforced consistently, it needs a person responsible for the whistleblowing system reports to be presented to the Board of Directors and Board of Commissioners so that the necessary mechanism updates, the implementation mechanism agreed upon with the determination of Directors Circular Letter No. 008.E/DIR/2016 Dated September 30, 2016 on the System of Reporting Violations by the person responsible in the Internal Supervisory Unit.

Tujuan Penerapan *Whistle Blowing System*

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Perseroan merupakan tindakan pelanggaran yang harus diperangi bersama. Korupsi dapat hidup dan langgeng diantaranya disebabkan oleh sifat permissive (pembiaran) banyak pihak terhadap tindakan tidak terpuji tersebut. Untuk mengurangiya, seluruh insan PLN sebagai insan yang berintegritas harus menghilangkan sifat permissive terhadap korupsi dan aktif memberantas dengan melaporkan terjadinya tindak korupsi melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *whistle blowing system* (WBS) milik Perseroan.

Whistleblowing System Objectives

Corruption and abuse of power within the Company constitute an action of violation that must be fought as a matter of injustice. Corruption may occur in the long-term due to the permissive nature of and improper actions from many parties. In order to eliminate corruption, PLN individuals should act with integrity and rectify their permissive nature to actively overcome and report corruption through the Whistleblowing System (WBS).

Pelaporan pelanggaran (*whistle blowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personil atau badan hukum dari lingkungan internal maupun eksternal Perseroan kepada pimpinan PLN agar dapat diambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan tersebut diupayakan dapat berlangsung secara rahasia (*confidential*), namun didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Reporting violations (whistleblowing) reveal illegal acts, corruption or other actions that could harm PLN and its stakeholders. Reporting (whistleblowing) is submitted personally or through legal entities internally and externally to the head of PLN in order to implement disciplinary action. Disclosure must be supported by strong evidence and remain confidential.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dimaksudkan menjadi sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan unit bisnis PLN. Sebagai salah satu infrastruktur dalam menunjang sistem strategi *anti fraud* PLN, Mekanisme penyampaian pelanggaran disampaikan kepada Direktur Utama melalui sarana telepon atau dengan Short Message Service (SMS) ke nomor 08119861901.

Violation Reporting System (VRS) is a system conducted by the Company to collect, process, follow up and make reports submitted by the Rapporteur of the violations that occur in the environment of PLN business units. As one of the infrastructure to support the PLN anti-fraud strategy system, the delivery mechanism violations are submitted to the President Director by means of telephone or by Short Message Service (SMS) to 08119861901.

Mekanisme Penyampaian Pelaporan

1. Pelaporan melalui sarana telepon atau dengan Short Message Service (SMS) ke nomor 08119861901. Disamping itu sarana lainnya melalui email atau PO.Box resmi PLN yang dipegang oleh lembaga yang diberi mandat oleh Direktur Utama;
2. Direktur Utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada KSPI dan diteruskan ke petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan;
3. Direktur Utama menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima;
4. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi kepada KSPI untuk diteruskan ke Direktur Utama untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut;
5. PLN memberi jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/pengungkapan terhadap: Kerahasiaan identitas pelapor (Nama, alamat, nomor telepon, faksimil, email, unit kerja, dan lain-lain);
6. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gigatan hukum, harta benda, tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas hingga anggota keluarga pelapor.

Submission of Reporting Mechanism

1. Reporting by means of telephone or by Short Message Service (SMS) to 08119861901. In addition, via email or PLN official PO.Box held by an institution that is mandated by the President Director;
2. The President Director receives and submits any complaints of violations to Head of Internal Supervisory Unit and forwards them to the WBS officer appointed to conduct data verification and collection of initial evidence that is deemed to be adequate, and to organize the complaint reports;
3. The President Director assigns follow-up on complaints that have been received;
4. The investigation team conducts a thorough investigation and submits the results of the investigation to Head of Internal Supervisory Unit to be forwarded to the President Director for him to set out his ruling on the complaint.
5. PLN guarantees the protection, confidentiality, and anonymity of the complainant .
6. Protection of reprisals from the reported party or institution. Protection from pressure of delay in promotion, dismissal, legal suits, possessions, and physical action. The protection applies not only to the complainant but can be extended to his/her family members.

Pengelolaan *Whistle Blowing System*

Untuk tertib pengelolaan, kepastian tindak lanjut pelaporan/pengaduan, monitoring penyelesaian, dan evaluasi secara berkesinambungan maka ditunjuk unit pengelola WBS yaitu Satuan Pengawasan Intern.

SPI akan mengevaluasi dan menilai tingkat kompleksitas pelaporan/pengaduan tersebut berkaitan dengan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas pelaporan/pengaduan tersebut. SPI akan meneruskan hasil tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan disertai dengan kesimpulan apakah pelaporan/pengaduan tersebut terbukti atau tidak dan usulan tindak lanjut pelanggarannya kepada Direktur Utama untuk ditetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Perlindungan bagi *Whistle Blower*

1. Pelapor dijaga kerahasiaannya atas identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja, dan lain-lain) dengan cara menggunakan media komunikasi email yang di luar pengeloaan perusahaan (bukan alamat email pln.co.id);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/lembaga Pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan internal PLN:
   a. Tekanan;
   b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan;
   c. Pemecatan;
   d. Gugatan Hukum;
   e. Harta benda hingga tindakan fisik;
   f. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor tetapi dapat diperluas dengan anggota keluarga pelapor.

Penanganan Penganduan *Whistle Blowing System* Selama tahun 2016 dan Tindakan Yang Diambil

Selama tahun 2016 terdapat 14 laporan yang dilaporkan melalui *whistleblower*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat Serikat Pekerja salah satu unit;
2. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat General Manager di salah satu unit;
3. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat Manager Menengah di dua unit;
4. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat Manajer Dasar di empat unit;
5. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pejabat setingkat Supervisor atas di salah satu unit;

Whistleblowing Management System

Certainty for the follow-up reporting of complaints, monitoring progress, and evaluating on an ongoing basis, the Internal Supervisory Unit is appointed for orderly management of The WBS.

Internal Supervisory Unit will evaluate and assess the level of complexity of reporting of complaints related to the follow-up completion. The Internal Supervisory Unit will continue the follow-up of results with a conclusion on whether the complaint is proven or not.

Protection for the Whistleblower

1. The Rapporteur's identity is kept confidential, including name, address, telephone number, fax, email, work unit, etc., by using external email as a communications media not the Company's email, pln.co.id;
2. Protection from reprisals from the reporting and reported institutions;
3. Protection from internal measures of PLN, such as:
   a. Pressure;
   b. Delays in promotion;
   c. Dismissal;
   d. Lawsuit;
   e. Possessions as well as physical action;
   f. The protection applies not only to the complainant but may be extended to family members of the complainant.

Handling Whistleblowing System Reports During 2016 and Follow-Up Actions

During 2016 there were 14 (fourteen) cases reported through whistleblower reports, with details as follows:

1. Reporting of violations in the implementation of authority for union officials in one of the units;
2. Reporting of violations in the implementation of authority for General Manager-level officials in one of the units;
3. Reporting of violations in the implementation of the authority for Intermediate Manager-level officials in two units;
4. Reporting of violations in the implementation of authority for Entry Manager-level officials in four units;
5. Reporting of violation in the implementation of authority for Supervisor Top-level officials in one unit ;

6. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pegawai di empat unit;
7. Pelaporan pelanggaran tentang pelaksanaan kewenangan pegawai *outsourcing* di salah satu unit.

Keseluruhan pelaporan sudah ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PERKARA HUKUM YANG MELIBATKAN PERSEROAN

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Nopember 2012 yang diajukan oleh Lydia Manurung terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat. Gugatan diajukan karena Penggugat merasa tanahnya yang terletak di Desa Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Propinsi Papua, seluas 15.000 m2 telah dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan telah berdiri bangunan kantor PT PLN (Persero) Ranting Timika. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.200.000.000,00, ganti rugi immaterial Rp15.000.000.000,00, dwangsom Rp1.000.000,00 per hari. Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 16 September 2013. Pada Tingkat Banding PLN Menang. Saat ini masih dalam proses Kasasi.
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh PT Meta Epsi terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat II. Gugatan diajukan karena Penggugat meminta Bank Garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada PT PLN (Persero). Nilai gugatan sebesar Rp83.346.920.456,00 dan US$5.116.957,00. Perkara telah diputus dan PLN kalah di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 14 Maret 2013. Pada Tingkat Banding PLN Menang. Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam Putusan Kasasi PLN Menang.
3. Pada tahun 2001 Hendrik Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi selaku Ahli Waris kepada PT PLN (Persero) atas tanah PLTA Tonsealama sebesar Rp 54.000.000.000,00, di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI PT PLN (Persero) kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, PT PLN (Persero) melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi tanah tersebut dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.
4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh

6. Reporting of violations in the implementation of authority for employees in four units;
7. Reporting of violations in the implementation of authority for outsourcing employees in one unit.

Overall reporting has been followed-up and realized in accordance with applicable regulations.

LITIGATIONS INVOLVING THE COMPANY

1. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 692/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 29 November 2012 filed by Lydia Manurung against PT PLN (Persero) as Defendant. The Plaintiff who alleged that her land located in Koperapoka Village, Mimika Baru Subdistrict, Mimika Regency, Papua, filed the lawsuit of 15,000 m, which had been controlled by the Defendant without having the rights to do so, and is now occupied by the PLN building, Ranting Timika. Compensation claimed was Rp5,200,000,000.00, as well as compensation for non-material harm of Rp15,000,000,000.00, and penalty of Rp1,000,000.00 per day. The case has been decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 16 September 2013. Upon appeal, PLN won. Currently in the process of cassation.
2. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel filed by PT Meta Epsi against PT PLN (Persero) as Defendant II. The lawsuit was filed due to the Litigant requesting the Bank Guarantee from Bank Niaga not to be liquidated for PT PLN (Persero). The claim of the lawsuit was Rp83,346,920,456.00 and US$5,116,957.00. The case has been decided and PLN lost at the District Court, with the verdict made on 14 March 2013. Upon appeal, PLN won. Currently the case is in the process of cassation.
3. In 2001 Hendrik Nelwan and Associates filed a lawsuit to obtain compensation as the Beneficiary against PT PLN (Persero) for the land of Tonsealama Hydro Power Plant, valued at Rp54,000,000,000.00, to the Manado District Court. In the trial, starting from the First Level to the Review Level at the Supreme Court of RI, PT PLN (Persero) lost. When execution was about to take place by the Manado District Court, PT PLN (Persero) filed a Resisting Lawsuit against the execution of the plot of land. Currently the case is under Review by the Supreme Court of The Republic of Indonesia.
4. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 762/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 26 December 2012 filed by PT Modaco Enersys against PT PLN (Persero) as

PT Modaco Enersys terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Riau (2x10 MW) Bengkalis karena alasan Tergugat memberikan rancangan pekerjaan yang keliru kepada Penggugat. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp10.140.825.582,00. Pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi PLN Menang. Penggugat mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 Desember 2016. Saat ini dalam proses kasasi.

5. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Desember 2012 yang diajukan oleh PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat. Gugatan ini diajukan atas dasar Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima yang keliru sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp61.927.363.731,00. Perkara telah diputus dan PLN menang di tingkat Pengadilan Negeri, putusan tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya PLN menang di tingkat Banding tanggal 27 Februari 2015. Berdasarkan Website Mahkamah Agung, Kasasi telah diputus dan PLN Menang.
6. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2014 diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih dkk terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan PLTGU Muara Tawar dianggap belum dibebaskan dan belum dibayarkan ganti rugi dan kompensasi oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp59.264.000.000,00. PLN menang di Pengadilan Negeri dengan putusan pada tanggal 5 Oktober 2015. Penggugat Mengajukan Banding, saat ini masih dalam proses Banding.
7. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2012 yang diajukan PT Acset Indonusa kepada PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan karena Tergugat dianggap sewenang-wenang terhadap Penggugat atas hasil temuan yang dilakukan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. PT PLN (Persero) dituntut Rp1.180.856.880,00 dan Rp2.361.713.760,00. Perkara telah diputus dan PLN kalah di tingkat Pengadilan Negeri (putusan tanggal 15 Agustus 2012). Pada tingkat banding dan kasasi PLN Kalah. Saat ini PLN mengajukan peninjauan kembali.
8. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 662/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 07 November 2014

defendant. This lawsuit was filed due to the Litigant being incapable of performing the construction of Riau 1 Steam Power Plant (2x10 MW) Bengkalis due to the defendant providing an incorrect design to the Litigant. Amount of compensation claimed was Rp10,140,825,582.00. PLN won at the level of the District Court and the High Court. Plaintiff filed a cassation petition on December 28, 2016. It is currently in the process of appeal.

5. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 763/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 26 December 2012 filed by PT Modaco Enersys & PT Angkasa Buana Cipta against PT PLN (Persero) as Defendant. This lawsuit was filed due to the Litigant alleging that they had been harmed as the Defendant provided an incorrect design for the construction of Nusa Tenggara Barat 1 Steam Power Plant (2x10 MW) Bima so that the Litigants could not continue the construction of said power plant. Amount of compensation claimed was Rp61,927,363,731.00. The case was decided and PLN won at the District Court, with the verdict made on 17 February 2014, and subsequently PLN won at the Appeal on 27 February 2015. Based on the Supreme Court Website, Cassation had been thrown out and PLN won.
6. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel on 21 August 2014 filed by Ny. Nesah binti Sadih et al. against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the land used by Muara Tawar Combined Cycle Power Plant had not been released and compensation had not been paid by PT PLN (Persero) to the Litigant as beneficiary of the land. the Litigant claimed for compensation amounting to Rp59,264,000,000.00. PLN won at the District Court with the verdict made on 5 October 2015.
7. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 15/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel on 10 January 2012 filed by PT Acset Indonusa against PT PLN (Persero). The lawsuit was filed due to the Defendant being considered as acting without consideration to the Litigant's rights for the findings of the Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang. PT PLN (Persero) was demanded to pay Rp1,180,856,880.00 and Rp2,361,713,760.00. The case has been decided and PLN lost at the District Court,with the verdict made on 15 August 2012. PLN also lost at the High Court. PLN filed for cassation. Currently the case is in the process of cassation.
8. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 662/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel on 07 November 2014 filed by Tina Anggraeny against PT PLN (Persero). The

diajukan oleh Ny. Tina Anggraeny terhadap PT PLN (Persero). Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan tapak tower SUTET yang terletak di Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor tanpa hak, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp10.000.000.000,00. Dan Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- PLN menang dalam tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan tinggi.

9. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Sdr. Alex Lyandouw terhadap PT PLN (Persero). Gugatan ini diajukan atas dasar Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah Nomor 1242.PJ/554/DIR/2005 tanggal 18 April 2005. Penggugat meminta PLN menyatakan harga rumah dinas seharga Rp370.445.276,- dan membayar ganti rugi sebesar Rp3.212.323.377,-. PLN menang dalam tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan tanggal 12 Agutus 2015 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 April 2016. Penggugat menyatakan Kasasi dan perkara saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI.
10. Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan oleh Agung Rijoto (Penggugat) terhadap PT PLN (Persero) (Tergugat) di Pengadilan Negeri Indramayu yang tercatat dalam register perkara perdata Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Idm tanggal 17 Februari 2015 terkait lahan dengan HGU no. I di Desa Sumuradem seluas 135.426 m^2 untuk Pembangunan PLTU I Jawa Barat. Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp20.313.900.000,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang kompensasi/sewa sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Pada Tingkat Pengadilan Negri PLN kalah, pada tingkat Pengadilan Tinggi PLN menang. Pada tingkat Kasasi PLN Menang.
11. Gugatan perdata yang diajukan oleh Dorkas Marunduri – Djami, SH sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) selaku Tergugat I yang tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor: 190/Pdt/G/2014/PN.Kpg, terkait keberadaan 3 jaringan SUTM yang berada pada tanah seluas 8.960 m^2 milik Penggugat di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa. Dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp1.543.350.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi PLN kalah dan pada tingkat kasasi, PLN Kalah.

12. Gugatan perdata yang diajukan oleh Jaya Bin Jaiyan sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat 1 yang tercatat dalam Register Perkara Perdata

lawsuit was filed due to the land used for the base of the SUTET tower located in Gadog Village, Megamendung Subdistrict, Bogor Regency, was allegedly used without obtaining the right, permission, or knowledge of the Litigant. The Litigant claimed for material compensation of Rp10,000,000,000.00 and non-material harm amounting to Rp5,000,000,000. PLN won at the District Court and High Court.

9. Tort Lawsuit at the South Jakarta District Court with Case No. 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel filed by Alex Lyandouw against PT PLN (Persero). This lawsuit was filed on the grounds of the Agreement of the Sales and Purchase of Land and Residential Building No. 1242.PJ/554/DIR/2005 on 18 April 2005. The Litigant demanded PLN state that the value of the official residence was Rp370,445,276 and pay compensation amounting to Rp3.212.323.377. PLN won at the District Court with the verdict made on 12 August 2015. The Plaintiff filed its objection and the case is still under appeal in the Supreme Court.

10. Tort Lawsuit and compensation filed by Aging Risotto (the Litigant) against PT PLN (Persero) (Defendant) at the Indramayu District Court as registered in the Civil Lawsuit Register No. 06/Pdt.G/2015/PN.Idm on 17 February 2015. The lawsuit was filed due to the allegations that PLN had not made payment for the remainder of the land in the HGU No. 1 Sumeradem Village with an area of 135,426 m^2. The Litigant claimed for material compensation amounting to Rp20,313,900,000 (twenty billion three hundred and thirteen million nine hundred thousand Rupiah) and compensation for rent of Rp1,800,000,000 (one billion eight hundred million Rupiah). At the level of District Court PLN lost, at the level High Court of PLN won. At the level of Cassation PLN won.
11. Civil Lawsuit filed by Dorkas Marunduri – Djami, SH as the Litigant against PT PLN (Persero) as Defendant I, as registered on the Civil Lawsuit Register Num. 190/Pdt/G/2014/PN.Kpg. The lawsuit was filed due to the presence of 3 (three) grid towers belonging to PLN along with the power line located under and traversing the land with an area of 8,960 m^2 belonging to the Litigant. In the lawsuit the Litigant claimed for material compensation amounting to Rp1,543,350,000.00 (one billion five hundred and forty three million three hundred and fifty thousand Rupiah) and compensation for non-material harm amounting to Rp7,000,000,000.00 (seven billion Rupiah). At the District Court and High Court of PLN lost, and on appeal, PLN lost.
12. Civil Lawsuit filed by Jaya Bin Jaiyan as the Litigant against PT PLN (Persero) as Co-Defendant 1, as registered on the Civil Lawsuit Register No. 57/Pdt.G/2015/ PN.BKS on

Nomor: 57/Pdt.G/2015/PN.BKS tanggal 28 Januari 2015 terkait tanah yang digunakan untuk PLTGU Muara Tawar seluas 8200 m^2. Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp24.600.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah rupiah) dan immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). PLN Menang pada tingkat pengadilan negeri. Penggugat Menyatakan Banding, saat ini masih dalam proses banding.

13. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Dharma Lautan Utama selaku pemilik kapal KM Kirana III kepada PT PLN (Persero) selaku Tergugat II dengan Register Perkara Perdata Nomor: 115/Pdt.G/2015/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait tidak beroperasinya Kapal KM Kirana III Jalur Surabaya – Kalimantan pada tanggal 5 s/d 8 Januari 2010 dikarenakan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas permintaan PLN (Kapal KM Kirana III telah melakukan lego jangkar yang menggaruk kabel laut 150 kV Jawa Madura). Penggugat menuntut ganti rugi material sebesar Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). PLN Menang pada tingkat pengadilan negeri. Tergugat menyatakan Banding, saat ini masih dalam proses banding.
14. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan Muchlis Saleh sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks tanggal 21 September 2015. Penggugat menuntut diangkat menjadi pegawai PT PLN (Persero) dan upah sebesar Rp.5.608.950,00 (lima juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). Pada Tingkat Pengadilan Negeri PLN menang. Penggugat menyatakan kasasi dan saat ini perkara dalam tingkat kasasi.
15. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan register perkara 02/Pdt.G/2016/PN.BLG terkait pemebebasan lahan yang dilakukan Perusahaan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pelaksanaan proyek PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Nilai gugatan ini sebesar Rp54.548.000.000,-. PLN kalah dalam tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan tanggal 6 September 2015, PLN menyatakan banding dan perkara masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan.
16. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bano Binti Bagol sebagai Penggugat dengan register perkara 485/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. Penggugat mengklaim tanah seluas 2.578 m^2 yang diatasnya berdiri bangunan berupa gardu listrik milik PLN, kantor kelurahan Bambu Apus, Puskesmas Bambu Apus, Ruang Karang Taruna Bambu Apus dan Mushola yang terletak di Jalan Mini III, RT 012/RW 03, Kelurahan Bambu

28 January 2015 associated with land used for PLTGU Muara Tawar measuring 8200 m^2.The Litigant claimed for compensation for material losses of Rp24,600,000,000.00 (twenty four billion six hundred million Rupiah) and for non-material harm of Rp50,000,000,000.00 (fifty billion Rupiah). PLN won at the district court level. Plaintiffs to Appeal, currently still in the appeals process.

13. Tort Lawsuit filed by PT. Dharma Lautan Utama as owner of the vessel KM Kirana III to PT PLN (Persero) as Defendant II with Civil Lawsuit Register No. 115/Pdt.G/2015/PN.Sda at Sidoarjo District Court. Related to non-operating Ship KM Kirana III Surabaya – Kalimantan Line on January 5th until 8th, 2010 due to confiscation by the Surabaya District Court at the request of PLN (Ship KM Kirana III had dropped anchor that scratched sea cables of 150 kV Java Madura). The Litigant claimed for compensation for material losses of Rp1,058,000,000.00 (one billion fifty eight million Rupiah) and for non-material harm of Rp5,000,000,000.00 (five billion Rupiah). PLN won at the District Court level. Defendant filed an appeal, and the case is still in the appeals process.

14. Industrial Dispute Lawsuit filed by Muchlis Saleh as a Plaintiff against PT PLN (Persero) as First Defendant in the Court of Industrial Relations at the Makassar District Court, which was recorded in the Register of Civil Case No. 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks Dated September 21, 2015. The Plaintiff is suing to be appointed as an employee of PT PLN (Persero) and the wages of Rp5,608,950.00 (five million six hundred and eight thousand nine hundred and fifty Rupiah). At the District Court level, PLN won. The Plaintiff appealed and the case is currently under appeal.

15. Tort Lawsuit filed by Netti Pardosi and Pandapotan Kasmin Simanjuntak with Registers No. 02/Pdt.G/2016/PN.BLG related to the land acquisition conducted by the Company on the land area of 6.2 Hectares for the implementation of Asahan III Hydropower project. The Plaintiff demanded that land acquisition was canceled. The lawsuit value at Rp54,548,000,000. PLN lost in the District Court Level by decision dated September 6, 2015, PLN appealed and the case is still under appeal in the High Court of Medan.
16. Tort Lawsuit filed by Bano Binti Bagol as Plaintiff with case Registers No. 485/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. The Plaintiff claimed the land area of 2,578 m^2 that stands above the building in the form of an electrical substation owned by PLN, the District Office Bambu Apus, PHC Bambu Apus, Youth Space Bambu Apus and Mosque in Jalan Mini III, RT 012/RW 03, Bambu Apus District, Cipayung Regency, East Jakarta. The Plaintiff claims the land, as well as losses

Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Penggugat menuntut Pengembalian lahan serta kerugian Materiil Rp3.138.500.000,- dan Imateriil Rp10.000.000.000,-. PLN menang pada tingkat Pengadilan Negeri, Tergugat mengajukan banding. Saat ini dalam proses banding.

17. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor register 290/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel diajukan oleh Ahli Waris Alm. Tjotjong kepada kepada PT PLN (Persero) sebagai Tergugat atas tanah Persil No. 29, luas ±19.800 Ha di PLTGU Muar Tawar. Penggugat menuntut Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp48.500.000.000,- (Empat Puluh Delapan miliar lima ratus juta rupiah). Perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri.
18. Permohonan Arbitrase Nomor Nomor 748/IX/ARB-BANI/2015 yang diajukan oleh PT PLN Persero terhadap Konsorsium PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama - PT Tuban LPG dan PT Tuban BBM atas Perjanjian Nomor 428. PJ/040/DIR/2010 tentang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak HSD untuk Pusat Pembangkit Listrik Belawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara. PLN menuntut denda dan ganti kerugian akibat keterlambatan pengiriman BBM HSD sebesar Rp29.251.729.300,98. Perkara ini masih dalam proses di BANI.
19. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 47/PDT.G/2016/PN.TK (*class action*) oleh Pengacara Syariah Indonesia Wilayah Lampung, gugatan tersebut diajukan atas dasar pada pemadaman listrik di Wilayah Lampung yang terus terjadi. Bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atas pemadaman listrik. Perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri.
20. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 643/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, diajukan oleh Ahli Waris dari (alm) Tjotjong bin Runah yaitu Halimah (binti Sairih), dkk sebagai Penggugat terhadap PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I, Ny. Kubil binti Jenih sebagai Tergugat II, M. Subur bin Soleh sebagai Tergugat III, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat, terkait sebidang tanah warisan persil nomor 29 dengan luas kurang lebih 19.800 m^2. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp48.500.000.000,- (Empat Puluh Delapan miliar lima ratus juta rupiah), ganti rugi imateriil sebesar Rp41.500.000.000,- (Empat Puluh Satu miliar lima ratus juta rupiah). Perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri.
21. Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Lbh diajukan oleh Wahda Panigfat dkk, sebagai Para Penggugat terhadap PT PLN (Persero) Rayon Sanana sebagai Tergugat I, PT PLN (Persero) Area Ternate sebagai Tergugat II, PT PLN (Persero) Wilayah Maluku

of Material Returns of Rp3,138,500,000,- and non-material Rp10,000,000,000,-. PLN won at the District Court level, the Defendant appealed. It is currently in the appeals process.

17. Tort Lawsuit with Register No. 290/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel filed by the beneficiary of the (late) Tjotjong to PT PLN (Persero) as the Defendant on land Plot No. 29, an area of ± 19,800 Ha in Muar Tawar Power Plant. The Plaintiffs are suing the Defendant to pay material damages amounting to Rp48,500,000,000, - (Forty Eight Billion Five Hundred Million). The case is still in progress at the District Court.

18. Arbitration Request No. 748/IX/ARB-BANI/2015 filed by PT PLN against the consortium of PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama - PT Tuban LPG and PT Tuban BBM on Agreement No. 428.PJ/040/DIR/2010 concerning the Sales Agreement of HSD Fuel for Belawan Power Plant Center PT PLN (Persero) Generator of Northern Sumatra. PLN is demanding fines and damages due to delayed delivery of the HSD fuel in the amount of Rp29,251,729,300.98. The case is still in progress at BANI.

19. Tort Lawsuit No. 47/PDT.G/2016/PN.TK (class action) by the Syariah Lawyers Indonesia Lampung Region, the lawsuit was filed on the basis of power outage in Lampung region that continues to occur. On the lawsuit, the plaintiff demanded compensation worth Rp.100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) for the power outage. The case is still in progress at the District Court.

20. Tort Lawsuit No. 643/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, submitted by the beneficiary of the (late) Tjotjong bin Runah, namely Halimah (binti Sairih), and others as Plaintiffs against PT PLN (Persero) as Defendant I, Ms. Kubil binti Jenih as the Defendant II, M. Subur bin Soleh as Defendant III, and the National Land Agency (BPN) Bekasi as Co-Defendant, related to an inheritance land plot No. 29 with an area of approximately 19,800 m^2. Plaintiffs demanded material compensation of Rp48,500,000,000, - (Forty Eight Billion Five Hundred Million), and non-material compensation amounting to Rp41,500,000,000, - (forty one billion five hundred million). The case is still in progress at the District Court.

21. Class Action No. 17/Pdt.G/2016/PN.Lbh filed by Wahda Panigfat and friends, as Plaintiffs to PT PLN (Persero) Rayon Sanana as Defendant I, PT PLN (Persero) Area Ternate as Defendant II, PT PLN (Persero) Maluku and North Maluku as Defendant III, PT PLN (Persero) as Defendant IV related

dan Maluku Utara sebagai Tergugat III, PT PLN (Persero) sebagai Tergugat IV terkait pemadaman listrik di desa Fat Kau Yon, Wai Nib, Wai ina, Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp11.379.780.000,- (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), ganti rugi imateriil Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Perkara ini masih dalam proses pengadilan negeri.

22. Gugatan Perdata Nomor 352/Pdt.G/2016/PN.Mks diajukan oleh Andrian Johanis Matapere dkk (pensiunan pegawai PLN), sebagai Para Penggugat terhadap PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar sebagai Tergugat I, PT PLN (Persero) sebagai Tergugat II terkait kepemilikan rumah dinas PT PLN (Persero) yang berada di dalam komplek PLTU Tello Makasar. Para Penggugat menuntut agar rumah dinas tersebut menjadi hak milik para penggugat. Perkara ini masih dalam proses Pengadilan Negeri.
23. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik nomor 064/XII/KIP-PS-A/2015 diajukan oleh Sdr. Muhith Afif Syam Harahap (Sdr. Muhith) terhadap PT PLN (Persero) di Komisi Informasi Pusat terkait permintaan dokumen Notula rapat – rapat pengadaan mesin PLTU Asam – Asam Kalsel unit 1,2,3 dan 4, Perjanjian Kerja sama atau kontrak anatar PLN dengan pemenang lelang (pelaksana pekerjaan), yang meliputi perjanjian kerjasama atau kontrak kerja (pertama) dan addendumnya serta Spesifikasi mesin PLTU Asam – Asam unit 1,2,3 dan 4. Dalam putusan Komisi Informasi Pusat PLN kalah dan harus menyerahkan dokumen tersebut diatas. Dalam hal ini PLN mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor register 744/Pdt.G.Kip/2016/PN.Jkt.Sel.

24 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar yang diajukan oleh Sanusi Fajar sebagai PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor : 737/Pdt/G/2014/PN.DPS tanggal 13 Oktober 2014. Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan tapak tower SUTT keberadaan tiang listrik (tower) dengan ukuran 5m x 5m dan lintasan SUTT yang melewati tanah milik Penggugat seluas 800 m2 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp12.000.000.000,00. Dan Immateriil sebesar Rp738.793.320,00,- Perkara saat ini dimenangkan PLN pada tingkat pengadilan negeri tanggal putusan 16 April 2015 dan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 November 2015. Penggugat menyatakan Kasasi Perkara saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI.

to power outage in the village Fat Kau Yon, Wai Nib, Wai ina, Fuata District of South Sulawesi Sula Islands, North Maluku. The Plaintiffs are suing for material compensation for Rp11,379,780,000 (eleven billion three hundred and seventy-nine million, seven hundred and eighty thousand Rupiah), non-material damages of Rp8,000,000,000 (eight billion Rupiah). The case is still in process in the District Court.

22. Civil Case No. 352/Pdt.G/2016/PN.Mks filed by Andrian Johanis Matapere and friends (retired PLN employee), as Plaintiffs to PT PLN (Persero) Sulselrabar Region as Defendant I, PT PLN (Persero) as Defendant II related to ownership of the official residence of PT PLN (Persero) situated in the Tello Makasar power plant complex. The Plaintiff demanded that the official residence become the property of the Plaintiffs. The case is still in the process of the District Court.
23. Public Disclosure Request number 064/XII/KIP-PS-A/2015 filed by Mr. Muhith Afif Syam Harahap (Mr. Muhith) to PT PLN (Persero) in the Central Information Commission requests for documents related to meeting notes - Meeting on Asam Power Plant machinery procurement - Asam Kalsel units 1,2,3 and 4, Partnership Agreement or contract between PLN and the winner of the tender (executor of the work), which includes an agreement or contract of employment (first) and addendum, as well as Power Plant engine specifications Asam Power Plant - Asam units 1,2,3 and 4. In the decision of the Central Information Commission, PLN lost and must submit the documents mentioned above. In this case PLN filed an objection to the South Jakarta District Court with register No. 744/Pdt.G.Kip/2016/PN.Jkt.Sel.
24. Tort Lawsuit at the Denpasar District Court filed by Sanusi Fajar as the Litigant at the Denpasar District Court as registered on the Civil Lawsuit Register No. 737/Pdt/G/2014/PN.DPS on 13 October 2014. The lawsuit was filed due to the land used for the base of the SUTT tower, with a 5m x 5m tower and SUTT line traversing the 800m2 land owned by the Litigant located on Jalan Gatot Subroto Barat, Kuta Utara Subdistrict, Badung Regency, Bali. The Litigant claimed for material compensation of Rp12,000,000,000.00 and non-material harm of Rp738,793,320.00. PLN won at the District Court based on the verdict on 16 April 2015, and the Denpasar High Court dated November 9, 2015. Plaintiff filed a Cassation and currently the case is still under appeal in the Supreme Court.

Dampak Perkara Hukum dan Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Seluruh perkara hukum tersebut di atas, tidak memberikan dampak finansial signifikan terhadap PLN. Perkara tersebut juga tidak menyebabkan adanya pengurus PLN yang dikenai sanksi dari otoritas yang berwenang dan tidak melibatkan jajaran Perseroan lainnya.

PLN memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dan proses hukum atas setiap pelanggaran kode etik dan wewenang yang terindikasi *fraud*, sebagai bentuk konsistensi Perseroan dalam menegakan hukum dan menerapkan praktek terbaik tata kelola perusahaan.

Impact of the Litigations and Administrative Sanctions from the Authorities.

All of the litigations above have had no significant financial impact on PLN. These cases have not resulted in any member of PLN's management being sanctioned by the authorities, and have not involved other parties within the Company.

PLN imposes heavy sanctions in the form of job termination and legal proceedings for every violation of the code of conduct and authority in all proven allegations of fraud, demonstrating the Company's consistent approach in enforcing the rule of law and in enacting the best practices of corporate governance.

KODE ETIK/PEDOMAN PERILAKU

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa publik, Perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).Perseroan dikelola secara profesional serta senantiasa menjaga dan membina hubungan dengan semua Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) sesuai standar etika bisnis.Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, Perusahaan menerapkan Pedoman GCG secara konsisten, serta didukung dengan standar etika perilaku bisnis dan individu yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku PLN.

Pada Oktober 2005, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Perilaku PLN (*Code of Conduct*) sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan budaya perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik ini harus menjadi panduan serta dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan PT PLN (Persero).

Pedoman Perilaku PLN berisi mengenai kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN, serta mengatur aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan antara Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dengan Perseroan.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penyusunan ulang atas butir-butir ketentuan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang telah ada, menyesuaikan kembali aturan di dalamnya dengan Pedoman GCG dan praktek-praktek lazim terkini dan menampilkannya dalam bentuk yang lebih ringkas agar mudah dibawa saat beraktifitas. Penyusunan Buku Pedoman Perilaku tersebut dilaksanakan sesuai SK Direksi No. 548A/K/DIR/2010 tentang. "Buku Pedoman Perilaku".

CODE OF CONDUCT

As a public service company, the Company is responsible for meeting the expectations of the stakeholders. The Company is managed professionally and also maintains relationships with all the stakeholders in accordance with the standards of business ethics. Bearing all the responsibilities, the Company applies the GCG Guidelines consistently, supported by standards of business and individual ethics described in the PLN Code of Conduct.

On October 2005, the Company published the PLN Code of Conduct as an improvement in excellence in corporate culture and corporate governance. This code of conduct serves as a guideline and it must be adhered to by all employees of PLN.

The PLN Code of Conduct contains desirable behavior and professional interaction in PLN's environment, and regulates PLN leadership aspects, responsible membership, and internal and external professional relationships. Furthermore, the Code of Conduct is a tool to construct a compatible, synergetic, and mutually beneficial relationship between the stakeholders and the Company.

In 2010, the Company re-organized the provisions from the previous Company Code of Conduct, readjusted the regulations with GCG Guidelines, and updated the common current practices, and presented them in a briefer form in order to be easily carried out in all activities. The preparation of the Code of Conduct Book is based on Decision of the Board of Directors No. 548A/K/DIR/2010 on the Code of Conduct Book.

Pedoman Perilaku Perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten dalam menjalankan bisnis dan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, selanjutnya disingkat dengan SIPP. Pada akhirnya komitmen disertai integritas yang tinggi untuk menerapkan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin perwujudan visi, misi, falsafah, nilai-nilai dan Budaya Perusahaan.

Penyebarluasan Kode Etik/Pedoman Perilaku

Penyebar luasan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi diantaranya melalui kewajiban menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap butir-butir Pedoman Perilaku secara berkala.

Pokok-Pokok Kode Etik/Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku Perseroan menekankan kebijakan pelaksanaan perilaku insan perusahaan, yang menjadi tanggung jawab pegangan setiap insan Perseroan dalam berhubungan dengan seluruh individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan bisnis dengan Perseroan, meliputi:

1. Perilaku Pemimpin

a. Memberikan gambaran ringkas mengenai sikap perilaku pemimpin yang harus dikedepankan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari;
b. Menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar;
c. Mempelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran yang *out of the box*;
d. Memastikan semua unsur Perseroan bekerjasama secara sinergis guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik;
e. Membina kader melalui proses CMC (*coaching, mentoring* dan counselling);
f. Mengantisipasi kondisi *turbulence* dan lingkungan yang selalu berubah dengan gesit (*agility*) dan fleksibel;
g. Perilaku Pemimpin sangat diharapkan tidak bertentangan dengan sikap-sikap tersebut di atas.

2. Perilaku dalam Berhubungan Antar Insan PLN

a. Saling Percaya
   i. Berpikir dan berperilaku positif;
   ii. Menghargai pendapat dan gagasan yang berbeda;
   iii. Obyektif dan transparan;
   iv. Menjalin hubungan yang harmonis.
b. Integritas
   i. Jujur dan menjaga komitmen;
   ii. Memberikan keteladanan;
   iii. Adil dan bertanggung jawab;
   iv. Mengakui keterbatasan.

The Code of Conduct functions as a platform to shape and regulate consistency of behavior in running the business based on Trust, Integrity, Caring, and Learning (TICL). Eventually, the commitment, which is followed by a high level of integrity to apply the best practices in good corporate governance, guarantees the realization of the Company's vision, mission, philosophy, values, and corporate culture.

Dissemination of The Code Of Ethics and Code of Conduct

The Code of Conduct is disseminated through socialization by requiring the periodic signing of a statement of compliance with its contents.

Fundamentals of the Code Of Ethics and Code of Conduct

The Code of Conduct emphasizes the policy regarding behaviors that are the responsibility of each element of the Company in maintaining relationships with all individuals and other parties who are doing business with the Company, such as:

1. Leader Behaviors

a. Give a brief description regarding leader behavior which should always be prioritized in performing daily duties;
b. Inspire and become a role model in displaying Trust, Integrity, Caring, and Learning;
c. Pioneer renewal and modernization in the Company, through out-of-the-box thinking;
d. Ensure that all aspects of the Company work in cooperation in order to attain performance excellence and improve services to the public;
e. Develop cadres through the CMC (coaching, mentoring, and counseling) process;
f. Anticipate turbulent conditions in the environment with flexibility and agility;
g. Leader behavior is expected to not be in conflict with the above points.

2. Behavior in Interaction with PLN Individuals

a. Trust
   i. Think and behave positively;
   ii. Respect different ideas and opinions;
   iii. Be objective and transparent;
   iv. Build harmonious relationships.
b. Integrity
   i. Be truthful and stick to commitments;
   ii. Become a role model;
   iii. Be fair and responsible;
   iv. Admit one's limitations.

c. Peduli
   i. Saling membantu, memotivasi dan memberi perhatian;
   ii. Santun, ramah dan terbuka;
   iii. Menjaga citra dan memberikan pelayanan terbaik;
   iv. Saling mengingatkan bila ada yang melanggar aturan.

d. Pembelajar
   i. Memahami dan melaksanakan kebijakan Perseroan;
   ii. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus;
   iii. Berbagi ide, informasi, pengetahuan dan pengalaman;
   iv. Melakukan inovasi dan mendorong perubahan.

3. Sikap Korporasi Terhadap Hubungan Eksternal/ Pemangku Kepentingan

a. Hubungan dengan Pelanggan
   i. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan;
   ii. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan;
   iii. Memenuhi standar mutu pelayanan yang telah disepakati;
   iv. Menegakkan integritas pelayanan publik.

b. Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok
   i. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan;
   ii. Menilai secara objektif, transparan dan akuntabel;
   iii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan;
   iv. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi;

c. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.
   i. Hubungan dengan Pesaing
   ii. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan;
   iii. Menjadikan pesaing sebagai pemicu peningkatan diri;

d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi.
   i. Hubungan dengan Investor
   ii. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab;
   iii. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan;
   iv. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi;
   v. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif;
   vi. Menjaga kepercayaan Investor.

c. Caring
   i. Help, motivate, and care for each other;
   ii. Be polite, friendly, and open;
   iii. Maintain a good image and provide exemplary service;
   iv. Remind one another of any violations.

d. Learner
   i. Understand and comply with the Company's policies;
   ii. Keep improving competence;
   iii. Share ideas, information, knowledge, and experience;
   iv. Create innovation and encourage change.

3. Corporate Behavior toward External Relationships and Stakeholders

a. Relationship with Customers
   i. Prioritize customer satisfaction and trust;
   ii. Foster healthy, friendly, fair, honest, and proper communication;
   iii. Comply with the agreed service quality standards;
   iv. Uphold public service integrity.

b. Relationship with Suppliers
   i. Maintain and prioritize the interests of the Company;
   ii. Evaluate objectively, transparently, and accountably;
   iii. Make work contracts mutually beneficial;
   iv. Foster truthful and effective communication by maintaining the confidentiality of data and information;
   v. Impose sanctions on those who do not comply with the work agreement.

c. Relationship with Competitors
   i. Maintain robust competition through product and service excellence;
   ii. Treat competitors as development triggers;
   iii. Maintain the confidentiality of data and information.

d. Maintaining the confidentiality of data and information.
   i. Relationship with Investors;
   i. Choose trustworthy, credible, and responsible investors;
   iii. Create mutually beneficial agreements;
   iv. Foster truthful and effective communication by maintaining the confidentiality of data and information;
   v. Provide actual, accurate, and prospective information;
   vi. Maintain investors' trust.

e. Hubungan dengan Pemerintah/DPR
   i. Mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah/DPR;
   ii. Membina hubungan yang harmonis dan konstruktif;
   iii. Memberikan laporan data secara benar dan akurat.
f. Hubungan dengan Masyarakat
   i. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik;
   ii. Melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang mengalami musibah;
   iii. Menghormati tata nilai daerah;
   iv. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
g. Hubungan dengan Media Massa
   i. Menjaga dan mengutamakan citra Perseroan;
   ii. Memberikan informasi yang aktual, relevan, dan berimbang;
   iii. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya.
h. Hubungan dengan Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan
   i. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   ii. Menerapkan standar-standar dan sertifikasi yang disepakati bersama;
   iii. Memberikan kesempatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat;
   iv. Hubungan dengan Penegak Hukum;
   v. Obyektif, transparan dan taat aturan;
   vi. Menjalin kerjasama dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aset Perseroan;
   vii. Melaksanakan program konsultatif dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pedoman Perilaku Berlaku bagi Seluruh Insan PLN

Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Perseroan menyebarkan Pernyataan Kepatuhan untuk semua Pegawai agar mematuhi dan melaksanakan Pedoman Peraturan tanpa kecuali.Penandatanganan pernyataan ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sebagai salah satu bentuk komitmen seluruh insan PLN dari Manajemen Puncak hingga pelaksana lapangan untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik.Penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG).

e. Relationship with the Government
   i. Support the Government's programs and preserve trust;
   ii. Foster a harmonious and constructive relationship;
   iii. Provide valid and accurate reports.
f. Relationship with Society
   i. Build and maintain a good relationship;
   ii. Implement Corporate Social Responsibility (CSR) programs and help disaster victims;
   iii. Respect local culture;
   iv. Engage in conservation and sanitation of the environment.
g. Relationship with Mass Media
   i. Maintain and prioritize the image of the Company;
   ii. Provide actual, relevant, and balanced information;
   iii. Accept and follow up any constructive criticism by observing the aspects of risk and cost.
h. Relationship with Professional Organizations and Educational Institutions
   i. Foster continuous collaboration to gain information on science and technology development;
   ii. Apply the agreed standards and certifications;
   iii. Provide opportunities in education, research, and social development;
   iv. Relationship with Law Enforcers;
   v. Be objective, transparent, and comply with the regulations;
   vi. Foster cooperation in order to preserve the safety and security of assets;
   vii. Conduct consultative programs and legal assistance in accordance with the law.

Code of Conduct Applied For All PLN Individuals

To develop a compliance culture in the entire organization, the Company issued the Compliance Statement to all employees so that the Code of Conduct is completely adhered to without exception. This statement was signed in mid 2012 as the commitment of all PLN individuals, from the top management to the staff, to improve good corporate governance. The practices and the establishment of the Code of Conduct are part of Good Corporate Governance (GCG) implementation.

Perseroan mewajibkan seluruh jajaran Organ Perusahaan dan Pegawai, Anak Usaha serta Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya untuk turut mendukung, memahami dan mematuhi Pedoman Perilaku, Pedoman GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berhubungan dan berbisnis dengan Perseroan dan bersama-sama menegakkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan negara.

The Company requires the management and employees, subsidiaries, and stakeholders to support, comprehend, and comply with the Code of Conduct, GCG Guidelines, and the regulations in maintaining business relationships with the Company and together establishing a clean business environment free from any actions which may harm the country.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik/Pedoman Perilaku

1. Mitra kerja/pemasok PLN yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan;
2. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner secara berjenjang, mulai dari teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Untuk jenis pelanggaran yang mengandung unsur pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;
4. Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, bergantung kepada keseriusan jenis pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait.

Sanctions for Violations of The Code of Ethics and Code of Conduct

1. Partners and suppliers of PLN with proven violations will be penalized in accordance with the regulations and the Company's decision;
2. Employees proven to have violated the Code of Conduct may be subject to disciplinary measures, ranging from oral or written reprimands, to stern warnings, or suspension, up to termination of employment;
3. Offenses with legal ramifications will be forwarded to the authorities;
4. The nature of disciplinary action taken depends on the severity of the offense committed and the relevant circumstances.

Jumlah Pelaku Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Pada tahun 2016 jumlah pegawai PLN yang melakukan pelanggaran terhadap butir-butir Pedoman Perilaku ada 94 orang.

Akibatnya 29 orang dikenakan sanksi ringan, 44 orang dikenakan sanksi sedang dan 21 orang dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian status hubungan kerja.

Number of Offenders and Sanctions Imposed

In 2016, a total of 94 PLN employees violated the fundamentals of the Code of Conduct.

As a result, 29 received light penalties, 44 moderate penalties and 21 serious penalties in the form of termination of employment.

BUDAYA PERUSAHAAN

Nilai-nilai perusahaan sebagaimana disederhanakan dalam *tag-line* SIPP, yakni Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar, dan dijabarkan dengan singkat dan jelas pada uraian "Profil Perusahaan" terus diusahakan untuk disosialisasikan kepada seluruh pegawai Perseroan.

COMPANY CULTURE

The Company's values, abbreviated as TICL (Trust, Integrity, Caring, and Learning) and briefly and clearly described in the Company Profile Section of this Annual Report, continue to be disseminated to all employees.

Saling percaya

Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesame anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang bersih dan etis.

Trust

The atmosphere of mutual respect and openness among members of the Company, based on conviction of integrity, good will, and competency from related parties in the clean and ethical conduct of business.

Integritas

Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan

Integrity

Manifestation of Company members' behaviors which consistently show truthfulness, conformity between words

perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

and actions, responsibility to the Company's management and property utilization for short and long term interests, and responsibility to all stakeholders.

Peduli

Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan setiap permasalahan yang dihadapi Perusahaan serta mencari solusi yang tepat.

Caring

Reflection of the intention to maintain and preserve work-life quality, which is perceived by the Company's members and all stakeholders in order to grow together, driven by sensitivity to every issue and the pursuit of the best solutions.

Pembelajar

Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktik pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaharuan Perusahaan secara berkelanjutan.

Learning

The behavior of Company members to always have courage to keep questioning the established systems and practices of development, management, and operations, and to keep making efforts in mastering the latest knowledge and technologies to ensure sustainable development of the Company.

07

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

530 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

531 Visi Dan Misi
Vision And Mission

531 Maksud Dan Tujuan
Purpose And Objective

532 Ruang Lingkup Kegiatan Dan Sumber Dana Kegiatan TJSL
Scope Of Activities And Funding Of Csr Activities

534 Dasar Hukum Dan Kebijakan Pelaksanaan
Legal Basis And Policy Of Csr Implementation

536 Rumah Kreatif BUMN
Rumah Kreatif BUMN

540 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Dan Perubahan Iklim
Responsibility For The Environment, Electricity Safety (K2) And Climate Change

547 Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Occupational Health And Safety

547 Ketenagakerjaan
Workforce

548 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Occupational Health And Safety

554 Bekerja Tanpa Padam
Working Without Power Outage

558 Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Dan Program Csr Pln
Partnership And Community Development Program (PKBL) And Pln Csr Program

560 Langkah Kongkrit Plln Bangun Kompetensi Kelistrikan Siswa Smk Melalui Program CSR
Pln Concrete Measures In Upgrading The Skills Of Vocational High School Students Through CSR Program

562 Aksi Sosial Di Tengah Bencana Bima
Social Action Amidst The Bima Disaster

563 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/ Pelanggan
Responsibility To Customers

560 Upaya peningkatan kepuasan pelanggan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)
Efforts to improve customer satisfaction at PT PLN (Persero) Jakarta Raya Distribution (Disjaya)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PLN memandang bahwa realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud pemberian manfaat kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam kesinambungan usaha Perseroan.

PLN considers that fulfillment of corporate social responsibility is not just an obligation, but rather a form of providing benefits to communities as well as a vital part of the Company's business continuity.

PT PLN (Persero) memandang bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) merupakan bentuk komitmen untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia. Sebagai perusahaan milik negara, PLN memiliki ikatan moral untuk mampu memberikan sumbangan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia secara umum, dan kepada para pemangku kepentingan secara khusus.

PT PLN (Persero) believes that Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of commitment to provide real contributions to the community, environment, and human resources. As a state-owned enterprise, PLN has a moral obligation to provide the best contribution to the people of Indonesia in general, and the stakeholders in particular.

Karena itulah, pelaksanaan program TJSL ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bentuk komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran anggaran TJSL untuk sejumlah kegiatan.

On that account, the implementation of the CSR program is not just the fulfillment of obligation, but rather a commitment to create harmony with the surrounding community and environment, as well as being involved in sustainable development. The commitment is realized through the disbursement of CSR funds for a number of activities.

VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang pelaksanaan kegiatan TJSL, PLN menetapkan Visi dan Misi kegiatan TJSL sebagai berikut :

Visi

"Menjadikan TJSL PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh lapisan *stakeholder* dan lingkungan".

Misi

"Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan *stakeholder* perusahaan agar dapat berjalan sinergis menjalankan dan memajukan citra perusahaan".

VISION AND MISSION

In order to accomplish the long term objectives of CSR activities, PLN has established the following Vision and Mission:

Vision

"Making the CSR of PT PLN (Persero) the leading program in increasing the electricity supply, while maintaining harmony among the stakeholders and the environment."

Mission

"Implementing social activities in order to build links for all stakeholders, so they can interact in synergy to maintain and promote the image of the company."

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan misi Perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, PLN berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh dengan konsisten.

Perbaikan kualitas pelaksanaan tersebut mengandung maksud pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) tidak terbatas pada kegiatan pemberian bantuan semata, melainkan menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengembangan usaha jangka panjang Perseroan.

PURPOSE AND OBJECTIVE

To realize the mission of the Company as well as to create quality growth and meeting the expectations of all stakeholders, PT PLN (Persero) is consistently improving the quality of its corporate social responsibility implementation.

The improvement in implementation means that the purpose of the CSR implementation is not restricted to the provision of assistance, but rather acts as one of the supporting elements of the Company's success in long-term business development.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan TJSL PLN adalah:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

The objectives of PLN's CSR activities are:

1. Creating a harmonious relationship between the company and the public.
2. Encouraging the growth and development of independent, resilient, competitive, and professional small enterprises and cooperative unions.
3. Fostering an approach towards the development of small enterprises and cooperative unions based on equality, independence, professionalism, and ethics.
4. Preserving the environment, as well as assisting in the improvement of the public's quality of life in education, public health, and welfare.

Sesuai dengan tujuan tersebut, PLN secara berkala menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program tanggung jawab perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Based on these objectives, PLN periodically prepares, implements, and evaluates the realization of the corporate responsibility program, which involves and provides added value for all stakeholders.

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN TJSL

PLN melaksanakan kegiatan TJSL yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab dalam lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab

SCOPE OF ACTIVITIES AND FUNDING OF CSR ACTIVITIES

PLN implements CSR activities that fully support the environment, employment, occupational health and safety, as well as product responsibility with the objective of fulfilling

produk, dengan tujuan pencapaian misi perusahaan dan terpenuhinya harapan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan TJSL dilakukan oleh masing-masing unit kerja, dan sumber dana untuk membiayai kegiatan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun.

Mengingat kegiatan di bidang ketenagakerjaan, tanggung jawab produk dan keselamatan kerja memberi dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, PLN berusaha untuk merealisasikan kegiatan di bidang TJSL dengan sungguh-sungguh.

Bentuk kegiatan TJSL PLN pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yakni:

1. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kegiatan dengan penerima manfaat para pemangku kepentingan sebagai bentuk amanat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

the Company's mission and meeting the expectations of the stakeholders.

The CSR program is conducted by each work unit, and the funds for the activities are annually allocated in the Company Work & Budget Plan (RKAP).

Given that activities related to labor practices, product responsibility, and occupational safety have a significant impact to long-term business sustainability, PLN strives to realize CSR activities in a serious manner.

CSR activities implemented by PLN consist of two main activities, namely:

1. CSR activities in which the stakeholders are the beneficiaries as mandated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 74, and Governement Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
2. Partnership and Community Development Program.

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 terdapat beberapa perubahan kebijakan dari Kementerian BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sudah mengalami beberapa perubahan di tahun 2012 dan 2013, 2015, 2016 yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan atas Peraturan No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. Per-05/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2013 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013.

LEGAL BASIS AND POLICY OF CSR IMPLEMENTATION

As a State Owned Enterprise, PLN is obligated to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). In its implementation, PKBL activities refer to the Regulation of the Ministry of SOE No. PER-05/MBU/20017, dated 27 April 2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program.

In 2012, 2013, 2014, 2015, and 2016 there were several policy changes from the Ministry of SOE, namely the Regulation of the Ministry of SOE No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program, which was amended a number of times in 2012, 2013, 2014, 2015, and 2016, namely:

1. Regulation of the Minister of SOE No. PER-20/MBU/2012, dated 27 December 2012, on the Amendment to Regulation No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program;
2. Regulation of the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2013, dated 1 May 2013, on Second Amendment to Ministry of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program as amended by the Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2012, dated 27 December 2012
3. Regulation of the Minister of SOE No. PER-07/MBU/2013, dated 27 June 2013, on the Third Amendment to the Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program as amended by the Minister of SOE Regulation No. PER-20/MBU/2012 dated 27 December 2013 and Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2013, dated 1 May 2013.

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015, tanggal 22 Mei 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Peraturan Menteri ini langsung diimplementasikan menggantikan Peraturan Menteri BUMN sebelumnya perihal yang sama.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana Peraturan Menteri ini langsung diimplementasikan menggantikan Permen BUMN sebelumnya perihal yang sama.
7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, tanggal 16 Desember 2016, perihal Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 16 Desember 2016, perihal perubahan atas Permen No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Berdasarkan :

1. Risalah RUPS Pengesahan RKAP No. RIS-13/D2.MBU/2015, tanggal 23 Desember 2015, pada tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk PKBL (menggunakan dana tersedia)
2. Risalah Rapat pembahasan Laporan Tahunan PKBL Tahun 2015, No. Ris-64/D7.MBU.3/04/2016, tanggal 01 April 2016, menyatakan bahwa mengusulkan sumber dana untuk PKBL tahun 2016 berasal dari sisa/ saldo dana PKBL yang tersedia di awal tahun dan dana bergulir/ *revolving*.

Dengan demikian maka PKBL PT PLN (Persero) pada tahun 2016 melaksanakan program PKBL dengan menggunakan anggaran tersedia atau saldo dana sampai dengan 2015.

4. Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/2013, dated 10 September 2013, on the Fourth Amendment to the Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program
5. Regulation of the Minister of SOE No. PER-07/MBU/2015, dated 22 May 2015, on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program, in which the Ministerial Regulation is effective immediately and replaces the previous Minister of SOE Regulation on the same subject.
6. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2015, dated 3 July 2015, on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program, in which the Ministerial Regulation is effective immediately and replaces the previous Minister of SOE Regulation on the same subject.
7. Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/2016, dated 16 December 2016, on the Amandment to the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2015, dated 16 December 2016, on the Amendment to the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2015 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program

Based on:

1. Based on the Minutes of the Company Work and Budget Plan GMS approval No. RIS-13/D2.MBU/2015, dated 23 December 2015, there is no allocation of funds for PKBL in 2016 (utilizing the available funds).
2. Minutes of the Meeting discussing the 2015 PKBL Annual Report No. Ris-64/D7.MBU.3/04/2016, dated 1 April 2016, stating to move the source of PKBL funds in 2016 deriving from the available balance at the beginning of the year and revolving funds.

On that account, PKBL of PT PLN (Persero) in 2016 implemented the PKBL programs by utilizing the available balance or the balance up to 2015.

Rumah Kreatif BUMN
Rumah Kreatif BUMN

Rumah Kreatif BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi badan usaha milik negara dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok usaha tersebut. Rumah Kreatif BUMN akan menjadi pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM.

BUMN Creative House is a mean for state owned enterprises (BUMN) to form a Digital Economy Ecosystem by assisting small and medium enterprises (SME) to increase their capacity and capability. BUMN Creative House will be the information and data center as well as education, development and digitalization center for the SMEs.

Setiap Rumah Kreatif BUMN, akan menangani komunitas-komunitas UKM yang ada disekitar wilayahnya. Dan di dalam komunitas-komunitas UKM inilah terdapat beberapa UKM yang nantinya akan dibina.

Every BUMN Creative House will handle SME communities in their area. From these SME communities, there will be some SMEs that will be developed.

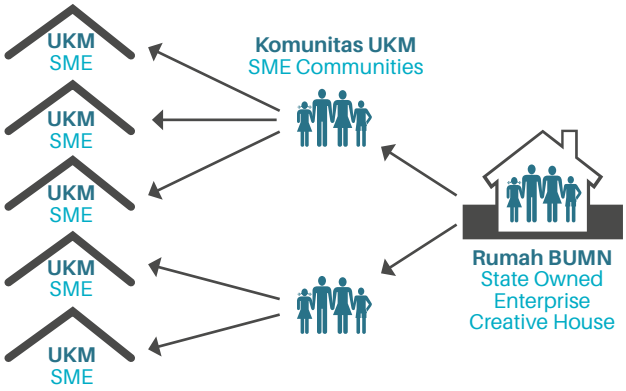

Analisa Data
Data analysis

1. **Mengumpulkan data UKM**
   SMEs data Collection
2. **Menganalisa data UKM**
   SMEs data Analyzing
3. **Melakukan kategorisasi UKM, produk, pasar.**
   SMEs product and market Categorization

Pembina UKM
Fostering SMEs

1. **Standarisasi bahan baku**
   Raw materials Standardization
2. **Standarisasi produksi**
   Production Standardization
3. **Seleksi UKM Unggulan**
   Leading SMEs Selection
4. **Bimbingan dan Pelatihan Teknologi dan Operasional Bisnis**
   Tutoring and Training Technology and Business Operations
5. **Bimbingan Pendanaan**
   Financing Tutoring

Aktivitas yang dilakukan:

Untuk mendukung terbentuknya Digital Economy Ecosystem, dilibatkan pula blanja.com yang ditetapkan sebagai marketplace BUMN dimana telah terjadi kolaborasi bisnis antar BUMN di dalamnya. Sebagai *platform marketplace*, blanja.com juga telah menyiapkan modul-modul yang memudahkan UKM untuk mulai memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. Positioning blanja.com

Activities Performed

To support the establishment of Digital Economy Ecosistem, blanja.com is involved and appointed as BUMN marketplace where inter BUMN business collaboration has been going on. As marketplace platform, blanja.com also prepared modules that simplify BUMN to start utilizing digital technology in running their business. Blanja.com position and collaboration

dalam Rumah Kreatif dan kolaborasinya untuk mendukung Digital Economy Ecosystem.

in Creative House is to support the Digital Economy Ecosystem.

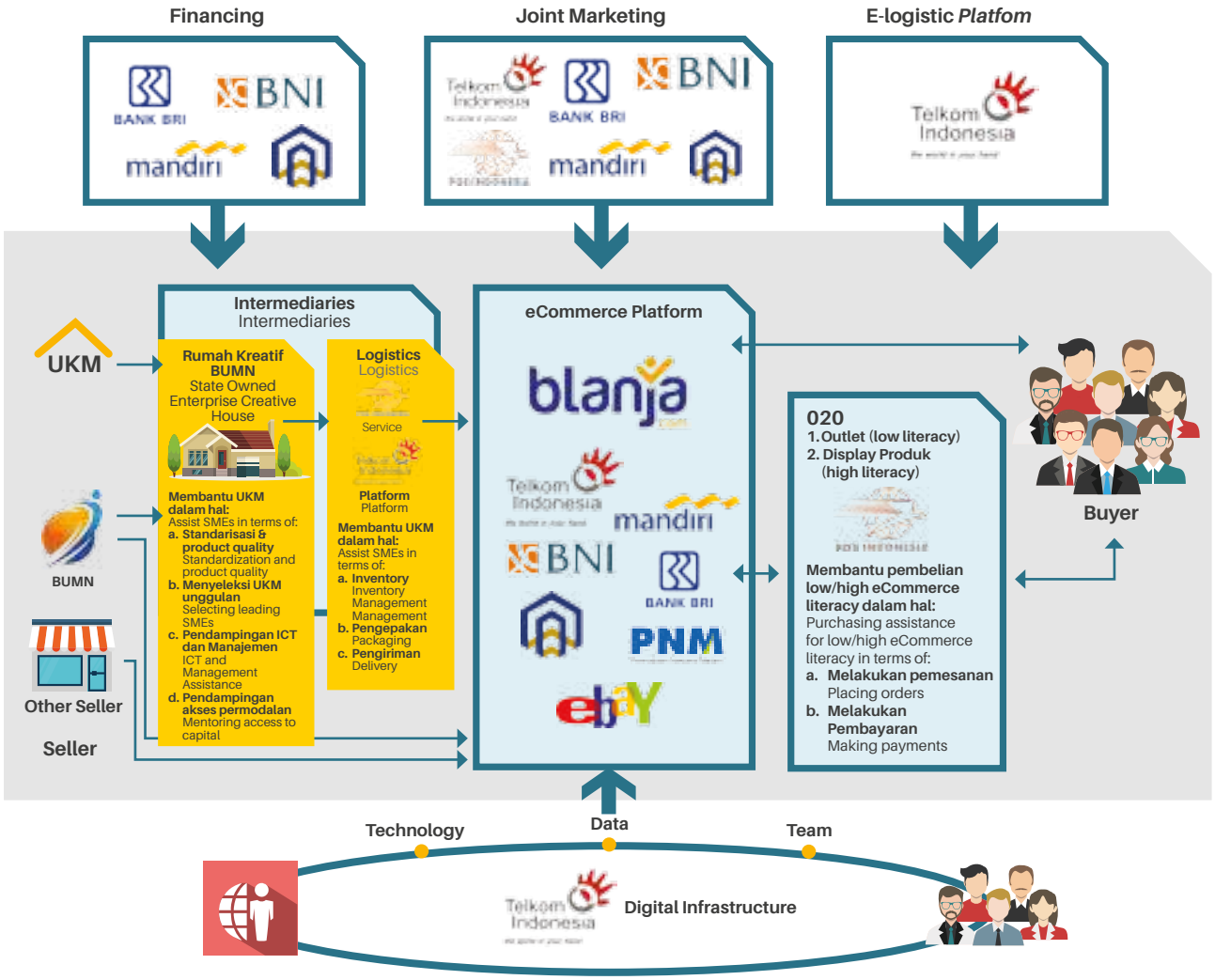

blanja.com akan membantu UKM dalam memasarkan dan mempromosikan UKM di dunia maya. Untuk dapat terlisting di blanja.com maka di dalam Rumah Kreatif disediakan intermediary portal yang terhubung langsung dengan blanja.com

Blanja.com will help SME in marketing and promoting in the internet. To be listed in blanja.com, an intermediary portal that is connected with blanja.com is provided.

Proses *listing* UKM melalui Rumah Kreatif BUMN adalah sebagai berikut:

SME listing process through BUMN Creative House as follows:

Diharapkan dengan adanya blanja.com sebagai media *market place* BUMN, tujuan untuk membentuk Digital Economy Ecosystem dapat lebih mudah tercapai. Blanja.com sebagai media *marketplace* UKM melengkapi operasional dari Rumah Kreatif sebagai berikut:

It is expected that with blanja.com as BUMN market place media, the objective to form the Digital Economy Ecosystem will be easier to achieve. Blanja.com as SME marketplace media completers Creative House's operations as follows:

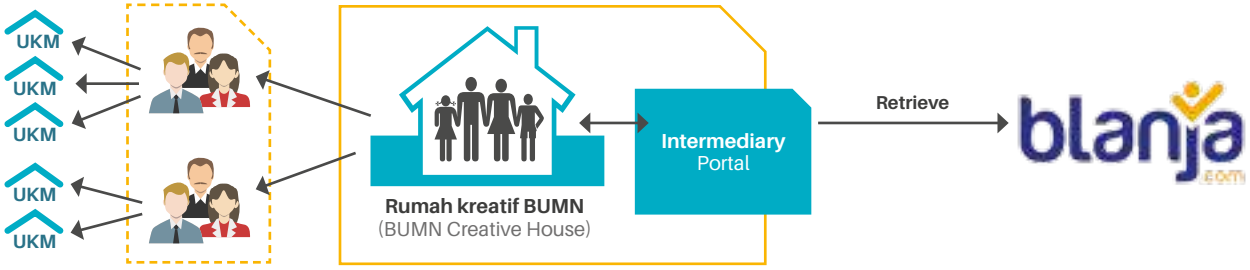

Pada tahapan listing blanja.com, petugas Rumah Kreatif akan membantu UKM dalam melakukan *review* deskripsi produk, membuat foto produk, desain *packaging*, harga dan *upload* ke *intermediary portal*.

In the blanja.com listing phase, an officer from Creative House will help SME in reviewing the product description, taking pictures of the product, packaging design, pricing and uploading to intermediary portal.

Berikut ini lokasi Rumah Kreatif BUMN dalam pendampingan PT PLN (Persero):

No	Provinsi Province	**Kab/Kota** Regency/City
1	Bali	Denpasar
2	Bengkulu	Kepahiang
3	Daerah Istimewa Yogyakarta (Special Region of Yogyakarta)	Gunung Kidul
4	Jambi	Jambi
5	Jawa Barat (West Java)	Cirebon
6	Jawa Tengah (Central Java)	Jepara
7	Jawa Timur (East Java)	Sumenep
8	Kalimantan Barat (West Kalimantan)	Sintang
9	Kalimantan Timur (East Kalimantan)	Kutai Kartanegara

10	Kalimantan Utara (North Kalimantan)	Nunukan
11	Lampung	Bandar Lampung
12	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Utara (North Aceh)
13	Nusa Tenggara Barat (West Nusa Tenggara)	Lombok Barat (West Lombok)
14	Papua Timur (East Papua)	Nabire
15	Sulawesi Barat (West Sulawesi)	Majene

Program rumah kreatif ini secara umum, dapat membantu UKM untuk menghadapi beberapa tantangan, yakni:

- Akses Kompetensi
  UKM masih memerlukan bimbingan dalam hal standar pengembangan produk, kualitas, dan pemanfaatan teknologi dan manajemen.

- Akses Pasar
  UKM masih memerlukan bimbingan dalam hal akses ke pasar yang lebih luas melalui penjualan *online*.

- Akses Permodalan
  UKM masih membutuhkan dukungan dalam mendapatkan akses permodalan.

Solusi dari tantangan tersebut adalah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi atau digital dengan memanfaatkan berbagai layanan aplikasi yang sangat dimungkinkan untuk mempermudah proses bisnis seperti layaknya pada program rumah kreatif ini. Lebih lanjut, program ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan UKM sebesar 80%. Untuk itulah, solusi menuju digital menjadi penting bagi UKM.

Creative House program in general should help SME to face these obstacles:

- Competency Access
  SMEs still need guidance on product development standards, quality and management & technology utilization.

- Market Access
  SMEs still need guidance to a wider market access through online marketing.

- Capital Access
  SMEs still need support to obtain access to capital.

The solution to the challenges is to adopt information and communication or digital technology by utilizing various application services to ease the business process such as the creative house program. Digital technology also can potentially increase the SMEs revenue by 80%. Therefore, digital solutions become very important to the SMEs.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN, KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) DAN PERUBAHAN IKLIM

Misi perusahaan menegaskan bahwa PT PLN (Persero) akan "Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan". Oleh sebab itu, PLN selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN secara maksimal telah berupaya mengurangi pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi maupun pada anak-anak usaha.

Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai implementasi dari misi tersebut di atas, Perseroan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya dalam bidang lingkungan.

Adapun Kebijakan Lingkungan yang mendukung Komitmen Perusahaan sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan.
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan.
4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara Kebijakan Lingkungan, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan

RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT, ELECTRICITY SAFETY (K2) AND CLIMATE CHANGE

The Company mission affirms that PT PLN (Persero) will be "Running Business Activities with Environmental Awareness". Therefore, PLN has tried to pay attention to environmental aspects in carrying out every activity. PLN has made its best efforts on reducing the pollution of soil, water and air by pollutants, including reducing greenhouse gas emission. This effort is being done thoroughly in all electricity supply activities carried out by PLN, in its generators, transmissions/substations and distributions, as well as in the subsidiaries.

Environment, Health and Safety Policy

For the implementation of the mission above, the Company has set the environmental as one of the performance assessment elements in PLN business units throughout Indonesia. Through such performance assessment, the Company can evaluate fulfillment of commitments in environmental matters.

The Environmental Policy that supports the Company's commitment is as follows:

1. To prevent environmental pollution and degradation of biodiversity; as well as protecting the safety and health of employees around the the Company's working area.
2. To comply with legislation and other provisions as well as controlling the significant environmental aspects and impacts of each activity, processes, and products of various units and subsidiaries.
3. To document, implement, maintain and periodically review the Environmental Policy so as to remain relevant, appropriate and applicable as the basic guidelines for environmental management as applied specifically in each unit and the subsidiaries.
4. To make this policy the basis for the determination and evaluation for achieving environmental and occupational health and safety management goals and targets.
5. Encourage each unit and subsidiary to continuously improve the systems and performance of environmental and occupational health and safety management.
6. To provide and facilitate the resources required to implement and maintain the Environmental Policy, so that each unit of work, subsidiary and business partner can implement this policy gradually by taking into account

kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat.
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan.
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihakpihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (*lender*) dan masyarakat luas.

Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Sekitar Instalasi

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, Perseroan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, PT PLN (Persero) dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam bidang lingkungan.

1. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
2. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Progres Kegiatan Bidang Lingkungan dalam Pembangunan Proyek Ketenagalistrikan

1. SUTET 500kV Paiton – Antosari dan SUTT 150kV Antosari – Kapal Proyek Java Bali Crossing (Pendanaan ADB).
   - Perbaikan *draft* dokumen *update* LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) final sesuai dengan masukan dari ADB (Asian Development Bank)
   - Penyusunan *Biodiversity Assessment* di Kawasan Taman Nasional Bali Barat
2. PLTA Nua 2 x 4,4 MW (Pendanaan KFW)
   Pelaksanaan studi lingkungan belum bisa dilaksanakan dikarenakan *update* FS belum selesai.
3. SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau (Pendanaan ADB)
   Penyampaian dokumen Initial Environmental Examination (IEE) dan Resettlement Customary Community Plan (RCCP) ke ADB

the ability of the Company and local environmental conditions.
7. To make environmental and occupational health and safety management an attitude and behavior of every line manager and employee of the Company.
8. To encourage the development of communities around the working units and subsidiary companies as an effort to make the Company an integral part of the community.
9. To participate in the government's program to reduce greenhouse gas emissions.
10. To ensure this policy is always available to the interested parties such as funding providers and the community.

Environmental Management Around Installations

As an implementation of the above policy, the Company has set the environmental as one element of judgment in the performance of PLN business units throughout Indonesia. Through this performance assessment, PT PLN (Persero) can evaluate the fulfillment of the Company's commitment in the environment sector.

1. PLN Installations regularly carry out environmental management and monitoring in accordance with the environmental documents (EIA / UKL-UPL).
2. Performance Rating Program for Environmental Management, known as PROPER implemented by the Ministry of Environment (MOE).

Environmental Field Activity Progress in Electricity Project Development

1. SUTET Paiton 500kV - Antosari and SUTT 150kV Antosari - Java Bali Crossing Ship Project (ADB Funding).
   - Updated LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) draft document improvement in accordance with the final input from ADB (Asian Development Bank)
   - Created Biodiversity Assessment in Bali Barat National Park Area
2. Nua 2 x 4.4 MW Power Plant (KFW Funding)
   Implementation of environmental study could not be implemented due to unfinished FS Update
3. SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau (ADB Funding)
   Submission of Initial Environmental Examination (IEE) and Customary Community Resettlement Plan (RCCP) document to ADB

4. Eastern Indonesia Sustainable Energy Access Sector Project: PLTMG Kaltim Peaker, PLTMG Jayapura Peaker, PLTMG Minahasa Peaker, dan Distribusi 20 kV di Indonesia Timur (Pendanaan ADB).
   ADB sedang melakukan *assessment/due diligence* mengenai *safeguard system* yang berlaku di unit PLN
5. *Indonesia Second Power Transmission Development Project* (IPTD 2 – Group 2; Pendanaan World Bank) .
   Dokumen *Environmental Management Plan* dan *Land Acquisition and Resettlement Plan* telah disampaikan dan disetujui oleh Bank Dunia
6. PLTA Wae Racang 2 x 4,4 MW (Pendanaan KFW)
   - Surat pengajuan permohonan izin lingkungan sudah disampaikan ke BLH Kab Manggarai dan pertemuan dengan BLH sudah dilaksanakan,namun izin lingkungan belum terbit dikarenakan BLH meminta pertemuan ulang untuk membahas dokumen UKL UPL.
   - Pelaksanaan studi EMP (Environmental Management Plan) dan LARAP ditangguhkan dikarenakan akan dilaksanakan *Review Feasibility Study*
7. PLTA Poko 2x117 MW (Pendanaan World Bank)
   Proses Pengadaan Konsultan ESIA (*Environmental Social Impact Assessment*)/AMDAL dan penyusunan Draft ToR (*Term of Reference*) penyusunan dokumen LARAP
8. PLTA Bakaru II 2 x 63 MW (Loan KFW)
   - Pekerjaan persiapan penyusunan dokumen KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan).
   - Pembahasan KA ANDAL akan dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan perpanjangan izin prinsip dari Bupati Kab Pinrang.
9. PLTA Kumbih 3 x 15 MW (Loan KfW)
   Dokumen KA ANDAL telah dibahas bersama Tim Teknis dan saat ini proses pengesahan. Bersamaan dengan proses pengesahan KA ANDAL oleh Tim Teknis, PLN sedang menyusun dokumen ANDAL, RKL-RPL. Dokumen KA ANDAL tidak dapat disahkan, dikarenakan Surat Keterangan kesesuaian Tata Ruang dari Provinsi Sumatera Utara belum terbit.
10. PLTP Mataloko 20 MW (Loan KFW)
    - Surat penugasan penyusunan Dokumen Lingkungan telah dikirimkan ke Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara pada Bulan Oktober 2016 dengan target penyelesain Dokumen Lingkungan dan penerbitan Izin Lingkungan pada Bulan Maret 2017.
    - UIP Nusa Tenggara sedang melaksanakan pengadaan konsultan penyusun dokumen lingkungan dan diharapkan sudah terkontrak pada Bulan Februari 2017.
11. PLTP Ulumbu 2 x 5 MW (Loan KFW)
    - Surat penugasan penyusunan Dokumen Lingkungan telah dikirimkan ke Unit Induk Pembangunan Nusa

4. Eastern Indonesia Sustainable Energy Access Sector Project: PLTMG Kaltim Peaker, PLTMG Jayapura Peaker, PLTMG Minahasa Peaker, and the distribution of 20 kV in eastern Indonesia (ADB Funding).
   ADB is conducting assessment / due diligence on the safeguard systems applicable to PLN units
5. Indonesia Second Power Transmission Development Project (IPTD 2 - Group 2; World Bank Funding).
   Environmental Management Plan and Land Acquisition and Resettlement Plan document has been submitted and approved by the World Bank
6. Wae Racang 2 x 4.4 MW Power Plant (Funding KFW)
   - Application letter for environmental permit has been submitted to the Manggarai district BLH and meetings with BLH were made, but environmental permit has not been released due to the BLH requesting a second meeting to discuss the document UKL UPL
   - Implementation of EMP (Environmental Management Plan) and LARAP study suspended due to Feasibility Study review being carried out.
7. Poko 2x117 MW Power Plant (World Bank Funding)
   ESIA (Environmental Social Impact Assessment)/AMDAL Consultant Tendering Process and preparation of LARAP document ToR (Terms of Reference)
8. Bakaru II 2 x 63 MW Power Plant (KFW Loan)
   - Preparation of KA ANDAL (Environmental Impact Assessment Terms of Reference) document
   - Discussion of KA ANDAL will be carried out after obtaining permit extension Pinrang Regent
9. Kumbih 3 x 15 MW Power Plant (KFW Loan)
   KA ANDAL document has been discussed with the technical team and is currently awaiting approval process. Along with KA ANDAL approval process by the technical team, the Company is preparing ANDAL RKL-RPL documents. KA ANDAL document can not be approved due to the Spatial Conformity Certificate from North Sumatra Province not being published
10. Mataloko 20 MW Power Plant (KFW Loan)
    - Environmental Document Preparation assignment letter has been sent to the Nusa Tenggara Development Main Unit in October 2016, with a target completion and issuance of Environmental Documents and Environmental Permit in March 2017.
    - UIP Nusa Tenggara is tendering for environmental document preparation consultants and is expected to be awarded in February 2017.
11. Ulumbu 2 x 5 MW Power Plant (KFW Loan)
    - Environmental Document Preparation assignment letter has been sent to the Nusa Tenggara

Tenggara pada Bulan Oktober 2016 dengan target penyelesaian Dokumen Lingkungan dan penerbitan Izin Lingkungan pada Bulan Maret 2017.
- UIP Nusa Tenggara sedang melaksanakan pengadaan konsultan penyusun dokumen lingkungan dan diharapkan sudah terkontrak pada Bulan Februari 2017.

12. PLTA Matenggeng (*Loan World Bank*)
    Penyusunan dokumen ESIA direncanakan dimulai pada Bulan Februari 2017.
13. PLTGU Grati Peaker 450 MW (Pendanaan KEXIM, ADB, SACE, EGAP, Commercial Facility)
    Laporan Environmental and Social Due Diligence (ESDD) telah disusun. Saat ini PLN sedang menyiapkan rencana terkait pemenuhan *Action Plan* yang harus dilakukan sesuai ESDD.

Proyek Percepatan 35.000 MW

1. PLTGU Muara Karang (1x500 MW)
   Izin Lingkungan telah terbit sesuai nomor 92/7.1/31/-1.774.1/2016 pada tanggal 27 Juni 2016
2. PLTGU Jawa-2 800 MW
   Izin Lingkungan telah terbit sesuai nomor 83/7.1/31/-1.774.1/2016 pada tanggal 06 Juni 2016
3. PLTU Lombok FTP-2 (2 x 50 MW)
   Rekomendasi KA ANDAL telah terbit pada Bulan September 2016. Dokumen ANDAL, RKL RPL sudah disampaikan ke Komisi Penilai AMDAL untuk dilakukan pembahasan
4. PLTGU Lombok Peaker (150 MW)
   Proses pengurusan rekomendasi KA ANDAL dan penyusunan dokumen ANDAL, RKL –RPL. Penerbitan rekomendasi KA ANDAL terkendala oleh belum terbitnya surat kesesuaian Tata Ruang Daerah.
5. PLTU Sulsel 2 (200MW)
   Sidang teknis pembahasan dokumen KA ANDAL telah dilaksanakan saat ini persiapan penyusunan dokumen ANDAL, RKL – RPL.
6. PLTU Palu 3 (100 MW)
   Terjadi perpindahan lokasi Pembangkit, sehingga kajian lingkungan dihentikan hingga kajian kelayakan proyek lokasi baru selesai dan izin prinsip terbit
7. PLTG/PLTMG Minahasa *Peaker* (150 MW)
   Proses pengajuan izin lokasi baru, penyusunan dokumen lingkungan akan dilaksanakan setelah izin lokasi baru terbit.
8. PLTG/PLTMG Makassar *Peaker* (450 MW)
   Pekerjaan penyusunan Dokumen Lingkungan akan diberhentikan sementara dikarenakan ada perubahan lokasi Pembangkit.

Development Main Unit in October 2016, with a target completion and issuance of Environmental Documents and Environmental Permit in March 2017
- UIP Nusa Tenggara is tendering for environmental document preparation consultants, expected to be awarded in February 2017.

12. Matenggeng Power Plant (World Bank Loan)
    The preparation of the ESIA document is planned to commence in February 2017
13. Grati Peaker 450 MW Power Plant (KEXIM, ADB, SACE, EGAP, Commercial Facility Financing)
    Environmental and Social Due Diligence (ESDD) Report has been prepared. The Company is preparing a plan related to the fulfillment of the Action Plan that should be carried out in accordance to ESDD.

35,000 MW Acceleration Project

1. Muara Karang Power Plant (1x500 MW)
   Environmental Permit number 92 / 7.1 / 31 / -1.774.1 / 2016 was published on June 27, 2016
2. Java-2 800 MW Power Plant
   Environmental permit number 83 / 7.1 / 31 / -1.774.1 / 2016 was published on June 6, 2016
3. Lombok FTP-2 Power Plant (2 x 50 MW)
   KA EIA recommendation was published in September 2016. EIA documents, RKL RPL were submitted to the EIA/AMDAL Audit Commission for discussion
4. Lombok Peaker Power Plant (150 MW)
   Currently in process to obtain KA ANDAL recommendation and preparation of EIA/ANDAL, RKL –RPL documents. KA ANDAL recommendations are facing obstacles due to the Regional Spatial Conformity Letter issuance delay.
5. Sulsel 2 Power Plant (200MW)
   Technical Session discussion on the KA ANDAL/EIA document has been carried out, currently preparing the ANDAL/EIA RKL – RPL document
6. Palu 3 Power Plant (100 MW)
   There has been a change of plant location, therefore the environmental assessment to be discontinued until the feasibility study is completed and the new location principle license is issued
7. Minahasa Peaker Power Plant (150 MW)
   In process of new location permit application, the preparation of environmental documents will commence after the new location permit is issued
8. Makassar Peaker Power Plant (450 MW)
   Environmental Document drafting work will be suspended due to the change in plant location.

Penyusunan Dokumen Lingkungan (DELH-Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DPLH-Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) melalui Surat Edaran KLH No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,mewajibkan seluruh kegiatan yang telah memiliki izin usaha dari Tahun 2009 untuk menyusun dokumen lingkungan (DELH/DPLH) dan memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu, seluruh unit operasional PLN yang sudah memiliki izin usaha sebelum Tahun 2009, baik unit bisnis Pembangkit, Jaringan, Distribusi dan Perkantoran diwajibkan menyusun dokumen Lingkungan (DELH/DPLH).

Berdasarkan surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan nomor S234/PDLUK/ALHDI/PKTL.4/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal arahan tindak lanjut usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, disampaikan bahwa unit PLN yang belum memiliki dokumen lingkungan dan belum menyusun DELH/DPLH akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, dari 206 unit yang berkewajiban menyusun dokumen lingkungan, 115 unit telah menyelesaikan dan sisanya masih tahap penyusunan.

Program Proper

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengumumkan hasil penilaian PROPER tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2016 tanggal 6 Desember 2016. Unit PLN telah meraih Peringkat PROPER dari rendah ke tinggi, yakni 8 unit mendapatkan peringkat merah, 74 unit mendapatkan peringkat biru, dan 14 unit meraih peringkat hijau.

Berikut ini rincian jumlah PROPER di lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan:

Preparation of Environmental Document (DELH -Environmental Evaluation Document/DPLH-Environmental Management Document)

Ministry of Environment and Forestry through Circular Letter No. B-14 134 / MENLH / KP / 12/2013 dated December 27, 2013, concerning the direction of the implementation of Article 121 of Act No. 32 Year 2009 on the Protection and Environmental Management, requires that all activities already having an operating license from 2009 to draft environmental documents (DELH / DPLH) and have an environmental permit. Therefore, all PLN operational units that already have a business license prior to 2009, namely Generation, Network, Distribution and Office business units are required to prepare a document for the Environment (DELH / DPLH).

Based on a letter from the Environmental Impact Prevention for Companies and Activities Directorate, Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management, Ministry of Environment and Forestry number S234 / PDLUK / ALHDI / PKTL.4 / 3/2016 dated March 17, 2016, concerning the direction of the follow-up of operations and/or activities that do not have the environmental document, PLN units that do not have environmental documents and have yet to develop DELH / DPLH will be sanctioned in accordance with applicable regulations. Until now, of the 206 units obliged to prepare environmental documentation, 115 units have completed the documents and the rest are still under preparation.

PROPER Program

Ministry of Environment and Forestry has announced the results of PROPER assessment in 2016 through the Minister of Environment and Forestry Decision SK.892 / Menlhk / Secretariat / STD.0 / 12/2016 on the Company Performance in Environmental Management Rating Results Year 2015-2016 dated December 6, 2016. PROPER PLN Units rank successively from low to high, Namely 8 Units red rated, 74Units blue rated, and 14 Units green rated.

Item	PLN	Anak Perusahaan	Total	Item
Peserta PROPER	81 Unit	15 Unit	96 Unit	Peserta PROPER
Peringkat Hijau	3 Unit	11 Unit	14 Unit	Peringkat Hijau
Peringkat Biru	70 Unit	4 Unit	74 Unit	Peringkat Biru
Peringkat Merah	8 Unit	-	8 Unit	Peringkat Merah

Penggunaan Bahan-Bahan Daur Ulang dan Pengembangan Penggunaan Energi Terbarukan.

PLN berupaya meningkatkan pengguanaan bahan-bahan daur ulang dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, dengan merealisasikan program-program:

1. Penggunaan bahan-bahan daur ulang:
   a. Penggunaan *air sampling rack*.
   b. Menggunakan proses *purifier* pada minyak pelumas.
   c. Menggunakan *purifier* dan reklamasi pada minyak oli trafo.
   d. Menggunakan kertas bekas.
   e. Menggunakan kembali limbah minyak HSD/MFO, melalui separator ulang atau memompa kembali ke *receiving tank* dan digunakan kembali.
   f. Memanfaatkan sampah daun untuk pembuatan kompos.
   g. Memanfaatkan limbah besi untuk dipakai kembali.
2. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan:
   Dalam RUPTL Tahun 2015-2024, PLN merencanakan untuk membangun pembangkit energi terbarukan skala besar dan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas total 28,27 GW, yang terdiri dari PLTGU, PLTG/MG, PLTP, PLTA dan PLT EBT lainnya seperti pembangkit termal modular, PLTS, PLTB dan lainnya.
3. Untuk meningkatkan efisiensi energi, akan dilakukan rehabilitasi PLTU Suralaya Unit 3 dan 4 dengan target peningkatan efisiensi sebesar 3%.

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

PLN menggalang kerja sama dengan beberapa pihak ke-3 dalam berbagai bidang terkait lingkungan hidup, seperti:

1. Kerja sama dalam hal pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke 3 yang memiliki izin Pengangkutan, Pengumpulan, dan Pengelola akhir limbah B3 (pengolahan, pemanfaatan, penimbunan).
2. Kerja sama peningkatan kapasitas SDM Bidang Lingkungan terkait penyiapan dokumen lingkungan dan sosial oleh Bank Dunia.
3. Kerja sama studi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) tersebar dengan konsultan yang terakreditasi.
4. Kerja sama pembuatan laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebar dengan konsultan independen.
5. Kerja sama pelaksanaan pemantauan lingkungan tersebar dengan laboratorium terakreditasi.
6. Kerja sama pelaksanaan pelatihan AMDAL A dan AMDAL C dengan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
7. Kerja sama pelaksanaan pelatihan Auditor Lingkungan dengan Institute Pertanian Bogor sebagai lembaga pelatihan yang terakreditasi.
8. Kerja sama pengurusan izin PPLH dengan konsultan.

The Use of Recycled Materials and Development of Renewable Energy

PLN seeks to increase the use recycled materials and increase the use of renewable energy, with the realization of the following programs:

1. The usage of recycled materials such as:
   a. The use of water sampling rack.
   b. Using purifying process on lubricants.
   c. Using of purifier and reclamation of transformer oil.
   d. Using of waste paper.
   e. Reusing HSD / MFO waste oil, through the separator or pumped back into a receiving tank and reused.
   f. Utilizing leaf waste for composting.
   g. Utilizing iron waste for reuse.
2. Increase the use of Renewable Energy:
   In RUPTL 2015-2024, PLN plans to build a largescale renewable energy power plant and a gas power plant with a total capacity of 28.27 GW comprising: Combined Cycle Power Plant, Gas Turbine Power Plant/Gas Engine Power Plant, Geothermal Power Plant, Hydro Power Plant and other Renewable Energy Power Plant modular thermal power plant, Solar Cell Power Plant, Wind Power Plant and others.
3. To increase energy efficiency, Suralaya Steam Power Plant Units 3 and 4 will be rehabilitated with a target of increasing efficiency by 3%.

Cooperation with Third Parties

PLN supports cooperation with several third parties in many areas related to the environment, such as:

1. Cooperation in terms of hazardous and toxic waste (B3 waste) management with a third party licensed for freight, collection, and final management of B3 waste (processing, use, stockpiling).
2. Cooperation in human capital capacity improvement in the Environment Sector related to environmental and social document preparation by the World Bank.
3. Cooperation in studies of environmental documents (EIA, UKL-UPL) with accredited consultants.
4. Cooperation in implementation of reports on RKL-RPL with independent consultants.
5. Cooperation in implementation of environmental monitoring scattered with accredited laboratories.
6. Cooperation in training implementation of AMDAL A and AMDAL C with accredited trainers.
7. Cooperation in implementation of Environmental Auditor training with Bogor Institute of Agriculture (IPB) as an accredited trainer.
8. Cooperation in permit management of PPLH with consultants.

9. Kerja sama penelitian dengan LIPI tentang sifat limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash dari pembakaran batubara PLTU.
10. Kerja sama pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash dengan Korigi ITS.
11. Keterlibatan dalam Kerja sama tiga kementerian (PUPR-ESDM-KLHK) tentang percepatan penelitian pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash untuk kegiatan infrastruktur.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, di tahun 2016 kembali PLN melakukan berbagai penelitian terkait lingkungan hidup, meliputi.

1. Pelaksanaan Seminar 'Pemanfaatan Limbah B3 (FABA & Gypsum) dari PLTU Batubara milik PLN
2. Pelaksanaan Workshop 'Pengamanan Lingkungan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) Regional Sumatera dan Regional Jawa-Kalimantan'
3. Pelaksanaan Workshop 'Peningkatan Pemahaman PROPER di lingkungan PLN'
4. Pelaksanaan Focus Group Discusion "Apakah Limbah FABA di PLTU Batubara Limbah B3?"
5. Pelaksanaan Training Environmental and Social Safeguards untuk program ADB & WB.
6. Penelitian pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari PLTU Batu Bara oleh Korigi ITS
7. Penelitian pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari PLTU Batu Bara untuk kegiatan infrastruktur oleh PUPR

Kegiatan di Bidang Lingkungan lainnya

1. *Monitoring* rutin Dokumen Pelaksanaan RKL
2. Pembuatan *database* lingkungan
3. Workshop Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Seminar Pemanfaatan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash*
5. Workshop Pengamanan Lingkungan Objek Vital Nasional.

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan lingkungan hidup selama tahun 2016 sebesar Rp 135,1 miliar (2015: Rp116,3 miliar) mencakup kegiatan pembuatan dokumen lingkungan, realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta realisasi kegiatan penghijauan di sekitar area operasi pembangkitan maupun area pendukung lainnya.

Sertifikasi Bidang Lingkungan Hidup

Selaras dengan pencapaian misi Perseroan "Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan", PLN menerapkan kebijakan perolehan sertifikasi lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga independen bagi unit-unit

9. Research cooperation with LIPI on the nature of B3 Fly Ash and Bottom Ash from power plant coal burning.
10. Cooperation of Fly Ash and Bottom Ash utilization with Korigi ITS.
11. Involved with three ministries in cooperation (PUPR-EMR-KLHK) on the utilization of Fly Ash and Bottom Ash for infrastructure activities research acceleration.

Research and Development in Environmental Aspect

As a commitment to the environment, PLN also conducts several environmental-related studies, including:

1. Held Seminar on 'B3 (FABA & Gypsum) Waste Utilization of PLN's Coal Based Power Plant
2. Held Workshop on Security in National Vital Assets (Obvitnas) Sumatra and Java-Kalimantan Regions
3. Held Workshop on "Increasing the Understanding of PROPER in PLN"
4. Held Focus Group Discussion on "Is FABA waste in coal based power plant B3 waste?"
5. Held Environmental and Social Safeguards Training for ADB and WB programs
6. Research on the use of Fly Ash and Bottom Ash from coal based power plant by Korigi ITS
7. Research on the use of Fly Ash and Bottom Ash from coal based power plant for infrastructure activities by PUPR

Other Environmental Activities

1. Monitoring the planning and implementation of environmental documents (RKL)
2. Creating an environmental database
3. Workshop on Environmental Control and Management
4. Seminar on Waste Utilization of Fly Ash and Bottom Ash
5. Workshop on Securing National Vital Assets.

Financial Impact of Environmental Activities

The total cost incurred for environmental activities in 2016 was Rp135.1 billion (2015: Rp116.3 billion) consisting of environmental documentation, environmental management and monitoring activities as well as reforestation activities in the surrounding areas of the power generation operations and other supporting areas.

Environmental Certification

In line with the effort to achieve the Company's mission: "Running environmentally sound business activities", PLN implements an environmental certification acquisition policy which is issued by an independent agency, for business

bisnis dan anak usaha yang mengelola stasiun pembangkit. Adapun sertifikasi lingkungan hidup yang dipersyaratkan bagi unit pengelola pembangkit adalah ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan sertifikasi lingkungan lain yang relevan.

Pada tahun 2016, PLN, melalui unit-unit bisnis dan entitas anak, mendapatkan 44 sertifikasi bidang lingkungan hidup, yakni ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PLN sangat menyadari makna penting dari terciptanya hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh pegawai. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan operasional, Perseroan senantiasa menjalankan praktik atau perlakuan yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku, ras, agama, gender dan haluan politiknya, begitu pula semua karyawan memiliki kebebasan berserikat. Untuk merealisasikan hubungan kerja yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif, PLN bersama-sama dengan Serikat Pekerja menyetujui untuk tetap menggunakan PKB periode 2010-2012 sebagai dasar bagi penyelenggaraan hubungan industrial yang saling menghargai. PLN bersama dengan Serikat Pekerja kini tengah membahas PKB untuk periode selanjutnya sebagai pengganti PKB dimaksud.

Selain kesepakatan hubungan industrial tersebut, Perseroan aktif menyelenggarakan berbagai forum komunikasi bipartit dalam kerangka formal maupun informal. Kemudian untuk memastikan pengelolaan SDM yang optimal dan selaras dengan tujuan pengembangan usaha PLN mengorganisasikan tenaga kerja dengan kebijakan sesuai butir-butir yang tercantum dalam Keputusan Direksi No.032.K/DIR/2009.

KETENAGAKERJAAN

Kebijakan

PLN berupaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan kemampuan Perseroan, maka PLN menerapkan kebijakan dasar pengelolaan SDM sebagai berikut:

1. Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerjasama timbal balik yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan ditinjau secara berkala.
2. Mematuhi seluruh peraturan-peraturan dan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.

units and subsidiaries that manage the power stations. The environmental certification required for plant management units is ISO 14001 Environmental Management System and other relevant environmental certifications.

In 2016, PLN business units and subsidiaries obtained 44 ISO 14001 (environmental management system) certifications.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

PLN realizes the important benefit of creating a harmonious partnership between management and all employees. Therefore, in all operational activities, the Company always adheres to the same practices and treatment of all employees without discriminating against ethnicity, race, religion, gender and political opinion, as well as allowing freedom to participate in Labor Unions. In order to implement labor relations supporting a conducive work environment, PLN and the Labor Unions agree to consistently use the collective agreement of 2010-2012 as the foundation for implementing industrial relations under the ethos of mutual respect. PLN along with the Labor Unions recently discussed the next collective agreement to renew the old collective agreement mentioned above.

Besides this agreement, the Company actively conducts various bipartite formal and informal communication fora. Furthermore, to ensure optimal human resources management that is consistent with business development objectives, PLN manages human resources based on the policies embodied in PT PLN's Board of Directors Decision No. 032.K/DIR/2009.

WORKFORCE

Policies

PLN strives to increase the optimization of human resources management by always observing employee needs. As part of high quality human resources management practices and fair consideration of Company and customer needs, while also taking into account the Company's abilities, PLN applies several basic policies of human resources management, as follows:

1. Developing good relations with employees based on a mutual partnership as embodied in the collective agreement, which is reviewed periodically.
2. Complying with all rules and regulations related to employment.

3. Memberlakukan sistem pengupahan berdasarkan kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pegawai dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Serikat Pegawai.
5. Menyiapkan berbagai program peningkatan dan pelatihan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan akhirnya korporasi.
6. Menerapkan kesetaraan dalam jejang karir
7. Menerapkan kesetaraan gender dalam hal remunerasi.

Kegiatan

Uraian lebih lengkap mengenai kegiatan di bidang pengelolaan ketenagakerjaan terdapat dalam bahasan "Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia" (Silahkan disesuaikan dengan judul pembahasan SDM yang digunakan)

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Sebagai realisasi kebijakan PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai, Perseroan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang terbuka bagi seluruh pegawai, sesuai dengan jenjang jabatan dan program pengembangan perusahaan. Adapun gambaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk meningkatkan kompetensi pegawai di tahun 2016 sebesar Rp 741 miliar.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan

Kebijakan PLN dalam pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), dengan ringkasan kebijakan K3, adalah:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan degredasi keanekaragaman hayati; serta melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan disekitar wilayah kerja perusahaan
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan lain dengan mengontrol risiko keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan
3. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantisasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik disetiap unit kerja dan anak perusahaan

3. Applying a performance-based wage payment system that is fair, transparent, and accountable.
4. Upholding employee rights and fully supporting the establishment of Labor Unions.
5. Preparing various programs to increase training for employee competencies for the sake of escalating individual, group, and finally Company performance.
6. Ensuring the principle of equality on career advancement.
7. Ensuring the principle of gender equality on remuneration.

Activities

More complete description of activities on the subject of employment management can be found in the discussion of "Enhancing Human Resources Competence"

Financial Impact due to Activities

In fulfilling of PLN's commitment to raise the competence of employees, Company organizes various training programs that are available to all employees depending on the hierarchy and enterprise development programs. The cost overview incurred by PLN in improving employees' competence in 2016 amounted to Rp 741 billion.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Policies

PLN's Occupational Health and Safety (OHS) policies are embodied in PT PLN's Board of Directors Decision No. 134.K/DIR/2007 regarding Environment, Occupational Health and Safety Policy (LK3) and is summarized into Occupational Health and Safety policies, as follows:

1. Preventing pollution and biodiversity degradation; as well as protecting employees' Occupational Health and Safety around Company workplaces.
2. Complying with regulations and other stipulations by controlling the risk of employees' Occupational Health and Safety as well as important aspects of and impacts on the environment in every activity, as with processes and products in various working units and subsidiaries.
3. Periodically documenting, implementing, maintaining and reviewing LK3 policies in order to make them consistently relevant, appropriate, and applicable as the basic guideline for managing LK3, as especially applied to each working unit and subsidiary.

4. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja
6. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan LK3, sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat
7. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan
8. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya.
9. Berparstisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
10. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihakpihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (*lender*) dan masyarakat luas.

4. Developing this policy as a basis to determine and evaluate the objectives as well as targets of LK3 management.
5. Encouraging all working units and subsidiaries to continuously conduct revisions on LK3 management system performance.
6. Providing and facilitating the resources needed to implement and maintain LK3 policies, with every working unit, subsidiary, and partner having the ability to gradually implement this policy, while considering Company ability and local environment conditions.
7. Ensuring environment management and LK3 protection becomes the norm in every management line and among individual employees.
8. Supporting the development of communities living around the working units and subsidiaries as well as striving to make the Company become an integral part of surrounding communities.
9. Participating in government programs to reduce greenhouse gas emissions.
10. Ensuring this policy is always obtainable by stakeholders such as lenders and public communities

Untuk mendukung terciptanya kondisi Keselamatan Kerja di lingkungan PT PLN (Persero), maka PLN berkomitmen menetapkan kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan untuk dilaksanakan oleh seluruh Manajemen, Pegawai dan Mitra Kerja serta Anak Perusahaan di lingkungan PT PLN (Persero), yaitu:

1. Mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan dalam setiap aktifitas di PT PLN (Persero).
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan.
3. Melaksanakan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi ancaman keamanan dan identifikasi aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal dan ramah lingkungan.

To support Occupational Safety at PT PLN (Persero), PLN is committed to establishing Occupational Health, Safety, Security and Environmental Protection policy to be implemented by all management, employees and partners as well as subsidiaries in PT PLN (Persero), namely:

1. Prioritize safety, occupational health, safety and environmental protection in every activity at PT PLN (Persero).
2. Comply with laws and regulations and other requirements relating to safety, occupational health, securityand environmental protection.
3. Identify occupational safety and health hazards, security threats, and aspects of environmental protection in accordance with the level of risk and to make efforts in prevention, protection, control and mitigation and review them regularly and continuously.
4. Increase employee awareness and competence in order to carry out the work safely, reliably and in an environmentally friendly way.

5. Menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan *stakeholders* pada kegiatan usaha PT PLN (Persero) untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

5. Creating and maintaining good relationships with stakeholders on PT PLN business activities to build a mutually beneficial partnership.

Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001 : 2004, mengenai pengelolaan lingkungan.

PLN menerapkan target dicapainya *zero-accident* pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan bagian dari penilaian kinerja unit bisnis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan operasional berbasis K3.

Occupational Health and Safety Certification

PLN applies OHS management policies implementing the OHS Management System (SMK3) and complying with OHSAS 18001 Certification and ISO 14001:2004 on environmental management.

PLN applies the zero-accident target in the implementation of Occupational Health and Safety in every operational period. This target becomes the reference which must be complied with and utilized by all business units as an criteria of performance review. Thus, this target must be complied with while implementing all Occupational Health and Safety-based operational activities.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Mengingat operasional PLN melalui 54 unit bisnis dan 10 anak usaha berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Panitia Pembina untuk mengkoordinasikan kegiatan dan program terkait dengan K3, yang dinamakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melalui Keputusan Direksi No. 0072.K/DIR/2016, yang merupakan penyempurnaan dari Komite Keselamatan Ketenagalistrikan melalui SK Dir No. 017.K/DIR/2011 dan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui SK Direksi No. 570.K/DIR/2010.

Pembentukan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ini untuk mewujudkan kondisi yang aman, andal dan ramah lingkungan dalam menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap pelaksanaan program nihil kecelakaan/ *zero accident*, yang dikoordinasikan oleh Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (DIVK3L).

Occupational Health and Safety (P2K3) Committee

In regards to PLN's operational activities in 47 business units and 10 subsidiaries throughout Indonesia, PLN established a special committee to coordinate the activities and programs related to Occupational Health and Safety (K3), namely the Occupational Health and Safety (P2K3) Committee, through Board of Directors Decision No. 0072.K / DIR / 2016, which is a refinement of the Electricity Safety Committee through SK Dir No. 017.K / DIR / 2011 and Occupational Health and Safety Committee through the SK No. 570.K / DIR / 2010.

The forming of the Occupational Safety and Health Committee (P2K3) is to create conditions that are safe, reliable and environmentally friendly in carrying out the Occupational Health and Safety (SMK3) Management System on the implementation of the zero accident program, which is coordinated by the Health, Safety, Safety and Environment (DIVK3L) Division.

Program Strategis di Bidang K2 dan K3

PLN menyakini bahwa penerapan kegiatan operasional berbasiskan K2 dan K3 yang berkualitas maka seluruh kegiatan internal maupun eksternal akan dapat berjalan secara optimal dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karenanya, PLN telah menyusun program/ langkah strategis secara korporat guna meningkatkan implementasi K2/K3 baik secara internal maupun eksternal, yakni:

Strategic Programs in K2 (Electricity Safety) and K3 (Occupational Health and Safety)

PLN believes that the implementation of operational activities based on high quality Electricity Safety and Occupational Health and Safety ensures all internal and external activities run optimally to increase Company performance. Because of this, PLN has compiled corporate strategic programs and steps with the aim to intensify Electricity Safety and Occupational Health and Safety implementation internally and externally. These strategic programs and steps are:

1. Peningkatan *awareness* terhadap seluruh insan PLN (tingkat *top management* hingga karyawan), mitra kerja dan pekerja, dan masyarakat (terutama masyarakat sekitar instalasi).
   Dilakukan diantaranya dengan mengadakan *workshop* CSMS (*Contractor Safety Management System*), *workshop* penyusunan SOP dan COC kepada seluruh pegawai; pemasangan rambu-rambu tanda bahaya; pemasangan poster-poster terkait K2/K3; serta penerapan BBS (*Behavior Base Safety*) perilaku berbasis *safety* dengan metode *Do It*.
2. Peningkatan peran *top management* di tiap tingkatan unit (Pusat, Unit Induk, Unit Pelaksana dan AP). Dilakukan melalui: pelaksanaan *workshop safety for manager*, adanya komitmen manajemen yang berpihak pada K2/K3, serta *reward* dan *punishment* melalui sistem penilaian kinerja yang terukur terhadap pencapaian KPI unit.
3. Penyempurnaan struktur organisasi yang membidangi K2/K3 pada setiap tingkatan organisasi (Kantor Pusat, Unit Induk dan Unit Pelaksana).
4. Menetapkan alokasikan anggaran K2/ K3 dalam RKAP.
5. Peningkatan kompetensi pengawas, pelaksana dan mitra kerja PLN, melalui diklat maupun sertifikasi.
6. Peningkatan peran pusdiklat dalam peningkatan kompetensi berbasis K2 dan K3 .
7. Implementasi SMK3 (Sistem Manajemen K3) dan pemeliharaan kualitasnya.
   PLN menargetkan 20 unit kantor induk mempunyai sertifikat SMK3 di tahun 2016.
8. *Continuous improvement* bagi SDM yang bergerak di K2 dan K3.
9. Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk unit-unit Obvitnas PLN berdasarkan Kepmen ESDM No 3407.K/12/MEM/2012.
10. Penerapan sistim berbasis IT untuk mengawasi implementasi K2/K3 dan memperbaiki sistim pendataan agar semakin baik.

1. Increasing the awareness of all PLN personnel (starting from top management until employee level), partners, work force members, and communities, especially communities living around the location of electricity installations.
   This program is implemented by conducting various workshops, such as CSMS (Contractor Safety Management System), Standard Operating Procedures (SOP), and Code of Conduct (COC) for all employees; installing safety signs and posters related to Electricity Safety and Occupational Health and Safety; as well as implementing BBS (Behavior Based Safety), which is safety-based behavior using the Do It method.
2. Expanding the role of top management in each unit level (Head Office, Main Unit, Managing Unit, and Service Area/AP). This program is conducted by implementing a workshop, namely Safety for Managers. The existence of management commitment arising from Electricity Safety and Occupational Health and Safety principles as well as the existence of a reward and punishment system through a measurable performance evaluation system also supports this program.
3. Finalizing the organizational structure regarding Health, Security and Safety (Electricity Safety and Occupational Health and Safety) sectors in each unit level (Head Office, Main Unit, and Managing Unit).
4. Determining the budget allocation regarding Health, Security and Safety (Electricity Safety and Occupational Health and Safety) in the Work and Budget Plan (RKAP).
5. Increasing the competencies of PLN supervisors, managers, and partners through various training as well as certifications.
6. Enlarging the role of the training center to increase Health Security and Safety (Electricity Safety and Occupational Health and Safety) based competencies.
7. Implementing the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and maintaining its quality. PLN's target was 75% of all main units, areas, and managing units should be SMK3 certified in 2015.
8. Continuously improving human resources on Electricity Safety and Occupational Health and Safety.
9. Implementation of Security Management System Certification (SMP) PLN National Vital Assets based on Minister of Energy and Resources Decision No. 3407.K / 12 / MEM / 2012.
10. Implementing an information technology/IT-based system to control Health Security and Safety (Electricity Safety and Occupational Health and Safety) implementation and develop a better data system.

Kegiatan-Kegiatan Utama di Tahun 2016

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan, di tahun 2016 PLN melaksanakan berbagai langkah strategis terkait keselamatan ketenagalistrikan, baik di bidang sistem, organisasi, bidang pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan, yakni:

1. Melakukan Sertifikasi SMK3 sesuai PP 50 tahun 2012 untuk seluruh unit induk.
2. Melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) untuk seluruh unit Objek Vital Nasional (OBVITNAS) PLN.
3. Melakukan edukasi K2/K3 kepada seluruh unit, melalui sosialisasi, *workshop*, seminar, dan diklat.
4. Melakukan penyusunan Peraturan Direksi terkait kesehatan dan keselamatan kerja, diantaranya :
   a. PERDIR No 250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero).
   b. PERDIR No 251.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
   c. PERDIR No 252.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero).
5. Melaksanakan bulan K3 untuk menyemarakkan dan menggalakkan kegiatan K3 di seluruh unit PLN.
6. Membentuk unit K3L Percontohan untuk unit PLTU Batubara, yaitu Unit PLTU Indramayu dan Unit PLTU Lontar.
7. Menyusun standarisasi SPLN tentang Contractor Safety Management System (CSMS) dan Fire Protection System untuk PLTU Batubara.
8. Pembentukan unit pendidikan dalam bidang Keselamatan kerja, yaitu *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE) *Academy*, yang berlokasi di PLN Udiklat Semarang.

Key Activities in 2016

To ensure the quality of implementation of the Electricity Safety, in the year 2016 PLN implemented various strategic actions related to electricity safety, in systems, organization, training, provision of fire extinguishers, and determination of policies, as follows:

1. Implementing the SMK3 in accordance with Government Regulation No. 50/2012.
2. Certifying Security Management System (SMP) for all PLN National Vital Assets (OBVITNAS).
3. Educate K2/K3 to all units through socialization, workshops, seminars, and training.
4. Preparation of Board of Directors Regulations related occupational health and safety, including:
   a. PERDIR No 250.P / DIR / 2016 on Guidelines for Occupational Safety in PT PLN (Persero).
   b. PERDIR No 251.P / DIR / 2016 on Guidelines for Installation Safety at PT PLN (Persero).
   c. PERDIR No 252.P / DIR / 2016 on Guidelines for Public Safety at PT PLN (Persero).
5. Held K3 month to promote K3 activities in all PLN units.
6. Establish a Pilot K3L unit for Indramayu and Lontar coal based power plant units.
7. Prepare SPLN standardization on Contractor Safety Management System (CSMS) and the Fire Protection System for coal based power plants.
8. Establishment of educational unit called Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Academy, which is located in PLN Udiklat Semarang.

Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sekalipun prosedur kerja aman telah ditetapkan, kegiatan operasional yang banyak berlangsung di lapangan membuat insiden kecelakaan kerja pada unit-unit bisnis PLN yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia masih terjadi. Adapun gambaran insiden kecelakaan kerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tergambar sebagai berikut:

Occupational Health and Safety Performance

Even though a secure working procedure has been determined, there are many operational activities taking place in the field, so accidents on PLN business units throughout Indonesia still occur. The details of work accidents during the last three years are depicted in the following table:

Insiden	2016	2015	2014	Incident
Kecelakaan Kerja	32	23	32	Work Accidents
Kecelakaan Instalasi	6	20	13	Installation Accidents
Total Kecelakaan	38	43	45	Total Accidents
Jenis Luka				Type of Injury
Jumlah Luka Ringan	6	8	2	Minor Injury
Jumlah Luka Berat	13	12	23	Major Injury
Jumlah Meninggal	22	8	21	Fatality

Total Kecelakaan

Kondisi tingkat insiden kecelakaan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan prosedur kerja maupun program peningkatan kesadaran budaya sadar aspek K3 dalam kegiatan operasional di seluruh unit bisnis PLN.

Kesehatan

Berkaitan dengan kesehatan karyawan, PLN memiliki program pemeriksaan rutin bagi para pekerja yang bekerja pada lingkungan dan kondisi tertentu, misalnya terhadap para operator pada mesin pembangkit yang kesehariannya bekerja dengan kondisi kebisingan yang melewati ambang batas. PLN juga melakukan upaya pemantauan lingkungan di unit bisnis yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan yang bisa mencemarkan lingkungan. Dalam kaitan pemantauan kondisi lingkungan ini, PLN menetapkan SE Direksi No. 109 - Tahun 2014 yang didalamnya termasuk mewajibkan pemeriksaan berkala bagi tenaga kerja yang ada. Dalam pengukuran maturity level K3 juga telah dicantumkan kriteria terhadap pemeriksaan kesehatan pegawai.

Dampak Keuangan dari Kegiatan di bidang K3

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 35 miliar.

Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/CSR) yang memiliki makna sangat berarti bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga Perusahaan. Melalui program ini Perusahaan turut berperan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Selain itu Perusahaan mengharapkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap instalasi PLN, sehingga mereka turut berpartisipasi menjaga dan memelihara instalasi PLN.

Total Accidents

The accident rate as described above is then used as material for evaluating the improvement of work procedures as well as enhancement of the Occupational Health and Safety culture awareness program in all PLN business units and operational activities.

Health

In relation to employee health, PLN has a routine inspection program for employees working in particular environments and conditions, for example power plant operators, who work daily with noise exceeding the standard threshold. PLN also conducts efforts to monitor the environment around its business units, aimed at maintaining the environmental conditions and avoiding waste disposal that can pollute the environment. In regards to these monitoring actions, PLN issued the Director's Circular No. 109/2014, which includes the requirement of periodic inspection of workforces. For measuring the Occupational Health and Safety maturity level, the criteria for examining employee health is also included.

Financial Effects of Occupational Health and Safety Activities

The total cost incurred for Occupational Health and Safety related activities during 2016 amounted to Rp 35 billion.

Social And Community Development

This activity is implemented in the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (P3L/CSR), with very positive benefits, not only for the community, but the Company as well. Through this program, the Company contributes to and improves the standard of living of the community as well as expanding employment.

Furthermore, the Company expects the community to have a sense of ownership towards PLN installations, consequently participating in the protection and maintenance of the installations.

Bekerja Tanpa Padam
Working Without Power Outage

Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, PLN telah mengimplementasikan metode perbaikan dan pemeliharaan jaringan tenaga listrik baik pada tegangan ekstra tinggi (500 KV), tegangan tinggi (150 KV), maupun pada tegangan menengah (20 KV) melalui metode Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dimana seluruh perbaikan dan pemeliharaan jaringan dilakukan tanpa adanya pemadaman. Dengan upaya ini, maka pelanggan tetap dapat menikmati pelayanan PLN sebagaimana biasanya.

Selain sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, metode PDKB ini juga memberikan manfaat bagi pengamanan pendapatan penjualan karena kontinuitas aktivitas penjualan tenaga listrik tetap dapat berlangsung tanpa adanya interupsi pemadaman akibat perbaikan maupun pemeliharaan jaringan.

Kami menyadari bahwa aktivitas pekerjaan dalam bertegangan ini memiliki risiko yang tinggi bagi para pekerja yang melaksanakannya, untuk itu PLN menerapkan Standar Operating Procedure tertinggi pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan ini sebagai konsekuensi untuk mengeliminir risiko yang dapat terjadi pada aktivitas ini. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PDKB merupakan hal mutlak harus dipenuhi baik pada personil, peralatan dan sistem instalasi.

Dalam pelaksanaan PDKB di jaringan tenaga listrik, jika terjadi kesalahan prosedur akan mengakibatkan gangguan pada sistem tenaga listrik dan kerusakan peralatan bahkan kecelakaan pada manusia.

In an effort to deliver the best services to customers, PLN has implemented an electrical network improvement and maintenance method for extra high voltage (500 KV), high voltage (150 KV) and medium voltage (20 KV) through the High Voltage Electrical Work (PDKB) approach. In this, all network improvements and maintenance can be done without having to turn off the power with customers therefore continuing to enjoy PLN services uninterupted.

Apart from the provision of first-rate services to customers, the PDKB method also helps to ensure security of sales income as power supply remains uninterrupted from downtime due to network repairs or maintenance.

The Company is fully aware of the high level of risk associated with high voltage electrical work for employees, and as such PLN has adopted the highest Standard Operating Procedure for work done under such dangerous circumstances in order to eliminate potential risks. Occupational Health and Safety in PDKB is an absolute necessity in terms of personnel, equipment and installation system.

When the proper PDKB procedures in electrical work are not observed, power supply disruptions, damage to equipment, and injuries to humans may very likely result.

Untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan PDKB maka personil yang melaksanakan tugas wajib mematuhi Pedoman K3 agar pekerjaan dapat terlaksana dengan lancer serta selamat (*safety process*) sehingga tercapai *Zero Accident*. Pedoman K3 pada pekerjaan PDKB meliputi K3 Personil, K3 Peralatan dan K3 Instalasi. Personil harus mempunyai sertifikat, melakukan *General Check Up* dan dinyatakan lulus untuk bekerja, memakai peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu *wear pack* (pakaian kerja), *conductive suit complete, conductive shoes, helm, safety shoes, safety gloves, safety glasses, lanyard, harnes, handy talky,* rompi pengawas pekerjaan, dan rompi pengawas K3. Personil PDKB yang bekerja harus memahami tanggung jawab masing-masing tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi bahaya serta menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terhadap bahaya bahaya yang ada, melaporkan kondisi fisik apabila terjadi kelelahan, sakit mendadak dan cidera saat melakukan pekerjaan kepada Pengawas K3, mematuhi Instruksi Kerja (IK), sesuai dengan SOP, jarak aman minimum saat bekerja supaya pekerjaan terlaksana dengan aman, lancar dan selamat. Kondisi personil juga harus dipastikan sehat baik fisik maupun mental dengan mengisi blangko Kesiapan Pelaksana dan Pembagian Tugas (KPPT).

To ensure better safety and security in PDKB, all employees concerned must act in conformity with the OHS Guidelines for a smooth and safe process in conducting work in order to achieve zero accidents. OHS Guidelines for PDKB covers occupational health and safety for personnel, equipment and installation. Employees must have the proper certificates, undergo general checkups and be declared eligible to work, using self-protection gear that includes a "wearpack", conductive suit complete with conductive shoes, helmet, safety shoes, safety gloves, safety glasses, lanyards and harness, as well as handy-talky, and safety vests for on-site and OHS supervisors. Employees involved in PDKB must fully understand their respective work, identify hazards and determine the most appropriate action to take in dealing with emerging risks, report on any signs of weakening physical condition such as fatigue, sudden illness or work-site injury to the OHS Supervisor, follow Work Instructions according to SOP, and maintain a minimum safe distance to ensure that work can be done smoothly and safely. Measures must be taken to ensure that employees are physically and mentally fit by completing the form on Execution Readiness and Job Delegation (KPPT).

Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan dipimpin oleh Pengawas Pekerjaan. Peralatan PDKB perlu disimpan pada tempat yang sejuk dan kering, mempunyai sertifikat lulus uji dari pabrikan dan unit setempat yang ditunjuk, melakukan pengetesan *hot stick* yaitu peralatan berisolasi yang digunakan sebagai media dalam bekerja yang menjaga posisi bagian yang bertegangan dan tidak bertegangan serta *rope* yaitu tali tambang yang mempunyai nilai isolasi yang digunakan sebagai media transportasi. Pengecekan kondisi peralatan PDKB yang akan digunakan dalam pekerjaan secara visual dilakukan sebelum berangkat ke lapangan dan sesudah tiba di lapangan untuk memastikan apakah permukaannya terdapat kotoran tanah, lumpur dan kondisinya masih layak digunakan sesuai dengan standar. Personil PDKB juga harus membuat jadwal pekerjaan kemudian dimintakan persetujuan kepada Unit PLN terkait serta melakukan pekerjaan sesuai jadwal pekerjaan yang telah disetujui. Cuaca dan kelembaban udara diperhatikan sebelum dilaksanakannya pekerjaan PDKB. Pengawas pekerjaan dan Pengawas K3 berkoordinasi dengan Unit PLN terkait mengenai kapan pekerjaan akan dimulai/ diakhiri, beban dan apabila terjadi keadaan darurat.

Saying of a prayer before and after work is led by the Site Supervisor. PDKB equipment must be stored in a cool and dry place, certified and tested by the manufacturer and appointed by the local unit. Furthermore, a hot stick test must be conducted for the insulated poles used at work in order to maintain proper safety clearances from high voltage power lines, and for the insulating ropes as a medium of transportation. Visually examining the condition of the PDKB equipment before leaving for the site and after reaching the location to see whether the exterior is covered in dirt or mud is necessary to determine if it still meets standards and is feasible to use. Employees involved in PDKB must also prepare a work schedule to be approved by the relevant PLN unit, and perform the work according to the approved schedule. The weather and humidity level must also be taken into consideration before carrying out the PDKB work. Both the on-site and OHS supervisors are to coordinate with the PLN unit to determine when the work is to commence/end, the work load, and news of any emergency situation.

Personil PDKB Transmisi ini harus memenuhi kualifikasi rekrutmen yang relatif ketat karena jenis pekerjaannya memang berbeda dengan pekerjaan tenaga kerja PLN lainnya di antaranya yaitu tidak takut ketinggian. Mantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mendeklarasikan operasional PDKB TT/TET secara resmi pada 27 Oktober 2004 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-58. Terhitung saat itu PLN telah memiliki Tim PDKB TT/TET yang tersebar di 4 region P3B Jawa Bali. Untuk mendidik dan melatih tenaga kerja di PLN, agar menjadi tenaga-tenaga profesional pada bidang PDKB, diperlukan sarana, materi, peralatan dan instruktur yang kompeten memiliki dedikasi dan keterampilan di bidang PDKB maka PLN mendeklarasikan PLN Corporate University (CorpU) sebagai pusat pembelajaran PDKB. Udiklat Semarang merupakan salah satu dari 10 unit yang dideklarasikan sebagai Transmission and Live Maintenance Academy (TLM Academy) pada tanggal 10 Nopember 2011 lalu oleh Direktur SDM dan Umum PLN sebagai pusat pembelajaran di bidang penyaluran transmisi dan PDKB.

Berdasarkan data pembelajaran PLN CorpU, jumlah peserta pembelajaran PDKB Tegangan Menengah dan Tegangan Tinggi/Tegangan Tegangan Ekstra Tinggi sejak November 2011 hingga April 2016 sebanyak 4.400 orang, terdiri dari personil PDKB Unit Operasional yang ada di Indonesia.

PLN akan terus mendorong PDKB akan memiliki profesi yang mendukung tercapainya kinerja operasi excellence di PLN. Dengan dilakukannya PDKB, pelanggan akan tetap menikmati energi listrik selama kegiatan pemeliharaan.l

PDKB transmission personnel must have the required qualifications and undergo a relatively strict recruitment process as this type of work differs from that of other PLN personnel, such as the requirement to have no fear of heights. The former Minister of Energy and Mineral Resources, Purnomo Yusgiantoro, officially announced the operations of PDKB TT/TET on 27 October 2004 that coincided with the 58th anniversary of National Electricity Day. PLN to date has PDKB TT/TET Teams spread across 4 regions of the Java-Bali Transmission and Load Balancing Centers. To educate and train PLN employees in order to become professionals in PDKB, the necessary facilities, materials, equipment and infrastructure with a competent, dedicated and skilled workforce in PDKB are of utmost importance. Hence, PLN has launched the PLN Corporate University (CorpU) as a PDKB learning center. The Semarang Udiklat (education and training unit) is one of 10 units declared as a Transmission and Live Maintenance Academy (TLM Academy) on 10 November 2011 by the PLN Director for Human Resource and General Affairs. It functions as a learning center in transmission, distribution and PDKB.

Based on learning-related data at PLN CorpU, at least 4,400 people consisting of PDKB personnel from operational units in Indonesia have participated in the learning program on PDKB for Medium and High Voltage/Extra High Voltage from November 2011 to April 2016.

PLN shall continue to improve and develop PDKB as a profession that supports the achievement of operational excellence in PLN. Through PDKB, customers will be able to enjoy an uninterrupted supply of electricity even during maintenance.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DAN PROGRAM CSR PLN

Kebijakan

Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan PLN, khususnya program PKBL mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan dan perubahannya, yang merupakan bagian dari realisasi kegiatan TJSL yang dilaksanakan dengan tujuan :

1. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
3. Mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan
4. Mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
5. Pengembangan desa mandiri energi
6. Menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,organisasi massa dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan emosi yang saling memahami, saling membutuhkan dan saling menjaga antara PLN dengan masyarakat sekitar.

Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN.

Program Kemitraan menyalurkan dana dalam bentuk:
Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Beban Pembinaan:

Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL) AND PLN CSR PROGRAM

Policy

PLN's social and community development activities, particularly the PKBL program refers to the Minister of SOE Regulation No. PER 05/MBU/2007 on SOE Partnership Program with Small Business and Environmental Development Program, including its amendments, which are part of CSR activity realization, with the following objectives:

1. Supporting the development of the community
2. Increasing community empowerment
3. Empowering the community through education
4. Encouraging electricity availability, consequently improving the quality of life of the community
5. Development of energy independent villages
6. Maintaining environmental sustainability through conservation.

Activities are conducted with the involvement of all stakeholders, in collaboration with various parties including the government, non-governmental organizations, mass organizations, and others. Consequently creating emotional relationships with mutual understanding, interests, and concerns between PLN and the surrounding communities.

Partnership Program

The Partnership Program is a program to improve the capability of small businesses to be solid and independent through the utilization of funds deriving from part of a SOE's profit.

The Partnership Program disburses funds in the forms of:
Loans in order to finance working capital and/ or purchase of assets to increase production and sales.

Special loans to fulfill the funds required by foster partners and treated as additional short-term loans to fulfill orders from the foster partners' customers.

Coaching expenses:

To finance education, training, internship, marketing, promotion, and other matters relating to productivity improvement of foster partners as well as for review or research related with the Partnership Program;

Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

Coaching expenses in the form of grants to a maximum of 20% of the Partnership Program funds in the current year;

Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan

Coaching expenses can only be provided to or for the benefit of the foster partners.

Berdasar risalah RUPS Pengesahan RKAP No. RIS-13/D2.MBU/2015 tanggal 23 Desember 2015, disebutkan bahwa pada tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk PKBL. Pada tahun 2016 Unit PKBL PT PLN (Persero) merencanakan penyaluran untuk Program Kemitraan senilai Rp 27.500.000.000,- dengan menggunakan dana bergulir.

Based on the Minutes of the Company Work and Budget Plan Approval No. RIS-13/D2.MBU/2015 dated 23 December 2015, stating that there is no funds allocation for the 2016 PKBL. In 2016, the PKBL Unit of PT PLN (Persero) planned to disburse Rp. 27,500,000,000,- for the Partnership Program by utilizing revolving funds.

Sepanjang tahun 2016, PLN telah menyalurkan dana sebesar Rp. 371.335.593,- kepada 8 mitra yang berada di propinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan yang bergerak pada sektor industri, perikanan dan usaha jasa.

Throughout 2016, PLN has disbursed Rp. 371,335,593,- to 8 partners that are located in the province of East Java and South Sumatra engaging in the sectors of industry, fishery, and services.

Adapun rincian penyaluran Program Kemitraan seperti terlihat pada tabel berikut :

Details of the Partnership Program disbursemnts can be viewed in the following table:

No.	Sektor Usaha	Realisasi 2016 Achievement 2016	Business Sector
		Nilai Penyaluran Disbursement Amount	
1	Bencana Alam	104.014.403	Natural Disasters
2	Pendidikan	7.001.163.274	Education
3	Kesehatan	3.870.178.800	Health
4	Fasum Fasos	6.316.061.242	Public and Social Facilities
5	Tempat Ibadah	5.927.671.384	Environmental Conservation
6	Pelestarian Alam	5.571.046.000	Worship place
7	Pengentasan Kemiskinan	6.079.801.735	Poverty Alleviation
8	Admin	6.079.801.735	Admin
JUMLAH		**371.335.593**	TOTAL

LANGKAH KONGKRIT PLN BANGUN KOMPETENSI KELISTRIKAN SISWA SMK MELALUI PROGRAM CSR

PLN CONCRETE MEASURES IN UPGRADING THE SKILLS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH CSR PROGRAM

Minimnya tenaga kerja yang kompeten di bidang ketenagalistrikan serta maraknya penggunaan tenaga kerja asing di beberapa proyek ketenagalistrikan di Indonesia menjadi perhatian penting PT PLN (Persero). Untuk mengatasi hal tersebut, PLN berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sektor ketenagalistrikan di sekolah kejuruan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai *pilot project*, PLN melalui program *Corporate Social Resposibillity* (CSR) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan (Dindik) di tiga Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dalam rangka peningkatan kompetensi bidang ketenagalistrikan pada peserta didik SMK yang dilakukan pada Kamis, 30 Maret 2017.

Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka mendukung program penyediaan listrik 35.000 MW yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang handal, dan sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ketenagalistrikan.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk melaksanakan pengembangan kompetensi peserta didik SMK sebagai calon tenaga kerja bidang ketenagalistrikan. Selain itu, juga untuk menyempurnakan kurikulum dan proses pembelajaran bermutu di SMK dan melaksanakan program dan kegiatan praktik kerja lapangan dan sertifikasi bagi pendidik (guru SMK) dan peserta didik SMK.

Adapun SMK yang terpilih menjadi *Pilot Project* dalam Program ini adalah SMKN 26 Jakarta, SMKN 5 Jakarta, SMKN 2 Bogor dan SMK PGRI 3 Malang, yang secara keseluruhan melibatkan 110 Siswa dan 30 orang guru yang akan dilakukan *ugrading* kompetensi.

Dengan adanya program ini, PT PLN)Persero) berharap Siswa SMK dapat menjadi tenaga kerja yang siap terjun ke lapangan, khususnya di bidang distribusi yaitu tenaga pelayanan teknik (Yantek) dan Tenaga Inspeksi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL).

The lack of skilled workforce in the electricity sector as well as the widespread employment of foreign labor in several power plant projects in Indonesia is an important concern for PT PLN (Persero). To overcome this, PLN is committed to improving the competencies of the electrician workforce candidates through vocational schools in various regions in Indonesia.

As a pilot project, PLN through its Corporate Social Responsibility (CSR) program signed a memorandum of understanding with the Department of Education (Dindik) on Thursday, March 30, 2017 to improve competencies of electrician students in vocational high schools in three provinces, Jakarta, West Java and East Java.

The Agreement between PLN and the Department of Education (Dindik) was embarked on in order to support 35,000 MW program that requires a large and skilled workforce, and in line with Presidential Instruction No. 9 2016 dated September 9, 2016 on vocational high school revitalization. Moreover, it is a follow-on cooperation between the Director General of Electricity of the Ministry of Energy and the Directorate General of Primary and Secondary Education Kemendikbud to fulfill the need for skilled electrician manpower.

The aim of this cooperation is also to improve the aptitude of vocational high school students so as to become skilled in the electricity sector. In addition, the purpose is to provide curriculum and learning process quality enhancement in vocational high schools, on the job training, and certification for teachers and students.

The vocational high schools selected for this pilot project program are SMK 26 Jakarta, SMKN 5 Jakarta, Bogor SMKN 2 and PGRI 3 Malang vocational high school, altogether to raise the competence of 110 students and 30 teachers.

Through the program, PT PLN (Persero) hopes that one day more vocational students can join into the proficient and reliable work force, particularly in the field of power distribution technical services, namely (Yantek) and Electric Power Utilization Inspection Personnel (IPTL).s

Program Bina Lingkungan

Pada tahun 2016 Unit PKBL PT PLN (Persero) telah merealisasikan dana Bina Lingkungan tahun 2016 sebagai berikut:

Community Development Program

In 2016, the PKBL Unit of PT PLN (Persero) has realized the following Community Development funds:

Kegiatan	Nilai Dana (Rp) Dibursement Value (Rp)	Activities
Bantuan Bencana Alam	2.182.244.341	Natural Disaster Assistance
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	14.676.428.206	Education and Training Assistance
Bantuan Peningkatan Kesehatan	3.484.231.020	Health Improvement Assistance
Bantuan Sarana dan Prasarana Umum	13.038.989.848	General Facilities and Infrastructure Assistance
Bantuan sarana Ibadah	8.289.800.000	Place of Worship Facilities Assistance
Bantuan Pelestarian alam	5.072.996.670	Poverty Alleviation Assistance
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan kemiskinan	18.050.648.723	Environmental Conservation Assistance
Jumlah	**64.795.320.808**	**Total**

Adapun rincian kegiatan Bina Lingkungan sebagai berikut :

1. Bantuan bencana alam senilai Rp.2.182.244.341,- direalisasikan untuk bantuan bencana alam di Puting beliung di Kalimantan Barat, Gempa Bumi di Pidie Jaya Aceh, tanah longsor di Garut Jawa Barat, Banjir Bandang di Nusa Tenggara Barat dan lainnya
2. Bantuan Pendidikan/Pelatihan senilai Rp.14.676.428.206,- direalisasikan melalui program bantuan fasilitas/sarana penunjang pendidikan di Aceh, Sumut, Riau, Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Sulsel, dll. Batuan Program Siswa Mengenal Nusantara di Kalsel, Program PLN Mengajar di seluruh provinsi peleh Direksi dan GM diseluruh Unit PLN.
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan senilai Rp3.484.231.020,- direalisasikan untuk bantuan pemeriksaan kesehatan, pembangunan sarana air bersih, bantuan kantong darah dan program bantuan Pembangunan puskesmas
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum senilai Rp 13.038.989.848,- direalisasikan untuk perbaikan jalan, pembangunan sumur bor, bantuan air bersih, dan bantuan fasum fasos lainnya.
5. Bantuan Sarana Ibadah senilai Rp8.289.800.000,- direalisasikan untuk bantuan perbaikan sarana ibadah.
6. Bantuan Pelestarian Alam senilai Rp5.072.996.670,- direalisasikan untuk bantuan penanaman pohon, dan kegiatan pengelolaan/peduli sampah.
7. Bantuan Pengentasan Kemiskinan senilai Rp18.050.648.723,- direalisasikan untuk bantuan bedah rumah veteran di Jakarta dan Jawa Barat, program buka puasa bersama anak yatim-dhuafa, dan program bantuan sembako murah dan santunan anak yatim, program elektrifikasi (sambung listrik gratis) dan MCK untuk warga kurang beruntung.

Details on Community Development activities are as follows:

1. Natural disaster assistance in the amount of Rp.2,182,244,341,- as realized for the natural disasters: Tornado in West Kalimantan, Earthquake in Pidie Jaya Aceh, Landslide in Garut West Java, Flood in West Nusa Tenggara, and others.
2. Education/Training assistance in the amount of Rp.14,676,428,206,- as realized through educational supporting facilities assistance in Aceh, North Sumatra, Riau, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Kalimantan, South Sulawesi, and others. Students Acquainted with the Archipelago in South Kalimantan. PLN Teaches Program at all provinces by the Board of Directors and GM at all PLN Units.
3. Health Improvement Aid in the amount of Rp3,484,231,020 as realized for health examination aid, clean water facilities assistance, blood drives, and Community Health Center development assistance.
4. Development of Public Facilities and Infrastructure in the amount of Rp 13,038,989,848,- as realized through the development of wells, clean water assistance, and other public facilities.
5. Houses of Worship assistance in the amount of Rp8,289,800,000,- as realized for houses of worship facilities improvement.
6. Nature conservation Aid in the amount of Rp5,072,996,670,- as realized for planting of trees and waste management activities.
7. Poverty eradication aid in the amount of Rp18,050,648,723,- as realized with the veteran housing improvement assistance in Jakarta and West Java, breaking the fast with orphans program, and cheap food packages program, as well as orphan aid, electrification program (free electrification), and sanitation for the less fortunate.

AKSI SOSIAL DI TENGAH BENCANA BIMA
SOCIAL ACTION AMIDST THE BIMA DISASTER

Banjir bandang dua kali menerjang Kota Bima dengan ketinggian hingga 3 meter terjadi pada Rabu (21/12) dan Jumat (23/12). Banjir melumpuhkan 33 desa di 5 kecamatan yaitu Rasanae Timur, Raba, Mpunda, Asakota, Rasanae Barat. Lebih dari 1.000 rumah terendam dan 104 ribu masyarakat mengungsi di berbagai titik yang lebih aman.

Bencana ini mengakibatkan fasilitas publik dan sistem kelistrikan Bima yang sebesar 42 MW lumpuh total. Kota Bima pun diberlakukan masa tanggap darurat hingga 4 Januari 2017 oleh Pemerintah Kota Bima.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat banjir lebih dari Rp1 triliun. Kerugian paling besar adalah harta kekayaan dari penduduk Bima, yang oleh pemerintah setempat diperkirakan mencapai Rp607,93 miliar.

Melalui program "PLN Peduli", Perseroan memberikan bantuan untuk korban banjir bandang Bima senilai Rp300 juta yang disalurkan ke beberapa titik lokasi banjir pada Sabtu (24/12). Beragam peralatan dan material yang dibutuhkan didatangkan dari kota-kota terdekat. Bukan sekadar agar sistem kelistrikan kembali normal, tapi juga ikut bahu-membahu membatu masyarakat terdampak banjir. Selain peralatan kelistrikan, mi instan, alat memasak, tikar, selimut, pakaian, perahu karet dan mandi, cuci kakus (MCK) *portable* ikut dihadirkan.

Langkah tanggap PLN membuat Kementerian BUMN langsung menunjuk Perseroan sebagai koordinator bantuan dari BUMN di lokasi bencana Bima sampai dengan masa tanggap bencana dinyatakan selesai. Dengan demikian, selain upaya pemulihan, PLN juga diberikan tanggung jawab lebih untuk turut serta memulihkan kondisi Kota Bima pasca-bencana. Untuk itu, Perseroan mendirikan posko tanggap bencana Banjir Bima di PLTD Ni'u yang bertugas menerima dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

Di tempat pengungsian, PLN mendirikan dapur umum yang menyiapkan 2.000 porsi makanan siap santap per hari untuk dibagikan kepada korban banjir. Sementara itu, PLN sebagai koordinator BUMN tanggap bencana Bima berhasil mengumpulkan bantuan sekitar Rp1,21 miliar yang diberikan kepada masyarakat.

Flash floods struck Bima City twice on Wednesday (21/12) and Friday (23/12), with waters rising up to three meters in height. At least 33 villages across 5 sub-districts, namely Rasanae Timur, Raba, Mpunda, Asakota and Rasanae Barat, were paralyzed by the sudden floods. Over 1,000 houses were submerged, and 104,000 people displaced, seeking refuge in safer zones.

Bima's public facilities and its 42 MW power grid were crippled by the disaster. The local government declared a state of emergency on 4 January 2017.

According to the National Disaster Management Agency (BNPB), flood damages and losses are estimated at over Rp1 trillion. Losses suffered by the local people mostly concern their properties and possessions which the local government estimated to reach Rp607.93 billion.

Through the "PLN Peduli" program, the Company channeled relief aid worth Rp300 million to Bima's flood victims in several disaster areas, on Saturday (24/12). The necessary equipment and materials were brought in from nearby cities, not only to restore the local power system but also to help flood-affected communities. Apart from electrical equipment and components, instant noodles, cooking utensils, mats, blankets, clothes, inflatable rescue boats and portable washing stations were also provided.

PLN's flood response program caught the attention of the State-Owned Enterprise Ministry that immediately appointed the Company as relief aid coordinator among state-enterprises at Bima's disaster locations until the state of emergency is lifted. In addition to recovery efforts, PLN was also given the responsibility to help Bima recover through post-disaster rehabilitation measures. In regard to this, the Company established a relief center at the PLTD Ni'u diesel power plant to accept and distribute aid to affected communities.

At temporary shelters, PLN set up soup kitchens to serve 2,000 meals daily for flood victims. As coordinator among state-owned enterprises for the Bima flood relief aid, the Company managed to collect funds worth IDR1.21 billion to help local communities.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Di tahun 2016 Perusahaan mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility (CSR) Program

In 2016, the Company allocated Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) for Corporate Social Responsibility (CSR) activities, with the following activity realizations:

No.	Sektor Usaha	Realisasi 2016 Achievement 2016 Nilai Penyaluran Disbursement Amount	Business Sector
1	Bencana Alam	401.014.403	Natural Disaster
2	Pendidikan	7.001.163.274	Education and Training
3	Kesehatan	3.870.178.800	Health Improvement
4	Fasum Fasos	6.316.061.242	General Facilities and Infrastructure
5	Tempat Ibadah	5.927.671.384	Place of Worship Facilities
6	Pelestarian Alam	5.571.046.000	Poverty Alleviation
7	Pengentasan Kemiskinan	6.079.801.735	Environmental Conservation
8	Admin	1.842.744.197	Admin
JUMLAH		37.009.681.045	Total

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN/ PELANGGAN

Kebijakan

1. Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.
2. Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan
3. Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat.
4. Pengoptimalan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan *corporate brand* perusahaan.
5. Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk menekan SAIDI dan SAIFI.
6. Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
7. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *Customer Relationship Management* System, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat setara perusahaan sejenis kelas dunia.

Program

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan usaha, PT PLN (Persero) berkomitmen penuh untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen. Perbaikan tersebut ditujukan untuk mengubah maupun memperbaiki persepsi para pelanggan terhadap kualitas layanan PLN dalam memberikan jasa penyediaan tenaga listrik, memenuhi

RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Policy

1. Ensuring electricity supply that is free of power blackouts and transmission interruptions.
2. Ensuring the accuracy of usage meter records and billing calculations.
3. Providing services to customers and resolving customer complaints in a fast and accurate manner.
4. Optimizing the efforts in improving the corporate image and developing the corportae brand.
5. Improving the reliability of power plants, transmission, and distribution to reduce SAIDI and SAIFI.
6. Regularly monitoring the connection points.
7. Optimizing the utilization of information technology to support the Customer Relationship Management System, improve the business process of customer service as well as other corporate services in a centralized manner, equaling similar world-class companies.

Program

In conducting operational activities and developing the business, PT PLN (Persero) is fully committed to continuously improving the quality of responsibility implementation to customers. The improvement is aimed at changing or elevating the customers' perception on PLN's quality of services in providing electricity supply, fulfilling electricity needs, and solving problems faced by the customers relating

kebutuhan tenaga listrik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan listriknya maupun dalam menyelesaikan kewajibannya atas tenaga listrik yang digunakan. Sejalan dengan tuntutan efisiensi operasional dan tuntutan bagi terciptanya kegiatan operasional yang mampu meminimalisir *human error* dan lebih dapat dipertanggungjawabkan, PLN semakin intensif mengembangkan sistim layanan berbasiskan pada dukungan sistem teknologi informasi. Berbagi program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab terhadap konsumen meliputi:

1. Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
2. Pengembangan sistim penagihan dan penyambungan, yakni AP2T dan P2APST.
3. Pengembangan Pelayanan Borderless, meliputi:
4. Pembukaan akun twitter @pln_123 dan Facebook PLN123
5. Call center PLN 123, email: pln123@pln.co.id, dan website pln www.pln.co.id.
6. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT).
7. Pengembangan Aplikasi PLN Mobile
8. Pengembangan aplikasi APKT mobile
9. *Launching* PLN Mobile
10. Pengembangan program optimalisasi pengelolaan proses bisnis *back office*.

Pengembangan sistem operasional berbasis teknologi informasi tersebut selain dapat meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi operasional, juga dapat mengurangi peluang bagi terjadinya tindakan fraud akibat terjadinya kontak langsung dengan pelanggan.

Selain peningkatan kualitas layanan tersebut, PLN tetap konsisten melaksanakan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen. Upaya tersebut meliputi: (i) pengurangan frekuensi gangguan pemadaman dan lama pemadaman, (ii) kestabilan tegangan dan (iii) pengembangan kapasitas pembangkitan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik.

Mengerti dan Memenuhi Kebutuhan Pelanggan

Sebagai wujud komitmen tinggi terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, PLN menggunakan pendekatan yang berbeda pada masing-masing kelompok pelanggan, yang terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhannya.

to the fulfillment of their electricity needs, as well as settling the obligations for the electricity consumed. In line with the demand for operational efficiency and the creation of a more accountable operational activities and being capable of minimizing human error, PLN intensively develops its IT-based service system. The various programs conducted to improve the quality of responsibility towards customers are as follows:

1. Provision of account officer and official account for main customers as well as main business and commercial customers.
2. Development of billing and connection system, namely the AP2T and P2APST.
3. Development of Borderless Service, including:
4. Twitter account @pln_123 and Facebook PLN123
5. Call center PLN 123, email: pln123@pln.co.id, and PLN website: www.pln.co.id
6. Development of Integrated Complaint Application (APKT).
7. Development of PLN Mobile Application.
8. Development of APKT Mobile Application
9. Launching of PLN Mobile
10. Development of back office business management optimization program.

The development of the IT-based operational system can improve the speed of service delivery to final customers and increase the efficiency of operational activities. Also minimizing the chance of fraud because there is no direct contact with customers.

In addition to the service quality improvement, PLN consistently engages in other efforts to fulfill its responsibility to customers. The efforts include: (i) reducing the number and duration of power blackouts, (ii) voltage stability improvement, and (iii) expansion of power plant capacity to fulfill electricity supply sufficiency.

Understanding and Fulfilling Customer Needs

As a form of high comittment to the efforts of improving service quality, PLN uses different approaches for each customer group, comprising of households, businesses, and industry customers to improve the quality of service and fulfill customers' needs.

Masing-masing kelompok pelanggan PLN tersebut memiliki karakteristik kebutuhan spesifik yang berbeda. Oleh karenanya dengan menekankan program pemasaran yang semakin "*Customer Oriented*" PLN kini semakin proaktif dan berupaya memahami betul rencana pelanggan dan calon pelanggan, serta kemudian membuat rencana bisnis yang selaras dengan keinginan pelanggan.

Each PLN customer group has different characteristics with specific needs. Therefore, by prioritizing a more "Customer Oriented" marketing program, PLN is becoming more proactive and trying to really understand the needs of the customers and prospective customers, as well as formulating a business plan that is in line with the needs of the customers.

Mempertimbangkan bahwa kelompok pelanggan industri merupakan sumber pendapatan utama, disusul dengan kelompok pelanggan bisnis, PLN merancang beragam program khusus untuk mengetahui, mengerti dan berusaha memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti: layanan *online* dengan menyediakan *account officer* untuk memberi para pelanggan kemudahan mendapatkan tambahan daya, akses informasi perbaikan jaringan listrik, akses keluhan pelanggan dan kemudahan pembayaran tagihan dan sebagainya.

Bearing in mind that the industry customer group is the main source of income, followed by the business customer group, PLN designed various specific programs to understand, comprehend, and strive to fulfill their specific needs, such as: online services through an account officer to facilitate these customers in obtaining more electricity, customer complaint access, billing payments, and others.

Untuk kelompok pelanggan rumah tangga, PLN juga menyiapkan berbagai program layanan sesuai dengan kebutuhan, seperti: akses pengaduan melalui layanan call 123, SMS 8123 dan sebagianya.

For the household customer group, PLN also prepared various service programs based on the needs of the customers, such as complaint access through the call 123 service, SMS 8123, and others.

PLN juga mengintrodusir layanan yang bersifat umum, yang dapat digunakan untuk seluruh kelompok pelanggan. PLN juga berupaya keras memenuhi harapan umum dari seluruh kelompok pelanggan, yakni meningkatnya keandalan pasokan listrik, yang ditandai dengan semakin berkurangnya intensitas maupun lama gangguan/pemadaman listrik, selain stabilnya tegangan listrik yang sampai ke instalasi pelanggan.

PLN also introduced general services, which can be utilized by all customer groups. PLN also strives to meet the expectations of the public from all customer groups, which is improving the reliability of electricity supply, as indicated by a reduced intensity and duration of power blackouts, as well as increasing electricity voltage stability of the customers' installations.

Sertifikasi Mutu Layanan dan Penghargaan

Untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan, PLN mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Service Quality Certification and Award

To improve standard of services to the customers, PLN adopted the Quality Management System ISO 9001:2008.

Uraian tambahan yang dilakukan PLN untuk menunjukkan pemenuhan tanggung jawab terhadap konsumen dijelaskan pula pada bab Diskusi dan Analisa Manajemen - "Peningkatan Mutu Layanan dan Keandalan".

PLN has provided additional explanation to show the fulfillment of responsibility towards customers, as contained in the Management Discussion and Analysis chapter – "Improvement on the Quality of Improvement and Reliability."

Survei Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka mendapatkan *feed-back* bagi perbaikan kualitas layanan kepada pelanggan, sejak beberapa tahun terakhir PLN secara berkala melaksanakan survei kepuasan pelanggan bekerja sama dengan konsultan independen untuk memastikan bahwa hasil survei tersebut telah mewakili suara pelanggan. Survei dilakukan dengan menggunakan sample acak dari masing-masing unit usaha PLN, untuk mengukur kinerja layanan unit-unit dimaksud, sekaligus mengukur rata-rata kinerja layanan PLN secara nasional. Kegiatan survey kepuasan pelanggan terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2016 dan hasilnya baru diperoleh di akhir bulan Desember 2016.

Customer Satisfaction Survey

To obtain feedback on customer service quality improvement, PLN has conducted customer satisfaction surveys in the last few years, in collaboration with independent consultants, to ensure the survey result represents the customers' opinions. The survey is implemented by random samples from all PLN units to measure the service performance of those units as well as the average PLN service peroformance nationwide. The most recent customer satisfaction survey was conducted in October 2016, and the result was obtained in December 2016.

Untuk pengukuran IKP, hasil survei kepuasan pelanggan pada PLN Distribusi/Wilayah 2016 secara nasional dikategorikan "puas", dengan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) rata-rata sebesar 88,42% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana Tahun 2015 sebesar 88,11%.
Untuk IKP 2016 dilakukan survey pada 22 unit PLN Distribusi/ Wilayah se-Indonesia serta 2 Anak Perusahaan dengan pengelompokkan hasil menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Nilai 65,00 < IKP < 80,00 adalah wilayah yang perlu menjadi prioritas bagi PLN untuk memperbaiki kinerja pelayanan di wilayah yang masuk ke kategori kisaran nilai IKP tersebut.
   Terdapat 1 unit Wilayah yang masuk kategori tersebut yaitu Distribusi Lampung dengan nilai 78,99%.

2. Nilai 80,00 <IKP < 88,42 adalah wilayah yang perlu diperbaiki kinerja pelayanannya.
   Terdapat 14 unit Distribusi/Wilayah yaitu DisJatim 86,56%, DisBanten 83,53%, DisJateng 84,40%, Wilayah Kaltimra 84,44% , Wilayah Maluku 83,50% , Wilayah Papua 84,59%, Wilayan NTB 85,54%, Wilayah Sulutenggo 84,20%, Wilayah Babel 87,15%, Wilayah Riau 85,89%, Wilayah S2JB 84,49%, Wilayah Sumbar 84,35%, Wilayah Sumut 86,01% serta PLN Batam 83,33%.

3. Nilai IKP > 88,42 adalah wilayah yang perlu dipertahankan kinerja pelayanannya.
   Terdapat 9 unit Distribusi/Wilayah yang memiliki IKP "di atas" nasional, yaitu Distribusi Bali 93,25%, Dis Jakarta Raya 97,26%, DisJabar 98,48%, Wilayah Kalbar 91,16%, Wilayah Kalselteng 89,23%, Wilayah NTT 97,34%, Wilayah Sulselrabar 90,19%, Wilayah Aceh 88,78% ,serta PLN Tarakan 98,08%

Sedangkan nilai Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtP) Tahun 2016 secara nasional, yaitu sebesar 0,71% mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya 2015 yaitu 1,46%.

Hasil Survei Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan pada PT PLN (PERSERO) (Persero) 2016 yang meliputi PLN Wilayah/Distribusi dan Anak Perusahaan, Pelanggan PT PLN (PERSERO) (Persero) secara Nasional dikategorikan puas karena memiliki Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) PT PLN (PERSERO) (Persero) 2016 sebesar 88,42% dengan Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (IKtP) sebesar 0,71%.Kategori pelanggan yang memiliki nilai IKP di bawah IKP nasional, yaitu Pelanggan Pemerintah dengan IKP sebesar 85,26%.

For the IKP assessment, the 2016 customer satisfaction survey result for PLN Distribution/ Region is categorized as "satisfied", with an average Customer Satisfaction Index (IKP) of 88.42%, an increase compared to the previous year, which stood at 88.11%.
The IKP survey in 2016 was conducted on 22 PLN Distribution/ Region units throughout Indonesia, as well as 2 Subsidiaries, with several result categories, namely:

1. Score of 65.00<IKP<80.00 is the area where PLN must take priority to improve the performance in regions in that IKP results.
   There is 1 Region unit in this category, namely the Lampung Distribution, with a score of 78.99%

2. Score of 8.00<IKP<88.42 is the area that needs to improve the service performance.
   There are 14 Distribution/ Region units, namely DisJatim 86.56%, DisBanten 83.53%, DisJateng 84.40%, Kaltimra Region 84.44%, Papua Region 84.59%, NTB Region 85.54%, Sulutenggo Region 84.20%, Babel Region 87.15%, Riau Region 85.89%, S2JB Region 84.49%, Sumbar Region 84.35%, Sumut Region 86.01%, and PLN Batam 83.33%

3. IKP Score of more than 88.42 is the area that needs to maintain its service performance.
   There are 9 Distribution/ Region units that has the 'above' national IKP, namely Bali Distribution 93.25%, Dis Jakarta Raya 97.26%, DisJabar 98.48%, Kalbar Region 91.16%, Kalselteng Region 89.23%, NTT Region 97.34%, Sulselrabar Region 90.19%, Aceh Region 88.78%, as well as PLN Tarakan 98.08%.

The 2016 nationwide Customer Dissatisfaction Index (IktP) was 0.71%, an improvement compared to the result in the previous year, which stood at 1.46%.

The results of the 2016 Customer Satisfaction and Dissatisfaction Survey of PT PLN (Persero), which includes PLN Region/Distribution and Subsidiaries, states that customers of PT PLN (Persero) nationwide are in the satisfactory category, due to the 2016 IKP (Customer Satisfaction Index) result of 88.42% and IKtP (Customer Dissatisfaction Index) result of 0.71%. The customer category with an IKP below the national IKP is the government as customer, with an IKP of 85.26%.

Berdasarkan nilai IKP nasional, terdapat beberapa region dan Anak Perusahaan yang memiliki IKP di bawah nilai IKP Nasional. Prioritas perbaikan mutu pelayanan PLN region kepada pelanggan adalah Region Maluku Papua 84,02%, Region Sumatera (IKP 84,57%),dan Region Jawa Bagian Timur dan Bali 87,56% serta PLN Batam 83,33%.

Selain indeks kepuasan pelanggan dan ketidakpuasan pelanggan, dalam pelaksanaan SKP 2016 juga dilakukan penilaian terhadap indeks yang lain, diantaranya:

1. Indeks kepuasan relatif terhadap pesaing
   Pengukuran indeks relatif ini dilakukan dengan membandingan indeks kepuasan pelanggan PT PLN (Persero) dengan indeks kepuasan pelanggan kompetitor pada wilayah dan golongan tarif yang sama. Untuk Survei Kepuasan Pelanggan relatif terhadap pesaing, PLN masih unggul dengan rasio 1,65 PLN untuk Industri 97,51% dibandingkan nilai kompetitor dengan dilakukan survei pada pelanggan PT Karingau Power PT Panbil Utilitas Sentosa, PT Tunas Energi, PT Batamindo Investment Cakrawala, PT Krakatau Daya Listrik, PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo mencapai nilai 59,05%.

2. Indeks Loyalitas Pelanggan
   Nilai yang menunjukkan kesetiaan pelanggan dalam menggunakan produk/jasa PT PLN (Persero) dengan melakukan pembelian secara berulang dan merekomendasikan kepada orang lain dengan nilai sebesar 86,80%.

3. Indeks keterikatan pelanggan
   Nilai yang menggambarkan hubungan antara pelanggan dengan PT PLN (Persero) dengan kepercayaan dan kebanggaan serta selalu membicarakan perihal positif PT PLN (Persero) dengan nilai sebesar 80,37%

4. Indeks kepedulian pelanggan
   Nilai yang menggambarkan hubungan antara pelanggan dengan PT PLN (Persero) dalam bentuk perhatian yang lebih terhadap program PLN maupun perihal yang terkait dengan peningkatan perbaikan layanan PT PLN (Persero) dengan nilai sebesar 84,57%.

5. Indeks kepedulian pelanggan
   Nilai yang menggambarkan keefektifan dan pemahaman pengetahuan pelanggan terkait *contact center* PLN 123, dengan layanan call, Facebook, Twitter, Email serta layanan Website pln.co.id dengan nilai sebesar 71,27%.

Based on the national IKP, there are several regions and Subsidiaries with an IKP below the national IKP. Regions where customer service quality needs to be improved are the Maluku Papua Region 84.02%, Sumatra Region (IKP 84.57%), and Eastern Java and Bali Region 87.56%, as well as PLN Batam 83.33%.

In addition to the customer satisfaction and dissatisfaction index, the 2016 SKP implementation is also conducted on other indices, among others:

1. Index of satisfaction relative to competitor
   The assessment on the relative index is conducted by comparing the customer satisfaction index of PT PLN (Persero) with the customer satisfaction index of competitors in the same region and fare class. For the index of satisfaction relative to competitors, PLN is still superior with a ratio of 1.65 for PLN for Industry at 97.51%, compared to the score of competitors by conducting a survey on the customers of PT. Karingau Power, PT Panbil Utilitas Sentosa, PT Tunas Energi, PT Batamindo Investment Cakrawala, PT Krakatau Daya Listrik, PT Bekasi Power, PT Cikarang Listrindo, which stood at 59.05%.

2. Customer Loyalty Program
   The score that indicates customer loyalty in using the products/ services of PT PLN (Persero) by repeated purchases and recommendation to others with a score of 86.80%.

3. Customer Engagement Index
   The score that illutrates the relation between the customers and PT PLN (Persero) by confidence and pride as well as positive conversation on PT PLN (Persero) with a score of 80.37%.

4. Customer Care Index
   The score that illustrates the relation between the customers and PT PLN (Persero) in the form of extra attention on PLN programs as well as subjects related to the service improvement of PT PLN (Persero) with a score of 84.57%.

5. Customer Satisfaction Index
   The score that illustrates the knowledge effectiveness and understanding of customers related to contact center PLN 123, with call service, Facebook, Twitter, Email, as well as the Website pln.co.id with a score of 71.27%.

Pelanggan PT PLN (Persero) secara nasional memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan pengaduan, terutama pada kecepatan petugas lapangan dalam menyelesaikan gangguan. Selain itu, pelanggan secara nasional juga mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap mutu produk listrik PT PLN (Persero), khususnya pada kecepatan listrik menyala kembali setelah padam. Selain kedua dimensi tersebut, dimensi kemudahan informasi layanan, pra bayar dan pasca bayar juga sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan PT PLN (Persero).

Untuk meningkatkan performansi perusahaan, PT. PLN dapat mengoptimalkan perbaikan pada layanan prabayar (kemudahan migrasi, kemudahan memperoleh token/*stroom* isi ulang dan kemudahan pada saat isi ulang), layanan pasca bayar dan kemudahan informasi layanan (*website* PLN mudah diakses dan dipahami). Peningkatan performansi perusahaan diarahkan untuk menjadi perusahaan *world class services* sehingga kepercayaan masyarakat terhadap PLN meningkat.

Peningkatan indeks kepuasan pelanggan PT PLN berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks loyalitas pelanggan. Lebih lanjut, Peningkatan indeks loyalitas pelanggan juga berpengaruh signifikan terhadap indeks keterikatan pelanggan.

Rekomendasi

Dari hasil survei tersebut, beberapa hal rekomendasi yang diberikan untuk PLN diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas layanan respon pengaduan, terutama kecepatan petugas dalam menyelesaikan gangguan, perlu dibangun sistem aksi cepat tanggap PLN, yang dibangun mulai dari:
   a. Identifikasi area yang memiliki kepuasan pelanggan rendah dalam penyelesaian gangguan
   b. Memetakan kendala yang menghambat kecepatan dalam menyelesaikan gangguan, dari sisi SDM (jumlah dan kapabilitas), infrastruktur (kendaraan, peralatan dan lainnya), pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan gangguan. Pemetaan bisa diperoleh dari petugas maupun pelanggan.
   c. Menyusun program untuk meminimalisasi kendala yang telah dipetakan, misalnya pelatihan dalam peningkatan kapabilitas, pengetahuan dan skill petugas, penambahan SDM yang *capable*.
   d. Membangun jaringan komunikasi antara petugas dengan leader yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memantau pergerakan petugas di lapangan hingga penyelesaian gangguan dinyatakan *close*.

Customers of PT PLN (Persero) nationwide have a high expectation on complaint services, particularly on the speed of field workers in resolving interruptions. In addition, customers nationwide also have a high expectation on the quality of electrical products of PT PLN (Persero), particularly on the speed of power ups after blackouts. In addition to these two, ease of services information, prepaid and postpaid, also influence the customer satisfaction of PT PLN (Persero).

To improve the Company's performance, PT PLN can optimize improvement in prepaid services (ease of migration, ease of obtaining top up tokens, and ease of topping up), postpaid services, and services information convenience (easy to access and understood PLN website). Company performance improvement is aimed at becoming a world class services company, improving the confidence of the public in PLN.

The increase in the PT. PLN customer satisfaction index has a significant impact to the customer loyalty program. Furthermore, the increase in the customer loyalty index also has a significant impact on the customer engagement index.

Recommendation

From the survey results, the following recommendations were provided to PLN, among others:

1. To improve the quality of complaint response services, particularly on the speed of field workers to resolve interruptions, a fast action response team system should be developed, starting from:
   a. Identification of areas with low customer satisfaction in resolving interruptions.
   b. Mapping the issues that hinder the speed in resolving interruptions, in terms of HR (number and capability), infrastructure (vehicles, equipment, and others), knowledge, and skills. Mapping can be obtained from the workers as well as the customers.
   c. Developing a program to minimize mapped issues, such as training to improve capability, knowledge, and skill of workers, addition of capable HR.
   d. Developing a communication network between workers and the appointed leader as the party accountable in monitoring the movement of the workers in the field up to the completion of interruption as stated closed.

e. Membangun wadah berbagi pengetahuan antar tim petugas aksi cepat tanggap PLN sebagai sarana tukar pikiran dan pengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi dan kendala di lapangan saat penyelesaian gangguan.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai *contact center* PLN pada beberapa *event* yang dapat menjangkau *public* secara luas atau melibatkan komunitas dalam jumlah yang banyak, misalnya sosialisasi *contact center* PLN melalui beberapa acara *talkshow* di TV yang memiliki rating tinggi. Kerja sama dapat dalam bentuk pemasangan slogan/logo *contact center* PL N di perlengkapan tas dari agen.

3. Perlu perbaikan teknis pemasangan meteran prabayar dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen agar lebih mudah, aman dan nyaman pada saat pengisian pulsa listrik.

Perlu sosialisasi secara meluas mengenai kelebihan/ keunggulan penggunaan prabayar dibandingkan pascabayar. Sosialisasi dapat berbentuk iklan layanan masyarakat melalui radio, TV maupun media sosial.

e. Developing a knowledge sharing forum between the PLN fast action response teams as a means of exchanging ideas and experience in addressing the various field conditions and constraints during resolving the interruptions.

2. Increasing dissemination is needed on PLN contact center in various events that can reach out to the public or involving a large number of communities, such as PLN contact center dissemination through TV talkshows with high ratings. The cooperation can be in the form of placing PLN contact center slogan/ logo in the agent's equipment bag.

3. Technical improvement in the installation of prepaid meter is required, by taking into account the heterogenous conditions of the Indonesian people for easier, safer, and more reliable electricity topping up.

Extensive dissemination on the advantage/ benefit of prepaid utilization compared to postpaid is required. The dissemination can be in the form of public service announcement on radio, TV, as well as social media.

Upaya peningkatan kepuasan pelanggan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)

Efforts to improve customer satisfaction at PT PLN (Persero) Jakarta Raya Distribution (Disjaya)

Program Peningkatan Pelayanan (*Customer Value*) oleh PLN Disjaya dilakukan secara terus menerus dan selalu membuat perbaikan yang berkelanjutan, karena tingkat kepuasan pelanggan bersifat dinamis.

Beberapa langkah *continous improvement* yang dilakukan adalah:

1. Perluasan dan Optimalisasi Pelayanan *Contact Centre*
   Aktivitas ini adalah implementasi layanan *contact centre* yang dikembangkan oleh PLN dengan menerapkannya pada seluruh unit layanan di seluruh unit kerja PLN Disjaya. Tercatat 16 area layanan di wilayah PLN Disjaya telah seluruhnya ter*cover* oleh layanan ini. Pelayanan *Contact centre* ini meliputi: pelayanan pasang baru/ perubahan daya/ pasang sementara, keluhan pencatatan meter, gangguan tenaga listrik, serta layanan lainnya.
2. Peningkatan Mutu Baca Meter
   Aktivitas ini adalah upaya perbaikan untuk meningkatkan proses serta kualitas pembacaan meter pelanggan untuk menekan keluhan dari pelanggan terkait baca meter. Aktivitas ini berupa: peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional, pendampingan uji petik hasil pembacaan meter, dan pemutakhiran rute baca meter berbasis aplikasi GIS.
3. *Call Back Centre* PLN Disjaya
   Aktivitas ini merupakan saluran untuk menyapa pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai Integritas Layanan Publik dan Kepuasan Pelanggan untuk layanan Pasang Baru (PB), Perubahan Daya (PD) dan Migrasi PascaBayar ke PraBayar dan pelayanan tehnik.

The Customer Value Improvement program by PLN Disjaya is carried out continuously and always making sustainable improvement, due to the dynamics of customer satisfaction.

Several continuous improvement measures conducted are:

1. Expansion and Optimization of Contact Center Services
   This activity is the implementation of contact center services developed by PLN by applying it to the entire service unit in all PLN Disjaya work units. 16 service areas registered in the PLN Disjaya region has been entirely covered by this service. The contact center services include: new instalation / change of power/ temporary installation, complaints on meter recordings, electric power disruptions, as well as other services.

2. Improvement in Meter Reading Quality
   This activity is the effort to improve the process and quality of customers' meter readings to suppress complaints from customers related to meter reading. These activities include: increasing cooperations with professional third-parties, counseling on pick-test meter readings, and updating the routes of meter reading based on the GIS application.
3. PLN Disjaya Call Back Centre
   This activity is the means to greet customers to obtain information on the Public Service Integrity and Customer Satisfaction for New Installation Service (PB), Power Change (PD) and Migration from PostPaid to PrePaid, and technical services.

4. Program Monitoring Pemberitaan di Mass Media
   Aktivitas ini merupakan saluran untuk mengetahui citra PLN melalui pemberitaan di media massa yang dikategorikan menjadi pemberitaaan negatif, positif ataupun netral. Dengan mengetahui pemberitaan di media massa terkait dengan citra perusahaan merupakan input untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
5. Respon Pengaduan
   Aktivitas ini merupakan saluran untuk memonitor tindak lanjut keluhan pelanggan yang bersumber dari pengaduan pelanggan yang bersumber dari seluruh saluran yang disiapkan oleh PLN dengan memperhatikan dan fokus pada respon penanganan gangguan yang dilakukan oleh petugas PLN. Dengan aktifitas ini, dapat diperoleh data kecepatan pelayanan keluhan dan gangguan yang dialami pelanggan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan layanan.
6. Pelayanan Penyambungan PB/PD/PS
   Aktivitas ini merupakan media untuk memonitor kecepatan pelayanan permintaan penyambungan baru/perubahan daya/penyambungan sementara yang diminta oleh pelanggan. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan tingkat layanan serta transparansi pelayanan.
7. Mutu Listrik
   Aktivitas ini merupakan media untuk memonitor dan mengendalikan mutu produk listrik yang dinikmati oleh pelanggan agar sesuai dengan tingkat layanan yang telah diperjanjikan. Melalui aktivitas ini, dapat dilakukan proses perencanaan tindakan atas mutu dan keandalan produk listrik.

4. News Coverage in Mass Media Monitoring Program
   This activity is the means to observe the image of PLN through reports in the mass media, which is categorized into negative, positive, or neutral news coverage. Being aware of the news coverage in mass media related to the company's image is a form of input for evaluation and required remedial measures.

5. Response to Complaints
   This activity is the means to monitor the follow-up of customer complaints originating from customer complaints that are sourced from all channels set up by PLN by paying attention and focusing on the response to the handling of interruptions carried out by PLN officers. With this activity, data on the speed of complaints service and interruptions experienced by customers as a basis for improvement of services can be obtained.

6. PB/ PD/ PS Installation Services
   This activity is the media to monitor the speed of he new service connection/ change of power/ connection of temporary requests by customers. This activity aims to ensure that the process is carried out in accordance with the level of service and transparency of services.

7. Quality of Electricity
   This activity is the media to monitor and control the quality of electrical products that are enjoyed by the customers to match the level of service that has been agreed upon. Through this activity, the action planning process can be done on the quality and reliability of the electricity products.

08

Laporan keuangan konsolidasian

Consolidated Financial Statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK*/AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015

PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550
Kotak Pos : 4322/KBB Faximile : (021) 7221330 Alamat Kawat : PLNPST

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1.	Nama/*Name*	:	SOFYAN BASIR
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	Jl. Taman Bendungan Jaliluhur No. 3 Bendungan Hilir Jakarta Selatan
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7220300
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*
2.	Nama/*Name*	:	SARWONO SUDARTO
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	Komplek BRI Blok A No.45 Jl. Pramukasari IV RT 009 RW 005 Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7392038
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR / *DIRECTOR*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;
2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles;
3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;
   b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the internal control system of the Companies and its Subsidiaries.

This Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 30 Maret 2017 / March 30, 2017

METERAI TEMPEL 6000

SOFYAN BASIR
Direktur Utama / President Director

SARWONO SUDARTO
Direktur / Director

U/ 98

MODEL 1001

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : **R/234.AGA/sat.1/2017**

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholder, Board of Commissioners and Directors

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar

Auditors' responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

License: KMK No.417/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Dampak perubahan kebijakan akuntansi ini diungkapkan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 2.a to the accompanying consolidated financial statements which explains that the Company changed its accounting policy for transactions based on power purchase agreements by early applying the Financial Services Authority Regulation No.6 POJK.04/2017 prospectively for the annual period beginning on January 1, 2016. The effect of such change in accounting policy is disclosed in Note 56 to the accompanying consolidated financial statements. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 14 Maret 2017.

Other matter

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on March 14, 2017.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Saptoto Agustomo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499/
Public Accountant License Number: AP.0499

Jakarta, 30 Maret / *March 30,* 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	1.145.529.527	1.187.879.590	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	7	1.325.297	1.000.974	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi	8	1.980.118	1.645.413	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	8	1.849.864	1.529.285	*Investments in joint ventures*
Aset pajak tangguhan	47	9.882.003	29.088.271	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	9	263.064	268.647	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	7.464.260	8.796.977	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	16	350.465	312.084	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	11	4.964.300	4.504.847	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1.173.608.898**	**1.235.026.088**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	12	41.909.223	23.596.339	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	13	374.771	120.059	*Short-term investments*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	14	565.458	569.088	*Related parties*
Pihak ketiga	14	21.145.503	19.265.139	*Third parties*
Piutang subsidi listrik	15	14.844.365	17.501.009	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	16	2.411.384	481.681	*Other receivables*
Persediaan	17	11.569.596	11.415.863	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	18	7.206.530	5.265.445	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	19	898.039	1.058.501	*Prepaid expenses and advances*
Piutang pihak berelasi	9	36.548	71.669	*Receivables from related parties*
Aset lancar lain	55	5.915	--	*Other current assets*
Jumlah Aset Lancar		**100.967.332**	**79.344.793**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**1.274.576.230**	**1.314.370.881**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				*Equity attributable to owners of the Parent*
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				*Capital stock - par value of Rp1 per share*
Modal dasar - masing-masing 204.000.000 saham dan 63.000.000 saham per 31 Desember 2016 dan 2015				*Authorized - 204,000,000 shares and 63,000,000 shares as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh- masing-masing 55.666.007 saham dan 46.197.380 saham per 31 Desember 2016 dan 2015	20	55.666.007	46.197.380	*Subscribed and paid-up 55,666,007 shares and 46,197,380 shares as of December 31, 2016 and 2015, respectively*
Tambahan modal disetor	21	21.797.016	49.707.027	*Additional paid-in capital*
Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	54.160.519	9.468.627	*Stock subscription from Government in issuance process*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	20	40.304.040	26.872.493	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya	20	79.593.197	41.222.131	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		629.159.943	631.241.725	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		880.680.722	804.709.383	*Equity attributable to owners of the Parent*
Kepentingan nonpengendali		116.990	81.234	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**880.797.712**	**804.790.617**	***Total Equity***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	47	59.725	5.475	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current portion*
Penerusan pinjaman	23	29.133.756	29.205.236	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	24	7.257.810	8.194.693	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	25	17.933.075	149.621.763	*Lease liabilities*
Utang bank	26	100.362.498	77.828.870	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	68.824.683	80.043.338	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	28	7.315.422	7.093.280	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	29	2.301	2.566	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan kerja	49	41.110.112	37.378.472	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain	31	155.781	67.678	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**272.155.163**	**389.441.371**	***Total Non-current Liabilities***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	30	7.772.693	8.910.438	*Related parties*
Pihak ketiga	30	22.419.391	17.715.563	*Third parties*
Utang pajak	32	1.950.946	15.131.857	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	33	10.644.559	10.627.055	*Accrued expenses*
Uang jaminan langganan	34	12.049.554	11.324.898	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	35	384.739	1.113.825	*Project cost payable*
Pendapatan ditangguhkan	22	1.147.227	1.533.703	*Deferred revenue*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	23	2.562.332	2.505.347	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	24	1.043.793	293.793	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	25	3.789.317	6.759.138	*Lease liabilities*
Utang bank	26	26.394.780	11.752.458	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	27	9.568.000	9.122.350	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	28	328.683	311.196	*Electricity purchase payable*
Liabilitas imbalan kerja	49	3.494.487	2.848.664	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain	31	18.072.854	20.188.608	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**121.623.355**	**120.138.893**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**393.778.518**	**509.580.264**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**1.274.576.230**	**1.314.370.881**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUES***
Penjualan tenaga listrik	36	214.139.834	209.844.541	*Sale of electricity*
Penyambungan pelanggan	22	7.052.136	6.141.335	*Customer connection fees*
Lain-lain	38	1.629.986	1.361.114	*Others*
Jumlah Pendapatan Usaha		222.821.956	217.346.990	*Total Revenues*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	39	109.492.383	138.408.315	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	40	59.729.390	4.420.859	*Purchased electricity*
Sewa	41	6.545.114	8.065.522	*Lease*
Pemeliharaan	42	21.226.736	21.861.310	*Maintenance*
Kepegawaian	43	22.659.965	20.321.137	*Personnel*
Penyusutan	6	27.512.150	25.406.856	*Depreciation*
Lain-lain	44	7.284.064	7.090.077	*Others*
Jumlah Beban Usaha		254.449.802	225.574.076	*Total Operating Expenses*
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI		**(31.627.846)**	**(8.227.086)**	***OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY***
Subsidi listrik Pemerintah	37	60.441.520	56.552.532	*Government's electricity subsidy*
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI		**28.813.674**	**48.325.446**	***OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY***
Penghasilan lain-lain - bersih	46	1.092.366	2.437.066	*Other income - net*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		4.195.210	(27.326.131)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Penghasilan keuangan		578.507	627.412	*Financial income*
Beban keuangan	45	(18.703.276)	(39.977.228)	*Financial cost*
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**15.976.481**	**(15.913.435)**	***INCOME (LOSS) BEFORE TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**47**	**(5.427.843)**	**21.939.942**	***TAX BENEFIT (EXPENSES)***
LABA TAHUN BERJALAN		**10.548.638**	**6.026.507**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016 Rp	2015 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		**10.548.638**	**6.026.507**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items that might be reclassified subsequently to profit or loss*
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama		(9.313)	36.978	*Share of Other Comprehensive Income (expense) from associates and joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Surplus revaluasi aset tetap		2.287	653.441.218	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(2.766.341)	6.120.609	*Remeasurement on defined benefit plans*
Manfaat (beban) pajak terkait		691.585	(16.865.984)	*Related income tax benefits (expenses)*
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**(2.081.782)**	**642.732.821**	***Other comprehensive (expenses) income for the year after tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**8.466.856**	**648.759.328**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		10.511.911	6.010.568	*Owners of the parent*
Kepentingan nonpengendali		36.727	15.939	*Non-controlling interest*
Jumlah		**10.548.638**	**6.026.507**	***Total***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		8.430.129	648.743.389	*Owners of the parent*
Kepentingan nonpengendali		36.727	15.939	*Non-controlling interest*
Jumlah		**8.466.856**	**648.759.328**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	48	194.349	130.106	*BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock* Rp	Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham/ *Stock subscription from Government in issuance process* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehesif lain/ *Other comprehensive income*			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the Parent* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
					Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and Equipment revaluation surplus* Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans* Rp	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from associates and joint ventures* Rp				
Saldo per 1 Januari 2015		**46.197.380**	**--**	**52.496.893**	**19.108.528**	**46.937.969**	**--**	**(11.491.096)**	**--**	**153.249.674**	**54.141**	**153.303.815**	***Balance as of January 1, 2015***
Reklasifikasi dari tambahan modal di setor		--	4.468.627	(4.468.627)	--	--	--	--	--	--	--	--	*Reclassification from additional paid in capital*
Penambahan modal tahun berjalan	21	--	5.000.000	1.678.761	--	--	--	--	--	6.678.761	12.154	6.690.915	*Capital addition during the year*
Cadangan umum tahun berjalan	20	--	--	--	7.763.965	(7.763.965)	--	--	--	--	--	--	*Appropriation during the year*
Dividen	20	--	--	--	--	(3.962.441)	--	--	--	(3.962.441)	(1.000)	(3.963.441)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	--	6.010.568	638.105.386	4.590.457	36.978	648.743.389	15.939	648.759.328	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2015		**46.197.380**	**9.468.627**	**49.707.027**	**26.872.493**	**41.222.131**	**638.105.386**	**(6.900.639)**	**36.978**	**804.709.383**	**81.234**	**804.790.617**	***Balance as of December 31, 2015***
Penyesuaian berkaitan dengan penerapan POJK No.6 - bersih	2.a	--	--	--	--	43.428.454	--	--	--	43.428.454	--	43.428.454	*Adjustment related to the implementation of POJK No.6 - net*
Saldo per 1 Januari 2016, disesuaikan		**46.197.380**	**9.468.627**	**49.707.027**	**26.872.493**	**84.650.585**	**638.105.386**	**(6.900.639)**	**36.978**	**848.137.837**	**81.234**	**848.219.071**	***Adjusted Balance as of January 1, 2016***
Reklasifikasi dari tambahan modal di setor	21	9.468.627	21.131.892	(30.600.519)	--	--	--	--	--	--	--	--	*Reclassification from additional paid in capital*
Penambahan modal tahun berjalan	21	--	23.560.000	2.596.131	--	--	--	--	--	26.156.131	--	26.156.131	*Capital addition during the year*
Cadangan umum tahun berjalan	20	--	--	--	13.431.547	(13.431.547)	--	--	--	--	--	--	*Appropriation during the year*
Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak	21	--	--	94.377	--	--	--	--	--	94.377	127	94.504	*Differences between asset and liabilities of tax amnesty*
Dividen	20	--	--	--	--	(2.137.752)	--	--	--	(2.137.752)	(1.098)	(2.138.850)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	--	10.511.911	2.287	(2.074.756)	(9.313)	8.430.129	36.727	8.466.856	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2016		**55.666.007**	**54.160.519**	**21.797.016**	**40.304.040**	**79.593.197**	**638.107.673**	**(8.975.395)**	**27.665**	**880.680.722**	**116.990**	**880.797.712**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016 Rp	2015 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	220.970.461	219.257.343	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(200.943.180)	(178.049.789)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(20.370.584)	(17.325.869)	*Cash paid to employees*
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(343.303)	23.881.685	*Cash provided by (used in) operations*
Penerimaan subsidi listrik	49.568.244	55.332.384	*Government subsidy received*
Penerimaan bunga	578.507	627.412	*Interest received*
Pembayaran bunga	(18.285.840)	(37.708.595)	*Interest expense paid*
Pembayaran biaya transaksi pinjaman	--	(166.719)	*Transaction cost paid*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	--	2.258.070	*Income tax restitution received*
Pembayaran pajak revaluasi aset tetap	--	(3.145.210)	*Tax paid on revaluation of property, plant and equipment*
Pembayaran pajak penghasilan	(1.927.652)	(3.789.944)	*Income tax paid*
Pembayaran pengampunan pajak	(1.896)	--	*Payment of tax amnesty*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**29.588.060**	**37.289.083**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	27.705	9.285	*Proceeds from sale of assets not used in operations*
Perolehan aset tetap	(55.800.543)	(36.365.403)	*Acquisition of property, plant and equipment*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi	207.875	161.006	*Proceeds from dividend of associates*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(381.767)	(16.739)	*Acquisition of investments in associates and joint ventures*
Penerimaan kembali dari pinjaman kepada pihak berelasi	33.111	85.601	*Receipt of payments from loans to related parties*
Pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi	(265)	(18.700)	*Repayments of loans from related parties*
Penarikan (penempatan) rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	1.368.632	(2.132.994)	*Withdrawal (placement) of restricted cash in banks and time deposits*
Penempatan investasi jangka pendek	(254.712)	(19.363)	*Placement of short-term investments*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(54.799.964)**	**(38.297.307)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham	23.560.000	5.000.000	*Proceeds from Government for stock subscription in issuance process*
Pembayaran dividen	(2.137.752)	(3.962.441)	*Payment of dividends*
Pembayaran dividen kepada pihak non pengendali	(1.098)	(1.000)	*Payment of dividends to non controlling interest*
Pembayaran penerusan pinjaman	(2.594.441)	(2.819.345)	*Payment of two-step loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	(293.793)	(293.793)	*Payment of Government and non-bank Government financial institution loans*
Perolehan utang bank	70.841.659	43.525.661	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	(32.629.553)	(38.032.571)	*Payment of bank loans*
Pembayaran utang obligasi	(9.122.350)	(805.000)	*Payment of bonds payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.705.740)	(5.190.273)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran utang listrik swasta	(321.879)	(290.798)	*Payments of electricity purchase payable*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**43.595.053**	**(2.869.560)**	***Net cash provided by (used in) financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**18.383.149**	**(3.877.784)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(70.265)	362.595	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**23.596.339**	**27.111.528**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**41.909.223**	**23.596.339**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 50.			*Additional information on activities that does not affect the activity of cash flows are presented in Note 50.*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No.6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta No. 12 tanggal 22 Februari 2016 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan pasal 4 ayat 2 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0029081 tanggal 7 Maret 2016.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 52 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. General

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or the "Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No.6731.

The articles of association of the Company were recently amended by notarial deed No. 12 dated February 22, 2016 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, in accordance with article 4 section (2) regarding the increase in the subscribed and paid-up capital. This change was received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.03-0029081 dated March 7, 2016.

The Company is domiciled in Jakarta, with 52 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's head office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which must be satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development with the application of the principles of Limited Liability Companies.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidized electricity to the public (Note 37).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 51.158 karyawan (tidak diaudit) dan 47.610 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

As of December 31, 2016 and 2015 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 51,158 (unaudited) and 47,610 (unaudited), respectively. The total employees do not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

b. The Company's Public Offering of Bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In *)*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount* Rp	
Obligasi Rupiah					*Rupiah Bonds*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1.244.000	*Sustainable Bonds I PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429.000	*Sustainable Sukuk ijara I PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879.000	*Sustainable Bonds I PLN I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121.000	*Sustainable Sukuk ijara I PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2.500.000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500.000	*Sukuk ijara PLN V Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2.703.000	*PLN XI Bonds Year 2010*

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In *)*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount* Rp	
Obligasi Rupiah (Lanjutan)					*Rupiah Bonds (Continued)*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297.000	*Sukuk ijara PLN IV Year 2010*
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1.440.000	*PLN X Bonds Year 2009*
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760.000	*Sukuk ijara PLN III Year 2009*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2.700.000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300.000	*Sukuk ijara PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	June 12, 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	2.200.100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	June 12, 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	22 Juni 2006/ *June 22, 2006*	200.000	*Sukuk ijara PLN I Year 2006*
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 November 2004/ *November 12, 2004*	1.500.000	*PLN VII Bonds Year 2004*
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600.000	*PLN VI Bonds Year 1997*
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya Stock Exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1.000.000	*PLN V Bonds Year 1996*
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680.000	*PLN IV Bonds Year 1995*
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318.430	*PLN III Bonds Year 1995*
Obligasi PLN IITahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	8 November 1993/ *November 8, 1993*	600.000	*PLN II Bonds Year 1993*
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel Exchange*	10 November 1992/ *November 10, 1992*	300.000	*PLN I Bonds Year 1992*
Jumlah				**21.271.530**	***Total***

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya.
Pada tanggal 20 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur kedalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

**) On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquaired by Surabaya Stock Exchange.*
On October 30, 2007 Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange, which then changed its name to Indonesia Stock Exchange.

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount* US$ *)	
Surat Utang Jangka Menengah Global					*Global Medium Term Notes*
Penerbitan tahun 2012	16 Oktober 2012/ *October 16, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1.000.000.000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	15 November 2011/ *November 15, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 November 2011/ *November 23, 2011*	1.000.000.000	*Issued in 2011*
Jumlah				**2.000.000.000**	***Total***

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed Date*	Jumlah yang Ditawarkan/ *Offered Amount* US$ *)	
Obligasi Terjamin					*Guaranteed Notes*
Penerbitan 2009	30 Oktober 2009/ October 30, 2009	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 November 2009/ November 9, 2009	750.000.000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2009	3 Agustus 2009/ August 3, 2009	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	10 Agustus 2009/ August 10, 2009	1.250.000.000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2007	21 Juni 2007/ June 21, 2007	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ June 29, 2007	1.000.000.000	*Issued in 2007*
Penerbitan 2006	11 Oktober 2006/ October 11, 2006	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ October 17, 2006	1.000.000.000	*Issued in 2006*
Jumlah				**4.000.000.000**	***Total***

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information
As of December 31, 2016 and December 31, 2015, the Company's management consists of the following:

	2016	2015	
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	--	Kuntoro Mangkusubroto	*President Commissioner*
Pelaksana Tugas Komisaris Utama	Hasan Bisri	--	*Task Executor President Commissioner*
Komisaris	Harry Susetyo Nugroho	Andin Hadiyanto	*Commissioners*
	Jarman	Harry Susetyo Nugroho	
	Hasan Bisri	Jarman	
	Budiman	Hasan Bisri	
	Aloysius Kiik Ro	Budiman	
		Aloysius Kiik Ro	
Komisaris Independen	Oegroseno	Oegroseno	*Independent Commissioners*
	Darmono	Darmono	
Dewan Direksi			*Board of Directors*
Direktur Utama/ *President Director*	Sofyan Basir	Sofyan Basir	Direktur Utama/ *President Director*
Direktur/*Director*	Sarwono Sudarto	Sarwono Sudarto	Keuangan/ *Finance*
Direktur/*Director*	Nasri Sebayang	Nasri Sebayang	Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah/ *Regional Business of Central Side of Java*
Direktur/*Director*	Murtaqi Syamsuddin	Murtaqi Syamsuddin	Bisnis Regional Jawa Bagian Barat/ dan Lampung/ *Regional Business of West Part of Java and Lampung*
Direktur/*Director*	Supangkat Iwan Santoso	Supangkat Iwan Santoso	*Pengadaan/Procurement*
Direktur/*Director*	Amir Rosidin	Amir Rosidin	Bisnis Regional Sumatera/ *Regional Business of Sumatera*
Direktur/*Director*	Nicke Widyawati	Nicke Widyawati	Perencanaan Korporat/ *Corporate Planning*
Direktur/*Director*	Amin Subekti	Amin Subekti	Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali/ *Regional Business of East Side of Java and Bali*
Direktur/*Director*	Muhamad Ali	Muhamad Ali	Human Capital Manajemen/ *Human Capital Management*
Direktur/*Director*	Djoko Rahardjo Abu Manan	Djoko Rahardjo Abu Manan	Bisnis Regional Kalimantan/ *Regional Business of Kalimantan*
Direktur/*Director*	Machnizon	Machnizon	Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara/ *Regional Business of Sulawesi and South East Nusa*
Direktur/*Director*	Haryanto W.S.	Haryanto W.S.	Bisnis Regional Maluku dan Papua/ *Regional Business of Maluku and Papua*
Komite Audit			*Audit Committee*
Ketua	Darmono	Darmono	*Chairman*
Anggota	Hasan Bisri	Andin Hadiyanto	*Members*
	Sugeng Rochadi	Hasan Bisri	
	Achmad Wahyudi	Joseph Suardi Sabda	
		Sugeng Rochadi	
		Aidil Yuzar	
Sekretaris Perusahaan			*Corporate Secretary*
Sekretaris Perusahaan	--	Adi Supriono	*Corporate Secretary*
Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan	Bambang Dwiyanto	--	*Task Executor Corporate Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. SK-179/MBU/2013 tanggal 8 Maret 2013, Murtaqi Syamsuddin diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("MSOE") of the Republic of Indonesia No. SK-179/MBU/2013 dated March 8, 2013, Murtaqi Syamsuddin was appointed as the Company's Director.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen.

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Sofyan Basir diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan dan Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati dan Amin Subekti diangkat sebagai direktur Perusahaan.	*Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Sofyan Basir was appointed as the Company's President Director and Sarwono Sudarto, Nasri Sebayang, Supangkat Iwan Santoso, Amir Rosidin, Nicke Widyawati and Amin Subekti were appointed as the Company's Directors.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP-273/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 Hasan Bisri diangkat sebagai Komisaris.	*Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. KEP-273/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Hasan Bisri was appointed as Commissioner.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, Aloysius Kiik Ro diangkat sebagai Komisaris.	*Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015, Aloysius Kiik Ro was appointed as Commissioner.*
Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 198/SK/DK-PLN/2015 tanggal 16 Oktober 2015, pengangkatan Komite Audit Perusahaan yang terdiri dari Darmono sebagai Ketua Komite Audit, beserta Anggota Komite Audit yang terdiri dari Hasan Bisri, Sugeng Rohadi, Andin Hadiyanto, dan Aidil Yuzar. Di tahun 2016, Andin Hadiyanto telah habis masa jabatannya, sedangkan Aidil Yuzar digantikan oleh Achmad Wahyudi berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 19/SK/DK-PLN/2016 tanggal 28 Juli 2016. Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 29/SK/DK-PLN/2015 tanggal 27 Agustus 2015, Joseph Suardi Sabda diangkat sebagai anggota Komite Audit Non Komisaris dengan status paruh waktu dan masa jabatannya habis pada tanggal 1 September 2016.	*Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 198/SK/DK-PLN/2015 dated October 16, 2015, the appointment of the Company's Audit Committee consist of Darmodo as the Chairman, and Members of the Audit Committee consist of Hasan Bisri, Sugeng Rohadi, Andin Hadiyanto, and Aidil Yuzar. In 2016, Andin Hadiyanto ended his term, while Aidil Yuzar was replaced by Achmad Wahyudi based on the Company's Board of Commissioners SK No. 19/SK/DK-PLN/2016 dated July 28, 2016. Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 29/SK/DP-PLN/2015, Joseph Suardi Sabda was appointed as part time Audit Committee Non Commissioner and his term ended on September 1, 2016.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon, dan Haryanto.W.S diangkat sebagai Direktur Perusahaan.	*Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon and Haryanto.W.S were appointed as the Company's Directors.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 tanggal 10 November 2015, Kuntoro Mangkusubroto diangkat sebagai Komisaris Utama, dan Jarman diangkat sebagai komisaris.	*Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-223/MBU/11/2015 dated November 10, 2015, Kuntoro Mangkusubroto was appointed as President Commissioner, and Jarman was appointed as Commissioner.*

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016, Hasan Bisri diangkat sebagai Pelaksana Tugas ("PLT") Komisaris Utama menggantikan Kuntoro Mangkusubroto.

Based on the Decision Letter of the MSOE of the Republic of Indonesia No. SK-106/MBU/05/2016 dated May 24, 2016, Hasan Bisri was appointed as Task Executor ("PLT") of President Commissioner to replace Kuntoro Mangkusubroto.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU")

2. Implementation of Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("PABU")

a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.l).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengijinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No.6")

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely Power Purchase Agreements ("PPA") and Energy Sales Contracts ("ESC"), with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries applied ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contain a Lease ("ISFAS 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.l).

On March 1, 2017, Financial Services Authority ("OJK") issued POJK No.6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No.6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the power purchase agreements contain substances other than of a sale and purchase. POJK No.6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No.6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructures development in accordance with Presidential Regulation.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (catatan 3.l), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

The Company decided to early implement POJK No.6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on power purchase agreement which contains a lease (note 3.l), since January 1, 2016 are presented as purchased electricity in the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Company and its subsidiaries have adjusted the related assets and liabilities.

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

The net adjustments on related assets and liabilities amounting to Rp43,428,454 are recorded as adjustment to retained earnings on January 1, 2016, the details of which are as follows:

	1 Januari sebelum penyesuaian/ *January 1, Before adjustment* 2016 Rp	**Penyesuaian saldo awal/ *Beginning balance adjustment* Rp**	**1 Januari setelah penyesuaian/ *January 1, after adjustment* 2016 Rp**	
Aset tetap	1.187.879.590	(72.227.600)	1.115.651.990	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	29.088.271	(14.787.769)	14.300.502	*Deferred tax assets*
	1.216.967.861	(87.015.369)	1.129.952.492	
Liabilitas jangka panjang				*Non-current liabilities*
Utang listrik swasta	7.093.280	755.783	7.849.063	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	149.621.763	(128.065.144)	21.556.619	*Lease Liabilities*
Liabilitas jangka pendek				*Current liabilities*
Utang sewa pembiayaan	6.759.138	(3.313.534)	3.445.604	*Lease liabilities*
Biaya masih harus dibayar	10.627.055	(2.216.084)	8.410.971	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	311.196	9.968	321.164	*Electricity purchase payable*
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	8.910.438	380.409	9.290.847	*Related parties*
Pihak ketiga	17.715.563	1.998.142	19.713.705	*Third parties*
Utang lain-lain	20.188.608	6.637	20.195.245	*Other payables*
	221.227.041	(130.443.823)	90.783.218	
Dampak penerapan POJK No.6 terhadap saldo laba awal		43.428.454		*The effect of POJK No.6 application on beginning retained earnings*

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayaran Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut.

The subsidiaries that have transactions based on power purchase agreement, namely PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), who are not listed or public companies, therefore POJK No.6 is not applied for those subsidiaries.

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

For consolidation purposes, adjustments are made on the financial statements of PLN Batam and IP to bring their accounting policy for transactions based on power purchase agreement in accordance with POJK No.6.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") di tahun 2015 dan 2016, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Standar dan implementasi standar baru

- PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
- ISAK 30: Pungutan

Penyesuaian 2015

- PSAK 5: Segmen Operasi
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 110: Akuntansi Sukuk

Amandemen

- PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

b. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standard (ISFAS) effective for the year beginning on or after January 1, 2016

Ratification of amandements and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board ("DSAK-IAI") in 2015 and 2016, effective for the year beginning on or after January 1, 2016, are as follows:

New standards and implementation of standards

- *SFAS 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities*
- *ISFAS 30: Levies*

Improvement 2015

- *SFAS 5: Operating Segments*
- *SFAS 7: Related Party Disclosures*
- *SFAS 13: Investment Property*
- *SFAS 16: Property, Plant and Equipment*
- *SFAS 19: Intangible Asset*
- *SFAS 22: Business Combination*
- *SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *SFAS 53: Share-based Payments*
- *SFAS 68: Fair Value Measurement*
- *SFAS 110: Accounting for Sukuk*

Amendments

- *SFAS 4: Separate Financial Statements regarding Equity Method in Separate Financial Statements*
- *SFAS 15: Investment in Associates and Joint Venture regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *SFAS 16: Property, Plant and Equipment regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*

- PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja

- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi

- *SFAS 19: Intangible Asset regarding Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- *SFAS 24: Employee Benefits regarding Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
- *SFAS 65: Consolidated Financial Statements about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- *SFAS 66: Joint Arrangements regarding Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation*
- *SFAS 67: Disclosures of Interest in Other Entities regarding Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*

c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan 2018

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan Interim
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31 (2015): Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32 (2017): Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Amandemen standar dan interpretasi berikut ini efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 69 (2015): Agrikultur
- PSAK 16 (Amandemen 2015): Aset Tetap
- PSAK 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas

c. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standard (ISFAS) effective for the year beginning on or after January 1, 2017 and 2018

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2017, for which early adoption is permitted:

- *SFAS 1 (Amendment 2015) : Presentations of Financial Statements*
- *SFAS 3 (Improvement 2016) : Interim Financial Reporting*
- *SFAS 24 (Improvement 2016): Employee Benefits*
- *SFAS 58 (Improvement 2016): Non-Current Asset Held for Sale and Discontinued Operation*
- *SFAS 60 (improvement 2016): Financial Instruments: Disclosure*
- *ISFAS 31 (2015): Interpretation on Scope of SFAS 13: Investment Property*
- *ISFAS 32 (2017): Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards*

The following amendments and interpretations of standard will be effective for the year beginning on or after January 1, 2018, for which early adoption is permitted:

- *SFAS 69 (2015): Agriculture*
- *SFAS 16 (Amendment 2015): Property, Plant and Equipment*
- *SFAS 2 (Amendment 2016): Statement of Cash Flows*

- PSAK 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

- *SFAS 46 (Amendment 2016): Income Tax*

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a. Pernyataan Kepatuhan

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU"), yang mencakup:

a. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

b. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI").

c. Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No.6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Sebelum 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan tersebut mencakup:

a. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, yang meliputi PSAK dan ISAK.

3. Summary of Significant Accounting Policies

a. Statement of Compliance

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("PABU"), which cover:

a. Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI"), which covers Indonesian Statements Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS").

b. Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Sharia Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAS-IAI").

c. Applicable Capital Market Regulations as stated by OJK including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company, and OJK Regulation No.6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

Prior to January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Those financial accounting standards cover:

a. Financial Accounting Standards issued by DSAK-IAI, which covers SFAS and ISFAS.

b. Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Applicable Capital Market Regulations as stated by OJK including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries

entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

Changes in the Company and its subsidiaries interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

If the Company loses control over the subsidiary, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;
(b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;
(e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan nonpengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk

d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders is initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on an acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interest even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a

sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam pendapatan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information

mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. ("MH") dan Majapahit Finance B.V. ("MF") diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan prosedur yang sama dengan Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. ("MH") and Majapahit Finance B.V. ("MF"), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same procedures adopted by the Company.

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Mata uang/ *Currency*	2016 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2015 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)
JPY	115	115
US$	13.436	13.795
EUR	14.162	15.070
AUD	9.724	10.064
CHF	13.178	13.951
GBP	16.508	20.451
NZD	9.360	9.442

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a), atau

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a), or

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State Owned Enterprise as shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Aset Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

g. Financial Assets
Initial Recognition and Measurement
All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Subsequent Measurement of Financial Assets
The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, they are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses, until they are derecognized.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Impairment of Financial Assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Derecognition of Financial Assets

The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in

sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Lindung nilai
Dalam bisnis normal Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasuri tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

Hedging
In the normal course of the Company and its subsidiaries' business exposes them to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in accordance with the management's written treasury policies, the Company and its subsidiaries use

menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:
- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:
- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas
Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

derivatives and other hedging instruments. PSAK 55 allows three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Company and its subsidiaries use hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*

- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash flow hedge
The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net of tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Company reclassifies the associated gains and losses that were previously recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan
Penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Financial Liabilities
Two-step loans, Government and non-bank Government Financial Institution loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (excluding sukuk ijara), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Sukuk ijarah dan obligasi syariah ijarah diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi.

Biaya transaksi sukuk ijarah diamortisasi menggunakan metode *Effective Interest Rate* (EIR) sepanjang umur kontrak dan liabilitasnya.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:
- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Sebelum 31 Desember 2015, setelah pengakuan awal, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan, kecuali tanah, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap termasuk material cadangan utama dan peralatan siap pakai dengan manfaat ekonomis lebih dari satu tahun yang diperuntukkan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan operasi instalasi dan mesin pembangkit listrik dalam rangka memproduksi serta mendistribusikan tenaga listrik.

Sukuk ijara and syariah ijara bonds are initially measured at fair value, net of transaction costs.

Transaction costs for sukuk ijara are amortized using the Effective Interest Rate (EIR) method over the contractual life of the liability.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, when and only when the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities
The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:
- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

j. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisition
Before December 31, 2015, after initial recognition, property, plant and equipment held for use, except land rights, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Land rights is stated at cost. Property, plant and equipment include major spare parts and stand-by equipment, with economic benefits of more than one year, which are used to ensure the continuity and stability of the power plant operations and electricity installations necessary to produce and distribute electricity.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan distribusi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik
- Material cadangan utama

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land*
- *Buildings, reservoir and infrastructure*
- *Installations and power plant*
- *Transmission equipment*
- *Distribution equipment*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
- *Major spare parts*

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful lives as follows:

	2016 (Tahun/ *Years*)	2015 (Tahun/ *Years*)	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10-50	10-47	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12-40	13-30	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	40	37	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	40	15-37	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	5	4-8	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	3-5	*Motor vehicle*
Material cadangan utama	10-50	10-25	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	5-10	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	5-10	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	10-47	10-47	*Vessel and equipment*

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairments are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

k. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

l. Sewa

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2016

ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011): Sewa ("PSAK 30").

l. Leases

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

Accounting treatment before January 1, 2016

ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contains a Lease ("ISFAS 8") provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011): Leases ("SFAS 30").

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.	*The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried out by the Company as a State-Owned Enterprise, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.*
Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni PPA dan ESC, dengan IPP. IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.	*The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely PPA and ESC, with IPPs. Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.*
Berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK yang kemudian bergabung menjadi bagian dari OJK, No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, perjanjian penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mengatur transaksi tersebut.	*Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of Bapepam-LK, which has subsequently been merged into the OJK, power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to-private consession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions.*
Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ("ISAK 16") (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi perlakuan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.	*Management assessed the impact of ISFAS 16: Service Concession Arrangements ("ISFAS 16") (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of Bapepam-LK, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.*

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2016
Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6") yang diterapkan secara prospektif. Penerapan POJK tersebut mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli, sehingga evaluasi apakah PPA dan IPP mengandung sewa tidak dilakukan (Catatan 2.a).

Accounting treatment since January 1, 2016
On March 1, 2017, Financial Services Authority ("OJK") issued POJK No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment on Transactions based on Power Purchase Agreement ("POJK No.6") which is applied prospectively. The application of the POJK resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase, therefore evaluation on whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease is not performed (Note 2.a).

Klasifikasi Sewa
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Lease Classification
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.

m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk

m. Construction in Progress
Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property

pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, to be added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

Investment income is earned from the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas anak; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Company and its subsidiaries choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

p. Investments in Associates and Joint Venture

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Investments in Associates

Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-

penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries and associates are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) jika investasi menjadi entitas anak.

(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

(c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) if the investment becomes a subsidiary.

(b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value

(c) When the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama

Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian perusahaan dan entitas anak atas laba rugi atas ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas pendapatan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Interest in joint ventures

Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations and assets and liabilities of a joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the company and its subsidiaries' share of its joint venture's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali perusahan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint venture.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

q. Aset Tak Berwujud

q. Intangible Assets

i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak
Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang

i. Software Development Cost
Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company

dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

and its subsidiaries are recognized as intangible assets. Computer software development costs recognized as assets are amortized using the straight line method over their estimated useful lives.

ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah
Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

ii. Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized over the period of the land rights.

After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight line method.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukum hak atau umur ekonomi tanah.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amotized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment

bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

r. Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

r. Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.g.

s. Cash and Cash Equivalents
For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3.g for the accounting policy on loans and receivables.

t. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

t. Inventories
Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

u. Pinjaman dan Utang Obligasi (Termasuk Sukuk Ijarah)
Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.h.

u. Borrowings and Bonds Payable (Including Sukuk Ijara)
Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3.h for the accounting policy on financial liabilities.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik
Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Subsidi Listrik Pemerintah
Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Biaya Penyambungan Pelanggan
Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pembelian Tenaga Listrik
Dalam PPA dan ESC dengan IPP, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan

v. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity
Revenue from the sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

The Government's Electricity Subsidy
The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the prevailing Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Customers Connection Fees
The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.

Other Revenues
Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized with reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date.

Interest Income
Interest revenue is recognized as in incurred on an accrual basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses
Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

w. Purchase of Electricity
Under PPAs and ESCs with IPPs, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and

pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2016
Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 dan mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa. Apabila terdapat unsur sewa, maka Perusahaan dan entitas anak melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaaan atau sewa operasi (Catatan 3.l). Jika PPA dan ESC dengan IPP tidak mengandung sewa, maka biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Accounting treatment before January 1, 2016
The Company and its subsidiaries implemented ISFAS 8 and evaluated whether PPAs with IPPs contain a lease. When a lease is identified, the Company and its subsidiaries perform assessment on whether such lease is classified as finance lease or operating lease (Note 3.l). If PPA and ESC with IPP does not contain a lease, the cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2016
Penerapan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016, mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli. Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 2.a).

Accounting treatment since January 1, 2016
The prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016 resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase. The cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 2.a).

x. Imbalan Kerja

x. Employee Benefits

Imbalan Paska Kerja
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Post-employment Benefits
The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end

pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Long-term Benefits

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui laba rugi.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to profit or loss.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

z. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial

laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to reliaze the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

aa. Aset Donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

bb. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:
a. Tanggal SKPP
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

aa. Government Contributed Assets

Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.

bb. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Certificate (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company has disclosed the following in its financial statements:
a. The date of SKPP
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP
c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

cc. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

dd. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi individual atau suatu grup segmen operasi yang informasi segmennya harus dilaporkan secara terpisah. Penggabungan satu atau lebih segmen operasi diperbolehkan ketika memenuhi kriteria tertentu, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah segmen operasi harus memiliki karakteristik ekonomis yang sejenis (contoh margin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dll). Pertimbangan signifikan diperlukan ketika menentukan penggabungan segmen operasi.

Wilayah Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur digabungkan sebagai satu segmen operasi dikarenakan memiliki karakteristik konsumen yang sejenis.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

dd. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Reportable segments are individual operating segments or a group of operating segments for which segment information must be separately reported. Aggregation of one or more operating segments into a single reportable segment is permitted (but not required) where certain conditions are met, the principal condition being that the operating segments should have similar economic characteristics (for example. profit margin, spreads, sales growth rates, etc). Whether multiple operating segments can be aggregated into a single reportable segment is a matter of significant judgement.

West Part of Java Area, Central Part of Java Area and East Part of Java Area is aggregated as single reportable segment due to similar characteristic of consumer.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa Pembiayaan
Sejumlah aset tetap dicatat berdasarkan sewa pembiayaan menurut PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

4. Critical Accounting Judgments and Estimates

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies
In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company has identified the following matters under which significant judgments are made:

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Leases
A number of property, plant and equipment are recorded based on finance lease arrangement, in accordance with SFAS 30. At the commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

Biaya Penyambungan Pelanggan

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban terpisah bagi Perusahaan dan entitas anak untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value)* untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas anak mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Revenues from Customers' Connection Fees

The Company and its subsidiaries have considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.

The Company and its subsidiaries considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company and its subsidiaries to provide ongoing electricity supply to its customers.

The Company and its subsidiaries conclude that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company and its subsidiaries recognize connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.

Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries' have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan)

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Power Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkit Jawa Bali dan PT GCL Indotenaga. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also considers the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle*
  - *The terms of the contractual arrangement*
  - *Other facts and circumstances (when relevant)*

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Power Switchgear Indonesia, PT Shenhua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkit Jawa Bali dan PT GCL Indotenaga. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 8).

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang

Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14 dan 16.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 16.

Estimated Useful Lifes of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The carrying amounts of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The assets revaluation was performed by an independent public valuer.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and its

dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

Imbalan Paska Kerja
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Pajak Penghasilan
Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

Post-employment Benefits
The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit obligations.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 49.

Income Taxes
The calculations of income tax expense for the Company requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. Entitas Anak / *5. Subsidiaries*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2016 %	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2015 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* **) 2016 Rp	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* **) 2015 Rp
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	220.755	226.487
PT Cogindo Daya Bersama (CDB) *)	Jakarta	*Cogeneration,* pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99,99	99,99	1999	915	797
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	80,00	60,00	1998	182	116
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	93,96	86,00	***)	607	221
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (TPGP) *)	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik/ *Development of geothermal energy and electricity supplies*	95,21	95,21	***)	84	80
PT Putra Indotenaga *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan Energi/ *Electricity and Energy*	99,99	99,90	2016	417	261
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	1995	191.738	195.546
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Surabaya	Jasa/ *Service*	98,00	98,00	2001	985	680
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/ *Service*	92,00	92,00	2013	69	48
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik *)	Jakarta	Jasa/ *Service*	95,00	95,00	2015	2	1
PT Rekadaya Elektrika (RE) *) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	98,90	98,68	2004	981	552
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *)	Jakarta	Supervisi dan Konsultasi/ *Supervision and consultation*	99,80	99,80	2011	87	70
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72,97	72,97	***)	220	206

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2016 %	2015 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* **) 2016 Rp	2015 Rp
PT PJB Investasi (PJBI) *)	Jakarta	Ketenagalistrikan/ *Electricity*	99,99	99,99	2016	327	--
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,99	99,99	2000	16.138	5.932
PT Pelayanan Energi Batam (PEB)	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ *Construction of gas pipeline and other energy sector*	99,90	99,90	2016	821	9
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99,99	99,99	2000	2.296	2.068
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99,90	99,90	2003	878	521
PT Prima Power Nusantara (PPN)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99,99	--	***)	45	--
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)	Tarakan	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99,97	99,97	2004	350	279
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ and subsidiary	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100	100	2006	41.896	52.169
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100	100	2006	33.827	39.277
PT PLN Batubara (PLN Batubara)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	99,99	99,99	2009	1.265	1.328
PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (PLN Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99,99	99,99	2010	21	91
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	100	100	2011	1.257	1.243
PT PBM Adhiguna Putera (PBM AP)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	99,95	99,95	1987	147	136
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Operation and maintenance*	99,99	99,99	2013	586	444
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/ *Service*	90,00	90,00	2013	311	267

*) Pemilikan tidak langsung/ *Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/ *Stated in billions of Rupiah*
***) Dalam tahap pengembangan/ *Under development stage*

Pada tahun 2016, IP, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan saham di IRP sebesar Rp135.000 yang meningkatkan modal disetor IP di IRP menjadi Rp337.035 atau setara 93,96% saham IRP.

In 2016, IP, a subsidiary, increased their additional shares to IRP amounted Rp135,000 which increases the IP's paid up capital in IRP to become Rp337,035 equivalent of 93.96% shares in IRP.

Pada tahun 2016, IP, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan saham di ADC sebesar Rp15.000 yang meningkatkan modal disetor IP di ADC menjadi Rp24.000 atau setara 80% saham ADC.

In 2016, IP, a subsidiary, increased their additional shares to ADC amounted Rp15,000 which increases the IP's paid up capital in ADC to become Rp24,000 equivalent of 80% shares in ADC.

Pada tahun 2016, PLNE, entitas anak, melakukan penyertaan saham di PPN sebesar Rp15.000 atau setara 99,99% saham PPN.

In 2016, PLNE, a subsidiary, made a share investment to PPN amounted Rp15,000 equivalent of 99.99% shares in PPN.

6. Aset Tetap / *6. Property, Plant and Equipment*

	2016							
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penyesuaian penerapan/ *Application adjustment* POJK No.6 *) Rp	Saldo awal disesuaikan/ *Adjusted Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan/ revaluasi:								***Acquisition cost/ revaluation:***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Tanah	119.569.383	--	119.569.383	890.624	--	2.486.822	122.946.829	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	49.456.429	--	49.456.429	115.018	--	3.650.261	53.221.708	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	572.134.451	--	572.134.451	1.923.345	--	27.800.198	601.857.994	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	86.701.829	--	86.701.829	120.233	--	7.390.507	94.212.569	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	141.446.484	--	141.446.484	2.845.940	--	12.663.053	156.955.477	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	9.848.947	--	9.848.947	269.422	--	616.513	10.734.882	*General equipment*
Kendaraan bermotor	841.123	--	841.123	44.662	--	310.111	1.195.896	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	667.054	--	667.054	274.874	--	75.269	1.017.197	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.603.090	--	2.603.090	26.345	--	618.749	3.248.184	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1.646.470	--	1.646.470	915	--	239.139	1.886.524	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	1.413.716	--	1.413.716	11.342	--	(279.005)	1.146.053	*Vessels and equipment*
Sub-jumlah	986.328.976	--	986.328.976	6.522.720	--	55.571.617	1.048.423.313	*Subtotal*
Aset sewaan								*Leased assets*
Tanah	48.388	--	48.388	--	--	(988)	47.400	*Land*
Instalasi dan mesin pembangkit	144.432.130	(103.659.494)	40.772.636	--	--	(2.850.705)	37.921.931	*Installation and power plant*
Sub-jumlah	144.480.518	(103.659.494)	40.821.024	--	--	(2.851.693)	37.969.331	*Subtotal*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	104.984.687	--	104.984.687	51.324.191	--	(53.314.221)	102.994.657	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	8.055.240	--	8.055.240	--	467.359	971.924	8.559.805	*Assets not used in operation*
Jumlah	1.243.849.421	(103.659.494)	1.140.189.927	57.846.911	467.359	377.627	1.197.947.106	*Total*
Akumulasi penyusutan								***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	--	--	2.029.031	--	262.276	2.291.307	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	--	15.511.262	--	(194.174)	15.317.088	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	--	--	--	2.314.178	--	26.828	2.341.006	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	--	--	--	4.313.743	--	(2.379)	4.311.364	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	7.433.553	--	7.433.553	975.895	--	(82.507)	8.326.941	*General equipment*
Kendaraan bermotor	759.513	--	759.513	107.290	--	87.182	953.985	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	--	--	--	77.316	--	78.373	155.689	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	--	--	519.696	--	24.108	543.804	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1.043.768	--	1.043.768	185.555	--	29.857	1.259.180	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	287.944	--	287.944	90.269	--	(86.393)	291.820	*Vessels and equipment*
Sub-jumlah	9.524.778	--	9.524.778	26.124.235	--	143.171	35.792.184	*Subtotal*
Aset sewaan								*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	39.529.187	(31.431.894)	8.097.293	1.404.427	--	604.443	10.106.163	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	6.915.866	--	6.915.866	234.698	338.501	(292.831)	6.519.232	*Assets not used in operation*
Jumlah	55.969.831	(31.431.894)	24.537.937	27.763.360	338.501	454.783	52.417.579	*Total*
Jumlah Tercatat	**1.187.879.590**	**(72.227.600)**	**1.115.651.990**				**1.145.529.527**	***Net Carrying Value***

*) Lihat Catatan 2.a / **) See Note 2.a*

	2015						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Selisih Penilaan Kembali/ *Difference Arising on Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Biaya perolehan/ revaluasi:							***Acquisition cost/ revaluation:***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	9.274.191	49.194	--	84.746	110.161.252	119.569.383	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	59.756.531	59.305	--	1.875.599	(12.235.006)	49.456.429	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	186.223.996	731.356	--	11.127.031	374.052.068	572.134.451	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	79.439.651	86.912	--	3.960.256	3.215.010	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	117.243.483	2.374.366	--	8.566.445	13.262.190	141.446.484	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	9.204.288	185.380	--	459.279	--	9.848.947	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1.035.574	47.222	--	(241.673)	--	841.123	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	1.021.881	203.398	--	(401.408)	(156.817)	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4.652.495	31.401	--	219.730	(2.300.536)	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1.646.287	183	--	--	--	1.646.470	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	774.041	276.000	--	363.675	--	1.413.716	*Vessels and equipment*
Sub-jumlah	470.272.418	4.044.717	--	26.013.680	485.998.161	986.328.976	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Tanah	48.388	--	--	--	--	48.388	*Land*
Instalasi dan mesin pembangkit	128.653.831	15.095.268	--	683.031	--	144.432.130	*Installation and power plant*
Sub-jumlah	128.702.219	15.095.268	--	683.031	--	144.480.518	*Subtotal*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	94.901.088	40.196.223	--	(30.112.624)	--	104.984.687	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	6.672.832	--	264.293	1.646.701	--	8.055.240	*Assets not used in operation*
Jumlah	700.548.557	59.336.208	264.293	(1.769.212)	485.998.161	1.243.849.421	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	15.414.049	2.316.878	--	(70.172)	(17.660.755)	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	69.220.246	8.978.948	--	(1.683.450)	(76.515.744)	--	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	23.413.707	2.509.592	--	(83.755)	(25.839.544)	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	38.955.832	4.361.659	--	(16.839)	(43.300.652)	--	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	6.353.068	1.107.305	--	(26.820)	--	7.433.553	*General equipment*
Kendaraan bermotor	749.812	103.446	--	(93.745)	--	759.513	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	223.390	47.074	--	(15.588)	(254.876)	--	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.701.740	315.601	--	86.305	(3.103.646)	--	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	914.070	199.152	--	(69.454)	--	1.043.768	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	121.712	83.129	--	83.103	--	287.944	*Vessels and equipment*
Sub-jumlah	158.067.626	20.022.784	--	(1.890.415)	(166.675.217)	9.524.778	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	34.996.639	5.392.643	--	(860.095)	--	39.529.187	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	5.778.017	497.835	142.921	782.935	--	6.915.866	*Assets not used in operation*
Jumlah	198.842.282	25.913.262	142.921	(1.967.575)	(166.675.217)	55.969.831	*Total*
Jumlah Tercatat	**501.706.275**					**1.187.879.590**	***Net Carrying Value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2016 Rp	2015 Rp	
Beban usaha	27.512.150	25.406.856	*Operating expenses*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	16.512	8.571	*Construction in progress*
Beban lain-lain	234.698	497.835	*Others*
Jumlah	**27.763.360**	**25.913.262**	***Total***

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu. HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2017 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2017 to 2051, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of land rights, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$22.057.263.960 (setara dengan Rp296.361.399) dan Rp1.644.268 pada tanggal 31 Desember 2016. Aset sewaan PLTU Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY443.480.763.353 (setara dengan Rp51.000.288) dan US$4.320.000 (setara dengan Rp58.044) pada tanggal 31 Desember 2016.

Building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels were insured to several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, against fire and other possible risks with insurance coverage of US$22,057,263,960 (equivalent to Rp296,361,399) and Rp1,644,268 as of December 31, 2016. Leased assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant 4x660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY443,480,763,353 (equivalent to Rp51,000,288) and US$4,320,000 (equivalent to Rp58,044) as of December 31, 2016.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal dan perlengkapan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not insure assets other than building, installation and power plant, other transmission equipment and vessels and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp5.969.347.

As of December 31, 2016, the gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use amounted to Rp5,969,347.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of property, plant and equipment as of the reporting date.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tertentu dari model biaya menjadi model revaluasi.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for certain class of assets from the cost model to the revaluation model.

Revaluasi aset tetap untuk Perusahaan dan entitas anak dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), Penilai Publik Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan No. 2.09.0012 dan OJK.

The revaluation of property, plant and equipment of the Company and its subsidiaries is conducted by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), an Independent Public Valuer registered in the Ministry of Finance No. 2.09.0012 and OJK.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

1. Pendekatan Pasar
   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

   Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

2. Pendekatan Pendapatan
   Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode Arus Kas Terdiskonto, atau keduanya.

   Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

3. Pendekatan Biaya
   Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. *Market Approach*
   This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (object being appraised) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

   The market approach is applied to the asset class of land rights.

2. *Income Approach*
   This approach considers the income and costs related to the assets being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the Discounted Cash Flow method or both.

   The income approach is applied to the asset class of commercial land rights or land rights with development scale.

3. *Cost Approach*
   This approach is based on a principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would not be more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration undue time and overtime charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadangan utama, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

The cost approach is applied to asset classes of buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, major spare parts and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

Information on the revaluation of assets as of December 31, 2015 for Classes of Revalued Assets are as follows:

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ *Net carrying value before revaluation* 31 Desember/ *December 31,* 2015 Rp	Surplus (Rugi) Revaluasi/ *Revaluation Surplus (loss)* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* 31 Desember/ *December 31,* 2015 Rp	
Nilai revaluasi				***Revalued amount***
Pemilikan langsung				*Direct acquisitions*
Tanah	9.408.131	110.161.252	119.569.383	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	61.691.435	(12.235.006)	49.456.429	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	198.082.383	374.052.068	572.134.451	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	83.486.819	3.215.010	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	128.184.294	13.262.190	141.446.484	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	823.871	(156.817)	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4.903.626	(2.300.536)	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipments that are used for electricity supply*
Sub-jumlah	486.580.559	485.998.161	972.578.720	*Sub total*
Akumulasi penyusutan				***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung				*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(17.660.755)	17.660.755	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	(76.515.744)	76.515.744	--	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	(25.839.544)	25.839.544	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	(43.300.652)	43.300.652	--	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	(254.876)	254.876	--	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	(3.103.646)	3.103.646	--	*Telecommunication and data processing equipments that are used for electricity supply*
Sub-jumlah	(166.675.217)	166.675.217	--	*Sub total*
Jumlah Tercatat	**319.905.342**	**652.673.378**	**972.578.720**	***Net Carrying Value***

Per 31 Desember 2015, jumlah kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelas Aset yang Direvaluasi dicatat sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah sebesar Rp652.673.378.

As of December 31, 2015, total increase in the carrying amounts of the Classes of Revalued Assets is recorded as Property, plant and equipment Revaluation Surplus amounting to Rp652,673,378.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan terkait dan pajak final atas revaluasi aset tetap

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes and final tax on property, plant and equipment revaluation, is

dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap pada penghasilan komprehensif lain.

credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment Revaluation Surplus in other comprehensive income section.

Tabel di bawah ini menganalisis aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hirarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perbedaan level Nilai Wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- *Input* selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Level 2);
- *Input* untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 3).

The table below analyses non-financial assets recorded at fair value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68: Fair Value Measurement. The different levels of Fair Value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, neither directly or indirectly (Level 3).*

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2015 menggunakan/ *Fair value measurement as at December 31, 2015 using*				
	Level 1	**Level 2**	**Level 3**	**Jumlah/ *Total***	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	--	48.169.865	71.399.518	119.569.383	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	9.618.342	39.838.087	49.456.429	*Building, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	572.134.451	572.134.451	*Installation and power plants plant*
Perlengkapan transmisi	--	--	86.701.829	86.701.829	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	--	--	141.446.484	141.446.484	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	--	--	667.054	667.054	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	--	2.603.090	2.603.090	*Telecommunication and data processing equipments that are used for electricity supply*
Jumlah	**--**	**57.788.207**	**914.790.513**	**972.578.720**	***Total***

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam Nilai Wajar level 1.

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

Nilai Wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. *Input* yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi
b. Tingkat hunian
c. Tingkat pertumbuhan
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi

The level 2 Fair Value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

a. Sale or rental price per square meter
b. Occupancy rate
c. Growth rate
d. Discount and capitalization rate

e. Biaya pembuatan baru per meter persegi
f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal

e. Replacement cost new per square meter
f. Depreciation, functional and external obsolenscence

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Nilai wajar level 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi.

The level 3 Fair Value is calculated through the market approach, income approach and cost approach by using unobservable inputs.

Selain menggunakan *input* yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialized property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ *Fair value at December 31, 2015* Rp	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran *input* yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable Input* %	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah	**71.399.518**					***Land***
Tapak tower	8.344.953	Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Kompensasi/*Compensation Right of Way ("ROW")*	10% - 20%	Semakin tingi kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the ROW compensation, the higher the fair value*	*Land for tower site*
Tanah gardu dan kantor	42.550.076	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	1,35 - 3,40	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land for substation and office building*
Tanah pembangkit	20.504.489	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	1,35 - 3,40	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land for power plant*
		Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Biaya pembebasan lahan/ *Soft cost*	5% - 10%	Semakin tinggi biaya pembebasan lahan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the soft cost, the higher the fair value*	

	Nilai wajar pada 31 Desember 2015/ *Fair value at December 31, 2015* Rp	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran *input* yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable Input* %	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Bangunan	**39.838.087**					***Building***
Bangunan umum	20.766.582	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fisik/ *Physical depreciation*	0% - 83%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation, the lower the fair value*	*Buildings*
Waduk dan prasarana	19.071.505	Trending/*Trending*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1,00 - 2,44	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/The higher *the functional depreciation, the lower the fair value*	*Reservoir and infrastructure*
			Indeks/*Index*		Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Instalasi dan mesin pembangkit	572.134.451	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1% - 23%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation rate, the lower the fair value*	*Installation and power plant*
			Indeks/*Index*		Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Perlengkapan transmisi	86.701.829	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,54	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	141.446.484	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,54	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	667.054	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,17	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2.603.090	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1,00 - 1,023	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Telecomunication and data processing equipments used for electricity supply*

Perusahaan dan entitas anak juga melakukan penilaian kembali atas aset tetap untuk tujuan perpajakan.

Pada tahun 2016, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

The Company and its subsidiaries also performed revaluation of Property, plant and equipment for tax purposes.

In 2016, the Company's and its subsidiaries' management believe that the fair value of Property, plant and equipment is not materially different with its carrying amount, hence did not revalue its Property, plant and equipment.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction In Progress
This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/ betterment of power supply facilities, as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Proyek penugasan - Program percepatan			*Mandatory project - Fast track program*
Pembangkitan	13.473.959	33.499.918	*Power plants*
Transmisi	6.983.868	7.511.564	*Transmission*
Sub Jumlah	20.457.827	41.011.482	*Sub Total*
Konstruksi rutin Pembangkitan	29.123.314	19.991.986	*Regular constructions of Power plants*
Transmisi	46.854.170	39.769.816	*Transmission*
Distribusi	5.675.889	3.842.308	*Distribution*
Perlengkapan	883.457	369.095	*Equipment*
Sub Jumlah	82.536.830	63.973.205	*Sub Total*
Jumlah	**102.994.657**	**104.984.687**	***Total***

(i) Program percepatan
Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

Pembangkitan
Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU Kalimantan Timur-Teluk Balikpapan 2x100 MW, PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW, dan PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW.

Transmisi
Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* ("UGC") 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1 dan Gardu Induk 150 kV Bekasi Utara.

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan
Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTA Peusangan 2x88 MW, PLTU 3 Kalimantan Barat – Site Bengkayang 2x50 MW dan PLTGU Grati *Peaker* 1x450 MW.

(i) Fast track program
The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalized expenditures.

Power plants
The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU Kalimantan Timur- Teluk Balikpapan 2x100 MW, PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW, and PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW.

Transmission
The fast track program of transmission under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan), Underground Cable ("UGC") 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - package 1 and Substations 150 kV Bekasi Utara.

(ii) Regular constructions

Power plants
Power plants under construction consist mainly of PLTA Peusangan 2x88 MW, PLTU 3 Kalimantan Barat – Site Bengkayang 2x50 MW and PLTGU Grati Peaker 1x450 MW.

Transmisi
Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi T/L 500 kV Jawa - Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Transmission
Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of T/L 500 kV in Java - Bali, T/L 150 kV outside Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribusi
Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Distribution
Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Perlengkapan
Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Equipment
Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2017 dan 2019.

Constructions in progress are expected to be completed between 2017 and 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2016, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

Nama Proyek/ *Project Name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress* Rp	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %
PLTU Kalimantan Timur - Teluk Balikpapan 2x100 MW	3.205.292	97%
PLTA Peusangan 2x88 MW	2.409.116	66%
PLTU 3 Kalimantan Barat - Site Bengkayang 2x50 MW	1.870.414	78%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1.743.571	86%
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	1.565.751	28%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ *and* 4 2x200 MW	1.457.456	45%
PLTU Takalar 2x100 MW	1.226.060	49%
PLTU Gorontalo - Anggrek 2x25 MW	1.143.687	51%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27,5 MW	759.499	81%
PLTU Sampit 2x25 MW	527.677	34%
Transmisi lainnya/ *Various transmission line*	53.838.038	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ *Other power plants*	26.688.750	2%-98%
Lainnya/ *Others*	6.559.346	2%-98%
Jumlah/*Total*	**102.994.657**	

Pada tanggal 31 Desember 2015, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2015, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

Nama Proyek/ *Project Name*	**Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress* Rp**	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %**
PLTU 2 Jawa Tengah - Adipala 1x660 MW	11.566.340	99%
PLTU 3 Jawa Timur - Tanjung Awar-awar 2x350 MW	4.179.862	98%
PLTU Kalimantan Timur - Teluk Balikpapan 2x100 MW	2.949.497	94%
PLTU Riau - Tenayan 2x110 MW	2.925.080	95%
PLTGU Gorontalo Peaker 4x25 MW	2.066.572	83%
PLTU Kalimantan Tengah - Pulang Pisau 2x60 MW	2.033.504	93%
PLTU Lampung - Tarahan Unit 4 2x100 MW	2.015.633	99%
PLTG Bengkanai 1x155 MW	1.821.973	96%
PLTA Peusangan 2x88 MW	1.811.290	54%
PLTU Kalimantan Barat 1 - Parit Baru 2x50 MW	1.686.895	85%
Transmisi lainnya/ *Various transmission line*	47.281.380	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ *Other power plants*	20.435.258	2%-98%
Lainnya/ *Others*	4.211.403	2%-98%
Jumlah/ *Total*	**104.984.687**	

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan estimasi kemajuan tahap *engineering, procurement and construction.* Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

The information about the percentages of completion disclosed in the table above indicate the estimated progress during the engineering, procurement and construction phases. There are still number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are certified for operations.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2016 Rp	**2015 Rp**	
Program percepatan			*Fast track program*
Bunga pinjaman termasuk amortisasi biaya emisi obligasi	1.251.994	1.336.503	*Interest expense including amortization of bonds issuance*
Kerugian kurs mata uang asing	407	589.801	*Loss on foreign exchange*
Sub Jumlah	1.252.401	1.926.304	*Sub Total*
Konstruksi rutin			*Regular constructions*
Bunga pinjaman	1.549.207	1.028.818	*Interest expense*
Kerugian kurs mata uang asing	242.528	379.385	*Loss on foreign exchange*
Sub Jumlah	1.791.735	1.408.203	*Sub Total*
Jumlah	**3.044.136**	**3.334.507**	***Total***

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi
Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset tetap akan diperbaiki.

Percepatan penyusutan atas aset yang akan dihapus sebesar Rp167.941 tahun 2016 dan Rp497.835 tahun 2015 dicatat sebagai beban lain-lain (Catatan 46).

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp27.705 tahun 2016 dan Rp9.285 tahun 2015. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil, sehingga hasil penjualan aset merupakan keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 46).

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used In Operations
Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Accelerated depreciation on assets to be written off amounting to Rp167,941 in 2016 and Rp497,835 in 2015 are recorded as other expenses (Note 46).

Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp27,705 in 2016 and Rp9,285 in 2015. The carrying value of such assets was nil, hence the proceeds from the sale of assets represented a gain on the sale of assets not used in operations (Note 46).

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. Properti Investasi / *Investment Properties*

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan dan PJB, entitas anak, yang terletak di Pademangan – Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, dan PT Karya Semesta Gemilang ("KSG").

This account pertains to pieces of land owned by the Company and PJB, a subsidiary, located in Pademangan – North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta and Asahan - North Sumatera with Building Use Rights ("HGB") for periods between 7 to 40 years until 2032, which are leased to PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, and PT Karya Semesta Gemilang ("KSG").

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan dan PJB melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh KJPP RHR, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

As of December 31, 2016 and 2015, the Company and PJB performs revaluation of the fair value of its investment properties which is performed by KJPP RHR, an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.325.297 dan Rp1.000.974, dan menghasilkan keuntungan revaluasi masing-masing sebesar Rp104.196 dan Rp767.841 pada tahun 2016 dan 2015.

The fair value of the investment properties as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp1,325,297 and Rp1,000,974, respectively, resulted to a gain on revaluation amounted to Rp104,196 and Rp767,841 in 2016 and 2015, respectively.

8. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *8. Investments in Associates and Joint Ventures*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2016 %	2015 %
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investment in associates*					
PT Geo Dipa Energi	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	6,67	33,00
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30,00	30,00
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2005	46,80	46,80
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49,00	49,00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	20,00	20,00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2012	10,00	10,00
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	45,00	45,00
Ventura bersama/ *Joint ventures*					
PT Unelec Indonesia	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electricity supports*	1998	32,35	32,35
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49,00	49,00
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2010	36,61	36,61
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2015	37,25	37,25
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	2015	35,00	35,00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51,00	51,00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ *Electricity controller and distribution*	2014	49,00	49,00
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	10,00	10,00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	30,00	--
PT GCL Indotenaga	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	35,00	--
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2015	35,00	--

*) Tahap pengembangan/ *Development stage*

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

Per 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2016 and 2015, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2016/ *Carrying amount January 1, 2016* Rp	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2016/ *Carrying amount December 31, 2016* Rp	
ENTITAS ASOSIASI							***ASSOCIATES***
PT Geo Dipa Energi	--	--	--	83.824	--	83.824	*PT Geo Dipa Energi*
PT Mitra Energi Batam	101.933	--	(1.500)	(2.528)	--	97.905	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	1.288.685	--	(52.816)	270.517	--	1.506.386	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	76.060	--	--	7.742	--	83.802	*PT Dalle Energy Batam*
PT Indo Pusaka Berau	101.350	--	--	10.249	--	111.599	*PT Indo Pusaka Berau*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	33.146	--	--	4.430	--	37.576	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	44.239	--	(2.231)	17.018	--	59.026	*PT Tanjung Kasam Power*
	1.645.413	--	(56.547)	391.252	--	1.980.118	
VENTURA BERSAMA							***JOINT VENTURES***
PT Unelec Indonesia	112.033	--	--	(77.330)	--	34.703	*PT Unelec Indonesia*
PT Bajradaya Sentranusa	418.423	--	(115.787)	104.176	(4.241)	402.571	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Bukit Pembangkit Innovative	777.217	--	--	51.369	(5.072)	823.514	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	61.601	--	(35.541)	25.880	--	51.940	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Rekind Daya Mamuju	20.403	4.001	--	--	--	24.404	*PT Rekind Daya Mamuju*
PT Pertadaya Gas	--	--	--	--	--	--	*PT Pertadaya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	102.347	13.447	--	(986)	--	114.808	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	37.261	--	--	(1.943)	--	35.318	*PT Crompton Power Switchgear Indonesia*
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	--	319.944	--	--	--	319.944	*PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali*
PT GCL Indotenaga	--	42.355	--	(1.713)	--	40.642	*PT GCL Indotenaga*
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	--	2.020	--	--	--	2.020	*PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali*
	1.529.285	381.767	(151.328)	99.453	(9.313)	1.849.864	
Jumlah	**3.174.698**	**381.767**	**(207.875)**	**490.705**	**(9.313)**	**3.829.982**	***Total***

	Jumlah tercatat 1 Januari 2015/ *Carrying amount January 1, 2015* Rp	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deduction)* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas pendapatan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2015/ *Carrying amount December 31, 2015* Rp	
ENTITAS ASOSIASI							***ASSOCIATES***
PT Mitra Energi Batam	101.371	--	--	562	--	101.933	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	971.814	--	(54.225)	371.096	--	1.288.685	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	71.955	--	--	4.105	--	76.060	*PT Dalle Energy Batam*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	33.097	--	--	49	--	33.146	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	28.457	--	--	15.782	--	44.239	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Indo Pusaka Berau	98.017	--	(2.327)	5.660	--	101.350	*PT Indo Pusaka Berau*
PT Geo Dipa Energi	--	--	--	--	--	--	*PT Geo Dipa Energi*
	1.304.711	--	(56.552)	397.254	--	1.645.413	
VENTURA BERSAMA							***JOINT VENTURES***
PT Unelec Indonesia	130.589	--	--	(18.556)	--	112.033	*PT Unelec Indonesia*
PT Rajamandala Electric Power	100.515	--	--	1.832	--	102.347	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Bajradaya Sentranusa	355.977	--	(69.350)	123.210	8.586	418.423	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Pertadaya Gas	--	--	--	--	--	--	*PT Pertadaya Gas*
PT Bukit Pembangkit Innovative	608.681	--	--	140.144	28.392	777.217	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	50.101	--	(35.104)	46.604	--	61.601	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	22.019	16.739	--	(1.497)	--	37.261	*PT Crompton Power Switchgear Indonesia*
PT Rekind Daya Mamuju	--	20.403	--	--	--	20.403	*PT Rekind Daya Mamuju*
	1.267.882	37.142	(104.454)	291.737	36.978	1.529.285	
Jumlah	**2.572.593**	**37.142**	**(161.006)**	**688.991**	**36.978**	**3.174.698**	***Total***

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2016 dan 2015 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associates and joint ventures as of December 31, 2016 and 2015, which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi/*Associates*

	2016					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	73.707	1.493.572	102.880	906.426	2.576.585	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	102.241	1.383.392	164.620	340.067	1.990.320	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	175.948	2.876.964	267.500	1.246.493	4.566.905	*Total of current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	14.261	618.177	1.727	157.213	791.378	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	68.210	2.362.789	425.915	275.624	3.132.538	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	82.471	2.980.966	427.642	432.837	3.923.916	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	571.333	11.284.922	2.586.670	3.692.868	18.135.793	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	319.826	8.746.836	1.525.333	1.147.900	11.739.895	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	18.636	9.163	310.928	153.177	491.904	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	338.462	8.755.999	1.836.261	1.301.077	12.231.799	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	326.348	2.424.921	590.267	3.205.447	6.546.983	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**20% - 46,80%**	**6,67% - 46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih asosiasi	97.904	1.188.211	59.026	381.049	1.726.190	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	1	318.175	--	(64.248)	253.928	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	97.905	1.506.386	59.026	316.801	1.980.118	*Total carrying value*
Pendapatan	130.419	5.094.718	407.943	1.330.497	6.963.577	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(23.781)	(3.466.817)	(83.389)	(883.456)	(4.457.443)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	(2.244)	(648.583)	--	(27.372)	(678.199)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	1.975	--	4.961	6.936	*Interest income*
Beban keuangan	(33.179)	(388.258)	(98.942)	(43.437)	(563.816)	*Interest expense*
Beban operasi	(77.239)	(15.398)	(7.725)	(167.436)	(267.798)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(186)	122.332	--	1.157.768	1.279.914	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(2.217)	(147.893)	(47.701)	(46.669)	(244.480)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(8.427)	552.076	170.186	1.324.856	2.038.691	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**20% - 46,80%**	**6,67% - 46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian laba (rugi) asosiasi tahun berjalan	(2.528)	270.517	17.018	106.245	391.252	*Share of the profit (loss) for the year of associates*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	--	--	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	--	--	--	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	1.500	52.816	2.231	--	56.547	*Dividend received from associates*

	2015					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	25.280	71.155	170.488	91.685	358.608	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	171.640	614.713	149.256	190.475	1.126.084	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	196.920	685.868	319.744	282.160	1.484.692	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	2.091	566.800	101.750	126.364	797.005	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	63.613	1.677.981	213.213	66.856	2.021.663	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	65.704	2.244.781	314.963	193.220	2.818.668	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	533.732	11.962.019	2.728.715	953.538	16.178.004	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	340.552	8.449.991	1.666.436	194.313	10.651.292	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	12.082	(198)	510.060	170.649	692.593	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	352.634	8.449.793	2.176.496	364.962	11.343.885	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	312.314	1.953.313	557.000	677.516	3.500.143	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**20% - 46,80%**	**10% - 46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih asosiasi	93.694	957.124	55.700	212.506	1.319.024	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	8.239	331.561	(11.461)	(1.950)	326.389	*Adjustment of equity method*
Jumlah tercatat	101.933	1.288.685	44.239	210.556	1.645.413	*Total carrying value*

	2015					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan	116.177	3.833.634	418.505	733.847	5.102.163	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(51.372)	--	(60.323)	(477.457)	(589.152)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(303.261)	--	(13.729)	(316.990)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	1.451	--	152	1.603	*Interest income*
Beban keuangan	(37.147)	(8.430)	(71.541)	(30.003)	(147.121)	*Interest expense*
Beban operasi	(38.619)	(2.389.378)	(77.661)	(163.159)	(2.668.817)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	13.343	(253.860)	--	404	(240.113)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(509)	(122.817)	(51.159)	(17.327)	(191.812)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	1.873	757.339	157.821	32.728	949.761	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**20% - 46,80%**	**10% - 46,80%**	***% of effective ownership***
Bagian laba (rugi) asosiasi tahun berjalan	562	371.096	15.782	9.814	397.254	*Share of the profit (loss) for the year of associates*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	--	--	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	--	--	--	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	--	54.225	--	2.327	56.552	*Dividend received from associates*

Ventura bersama/*Joint ventures*

	2016					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	14.714	380.139	160.539	417.238	972.630	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	680.162	214.200	28.998	178.601	1.101.961	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	694.876	594.339	189.537	595.839	2.074.591	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	166.396	130.046	250.735	233.759	780.936	*Trade accounts payable*
Liabilitas lancar lainnya	765.026	245.967	287.592	150.876	1.449.461	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	931.422	376.013	538.327	384.635	2.230.397	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	387.801	5.503.025	5.432.027	1.658.333	12.981.186	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	--	2.786.202	2.055.971	1.030.917	5.873.090	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	43.896	760.082	488.686	43.778	1.336.442	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	43.896	3.546.284	2.544.657	1.074.695	7.209.532	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	107.359	2.175.067	2.538.580	794.842	5.615.848	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**32,35%**	**36,61%**	**37,25%**	**10% - 51%**	**10% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	34.731	796.292	945.621	277.421	2.054.065	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	(28)	(393.721)	(122.107)	311.655	(204.201)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	34.703	402.571	823.514	589.076	1.849.864	*Total carrying value*
Pendapatan	715.054	611.731	734.398	976.749	3.037.932	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(686.296)	--	(173.517)	(825.038)	(1.684.851)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(259)	--	(8.397)	(8.656)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	26.792	4.739	13.077	44.608	*Interest income*
Beban keuangan	(33.661)	(254.229)	(121.159)	(6.191)	(415.240)	*Interest expense*
Beban operasi	(80.653)	(24.032)	(297.005)	(99.800)	(501.490)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(162.213)	5.792	(9.552)	2.546	(163.427)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	8.727	(81.239)	--	(30.579)	(103.091)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(239.042)	284.556	137.904	22.367	205.785	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**32,35%**	**36,61%**	**37,25%**	**10% - 51%**	**10% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) tahun berjalan ventura bersama	(77.330)	104.176	51.369	21.238	99.453	*Share of the profit (loss) for the year of joint ventures*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	(11.583)	(13.617)	--	(25.200)	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba (rugi) komprehensif ventura bersama	--	(4.241)	(5.072)	--	(9.313)	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	115.787	--	35.541	151.328	*Dividend received from joint ventures*

	2015					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	1.389	482.118	185.970	333.919	1.003.396	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	1.076.117	207.894	105.796	287.674	1.677.481	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	1.077.506	690.012	291.766	621.593	2.680.877	*Total current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	96.950	58.787	--	33.506	189.243	*Trade accounts payable*
Liabilitas lancar lainnya	774.612	314.299	384.436	70.093	1.543.440	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	871.562	373.086	384.436	103.599	1.732.683	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	241.149	5.710.383	5.242.750	1.557.354	12.751.636	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	--	3.006.284	2.476.395	1.387.184	6.869.863	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	158.063	760.041	315.951	1.421	1.235.476	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	158.063	3.766.325	2.792.346	1.388.605	8.105.339	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	289.030	2.260.984	2.357.734	686.743	5.594.491	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**32,35%**	**36,61%**	**37,25%**	**10% - 51%**	**10% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	93.501	827.746	878.256	242.930	2.042.433	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	18.532	(409.323)	(101.039)	(21.318)	(513.148)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	112.033	418.423	777.217	221.612	1.529.285	*Total carrying value*
Pendapatan	253.260	620.739	1.206.877	350.839	2.431.715	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(289.929)	(16.070)	(393.306)	(124.358)	(823.663)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(335)	(816)	(57.866)	(59.017)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	200	6.781	12.466	19.447	*Interest income*
Beban keuangan	(9.537)	(240.059)	(114.163)	(45.872)	(409.631)	*Interest expense*
Beban operasi	(26.632)	(74.006)	(56.166)	(59.541)	(216.345)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	15.478	163.664	(174.934)	(4.374)	(166)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	--	(117.552)	(98.047)	2.775	(212.824)	*Income tax expense*
Laba (rugi) tahun berjalan	(57.360)	336.581	376.226	74.069	729.516	*Profit (loss) for the year*
% kepemilikan efektif	**32,35%**	**36,61%**	**37,25%**	**10% - 51%**	**10% - 51%**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba (rugi) tahun berjalan ventura bersama	(18.556)	123.210	140.144	46.939	291.737	*Share of the profit (loss) for the year of joint ventures*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	23.455	76.220	--	99.675	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian atas laba (rugi) komprehensif ventura bersama	--	8.586	28.392	--	36.978	*Share of other comprehensive income (loss) of joint ventures*
Dividen yang diterima dari ventura bersama	--	69.350	--	35.104	104.454	*Dividend received from joint ventures*

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

PT Geo Dipa Energi

PT Geo Dipa Energi was established to continue the development of the Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

Pada tahun 2015 Perusahaan tidak mengakui bagian laba bersih dari PT Geo Dipa Energi sebesar Rp83.257 karena masih terdapat akumulasi kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi. Sedangkan pada tahun 2016, Perusahaan mulai mengakui bagian atas laba bersih PT Geo Dipa Energi sebesar Rp83.824.

In 2015, the Company did not recognize share of net income of PT Geo Dipa Energi amounting to Rp83,257 since the accumulated loss is higher than its investment carrying value. Whereas in 2016, the Company has started to recognize share of net income of PT Geo Dipa Energi amounting to Rp83,824.

Walaupun Perusahaan hanya memiliki 6,67% kepemilikan PT Geo Dipa Energi, Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan atas PT Geo Dipa Energi. Pengaruh yang signifikan dinilai berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan operasional PT Geo Dipa Energi dengan menetapkan *Key Performace Indicator (*KPI).

Although the Company only has 6.67% ownership in PT Geo Dipa Energi, the Company has significant influence over PT Geo Dipa Energi. The significant influence was indicated by the Company's ability to drive PT Geo Dipa Energi's operation by imposing Key Performance Indicator (KPI).

S2P
Pada tahun 2016 dan 2015, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari S2P masing-masing sebesar US$3.920.000 dan US$3.920.000 (ekuivalen Rp52.816 dan Rp54.225).

S2P
In 2016 and 2015, PJB, a subsidiary, received dividends from S2P amounting to US$3,920,000 and US$3,920,000 (equivalent to Rp52,816 and Rp54,225), respectively.

BDSN
Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan memperoleh dividen dari BDSN masing-masing sebesar US$8.786.400 dan US$5.308.450 (ekuivalen Rp115.787 dan Rp69.350).

BDSN
In 2016 and 2015, the Company received dividend from BDSN amounting to US$8,786,400 and US$5,308,450, respectively (equivalent to Rp115,787 and Rp69,350).

Komipo PJB
Pada tahun 2016 dan 2015, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari Komipo PJB masing-masing sebesar Rp35.541 dan Rp35.104.

Komipo PJB
In 2016 and 2015, PJB, a subsidiary, received dividends amounting to Rp35,541 and Rp35,104, respectively.

IPB
Pada tahun 2015, IP, entitas anak, memperoleh dividen dari IPB sebesar Rp2.327.

IPB
In 2015, IP, a subsidiary, received dividend from IPB amounting to Rp2,327.

TJK
PLN Batam, entitas anak, mempunyai pengaruh signifikan di TJK dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK. Pada tahun 2016, PLN Batam memperoleh dividen sebesar Rp2.231.

TJK
PLN Batam, a subsidiary, has significant influence over TJK by considering its representation in TJK's Directors. In 2016, PLN Batam received cash dividends amounted to Rp2,231.

MEB
Pada tahun 2016, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari MEB sebesar Rp1.500.

RDM
RE, entitas anak PJB, mempunyai pengendalian bersama atas RDM berdasarkan adanya keharusan kesepakatan bersama atas pengambilan keputusan penting. Selama tahun 2016, RE melakukan tambahan investasi sebesar Rp4.001 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

CPSI
Pada tahun 2014, PLNE, entitas anak, dan CG International Holding Singapore PTE. LTD. mendirikan CPSI untuk membuat peralatan yang digunakan untuk pendistribusian listrik. PLNE melakukan tambahan penyertaan saham sebesar US$1.200.000 atau setara dengan Rp16.739 pada tahun 2015.

SGPJB
Pada tanggal 13 Januari 2016, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada SGPJB dengan melakukan penyertaan saham sebesar US$24.000.000 (ekuivalen Rp319.944), setara dengan kepemilikan saham sebesar 30%.

GTPJB
Pada tanggal 23 September 2016, PJBI, entitas anak PJB, dan Guangdong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited mendirikan GTPJB dengan investasi awal sebesar US$150.000 (ekuivalen Rp2.020), setara dengan kepemilikan saham sebesar 30%.

PT GCL Indotenaga
Pada tanggal 25 Februari 2016, PIT, entitas anak IP, dan Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation mendirikan PT GCL Indotenaga untuk menjalankan proyek pembangkit listrik tenaga uap. PIT melakukan pembayaran investasi awal sebesar US$3.150.000 (setara dengan Rp42.355), setara dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

MEB
In 2016, PLN Batam, a subsidiary, received cash dividends from MEB amounted to Rp1,500.

RDM
RE, a subsidiary of PJB, has joint control over in RDM as there must be a unanimous consent on important decisions. During 2016, RE made additional investments amounting to Rp4,001 without percentage changes in ownership.

CPSI
In 2014, PLNE, a subsidiary, and CG International Holding Singapore PTE. LTD. established CPSI, to manufacture equipment used for electricity distribution. PLNE made additional investment amounting to US$1,200,000 or equivalent to Rp16,739 in 2015.

SGPJB
On January 13, 2016, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to SGPJB with initial investment amounted to US$24,000,000 (equivalent to Rp319,944), equivalent to 30% ownership share.

GTPJB
On September 23, 2016, PJBI, a subsidiary of PJB, and Guangdong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited established GTPJB with initial investment amounted to US$150,000 (equivalent to Rp2,020), equivalent to 30% ownership share.

PT GCL Indotenaga
On February 25, 2016, PIT, a subsidiary of IP, and Taicang Harbour Golden Concord Electric - Power Generation established PT GCL Indotenaga to implement the project coal fired power plant. PIT made initial investments amounted to US$3,150,000 (equivalent to Rp42,355), equivalent to 35% ownership share.

9. Piutang Pihak Berelasi / *9. Receivables from Related Parties*

	2016 Rp	2015 Rp	
PT Perta Daya Gas	260.085	293.369	*PT Perta Daya Gas*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	16.747	22.329	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Tanjung Kasam Power	12.465	23.935	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Dalle Energy Batam	9.632	--	*PT Dalle Energy Batam*
PT Mitra Energi Batam	683	683	*PT Mitra Energi Batam*
Jumlah	299.612	340.316	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	**36.548**	**71.669**	***Less current portion***
Bagian jangka panjang	**263.064**	**268.647**	***Long-term portion***

PT Perta Daya Gas ("PDG")
Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$18.837.112 kepada PDG untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* (CNG) di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pinjaman pokok akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo piutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar US$18.897.451 atau setara dengan Rp253.906 (2015: US$20.999.242 atau setara dengan Rp289.685). Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 piutang lainnya sebesar Rp6.719 dan Rp3.683 merupakan piutang yang antara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

PT Perta Daya Gas ("PDG")
On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to US$18,837,112 to PDG for the financing of the Compressed Natural Gas (CNG) project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become US$18,191,529 in accordance with the fund transferred up to January 9, 2014 and the tenor of the loan was revised to eight years and which due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and paid-in full on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from date June 1, 2016 until December 1, 2023. As of December 31, 2016, the outstanding principal and accrued interest of the receivables amounted to US$18,897,451, equivalent to Rp253,906 (2015: US$20,999,242, equivalent to Rp289,685). As of December 31, 2016 and 2015, other receivables from PDG amounting to Rp6,179 and Rp3,638 represent among others, interest receivables and costs of relocation of employees.

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")
Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB, entitas anak, menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Komipo PJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan Komipo PJB dana cadangan

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")
On December 29, 2010, PJB, a subsidiary, agreed to provide loans to Komipo PJB, in the form of a shareholder loan with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for Komipo PJB in order to comply with the

untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian pengembangan operasi dan pemeliharaan dengan PJB, dimana Komipo PJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Jangka waktu pinjaman tujuh tahun sejak tanggal 29 Desember 2010. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012.

contractual obligations stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with PJB, which requires Komipo PJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six-months operation and maintenance of power plant. The term of the loan is seven years starting from December 29, 2010. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012.

PT Tanjung Kasam Power, PT Mitra Energi Batam, dan PT Dalle Energy Batam
Piutang ini merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

PT Tanjung Kasam Power, PT Mitra Energi Batam, and PT Dalle Energy Batam
These receivables represent receivables on penalty of power purchase contracts.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

Managements of the Company and its subsidiaries consider these receivables from related parties to be collectible.

10. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya / *10. Restricted Cash in Banks and Time Deposits*

	2016 Rp	2015 Rp	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi			***Lease installments and operation guarantee***
Deposito berjangka			*Time deposits*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
JPY	6.797.365	8.160.752	*JPY*
US$	603.573	613.115	*US$*
Bank Bukopin - Rupiah	49.855	--	*Bank Bukopin - Rupiah*
Jaminan pembelian gas			***Guarantee deposit for gas purchases***
Rekening bank - Rupiah			*Cash in bank - Rupiah*
Bank Central Asia	--	7.880	*Bank Central Asia*
Jaminan bank garansi			***Bank guarantee***
Rekening bank - Rupiah			*Cash in banks - Rupiah*
Bank Mandiri - pihak berelasi	12.159	14.345	*Bank Mandiri - related party*
Bank Negara Indonesia - pihak berelasi	1.269	777	*Bank Negara Indonesia - related party*
Bank Woori Saudara	39	108	*Bank Woori Saudara*
Jumlah	**7.464.260**	**8.796.977**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	8,25%	0,15% - 2,00%	*Rupiah*
US$	1,03% - 1,13%	0,51% - 1,03%	*US$*
JPY	0,0001% - 0,065%	0,02%-0,11%	*JPY*
Jangka waktu	1 Tahun/ *Year*	1 Tahun/ *Year*	*Period*

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY58.900.167.541 dan US$44.922.075 pada tanggal 31 Desember 2016 dan sebesar JPY71.257.878.838 dan US$44.444.701 pada tanggal 31 Desember 2015 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA").

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY58,900,167,541 and US$44,922,075 as of December 31, 2016 and amounting to JPY71,257,878,838 and US$44,444,701 as of December 31, 2015 to fulfill the requirement of the Financial Lease Agreement ("FLA").

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:

	2016		2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rp**	**Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)***	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rp**	
JPY	58.900.167.541	6.797.365	71.257.878.838	8.160.752	*JPY*
US$	44.922.075	603.573	44.444.701	613.115	*US$*
Jumlah		**7.400.938**		**8.773.867**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

11. Aset Tidak Lancar Lain / *11. Other Non-Current Assets*

	2016 Rp	**2015 Rp**	
Biaya dibayar dimuka			*Prepaid expenses*
Pembelian gas	862.060	895.908	*Purchase of gas*
Lain-lain	505.222	541.702	*Others*
Sub jumlah	1.367.282	1.437.610	*Sub total*
Uang muka			*Advances*
Pengembangan Proyek	2.152.425	1.406.756	*Project development*
Pembelian batubara	818.232	848.825	*Purchase of coal*
Sub jumlah	2.970.657	2.255.581	*Sub total*
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Biaya legal terkait Perpanjangan hak atas tanah	57.872	50.403	*Legal costs to renew land rights*
Piranti lunak	567.522	759.566	*Software*
Sub jumlah	625.394	809.969	*Sub total*
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	967	1.687	*Investment in non-listed shares*
Jumlah	**4.964.300**	**4.504.847**	***Total***

Amortisasi aset takberwujud

Beban amortisasi aset takberwujud di tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp275.918 dan Rp213.194.

Amortization of intangible assets

Amortization of intangible assets for 2016 and 2015 amounted to Rp275,918 and Rp213,194, respectively.

12. Kas dan Setara Kas / *12. Cash and Cash Equivalents*

	2016 Rp	2015 Rp	
Kas	16.529	12.737	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	11.982.982	8.222.873	*Rupiah*
US$	1.312.360	684.829	*US$*
JPY	732	755	*JPY*
EUR	47.647	72.381	*EUR*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	9.880.319	3.747.226	*Rupiah*
US$	545.650	356.308	*US$*
EUR	11.635	89.005	*EUR*
JPY	1.942	1.057	*JPY*
Bank Negara Indonesia			*Bank Negara Indonesia*
Rupiah	9.626.030	3.315.716	*Rupiah*
US$	318.455	316.790	*US$*
CHF	6.150	6.511	*CHF*
JPY	25.234	2.192	*JPY*
EUR	39.686	108.266	*EUR*
Bank Tabungan Negara - Rupiah	1.003.076	2.898	*Bank Tabungan Negara - Rupiah*
Bank DKI			*Bank DKI*
Rupiah	721.440	905.042	*Rupiah*
US$	39.169	62.992	*US$*
JPY	878	871	*JPY*
Jumlah pihak berelasi	35.563.385	17.895.712	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	2.459.059	2.054.778	*Rupiah*
US$	152.947	117.179	*US$*
JPY	55.100	69.025	*JPY*
Bank Internasional Indonesia			*Bank Internasional Indonesia*
Rupiah	1.451	1.434	*Rupiah*
US$	510	634	*US$*
Bank Danamon - Rupiah	122.318	77.993	*Bank Danamon - Rupiah*
Bank Central Asia			*Bank Central Asia*
Rupiah	391.801	407.122	*Rupiah*
US$	23.641	49.166	*US$*
Deutsche Bank			*Deutsche Bank*
US$	--	858.246	*US$*
EUR	--	106	*EUR*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	422.864	73.771	*Rupiah*
US$	5.649	5.704	*US$*
EUR	4.398	13.896	*EUR*
Jumlah pihak ketiga	3.639.738	3.729.054	*Total third parties*
Sub Jumlah	**39.219.652**	**21.637.503**	***Sub Total***

	2016 Rp	2015 Rp	
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi - Rupiah			*Related parties - Rupiah*
Bank Rakyat Indonesia	520.298	651.986	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia	654.432	360.000	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri	452.886	237.553	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	1.627.616	1.249.539	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	914.607	557.500	*Rupiah*
JPY	57.235	--	*JPY*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	90.113	150.112	*Rupiah*
US$	--	1.685	*US$*
Jumlah pihak ketiga	1.061.955	709.297	*Total third parties*
Sub Jumlah	**2.689.571**	**1.958.836**	***Sub Total***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**41.909.223**	**23.596.339**	***Total Cash and Cash Equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	7,16% - 7,81%	4,50% - 9,50%	*Rupiah*
JPY	0,15%	--	*JPY*
US$	0,50% - 1,49%	0,73% - 0,83%	*US$*
Jangka waktu	1 Bulan/ *Month*	1 Bulan/ *Month*	*Period*

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2016		2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	178.504.121	2.398.381	177.856.702	2.453.533	*US$*
JPY	1.222.842.324	141.122	645.274.365	73.900	*JPY*
EUR	7.299.106	103.367	18.823.038	283.654	*EUR*
Lain-lain **)	457.750	6.150	472.008	6.511	*Others **)*
Jumlah		**2.649.020**		**2.817.598**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Cash and cash equivalents in other currencies are presented in US$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date*

13. Investasi Jangka Pendek / *13. Short-Term Investments*

	2016 Rp	2015 Rp	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia	367.200	50.000	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	--	66.150	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	367.200	116.150	*Total related parties*
Investasi lain-lain	7.571	3.909	*Other investments*
Jumlah investasi jangka pendek	**374.771**	**120.059**	***Total short-term investments***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	5,50% - 7,25%	6,50% - 7,25%	*Interest rate per annum on time deposits*
Jangka waktu	6 Bulan/ *Months*	6 Bulan/ *Months*	*Period*

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. Piutang Usaha / *14. Trade Receivables*

a. Berdasarkan langganan / *a. By debtor*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
Badan Usaha Milik Negara	568.123	571.894	*State-owned enterprises*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.665)	(2.806)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	565.458	569.088	*Total related parties - net*
Pihak ketiga			*Third parties*
Umum	20.444.950	18.564.360	*Public*
TNI dan Polri	603.286	430.670	*Indonesian Armed Forces*
Institusi Pemerintah lainnya	1.120.444	1.129.927	*Other Government Institutions*
Sub jumlah	22.168.680	20.124.957	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.023.177)	(859.818)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	21.145.503	19.265.139	*Total third parties - net*
Bersih	**21.710.961**	**19.834.227**	***Net***

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya / *b. By age category of receivables that are not impaired*

	2016 Rp	2015 Rp	
Belum jatuh tempo	19.806.412	17.462.474	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo			*Past due*
1 s/d 90 hari	1.120.873	1.553.524	*1 to 90 days*
91 s/d 360 hari	735.436	740.299	*91 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	1.074.082	940.554	*More than 360 days*
Jumlah	**22.736.803**	**20.696.851**	***Total***
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai			*Changes in the allowance for impairment losses*
Saldo awal tahun	(862.624)	(597.595)	*Balance at beginning of year*
Penambahan	(243.244)	(272.667)	*Additions*
Penghapusan	80.026	7.638	*Write-off*
Saldo akhir tahun	**(1.025.842)**	**(862.624)**	***Balance at end of year***

Piutang usaha Perusahaan, PLN Batam dan PLN Tarakan dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

The Company, PLN Batam and PLN Tarakan's trade receivables are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 34).

Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Provision for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are past due.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp19.806.412. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

Management believes that the allowances made for impairment losses are adequate. As of December 31, 2016, the Company's receivables balance that is neither past due nor impaired amounting to Rp19,806,412. The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of trade receivable across the years.

15. Piutang Subsidi Listrik / *15. Receivables on Electricity Subsidy*

	2016 Rp	2015 Rp	
Tahun anggaran			*Budget years*
2014	--	12.280.861	*2014*
2015	5.220.148	5.220.148	*2015*
2016	9.624.217	--	*2016*
Jumlah	**14.844.365**	**17.501.009**	***Total***

Selama tahun 2016, Perusahaan telah menerima piutang subsidi listrik tahun anggaran 2014 sebesar Rp12.280.861.

In 2016, the Company collected receivables on electricity subsidy for budget year 2014 amounting to Rp12,280,861.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Risiko kredit pada piutang subsidi listrik dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan Pemerintah Indonesia.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The credit risk on receivables on electricity subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Indonesia.

16. Piutang Lain-Lain / *16. Other Receivables*

	2016 Rp	2015 Rp	
Karyawan	373.652	354.756	*Employees*
Lain-lain	2.388.197	439.009	*Others*
Jumlah	2.761.849	793.765	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	2.411.384	481.681	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**350.465**	**312.084**	***Long-term portion***

Karyawan
Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

Employees
Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

17. Persediaan / *17. Inventories*

	2016 Rp	2015 Rp	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	6.066.737	7.165.500	*Coal, fuel and lubricants*
Persediaan umum	2.827.297	2.602.706	*General supplies*
Switchgear dan jaringan	1.701.724	1.020.159	*Switchgear and network*
Alat ukur, pembatas dan kontrol	745.438	539.591	*Meter recording device and control equipment*
Transformator	250.364	126.404	*Transformers*
Kabel	93.361	77.056	*Wire*
Jumlah	11.684.921	11.531.416	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(115.325)	(115.553)	*Allowance for decline in value*
Bersih	**11.569.596**	**11.415.863**	***Net***
Mutasi penyisihan penurunan nilai			*Changes in allowance for decline in value*
Saldo awal tahun	(115.553)	(114.611)	*Balance at beginning of year*
Pemulihan (penambahan)	228	(942)	*Recovery (additions)*
Saldo akhir tahun	**(115.325)**	**(115.553)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

18. Pajak Dibayar Dimuka / *18. Prepaid Taxes*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pajak penghasilan badan lebih bayar			*Overpayment of corporate income tax*
Perusahaan			*The Company*
2016	105.548	--	*2016*
2015	2.323.797	2.323.797	*2015*
2014	147.993	147.993	*2014*
Entitas anak			*Subsidiaries*
2016	716.827	--	*2016*
2015	126.990	126.990	*2015*
Bea materai	23.977	19.156	*Stamp duty*
Pajak pertambahan nilai	821.211	538.271	*Value added tax*
Pembayaran dimuka atas			*Prepayment of Tax Assessment*
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	2.940.187	2.109.238	*Letter for Underpayment*
Jumlah	**7.206.530**	**5.265.445**	***Total***

Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

19. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / *19. Prepaid Expenses and Advances*

	2016 Rp	2015 Rp	
Biaya dibayar dimuka			*Prepaid expenses*
Premi asuransi	79.261	182.638	*Insurance*
Sewa	119.351	155.437	*Rent*
Gaji dan tunjangan	--	5.825	*Salaries and allowances*
Sub jumlah	198.612	343.900	*Subtotal*
Uang muka			*Advances*
Pembelian barang	199.749	183.514	*Purchases*
Lain-lain	499.678	531.087	*Others*
Sub jumlah	699.427	714.601	*Subtotal*
Jumlah	**898.039**	**1.058.501**	***Total***

20. Modal Saham dan Saldo Laba / *20. Capital Stock and Retained Earnings*

Modal saham
Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Capital stock
The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp204.000.000 yang terbagi atas 204.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

As of December 31, 2016, the Company has authorized capital of Rp204,000,000 consisting of 204,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 43

Based on the Extraordinary Stockholders' General Meeting dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26,

tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain:

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp28.781.355, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp28.781.354, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp46.107.154, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved among other items as follows:

- *Convert the Company's liability to the Government amounting to Rp28,781,355, arising from overdue interest and penalty on two-step loans, into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.*
- *Increase the subscribed and paid-up capital by Rp28,781,354, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital amounting to Rp46,107,154 consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp1 per share.*

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2001.

On August 1, 2001, the additional equity participation from Government has been stated in Government Regulation No.61 year 2001.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp90.226. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp90,226. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp90.226 atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated on May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp90,226, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia came from the transfer of 21,674 shares of the government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares of the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.

Berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-82/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam akte notaris No. 12 tanggal 22 Pebruari 2016, pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Negara sebagai Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp204.000.000.
- Penambahan penyertaan modal negara sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp9.468.627 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp55.666.007.

Based on letter of State Owned Enterprises No. S-82/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, as stated in notarial deed No. 12 dated February 22, 2016, decision of State Owned Enterprises Minister as stated in the General Shareholders Meeting approved items the following:

- *Increase of authorized capital stock to Rp204,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 9,468,627 shares amounting to Rp9,468,627, increase in subscribed and paid-up capital to Rp55,666,007.*

Saldo laba

Saldo laba terdiri dari:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. RIS-53/D2.MBU/05/2015, terdapat saldo laba tahun 2014 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp7.763.965.

Berdasarkan RUPS tahun 2015 No. SKU-146/MBU/06/2016 pada tanggal 30 Juni 2016, terdapat saldo laba tahun 2015 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp13.431.547.

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp40.304.040 dan Rp26.872.493 atau 72% dan 58% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya

Berdasarkan penyajian kembali akibat penerapan PSAK 24 secara retrospektif, saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp41.222.131. Setelah penyesuaian saldo awal berkaitan dengan penerapan

Retained earnings

Retained earnings consist of:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Based on the Minutes of Shareholder's Meeting ("RUPS") No. RIS-53/D2.MBU/05/2015, there is an additional appropriated from the 2014 retained earnings amounting to Rp7,763,965.

Based on RUPS for the year 2015 No. SKU-146/MBU/06/2016 dated June 30, 2016, there is an allocation of appropriated from the 2015 retained earnings amounting to Rp13,431,547.

The balance of the appropriated retained earnings as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp40,304,040 and Rp26,872,493 or 72% and 58%, respectively, of the Company's subscribed and paid-up capital.

ii. Unappropriated retained earnings

Based on restatement caused by the effect of the retrospective application of SFAS 24, the balance of the unappropriated retained earnings as of December 31, 2015 amounted to Rp41,222,131. After beginning balance adjustment related to the implementation

POJK No.6, saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya pada 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp84.650.585.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp79.593.197.

of POJK No.6, the balance of the unappropriated retained earnings as of January 1, 2016 is amounted to Rp84,650,585.

On December 31, 2016, the balance of the unappropriated retained earnings is amounted to Rp79,593,197.

Dividen per lembar saham
Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2015 dan 2014 masing-masing sejumlah Rp2.137.752 atau Rp38.403 (nilai penuh) per lembar saham dan Rp3.962.441 atau Rp85.772 (nilai penuh) per lembar saham.

Dividends per share
In 2016 and 2015, the Company paid a total cash dividend for 2015 and 2014 amounting to Rp2,137,752 or Rp38,403 (full amount) per share and Rp3,962,441 or Rp85,772 (full amount) per share, respectively.

21. Tambahan Modal Disetor dan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham

21. Additional Paid-In Capital and Stock Subscription from Government in Issuance Process

a. Tambahan modal disetor
Tambahan modal disetor diantaranya merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Additional paid-in capital
Additional paid-in capital among others represents the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined, with the following details:

	2016 Rp	2015 Rp	
Bantuan proyek	2.117.922	16.706.712	*Project aid*
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	18.303.679	31.722.223	*The list of Project Fund*
Bantuan Pemerintah Daerah dan lainnya	1.281.038	1.278.092	*Local Government participation and others*
Jumlah	**21.702.639**	**49.707.027**	***Total***

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

The List of Project Fund represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Department of Mining and Energy.

Bantuan Pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Local Government participation represents land and electricity equipment donated by the local Government to the Company.

Jumlah aset yang didonasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dicatat sebagai penambahan aset tetap dan tambahan modal disetor sepanjang tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.596.131 dan Rp1.678.761.

Di tahun 2016, Tambahan modal disetor berasal dari partisipasi Entitas Anak dalam Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp94.504 (Catatan 47).

The total amount of assets contributed by the Government of the Republic of Indonesia that have been recognized as additions to property, plant and equipment and additional-paid-in capital in 2016 and 2015 amounted to Rp2,596,131 and Rp1,678,761, respectively.

In year 2016, Additional paid-in capital arising from the Subsidiaries' participation in Tax Amnesty is amounted to Rp94,504 (Note 47).

b. Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2015 dan No. 125 tahun 2015 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Pemerintah) sejumlah masing-masing Rp4.468.627 dan Rp5.000.000. Sejumlah Rp5.000.000 merupakan setoran tunai, sedangkan Rp4.468.627 merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

Per tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan akta notaris dari Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 tanggal 22 Pebruari 2016, akun ini telah direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2016 dan No. 17 tahun 2016 serta No. 33 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar masing-masing Rp8.860.208 dan Rp11.159.688 serta Rp10.580.623 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

Pada tangggal 30 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp23.560.000.

b. Stock subscription from Government in issuance process

On December 28, 2015, the Government of Republic of Indonesia issued Regulation No. 42 year 2015 and No. 125 year 2015 regarding additional capital stock (Government's equity participation) amounting to Rp4,468,627 and Rp5,000,000, respectively. An amount of Rp5,000,000 was in cash, whereas Rp4,468,627 was reclassified from additional paid-in capital.

As of December 31, 2016, based on notarial deed of Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 dated February 22, 2016, this account has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 16 year 2016 and No. 17 Year 2016 and No. 33 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp8,860,208, Rp11,159,688 and Rp10,580,623, respectively, which was resclassified from additional paid-in-capital.

On the December 30, 2016, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 91 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp23,560,000.

22. Pendapatan Ditangguhkan / *22. Deferred Revenue*

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company. Details of the deferred revenue are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Saldo awal tahun	1.533.703	1.306.976	*Balance at beginning of year*
Penerimaan tahun berjalan	6.665.660	6.368.062	*Additions during the year*
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(7.052.136)	(6.141.335)	*Recognized as revenue during the year*
Saldo akhir tahun	**1.147.227**	**1.533.703**	***Balance at end of year***

23. Penerusan Pinjaman / *23. Two-Step Loans*

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	2016					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 4712 dan/ and 7758 IND - 1165	57.492.186	772.465	123.763	648.702	LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread + 0,35%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.698.765	251.237	--	251.237	LIBOR + variable spread + 0,45%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	107.620.142	1.445.984	--	1.445.984	LIBOR + variable spread+ 0,45%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	30.963.783	416.029	--	416.029	IBRD + variable spread + 0,45%	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	20.376.581	273.780	--	273.780	LIBOR + variable spread + 0,45%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
US$						
ADB - 1982 INO - 1170	123.730.235	1.662.439	88.432	1.574.007	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	84.040.075	1.129.162	60.065	1.069.097	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	38.105.575	511.987	10.328	501.659	LIBOR + 0,6% - 0,4% + 0,45%	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	28.081.613	377.305	15.100	362.205	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	1.916.913	25.756	--	25.756	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	212.900	2.861	--	2.861	LIBOR + 1,40% + 0,45%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	4.327.774	61.288	15.322	45.966	0,75% + 2% dan/and 2% + 0,35% dan/ and KFW + 0,35%	1996 - 2020
KFW - 10599 IND - 1179	3.533.086	50.034	33.356	16.678	4,86% +0,35%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	1.099.231	14.769	14.769	--	4,75% + 0,35%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation/ Japan International Cooperation Agency (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
Yen						
JBIC IP 512 - 1163	44.905.296.000	5.182.291	304.841	4.877.450	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	13.704.958.000	1.581.619	93.036	1.488.583	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	48.314.210.000	5.575.696	318.611	5.257.085	1,3% + 0,35%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	503.415.000	58.097	2.113	55.984	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4.358.805.000	503.027	18.292	484.735	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC - 1187	625.717.662	72.211	28.884	43.327	2,01% + 1,99% + 0,35%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	15.014.940.000	1.732.798	60.800	1.671.998	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	632.979.588	73.049	2.563	70.486	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9.677.262.639	1.116.803	27.239	1.089.564	1,75%	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	1.071.392.269	123.644	--	123.644	1,20%	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	284.232.810	32.802	25.323	7.479	1,95%	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	13.107.907.123	1.512.717	98.444	1.414.273	1,20%	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	9.782.320.654	1.128.928	90.744	1.038.184	1,95%	2009 - 2037
JICA IP 555 - 1231	1.412.791.775	163.043	--	163.043	0,012%	2013 - 2039

2016

	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)*
JICA IP 556 - 1249	1.706.628.617	196.953	--	196.953	1,4% + 0,45%	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	146.127.599	16.864	--	16.864	0,3% + 0,45% dan/ and 0,01% +0,45%	2013 - 2053
JBIC - 1243	2.126.533.998	245.412	44.623	200.789	1,82% + 1,04% + 0,45%	2012 - 2022
JBIC - 1188	248.702.574	28.701	14.350	14.351	4,02% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC - 1192	2.778.628.705	320.667	213.778	106.889	4,47% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	3.475.011.524	401.033	121.801	279.232	4,41%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	906.041.104	104.562	54.659	49.903	3,90%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	491.491.547	56.721	18.806	37.915	3,91%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	1.524.699.100	175.958	60.673	115.285	3,74%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	2.884.580.318	332.895	84.212	248.683	3,98%	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	83.451.648	9.631	--	9.631	1,58% + 0,62% + 0,45%	2013 - 2025
JICA - IP 561- 1252	126.748.996	14.627	--	14.627	0,01% + 0,45%	2012 - 2053
Midland Bank Public Limited Company						
Rupiah						
Midland Bank - 798	--	59.745	14.936	44.809	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	4.802	1.372	3.430	SUN benchmark related to the year with tenor 20 years	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP	6.072.698	100.245	16.708	83.537	3,343%+ 0,35%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	7.869.441	111.443	34.457	76.986	Lender interest rate to Government + 0,35%	2002 - 2020
Banque Paribas - 1176	2.603.421	36.868	24.579	12.289	4,76% + 0,35%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	1.342.021	19.004	9.502	9.502	5,32% + 0,35%	2004 - 2018
BNP Paribas dan/ and Calyon 1206	17.999.931	254.906	72.830	182.076	4,81%	2006 - 2020
Kerajaan Belgia/ *Kingdom of Belgium* - EUR						
Kerajaan Belgia - 1185	1.920.300	27.194	1.600	25.594	0,35%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia -1186 EUR	156.317	2.214	2.214	--	4,82% + 0,35%	2005 - 2017
Efic Australia - AUD 1071	7.934.002	77.153	14.028	63.125	3% + 0,35%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US$	37.149.879	499.146	249.573	249.573	3% + 0,35%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - US$	65.931.229	885.852	--	885.852	3% + 0,35%	2013 - 2029
China Exim Bank 1260 -US$	67.508.912	907.050	--	907.050	3% + 0,35%	2015 - 2030
China Exim Bank 1261-US$	18.926.646	254.298	--	254.298	3% + 0,35%	2015 - 2030
MKB Hungaria 1180 - US$	940.656	12.639	8.426	4.213	4,81% + 0,35%	2005 - 2018
AFD 101901F - 1237	24.121.875	324.102	67.180	256.922	AFD + 0,47%+0,45%	2010 - 2025
AFD - 1254	26.071.951	350.303	--	350.303	LIBOR + 0,7% + 0,45%	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259	988.288	13.279	--	13.279	LIBOR + 2,05%+0,35%	2014 - 2026
Total		**31.696.088**	**2.562.332**	**29.133.756**		

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/ *Include grace periods in terms of payments*

2015

	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)						
US$						
IBRD - 4712 dan/ and 7758 IND - 1165	66.540.782	917.930	124.825	793.105	IBRD + 0,5%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.684.626	257.754	--	257.754	IBRD + 0,5%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	87.699.511	1.209.815	--	1.209.815	IBRD + 0,5%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	28.781.237	397.037	--	397.037	IBRD + 0,5%	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	3.534.667	48.761	--	48.761	LIBOR +0,5%	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)						
Rupiah						
ADB - 1032 INO - 540	--	85.751	85.751	--	ADB + 2,75%	1991 - 2016
ADB - 1092 INO - 580	--	29.863	29.863	--	ADB + 3,75%	1991 - 2016
US$						
ADB - 1982 INO - 1170	129.715.100	1.789.420	82.562	1.706.858	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	88.105.116	1.215.409	56.077	1.159.332	ADB + 0,5%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	39.022.105	538.310	7.285	531.025	ADB + 0,6% - 0,4% + 0,5%	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	24.547.135	338.628	--	338.628	ADB + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	207.285	2.860	--	2.860	LIBOR + 0,60% + 0,5%	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	22.881	316	--	316	LIBOR + 1,40% + 0,5%	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	5.409.742	81.522	16.304	65.218	0,75% - 2% dan/and KFW + 0,35%	1996 - 2020
KFW - 9024 - 1157	2.999.936	45.208	45.208	--	KFW + 0,35% dan/and OECD+ 0,35%	2002 - 2016
KFW - 10599 IND - 1179	5.888.476	88.737	35.495	53.242	4,86% +0,35%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	3.297.693	45.492	30.328	15.164	4,75% + 0,35%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)						
Yen						
JBIC IP 512 - 1163	47.546.784.000	5.445.257	302.514	5.142.743	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	14.511.132.000	1.661.875	92.326	1.569.549	1,8% + 0,35%	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	51.132.479.347	5.855.907	323.116	5.532.791	1,3% + 0,35%	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	521.721.000	59.749	2.096	57.653	0,75% + 0,35%	2004 - 2044

	2015					
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Periode/ *Period **)*
JBIC IP 517 - 1178	4.517.356.107	517.347	18.158	499.189	0,75% + 0,35%	2004 - 2044
JBIC IP 518 - 1187	876.004.726	100.324	28.664	71.660	2,01% + 1,99% + 0,35%	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	15.541.780.000	1.779.910	60.336	1.719.574	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	655.189.398	75.035	2.544	72.491	0,75% + 0,35%	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9.677.262.639	1.108.281	--	1.108.281	0,0175	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	1.051.576.175	120.431	--	120.431	0,012	2006 - 2047
JBIC IP 537 - 1220	284.232.810	32.552	--	32.552	0,0195	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	10.875.225.119	1.245.476	--	1.245.476	0,012	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	8.747.820.071	1.001.837	--	1.001.837	1,95%	2009 - 2037
JBIC IP 555 - 1231	1.412.791.775	161.799	--	161.799	0,012%	2013 - 2039
JBIC IP 556 - 1249	995.491.632	114.008	--	114.008	1,4% + 0,45%	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	138.158.006	15.822	--	15.822	0,3% + 0,45% dan/and 0,01% +0,45%	2013 - 2053
JBIC IP - 1243	2.590.537.998	296.680	53.140	243.540	1,82% + 1,04% + 0,45%	2012 - 2022
JBIC IP - 1188	373.053.863	42.723	14.241	28.482	2,01% + 2,01% dan/and 4,02% + 0,35%	2005 - 2018
JBIC IP - 1192	4.631.047.835	530.367	212.147	318.220	1,96% + 2,51% dan/and 4,47% + 0,5%	2005 - 2018
JBIC LA No 1 - 1216	4.530.437.524	518.845	120.872	397.973	4,41%	2008 - 2020
JBIC LA No 2 - 1219	1.379.665.104	158.005	54.241	103.764	3,90%	2008 - 2018
JBIC LA No 3 - 1233	654.447.547	74.950	18.662	56.288	3,91%	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	2.050.441.100	234.825	60.210	174.615	3,74%	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	3.614.286.318	413.923	83.569	330.354	3,98%	2008 - 2020
Midland Bank Public Limited Company						
Midland Bank - 798	--	74.682	14.936	59.746	SUN seri Benchmark tenor 20 years	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	6.173	1.372	4.801	SUN seri Benchmark tenor 20 years	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP	7.084.795	144.892	20.699	124.193	3,343%+ 0,35%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	10.473.374	157.829	39.240	118.589	7,89% + 0,35%	2002 - 2018
Banque Paribas - 1176	4.339.034	65.388	26.155	39.233	4,76% + 0,35%	2004 - 2018
Calyon and BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	2.013.031	30.336	10.112	20.224	5,32% + 0,35%	2004 - 2018
BNP Paribas dan/ and Calyon 1206	23.142.769	348.753	77.501	271.252	4,81%	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR						
Kerajaan Belgia - 1185	2.033.260	30.640	1.702	28.938	0,35%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia -1186 EUR	468.952	7.067	4.711	2.356	4,82% + 0,35%	2005 - 2017
Efic Australia - AUD 1071	9.376.548	94.367	14.518	79.849	3% + 0,35%	1997 - 2022
China Exim Bank 1181 - US$	55.724.819	768.724	256.241	512.483	3% + 0,35%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248 - US$	44.212.212	609.907	--	609.907	3% + 0,35%	2013 - 2033
MKB Hungaria 1180 - US$	1.567.760	21.627	8.651	12.976	4,81% + 0,35%	2005 - 2018
AG Francaise 101901F - 1237	29.121.875	401.736	68.975	332.761	AFD + 0,47%+0,45%	2010 - 2025
AFD - 1254	21.001.907	289.721	--	289.721	AFD + 0,7%+0,45%	2013 - 2028
Total		**31.710.583**	**2.505.347**	**29.205.236**		

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/ *Include grace periods in terms of payments*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2016		2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	753.977.435	10.130.441	641.786.711	8.853.447	*US$*
JPY	179.894.874.250	20.760.750	188.308.922.095	21.565.928	*JPY*
EUR	39.752.290	562.954	56.768.573	855.480	*EUR*
Lain-lain **)	13.203.171	177.396	17.343.893	239.259	*Others **)*
Jumlah		**31.631.541**		**31.514.114**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

24. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank / *24. Government and Non-Bank Government Financial Institution Loans*

	2016 Rp	2015 Rp	
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	1.061.727	1.294.602	*Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001*
PT Sarana Multi Infrastruktur	7.239.876	7.193.884	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
Jumlah	8.301.603	8.488.486	*Total*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.043.793	293.793	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**7.257.810**	**8.194.693**	***Long-term portion***

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001 / *Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pokok pinjaman	1.175.171	1.468.963	*Principal*
Perbedaan nilai wajar	(113.444)	(174.361)	*Fair value difference*
Jumlah	**1.061.727**	**1.294.602**	***Total***

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001 Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun, tanpa jaminan, dan dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

As stated on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001, on June 20, 2001 the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp5,288,268 to become 20 years period matured on July 30, 2021. The loan bears interest at 4% per annum, unsecured, and paid-in semi-annual installments of Rp146,896.

PT Sarana Multi Infrastruktur / *PT Sarana Multi Infrastruktur*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pokok pinjaman	7.500.000	7.500.000	*Principal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(24.854)	(32.477)	*Unamortized transaction cost*
Perbedaan nilai wajar	(235.270)	(273.639)	*Fair value difference*
Jumlah	**7.239.876**	**7.193.884**	***Total***

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000, dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000, with an annual interest rate of 5.25% with 15 years term.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") has signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company is required to maintain a ratio of EBITDA with interest expense at a minimum of 1.5 : 1. The Company has complied with the covenants in the borrowing agreement.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government and non-bank Government Financial Institution Loans by installment schedules at nominal amount, are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Dibayarkan:			*Payable:*
Dalam satu tahun	1.043.793	293.793	*Within one year*
Pada tahun kedua	1.043.793	1.043.793	*In the second year*
Pada tahun ketiga	1.043.793	1.043.793	*In the third year*
Pada tahun keempat	1.043.793	1.043.793	*In the fourth year*
Pada tahun kelima dan setelahnya	4.499.999	5.543.791	*In the fifth year and thereafter*
Jumlah	**8.675.171**	**8.968.963**	***Total***

25. Utang Sewa Pembiayaan / *25. Lease Liabilities*

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C dan D.

This account represents the Company's payable to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C and D 4x660MW power plants.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA"), Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

In relation to the CJP Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. To fulfill the requirements of Financial Lease Agreement ("FLA"), the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

Pada tahun 2015, akun ini termasuk utang kepada IPP terkait PPA dan ESC yang ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016, PPA dan ESC yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan tersebut diperlakukan sebagai transaksi jual beli (Catatan 2.a).

In 2015, this account included amounts payable to certain IPPs in relation to PPAs and ESCs which were determined as containing a lease in accordance with ISFAS 8 and classified as finance leases. As a result of the prospective application of POJK No.6 since January 1, 2016, PPAs and ESCs which have been previously classified as finance lease are now treated as sale and purchase transactions (Note 2.a).

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2016 and 2015 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2016 Rp	2015 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu :			*Minimum lease payments due :*
Tidak lebih dari satu tahun	5.888.441	31.340.649	*Not later than one year*
Antara satu tahun sampai lima tahun	19.487.113	116.763.634	*Between one year to five years*
Lebih dari lima tahun	5.432.835	355.390.174	*More than five years*
Jumlah pembayaran sewa minimum	30.808.389	503.494.457	*Total minimum lease payments*
Dikurangi porsi beban bunga	9.085.997	347.113.556	*Less interest expense portion*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	21.722.392	156.380.901	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.789.317	6.759.138	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**17.933.075**	**149.621.763**	***Long-term portion***
Tingkat bunga:			*Interest rate:*
CJP	7.60% - 11,00%	5.04% - 24.65%	*CJP*

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan CJP pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.273.840 dan Rp25.740.278. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen masing-masing sebesar Rp460.467 dan Rp1.352.521 untuk tahun 2016 dan 2015.

Interest expense and financial charges related to finance leases to CJP in 2016 and 2015 amounted to Rp4,273,840 and Rp25,740,278, respectively. This interest expenses and financial charge include contingent rent amounting to Rp460,467 and Rp1,352,521 for 2016 and 2015, respectively.

26. Utang Bank / *26. Bank Loans*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Negara Indonesia	4.128.291	5.071.199	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	3.006.321	3.513.394	*Bank DKI*
Bank Rakyat Indonesia	2.395.588	3.250.011	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	1.461.198	2.107.554	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**10.991.398**	**13.942.158**	***Total related parties***

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
The Export-Import Bank of China	13.833.659	15.998.937	*The Export-Import Bank of China*
Bank of China Limited	9.357.193	11.446.352	*Bank of China Limited*
Barclays Bank PLC dan China Development Bank	8.770.729	10.320.351	*Barclays Bank PLC and China Development Bank*
Bank Bukopin	1.536.029	1.845.283	*Bank Bukopin*
Bank Mega	1.448.325	2.224.463	*Bank Mega*
Bank Central Asia	666.234	963.855	*Bank Central Asia*
Jumlah pihak ketiga	**35.612.169**	**42.799.241**	***Total third parties***
Sub jumlah	**46.603.567**	**56.741.399**	***Subtotal***
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Rakyat Indonesia	34.785.714	13.999.808	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia	18.500.000	6.500.000	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri	10.773.072	5.250.000	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**64.058.786**	**25.749.808**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank Central Asia	7.000.000	7.000.000	*Bank Central Asia*
Export Development Canada dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company	5.314.121	--	*Export Development Canada and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company*
Asian Development Bank	2.821.560	--	*Asian Development Bank*
Standard Chartered Bank	2.019.798	1.377.702	*Standard Chartered Bank*
Japan Bank for Internasional Cooperation	63.828	--	*Japan Bank for International Cooperation*
Jumlah pihak ketiga	**17.219.307**	**8.377.702**	***Total third parties***
Sub jumlah	**81.278.093**	**34.127.510**	***Subtotal***
Jumlah	**127.881.660**	**90.868.909**	***Total***
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.124.382)	(1.287.581)	*Unamortized transaction cost*
Jumlah bersih	**126.757.278**	**89.581.328**	***Total net***
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			***Less current maturities within one year***
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Negara Indonesia	996.810	996.810	*Bank Negara Indonesia*
Bank Rakyat Indonesia	854.422	854.422	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank DKI	676.000	676.000	*Bank DKI*
Bank Mandiri	646.356	646.356	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**3.173.588**	**3.173.588**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank of China Limited	1.791.280	1.839.142	*Bank of China Limited*
The Export-Import Bank of China	1.748.925	1.795.655	*The Export-Import Bank of China*
Barclays Bank PLC dan China Development Bank	1.281.046	1.315.274	*Barclays Bank PLC and China Development Bank*
Bank Mega	776.138	776.138	*Bank Mega*
Bank Bukopin	309.253	309.253	*Bank Bukopin*
Bank Central Asia	297.621	297.621	*Bank Central Asia*
Jumlah pihak ketiga	**6.204.263**	**6.333.083**	***Total third parties***
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun program percepatan	9.377.851	9.506.671	*Total current portion fast track program*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Rakyat Indonesia	14.714.286	1.214.286	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	875.000	875.000	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**15.589.286**	**2.089.286**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank Central Asia	1.000.000	--	*Bank Central Asia*
Export Development Canada dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company	244.025	--	*Export Development Canada and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company*
Standard Chartered Bank	183.618	156.501	*Standard Chartered Bank*
Jumlah pihak ketiga	**1.427.643**	**156.501**	***Total third parties***
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun tidak terkait program percepatan	17.016.929	2.245.787	*Total current portion not related to fast track program*
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**26.394.780**	**11.752.458**	***Current maturities portion***
Bagian jangka panjang	**100.362.498**	**77.828.870**	***Long-term portion***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016 and 2015, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016		31 Desember/*December* 31, 2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *equivalent* Rp	
US$	2.989.065.968	40.161.092	2.737.632.476	37.765.640	*US$*
EUR	142.625.503	2.019.798	91.422.114	1.377.702	*EUR*
Jumlah		**42.180.890**		**39.143.342**	***Total***

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

Pinjaman terkait program percepatan
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Loans related to fast track program
The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction (EPC) contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, which superseded PP No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2016, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*		Pembayaran kembali/ *Repayment*		Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium*	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
		US$*)	Rp	2016 Rp	2015 Rp		US$*)	
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	592	--	728.811	734.816	0,785% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	55	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*
2	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	331	--	325.886	312.493	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	32	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	2.741.298	391.614	391.614	0,825% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	23 Juli 2018/ *July 23, 2018*
4	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	--	317.969	304.901	0,84% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	27	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
5	Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	262	--	345.511	359.425	3,25% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*
6	Bank DKI/ PLTU Nagan Raya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah	--	4.732.000	676.000	676.000	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	24 April 2019/ *April 24, 2019*
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	--	2.074.739	193.903	193.903	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	--	1.911.480	273.069	273.069	1,11% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	23 Maret 2018/ *March 23, 2018*
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	--	1.874.315	257.663	257.663	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	--	1.606.612	178.512	178.512	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	--	1.498.513	195.418	195.418	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	29 Jull 2018/ *July 29, 2018*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2016 Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	--	1.272.913	164.422	164.422	1,10% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*
13	Bank Mega/ PLTU Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	--	1.240.661	115.154	115.154	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	1.077.578	151.086	151.086	1,12% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
15	Pinjaman sindikasi dikordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	--	1.151.005	164.429	164.429	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
16	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	--	1.045.924	130.741	130.741	0,71% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	--	735.387	122.303	122.303	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
18	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	--	600.635	85.600	85.600	1,10% + JIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
19	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482	--	630.323	310.789	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	44	12 Februari 2025/ *February 12, 2025*
	PLTU NAD	124	--	145.215	139.247	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	12	14 Januari 2025/ *January 14, 2025*
20	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga, Banten	455	--	567.013	574.835	2,30% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	46	4 Mei 2022/ *May 4, 2022*
21	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar Awar	--	1.155.352	165.050	165.050	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
22	The Export-Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	--	340.011	326.037	2,8% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	30	2 Juli 2025/ *July 2, 2025*
23	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara	--	3.941.772	346.543	346.543	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	34	14 Oktober 2019/ *October 14, 2019*
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ Transmisi/*Transmission*	--	2.613.012	373.287	373.287	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ Transmisi/*Transmission*	--	327.195	46.742	46.742	1,5% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$*)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2016 Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2015 Rp	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance Premium* US$*)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
26	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	--	747.024	763.421	3,85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
27	China Development Bank/ PLTU Sumbar	138	--	164.450	167.551	3,85% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
28	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar Awar	372	--	476.333	483.295	2,30% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	14 Desember 2022/ *December 14, 2022*
29	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	--	1.930.063	275.723	275.723	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/*and* PLTU Kalimantan Barat	--	1.080.598	99.793	99.793	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/*Transmission*	--	1.067.684	149.547	150.292	1,05% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	--	2.225.000	--	--	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	12 November 2025/ *November 12, 2025*
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur	--	2.449.963	--	--	1,20% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	17 Desember 2025/ *December 17, 2025*
	Jumlah/*Total*	**3.958**	**40.353.699**	**9.345.145**	**9.034.154**		**280**	

*) Dalam jutaan

*) *In million*

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perusahaan 2011
Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000, dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi +3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.375.000 dan Rp5.250.000. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp875.000.

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

Corporate Loan 2011
On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp7,000,000, with annual interest based on weighted average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +3.42% and maturity date on October 23, 2021. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance amounted to Rp4,375,000 and Rp5,250,000, respectively. The principal loan repayment for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp875,000, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2016
Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri, dengan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan +1,92% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp6.398.072. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Corporate Loan 2016
On December 19, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by Bank Mandiri, with annual interest rate based on three months JIBOR +1.92% per annum. This credit facility will mature on December 19, 2026. As of December 31, 2016, the outstanding balance amounted to Rp6,398,072. There is no loan repayment during 2016.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Kredit Modal Kerja 2011
Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan +1,65% dan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 dengan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,02% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 dengan tingkat suku bunga berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,45% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000. Jumlah pembayaran kembali pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp28.123.417.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Working Capital Loan 2011
In June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by BRI amounting to Rp15,000,000, with annual interest based on three months JIBOR +1.65% and maturity date on June 21, 2012. This loan facility has been amended several times. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp9,000,000 with annual interest based on average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +2.02% and maturity date was extended to June 21, 2016. Amendment during 2016 was first occurred on June 21, 2016 with changes on the amount of credit facility to become Rp15,000,000 with annual interest based on average of the three months Rupiah time deposit of syndicated creditors +2.45% and maturity date was extended until June 21, 2017. Futher amendment was occurred on September 9, 2016 where the credit facility was amended to Rp20,000,000. The latest amendment was on November 17, 2016 where the credit facility was amended to Rp28,000,000. The principal repayment for the years ended December, 31 2016 and 2015 were amounted to Rp21,000,000 and Rp28,123,417, respectively.

Arus kas penarikan dan pembayaran kredit serta saldo pinjaman modal kerja 2011 BRI untuk tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Cash flows withdrawal and payment and net payables amount on of the BRI working capital loan 2011 for years 2016 and 2015 are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Penarikan	34.500.000	28.123.417	*Withdrawal*
Pembayaran	(21.000.000)	(28.123.417)	*Payment*
Bersih	**13.500.000**	**--**	***Net***

Pinjaman Perusahaan 2012
Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000 dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 November 2022. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terutang atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp7.285.714 dan Rp8.500.000. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.214.286 dan nihil.

Corporate Loan 2012
On December 21, 2012, the Company obtained investment credit facility from BRI amounting to Rp8,500,000, with annual interest rate of average three months time deposit +3.2%, which is due every three months. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding loan balance amounted to Rp7,285,714 and Rp8,500,000, respectively. The principal repayment for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp1,214,286 and nil, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2014
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga per tahun menggunakan rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan BRI +2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terutang atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016 dan 2015.

Corporate Loan 2014
On December 17, 2014, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp2,000,000, with annual interest rate based on BRI's average three months time deposit +2.75% and will mature on December 17, 2024. As of December 31, 2016 and 2015 the outstanding balance amounted to Rp2,000,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2016 and 2015.

Pinjaman Perusahaan 2015
Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 dengan tingkat suku bunga per tahun menggunakan suku bunga Bank Indonesia +2,3% pada tanggal tiga hari sebelum jangka waktu bunga. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terhutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp12.000.000 dan Rp3.499.807. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016 dan 2015.

Corporate Loan 2015
On December 17, 2015, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp12,000,000, with the annual interest rate based on Bank Indonesia's rate +2.3% on three days before interest period. The maturity date of the principal is on December 17, 2025. As of December 31, 2016 and 2015 the outstanding balance amounted to Rp12,000,000 and Rp3,499,807, respectively. There is no principal loan repayment during 2016 and 2015.

Bank Negara Indonesia ("BNI")

Pinjaman Perusahaan 2014
Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 yang dikoordinasikan oleh BNI, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +3% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp6.500.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016 dan 2015.

Pinjaman Perusahaan 2016
Pada tanggal 9 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh BNI, dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan +2,6% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp12.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Bank Central Asia ("BCA")
Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000, dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan +2,4% yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terhutang atas pinjaman ini adalah masing-masing sebesar Rp7.000.000. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016 dan 2015.

Standard Chartered Bank ("SCB")

Fasilitas Arun
Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun sebesar EUR90.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir

Bank Negara Indonesia ("BNI")

Corporate Loan 2014
On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp6,500,000 coordinated by BNI, with annual interest rate based on weighted average of three months time deposit +3% per annum. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance amounted to Rp6,500,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2016 and 2015.

Corporate Loan 2016
On September 9, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by BNI, with annual interest rate based on weighted average of three months time deposit +2.6% per annum. This credit facility will mature on September 9, 2026. As of December 31, 2016, the outstanding balance was amounting to Rp12,000,000. There is no principal loan repayment during 2016.

Bank Central Asia ("BCA")
On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp7,000,000, with annual interest rate based on three months JIBOR +2.4% and maturity date on December 23, 2023. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of this facility amounted to Rp7,000,000, respectively. There is no principal loan repayment during 2016 and 2015.

Standard Chartered Bank ("SCB")

Arun Facility
On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant ("PLTMG") amounting to EUR90,000,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31,

pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah terutang atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.100.071 dan Rp569.924. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp107.830 dan nihil.

2016 and 2015, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,100,071 and Rp569,924 respectively. The principal loan repayment in 2016 and 2015 amounted to Rp107,830 and nil, respectively.

Fasilitas Bangkanai
Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000 dengan tingkat suku bunga yang digunakan untuk pinjaman tersebut sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Jumlah terutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp919.727 dan Rp807.778. Jumlah pembayaran pokok pinjaman di tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp87.292 dan nihil.

Bangkanai Facility
On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai solar and steam Power Plant amounting to EUR70,850,000 with interest rate of 2.1% per annum. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of this facility amounted to Rp919,727 and Rp807,778, respectively. The principal loan repayment in 2016 and 2015 amounted to Rp87,292 and nil, respectively.

Asian Development Bank ("ADB")
Pada tanggal 4 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatera sebesar US$575.000.000 dan US$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 September 2035 dan tingkat bunga masing-masing sebesar LIBOR + 0,6% - 0,1% dan LIBOR + 1,4% yang dibayar setiap semester.

Asian Development Bank ("ADB")
On December 4, 2015, the Company obtained credit facilities from ADB for grid strengthening of Sumatera amounted to US$575,000,000 and US$25,000,000 with maturity date until September 15, 2035 and interest rate of LIBOR + 0.6% - 0.1% and LIBOR + 1.4%, respectively, payable semiannually.

Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar US$210.000.000 (setara Rp2.821.560).

As of December 31, 2016 the outstanding balance of this facility amounted to US$210,000,000 (equivalent to Rp2,821,560).

Export Development Canada ("EDC") dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")
Pada tanggal 2 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pendanaan untuk *Batam mobile power plant* sebesar US$435.888.247 dengan tingkat bunga 2,56% akan dibayar setiap semester dan jatuh tempo 2 Juni 2029. Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terhutang atas pinjaman ini sebesar US$395.513.638 (setara Rp5.314.121).

Export Development Canada ("EDC") and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")
On December, 2 2016, the Company obtained credit facility for Batam mobile power plant amounting to US$435,888,247 with interest rate of 2.56% payable semiannually and maturity date on June 2, 2029. As of December 31, 2016 the outstanding balance of this facility amounted to US$395,513,638 (equivalent to Rp5,314,121).

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Lontar sebesar US$107.595.235 dan US$71.730.158 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,85%+1,06% dan LIBOR 6 bulanan + 1.1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar US$4.750.638 (setara Rp63.828).

Beberapa perjanjian utang bank dengan ADB, SCB, dan EDC dan HEXIM mensyaratkan bahwa Perusahaan wajib memenuhi beberapa pembatasan tertentu, antara lain, jumlah minimal *self financing, debt sevice coverage ratio,* rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas serta *consolidated interest coverage ratio.*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")

On March 14, 2016, the Company obtained a credit facility to finance the construction of Lontar Steam Power Plant ("PLTU") amounting to US$107,595,235 and US$71,730,158 with interest rate of 2,85%+1,06% and 6 months LIBOR + 1.1% per annum. This credit facility will mature on October 1, 2031. As of December 31, 2016 the outstanding balance of this facility amounted to US$4,750,638 (equivalent to Rp63,828).

Several loan agreements with ADB, SCB, and EDC and HEXIM governed that, the Company should comply to certain covenants, among others, the minimum amount of self financing, debt services coverage ratio, debt to equity ratio, and consolidated interest coverage ratio.

The Company made payments of principle and interest of the bank loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the bank loans.

27. Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah / *27. Bonds Payable and Sukuk Ijara*

	2016 Rp	2015 Rp	
Obligasi dan Sukuk Ijarah - Rupiah			*Bonds and Sukuk Ijara- Rupiah*
Obligasi Berkelanjutan			*Sustainable Bonds I*
I PLN Tahap II Tahun 2013	1.244.000	1.244.000	*PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan			*Sustainable Sukuk Ijara I*
I PLN Tahap II Tahun 2013	429.000	429.000	*PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan			*Sustainable Bonds I*
I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000	879.000	*PLN I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan			*Sustainable Sukuk Ijara I*
I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	121.000	*PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1.855.000	1.855.000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340.000	340.000	*Sukuk Ijara PLN V Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	2.703.000	2.703.000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	297.000	297.000	*Sukuk Ijara PLN IV Year 2010*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	2.700.000	2.700.000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	300.000	*Sukuk Ijara PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865.000	2.200.100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Obligasi Syariah Ijarah			*Sharia Ijara*
PLN I Tahun 2006	--	200.000	*PLN I Bonds Year 2006*

	2016 Rp	2015 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$			*Global Medium Term Notes - US$*
Penerbitan tahun 2012	13.436.000	13.795.000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	13.436.000	13.795.000	*Issued in 2011*
Obligasi Terjamin - US$			*Guaranteed Notes - US$*
Penerbitan tahun 2009	26.872.000	27.590.000	*Issued in 2009*
Penerbitan tahun 2007	13.436.000	13.795.000	*Issued in 2007*
Penerbitan tahun 2006	--	7.587.250	*Issued in 2006*
Sub jumlah	78.913.000	89.830.350	*Subtotal*
Biaya emisi belum diamortisasi	(520.317)	(664.662)	*Unamortized debt issuance cost*
Jumlah	**78.392.683**	**89.165.688**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			*Presented in consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	9.568.000	9.122.350	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	68.824.683	80.043.338	*Non-current liabilites*
Jumlah	**78.392.683**	**89.165.688**	***Total***

Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Rupiah Bonds and Sukuk Ijara

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ *Principal* Rp	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat kupon/ *Coupon rate* %	
Obligasi Berkelanjutan I				*Sustainable Bonds I*
PLN Tahap II Tahun 2013				*PLN II Year 2013*
Seri A	593.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	9,00%	*Series A*
Seri B	651.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	9,60%	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				*Sustainable Sukuk Ijara I*
PLN Tahap II Tahun 2013				*PLN II Year 2013*
Seri A	321.000	10 Desember 2018/*December 10, 2018*	--	*Series A*
Seri B	108.000	10 Desember 2023/*December 10, 2023*	--	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan I				*Sustainable Bonds I*
PLN Tahap I Tahun 2013				*PLN I Year 2013*
Seri A	182.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	8,00%	*Series A*
Seri B	697.000	5 Juli 2023/*July 5, 2023*	8,25%	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I				*Sustainable Sukuk Ijara I*
PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	5 Juli 2020/*July 5, 2020*	--	*PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010				*PLN XII Bonds Year 2010*
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	10,40%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010				*Sukuk Ijara PLN V Year 2010*
Seri B	340.000	8 Juli 2022/*July 8, 2022*	--	*Series B*
Obligasi PLN XI Tahun 2010				*PLN XI Bonds Year 2010*
Seri A	920.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	11,95%	*Series A*
Seri B	1.783.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	12,55%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010				*Sukuk Ijara PLN IV Year 2010*
Seri A	130.000	12 Januari 2017/*January 12, 2017*	--	*Series A*
Seri B	167.000	12 Januari 2020/*January 12, 2020*	--	*Series B*
Obligasi PLN IX Tahun 2007				*PLN IX Bonds Year 2007*
Seri A	1.500.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	10,40%	*Series A*
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022/*July 10, 2022*	10,90%	*Series B*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	10 Juli 2017/*July 10, 2017*	--	*Sukuk Ijara PLN II Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006				*PLN VIII Bonds Year 2006*
Seri B	865.000	21 Juni 2021/*June 21, 2021*	13,75%	*Series B*
Jumlah/*Total*	**11.733.000**			

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp1,244,000 consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap II tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Sukuk Ijara I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara I PLN II Year 2013, with a nominal value amounting to Rp429,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp28,890 for Series A Bonds and Rp10,368 for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sustainable Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp879,000 consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN tahap I tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013

Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013 with a nominal value amounting to Rp121,000 with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp9,680 is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi PLN XII tahun 2010
Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

PLN XII Bonds Year 2010
On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,500,000 consisting of Series A and Series B bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp645,000 has been fully repaid in 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Seri A senilai Rp160.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sukuk Ijara PLN V Year 2010
Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijara PLN V Year 2010 with a nominal value amounting to Rp500,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp15,520 for Series A and Rp35,360 for Series B payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the sukuk ijara. Series A bonds amounting to Rp160,000 has been fully repaid in 2015.

Obligasi PLN XI Tahun 2010
Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

PLN XI Bonds Year 2010
On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,703,000, consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Sukuk Ijara PLN IV Year 2010
Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijara PLN IV Year 2010 with a nominal value amounting to Rp297,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp15,535 for Series A and Rp20,958 for Series B payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the sukuk ijara.

Obligasi PLN IX Tahun 2007
Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp300.000 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp31.200 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006
Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi seri A senilai Rp1.335.100 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.

- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

PLN IX Bonds Year 2007
On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value amounting to Rp2,700,000 consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijara PLN II Year 2007
Concurrent with the issuance of PLN IX Bonds Year 2007, the Company also issued Sukuk Ijara PLN II Year 2007 with a nominal value amounting to Rp300,000 with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp31,200 is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the sukuk ijara.

PLN VIII Bonds Year 2006
On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value amounting to Rp2,200,100 with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp1,335,100 has been fully repaid in 2016.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) in accordance with the Minutes of Meeting of the Bond holders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.

In relation to the issuance of all Rupiah bonds and sukuk ijara bonds above, each trustee agreement stipulates, among others that:

- *After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.*

- *The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.*

- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang menyebabkan Perusahaan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada entitas anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

  Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1, untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII tahun 2006 dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman, pinjaman langsung, obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007.

- *The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) grant a loan to another party; (d) perform any merger, consolidation or acquisition that would cause the Company to be dissolved; (e) transfer the Company's property, plant and equipment, or allow subsidiaries to grant a loan to another party or to make an investment; (f) issue higher ranking bonds; and (g) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.*

  The Company is also required to maintain the following: (a) a ratio of total financial liabilities to total assets not exceeding 80%; (b) except for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara IV Year 2010, the ratio of earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) to interest expense at a minimum of 2 : 1, for PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara IV Year 2010, the minimum ratio is 1.5 : 1 ; (c) a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest-bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans and Government and non-bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 150% for PLN VIII Bonds Year 2006 and a ratio of power plant, transmission and distribution facilities to interest bearing liabilities which are not secured by specific collaterals (excluding two-step loans, direct loans, global bonds and Government and non-bank Government Financial Institution Loans) at a minimum of 125% for the PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara PLN IV Year 2010 and PLN IX Bonds Year 2007 and Sukuk Ijara PLN II Year 2007.

- Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007, Perusahaan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit listrik tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perusahaan juga menerima kuasa dari Wali Amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait.

- *Related to Sukuk Ijara PLN II Year 2007, the Company has agreed to transfer benefits obtained from certain diesel power plants and transformers of the Company to the bondholders and the bondholders have agreed to provide the Company with a power of attorney to enter into agreements with transformer users for the benefits of the bondholders. The Company also received a power of attorney from the Trustee to enter into agreements with the transformer users to collect the related receivables.*

- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

- *The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.*

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

The proceeds from the issuance of Sustainable Bonds I PLN II Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijara I PLN II Year 2013, Sustainable Bonds I PLN I Year 2013 and Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013, PLN XII Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution construction projects.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijara.

	31 Desember/ *December 31,* 2016	
	Peringkat/ *Rating*	**Lembaga pemeringkat/ *Rating agency***
Obligasi/ *Bonds*		
PLN VIII Tahun/ *Year* 2006	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IX Tahun/ *Year* 2007	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XI Tahun/ *Year* 2010	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun/ *Year* 2010	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013/ *Sustainable Bonds PLN I Year 2013*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013/ *Sustainable Bonds PLN II Year 2013*	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah/ *Sukuk Ijara*		
PLN II Tahun/ *Year* 2007	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IV Tahun/ *Year* 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun/ *Year* 2010	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013/ *Sustainable Sukuk Ijara PLN I Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013/ *Sustainable Sukuk Ijara PLN II Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$
Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin adalah sebagai berikut:

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes – US$
The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ *Principal* US$	Harga penerbitan/ *Issuing price*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate* %	
Surat Utang Jangka Menengah Global					*Global Medium Term Notes*
Penerbitan tahun 2012					*Issued in 2012*
Jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,51%	24 Oktober 2042/ *October 24, 2042*	5,25%	*Due in 2042*
Penerbitan tahun 2011					*Issued in 2011*
Jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,05%	22 November 2021/ *November 22, 2021*	5,50%	*Due in 2021*
Obligasi Terjamin					*Guaranteed Notes*
Penerbitan tahun 2009					*Issued in 2009*
Jatuh tempo 2020	1.250.000.000	99,15%	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	7,75%	*Due in 2020*
Jatuh tempo 2019	750.000.000	99,15%	7 Agustus 2019/ *August 7, 2019*	8,00%	*Due in 2019*
Sub-jumlah	2.000.000.000				*Sub total*
Penerbitan tahun 2007					*Issued in 2007*
Jatuh tempo 2017	500.000.000	99,13%	28 Juni 2017/ *June 28, 2017*	7,25%	*Due in 2017*
Jatuh tempo 2037	500.000.000	98,59%	29 Juni 2037/ *June 29, 2037*	7,87%	*Due in 2037*
Sub-jumlah	1.000.000.000				*Sub total*
Jumlah	**5.000.000.000**				***Total***

Surat Utang Jangka Menengah Global
Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Global Medium Term Notes
On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Pada tanggal 22 November 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009
Pada tanggal 6 November 2009, Majapahit Holding B.V. ("MH"), Belanda, entitas anak, menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Penerbitan tahun 2007
Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

Guaranteed Notes

Issued in 2009
On November 6, 2009, Majapahit Holding B.V. ("MH"), Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary, issued Guaranteed Notes amounting to US$1,250,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$750,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

Issued in 2007
On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$1,000,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until the maturity date of the Guaranteed Notes.

The Indenture stipulates that:

- *No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of the Republic of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in which a rating declines (Change of Control Triggering Event), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting the taxes of the Netherlands or Indonesia.*

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian", yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

- *Certain covenants, including, among others, the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception", that after giving effect to the permitted indebtedness is at least 2 : 1; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.*

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

	Lembaga pemeringkat/ *Rating agency*		
	Moody's Investor Service, Inc.,	**Standard and Poor's**	**Fitch**
Surat Utang Jangka Menengah Global/ *Global Medium Term Notes*			
Penerbitan tahun 2012/ *Issued in 2012*	Baa3	BB	BBB-
Penerbitan tahun 2011/ *Issued in 2011*	Baa3	BB	BBB-
Obligasi Terjamin/ *Guaranteed Notes*			
Penerbitan tahun 2009/ *Issued in 2009*	Baa3	BB	BBB-
Penerbitan tahun 2007/ *Issued in 2007*	Baa3	BB	BBB-

28. Utang Listrik Swasta / *28. Electricity Purchase Payable*

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016, utang listrik swasta kepada PT Jawa Power dari transaksi yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan sebagai utang sewa pembiayaan, dicatat sebagai utang listrik swasta (Catatan 2.a).

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with IPP.

As the result of the prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016, electricity purchase payable to PT Jawa Power arising from transactions which were previously determined as containing a lease in accordance with ISFAS 8 and have been classified as lease liabilities, are recorded as electricity purchase payable (Note 2.a).

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. Berdasarkan pemasok / ***a. By creditor***

	2016 Rp	2015 Rp	
PT Paiton Energy (2016: US$ 514.079.190; 2015: US$ 536.746.497)	6.907.168	7.404.476	*PT Paiton Energy (2016: US$ 514,079,190 2015: US$ 536,746,497)*
PT Jawa Power (2016: US$ 54.847.946; 2015: nihil)	736.937	--	*PT Jawa Power (2016: US$ 54,847,946; 2015: nil)*
Jumlah	7.644.105	7.404.476	*Total*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	328.683	311.196	*Less current maturities portion*
Bagian jangka panjang	**7.315.422**	**7.093.280**	***Long-term portion***

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok, pada nilai nominal / ***b. By installment schedule, at nominal amount***

	2016 Rp	2015 Rp	
Dibayarkan:			*Payable:*
Dalam satu tahun	328.683	311.196	*Within one year*
Pada tahun kedua	347.075	328.079	*In the second year*
Pada tahun ketiga	365.941	344.219	*In the third year*
Pada tahun keempat	386.096	361.153	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	6.216.310	6.059.829	*After five years*
Jumlah	**7.644.105**	**7.404.476**	***Total***

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively, and are payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

29. Utang Pihak Berelasi / *29. Payable to Related Parties*

	2016 Rp	2015 Rp	
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	2.301	370	*PT Dalle Energy Batam ("DEB")*
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	--	2.196	*PT Mitra Energi Batam ("MEB")*
Jumlah	**2.301**	**2.566**	***Total***

Utang kepada DEB dan MEB merupakan utang oleh PLN Batam, entitas anak, masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan utang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

Payable to DEB and MEB are payable by PLN Batam, a subsidiary, for purchases of switchyard and historical subscription of shares that have not been fully paid by PLN Batam.

30. Utang Usaha / *30. Trade Payables*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	6.984.764	8.075.208	*Purchases of fuel, goods and services*
Pembelian tenaga listrik	787.929	835.230	*Purchases of electricity*
Sub jumlah	7.772.693	8.910.438	*Sub total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	17.119.615	16.197.581	*Purchases of fuel, goods and services*
Pembelian tenaga listrik	5.299.776	1.517.982	*Purchases of electricity*
Sub jumlah	22.419.391	17.715.563	*Sub total*
Jumlah	**30.192.084**	**26.626.001**	***Total***

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

	2016		2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	416.862.980	5.600.971	333.184.447	4.596.279	*US$*
EUR	10.972.386	155.386	1.747.171	26.329	*EUR*
JPY	31.991.723	3.692	--	--	*JPY*
Lain-lain **)	5.081.646	68.277	--	--	*Others**)*
Jumlah		**5.828.326**		**4.622.608**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Trade payables in other currencies are presented in US$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date*

Pada tahun 2015, akun ini termasuk utang kepada IPP terkait PPA dan ESC yang ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016, utang usaha kepada IPP tertentu dari transaksi yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dicatat sebagai utang usaha (Catatan 2.a).

In 2015, this account included amounts payable to certain IPPs in relation to PPAs and ESCs which were determined as containing a lease in accordance with ISFAS 8 and classified as finance leases. As the prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016, trade payables to certain IPPs arising from transactions which were previously determined as containing a lease and have been classified as finance lease in accordance to ISFAS 8, are recorded as trade payables (Note 2.a).

31. Utang Lain-Lain / *31. Other Payables*

	2016 Rp	2015 Rp	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			*Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress*
Rupiah	8.760.185	10.524.018	*Rupiah*
US$	5.628.507	6.578.206	*US$*
EUR	671.898	--	*EUR*
CHF	110.033	318.503	*CHF*
JPY	--	103.071	*JPY*
Pungutan pajak dan lain-lain kepada Pemerintah Daerah	1.692.528	1.720.213	*Witholding tax and others to Local Government*
Uang muka penjualan tenaga listrik	663.880	542.772	*Advances received on sale of electricity*
Karyawan	41.485	24.671	*Employees*
Lain-lain	660.119	444.832	*Others*
Jumlah	18.228.635	20.256.286	*Total*
Dikurangi bagian jangka panjang	155.781	67.678	*Less long-term portion*
Bagian jangka pendek	**18.072.854**	**20.188.608**	***Current portion***

Pungutan pajak dan lain-lain kepada Pemerintah Daerah
Utang kepada pemerintah daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada pemerintah daerah.

Withholding tax and others to Local Government
The payable to local Government represents the amount collected by the Company from the customer for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik
Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity
This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Karyawan
Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees
Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

32. Utang Pajak / *32. Taxes Payable*

	2016 Rp	2015 Rp	
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	50.416	51.194	*Article 21*
Pasal 22	65.721	37.114	*Article 22*
Pasal 23	60.912	44.388	*Article 23*
Pasal 15, 25 dan 26	481.069	525.764	*Article 15, 25 and 26*
Pajak pertambahan nilai	594.298	388.708	*Value added tax*
Bea materai	13.523	10.871	*Stamp duty*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	--	4.172.004	*Tax on revaluation increment on property, plant and equipment*
Sub jumlah	1.265.939	5.230.043	*Sub total*

	2016 Rp	2015 Rp	
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan badan	126.858	136.711	*Corporate income tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	60.981	50.893	*Article 21*
Pasal 22	16.723	23.710	*Article 22*
Pasal 23	32.897	18.671	*Article 23*
Pasal 15, 25 dan 26	84.383	126.740	*Article 15, 25 and 26*
Pajak pertambahan nilai	363.147	143.649	*Value added tax*
Pajak bumi dan bangunan	18	2.585	*Land and building taxes*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	--	9.398.855	*Tax on revaluation increment on property, plant and equipment*
Sub jumlah	685.007	9.901.814	*Sub total*
Jumlah	**1.950.946**	**15.131.857**	***Total***

33. Biaya Masih Harus Dibayar / *33. Accrued Expenses*

Pada tahun 2015, akun ini termasuk bunga yang masih harus dibayar kepada IPP terkait PPA dan ESC yang ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016, PPA dan ESC yang telah diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan tersebut diperlakukan sebagai transaksi jual beli (Catatan 2.a).

In 2015, this account represents accrued interest expenses to certain IPPs in relation to PPAs and ESCs which were determined as containing a lease in accordance with ISFAS 8 and have been classified as finance leases. As a result of the implementation of POJK No.6 since January 1, 2016, PPAs and ESCs which have been previously classified as finance lease are treated as sale and purchase transactions (Note 2.a).

	2016 Rp	2015 Rp	
Bunga dan beban keuangan			*Interest and financing charges*
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang bank	447.596	361.470	*Bank loans*
Utang penerusan pinjaman	235.460	219.259	*Two-step loans*
Utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank	119.640	114.460	*Government and non bank government financial institution loans*
Utang usaha atas pembelian BBM	19.713	18.572	*Trade accounts payable on purchases of fuel*
Jumlah pihak berelasi	822.409	713.761	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.338.615	1.501.038	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang bank	394.765	400.030	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan	341.403	2.873.340	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	39.027	54.795	*Electricity purchase payable*
Jumlah pihak ketiga	2.113.810	4.829.203	*Total third parties*
Sub jumlah	2.936.219	5.542.964	*Subtotal*
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek			*Employee benefit obligation-Short term*
Bonus dan insentif prestasi kerja	6.159.817	4.582.633	*Bonus and performance incentives*
Biaya operasional	1.548.523	501.458	*Operational charges*
Jumlah	**10.644.559**	**10.627.055**	***Total***

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2016		2015		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	113.279.119	1.522.018	279.346.037	3.853.579	*US$*
JPY	4.198.343.675	484.509	4.930.820.534	564.698	*JPY*
EUR	1.136.639	16.097	1.015.374	15.301	*EUR*
Lain-lain **)	138.506	1.861	172.667	2.382	*Others **)*
Jumlah		**2.024.485**		**4.435.960**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) *In full amount*
**) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.*

34. Uang Jaminan Langganan / *34. Customers' Security Deposits*

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents security deposits from customers determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

35. Utang Biaya Proyek / *35. Project Cost Payable*

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

This account represents payable to contractors arising from construction of property and equipment and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account gwhen the Company receives the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

36. Penjualan Tenaga Listrik / *36. Sale of Electricity*

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

Sale of electricity by customers is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
Badan Usaha Milik Negara	5.125.587	5.428.312	*State-Owned Enterprises*
Pihak ketiga			***Third parties***
Umum	199.054.085	194.460.159	*Public*
Lembaga dan Kementerian	10.077.117	10.080.266	*Institutions and Ministries*
TNI dan Polri	1.118.787	1.100.897	*Indonesian Armed Forces*
Jumlah pihak ketiga	210.249.989	205.641.322	*Total of third parties*
Jumlah	**215.375.576**	**211.069.634**	***Total***
Masa uji coba	(1.235.742)	(1.225.093)	***Comissioning test***
Jumlah penjualan bersih	**214.139.834**	**209.844.541**	***Total sales - net***

Testing dan masa uji coba (*commissioning test*) merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa masa uji coba dikapitalisasi ke Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) konstruksi dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi.

Testing and commissioning (commissioning test) are series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going to be operated. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into construction in progress because the electrical installation has not been commercially operated.

Penjualan tenaga listrik tahun 2016 dan 2015 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

Sale of electricity for the years 2016 and 2015 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government as follows:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2015.
- Peraturan Walikota Batam No. 40 Tahun 2012, tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 38 Tahun 2015 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
- Peraturan Walikota Tarakan No. 17 Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, tentang pemberlakuan penyesuaian tarif listrik berkala.

- *Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 31 Year 2014, regarding the Tariff of Electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, which has been amended by Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 9 Year 2015.*
- *Regulation of the Mayor of Batam No. 40 Year 2012, regarding the tariff of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 38 Year 2015, regarding the tariff of electricity provided by PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.*
- *Regulation of the Mayor of Tarakan No. 17 Year 2014 dated August 17, 2014, regarding the enforcement of adjusted periodical tariff of electricity.*

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.

37. Subsidi Listrik Pemerintah

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

37. Government's Electricity Subsidy

Subsidy revenue represent the revenue from the Government of Indonesia for difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of ESDM Regulation No. 09 Year 2015 regarding changes on the Minister of ESDM Regulation No. 31 Year 2014 regarding electricity tariff provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2016 dan 2015 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 November 2013. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of electricity subsidy for Budget Year 2016 and 2015 areg1 using the Minister of Finance Regulation No. 170/PMK.02/2013 dated November 28, 2013. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") revisi tanggal 30 Desember 2016 No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2016, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan 2015 ditetapkan sebesar Rp63.098.157 dan Rp73.149.237, termasuk 7% marjin diatas BPP tenaga listrik.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") revised dated December 30, 2016 No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2016, the electricity subsidy plafond for budget year 2016 and 2015 were amounted to Rp63,098,157 and Rp73,149,237, respectively, which includes 7% margin above the costs of electricity supplies.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalized based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

Pada tanggal 30 Maret 2017 dan 10 Maret 2016, Perusahaan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp60.441.520 dan Rp56.552.532.
Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

On March 30, 2017 and March 10, 2016, the Company agreed with the result of audit of 2016 and 2015 electricity subsidy computation amounting to Rp60,441,520 and Rp56,552,532, respectively.
The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan			*Realization of subsidy from current year budget*
Penerimaan tunai	37.287.383	51.332.384	*Cash received*
Offset dengan pajak revaluasi	13.529.920	--	*Offset with tax revaluation*
Piutang subsidi listrik	9.624.217	5.220.148	*Subsidy receivable*
Jumlah	**60.441.520**	**56.552.532**	***Total***

38. Pendapatan Usaha Lain-Lain / *38. Other Revenues*

	2016 Rp	2015 Rp	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	816.278	798.435	*Telecommunication network and service*
Sewa transformator	312.725	270.255	*Transformer rental*
Perubahan daya tersambung dan administrasi	25.284	1.272	*Upgrading of electricity power and administration fees*
Jasa-jasa dan lainnya	475.699	291.152	*Services and others*
Jumlah	**1.629.986**	**1.361.114**	***Total***

39. Beban Bahan Bakar dan Pelumas / *39. Fuel and Lubricants Expense*

	2016 Rp	2015 Rp	
Bahan Bakar Minyak			*Fuel*
Solar High Speed Diesel	19.191.437	30.425.933	*Solar High Speed Diesel*
Residu	3.570.435	4.778.955	*Residue*
Solar Industrial Diesel	4.315	14.362	*Solar Industrial Diesel*
Lainnya	1.291.002	948.078	*Others*
Sub jumlah	24.057.189	36.167.328	*Subtotal*
Bahan Bakar - Non Minyak			*Nonfuel*
Gas alam	51.079.829	45.078.428	*Natural gas*
Batubara	30.901.389	51.668.400	*Coal*
Panas bumi	2.834.209	4.899.408	*Geothermal*
Air	322.631	308.724	*Water*
Sub jumlah	85.138.058	101.954.960	*Subtotal*
Minyak pelumas	297.136	286.027	*Lubricants*
Jumlah	**109.492.383**	**138.408.315**	***Total***

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp22.581.839 dan Rp45.924.873 di tahun 2016 dan 2015 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi) (Catatan 51).

Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) which amounted to Rp22,581,839 and Rp45,924,873 in 2016 and 2015, respectively (Note 51).

Sebelum 1 Januari 2016, komponen operasional dalam transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dicatat sebagai beban bahan bakar dan pelumas. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016 (Catatan 2.a), komponen operasional tersebut dicatat sebagai beban pembelian tenaga listrik (Catatan 40).

Prior to January 1, 2016, operations component in transactions based on PPAs and ESCs with IPPs which were previously determined as containing a lease in accordance with ISAK 8 are recorded as fuel and lubricants expense. As a result of the prospective application of POJK No.6 since January 1, 2016 (Note 2.a), such operations components are recorded as purchased electricity expense (Note 40).

40. Beban Pembelian Tenaga Listrik / *40. Purchased Electricity Expenses*

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account includes purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak Berelasi			*Related parties*
PT Sumber Segara Primadaya	3.281.618	--	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Pertamina Geothermal Energy	916.737	--	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Bajradaya Sentranusa	775.713	--	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Geo Dipa Energi	589.986	--	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam	545.847	--	*PT Dalle Energy Batam*
PT Bukit Pembangkit Innovative	444.259	--	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
Sub Jumlah	6.554.160	--	*Sub Total*
Pihak Ketiga			*Third parties*
PT Paiton Energy	11.912.764	--	*PT Paiton Energy*
PT Jawa Power	6.925.687	--	*PT Jawa Power*
PT Cirebon Electric Power	3.555.402	--	*PT Cirebon Electric Power*
PT Cikarang Listrindo	1.986.615	2.232.310	*PT Cikarang Listrindo*
PT Indonesia Asahan Alumunium Kuala Tanjung	213.121	338.166	*PT Indonesia Asahan Alumunium Kuala Tanjung*
PT Makmur Sejahtera Wisesa	196.165	270.900	*PT Makmur Sejahtera Wisesa*
Sub Jumlah	24.789.754	2.841.376	*Sub Total*
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah)	28.385.476	1.579.483	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah	**59.729.390**	**4.420.859**	***Total***

Transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8, sejak 1 Januari 2016, dicatat sebagai beban pembelian tenaga listrik (Catatan 2.a).

Transactions based on PPAs and ESCs with IPPs which were previously determined as containing a lease in accordance with ISAK 8, since January 1, 2016, is recorded as purchased electricity expense (Note 2.a).

41. Beban Sewa / *41. Lease Expenses*

Akun ini sebagian besar merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi.

This account mostly pertains to the rental of diesel engines and gensets determined as operating leases.

42. Beban Pemeliharaan / *42. Maintenance Expenses*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Jasa borongan	14.439.884	16.123.358	*Contractor fees*
Pemakaian material	6.786.852	5.737.952	*Spare parts used*
Jumlah	**21.226.736**	**21.861.310**	***Total***

Sebelum 1 Januari 2016, komponen pemeliharaan dalam transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dicatat sebagai beban pemeliharaan. Sebagai dampak diterapkannya POJK No.6 secara prospektif mulai 1 Januari 2016 (Catatan 2.a), komponen pemeliharaan tersebut dicatat sebagai beban pembelian tenaga listrik (Catatan 40).

Prior to January 1, 2016, maintenance component in transactions based on PPAs and ESCs with IPPs which were previously determined as containing a lease in accordance with ISAK 8 are recorded as maintenance expense. As a result of the prospective application of POJK No.6 since January 1, 2016 (Note 2.a), such maintenance components are recorded as purchased electricity expense (Note 40).

43. Beban Kepegawaian / *43. Personnel Expenses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	7.001.682	5.763.554	*Bonus and performance incentives*
Imbalan kerja (Catatan 49)	4.968.131	5.335.698	*Employee benefits (Note 49)*
Gaji	4.262.154	4.075.165	*Salaries*
Tunjangan	2.708.988	2.121.034	*Allowances*
Lain-lain	3.719.010	3.025.686	*Others*
Jumlah	**22.659.965**	**20.321.137**	***Total***

44. Beban Usaha Lain-Lain / *44. Other Operating Expenses*

	2016 Rp	2015 Rp	
Baca meter	1.084.739	914.309	*Meter reading*
Honorarium	751.655	683.611	*Honorarium*
Perjalanan dinas	725.198	598.783	*Travel*
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	686.023	681.254	*Billing collection and orderliness of electricity used*
Pengelolaan pelanggan	666.112	672.357	*Customer maintenance*
Teknologi informasi	536.176	527.592	*Technological information*
Listrik, gas dan air	298.176	285.952	*Electricity, gas, and water*
Asuransi	--	607.718	*Insurance*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200.000)	2.535.985	2.118.501	*Others (each below Rp200,000)*
Jumlah	**7.284.064**	**7.090.077**	***Total***

45. Beban Keuangan / *45. Financial Cost*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang bank	3.774.489	2.803.534	*Bank loans*
Penerusan pinjaman	633.599	564.820	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah	558.962	569.073	*Government loans*
Utang usaha atas pembelian BBM	--	17.133	*Trade payables on fuel*
Utang Sewa Pembiayaan	--	3.065.008	*Lease liabilities*
Instrumen derivatif	105.215	--	*Derivative instruments*
Jumlah pihak berelasi	5.072.265	7.019.568	*Total related parties*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang sewa pembiayaan	4.273.840	23.127.774	*Lease liabilities*
Utang obligasi	6.487.714	7.321.872	*Bonds payable*
Utang bank	2.289.708	1.898.864	*Bank loans*
Utang listrik swasta	471.406	510.678	*Electricity purchase payable*
Lain-lain	108.343	98.472	*Others*
Jumlah pihak ketiga	13.631.011	32.957.660	*Total third parties*
Jumlah	**18.703.276**	**39.977.228**	***Total***

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak mencatat beban keuangan yang terjadi dalam transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP yang sebelumnya ditentukan mengandung sewa menurut ISAK 8 dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sejak 1 Januari 2016, seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai beban pembelian tenaga listrik (Catatan 2.a).

Prior to January 1, 2016, the Company and its subsidiaries recorded finance costs incurred for transactions based on PPAs and ESCs with IPPs which were previously determined as containing a lease in accordance with ISAK 8 and classified as financial lease. Since January 1, 2016, all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as purchased electricity expense (Note 2.a).

46. Penghasilan Lain-Lain - Bersih / *46. Other Income - Net*

	2016 Rp	2015 Rp	
Penghasilan denda administrasi	1.848.808	1.533.497	*Administrative penalty income*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	490.705	688.991	*Equity in net income of associates and joint ventures*
Penghasilan jasa dan klaim	44.988	102.212	*Claim and service income*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	27.705	9.285	*Gain on sale of assets not used in operations*
Beban penelitian	(27.417)	(39.676)	*Research expenses*
Program pemberdayaan lingkungan	(81.079)	(159.883)	*Community development programs*
Kerugian penurunan nilai aset tidak digunakan dalam operasi	(167.941)	(497.835)	*Loss on impairment of asset not used in operations*
Lain-lain	(1.043.403)	800.475	*Others*
Jumlah	**1.092.366**	**2.437.066**	***Total***

47. Pajak Penghasilan / *47. Income Tax*

(Beban) manfaat pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax (expense) benefits of the Company and its subsidiaries consist of the following:

	2016 Rp	2015 Rp	
Beban pajak kini	(263.510)	(1.356.581)	*Current tax*
(Beban) manfaat Pajak tangguhan	(5.164.333)	23.296.523	*Deferred tax benefits (expenses)*
Jumlah beban pajak	**(5.427.843)**	**21.939.942**	***Total tax expenses***

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Laba (Rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	15.976.481	(15.913.435)	*Income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Rugi (laba) sebelum pajak entitas anak	(9.698.078)	(5.276.282)	*Loss (income) before tax attributable to subsidiaries*
Laba sebelum pajak - Perusahaan	6.278.403	(21.189.717)	*Income before tax - the Company*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Sewa pembiayaan	(1.875.414)	13.587.788	*Lease expenses*
Penyambungan pelanggan	(331.315)	341.981	*Customer connection fees*
Penyusutan aset tetap	(50.666.325)	(9.160.736)	*Depreciation*
Imbalan kerja	1.337.285	2.177.263	*Employee benefits*
Perbedaan temporer dikarenakan revisi surat DJP	969.193	--	*Temporary difference from DJP revised letter*
Amortisasi biaya emisi obligasi	--	9.692	*Amortization of bonds issuance cost*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Nondeductible expenses (nontaxable income):*
Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan	210.544	264.197	*Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories*
Kesejahteraan karyawan	809.141	988.223	*Employee welfare*
Penyusutan rumah dinas	5.267	5.267	*Depreciation of guest house*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(307.309)	(379.408)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	2.883.839	4.285.656	*Other nondeductible expenses*
Laba kena pajak Perusahaan tahun berjalan	(40.686.691)	(9.069.794)	*The Company's taxable income for the year*
Laba (rugi) fiskal tahun :			*Fiscal gain (losses) year :*
2015	--	--	*2015*
2014	--	5.799.917	*2014*
2013	--	(18.459.547)	*2013*
Akumulasi rugi fiskal - Perusahaan	**(40.686.691)**	**(21.729.424)**	***Accumulated fiscal losses - the Company***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed with the Tax Office.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Sehingga per 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp16.027.248.

The fiscal loss can be compensated against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is probable future taxable profits will be available to be utilized accumulated fiscal losses. Therefore as of December 31, 2016, the Company and its subsidiaries' recognized deferred tax assets from accumulated fiscal losses amounted to Rp16,027,248.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	263.510	1.356.582	*Subsidiaries*
Jumlah	**263.510**	**1.356.582**	***Total***
Pembayaran pajak dimuka			*Prepayment of taxes*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 22	82.817	228.651	*Article 22*
Pasal 23	22.731	25.111	*Article 23*
Pasal 25	--	2.070.035	*Article 25*
Jumlah	105.548	2.323.797	*Total*
Entitas anak	853.478	1.346.861	*Subsidiaries*
Jumlah	**959.026**	**3.670.658**	***Total***
Lebih bayar pajak kini - bersih	(695.516)	(2.314.076)	*Current tax prepayment - net*
Terdiri dari			*Consist of*
Utang pajak kini			*Current tax payable*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	126.858	136.711	*Subsidiaries*
Jumlah hutang pajak kini	126.858	136.711	*Total current tax payable*
Pajak penghasilan lebih bayar			*Income tax overpayment*
Perusahaan	(105.548)	(2.323.797)	*The Company*
Entitas anak	(716.827)	(126.990)	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	(822.375)	(2.450.787)	*Total income tax overpayment*

b. Pajak Tangguhan / *b. Deferred Tax*

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2016 Rp	Penyesuaian penerapan/ *Application adjustment* POJK No.6 *) Rp	1 Januari/ *January 1,* 2016 setelah penyesuaian/ *after adjustment* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the period* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2016 Rp	
Aset Pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	--	--	--	16.007.239	--	16.007.239	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	10.032.919	--	10.032.919	416.974	689.733	11.139.626	*Employment benefits obligations*
Pendapatan ditangguhkan	382.635	--	382.635	(95.371)	--	287.264	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	13.721.427	(14.787.770)	(1.066.343)	(468.854)	--	(1.535.197)	*Leases*
Aset tetap	4.815.402	--	4.815.402	(21.266.717)	--	(16.451.315)	*Property, plant and equipment*
Perbedaan sementara karena surat revisi DJP	--	--	--	242.298	--	242.298	*Temporary difference due to revision of DJP*
Bonus	130.298	--	130.298	73.160	--	203.458	*Bonus*
Persediaan	1.560	--	1.560	6.983	--	8.543	*Inventories*
Piutang usaha	10.684	--	10.684	(6.525)	--	4.159	*Trade receivables*
Laba dari entitas asosiasi	(8.836)	--	(8.836)	(14.755)	--	(23.591)	*Income from associates*
Biaya ditangguhkan	2.182	--	2.182	(2.663)	--	(481)	*Deferred charges*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**29.088.271**	**(14.787.770)**	**14.300.501**	**(5.108.231)**	**689.733**	**9.882.003**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	703	--	703	19.306	--	20.009	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	791	--	791	8.882	1.852	11.525	*Employment benefits obligations*
Pendapatan ditangguhkan	--	--	--	10.689	--	10.689	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	--	--	--	(2.070)	--	(2.070)	*Leases*
Aset tetap	(6.670)	--	(6.670)	(79.096)	--	(85.766)	*Property, plant and equipment*
Piutang Usaha	--	--	--	6.932	--	6.932	*Trade receivables*
Laba dari entitas asosiasi	--	--	--	(20.753)	--	(20.753)	*Income from associates*
Amortisasi biaya emisi obligasi	(299)	--	(299)	8	--	(291)	*Amortization of bonds issuance cost*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(5.475)**	**--**	**(5.475)**	**(56.102)**	**1.852**	**(59.725)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
				(5.164.333)	**691.585**		

*) Lihat Catatan 2.a

*) *See Note 2.a*

	1 Januari/ *January 1, 2015* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to income for the year* Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke pendapatan komprehensif lain/ *Credited (charged) to other comprehensive income* Rp	*Reklasifikasi/ Reclassification* Rp	31 Desember/ *December 31, 2015* Rp	
Aset Pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	3.164.908	(3.164.908)	--	--	--	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	10.105.669	(1.213.736)	(1.905)	1.142.891	10.032.919	*Employment benefits obligations*
Pendapatan ditangguhkan	284.597	85.495	--	12.543	382.635	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	10.182.711	3.402.151	--	136.565	13.721.427	*Leases*
Aset tetap	(17.051.368)	20.987.253	--	879.517	4.815.402	*Property, plant and equipment*
Bonus	--	--	--	130.298	130.298	*Bonus*
Persediaan	103	(14)	--	1.471	1.560	*Inventories*
Piutang usaha	4.784	(625)	--	6.525	10.684	*Trade receivables*
Laba dari entitas asosiasi	--	--	--	(8.836)	(8.836)	*Income from associates*
Biaya ditangguhkan	--	2.182	--	--	2.182	*Deferred charges*
Amortisasi biaya emisi oblitasi	(2.423)	2.423	--	--	--	*Amortization of bonds issuance cost*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**6.688.981**	**20.100.221**	**(1.905)**	**2.300.974**	**29.088.271**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	783.395	(782.692)	--	--	703	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	54.035	2.617.893	(1.528.246)	(1.142.891)	791	*Employment benefits obligations*
Pendapatan ditangguhkan	4.633	7.910	--	(12.543)	--	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	127.941	8.624	--	(136.565)	--	*Leases*
Aset tetap	(4.725.756)	1.218.365	4.380.238	(879.517)	(6.670)	*Property, plant and equipment*
Bonus	--	130.298	--	(130.298)	--	*Bonus*
Persediaan	1.471	--	--	(1.471)	--	*Inventories*
Piutang Usaha	6.626	(101)	--	(6.525)	--	*Trade receivables*
Laba dari entitas asosiasi	(4.871)	(3.965)	--	8.836	--	*Income from associates*
Amortisasi biaya emisi obligasi	(269)	(30)	--	--	(299)	*Amortization of bonds issuance cost*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(3.752.795)**	**3.196.302**	**2.851.992**	**(2.300.974)**	**(5.475)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
		23.296.523	**2.850.087**			

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2016 Rp	**2015** Rp	
Aset pajak tangguhan			***Deferred tax assets***
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan:			*Deferred tax assets to be recovered:*
setelah 12 bulan	13.216.944	27.027.183	*after 12 months*
dalam 12 bulan	(3.334.941)	2.061.088	*within 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan			***Deferred tax liabilities***
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan:			*Deferred tax liabilities to be recovered:*
setelah 12 bulan	--	--	*after 12 months*
dalam 12 bulan	(59.725)	(5.475)	*within 12 months*

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat) beban pajak dan hasil perkalianlaba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax (benefit) expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit (loss) before tax is as follows:

	2016 Rp	**2015** Rp	
Laba/ (rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	15.976.481	(15.913.435)	*Consolidated profit/ (loss) before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	3.994.120	(3.978.359)	*Tax calculated at applicable tax rate*

	2016 Rp	2015 Rp	
Pengaruh pajak atas:			*Tax effect on:*
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan yang dibalik	--	(19.055.369)	*Reversal of deferred tax assets/ (liabilities)*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Non-deductible expenses (non-taxable income)*
Kesejahteraan karyawan	309.115	314.429	*Employee welfare*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(191.555)	(197.205)	*Share in net income of associates and joint venture*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(179.275)	(94.853)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	1.495.438	1.071.415	*Other non-deductible expenses*
(Manfaat) beban pajak penghasilan konsolidasian	**5.427.843**	**(21.939.942)**	***Consolidated income tax (benefit) expense***

c. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pada bulan November 2016, Perusahaan telah menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas berbagai Pajak Penghasilan ("PPh") tahun 2013 sebesar Rp3.319.660, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp690.012 pemindahbukuan dari PPh 25/29 badan tahun 2016 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Perusahaan masih mengajukan banding dan telah mengajukan keberatan ke DJP atas ketetapan tersebut (Catatan 57).

Pada bulan April 2016, Perusahaan menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2014 sebesar Rp140.937 dan menetapkan laba fiskal sebesar Rp902.140. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp140.937, dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada bulan Juni 2016 dan sedang menunggu keputusan keberatan.

Pada bulan April 2016, Perusahaan juga menerima beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masa 2014 sebesar Rp13.910. Seluruh STP tersebut telah dibayar oleh Perusahaan dibulan Agustus 2016, namun Perusahaan sedang dalam upaya mengajukan permohonan gugatan dan penghapusan sanksi ke Pengadilan Pajak.

Pada bulan Maret 2016, Perusahaan menerima STP atas PPh pasal 25 masa Januari 2016 sebesar Rp3.450 dan Perusahaan telah melakukan permohonan pembatalan atas STP tersebut.

c. Tax Assessment Letters

The Company

In November 2016, the Company received several tax assessment letters for underpayment ("SKPKB") for various income tax ("PPh") for 2013 fiscal year amounting to Rp3,319,660. The Company has partially paid Rp690,012 offsetted from PPh25/29 fiscal year 2016 recorded as prepaid tax. The Company has filed an objection on the assessment letter and made an appeal to DJP (Note 57).

In April 2016, the Company received a tax SKPKB for 2014 PPh fiscal year 2014 amounting to Rp140,937 and determined the taxable income of Rp902,140. The Company has paid Rp140,937, recorded as prepaid tax. The Company had submitted the objection letter for SKPKB in June 2016 and still awaiting for the objection decision letter.

In April 2016, the Company also received a tax collection letters ("STP") for Value Added Tax ("VAT") fiscal year 2014 amounting to Rp13,910. The Company had paid all the STP in August 2016, however, the Company is in their effort to submit an appeal and request for the removal of sanctions to the Tax Court.

In March 2016, the Company also received STP for PPh article 25 for January 2016 amounting to Rp3,450. The Company had appeal for cancellation of the STP.

Pada bulan April 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp2.011.024 dan menetapkan rugi neto fiskal dari Rp18.459.546 menjadi sebesar Rp8.371.218. Terhadap lebih bayar tersebut Perusahaan kemudian menerima restitusi sebesar Rp2.010.792 setelah diperhitungkan dengan kompensasi utang unit Perusahaan, namun Perusahaan tetap mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut pada bulan Juli 2015. DJP menolak keberatan yang diajukan Perusahaan pada bulan Juni 2016, Perusahaan tidak mengajukan banding atas penolakan tersebut.

In April 2015, the Company received a tax assessment letter for the overpayment ("SKPLB") of corporate income tax for the 2013 fiscal year amounting to Rp2,011,024 and amend the fiscal net loss from Rp18,459,546 to Rp8,371,218. For the overpayments the Company later received the restitution amounting to Rp2,010,792 after considering the business unit's payable, however the Company still filed an objection letter related to the assessment in July 2015. The DJP has rejected the Company's appeal in June 2016, the Company did not file an appeal against the verdict.

Pada bulan Juli dan November 2015, Perusahaan juga menerima beberapa SKPKB dan STP PPh pasal 4(2) dan PPh pasal 26 tahun 2012 dan PPN tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp8.612.648. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB dan penghapusan sanksi serta pembatalan atas STP tersebut pada bulan Oktober 2015, Desember 2015 dan Januari 2016. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp192.065 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka dan pembayaran sebesar Rp15.019 dicatat Perusahaan sebagai beban lain-lain. Pada bulan April 2016, DJP menolak permohonan penghapusan atas STP PPN tahun 2013 sebesar Rp22.864 dan Perusahaan telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi kedua untuk STP terkait pada bulan Juni 2016. Pada bulan Juni 2016, DJP menolak permohonan penghapusan atas STP PPN tahun 2013 sebesar Rp5.305.664 dan Perusahaan telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi kedua untuk STP terkait pada bulan Agustus 2016.

In July and November 2015, the Company also received SKPKB and STP for income tax article 4(2) and article 26 for 2012 and VAT for the years 2012 and 2013 amounting to Rp8,612,648. The Company has filed an objection letter for SKPKB and administrative sanction abolition request on STP in October 2015, December 2015 and January 2016. The Company has paid the amount of Rp192,065 and recorded it as prepaid taxes and payment amounting to Rp15,019 has been recorded by the Company as other expense. In April 2016, DJP rejected administrative sanction abolition request on STP VAT 2013 fiscal year amounting to Rp22,864 and the Company submitted second abolition request in June 2016. In June 2016, DJP rejected administrative sanction abolition request on STP VAT fiscal year 2013 amounting to Rp5,305,664 million and the Company submitted second abolition request in August 2016.

Pada bulan April 2014, Perusahaan menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2012 sebesar Rp1.330.243 dan menetapkan laba fiskal sebesar Rp4.540.925. Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada bulan Juni 2014. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp182.496, dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Keberatan tersebut ditolak DJP

In April 2014, the Company received a SKPKB of corporate income tax for the 2012 fiscal year amounting to Rp1,330,243 and determined taxable income of Rp4,540,925. The Company has filed an objection letter on the assessment in June 2014 and the Company has paid Rp182,496, recorded as prepaid tax. The objection was rejected by DJP in May 2015. The Company filed an appeal

pada bulan Mei 2015. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2015, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Perusahaan telah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Pajak (Catatan 57).

against the verdict in August 2015, later on February 22, 2017 the Company received a final result from the Tax Court (Note 57).

Pada bulan September 2013, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp84.857 dan penetapan laba fiskal tahun 2011 dari Rp8.099.968 menjadi sebesar Rp11.506.614. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Desember 2013 dan ditolak DJP pada bulan November 2014. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Februari 2015 dan sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Februari 2016, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

In September 2013, the Company received a SKPLB of corporate income tax for the 2011 fiscal year amounting to Rp84,857 and amend the 2011 taxable income from Rp8,099,968 to Rp11,506,614. The Company filed an objection to the DJP in December 2013 and rejected by the DJP in November 2014. The Company filed an appeal against the rejection in February 2015 and hearring session on the Tax Court has been completed in February 2016, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4(2), pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp144.328. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp94.478 (nilai sengketa Rp84.078) pada bulan Desember 2013. Pada bulan November 2014, DJP menolak keberatan tersebut dan Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Pebruari 2015. Sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Pebruari 2016, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

The Company also received a SKPKB of income tax article 4(2), article 21, article 23, article 26 and VAT for the 2011 fiscal year with the total amount of Rp144,328. The Company filed an objection letter in December 2013 for income tax article 23 and 26 amounting to Rp94,478 (with dispute amounting to Rp84,078). In November 2014, the DJP rejected the objection and the Company filed an appeal against the rejection in February 2015. Hearring session on the Tax Court has been completed in February 2016, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

Pada bulan Desember 2012, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp98.148 dan penetapan laba fiskal dari Rp6.627.169 menjadi sebesar Rp9.627.659. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Januari 2013 dan ditolak DJP pada bulan Januari 2014. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan April 2014 dan sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Februari 2015, namun masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.

In December 2012, the Company received a SKPLB 2010 fiscal year corporate income tax amounting to Rp98,148 and determined the taxable income from Rp6,627,169 to Rp9,627,659. The Company filed an objection to the DJP in January 2013 and it was rejected by the DJP in January 2014. The Company filed an appeal against the rejection in April 2014 and hearring session on the Tax Court has been completed in February 2015, but still awaiting for the Tax Court decision letter.

Perusahaan juga menerima SKPKB PPh pasal 4(2), pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN tahun 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp141.012. SKPKB sebesar Rp59.913 telah diterima dan dicatat oleh Perusahaan sebagai beban lain-lain pada bulan Desember 2012. Perusahaan mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan 26 sebesar Rp84.306 (nilai sengketa Rp81.099) pada bulan Januari 2013 dan telah melunasi kurang bayar tersebut pada bulan Desember 2012. Pada bulan Januari 2014, DJP menolak keberatan tersebut dan Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan April 2014. Sidang banding Pengadilan Pajak sudah selesai di bulan Maret dan April 2015 dan pada bulan Mei 2016, Pengadilan Pajak menyetujui banding yang diajukan perusahaan untuk PPh pasal 23 dan menolak banding untuk PPh 26 yang diajukan Perusahaan. Perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2016.

The Company also received a SKPKB of income tax article 4(2), article 21, article 23, article 26 and VAT for the fiscal year 2010 amounting to Rp141,012. SKPKB amounting to Rp59,913 has been accepted and recorded by the Company as other expense in December 2012. The Company submitted an objection letter on the SKPKB of income tax article 23 and 26 totaling Rp84,306 (with dispute amount of Rp81,099) in January 2013 and has paid the under payment in December 2012. In January 2014, the DJP rejected the objection and the Company filed an appeal against the rejection in April 2014. Hearring session on the Tax Court has been completed in March and April 2015 and in May 2016, Tax Court accepted the Company's appeal for income tax article 23 and rejected the Company's appeal for income tax article 26. The Company submitted Judicial Review to Supreme Court in August 2016.

Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan menerima SKPLB atas PPh Badan tahun 2009 sebesar Rp95.625 dan penetapan laba fiskal dari Rp5.936.754 menjadi sebesar Rp8.132.406. Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP pada bulan Januari 2012 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2012. Pada bulan Maret 2016, Pengadilan Pajak menyetujui banding yang diajukan Perusahaan.

In October 2011, the Company received a SKPLB of corporate income tax for the 2009 fiscal year amounting to Rp95,625 and amend the taxable income from Rp5,936,754 to Rp8,132,406. The Company filed an objection to the DJP in January 2012 and it was rejected by the DJP in October 2012. The Company filed an appeal against the rejection in December 2012. In March 2016, the Tax Court accepted the Company's appeal.

Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2009 sebesar Rp252.348. Atas jumlah tersebut Perusahaan telah menyetujui koreksi sejumlah Rp5.058. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Januari 2012 dan ditolak DJP pada bulan September 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2012. Pada bulan Oktober 2014, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp247.290 pada bulan Juli 2015. DJP mengajukan Peninjauan Kembali ("PK") untuk PPh 23 tahun 2009 di mana memori Peninjauan

In October 2011, the Company received a SKPKB income tax article 23 for fiscal year 2009 with total amount of Rp252,348. Correction amounting to Rp5,058 has been accepted by the Company. In January 2012 the Company submitted an objection letter and it was rejected by the DJP in September 2012. The Company filed an appeal against the rejection in December 2012. In October 2014, the Tax Court accepted the Company's appeal and refunded the tax overpayments of Rp247,290 in July 2015. The DJP filed Judicial Review ("PK") for income tax article 23 fiscal year 2009 and the Company received memory PK in March

Kembali diterima Maret 2016. Perusahaan telah menjawab memori Peninjauan Kembali ("Kontra Memori") pada bulan April 2016. Pada bulan Oktober 2011, Perusahaan juga menerima SKPKB PPh 26 tahun 2009 sebesar Rp643.601. Atas jumlah tersebut Perusahaan telah menyetujui koreksi sejumlah Rp5.452. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2011 dan ditolak DJP pada bulan Mei 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2012. Pada bulan Maret 2015, banding ditolak Pengadilan Pajak dan Perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

2016. The Company replied memory PK ("Contra Memory") in April 2016. In October 2011, the Company also received a SKPKB income tax article 26 fiscal year 2009 amounting to Rp643,601. Correction amounting to Rp5,452 has been accepted by the Company. The Company submitted objection letter in December 2011 and rejected by the DJP in May 2012. The Company filed an appeal against the rejection in August 2012. In March 2015, the Tax Court rejected the appeal and then the Company submitted Judicial Review to Supreme Court in June 2015.

Pada bulan Juni 2011, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2007 dan 2006 sejumlah Rp181.908. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan September 2011 dan ditolak DJP pada bulan Juni 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan September 2012. Pada bulan Oktober 2013, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp181.908 pada bulan Desember 2013. Pada bulan Januari 2014, DJP mengajukan PK untuk PPh 23 tahun 2006 dan Perusahaan telah menjawab kontra memori PK pada bulan November 2014. Pada bulan Juni 2011, Perusahaan juga menerima SKPKB PPh 26 tahun 2007 sejumlah Rp316.944. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan September 2011 dan ditolak DJP pada bulan Mei 2012. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Agustus 2012. Pada bulan Pebruari 2015, banding ditolak Pengadilan Pajak. Perusahaan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

In June 2011, the Company received SKPKB income tax article 23 for 2007 and 2006 fiscal year amounting to Rp181,908. The Company submitted an objection letter in September 2011 and it was rejected by the DJP in June 2012. The Company filed an appeal in September 2012. In October 2013, the Tax Court accepted the Company's appeal and has been refunded the tax overpayment of Rp181,908 in December 2013. In January 2014, the DJP filed PK for income tax article 23 for the 2006 fiscal year and the Company has replied the contra memory PK in November 2014. In June 2011, the Company also received a SKPKB income tax article 26 for 2007 fiscal year amounting to Rp316,944. The Company submitted an objection letter in September 2011 and it was rejected by the DJP in May 2012. The Company filed an appeal against the rejection in August 2012. In February 2015, the Tax Court rejected the appeal. The Company filed PK to Supreme Court in June 2015.

Pada bulan November 2010, Perusahaan menerima SKPKB PPh 23 tahun 2008 sebesar Rp301.385. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2010 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2011. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2011. Pada bulan Oktober 2013, Pengadilan Pajak menyetujui banding dan mengembalikan kelebihan bayar pajak

In November 2010, the Company received a SKPKB income tax article 23 fiscal year 2008 amounting to Rp301,385. The Company submitted objection letter in December 2010 and it was rejected by the DJP in October 2011. The Company filed an appeal against the rejection in December 2011. In October 2013, the Tax Court accepted the Company's appeal and refunded the tax overpayments of Rp93,061 in December 2013. In November

sebesar Rp93.061 pada bulan Desember 2013. Pada bulan November 2010, Perusahaan juga menerima SKPKB atas PPh 26 tahun 2008 sebesar Rp614.610. Perusahaan mengajukan surat keberatan pada bulan Desember 2010 dan ditolak DJP pada bulan Oktober 2011. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan keberatan ini pada bulan Desember 2011. Pada bulan Maret 2015, banding ditolak Pengadilan Pajak dan Perusahaan mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada bulan Juni 2015.

2010, the Company also received SKPKB income tax article 26 fiscal year 2008 amounting to Rp614,610. The Company submitted objection letter in December 2010 and it was rejected by the DJP in October 2011. The Company filed an appeal against the rejection in December 2011. In March 2015, the Tax Court rejected the appeal and the Company submitted PK to Supreme Court in June 2015.

Sehubungan dengan Perusahaan mengajukan surat keberatan dan banding terhadap SPKB, pembayaran yang telah dilakukan atas SKPKB tersebut sebesar Rp2.940.187 dan Rp2.109.238 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 18).

Due to the objections and appeals filed by the Company against the SKPKB, payments made by the Company for the SKPKB amounting to Rp2,250,175 and Rp2,940,187 as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively, was recorded as prepaid taxes (Note 18).

d. Pengampunan Pajak

Entitas anak Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

d. Tax Amnesty

The Company's subsidiaries were participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law No.11 of 2016 regarding Tax Amnesty, as amended by the Minister of Finance Regulation No.141/PMK.03/2016 and the Directorate General of Tax Regulation No.PER-18/PJ/2016 regarding the refund of excess payment on compensation for Tax Amnesty.

Rincian Surat Ketetapan Pengampunan Pajak ("SKPP") yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah:

Details of Tax Amnesty Approval Letter ("SKPP") issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	No. SKPP	Tanggal/ *Date*	Jumlah Aset pengampunan pajak/ *Total tax amnesty assets *)* Rp
Pembangkit Jawa Bali (PJB)	No. KEP-777/PP/WJP/19/2016	4 Oktober/ *October 4,* 2016	44.207
Indonesia Power (IP)	No. KEP-778/PP/WJP/19/2016	4 Oktober/ *October 4,* 2016	9.609
Artha Daya Coalindo (ADC)	No. KET-1327/PP/WJP.19/2016	8 Desember/ *December 8,* 2016	635
PLN Batam	No. KET-1040/PP/WJP.19/2016	17 Oktober/ *October 17*, 2016	40.053
			94.504

*) Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak yang dilaporkan/ *There is no tax amnesty liabilities declared*

48. Laba Per Saham Dasar dan Dilusian / *48. Basic and Diluted Earnings Per Share*

Laba bersih
Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp10.511.911 dan Rp6.010.568.

Jumlah saham
Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar untuk tahun 2016 dan 2015 adalah 54.087.903 saham dan 46.197.380 saham.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

Net income
Net income/ (loss) for the computation of basic earnings per share in 2016 and 2015 amounted to Rp10,511,911 and Rp6,010,568, respectively.

Number of shares
The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share for 2016 and 2015 were 54,087,903 shares and 46,197,380 shares.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

49. Liabilitas Imbalan Kerja / *49. Employee Benefits Liabilities*

	2016 Rp	2015 Rp	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			*Liabilities recognized on statements of financial position:*
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun	118.035	--	*Pension plan*
Imbalan paska kerja lainnya	13.371.371	13.256.657	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	30.152.741	25.969.297	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	962.452	1.001.182	*Other long-term benefits*
Jumlah	**44.604.599**	**40.227.136**	***Total***
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 43)			*Expenses recognize in profit or loss: (Note 43)*
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun	19.940	79.544	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	1.896.211	1.590.475	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2.708.183	3.480.029	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	343.797	185.650	*Other long-term benefits*
Jumlah	**4.968.131**	**5.335.698**	***Total***
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			*Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:*
Program pensiun	506.991	77.756	*Pension Plan*
Imbalan pascakerja lainnya	(56.053)	1.936.004	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2.315.404	(8.134.368)	*Health care benefits*
Jumlah	**2.766.342**	**(6.120.608)**	***Total***

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Program Pensiun Imbalan Pasti
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan
Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan PascaKerja Lainnya
Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Asumsi Yang Digunakan dalam Perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja

Post-employment Benefits Liabilities

Defined Benefit Pension Plan
The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated on February 11, 2016 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 13.41% from basic pension income, respectively.

Health Care Benefits
In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other Post-employment Benefits
In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Assumption Used in the Calculations of Employment Benefits Obligation

	2016 dan/ *and* 2015	
Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri		*Resignation rate*
Usia 18 s.d. 49 tahun	0,27%	*Age 18 up to 49 years old*
Usia 50 s.d. 55 tahun	0,01%	*Age 50 up to 55 years old*
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ *Years old*	*Normal Retirement Age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah table mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long term benefits for the years ended December 31, 2016 and 2015 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasian, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that best suits with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun
Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan
The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	7.842.473	6.346.704	*Present value of funded obligations*
Aset program yang tidak diakui	--	683.763	*Plan asset not recognized*
Nilai wajar aset program	(7.724.438)	(7.030.467)	*Fair value of plan assets*
Defisit (surplus) program yang didanai	118.035	--	*Deficit (surplus) of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	118.035	--	*Liability in the statement of financial position*

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement its of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	6.346.704	6.217.066	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	146.379	133.887	*Current service cost*
Biaya bunga	552.168	532.079	*Interest expense*
	698.547	665.966	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	194.593	19	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	(381.867)	150.730	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	(70.367)	(17.104)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	1.697.607	(164.142)	*Experience adjustment*
	8.485.217	6.852.535	
Pembayaran manfaat	(642.744)	(505.831)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	7.842.473	6.346.704	*At end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	7.030.467	7.211.829	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	607.871	516.042	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	408.896	157.300	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	70.737	70.380	*Employee's contributions*
Pembayaran manfaat	(642.745)	(505.831)	*Benefit payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada aset program	249.212	(419.253)	*Actuarial loss (gain) on plan asets*
Pada akhir tahun	**7.724.438**	**7.030.467**	*At the end of the year*

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2016				2015				
	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted Price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted Price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	
Surat Berharga Negara	1.283.965	--	1.283.965	16,62%	948.755	--	948.755	13,49%	*Government bonds*
Tabungan	--	10.550	10.550	0,14%	--	--	--	0,00%	*Saving accounts*
Deposito *On Call*	--	12.185	12.185	0,16%	--	59.750	59.750	0,85%	*Deposits On Call*
Deposito Berjangka	--	611.225	611.225	7,91%	--	547.266	547.266	7,78%	*Time Deposits*
Saham	789.298	--	789.298	10,22%	663.508	--	663.508	9,44%	*Shares*
Obligasi	2.653.659	--	2.653.659	34,35%	2.742.354	--	2.742.354	39,01%	*Bonds*
Sukuk	9.986	--	9.986	0,13%	--	--	--	0,00%	*Sukuk*
Unit Penyertaan Reksa Dana	1.041.514	--	1.041.514	13,48%	1.021.522	--	1.021.522	14,53%	*Mutual fund units*
Penempatan Langsung	--	401.001	401.001	5,19%	--	200.435	200.435	2,85%	*Direct Investments*
Tanah	--	78.274	78.274	1,01%	--	63.984	63.984	0,91%	*Lands*
Bangunan	--	418.488	418.488	5,42%	--	425.971	425.971	6,06%	*Buildings*
Tanah dan Bangunan	--	356.940	356.940	4,62%	--	290.429	290.429	4,13%	*Land and Buildings*
Lain-lain	--	57.353	57.353	0,75%	--	66.493	66.493	0,95%	*Others*
Total	**5.778.422**	**1.946.016**	**7.724.438**	**100%**	**5.376.139**	**1.654.328**	**7.030.467**	**100%**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016 %	2015 %	
Tingkat diskonto	8,50%	9.16% - 9,20%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,35% - 8,30%	*Salary increase rate per annum*

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah Rp 131.294.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ending December 31, 2017 are Rp 131,294.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 1,81%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 2,04%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 2,00%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 1,80%	*Salary increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0,02%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 0,02%	*Mortality rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya / *(ii) Other Post-Employment Benefits*

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of post-employment benefits obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	13.256.657	11.306.269	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	770.969	630.213	*Current service cost*
Biaya bunga	1.125.242	960.262	*Interest expense*
	1.896.211	1.590.475	

	2016 Rp	2015 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	81.563	283	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	579.633	650.453	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	5.110	(109.319)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(722.359)	1.394.587	*Experience adjustment*
	15.096.815	14.832.748	
Pembayaran manfaat	(1.725.444)	(1.576.091)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	13.371.371	13.256.657	*At end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016 %	2015 %	
Tingkat diskonto	8,45%	9,10% - 9.19%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,87%	5,35% - 11%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation* — Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6,31%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 7,38%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 7,16%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6,23%	*Medical inflation rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0,72%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0,72%	*Mortality rate*

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits

The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit obligation over the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	25.969.297	31.297.368	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	367.427	802.690	*Current service cost*
Biaya bunga	2.340.756	2.677.339	*Interest expense*
	2.708.183	3.480.029	

	2016 Rp	2015 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/ kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	543.568	(15.389)	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	2.290.814	(13.878.086)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	69.696	1.366.344	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(588.674)	4.392.763	*Experience adjustment*
	30.992.884	26.643.029	
Pembayaran manfaat	(840.143)	(673.732)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	30.152.741	25.969.297	*At end of the year*

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016 %	2015 %	
Tingkat diskonto	8,50%	9,09% - 9,20%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,50%	5,35% - 8,30%	*Salary increase rate per annum*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	6,00%	6,00%	*Long-term increase rate in health costs*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 11,15%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 13,65%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 10,70%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 8,93%	*Health costs increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0,57%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 0,58%	*Mortality rate*

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits

Movement of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pada awal tahun	1.001.182	1.175.404	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	299.056	265.396	*Current service cost*
Biaya bunga	74.581	98.339	*Interest expense*
	373.637	363.735	
Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebankan ke laba rugi:			*Remeasurement on defined benefit plan charged to profit or loss:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	67	174	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	14.237	8.431	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	(1)	5.596	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(58.245)	(192.286)	*Experience adjustment*
	1.330.877	1.361.054	
Pembayaran manfaat	(368.425)	(359.872)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**962.452**	**1.001.182**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016 %	2015 %	
Tingkat diskonto	8,44%	9,10% - 9,19%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,66%	5,35% - 11,00%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in Assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption*	
Tingkat Diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 2,19%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 2,33%	*Discount rate*
Tingkat Kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 2,20%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 2,10%	*Medical inflation rate*
Tingkat Mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 0%	*Mortality rate*

Perusahan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset
Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Asset volatility
The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. It the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Harapan umur hidup
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy
The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefit, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Perusahan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Company and its subsidiaries also invest in property, bonds, mutual funds and cash. The Company and its subsidiaries believe that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 20,46 tahun.

Average expected remaining service year is 20,46 year.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* Rp	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years* Rp	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Imbalan paska kerja					*Post-employment benefits*
Program pensiun	568.004	1.366.134	9.443.181	11.377.319	*Pension plan*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	960.224	2.569.204	70.635.238	74.164.666	*Health care benefits*
Imbalan paska kerja lainnya	1.680.639	6.073.543	143.964.926	151.719.108	*Other post-employment benefit*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	194.178	921.960	425.357	1.541.495	*Other long-term employee benefit*
Jumlah	**3.403.045**	**10.930.841**	**224.468.702**	**238.802.588**	***Total***

Jumlah liabilitas dan beban imbalan kerja pada dan untuk tahun 2016 dan 2015 diestimasi berdasarkan perhitungan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah per 30 November 2015 dan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2016.

Total liabilities and expenses of employee benefits as of and for years 2016 and 2015 were estimated based on calculation of actuary PT Binaputera Jaga Hikmah as of November 30, 2015 and 2015 which were carried out on December 31, 2016.

50. Transaksi Non-Kas / *50. Non-Cash Transactions*

	2016 Rp	2015 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas :			*Noncash investing and financing activities :*
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui :			*Additions to construction in progress through :*
Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	1.855.825	2.871.885	*Drawdown of loans and project cost payable*
Bantuan Pemerintah	2.596.132	1.678.761	*Government equity participation*
Kapitalisasi biaya pinjaman	242.936	1.390.684	*Capitalization of borrowing costs*
Kapitalisasi beban penyusutan	16.512	8.571	*Capitalization of depreciation expense*
Mutasi Utang lain-lain	(1.281.216)	2.963.801	*Movement of other payables*
Mutasi aset tidak lancar lainnya	217.363	--	*Movement of other non current assets*
Pembayaran pajak revaluasi aset melalui subsidi listrik Pemerintah	13.529.921	3.000.000	*Tax payment on asset revaluation through Government's electricity subsidy*
Penambahan ventura bersama melalui reklasifikasi aset tidak lancar lain	--	20.403	*Addition of joint venture through reclassification from non-current assets*
Penambahan nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	104.196	653.441.219	*Addition of value of assets through revaluation and increase of fair value of investment properties*
Deklarasi aset pengampunan pajak	94.504	--	*Declaration of tax amnesty assets*
Pengakuan tanah hibah	820.906	--	*Recognition of land grants*

51. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

51. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan Berelasi

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan.
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Nature of Related Parties

a. The Government is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and State-Owned Enterprises (SOE).

b. The Company is related to other SOE owned by the Minister of Finance.

c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).

d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of Republic of Indonesia* ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ *Ultimate Shareholder*	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ *Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans*
PT Bank DKI ("Bank DKI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ *Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank Tabungan Negara")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas *Placement of cash and cash equivalents*
PT Wijaya Karya - Navigat	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services transaction*
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa transportasi gas untuk unit bisnis/ *Gas transportation services transaction at business units*
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Surveyor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Jakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ *Fuels and coals transportation services transaction*
PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels*
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Sarana Multi Infrastruktur	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ *Receipt of non-bank government financial institution*
PT Geo Dipa Energi	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Bajradaya Sentranusa	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang/ *Purchase of electricity and issuance of long-term loan*
PT Bukit Pembangkit Innovative	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ *Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/ *Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loan*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ *Payment of contribution for defined benefit plan*

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi / *Balances and Transactions with Related Parties*

	Catatan/ *Notes*	2016		2015		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Piutang pihak berelasi	9					*Receivables from related parties*
PT Perta Daya Gas		260.085	0,02%	293.369	0,02%	*PT Perta Daya Gas*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		16.747	0,00%	22.329	0,00%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Tanjung Kasam Power		12.465	0,00%	23.935	0,00%	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Dalle Energy Batam		9.632	0,00%	--	0,00%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Mitra Energi Batam		683	0,00%	683	0,00%	*PT Mitra Energi Batam*
Sub jumlah		299.612	0,02%	340.316	0,02%	*Subtotal*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10					*Restricted cash in banks and time deposits*
Bank Mandiri		12.159	0,00%	14.345	0,00%	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia		1.269	0,00%	777	0,00%	*Bank Negara Indonesia*
Sub jumlah		13.428	0,00%	15.122	0,00%	*Subtotal*
Kas dan setara kas	12					*Cash and cash equivalents*
Bank Rakyat Indonesia		13.864.019	1,09%	9.632.824	0,73%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		10.892.432	0,85%	4.431.149	0,34%	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia		10.669.987	0,84%	4.109.475	0,31%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Tabungan Negara		1.003.076	0,08%	2.898	0,00%	*Bank Tabungan Negara*
Bank DKI		761.487	0,06%	968.905	0,07%	*Bank DKI*
Sub jumlah		37.191.001	2,92%	19.145.251	1,45%	*Subtotal*
Investasi jangka pendek	13					*Short-term investment*
Bank Rakyat Indonesia		367.200	0,03%	50.000	0,00%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		--	0,00%	66.150	0,01%	*Bank Mandiri*
Sub jumlah		367.200	0,03%	116.150	0,01%	*Subtotal*
Piutang usaha	14					*Trade account receivablse*
Badan Usaha Milik Negara		568.123	0,04%	571.894	0,04%	*State-Owned Enterprises*
Piutang subsidi listrik						*Receivables on electricity subsidy*
Pemerintah Republik Indonesia	15	14.844.365	1,16%	17.501.009	1,33%	*Government of Republic of Indonesia*
Jumlah		**53.283.729**	**4,17%**	**37.689.742**	**2,85%**	***Total***
Penerusan pinjaman	23	31.696.088	8,44%	31.710.583	6,22%	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah nonbank	24	8.301.603	2,21%	8.488.486	1,67%	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	25					*Lease liabilities*
PT Sumber Segara Primadaya		--	0,00%	7.342.528	1,44%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Geo Dipa Energi		--	0,00%	1.560.552	0,31%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Tanjung Kasam Power		--	0,00%	1.180.767	0,23%	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Dalle Energy Batam		--	0,00%	684.448	0,13%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Mitra Energi Batam		--	0,00%	90.886	0,02%	*PT Mitra Energi Batam*
PT Bajradaya Sentranusa Asahan		--	0,00%	4.745.768	0,93%	*PT Bajradaya Sentranusa Asahan*
PT Bukit Pembangkit Innovative		--	0,00%	3.179.676	0,62%	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Pertamina Geothermal Energi		--	0,00%	1.713.522	0,34%	*PT Pertamina Geothermal Energi*
PT Wijaya Karya - Navigat		--	0,00%	481.777	0,09%	*PT Wijaya Karya - Navigat*
PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu		--	0,00%	352.108	0,07%	*PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu*
Subjumlah		--	0,00%	21.332.032	4,18%	*Subtotal*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	26					*Bank loans and medium term notes*
Bank Rakyat Indonesia		37.181.302	9,90%	17.249.819	3,39%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		22.628.291	6,02%	11.571.199	2,27%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri		12.234.270	3,26%	7.357.554	1,44%	*Bank Mandiri*
Bank DKI		3.006.321	0,80%	3.513.394	0,69%	*Bank DKI*
Sub jumlah		75.050.184	19,98%	39.691.966	7,79%	*Subtotal*

	Catatan/ *Notes*	2016		2015		
		Rp	% *)	Rp	% *)	
Utang pihak berelasi	29					*Payable to related parties*
PT Dalle Energy Batam		2.301	0,00%	370	0,00%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Mitra Energi Batam		--	0,00%	2.196	0,00%	*PT Mitra Energi Batam*
Sub jumlah		2.301	0,00%	2.566	0,00%	*Subtotal*
Utang usaha	30					*Trade payables*
PT Pertamina (Persero)		4.109.919	1,09%	6.414.466	1,26%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Nusantara Regas		678.945	0,18%	329.104	0,06%	*PT Nusantara Regas*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk		651.321	0,17%	663.328	0,13%	*PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk*
PT Sumber Segara Primadaya		624.837	0,17%	345.907	0,07%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		451.037	0,12%	312.389	0,06%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
Perum Jasa Tirta		202.558	0,05%	74.266	0,01%	*Perum Jasa Tirta*
PT Tanjung Kasam Power		72.484	0,02%	92.224	0,02%	*PT Tanjung Kasam Power*
PT Bajradaya Sentranusa		61.743	0,02%	97.701	0,02%	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Geo Dipa Energi		58.165	0,02%	63.504	0,01%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam		49.830	0,01%	55.233	0,01%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Pertamina Geothermal Energy		31.002	0,01%	257.063	0,05%	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		19.712	0,01%	133.819	0,03%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Mitra Energi Batam		16.641	0,00%	15.822	0,00%	*PT Mitra Energi Batam*
PT Wijaya Karya		11.393	0,00%	2.762	0,00%	*PT Wijaya Karya*
PT Sucofindo (Persero)		5.832	0,00%	5.798	0,00%	*PT Sucofindo (Persero)*
PT Jakarta Lloyd (Persero)		3.646	0,00%	22.218	0,00%	*PT Jakarta Lloyd (Persero)*
PT Surveyor Indonesia		2.130	0,00%	3.706	0,00%	*PT Surveyor Indonesia*
PT Transportasi Gas Indonesia		--	0,00%	4.857	0,00%	*PT Transportasi Gas Negara*
Lain-lain (dibawah 5% dari jumlah utang usaha)		721.498	0,19%	16.271	0,00%	*Others (below 5% of total trade accounts payable)*
Sub jumlah		7.772.693	2,06%	8.910.438	1,73%	*Subtotal*
Biaya masih harus dibayar	33					*Accrued expenses*
Penerusan pinjaman		235.460	0,06%	219.259	0,04%	*Two-step loans*
Utang bank						*Bank loans*
Bank Rakyat Indonesia		193.422	0,05%	138.365	0,03%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		140.797	0,04%	54.357	0,01%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri		109.126	0,03%	168.748	0,03%	*Bank Mandiri*
Bank DKI		4.251	0,00%	--	0,00%	*Bank DKI*
Utang usaha pembelian BBM		19.713	0,01%	18.572	0,00%	*Trade accounts payable on purchase of fuel*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah nonbank		119.640	0,03%	114.460	0,02%	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Subjumlah		822.409	0,22%	713.761	0,13%	*Subtotal*
Jumlah		123.645.278	32,91%	110.849.832	21,72%	*Total*
Penjualan tenaga listrik	36					*Sale of electricity*
Badan Usaha Milik Negara		5.091.201	2,38%	5.398.588	2,57%	*State-Owned Enterprises*
Subsidi listrik Pemerintah	37	60.441.520	100%	56.552.532	100,00%	*Government's electricity subsidy*
Beban bahan bakar dan pelumas	39					*Fuel and lubricants expense*
PT Pertamina (Persero)		22.581.839	20,62%	45.924.873	33,18%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Nusantara Regas		8.299.203	7,58%	10.656.308	7,70%	*PT Nusantara Regas*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		7.347.673	6,71%	13.747.818	9,93%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk		4.373.538	3,99%	6.723.120	4,86%	*PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk*
Jumlah		42.602.253	38,90%	77.052.119	55,67%	*Total*
Beban pembelian tenaga listrik	40					*Purchased electricity expenses*
PT Sumber Segara Primadaya		3.281.618	5,49%	--	0,00%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Pertamina Geothermal Energy		316.737	1,53%	--	0,00%	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Bajradaya Sentranusa		775.713	1,30%	--	0,00%	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Geo Dipa Energi		589.986	0,99%	--	0,00%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Dalle Energy Batam		545.847	0,91%	--	0,00%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Bukit Pembangkit Innovative		444.259	0,74%	--	0,00%	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
Jumlah		5.954.160	10,96%	--	0,00%	*Total*
Beban pemeliharaan	42					*Maintenance expenses*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		216.560	1,02%	204.103	0,93%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
Beban usaha lain-lain						*Other operating expenses*
Asuransi						*Insurance*
PT Asuransi Jasa Indonesia	44	270.828	3,72%	712.967	10,42%	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Sucofindo (Persero)		37.587	0,52%	9.715	0,14%	*PT Sucofindo (Persero)*
PT Surveyor Indonesia		6.195	0,09%	49.636	0,73%	*PT Surveyor Indonesia*
Jumlah		314.610	4,33%	772.318	11,29%	*Total*
Beban keuangan	45					*Finance cost*
Utang bank dan surat utang jangka menengah		3.774.489	20,18%	2.803.534	7,01%	*Bank loans and medium term notes*
Penerusan pinjaman		633.599	3,39%	564.820	1,41%	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah		558.962	2,99%	569.073	1,42%	*Government loans*
Instrumen derivatif		105.215	0,56%	--	0,00%	*Derivative instruments*
Utang sewa pembiayaan		--	0,00%	3.065.008	7,67%	*Lease liabilities*
Utang usaha pembelian bahan bakar		--	0,00%	17.133	0,04%	*Trade accounts payable on purchase of fuel*
Jumlah		5.072.265	27,12%	7.019.568	17,55%	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/ liabilities/ revenues/ expenses*

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp48.654 dan Rp16.303.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for 2016 and 2015 amounted to Rp48,654 and Rp16,303, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp116.170 dan Rp34.737.

Total compensation of the Company's Directors for 2016 and 2015 amounted to Rp116,170 and Rp34,737, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

52. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing / *52. Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2016				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	--	18.897.451	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	58.900.167.541	44.922.075	--	--	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	1.222.842.324	178.504.121	7.299.106	457.750	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset moneter	60.123.009.865	242.323.647	7.299.106	457.750	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	179.894.874.250	753.977.435	39.752.290	13.203.171	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	188.227.714.907	--	--	--	*Lease liability*
Utang bank	--	2.989.065.968	142.625.503	--	*Bank loans*
Utang obligasi	--	5.000.000.000	--	--	*Bonds payable*
Utang listrik swasta	--	568.927.136	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	--	418.912.416	47.445.212	8.189.434	*Other payables*
Utang biaya proyek	59.509.492	19.387.543	3.362.440	--	*Project cost payable*
Utang usaha	31.991.723	416.862.980	10.972.386	5.081.646	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	4.198.343.675	113.279.119	1.136.639	138.506	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	372.412.434.047	10.280.412.597	245.294.470	26.612.757	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(312.289.424.182)	(10.038.088.950)	(237.995.364)	(26.155.007)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(36.039.714)	(134.871.763)	(3.370.383)	(351.419)	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(174.633.279)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

	2015				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	--	20.999.242	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	71.257.878.838	44.444.701	--	--	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	645.274.365	177.856.702	18.823.038	472.008	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset moneter	71.903.153.203	243.300.645	18.823.038	472.008	*Total monetary assets*

	2015				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	188.308.922.095	641.786.711	56.768.573	17.343.893	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	218.313.885.386	9.265.847.094	--	--	*Lease liability*
Utang bank	--	2.737.632.476	91.422.114	--	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	5.550.000.000	--	--	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	--	536.746.497	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	899.991.211	476.854.332	--	23.088.267	*Other payables*
Utang biaya proyek	392.338.505	61.394.118	7.915.591	--	*Project cost payable*
Utang usaha	--	333.184.447	1.747.171	--	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	4.930.820.534	279.346.037	1.015.374	172.667	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	412.845.957.731	19.882.791.712	158.868.823	40.604.827	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(340.942.804.528)	(19.639.491.067)	(140.045.785)	(40.132.819)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah (dalam jutaan)	(39.046.202)	(270.926.779)	(2.110.445)	(553.632)	*Rupiah equivalent (in millions)*
Jumlah dalam Rupiah - bersih (dalam jutaan)	**(312.637.058)**				***Total in Rupiah - net (in millions)***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp4.195.210 untuk tahun 2016 dan rugi kurs sebesar Rp27.326.131 untuk tahun 2015.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange of Rp4,195,210 for 2016 and net loss amounted to Rp27,326,131 for 2015.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 30 Maret 2017, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan naik sebesar Rp135.838.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2016 had been translated using the closing rates at issuance of March 30, 2017, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been increase by Rp135,838.

53. Segmen Operasi / *53. Operating Segment*

Informasi Wilayah Geografis
Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Geographical Information
The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut:

For management reporting purposes, as of December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java-Bali, Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara and Maluku Papua. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, with the following details:

	2016						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI NUSA TENGGARA Rp	MALUKU PAPUA Rp	JUMLAH Rp	
Pendapatan usaha							*Revenue*
Pendapatan eksternal	79.867.001	165.089.575	14.640.641	18.080.306	3.955.967	281.633.490	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	1.387.465	213.788	3.832	23.711	1.190	1.629.986	*Income between segment*
Jumlah	**81.254.466**	**165.303.363**	**14.644.473**	**18.104.017**	**3.957.157**	**283.263.476**	***Total***
Hasil segmen							*Segmen result*
Beban usaha	81.931.224	129.260.803	16.045.112	21.339.357	5.873.306	254.449.802	*Operating expense*
Laba (rugi) usaha	(676.757)	36.042.559	(1.400.639)	(3.235.340)	(1.916.149)	28.813.674	*Operating income (loss)*
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan	(864.961)	(11.429.991)	(157.386)	(381.791)	(3.064)	(12.837.193)	*Unallocated non-operating income (loss)*
Beban pajak	(101.642)	(5.329.670)	3.469	--	--	(5.427.843)	*Tax expense*
Laba (rugi) bersih	**(1.643.360)**	**19.282.898**	**(1.554.556)**	**(3.617.131)**	**(1.919.213)**	**10.548.638**	***Net income***
Aset segmen							*Segment assets*
Aset segmen konsolidasi	**218.094.380**	**916.811.896**	**63.053.814**	**63.374.070**	**13.242.070**	**1.274.576.230**	***Consolidated segment assets***
Liabilitas segmen							*Segment liabilities*
Liabilitas segmen konsolidasi	**211.692.352**	**35.713.329**	**64.220.354**	**66.991.200**	**15.161.283**	**393.778.518**	***Consolidated segment liabilities***

	2015						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI NUSA TENGGARA Rp	MALUKU PAPUA Rp	JUMLAH Rp	
Pendapatan usaha							*Revenue*
Pendapatan eksternal	84.853.032	149.646.201	15.030.656	18.190.764	4.817.755	272.538.408	*External revenue*
Pendapatan antar segmen	577.154	762.958	1.905	16.837	2.260	1.361.114	*Income between segment*
Jumlah	**85.430.186**	**150.409.159**	**15.032.561**	**18.207.601**	**4.820.015**	**273.899.522**	***Total***
Hasil segmen							*Segmen result*
Beban usaha	83.815.329	98.054.083	16.955.589	20.664.195	6.084.880	225.574.076	*Operating expense*
Laba (rugi) usaha	1.614.857	52.355.077	(1.923.028)	(2.456.594)	(1.264.866)	48.325.446	*Operating income (loss)*
Penghasilan (beban) lain-lain tidak dapat dialokasikan	(2.242.576)	(61.354.061)	(306.764)	(437.092)	101.612	(64.238.881)	*Unallocated non-operating income (loss)*
Beban pajak	--	21.939.942	--	--	--	21.939.942	*Tax expense*
Laba (rugi) bersih	**(627.719)**	**12.940.958**	**(2.229.792)**	**(2.893.686)**	**(1.163.254)**	**6.026.507**	***Net income***
Aset segmen							*Segment assets*
Aset segmen konsolidasi	**97.731.412**	**1.131.648.304**	**38.111.236**	**38.548.576**	**8.331.353**	**1.314.370.881**	***Consolidated segment assets***
Liabilitas segmen							*Segment liabilities*
Liabilitas segmen konsolidasi	**96.596.506**	**321.705.861**	**40.341.028**	**41.442.262**	**9.494.607**	**509.580.264**	***Consolidated segment liabilities***

54. Ikatan dan Kontinjensi / *54. Commitments and Contingencies*

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

As of December 31, 2016, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar / *a. Fuel supply agreements*

i. Gas / *i. Gas*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* [e]
Cilegon	a)	2006-2018	bbtu	356.300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	101.400
Muara Karang - Priok	b)	2004-2017	bbtu	679.440
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2008-2016	bbtu	287.245
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	c)	2011-2019	bbtu	182.585
Keramasan, Inderalaya, Borang	PT Medco E&P Lematang	2009-2017	bbtu	129.136
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd. [f]	2012-2028	bbtu	368.700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2018	bbtu	478.990
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd.	2006-2026	mmscf	440.000
Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. [g]	2007-2021	bbtu	128.619

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* [e]
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27.375
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	bbtu	104.002
Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2017	bbtu	247.967
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2017	bbtu	3.359
Bontang	Total E&P Indonesie, INPEX Co.	2009-2017	bbtu	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2019	bbtu	72.270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2016	bbtu	21.870
Grati	d) Lapangan Oyong	2009-2017	bbtu	116.070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	21.000
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2017	mmscf	8.434
Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd. [h]	2013-2032	bbtu	130.000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd.	2012-2022	bbtu	51.945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2010-2016	bbtu	61.281
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	bbtu	219.000
Grati	d) Lapangan Wortel	2012-2018	bbtu	55.827
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280.100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31.793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5.911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2020	bbtu	8.340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd.	2014-2026	bbtu	354.780
Melibur	Kondur Petroleum S.A.	2012-2020	bbtu	831
Nunukan	PT Pertamina EP	2012-2018	mmscf	4.200
Sungai Gelam	PT Pertamina EP (Own Operation UBEP Jambi)	2012-2017	mmscf	3.500
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	2012-2019	mmscf	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	Juta Ton	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11.550
Bunyu Kaltim	PT Pertamina EP	2012-2016	mmscf	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd.; PC Madura Ltd. dan PT Petrogas Pantai Madura	2013-2017	bbtu	33.362
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2015-2016	bbtu	3.580
Sumatera	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9.250
Tarakan	BUT. Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd.	2012-2018	bbtu	10.500
Batam	PT Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11.685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2017	mmscf	39.898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	688
Rawa Minyak Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	7.802
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	mmscf	805
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2015-2017	bbtu	3.030
Bali	PT Pertamina (Persero); Total E&P Indonesie; INPEX Co.	2016-2017	kargo	± 7
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2018	bbtu	2.825
Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2017	bbtu	14.600

a) CNOOC SES Ltd.; PT Pertamina Hulu Energi OSES; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra B.V.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman Uk (Southeast Sumatra) Ltd.; Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
b) PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java; EMP ONWJ Ltd.; KUFPEC Indonesia (ONWJ) B.V.
c) Pt Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
d) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty Ltd.
e) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
f) Berganti nama dari/ *Change name from* PT EMP Kangean Ltd.
g) Berganti nama dari/ *Change name from* Kalila Bentu Ltd.
h) Berganti nama dari/ *Change name from* Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai *fasilitas stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the above agreement, the Company has facilities stand-by letter of credit with the following details:

Bank Penerbit/ *Issuing bank*	Penerima Manfaat/ *Beneficiary*	Mata Uang/ *Currency*	Jumlah/ *Amount *)*
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	62.387.344.718
		USD	21.999.600
	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	USD	31.665.343
	Kangean Energy Indonesia Ltd.	USD	20.970.228
	Petrochina Int. Jabung	USD	4.576.036
Mandiri	PT Inpex Corporation	USD	278.034
	Total E&P Indonesie	USD	278.034
	BP Berau Ltd. (On Behalf Of Tangguh)	USD	33.112.770
	PT Pertamina Hulu Energi Jambi	USD	4.210.000
	PT Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.	USD	1.052.500
	Talisman (Jambi Merang) Ltd.	USD	1.052.500
	PT Petrogas Jatim Utama	IDR	51.684.069.938
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	1.558.617.226
		USD	17.777.664
	PT Pelindo Energi Logistik	IDR	237.804.622.235
BNI	SESCO	USD	35.000.000
	Conoco Philips	USD	10.800.000
Bukopin	PT Inti Daya Latu Prima	USD	2.706.000
	PT Sumber Petrindo Perkasa	USD	22.560.000

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$3,09 sampai dengan US$10,23 per *Million British Thermal Units* (MMBTU) dan *Liquid Natural Gas* ("LNG") antara US$3,91 sampai dengan US$8,53 per MMBTU.

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US$3.09 to US$10.23 per Million British Thermal Units (MMBTU) and the price of Liquid Natural Gas ("LNG") ranges from US$3.91 to US$8.53 per MMBTU.

PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PGN untuk mengadakan gas alam. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dengan jumlah volume gas sebesar 72.270 BBTU, sejak gas pertama disalurkan ke titik penyerahan, yaitu tanggal 7 Agustus 2004. Harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$2,60 sampai dengan US$3,32 per MMBTU. Sesuai dengan perjanjian, PLN Batam harus menyediakan jaminan pembayaran berupa SBLC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

PLN Batam entered into an agreement with PGN for the supply of natural gas. The agreement is valid for 15 years with total gas volume of 72,270 BBTU, starting from the first time the gas is channeled to the point of delivery, which was on August 7, 2004. Gas purchase price at point of delivery ranges from US$2.60 to US$3.32 per MMBTU. In accordance with the agreement, PLN Batam must provide a payment guarantee in the form of an SBLC issued by Bank Mandiri.

ii Batubara / *ii. Coal*

Pemasok/*Suppliers*	Kuantitas metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric tons*)*	Periode/ *Period*
Rutin/ *Regular*		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	5.300.000	2013-2022
PT Adaro Indonesia	1.500.000	2014-2023
PT Kaltim Prima Coal	5.000.000	2007-2017
PT Kideco Jaya Agung	1.500.000	2009-2018
PT Berau Coal	2.500.000	2009-2018
PT Indominco Mandiri	2.100.000	2008-2018
PT Natuna Energi Indonesia	480.000	2006-2017
PT Oktasan Baruna Persada	660.000	2006-2017
PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk [1)]	480.000	2006-2018
PT Artha Daya Coalindo	600.000	2016-2017
Kerjasama konsorsium/ *Consortium*		
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	783.000	2009-2028
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2.005.000	2008-2028
PT Oktasan Baruna Persada and PT Insani Perkasa	540.000	2012-2017
PT Prima Multi Mineral and PT Baratama	384.000	2012-2017
Program Percepatan/ *Fast Track Program*		
PT Bukit Asam (Persero), Tbk	6.600.000	2010-2030
PT Adaro Indonesia	4.500.000	2016-2020
PT Titan Infra Energy [2)]	2.920.000	2011-2031
PT Hanson Energy	2.128.000	2009-2031
PT Lanna Harita Indonesia	300.000	2015-2020
PT Dwi Guna Laksana	1.890.000	2010-2032
PT Tunas Inti Abadi	600.000	2015-2020
PT Dizamatra Powerindo	500.000	2016-2020
PT Samantaka Batubara	500.000	2016-2021
Kerjasama konsorsium/ *Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	6.253.000	2009-2029
PT Multi Bara Persada dan PT Eksploitasi Energi Indonesia	1.179.104	2011-2020
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	2.860.000	2010-2031
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576.000	2011-2022
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan PT Rizki Anugrah Pratama	1.185.328	2011-2023
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Risky Armia	1.241.000	2010-2031
PT Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergy Nusantara	220.500	2013-2032

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
1) Berganti nama dari/ *Change name from* PT Central Korporindo Internasional, Tbk
2) Berganti nama dari/ *Change name from* PT Titan Mining Energy

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp341.867 dan Rp763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* (AFT) dan *Hardgrove Grindability Index* (HGI).

The price of coal purchases ranges from Rp341,867 to Rp763,993 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature (AFT) and Hardgrove Grindability Index (HGI).

PLN Batubara mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

PLN Batubara entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers as follows:

Pemasok/*Suppliers*	Lokasi/ *Location*	Kuantitas metrik ton/ *Quantity in metric ton*)*
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	43.396.322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/ *West Papua*	14.800.000
PT Mahakarya Abadi Prima	Sarolangun, Jambi	11.822.430
PT Bangun Persada Jambi Energi	Sarolangun, Jambi	16.685.059
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	1.000.000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan*	693.680

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di adendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

iii. Fuel

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment is using a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor.*

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perusahaan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1. HSD *(High Speed Diesel)*
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kiloliter (kl) di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina Terminal Transit Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan di Instalasi Tanjung Priok dan Instalasi Surabaya Group adalah 108,5% dari MOPS.
   - Harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.

2. Harga pembelian IDO *(Industrial Diesel Oil)* sampai dengan 3.933 kl di titik penyerahan di Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.

3. Harga pembelian MFO *(Marine Fuel Oil)* sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan di Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Based on Amendment III of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated November 7, 2011, the Company and Pertamina agreed in 2011 on the following:

1. HSD (High Speed Diesel)
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,537,161 kiloliters (kl) from 18 supply points of Pertamina is 105% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 480,487 kl from the point of delivery Pertamina Terminal Transit Manggis is 108% from MOPS.*
   - *The price of HSD for the purchase of up to 2,978,360 kl from the point of delivery at Instalasi Tanjung Priok and Instalasi Surabaya Group is 108.5% from MOPS.*
   - *The price of HSD in excess of 5,996,008 kl or supplied from the point of delivery other than the 21 delivery points specified by Pertamina is 109.5% from MOPS.*

2. The price of IDO (Industrial Diesel Oil) for purchases of up to 3,933 kl from the point of delivery at Kilang Plaju is 105% from MOPS and for purchases in excess of 3,933 kl or supplied from point of delivery other than the supply point Kilang Plaju is 109.5% from MOPS.

3. The price of MFO (Marine Fuel Oil) for purchases of up to 1,193,166 kl from the point of delivery at Kilang Cilacap is 105% from MOPS and for purchases in excess of 1,193,166 kl or supplied from the point of delivery other than the supply point Kilang Cilacap is 109.5% from MOPS.

Tahun 2013, Perusahaan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

In 2013, the Company and Pertamina agreed to use the price of the year 2011, since the Fuel Sale Purchase Agreement amendment has not been completed yet.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-74/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara Perusahaan dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perusahaan antara lain:

a. Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 11,94%;
b. Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, Perusahaan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan BBM.

Based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia's letter No. S-74/MK.02/2015 to Minister of Energy and Mineral Resources regarding its recommendation on the sale and purchase price of HSD and MFO between the Company and Pertamina for 2014 dated January 30, 2015, the terms of the agreement between Pertamina and the Company are:

a. The sales price for 2014 uses the price based on the review of the Board of Finance and Development Supervision as follows: for HSD: MOPS + 9.19% and for MFO: MOPS + 11.94%;
b. For the efficiency of purchase cost in 2015, the Company is allowed to acquire from other sources of fuel than Pertamina, whilst maintaining security of fuel supply.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2014 based on those prices.

Dalam rangka penyelesaian harga jual Bahan Bakar Minyak ("BBM") (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perusahaan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tahun 2015 di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

In settlement of the fuel sales price of Pertamina's fuel (HSD and MFO) to the Company, discussions on selling price of fuel (HSD and MFO) has been conducted between Pertamina and the Company in 2015 in the Minister of State Owned Enterprises ("SOE") office, facilitated by a deputy in energy business logistics and tourism, to determine the selling price of fuel in 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

a. Harga transaksi HSD tahun 2015:
   - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS

Based on the Sales and Purchase Price Agreement for Fuel (HSD and MFO) between Pertamina and the Company dated on February 9, 2016 the results are:

a. HSD transaction price for 2015:
   - *January until September 2015 is 107% from MOPS*

- Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS

b. Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen masih dalam proses diskusi mengenai perpanjangan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina masing-masing Rp19.713 dan Rp18.572 yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 33).

Pada tanggal 3 September 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 23 Pebruari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan,

- *October until December 2015 is 105% from MOPS*

b. MFO transaction price for 2015 is 109.5% from MOPS.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2015 based on those prices.

As of the consolidated financial statements date, the management is still in discussion related to the extension process of the Fuel Sale and Purchase Agreement.

As of December 31, 2016 and 2015, estimated liabilities on interest and penalties for payable on purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp19,713 and Rp18,572, respectively, which are recorded as accrued expenses (Note 33).

On September 3, 2014, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On July 14, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On July 14, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Bangka Belitung for 120,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On February 23, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau

Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

(Menyurai and Semboja) and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

iv. Uap Panas Bumi

Pada tahun 2016 Perusahaan memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

iv. *Geothermal Steam*

In 2016, the Company entered geothermal steam agreement with several suppliers, as follows:

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2040
Lahendong Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2007-2039
Lahendong Unit 4	PT Pertamina Geothermal Energy	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun *)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun *)
Kotamobagu Unit 1, 2, 3 & 4	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun *)
Darajat Unit 1	PT Pertamina (Persero); Chevron Darajat Ltd.; Texaco Darajat Ltd.; PT Darajat Geothermal Indonesia	1994-2030
Gunung Salak Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina (Persero); Dayabumi Salak Pratama Ltd.; Unocal Geothermal of Indonesia Ltd.	1993-2040

*) Sejak/ *Since* COD

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract

Prior to 1997, the Company entered into Power Purchase Agreement (PPA) and Energy Sales Contract (ESC) with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PLN Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

Pada tanggal 31 Desember 2016, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016 the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

i. Sudah Beroperasi / *i. In Operations*

No	Perusahaan/ *Company*	*Proyek/ Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period* [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
1.	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	300,0	72	1998-2031	1 Desember 1998/ *December 1, 1998*
2.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Gas	315,0	85	1999-2028	1 Maret 1999/ *March 1, 1999*
3.	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	165,0	90	2000-2030	1 Desember 2000/ *December 1, 2000*
4.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1.230,0	85	2000-2040	1 Juli 2000/ *July 1, 2000*
5.	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1.220,0	83	2000-2030	1 November 2000/ *November 1, 2000*
6.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	Drajat, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	196,0	95	2000-2030	1 Februari 2000 / *February 1, 2000* 1 Agustus 2007/ *August 1, 2007*
7.	Star Energy Geothermal Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	225,0	90	2000-2042	1 Juni 2000/ *June 1, 2000*
8.	PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah *Central Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	45,0	85	2002-2044	1 Oktober 2002/ *October 1, 2002*
9.	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	150,0	85	2004-2024	1 September 2004/ *September 1, 2004*
10.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	562,0	80	2007-2037	1 Februari 2007/ *February 1, 2007*
11.	PT Metaepsi Pejebe Powe Generation	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	110,0	80	2007-2027	10 November 2007/ *November 10, 2007*
12.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	27,0	80	2007-2032	1 November 2007/ *November 1, 2007*
13.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	3,0	80	2007-2027	31 Juli 2007/ *July 31, 2007*
14.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60,0	90	2008-2038	26 Januari 2008/ *January 26, 2008*
15.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kalimantan Timur/ *East Bontaro*	Batubara/ *Coal*	45,0	83	2008-2038	20 Desember 2008/ *December 20, 2008*
16.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	11,3	90	2008-2038	1 Agustus 2008/ *August 1, 2008*
17.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga Air/ *Hydro*	180,0	1.175 GWh/th	2010-2040	18 Januari 2011/ *January 18, 2011*
18.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/ *West Java*	Tenaga Air/ *Hydro*	180,0	--	2012-2016	1 Agustus 2006/ *August 1, 2006*
19.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Luwu, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	2,4	--	2010-2035	1 Mei 2010/ *May 1, 2010*
20.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	10,0	--	2011-2036	1 Februari 2011/ *February 1, 2011*
21.	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	227,0	80	2011-2041	27 Februari 2013/ *February 27, 2013*
22.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ *South Bontaro*	Batubara/ *Coal*	11,0	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ *October 14, 2011*
23.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	815,0	85	2012-2042	18 Maret 2012/ *March 18, 2012*
24.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	660,0	80	2012-2042	27 Juli 2012/ *July 27, 2012*
25.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	200,0	80	2012-2042	1 Agustus 2012/ *August 1, 2012*

No	Perusahaan/ *Company*	*Proyek/ Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period* [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
26.	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	195,0	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012/ *December 30, 2012*
27.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	118,8	80	2013-2033	5 Januari 2013/ *January 5, 2013*
28.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara/ *Coal*	12,0	80	2014-2034	2 Mei 2014/ *May 2, 2014*
29.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kalimantan Timur/ *East Bontaro*	Batubara/ *Coal*	50,0	87	2014-2039	5 September 2014/ *September 5, 2014*
30.	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	55,0	75	2014-2044	22 September 2014/ *September 22, 2014*
31.	PT Gorontalo Energi	Molotabu, Gorontalo	Batubara/ *Coal*	21,0	80	2014-2039	13 September 2014/ *September 13, 2014*
32.	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kalimantan Timur/ *East Bontaro*	Gas	82,0	85	2015-2040	16 Maret 2015/ *March 16, 2015*
33.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	220,0	80	2015-2045	30 Juni 2015/ *June 30, 2015*
34.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/ *Coal*	380,0	85	2015-2045	23 September 2015/ *September 23, 2015*
35.	PT Harmoni Energy Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	14,0	80	2015-2040	29 Oktober 2015/ *October 29, 2015*
36.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	30,0	90	2015-2045	29 Juni 2015/ *June 29, 2015*
37.	PT Priamanaya Energi	Keban Agung, Lahat, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	240,0	80	2016-2046	1 Mei 2016/ *May 1, 2016*
38.	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumetera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga Air/ *Hydro*	45,0	315,36 GWh/Th	2016-2046	1 Mei 2016/ *May 1, 2016*
39.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	614,0	80	2016-2046	10 Juni 2016/ *June 9, 2016*
40.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu 3, Sumatera	Panas bumi/ *Geothermal*	55,0	90	2016-2046	26 Juli 2016/ *July 26, 2016*
41.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara/ *Coal*	30,0	80	2016-2041	7 September 2016/ *September 7, 2016*
42.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Panas bumi/ *Geothermal*	20,0	90	2016-2046	15 September 2016/ *September 15, 2016*
43.	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel 5, Banyuasin, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	300,0	80	2016-2041	14 Januari 2016/ *January 14, 2016* 3 April 2016/ *April 3, 2016*
44.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Panas bumi/ *Geothermal*	20,0	90	2016-2046	9 Desember 2016/ *December 9, 2016*
45.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	17,4	80	2006-2017	11 September 2005/ *September 11, 2005* 1 April 2006/ *April 1, 2006*
46.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ *December 1, 2005*
47.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	55,0	84	2005-2034	29 Oktober 2004/ *October 29, 2004*
48.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	22,2	--	2014-2034	1 September 2014/ *September 1, 2014*
49.	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/ *Coal*	110,0	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012* 1 November 2012/ *November 1, 2012*
50.	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Unvang, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/ *Coal*	70,0	85	2016-2038	1 Mei 2016/ *May 1, 2016*

No	Perusahaan/Company	*Proyek/Project*	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF [b] (%)	Periode/ Period [a]	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
51.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutraja, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/ *Hydro*	5,0	65	2012-2037	10 Mei 2012/ *May 10, 2012*
52.	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	20,0	80	2014-2039	18 Januari 2014/ *January 18, 2014*
53.	Joint Operation PT Wijaya Karya PT Mirlindo Padu Kencana	Pesaggaran, Bali	Diesel	50,0	85	2009-2017	1 Maret 2011/ *March 1, 2011*
54.	Konsorsium PT Wijaya Karya PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	67,0	80	2012-2019	29 Juni 2012/ *June 29, 2012*
55.	Konsorsium PT Modaco Enrgy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. INC Renewable Energy Poweer International	Payo Selincah, Jambi	Gas	94,0	60	2012-2019	8 Juni 2012/ *June 8, 2012*
56.	Konsorsium PT PP PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57,0	60	2013-2019	11 Januari 2007/ *January 11, 2007*
	Jumlah/ *Total*			**10.105**			

Sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, PLN Batam telah menyerahkan jaminan deposito berjangka masing-masing sebesar Rpnil dan Rp7.880 pada tahun 2016 dan 2015 (Catatan 10).

In relation to the purchase of electricity, PLN Batam has placed collateral time deposits amounting to Rpnil and Rp7,880 in 2016 and 2015, respectively (Note 10).

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi. Berikut ini adalah komitmen sewa operasi:

In addition to the above power purchase agreements, the Company and its subsidiaries also entered into rental agreements that falls into the category of operating leases. The followings are commitments for operating leases:

	2016 Rp	2015 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	24.430	106.249	*No later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai dua tahun	--	--	*Later than one year and no later than two years*
Lebih dari dua tahun	--	--	*More than two years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	**24.430**	**106.249**	***Total minimum lease payments***

	2016 Rp	2015 Rp	
Rincian pembayaran sewa minimum berdasarkan lessor:			*Details of the minimum lease payment by lessor:*
Perum Jasa Tirta	24.430	97.720	*Perum Jasa Tirta*
PT Dalle Energy Batam	--	8.529	*PT Dalle Energy Batam*
Jumlah	**24.430**	**106.249**	***Total***

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan) / *ii. Not Yet in Operation (Development Stage)*

No.	Perusahaan/ *Company*	Proyek/ *Projects*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity (MW)*	AF b) (%)	Periode/ *Period a)*	Status
1	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Serang, Banten	Batubara/ *Coal*	2.000	86	2021-2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
2	PT Bhumi Jati Power	Jepara, Jawa Tengah /*Central Java*	Batubara/ *Coal*	2.000	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
3	PT Bimasena Power Indonesia	Batang, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	1.900	86	2020-2050	Tahap Pembangunan/ *Construction*
4	PT Tanjung Jati Power	Cirebon, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	1.320	80	2019-2049	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
5	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	1.200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
6	PT Cirebon Energi Prasarana	Cirebon, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	1.000	86	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
7	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	1.000	86	2018-2048	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
8	PT Lestari Banten Energi	Cilegon, Banten	Batubara/ *Coal*	625	80	2017-2042	Tahap Pembangunan/ *Construction*
9	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	600	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
10	PT North Sumatra Hydro	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/ *Hydro*	510	0	2016 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction*
11	Sarulla Operation Ltd	Sarulla, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	330	90	2017-2018	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
12	PT DSSP Power Sumsel	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	300	80	2015-2040	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
13	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	250	80	2018-2048	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
14	PT Banyuasin Power Energi	Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	250	80	2020-2050	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
15	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	240	0	0	*Power Purchase Agreement*
16	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2017-2047	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
17	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2023-2053	Eksplorasi/ *Exploration*
18	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ *West Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2017-2047	Eksplorasi/ *Exploration*
19	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dadap, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	90	2019-2049	Eksplorasi/ *Exploration*
20	Star Energy	Wayang Windu #3,4, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	85	2020-2050	Exploitasi/ *Exploitation*
21	PT Sejahtera Alam Energi	PLTP Baturraden, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	220	0	0	*Power Purchase Agreement*
22	PT SKS Listrik Kalimantan	Gunung Mas, Kalimantan Tengah/ *Central Borneo*	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
23	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
24	PT GCL Indo Tenaga	Kalimantan Barat/ *West Borneo*	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
25	PT Tanjung Power Indonesia	Kalimantan Selatan/ *South Borneo*	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
26	PT Graha Power Kaltim	Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/ *Coal*	200	80	2019-2044	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
27	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/ *Coal*	200	80	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
28	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jawa Timur/ *East Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	165	0	0	*Power Purchase Agreement*
29	PT Geo Dipa Energi	Dieng #2,3 Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	115	85	2019-2039	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
30	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Ijen, Jawa Timur/ *East Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2020-2050	Eksplorasi/ *Exploration*
31	PT Tangkuban Perahu Geothermal Power	PLTP Tangkuban Perahu I, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	0	0	*Power Purchase Agreement*
32	PT Sintesa Banten Geothermal	PLTP Rawa Dano, Banten	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	0	0	*Power Purchase Agreement*
33	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2019-2049	Eksplorasi/ *Exploration*
34	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/ *Geothermal*	110	85	2024-2055	Eksplorasi/ *Exploration*
35	PT DSS Power Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	100	80	2019-2044	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
36	PT Muntok Listrik Utama	Bangka Belitung	Gas	100	85 (Y1) 60 (Y2)	2019-2039	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
37	PT Gorontalo Listrik Perdana	Gorontalo	Batubara/ *Coal*	100	80	2020-2045	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
38	PT Pertamina Geothermal	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/	80	90	2024-2054	Eksplorasi/ *Exploration*
39	PT UPC Sidrap Bayu Energi	PLTBayu Sidrap, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Angin/ *Wind*	70	0	30	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
40	EQUIS FUNDS GROUP PTE. LTD	PLT Bayu Tolo Jeneponto, Sulawesi Selatan/ South Sulawesi	Angin/ *Wind*	60	0	20	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
41	PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka	Tenaga Air/ *Hydro*	56	1	30	Tahap Pembangunan/ *Construction*
42	PT Indo Ridlatama Power	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur /*East Borneo*	Batubara/ *Coal*	55	80	2017-2047	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
43	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Ulubelu #4, Lampung	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	90	2016-2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
44	PT Giri Indah Sejahtera	PLTP Ungaran, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	85	2021-2051	Eksplorasi/ *Exploration*
45	PT Spring Energy Sentosa	PLTP Guci, Jawa Tengah/*Central Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	0	0	*Power Purchase Agreement*
46	PT. Lombok Energy Dynamics	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat/*West Nusa Temggara*	Batubara/ *Coal*	50	80	2016-2041	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
47	PT Rekind Daya Mamuju	Mamuju, Sulawesi Barat/*West*	Batubara/ *Coal*	50	80	2017-2042	Tahap Pembangunan/ *Construction*
48	PT Jabar Rekind Geothermal	PLTP Cisolok Cisukarame, Jawa Barat/*West Java*	Panas Bumi/ *Geothermal*	50	0	0	*Power Purchase Agreement*
49	PT UPC Yogyakarta Bayu	PLTBayu Samas, Yogyakarta	Angin/ *Wind*	50	0	30	Tahap Pembiayaan/ *Financing Stage*
50	Lainnya/*The Others c)*			657			
	Jumlah/*Total*			**18.518**			

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.

b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.

a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.

b) AF = Power supply factor which should be absorbed by the Company.

c) Meliputi kontrak dengan 95 IPP, terdiri dari 41 IPP dalam tahap pembangunan dan 40 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 14 *Power Purchase Agreement* berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

c) Represents contracts with 95 IPPs, consisting of 41 IPPs under construction, 40 IPPs in the financing stage, and 14 Power Purchase Agreement which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As of December 31, 2016, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	Mata uang/ *Currencies*	Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies *)*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Program percepatan				*Fast track program*
Kontrak pembangkitan	US$	57.427.409	771.595	*Power plant contracts*
	Rupiah	--	1.129.101	
			1.900.696	
Kontrak transmisi	Rupiah	--	58.534	*Transmission contracts*
Kontrak konstruksi rutin	US$	324.218.675	4.356.202	*Regular construction contracts*
	EUR	32.342.095	458.029	
	JPY	4.997.811.234	574.748	
	NZD	542.100	5.074	
	Rupiah	--	25.148.382	
			30.542.435	

*) Dalam jumlah penuh/ *in full amount*

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran dimuka yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak.

The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Company and its subsidiaries in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Company and its subsidiaries.

Program Percepatan
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak Pembangkitan
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$874.648.577 dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi
Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak Konstruksi Rutin
Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan

Fast Track Program
Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired Steam Power Plants (PLTU) at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Power Plant Contracts
As of December 31, 2016, the Company signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2016, the Company made a total down payment of US$874,648,577 and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission Contracts
Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular Construction Contracts
Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external

dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan
Penerusan pinjaman

d. Unused loan facilities
Two-step loans

Mata uang/ *Currency*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen Rp/ *Rp equivalent*
US$	2.053.139.108	27.585.977
EUR	50.914.891	721.034
JPY	103.290.117.917	11.920.181
Jumlah/ *Total*		**40.227.192**

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amounts*

Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp18.309.809 dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,40% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp21.917.383 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2016 sampai dengan 2055.

As of December 31, 2016 the unused facilities equivalent to Rp18,309,809 bear a provision charge of 0.10% - 0.40% per annum, while the remaining facilities of Rp21,917,383 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2016 and 2055.

Perjanjian pinjaman program percepatan
Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007 pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Loan agreements for fast track program
The purpose of these loan facilities is to finance 85% of the contract price of EPC for the fast track program. The term of the loan includes preparation of credit for 36 months and is fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia (PP) No. 91 Year 2007, superseding No. 86 Year 2006, regarding Grant of Government Guarantee for Construction of Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is obliged to comply with general restrictions.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities to finance the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Tahun/ *Year **)*
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ *Rupiah loan facilities*					
1	PT Bank DKI PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur/ *East Nusa Tenggara* PLTU 1 Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara* PLTU Sumatera Barat/ *West Sumatera* PLTU 2 Kalimantan Barat/ *West Kalimantan* PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara/ *North Maluku* PLTU Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi* PLTU 1 Nusa Tenggara Timur/ *East Nusa Tenggara* PLTU 2 Sulawesi Utara/ *North Sulawesi* PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara* PLTU 1 Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan*	4.732.000	594.182	1% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	24 April 2009/ *April 24, 2009*	10
2	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank DKI PLTU Riau Tenayan	2.225.000	145.497	1,50% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	12 November 2015/ *November 12, 2015*	10
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	2.449.963	313.154	1,20% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	17 Desember 2015/ *December 17, 2015*	10
		9.406.963	1.052.833			

*) Dalam jutaan/ *In million*
**) Termasuk masa tenggang/ *Include grace period*

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

Loan agreements for non fast track program

As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Tahun/ *Year **)*
	Fasilitas pinjaman dalam US$/ *US$ loan facilities*						
1	Asian Development Bank Gardu induk/ *Grid*	575	374	0,6% - 0,1% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	20
2	Asian Development Bank Gardu induk/ *Grid*	25	16	1,4 % + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	20
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	107	105	2.85% + 1.06%	--	14 Maret 2015/ *March 14, 2015*	15,5
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	72	70	1.1% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	4,8	14 Maret 2015/ *March 14, 2015*	15,5
5	International Bank for Reconstruction and Development *Power distribution development program*	500	500	*Reference Rate for Loan Curr + Var. Spread*	--	20 Mei 2016/ *May 20, 2016*	30
6	The Export-Import Bank of Korea dan/ *and* ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	36	36	*2.35%* + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	24 Juni 2016/ *June 24, 2016*	14,5
7	The Export-Import Bank of Korea dan/ *and* ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	35	35	0.98% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	2,3	24 Juni 2016/ *June 24, 2016*	14,5
8	ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG PLTGU Grati	17	17	0.98% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	1,1	24 Juni 2016/ *June 24, 2016*	14,5
9	Japan Bank for International Cooperation PLTU jawa 2 Priok	27	27	3,52%	0,2	*20 Oktober 2016/* *October 20, 2016*	15
10	Japan Bank for International Cooperation PLTU jawa 2 Priok	18	18	0,7% + LIBOR 6 bulanan/ *6 months*	0,1	*20 Oktober 2016/* *October 20, 2016*	15
11	Export Development Canada dan/ *and* Hungarian Export Import Bank Private Limited Company *Batam Mobile Power Plant*	436	40	*2,56%*	27,6	*2 Desember 2016/* *December 2, 2016*	12
	Jumlah dalam US$/ *Total in* US$	**1.848**	**1.238**		**36,1**		

*) dalam jutaan/ *in million*
**) termasuk masa tenggang/ *include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Tahun/ *Year **)*
	Fasilitas pinjaman dalam EUR/ *EUR loan facilities*						
1	Agence Francaise De Developpement *Transmission Jakarta*	100	100	0,2 % + EURIBOR 6 bulanan/ *6 months*	--	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	15
2	Agence Francaise De Developpement *Jakarta's grid law carbon master plan study*	1	1	0%	--	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	5
3	Kreditanstalt fur Wiederaufbau *Rehabilitation of unit 3x4 of Suralaya Power Plant*	175	175	2,20%	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	12
4	Kreditanstalt fur Wiederaufbau *1000 Islands Renewable Energy*	65	65	2,20%	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaufbau *Rehabilitation of PLTG Kamojang*	60	60	1,70%	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
6	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi/ *Transmission*	45	45	1,65%	--	23 Mei 2016/ *May 23, 2016*	13
7	ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG dan/ *and* Societe Generale PLTGU Grati	40	40	1,09% + biaya tambahan/ *Mandatory cost*	3	24 Juni 2016/ *June 24, 2016*	14,5
	Jumlah dalam EUR/ *Total in EUR*	**486**	**486**		**3**		

*) dalam jutaan/ *in million*
**) termasuk masa tenggang/ *include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Tahun/ *Year **)*
	Fasilitas pinjaman dalam JPY/ *JPY loan facilities*						
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension	16.430	16.430	1,03% + 0,55%	441	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	15,5
2	Japan Bank for International Cooperation PLTU Jawa 2 Priok	31.763	31.763	1,58%	416	20 Oktober 2016/ *October 20, 2016*	15
	Jumlah dalam JPY/ *Total in JPY*	**48.193**	**48.193**		**857**		

*) Dalam jutaan/ *In million*
**) Termasuk masa tenggang/ *Include grace period*

	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ *Rupiah loan facilities*						
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Rakyat Indonesia Corporate loan KMK 2011	28.000.000	14.500.000	2,45% + Rata-rata deposito berjangka 3 bulanan/ *Average time deposit 3 months*	--	17 November 2016/ *November 17, 2016*	1
2	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* PT Bank Mandiri Corporate loan 2016	12.000.000	5.601.928	1,92% + JIBOR 3 bulanan/ *3 months*	--	19 Desember 2016/ *December 19, 2016*	10
	Jumlah dalam Rupiah/ *Total in Rupiah*	**40.000.000**	**20.101.928**		**--**		

*) Dalam jutaan/*In million*
**) Termasuk masa tenggang/*Include grace period*

e. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractors*	Nilai kontrak setara/ *Contract amount equivalent* Rp	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	2,618,958	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ *consortium of* Fortum Service OY & PT Medco Energy	1,082,118	2005-2030
Jumlah/*Total*		**3,701,076**	

f. Litigasi

(i) Pada tahun 2001, Hendrik Meinder Nelwan dan kawan-kawan mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah ahli waris yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama sebesar Rp54.000.000 di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI Perusahaan kalah.

Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh PN Manado, Perusahaan melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi (Derden Verzet) terhadap tanah tersebut mengingat Perusahaan merupakan bezitter yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsea Lama selama lebih dari 50 tahun. Saat ini perkara Derden Verzet tersebut di tingkat Peninjauan Kembali telah diputus bahwa Perusahaan kalah.

f. Litigation

(i) In 2001, Hendrik Nelwan and co-claimants filed claims for compensation for the heirs to the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, amounting to Rp54,000,000 in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Reconsideration in the Supreme Court, the Company lost.

In the preparation of Execution by District Court of Manado, the Company filed a Third Resistence of the Execution (Derden Verzet) of the land rights considering the Company is a good bezitter that has been effectively controlling and operating PLTA Tonsealama for more than 50 years. The Derden Verzet is still in the process of Reconsideration in the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Company loss.

Perusahaan melaporkan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap Hendrik Meinder Nelwan (Penggugat) atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Saat ini laporan pidana tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dengan amar putusan Hendrik Meinder Nelwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu dalam perkara perdata PLTA Tonsea Lama.

The Company has filed claims for criminal action about fake documents in the name of Hendrik Meinder Nelwan that were used as evidence materials against the Company for civil action. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has ruled that Hendrik Meinder Nelwan is proven and reassured of doing a criminal action by using fake documents.

Atas putusan pidana tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Manado mengeluarkan Penetapan yang menyampaikan eksekusi PLTA Tonsea Lama dapat dilaksanakan apabila putusan Kasasi pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan putusan kasasi pidana pemalsuan dokumen perkara PLTA Tonsealama tidak dieksekusi.

For that ruling, the chief of the District Court of Manado has released a verdict state that the execution of PLTA Tonsealama has to wait for the verdict from the Criminal Court. The final verdict of the Criminal Casasion has ruled that the Company won and PLTA Tonsealama will not be excecuted.

(ii) Pada tahun 2012, Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Meta Epsi sehubungan dengan Penggugat meminta bank garansi di Bank Niaga untuk tidak dicairkan kepada Perusahaan. Nilai gugatan sebesar Rp83.300 dan Rp5. Pada tanggal 14 Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan penggugat. Pada tanggal 19 Maret 2013, Perusahaan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta, mengabulkan banding Perusahaan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 27 Januari 2016 Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat kasasi.

(ii) In 2012, the Company faced unlawful acts from PT Meta Epsi in the District Court of South Jakarta relating to the plaintiff's claim to unwithdraw a bank guarantee account in Bank Niaga. The amount of the claim is Rp83,300 and Rp5. On March 14, 2013, the District Court of South Jakarta granted the plaintiff's claim. On March 19, 2013 the Company appealed to the High Court of DKI Jakarta. On October 27, 2014, the High Court of DKI Jakarta granted the Company's appeal and cancelled the ruling of the District Court of South Jakarta. On January 27, 2016 the Company won the app eal at the Cassasion.

(iii) Pada tanggal 26 Desember 2012 Perusahaan menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Modaco Enersys dan PT Angkasa Buana Cipta terkait Penggugat merasa dirugikan karena Perusahaan selaku tergugat memberikan rancangan pekerjaan pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10MW) Bima yang dirasa keliru sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunannya. Nilai tuntutan ganti rugi sebesar Rp61.927. Pada tanggal 19 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan penggugat, dan selanjutnya penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat banding. Penggugat telah melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan saat ini masih menunggu proses kasasi.

(iii) On December 26, 2012, the Company faced claims for unlawful acts from PT Modaco Enersys and PT Angkasa Buana Cipta relating to the plaintiff's claim that the Company as defendants gave an unsuitable design for PLTU 1 West Nusa Tenggara (2x10MW) Bima. The amount of the claim is Rp61,927. On February 19, 2014, the District Court of South Jakarta refused the claim of plaintiff and consequently, the plaintiff submitted an appeal to High Court of Jakarta on March 3, 2014. The Company won the case in the appeal process. The plaintiff has further submitted an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and currently is waiting for the appeal process.

(iv) Pada tanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih sehubungan dengan sengketa tanah PLTGU Muara Tawar. Nilai gugatan sebesar Rp59.264. Perusahaan memenangkan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian penggugat mengajukan banding. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

(iv) On August 21, 2014, the Company faced an unlawful act from Ny. Nesah binti Sadih relating to disputes regarding PLTGU Muara Tawar land rights. The amount of the claim was Rp59,264. The Company won the case in the District Court of South Jakarta, subsequently the plaintiff submitted an appeal. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still in appeal process in the High Court of Jakarta.

(v) Pada tanggal 28 Januari 2015, Perusahaan menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh Jaya Bin Jaiyan sebesar Rp24.600 dan gugatan immaterial sebesar Rp50.000. Perusahaan memenangkan kasus ini di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi.

(v) On January 28, 2015, the Company faced an unlawful act filed by Jaya Bin Jaiyan amounting to Rp24,600 and non-material loss amounting to Rp50,000. The Company won the case in the District Court of Bekasi. As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, the case is still on appeal process in the High Court of Jakarta.

(vi) Pada tanggal 11 Januari 2016, Perusahaan menghadapi gugatan dari Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak terkait pembebasan lahan yang dilakukan Perusahaan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pembangunan PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Nilai gugatan ini sebesar Rp54.548. Pengadilan Negeri Balige menerima gugatan Penggugat dengan putusan tanggal 6 September 2016 dan PLN menyatakan banding pada tanggal 15 September 2016 dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian perkara ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan.

(vi) On January 11, 2016, the Company faced a lawsuit from Netti Pardosi and Pandapotan Kasmin Simanjuntak related to land rights acquisition by the Company on an area of 6.2 Ha for construction of PLTA Asahan III. Plaintiffs demanded that the land rights acquisition to be cancelled. The lawsuit amounted to Rp54,458. District Court of Balige accepted the Plaintiff's suit on September 6, 2016 and PLN filed an appeal on September 15, 2016 and as of the date of issuance of the consolidated financial statements, this case is in appeal process at the Medan High Court.

(vii) Perusahaan dan entitas anak juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/ distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

(vii) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, at several areas of the Company's transmission/ distribution facilities, disputes with the Company's employees and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favour of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

55. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal

55. Financial Instruments, Financial Risk and Capital Risk Management

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

a. Categories and classes of financial instruments

The following table discloses the details of the Company's and its subsidiaries' financial asset classifications:

	2016			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-Sale*	Jumlah Aset dan Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Assets and Liabilities*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Aset tidak lancar				***Noncurrent assets***
Piutang pihak berelasi	263.064	--	263.064	*Receivable from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunanannya	7.464.260	--	7.464.260	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	350.465	--	350.465	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	--	967	967	*Other noncurrent assets*
Jumlah aset tidak lancar	8.077.789	967	8.078.756	*Total noncurrent assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	41.909.223	--	41.909.223	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	374.771	--	374.771	*Short-term investments*
Piutang usaha	21.710.961	--	21.710.961	*Trade receivables*
Piutang subsidi listrik	14.844.365	--	14.844.365	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	356.155	--	356.155	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	36.548	--	36.548	*Receivables from related parties*
Aset lancar lainnya	5.915	--	5.915	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	79.237.938	--	79.237.938	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**87.315.727**	**967**	**87.316.694**	***Total financial assets***

	2015			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instruments classification*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and Receivables*	Tersedia untuk dijual / *Available-for-Sale*	Jumlah Aset dan Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Assets and Liabilities*	
Aset keuangan				***Financial assets***
Aset tidak lancar				***Noncurrent assets***
Piutang pihak berelasi	268.647	--	268.647	*Receivable from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunanannya	8.796.977	--	8.796.977	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	68.993	--	68.993	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	--	1.687	1.687	*Other noncurrent assets*
Jumlah aset tidak lancar	9.134.617	1.687	9.136.304	*Total noncurrent assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	23.596.339	--	23.596.339	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	120.059	--	120.059	*Short-term investments*
Piutang usaha	19.834.227	--	19.834.227	*Trade receivables*
Piutang subsidi listrik	17.501.009	--	17.501.009	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang lain-lain	152.577	--	152.577	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	71.669	--	71.669	*Receivables from related parties*
Jumlah aset lancar	61.275.880	--	61.275.880	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**70.410.497**	**1.687**	**70.412.184**	***Total financial assets***

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

All of the Company's and subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortized cost, details are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi:			***Amortised cost measured at financial liabilities:***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			*Long-term liabilities - net of current maturities*
Penerusan pinjaman	29.133.756	29.205.236	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non Bank	7.257.810	8.194.693	*Government and Non-Bank Government Financial Istitution Loan*
Utang sewa pembiayaan	17.933.075	21.556.619	*Lease liabilities*
Utang bank	100.362.498	77.828.870	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	68.824.683	80.043.338	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	7.315.422	7.849.063	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.301	2.566	*Payable to related parties*
Utang lain-lain	155.781	67.678	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**230.985.326**	**224.748.063**	***Total noncurrent liabilities***
Liabilitas jangka pendek			***Current liabilities***
Utang usaha	30.192.084	29.004.552	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	12.049.554	11.324.898	*Customers' security deposits*
Biaya yang masih harus dibayar	4.484.742	3.828.338	*Accrued expenses*
Utang biaya proyek	384.739	1.113.825	*Project cost payable*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	2.562.332	2.505.347	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non Bank	1.043.793	293.793	*Government and Non-Bank Government Financial Istitution Loan*
Utang sewa pembiayaan	3.789.317	3.445.604	*Lease liabilities*
Utang Bank	26.394.780	11.752.458	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.568.000	9.122.350	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	328.683	321.164	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	15.716.446	17.932.260	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**106.514.470**	**90.644.589**	***Total current liabilities***
Jumlah liabilitas keuangan	**337.499.796**	**315.392.652**	***Total financial liabilities***

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 23, 24, 25, 26, 27 dan 28) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 20), dan tambahan modal disetor (Catatan 21).

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries' capital structure consists of debt (Notes 23, 24, 25, 26, 27 and 28) and equity shareholders of the holding that consists of capital stock, retained earnings (Note 20) and additional paid-in capital (Note 21).

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

The Company's loan covenants require among other things, the fullfilment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Company and its subsidiaries' financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. "DIVMRK" bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat ("DIRREN").

In managing those risks, the Company established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. "DIVMRK" is responsible to the Corporate Planning Director ("DIRREN").

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories: strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Catatan 55 untuk klasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

Related to financial risks, the Company has established management's policy related to hedging transactions. As an SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealized gain or loss from derivative contracts. The Company and its subsidiaries derivative contracts are classified as Financial Assets measured in fair value through profit and loss (FVTPL). These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Company and its subsidiaries reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities, as well as Note 55 for the financial instruments classification. The Company and its subsidiaries does not apply hedge accounting on those transactions.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahan kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Analisa sensitifitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26, Biaya Pinjaman.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.

The Company held regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company then incorporated this outlook into its internal financial forecast and developed a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Company and its subsidiaries' foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 52.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress assets in accordance with SFAS 26, Borrowing Costs.

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*

	2016				
	USD		**JPY**		
	10%	**-10%**	**10%**	**-10%**	
Aset Keuangan					***Assets***
Piutang pihak berelasi	19.043	(19.043)	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	45.268	(45.268)	509.802	(509.802)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	179.879	(179.879)	10.584	(10.584)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	244.190	(244.190)	520.386	(520.386)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					***Liabilities***
Penerusan pinjaman	(759.783)	759.783	(1.557.056)	1.557.056	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	--	--	(1.629.179)	1.629.179	*Lease liabilities*
Utang bank	(3.012.082)	3.012.082	--	--	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	(5.038.500)	5.038.500	--	--	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	(573.308)	573.308	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(422.138)	422.138	--	--	*Other payables*
Utang biaya proyek	(19.537)	19.537	(515)	515	*Project cost payable*
Utang usaha	(420.073)	420.073	(277)	277	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(114.151)	114.151	(36.338)	36.338	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(10.359.572)	10.359.572	(3.223.365)	3.223.365	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(10.115.382)**	**10.115.382**	**(2.702.979)**	**2.702.979**	***Total - net***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*

	2016				
	EUR		**Lain-lain/*Others **)***		
	10%	**-10%**	**10%**	**-10%**	
Aset Keuangan					***Assets***
Kas dan setara kas	7.752	(7.752)	461	(461)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	7.752	(7.752)	461	(461)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					***Liabilities***
Penerusan pinjaman	(42.222)	42.222	(13.305)	13.305	*Two-step loans*
Utang bank	(151.485)	151.485	--	--	*Bank loans*
Utang lain-lain	(50.392)	50.392	(8.252)	8.252	*Other payables*
Utang biaya proyek	(3.571)	3.571	--	--	*Project cost payable*
Utang usaha	(11.654)	11.654	(5.121)	5.121	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(1.207)	1.207	(140)	140	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(260.531)	260.531	(26.818)	26.818	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(252.779)**	**252.779**	**(26.357)**	**26.357**	***Total - net***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*

	2015				
	USD		**JPY**		
	10%	**-10%**	**10%**	**-10%**	
Aset keuangan					***Financial Assets***
Piutang pihak berelasi	21.726	(21.726)	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	45.984	(45.984)	612.056	(612.056)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	184.015	(184.015)	5.542	(5.542)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	251.725	(251.725)	617.598	(617.598)	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(664.009)	664.009	(1.617.445)	1.617.445	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	--	--	(1.875.167)	1.875.167	*Lease liabilities*
Utang bank	(2.832.423)	2.832.423	--	--	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	(5.742.169)	5.742.169	--	--	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	(612.763)	612.763	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	(493.365)	493.365	(7.730)	7.730	*Other payables*
Utang biaya proyek	(63.520)	63.520	(3.370)	3.370	*Project cost payable*
Utang usaha	(523.112)	523.112	--	--	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(122.812)	122.812	(42.352)	42.352	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(11.054.173)	11.054.173	(3.546.064)	3.546.064	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(10.802.448)**	**10.802.448**	**(2.928.466)**	**2.928.466**	***Total - net***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)* 2015				
	EUR		Lain-lain/*Others* **)		
	10%	-10%	-10%	-10%	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan setara kas	21.274	(21.274)	488	(488)	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	21.274	(21.274)	488	(488)	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(64.161)	64.161	(17.944)	17.944	*Two-step loans*
Utang bank	(103.328)	103.328	--	--	*Bank loans*
Utang lain-lain	--	--	(23.888)	23.888	*Other payables*
Utang biaya proyek	(8.946)	8.946	--	--	*Project cost payable*
Utang usaha	(1.975)	1.975	--	--	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(1.148)	1.148	(179)	179	*Accrued expenses*
Total liabilitas keuangan	(179.558)	179.558	(42.011)	42.011	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(158.284)**	**158.284**	**(41.523)**	**41.523**	***Total - net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara Rp menggunakan kurs tanggal pelaporan

**) Not considering the effect of borrowing cost capitalization*
***) Denominated in other foreign currency are presented as Rp equivalent using the exchange rates prevelling at reporting dates*

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak dengan risiko suku bunga nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company and its subsidiaries to fair value interest risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company's and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 basis points increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2016		
	+50 bp	-50bp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	157.160	(157.160)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1.377	(1.377)	*Short-term investments*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	27.991	(27.991)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Sub jumlah laba (rugi)	186.528	(186.528)	*Sub total income (loss)*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(29.087)	29.087	*Two-step loans*
Utang bank	(447.838)	447.838	*Bank loans*
Sub jumlah laba (rugi)	(476.925)	476.925	*Sub total income (loss)*
Jumlah laba (rugi)	**(290.397)**	**290.397**	***Total income (loss)***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2015		
	+50 bp	-50bp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	88.486	(88.486)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	436	(436)	*Short-term investments*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	32.989	(32.989)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Sub jumlah laba (rugi)	121.911	(121.911)	*Sub total income (loss)*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(29.086)	29.086	*Two-step loans*
Utang bank	(333.588)	333.588	*Bank loans*
Sub jumlah laba (rugi)	(362.674)	362.674	*Sub total income (loss)*
Jumlah laba (rugi)	**(240.763)**	**240.763**	***Total income (loss)***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

*) *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three months to minimize the Company's credit risk. For cash and cash equivalents, the Company and its

Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55.a untuk rinciannya.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 55.a for details.

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Credit quality of trade accounts receivable
The Company believes there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik
Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

Credit quality of electricity subsidy
Receivables on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company believes there is no risk of default by the Government.

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya
Perusahaan menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

Credit qualities of cash, time deposits and restricted cash
The Company placed cash and cash equivalents, time deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company believes the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and other SOEs.

Kualitas kredit piutang lainnya
Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini

Credit quality of other receivables
Other receivables are to be collected from the Company's related parties and employees; as such, the Company can closely monitors the collectability of these receivables. The Company

dengan seksama. Perusahaan memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

has a good historical collection rate of these financial assets.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2016. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2016. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

	2016					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year* Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years* Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years* Rp	Lebih dari lima tahun/ *Over five years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Liabilitas keuangan:						***Financial Liabilities:***
Penerusan pinjaman	3.225.020	5.647.585	4.788.322	23.224.184	36.885.111	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.477.709	2.792.908	2.294.957	3.917.838	10.483.412	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	6.015.204	13.055.210	7.174.345	6.143.690	32.388.449	*Lease liability*
Utang bank	37.685.205	42.043.558	39.585.060	51.306.781	170.620.604	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	16.506.604	23.893.851	39.747.215	48.967.000	129.114.670	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	787.756	1.579.268	1.578.912	7.931.753	11.877.689	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	--	2.301	--	--	2.301	*Related parties payables*
Utang usaha	30.192.084	--	--	--	30.192.084	*Trade payables*
Utang jaminan langganan	12.049.554	--	--	--	12.049.554	*Customer's security deposits*
Utang biaya proyek	384.739	--	--	--	384.739	*Project cost payable*
Biaya masih harus di bayar	10.644.559	--	--	--	10.644.559	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	18.081.035	155.781	--	--	18.236.816	*Other payables*
Jumlah	**137.049.469**	**89.170.462**	**95.168.811**	**141.491.246**	**462.879.988**	***Total***

	2015					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year* Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years* Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years* Rp	Lebih dari lima tahun/ *Over five years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Liabilitas keuangan:						***Financial Liabilities:***
Penerusan pinjaman	3.268.316	6.186.444	4.832.443	22.558.089	36.845.292	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	750.872	2.903.581	2.697.016	5.278.641	11.630.110	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	5.843.507	11.687.014	6.747.450	12.138.817	36.416.788	*Lease liability*
Utang bank	17.513.626	35.774.915	31.128.580	38.055.597	122.472.718	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6.992.468	22.967.948	39.612.726	85.462.633	155.035.775	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	811.146	1.622.292	1.622.292	8.977.786	13.033.516	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.566	--	--	--	2.566	*Related parties payables*
Utang usaha	29.004.552	--	--	--	29.004.552	*Trade payables*
Utang jaminan langganan	11.324.898	--	--	--	11.324.898	*Customer's security deposits*
Utang biaya proyek	1.113.825	--	--	--	1.113.825	*Project cost payable*
Biaya masih harus dibayar	3.828.338	--	--	--	3.828.338	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	17.932.260	67.678	--	--	17.999.938	*Other payables*
Jumlah	**98.386.374**	**81.209.872**	**86.640.507**	**172.471.563**	**438.708.316**	***Total***

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

	2016		2015		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Pinjaman diberikan dan piutang					***Loans and receivables***
Piutang pihak berelasi	299.612	299.191	340.316	339.279	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7.464.260	7.867.441	8.796.977	9.107.686	*Restricted cash in banks and time deposits*

	2016		2015		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					***Liabilities at amortized cost***
Penerusan pinjaman	31.696.088	34.287.857	31.710.583	33.786.503	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	8.301.603	6.862.736	8.488.486	7.644.779	*Government and non-bank Government financial institution loan*
Utang sewa pembiayaan	21.722.392	22.164.687	25.002.223	25.566.187	*Lease liabilities*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	78.392.683	82.902.380	89.165.688	91.994.400	*Bonds payable and sukuk ijarah*
Utang listrik swasta	7.644.105	8.683.601	8.170.227	9.429.477	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	2.301	2.301	2.566	2.566	*Payable to related parties*
Utang bank	126.757.278	126.834.204	89.581.328	89.580.913	*Bank loans*

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan diatas diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi diatas diklasifikasikan sebagai tingkat satu dalam hirarki nilai wajar.

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level two of the fair value hierarchy.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level one of the fair value hierarchy.

e. Aset Derivatif

Sejak tahun 2015, Perusahaan melaksanakan hedging terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi hedging yang dilaksanakan adalah kontrak kontrak *forward* dengan jumlah rincian per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

e. Derivative Asset

Since 2015, the Company has implemented limited hedge on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is forward contract with details as of December 31, 2016 as follows:

Pihak Lawan/ *Couterparties*	Jangka Waktu hedging/ *Hedging periods*	Jumlah Notional/ *Notional amount* Rp	Aset derivatif/ *Derivatives asset* Rp
BRI	2 Minggu/ *Weeks*	404.190	994
Bank Mandiri	2 Minggu/ *Weeks*	404.160	1.024
Bank Mandiri	3 Minggu/ *Weeks*	404.100	1.084
BNI	1 Bulan/ *Month*	404.790	837
BRI	1 Bulan/ *Month*	404.640	988
Bank Mandiri	1 Bulan/ *Month*	404.640	988
Jumlah/ *Total*		**2.426.520**	**5.915**

56. Informasi Tambahan terkait Penerapan Kebijakan Akuntansi Baru

56. Additional Information Related to Implementation of New Accounting Policy

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No.6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No.6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No.6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agrement with IPPs. The effect of POJK No.6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as of January 1, 2016 (Note 2.a).

Penerapan POJK No.6 secara prospektif menyebabkan beberapa pos pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda (Catatan 3.l dan 3.w). Tabel berikut ini disajikan sebagai Informasi tambahan.

Prospective implementation of POJK No.6 causes certain accounts in consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016 and 2015 are presented by using different accounting policies (Notes 3.l and 3.w). The following tables are presented as an additional information.

	Tanpa/ *Without* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2016	31 Desember/ *December 31*, 2015 *)	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar			*Non-current assets*
Aset tetap	1.145.529.527	1.115.651.990	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	9.882.003	14.300.502	*Deferred tax assets*
Liabilitas jangka panjang			*Non-current liabilities*
Utang sewa pembiayaan	17.933.075	21.556.619	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	7.315.422	7.849.063	*Electricity purchase payable*
Liabilitas jangka pendek			*Current liabilities*
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak berelasi	7.772.693	9.290.847	*Related parties*
Pihak ketiga	22.419.391	19.713.705	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	10.644.559	8.410.971	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	328.683	321.164	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	3.789.317	3.445.604	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	18.072.854	20.195.245	*Other payables*
Ekuitas			*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	79.593.197	84.650.585	*Retained earnings - unappropriated*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian			*Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban usaha:			*Operating expenses:*
Bahan bakar dan pelumas	109.492.383	120.587.310	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	59.729.390	51.690.867	*Purchased electricity*
Sewa	6.545.114	7.560.994	*Lease*
Pemeliharaan	21.226.736	17.593.261	*Maintenance*
Penyusutan	27.512.150	21.418.640	*Depreciation*
Rugi usaha sebelum subsidi	(31.627.846)	(28.915.296)	*Operating loss before subsidy*
Pendapatan (beban) lain-lain			*Other income (expense)*
Beban keuangan	(18.703.276)	(17.536.348)	*Financial cost*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.195.210	(16.229.625)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanpa/ *Without* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2016	**31 Desember/ *December 31*, 2015 *)**	
Laba (rugi) sebelum pajak	15.976.481	(3.064.259)	*Income (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak	(5.427.843)	18.649.497	*Tax (expenses) benefit*
Laba tahun berjalan	10.548.638	15.585.238	*Income for the year*
Laba per saham dasar/ (Dalam Rupiah penuh)	194.349	337.017	*Basic/ earning per share (In Rupiah full amount)*
Laporan arus kas konsolidasian			*Consolidated statements of cash flows*
Arus kas dari aktivitas operasi			*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(200.943.180)	(200.977.911)	*Cash paid to suppliers*
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(343.303)	953.563	*Cash provided by (used in) operations*
Pembayaran bunga	(18.285.840)	(16.896.444)	*Interest expense paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	29.588.060	35.173.112	*Net cash provided by operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(321.879)	(297.519)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.705.740)	(3.067.581)	*Payments of lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	43.595.053	(753.589)	*Net cash provided by (used in) financing activities*

	Dengan/ *Under* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2016 *)	**31 Desember/ *December 31*, 2015**	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar			*Non-current assets*
Aset tetap	1.239.554.567	1.187.879.590	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	24.116.230	29.088.271	*Deferred tax assets*
Liabilitas jangka panjang			*Non-current liabilities*
Utang sewa pembiayaan	165.361.010	149.621.763	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	6.587.627	7.093.280	*Electricity purchase payable*
Liabilitas jangka pendek			*Current liabilities*
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak berelasi	7.209.473	8.910.438	*Related parties*
Pihak ketiga	20.912.486	17.715.563	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	12.566.549	10.627.055	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	318.846	311.196	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	7.323.327	6.759.138	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	18.057.664	20.188.608	*Other payables*
Ekuitas			*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	37.791.476	41.222.131	*Retained earnings - unappropriated*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian			*Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban usaha:			*Operating expenses:*
Bahan bakar dan pelumas	127.408.734	138.408.315	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	4.524.394	4.420.859	*Purchased electricity*
Sewa	8.082.353	8.065.522	*Lease*
Pemeliharaan	26.087.691	21.861.310	*Maintenance*
Penyusutan	31.484.447	25.406.856	*Depreciation*
Rugi usaha sebelum subsidi	(4.709.692)	(8.227.086)	*Operating loss before subsidy*
Pendapatan (beban) lain-lain			*Other income (expense)*
Beban keuangan	(46.385.695)	(39.977.228)	*Financial cost*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	7.133.260	(27.326.131)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*

	Dengan/ *Under* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2016 *)	**31 Desember/ *December 31*, 2015**	
Laba (rugi) sebelum pajak	18.156.756	(15.913.435)	*Income (loss) before tax*
(Beban) manfaat pajak	(5.981.386)	21.939.942	*Tax (expenses) benefit*
Laba tahun berjalan	12.175.370	6.026.507	*Income for the year*
Laba per saham dasar/ (Dalam Rupiah penuh)	224.424	130.106	*Basic/ earning per share (In Rupiah full amount)*
Laporan arus kas konsolidasian			*Consolidated statements of cash flows*
Arus kas dari aktivitas operasi			*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(164.210.241)	(178.049.789)	*Cash paid to suppliers*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	36.388.636	23.881.685	*Cash provided by operations*
Pembayaran bunga	(45.968.259)	(37.708.595)	*Interest expense paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	38.637.580	37.289.083	*Net cash provided by operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(312.695)	(290.798)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(12.764.446)	(5.190.273)	*Payments of lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	34.545.533	(2.869.560)	*Net cash provided by (used in) financing activities*

*) Tidak diaudit / *) *Unaudited*

57. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *57. Events After Reporting Period*

(i) Pada bulan Januari 2017, Perusahaan telah melakukan penarikan pinjaman senilai Rp5.601.926 untuk fasilitas Pinjaman Perusahaan 2016 dari Bank Mandiri (Catatan 26).

(i) In January 2017, the Company made withdrawals in the amount of Rp5,601,926 under Corporate Loan 2016 facility from Bank Mandiri (Note 26).

(ii) Pada tanggal 9 Januari 2017, Perusahaan telah melakukan penarikan pertama pinjaman IBRD 86100ID. Jumlah penarikan adalah sebesar US$107.650.000. Pinjaman ini sebelumnya telah dinyatakan efektif sejak tanggal 18 November 2016 berdasarkan surat dari World Bank no.CD-254/WB/XI/2016 (Catatan 54).

(ii) On January 9, 2017, the Company has performed its first withdrawal of loan IBRD 86100ID. The withdrawal amounted to US$107,650,000. This loan has previously been declared effective since November 18, 2016 based on the letter from World Bank no.CD-254/WB/XI/2016 (Note 54).

(iii) Pada tanggal 10 Januari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjualan bertahap dengan Islamic Development Bank ("IDB") dimana IDB berpartisipasi dalam pendanaan Proyek Peningkatan Jaringan Listrik ("Proyek") dengan cara mendanai pembelian atas peralatan tertentu ("Aset"). Berdasarkan perjanjian ini, IDB menyediakan pendanaan melalui penjualan bertahap yang jumlahnya tidak melebihi US$330.000.000 dan penjualan Aset kepada Perusahaan dimana IDB

(iii) On January 10, 2017 the Company entered into an installment sale agreement with Islamic Development Bank ("IDB") in which IDB participate in the financing of the Power Grid Enhancement Project (the "Project") by financing the purchase of certain equipments (the "Asset"). Under this agreement, IDB provide the financing of the Asset through installment sale for an amount not exceeding US$330,000,000 and the sale of the Asset to the Company in which IDB appointed the

menunjuk Perusahaan sebagai agen untuk melaksanakan Proyek dan pembelian Aset. Pencairan dana dapat dilakukan dalam tiga tahun sejak pencairan pertama ("Periode Pembangunan"). Biaya modal akan ditentukan oleh IDB berdasarkan jumlah pencairan sampai dengan akhir masa pelaksanaan proyek atau pada saat penjualan terjadi ditambah suku bunga mengambang dari US$ LIBOR enam bulanan +1,3%.

Company as its agent for implementing the Project and purchasing the Asset. The disbursements are made available until three years since the first disbursement (the "gestation period"). The capital cost will be determined by IDB based on the total disbursements at the end of the gestation period or the time of sale plus a floating mark up rate of US$ LIBOR six months +1.3%.

(iv) Pada bulan Januari 2017, Perusahaan telah melunasi obligasi PLN XI tahun 2010 seri A sebesar Rp920.000 dan sukuk ijarah PLN IV tahun 2010 seri A sebesar Rp130.000 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2017.

(iv) In January 2017, the Company has fully settled the PLN XI Bonds 2010 series A amounting to Rp920,000 and sukuk ijara PLN IV 2010 series A amounting to Rp130,000 which were due on January 12, 2017.

(v) Pada tanggal 22 Februari 2017 Perusahaan telah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Pajak atas permohonan banding Perusahaan terhadap SKPKB PPh Badan tahun 2012. Hasil putusan tersebut mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan sehingga nilai kurang bayar dalam SKPKB Perusahaan yang semula sebesar Rp1.330.243 ditetapkan menjadi sebesar Rp100.510.

(v) On February 22, 2017 the Company received a copy of the Tax Court's verdict regarding the Company's appeal over the SKPKB of 2012 fiscal year Corporate Income Tax. The verdict has partly granted the Company's appeal on that the underpayment in the Company's SKPKB which was previously stated as Rp1,330,243 was stipulated to become Rp100,510.

(vi) Pada tanggal 27 Februari 2017, berdasarkan rapat pemegang saham PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB") dan PT Indonesia Power ("IP"), pihak berelasi, sepakat untuk membentuk entitas anak yang ruang lingkup kegiatan utamanya bergerak dibidang penyediaan suku cadang pembangkitan tenaga listrik. Dengan modal dasar sebesar Rp600.000, PJB akan menempatkan modal sebesar Rp76.500 dan IP Sebesar Rp73.500 sehingga porsi kepemilikan Perusahaan atas entitas anak adalah sebesar 51%.

(vi) Based on shareholder circular dated February 27, 2017, PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB") and PT Indonesia Power ("IP"), related party, agreed to establish a subsidiary with scope of its activities to provide spare parts for power plant. With share capital amounted to Rp600,000 PJB will subscribed paid - in capital amounting to Rp76,500 and IP amounting to Rp73,500 which giving the Company 51% share of ownership in newly subsidiary.

(vii) Pada bulan November 2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (”SKPKB”) atas berbagai Pajak Penghasilan (”PPh”) tahun 2013 sebesar Rp3.319.660. Atas SKPKB tersebut, Perusahaan telah melakukan pemindahbukuan dari pajak dibayar dimuka atas PPh 25/29 sebesar Rp690.012. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada bulan Pebruari 2017.

(vii) In November 2016, the Company received several tax assessment letters for underpayment (”SKPKB”) for various income tax (”PPh”) for fiscal year 2013 amounting to Rp3,319,660. For those SKPKB, the Company has partly overbooking from income tax art 25/29 amounted to Rp690,012. The Company has submitted objection letter for those SKPKB on February 2017.

(viii) Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK menerbitkan POJK No.6 Tahun 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

(viii) On March 1, 2017, the FSA issued POJK No.6 Year 2017 regarding Accounting Treatment on Transactions under the Power Purchase Agreement.

The Company decided to implement POJK No.6 prospectively since January 1, 2016 (Note 2.a).

(ix) Perusahaan telah melakukan pembayaran utang pajak dan uang tebusan kepada Kas Negara sebesar Rp3.644.981 dalam rangka keikutsertaan dalam Pengampunan Pajak. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sehubungan keikutsertaan Perusahaan dalam Pengampunan Pajak tersebut belum diterbitkan.

(ix) The Company has made payments for tax payables and compensation to State Treasury amounting to Rp3,644,981 with respect to the Company’s participation in Tax Amnesty. Until March 30, 2017, the Tax Amnesty Approval Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia regarding the Company’s participation in Tax Amnesty has not been issued.

58. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017.

58. Management’s Responsibility and Approval of the Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issuance on March 30, 2017.

Referensi Silang Kriteria Annual Report Award

Cross Reference of Annual Report Award

Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

Reference of Financial Services
Authority Circular Letter Nomor 30-SEOJK.04-2016:
Public Company Annual Report

Referensi Kriteria Annual Report Award

Cross Reference of Annual Report Award

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
I. UMUM		**I. GENERAL**
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1. In good and correct Indonesian, it is recommended to present the report also in English.
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2. The annual report should be printed in good quality paper, using the font type and size that allow for easy reading
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:	√	3. Should state clearly the identity of the company. Name of company and year of the Annual Report is placed on:
1. Sampul muka;	√	1. The front cover;
2. Samping;	√	2. Sides;
3. Sampul belakang; dan	√	3. Back cover; and
4. Setiap halaman.	√	4. Each page.
4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	4. The Annual Report is presented in the company's website
II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING		**II. SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION**
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:	24-25	1. Result of the Company information in comparative form over a period of 5 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 5 years. The information contained includes:
1. Penjualan/pendapatan usaha;	√	1. Sales/income from business;
2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	2. Profit (loss). a. Attributable to owners; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;	√	b. Attributable to non-controlling shareholders;
3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	3. Total of profit (loss) and other comprehensive income: a. Attributable to owners; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan	√	b. Attributable to non-controlling shareholders; and
4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	√	4. Net profit (loss) per share. Note: profit (loss) and other comprehensive income disclosed in total if the company doesn't have subsidiaries.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:	24-25	2. Financial information in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 years. The information contained includes:
1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	√	1. Investments in associated entities;
2. Jumlah aset;	√	2. Total assets;
3. Jumlah liabilitas; dan	√	3. Total liabilities; and
4. Jumlah ekuitas.	√	4. Total equity.
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	24	3. Financial Ratio in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contains 5 (five) general financial ratios and relevant to the industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik 1. Jumlah saham yang beredar;	94	4. Information regarding share price in the form of tables and graphs 1. Number of shares outstanding;

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	-	2. The table forms contain the following information: a. Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed;
b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	b. Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	-	c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	-	3. Information presented on graphs that includes at least the closing price and trading volume of the share. a. The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	-	b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed for each quarter in the latest 2 (two) financial years. Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat:	28-29	5. Information regarding bonds, sharia bonds or convertible bonds issued and which are still outstanding in the last 2 financial years The information contained includes:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding);	√	1. The amount/value of bonds/convertible bonds outstanding;
2. Tingkat bunga/imbalan;	√	2. Interest rate;
3. Tanggal jatuh tempo; dan	√	3. Maturity date; and
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.	√	4. Rating of bonds. Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		**III. BOARD OF COMMISSIONERS' AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT**
1. Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut:	42-51	1 Board of Commissioners' Report Contains the following items:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	44-45	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis of such assessment;
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	49-50	2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors, and the basis of such view;
3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	47-49	3. Assessment of the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	50	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons of the changes.
2. Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:	56-70	2 Board of Directors' Report Contains the following items:
1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis;	58-65	1. Analysis of the company's performance, covering among others: a. strategic policies;
b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b. comparison between targets and achievements; and
c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	√	c. challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
2. Analisis tentang prospek usaha;	66-67	2. Analysis on business prospects;

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	67-68	3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	69	4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:	78-79	3. Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Contains the following items:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	√	1. Signatures are set on a separate page;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	√	2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	√	3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/ positions; and
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	-	4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or: written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.
IV. PROFIL PERUSAHAAN		**IV. COMPANY PROFILE**
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	82	1 Name and address of the company Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, website.
2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	83-85	2 Brief history of the company Includes among others: date/year of establishment, name and change in the company name, if any. Note: should be disclosed if the company never change the name.
3. Bidang usaha Uraian mengenai antara lain:	90-91	3 Field of business. The descriptions contains the following items:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	√	1. The company's business activities in accordance with the last articles of associations;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	√	2. The company's business activities; and
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	√	3. The types of products and or services produced.
4. Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	92-93	4 Organizational structure In the form of a chart, including the names and titles, at least until one level below the board of directors on the structure.
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	88-89	5 Company Vision and Mission The information should contain:
1. Visi perusahaan;	88	1. Company vision;
2. Misi perusahaan;	88	2. Company mission;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	88	3. A note that the vision and mission statements have been approved by the Board of Directors/ Commissioners; and
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	89	4. Statement concerning the corporate culture.
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain:	130-133	6. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners The information should contain:

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
1. Nama;	130-133	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	130-133	2. Title (including position in other company or institution);
3. Umur;	130-133	3. Age;
4. Domisili;	130-133	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	130-133	5. Education (Field of Study and Institutions);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	130-133	6. Working experience (Position, Institution/Company andPeriod Served); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk	130-133	7. Appointment history as the Board of Commissioners in the Company.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	134-139	7. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors. The information should contain:
1. Nama;	134-139	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	134-139	2. Title (including position in other company or institution);
3. Umur;	134-139	3. Age;
4. Domisili;	134-139	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	134-139	5. Education (Field of Study and Institutions);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	134-139	6. Working experience (Position, Institution/Company and Period Served); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	134-139	7. Appointment history as the Board of Directors in the Company.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. Informasi memuat antara lain:	138-139	8. Number of employees (comparative in two years) and description of competence building (for example: education and training of employees). The information should contain:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	√	1. The number of employees for each level of the organization;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	√	2. The number of employees for each level of education;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	√	3. The number of employees based on employment status;
4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	340-341, 346-347	4. The description and data of employees compentencies development program that has been conducted, which also reflect equal opportunity to all employees, for each level of the organization; and
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	349	5. Expenses of employee's compentencies development program incurred.
9. Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain:	94	9. Composition of shareholders. Should include:
1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	94	1. The details include the name of 20 largest shareholders and their percentage of ownership;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	94	2. The details of shareholders and their percentage of ownership, including: a. Names of shareholders having 5% or more shares;
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	94	b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.

	Materi & Penjelasan	√Halaman Page		Subject & Explanation
	3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	94		3. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding. Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:	96-97	10.	List of subsidiaries and/or associated entities In table form, containing:
	1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	√		1. Name of Subsidiary/Affiliate;
	2. Persentase kepemilikan saham;	√		2. Percentage of share ownership;
	3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan	√		3. Information on the field of business of Subsidiary/Affiliate; and
	4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	√		4. Explanation regarding the operational status of the Subsidiary/Affiliate (already operating or not yet operating).
11.	Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	98-99	11.	Company's group structure Company's group structure in the form of a chart, that shows subsidiaries, associated entities, joint venture and special purpose vehicle (SPV).
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain:	94-95	12.	Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year. Includes among others:
	1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action);	94-95		1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
	2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan	94-95		2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
	3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	94-95		3. The stock exchange where the shares are listed. Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain:	94-95	13.	Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year. Includes among others:
	1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	94-95		1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
	2. Nilai penawaran efek lainnya;	94-95		2. Offering price of other securities;
	3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	94-95		3. The stock exchange where the securities are listed; and
	4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	94-95		4. Rating of the securities. Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain:	186-190	14.	Name and address of capital market institutions and or supporting professions. The information contains, among others:
	1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	186-190		1. Name and address of Share Registrar/parties administering the company's shares;
	2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	186-190		2. Name and address of the Public Accountants' Office; and
	3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	186-190		3. Name and address of the Securities Rating company

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Informasi memuat antara lain:	38-39	15. Award and/or certification received by the company on last fiscal year, both on a national scale and international scale. Information should include:
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	38-39	1. Name of the award and or certification;
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	38-39	2. Year of receiving the award;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	38-39	3. Institution presenting the award and or certification; and
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	38-39	4. Period of validity (for certificates).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Memuat informasi antara lain:	154-185	16. Name and address of subsidiary companies and or branch office or representative office (if any) Information should include:
1. Nama dan alamat entitas anak; dan	154-185	1. Name and address of business entities; and
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	154-185	2. Name and address of branch/representative office Note: should be disclosed if there is no business entities/branches/representatives.
17. Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang:	192-193	17. Information presented on Company's website Covers at the very least:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	192-193	1. Shareholders information until individual shareholders;
2. Isi Kode Etik;	192-193	2. Contents of the Code of Conduct;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	192-193	3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	192-193	4. Annual Report (in the last 5 years); and
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	192-193	5. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	192-193	6. Board manual/Charter of the BoC, BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):	103	18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit Cover at least information of type of training and participant of:
1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	130-139	1. Training and/or education for Board of Commissioners;
2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	130-139	2. Training and/or education for Board of Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	130-139	3. Training and/or education for Audit Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	130-139	4. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;
5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;	130-139	5. Training and/or education for other Committee(s);
6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	130-139	6. Training and/or education for Corporate Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	130-139	7. Training and/or education for Internal Audit Unit during the fiscal year. Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year.
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan		**V. Management Analysis and Discussion on Company Performance**
1. Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai	264-297	1. Explanation of each business segment. Includes analysis on:

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	264-269	1. Explanation of each business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi;	264-269	2. Performance by business segments, among others: a. Production;
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	264-269	b. Increase/decrease in production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	272	c. Sales/income from business; and
d. Profitabilitas.	296-297	d. Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:	240-327	2. Description of company's financial performance Financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year, and the cause of the increase/decrease (in the form of narration and tables), among others concerning:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	276-284	1. Current assets, non-current assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	289	2. Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
3. Ekuitas;	285-295	3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	300	4. Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), Other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
5. Arus kas.	281-295	5. Cash flows.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Penjelasan tentang:	298-299	3. Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's accounts receivable collectibility, by presenting the relevant ratios calculated in accordance with the type of industry of the company Explanation on:
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	√	1. Capacity to pay debts in long term and short term; and
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	√	2. Accounts receivable collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). Penjelasan atas:	299, 300-301	4. Discussion on capital structure and capital structure policies Explanation on:
1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	√	1. Details of capital structure consisting of subordinated bonds and equity; and
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan	√	2. Management policies of the capital structure, and the basis of the such policies.
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	√	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Penjelasan tentang:	301-303	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	√	1. Parties in the commitments;
2. Tujuan dari ikatan tersebut;	√	2. Objectives of the commitments;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	√	3. Sources of funds to meet the commitments;
4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	4. Denomination currency of commitments; and
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	√	5. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks. Note: Should be disclosed if the company has no material ties in investments in capital goods on last fiscal year.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Penjelasan tentang:	303-304	6. Discussion on investment of capital goods realized in the last fiscal year Explanation on:
1. Jenis investasi barang modal;	√	1. Type of the investment of capital goods;
2. Tujuan investasi barang modal; dan	√	2. The purpose of the investment of capital goods; and
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	√	3. Value of the investment of capital goods realized in the last fiscal year. Note: Should be disclosed if the company has no investments in capital goods realized.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain:	304-305, 272-273	7. Information about the comparison between the target at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), and the target or projected to be achieved for the coming year regarding revenue, earnings, capital structure, or others that are considered important for the company Information should include:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	√	1. The comparison between the target at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization; and
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√	2. The target or projected to be achieved for the coming year (at least 1 year).
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	305-306	8. Material Information and facts that occurred after the date of the accountant's report (subsequent events). Description of important events after the date of the accountant's report including their impact on performance and business risks in the future. Note: should be disclosed if there is no significant events after the date of accountant report.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	306-307	9. Description of the company's business prospects. Information on the company prospects in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source.
10. Uraian tentang aspek pemasaran. Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	269-272	10. Information on marketing aspects Information regarding the marketing of the company's products and services, among others concerning the market segment.
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai:	307-308	11. Description regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years. Contains description on:
1. Kebijakan pembagian dividen;	√	1. Dividen policy;
2. Total dividen yang dibagikan;	√	2. Amount of dividend;
3. Jumlah dividen kas per saham;	√	3. Cash dividend per share;
4. Payout ratio; dan	√	4. Pay-out ratio; and
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	√	5. The announcement date of cash dividen payment for each year. Note: if there is no dividend payment, disclose the reasons for not making a dividend payment.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Memuat uraian mengenai:	309	12. Management and/or Employee Stock Ownership Program implemented by the company (ESOP/MSOP) Contains description on:
1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	309	1. Amount of ESOP/MSOP shares and the realization;
2. Jangka waktu;	309	2. Time periode;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	309	3. Requirements of rightful employee and/or management; and
4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	309	4. Exercise price Note: should be disclosed if there is no such program.
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Memuat uraian mengenai:	309	13. Use of proceeds from the public offering (in the event that the company is still obligated to report such use of proceeds). Contains information on:
1. Total perolehan dana;	309	1. Total funds obtained;
2. Rencana penggunaan dana;	309	2. Plan for funds utilization;
3. Rincian penggunaan dana;	309	3. Details of funds utilization;
4. Saldo dana; dan	309	4. Remaining balance of funds; and
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	309	5. Date of General Meeting of Shareholder (or Bondholder) approval on change in the funds utilization plan (if any).
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Memuat uraian mengenai:	309	14. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with related parties. Contains information on:
1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	309	1. Name of the transacting parties and nature of related parties;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	309	2. A description of the fairness of the transaction;
3. Alasan dilakukannya transaksi;	309	3. Reason for the transaction;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	309	4. Realization of transactions during the period;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan	309	5. Company policies regarding the review mechanism on the transactions; and
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	309	6. Compliance with related rules and regulations Note: should be disclosed if there are no such transactions.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Uraian memuat antara lain:	318-319	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company Covers information on:
1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	318-319	1. Name of regulations; and
2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	318-319	2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact. Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Uraian memuat antara lain:	319-322	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year. Descriptions include among others:
1. Perubahan kebijakan akuntansi;	319-322	1. Changes in accounting policy;
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	319-322	2. Reasons for the change; and
3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	319-322	3. Quantitative impact on the financial statements. Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	323-325	17. Information of Business continuity Disclosure about:
1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	323-325	1. Issues with significant potential to affect company's business continuity in the last fiscal year;
2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	323-325	2. Management assessment on issues in number 1; and
3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	323-325	3. Assumptions used by management in doing assessment. Notes: if there are no issues of significant potential to affect business continuity in the last fiscal year, should be disclosed underlying assumption which is used by management to assure that there are no issues of significant potential to affect business continuity in the last fiscal year.
VI. Good Corporate Governance		**VI. Good Corporate Governance**
1. Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain:	397-409	1. Information on the Board of Commissioners. The information should contain:
1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	398-399	1. Description of the responsibility of the Board of Commissioners;
2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	400-401	2. Training programs for improving the competence of the Board of Commissioner or orientation program for new member of Board of Commissioners; and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	398	3. Disclosing the Board Charter (guidance and work procedure of the Board of Commissioners).
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain:	405-407	2. Information about Independent Commissioner The information should contain:
1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	405	1. The criteria of Independent Commissioner; and
2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	406-407	2. Statement about the independency of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi Uraian memuat antara lain:	409-424	3. Information on the Board of Directors. The information should include:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	419-422	1. Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors;
2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	68-69	2. Training programs for improving the competence of the Board of Directors or orientation program for new member of Board of Directors; and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	410	3. Disclosing the Board Charter (guidance and work procedure of the Board of Directors).
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Memuat uraian mengenai:	424-431	4. GCG implementation assessment for 2015, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors. Includes among others:

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	√	1. Assessment criteria;
2. Pihak yang melakukan penilaian;	√	2. Assessor;
3. Skor penilaian masing-masing kriteria;	√	3. Assessment score on each criteria;
4. Rekomendasi hasil penilaian; dan	√	4. Recommendations on results of assessment; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	√	5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations. Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015.
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Mencakup antara lain:	432-437	5. Description of the remuneration policy for the Board of Directors that is related to the company performance Includes among others:
1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	√	1. Board of Commissioners Remuneration procedures;
2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	√	1. Board of Directors Remuneration procedures;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	√	2. Remuneration structure, disclosing the type and amount of short-term and long-term compensation/ post service benefits for each member of the Board of Commissioners;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	√	4. Remuneration structure, disclosing the type and amount of short-term and long-term compensation/ post service benefits for each member of the Board of Directors; and
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	√	5. Performance indicators to determine the remuneration of the Board of Directors.
6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	√	6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any). Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Informasi memuat antara lain:	437-453	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months) Information include:
1. Tanggal Rapat;	√	1. Date of meetings;
2. Peserta Rapat; dan	√	2. Meeting participants;
3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	√	3. Meeting Agenda. for each Board of Commissioners meetings, Board of Directors meeting and joint meetings.
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	94,455	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder. Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Mencakup antara lain:	453-454	8. Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors and major and/or controlling shareholders Includes among others:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	√	1. Affiliation between member of the Board of Directors and other Board of Directors members;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	√	2. Affiliation between member of the Board of Directors and Board of Commissioners members;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	√	3. Affiliation between member of the Board of Directors and major and/or controlling shareholders;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	√	4. Affiliation between member of the Board of Commissioners and other Board of Commissioners members; and
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	√	5. Affiliation between member of the Board of Commissioners and major and/or controlling shareholders Note: should be disclosed if there are no such affiliations.
9. Komite Audit Mencakup antara lain:	456-461	9. Audit Committee Includes among others:
1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	149-145, 458-459	1. Name and title of the members of the Audit Committee;
2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	149-145, 458-459	2. Qualification of education and work experience of Audit Committee members;
3. Independensi anggota komite audit;	457	3. Independence of the members of the Audit Committee;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	456-457	4. Description of tasks and responsibilities;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	461	5. Brief report on the activities carried out by the Audit Committee; and
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	459-460	6. Frequency of meetings and the attendance of the Audit Committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain:	468-472	10. Nomination and Remuneration Committee/Function Includes among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	468-470	1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Nomination and/or Remuneration Committee/ Function;
2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	469	2. Independence of the members of the Nomination and/ or Remuneration Committee/Function;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	468	3. Description of the tasks and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku;	471-472	4. Activities carried out by the Nomination and/or Remuneration Committee/Function;
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	470	5. Frequency of meetings and the attendance rate of the Nomination and/or Remuneration Committee/ Function;
6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/ atau remunerasi; dan	472	6. Statement about Nomination and/or Remuneration Committee/Function guidelines; and
7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	416	7. Board of Directors sucession policy.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Mencakup antara lain:	461-468	11. Other committees of the company under the Board of Commissioners Includes among others:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	464-465	1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the committees;
2. Independensi komite lain;	462-463	2. Independence of the members of the committee;

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	462	3. Description of the tasks and responsibilities;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	467-468	4. Activities carried out by the committees; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	465-466	5. Frequency of meetings and the attendance rate of other committee.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain:	476-488	12. Description of tasks and function of the Corporate Secretary. Includes among others:
1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	476	1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the committees;
2. Domisili;	476	2. Domisili;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	477-478	3. Duties and responsibilities; and
4. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.	478-490	4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain:	500-510	13. Description on Internal Audit Unit Includes among others:
1. Nama ketua unit audit internal;	501	1. Name of internal audit unit head;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	502-503	2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	504	3. Certification on internal audit profession;
4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	502-503	4. Internal audit unit composition in the company's structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	504-510	5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	503	6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik Informasi memuat antara lain:	510-511	14. Public accountant The information should contain:
1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	1. Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	√	3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	√	4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain:	490-500	15. Description of the company's risk management Includes among others:
1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	√	1. Description of risk management systems;
2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	√	2. Description of evaluation on the effectiveness of risk management systems;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	√	3. Description of risks faced by the company; and
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	√	4. Efforts to manage these risks.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain:	511-512	16. Description of internal control systems Includes among others:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	√	1. Short description of the internal control system, including financial and operational control;

	Materi & Penjelasan	√Halaman Page		Subject & Explanation
	2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan	√		2. Description of compatibility between the internal control system and internationally recognized internal conrol framework (COSO); and
	3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	–		3. Description of evaluation on the effectiveness of internal control system.
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup Mencakup antara lain informasi tentang:	540-547	17.	Description of corporate social responsibility activities related to environment Contains information on, among others:
	1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;	√		1. Activity target/plans by the Management for 2016;
	2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	√		2. Activities conducted and the quantitative impact of such activities; including environmental programs related to the company's operational activities such as utilization of environment-friendly materials and energy or recycled materials, waste management system, complaint handling of environmental issues, green lending, and others
	3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	–		3. Environmental certifications.
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Mencakup antara lain informasi tentang:	547-557	18.	Description of corporate social responsibility related to the workforce, work health and safety Contains information on, among others:
	1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan	√		1. Activity target/plans by the Management for 2016; and
	2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	√		2. Activities conducted and quantitative impact of such activities related to occupational, heath and safety aspects, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, accident rate, remuneration, complaint handling of work-related issues, and others.
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mencakup antara lain informasi tentang:	558-563	19.	Description of corporate social responsibility activities related to social and community development Contains information on, among others:
	1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;	√		1. Activity target/plans by the Management for 2016;
	2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	√		2. Activities conducted and impact of such activities; and
	3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	√		3. Cost expended related to social and community development activities such as recruitment of local manpower, community development, donation in improvement to public facilities and infrastructure, other social donations, communications on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Mencakup antara lain:	563-571	20.	Description of corporate social responsibility activities related to responsibility to the consumer. Contains information on, among others:
	1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan	√		1. Activity target/plans by the Management for 2016;
	2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	√		2. Activities conducted and impact of such activities related to product responsibility, such as consumers health and safety, product information, facility, total and handling of consumers claims, and so forth.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Mencakup antara lain:	616-522	21 Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period
1. Pokok perkara/gugatan;	√	1. Substance of the case/claim;
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	√	2. Status of settlement of case/claim;
3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	√	3. Potential impacts on the financial condition of the company; and
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	√	4. Administrative sanctions imposed on the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors, by the related authorities (capital markets, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that is not subject to administrative sanctions). Notes: in case not litigants, to be disclosed.
22. Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	489-490	22. Access to corporate information and data. Description on the availability of access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.
23. Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain:	522-527	23. Discussion of company code of conduct. Contains information on:
1. Pokok-pokok kode etik;	√	1. Content of the Code of Conduct;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	√	2. Disclosure on the relevancy of the code of conduct for all levels of the organization;
3. Penyebarluasan kode etik;	√	3. Socialization of the Code of Conduct;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	√	4. Type of sanctions for each code of conduct violation; and
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	√	5. Number of violations and sanctions given regarding code of conduct in the last fiscal year. Note: if there is no code of conduct violation in the last fiscal year, should be disclosed.
24. Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:	512-516	24. Disclosure on the whistleblowing system. Description of the mechanism of the whistleblowing system, including:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;	√	1. Mechanism for violation reporting;
2. Perlindungan bagi whistleblower;	√	2. Protection for the whistleblower;
3. Penanganan pengaduan;	√	3. Handling of violation report;
4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	4. The unit responsible for handling of violation report; and
5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	√	5. Number of received complaint and processed in the last fiscal year and the follow-up handling; and
6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	√	6. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures. Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
25. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	404-405, 416-417	25. The diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition Description of the Company's policy on diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition on Education (field of study), work experience, age, and gender. Note: the reasons and consideration should be disclosed, if there are no such policy.
VII. Informasi Keuangan		**VII. Financial Information**
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	574	1. Statement by the Board of Directors concerning the Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement. Compliance with regulation regarding responsibility on the Financial Statement.
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	575-577	2. Independent auditor's opinion on the financial statement.
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang:	577	3. Description of the Independent Auditor in the Opinion. The description contains:
1. Nama dan tanda tangan;	√	1. Name and signature;
2. Tanggal Laporan Audit; dan	√	2. Date of the audit report; and
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	√	3. KAP license number and Public Accountant license number.
4. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	578-770	4. Comprehensive financial statement. Contains all elements of the financial statement:
1. Laporan posisi keuangan;	578-580	1. Financial Position (Balance sheet);
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	581-582	2. Comprehensive Profit loss statement;
3. Laporan perubahan ekuitas;	583	3. Statement of changes in equity;
4. Laporan arus kas;	584	4. Statement of Cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan;	585-770	5. Notes to the financial statement;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√	6. Comparative information about previous period; and
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√	7. Financial position at the start of comparative periods when the company implement retrospective application of accounting policies, or re-stated its accounts of financial statements, or re-classified the accounts of its financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	581-582	5. Comparison of profitability. Comparison of profit (loss) from operations for the year by the previous year.
6. Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	584	6. Cash Flow Report. Meets the following provisions:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	1. Grouped into three categories of activity: operational activity, investment, and funding;
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	2. Uses a direct method reporting for cash flows for operational activity;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	3. Separating the presentation between cash receipt and or cash expended during the current year for operational, investment, and funding activities; and
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	4. Disclosing activities that do not influence the cash flow.
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya:	590-638	7. Summary of Accounting Policy. Includes at least:

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	1. Statement of compliance to Financial Accounting Standard;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	2. Basis for the measurement and preparation of financial statements;
3. Pajak penghasilan;	√	3. Income tax;
4. Imbalan kerja; dan	√	4. Work compensation; and
5. Instrumen Keuangan.	√	5. Financial instruments.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	726-730	8. Disclosure on transaction with related parties. Disclosure of, among others:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	1. Name of related party, and nature of relation with related party;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	2. Amount of transaction and its percentage to total related revenues and expenses; and
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	√	3. Total balance of transaction and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan:	667, 699, 707-717	9. Disclosure related to taxation Issues that should be disclosed:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation on the relation between tax expenses (benefit) and accounting/book profit;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	3. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized on the financial position (balance sheet) for each reporting period, and the amount of deferred tax expenses (benefit) recognized in the profit/ loss statement in the event that the amount is not recognizable from the amount of deferred tax assets and liabilities presented on the financial position (balance sheet); and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan:	640-651	10. Disclosure related to Fixed Assets. Issues that should be disclosed:
1. Metode penyusutan yang digunakan;	√	1. Depreciation method used;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	2. Description of the selected accounting policies between the revaluation model and cost model;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	3. The methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost model); and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	4. Reconciliation of the gross book value and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the reporting period, showing any addition, reduction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan:	731-732	11. Disclosures relating to operating segment Issues that should be disclosed:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	√	1. General information which includes the factors used to identify segments that are reported;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	√	2. Information about income, assets, and liabilities of the reported segment;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	√	3. Reconciliation of total segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other segment material elements to the related number of the entity; and

Materi & Penjelasan	√Halaman Page	Subject & Explanation
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√	4. Disclosures at entity level, which includes information about products and/or services, geographic areas and major customers.
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan:	754-765	12. Disclosures relating to Financial Instruments Issues that should be disclosed:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. The Detail of financial instruments based on the classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. The fair value of each class of financial instruments;
3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	3. Explanation of the risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan	√	4. Risk management policy; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√	5. Risk analysis related to financial instruments quantitatively.
13. Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	770	13. Publication of financial statements. Issues to be disclosed include:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. The date that the financial statements is authorized to be published; and
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. The party responsible to authorize the published financial statements.

Referensi SEOJK
Reference of Financial Services

Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik
Authority Circular Letter Nomor 30-SEOJK.04-2016: Public Company Annual Report

Keterangan Description	Halaman Page
I. KETENTUAN UMUM **GENERAL PROVISION**	
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.	√
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through annual report.	√
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.	√
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves a guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.	√
II. BENTUK LAPORAN TAHUNAN **FORMAT OF ANNUAL REPORT**	
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.	√
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.	√
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.	√
III. ISI LAPORAN TAHUNAN **CONTENT OF THE ANNUAL REPORT**	
1. Ketentuan Umum General Provision	
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: Annual Report should contain at least the following information:	
1) ikhtisar data keuangan penting; summary of key financial information;	24-25
2) informasi saham (jika ada); stock information (if any);	94
3) laporan Direksi; the Board of Directors report;	56-70
4) laporan Dewan Komisaris; the Board of Commissioners report;	42-51
5) profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of Issuer or Public Company;	80-193
6) analisis dan pembahasan manajemen; management discussion and analysis;	238-327
7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; corporate governance applied by the Issuer or Public Company;	368-527
8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	528-571
9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual report; and	573-770
10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;	78-79s

Keterangan Description	Halaman Page
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami; Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;	√
2. Uraian Isi Laporan Tahunan Describing of Content of Annual Report	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Key Financial Information Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:	24-25
1) pendapatan/penjualan; income/sales;	√
2) laba bruto; gross profit;	√
3) laba (rugi); profit (loss);	√
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;	√
5) total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	√
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;	√
7) laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	√
8) jumlah aset; total assets;	√
9) jumlah liabilitas; total liabilities;	√
10) jumlah ekuitas; total equities;	√
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; profit (loss) to total assets ratio;	√
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; profit (loss) to equities ratio;	√
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; profit (loss) to income ratio;	√
14) rasio lancar; current ratio;	√
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; liabilities to equities ratio;	√
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan liabilities to total assets ratio; and	√
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya; other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	√
b. Informasi Saham Stock Information	94
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat: Stock Information (if any) at least contains:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:	-
a) jumlah saham yang beredar; number of outstanding shares;	-
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;	-

Keterangan Description	Halaman Page
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and	-
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;	-
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek; Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;	-
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek; Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;	-
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:	n/a
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; date of corporate action;	-
b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham; stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;	-
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan number of outstanding shares prior to and after corporate action; and	-
d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; share price prior to and after corporate action;	-
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	-
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;	-
c. Laporan Direksi The Board of Directors Report	56-70
Laporan Direksi paling sedikit memuat: The Board of Directors Report should at least contain the following items:	
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:	58-65
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	58
b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan comparison between achievement of results and targets; and	60-64
c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; challenges faced by the Issuer or Public Company;	58-59
2) gambaran tentang prospek usaha; description on business prospects;	66-67
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and	67-68
4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada); changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);	90

Keterangan Description	Halaman Page
d. Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Report	42-51
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:	
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik; assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;	44-45
2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;	46
3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; view on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;	49-50
4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; view on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;	46-49
5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and	50
6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi; the frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;	46
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of the Issuer or Public Company	80-193
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat: Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:	82
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;	82
2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:	
a) alamat; address;	√
b) nomor telepon; telephone number;	√
c) nomor faksimile; facsimile number;	√
d) alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	√
e) alamat Situs Web; website address;	√
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	83-85
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik; vision and mission of the Issuer or Public Company;	88-89
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;	90-91
6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan; structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;	92-93
7) profil Direksi, paling sedikit memuat: the Board of Directors profiles include:	134-139
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and short description of duties and functions;	√
b) foto terbaru; latest photograph;	√
c) usia; age;	√
d) kewarganegaraan; citizenship;	√

Keterangan Description			Halaman Page
e)	riwayat pendidikan; education;		√
f)	riwayat jabatan, meliputi informasi: history position, covering information on:		√
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;	√
	(2)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and	√
	(3)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	√
g)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and		√
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;		√
8)	profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: the Board of Commissioners profiles, at least include:		130-133
a)	nama; name;		√
b)	foto terbaru; latest photograph;		√
c)	usia; age;		√
d)	kewarganegaraan; citizenship;		√
e)	riwayat pendidikan; education;		√
f)	riwayat jabatan, meliputi informasi: history position, covering information on:		√
	(1)	dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;	√
	(2)	dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;	√
	(3)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and	√
	(4)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	√
g)	pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);		√
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and		√
i)	pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada); statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);		√

	Keterangan Description	Halaman Page
9)	dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;	√
10)	jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; number of employees and description of distribution of education level and age of the employee in the year under review;	128-129, 340-347
11)	nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari: names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:	94
a)	pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;	94
b)	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and	94
c)	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;	94
12)	jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:	94
a)	kepemilikan institusi lokal; ownership of local institutions;	94
b)	kepemilikan institusi asing; ownership of foreign institutions;	94
c)	kepemilikan individu lokal; dan ownership of local individual; and	94
d)	kepemilikan individu asing; ownership of foreign individual;	94
13)	informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;	94
14)	nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);	96-97
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut; For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;	184-185
15)	kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada); chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;	94-95
16)	kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada); chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);	94-95
17)	nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal; name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;	186-190
18)	dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (*fee*), dan periode penugasan; dan in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and	186-190

Keterangan Description			Halaman Page
	19)	penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:	38-39
		a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi; name of award and/or certification;	√
		b) badan atau lembaga yang memberikan; dan organization/institution that gives the awards; and	√
		c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada); award/certificate validity period (if any);	√
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis		238-327
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:		√
	1)	tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:	264-369
		a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, including process, capacity, and growth;	264-269;291-297
		b) pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	296-297
		c) profitabilitas; profitability;	
	2)	kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:	
		a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	276-284
		b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;	285-289
		c) ekuitas; equity;	290
		d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and	291-297
		e) arus kas; cash flows;	297-298
	3)	kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;	298
	4)	tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;	299
	5)	struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;	300-301
	6)	bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:	301-303
		a) tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of such ties;	√
		b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; source of funds expected to fulfill the said ties;	√
		c) mata uang yang menjadi denominasi; dan currency of denomination; and	√

Keterangan Description		Halaman Page
	d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;	√
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:	303-304
	a) jenis investasi barang modal; type of investment of capital goods;	√
	b) tujuan investasi barang modal; dan objective of the investment of capital goods; and	√
	c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; value of the investment of capital goods;	√
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);	305-306
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;	306-307
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:	272-275, 304-305
	a) pendapatan/penjualan; income/sales;	√
	b) laba (rugi); profit (loss);	√
	c) struktur modal (*capital structure*); atau capital structure; or	√
	d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	√
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:	307
	a) pendapatan/penjualan; income/sales;	√
	b) laba (rugi); profit (loss);	√
	c) struktur modal (*capital structure*); capital structure;	√
	d) kebijakan dividen; atau dividend policy;	√
	e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	√
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;	269-272
13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:	307-308
	a) kebijakan dividen; dividend policy;	√
	b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;	√
	c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan amount of cash per share (cash and/or non cash); and	√
	d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; amount of dividend per year paid;	√
14)	realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan: use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:	309
	a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and	309

Keterangan Description	Halaman Page
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;	309
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat: material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:	309-317
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; transaction date, value, and object;	309-317
b) nama pihak yang melakukan transaksi; name of transacting parties;	309-317
c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada); nature of related parties (if any);	309-317
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan description of the fairness of the transaction; and	309-317
e) pemenuhan ketentuan terkait; compliance with related rules and regulations;	309-317
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and	318-319
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);	319-322
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Corporate Governance of the Issuer or Public Company	368-527
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
1) Direksi, mencakup antara lain: the Board of Directors, covering:	
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;	419-422
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;	410
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;	432-437
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;	437-453
e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi: information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:	n/a
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and	-
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; explanation for the unrealized resolution;	-
f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi: information regarding the AGM resolution in the year under review, including:	395-397s
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and	-
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan explanation for the unrealized resolution;	-
g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi; assessment on the performance of the committee under the Board of Directors;	68-69

Keterangan Description	Halaman Page
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain: the Board of Commissioners, among others include:	397-409
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	397-400
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;	398
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris; procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of Commissioners;	432-436
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut; policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;	437-444
e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:	424-431
(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedure for the implementation of performance assessment;	√
(2) kriteria yang digunakan; dan criteria for assessment; and	√
(3) pihak yang melakukan penilaian; assessor;	√
f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and	422-423
g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai: in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, than should contain at least:	468-472
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan reason not to establish the committee; and	-
(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku; procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;	√
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:	-
a) nama; name;	-
b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and	-
c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;	-
4) Komite Audit, mencakup antara lain: Audit Committee, among others covering:	456-461
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in the committee;	140-141, 458-459
b) usia; age;	140-141, 458-459
c) kewarganegaraan; citizenship;	140-141, 458-459
d) riwayat pendidikan; education background;	140-141, 458-459
e) riwayat jabatan, meliputi informasi: history of position; including:	140-141, 458-459
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for the appointment as member of the committee;	140-141, 458-459

Keterangan Description	Halaman Page
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	140-141, 458-459
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	140-141, 458-459
f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit; period and terms of office of the member of Audit Committee;	
g) pernyataan independensi Komite Audit; statement of independence of the Audit Committee;	457
h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;	459-460
i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan education and/or training during the year under review (if any); and	n/a
j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit; the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;	461
5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain: other committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:	468-472;461-468
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in the Committee;	468-472;461-468
b) usia; age;	468-472;461-468
c) kewarganegaraan; citizenship;	468-472;461-468
d) riwayat pendidikan; education background;	468-472;461-468
e) riwayat jabatan, meliputi informasi: history of position, including:	468-472;461-468
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for the appointment as member of the committee;	468-472;461-468
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and	468-472;461-468
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	468-472;461-468
f) periode dan masa jabatan anggota komite; period and terms of office of the member of Audit Committee;	468-472;461-468
g) uraian tugas dan tanggung jawab; description of duty and responsibility;	468;462
h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; statement that the Committee has already have the Charter;	472;461
i) pernyataan independensi komite; statement of independence of the Committee;	469;462-463
j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;	470;465-466
k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan education and/or training during the year under review (if any); and	n/a
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; brief description on the activities of the committee;	471-472;467-468

Keterangan Description		Halaman Page
6)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain: Corporate Secretary, including:	476-488
a)	nama; name;	476
b)	domisili; domicile;	476
c)	riwayat jabatan, meliputi informasi: history of position, including:	476
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and	476
(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	476
d)	riwayat pendidikan; education background;	476
e)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan education and/or training during the year under review; and	490
f)	uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku; brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;	478-490
7)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain: Internal Audit Unit, among others including:	500-510
a)	nama kepala Unit Audit Internal; name of Head of Internal Audit Unit;	501
b)	riwayat jabatan, meliputi informasi: history of position, including:	501
(1)	dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and	501
(2)	pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;	501
c)	kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as internal auditor (if any);	504
d)	pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; education and/or training during the year under review;	504
e)	struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; structure and position of Internal Audit Unit;	502-503
f)	uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	502
g)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and	502
h)	uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku; brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;	504-510
8)	uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:	511-512
a)	pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and	√
b)	tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; review on the effectiveness of internal control systems;	√
9)	sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: risk management system implemented by the company, at least includes:	490-500
a)	gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;	√
b)	jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan types of risk and the management; and	√
c)	tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;	√

Keterangan Description	Halaman Page
10) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:	516-522
a) pokok perkara/gugatan; substance of the case/claim;	√
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of case/claim; and	√
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;	√
11) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);	522
12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:	522-527
a) pokok-pokok kode etik; key points of the code of conduct;	√
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan socialization of the code of conduct and enforcement; and	√
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;	√
13) informasi mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada); information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;	89
14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai: description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:	309
a) jumlah saham dan/atau opsi; number of share and/or option;	-
b) jangka waktu pelaksanaan; period;	-
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirement for eligible employee and/or management; and	-
d) harga pelaksanaan; exercised price;	-
15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:	512-516
a) cara penyampaian laporan pelanggaran; mechanism for violation reporting;	√
b) perlindungan bagi pelapor; protection for the whistleblower;	√
c) penanganan pengaduan; handling of violation reports;	√
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan unit responsible for handling of violation report; and	√
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: results from violation report handling, at least includes:	√
(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed during the fiscal year; and	√
(2) tindak lanjut pengaduan; follow up of complaints;	√

Keterangan Description	Halaman Page
16) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:	385-392
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau statement regarding recommendation that have been implemented; and/or	√
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada); description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);	√
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company	528-571
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: Information on social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:	
a) lingkungan hidup, antara lain: environment, among others:	540-547
(1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;	√
(2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik; the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;	√
(3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan mechanism for filling complaint on environmental issues; and	√
(4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki; environmental certifications;	√
b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain: employment practices, occupational health and safety, among others:	547-557
(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja; gender equality and equal work opportunity;	√
(2) sarana dan keselamatan kerja; work and safety facilities;	√
(3) tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan; employee turnover;	√
(4) tingkat kecelakaan kerja; work incident rate;	√
(5) pendidikan dan/atau pelatihan; education and/or training;	√
(6) remunerasi; dan remuneration; and	√
(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan; mechanism for filling complaint on employment issues;	√
c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain: social and community development, among others:	558-563
(1) penggunaan tenaga kerja lokal; the use of local work force;	√
(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi; empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;	√
(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial; improvement of public social facilities and infrastructure;	√
(4) bentuk donasi lainnya; dan other form of donation; and	√
(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada); dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);	√

Keterangan Description	Halaman Page
d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain: products and/or services responsibilities, among others:	563-571
(1) kesehatan dan keselamatan konsumen; consumers' health and safety;	√
(2) informasi barang dan/atau jasa; dan products and/or services information; and	√
(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen. facilities, number, and resolution of consumer complaint.	√
2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and	√
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan; The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;	√
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Statement	573-770
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and	√
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting	78-79
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.	√

Laporan Tahunan
Annual Report 2016

Listrik untuk Membangun & Mensejahterakan

Electricity for Developing & Prospering

PLN

PT PLN (Persero)

Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Tel. 021 7251234, 7261122
Fax. 021 7221330

www.pln.co.id